LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



TAHUN 2022 AUDITED



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 11 2023
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU ix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB x
RINGKASAN xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN xiii
NERACA xiv
LAPORAN OPERASIONAL xv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xvi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
A. PENJELASAN UMUM 1
A.1. Dasar Hukum 1
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 4
A.4. Basis Akuntansi 5
A.5. Dasar Pengukuran 6
A.6. Kebijakan Akuntansi 6
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 13
B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 18
B.2. Belanja 23
B.3. Belanja Pegawai 25
B.4. Belanja Barang 26
B.5. Belanja Modal 28
B.5.1. Belanja Modal Tanah 28
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30
B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 30
B.5.5. Belanja Modal Lainnya 31
B.6. Belanja Terdampak COVID-19 31
B.7. Informasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2022 32
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 35
C.1. Aset Lancar 35
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 37

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan 39
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas 40
C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) 43
C.1.5. Piutang Bukan Pajak 46
C.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 48
C.1.7. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 50
C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 50
C.1.9. Persediaan 51
C.2. Aset Tetap 53
C.2.1. Tanah 55
C.2.2. Peralatan dan Mesin 57
C.2.3. Gedung dan Bangunan 59
C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 62
C.2.5. Aset Tetap Lainnya 63
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 65
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 68
C.3. Piutang Jangka Panjang 69
C.3.1. Piutang Tagihan TP/TGR 70
C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR 72
C.4. Aset Lainnya 73
C.4.1. Aset Tak Berwujud 75
C.4.2. Aset Lain-Lain 77
C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 79
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 80
C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga 81
C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka 83
C.5.3. Uang Muka dari KPPN 86
C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya 86
C.6. Ekuitas 87
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 88
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 88
D.2. Beban Pegawai 93

D.3. Beban Persediaan 97
D.4. Beban Barang dan Jasa 98
D.5. Beban Pemeliharaan 109
D.6. Beban Perjalanan Dinas 112
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 113
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 117
D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 118
D.10. Pos-Pos Luar Biasa 126
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 127
E.1. Ekuitas Awal 127
E.2. Surplus/Defisit-LO 127
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi 127
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset 127
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan 127
E.4.3. Koreksi Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya 129
E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap 130
E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 130
E.4.6. Koreksi Lain-lain 132
E.5. Transaksi Antar Entitas 133
E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 134
E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar 134
E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung 136
E.6. Ekuitas Akhir 150
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 151
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 151
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 151
F.3. Rekening Pemerintah 156
F.4. Pengungkapan Penting Lain-lain 156
F.4.1. Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya 156
F.4.2. Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri 183
F.4.2.1. Penerimaan Hibah Mahkamah Agung RI 183
F.4.2.1.1. Hibah Tahun Berjalan Yang Sudah Disahkan 202
F.4.2.1.1.1. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang 206
F.4.2.1.1.2. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa 206

F.4.2.1.1.3. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) 206

F.4.2.2. Hibah Tahun Berjalan Yang Belum Disahkan 214

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA 5
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 19
Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi PNBP 20
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 23
Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program 23
Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja 24
Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai 26
Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang 27
Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal 28
Tabel 10. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah 29
Tabel 11. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29
Tabel 12. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30
Tabel 13. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31
Tabel 14. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya 31
Tabel 15. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun 36
Tabel 16. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Eselon I 37
Tabel 17. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I 37
Tabel 18. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran 37
Tabel 19. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satuan Kerja 38
Tabel 20. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I 39
Tabel 21. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan 39
Tabel 22. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Satuan Kerja 40
Tabel 23. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I 41
Tabel 24. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I 41
Tabel 25. Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas 41
Tabel 26. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satuan Kerja 42
Tabel 27. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Eselon I 43
Tabel 28. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Jenis Akun 44
Tabel 29. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 46
Tabel 30. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja 47
Tabel 31. Mutasi Piutang Bukan Pajak 48
Tabel 32. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 48
Tabel 33. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja 49
Tabel 34. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I 50

Tabel 35. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I..... 51
Tabel 36. Perbandingan Rincian Persediaan Per Eselon I 51
Tabel 37. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun 52
Tabel 38. Rincian Kondisi Barang Persediaan Per Eselon I periode 31 Desember 2022 ... 52
Tabel 39. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun..... 53
Tabel 40. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca Modul GLP SAKTI dan Modul Aset SAKTI 54
Tabel 41. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Eselon I 55
Tabel 42. Perbandingan Rincian Tanah Per Eselon I 55
Tabel 43. Mutasi Transaksi Tanah..... 56
Tabel 44. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I 57
Tabel 45. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin..... 58
Tabel 46. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan Per Eselon I..... 60
Tabel 47. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan 60
Tabel 48. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Eselon I 62
Tabel 49. Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... 63
Tabel 50. Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya Per Eselon I 64
Tabel 51. Mutasi Transaksi Aset Tetap Lainnya 64
Tabel 52. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 66
Tabel 53. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 66
Tabel 54. Mutasi Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 67
Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 68
Tabel 56. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Akun 69
Tabel 57. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Eselon I 70
Tabel 58. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Eselon I 70
Tabel 59. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing Debitur..... 71
Tabel 60. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Eselon I 73
Tabel 61. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur 73
Tabel 62. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun 74
Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Eselon I..... 75
Tabel 64. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I..... 75
Tabel 65. Mutasi Transaksi Aset Tak Berwujud 76
Tabel 66. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain 77
Tabel 67. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I 77

Tabel 68. Mutasi Transaksi Aset Lain-Lain..... 78
Tabel 69. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya..... 79
Tabel 70. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun..... 80
Tabel 71. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Eselon I..... 81
Tabel 72. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I 81
Tabel 73. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Jenis Belanja 82
Tabel 74. Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I..... 84
Tabel 75. Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN Per Eselon I 86
Tabel 76. Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I..... 87
Tabel 77. Perbandingan Rincian Ekuitas Per Eselon I 87
Tabel 78. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP 88
Tabel 79. Perbandingan Rincian Beban Pegawai..... 94
Tabel 80. Perbandingan Rincian Beban Persediaan..... 97
Tabel 81. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 99
Tabel 82. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 109
Tabel 83. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 113
Tabel 84. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 114
Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 117
Tabel 86. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional..... 119
Tabel 87. Rincian Koreksi Nilai Persediaan..... 128



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelaporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 27 Februari 2023
Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

SUGIYANTO



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 11 Mei 2023
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



RINGKASAN

RINGKASAN

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahunan Tahun 2022 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp105.590.154.119,00 atau mencapai 135 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp78.474.597.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.278.927.068.631,00 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.514.469.985.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.571.764.455.628,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp55.905.353.442,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.482.273.236.416,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp33.585.865.770,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 46.078.179.636,00 dan Rp30.525.686.275.992,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.741.764.356,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp10.444.286.890.893,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp10.351.545.126.537,00). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp6.435.298.055,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 10.357.980.424.592,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp29.529.218.827.065,00, ditambah Defisit-LO sebesar (Rp10.357.980.424.592,00), kemudian ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan, koreksi yang menambah/mengurang ekuitas, koreksi lain-lain, dan transaksi antar entitas masing-masing senilai Rp0,00, Rp98.435.003.799,00, (Rp271.426.058,00) danRp 11.256.012.869.720,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp30.525.686.275.992,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis Akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022				TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)	% TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	78.474.597.000,00	105.590.154.119,00	27.115.557.119,00	135	96.521.922.988,00
JUMLAH PENDAPATAN		**78.474.597.000,00**	**105.590.154.119,00**	**27.115.557.119,00**	**135**	**96.521.922.988,00**
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2	7.221.624.128.000,00	7.048.276.739.941,00	(173.347.388.059,00)	98	6.780.138.260.234,00
Belanja Barang	B.3	2.678.566.650.000,00	2.634.148.576.563,00	(44.418.073.437,00)	98	2.136.635.079.145,00
Belanja Modal	B.4	1.614.279.207.000,00	1.596.501.752.127,00	(17.777.454.873,00)	99	1.592.533.967.690,00
JUMLAH BELANJA		**11.514.469.985.000,00**	**11.278.927.068.631,00**	**(235.542.916.369,00)**	**98**	**10.509.307.307.069,00**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



NERACA

NERACA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1.	271.770.124,00	151.248.877,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C. 1.2.	4.894.000,00	111.492.300,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.3.	6.064.885.817,00	328.806.675,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.4.	24.432.411.476,00	16.752.286.066,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.6.	5.493.589.931,00	1.506.868.229,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.7.	(27.220.491,00)	(7.534.341,00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		5.466.369.440,00	1.499.333.888,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.8.	0,00	110.693.622,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.9.	0,00	(553.468,00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		0,00	110.140.154,00
Persediaan	C. 1.10.	19.665.022.585,00	21.944.823.818,00
Jumlah Aset Lancar		**55.905.353.442,00**	**40.898.131.778,00**
ASET TETAP	C. 2		
Tanah	C. 2.1.	19.986.074.179.582,00	19.805.288.980.810,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2.	4.462.524.660.536,00	3.808.622.153.369,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3.	10.461.107.316.949,00	9.582.390.434.389,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C. 2.4.	262.312.858.137,00	258.176.969.852,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.5.	52.090.395.576,00	68.004.058.842,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.6.	656.303.651.907,00	617.396.614.572,00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.7.	(5.398.139.826.271,00)	(4.659.713.856.206,00)
Jumlah Aset Tetap		**30.482.273.236.416,00**	**29.480.165.355.628,00**
PIUTANG JANGKA PANJANG	C. 3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 3.1.	48.752.226,00	51.752.226,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 3.2.	(48.752.226,00)	(51.752.226,00)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA	C. 4		
Aset Tak Berwujud	C. 4.1.	66.705.847.914,00	65.269.905.024,00
Aset Lain-Lain	C. 4.2.	147.118.278.231,00	159.843.755.689,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 4.3.	(180.238.260.375,00)	(188.038.494.197,00)
Jumlah Aset Lainnya		**33.585.865.770,00**	**37.075.166.516,00**
Jumlah Aset		**30.571.764.455.628**	**29.558.138.653.922**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C. 5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 5.1.	42.970.421.804,00	25.691.256.213,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 5.2.	2.831.281.278,00	3.076.249.032,00
Uang Muka dari KPPN	C. 5.3.	271.770.124,00	151.248.877,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 5.4.	4.706.430,00	1.072.735,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**46.078.179.636,00**	**28.919.826.857,00**
Jumlah Kewajiban		**46.078.179.636,00**	**28.919.826.857,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C. 6	30.525.686.275.992,00	29.529.218.827.065,00
Jumlah Ekuitas		**30.525.686.275.992,00**	**29.529.218.827.065,00**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**30.571.764.455.628,00**	**29.558.138.653.922,00**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	92.741.764.356,00	86.793.728.206,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**92.741.764.356,00**	**86.793.728.206,00**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D. 2	7.048.043.385.423,00	6.780.962.599.442,00
Beban Persediaan	D. 3	94.286.979.901,00	95.503.112.886,00
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.592.628.939.888,00	1.301.888.339.402,00
Beban Pemeliharaan	D. 5	478.941.136.468,00	373.677.670.889,00
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	497.057.765.025,00	366.131.582.680,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	733.312.551.506,00	619.706.020.768,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D. 8	16.132.682,00	(1.036.637,00)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**10.444.286.890.893,00**	**9.537.868.289.430,00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(10.351.545.126.537,00)**	**(9.451.074.561.224,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		4.021.596.684,00	3.824.572.872,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		29.335.903.099,00	16.618.102.338,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(25.314.306.415,00)**	**(12.793.529.466,00)**
DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		40.327.424.415,00	4.206.050.761,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.448.416.055,00	510.992.763,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**18.879.008.360,00**	**3.695.057.998,00**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**D. 9**	**(6.435.298.055,00)**	**(9.098.471.468,00)**
POS LUAR BIASA	**D. 10**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		**(10.357.980.424.592,00)**	**(9.460.173.032.692,00)**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	**E. 1**	**29.529.218.827.065,00**	**28.772.957.024.392,00**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**E. 2**	**(10.357.980.424.592,00)**	**(9.460.173.032.692,00)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		**98.435.003.799,00**	**-241.377.789.918,00**
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	737.584.260,00	36.134.712,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	(134.596.433,00)	(32.664.518.258,00)
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	155.857.561,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	98.103.442.030,00	(209.195.042.665,00)
Lain-Lain	E. 4.6	(271.426.058,00)	289.778.732,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**E. 5**	**11.256.012.869.720,00**	**10.457.812.625.283,00**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**996.467.448.927,00**	**756.261.802.673,00**
EKUITAS AKHIR	**E. 6**	**30.525.686.275.992,00**	**29.529.218.827.065,00**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

18. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 adalah sebagai berikut: "***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***".

Penjelasan:
Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya menurunkan dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Tujuan

Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, apabila:

a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
b. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
f. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
g. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI *online* dan SAKTI *offline*, yang menggunakan sistem *single entry point, single database*, multi *user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited.*

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada Periode Tahunan Tahun 2022 (*Unaudited*), Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia meliputi 7 (tujuh) Satuan Kerja Unit Eselon I dengan jumlah Satuan Kerja sebanyak 1.827 Satuan Kerja. Dari jumlah tersebut Satuan Kerja yang menyampaikan Laporan Keuangan sejumlah 1.827 Satuan Kerja (100%).

Rincian Satuan Kerja tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satuan Kerja
			KP		KD		
			M	TM	M	TM	
1	01	Badan Urusan Administrasi	1	0	910	0	911
2	02	Kepaniteraan	1	0	0	0	1
3	03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1	0	412	0	413
4	04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1	0	441	0	442
5	05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	1	0	57	0	58
6	06	Badan Litbang Diklat Kumdil	1	0	0	0	1
7	07	Badan Pengawasan	1	0	0	0	1
Jumlah			**7**	**0**	**1820**	**0**	**1827**

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 (*Unaudited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan:
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. **Aset Tetap**

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pada Tahun 2017 dan 2019 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2019.

  Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nila buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

ASET TETAP	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek

    Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang

    Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Mahkamah Agung mendapatkan tambahan anggaran belanja dari PNBP yang dapat digunakan kembali sebesar 21% dari PNBP yang telah disetorkan ke kas negara.

Sesuai peraturan perundangan, sebagian dana PNBP dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu. Mahkamah Agung mengajukan permohonan penggunaan PNBP bertujuan untuk belanja:

1. Operasional Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Mahkamah Agung.
2. Non Operasional antara lain:
   a. Pelaksanaan pembinaan, monitoring PNBP, dan sosialisasi peraturan PNBP;
   b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kepaniteraan dan kesekretariatan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
   c. Pengadaan kebutuhan fasilitas pendukung perkantoran untuk pelayanan pada pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Alokasi pagu anggaran pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Pagu Anggaran Mahkamah Agung TA 2022

   Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp11.820.133.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

   Berdasarkan per program

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	179.310.835.000,00
005.WA	Program Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,00
Jumlah		**11.820.133.400.000,00**

Berdasarkan Unit Eselon I

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.127.467.300.000,00
005.02	Kepaniteraan	189.994.752.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	140.447.558.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	117.755.347.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.554.757.000,00
005.06	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan	174.752.945.000,00
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	40.160.741.000,00
Jumlah		**11.820.133.400.000,00**

Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
51	Belanja Pegawai	7.486.002.321.000,00
52	Belanja Barang	2.590.670.906.000,00
53	Belanja Modal	1.743.460.173.000,00
Jumlah		**11.820.133.400.000,00**

Berdasarkan Sumber Dana

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Pagu
	Rupiah Murni	
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	164.251.799.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,00
	Jumlah Pagu Rupiah Murni	**11.805.074.364.000,00**
	PNBP	
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.059.036.000,00
	Jumlah Pagu PNBP	**15.059.036.000,00**
Total Pagu		**11.820.133.400.000,00**

a. Alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk belanja operasional yaitu pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja untuk ASN dan Hakim serta operasional Satuan Kerja pengadilan;

b. Pagu anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu untuk memenuhi:

1) Pembayaran belanja pegawai atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021;

2) Peningkatan Layanan Operasional Satuan Kerja

Penambahan anggaran operasional Satuan Kerja daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

3) Peningkatan Pelayanan Peradilan

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan peradilan menuju modernisasi peradilan berbasis elektronik, pembebasan biaya perkara, sidang keliling, posbakum, dan *zitting plaats*;

4) Pengadaan Tanah

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dalam meningkatakan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka pada Tahun 2022 dilakukan pengadaan tanah.

2. Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Perubahan Rincian Anggaran

a. Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, BAS (termasuk segmen akun) digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-KL dan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan adanya pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, maka Mahkamah Agung dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020, Hal : Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Adapun rincian penggunaan akun khusus Covid-19 pada Mahkamah Agung per tanggal 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1) 521131 - Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19

   Pembelian alat-alat kesehatan berupa masker/*hand sanitizer* (habis pakai) yang diperuntukkan bagi pegawai dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik termasuk yang diadakan dalam rangka mendukung pelayanan (secara sewajarnya) dan tidak menghasilkan persediaan, dan penyemprotan desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan dengan swakelola;

2) 521241 - Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19

   Diperuntukan untuk penyelenggaraan tugas fungsi dan pencapaian target kinerja berupa pengadaan APD/*rapid test* dan sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap-Peralatan dan Mesin/Persediaan;

3) 521841 - Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19

   Pengadaan *hand sanitizer*, masker, sarung tangan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan yang diniatkan untuk disimpan sebagai persediaan;

4) 522192 - Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19;

   Pembayaran biaya penyemprotan disinfektan dan pelaksanaan *rapid test* COVID-19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan disinfektan dan pelaksanaan *rapid test* COVID-19).

b. Perubahan Rincian Anggaran

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara per 31 Desember 2022 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, anata lain:

- Pengurangan pagu sebesar Rp3.559.364.000,00 berupa pengalihan anggaran kegiatan Penelitian dan Pengembangan dari Mahkamah Agung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Pengurangan Pagu Belanja Pegawai (alokasi Tunjangan Kinerja) Mahkamah Agung RI yang berasal dari Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung sebesar Rp262.789.287.000,00.

- Realokasi anggaran ke BA-BUN dari anggaran yang diblokir untuk pengadaan Server 13 Pengadilan Tingkat Banding baru menjadi sebesar Rp43.639.261,00.
- Penambahan pagu berasal dari Penerimaan Hibah Uang berdasarkan data SPAN sebesar Rp4.333.497.000,00 pada 6 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai Perolehan Register	Data Revisi SPAN Menambah Pagu 2022	Selisih
Pengadilan Negeri Cibinong (005.01.0200.401915)	1.404.540.848,00	1.404.580.000,00	(39.152,00)
Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa (005.01.2100.401971)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang (005.01.1100.526750)	2.186.000.000,00	2.024.227.000,00	161.773.000,00
Pengadilan Negeri Kuningan (005.01.0200.097709)	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
Pengadilan Negeri Singkawang (005.01.1300.099070)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Pengadilan Negeri Cikarang (005.01.0200.613519)	6.000.000.000,00	4.690.000,00	5.995.310.000,00
Jumlah	**10.490.540.848,00**	**4.333.497.000,00**	**6.157.043.848,00**

Terdapat perbedaan antara nilai perolehan register dengan nilai pada SPAN yang menambah Pagu tahun 2022 pada 3 satuan kerja, antara lain:

a. Pengadilan Negeri Cibinong (005.01.0200.613519), perbedaan nilai disebabkan oleh kesalahan input nilai pada SP2D oleh Pemda selaku pemberi hibah.
b. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (005.01.1100.526750). Perbedaan nilai disebabkan oleh adanya pagu yang tidak dapat direalisasikan.
c. Pengadilan Negeri Cikarang (005.01.0200.401915), selisih nilai sebesar Rp5.995.310.000,00 merupakan sisa saldo Penerimaan Hibah pada Tahun 2022 yang belum direalisasikan.

Pagu Penyesuaian Anggaran Tahun 2022 per Program sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Program	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Revisi
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	179.310.835.000,00	(97.342.000,00)	179.213.493.000,00
Program Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,00	(305.566.073.000,00)	11.335.256.492.000,00
Jumlah	**11.820.133.400.000,00**	**(305.663.415.000,00)**	**11.514.469.985.000,00**

Pagu Penyesuaian Anggaran Tahun 2022 per Kelompok Belanja sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Revisi
Belanja Pegawai	7.486.002.321.000,00	(264.378.193.000,00)	7.221.624.128.000,00
Belanja Barang	2.590.670.906.000,00	87.895.744.000,00	2.678.566.650.000,00
Belanja Modal	1.743.460.173.000,00	(129.180.966.000,00)	1.614.279.207.000,00
Jumlah	**11.820.133.400.000,00**	**(305.663.415.000,00)**	**11.514.469.985.000,00**

Berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	7.270.515.000,00	7.270.515.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	70.951.947.000,00	70.951.947.000,00
Pendapatan Denda	153.140.000,00	153.140.000,00
Pendapatan Lain-Lain	98.995.000,00	98.995.000,00
Jumlah Pendapatan	**78.474.597.000,00**	**78.474.597.000,00**
Belanja		
Belanja Pegawai	7.486.002.321.000,00	7.221.624.128.000,00
Belanja Barang	2.590.670.906.000,00	2.678.566.650.000,00
Belanja Modal	1.743.460.173.000,00	1.614.279.207.000,00
Jumlah Belanja	**11.820.133.400.000,00**	**11.514.469.985.000,00**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp105.590.154.119,00

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp105.590.154.119,00 atau mencapai 134,55 persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp78.474.597.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	2022				
		Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	0,00	18.818.000,00	0,00	18.818.000,00	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	57.340.000,00	1.495.799.657,00	0,00	1.495.799.657,00	2.608,65
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.838.000,00	2.506.979.027,00	0,00	2.506.979.027,00	31.984,93
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	7.205.337.000,00	8.167.908.143,00	9.837.628,00	8.158.070.515,00	113,22
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	236.670.000,00	172.160.000,00	0,00	172.160.000,00	72,74
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.803.121.000,00	2.875.580.000,00	0,00	2.875.580.000,00	102,58
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.170.714.000,00	24.898.990.000,00	0,00	24.898.990.000,00	107,46
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	44.741.442.000,00	51.894.595.893,00	7.320.000,00	51.887.275.893,00	115,97
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	159.516.500,00	0,00	159.516.500,00	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0,00	16.575.000,00	0,00	16.575.000,00	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	110.693.622,00	0,00	110.693.622,00	0,00
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	153.140.000,00	4.448.754.045,00	0,00	4.448.754.045,00	2.905,02
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	468.000,00	527.168.234,00	0,00	527.168.234,00	112.642,79
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.573.000,00	4.847.014.441,00	0,00	4.847.014.441,00	56.538,14
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	89.953.000,00	3.179.744.552,00	0,00	3.179.744.552,00	3.534,90
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	281.795.607,00	0,00	281.795.607,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	5.219.026,00	0,00	5.219.026,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**78.474.597.000,00**	**105.607.311.747,00**	**17.157.628,00**	**105.590.154.119,00**	**134,55**

Estimasi yang ditetapkan sebesar Rp78.474.597.000,00 dengan kondisi penerimaan tersebut maka PNBP Mahkamah Agung per 31 Desember 2022 sudah mencapai 134,55 persen capaian atas estimasi tersebut.

Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp9.068.231.131,00 atau 9,39 persen. Kenaikan tersebut secara umum disebabkan oleh peningkatan pada Pendapatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu, dan Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu.

Terdapat perubahan realisasi pendapatan pada pelaporan *audited* atas akun:

a. 425913 – Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Lolak (005.04.1700.401996) berkurang sebesar Rp2.275.000,00 merupakan ralat/koreksi setoran atas kesalahan kode Satuan Kerja dan kode akun penyetoran PPN POSBAKUM Tahun 2021 yang seharusnya

menggunakan kode Satuan Kerja KPP dan akun 411211 (Pendapatan PPN Dalam Negeri).

b. 425931 – Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi (005.01.0199.663157) bertambah sebesar Rp128.898.547,00 merupakan perbaikan atas kesalahan penyetoran pengembalian belanja PNS yang telah pensiun menggunakan kode Satuan Kerja inaktif.

Perbandingan rincian Realisasi PNBP Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi PNBP

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi PNBP		Kenaikan/Penurunan	
		2022	2021	(Rp)	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan	18.818.000,00	305.784.500,00	(286.966.500,00)	(93,85)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.495.799.657,00	1.707.342.248,00	(211.542.591,00)	(12,39)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.506.979.027,00	1.811.446.124,00	695.532.903,00	38,40
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	8.158.070.515,00	10.306.111.382,00	(2.148.040.867,00)	(20,84)
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum				
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	172.160.000,00	182.880.000,00	(10.720.000,00)	(5,86)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.875.580.000,00	2.829.782.501,00	45.797.499,00	1,62
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.898.990.000,00	24.395.260.028,00	503.729.972,00	2,06
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.887.275.893,00	48.884.186.640,00	3.003.089.253,00	6,14
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
425699	Pendapatan Jasa lainnya	0,00	1.416,00	(1.416,00)	(100,00)
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan				
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	159.516.500,00	98.186.302,00	61.330.198,00	62,46
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	16.575.000,00	34.622.974,00	(18.047.974,00)	(52,13)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	110.693.622,00	66.300.000,00	44.393.622,00	66,96
4258	Pendapatan Denda				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.448.754.045,00	1.740.462.541,00	2.708.291.504,00	155,61
4259	Pendapatan Lain-Lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	527.168.234,00	1.226.175.779,00	(699.007.545,00)	(57,01)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.847.014.441,00	2.061.381.039,00	2.785.633.402,00	135,13
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.179.744.552,00	543.119.259,00	2.636.625.293,00	485,46
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	281.795.607,00	277.369.054,00	4.426.553,00	1,60
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	45.318.483,00	(45.318.483,00)	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.219.026,00	6.192.718,00	(973.692,00)	(15,72)
Jumlah		**105.590.154.119,00**	**96.521.922.988,00**	**9.068.231.131,00**	**9,39**

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan terdapat Realisasi Akun PNBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, antara lain:

- 425764 - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp159.516.500,00 pada 15 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja			Nama Satuan Kerja	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Keterangan
1	005.01	3100	401892	Pengadilan Agama Suwawa	1.634,00	Pendapatan jasa giro yang berasal dari rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2019, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
2	005.03	0100	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	74.891.500,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
3	005.03	1200	614884	Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat	5.200,00	
4	005.03	1200	663027	Pengadilan Negeri Menggala	60.750.050,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara akibat perpindahan rekening dari Bank Mandiri ke BTN karena kesalahan Bank yang belum mendaftarkan rekening untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP) sehingga saldo giro terhitung pada rekening, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
5	005.03	1600	402028	Pengadilan Negeri Penajam	1.935.348,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara akibat perpindahan rekening dari BRI ke BTN karena kesalahan Bank yang belum mendaftarkan rekening untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP) sehingga saldo giro terhitung pada rekening, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
6	005.03	1700	670211	Pengadilan Negeri Airmadidi	10.138.279,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
7	005.03	2200	099817	Pengadilan Negeri Klungkung	11.314.664,00	
8	005.03	3100	099362	Pengadilan Negeri Gorontalo	57.321,00	Pendapatan yang berasal dari pembukaan rekening baru atas penampungan uang perkara per November 2022, namun belum didaftarkan dalam program Treasury Notional Polling (TNP). Satuan Kerja telah mendaftarkan rekening tersebut untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP) pada tanggal 4 Januari 2023.
9	005.04	0200	652063	Pengadilan Agama Depok	301.000,00	Pendapatan yang berasal dari rekening penampungan uang perkara, Satuan Kerja telah mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program Treasury Notional Polling (TNP)
10	005.04	0300	401062	Pengadilan Agama Purwokerto	54.092,00	
11	005.04	0500	401272	Pengadilan Agama Jombang	38.974,00	
12	005.04	0700	401784	Pengadilan Agama Binjai	710,00	
13	005.04	0700	403084	Pengadilan Agama Simalungun	500,00	
14	005.04	0900	402082	Pengadilan Agama Rengat	27.088,00	
15	005.04	1400	402469	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	140,00	
Jumlah					**159.516.500,00**	

- 425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp5.219.026,00 terdapat pada 9 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja			Nama Satuan Kerja	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Keterangan
1	005.01	0100	663267	Pengadilan Militer II - 08 Di Jakarta	12.353,00	Kesalahan penggunaan akun saat menyetorkan Pengembalian UP. Satuan Kerja menggunakan akun 532111 (Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin), kemudian Satuan Kerja melakukan penyetoran kembali menggunakan akun 815111 (Pengembalian UP Rupiah Murni) sehingga terjadi double penyetoran. Atas kelebihan penyetoran tersebut, satuan kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain).
2	005.01	0300	097844	Pengadilan Negeri Jepara	489.150,00	Selisih kelebihan setoran pengembalian TUP atas uang makan. Satuan Kerja telah melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
3	005.01	1900	099507	Pengadilan Negeri Enrekang	37.166,00	Kesalahan akun potongan Taperum atas pembayaran Kekurangan THR, sehingga Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
4	005.01	1900	307602	Pengadilan Agama Sidenreng	29.263,00	Kelebihan penyetoran sisa UP Tahun 2022. Atas kelebihan setor tersebut Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
5	005.01	2900	400817	Pengadilan Agama Rangkas Bitung	493.894,00	Kesalahan penginputan nilai pengembalian Uang Muka sehingga lebih setor. Atas kelebihan setor tersebut Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
6	005.03	0500	626157	Pengadilan Negeri Kab.Malang, Jawa Timur	600,00	Kesalahan penginputan nilai pengembalian Uang Persediaan yang seharusnya dikembalikan sebesar Rp9.233.400,00 namun terinput sebesar Rp9.234.000,00 (lebih setor sebesar Rp600,00). Atas kelebihan setor tersebut Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi akun dari 815111 (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan) menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
7	005.03	1800	099383	Pengadilan Negeri Toli-Toli	32.100,00	Transaksi yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran unit organisasi 01 atas sisa dana TUP Tahun berjalan, namun terjadi kesalahan penyetoran ke kode unit organisasi 03 dan Satuan Kerja kembali menyetorkan dengan menggunakan kode unit organisasi 01 sehingga terjadi *double* penyetoran baik di unit organisasi 01 dan 03, atas kesalahan penyetoran pada kode unit organisasi 03 KPPN mengarahkan untuk mengajukan ralat/koreksi akun dari 815511 (Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP)) menjadi 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
8	005.04	0500	401495	Pengadilan Agama Magetan	4.035.000,00	Pendapatan diperoleh atas kelebihan pembayaran biaya perkara yang melebihi standar biaya yang ditentukan. Satuan kerja telah melakukan penyetoran menggunakan akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain).
9	005.05	0199	663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	89.500,00	Kesalahan penginputan nilai pengembalian Uang Persediaan yang seharusnya dikembalikan sebesar Rp21.155.415,00 namun terinput sebesar Rp21.244.915,00 (lebih setor sebesar Rp89.500,00). Atas kelebihan setor tersebut solusi dari KPPN Jakarta VI adalah melakukan ralat/koreksi akun dari 815111 (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan) menjadi akun 425999 (Pendapatan Anggaran Lain-lain)
Jumlah					**5.219.026,00**	

Realisasi belanja penggunaan dana PNBP Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.416.198.005,00 atau 95,73% dari Anggaran Belanja PNBP sebesar Rp15.059.036.000,00.

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja penggunaan PNBP Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu PNBP	Realisasi Belanja PNBP	% Realisasi
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	30.056.000,00	26.628.900,00	88,60
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3.676.507.000,00	3.389.405.540,00	92,19
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	11.177.719.000,00	10.847.581.673,00	97,05
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	174.754.000,00	152.581.892,00	87,31
Jumlah Belanja		**15.059.036.000,00**	**14.416.198.005,00**	**95,73**

Realisasi Belanja Negara Rp11.278.927.068.631,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.278.927.068.631,00 atau 97,95 persen dari Anggaran Belanja sebesar Rp11.514.469.985.000,00.

Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.221.624.128.000,00	7.050.179.580.080,00	97,63
Belanja Barang	2.678.566.650.000,00	2.636.564.540.020,00	98,43
Belanja Modal	1.614.279.207.000,00	1.596.514.944.027,00	98,90
Total Belanja Bruto	**11.514.469.985.000,00**	**11.283.259.064.127,00**	**97,99**
Pengembalian Belanja	0,00	4.331.995.496,00	0,00
Jumlah	**11.514.469.985.000,00**	**11.278.927.068.631,00**	**97,95**

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 berdasarkan Program adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program		2022		%
		Anggaran	Realisasi	
01	**Rupiah Murni**			
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	164.154.457.000,00	160.210.960.631,00	97,60
WA	Program Dukungan Manajemen	11.330.922.995.000,00	11.100.013.097.833,00	97,96
Jumlah Belanja Rupiah Murni		**11.495.077.452.000,00**	**11.260.224.058.464,00**	**97,96**
04	**PNBP**			
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.059.036.000,00	14.416.198.005,00	95,73
Jumlah Belanja PNBP		**15.059.036.000,00**	**14.416.198.005,00**	**95,73**
08	**Hibah Dalam Negeri**			
WA	Program Dukungan Manajemen	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja Hibah Dalam Negeri		**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100,00**
10	**Hibah Langsung Dalam Negeri**			
WA	Program Dukungan Manajemen	4.183.497.000,00	4.136.812.162,00	98,88
Jumlah Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri		**4.183.497.000,00**	**4.136.812.162,00**	**98,88**
Jumlah		**11.514.469.985.000,00**	**11.278.927.068.631,00**	**97,95**

Perbandingan rincian Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	(Rp)	%
Belanja Pegawai	7.048.276.739.941,00	6.780.138.260.234,00	268.138.479.707,00	3,95
Belanja Barang	2.634.148.576.563,00	2.136.635.079.145,00	497.513.497.418,00	23,28
Belanja Modal	1.596.501.752.127,00	1.592.533.967.690,00	3.967.784.437,00	0,25
Jumlah Belanja	**11.278.927.068.631,00**	**10.509.307.307.069,00**	**769.619.761.562,00**	**7,32**

Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp769.619.391.562,00 atau sebesar 7,32 persen dibandingkan 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai

   Secara umum kenaikan belanja pegawai disebabkan karena hal-hal berikut, antara lain:

   - Adanya penambahan jumlah pegawai dari formasi CPNS Tahun 2021 yang mulai melaksanakan tugas di tahun 2022 sehingga belanja gaji pegawai dan uang makan serta tunjangan kinerja pegawai mengalami kenaikan;

- Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi Eselon II dan Hakim yang dibayarkan pada Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

2. Belanja Barang

   Kenaikan belanja operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas dikarenakan antara lain:

   - Realisasi akun 522191 (Belanja Jasa Lainnya) pada tahun 2022 merupakan program baru pada Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung (MA), yakni program Duta Peradilan Indonesia yang bertujuan mencari insan muda untuk memberikan citra positif dan meningkatkan interaksi masyarakat pada Mahkamah Agung.
   - Pembayaran honorarium penanganan perkara bagi hakim agung yang diselesaikan tepat waktu;
   - Pembayaran transport hakim dan bantuan sewa rumah dinas;
   - Sewa kendaraan dinas dan sewa mesin *fotocopy* dibayar dimuka;
   - Kenaikan tarif dasar listik pada tahun 2022 yang menyebabkan kenaikan tagihan listrik; dan
   - Mulai dilaksanakannya kegiatan perjalanan dinas jabatan dalam rangka Pembinaan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Kesekretariatan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

3. Belanja Modal

   - Kenaikan realisasi Belanja Modal Tanah disebabkan karena adanya pengadaan Tanah pada tahun 2022;
   - Pembangunan gedung kantor pada Satuan Kerja masih dalam proses perencanaan dan masih tahap awal pembangunan;
   - Alokasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan pada Tahun 2022 disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin untuk satuan kerja baru serta pengadaan perlatan dan mesin pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi untuk ditransfer ke seluruh satuan kerja.

Realisasi Belanja Pegawai Rp7.048.276.739.941,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.048.276.739.941,00 dan Rp6.780.138.260.234,00.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp268.138.479.707,00 atau 3,95 persen dari Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.692.781.023.786,00	4.711.629.306.250,00	(18.848.282.464,00)	(0,40)
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	40.184.563.711,00	43.602.286.929,00	(3.417.723.218,00)	(7,84)
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	72.929.143.474,00	68.919.530.980,00	4.009.612.494,00	5,82
5122	Belanja Lembur	603.274.000,00	217.706.000,00	385.568.000,00	177,10
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	2.243.681.575.109,00	1.956.746.926.624,00	286.934.648.485,00	14,66
Realisasi Belanja Bruto		**7.050.179.580.080,00**	**6.781.115.756.783,00**	**269.063.823.297,00**	**3,97**
Pengembalian Belanja		(1.902.840.139,00)	(977.496.549,00)	(925.343.590,00)	94,66
Realisasi Belanja Neto		**7.048.276.739.941,00**	**6.780.138.260.234,00**	**268.138.479.707,00**	**3,95**

Terdapat penurunan realisasi pengembalian belanja pada periode pelaporan audited atas akun 511119 – Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang (005.01.0500.604730) berkurang sebesar Rp370.000,00 merupakan kesalahan penggunaan akun untuk potongan PFK dimana sebelumnya satuan kerja menggunakan akun 511119 - Belanja Pembulatan Gaji PNS yang seharusnya menggunakan akun 811132 - Penerimaan setoran/ptongan PFK 8% gaji PNS Pusat.

Realisasi Belanja Barang Rp2.634.148.576.563,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.634.148.576.563,00 dan Rp2.136.635.079.145,00.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp497.513.497.418,00 atau 23,28 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	947.066.191.827,00	732.500.438.574,00	214.565.753.253,00	29,29
5212	Belanja Barang Non Operasional	55.427.193.620,00	96.298.359.946,00	(40.871.166.326,00)	(42,44)
5218	Belanja Barang Persediaan	95.142.490.963,00	101.178.354.986,00	(6.035.864.023,00)	(5,97)
5221	Belanja Jasa	567.930.018.528,00	469.906.709.427,00	98.023.309.101,00	20,86
5231	Belanja Pemeliharaan	471.669.491.996,00	364.728.053.273,00	106.941.438.723,00	29,32
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	493.892.460.201,00	375.748.967.112,00	118.143.493.089,00	31,44
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.436.692.885,00	0,00	5.436.692.885,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto		**2.636.564.540.020,00**	**2.140.360.883.318,00**	**496.203.656.702,00**	**23,18**
Pengembalian Belanja		(2.415.963.457,00)	(3.725.804.173,00)	1.309.840.716,00	(35,16)
Realisasi Belanja Neto		**2.634.148.576.563,00**	**2.136.635.079.145,00**	**497.513.497.418,00**	**23,28**

Pada periode Tahunan Tahun 2022 terdapat realisasi belanja barang melebihi pagu pada Satuan Kerja 00504.0600.401583 Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar Rp5.969.000,00 pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Biasa. Hal ini dikarenakan oleh:

1. SPM Nomor 00004A tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp143.481.000,00 merupakan pagu yang berasal dari PNBP. Transaksi tersebut merupakan MP (Maksimum Pencairan) PNBP Tahap ke II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-165/PB/2022.
2. Terjadi kesalahan pembebanan akun, pada saat diajukan ke KPPN yaitu akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp143.481.000,00 seharusnya pembebanan pada 2 akun, yaitu : akun 521211 - Belanja Bahan sebesar Rp5.969.000,00 sedangkan akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp137.512.000,00. Kondisi tersebut menyebabkan pagu minus pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Terhadap kondisi tersebut, Satuan Kerja sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan pagu minus, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan ralat SPM, tetapi terjadi penolakan dari KPPN Banda Aceh karena untuk akun 521211 – Belanja Bahan hanya bisa dibayarkan melalui mekanisme non gaji (kepada rekening pihak ketiga/rekanan) dan dasar pembayarannya kwitansi/faktur, sedangkan SPM koreksi ini melalui mekanisme non gaji (LS Bendahara Pengeluaran).

2. Melakukan Revisi Anggaran, tetapi revisi pada SAKTI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki pagu, hal ini dikarenakan pada saat akan dilakukan revisi, realisasi anggaran sudah mencapai 100%. Sedangkan revisi antar Satuan Kerja tidak dapat dilakukan karena RO dan KRO yang berbeda serta sumber anggaran yang berbeda yaitu dari PNBP.

Realisasi Belanja Modal Rp1.596.501.752.127,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.596.501.752.127,00 dan Rp1.592.533.967.690,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.967.784.437,00 atau 0,25 persen dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	120.665.501.668,00	1.298.970.000,00	119.366.531.668,00	9.189,32
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	647.516.644.141,00	437.678.377.774,00	209.838.266.367,00	47,94
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	826.617.586.474,00	1.145.599.478.878,00	(318.981.892.404,00)	(27,84)
5341	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	94.456.560,00	297.285.835,00	(202.829.275,00)	(68,23)
5361	Belanja Modal Lainnya	1.620.755.184,00	8.433.422.860,00	(6.812.667.676,00)	(80,78)
Realisasi Belanja Bruto		**1.596.514.944.027,00**	**1.593.307.535.347,00**	**3.207.408.680,00**	**0,20**
Pengembalian Belanja		**(13.191.900,00)**	**(773.567.657,00)**	**760.375.757,00**	**(98,29)**
Realisasi Belanja Neto		**1.596.501.752.127,00**	**1.592.533.967.690,00**	**3.967.784.437,00**	**0,25**

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp120.665.501.668,00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp120.665.501.668,00 dan Rp1.298.970.000,00.

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp119.366.531.668,00 atau 9.189,32 persen dari Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
531111	Belanja Modal Tanah	118.438.782.400,00	1.273.160.000,00	117.165.622.400,00	9.202,74
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	122.804.472,00	0,00	122.804.472,00	0,00
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	9.000.000,00	25.810.000,00	(16.810.000,00)	(65,13)
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1.979.570.607,00	0,00	1.979.570.607,00	0,00
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	115.344.189,00	0,00	115.344.189,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto		**120.665.501.668,00**	**1.298.970.000,00**	**119.366.531.668,00**	**9.189,32**
Pengembalian Belanja		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Realisasi Belanja Neto		**120.665.501.668,00**	**1.298.970.000,00**	**119.366.531.668,00**	**9.189,32**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp647.514.818.141,00

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp647.514.818.141,00 dan Rp437.667.359.774,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember mengalami kenaikan sebesar Rp209.847.458.367,00 atau 47,95 persen dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersebut antara lain:

Tabel 11. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	646.946.798.641,00	437.678.377.774,00	209.268.420.867,00	47,81
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	23.962.000,00	0,00	23.962.000,00	0,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	545.883.500,00	0,00	545.883.500,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto		**647.516.644.141,00**	**437.678.377.774,00**	**209.838.266.367,00**	**47,94**
Pengembalian Belanja		**(1.826.000,00)**	**(11.018.000,00)**	**9.192.000,00**	**(83,43)**
Realisasi Belanja Neto		**647.514.818.141,00**	**437.667.359.774,00**	**209.847.458.367,00**	**47,95**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp826.606.220.574,00

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp826.606.220.574,00 dan Rp1.144.836.929.221,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp318.230.708.647,00 atau 27,80 persen dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersebut antara lain:

Tabel 12. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	677.720.256.706,00	831.375.325.263,00	(153.655.068.557,00)	(18,48)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	148.897.329.768,00	314.224.153.615,00	(165.326.823.847,00)	(52,61)
Realisasi Belanja Bruto		**826.617.586.474,00**	**1.145.599.478.878,00**	**(318.981.892.404,00)**	**(27,84)**
Pengembalian Belanja		**(11.365.900,00)**	**(762.549.657,00)**	**751.183.757,00**	**(98,51)**
Realisasi Belanja Neto		**826.606.220.574,00**	**1.144.836.929.221,00**	**(318.230.708.647,00)**	**(27,80)**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp94.456.560,00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp94.456.560,00 dan Rp0,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp202.829.275,00 atau 68,23 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 antara lain:

Tabel 13. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
534131	Belanja Modal Jaringan	94.456.560,00	97.289.500,00	(2.832.940,00)	(2,91)
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0,00	199.996.335,00	(199.996.335,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto		**94.456.560,00**	**297.285.835,00**	**(202.829.275,00)**	**(68,23)**
Pengembalian Belanja		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Realisasi Belanja Neto		**94.456.560,00**	**297.285.835,00**	**(202.829.275,00)**	**(68,23)**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp1.620.755.184,00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.620.755.184,00 dan Rp8.433.422.860,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.812.667.676,00 atau 80,78 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2021.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 antara lain:

Tabel 14. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian		Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		2022	2021	(Rp)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	1.437.743.500,00	8.323.422.860,00	(6.885.679.360,00)	(82,73)
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	183.011.684,00	110.000.000,00	73.011.684,00	66,37
Realisasi Belanja Bruto		**1.620.755.184,00**	**8.433.422.860,00**	**(6.812.667.676,00)**	**(80,78)**
Pengembalian Belanja		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Realisasi Belanja Neto		**1.620.755.184,00**	**8.433.422.860,00**	**(6.812.667.676,00)**	**(80,78)**

Realisasi Belanja Barang Terdampak COVID-19 Rp25.581.309.412,00

B.6. Belanja Terdampak COVID-19

Belanja Barang

Mahkamah Agung mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp26.665.655.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp25.581.309.412,00 atau 95,93 persen dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.357.189.000,00	6.402.006.203,00	100,70
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.416.583.000,00	737.010.584,00	30,50
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.313.458.000,00	528.238.845,00	22,83
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28.827.433.000,00	17.914.053.780,00	62,14
Jumlah		**39.914.663.000,00**	**25.581.309.412,00**	**64,09**

Informasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Dan Realisasi Output Prioritas Nasional

B.7. Informasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam RKP, pada Mahkamah Agung terdapat Alokasi Anggaran untuk 3 (tiga) PN, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN III);
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN VI);
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN VII);

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target, dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

PN III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pagu Anggaran PN III adalah Rp4.779.898.000,00 dan total realisasi sebesar Rp4.655.781.446,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN III ini antara lain sebagai berikut:

Program Prioritas / Kegiatan Prioritas (Sasaran) / Proyek Prioritas Nasional (Sasaran)	*RO Prioritas*	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW III	Realisasi pagu hingga TW III
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
PP : Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan					
KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan **Sasaran : Meningkatnya Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan**					
Pro PN : Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan **Sasaran Pro PN : Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan**					
Ditjen Badan Peradilan Agama	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	7.658 Perkara	2.588.588.000,00	11.534 Perkara (150,73%)	2.473.953.950,00 (95,57%)
PP : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda					
KP : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak **Sasaran : Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak**					
Pro PN : Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya **Sasaran Pro PN : Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya**					
Balitbang Diklat Kumdil MA	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	160 Orang	2.191.310.000,00	168 orang (105%)	2.181.827.496,00 (99,57%)

PN VI : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pagu Anggaran PN VI adalah Rp2.176.218.000,00 dan total realisasi sebesar Rp2.176.152.969,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VI ini antara lain sebagai berikut:

Program Prioritas / Kegiatan Prioritas (Sasaran) / Proyek Prioritas Nasional (Sasaran)	*RO Prioritas*	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW III	Realisasi pagu hingga TW III
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
PP : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup **Sasaran : Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**					
Pro PN : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup **Sasaran Pro PN : Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**					
Balitbang Diklat Kumdil MA	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	160 Orang	2.176.218.000,00	161 orang (100,63%)	2.176.152.969,00 (100%)

PN VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pagu Anggaran PN VII adalah Rp78.504.722.000,00 dan total realisasi sebesar Rp76.516.995.641,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VII ini antara lain sebagai berikut:

Program Prioritas / Kegiatan Prioritas (Sasaran) / Proyek Prioritas Nasional (Sasaran)	*RO Prioritas*	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW III	Realisasi pagu hingga TW III
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
PP : Penegakan Hukum Nasional					
KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata **Sasaran : Terlaksananya Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata**					
Pro PN : Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha **Sasaran Pro PN : Terlaksananya Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha**					
Badan Urusan Administrasi	Pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)	1 NSPK	800.000.000,00	4 NSPK (400%)	792.339.085,00 (99%)
Balitbang Diklat Kumdil MA	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	50 Orang	936.000.000,00	52 Orang (104%)	929.560.274,00 (99,31%)
	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	280 Orang	2.284.000.000,00	286 orang (102,14%)	2.174.039.954,00 (95,19%)
Pro PN : Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan **Sasaran Pro PN : Terwujudnya Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan**					
Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	1 Sistem Informasi	2.200.000.000,00	1 Sistem Informasi (100%)	2.136.649.162,00 (97%)
Pro PN : Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif **Sasaran Pro PN : Terlaksananya Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif**					
Ditjen Badan Peradilan Umum	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	300 orang	1.500.000.000,00	330 orang (110%)	1.496.379.233,00 (99,76%)
KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan **Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Akses terhadap Keadilan**					
Pro PN : Penguatan Layanan Keadilan **Sasaran Pro PN: Terlaksananya Penguatan Layanan Keadilan**					
Ditjen Badan Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	111.368 Orang	11.136.800.000,00	110.210 orang (98,96%)	11.021.055.786,00 (98,96%)
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	4.628 Perkara	6.317.295.000,00	4.593 perkara (99,21%)	6.267.387.197,00 (99,21%)
	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	160 Perkara	106.350.000,00	50 perkara (30,6%)	32.522.000,00 (30,61%)
Ditjen Badan Peradilan Agama	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	234.469 Orang	22.413.120.000,00	372.834 orang (159,01%)	22.257.091.347,00 (99,30 %)
	Perkara di Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	21.413 Perkara	9.952.839.000,00	31.063 perkara (145,07 %)	8.764.795.153,00 (88,06 %)
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	32.918 Perkara	20.858.318.000,00	56.039 perkara (170,24 %)	20.643.526.667,00 (99,97 %)
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2.880 Orang	990.000.000,00	1.741 Orang (60,45%)	641.938.000,00 (64,79%)
	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	66 Perkara	49.860.000,00	11 Perkara (16,67%)	5.890.000,00 (11,81%)



PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar Rp55.905.353.442,00

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp55.905.353.442,00 dan Rp40.898.131.778,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp15.007.221.664,00 atau 36,69%.

Adapun kenaikan dan penurunan yang terjadi pada saldo Aset Lancar sebesar Rp15.007.221.664,00 tersebut disebabkan sebagai berikut:

a. Adanya penurunan pada Aset Lancar untuk akun-akun:
   1. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp106.598.300,00 .
   2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp110.693.622,00.
   3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp553.468,00.
   4. Persediaan sebesar Rp2.279.801.233,00.
b. Selain itu, terdapat kenaikan pada Aset Lancar untuk akun–akun:
   1. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp120.521.247,00.
   2. Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5.736.079.142,00.
   3. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) sebesar Rp7.680.125.410,00.
   4. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp3.986.721.702,00.
   5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak sebesar Rp19.686.150,00.

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	271.770.124,00	151.248.877,00	120.521.247,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.894.000,00	111.492.300,00	(106.598.300,00)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	6.064.885.817,00	328.806.675,00	5.736.079.142,00
4	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	24.432.411.476,00	16.752.286.066,00	7.680.125.410,00
5	Piutang Bukan Pajak	5.493.589.931,00	1.506.868.229,00	3.986.721.702,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(27.220.491,00)	(7.534.341,00)	(19.686.150,00)
7	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	110.693.622,00	(110.693.622,00)
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	(553.468,00)	553.468,00
9	Persediaan	19.665.022.585,00	21.944.823.818,00	(2.279.801.233,00)
Jumlah Aset Lancar		**55.905.353.442,00**	**40.898.131.778,00**	**15.007.221.664,00**

Komposisi Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik

Komposisi Aset Lancar

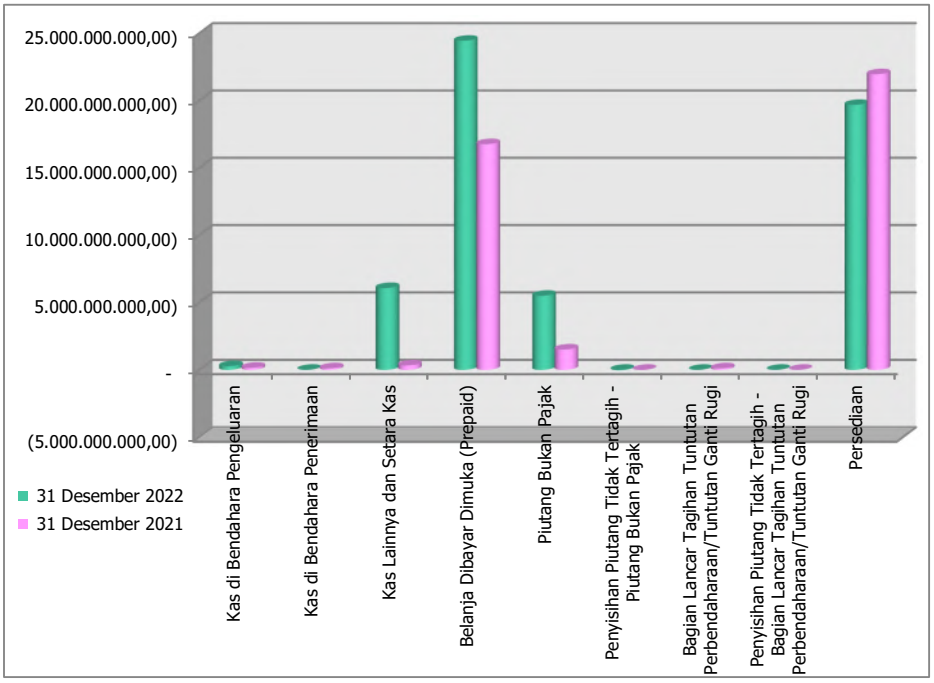

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	44.299.963.662,00	28.577.557.629,00	15.722.406.033,00
2	005.02	Kepaniteraan	1.343.987.114,00	1.655.186.280,00	(311.199.166,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	7.604.169.567,00	8.053.287.586,00	(449.118.019,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	1.436.515.251,00	1.703.707.952,00	(267.192.701,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	168.529.278,00	198.587.220,00	(30.057.942,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	696.919.367,00	514.845.893,00	182.073.474,00
7	005.07	Badan Pengawasan	355.269.203,00	194.959.218,00	160.309.985,00
Jumlah			**55.905.353.442,00**	**40.898.131.778,00**	**15.007.221.664,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp271.770.124,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp271.770.124,00 dan Rp151.248.877,00, terjadi kenaikan sebesar Rp120.521.247,00 atau 79,68%.

Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	268.160.124,00	150.618.877,00	117.541.247,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	630.000,00	(630.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**271.770.124,00**	**151.248.877,00**	**120.521.247,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2022	Penyetoran	Saldo per Tahun 2023
1	005.01	BUA	268.160.124,00	(268.160.124,00)	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	3.610.000,00	(3.610.000,00)	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**271.770.124,00**	**(271.770.124,00)**	**0,00**

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Satuan Kerja

(*Dalam Rupiah*)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan	Bukti Setor	
						Tgl Dok.	NTPN
Kas Di Bendahara Pengeluaran UP							
005.01 BUA	0800	400333	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	16.834.000,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 5 Januari 2023	05/01/2023	BF5FD2CNR1833GSE
	0800	401947	Pengadilan Agama Batusangkar	17.192.370,00	Sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 4 Januari 2023	04/01/2023	0DA896QRA640LSH3
	1300	402669	Pengadilan Agama Mempawah	10,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada Tgl. 18 Januari 2023	18/01/2023	AAB510JSRC3NRJJG
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran UP 005.01 BUA				**34.026.380,00**			
005.04 Ditjen. Badilag	0800	401979	Pengadilan Agama Sijunjung	145.000,00	sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 2 Januari 2023	02/01/2023	AF5D145IQMCPSMUI
	1700	401996	Pengadilan Agama Lolak	3.395.000,00	Sudah dilakukan Penyetoran Sisa UP ke Kas Negara	04/01/2023	9DB1A7N8Q0MDRFN4
	0900	402623	Pengadilan Agama Dumai	70.000,00	sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 4 Januari 2023	04/01/2023	2F90B6QRA6413FS1
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran UP 005.04 Ditjen. Badilag				**3.610.000,00**			
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran UP				**37.636.380,00**			
Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP							
005.01 BUA	0200	097514	Pengadilan Negeri Bandung	88.452.000,00	sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 06 Januari 2023	06/01/2023	05F88395ARQHCL93
	1700	401888	Pengadilan Agama Lolak	51.265.000,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 04 Januari 2023	04/01/2023	7ED860JSRC39Q8FA
	1700	531872	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	37.214.139,00	Adanya permasalahan pada aplikasi sakti pengguna (satker) di akhir tahun 2022 yang menyebabkan penyetoran sisa dana TUP RM ke kas negara dilakukan pada awal bulan Januari 2023	06/01/2023	1C0CF0JSRC3BULF4
	199	663157	Badan Urusan Administrasi	57.202.605,00	Sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 04 Januari 2023	12/01/2023	782198N3E9VNN1NL
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP 005.01 BUA				**234.133.744,00**			
Jumlah Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP				**234.133.744,00**			
Jumlah				**271.770.124,00**			

Kas di Bendahara Penerimaan Rp4.894.000,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.894.000,00 dan Rp111.492.300,00, terjadi penurunan sebesar Rp106.598.300 atau 95,61%, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku Wajib Pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Perbandingan rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	0,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	4.874.000,00	10.950.500,00	(6.076.500,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	20.000,00	100.541.800,00	(100.521.800,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**4.894.000,00**	**111.492.300,00**	**(106.598.300,00)**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2022	Penyetoran	Saldo per Tahun 2023
1	005.01	BUA	0,00	0,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	4.874.000,00	(4.874.000,00)	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	30.000,00	(20.000,00)	10.000,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**4.904.000,00**	**(4.894.000,00)**	**10.000,00**

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Satuan Kerja

(*Dalam Rupiah*)

Kode Es. 1	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan	Bukti Setor	
						Tgl. Dok.	NTPN
005.03 Ditjen. Badilum	2900	099074	Pengadilan Negeri Serang	2.846.500,00	Setoran Tahun 2022 atas akun 425232, 425233, dan 425239 yang disetorkan pada Tahun 2023,	10/01/2023	1. 8F5173CIFAHBGC5D 2. 123D38N3E9VM0IQR 3. 5F8D51JNFLCPSQC1 4. 011388N3E9VLUCE1 5. 620841JNFLCIN72T 6. 4E14E6U8EKQT6OKN 7. 556728N3E9VT4S13
	0300	099090	Pengadilan Tinggi Semarang	20.000,00	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya yang berasal dari putusan perkara pada 31 Desember 2022 namun disetor di Januari 2023	02/01/2023	012C63CIFAH5VB3C
	0500	099152	Pengadilan Negeri Malang	1.947.500,00	PNBP diterima pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.00 sehingga penyetoran baru terekam pada tanggal 2 Januari 2023 (lewat tahun anggaran).	03/01/2023	1. FF2FA2G4VFUN9IEK 2. 623FF1JNFLCAS188 3. 9247C61QUQ88TIVU 4. FF24C8N3E9VE4I0F 5. 817D255DEVLSGF1L 6. 00C5B48VV53G3HNI 7. 8F17961QUQ88TEV6 8. CA3910N9VQPUFEUC 9. 551DC0N9VQPUFESQ 10. 90AC96U8EKQLAERF 11. D299C8N3E9VE4EQJ 12. 04F6C1JNFLCASH27 13. A49266U8EKQLAEP9 14. 915351JNFLCASGTR (15. CC 2248N3E9VE4EO3 16. DE3D261QUQ88TGPU 17. B15B73CIFAH3MGNL 18. 689FF55DEVLSGEL5 19. 7D7FB3CIFAH3MEK5 20. 61D3C1JNFLCASGDJ 21. 6ACFA61QUQ88TG26
	0700	099198	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	10.000,00	PNBP diterima pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 15.00 sehingga penyetoran baru terekam pada tanggal 2 Januari 2023 (lewat tahun anggaran).	06/01/2023	5546E3CIFAH70U5D
	1100	099226	Pengadilan Negeri Palembang	50.000,00	Setoran Tahun 2022 atas akun 425233 dan 425239 yang disetorkan pada Tahun 2023,	03/01/2023	1. 637123CIFAH4OOEF 2. DAAE061QUQ89VOEI
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan UP 005.03 Ditjen. Badilum				**4.874.000,00**			
	1300	403424	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	10.000,00	PNBP Tahun 2022 tanggal 30 Desember namun disetor di awal Januari 2023	11/01/2023	209ED0N9VQQ6GB9U
	1600	402481	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	10.000,00	Setoran Tahun 2022 atas akun 425239 yang disetorkan pada Tahun 2023,	03/01/2023	60A5F61QUQ89TVP9
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan UP 005.04 Ditjen. Badilag				**20.000,00**			
Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan				**4.894.000,00**			

Terdapat pergeseran nilai Kas Di Bendahara Penerimaan pada Neraca 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.650.000 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sengeti (005.04.1000.652035) berkurang sebesar Rp1.650.000,00 dimana pada Neraca 31 Desember 2022 (*Unaudited*) terdapat Kesalahan pencatatan transaksi uang masuk dengan SBS Nomor 00130/SBS/652035/2022 yang telah dihapuskan dari Modul Bendahara. Penghapusan transaksi tersebut tidak terposting oleh sistem, satuan kerja terkait melaporkan permasalahan tersebut kepada DJPB Kementerian Keuangan melalui platform Hai DJPB dengan nomor tiket 20230209-4VVJK8. Sampai dengan laporan *Unaudited* disusun (28 Februari 2023 pukul 11:54) satuan kerja terkait belum menerima respon atas pelaporan terhadap permasalahan tersebut. Perbaikan telah dilakukan oleh sistem pada pelaporan *Audited*.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp6.064.885.817,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.064.885.817,00 dan Rp328.806.675,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.736.079.142,00 atau 1.744,51%.

Perbandingan rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	6.038.412.512,00	328.731.675,00	5.709.680.837,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	75.000,00	(75.000,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	412.880,00	0,00	412.880,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	26.060.425,00	0,00	26.060.425,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**6.064.885.817,00**	**328.806.675,00**	**5.736.079.142,00**

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	69.575.817,00	328.806.675,00
2	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	5.995.310.000,00	0,00
Jumlah		**6.064.885.817,00**	**328.806.675,00**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Negara dan diserahkan kepada pegawai pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Saldo per 31 Desember 2022	Penyetoran	Saldo per Januari 2023
1	005.01	BUA	6.038.412.512,00	(43.102.512,00)	5.995.310.000,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	412.880,00	(412.880,00)	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	26.060.425,00	(26.060.425,00)	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**6.064.885.817,00**	**(69.575.817,00)**	**5.995.310.000,00**

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satuan Kerja

(*Dalam Rupiah*)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor	
						Tgl. Dok.	NTPN
005.01 BUA	0500	098221	Pengadilan Negeri Situbondo	1.511.550,00	Pembayaran Pajak Uang Makan Bulan Desember 2022 yang disetor/dibayarkan pada Bulan Januari 2023	10/01/2023	537EA67NBQHQ6975
	0800	402050	Pengadilan Agama Payakumbuh	1.190.000,00	Pajak belum di setor, telah ditindaklanjuti dengan menyetor pajak trs pada bulan Januari 2023	02/01/2023	721CAP1PJKP5SCNQ
	1000	402205	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	3B6E91PJPKNSUGKQ
				132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	F651E7440K67RP10
				132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	4C6333IEP98LVM4K
				132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	D9C6A67NBPJRKGKD
				35.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	D8F451PJPKNU7H4Q
				30.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	D4B8D7440K68TQQ8
				521.600,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	9AF462M19FAAF439
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	12.805.000,00	kelebihan tukin Badan Litbang Diklat Kumdil TA 2022	12/01/2023	D14B17QLUFD9DG0E
				26.003.962,00	kelebihan Tunjangan Kinerja Tahun 2022	21/03/2023	A95E28N3EA5UCVHR
	2900	663398	Pengadilan Tinggi Banten	231.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	24/01/2023	B016A67N8RPI885L
				246.400,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	24/01/2023	CC8592M19HG1B89T
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.01 BUA				**43.102.512,00**			
005.05	0199	663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	412.880,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	17/01/2023	1. 0AB6900OQ1DMEV9C 2. CBEAD744OM0R2CT4
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.05 Ditjen. Badilmiltun				**412.880,00**			
005.06	0199	309055	Badan Litbang Diklat Kumdil	660.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	BA6B31JNFLCHAP51
				780.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	33C7D7QLUFD85PCE
				960.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	AC8DC61QUQ8FBPDA
				896.633,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	85DFB7QLUFD85PEK
				11.960.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	10/01/2023	4A15A7QLUFD89VAI
				2.748.400,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	10/01/2023	2E0B00N9VQQ51V60
				8.055.392,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2023	6828561QUQ8FFV1D
Jumlah Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 005.04 Ditjen. Badilag				**26.060.425,00**			
005.01	0200	401915	Penerimaan Hibah pada Tahun 2022, saldo di rekening adalah yg belum dilakukan realisasi & pengesahan dari KPPN	5.995.310.000,00	Penerimaan Hibah pada Tahun 2022, saldo di rekening adalah yg belum dilakukan realisasi & pengesahan dari KPPN	31/12/2022	-
Jumlah Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah				**5.995.310.000,00**			
Jumlah				**6.064.885.817,00**			

Terdapat pergeseran nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca 31 Desember 2022 (Audited) yang bertambah sebesar Rp26.003.962,00 pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi (005.01.0199.663157). Hal tersebut disebabkan terdapat tambahan setoran pengembalian Tunjangan Kinerja Tahun 2022 yang telah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2023 melalui SSBP dengan NTPN: A95E28N3EA5UCVHR tanggal 21 Maret 2023.

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp24.432.411.476,00

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa (sewa *Hosting*, lisensi *Zoom Meeting*, sewa *Domain*, sewa rumah dinas, dan sewa mesin *fotocopy*) dan pembayaran dimuka atas belanja modal (jaminan atas pekerjaan yang belum yang belum *final* sampai dengan akhir tahun anggaran).

Saldo Belanja Dibayar Dimuka *(Prepaid)* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.432.411.476,00 dan Rp16.752.286.066,00, terjadi kenaikan sebesar Rp7.680.125.410,00 atau 45,85%.

Perbandingan rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka *(Prepaid)* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	24.432.411.476,00	16.752.286.066,00	7.680.125.410,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**24.432.411.476,00**	**16.752.286.066,00**	**7.680.125.410,00**

Rincian Belanja Dibayar Dimuka *(Prepaid)* per 31 Desember 2022 per Jenis Akun disajikan sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per Jenis Akun

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran	245.933.176,00
Pembayaran Belanja Sewa	17.776.443.531,00
Pembayaran Operasional Lainnya	366.667,00
Jaminan Pembayaran atas Pekerjaan yang Belum Final sampai dengan TA 2022 berakhir	6.409.668.102,00
Jumlah	**24.432.411.476,00**

Rincian Belanja Modal Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja sebesar Rp6.409.668.102,00, sebagai berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
1	005.01.099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	218.396.000,00	Merupakan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) atas pekerjaan konstruksi revitalisasi gedung cagar budaya kantor Pengadilan Negeri Makassar TA 2022 yang diperpanjang sampai dengan 21 Maret 2023. Pekerjaan telah diselesaikan pada tanggal 6 Januari 2023.
2	005.01.099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	3.303.445.154,00	Merupakan Jaminan Pembayaran (SPTJM) sebesar Rp35.845.700 atas pekerjaan konsultan pengawasan (CV. Cipta Estetika) dan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) atas pekerjaan konstruksi pembangunan fisik gedung kantor Pengadilan Negeri Mamuju (CV. Asri Nusa) yang diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023.
3	005.01.401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	1.637.735.008,00	Merupakan jaminan bank (bank garansi) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) oleh PT Berkibar Bersama Bendera sebesar Rp.5.618.020.100, pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) oleh PT Alocita Mandiri sebesar Rp.127.972.350, pelaksanaan pekerjaan pembayaran pengadaan jasa konsultasi perencanaan gedung kantor baru gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) oleh PT Skala Pilar Lima sebesar Rp.53.251.397, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wanprestasi), jaminan bank berlaku tanggal 19 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 30 Januari 2023
4	005.01.401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	1.250.091.940,00	Merupakan jaminan bank (bank garansi) atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan sarana lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh CV Antazena sebesar Rp.935.404.250, dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi finishing gedung kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh CV Dwi Karya Bakti sebesar Rp.250.458.500, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wanprestasi), jaminan bank berlaku tanggal 22 Desember 2022 s.d. 23 Januari 2023, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 22 Februari 2023, BAST CV Antazena tanggal 21 Januari 2023 dan BAST CV Dwi Karya Bakti tanggal 23 Januari 2023, sehingga bank garansi tersebut sudah diklaim per tanggal BAST, denda wanprestasi tersebut sudah dibayar per 26 Januari 2023 sebesar Rp.10.672.000 (CV Antazena) dan Rp.869.000 (CV Dwi Karya Bakti).
Jumlah			**6.409.668.102,00**	

Terdapat pergeseran nilai Neraca periode 31 Desember 2022 (*Audited*) pada Belanja Barang Dibayar Dimuka bertambah sebesar Rp2.552.137.747,00, dan pada Belanja Modal Dibayar Dimuka berkurang sebesar Rp4.161.508.839,00 pada beberapa satuan kerja sebagai berikut :

1. Pada 19 Satuan Kerja terdapat pergeseran nilai Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar Rp2.552.137.747,00 yang disebabkan terdapat koreksi nilai akibat kurang catat atau lebih catat akrual atas Belanja Dibayar Dimuka dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1	099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	(176.458,00)	Kesalahan penyajian Belanja Dibayar Dimuka atas sewa Web Hosting
2	099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	(1.692.790,00)	Koreksi atas Lebih Catat Belanja Dibayar Dimuka sewa Web Hosting
3	307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	(2.500.000,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka sewa Domain dan Hosting
4	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	16.869.688,00	Belanja Sewa (522141) untuk sewa Webhosting berdasarkan No. Faktur 010.003-22.47369811 senilai Rp40.487.250,00 dari tanggal 13 Juni 2022 s.d. 13 Juni 2023 belum dicatat sebagai Belanja sewa dibayar Dimuka sebesar Rp16.869.688,00
5	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	212.864.750,00	Koreksi atas lebih Catat Belanja Dibayar Dimuka
6	400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	2.916.666,00	Koreksi atas kurang catat belanja dibayar dimuka atas sewa Video Conference (ZM)
7	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	875.000,00	Koreksi Kurang Catat Sewa Hosting Dibayar Dimuka Rp875.000,00 atas pembayaran sewa sebesar Rp2.625.000 selama 1 tahun (19/4/2022 s.d 18/4/2023)
8	401895	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	280.000,00	Koreksi kurang Catat Belanja Sewa Hosting Dibayar Dimuka
9	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	(1.145.833,00)	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual belanja dibayar dimuka atas sewa Web Hosting yang seharusnya tidak disajikan sebagai akrual karena pembayaran hanya untuk 1 bulan pada bulan Desember 2022
10	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	3.277.250,00	Koreksi atas belanja sewa (MAK 522141) untuk Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data dan Informasi senilai Rp39.327.000,00 sesuai Surat Perjanjian Nomor : W16-U11/75/PL.03/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 dengan periode sewa 24 Januari 2022 s.d. 23 Januari 2023. Belum diperhitungkan Belanja Sewa Dibayar Dimuka untuk Periode 1 Januari 2023 s.d. 24 Januari 2023 senilai Rp3.277.250,00.
11	401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	(687.500,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting
12	402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	2.459.167,00	Koreksi kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka atas sewa Web Hosting
13	402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	(776.245,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting (nilai Realisasi tidak sesuai dengan besar tagihan yang tertera di invoice)
14	402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	(20.000,00)	Koreksi nilai akrual belanja barang dibayar di muka atas sewa mesin fotocopy
15	477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	7.166.718,00	Koreksi jurnal Akrual GLP atas Belanja Barang Dibayar Dimuka untuk langganan Zoom Meeting
16	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	(333.000,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting
17	604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	(2.063.780,00)	Koreksi kesalahan penyajian nilai Belanja Dibayar Dimuka atas sewa Cloud Storage
18	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2.315.769.114,00	Koreksi kurang catat Belanja Dibayar Dimuka atas: 1. Kesalahan Perhitungan atas Pengakuan BDD pada 1 paket Belanja Sewa Kendaraan 2. Belum diakuralkan untuk Belanja Dibayar Dimuka atas 2 paket Belanja Sewa Kendaraan
19	670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	(945.000,00)	Koreksi lebih catat belanja dibayar dimuka atas sewa Hosting
Jumlah			**2.552.137.747,00**	

2. Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Rumbia (005.01.2000.401887) terdapat pergeseran nilai Belanja Modal Dibayar Dimuka berkurang sebesar Rp4.161.508.839,00 yang disebabkan terdapat Koreksi Jurnal atas pengembalian belanja modal ke kas negara dari pencairan Bank Garansi. Adapun pengembalian perencanaan PT. Skala Pilar Lima sebesar Rp39.172.805,00; pelaksanaaan PT Berkibar Bersama Bendera Rp4.031.309.018,00 dan pengawasan PT Alucita Mandiri Rp91.027.016,00.

Piutang Bukan Pajak
Rp5.493.589.931,00

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.493.589.931,00 dan Rp1.506.868.229,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.986.721.702,00 atau 264,57%.

Perbandingan rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	5.491.007.201,00	1.466.904.229,00	4.024.102.972,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	39.964.000,00	(39.964.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	2.582.730,00	0,00	2.582.730,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**5.493.589.931,00**	**1.506.868.229,00**	**3.986.721.702,00**

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Piutang Bukan Pajak	Keterangan	Bukti Setor		
						Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak								
	0100	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3.550.000,00	Sewa Fotocopy an Rika Fatmawati (Perpanjangan), perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2026. Bukti setor tahun 1 Rp7.100.000 tgl 24 Mei 2021 (periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022). Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023)	0,00	-	-
				12.500.000,00	Sewa Kantin a.n. Rosida, perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2026. Harga sewa sebesar Rp25.000.000/tahun. Bukti setor tahun ke-1 Rp25.000.000 tgl 24 Mei 2021 (periode 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2022). Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023)	0,00	-	-
				18.900.000,00	Sewa BTS Storvanet, perjanjian sewa ditandatangani 1 Okt 2021, jangka waktu sewa 3 tahun dari 1 Okt 2021 s.d. 30 Sept 2024. Harga sewa sebesar Rp18.900.000/tahun atau Rp56.700.000 selama 3 tahun. Bukti setor tgl 19 Jan 2023 sebesar Rp56.700.000 untuk jangka waktu sewa 3 tahun. Pembayaran atas sewa Tahun 2022 baru dibayarkan pada Tahun 2023	56.700.000,00	19/01/2023	B78370N9VQQEHUI0
005.01 BUA	0500	098281	Pengadilan Negeri Malang	6.218.400,00	Sewa Payment Point BTN, perjanjian sewa Ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 31 Agust 2022 s.d. 30 Agust 2024 (2 tahun), PNBP sewa baru disetorkan tanggal 20 Jan 2023 Rp6.218.400 untuk sewa 2 tahun. Sesuai Surat KPKNL S-119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022. Nilai sewa Rp6.218.400 per tahun. Pembayaran atas sewa tersebut baru dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.	6.218.400,00	20/01/2023	BDC2S8N3E9VQVE03
				8.323.200,00	Sewa Kantin Pak Kamid dan Kantin Bu Tutik, perjanjian ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 17 Juni 2022 s.d. 17 Juni 2025 (3 tahun). PNBP sewa baru disetorkan tanggal tgl 16 Jan 2023 masing-masing Rp 4.161.600 untuk sewa 3 tahun. Sesuai surat KPKNL S 119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022	8.323.200,00	16/01/2023	720F80N9VQQBACU2
	1900	099600	Pengadilan Negeri Palopo	551.886,00	Pengakuan piutang atas sewa rumah dinas (pemakaian bulan Juli-September 2022) yang baru dibayarkan pada Desember 2022 - Februari 2023 melalui potongan SPM. (Piutang diakui sebesar 2 bulan: Januari dan Februari)	551.886,00	1. 01/01/2023 2. 01/02/2023	1. SP2D Nomor :230581506000032 2. SP2D Nomor :230581506000044
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	287.155.079,00	Sewa Kantin Medan Merdeka Utara bulan April 2017 s.d Mei 2019.	0,00	-	-
				136.169.450,00	Sewa Kantin Sekretariat Mahkamah Agung (A Yani) selama tahun 2020.	0,00	-	-
Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak				**473.368.015,00**				
Piutang Lainnya								
	2000	401887	Pengadilan Agama Rumbia	4.161.508.839,00	Pengembalian belanja modal ke kas negara dari pencairan Bank Garansi. Adapun pengembalian perencanaan PT. Skala Pilar Lima sebesar Rp39.172.805,00; pelaksanaaan PT Berkibar Bersama Bendera Rp4.031.309.018,00 dan pengawasan PT Alucita Mandiri Rp91.027.016,00	4.161.508.839,00	27/01/2023	DC91448VVS47KTC8
	1400	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	789.000,00	Pengembalian uang makan bulan desember 2022.	0,00	-	-
005.01 BUA	0500	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	26.952.000,00	Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d. November 2022 (5 bulan x Rp5.390.400,00).	24.952.000,00	-	Pengembalian melalui potongan TASPEN bulan Desember 2022 s.d. Juni 2023.
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	584.212.277,00	Kelebihan atas pembayaran sewa kendaraan dinas sesuai Adendum II dengan Kontrak Nomor: 30/BUA.7/ADD-SP/11/2022 tanggal 14 November 2022	0,00	-	-
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	244.177.070,00	kelebihan bayar atas kontrak Pengadaan BBM Kendaraan Operasional antara MA dengan Pertamina, berdasarkan Perjanjian No.22/BUA.7/SP/1/2022 tgl 1 Januari 2022.	0,00	-	-
005.05 Ditjen. Badilmiltun	0199	663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	2.582.730,00	Pengembalian atas kelebihan pembayaran transport kegiatan Rakernas di Semarang Tahun 2022.	2.582.730,00	16/01/2023	0C7B22G4VFV429UM
Jumlah Piutang Lainnya				**5.020.221.916,00**				
Jumlah				**5.493.589.931,00**				

Sedangkan mutasi saldo Piutang PNBP pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Mutasi Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	**1.506.868.229,00**
Mutasi Tambah :	
- Piutang PNBP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	34.950.000,00
- Piutang PNBP Pengadilan Negeri Malang	14.541.600,00
- Piutang PNBP Pengadilan Negeri Palopo	551.886,00
- Piutang Lainnya Pengadilan Agama Rumbia	4.161.508.839,00
- Piutang Lainnya Pengadilan Negeri Kuala Kurun	789.000,00
- Piutang Lainnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	26.952.000,00
- Piutang Lainnya BUA	828.389.347,00
- Piutang Lainnya Ditjen. Badilum	2.582.730,00
Jumlah Mutasi Tambah	**5.070.265.402,00**
Mutasi Kurang :	
- Piutang PNBP Pengadilan Agama Giri Menang	131.563,00
- Piutang PNBP Ditjen. Badilum	39.964.000,00
- Piutang Lainnya BUA	1.035.343.467,00
- Piutang Lainnya PTA Bandung	72.776,00
- Piutang Lainnya PT Semarang	7.012.476,00
- Piutang Lainnya PT Denpasar	738.800,00
- Piutang Lainnya PN Negara	280.600,00
- Piutang Lainnya PN Gianyar	18,00
Jumlah Mutasi Kurang	**1.083.543.700,00**
Jumlah Mutasi	**3.986.721.702,00**
Saldo per 31 Desember 2022	**5.493.589.931,00**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak (Rp27.220.491,00)

C.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp27.220.491,00) dan (Rp7.534.341,00), terjadi kenaikan sebesar Rp19.686.150,00 atau 261,29%.

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	(27.207.577,00)	(7.334.521,00)	(19.873.056,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	(199.820,00)	199.820,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	(12.914,00)	0,00	(12.914,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**(27.220.491,00)**	**(7.534.341,00)**	**(19.686.150,00)**

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak Per Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak							
005.01 BUA	0100	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Lancar	3.550.000,00	0,50%	0,00
005.01 BUA	0100			Lancar	12.500.000	0,50%	0,00
005.01 BUA	0100			Lancar	18.900.000	0,50%	0,00
005.01 BUA	0500	098281	Pengadilan Negeri Malang	Lancar	6.218.400,00	0,50%	0,00
005.01 BUA	0500	098281	Pengadilan Negeri Malang	Lancar	8.323.200,00	0,50%	0,00
005.01 BUA	1900	099600	Pengadilan Negeri Palopo	Lancar	551.886,00	0,50%	(2.759,00)
005.01 BUA	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	287.155.079,00	0,50%	(1.435.775,00)
005.01 BUA	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	136.169.450,00	0,50%	(680.847,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Bukan Pajak					**473.368.015,00**		**(2.119.381,00)**
Piutang Lainnya							
005.01 BUA	2000	401887	Pengadilan Agama Rumbia	Lancar	4.161.508.839,00	0,50%	(20.807.544,00)
	1400	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Lancar	789.000,00	0,50%	(3.945,00)
	0500	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Lancar	26.952.000,00	0,50%	(134.760,00)
	0199	663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	584.212.277,00	0,50%	(2.921.061,00)
		663157	Badan Urusan Administrasi	Lancar	244.177.070,00	0,50%	(1.220.885,00)
		663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Lancar	2.582.730,00	0,50%	(12.914,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya					**5.020.221.916,00**		**(25.101.109,00)**
Jumlah					**5.493.589.931,00**		**(27.220.490,00)**

Terdapat koreksi *audited* atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya bertambah sebesar Rp22.182.807,00 pada 6 Satuan Kerja yaitu PN Palopo (005.01.1900.099600), PA Rumbia (005.01.2000.401887), PN Kuala Kurun (005.01.1400.401918), PTTUN Surabaya (005.01.0500.548940), BUA (005.01.0199.663157), dan Ditjen. Badilmiltun (005.05.0199.663122) dikarenakan terdapat tambahan Piutang Bukan Pajak yang belum disajikan pada Neraca periode 31 Desember 2022 (*Unaudited*), sehingga menambah nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak yang sebelumnya belum dicatat perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak. Atas hal tersebut, sudah dilakukan perbaikan pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*).

Terdapat kurang saji Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada periode *audited* pada 2 satuan kerja dikarenakan belum dilakukan penginputan jurnal atas penyisihan piutang, dengan rincian sebagai berikut:

1. PN Malang (005.01.0500.098281) sebesar Rp72.708,00, piutang tersebut telah lunas pada tahun 2023.
2. PN Jakarta Pusat (005.01.0100.097471) sebesar Rp174.750,00, PN Jakarta Pusat belum melakukan pelunasan piutang di tahun 2023. Atas hal tersebut, akan dilakukan koreksi di tahun 2023.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0,00

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp110.693.622,00, terjadi penurunan sebesar Rp110.693.622,00 atau 100,00%.

Perbandingan rincian saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	110.693.622,00	(110.693.622,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**0,00**	**110.693.622,00**	**(110.693.622,00)**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Rp0,00)

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp553.468,00), terjadi penurunan sebesar Rp553.468,00 atau 100,00%. Hal ini dikarenakan adanya setoran pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara di Tahun 2021.

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	(553.468,00)	553.468,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**0,00**	**(553.468,00)**	**553.468,00**

Persediaan Rp19.665.022.585,00

C.1.9. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.665.022.585,00 dan Rp21.944.823.818,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.279.801.233,00 atau 10,39%.

Perbandingan rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan Rincian Persediaan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	8.097.179.926,00	9.776.211.149,00	(1.679.031.223,00)
2	005.02	Kepaniteraan	1.343.987.114,00	1.655.186.280,00	(311.199.166,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	7.599.295.567,00	8.001.942.906,00	(402.647.339,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	1.432.885.251,00	1.603.091.152,00	(170.205.901,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	165.546.582,00	198.587.220,00	(33.040.638,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	670.858.942,00	514.845.893,00	156.013.049,00
7	005.07	Badan Pengawasan	355.269.203,00	194.959.218,00	160.309.985,00
Jumlah			**19.665.022.585,00**	**21.944.823.818,00**	**(2.279.801.233,00)**

Perbandingan rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Kode Perkiraan	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	117111	Barang Konsumsi	18.602.549.741,00	20.889.488.455,00
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.062.329.844,00	1.055.335.363,00
3	117131	Bahan Baku	143.000,00	1.055.335.363,00
Jumlah			**19.665.022.585,00**	**23.000.159.181,00**

Terdapat persediaan Bahan Baku disebabkan kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen. Koreksi reklasifikasi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan sudah dihabispakaikan di periode januari 2023. Sudah mengajukan tiket ke haidjpb untuk pembatalan transaksi habispakai tetapi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan pada januari 2023 sudah terdapat transaksi TKTM.

Penyajian persediaan per 31 Desember 2022 sudah melalui proses pelaksanaan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan dalam kondisi baik, rusak, dan usang, sedangkan kondisi usang dan rusak tidak terakumulasi pada Laporan Barang Persediaan tingkat Kementerian/Lembaga pada aplikasi SAKTI.

Tabel 38. Rincian Kondisi Barang Persediaan Per Eselon I periode 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	Usang	Rusak
1	005.01	BUA	718.282.620,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	63.120.882,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00
Jumlah			**781.403.502,00**	**0,00**

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan koreksi persediaan pada Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, namun tidak dapat dilakukan koreksi karena sudah terdapat layer persediaan 2023 yang terbentuk, adapun tindak

lanjut terhadap ini adalah dengan melakukan opname fisik pada tahun anggaran 2023.

Terdapat koreksi audited atas Persediaan bertambah sebesar Rp3.539.802,00 pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun (00503.1400.402024) dikarenakan terdapat pemakaian persediaan berupa Barang Konsumsi pada bulan Desember 2022 yang belum diinput pemakaian tersebut pada Modul Persediaan sehingga dilakukan penginputan pada periode 14 Tahun 2022.

Aset Tetap Rp30.482.273.236.416,00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.482.273.236.416,00 dan Rp29.480.165.355.628,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.002.107.880.788,00 atau 3,40%.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 39. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1.	Tanah	19.986.074.179.582,00	19.805.288.980.810,00	180.785.198.772,00
2.	Peralatan dan Mesin	4.462.524.660.536,00	3.808.622.153.369,00	653.902.507.167,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.461.107.316.949,00	9.582.390.434.389,00	878.716.882.560,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	262.312.858.137,00	258.176.969.852,00	4.135.888.285,00
5.	Aset Tetap Lainnya	52.090.395.576,00	68.004.058.842,00	(15.913.663.266,00)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	656.303.651.907,00	617.396.614.572,00	38.907.037.335,00
Jumlah		**35.880.413.062.687,00**	**34.139.879.211.834,00**	**1.740.533.850.853,00**
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.398.139.826.271,00)	(4.659.713.856.206,00)	(738.425.970.065,00)
Jumlah Aset Tetap		**30.482.273.236.416,00**	**29.480.165.355.628,00**	**1.002.107.880.788,00**

Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik

Komposisi Aset Tetap

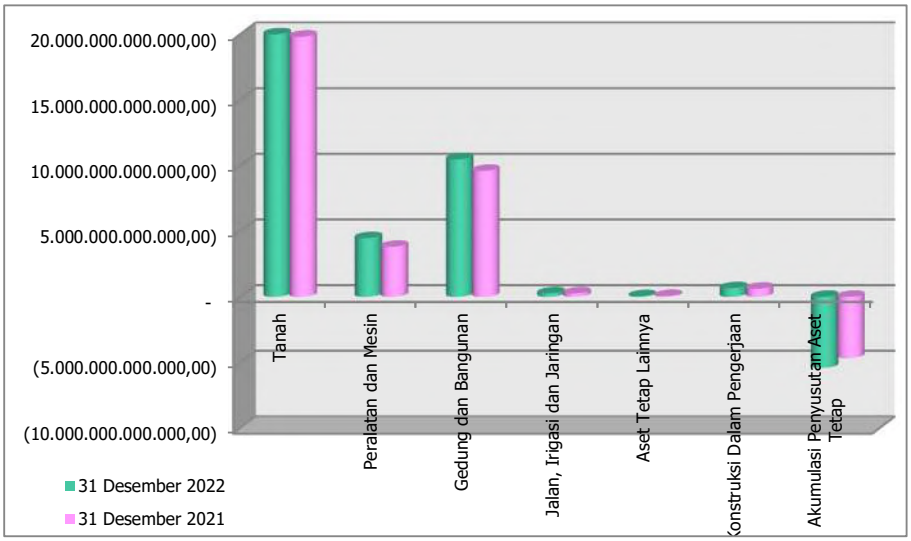

Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 40. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca Modul GLP SAKTI dan Modul Aset SAKTI

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca Modul GLP SAKTI	Aset Tetap dalam Neraca Modul Aset SAKTI	Selisih
1	Tanah	19.986.074.179.582,00	19.986.074.179.582,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.462.524.660.536,00	4.462.524.660.536,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	10.461.107.316.949,00	10.461.107.316.949,00	0,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	262.312.858.137,00	262.312.858.137,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	52.090.395.576,00	52.090.395.576,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	656.303.651.907,00	656.303.651.907,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.398.139.826.271,00)	(5.398.139.826.271,00)	0,00
Jumlah		**30.482.273.236.416,00**	**30.482.273.236.416,00**	**0,00**

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	29.460.640.573.754,00	28.300.834.602.919,00	1.159.805.970.835,00
2	005.02	Kepaniteraan	5.047.702.891,00	5.447.835.796,00	(400.132.905,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	661.513.100.985,00	657.551.890.337,00	3.961.210.648,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	2.536.938.563,00	1.934.664.281,00	602.274.282,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	21.395.013.160,00	179.351.803.436,00	(157.956.790.276,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	328.832.807.256,00	332.681.981.341,00	(3.849.174.085,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	2.307.099.807,00	2.362.577.518,00	(55.477.711,00)
Jumlah			**30.482.273.236.416,00**	**29.480.165.355.628,00**	**1.002.107.880.788,00**

Tanah Rp19.986.074.179.582,00

C.2.1. Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.986.074.179.582,00 dan Rp19.805.288.980.810,00, terjadi kenaikan sebesar Rp180.785.198.772,00 atau 0,91%.

Perbandingan rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Rincian Tanah Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	19.230.014.289.253,00	18.891.927.223.481,00	338.087.065.772,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	643.493.036.329,00	643.493.036.329,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	19.218.950.000,00	176.520.817.000,00	(157.301.867.000,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	93.347.904.000,00	93.347.904.000,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**19.986.074.179.582,00**	**19.805.288.980.810,00**	**180.785.198.772,00**

Mutasi transaksi Tanah pada 31 Desember Tahun 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 43. Mutasi Transaksi Tanah

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**19.805.288.980.810,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	169.972.021.336,00
101	Pembelian	54.744.936.338,00
102	Transfer Masuk	217.431.521.000,00
103	Hibah Masuk	17.659.656.646,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	64.535.458.461,00
106	Pembatalan Penghapusan	83.800.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	180.555.991.650,00
111	Pertukaran	613.523.000,00
112	Perolehan Lainnya	36.413.888.000,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	243.470.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	11.794.090.000,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	41.061.237.645,00
208	Pengembangan Melalui KDP	2.321.054.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**797.430.648.076,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(2.765.409.930,00)
301	Penghapusan	(83.800.000,00)
302	Transfer Keluar	(217.076.534.000,00)
303	Hibah Keluar	(5.696.251.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(181.555.665.650,00)
305	Koreksi Pencatatan	(209.093.040.724,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(374.748.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(616.645.449.304,00)**
Jumlah Mutasi		**180.785.198.772,00**
Saldo per 31 Desember 2022		**19.986.074.179.582,00**

Terdapat koreksi audited atas Tanah berkurang sebesar Rp929.546.250,00 pada 2 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Muara Bungo (00501.1000.098900) berkurang sebesar Rp41.946.250,00 dikarenakan:
   a) Terdapat kesalahan pencatatan nilai koreksi LKPP 2021 dimana lebih catat koreksi nilai bertambah Tanah. Satuan Kerja telah melakukan koreksi *audited* dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas kelebihan catat tersebut sebesar Rp39.946.250,00.
   b) Terdapat kesalahan pencatatan saldo awal Tanah senilai Rp2.000.000,00 sehingga terjadi *double* NUP yang seharusnya tidak perlu dilakukan input saldo awal. Telah dilakukan koreksi *Audited* dengan melakukan koreksi pencatatan pada NUP saldo awal tersebut.
2. Pengadilan Negeri Tebo (00501.1000.477368) berkurang sebesar Rp887.600.000,00 dikarenakan:

a) Terdapat kesalahan pencatatan nilai koreksi LKPP 2021 dimana lebih catat koreksi nilai bertambah Tanah. Satuan Kerja telah melakukan koreksi audited dengan melakukan koreksi nilai berkurang atas kelebihan catat tersebut sebesar Rp862.500.000,00.

b) Terdapat kesalahan pencatatan nilai koreksi LKPP 2021 dimana kurang catat koreksi nilai berkurang Tanah. Satuan Kerja telah melakukan koreksi audited dengan melakukan koreksi nilai berkurang sebesar Rp25.100.000,00.

Peralatan dan Mesin
Rp4.462.524.660.536,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.462.524.660.536,00 dan Rp3.808.622.153.369,00, terjadi kenaikan sebesar Rp653.902.507.167,00 atau 17,17%.

Perbandingan rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	4.234.632.303.694,00	3.588.138.755.701,00	646.493.547.993,00
2	005.02	Kepaniteraan	25.800.025.149,00	24.046.869.067,00	1.753.156.082,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	24.401.336.062,00	24.263.382.962,00	137.953.100,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	15.389.507.853,00	15.858.489.294,00	(468.981.441,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	12.719.028.641,00	14.064.590.210,00	(1.345.561.569,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	134.327.244.318,00	127.236.706.710,00	7.090.537.608,00
7	005.07	Badan Pengawasan	15.255.214.819,00	15.013.359.425,00	241.855.394,00
Jumlah			**4.462.524.660.536,00**	**3.808.622.153.369,00**	**653.902.507.167,00**

Mutasi transaksi Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 45. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**3.808.622.153.369,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	19.345.965.263,00
101	Pembelian	484.092.090.590,00
102	Transfer Masuk	309.660.079.408,00
103	Hibah Masuk	27.770.975.527,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	27.717.521.961,00
106	Pembatalan Penghapusan	823.745.191,00
107	Reklasifikasi Masuk	25.521.551.905,00
112	Perolehan Lainnya	283.085.676.994,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	201.861.600,00
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	399.900.000,00
193	Batal Transfer Keluar	2.843.040.000,00
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	713.108.510,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	85.924.362,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	24.243.940.627,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.779.515.122,00
208	Pengembangan Melalui KDP	24.219.084.949,00
209	Koreksi Manual	680.000,00
214	Koreksi Susulan	41.171.785,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.834.712.672,00
-	Penyesuaian Jurnal Pasca Migrasi karena Perbedaan Mapping Kode Barang VS Akun terkait BMN	5.453.607.750,00
Jumlah Mutasi Tambah :		**1.244.834.154.216,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(9.332.502.251,00)
301	Penghapusan	(1.803.075.278,00)
302	Transfer Keluar	(312.503.119.408,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(25.161.718.665,00)
305	Koreksi Pencatatan	(201.347.529.605,00)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(229.000.000,00)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(41.769.500,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(40.512.932.342,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(590.931.647.049,00)**
Jumlah Mutasi		**653.902.507.167,00**
Saldo Per 31 Desember 2022		**4.462.524.660.536,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		**(3.377.493.230.256,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		**1.085.031.430.280,00**

Terdapat koreksi *audited* atas Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp2.251.181.946,00 pada 951 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi nilai bertambah maupun berkurang Peralatan dan Mesin berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada 12 Satuan Kerja sebesar (Rp369.947.907,00). Telah dilakukan koreksi nilai bertambah maupun berkurang pada modul Aset Tetap periode 14 Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Koreksi Nilai Bertambah	Koreksi Nilai Berkurang	Koreksi Pencatatan	Penggunaan Kembali	Total
1	401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	8.164.117,00	(16.328.234,00)			(8.164.117,00)
2	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO		(59.866.590,00)	(11.800.000,00)		(71.666.590,00)
3	098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO		(1.492.000,00)			(1.492.000,00)
4	547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG			(280.950.000,00)	1.500.000,00	(279.450.000,00)
5	632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA		(900,00)			(900,00)
6	098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA			(9.191.000,00)		(9.191.000,00)
7	098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	4.540.800,00	(5.556.200,00)			(1.015.400,00)
8	614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	4.729.800,00	(2.667.700,00)			2.062.100,00
9	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN		(70.000,00)			(70.000,00)
10	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR		(2.520.000,00)			(2.520.000,00)
11	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	1.560.000,00				1.560.000,00
12	400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR			(46.832.800,00)	46.832.800,00	-
Total							**(369.947.907,00)**

2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada 7 Satuan Kerja sebesar Rp700.921.110,00 yang belum melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan *Unaudited,* dengan rincian sebagai berikut:.

No	Kode Satker	Nama Satker	Perolehan Normalisasi	Total Nilai Koreksi
1	097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	1.500.000,00	1.500.000,00
2	401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	11.277.000,00	11.277.000,00
3	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	330.468.049,00	330.468.049,00
4	578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	316.163.561,00	316.163.561,00
5	402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	23.175.000,00	23.175.000,00
6	099401	PENGADILAN NEGERI POSO	2.200.000,00	2.200.000,00
7	670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	16.137.500,00	16.137.500,00
Total				700.921.110,00

3. Terdapat koreksi Audited peralatan dan mesin yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada 932 Satuan Kerja sebesar Rp1.920.208.743,00. Telah dilakukan perbaikan pada modul Aset Tetap pada periode pelaporan *Audited* Tahun Anggaran2022. Rincian penjelasan koreksi *Audited* Peralatan dan Mesin terlampir.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp10.461.107.316.949,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp10.461.107.316.949,00 dan Rp9.582.390.434.389,00, terjadi kenaikan sebesar Rp878.716.882.560,00 atau 9,17%.

Perbandingan rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Perbandingan Rincian Gedung dan Bangunan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	10.232.025.158.645,00	9.363.034.594.607,00	868.990.564.038,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	22.975.619.434,00	17.068.042.734,00	5.907.576.700,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	714.703.416,00	714.703.416,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	205.391.835.454,00	201.573.093.632,00	3.818.741.822,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**10.461.107.316.949,00**	**9.582.390.434.389,00**	**878.716.882.560,00**

Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 47. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**9.582.390.434.389,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	63.820.138.212,00
101	Pembelian	32.988.267.001,00
102	Transfer Masuk	76.861.540.996,00
103	Hibah Masuk	38.185.884.033,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	500.035.970.295,00
106	Pembatalan Penghapusan	463.702.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	72.501.639.503,00
111	Pertukaran	230.629.000,00
112	Perolehan Lainnya	40.246.171.338,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.620.291.390,00
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	598.331.000,00
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	95.507.506,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	11.108.142.910,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	173.355.511.131,00
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	6.348.283.254,00
208	Pengembangan Melalui KDP	305.827.664.944,00
209	Koreksi Manual	224.763.994,00
214	Koreksi Susulan	1.926.256.792,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3.892.798.500,00
Jumlah Mutasi Tambah :		**1.330.331.493.799,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(42.574.241.150,00)
301	Penghapusan	(3.094.150.220,00)
302	Transfer Keluar	(77.196.015.996,00)
303	Hibah Keluar	(930.813.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(71.238.258.917,00)
305	Koreksi Pencatatan	(224.705.924.956,00)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(24.120.500,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(26.351.242.800,00)
-	Penyesuaian Jurnal Pasca Migrasi karena Perbedaan Mapping Kode Barang VS Akun terkait BMN	(5.499.843.700,00)
Jumlah Mutasi Kurang :		**(451.614.611.239,00)**
Jumlah Mutasi		**878.716.882.560,00**
Saldo Per 31 Desember 2022		**10.461.107.316.949,00**
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		**(1.905.558.878.012,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		**8.555.548.438.937,00**

Terdapat koreksi *audited* atas Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp9.746.752.519,00 pada 20 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi nilai bertambah maupun berkurang Gedung dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada 6 Satuan Kerja sebesar Rp6.716.522.065,00. Telah dilakukan koreksi nilai bertambah maupun berkurang pada modul Aset Tetap periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.

No.	Kode Satker	Nama Satker	Koreksi Nilai Bertambah	Koreksi Nilai Berkurang	Total
1	401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	1.637.322.882,00	(1.645.487.000,00)	(8.164.118,00)
2	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	8.587.884.183,00	(1.418.118.000,00)	7.169.766.183,00
3	098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	104.662.000,00	(609.037.000,00)	(504.375.000,00)
4	402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	158.377.000,00		158.377.000,00
5	099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	30.000.000,00		30.000.000,00
6	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN		(129.082.000,00)	(129.082.000,00)
Total					6.716.522.065,00

2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada 2 Satuan Kerja sebesar Rp140.957.000,00. Yang belum melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan Unaudited.

No	Kode Satker	Nama Satker	Perolehan Normalisasi	Penghentian Penggunaan	Total Nilai Koreksi
1	099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	123.000.000,00		123.000.000,00
2	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	17.957.000,00		17.957.000,00
Total					140.957.000,00

3. Terdapat koreksi Audited peralatan dan mesin yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada 12 Satuan Kerja 2.889.273.454,00. Telah dilakukan perbaikan pada modul Aset Tetap periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.

No.	Kode Satker	Nama Satker	Koreksi Nilai Bertambah	Koreksi Nilai Berkurang	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Penghapusan dari sistem	Total
1	099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM		(145.688.968,00)			(145.688.968,00)
2	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU			2.004.048.834,00		2.004.048.834,00
3	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	37.640.100,00				37.640.100,00
4	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA		(23.635.061,03)			(23.635.061,00)
5	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA		(2.535.000,00)			(2.535.000,00)
6	526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	39.655.000,00				39.655.000,00
7	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	294.460.174,00				294.460.174,00
8	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	105.063.000,00				105.063.000,00
9	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	49.000.000,00				49.000.000,00
10	098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	49.994.400,00				49.994.400,00
11	547699	PENGADILAN AGAMA BATAM				571.224.000,00	571.224.000,00
12	097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO		(28,00)			(28,00)
13	401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE		(89.952.997,00)			(89.952.997,00)
Total							2.889.273.454,00

Terdapat kurang catat Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun (00501.1400.401918) sebesar Rp.31.727.099.924,00 yang berasal dari transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak dapat dilakukan koreksi karena sudah dilakukan koreksi pada Tahun Anggaran 2023.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp262.312.858.137,00

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp262.312.858.137,00 dan Rp258.176.969.852,00, terjadi kenaikan sebesar Rp4.135.888.285,00 atau 1,60%.

Perbandingan rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Perbandingan Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	221.266.221.800,00	217.394.693.338,00	3.871.528.462,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	245.290.636,00	245.290.636,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	40.801.345.701,00	40.536.985.878,00	264.359.823,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**262.312.858.137,00**	**258.176.969.852,00**	**4.135.888.285,00**

Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 49. Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**258.176.969.852,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	37.384.050,00
101	Pembelian	1.739.444.302,00
103	Hibah Masuk	655.896.934,00
106	Pembatalan Penghapusan	114.947.500,00
112	Perolehan Lainnya	2.974.681.578,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	182.050.915,00
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	81.737.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	229.618.263,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	271.641.400,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	657.876.500,00
Jumlah Mutasi Tambah		**6.945.278.442,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(17.500.000,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(553.196.850,00)
305	Koreksi Pencatatan	(1.689.253.807,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(549.439.500,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(2.809.390.157,00)**
Jumlah Mutasi		**4.135.888.285,00**
Saldo Per 31 Desember 2022		**262.312.858.137,00**
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		**(114.518.871.690,00)**
Nilai Buku per 31 Desember 2022		**147.793.986.447,00**

Terdapat koreksi *Audited* atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jalan khusus komplek bertambah sebesar Rp81.737.000,00 pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (00501.1000.578839), yang disebabkan tidak lanjut normalisasi pada To Do List MONSAKTI.

Aset Tetap Lainnya Rp52.090.395.576,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp52.090.395.576,00 dan Rp68.004.058.842,00, terjadi penurunan sebesar Rp15.913.663.266,00 atau 23,40%.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Perbandingan Rincian Aset Tetap Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	50.385.026.060,00	66.006.647.076,00	(15.621.621.016,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	128.459.011,00	128.459.011,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	15.000.000,00	307.042.250,00	(292.042.250,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	1.026.506.820,00	1.026.506.820,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	535.403.685,00	535.403.685,00	0,00
Jumlah			**52.090.395.576,00**	**68.004.058.842,00**	**(15.913.663.266,00)**

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 51. Mutasi Transaksi Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**68.050.294.792,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	4.400.000,00
101	Pembelian	6.271.788.808,00
102	Transfer Masuk	555.399.247,00
103	Hibah Masuk	749.154.027,00
106	Pembatalan Penghapusan	23.670.320,00
107	Reklasifikasi Masuk	32.645.000,00
112	Perolehan Lainnya	5.844.533.989,00
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	605.147.255,00
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	4.597.750,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	635.000,00
955	Perolehan Lainnya Aset Tetap Renovasi	143.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**14.234.971.396,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(175.311.362,00)
301	Penghapusan	(292.042.250,00)
302	Transfer Keluar	(8.895.855.454,00)
303	Hibah Keluar	(1.416.203.925,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(103.369.510,00)
305	Koreksi Pencatatan	(18.539.316.111,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(772.772.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(30.194.870.612,00)**
Jumlah Mutasi		**(15.959.899.216,00)**
Saldo Per 31 Desember 2022		**52.090.395.576,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		**(568.846.313,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		**51.521.549.263,00**

Terdapat koreksi audited atas Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp276.170.788,00 pada 7 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi nilai berkurang Gedung dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tebo sebesar Rp385.362,00. Telah dilakukan koreksi nilai berkurang pada modul Aset Tetap periode 14 Tahun 2022.
2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada 5 Satuan Kerja sebesar Rp4.597.750,00. Yang telah melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.

No	Kode Satker	Nama Satker	Perolehan Normalisasi	Total Nilai Koreksi
1	097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	9.000,00	9.000,00
2	400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	750.000,00	750.000,00
3	403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	3.750.000,00	3.750.000,00
4	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	50.000,00	50.000,00
5	099816	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	38.750,00	38.750,00
Total				4.597.750,00

3. Terdapat koreksi Audited peralatan dan mesin yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh Sebesar Rp271.958.400,00 dikarenakan Koreksi untuk mencatat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang direalisasikan untuk pembuatan partisi Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh yang memenuhi batas minimum kapitalisasi.

Rincian Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp656.303.651.907,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp656.303.651.907,00 dan Rp617.396.614.572,00, terjadi kenaikan sebesar Rp38.907.037.335,00 atau 6,30%, diantaranya pembangunan Gedung dan Bangunan tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal Neraca.

Perbandingan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	656.303.651.907,00	617.396.614.572,00	38.907.037.335,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**656.303.651.907,00**	**617.396.614.572,00**	**38.907.037.335,00**

Perbandingan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Perbandingan Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Wilayah

(Dalam Rupiah)

Kode Wilayah	Koordinator Wilayah	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
0199	BUA	36.460.994.468,00	12.028.411.350,00	24.432.583.118,00
0100	Korwil DKI Jakarta	0,00	113.358.912.890,00	(113.358.912.890,00)
0200	Korwil Jabar	634.971.500,00	0,00	634.971.500,00
0300	Korwil Jateng	2.376.813.247,00	5.642.394.497,00	(3.265.581.250,00)
0400	Korwil DIY	0,00	0,00	0,00
0500	Korwil Jatim	0,00	14.545.507.768,00	(14.545.507.768,00)
0600	Korwil Aceh	100.010.540.501,00	53.556.436.372,00	46.454.104.129,00
0700	Korwil Sumut	21.332.158.482,00	0,00	21.332.158.482,00
0800	Korwil Sumbar	51.017.533.238,00	44.089.669.344,00	6.927.863.894,00
0900	Korwil Riau	0,00	28.474.706.172,00	(28.474.706.172,00)
1000	Korwil Jambi	0,00	0,00	0,00
1100	Korwil Sumsel	66.809.239.025,00	42.039.741.421,00	24.769.497.604,00
1200	Korwil Lampung	24.475.375.304,00	30.804.665.952,00	(6.329.290.648,00)
1300	Korwil Kalbar	16.264.863.119,00	0,00	16.264.863.119,00
1400	Korwil Kalteng	113.386.385.921,00	30.678.816.633,00	82.707.569.288,00
1500	Korwil Kalsel	7.876.835.650,00	33.225.612.827,00	(25.348.777.177,00)
1600	Korwil Kaltim	4.986.852.314,00	21.222.318.445,00	(16.235.466.131,00)
1700	Korwil Sultra	10.056.323.327,00	0,00	10.056.323.327,00
1800	Korwil Sulteng	20.802.954.529,00	0,00	20.802.954.529,00
1900	Korwil Sulsel	9.918.446.529,00	15.993.568.749,00	(6.075.122.220,00)
2000	Korwil Sultra	57.893.691.307,00	54.230.514.837,00	3.663.176.470,00
2100	Korwil Maluku	11.615.316.698,00	51.252.973.237,00	(39.637.656.539,00)
2200	Korwil Bali	0,00	0,00	0,00
2300	Korwil NTB	0,00	0,00	0,00
2400	Korwil NTT	0,00	0,00	0,00
2500	Korwil Papua	0,00	0,00	0,00
2600	Korwil Bengkulu	31.234.360.781,00	0,00	31.234.360.781,00
2800	Korwil Malut	23.217.805.999,00	0,00	23.217.805.999,00
2900	Korwil Banten	0,00	0,00	0,00
3000	Korwil Babel	0,00	47.518.877.596,00	(47.518.877.596,00)
3100	Korwil Gorontalo	25.029.747.598,00	18.733.486.482,00	6.296.261.116,00
3200	Korwil Kepri	0,00	0,00	0,00
3300	Korwil Pabar	14.412.561.440,00	0,00	14.412.561.440,00
3400	Korwil Sulbar	6.489.880.930,00	0,00	6.489.880.930,00
3500	Korwil Kaltara	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**656.303.651.907,00**	**617.396.614.572,00**	**38.907.037.335,00**

Mutasi transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 54. Mutasi Transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**617.396.614.572,00**
Mutasi Tambah :		
501	Saldo Awal KDP	22.658.798.266,00
502	Perolehan/Penambahan KDP	258.341.073.280,00
503	Pengembangan KDP	692.009.459.651,00
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	132.442.463.821,00
508	Hibah Masuk KDP	169.250.000,00
510	Perolehan Lainnya KDP	140.493.641.528,00
514	Reklasifikasi Masuk KDP	4.175.414.220,00
597	Perolehan Tinjut Normalisasi KDP	5.642.394.497,00
Jumlah Mutasi Tambah		**1.255.932.495.263,00**
Mutasi Kurang :		
505	Penghapusan/Penghentian KDP	(73.417.633.497,00)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(4.175.414.220,00)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(192.949.525.025,00)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(16.001.263.648,00)
579	Normalisasi KDP	(5.642.394.497,00)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(924.839.227.041,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.217.025.457.928,00)**
Jumlah Mutasi		**38.907.037.335,00**
Saldo per 31 Desember 2022		**656.303.651.907,00**

Terdapat koreksi audited atas Konstruksi Dalam Pengerjaan berkurang sebesar Rp2.793.848.834,00 pada 2 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi *audited* pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau (00501.1400.401920) berkurang sebesar Rp2.004.048.834,00 yang merupakan pendefinitifan KDP menjadi Gedung dan Bangunan.
2. Terdapat koreksi *audited* pada Satuan Kerja Pengadilan Militer I-01 di Banda Aceh (00501.0600.663182) berkurang sebesar Rp789.800.000,00 yang merupakan pendefinitifan KDP menjadi Peralatan dan Mesin.

Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun (00501.1400.401918) terdapat lebih catat KDP sebesar Rp31.727.099.924,00 yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak dapat dilakukan koreksi karena sudah dilakukan koreksi pada Tahun Anggaran 2023.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp5.398.139.826.271,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp5.398.139.826.271,00) dan (Rp4.659.713.856.206,00), terjadi kenaikan sebesar Rp738.425.970.065,00 atau 15,85%.

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.462.524.660.536,00	(3.377.493.230.256,00)	1.085.031.430.280,00
2	Gedung dan Bangunan	10.461.107.316.949,00	(1.905.558.878.012,00)	8.555.548.438.937,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	262.312.858.137,00	(114.518.871.690,00)	147.793.986.447,00
4	Aset Tetap Lainnya	52.090.395.576,00	(568.846.313,00)	51.521.549.263,00
Jumlah		**15.238.035.231.198,00**	**(5.398.139.826.271,00)**	**9.839.895.404.927,00**

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 56. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(48.752.226,00)	(51.752.226,00)	3.000.000,00
Jumlah Piutang Jk. Panjang		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Komposisi Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik

Komposisi Piutang Jangka Panjang

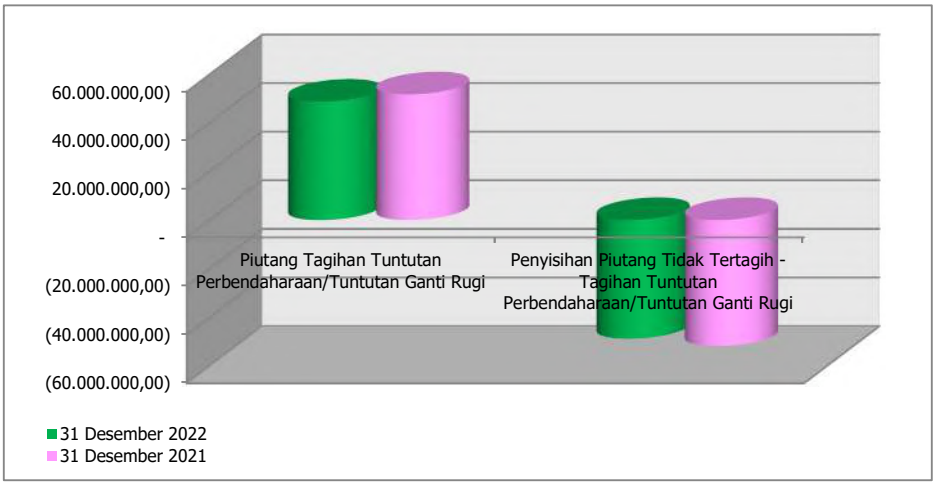

Perbandingan rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Perbandingan Rincian Piutang Jangka Panjang Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	0,00	0,00	0,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp48.752.226,00

C.3.1. Piutang Tagihan TP/TGR

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaianya.

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp48.752.226,00 dan Rp51.752.226,00. Terdapat penurunan sebesar Rp3.000.000,00 dikarenakan adanya pelunasan TGR atas nama Martini Soegito (PN. Bogor).

Perbandingan rincian saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Perbandingan Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**48.752.226,00**	**51.752.226,00**	**(3.000.000,00)**

Berikut disajikan rincian perhitungan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur:

Tabel 59. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing Debitur

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Tagihan TP/TGR
1	00501 BUA	2300	417844	PN Sumbawa Besar	I Made Subagyo W	Macet	36.252.226,00
2		2900	098281	PN Pandeglang	Syamsudin UP	Macet	12.500.000,00
Jumlah							**48.752.226,00**

Berdasarkan data diatas, terdapat 4 Tuntutan Ganti Rugi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Syamsudin UP, S.H.,
   - Telah terbit Surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banten Nomor PSBDT-01/PUPNC.14.01/2018 tanggal 23 April 2018, serta telah mengajukan permintaan untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 349/KMA/KU.02/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 akan tetapi sampai dengan saat ini belum terbit rekomendasinya;
   - Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara atas nama Sjamsudin UP, S.H.,M.H. kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan Nomor 691A/SEK/KU.02/3/2022 tanggal 7 Maret 2022;
   - Proses Penggalian Data dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dengan Majelis Tuntutan Perbandaharaan BPK pada tanggal 30 November 2022;
2. I Made Subagio Wiryo
   - Kerugian negara senilai Rp64.973.646,78 telah diangsur sebesar Rp6.746.000,00, sehingga sisa kerugian negara yang dilimpahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang NTB adalah sebesar Rp58.227.646,78, dan telah dicantumkan dalam Surat Kesanggupan Membayar tanggal 4 Januari 2016 (terlampir);
   - Sekretaris Mahkamah Agung akan memerintahkan Kepala Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk meminta PUPN Cabang NTB menerbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atas CV. WIDYA KENCANA. Adapun CV. DWI TUNGGAL, dan CV. ANA JAYA telah diterbitkan PSBDT (terlampir), sedangkan CV. TANJUNG ALANG, dan CV. AS.

SYIFA telah melakukan pelunasan piutang (terlampir), dengan rincian sebagai berikut:

Debitur	Sisa Kerugian	Angsuran	Sisa Kerugian
CV. TANJUNG ALANG	15.822.403,00	15.822.403,00	0,00
CV. WIDYA KENCANA	6.475.000,00	0,00	6.475.000,00
CV. AS. SYIFA	3.754.850,00	3.754.850,00	0,00
CV. DWI TUNGGAL	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
CV. ANA JAYA	27.875.393,78	2.398.168,00	25.477.225,78
Total	**58.227.646,78**	**21.975.421,00**	**36.252.225,78**

- Pengadilan Negeri Sumbawa telah menyerahkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atas CV. Widya Kencana dengan Nomor PSBDT-17/PUPNC21.02/2016;
- Setelah seluruh PSBDT diperoleh, Sekretaris Mahkamah Agung akan mengajukan Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penghapusan secara Bersyarat Piutang Negara kepada BPK;
- Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara secara Bersyarat ke Ketua BPK atas nama I Made Subagio Wiryo pada PN Sumbawa Besar, berdasar Surat Sekretaris MA Nomor 2631/SEK/KU.02/11/2022 tanggal 15 November 2022;
- Proses Penggalian Data dan Informasi dalam rangka Pembahasan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara dengan Majelis Tuntutan Perbandaharaan BPK pada tanggal 30 November 2022.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

(Rp48.752.226,00)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar(Rp48.752.226,00) dan (Rp51.752.226,00).

Perbandingan rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 60. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	48.752.226,00	51.752.226,00	(3.000.000,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**48.752.226,00**	**51.752.226,00**	**(3.000.000,00)**

Berikut disajikan rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur:

Tabel 61. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nama Debitur	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Tagihan TP/TGR	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	00501 BUA	2300	417844	PN Sumbawa Besar	I Made Subagyo W	Macet	36.252.226,00	100,00%	(36.252.226,00)
2		2900	098281	PN Pandeglang	Syamsudin UP	Macet	12.500.000,00	100,00%	(12.500.000,00)
Jumlah							**48.752.226,00**		**(48.752.226)**

Aset Lainnya Rp33.585.865.770,0

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp33.585.865.770,00 dan Rp37.075.166.516,00, terjadi penurunan sebesar Rp3.489.300.746,00 atau 9,41%.

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 62. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Aset Tak Berwujud	66.705.847.914,00	65.269.905.024,00	1.435.942.890,00
2	Aset Lain-Lain	147.118.278.231,00	159.843.755.689,00	(12.725.477.458,00)
Jumlah		**213.824.126.145,00**	**225.113.660.713,00**	**(11.289.534.568,00)**
3	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	(180.238.260.375,00)	(188.038.494.197,00)	7.800.233.822,00
Jumlah Aset Lainnya		**33.585.865.770,00**	**37.075.166.516,00**	**(3.489.300.746,00)**

Komposisi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik Komposisi Aset Lainnya

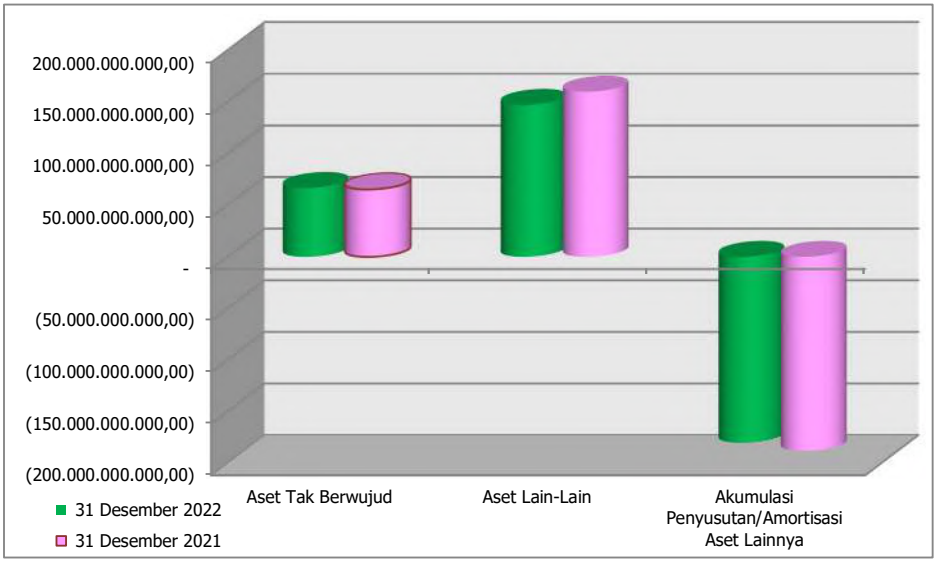

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	30.808.472.111,00	33.697.042.900,00	(2.888.570.789,00)
2	005.02	Kepaniteraan	58.292.687,00	78.441.875,00	(20.149.188,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	93.680.812,00	200.326.640,00	(106.645.828,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	-
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	71.250.000,00	101.250.000,00	(30.000.000,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	2.554.170.160,00	2.734.090.550,00	(179.920.390,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	264.014.551,00	(264.014.551,00)
Jumlah			**33.585.865.770,00**	**37.075.166.516,00**	**(3.489.300.746,00)**

Aset Tak Berwujud Rp66.705.847.914,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp66.705.847.914,00 dan Rp65.269.905.024,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.435.942.890,00 atau 2,20%.

Perbandingan rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	55.274.816.789,00	54.040.257.924,00	1.234.558.865,00
2	005.02	Kepaniteraan	170.257.000,00	150.332.500,00	19.924.500,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	2.545.455.294,00	2.545.455.294,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	113.285.000,00	113.285.000,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	1.533.280.130,00	1.533.280.130,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	3.814.420.521,00	3.632.960.996,00	181.459.525,00
7	005.07	Badan Pengawasan	3.254.333.180,00	3.254.333.180,00	0,00
Jumlah			**66.705.847.914,00**	**65.269.905.024,00**	**1.435.942.890,00**

Mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 65. Mutasi Transaksi Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**65.269.905.024,00**
Mutasi Tambah :		
100	Saldo Awal	743.898.650,00
101	Pembelian	1.129.816.500,00
103	Hibah Masuk	49.692.500,00
106	Pembatalan Penghapusan	47.190.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	34.650.000,00
112	Perolehan Lainnya	202.400.000,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	206.864.684,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	219.320.625,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	51.865.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**2.685.697.959,00**
Mutasi Kurang :		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.552.159,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(34.650.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(108.780.000,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1.104.772.910,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(1.249.755.069,00)**
Jumlah Mutasi		**1.435.942.890,00**
Saldo per 31 Desember 2022		**66.705.847.914,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		**(46.192.270.449,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		**20.513.577.465,00**

Terdapat koreksi audited atas Aset Tak Berwujud berkurang sebesar Rp22.401.525,00 pada 2 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (00501.0100.400214) terdapat barang hasil Kemitraan BTN berupa Software ATP belum didaftarkan sebagai barang hibah maupun dicatat sebagai BMN dengan BAST No. 96/S/JKK-UT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp 10.327.500,00 yang diinput sebagai saldo awal pada periode pelaporan *Audited*.
2. Pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya (00501.1400.400358) Terdapat 9 (Sembilan) NUP software senilai Rp32.729.025,00 yang sudah usang, sehingga dilakukan koreksi dengan melakukan penghentian dari penggunaan.

Aset Lain-Lain Rp147.118.278.231,00

C.4.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp147.118.278.231,00 dan Rp159.843.755.689,00, terjadi penurunan sebesar Rp12.725.477.458,00 atau 7,96%.

Perbandingan rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 66. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	145.364.364.071,00	158.165.584.539,00	(12.801.220.468,00)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1.753.914.160,00	1.678.171.150,00	75.743.010,00
Jumlah		**147.118.278.231,00**	**159.843.755.689,00**	**(12.725.477.458,00)**

Perbandingan rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 67. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	145.015.661.137,00	156.918.698.629,00	(11.903.037.492,00)
2	005.02	Kepaniteraan	253.331.868,00	0,00	253.331.868,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	110.384.000,00	818.817.302,00	(708.433.302,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	193.830.000,00	255.990.000,00	(62.160.000,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	1.276.671.226,00	685.543.426,00	591.127.800,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	268.400.000,00	1.164.706.332,00	(896.306.332,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**147.118.278.231,00**	**159.843.755.689,00**	**(12.725.477.458)**

Mutasi transaksi Aset Lain-Lain pada 31 Desember 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 68. Mutasi Transaksi Aset Lain-Lain

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)		**159.843.755.689,00**
Mutasi Tambah :		
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset	69.665.907.552,00
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.898.764.062,00
Jumlah Mutasi Tambah		**73.564.671.614,00**
Mutasi Kurang :		
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(7.437.252.672,00)
301	Penghapusan	(1.345.895.025,00)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(77.507.001.375,00)
Jumlah Mutasi Kurang		**(86.290.149.072,00)**
Jumlah Mutasi		**(12.725.477.458,00)**
Saldo Per 31 Desember 2022		**147.118.278.231,00**
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022		**(134.045.989.926,00)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2022		**13.072.288.305,00**

Terdapat koreksi audited atas Aset Lain-Lain bertambah sebesar Rp699.677.912,00 pada 6 Satuan Kerja, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat koreksi nilai berkurang Aset Lain-Lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 pada 2 Satuan Kerja yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (00501.1200.547678) sebesar Rp1.500.000,00, dan Pengadilan Negeri Arga Makmur (00501.2600.400239) sebesar Rp46.832.800,00 telah dilakukan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap pada periode pelaporan *Audited*.
2. Terdapat tidak lanjut atas To Do List pada MONSAKTI pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pagar Alam (00501.1100.672969) sebesar Rp457.374.000,00 yang telah melakukan tindak lanjut normalisasi pada periode pelaporan *Audited* Tahun 2022.
3. Terdapat koreksi *Audited* Aset Lain-Lain yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) pada 2 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	32.729.025,00	Koreksi atas 9 (Sembilan) NUP software senilai Rp32.729.025,00 yang sudah tidak terpakai/usang Telah dilakukan penghentian penggunaan atas aset tersebut.
2			245.057.687,00	Koreksi atas BMN Peralatan dan Mesin dalam kondisi Rusak Berat sesuai Berita Acara Perubahan Kondisi BMN No. W16-U/2669/PL.05/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp245.057.687,00.
3	578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	12.850.000,00	Koreksi untuk mencatat reklasifikasi nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lain-Lain atas dua unit printer (NUP 3 dan NUP 9) serta dua unit AC Split (NUP 8 dan NUP 9) sudah tidak digunakan karena rusak
Jumlah			**290.636.712,00**	

Rincian Aset Lain-lain, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku per 31 Desember 2022 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp180.238.260.375,00)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp180.238.260.375,00) dan (Rp188.038.494.197,00), terjadi penurunan sebesar Rp7.800.233.822,00 atau 4,15%.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 69. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud			
	Software	45.585.850.298,00	(42.092.126.197,00)	3.493.724.101,00
	Lisensi	19.315.129.016,00	(4.100.144.252,00)	15.214.984.764,00
	Hasil Kajian/Penelitian	1.804.868.600,00	0,00	1.804.868.600,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	**66.705.847.914,00**	**(46.192.270.449,00)**	**20.513.577.465,00**
2	Aset Lain-Lain			
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	145.364.364.071,00	(132.294.325.766,00)	13.070.038.305,00
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.753.914.160,00	(1.751.664.160,00)	2.250.000,00
	Jumlah Aset Lain-lain	**147.118.278.231,00**	**(134.045.989.926,00)**	**13.072.288.305,00**
Jumlah		**213.824.126.145,00**	**(180.238.260.375,00)**	**33.585.865.770,00**

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Rp46.078.179.636,00,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp46.078.179.636,00,00 dan Rp28.919.826.857,00, terjadi kenaikan sebesar Rp17.158.352.779,00 atau 59,33%.

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 70. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	42.970.421.804,00	25.691.256.213,00	17.279.165.591,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.831.281.278,00	3.076.249.032,00	(244.967.754,00)
3	Uang Muka dari KPPN	271.770.124,00	151.248.877,00	120.521.247,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.706.430,00	1.072.735,00	3.633.695,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**46.078.179.636,00**	**28.919.826.857,00**	**17.158.352.779,00**

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dalam grafik dibawah ini:

Grafik

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek

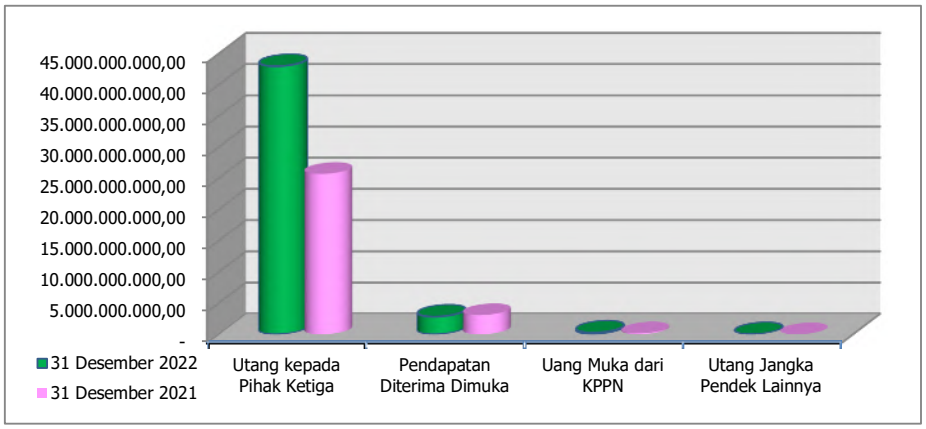

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 71. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	41.540.061.126,00	24.926.174.711,00	16.613.886.415,00
2	005.02	Kepaniteraan	14.893.573,00	122.575.875,00	(107.682.302,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	266.633.335,00	672.970.491,00	(406.337.156,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	4.061.437.466,00	3.002.483.240,00	1.058.954.226,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	1.412.880,00	22.695.419,00	(21.282.539,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	156.133.064,00	(156.133.064,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	193.741.256,00	16.794.057,00	176.947.199,00
Jumlah			**46.078.179.636,00**	**28.919.826.857,00**	**17.158.352.779,00**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp42.970.421.804,00

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp42.970.421.804,00 dan Rp25.691.256.213,00, terjadi kenaikan sebesar Rp17.279.165.591,00 atau 67,26%.

Perbandingan rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	38.436.326.174,00	21.698.234.067,00	16.738.092.107,00
2	005.02	Kepaniteraan	14.893.573,00	122.575.875,00	(107.682.302,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	266.633.335,00	672.340.491,00	(405.707.156,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	4.057.827.466,00	3.002.483.240,00	1.055.344.226,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	1.000.000,00	22.695.419,00	(21.695.419,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	156.133.064,00	(156.133.064,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	193.741.256,00	16.794.057,00	176.947.199,00
Jumlah			**42.970.421.804,00**	**25.691.256.213,00**	**17.279.165.591,00**

Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Perbandingan Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	8.718.469.347,00	9.022.237.836,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	34.239.146.457,00	16.667.503.377,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	12.805.000,00	1.515.000,00
Dana Pihak Ketiga	1.000,00	0,00
Jumlah	**42.970.421.804,00**	**25.691.256.213,00**

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahunan Tahun 2022 berasal dari:

- Saldo akrual Tahun Anggaran sebelumnya yang belum dilakukan jurnal balik sampai dengan periode 31 Desember Tahun 2022;
- Transaksi belanja pegawai yang belum dibayarkan ke pegawai dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi sampai dengan periode 31 Desember 2022;
- Dana pihak ketiga berasal dari jurnal yang tidak sesuai dalam rangka untuk mengeliminasi kas di bendahara penerimaan yang memiliki saldo kredit akibat jurnal otomatis dimana seharusnya terbentuk pada saaat input kas masuk pada Modul Bendahara Penerimaan tidak terposting (sumber informasi dari KPPN Kediri).
- Terdapat koreksi lebih catat (overstated) maupun kurang catat (understated) akrual Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Tahun Anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Nilai
005.01.307729	Pengadillan Agama Bau-Bau	Jurnal Eliminasi Perbaikan Saldo Akrual Akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	6.173.920,00
005.01.4663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Koreksi Jurnal Akhir tahun terkait tunggakan biaya Mutasi tenaga teknis tahun 2021.	(15.435.600,00)
005.01.400678	Pengadilan Agama Sumedang	Koreksi Jurnal Akrual Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas kekurangan gaji pegawai bulan April Tahun 2021 s.d. Desem ber 2021 yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023	(909.810,00)
Jumlah			**(10.171.490,00)**

Terdapat koreksi *Audited* akun Utang Kepada Pihak Ketiga bertambah sebesar Rp915.519.041,00 pada 13 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1	098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	(14.510.000,00)	Koreksi kesalahan input jurnal balik (20 Januari 2022) atas akrual Belanja Belanja Uang Makan PNS TA 2021
2	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	(50.000.000,00)	Jurnal balik atas jurnal koreksi belanja barang yang masih harus dibayar terkait belanja gaji hakim adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem dan telah diperbaiki oleh sistem.
3	099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	(76.000.000,00)	Jurnal balik atas jurnal koreksi belanja barang yang masih harus dibayar terkait belanja gaji hakim adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem dan telah diperbaiki oleh sistem.
4	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	(140.775.000,00)	Koreksi kesalahan pembentukan jurnal otomatis atas belanja Gaji Hakim AdHoc pada saat pencatatan SPM Nomor 00107T. (Perbaikan dilakukan oleh sistem)
5	400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	(1.640.000,00)	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual belanja pegawai masih harus dibayar atas uang makan, beberapa orang pegawai yang sudah dibayarkan di satuan kerja lama, seharusnya sebesar Rp51.540.000
6			(1.500,00)	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual belanja barang masih harus dibayar atas langganan telepon sebesar Rp1.500
7	400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	2.122.974,00	Koreksi atas Kekurangan gaji Pegawai bulan April 2021 s.d. bulan Februari 2023. Realisasi atas kekurangan belanja pegawai tersebut pada tahun 2023
8	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	(80,00)	Koreksi kurang catat atas jurnal balik langganan air.
9	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	2.683.800,00	Koreksi atas Tagihan Air sebesar bulan Desember 2022 belum diakrualkan sebagai hutang pihak ketiga sebesar Rp2.683.800,00 (Koreksi Hutang Pihak Ketiga).
10			185.000,00	Koreksi atas Kekurangan bayar uang makan 1 orang pegawai pada bulan Desember 2022 Rp185.000,00, yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023.
11	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	(170.000,00)	Koreksi kesalahan input jurnal balik (3 Januari 2022) atas akrual Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TA 2021
12	400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	14.069.681,00	Jurnal Akrual GLP atas belanja pengiriman pos pusat Tahun 2022 yang baru direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023.
13	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	1.179.554.166,00	Koreksi kurang catat utang pihak ketiga berupa tunggakan biaya pindah tenaga teknis tahun 2022
Jumlah			**915.519.041,00**	

Pendapatan Diterima Dimuka Rp2.831.281.278,00

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.831.281.278,00 dan Rp3.076.249.032,00, terjadi penurunan sebesar Rp244.967.754,00 atau 7,96%.

Perbandingan rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 74. Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	2.831.281.278,00	3.076.249.032,00	(244.967.754,00)
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
8	005.55	Konsolidasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**2.831.281.278,00**	**3.076.249.032,00**	**(244.967.754,00)**

Terdapat koreksi *Audited* pada Pendapatan Diterima Dimuka bertambah sebesar Rp395.153.754,00 pada 35 Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Nilai Koreksi	Keterangan
1	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	101.083.140,00	Koreksi jurnal akurat atas Sewa ruangan Kantor Kas dan ATM PT BTN, Perpanjangan ke-1, No. W10-V/3031/KS.00/V/2022, Ditandatangani 24 Juni 2022, jangka waktu sewa 3 tahun dari 29 Des 2021 s.d. 29 Des 2024. Nilai sewa untuk 3 tahun sebesar Rp151.624.710. PNBP sewa baru disetorkan tanggal tgl 27 Sep 2022 .
2			5.097.500,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Coffee Shop The Locus, perjanjian sewa ditandatangani 30 Mei 2022, terdapat addendum jangka waktu sewa dari 1 Juni 2022 s.d. 31 Mei 2023 menjadi 27 Okt 2022 s.d. 27 Okt 2023. Harga sewa sebesar Rp5.117.000/tahun. Bukti setor tgl 25 Okt 2022 sebesar Rp6.117.000 untuk jangka waktu sewa 1 tahun.
3			12.350.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Farida jangka waktu 1 Jul 2021 s.d. 30 Juni 2026, pembayaran sewa per tahun
4	097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	62.769.833,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa BTN 1 Agust 2022 s.d. 31 Jul 2025
5			51.350.000,00	Koreksi jurnal akrual Sewa tanah bangunan dan sewa Bangunan kantor (ATM) BRI 21 Jun 2022 s.d. 21 Jun 2025
6			40.900.417,00	Koreksi jurnal akrual Sewa tanah bangunan dan sewa Bangunan kantor.
7	097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	1.109.333,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 6 Sept 2022 s.d. 6 Sep 2023
8	097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	362.667,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 14 Maret 2022 s.d. 13 Maret 2023
9	098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	100.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Tahun 2022 tgl 19 Jan 2022 s.d. 18 Jan 2023
10	098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	(5.182.000,00)	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Payment Point BTN, perjanjian sewa Ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 31 Agust 2022 s.d. 30 Agust 2024 (2 tahun), PNBP sewa baru disetorkan tanggal 20 Jan 2023
11			(6.936.000,00)	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Pak Kamid dan Kantin Bu Tutik, perjanjian ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 17 Juni 2022 s.d. 17 Juni 2025 (3 tahun). PNBP sewa baru disetorkan tanggal tgl 16 Jan 2023
12	098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	250.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 14 Feb 2022 s.d. 14 Feb 2023
13	098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	3.712.500,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 12 Apr 2022 s.d. 12 Apr 2024
14	098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	395.000,00	Koreksi jurnal akrual atas sewa kantin atas nama Meghi Okta Adpelra
15	098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	1.440.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 12 Sept 2022 s.d. 11 Sept 2023
16	099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	29.863.333,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa BRI 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025
17	099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	1.654.333,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 22 Juli 2022 s.d. 22 Juli 2025, sewa per tahun Rp2.836.000
18			4.385.625,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Tanah a.n. Julfian Afriyandi untuk keperluan rumah makan berupa Bangunan Kantor Pemerintah seluas 495M2 dan Bangunan Gedung kantor Darurat seluas 60M2
19	099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	2.631.667,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 17 Okt 2022 s.d. 16 Okt 2023
20	099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	2.590.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 1 Nov 2022 s.d. 31 Okt 2023
21	099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	2.547.917,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 17 Okt 2022 s.d. 16 Okt 2023
22	108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	12.488.250,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa BNI 1 Okt 2022 s.d. 30 Sept 2023
23			13.755.750,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin 1 tahun 5 Okt 2022 s.d. 4 Okt 2023
24	400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	182.667,00	Koreksi jurnal akrual atas Kurang catat pendapatan sewa kantin dibayar dimuka sebesar Rp2.192.000 dari tanggal 21 Januari 2022 s.d 20 Januari 2023 selama 1 tahun
25	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	885.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 18 Maret 2022 s.d. 17 Maret 2023
26	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	977.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 12 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023
27	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	29.863.333,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa ATM, perjanjian sewa ditandatangani 1 Juli 2022, dengan nilai Rp35.836.000, dengan jangka waktu sewa dari 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025 (3 tahun) Bukti setor tgl 8 September 2022 sebesar Rp35.836.000 untuk jangka waktu sewa 3 tahun.
28	400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	2.032.875,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin tgl 8 Feb 2022 s.d. 8 Feb 2024
29	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	1.728.333,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 18 Okt 2022 s.d. 17 Okt 2023
30	400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	(40.404,00)	Koreksi jurnal akrual atas lebih catat sewa kantin tgl 11 May 2022 s.d. 10 May 2023
31	400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	1.698.829,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin per tahun, jangka waktu sewa 1 Okt 2022 s.d. 30 Sep 2025
32	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	2.347.333,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 1 Mei 2022 s.d. 30 Apr 2025
33	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	3.125.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin dan fotocopy di MS Banda Aceh, Surat Perjanjian sewa No.W1-A1/495/KS.00/2/2022 ditandatangani tgl 9 Febuari 2022. Jangka waktu sewa 9 Februari 2022 s.d. Jan 2025. Sewa disetor setiap tanggal 15 Januari setiap tahunnya. Penyewa sudah menyetorkan biaya sewa untuk 3 tahun sebesar Rp4.500.000 tgl 22 April 2022
34	401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	130.729,00	Koreksi jurnal akrual atas sewa sebagian tanah untuk kantin tgl 27 Jan 2022 s.d. 31 Des 2024. Pembayaran PNBP 1 tahunan.
35	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	710.737,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 10 May 2022 s.d. 9 May 2023
36	402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	97.167,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 8 Feb 2022 s.d. 8 Feb 2023
37	417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	1.006.667,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa tgl 20 Okt 2022 s.d. 20 Okt 2023
38	477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	352.500,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin per tahun, jangka waktu sewa 17 Maret 2022 s.d. Feb 2025
39	477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	684.833,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 3 Agust 2022 s.d. 2 Agust 2023
40			587.417,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 3 Agust 2022 s.d. 2 Agust 2023
41	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	7.101.000,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa Kantin Tahun 2022 an. KOPPEG PTUN JAKARTA 30 Des 2022 s.d. 30 Des 23
42	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	928.667,00	Koreksi jurnal akrual atas Sewa kantin tgl 1 Agust 2022 s.d 1 Agust 2023
43	673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	2.034.806,00	Koreksi jurnal akrual atas sewa tanah 3 tahun tgl 3 Agust 2022 s.d. 2 Agust 2025
		Jumlah	**395.153.754,00**	

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 per Satuan Kerja terlampir.

Uang Muka dari KPPN Rp271.770.124,00

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp271.770.124,00 dan Rp151.248.877,00, terjadi kenaikan sebesar Rp120.521.247,00 atau 79,68%, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Perbandingan rincian saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 75. Perbandingan Rincian Uang Muka dari KPPN Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	268.160.124,00	150.618.877,00	117.541.247,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	630.000,00	(630.000,00)
4	005.04	Ditjen. Badilag	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	0,00	0,00	0,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**271.770.124,00**	**151.248.877,00**	**120.521.247,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp4.706.430,00

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.706.430,00 dan Rp1.072.735,00, merupakan utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

Tabel 76. Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /Penurunan
1	005.01	BUA	4.293.550,00	1.072.735,00	3.220.815,00
2	005.02	Kepaniteraan	0,00	0,00	0,00
3	005.03	Ditjen. Badilum	0,00	0,00	0,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	0,00	0,00	0,00
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	412.880,00	0,00	412.880,00
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	0,00	0,00	0,00
7	005.07	Badan Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**4.706.430,00**	**1.072.735,00**	**3.633.695,00**

EKUITAS

Ekuitas Rp30.525.686.275.992,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.525.686.275.992,00 dan Rp29.529.218.827.065,00, terjadi kenaikan sebesar Rp996.467.458.927,00 atau 3,37%.

Perbandingan rincian saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 77. Perbandingan Rincian Ekuitas Per Eselon I

(Dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan /(Penurunan)
1	005.01	BUA	29.494.208.948.401,00	28.338.183.028.737,00	1.156.025.919.664,00
2	005.02	Kepaniteraan	6.435.089.119,00	7.058.888.076,00	(623.798.957,00)
3	005.03	Ditjen. Badilum	668.944.318.029,00	665.132.534.072,00	3.811.783.957,00
4	005.04	Ditjen. Badilag	(87.983.652,00)	635.888.993,00	(723.872.645,00)
5	005.05	Ditjen. Badilmiltun	21.633.379.558,00	179.628.945.237,00	(157.995.565.679,00)
6	005.06	Balitbang Diklat Kumdil	332.083.896.783,00	335.774.784.720,00	(3.690.887.937,00)
7	005.07	Badan Pengawasan	2.468.627.754,00	2.804.757.230,00	(336.129.476,00)
Jumlah			**30.525.686.275.992,00**	**29.529.218.827.065,00**	**996.467.448.927,00**

Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN OPERASIONAL

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp92.741.764.356,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp92.741.764.356,00 dan Rp86.793.728.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 78. Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.410.705.820,00	8.513.495.833,00	(1,21)
425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(9.837.628,00)	(3.067.406,00)	220,71
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	172.160.000,00	182.880.000,00	(5,86)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.873.419.700,00	2.831.762.801,00	1,47
425232	Pengembalian Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	(190.000,00)	(100,00)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.858.158.500,00	24.438.595.028,00	1,72
425233	Pengembalian Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	51.830.988.393,00	48.944.569.140,00	5,90
425239	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	(7.320.000,00)	(2.378.000,00)	207,82
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	1.416,00	(100,00)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	159.516.500,00	98.005.652,00	62,76
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.448.754.045,00	1.740.462.541,00	155,61
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	45.318.483,00	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.219.026,00	6.192.718,00	(15,72)
Jumlah		**92.741.764.356,00**	**86.793.728.206,00**	**6,85**

Terdapat koreksi audited atas Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp371.769.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	12.350.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Farida dengan jangka waktu 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2026
			(18.900.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNBP atas Sewa BTS Storvanet, perjanjian sewa ditandatangani 1 Oktober 2021, jangka waktu sewa 3 tahun dari 1 Oktober 2021 s.d 30 September 2024. Atas sewa di Tahun 2022 baru disetorkan tgl 19 Januari 2023
			(12.500.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNBP atas Sewa Kantin a.n Rosida, perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2026. Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023)
			5.097.500,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima di Muka atas Sewa Coffee Shop The Locus, perjanjian sewa ditandatangani 30 Mei 2022, terdapat addendum jangka waktu sewa dari 1 Juni 2022 s.d 31 Mei 2023 menjadi 27 Oktober 2022 s.d 27 Oktober 2023. Harga sewa sebesar Rp6.117.000/tahun. Bukti setor tgl 25 Oktober 2022 sebesar Rp6.117.000 untuk jangka waktu sewa 1 tahun. (PDD = 10/12x 6.117.000 = 5.097.500)
			(3.550.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNBP atas Sewa Fotocopy an. Rika Fatmawati (Perpanjangan), perjanjian sewa ditandatangani 25 Mei 2021, jangka waktu sewa 5 tahun dari 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2026. Bukti setor tahun 1 Rp7.100.000 tgl 24 Mei 2021 (periode 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2022). Belum ada pembayaran untuk tahun ke-2 (periode 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2023). (Sewa Fotokopi yg seharusnya masih diterima th 2022 6/12 x 7.100.000 = 3.550.000)
			101.083.140,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima di Muka atas sewa ruangan Kantor Kas dan ATM PT BTN, Perpanjangan ke-1, No. W10-VI/301/KS.00/VI/2022, Ditandatangani 24 Juni 2022, jangka waktu sewa 3 tahun dari 29 Desember 2021 s.d 29 Desember 2024. Nilai sewa untuk 3 tahun sebesar Rp151.624.710. PNBP sewa baru disetorkan tanggal tgl 27 September 2022. (PDD = 2/3x 151.624.710= 101.083.140)

			40.900.417,00	Kurang Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin
2	097598	Pengadilan Negeri Tangerang	62.769.833,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa BTN dengan jangka waktu 1 Agustus 2022 s.d 31 Juli 2025
			51.350.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM BRI dengan jangka waktu 21 Juni 2022 s.d 21 Juni 2025
3	097631	Pengadilan Negeri Subang	1.109.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 6 September 2022 s.d 6 September 2023
4	097670	Pengadilan Negeri Cirebon	362.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 14 Maret 2022 s.d. 13 Maret 2023
5	098260	Pengadilan Negeri Trenggalek	100.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 19 Januari 2022 s.d. 18 Januari 2023
			8.323.200,00	Sewa Kantin Pak Kamid dan Kantin Bu Tutik, perjanjian ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 17 Juni 2022 s.d. 17 Juni 2025 (3 tahun). PNBP sewa baru disetorkan tanggal tgl 16 Jan 2023 masing-masing Rp 4.161.600 untuk sewa 3 tahun. Sesuai surat KPKNL S-119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022
			(8.323.200,00)	
			6.936.000,00	
			(6.936.000,00)	
6	098281	Pengadilan Negeri Malang	5.182.000,00	Sewa Payment Point BTN, perjanjian sewa Ditandatangani 22 Des 2022, jangka waktu sewa dari 31 Agust 2022 s.d. 30 Agust 2024 (2 tahun), PNBP sewa baru disetorkan tanggal 20 Jan 2023 Rp6.218.400 untuk sewa 2 tahun. Sesuai Surat KPKNL S-119/MK.6/KNL.1003/2022 tgl 22 Des 2022. Nilai sewa Rp6.218.400 per tahun. Pembayaran atas sewa tersebut baru dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.
			(5.182.000,00)	
			6.218.400,00	
			(6.218.400,00)	
7	098633	Pengadilan Negeri Binjai	250.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 14 Februari 2022 s.d 14 Februari 2023
8	098682	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	3.712.500,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 12 April 2022 s.d 12 April 2024
9	098771	Pengadilan Negeri Batusangkar	395.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Meghi Okta Adpelra
10	098917	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	1.440.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 12 September 2022 s.d 11 September 2023

11	099031	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	29.863.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM BRI dengan jangka waktu 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025
12	099070	Pengadilan Negeri Singkawang	1.654.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 22 Juli 2022 s.d 22 Juli 2025
			4.385.625,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Rumah Makan a.n. Julfian Afriyandi dengan jangka waktu 11 Juli 2022 s.d 11 Juli 2025
13	099176	Pengadilan Negeri Sampit	2.631.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 17 Oktober 2022 s.d 16 Oktober 2023
14	099600	Pengadilan Negeri Palopo	(551.886,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang PNBP atas sewa rumah dinas (pemakaian bulan Juli s.d September 2022), belum ada pembayaran bulan Januari s.d Februari 2023
15	099731	Pengadilan Negeri Ternate	2.590.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 November 2022 s.d 31 Oktober 2023
16	099748	Pengadilan Negeri Tobelo	2.547.917,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 17 Oktober 2022 s.d 16 Oktober 2023
17	108309	Pengadilan Negeri Batam	12.488.250,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM BNI dengan jangka waktu 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2023
			13.755.750,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin 1 tahun dengan jangka waktu 5 Oktober 2022 s.d 4 Oktober 2023
18	400007	Pengadilan Negeri Larantuka	182.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 21 Januari 2022 s.d 20 Januari 2023
19	400126	Pengadilan Negeri Curup	885.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 18 Maret 2022 s.d 17 Maret 2023
20	400172	Pengadilan Negeri Bantul	977.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 12 Januari 2022 s.d 31 Desember 2023
21	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	29.863.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa ATM dengan jangka waktu 1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025
22	400389	Pengadilan Negeri Kisaran	2.032.875,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 8 Februari 2022 s.d 8 Februari 2024
23	400452	Pengadilan Negeri Kalianda	1.728.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 18 Oktober 2022 s.d 17 Oktober 2023

24	400503	Pengadilan Tinggi Jambi	(710.737,00) 670.333,00	Koreksi Lebih Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 11 Mei 2022 s.d 10 Mei 2023
25	400704	Pengadilan Agama Tasikmalaya	1.698.829,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2025
26	400905	Pengadilan Agama Batang	2.347.333,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 Mei 2022 s.d 30 April 2025
27	401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	3.125.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dan fotocopy dengan jangka waktu 9 Februari 2022 s.d Januari 2025
28	401910	Pengadilan Negeri Mukomuko	130.729,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 27 Januari 2022 s.d 31 Desember 2024
29	401924	Pengadilan Negeri Penajam	710.737,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 10 Mei 2022 s.d 9 Mei 2023
30	402324	Pengadilan Agama Tanjung Karang	97.167,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin degan jangka waktu 8 Februari 2022 s.d 8 Februari 2023
31	417722	Pengadilan Negeri Tanjung Selor	1.006.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa dengan jangka waktu 20 Oktober 2022 s.d 20 Oktober 2023
32	477230	Pengadilan Negeri Lembata	352.500,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 17 Maret 2022 s.d Februari 2025
533	477306	Pengadilan Negeri Kota Agung	587.417,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Beni dengan jangka waktu 3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2023
			684.833,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. Kusrini Sewa kantin dengan jangka waktu 3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2023
34	526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	7.101.000,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin an. KOPPEG PTUN JAKARTA dengan jangka waktu 30 Desember 2022 s.d 30 Desember 23
35	663178	Pengadilan Militer Tinggi - I Di Medan	928.667,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Kantin dengan jangka waktu 1 Agustus 2022 s.d 1 Agustus 2023
36	673020	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	2.034.806,00	Koreksi Kurang Catat Pendapatan Sewa Diterima Dimuka berupa Sewa Tanah dengan jangka waktu 3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2025
Jumlah			**371.769.868,00**	

2. Koreksi berkurang akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp1.650.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 652035 Pengadilan Agama Sengeti merupakan kesalahan pencatatan transaksi uang masuk dengan SBS Nomor 00130/SBS/652035/2022 yang telah dihapuskan dari Modul Bendahara. Penghapusan transaksi tersebut tidak terposting oleh sistem, Satuan Kerja telah melaporkan permasalahan tersebut kepada DJPB Kementerian Keuangan melalui platform Hai DJPB dengan nomor tiket 20230209-4VVJK8.

Beban Pegawai Rp7.048.043.385.423,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.048.043.385.423,00 dan Rp6.780.962.599.442,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79. Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.605.316.870.348,00	1.575.651.125.140,00	1,88
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(195.456.478,00)	(91.094.221,00)	114,57
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	32.532.463,00	22.027.812,00	47,69
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(413.021,00)	(241.514,00)	71,01
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.723.797.526,00	117.600.489.379,00	(1,60)
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(27.235.889,00)	(27.622.143,00)	(1,40)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	32.799.326.639,00	33.366.726.813,00	(1,70)
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(7.597.041,00)	(5.625.588,00)	35,04
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36.395.552.521,00	37.189.874.900,00	(2,14)
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(55.613.202,00)	(46.615.382,00)	19,30
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.067.265.960.588,00	2.102.061.396.815,00	(1,66)
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(769.160.296,00)	(286.957.736,00)	168,04
511125	Beban Tunj. PPh PNS	304.638.370.941,00	314.218.798.564,00	(3,05)
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	(17.052.475,00)	(193.213,00)	8.725,74
511126	Beban Tunj. Beras PNS	85.331.633.250,00	84.757.565.100,00	0,68
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(8.651.928,00)	(4.257.759,00)	103,20
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	20.250.000,00	0,00	0,00
511129	Beban Uang Makan PNS	258.645.276.958,00	254.889.880.669,00	1,47
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(58.595.200,00)	(45.656.150,00)	28,34
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70.725.000,00	70.850.000,00	(0,18)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.704.973.750,00	4.864.986.250,00	(3,29)
511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	(2.640.000,00)	(15.070.000,00)	(82,48)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19.358.968.630,00	14.587.431.500,00	32,71
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(158.696.047,00)	(153.727.425,00)	3,23
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	60.173.630.312,00	65.846.561.798,00	(8,62)
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	(39.000.000,00)	(72.550.000,00)	(46,24)
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	101.850.575.000,00	106.705.029.902,00	(4,55)
511158	Pengembalian Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	0,00	(197.435.418,00)	(100,00)
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00
511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	36.614.898.457,00	39.943.834.534,00	(8,33)
511224	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0,00	(30.450.000,00)	(100,00)
511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	3.484.585.254,00	3.567.592.395,00	(2,33)
511225	Pengembalian Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	(1.952.370,00)	0,00	0,00
511227	Beban Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	70.200.000,00	78.300.000,00	(10,34)
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	2.937.480.000,00	2.684.010.000,00	9,44
511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	39.100,00	35.640,00	9,71
511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	283.248.000,00	262.521.000,00	7,90
511321	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	(1.260.000,00)	0,00	0,00
511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	9.828.000,00	9.408.000,00	4,46
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	51.626.076.000,00	47.423.832.000,00	8,86
511323	Pengembalian Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	(218.562.000,00)	0,00	0,00
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	12.972.014.974,00	11.397.277.387,00	13,82
511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	106.457.400,00	98.201.520,00	8,41
511325	Pengembalian Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	(217.260,00)	0,00	0,00
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4.994.000.000,00	6.995.000.000,00	(28,61)
511332	Pengembalian Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	(33.900.833,00)	0,00	0,00
512211	Beban Uang Lembur	604.650.000,00	217.706.000,00	177,74
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.243.900.584.451,00	1.957.415.912.873,00	14,64
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(306.836.099,00)	0,00	0,00
Jumlah		**7.048.043.385.423,00**	**6.780.962.599.442,00**	**3,94**

Terdapat koreksi audited atas Beban Pegawai pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 511111 Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp34.321.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511111 Beban Gaji Pokok PNS	Keterangan
1	400678	Pengadilan Agama Sumedang	1.102.800,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Gaji Pokok PNS bulan April 2021 s.d bulan Desember 2022)
2	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(13.672.387,00)	Koreksi Lebih Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar atas Gaji Terusan Keempat bulan November 2021 utk 1 Pegawai/2 Jiwa
3	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(21.752.125,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Gaji Pokok PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022
Jumlah			**(34.321.712,00)**	

2. Koreksi berkurang akun 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp376,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	Keterangan
1	400678	Pengadilan Agama Sumedang	84,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Pembulatan Gaji PNS bulan April 2021 s.d bulan Desember 2022)
2	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(460,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Pembulatan Gaji PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022
Jumlah			**(376,00)**	

3. Koreksi berkurang akun 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp370.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 604730 Pengadilan Agama Malang Kab. Malang merupakan kesalahan penggunaan akun untuk potongan PFK dimana sebelumnya Satuan Kerja menggunakan akun 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS seharusnya menggunakan akun 811132 Penerimaan setoran/potongan PFK 8% gaji PNS Pusat. Satuan Kerja melakukan koreksi/ralat akun tersebut ke KPPN.
4. Koreksi berkurang akun 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp2.064.935,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Keterangan
1	400678	Pengadilan Agama Sumedang	110.280,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Tunjangan Suami/Istri PNS bulan April 2021 s.d bulan Desember 2022)
2	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(2.175.215,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Suami/Istri PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022
Jumlah			**(2.064.935,00)**	

5. Koreksi berkurang akun 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS sebesar Rp2.300.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 548940 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022.
6. Koreksi berkurang akun 511126 Beban Tunj. Beras PNS sebesar Rp724.200,00 terdapat pada Satuan Kerja 548940 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya akibat adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Beras PNS atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d November 2022.
7. Koreksi berkurang akun 511127 Beban Tunj. Kemahalan PNS sebesar Rp2.700.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 663403 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan Jurnal Balik GLP atas kesalahan input dalam kode akun 511127 (Beban Tunjangan kemahalan PNS) seharusnya kode akun 511157 (Beban Tunjangan Kemahalan Hakim) atas kekurangan tunjangan kemahalan KPT Bulan Desember 2022 dan kekurangan tunjangan kemahalan WKPT bulan Juli 2022.
8. Koreksi berkurang akun 511129 Beban Uang Makan PNS sebesar Rp16.754.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511129 Beban Uang Makan PNS	Keterangan
1	098608	Pengadilan Negeri Singkel	(14.510.000,00)	Koreksi kesalahan input jurnal balik (20 Januari 2022) atas akrual Belanja Uang Makan PNS TA 2021
2	400483	Pengadilan Negeri Bale Bandung	51.540.000,00	Koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar atas uang makan, beberapa orang pegawai yang sudah dibayarkan di Satuan Kerja lama
3	400483	Pengadilan Negeri Bale Bandung	(53.180.000,00)	
4	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(789.000,00)	Koreksi Kurang Catat Piutang Lainnya atas Kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Desember 2022
5	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	185.000,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Kekurangan Uang Makan 1 orang pegawai bulan Desember 2022)
Jumlah			**(16.754.000,00)**	

9. Koreksi berkurang akun 511138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS sebesar Rp170.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 402882 Pengadilan Agama Sorong merupakan kesalahan input jurnal balik (3 Januari 2022) atas akrual Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TA 2021.
10. Koreksi bertambah akun 511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim sebesar Rp2.700.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 663403 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan Jurnal Akrual GLP atas kekurangan tunjangan kemahalan KPT bulan Desember 2022 dan kekurangan tunjangan kemahalan WKPT bulan Juli 2022.

11. Koreksi berkurang akun 511158 Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc sebesar Rp126.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	511158 Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	Keterangan
1	099773	Pengadilan Tinggi Denpasar	(50.000.000,00)	Jurnal balik atas jurnal koreksi Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar terkait Belanja Gaji Hakim Adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem
2	099780	Pengadilan Negeri Denpasar	(76.000.000,00)	Jurnal balik atas jurnal koreksi Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar terkait Belanja Gaji Hakim Adhoc disebabkan kesalahan pembentukan jurnal dari sistem
Jumlah			**(126.000.000,00)**	

12. Koreksi berkurang akun 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp26.003.962,00 terdapat pada Satuan Kerja 663157 Badan Urusan Administrasi merupakan pengembalian Tunjangan Kinerja Tahun 2022 pada BUA yang sudah disetorkan ke kas negara pada Tahun 2023.

Beban Persediaan Rp94.286.979.901,00

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp94.286.979.901,00 dan Rp95.503.112.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80. Perbandingan Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	94.286.979.901,00	95.503.112.886,00	(1,27)
Jumlah		**94.286.979.901,00**	**95.503.112.886,00**	**(1,27)**

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Persediaan pada beberapa Satuan Kerja, yaitu Koreksi berkurang pada akun 593111 Beban Persediaan Konsumsi sebesar Rp99.253,00 pada beberapa Satuan Kerja, antara lain:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	593111 Beban Persediaan Konsumsi	Keterangan
1	098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	1.200.000,00	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian tiga buah tinta printer
2	401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	7.896.000,00	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian toner dan cartridge printer
3	400529	Pengadilan Tinggi Samarinda	(12.735.055,00)	Koreksi jurnal pada modul GLP terkait selisih TKTM
4	402024	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	1.034.550,00	Merupakan pemakaian persediaan bulan Desember 2022 yang belum diinput sehingga dilakukan penginputan pada periode 14 Tahun 2022
			50.710,00	
			48.920,00	
			49.305,00	
			98.610,00	
			59.950,00	
			44.786,00	
			113.300,00	
			48.920,00	
			49.720,00	
			44.786,00	
			52.800,00	
			47.080,00	
			43.670,00	
			239.580,00	
			49.720,00	
			94.160,00	
			147.915,00	
			47.300,00	
			209.440,00	
			271.590,00	
			209.440,00	
			49.720,00	
			106.700,00	
			66.000,00	
			66.000,00	
			48.920,00	
			49.720,00	
			51.700,00	
			44.790,00	
Jumlah			**(99.253,00)**	

Beban Barang dan Jasa Rp1.592.628.939.888,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.592.628.939.888,00 dan Rp1.301.888.339.402,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	682.235.860.396,00	534.779.520.228,00	27,57
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(79.916.954,00)	(51.466.708,00)	55,28
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4.198.500,00	0,00	0,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.312.434.969,00	15.595.116.195,00	23,84
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	(2.734.580,00)	(1.962.480,00)	39,34
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.994.006.178,00	45.703.627.794,00	(1,55)
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(5.598.000,00)	(27.222.500,00)	(79,44)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	207.555.430.897,00	127.630.642.182,00	62,62
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(70.891.165,00)	(17.490.000,00)	305,32
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.369.221.562,00	8.457.115.999,00	(24,69)
521211	Beban Bahan	47.701.065.242,00	40.335.976.188,00	18,26
521211	Pengembalian Beban Bahan	(2.153.318,00)	(2.491.300,00)	(13,57)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	710.691.500,00	349.362.000,00	103,43
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0,00	(4.452.500,00)	(100,00)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.886.586.390,00	50.336.069.803,00	(92,28)
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	(89.024.250,00)	(100,00)
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	715.210.584,00	5.176.691.055,00	(86,18)
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.053.170.361,00	0,00	0,00
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	259.472.965,00	0,00	0,00
521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	14.291.250,00	0,00	0,00
522111	Beban Langganan Listrik	148.118.365.851,00	122.753.050.219,00	20,66
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	(14.317.504,00)	(9.507.807,00)	50,59
522112	Beban Langganan Telepon	3.134.086.240,00	3.329.961.352,00	(5,88)
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	(590,00)	(1.033.790,00)	(99,94)
522113	Beban Langganan Air	6.175.064.559,00	6.009.621.798,00	2,75
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0,00	(8.778.170,00)	(100,00)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	669.273.540,00	780.047.896,00	(14,20)
522131	Beban Jasa Konsultan	35.795.815.267,00	30.556.507.876,00	17,15
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	(3.292.479,00)	(944.000,00)	248,78
522141	Beban Sewa	266.043.051.125,00	260.260.917.625,00	2,22
522141	Pengembalian Beban Sewa	(88.678.227,00)	(120.644.712,00)	(26,50)
522151	Beban Jasa Profesi	13.492.732.450,00	15.730.266.003,00	(14,22)
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	(6.228.000,00)	(66.367.500,00)	(90,62)
522191	Beban Jasa Lainnya	81.804.850.162,00	13.978.486.331,00	485,22
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(39.778.390,00)	0,00	0,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.949.515.570,00	19.136.394.124,00	(6,20)
522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.948.133.537,00	1.403.100.451,00	181,39
Jumlah		**1.592.628.939.888,00**	**1.301.888.339.402,00**	**22,33**

Penjelasan:

- 595112 - Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.948.133.537,00 pada 139 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
1	005.01.097467	Pengadilan Tinggi Jakarta	6.112.500,00
2	005.01.097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	555.000,00
3	005.01.097514	Pengadilan Negeri Bandung	4.858.000,00
4	005.01.097521	Pengadilan Negeri Sumedang	9.329.650,00
5	005.01.097535	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	35.211.400,00
6	005.01.097577	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	7.650.000,00
7	005.01.097598	Pengadilan Negeri Tangerang	102.854.500,00
8	005.01.097603	Pengadilan Negeri Purwakarta	3.596.000,00
9	005.01.097610	Pengadilan Negeri Bekasi	1.000.000,00
10	005.01.097645	Pengadilan Negeri Bogor	960.500,00
11	005.01.097709	Pengadilan Negeri Kuningan	1.480.000,00
12	005.01.097713	Pengadilan Tinggi Semarang	680.000,00
13	005.01.097762	Pengadilan Negeri Pati	545.000,00
14	005.01.097780	Pengadilan Negeri Pemalang	500.000,00
15	005.01.097797	Pengadilan Negeri Kendal	600.000,00
16	005.01.097802	Pengadilan Negeri Demak	2.440.000,00
17	005.01.097872	Pengadilan Negeri Batang	13.473.311,00
18	005.01.097912	Pengadilan Negeri Temanggung	4.940.000,00
19	005.01.098015	Pengadilan Negeri Cilacap	1.300.000,00
20	005.01.098132	Pengadilan Negeri Tuban	2.402.400,00
21	005.01.098214	Pengadilan Negeri Banyuwangi	2.025.000,00
22	005.01.098281	Pengadilan Negeri Malang	3.085.800,00
23	005.01.098310	Pengadilan Negeri Lumajang	3.100.000,00
24	005.01.098420	Pengadilan Negeri Sampang	1.102.000,00
25	005.01.098612	Pengadilan Tinggi Medan	33.976.800,00
26	005.01.098750	Pengadilan Negeri Padang	6.882.000,00
27	005.01.098881	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	1.242.000,00
28	005.01.098895	Pengadilan Negeri Jambi	1.457.000,00
29	005.01.098938	Pengadilan Tinggi Palembang	4.050.000,00
30	005.01.098942	Pengadilan Negeri Palembang	15.850.800,00
31	005.01.098959	Pengadilan Negeri Kayuagung	5.506.800,00
32	005.01.099031	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	14.630.000,00
33	005.01.099120	Pengadilan Negeri Palangkaraya	7.050.000,00
34	005.01.099162	Pengadilan Negeri Buntok	9.000.000,00
35	005.01.099197	Pengadilan Negeri Banjarmasin	1.272.000,00
36	005.01.099223	Pengadilan Negeri Barabai	1.570.000,00
37	005.01.099230	Pengadilan Negeri Martapura	1.100.000,00
38	005.01.099290	Pengadilan Negeri Tenggarong	2.597.400,00
39	005.01.099340	Pengadilan Negeri Tahuna	3.790.000,00
40	005.01.099375	Pengadilan Negeri Palu	28.475.000,00
41	005.01.099396	Pengadilan Negeri Luwuk	2.000.000,00

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
42	005.01.099471	Pengadilan Negeri Maros	25.650.000,00
43	005.01.099574	Pengadilan Negeri Sinjai	2.375.150,00
44	005.01.099731	Pengadilan Negeri Ternate	4.570.000,00
45	005.01.099752	Pengadilan Negeri Labuha	1.200.000,00
46	005.01.099858	Pengadilan Negeri Bangli	888.000,00
47	005.01.099879	Pengadilan Negeri Raba/Bima	3.909.975,00
48	005.01.099926	Pengadilan Negeri Kupang	4.650.000,00
49	005.01.099951	Pengadilan Negeri Kefamenanu	14.836.250,00
50	005.01.099968	Pengadilan Negeri Waingapu	3.748.800,00
51	005.01.307122	Pengadilan Agama Kotabaru	19.813.500,00
52	005.01.307271	Pengadilan Agama Kodya Palu	9.828.000,00
53	005.01.307885	Pengadilan Agama Mataram	1.200.000,00
54	005.01.308021	Pengadilan Agama Curup	275.300,00
55	005.01.400013	Pengadilan Negeri Ruteng	6.840.000,00
56	005.01.400022	Pengadilan Tinggi Jayapura	9.157.500,00
57	005.01.400220	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	2.497.500,00
58	005.01.400239	Pengadilan Negeri Arga Makmur	800.000,00
59	005.01.400282	Pengadilan Negeri Pleihari	14.100.000,00
60	005.01.400311	Pengadilan Negeri Bangko	6.355.000,00
61	005.01.400389	Pengadilan Negeri Kisaran	1.980.000,00
62	005.01.400421	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	3.000.000,00
63	005.01.400622	Pengadilan Agama Jakarta Utara	2.480.824,00
64	005.01.400781	Pengadilan Agama Kuningan	32.100.000,00
65	005.01.400797	Pengadilan Agama Serang	1.665.000,00
66	005.01.400823	Pengadilan Agama Tangerang	410.700,00
67	005.01.400832	Pengadilan Agama Bekasi	600.000,00
68	005.01.400951	Pengadilan Agama Purwodadi	846.000,00
69	005.01.400982	Pengadilan Agama Jepara	680.000,00
70	005.01.400998	Pengadilan Agama Rembang	3.547.500,00
71	005.01.401137	Pengadilan Agama Boyolali	5.600.000,00
72	005.01.401180	Pengadilan Agama Surakarta	1.420.000,00
73	005.01.401293	Pengadilan Agama Gresik	2.836.000,00
74	005.01.401338	Pengadilan Agama Jember	2.200.000,00
75	005.01.401369	Pengadilan Agama Banyuwangi	4.505.900,00
76	005.01.401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	3.655.000,00
77	005.01.401602	Mahkamah Syar'Iyah Sabang	2.500.000,00
78	005.01.401611	Mahkamah Syar'Iyah Sigli	14.031.150,00
79	005.01.401633	Mahkamah Syar'Iyah Bireuen	1.200.000,00
80	005.01.401877	Pengadilan Agama Penajam	1.645.975,00
81	005.01.401907	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	12.155.565,00
82	005.01.401908	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	23.307.778,00
83	005.01.401910	Pengadilan Negeri Mukomuko	2.640.000,00

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
84	005.01.401922	Pengadilan Agama Solok	2.850.000,00
85	005.01.401936	Pengadilan Agama Pulau Punjung	9.945.525,00
86	005.01.401946	Pengadilan Agama Pagar Alam	5.675.000,00
87	005.01.401949	Pengadilan Agama Prabumulih	124.956.232,00
88	005.01.401956	Pengadilan Agama Sukadana	56.960.400,00
89	005.01.401965	Mahkamah Syar'Iyah Blangpidie	13.000.000,00
90	005.01.401967	Mahkamah Syar'Iyah Kota Subulussalam	16.815.000,00
91	005.01.402072	Pengadilan Agama Pekanbaru	9.324.000,00
92	005.01.402123	Pengadilan Agama Pasir Pangarayan	9.324.000,00
93	005.01.402154	Pengadilan Agama Dabo Singkep	909.090,00
94	005.01.402185	Pengadilan Agama Jambi	1.241.000,00
95	005.01.402205	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	2.015.650,00
96	005.01.402355	Pengadilan Agama Metro	4.610.152,00
97	005.01.402370	Pengadilan Agama Sambas	2.800.000,00
98	005.01.402421	Pengadilan Agama Palangkaraya	3.500.000,00
99	005.01.402468	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	4.550.000,00
100	005.01.402474	Pengadilan Agama Sampit	680.000,00
101	005.01.402669	Pengadilan Agama Mempawah	899.800,00
102	005.01.402763	Pengadilan Agama Klungkung	1.101.000,00
103	005.01.402788	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	1.800.000,00
104	005.01.403052	Pengadilan Agama Muara Bulian	1.870.000,00
105	005.01.417657	Pengadilan Agama Tanjung Selor	9.463.860,00
106	005.01.417844	Pengadilan Negeri Pandeglang	602.175,00
107	005.01.526725	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaramedan	12.348.000,00
108	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	3.400.000,00
109	005.01.531844	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	3.840.600,00
110	005.01.531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	39.600.000,00
111	005.01.578839	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	8.001.000,00
112	005.01.578871	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	12.670.000,00
113	005.01.613519	Pengadilan Negeri Kab.Bogor Di Cibinong, Jawa Barat	812.000,00
114	005.01.614684	Pengadilan Agama Tulang Bawang	4.544.636,00
115	005.01.614691	Pengadilan Agama Tanggamus	1.630.000,00
116	005.01.614769	Pengadilan Agama Sentani	4.862.418,00
117	005.01.632001	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	3.000.000,00
118	005.01.632018	Pengadilan Agama Sarolangun	3.050.000,00
119	005.01.652034	Pengadilan Agama Sengeti	15.559.500,00

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
120	005.01.652041	Pengadilan Agama Gunung Sugih	2.700.000,00
121	005.01.652076	Pengadilan Agama Cilegon	3.441.000,00
122	005.01.663026	Pengadilan Negeri Menggala	9.250.000,00
123	005.01.663157	Badan Urusan Administrasi	2.831.367.451,00
124	005.01.663161	Pengadilan Militer Utama	4.426.000,00
125	005.01.663178	Pengadilan Militer Tinggi - I Di Medan	6.404.000,00
126	005.01.663211	Pengadilan Militer I - 04 Di Palembang	28.470.000,00
127	005.01.663232	Pengadilan Militer I - 06 Di Banjarmasin	6.932.600,00
128	005.01.663250	Pengadilan Militer Tinggi II Di Jakarta	4.426.000,00
129	005.01.663267	Pengadilan Militer II - 08 Di Jakarta	4.426.000,00
130	005.01.663300	Pengadilan Militer Tinggi III Di Surabaya	7.055.000,00
131	005.01.663321	Pengadilan Militer III - 13 Di Madiun	243.000,00
132	005.01.663335	Pengadilan Militer III - 14 Di Denpasar	4.995.000,00
133	005.01.672927	Pengadilan Negeri Masamba	4.459.980,00
134	005.01.672973	Pengadilan Negeri Kasongan	200.000,00
135	005.01.682150	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	3.885.000,00
136	005.01.682185	Pengadilan Agama Marisa	3.000.000,00
137	005.01.682228	Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong	6.040.000,00
138	005.04.663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	5.053.440,00
139	005.06.610378	Badan Litbang Diklat Kumdil	5.194.800,00
Jumlah			**3.948.133.537,00**

Merupakan transaksi belanja modal Peralatan dan Mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Barang dan Jasa pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 521111 Beban Keperluan Perkantoran sebesar Rp14.610.838,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	521111 Beban Keperluan Perkantoran	Keterangan
1	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(4.500.000,00)	Jurnal Koreksi untuk mencatat Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin berupa pembelian kursi jati sidang (3 buah)
2	400477	Pengadilan Negeri Sumber	291.667,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual sewa Zoom Meeting
			(3.208.333,00)	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas Sewa Zoom Meeting periode 23 November 2022 s.d 22 November 2023
3	401915	Pengadilan Negeri Cikarang	1.145.833,00	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas kesalahan perhitungan nilai akrual sewa Web Hosting yang seharusnya tidak disajikan sebagai akrual karena sewa hanya 1 bulan di Desember 2022
4	402349	Pengadilan Agama Kotabumi	1.475.500,00	Jurnal Balik atas kesalahan penggunaan akun pencatatan Belanja Barang Dibayar Dimuka untuk sewa Web Hosting
5	477352	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	(1.833.385,00)	Kurang Catat Belanja Barang Dibayar Dimuka untuk sewa Zoom Meeting
6	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(3.900.000,00)	Jurnal Koreksi atas Belanja Barang Ekstrakomptabel untuk pembelian printer second/epson an. Rizqy Computer NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00705/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
			(1.900.000,00)	Jurnal Koreksi atas Perolehan Lainnya Ekstrakomptabel untuk pembelian Rak Souvenir An. Asy'ari sesuai Kuitansi No. 00180/KW/548940/2022 tanggal 05-04-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
			(3.374.400,00)	Jurnal Koreksi atas Belanja Barang Ekstrakomptabel untuk pembelian kursi rapat aula An. Darma Karya Barokah NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi No. 00736/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
7	604719	Pengadilan Agama Cibinong	2.104.598,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka Sewa Cloud Storage
			(701.533,00)	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas sewa Cloud Storage periode 17 Maret 2022 s.d 16 Maret 2023
			2.312.500,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka sewa Web Hosting
			(1.651.785,00)	Jurnal Koreksi Belanja Barang Dibayar Dimuka atas sewa Web Hosting periode 18 Mei 2022 s.d 17 Mei 2023
8	663300	Pengadilan Militer Tinggi III Di Surabaya	(871.500,00)	Jurnal Koreksi atas pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran
Jumlah			**(14.610.838,00)**	

2. Koreksi bertambah akun 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp14.069.681,00 terdapat pada Satuan Kerja 400023 Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan kurang catat Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar atas langganan Pengiriman Surat Dinas Pos.
3. Koreksi berkurang akun 521119 Beban Barang Operasional Lainnya sebesar Rp8.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	521119 Beban Barang Operasional Lainnya	Keterangan
1	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	(4.531.000,00)	Koreksi Eliminasi Pendapatan Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin berupa pembelian papan pengumuman (rangka spanduk besi) menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya
2	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(4.080.000,00)	Koreksi Eliminasi Pendapatan Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin berupa papan nama untuk gapura an. Ragil Reklame sesuai Kuitansi No. 00160/KW/548940/2022 tanggal 05-04-2022 menggunakan akun Belanja Barang Operasional Lainnya
Jumlah			**(8.611.000,00)**	

4. Koreksi berkurang akun 521211 Beban Bahan sebesar Rp11.875.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 400365 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang merupakan Jurnal Eliminasi Pendapatan Perolehan Lainnya atas pembelian Peralatan dan Mesin berupa rak aluminium 2 buah menggunakan akun Belanja Bahan.
5. Koreksi bertambah akun 521252 Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel sebesar Rp55.703.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	521252 Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	Keterangan
1	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	17.509.350,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk perolehan Peralatan dan Mesin berupa hordeng (16 set) menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
2	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	17.600.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk Pengadaan Pemasangan Gordyn sebanyak 20 buah menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
3	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	330.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian Web Camera Logitech sesuai kuitansi no. 00589/KW/526767/2022 tanggal 30-12-22 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) yang seharusnya Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			994.500,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian AF Gordyn sesuai kuitansi no. 00479/KW/526767/2022 tanggal 07-09-22 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
4	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	11.145.500,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk Pengadaan Gorden untuk Gedung Kantor An. Aris sesuai kuitansi no. 00091/KW/548940/2022 tanggal 22-02-2022 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			3.900.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian printer second/epson An. Rizqy Computer NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00705/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			850.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian mesin chain saw an. Cahaya Nusantara NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00534/KW/548940/2022 tanggal 19-10-2022 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			3.374.400,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk pembelian kursi rapat aula an. Darma Karya Barokah NPWP 000986901609000 sesuai kuitansi no. 00736/KW/548940/2022 tanggal 30-12-2022 menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
Jumlah			**55.703.750,00**	

6. Koreksi bertambah akun 521253 Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel sebesar Rp46.950.000,00 terdapat pada Satuan Kerja 401918 Pengadilan Negeri Kuala Kurun merupakan Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk Pembangunan Bidang Kolam Ikan dan Taman Hijau sesuai kuitansi no. W16-U9/1819/PL.01/11/2022 tanggal 16-11-2022) dan Tanaman Indoor sesuai kuitansi no. W16-U9/1809/PL.01/11/2022 tanggal 14-11-2022) menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel (521253).
7. Koreksi berkurang akun 522112 Beban Langganan Telepon sebesar Rp1.500,00 terdapat pada Satuan Kerja 400483 Pengadilan Negeri Bale Bandung merupakan koreksi kesalahan perhitungan nilai akrual Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar atas langganan telepon.
8. Koreksi bertambah akun 522113 Beban Langganan Air sebesar Rp2.683.720,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	522113 Beban Langganan Air	Keterangan
1	401898	Pengadilan Agama Namlea	(80,00)	Koreksi Kurang Catat Jurnal Balik Awal Tahun 2022 atas Langganan Air
2	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	2.683.800,00	Koreksi Kurang Catat Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar atas Beban Langganan Air Tahun 2022
Jumlah			**2.683.720,00**	

9. Koreksi berkurang akun 522141 Beban Sewa sebesar Rp2.579.420.809,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	522141 Beban Sewa	Keterangan
1	099443	Pengadilan Negeri Pangkajene	176.458,00	Koreksi atas kesalahan Penyajian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
2	099600	Pengadilan Negeri Palopo	(307.780,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
			1.846.680,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Penyajian Jurnal Akrual Web Hosting
			307.780,00	Koreksi atas Kesalahan Penyajian Jurnal Akrual Web Hosting
			(153.890,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Web Hosting (Exabytes periode 13 Februari 2022 s.d 12 Februari 2023)
3	307839	Pengadilan Agama Singaraja	3.000.000,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Penyajian Jurnal Akrual Belanja Sewa Dibayar Dimuka Domain dan Web Hosting
			(500.000,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Sewa Web Hosting periode 21 Pebruari 2022 s.d 20 Pebruari 2023
4	400214	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	(16.869.688,00)	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting berdasarkan faktur no. 010.003-22.47369811 periode 13 Juni 2022 s.d 13 Juni 2023
5	400358	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	312.500,00	Koreksi lebih catat atas Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Web Hosting periode 15 November 2022 s.d 14 November 2023
			(213.177.250,00)	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa mesin fotocopy periode 1 Januari s.d 18 Maret 2023
6	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(29.700.000,00)	Merupakan sewa rumah untuk Hakim Tahun 2021 yang baru dibayarkan pada Tahun 2022
			2.352.000,00	Koreksi beban atas kesalahan penggunaan akun belanja untuk mencatat sewa AC (3 buah) menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) yang seharusnya menggunakan akun Belanja Sewa (522141)
7	401887	Pengadilan Agama Rumbia	(875.000,00)	Koreksi Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Hosting periode 19 April 2022 s.d 18 April 2023)
8	401895	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	(280.000,00)	Koreksi Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Sewa Hosting
9	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	(3.277.250,00)	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas Pengadaan Sewa Alat Pengolah Data dan Informasi sesuai Surat Perjanjian Nomor : W16-U11/75/PL.03/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 dengan periode sewa 24 Januari 2022 s.d 23 Januari 2023
10	401961	Pengadilan Agama Nanga Pinoh	(687.500,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting Periode 16 Juni 2022 s.d. 15 Juni 2023
			1.375.000,00	Jurnal Balik atas kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) untuk sewa Web Hosting
11	402349	Pengadilan Agama Kotabumi	(3.934.667,00)	Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
12	402386	Pengadilan Agama Ketapang	830.412,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) sewa Web Hosting
			(54.167,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting periode 23 Januari 2022 s.d 22 Januari 2023
13	402681	Pengadilan Tinggi Agama Manado	(60.446.760,00)	Koreksi atas kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa mesin fotocopy
			60.466.760,00	Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa mesin fotocopy
14	477352	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	(5.333.333,00)	Kurang Catat Belanja Barang Dibayar Dimuka (Prepaid) untuk langganan Domain Hosting
15	531851	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak	(666.000,00)	Koreksi atas kesalahan Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting periode 21 Agustus 2022 s.d 20 Agustus 2023
			999.000,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
16	663157	Badan Urusan Administrasi	12.928.714.504,00	Jurnal balik atas koreksi BPK (Kesalahan Perhitungan atas Pengakuan Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) pada 1 paket Belanja Sewa Kendaraan)
			(15.244.483.618,00)	Koreksi atas Pemeriksaan BPK (audited) (Belum diakrualkan untuk Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas 2 paket Belanja Sewa Kendaraan
17	670231	Pengadilan Negeri Bengkayang	(675.000,00)	Koreksi atas Kesalahan Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting periode 23 Mei 2022 s.d 22 Mei 2023
			1.620.000,00	Jurnal Balik atas Kesalahan Jurnal Akrual Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) atas sewa Web Hosting
Jumlah			**(2.579.420.809,00)**	

Beban Pemeliharaan Rp478.941.136.468,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp478.941.136.468,00 dan Rp373.677.670.889,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256.660.216.934,00	178.952.229.995,00	43,42
523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(221.712.730,00)	(14.676.721,00)	1.410,64
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	0,00	26.789.284,00	(100,00)
523114	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	36.117.272,00	(100,00)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38.553.466.033,00	37.432.950.053,00	2,99
523119	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	(3.225.252,00)	(236.513,00)	1.263,67
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.015.104.485,00	147.839.444.814,00	17,71
523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(49.586.390,00)	(35.959.223,00)	37,90
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	60.000.000,00	(100,00)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	25.622.060,00	78.264.250,00	(67,26)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	0,00	35.002.100,00	(100,00)
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	9.302.841.563,00	9.173.957.578,00	1,40
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	658.409.765,00	93.788.000,00	602,02
Jumlah		**478.941.136.468,00**	**373.677.670.889,00**	**28,17**

Penjelasan:

- 595113 - Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp658.409.765,00 pada 20 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
1	005.01.097691	Pengadilan Negeri Majalengka	18.002.600,00
2	005.01.098015	Pengadilan Negeri Cilacap	400.000,00
3	005.01.098167	Pengadilan Negeri Sidoarjo	21.500.000,00
4	005.01.099223	Pengadilan Negeri Barabai	44.626.780,00
5	005.01.307491	Pengadilan Agama Sungguminasa	9.000.000,00
6	005.01.400163	Pengadilan Negeri Kalabahi	89.775.967,00
7	005.01.400389	Pengadilan Negeri Kisaran	17.236.000,00
8	005.01.400879	Pengadilan Agama Pemalang	29.117.000,00
9	005.01.400936	Pengadilan Agama Kendal	8.980.000,00
10	005.01.401055	Pengadilan Agama Kebumen	5.150.000,00
11	005.01.401307	Pengadilan Agama Bojonegoro	9.500.000,00
12	005.01.401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	111.026.218,00
13	005.01.401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	12.767.900,00
14	005.01.402421	Pengadilan Agama Palangkaraya	30.000.000,00
15	005.01.402593	Pengadilan Agama Ambarawa	8.950.000,00
16	005.01.402860	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	19.700.000,00
17	005.01.531865	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	119.250.000,00
18	005.01.578843	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	40.882.000,00
19	005.01.614691	Pengadilan Agama Tanggamus	10.000.000,00
20	005.01.673062	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	52.545.300,00
JUMLAH			**658.409.765**

Merupakan transaksi belanja modal Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Pemeliharaan pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.188.448.024,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	(294.460.174,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai gedung atas: - Pengadaan Jasa Konstruksi Climbing berupa permasangan ralling besi keliling sebesar Rp61.567.704 - Pengadaan Jasa Perbaikan Instalasi Air Kotor dan Air Hujan sebesar Rp78.747.840 - Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Sarana dan Ruangan sebesar Rp74.770.630 - Pengadaan Jasa Konstruksi Relokasi Ruang Mediasi sebesar Rp79.374.000
			(69.900.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan atas Pengadaan Jasa Perbaikan Sistem Pompa STP yang seharusnya dicatat sebagai peralatan mesin sebesar Rp69.900.000
2	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	(8.350.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa lemari/rak wastafel senilai Rp8.350.000
3	098167	Pengadilan Negeri Sidoarjo	(49.994.400,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah Nilai Gedung dan Bangunan
4	098281	Pengadilan Negeri Malang	(3.981.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa CCTV
5	098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	(271.958.400,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan berupa pembuatan partisi Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh
6	098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	(4.000.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin
7	400358	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	(16.592.200,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa Partisi untuk pembuatan Pembatas Ruangan Perpustakaan senilai Rp16.592.200,00
8	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(17.509.350,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan peralatan dan mesin berupa hordeng (16 set) senilai Rp17.509.350
			(3.800.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa lampu tembak kantor (2 buah) senilai Rp3.800.000
			(1.200.000,00)	Koreksi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa mesin kolam (1 buah) senilai Rp1.200.000
9	401582	Mahkamah Syar'Iyah Aceh	(105.063.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan, dengan rincian: - Pekerjaan pemasangan pintu otomatis dengan nilai Rp70.200.000 - Renovasi gedung dan renovasi ruang disabilitas dengan nilai Rp34.863.000
10	401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	(49.000.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan berupa pembuatan ruang bermain anak
11	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(23.400.000,00)	Koreksi Beban Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Tanaman Indoor yang seharusnya menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel (521253)
			(23.550.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pembangunan Bidang Kolam Ikan dan Taman Hijau yang seharusnya menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel (521253)
			(62.562.400,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Vertikal Blind Semi Blok out sebesar Rp 19.934.100, Vertikal Blind 5034 ukuran 35.38 sebesar Rp18.928.300, dan 3 unit Partisi sebesar Rp23.700.000
12	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	(17.600.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Pemasangan Gordyn sebanyak 20 buah senilai Rp17.600.000
13	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	(994.500,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk pembelian AF Gordyn senilai Rp994.500,00 seharusnya Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252)
			(39.655.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp39.655.000,00
14	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	(10.050.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Perlatan dan Mesin berupa CCTV
			(37.640.100,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya menambah nilai Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan Backdop Lobby
			(1.443.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa pembelian 1 (satu) unit Pompa Air Tandon Gedung
			(8.085.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa pengadaan dan pemasangan 1 (satu) unit Tandon Atap senilai Rp8.085.000
			(850.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berupa pembelian mesin chain saw
			(11.145.500,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Perlatan dan Mesin berupa Pengadaan Gorden Untuk Gedung Kantor senilai Rp11.145.500
15	663300	Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya	(24.000.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa lampu sebesar Rp24.000.000
			(55.000,00)	Merupakan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan realisasinya pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) pada tahun 2022 sebesar Rp55.000
16	672973	Pengadilan Negeri Kasongan	(20.059.200,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp20.059.200
			(11.549.800,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya merupakan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin berupa Pemindahan CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp11.549.800,00
Jumlah			**(1.188.448.024,00)**	

2. Koreksi berkurang akun 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp431.654.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Keterangan
1	098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	(1.200.000,00)	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian barang persediaan berupa tiga buah tinta printer
2	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(2.352.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya menggunakan Belanja Sewa atas sewa AC (3 buah) senilai Rp2.352.000
			(1.935.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin berupa Audio Equalizer in/out door 30 band (1 buah) senilai Rp1.935.000
3	401426	Pengadilan Agama Malang	(10.515.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya menambah nilai Peralatan dan Mesin berupa Hardisk untuk server senilai Rp8.765.000 serta SSD dan RAM untuk laptop senilai 1.750.000
4	401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	(7.896.000,00)	Koreksi untuk mereklasifikasi beban pemeliharaan ke beban persediaan atas realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang digunakan untuk pembelian barang persediaan berupa toner dan cartridge printer
5	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	(330.000,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya merupakan perolehan Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berupa pembelian Webcam Logitech
6	663157	Badan Urusan Administrasi	(189.948.750,00)	Koreksi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang seharusnya merupakan perolehan Perlatan dan Mesin berupa set top box dan server IPTV
			(244.177.070,00)	Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pengadaan BBM Kendaraan Operasional antara MA dengan Pertamina berdasarkan Perjanjian No.22/BUA.7/SP/1/2022 tgl 1 Januari 2022 sebesar Rp244.177.070
7	663300	Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya	(4.909.500,00)	Merupakan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan realisasinya pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) tahun 2022 pada Dilmilti Surabaya sebesar Rp4.909.500
8	672973	Pengadilan Negeri Kasongan	20.059.200,00	Koreksi menambah Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin atas kesalahan penggunaan akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pemeliharaan CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp20.059.200
			11.549.800,00	Koreksi menambah Beban Pemeliharaan Perlatan dan Mesin atas kesalahan penggunaan akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan untuk Pemindahan CCTV (ITAM GROUP) senilai Rp11.549.800
Jumlah			**(431.654.320,00)**	

Beban Perjalanan Dinas Rp497.057.765.025,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp497.057.765.025,00 dan Rp366.131.582.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
524111	Beban Perjalanan Biasa	278.969.628.929,00	198.066.864.218,00	40,85
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(1.114.769.046,00)	(2.191.081.818,00)	(49,12)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	130.108.019.275,00	120.152.139.570,00	8,29
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(423.748.937,00)	(596.162.465,00)	(28,92)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.405.379.036,00	22.235.611.834,00	36,74
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	(67.620.213,00)	(95.002.969,00)	(28,82)
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	21.350.996,00	(100,00)
524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	(3.159.000,00)	(100,00)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.965.724.778,00	28.892.820.022,00	86,78
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(221.525.073,00)	(351.797.708,00)	(37,03)
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.391.002.344,00	0,00	0,00
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(16.609,00)	0,00	0,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	45.690.541,00	0,00	0,00
Jumlah		**497.057.765.025,00**	**366.131.582.680,00**	**35,76**

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Perjalanan Dinas pada beberapa Satuan Kerja, yaitu Koreksi bertambah pada akun 524111 Beban Perjalanan Biasa sebesar Rp1.179.554.166,00 terdapat pada Satuan Kerja 663712 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merupakan Kurang Catat Jurnal Akrual Tahun 2022 terkait tunggakan Biaya Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2022.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp733.312.551.506,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp733.312.551.506,00 dan Rp619.706.020.768,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	374.731.496.009,00	300.977.593.843,00	24,50
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	342.302.974.181,00	302.644.618.645,00	13,10
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.344.087.296,00	3.656.878.549,00	(8,55)
591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.399.372.403,00	1.311.138.215,00	6,73
591313	Beban Penyusutan Jaringan	4.873.410.143,00	5.033.187.275,00	(3,17)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	176.825.087,00	299.497.753,00	(40,96)
592115	Beban Amortisasi Software	3.392.595.231,00	3.626.993.089,00	(6,46)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	1.872.274.899,00	1.060.849.503,00	76,49
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	2.562.500,00	3.903.743,00	(34,36)
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.216.953.757,00	1.091.360.153,00	11,51
Jumlah		**733.312.551.506,00**	**619.706.020.768,00**	**18,33**

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Penyusutan dan Amortisasi pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi bertambah akun 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp178.532.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	5.642.856,00	Perolehan Lainnya Sumersible Pump
			4.342.858,00	Perolehan Lainnya Sumersible Pump
2	098036	Pengadilan Negeri Purbalingga	(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
			(22.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang PC Workstation
3	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	1.670.000,00	Perolehan Lainnya Lemari Kayu
4	098281	Pengadilan Negeri Malang	796.200,00	Perolehan Lainnya CCTV - Camera Control Television System
5	098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	800.000,00	Perolehan Lainnya Treng Air/Tandon Air
6	098629	Pengadilan Negeri Medan	(17.500,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Lap Top
7	400214	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	3.997.000,00	Saldo Awal Meja Komputer
			1.092.000,00	Saldo Awal Microphone
			(310.800,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Sofa
			728.000,00	Saldo Awal Microphone
			1.049.500,00	Saldo Awal Audio Converter
			949.200,00	Saldo Awal Mixer Sound Sistem
			(194.250,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Alat Kantor Lainnya
			4.050.200,00	Saldo Awal Loudspeaker
			1.113.000,00	Saldo Awal A.C. Split
			1.144.500,00	Saldo Awal Microphone
			310.800,00	Perolehan Lainnya Sofa
			68.498.000,00	Saldo Awal Cable

8	400358	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	237.032,00	Perolehan Lainnya Partisi
			1.422.186,00	Perolehan Lainnya Partisi
9	400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	900.000,00	Perolehan Lainnya Kursi Kayu
			760.000,00	Perolehan Lainnya Lampu
			387.000,00	Perolehan Lainnya Equalizer
			240.000,00	Perolehan Lainnya Mesin Pompa air PMK
10	401426	Pengadilan Agama Malang	437.500,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Note Book
11	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	476.686,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			2.370.000,00	Perolehan Lainnya Partisi
			246.100,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			173.340,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			1.993.410,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
			996.705,00	Perolehan Lainnya Vertikal Blind
12	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2.100.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			453.100,00	Perolehan Lainnya Papan Visual/Papan Nama
13	401924	Pengadilan Negeri Penajam	10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			14.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			14.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
			10.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah A.C. Split
14	477368	Pengadilan Negeri Tebo	(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
			(125.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Personal Computer
15	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	1.617.000,00	Perolehan Lainnya Treng Air/Tandon Air
			380.000,00	Perolehan Lainnya Lemari Display
			2.010.000,00	Perolehan Lainnya CCTV - Camera Control Television System
			103.071,00	Perolehan Lainnya Pompa Air
			816.000,00	Perolehan Lainnya Papan Visual/Papan Nama
16	663157	Badan Urusan Administrasi	15.109.875,00	Perolehan Lainnya TV Connector
			4.856.250,00	Perolehan Lainnya Server
17	663182	Pengadilan Militer I - 01 Di Banda Aceh	39.490.000,00	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Genset
18	663300	Pengadilan Militer Tinggi Iii Di Surabaya	700.000,00	Perolehan Lainnya Lampu
			2.800.000,00	Perolehan Lainnya Lampu-lampu Kristal
			1.300.000,00	Perolehan Lainnya Lemari Kayu
19	400365	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	1.187.500,00	Perolehan Lainnya Meubelair Lainnya
Jumlah			**178.532.319,00**	

2. Koreksi bertambah akun 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp284.949.866,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Keterangan
1	097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	6.134.587,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
2	097929	Pengadilan Negeri Wonosobo	(1,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
3	098167	Pengadilan Negeri Sidoarjo	3.562.698,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
4	098701	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	370.815.350,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(135.127.425,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(57.087.857,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(932.955,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
5	098900	Pengadilan Negeri Muara Bungo	(24.568.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(727.640,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung Pos Jaga Permanen
			(9.838.513,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
			573.600,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Rumah Tahanan Lainnya

			143.840,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen
			1.265.560,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gudang Tertutup Permanen
			110.240,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya
6	099003	Pengadilan Negeri Sekayu	15.190.804,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(7.394.700,00)	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
7	099070	Pengadilan Negeri Singkawang	5.454.546,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
8	099396	Pengadilan Negeri Luwuk	780.000,00	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
			1.680.000,00	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
9	099837	Pengadilan Negeri Karangasem	(2.995.334,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
10	400600	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	(7.376.114,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen
11	401582	Mahkamah Syar'Iyah Aceh	2.562.512,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
12	401591	Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh	597.561,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
13	401664	Mahkamah Syar'Iyah Lhok Seumawe	32.746.458,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(32.909.740,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
14	401904	Pengadilan Negeri Suka Makmue	(1.799.060,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
15	401920	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	40.080.977,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
16	402732	Pengadilan Agama Negara	9.316.294,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
17	417844	Pengadilan Negeri Pandeglang	359.140,00	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
18	477368	Pengadilan Negeri Tebo	(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.574.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(2.922.680,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Pagar Permanen
			120.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			81.158.295,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			456.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Tempat Parkir
			820.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Tempat Parkir
			9.608.260,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			60.000,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Tempat Parkir
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(2.663.740,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(850.240,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.700.000,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Tempat Parkir
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(1.454.370,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(8.470.740,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
19	526767	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	862.065,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
20	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	965.131,00	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen

			(15.052,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Rumah Genset
			(301.123,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(30.547,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
			(30.548,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
21	663300	Pengadilan Militer Tinggi Iii Di Surabaya	(32.922,00)	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
22	672969	Pengadilan Negeri Pagar Alam	9.147.480,00	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan
Jumlah			**284.949.866,00**	

3. Koreksi bertambah akun 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.275.350,00 terdapat pada Satuan Kerja 578839 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi merupakan Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi BMN.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Rp16.132.682,00

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan Beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.132.682,00 dan (Rp1.036.637,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	(199.122,00)	52.376,00	(480,18)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	19.885.272,00	(1.158.887,00)	(1.815,89)
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(3.000.000,00)	69.874,00	(4.393,44)
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(553.468,00)	0,00	0,00
Jumlah		**16.132.682,00**	**(1.036.637,00)**	**(1.656,25)**

Terdapat Beban Penyisihan Piutang PNBP pada Satuan Kerja 005.01.1900.099600 Pengadilan Negeri Palopo, Satuan Kerja 005.01.2200.099802 Pengadilan Negeri Negara, Satuan Kerja 005.01.2300.614727 Pengadilan Agama Giri Menang dan Satuan Kerja 005.03.097450 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas Piutang Lainnya sebesar (Rp199.122,00), seharusnya akun yang terbentuk yaitu Beban Penyisihan Piutang Lainnya, hal ini timbul akibat dari pencatatan settlement piutang pada Modul Piutang.

Terdapat koreksi *audited* atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. 594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP sebesar Rp2.759,00 pada Satuan Kerja 099600 Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengakuan beban penyisihan piutang atas sewa rumah dinas (pemakaian bulan Juli s.d September 2022) yang baru dibayarkan pada Desember 2022 s.d Februari 2023 melalui potongan SPM.
2. 594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp22.180.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Keterangan
1	401887	Pengadilan Agama Rumbia	20.807.544,00	Jurnal Beban Penyisihan atas Piutang Lainnya dari Pengembalian Belanja Modal ke Kas Negara atas Pencairan Bank Garansi
2	401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	3.945,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas Pengembalian Uang Makan PNS Ke Kas Negara
3	548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	134.760,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji atas 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dari bulan Juli s.d. November 2022
4	663157	Badan Urusan Administrasi	1.220.885,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas Kelebihan Bayar Pengadaan BBM Kendaraan Operasional antara MA dengan Pertamina, berdasarkan Perjanjian No.22/BUA.7/SP/1/2022 tgl 1 Januari 2022
5	663122	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	12.914,00	Jurnal Beban Penyisihan Piutang Lainnya
Jumlah			**22.180.048,00**	

Terdapat kurang saji Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada periode *audited* pada 2 satuan kerja dikarenakan belum dilakukan penginputan jurnal atas penyisihan piutang, dengan rincian sebagai berikut:

1. PN Malang (005.01.0500.098281) sebesar Rp72.708,00, piutang tersebut telah lunas pada tahun 2023.
2. PN Jakarta Pusat (005.01.0100.097471) sebesar Rp174.750,00, PN Jakarta Pusat belum melakukan pelunasan piutang di tahun 2023. Atas hal tersebut, akan dilakukan koreksi di tahun 2023.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(Rp6.435.298.055,00)

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp6.435.298.055,00) dan (Rp9.098.471.468,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	2022	2021	% Naik/ (Turun)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.818.000,00	305.784.500,00	(93,85)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.495.799.657,00	1.707.342.248,00	(12,39)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.506.979.027,00	1.811.446.124,00	38,40
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	13.575.000,00	31.750.000,00	(57,24)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	66.300.000,00	(100,00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	424.161.712,00	1.224.195.771,00	(65,35)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.913.067.958,00	599.733.541,00	552,47
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	778.240.450,00	543.119.259,00	43,29
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	281.795.607,00	277.369.054,00	1,60
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	9.319.394.177,00	1.462.543.000,00	537,20
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	25.597.189.511,00	1.040.136,00	2.460.846,41
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(20.667.012.553,00)	(223.366,00)	9.252.432,86
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	(29.335.903.099,00)	(16.618.102.338,00)	76,53
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	(781.403.502,00)	(510.769.397,00)	52,99
Jumlah		**(6.435.298.055,00)**	**(9.098.471.468,00)**	**(29,27)**

Penjelasan:

- 491429 - Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp9.319.394.177,00 pada 2 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Keterangan
1	005.01.401055	Pengadilan Agama Kebumen	808.518.000,00	- Merupakan tanah bangunan rumah negara gol. 1 atas perolehan tanah idle berdasarkan penetapan dari KPKNL karena tidak ada ADK dari Satuan Kerja pemberi sehigga masuk ke perolehan lainnya sebesar Rp803.368.000,00 - Adanya kesalahan kode akun pada saat penginputan pengembangan melalui kdp berupa gedung dan bangunan. Yang semula memakai akun pembentukan kdp kemudian dilakukan koreksi pencatatan menjadi pengembangan melalui kdp sebesar Rp5.150.000,00
2	005.01.401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	8.510.876.177,00	Merupakan Paket Meubelair yang diperoleh dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai Pada Periode 13 adalah Rp5.536.194.599,00, dan Paket Pekerjaan Sarana Lingkungan yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai pada Periode 13 adalah Rp2.974.681.578,00 terdiri dari Jalan Khusus Lainnya Rp1.514.655.890,00, Jembatan Penyeberangan Kendaraan Rp946.789.100,00, Saluran Sekunder Pembuangan (Saluran Pembuang Pasang Surut) Rp513.236.588,00. Perlu Adanya Koreksi Kembali atas Perolehan Lainnya tersebut akibat nilai harga satuan yang termultiplikasi hasil generate Aplikasi SAKTI sehingga nilai keseluruhan Perolehan Lainnya melampaui nilai Perolehan yang diperoleh dari hasil pemecahan KDP
Jumlah			**9.319.394.177,00**	

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

- 491511 - Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp25.597.189.511,00 pada 47 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
1	005.01.097631	Pengadilan Negeri Subang	855.000,00
2	005.01.098061	Pengadilan Negeri Wates	864.695.500,00
3	005.01.098082	Pengadilan Negeri Sleman	217.002.850,00
4	005.01.098200	Pengadilan Negeri Jember	324.000.000,00
5	005.01.098303	Pengadilan Negeri Probolinggo	4.341.600,00
6	005.01.098551	Pengadilan Negeri Kutacane	5.628.510.000,00
7	005.01.099485	Pengadilan Negeri Jeneponto	11.236.000.000,00
8	005.01.099710	Pengadilan Negeri Masohi	530.000,00
9	005.01.099769	Pengadilan Negeri Soasiu	2.745.000,00
10	005.01.099993	Pengadilan Negeri Maumere	1.605.000,00
11	005.01.307761	Pengadilan Agama Tual	4.865.000,00
12	005.01.400879	Pengadilan Agama Pemalang	38.000,00
13	005.01.401293	Pengadilan Agama Gresik	3.765.384.000,00
14	005.01.401880	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	63.952.000,00
15	005.01.401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	99.960.000,00
16	005.01.401900	Pengadilan Tinggi Agama Padang	432.000,00
17	005.01.401949	Pengadilan Agama Prabumulih	200.000,00
18	005.01.401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	934.000,00
19	005.01.401969	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	462.164.000,00
20	005.01.401973	Pengadilan Negeri Bobong	2.260.000,00
21	005.01.402004	Pengadilan Agama Painan	2.303.520.000,00
22	005.01.402101	Pengadilan Agama Bangkinang	40.000,00
23	005.01.402267	Pengadilan Agama Baturaja	260.000,00
24	005.01.402386	Pengadilan Agama Ketapang	207.500,00
25	005.01.402531	Pengadilan Agama Kandangan	66.000,00
26	005.01.402839	Pengadilan Agama Kefamenanu	750.004,00
27	005.01.402989	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	200.783.885,00
28	005.01.526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	136.740.000,00
29	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	190.000,00
30	005.01.576260	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	975.275,00
31	005.01.663012	Pengadilan Negeri Sengeti	260.000,00
32	005.01.663300	Pengadilan Militer Tinggi III Di Surabaya	180.000,00
33	005.01.663377	Pengadilan Militer III - 18 Di Ambon	500.000,00
34	005.03.099083	Pengadilan Negeri Sukabumi	519.000,00
35	005.03.099092	Pengadilan Negeri Semarang	22.500,00
36	005.03.099131	Pengadilan Negeri Sleman	9.320.750,00
37	005.03.099144	Pengadilan Negeri Jember	2.845.000,00
38	005.03.099200	Pengadilan Negeri Tarutung	242.765.100,00
39	005.03.099215	Pengadilan Negeri Bengkalis	180.000,00
40	005.03.099218	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	896.000,00
41	005.03.099273	Pengadilan Negeri Tarakan	3.498.000,00
42	005.04.309114	Pengadilan Agama Dompu	43.747,00
43	005.04.401257	Pengadilan Agama Mojokerto	8.925.000,00
44	005.04.401294	Pengadilan Agama Gresik	1.736.000,00
45	005.04.401521	Pengadilan Agama Pacitan	100.000,00
46	005.04.401696	Mahkamah Syar'Iyah Kuala Simpang	1.139.800,00
47	005.04.690182	Pengadilan Agama Arso	252.000,00
Jumlah			**25.597.189.511,00**

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

- 593311 - Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar (Rp20.667.012.553,00) pada 42 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
1	005.01.097577	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	(279.000,00)
2	005.01.098061	Pengadilan Negeri Wates	(864.695.500,00)
3	005.01.098082	Pengadilan Negeri Sleman	(286.593.050,00)
4	005.01.098200	Pengadilan Negeri Jember	(324.000.000,00)
5	005.01.098303	Pengadilan Negeri Probolinggo	(4.281.600,00)
6	005.01.099141	Pengadilan Negeri Muara Tewe	(600.000,00)
7	005.01.099485	Pengadilan Negeri Jeneponto	(11.236.000.000,00)
8	005.01.099837	Pengadilan Negeri Karangasem	(15.000,00)
9	005.01.307122	Pengadilan Agama Kotabaru	(7.380.230,00)
10	005.01.307300	Pengadilan Agama Luwuk	(50.000,00)
11	005.01.307761	Pengadilan Agama Tual	(4.865.000,00)
12	005.01.400879	Pengadilan Agama Pemalang	(987.974,00)
13	005.01.401293	Pengadilan Agama Gresik	(3.765.384.000,00)
14	005.01.401880	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	(59.545.000,00)
15	005.01.401900	Pengadilan Tinggi Agama Padang	(432.000,00)
16	005.01.401969	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	(462.164.000,00)
17	005.01.402004	Pengadilan Agama Painan	(2.303.520.000,00)
18	005.01.402531	Pengadilan Agama Kandangan	(1.666.999,00)
19	005.01.402839	Pengadilan Agama Kefamenanu	(750.004,00)
20	005.01.402911	Pengadilan Agama Manokwari	(330.000,00)
21	005.01.402989	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	(200.783.885,00)
22	005.01.403077	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	(32.224.150,00)
23	005.01.440740	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	(50.000,00)
24	005.01.526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	(136.740.000,00)
25	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	(19.000,00)
26	005.01.576260	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	(520.750,00)
27	005.01.663377	Pengadilan Militer Iii - 18 Di Ambon	(750.000,00)
28	005.01.670191	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	(4.552.000,00)
29	005.03.099083	Pengadilan Negeri Sukabumi	(1.814.404,00)
30	005.03.099092	Pengadilan Negeri Semarang	(22.500,00)
31	005.03.099131	Pengadilan Negeri Sleman	(939.106.460,00)
32	005.03.099144	Pengadilan Negeri Jember	(1.950.000,00)
33	005.03.099200	Pengadilan Negeri Tarutung	(8.302.500,00)
34	005.03.099215	Pengadilan Negeri Bengkalis	(120.000,00)
35	005.03.099218	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	(896.000,00)
36	005.03.099273	Pengadilan Negeri Tarakan	(3.498.000,00)
37	005.04.309114	Pengadilan Agama Dompu	(43.747,00)
38	005.04.401257	Pengadilan Agama Mojokerto	(8.925.000,00)
39	005.04.401294	Pengadilan Agama Gresik	(1.736.000,00)
40	005.04.401696	Mahkamah Syar'Iyah Kuala Simpang	(1.124.800,00)
41	005.04.402002	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	(42.000,00)
42	005.04.690182	Pengadilan Agama Arso	(252.000,00)
Jumlah			**(20.667.012.553,00)**

- 596111 - Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar (Rp29.335.903.099,00) pada 61 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Kerugian Pelepasan Aset
1	005.01.097467	Pengadilan Tinggi Jakarta	(4.474.000,00)
2	005.01.097560	Pengadilan Negeri Serang	(4.687.500,00)
3	005.01.097603	Pengadilan Negeri Purwakarta	(12.554.200,00)
4	005.01.097734	Pengadilan Negeri Tegal	(1.610.400,00)
5	005.01.097865	Pengadilan Negeri Rembang	(76.500,00)
6	005.01.098434	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	(5.281.913.424,00)
7	005.01.098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	(1.441.682.081,00)
8	005.01.098586	Pengadilan Negeri Sinabang	(431.322.870,00)
9	005.01.098633	Pengadilan Negeri Binjai	(70.848.400,00)
10	005.01.098832	Pengadilan Negeri Payakumbuh	(19.236.362,00)
11	005.01.098895	Pengadilan Negeri Jambi	(490.000,00)
12	005.01.099176	Pengadilan Negeri Sampit	(30.575.000,00)
13	005.01.099202	Pengadilan Negeri Kandangan	(12.494.846,00)
14	005.01.099230	Pengadilan Negeri Martapura	(71.000,00)
15	005.01.099244	Pengadilan Negeri Tanjung	(812.500,00)
16	005.01.099265	Pengadilan Negeri Rantau	(2.120.051.967,00)
17	005.01.099532	Pengadilan Negeri Watampone	(10.500.000,00)
18	005.01.099581	Pengadilan Negeri Bulukumba	(5.666.669,00)
19	005.01.099802	Pengadilan Negeri Negara	(555.060,00)
20	005.01.099862	Pengadilan Negeri Mataram	(584.331.000,00)
21	005.01.099972	Pengadilan Negeri Waikabubak	(82.501.454,00)
22	005.01.307452	Pengadilan Agama Ujung Pandang	(990.200,00)
23	005.01.307509	Pengadilan Agama Watampone	(227.631.418,00)
24	005.01.308014	Pengadilan Agama Manna	(3.811.020,00)
25	005.01.400245	Pengadilan Tinggi Kupang	(5.370.275,00)
26	005.01.400260	Pengadilan Negeri Marabahan	(314.582.220,00)
27	005.01.400389	Pengadilan Negeri Kisaran	(650.000,00)
28	005.01.400415	Pengadilan Negeri Janthoi	(13.540.950,00)
29	005.01.400503	Pengadilan Tinggi Jambi	(2.875.000,00)
30	005.01.400512	Pengadilan Tinggi Bengkulu	(67.509.350,00)
31	005.01.400534	Pengadilan Tinggi Palu	(261.129.280,00)
32	005.01.400565	Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi	(5.642.394.497,00)
33	005.01.400678	Pengadilan Agama Sumedang	(182.684.000,00)
34	005.01.400823	Pengadilan Agama Tangerang	(10.000.000,00)
35	005.01.400848	Pengadilan Agama Karawang	(408.000,00)
36	005.01.400891	Pengadilan Agama Brebes	(85.389.000,00)
37	005.01.400942	Pengadilan Agama Demak	(1.633.338.462,00)
38	005.01.400967	Pengadilan Agama Pati	(110.055.419,00)
39	005.01.401902	Pengadilan Negeri Blangpidie	(2.230.255,00)
40	005.01.401915	Pengadilan Negeri Cikarang	(4.931.000,00)

41	005.01.401966	Mahkamah Syar'Iyah Suka Makmue	(6.256.120,00)
42	005.01.402205	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	(308.908.888,00)
43	005.01.402412	Pengadilan Agama Putussibau	(50.000,00)
44	005.01.402474	Pengadilan Agama Sampit	(5.573.301.790,00)
45	005.01.402531	Pengadilan Agama Kandangan	(1.141.000,00)
46	005.01.402690	Pengadilan Agama Limboto	(1.851.000,00)
47	005.01.477368	Pengadilan Negeri Tebo	(3.159.272,00)
48	005.01.526711	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraujung Pandang	(100.830.000,00)
49	005.01.526771	Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang	(24.822.000,00)
50	005.01.531823	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	(7.600.000,00)
51	005.01.578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	(3.522.535.072,00)
52	005.01.613519	Pengadilan Negeri Kab.Bogor Di Cibinong, Jawa Barat	(372.128.420,00)
53	005.01.663157	Badan Urusan Administrasi	(403.584.261,00)
54	005.01.663292	Pengadilan Militer II - 11 Di Yogyakarta	(2.227.500,00)
55	005.01.663403	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	(1.402.148,00)
56	005.01.673062	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	(1.070.000,00)
57	005.01.682185	Pengadilan Agama Marisa	(6.410.000,00)
58	005.01.682207	Pengadilan Agama Andoolo	(400.000,00)
59	005.03.097450	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	(14.756.503,00)
60	005.04.401370	Pengadilan Agama Banyuwangi	(1.806.296,00)
61	005.04.663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	(295.687.250,00)
Jumlah			**(29.335.903.099,00)**

Merupakan transaksi penghapusan Persediaan dan Aset yang masih menyisakan nilai buku.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Beban Kerugian Pelepasan Aset sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

- 596121 - Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar (Rp781.403.502,00) pada 13 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Persediaan Rusak/Usang	Keterangan
1	005.01.663157	Badan Urusan Administrasi	(718.282.620,00)	Merupakan penghapusan barang persediaan rusak, SK SEKMA No. 2027
2	005.04.309054	Pengadilan Agama Tanah Grogot	(2.734.443,00)	Merupakan transaksi usang persediaan dalam rangka usulan pemusnahan barang persediaan yang sudah usang/rusak, dan sudah mendapatkan SK SEKMA tentang Pemusnahan No. 1454
3	005.04.400751	Pengadilan Agama Cirebon	(2.186.921,00)	Merupakan penghapusan barang persediaan rusak, Persetujuan SEKMA No. 2889
4	005.04.400773	Pengadilan Agama Majalengka	(11.257.244,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak
5	005.04.400849	Pengadilan Agama Karawang	(9.730.072,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
6	005.04.401202	Pengadilan Agama Sleman	(3.155.301,00)	Merupakan penghapusan barang persediaan rusak, SK SEKMA No. 1561
7	005.04.401257	Pengadilan Agama Mojokerto	(4.744.849,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dan terdapat perbedaan nilai karena adanya perbedaan harga pada persediaan tapi sama dalam kuantitas
8	005.04.401339	Pengadilan Agama Jember	(9.522.923,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
9	005.04.401382	Pengadilan Agama Tulungagung	(8.391.793,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
10	005.04.402082	Pengadilan Agama Rengat	(4.830.144,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
11	005.04.402102	Pengadilan Agama Bangkinang	(1.745.100,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
12	005.04.402623	Pengadilan Agama Dumai	(3.853.256,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
13	005.04.690140	Pengadilan Agama Batu Licin	(968.836,00)	Merupakan transaksi penghapusan barang usang/rusak, dengan dasar SK Kuasa Pengguna Barang
Jumlah			**(781.403.502,00)**	

Terdapat koreksi *audited* atas Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada beberapa Satuan Kerja, antara lain pada akun:

1. Koreksi berkurang akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp277.285.705,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Keterangan
1	097929	Pengadilan Negeri Wonosobo	184.517.708,00	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN
2	098036	Pengadilan Negeri Purbalingga	540.000,00	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN
3	401904	Pengadilan Negeri Suka Makmue	89.952.997,00	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN
4	401996	Pengadilan Agama Lolak	2.275.000,00	Merupakan kesalahan kode Satuan Kerja dan kode akun atas penyetoran PPN POSBAKUM Tahun 2021 yang seharusnya menggunakan kode Satuan Kerja KPP dan akun 411211 (Pendapatan PPN Dalam Negeri), Satuan Kerja melakukan ralat/koreksi kode Satuan Kerja KPP dan akun 411211
Jumlah			**277.285.705,00**	

2. Koreksi bertambah akun 425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp128.898.547,00 terdapat pada Satuan Kerja 663157 Badan Urusan Administrasi merupakan kesalahan penyetoran pengembalian belanja PNS yang telah pensiun menggunakan kode satker inaktif.

Pos-pos Luar Biasa Rp0,00

D.10. Pos-Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tidak terdapat Pos-Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.



PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp29.529.218.827.065,00

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp29.529.218.827.065,00 dan Rp28.772.957.024.392,00.

Defisit LO (Rp10.357.980.424.592,00)

E.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa.

Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar (Rp10.357.980.424.592,00) dan (Rp9.460.173.032.692,00).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0,00

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp737.584.260,00

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp737.584.260,00 dan Rp36.134.712,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 87. Rincian Koreksi Nilai Persediaan

(Dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi Nilai Persediaan
Barang Konsumsi	737.584.260,00
Jumlah	**737.584.260,00**

Koreksi Nilai Persediaan (391113) sebesar Rp737.584.260,00 terdapat pada 15 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Wilayah	KODE	SATKER	31 Desember 2022	Penjelasan
1	Aceh	005.01.098551	Pengadilan Negeri Kutacane	40.000,00	Koreksi nilai atas persediaan dikarenakan adanya 11951971.Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk Cantrig Cannon Pixma MG2570S Warna Hitam senilai -40.000
2	Banten	005.01.097577	Pengadilan Negeri Rangkas Bitung	278.500,00	Terdapat akun 391113 Koreksi Nilai Persediaan dikarenakan adanya penginputan saldo awal persediaan. Dikarenakan operator persediaan menginput saldo akhir persediaan di tahun lalu dan telah dilakukan koreksi nilai persediaan
3	Bengkulu	005.03.400513	Pengadilan Tinggi Bengkulu	433.000,00	Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk Catridge hitam G2000
4	Jawa Timur	005.03.099144	Pengadilan Negeri Jember	(895.000,00)	Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Keluar Label
5	Kepulauan Riau	005.01.614670	Pengadilan Agama Natuna	(56.000,00)	Koreksi Nilai Kurang Map Gobi dikarenakan nilai beli berbeda (barang sudah habis pakai)
6	Nusa Tenggara Timur	005.01.576260	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	235.950,00	Koreksi Kuantitas Tambah atas Reklasifikasi Masuk Lem Povinal -11.950, Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk Lem Povinal -1.375, Koreksi Nilai Tambah atas Reklasifikasi Masuk PORSTEK -201.000, Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Keluar isi Hekter HD 10 -3.625, Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Masuk So Klin Lantai 82.500 dan Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Keluar Tissu roll -100.500.
7	Papua	005.01.402876	Pengadilan Agama Jayapura	24.500,00	Koreksi Nilai Tambah karena perbedaan nilai atas Reklasifikasi Keluar Pelubang kertas kecil sebesar 8.500 dan Reklasifikasi Masuk PELUBANG KERTAS BESAR sebesar 33.000
8	Riau	005.03.099215	Pengadilan Negeri Bengkalis	(60.000,00)	Koreksi Kuantitas Kurang atas Reklasifikasi Masuk Agenda Surat Masuk Perdata 120.000 dan Koreksi Nilai Kurang atas Reklasifikasi Keluar Agenda Surat Keluar Perdata -60.000.
9	Sulawesi Tenggara	005.01.401885	Pengadilan Agama Wangi Wangi	10.000,00	Koreksi Nilai Tambah atas Koreksi Hasil Migrasi F4
10	Sumatera Selatan	005.01.098970	Pengadilan Negeri Lubuk Lingau	(29.860.000,00)	koreksi nilai atas persediaan senilai 29.860.000 (merupakan nilai gedung dan bangunan untuk pengadaan sarana disabilitas di input di menu koreksi nilai bertambah, di karenakan salah input detail barang pada modul komitmen sehingga menghasilkan nilai persediaan)
11	Sumatera Selatan	005.01.402236	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	(50.000,00)	koreksi nilai atas persediaan karena adanya salah pencatatan atas pembelian covid sarung tangan sebanyak 10 buah seharga 50.000 semestinya pencatatan barang konsumsi.
12	Sumatera Utara	005.01.098675	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	2.570.000,00	satuan kerja melakukan transaksi koreksi nilai persediaan pada modul persediaan dikarenakan penginputan saldo awal kembali yang seharusnya tidak perlu dilakukan satuan kerja melakukan transaksi koreksi nilai persediaan pada modul persediaan dikarenakan penginputan saldo awal kembali yang seharusnya tidak perlu dilakukan satuan kerja melakukan transaksi koreksi nilai persediaan pada modul persediaan dikarenakan penginputan saldo awal kembali yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Dan telah dilakukan perbaikan dengan cara opname fisik semester I untuk menyesuaian dengan sisa kuantitas antara fisik barang persediaan dengan aplikasi SAKTI modul persediaan.
13	Sumatera Utara	005.03.099200	Pengadilan Negeri Tarutung	(234.462.600,00)	Koreksi nilai kurang atas perbedaan nilai reklas keluar dan reklas masuk
14	Yogyakata	005.01.098082	Pengadilan Negeri Sleman	69.590.200,00	Koreksi nilai atas persediaan dikarenakan adanya kesalahan input harga dan jumlah pesediaan pada BAST Modul Komitmen
15	Yogyakata	005.03.099131	Pengadilan Negeri Sleman	929.785.710,00	Merupakan koreksi nilai atas perbedaan nilai saat reklas keluar dan reklas masuk
JUMLAH				**737.584.260,00**	

Koreksi Nilai Persediaan merupakan nilai koreksi tambah kurang nilai Persediaan yang berasal dari penginputan dan pengiriman Modul Persediaan dan adanya penginputan saldo awal pada menu persediaan masuk.

E.4.3. Koreksi Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Atas Reklasifikasi (Rp134.596.433,00)

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya merupakan transaksi pencatatan/penghapusan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain/sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru.

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp134.596.433,00) dan (Rp32.664.518.258,00).

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar (Rp134.596.433,00) terdapat pada 9 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Kode Wilayah	KODE	Nama Satker	Jumlah	Penjelasan
1	Jawa Tengah	005.01.097823	Pengadilan Negeri Salatiga	2.800.000,00	Terdapat 26659052.Reklasifikasi ke Aset Jam DInding Extra, 26659054.Reklasifikasi ke Aset Hardisk Extra, 26659051.Reklasifikasi ke Aset Jam Mekanis Extra dan 26659053.Reklasifikasi ke Aset Kipas Angin Extra
2	Jawa Timur	005.01.098104	Pengadilan Tinggi Surabaya	21.000.000,00	Satuan kerja melakukan Reklas Keluar Peralatan Mesin berupa Genset senilai 21.000.000 kemudian dilakukan Reklas Masuk berupa Rumah Genset dengan nilai Ekstrakomtabel Gedung Bangunan senilai Rp21.000.000
3	Sumatera Selatan	005.01.098942	Pengadilan Negeri Palembang	4.870.000,00	Terdapat reklas keluar intrakomptabel berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sebesar 99.347.000 dan Tanah untuk Taman Lainnya sebesar 4.600.000 kemudian dilakukan reklas masuk ekstrakomptabel ke Pagar Permanen sebanyak 8 buah sebesar 103.947.000; Terdapat reklas keluar persediaan ke aset tetap berupa Administrasi Belanja Modal Renovasi Pagar Rumah Dinas yang tercatat sebagai persediaan, sudah dilakukan reklas masuk ke aset tetap sehingga membentuk 2 NUP baru pagar permanen (12&13) sebesar 5.648.000
4	Maluku Utara	005.01.099731	Pengadilan Negeri Ternate	109.595.000,00	1. Merupakan Reklasifikasi Keluar Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sebesar 99,347,000; 2. Reklasifikasi Keluar Tanah Untuk Taman Lainnya 4,600,000; 3. Reklasifikasi dari persediaan ke aset berupa bahan bangunan dan konstrusi lainnya 4,900; Flash disk 85,000; kertas HVS 195,000; binder clips 200 28,000; tinta print epson hitam 440,000
5	Nusa Tenggara Timur	005.01.400007	Pengadilan Negeri Larantuka	(1.687.500,00)	Kesalahan Penginputan Kodefikasi Barang Laboratorium Pertanian Sehingga di Reklas keluar ke Persediaan kemudian di Reklas Masuk sebagai Personal Komputer di Aset. Nilai tersebut merupakan nilai penyusutan yang tidak ikut saat dilakukan reklas masuk berupa Personal Komputer sebanyak 2 kali.
6	Jawa Timur	005.01.401344	Pengadilan Agama Bondowoso	702.000,00	Satuan kerja melakukan Reklas Keluar Barang Persediaan berupa thermogun senilai 720.000 kemudian dilakukan Reklas Masuk berupa Peralatan dan Mesin dengan nilai Ekstrakomtabel senilai 720.000
7	Jawa Timur	005.01.401381	Pengadilan Agama Tulungagung	(6.666.667,00)	Terdapat 391151 Koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya sebesar (6.666.667,00) adalah akumulasi penyusutan aset tetap atas kesalahan reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan.
8	Jawa Timur	005.01.401463	Pengadilan Agama Kraksaan	1.301.000,00	Koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya sebesar Rp1.3001.000,00 adalah reklas dari persediaan ke aset tetap dengan nilai ektrakomtable yaitu 2 unit APAR @600.000,00 dan 1 unit standmic @1.001.000,00
9	Sulawesi Tengah	005.01.578850	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	2.682.600,00	Koreksi kesalahan pencatatan yang seharusnya aset tetap tetapi dicatat sebagai persediaan
TOTAL				**134.596.433**	

Merupakan nilai yang timbul akibat adanya transaksi reklas masuk dan reklas keluar baik Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya kiriman dari Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp155.857.561,00).

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp98.103.442.030,00

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp98.103.442.030,00 dan (Rp209.195.042.665,00).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena reavaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi

AKUN	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	97.531.352.646,00	(204.808.397.833,00)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	572.089.384,00	(4.386.644.832,00)
JUMLAH		**98.103.442.030,00**	**(209.195.042.665,00)**

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

AKUN	URAIAN	KOREKSI		JUMLAH
		TAMBAH	KURANG	
131111	Tanah	211.143.109.707,00	(212.233.198.654,00)	(1.090.088.947,00)
132111	Peralatan dan Mesin	29.021.673.555,00	(251.234.733.698,00)	(222.213.060.143,00)
133111	Gedung dan Bangunan	246.611.717.985,00	(296.353.940.256,00)	(49.742.222.271,00)
134111	Jalan dan Jembatan	739.613.500,00	(404.983.675,00)	334.629.825,00
134112	Irigasi	90.988.000,00	(207.185.500,00)	(116.197.500,00)
134113	Jaringan	218.037.450,00	(1.644.024.132,00)	(1.425.986.682,00)
135111	Aset Tetap Renovasi	0,00	(20.065.190.986,00)	(20.065.190.986,00)
135121	Aset Tetap Lainnya	11.401.750,00	(805.102.412,00)	(793.700.662,00)
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	160.743.656.584,00	(218.806.583.170,00)	(58.062.926.586,00)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16.140.516.574,00)	44.059.207.507,00	27.918.690.933,00
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(59.886.014.246,00)	17.847.554.028,00	(42.038.460.218,00)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(737.338.150,00)	267.973.570,00	(469.364.580,00)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(40.944.600,00)	37.357.935,00	(3.586.665,00)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(125.693.334,00)	107.646.896,00	(18.046.438,00)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		1.181.754.006,00	1.181.754.006,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	72.430.198.704,00	(15.563.800.395,00)	56.866.398.309,00
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		(154.615.000,00)	(154.615.000,00)
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	(53.008.660.586,00)	11.346.423.287,00	(41.662.237.299,00)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	(29.700.000,00)	154.215.000,00	124.515.000,00
	Koreksi Jurnal Manual GLP	448.961.048.550,00	0,00	448.961.048.550,00
JUMLAH		**1.040.002.578.295,00**	**(942.471.225.649,00)**	**97.531.352.646,00**

Rincian penjelasan jurnal manual per Satuan Kerja atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar RP448.961.048.550,00 sebagaimana terlampir pada data Pendukung Laporan Keuangan.

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Kode Perkiraan	Jenis Aset Lainnya	Koreksi Nett		Jumlah
		Nett Tambah	Nett Kurang	
162151	Software	929.454.775,00	(1.133.876.044,00)	(204.421.269,00)
162161	Lisensi	75.302.000,00	(38.500.000,00)	36.802.000,00
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.101.743.885,00	0,00	1.101.743.885,00
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(326.817.211,00)	1.070.780.405,00	743.963.194,00
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(64.006.700,00)	34.375.000,00	(29.631.700,00)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	(1.067.918.885,00)	0,00	(1.067.918.885,00)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	1.552.159,00	0,00	1.552.159,00
Jumlah		**647.757.864,00**	**(77.220.639,00)**	**572.089.384,00**

Jurnal koreksi jurnal manual pada modul GLP atas akun 391118 pada Satuan Kerja Badan Litbang Diklat Kumdil (005.06.610378) dikarenakan adanya koreksi

pengurangan aset tetap lainnya berupa *software* atas pengembalian belanja modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) tahun 2021 sebesar Rp1.552.159,00.

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Koreksi Lain-lain (Rp271.426.058,00).

E.4.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir ppada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp271.426.058,00) dan Rp289.778.732,00 Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Nilai Koreksi Lain-lain

Uraian	Jumlah Koreksi
Koreksi Kewajiban	(6.189.730,00)
Koreksi Beban	(265.236.328,00)
Jumlah	**(271.426.058,00)**

Rincian Nilai Koreksi Per Akun

AKUN	URAIAN	31 Desember 2022
212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(909.810,00)
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	9.261.680,00
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	(14.541.600,00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	26.659.600,00
511111	Beban Gaji Pokok PNS	(12.153.947,00)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	(490,00)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	240.820,00
511122	Beban Tunj. Anaki PNS	60.964,00
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	(540.000,00)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	(1.400.000,00)
511129	Beban Uang Makan PNS	2.791.000,00
521111	Beban Keperluan Perkantoran	(20.321.500,00)
522111	Beban Langganan Listrik	(232.171.766,00)
522112	Beban Langganan Telepon	5.293.976,00
522113	Beban Langganan Air	969.515,00
522141	Belanja Sewa	(29.700.000,00)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(55.000,00)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(4.909.500,00)
JUMLAH		**(271.426.058,00)**

Koreksi Lain-lain terdapat pada 34 Satuan Kerja, rincian penjelasan per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Koreksi Lain-lain	Keterangan
1	005.01.097471	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	973.635,00	Koreksi kurang catat beban langganan air
2	005.01.400214	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	432.520,00	Koreksi kurang catat beban langganan telepon
3	005.01.097709	Pengadilan Negeri Kuningan	13.000.000,00	Koreksi kurang catat beban keperluan perkantoran (internet) bulan desember 2021
8	005.01.401180	Pengadilan Agama Surakarta	(119.565,00)	koreksi lebih catat beban langganan telepon
9	005.01.401381	Pengadilan Agama Tulungagung	(9.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik sebesar Rp.3.000 dan beban langganan telepon sebesar Rp.6.000
10	005.01.401390	Pengadilan Agama Trenggalek	(2.750,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
11	005.01.098146	Pengadilan Negeri Lamongan	976.262,00	Koreksi kurang catat beban gaji pokok PNS sebesar Rp.976.240, beban pembulatan gaji PNS sebesar Rp.22 yang tidak direalisasikan karena pegawai yang bersangkutan pindah sehingga tidak dimintakan SPM
12	005.01.098150	Pengadilan Negeri Gresik	(18.641.637,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik bulan desember 2021 sebesar Rp.18.538.278 dan beban langganan air sebesar Rp.103.359
13	005.01.403046	Pengadilan Agama Kediri	(500,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
14	005.01.401441	Pengadilan Agama Bangil	(3.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
15	005.01.098281	Pengadilan Negeri Malang	12.118.000,00	Koreksi kurang catat pendapatan sewa payment point BTN yang disetorkan pada tahun 2023 (lewat tahun) sebesar Rp.5.182.000, pendapatan sewa kantin yang disetorkan pada tahun 2023 (lewat tahun) sebesar Rp.6.936.000
16	005.01.663300	Pengadilan Militer Tinggi III Di Surabaya	(5.836.000,00)	Koreksi lebih catat pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan beban keperluan perkantoran sebesar Rp871.500,00 pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp55.000,00 pembelian tahun 2021 yang dipertanggungjawabkan tahun 2022 menggunakan akun beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp4.909.500,00
17	005.01.098441	Pengadilan Negeri Banda Aceh	3.809.005,00	Koreksi kurang catat beban langganan telepon
18	005.01.098530	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	2.791.000,00	Koreksi kurang catat beban uang makan
19	005.01.400395	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	1.572.860,00	Koreksi kurang catat beban langganan telepon karena ada kesalahan jumal akrual pada tahun 2021, seharusnya pada tahun 2021 dilakukan jumal koreksi beban karena jumal akrual pada tahun 2020 senilai 1.572.860 dengan akun 522112 tetapi pada tahun 2021 direalisasikan dengan akun 521111
20	005.01.400461	Pengadilan Negeri Muaro	(540,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
21	005.01.098963	Pengadilan Negeri Baturaja	(3.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
22	005.01.400364	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	(29.700.000,00)	Koreksi lebih catat beban sewa rumah Hakim tahun 2021 yang dibayarkan tahun 2022
23	005.01.099031	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	632.778,00	Koresi kurang catat beban langganan listrik
24	005.01.401918	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	(13.672.387,00)	Koreksi lebih catat beban gaji pokok PNS
25	005.01.477270	Pengadilan Negeri Nunukan	1.622.676,00	Koreksi kurang catat beban gaji pokok PNS sebesar Rp.1.423.400, beban tunjangan suami/istri sebesar Rp.142.340, dan beban tunjangan anak sebesar Rp.56.936
26	005.01.307729	Pengadilan Agama Bau-Bau	(6.173.920,00)	Jurnal eliminasi perbaikan saldo akrual akun beban barang yang masih harus dibayar
27	005.01.672931	Pengadilan Negeri Saumlaki	(22.000,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
28	005.01.401898	Pengadilan Agama Namlea	80,00	Koreksi kurang catat beban langganan air
29	005.01.663377	Pengadilan Militer III - 18 Di Ambon	(23.715.825,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik sebesar Rp.2.315.520, dan beban keperluan perkantoran (internet) sebesar Rp.21.450.000, serta koreksi kurang catat beban langganan telepon sebesar Rp.49.695
30	005.01.400110	Pengadilan Negeri Bengkulu	(108.186,00)	Koreksi lebih catat beban gaji pokok PNS sebesar Rp.94.900, beban tunj. suami/istri PNS sebesar Rp.9.490, beban tunj. anak PNS sebesar Rp.3.796
31	005.01.440712	Pengadilan Tinggi Agama Banten	(26.245.225,00)	Koreksi lebih catat beban keperluan perkantoran (internet) sebesar Rp.11.181.230 dan beban langganan listrik sebesar Rp.15.063.995
32	005.01.097598	Pengadilan Negeri Tangerang	(56.698.680,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik
33	005.01.400797	Pengadilan Agama Serang	(140.021.748,00)	Koreksi lebih catat beban langganan listrik karena adanya kesalahan input/kelebihan 0 (nol), dicatat Rp.155.579.720, seharusnya Rp.15.557.972
34	005.04.663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15.435.600,00	Koreksi kurang catat beban perjalanan biasa terkait tunggakan biaya mutasi tenaga teknis tahun 2020
Jumlah			**(271.426.058,00)**	

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp11.256.398.663.322,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.256.012.869.720,00 dan Rp10.457.812.625.283,00 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

AKUN	URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	11.274.640.256.469,00	10.500.657.047.526,00
313121	Diterima dari Entitas Lain	(105.590.154.119,00)	(96.521.922.988,00)
313211	Transfer Keluar	(609.346.606.825,00)	(105.992.167.972,00)
313221	Transfer Masuk	607.164.620.871,00	83.895.895.509,00
391131	Pengesahan Hibah Langsung	70.284.339.793,00	61.711.086.461,00
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(1.989.293,00)	(111.785.000,00)
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	18.862.402.824,00	14.174.471.747,00
JUMLAH		**11.256.012.869.720,00**	**10.457.812.625.283,00**

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja Mahkamah Agung yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar (Rp105.590.154.119,00) sedangkan DDEL sebesar Rp11.274.640.256.469,00.

Terdapat koreksi tambah akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) pada Pengadllan Negeri Mataram (005.01.099862) atas koreksi kesalahan pembentukan jurnal otomatis atas belanja Gaji Hakim AdHoc pada saat pencatatan SPM Nomor 00107T sebesar Rp140.775.000,00

Terdapat koreksi *Audited* akun Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) pada 2 satuan kerja yaitu:

1. Badan Urusan Administrasi (005.01.663157) terdapat koreksi tambah atas kesalahan penyetoran pengembalian belanja PNS yang telah pensiun menggunakan kode satker inaktif sebesar Rp128.898.547,00
2. Pengadilan Agama Lolak (005.04.401996) terdapat koreksi kurang atas ralat PNBP berupa akun 425913 ke 411211.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp609.346.606.825,00) dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp607.164.620.871,00, terdiri dari:

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp607.164.620.871,00 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk

No.	Jenis	Transfer Masuk
1	Barang Konsumsi	9.049.003.335,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	224.213.565,00
3	Tanah	217.431.521.000,00
4	Peralatan dan Mesin	309.660.079.408,00
5	Gedung dan Bangunan	83.209.824.250,00
6	Aset Tetap Lainnya	198.924.000,00
7	Aset Tetap Renovasi	356.475.247,00
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.875.048.492,00)
9	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(762.311.428,00)
10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(23.765.016,00)
11	Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	(6.548.162,00)
12	Belanja Persediaan konsumsi	82.442.728,00
13	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.130.436,00
14	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(386.320.000,00)
Jumlah		**607.164.620.871,00**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp609.346.606.825,00) terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar

No.	Jenis	Transfer Keluar
1	Barang Konsumsi	(9.263.119.533,00)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	(224.535.565,00)
3	Tanah	(217.076.534.000,00)
4	Peralatan dan Mesin	(309.660.079.408,00)
5	Gedung dan Bangunan	(77.196.015.996,00)
6	Aset Tetap Lainnya	(198.924.000,00)
7	Aset Tetap Renovasi	(8.696.931.454,00)
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.875.048.492,00
9	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	962.071.443,00
10	Belanja Persediaan konsumsi	132.413.196,00
Jumlah		**(609.346.606.825,00)**

Rincian penjelasan per Satuan Kerja atas selisih transfer keluar dan transfer masuk sebagaimana terlampir pada Laporan Pendukung.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK RI pada Wilayah yang menjadi sampling dan data atas transaksi pada aplikasi SAKTI, ditemukan dokumen sumber terkait proses Transfer Keluar dan Transfer masuk yang dilakukan yang menunjukan semua pengiriman dan penerimaan dilakukan pada tahun 2023, melewati periode Pelaporan Keuangan dan BMN. Oleh karena itu kondisi yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI bahwa secara prosedur yang berlaku sesuai ketentuan, pencatatan BMN bahwa yang terjadi pada Mahkamah Agung RI tidak sesuai ketentuan yang berlaku, karena Mahkamah Agung RI melakukan proses Transfer Keluar sebelum asetnya dikirim ke satker tujuan dan untuk Transfer masuk oleh staker penerima dilakukan sebelum asetnya secara fisik diterima dan pastikan dalam kondisi baik dan sesuai spesifikasi.

Temuan tersebut secara detail sebagai berikut:

Nama barang	Jumlah satker	Jumlah Barang	Nila barang
Scanner	909	1.236	24.534.600.000
Server	127	127	10.756.900.000
laptop	4	28	419.720.000
		Total	35.711.220.000

Total nilai aset tersebut senilai Rp35.711.220.000,00 sangat material dan melabih batas toleransi untuk penentuan Opini atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nilai temuan tersebut sudah dilakukan koreksi pada aplikasi SAKTI.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah Langsung dan Pengembalian pengesahan

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp70.284.339.793,00 dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah (Rp1.989.293,00).

Pengesahan Hibah Langsung (391131) sebesar Rp70.284.339.793,00 dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00 pada 35 Satuan Kerja yang telah selesai proses pengesahan hibah dan telah tersaji di Neraca sebagai Aset dan di LPE sebagai Ekuitas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Namun dalam pencatatan dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI, total hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) terdapat selisih antara total angka pada dokumen pengesahan hibah dengan aplikasi SAKTI senilai Rp206.429.393,00. Hal ini disebabkan karena ada angka debit dari PTUN Palembang yang berasal dari pengesahan pengembalian sisa hibah uang (SP3HL) yang seharusnya diinput pada kas lainnya, namun satker tersebut terpaksa menginput pada akun hibah sudah disahkan TAYL karena satker terkendala dalam melakukan penginputan pada aplikasi SAKTInya, sehingga ketika dijurnal muncul angka debit pada akun hibah sudah disahkan TAYL yang menyebabkan total angka hibah sudah disahkan TAYL berkurang.

Rincian pengesahan Hibah untuk per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	099010	2Z43A93A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	5.000.000,00
2	098963	2LLG1QGA	PN BATURAJA	BARANG	DN	46.500.000,00
3	099780	29SC2YPA	PN DENPASAR	BARANG	DN	19.690.000,00
4	099780	2234U9CA	PN DENPASAR	BARANG	DN	5.070.000,00
5	099780	23XRHVCA	PN DENPASAR	BARANG	DN	12.050.000,00
6	099780	26S1R88A	PN DENPASAR	BARANG	DN	12.050.000,00

7	099780	2H7B93JA	PN DENPASAR	BARANG	DN	64.050.000,00
8	662972	2DKK6DYA	PN BONTANG	BARANG	DN	277.503.459,00
9	400936	2ATRJ4LA	PA KENDAL	BARANG	DN	11.999.000,00
10	477380	2DC38Y7A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	7.000.000,00
11	477380	2D2D2HFA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	7.000.000,00
12	477380	2HMB554A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	7.000.000,00
13	477380	2ET7772A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.600.000,00
14	477380	2S6BLRSA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.600.000,00
15	477380	23J1PB8A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.600.000,00
16	099574	2GWF2ZJA	PN SINJAI	BARANG	DN	10.654.000,00
17	099574	2ZEWTQHA	PN SINJAI	BARANG	DN	2.375.150,00
18	307555	29USX7AA	PA SINJAI	BARANG	DN	21.500.000,00
19	099003	2PQG872A	PN SEKAYU	BARANG	DN	1.000.000,00
20	099450	2C6MQ7AA	PN BARRU	BARANG	DN	196.698.000,00
21	097780	2S1TTZEA	PN PEMALANG	BARANG	DN	34.000.000,00
22	401390	23A8EASA	PA TRENGGALEK	BARANG	DN	520.075.105,00
23	097624	2FBG4TYA	PN KARAWANG	BARANG	DN	191.725.000,00
24	663403	2DXS24ZA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	3.000.000,00
25	098061	21XG95EA	PN WATES	BARANG	DN	45.500.000,00
26	099003	2PWED99A	PN SEKAYU	BARANG	DN	4.000.000,00
27	401055	2N8R6P1A	PA KEBUMEN	BARANG	DN	10.000.000,00
28	400421	23GB5RYA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	32.750.000,00
29	400741	2Q8WQF6A	PA CIANJUR	BARANG	DN	175.000.000,00
30	099926	28S2L76A	PN KUPANG	BARANG	DN	5.000.000,00
31	099926	2SJUVQXA	PN KUPANG	BARANG	DN	5.000.000,00
32	098675	2T3AC8QA	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	118.891.650,00
33	663398	2N7XULWA	PT BANTEN	BARANG	DN	1.800.000,00
34	663398	2LLGV4LA	PT BANTEN	BARANG	DN	5.500.000,00
35	663398	23KVZ9VA	PT BANTEN	BARANG	DN	4.350.000,00

36	663398	234V9MEA	PT BANTEN	BARANG	DN	2.300.000,00
37	099162	2D81N5WA	PN BUNTOK	BARANG	DN	9.696.000,00
38	402191	25GXSJEA	PA MUARA BUNGO	BARANG	DN	138.000.000,00
39	099162	2LLWAGXA	PN BUNTOK	BARANG	DN	11.663.000,00
40	400772	2TEAZ86A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	2.138.000,00
41	400772	2Q2NV62A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	2.000.000,00
42	400772	2ZPRPNRA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	4.950.000,00
43	400772	2KMG37KA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	3.250.000,00
44	400772	2PK54JNA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	1.750.000,00
45	401915	2EUPPH2A	PN CIKARANG	BARANG	DN	1.603.619.000,00
46	401957	2TKNZQPA	PA SOREANG	BARANG	DN	72.348.600,00
47	099045	2H4RRTJA	PN METRO	BARANG	DN	199.743.000,00
48	097872	2R8NMWKA	PN BATANG	BARANG	DN	62.000.000,00
49	097577	251JJG4A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	179.602.500,00
50	401307	2C55Q4HA	PA BOJONEGORO	BARANG	DN	825.839.780,00
51	098544	2YATGQ5A	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	2.000.000,00
52	097577	2EAYNF9A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	7.650.000,00
53	098544	2HMQJNCA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	2.200.000,00
54	099162	27TK8KDA	PN BUNTOK	BARANG	DN	9.000.000,00
55	400678	265ZUGTA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	132.700.000,00
56	099176	2BL45Z7A	PN SAMPIT	BARANG	DN	4.785.000,00
57	097872	2XAZTM9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	170.348.000,00
58	097872	2TPQKGRA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	157.834.495,00
59	401488	2V5Q7LSA	PA MADIUN	BARANG	DN	28.000.000,00
60	099802	2EC8DFSA	PN NEGARA	BARANG	DN	30.657.000,00
61	401709	2N7PRCCA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	7.200.000,00
62	401910	22A3KDBA	PN MUKOMUKO	BARANG	DN	777.799.650,00
63	099820	2X7GYQJA	PN TABANAN	BARANG	DN	4.000.000,00
64	400704	2KX2Y12A	PA TASIKMALAYA	BARANG	DN	33.266.759,00
65	307907	2QFUPCHA	PA PRAYA	BARANG	DN	80.000.000,00

66	097912	2UDN2N1A	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	8.999.999,00
67	099286	2R78HMUA	PN SAMARINDA	BARANG	DN	9.800.000,00
68	401904	2PND2C3A	PN SUKA MAKMUE	BARANG	DN	187.450.000,00
69	097872	2LM7FS9A	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	198.931.700,00
70	400421	2FQGFCKA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	45.000.000,00
71	098917	2HBDNGBA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	205.493.495,00
72	098917	2KBMWRRA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	424.486.682,00
73	682150	2RXFN2MA	PA KOTA TASIKMALAYA	BARANG	DN	106.987.664,00
74	097755	2QF6VURA	PN KUDUS	BARANG	DN	424.800.000,00
75	670206	2M2HRJAA	PN BATULICIN	BARANG	DN	3.900.000,00
76	097886	2C3SA5WA	PN PURWOREJO	BARANG	DN	2.165.741.250,00
77	402101	229D8AHA	PA BANGKINANG	BARANG	DN	47.640.000,00
78	401271	238Y39AA	PA JOMBANG	BARANG	DN	661.400.000,00
79	402101	2VVFLD5A	PA BANGKINANG	BARANG	DN	150.000.000,00
80	578864	2L6REEGA	PTUN KENDARI	BARANG	DN	42.660.000,00
81	098874	2WQZUVEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	11.100.000,00
82	098938	2392TD4A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.549.000,00
83	098938	2HQWKY1A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.549.000,00
84	098938	23WCFMPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	10.000.000,00
85	098938	2GBPMB5A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.549.000,00
86	098938	2Z6E3LNA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.700.000,00
87	097908	27RGLNUA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	12.012.000,00
88	400891	2ET6BMMA	PA BREBES	BARANG	DN	200.000.000,00
89	099031	21THL5DA	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	12.000.000,00
90	098938	2RA7G8ZA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	4.400.000,00
91	098938	286KM9NA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.700.000,00
92	400327	2SR2PNGA	PN DUMAI	BARANG	DN	23.450.000,00
93	401375	213RHZEA	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	322.541.788,00
94	681422	2UEUSX7A	PN PASANGKAYU	BARANG	DN	197.411.966,00

95	097542	2UVHW84A	PN GARUT	BARANG	DN	5.750.000,00
96	097542	2VWDQDLA	PN GARUT	BARANG	DN	5.750.000,00
97	097603	2VEY2ECA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	39.050.000,00
98	401876	2KKWXGHA	PA KUALA KURUN	BARANG	DN	338.162.000,00
99	098310	2F4YN6BA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	5.000.000,00
100	098310	2F9TBSEA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	3.500.000,00
101	099024	21SAJ1AA	PN SUNGAILIAT	BARANG	DN	70.000.000,00
102	670227	2F25XX3A	PA SURAKARTA	BARANG	DN	6.000.000,00
103	559857	29RMM13A	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	29.000.000,00
104	400690	2U3C6V2A	PA CIAMIS	BARANG	DN	250.000.000,00
105	400415	2G8JCKVA	PN JANTHOI	BARANG	DN	520.561.080,00
106	400492	22PN216A	PT RIAU	BARANG	DN	52.100.000,00
107	672980	25U13T6A	PN PARIGI	BARANG	DN	449.200.000,00
108	097652	2HU2UJRA	PN SUKABUMI	BARANG	DN	35.780.000,00
109	099773	2L3QVBBA	PT DENPASAR	BARANG	DN	5.016.854.000,00
110	402468	289MT84A	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	4.550.000,00
111	307644	2GM1K39A	PA MAJENE	BARANG	DN	11.000.000,00
112	098310	24X1N5VA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	32.000.000,00
113	098874	27ZUDQFA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	200.000.000,00
114	400559	2458MQ2A	PT MATARAM	BARANG	DN	6.549.000,00
115	400559	21CBPCTA	PT MATARAM	BARANG	DN	12.550.000,00
116	099155	2J1137ZA	PN KUALA KAPUAS	BARANG	DN	35.400.000,00
117	662972	27A755DA	PN BONTANG	BARANG	DN	11.667.000,00
118	402519	28VPDLFA	PA MARTAPURA	BARANG	DN	181.309.150,00
119	098015	2U6W5GRA	PN CILACAP	BARANG	DN	24.500.000,00
120	400239	2WU22KVA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	800.000,00
121	400239	29F9R9MA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	3.000.000,00
122	097908	2QP8RQSA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	8.000.000,00
123	604723	2CJJHDUA	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	235.500.000,00
124	673013	25J4YG7A	PN MALILI	BARANG	DN	524.533.560,00

125	402302	23FDWSVA	PA PANGKAL PINANG	BARANG	DN	83.016.000,00
126	099439	2L64TBDA	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	45.850.000,00
127	099926	2CHUPMGA	PN KUPANG	BARANG	DN	3.000.000,00
128	477380	2863U8ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	3.000.000,00
129	477380	2JV32PXA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	4.050.000,00
130	670227	293811GA	PN SAMBAS	BARANG	DN	3.900.000,00
131	652123	23NLRY5A	PA BANGGAI	BARANG	DN	32.225.000,00
132	098942	2DNTQS7A	PN PALEMBANG	BARANG	DN	12.100.000,00
133	400126	2HHDQE9A	PN CURUP	BARANG	DN	7.000.000,00
134	400126	2G1SWB7A	PN CURUP	BARANG	DN	12.500.000,00
135	400126	26GFT7WA	PN CURUP	BARANG	DN	7.000.000,00
136	400512	24LQ3D8A	PT BENGKULU	BARANG	DN	4.000.000,00
137	401938	2CBAFAKA	PA TELUK KUANTAN	BARANG	DN	570.000.000,00
138	400735	2U25DZZA	PA SUKABUMI	BARANG	DN	24.894.000,00
139	400678	212LMLGA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	27.500.000,00
140	417657	2HPLP3WA	PA TANJUNG SELOR	BARANG	DN	1.370.294.550,00
141	099816	23AGR2AA	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	688.976.300,00
142	099340	2MMSRVJA	PN TAHUNA	BARANG	DN	54.490.000,00
143	098900	2THSDN6A	PN MUARA BUNGO	BARANG	DN	149.555.000,00
144	400832	212679TA	PA BEKASI	BARANG	DN	21.540.000,00
145	400832	21QBBV9A	PA BEKASI	BARANG	DN	69.750.000,00
146	099947	2GALK3VA	PN SO'E	BARANG	DN	35.000.000,00
147	098938	24FV3A7A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	2.240.000,00
148	098938	2SGNM2CA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	12.200.000,00
149	098938	2K275EVA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	1.750.000,00
150	098938	2KLH5LPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	5.925.000,00
151	098938	2Z2XQ7RA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	4.050.000,00
152	098938	2Y2MA4JA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	2.350.000,00
153	401936	2RTZK12A	PA PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	198.669.994,00
154	098942	2EVL9GLA	PN PALEMBANG	BARANG	DN	16.500.000,00

155	576274	28FQA32A	PTA BENGKULU	BARANG	DN	7.300.000,00
156	576274	2SY41AEA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	43.500.000,00
157	576274	2F2UR9EA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	28.500.000,00
158	576274	25ZUYHDA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	12.500.000,00
159	477249	2W628Y4A	PN ROTE NDAO	BARANG	DN	6.000.000,00
160	400512	224SBGXA	PT BENGKULU	BARANG	DN	7.300.000,00
161	099070	281GMZNA	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	65.000.000,00
162	402820	2JVYPNDA	PA SO'E	BARANG	DN	1.600.000,00
163	402820	2JGQCQJA	PA SO'E	BARANG	DN	1.400.000,00
164	402820	2PRV8G9A	PA SO'E	BARANG	DN	3.400.000,00
165	402820	2X8MPJQA	PA SO'E	BARANG	DN	5.400.000,00
166	402820	2NHHAG8A	PA SO'E	BARANG	DN	5.400.000,00
167	402820	2FAVV4EA	PA SO'E	BARANG	DN	4.500.000,00
168	098959	2YBDB7QA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	255.912.200,00
169	663403	2CWNVALA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	2.000.000,00
170	663403	2KN4F76A	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	2.000.000,00
171	663403	2NRVC3GA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	2.500.000,00
172	099010	25LBHRLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	13.500.000,00
173	099010	2QETUP6A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	4.650.000,00
174	098938	2X177DFA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	3.300.000,00
175	307729	2D5QJU9A	PA BAU-BAU	BARANG	DN	16.000.000,00
176	477224	2GNGUTUA	PN UNAAHA	BARANG	DN	10.000.000,00
177	400141	2N2MH71A	PN BANGKINANG	BARANG	DN	311.687.534,00
178	099471	23R8V1AA	PN MAROS	BARANG	DN	177.534.246,00
179	417722	2GJNVE1A	PN TANJUNG SELOR	BARANG	DN	1.370.294.550,00
180	097872	2PVA4JTA	PN BATANG	BARANG	DN	439.202.000,00
181	400075	2Z4VMY5A	PN SORONG	BARANG	DN	299.580.000,00
182	400540	284BX3EA	PT KENDARI	BARANG	DN	539.078.000,00
183	097872	2SBSWDNA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	235.530.000,00

184	097872	21258K9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	280.282.420,00
185	097872	21PVS9RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	65.187.086,00
186	662986	2MRYTCKA	PN SANGATTA	BARANG	DN	10.200.000,00
187	662986	23AK2ELA	PN SANGATTA	BARANG	DN	6.600.000,00
188	098214	2FB4VC9A	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	22.800.000,00
189	400967	2TJSCEMA	PA PATI	BARANG	DN	475.000.000,00
190	559857	25XAVENA	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	25.400.000,00
191	307712	2RX33TPA	PA KENDARI	BARANG	DN	1.925.000,00
192	097500	2TG135BA	PT BANDUNG	BARANG	DN	200.000.000,00
193	097535	2S83Y8DA	PN TASIKMALAYA	BARANG	DN	134.462.500,00
194	402540	2XH5PPYA	PA BARABAI	BARANG	DN	6.000.000,00
195	402540	2QBNMJTA	PA BARABAI	BARANG	DN	7.700.000,00
196	098544	2DY4ZXKA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	149.105.000,00
197	307712	2V4WKRLA	PA KENDARI	BARANG	DN	6.000.000,00
198	307232	278J6DFA	PA KOTAMUBAGU	BARANG	DN	33.925.000,00
199	099638	2AT7UBQA	PN MAMUJU	BARANG	DN	162.000.000,00
200	098310	2WRQDQHA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	44.219.000,00
201	098310	2Z8LZ3YA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	4.500.000,00
202	098310	2T45PQUA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	13.325.000,00
203	402525	2LWCRFVA	PA RANTAU	BARANG	DN	117.500.000,00
204	402525	2KRRP9PA	PA RANTAU	BARANG	DN	4.800.000,00
205	098874	2AYMXHAA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	47.175.000,00
206	098874	2BKWLRNA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	175.844.000,00
207	098874	27HBVCUA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	175.778.000,00
208	477380	2GZLS6ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	1.787.146.700,00
209	400879	2T1ZPLCA	PA PEMALANG	BARANG	DN	33.750.000,00
210	400879	23TBNC5A	PA PEMALANG	BARANG	DN	29.117.000,00
211	099180	2YGE422A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	3.696.500,00
212	099180	23BHDD6A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	6.700.000,00
213	099752	2869FYCA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00

214	099752	27JGB2DA	PN LABUHA	BARANG	DN	12.000.000,00
215	099752	2ZBF8PDA	PN LABUHA	BARANG	DN	7.000.000,00
216	401929	27187KPA	PN DOBO	BARANG	DN	6.750.000,00
217	401929	2PFAYAJA	PN DOBO	BARANG	DN	9.650.000,00
218	401929	2DSUPG7A	PN DOBO	BARANG	DN	3.850.000,00
219	401929	25PSLW4A	PN DOBO	BARANG	DN	419.872.006,00
220	098832	2YQP6Y6A	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	3.500.000,00
221	098832	235MPPTA	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	5.999.000,00
222	099752	22U38QVA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
223	099752	2L9D8M1A	PN LABUHA	BARANG	DN	7.000.000,00
224	099752	2YNSUJ3A	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
225	099752	2FKDTF7A	PN LABUHA	BARANG	DN	26.500.000,00
226	099752	2S1M4CLA	PN LABUHA	BARANG	DN	43.000.000,00
227	099752	2GM28WHA	PN LABUHA	BARANG	DN	500.000,00
228	099752	29H7V5PA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
229	099752	2832ZE4A	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
230	099752	2V3JBR8A	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
231	099010	2QNDZYLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	4.200.000,00
232	099862	2DU5LHYA	PN MATARAM	BARANG	DN	1.690.000.000,00
233	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	214.525.150,00
234	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	356.400.000,00
235	400571	2D68V6KA	PN MUNGKID	BARANG	DN	4.900.000,00
236	400571	2K5B33HA	PN MUNGKID	BARANG	DN	3.300.000,00
237	400571	26GMWEAA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.050.000,00
238	400571	2PMRJ2YA	PN MUNGKID	BARANG	DN	1.375.000,00
239	400571	28FVQSDA	PN MUNGKID	BARANG	DN	1.750.000,00
240	400571	2UPD1MCA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.575.000,00
241	400571	2W3AAHTA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.575.000,00
242	400571	26FNR2LA	PN MUNGKID	BARANG	DN	2.700.000,00
243	400571	2MWL153A	PN MUNGKID	BARANG	DN	1.350.000,00

244	099176	2N1CFU6A	PN SAMPIT	BARANG	DN	3.000.000,00
245	097598	23ZRCWYA	PN TANGERANG	BARANG	DN	6.747.393.420,00
246	401907	2F3AP18A	PN PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	198.010.000,00
247	099162	22ZVSDHA	PN BUNTOK	BARANG	DN	1.750.000,00
248	098959	21XVZSDA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	114.830.610,00
249	098959	2B68CY7A	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	144.107.000,00
250	098959	2U9SWKSA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	125.083.750,00
251	098959	293XUTJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	28.695.000,00
252	099752	2K2XRSXA	PN LABUHA	BARANG	DN	5.000.000,00
253	097500	2PSAPAVA	PT BANDUNG	BARANG	DN	750.000.000,00
254	400492	23YMFCDA	PT RIAU	BARANG	DN	40.000.000,00
255	097691	2616N38A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	124.717.600,00
256	097890	2RKUAD3A	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.400.000,00
257	097890	2YN6RDMA	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.500.000,00
258	097890	2PB6B6HA	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.100.000,00
259	097890	26KJQR9A	PN MAGELANG	BARANG	DN	2.800.000,00
260	097890	2PDYBP7A	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.900.000,00
261	097890	26KBMLWA	PN MAGELANG	BARANG	DN	3.850.000,00
262	401884	2U1VZFEA	PA AMPANA	BARANG	DN	147.243.139,00
263	098881	2BYWNXDA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	924.688.000,00
264	098881	2AAEM6PA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	13.689.500,00
265	097908	2GYKFK1A	PN KEBUMEN	BARANG	DN	3.800.000,00
266	097598	2ZQ44BGA	PN TANGERANG	BARANG	DN	5.297.828.186,00
267	400126	2ZK8QRGA	PN CURUP	BARANG	DN	199.867.000,00
268	108309	2LCC52MA	PN BATAM	BARANG	DN	90.000.000,00
269	097691	2DA2NJ2A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	6.400.000,00
270	400239	2P6FF32A	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	302.894.027,00
271	477306	22Y38MLA	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	193.903.614,00
272	097691	29QN823A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	59.000.000,00
273	098192	2W6R8ZJA	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	13.000.000,00

274	400823	2W53PPPA	PA TANGERANG	BARANG	DN	4.500.000,00
275	400823	2PXF91MA	PA TANGERANG	BARANG	DN	3.500.000,00
276	098256	2D1JGX7A	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	10.450.000,00
277	097603	2UMC3WKA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	42.122.000,00
278	097603	2R5Q8X3A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	132.692.000,00
279	097603	23EMJ9DA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	10.000.000,00
280	097603	2JK5HPQA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	10.000.000,00
281	097603	2782DL5A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	9.400.000,00
282	097603	2ZKZH4XA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	9.400.000,00
283	672910	2BQA2LGA	PN BALIGE	BARANG	DN	30.600.000,00
284	401709	29KG64BA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	197.962.000,00
285	098959	2J44VDJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	593.834.460,00
286	559857	2QFJNACA	PTUN SAMARINDA	BARANG	DN	3.000.000,00
287	672910	2U8PTTVA	PN BALIGE	BARANG	DN	3.000.000,00
288	672910	2X5XXHLA	PN BALIGE	BARANG	DN	23.850.000,00
289	673062	23V3KT6A	PN SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	198.634.000,00
290	098874	29RU9UEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	199.851.000,00
291	098874	2JHP2P5A	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	151.620.000,00
292	097780	2VH6XLPA	PN PEMALANG	BARANG	DN	45.000.000,00
293	098743	2MDHA7BA	PT PADANG	BARANG	DN	718.529.500,00
294	098743	2D7618YA	PT PADANG	BARANG	DN	447.106.946,00
295	098722	22EQ8K1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	3.400.000,00
296	098061	2FY9M59A	PN WATES	BARANG	DN	68.000.000,00
297	099230	21Z88U4A	PN MARTAPURA	BARANG	DN	5.850.000,00
298	099230	232LG2XA	PN MARTAPURA	BARANG	DN	16.977.600,00
299	400421	2D79E5CA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	7.925.000,00
300	098860	2EW2HGLA	PN RENGAT	BARANG	DN	9.000.000,00
301	308021	2CPNYVZA	PA CURUP	BARANG	DN	4.749.000,00
302	401174	2V8PY87A	PA KARANGANYAR	BARANG	DN	290.711.900,00

303	097933	2TGSRWMA	PN SURAKARTA	BARANG	DN	237.994.000,00
304	400483	2ABYDBQA	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	479.436.473,00
305	099003	21JNHQGA	PN SEKAYU	BARANG	DN	739.470.000,00
306	663051	21APMVVA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	17.625.000,00
307	663051	2WDAXWNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	23.850.000,00
308	663051	2K9MEKNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	9.773.000,00
309	663051	21H1DZDA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	6.850.000,00
310	098881	2BKWC4GA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	34.854.000,00
311	098881	251G48FA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	349.560.508,00
312	400282	2Z4373RA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	4.950.000,00
313	400282	24PBJ4GA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	11.050.000,00
314	400282	2TRMR4JA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	27.500.000,00
315	097872	295282RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	250.000.000,00
316	097872	2UZ351AA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	250.000.000,00
317	097975	2SL1MW3A	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	10.500.000,00
318	097975	2HG2TCRA	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	409.000.000,00
319	099375	2Q9NDL3A	PN PALU	BARANG	DN	100.069.000,00
320	097762	2A9T9JQA	PN PATI	BARANG	DN	36.335.000,00
321	099663	213Y168A	PN BAU-BAU	BARANG	DN	19.088.000,00
322	099663	2WJ4N6MA	PN BAU-BAU	BARANG	DN	1.250.000,00
323	098132	2V22GQFA	PN TUBAN	BARANG	DN	258.445.400,00
324	097762	2L8M632A	PN PATI	BARANG	DN	199.500.000,00
325	097741	2Y1REXDA	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	10.000.000,00
326	099286	2R7A9W4A	PN SAMARINDA	BARANG	DN	907.442.400,00
327	613519	22QGNUSA	PN CIBINONG	BARANG	DN	32.400.000,00
328	682164	27Q94EMA	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	47.419.000,00
329	663157	27Q94EMA	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	191.109.100,00
330	097598	2YWLVVZA	PN TANGERANG	JASA	DN	2.036.666.594,00

331	613519	2ENK2HKA	PN CIBINONG	UANG	DN	1.404.540.848,00
332	401971	2UGZN68A	PN DATARAN HUNIMOA	UANG	DN	50.000.000,00
333	526750	21FPKXHA	PTUN PALEMBANG	UANG	DN	2.186.000.000,00
334	097709	2HH6RWGA	PN KUNINGAN	UANG	DN	700.000.000,00
335	099070	27FDBQ1A	PN SINGKAWANG	UANG	DN	150.000.000,00
336	401915	2KS1A39A	PN CIKARANG	UANG	DN	6.000.000.000,00
TOTAL						**70.284.339.793,00**

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	401670	2SH4BU5A	MS IDI	BARANG	DN	652.252.212,00
2	576253	2U7EXF9A	PTA KENDARI	BARANG	DN	21.500.000,00
3	576253	2KCAJVUA	PTA KENDARI	BARANG	DN	4.000.000,00
4	098167	29ETE8VA	PN SIDOARJO	BARANG	DN	150.375.000,00
5	401878	22BZ8N6A	PA SENDAWAR	BARANG	DN	3.037.149.000,00
6	099471	21VU4W9A	PN MAROS	BARANG	DN	167.707.950,00
7	400477	2G9DTAZA	PN SUMBER	BARANG	DN	536.400.000,00
8	097802	2E8R9LAA	PN DEMAK	BARANG	DN	100.000.000,00
9	097802	2EH6T4YA	PN DEMAK	BARANG	DN	70.000.000,00
10	097802	26NJHFCA	PN DEMAK	BARANG	DN	524.281.000,00
11	097802	2PLHMHTA	PN DEMAK	BARANG	DN	171.882.967,00
12	097872	25Y8YJ2A	PN BATANG	BARANG	DN	3.000.000,00
13	402132	2GUDDWGA	PA SELAT PANJANG	BARANG	DN	384.000.000,00
14	400580	2WCLHECA	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	1.709.609.772,00
15	097577	2EKG53HA	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	259.025.000,00
16	477352	2E2SELYA	PN PASAMAN BARAT	BARANG	DN	196.612.000,00
17	098462	2GJX7CWA	PN SIGLI	BARANG	DN	399.077.000,00

18	400389	2XTD5Q5A	PN KISARAN	BARANG	DN	86.086.000,00
19	400389	2RR3NNEA	PN KISARAN	BARANG	DN	42.117.500,00
20	663026	2HD4WT2A	PN MENGGALA	BARANG	DN	500.000.000,00
21	402443	2RVBTMXA	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	1.068.000.000,00
22	098874	2C3HGTDA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	186.320.000,00
23	402468	2GR89PDA	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	5.850.000,00
24	400389	261BZGBA	PN KISARAN	BARANG	DN	282.139.990,00
25	664522	2M7V8YJA	PT MALUKU UTARA	BARANG	DN	678.732.000,00
26	400998	27WHZ6VA	PA REMBANG	BARANG	DN	87.840.500,00
27	097776	2KUKP49A	PN BREBES	BARANG	DN	7.000.000,00
28	400891	213G76NA	PA BREBES	BARANG	DN	201.473.000,00
29	400891	213M8GEA	PA BREBES	BARANG	DN	126.704.000,00
30	099769	2BQ23L9A	PN SOASIU	BARANG	DN	364.436.000,00
31	401909	2V7FM7DA	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	1.034.376.000,00
32	663026	2EUEGHXA	PN MENGGALA	BARANG	DN	810.000.000,00
33	097691	2CLXD1LA	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	299.378.000,00
34	401914	2PEPANCA	PN BANJAR	BARANG	DN	80.000.000,00
35	401715	25P8D66A	MS KOTACANE	BARANG	DN	90.895.000,00
36	402242	2KHKL67A	PA PALEMBANG	BARANG	DN	84.200.000,00
37	672910	2DFM7VGA	PN BALIGE	BARANG	DN	78.801.000,00
38	098608	25E1WPQA	PN SINGKIL	BARANG	DN	1.893.569.000,00
39	307491	27H2GSRA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	9.000.000,00
40	307491	2WBRC3GA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	11.000.000,00
41	682171	2FJTF4GA	PA AMURANG	BARANG	DN	2.476.737.326,00
42	098722	2ZCX12GA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	3.400.000,00
43	098722	2CALLBVA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00
44	098722	23LPDNEA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00
45	098722	28NL2B1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	3.400.000,00
46	098722	2TCK51TA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00

47	098722	2EGMQ39A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	6.800.000,00
48	098310	24971ENA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	6.985.000,00
49	402097	2JLDNGCA	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	136.320.000,00
TOTAL						**19.068.832.217,00**

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL disajikan pada lampiran A3 Laporan Keuangan ini.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp30.525.686.275.992,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.525.686.275.992,00 dan Rp29.529.218.827.065,00.



PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahunan Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

1. Perkembangan kasus Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2022 ini kasus Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berjumlah 715 kasus Kerugian Negara, yang terdiri dari:

Tabel kerugian Negara Tahunan Tahun 2022

Status Penyelesaian		Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran dan Review Badan Pengawasan s.d. 31 Desember 2022	Sisa Angsuran
A	**SUDAH PENETAPAN**				
1	TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2	TGR NON BENDAHARA	253	3.113.789.047,00	3.101.289.047,00	12.500.000,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
B	**PROSES PENETAPAN**				
1	TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00
2	TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
C	**INFORMASI**				
1	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2	APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
JUMLAH		**715**	**29.874.382.263,74**	**29.802.858.037,96**	**71.524.225,78**

Rekapitulasi Perkembangan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara
Pada Mahkamah Agung Di Jakarta
Posisi Tahun 2003 s.d. Tahunan Tahun 2022

Status Penyelesaian		Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pelunasan s.d. 31 Desember 2022	Pembebasan	Sisa Angsuran
A	**SUDAH PENETAPAN**					
1	TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	303.824.891,00	810.422.059,00	0,00
2	TGR NON BENDAHARA	253	3.113.589.047,00	2.859.589.047,00	241.500.000,00	12.500.000,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**PROSES PENETAPAN**					
1	TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	0,00	0,00	22.772.000,00
2	TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**INFORMASI**					
1	BPK	441	25.105.030.304,98	23.642.832.340,69	1.462.197.964,29	0,00
2	APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	0,00	36.252.225,78
JUMLAH		**715**	**29.874.182.263,74**	**27.288.538.014,67**	**2.514.120.023,29**	**71.524.225,78**

Grafik Jumlah Kerugian Negara

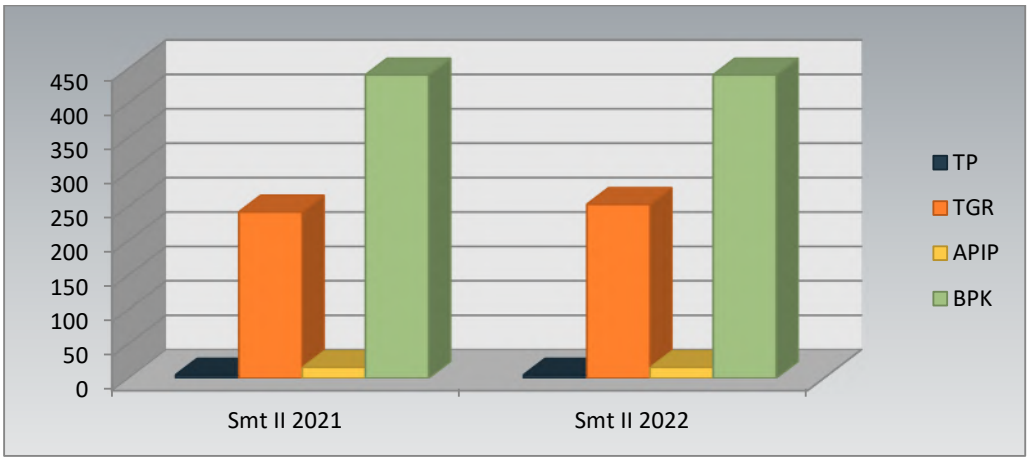

Kasus Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 715 kasus, berupa kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP), kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan kasus Pihak Ketiga baik temuan Badan Pengawasan Mahkamah Agung selaku APIP, maupun temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022. Kasus Kerugian Negara tersebut diperoleh dari:

- Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tingkat Lembaga, Wilayah, maupun Satuan Kerja yang menjadi objek pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK-RI;
- Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ketika melakukan pemeriksaan regional secara rutin;
- Laporan Satuan Kerja yang mengalami kasus Kerugian Negara dan kegiatan monitoring, serta evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2022 terdapat beberapa pemutakhiran data atas Sisa Kerugian Negara yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara BPK sampai dengan Tahun 2022 pada Mahkamah Agung, antara lain:

No	Nama	Unit Kerja	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran	Sisa	Keterangan
1	Rohmawati (TP)	PA Pekalongan	22.772.000	-	22.772.000	-	Dokumen Penyelesaian Sudah Dilampirkan dengan Pertanggung jawaban UP tahun tersebut

Berdasarkan pemutakhiran data diatas, Kerugian Negara per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Status Penyelesaian		Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara	Pembayaran Angsuran dan Review Badan Pengawasan s.d. 31 Desember 2022	Sisa Angsuran
A	**SUDAH PENETAPAN**				
1	TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2	TGR NON BENDAHARA	253	3.113.589.047,00	3.101.089.047,00	12.500.000,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
B	**PROSES PENETAPAN**				
1	TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	22.772.000,00	0,00
2	TGR NON BENDAHARA	0	0,00	0,00	0,00
3	PIHAK KETIGA	0	0,00	0,00	0,00
C	**INFORMASI**				
1	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2	APIP	16	518.543.961,76	482.291.735,98	36.252.225,78
JUMLAH		**715**	**29.874.182.263,74**	**29.825.430.037,96**	**48.752.225,78**

2. Kendala Penyelesaian Kerugian Negara

   Adapun beberapa kendala yang ditemukan, antara lain:

   - Pihak Yang Merugikan melakukan wanprestasi pelunasan yang diakibatkan karena meninggal dunia, ahli waris tidak mampu melunasi, dan/atau Perseroaan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootscap (CV) rekanan dinyatakan pailit dan masuk dalam daftar hitam (blacklist), tidak ada jaminan yang diserahkan/disita sehingga tidak dapat dilakukan pencairan/lelang jaminan;
   - Piutang TP/TGR macet yang telah diberikan Surat Penagihan (SPn) ke-3 dan telah dialihkan pengurusan penagihan piutang ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini belum dapat ditagih/dilunasi;
   - Penghapusan Piutang TP/TGR secara bersyarat memerlukan waktu 2 tahun untuk dapat diajukan penghapusan secara mutlak, dan membutuhkan 2 tahun Kembali untuk diajukan sebagai penghapusan mutlak.

3. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2022

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : AKN III

ENTITAS : MAHMAKAH AGUNG

TAHUN PEMERIKSAAN : TAHUNAN TAHUN 2022

(*dalam Rupiah*)

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-
2006	7	156,821,300.00	10	102,000,000.00	10	102,000,000.00	0	-	0	-	0	-	102,000,000.00
2007	30	1,987,903,852.50	30	545,051,826.98	22	285,298,757.35	0	-	0	-	8	259,753,069.63	285,298,757.35
2008	25	1,179,088,506.33	43	770,918,650.10	43	770,918,650.10	0	-	0	-	0	-	770,918,650.10
2009	40	3,038,087,057.41	72	679,878,497.41	71	679,878,497.41	0	-	0	-	1	-	679,878,497.41
2010	27	262,900,617.00	54	223,212,117.00	53	223,212,117.00	0	-	0	-	1	-	223,212,117.00
2011	54	3,653,976,655.88	93	2,407,310,465.36	93	2,178,440,465.36	0	-	0	-	0	228,870,000.00	2,178,440,465.36
2012	43	2,167,061,048.04	78	1,517,393,798.04	78	1,496,837,298.04	0	-	0	-	0	20,556,500.00	1,496,837,298.04
2013	67	1,813,091,023.43	109	1,813,091,023.43	109	1,813,091,023.43	0	-	0	-	0	-	1,813,091,023.43
2014	71	3,416,145,288.06	144	2,441,023,459.62	143	1,936,047,709.62	0	-	0	-	1	504,975,750.00	1,936,047,709.62
2015	25	8,214,492,976.92	72	7,357,200,084.30	72	7,172,355,990.99	0	-	0	-	0	184,844,093.31	7,172,355,990.99
2016	27	5,262,286,278.77	97	4,838,353,457.77	97	4,838,353,457.77	0	-	0	-	0	-	4,838,353,457.77
2017	33	8,006,124,606.67	91	7,061,976,186.19	91	5,617,136,771.07	0	-	0	-	0	1,444,839,415.12	5,617,136,771.07
2018	59	3,909,863,007.00	158	3,480,250,657.00	158	3,480,250,657.00	0	-	0	-	0	-	3,480,250,657.00
2019	35	2,120,302,977.86	110	1,588,924,414.86	110	1,588,924,414.86	0	-	0	-	0	-	1,588,924,414.86
2020	27	1,610,670,108.00	72	1,013,502,250.00	72	1,013,502,250.00	0	-	0	-	0	-	1,013,502,250.00
2021	86	5,274,816,676.00	298	3,122,716,846.00	298	3,069,458,476.00	0	-	0	-	0	-	2,038,330,221.00
2022	21	3,904,851,871.57	70	1,927,296,587.01	69	1,654,560,701.00	1	267,102,348.14	0	-	0	-	1,977,555,284.56
Jumlah	**683**	**55,978,483,851.44**	**1,607**	**40,890,100,321.07**	**1,595**	**37,920,267,237.00**	**1**	**267,102,348.14**	**0**	**-**	**11**	**2,643,838,828.06**	**37,212,133,565.56**

GRAFIK HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK

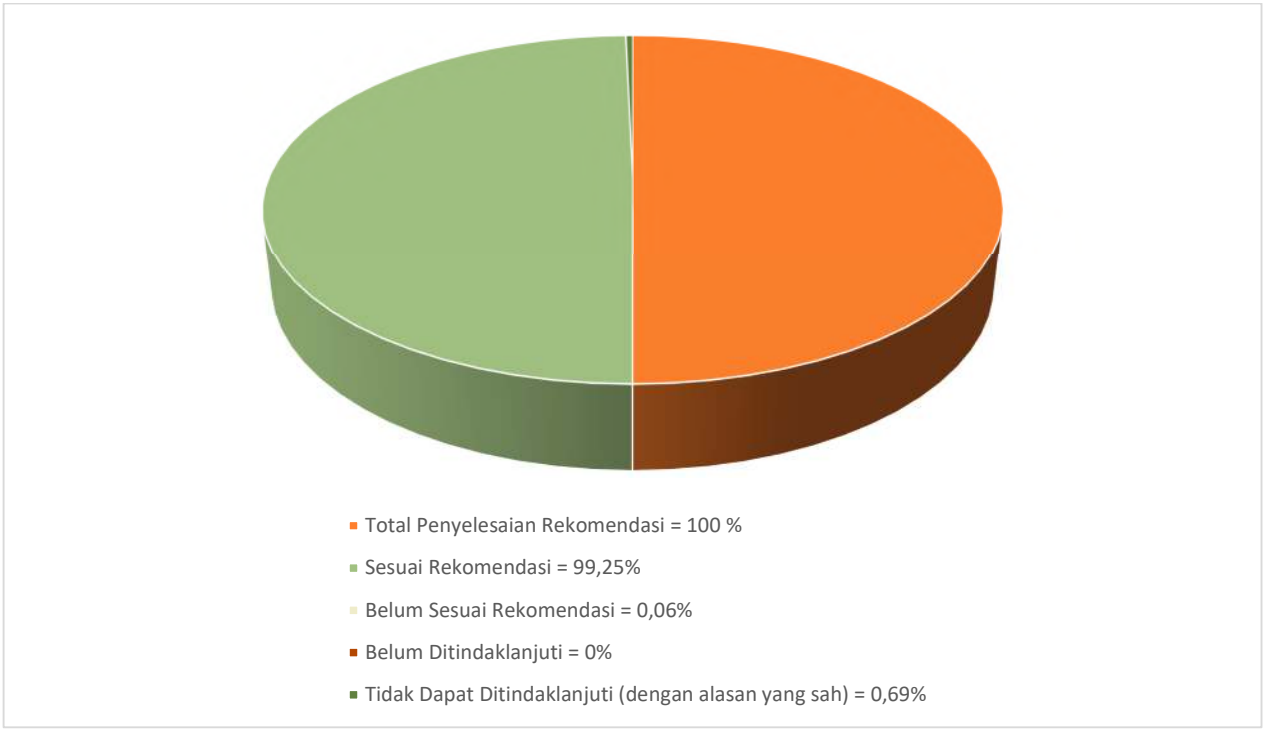

F.3. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah dan Rekening Pemerintah Lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sampai dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Rekening	Jumlah	Jenis	Saldo
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 01	932	Rekening	0,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 03	394	Rekening	3.733.000,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 04	428	Rekening	0,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 05	55	Rekening	0,00
Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran Pada Unit Eselon 1 Pusat	24	Rekening	12.805.000,00
Rekening Bendahara Penerimaan	7	Rekening	10.000,00
Rekening Lainnya	889	Rekening	6.004.911.718.151,00
Penutupan Rekening Tahun 2022	133	Rekening	0,00
Jumlah	**2862**	**Rekening**	**6.004.928.266.151,00**

Jumlah rekening yang ditutup sampai dengan Akhir Tahun 2022 sebanyak 133 rekening (terlampir). Penutupan rekening tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negera/Lembaga. Adapun rekening bendahara pengeluaran mengalami perubahan dari jenis rekening giro menjadi rekening virtual yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri.

Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran, Rekening Bendahara Penerimaan, dan Rekening Pemerintah Lainnya biaya perkara serta Monitoring Penutupan Rekening Akhir Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

F.4. Pengungkapan Penting Lain-lain

F.4.1. Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai Lembaga Yudikatif mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari bagian anggaran pada APBN dan sumber lain untuk pembiayaan perkara perdata baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara dari pihak berperkara yang disebut sebagai biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara. Di samping itu, pada pengadilan juga terdapat uang/barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan.

Yang dimaksud dengan biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara adalah seluruh pengeluaran pada perkara perdata atau penyelesaian perkara tata usaha negara yang dibebankan ke pihak berperkara (penggugat/pemohon) yang terdiri dari:

a. Biaya kepaniteraan (*griffier kosten*) yang lebih dikenal sebagai hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan atas layanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara sebagai PNBP dengan jenis dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah

b. Ongkos perkara/biaya proses yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi antara lain biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan biaya biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis bahwa dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara, biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada proses awal dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali karenanya negara tidak mengalokasikan anggarannya atas biaya perkara perdata pada APBN melalui DIPA, kecuali atas perkara prodeo bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah 150 juta.

Selain biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara pada pengadilan juga terdapat uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara yaitu uang konsinyasi, uang atas barang bukti perkara dan uang atas jaminan penangguhan penahanan yang dititipkan dan/atau disimpan di kepaniteraan dan juga uang-uang lain yang tersimpan di pengadilan antara lain uang sisa hasil pelaksanaan lelang aset debitur (pihak yang berhutang) yang dijaminkan setelah dibayarkan seluruh kewajiban pihak debitur kepada kreditur (pihak yang berpiutang/yang mengajukan klaim) masih terdapat sisa yang belum dikembalikan kepada debitur, dan/atau uang lainya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara.

Biaya proses penyelesaian perkara atau biaya perkara dalam pedoman ini disebut sebagai uang titipan pihak ketiga dan uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara di kepaniteraan peradilan termasuk uang lainya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara disebut sebagai uang titipan pihak ketiga lainnya.

Uang titipan pihak ketiga dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan dan dicatat pada Buku Keuangan Perkara, dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta diungkapkan dalam CaLK Mahkamah Agung RI.

Sebagai wujud dari akuntabilitas, transparansi dan asas full disclosure atas pelaporan keuangan Mahkamah Agung maka terhadap uang titipan pihak ketiga lainnya dicatat pada Buku Keuangan Perkara Lainnya serta diungkapkan dalam CaLK Mahkamah Agung.

Sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya khususnya pada Kebijakan Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga, diberikan pengungkapan sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Pengelolaan Biaya Proses

RINCIAN BIAYA PROSES/ATK/PEMBERKASAN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Januari	Saldo Awal	9.953.375.634,00			
		Koreksi Awal Tahun		-2.943.473.390,00		
		Penerimaan		5.838.717.429,00		
		Pengeluaran			5.217.090.426,00	
		Saldo Akhir				7.631.529.247,00
		Jumlah	9.953.375.634,00	2.895.244.039,00	5.217.090.426,00	7.631.529.247,00
2	Februari	Saldo Awal	7.631.529.247,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.806.735.452,00		
		Pengeluaran			4.661.382.641,00	
		Saldo Akhir				7.776.882.058,00
		Jumlah	7.631.529.247,00	4.806.735.452,00	4.661.382.641,00	7.776.882.058,00
3	Maret	Saldo Awal	7.776.882.058,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.022.407.950,00		
		Pengeluaran			5.872.205.873,00	
		Saldo Akhir				6.927.084.135,00
		Jumlah	7.776.882.058,00	5.022.407.950,00	5.872.205.873,00	6.927.084.135,00
4	April	Saldo Awal	6.927.084.135,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		3.343.801.890,00		
		Pengeluaran			3.935.570.269,00	
		Saldo Akhir				6.335.315.756,00
		Jumlah	6.927.084.135,00	3.343.801.890,00	3.935.570.269,00	6.335.315.756,00
5	Mei	Saldo Awal	6.335.315.756,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		4.400.466.892,00		
		Pengeluaran			4.419.466.658,00	
		Saldo Akhir				6.316.315.990,00
		Jumlah	6.335.315.756,00	4.400.466.892,00	4.419.466.658,00	6.316.315.990,00
6	Juni	Saldo Awal	6.316.315.990,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.747.409.150,00		
		Pengeluaran			5.325.342.554,00	
		Saldo Akhir				6.738.382.586,00
		Jumlah	6.316.315.990,00	5.747.409.150,00	5.325.342.554,00	6.738.382.586,00
7	Juli	Saldo Awal	6.738.382.586,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.002.960.425,00		
		Pengeluaran			5.147.234.224,00	
		Saldo Akhir				6.594.108.787,00
		Jumlah	6.738.382.586,00	5.002.960.425,00	5.147.234.224,00	6.594.108.787,00
8	Agustus	Saldo Awal	6.594.108.787,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.593.397.834,00		
		Pengeluaran			5.680.015.148,00	
		Saldo Akhir				6.507.491.473,00
		Jumlah	6.594.108.787,00	5.593.397.834,00	5.680.015.148,00	6.507.491.473,00
9	September	Saldo Awal	6.507.491.473,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.382.750.205,00		
		Pengeluaran			5.584.155.487,00	
		Saldo Akhir				6.306.086.191,00
		Jumlah	6.507.491.473,00	5.382.750.205,00	5.584.155.487,00	6.306.086.191,00
10	Oktober	Saldo Awal	6.306.086.191,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.272.972.334,00		
		Pengeluaran			5.455.322.190,00	
		Saldo Akhir				6.123.736.335,00
		Jumlah	6.306.086.191,00	5.272.972.334,00	5.455.322.190,00	6.123.736.335,00
11	November	Saldo Awal	6.123.736.335,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		5.154.325.744,00		
		Pengeluaran			5.409.553.480,00	
		Saldo Akhir				5.868.508.599,00
		Jumlah	6.123.736.335,00	5.154.325.744,00	5.409.553.480,00	5.868.508.599,00
12	Desember	Saldo Awal	5.868.508.599,00			
		Koreksi Awal Tahun				
		Penerimaan		3.473.551.250,00		
		Pengeluaran			5.261.433.149,00	
		Saldo Akhir				4.080.626.700,00
		Jumlah	5.868.508.599,00	3.473.551.250,00	5.261.433.149,00	4.080.626.700,00

b. Rekapitulasi Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

Adapun rekapitulasi uang titipan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	178.269.853.310,81	-5.838.636.035,00	86.579.159.343,65	71.698.339.706,00	187.312.036.913,46	176.752.769.594,58	10.559.267.318,88
		Biaya Eksekusi	188.254.043.351,56	110.393.200,00	28.078.506.498,00	33.466.134.483,91	182.976.808.565,65	181.697.369.841,45	1.279.438.724,20
		Biaya Konsinyasi	5.153.036.495.232,51	-553.405.874,00	50.342.338.725,00	62.907.477.997,44	5.139.917.950.086,07	5.139.512.699.591,07	405.250.495,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.030.533.040,41	-162.109.400,00	425.500.000,00	666.852.000,00	20.627.071.640,41	20.617.071.640,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.604.251.551,00	0,00	1.213.908.719,90	512.297.293,00	9.305.862.977,90	8.917.133.274,06	388.729.703,84
		Jumlah	5.549.195.176.486,29	-6.443.758.109,00	166.639.413.286,55	169.251.101.480,35	5.540.139.730.183,49	5.527.497.043.941,57	12.642.686.241,92
2	Februari	Biaya Perkara	187.312.036.913,46		63.019.547.459,00	60.184.963.563,00	190.146.620.809,46	178.897.253.655,29	11.249.367.154,17
		Biaya Eksekusi	182.976.808.565,65		23.673.345.745,60	25.479.258.845,00	181.170.895.466,25	179.997.259.482,05	1.173.635.984,20
		Biaya Konsinyasi	5.139.917.950.086,07		73.119.649.847,00	42.918.102.999,71	5.170.119.496.933,36	5.169.750.966.212,36	368.530.721,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.627.071.640,41		1.588.121.000,00	1.241.235.000,00	20.973.957.640,41	20.964.947.640,41	9.010.000,00
		PHI*)	9.305.862.977,90		1.038.716.027,00	839.240.085,00	9.505.338.919,90	9.037.379.095,06	467.959.824,84
		Jumlah	5.540.139.730.183,49		162.439.380.078,60	130.662.800.492,71	5.571.916.309.769,38	5.558.647.806.085,17	13.268.503.684,21
3	Maret	Biaya Perkara	190.146.620.809,46		75.450.054.158,00	73.378.894.490,00	192.217.780.477,46	181.733.376.649,34	10.484.403.828,12
		Biaya Eksekusi	181.170.895.466,25		84.178.517.607,00	63.260.698.274,00	202.088.714.799,25	200.939.295.008,05	1.149.419.791,20
		Biaya Konsinyasi	5.170.119.496.933,36		27.833.935.992,00	113.199.112.704,00	5.084.754.320.221,36	5.084.380.160.326,36	374.159.895,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.973.957.640,41		1.522.002.099,00	802.203.600,00	21.693.756.139,41	21.693.756.139,41	0,00
		PHI*)	9.505.338.919,90		525.632.429,00	902.552.772,00	9.128.418.576,90	8.788.788.443,06	339.630.133,84
		Jumlah	5.571.916.309.769,38		189.510.142.285,00	251.543.461.840,00	5.509.882.990.214,38	5.497.535.376.566,22	12.347.613.648,16
4	April	Biaya Perkara	192.217.780.477,46		46.837.634.502,00	58.791.192.934,00	180.264.222.045,46	170.005.952.397,34	10.258.269.648,12
		Biaya Eksekusi	202.088.714.799,25		78.874.420.778,00	26.001.998.278,00	254.961.137.299,25	253.797.367.215,05	1.163.770.084,20
		Biaya Konsinyasi	5.084.754.320.221,36		96.437.927.320,00	57.707.883.018,72	5.123.484.364.522,64	5.121.857.995.997,64	1.626.368.525,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.693.756.139,41		177.596.000,00	394.429.300,00	21.476.922.839,41	21.476.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.128.418.576,90		1.454.936.163,00	836.396.291,00	9.746.958.448,90	9.458.833.340,90	288.125.108,00
		Jumlah	5.509.882.990.214,38		223.782.514.763,00	143.731.899.821,72	5.589.933.605.155,66	5.576.597.071.790,34	13.336.533.365,32
5	Mei	Biaya Perkara	180.264.222.045,46		63.536.832.431,00	52.101.523.241,00	191.699.531.235,46	180.812.520.141,97	10.887.011.093,49
		Biaya Eksekusi	254.961.137.299,25		22.419.288.921,50	42.677.580.410,34	234.702.845.810,41	233.426.095.551,21	1.276.750.259,20
		Biaya Konsinyasi	5.123.484.364.522,64		332.108.223.759,00	156.177.200.039,00	5.299.415.388.242,64	5.299.029.529.796,64	385.858.446,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.476.922.839,41		1.617.085.000,00	1.531.085.000,00	21.562.922.839,41	21.562.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.746.958.448,90		516.171.467,00	331.311.000,00	9.931.818.915,90	9.645.483.173,06	286.335.742,84
		Jumlah	5.589.933.605.155,66		420.197.601.578,50	252.818.699.690,34	5.757.312.507.043,82	5.744.476.551.502,29	12.835.955.541,53
6	Juni	Biaya Perkara	191.699.531.235,46		82.215.006.282,94	81.732.049.957,00	192.182.487.561,40	181.480.500.509,67	10.701.987.051,73
		Biaya Eksekusi	234.702.845.810,41		16.369.172.888,00	29.364.162.908,00	221.707.855.790,41	220.480.376.656,21	1.227.479.134,20
		Biaya Konsinyasi	5.299.415.388.242,64		152.036.526.979,00	36.622.396.461,00	5.414.829.518.760,64	5.414.467.502.555,64	362.016.205,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.562.922.839,41		204.800.000,00	245.000.000,00	21.522.722.839,41	21.522.722.839,41	0,00
		PHI*)	9.931.818.915,90		549.038.000,00	1.385.466.817,00	9.095.390.098,90	8.783.123.815,06	312.266.283,84
		Jumlah	5.757.312.507.043,82		251.374.544.149,94	149.349.076.143,00	5.859.337.975.050,76	5.846.734.226.375,99	12.603.748.674,77
7	Juli	Biaya Perkara	192.182.487.561,40		70.728.092.354,00	75.744.266.716,94	187.166.313.198,46	176.246.469.081,52	10.919.844.116,94
		Biaya Eksekusi	221.707.855.790,41		22.398.908.503,00	39.981.498.382,00	204.125.265.911,41	202.850.221.012,21	1.275.044.899,20
		Biaya Konsinyasi	5.414.829.518.760,64		159.719.381.152,88	74.283.050.042,00	5.500.265.849.871,52	5.499.970.946.934,52	294.902.937,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.522.722.839,41		300.428.500,00	1.884.312.346,00	19.938.838.993,41	19.938.838.993,41	0,00
		PHI*)	9.095.390.098,90		604.987.611,00	635.769.032,00	9.064.608.677,90	8.851.899.464,06	212.709.213,84
		Jumlah	5.859.337.975.050,76		253.751.798.120,88	192.528.896.518,94	5.920.560.876.652,70	5.907.858.375.485,72	12.702.501.166,98
8	Agustus	Biaya Perkara	187.166.313.198,46		75.403.649.565,00	75.314.380.085,00	187.255.582.678,46	176.705.071.761,52	10.550.510.916,94
		Biaya Eksekusi	204.125.265.911,41		10.560.394.162,00	11.843.770.609,00	202.841.889.464,41	201.553.380.396,21	1.288.509.068,20
		Biaya Konsinyasi	5.500.265.849.871,52		64.158.122.685,00	78.853.511.872,91	5.485.570.460.683,61	5.485.255.851.312,61	314.609.371,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.938.838.993,41		586.599.231,00	1.235.025.349,00	19.290.412.875,41	19.290.412.875,41	0,00
		PHI*)	9.064.608.677,90		679.393.850,00	807.453.300,00	8.936.549.227,90	8.734.014.626,06	202.534.601,84
		Jumlah	5.920.560.876.652,70		151.388.159.493,00	168.054.141.215,91	5.903.894.894.929,79	5.891.538.730.971,81	12.356.163.957,98
9	September	Biaya Perkara	187.255.582.678,46		73.590.523.685,00	73.528.618.001,00	187.317.488.362,46	177.065.440.366,13	10.252.047.996,33
		Biaya Eksekusi	202.841.889.464,41		20.327.051.366,59	17.137.135.839,90	206.031.804.991,10	204.931.300.128,90	1.100.504.862,20
		Biaya Konsinyasi	5.485.570.460.683,61		29.500.567.592,00	71.079.002.880,52	5.443.992.025.395,09	5.443.683.311.217,09	308.714.178,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.290.412.875,41		826.989.180,00	677.711.267,00	19.439.690.788,41	19.439.690.788,41	0,00
		PHI*)	8.936.549.227,90		468.906.000,00	1.063.262.730,00	8.342.192.497,90	8.217.331.814,06	124.860.683,84
		Jumlah	5.903.894.894.929,79		124.714.037.823,59	163.485.730.718,42	5.865.123.202.034,96	5.853.337.074.314,59	11.786.127.720,37
10	Oktober	Biaya Perkara	187.317.488.362,46		70.665.151.990,00	74.628.131.260,00	183.354.509.092,46	172.417.952.649,67	10.936.556.442,79
		Biaya Eksekusi	206.031.804.991,10		14.454.586.825,00	6.857.625.580,00	213.628.766.236,10	212.364.808.273,90	1.263.957.962,20
		Biaya Konsinyasi	5.443.992.025.395,09		235.667.161.107,00	50.151.695.558,87	5.629.507.490.943,22	5.628.990.248.933,22	517.242.010,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.439.690.788,41		2.124.207.257,12	120.000.000,00	21.443.898.045,53	21.434.549.788,41	9.348.257,12
		PHI*)	8.342.192.497,90		1.451.085.818,00	1.820.664.049,00	7.972.614.266,90	7.789.181.733,06	183.432.533,84
		Jumlah	5.865.123.202.034,96		324.362.192.997,12	133.578.116.447,87	6.055.907.278.584,21	6.042.996.741.378,26	12.910.537.205,95
11	November	Biaya Perkara	183.354.509.092,46		81.862.710.946,00	73.051.958.813,04	192.165.261.225,42	181.506.116.520,09	10.659.144.705,33
		Biaya Eksekusi	213.628.766.236,10		24.071.638.863,00	22.093.620.528,00	215.606.784.571,10	214.408.825.064,10	1.197.959.507,00
		Biaya Konsinyasi	5.629.507.490.943,22		148.754.718.960,00	145.033.867.184,00	5.633.228.342.719,22	5.633.023.363.367,22	204.979.352,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.443.898.045,53		495.000.000,00	2.647.143.680,12	19.291.754.365,41	19.281.754.365,41	10.000.000,00
		PHI*)	7.972.614.266,90		1.064.213.621,00	832.636.684,00	8.204.191.203,90	8.061.837.210,06	142.353.993,84
		Jumlah	6.055.907.278.584,21		256.248.282.390,00	243.659.226.889,16	6.068.496.334.085,05	6.056.281.896.526,88	12.214.437.558,17
12	Desember	Biaya Perkara	192.165.261.225,42		54.760.069.165,00	80.115.811.265,00	166.809.519.125,42	157.679.295.868,54	9.130.223.256,88
		Biaya Eksekusi	215.606.784.571,10		130.758.653.401,94	34.305.896.862,94	312.059.541.110,10	311.139.204.066,90	920.337.043,20
		Biaya Konsinyasi	5.633.228.342.719,22		307.535.485.475,00	132.108.310.114,00	5.808.655.518.080,22	5.808.385.734.782,22	269.783.298,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.291.754.365,41		4.894.871.721,00	3.184.811.818,00	21.001.814.268,41	20.991.814.268,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.204.191.203,90		434.747.553,00	657.017.311,00	7.981.921.445,90	7.782.981.702,06	198.939.743,84
		Jumlah	6.068.496.334.085,05		498.383.827.315,94	250.371.847.370,94	6.316.508.314.030,05	6.305.979.030.688,13	10.529.283.341,92

Sedangkan rincian rekapitulasi Uang Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 untuk masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

1) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (0199) Instansi Pusat
Satuan Kerja : Kepaniteraan

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						Kas di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	30.532.748.430,00		1.581.524.000,00	2.820.834.760,00	29.293.437.670,00	29.206.473.056,00	86.964.614,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	30.532.748.430,00	0,00	1.581.524.000,00	2.820.834.760,00	29.293.437.670,00	29.206.473.056,00	86.964.614,00
2	Februari	Biaya Perkara	29.293.437.670,00		2.341.024.000,00	1.149.686.902,00	30.484.774.768,00	30.381.003.354,00	103.771.414,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	29.293.437.670,00	0,00	2.341.024.000,00	1.149.686.902,00	30.484.774.768,00	30.381.003.354,00	103.771.414,00
3	Maret	Biaya Perkara	30.484.774.768,00		2.546.054.000,00	984.819.504,00	32.046.009.264,00	31.985.369.264,00	60.640.000,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	30.484.774.768,00	0,00	2.546.054.000,00	984.819.504,00	32.046.009.264,00	31.985.369.264,00	60.640.000,00
4	April	Biaya Perkara	32.046.009.264,00		1.181.539.000,00	3.850.270.698,00	29.377.277.566,00	29.311.393.843,00	65.883.723,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	32.046.009.264,00	0,00	1.181.539.000,00	3.850.270.698,00	29.377.277.566,00	29.311.393.843,00	65.883.723,00
5	Mei	Biaya Perkara	29.377.277.566,00		1.233.994.000,00	883.913.909,00	29.727.357.657,00	29.617.396.834,00	109.960.823,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	29.377.277.566,00	0,00	1.233.994.000,00	883.913.909,00	29.727.357.657,00	29.617.396.834,00	109.960.823,00
6	Juni	Biaya Perkara	29.727.357.657,00		2.117.556.500,00	744.451.610,00	31.100.462.547,00	31.014.545.815,00	85.916.732,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	29.727.357.657,00	0,00	2.117.556.500,00	744.451.610,00	31.100.462.547,00	31.014.545.815,00	85.916.732,00
7	Juli	Biaya Perkara	31.100.462.547,00		2.225.867.000,00	6.309.224.642,00	27.017.104.905,00	26.919.726.673,00	97.378.232,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	31.100.462.547,00	0,00	2.225.867.000,00	6.309.224.642,00	27.017.104.905,00	26.919.726.673,00	97.378.232,00
8	Agustus	Biaya Perkara	27.017.104.905,00		1.439.451.000,00	898.328.644,00	27.558.227.261,00	27.506.056.056,00	52.171.205,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	27.017.104.905,00	0,00	1.439.451.000,00	898.328.644,00	27.558.227.261,00	27.506.056.056,00	52.171.205,00
9	September	Biaya Perkara	27.558.227.261,00		1.997.492.700,00	1.538.209.066,00	28.017.510.895,00	27.926.809.621,00	90.701.274,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	27.558.227.261,00	0,00	1.997.492.700,00	1.538.209.066,00	28.017.510.895,00	27.926.809.621,00	90.701.274,00
10	Oktober	Biaya Perkara	28.017.510.895,00		2.075.526.500,00	4.669.984.134,00	25.423.053.261,00	25.304.805.217,00	118.248.044,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	28.017.510.895,00	0,00	2.075.526.500,00	4.669.984.134,00	25.423.053.261,00	25.304.805.217,00	118.248.044,00
11	November	Biaya Perkara	25.423.053.261,00		1.884.262.500,00	1.465.233.345,00	25.842.082.416,00	25.748.470.079,00	93.612.337,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	25.423.053.261,00	0,00	1.884.262.500,00	1.465.233.345,00	25.842.082.416,00	25.748.470.079,00	93.612.337,00
12	Desember	Biaya Perkara	25.842.082.416,00		3.857.536.000,00	1.474.637.400,00	28.224.981.016,00	28.187.425.068,00	37.555.948,00
		Biaya Eksekusi				0,00	0,00		
		Biaya Konsinyasi				0,00	0,00		
		Uang Titipan Perkara Pidana*)				0,00	0,00		
		PHI*)				0,00	0,00		
		Jumlah	25.842.082.416,00	0,00	3.857.536.000,00	1.474.637.400,00	28.224.981.016,00	28.187.425.068,00	37.555.948,00

2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						Saldo Akhir di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	119.475.241.738,81	(3.125.025.809,00)	16.160.362.688,65	15.515.261.728,00	116.995.316.890,46	113.528.872.599,58	3.466.444.290,88
		Biaya Eksekusi	183.731.209.801,56	623.100,00	26.938.083.498,00	32.841.434.283,91	177.828.482.115,65	177.229.071.891,45	599.410.224,20
		Biaya Konsinyasi	5.124.584.466.495,07	(11.174,00)	49.889.137.925,00	61.743.700.053,00	5.112.729.893.193,07	5.112.613.370.932,07	116.522.261,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.030.533.040,41	(162.109.400,00)	425.500.000,00	666.852.000,00	20.627.071.640,41	20.617.071.640,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.604.251.551,00	0,00	1.213.908.719,90	512.297.293,00	9.305.862.977,90	8.917.133.274,06	388.729.703,84
		Jumlah	5.457.425.702.626,85	(3.286.523.283,00)	94.626.992.831,55	111.279.545.357,91	5.437.486.626.817,49	5.432.905.520.337,57	4.581.106.479,92
2	Februari	Biaya Perkara	116.995.316.890,46		14.910.925.259,00	13.268.876.366,00	118.637.365.783,46	114.901.682.201,29	3.735.683.582,17
		Biaya Eksekusi	177.828.482.115,65		23.096.018.745,60	24.816.669.645,00	176.107.831.216,25	175.543.490.732,05	564.340.484,20
		Biaya Konsinyasi	5.112.729.893.193,07		72.931.299.847,00	38.340.372.499,71	5.147.320.820.540,36	5.147.199.623.053,36	121.197.487,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.627.071.640,41		1.588.121.000,00	1.241.235.000,00	20.973.957.640,41	20.964.947.640,41	9.010.000,00
		PHI*)	9.305.862.977,90		1.038.716.027,00	839.240.085,00	9.505.338.919,90	9.037.379.095,06	467.959.824,84
		Jumlah	5.437.486.626.817,49		113.565.080.878,60	78.506.393.595,71	5.472.545.314.100,38	5.467.647.122.722,17	4.898.191.378,21
3	Maret	Biaya Perkara	118.637.365.783,46		19.479.675.399,00	17.721.055.582,00	120.395.985.600,46	116.915.439.090,34	3.480.546.510,12
		Biaya Eksekusi	176.107.831.216,25		83.570.896.107,00	62.531.552.374,00	197.147.174.949,25	196.575.965.738,05	571.209.211,20
		Biaya Konsinyasi	5.147.320.820.540,36		25.862.617.966,00	112.260.603.385,00	5.060.922.835.121,36	5.060.769.623.660,36	153.211.461,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	20.973.957.640,41		1.522.002.099,00	802.203.600,00	21.693.756.139,41	21.693.756.139,41	0,00
		PHI*)	9.505.338.919,90		525.632.429,00	902.552.772,00	9.128.418.576,90	8.788.788.443,06	339.630.133,84
		Jumlah	5.472.545.314.100,38		130.960.824.000,00	194.217.967.713,00	5.409.288.170.387,38	5.404.743.573.071,22	4.544.597.316,16
4	April	Biaya Perkara	120.395.985.600,46		16.090.102.059,00	17.588.055.906,00	118.898.031.753,46	115.675.180.476,34	3.222.851.277,12
		Biaya Eksekusi	197.147.174.949,25		78.287.425.778,00	25.430.945.878,00	250.003.654.849,25	249.502.992.265,05	500.662.584,20
		Biaya Konsinyasi	5.060.922.835.121,36		96.118.367.320,00	56.219.355.688,72	5.100.821.846.752,64	5.099.428.372.461,64	1.393.474.291,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.693.756.139,41		177.596.000,00	394.429.300,00	21.476.922.839,41	21.476.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.128.418.576,90		1.454.936.163,00	836.396.291,00	9.746.958.448,90	9.458.833.340,90	288.125.108,00
		Jumlah	5.409.288.170.387,38		192.128.427.320,00	100.469.183.063,72	5.500.947.414.643,66	5.495.542.301.383,34	5.405.113.260,32
5	Mei	Biaya Perkara	118.898.031.753,46		12.622.859.409,00	12.929.556.382,00	118.591.334.780,46	114.920.980.631,97	3.670.354.148,49
		Biaya Eksekusi	250.003.654.849,25		21.427.357.067,50	42.307.964.910,34	229.123.047.006,41	228.511.161.347,21	611.885.659,20
		Biaya Konsinyasi	5.100.821.846.752,64		331.650.073.759,00	155.558.928.039,00	5.276.912.992.472,64	5.276.773.423.260,64	139.569.212,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.476.922.839,41		1.617.085.000,00	1.531.085.000,00	21.562.922.839,41	21.562.922.839,41	0,00
		PHI*)	9.746.958.448,90		516.171.467,00	331.311.000,00	9.931.818.915,90	9.645.483.173,06	286.335.742,84
		Jumlah	5.500.947.414.643,66		367.833.546.702,50	212.658.845.331,34	5.656.122.116.014,82	5.651.413.971.252,29	4.708.144.762,53
6	Juni	Biaya Perkara	118.591.334.780,46		18.595.922.492,94	18.344.575.880,00	118.842.681.393,40	115.395.892.845,67	3.446.788.547,73
		Biaya Eksekusi	229.123.047.006,41		15.544.327.888,00	28.022.070.754,00	216.645.304.140,41	216.153.641.506,21	491.662.634,20
		Biaya Konsinyasi	5.276.912.992.472,64		151.127.780.879,00	35.028.768.361,00	5.393.012.004.990,64	5.392.861.978.019,64	150.026.971,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.562.922.839,41		204.800.000,00	245.000.000,00	21.522.722.839,41	21.522.722.839,41	0,00
		PHI*)	9.931.818.915,90		549.038.000,00	1.385.466.817,00	9.095.390.098,90	8.783.123.815,06	312.266.283,84
		Jumlah	5.656.122.116.014,82		186.021.869.259,94	83.025.881.812,00	5.759.118.103.462,76	5.754.717.359.025,99	4.400.744.436,77
7	Juli	Biaya Perkara	118.842.681.393,40		18.596.634.702,00	17.790.600.533,94	119.648.715.561,46	116.183.702.563,52	3.465.012.997,94
		Biaya Eksekusi	216.645.304.140,41		21.458.485.503,00	39.325.918.482,00	198.777.871.161,41	198.216.033.962,21	561.837.199,20
		Biaya Konsinyasi	5.393.012.004.990,64		159.085.371.172,88	73.655.420.160,00	5.478.441.956.003,52	5.478.323.766.500,52	118.189.503,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.522.722.839,41		300.428.500,00	1.884.312.346,00	19.938.838.993,41	19.938.838.993,41	0,00
		PHI*)	9.095.390.098,90		604.987.611,00	635.769.032,00	9.064.608.677,90	8.851.899.464,06	212.709.213,84
		Jumlah	5.759.118.103.462,76		200.045.907.488,88	133.292.020.553,94	5.825.871.990.397,70	5.821.514.241.483,72	4.357.748.913,98
8	Agustus	Biaya Perkara	119.648.715.561,46		19.236.675.542,00	18.835.738.242,00	120.049.652.861,46	116.624.617.904,52	3.425.034.956,94
		Biaya Eksekusi	198.777.871.161,41		9.494.147.162,00	11.097.504.659,00	197.174.513.664,41	196.603.190.796,21	571.322.868,20
		Biaya Konsinyasi	5.478.441.956.003,52		63.523.207.685,00	66.844.699.272,91	5.475.120.464.415,61	5.474.975.179.044,61	145.285.371,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.938.838.993,41		586.599.231,00	1.235.025.349,00	19.290.412.875,41	19.290.412.875,41	0,00
		PHI*)	9.064.608.677,90		679.393.850,00	807.453.300,00	8.936.549.227,90	8.734.014.626,06	202.534.601,84
		Jumlah	5.825.871.990.397,70		93.520.023.470,00	98.820.420.822,91	5.820.571.593.044,79	5.816.227.415.246,81	4.344.177.797,98
9	September	Biaya Perkara	120.049.652.861,46		20.258.843.766,00	20.296.138.156,00	120.012.358.471,46	116.803.579.370,13	3.208.779.101,33
		Biaya Eksekusi	197.174.513.664,41		19.618.821.866,59	16.392.316.939,90	200.401.018.591,10	199.914.694.228,90	486.324.362,20
		Biaya Konsinyasi	5.475.120.464.415,61		29.147.753.826,00	70.702.592.880,52	5.433.565.625.361,09	5.433.425.748.949,09	139.876.412,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.290.412.875,41		826.989.180,00	677.711.267,00	19.439.690.788,41	19.439.690.788,41	0,00
		PHI*)	8.936.549.227,90		468.906.000,00	1.063.262.730,00	8.342.192.497,90	8.217.331.814,06	124.860.683,84
		Jumlah	5.820.571.593.044,79		70.321.314.638,59	109.132.021.973,42	5.781.760.885.709,96	5.777.801.045.150,59	3.959.840.559,37
10	Oktober	Biaya Perkara	120.012.358.471,46		19.468.854.615,00	19.229.319.802,00	120.251.893.284,46	116.631.068.413,67	3.620.824.870,79
		Biaya Eksekusi	200.401.018.591,10		13.536.326.925,00	5.990.611.980,00	207.946.733.536,10	207.380.107.073,90	566.626.462,20
		Biaya Konsinyasi	5.433.565.625.361,09		234.719.460.107,00	49.518.031.774,87	5.618.767.053.693,22	5.618.507.999.449,22	259.054.244,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.439.690.788,41		2.124.207.257,12	120.000.000,00	21.443.898.045,53	21.434.549.788,41	9.348.257,12
		PHI*)	8.342.192.497,90		1.451.085.818,00	1.820.664.049,00	7.972.614.266,90	7.789.181.733,06	183.432.533,84
		Jumlah	5.781.760.885.709,96		271.299.934.722,12	76.678.627.605,87	5.976.382.192.826,21	5.971.742.906.458,26	4.639.286.367,95
11	November	Biaya Perkara	120.251.893.284,46		29.313.972.511,00	19.066.570.882,04	130.499.294.913,42	126.778.943.366,09	3.720.351.547,33
		Biaya Eksekusi	207.946.733.536,10		23.279.450.055,00	21.261.373.778,00	209.964.809.813,10	209.396.362.306,10	568.447.507,00
		Biaya Konsinyasi	5.618.767.053.693,22		148.458.832.770,00	143.987.865.484,00	5.623.238.020.979,22	5.623.146.152.693,22	91.868.286,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	21.443.898.045,53		495.000.000,00	2.647.143.680,12	19.291.754.365,41	19.281.754.365,41	10.000.000,00
		PHI*)	7.972.614.266,90		1.064.213.621,00	832.636.684,00	8.204.191.203,90	8.061.837.210,06	142.353.993,84
		Jumlah	5.976.382.192.826,21		202.611.468.957,00	187.795.590.508,16	5.991.198.071.275,05	5.986.665.049.940,88	4.533.021.334,17
12	Desember	Biaya Perkara	130.499.294.913,42		17.392.568.751,00	33.858.784.041,00	114.033.079.623,42	110.498.845.360,54	3.534.234.262,88
		Biaya Eksekusi	209.964.809.813,10		130.036.592.401,94	33.252.035.862,94	306.749.366.352,10	306.247.743.808,90	501.622.543,20
		Biaya Konsinyasi	5.623.238.020.979,22		307.423.448.475,00	130.858.492.048,00	5.799.802.977.406,22	5.799.634.898.108,22	168.079.298,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	19.291.754.365,41		4.894.871.721,00	3.184.811.818,00	21.001.814.268,41	20.991.814.268,41	10.000.000,00
		PHI*)	8.204.191.203,90		434.747.553,00	657.017.311,00	7.981.921.445,90	7.782.981.702,06	198.939.743,84
		Jumlah	5.991.198.071.275,05		460.182.228.901,94	201.811.141.080,94	6.249.569.159.096,05	6.245.156.283.248,13	4.412.875.847,92

3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						Saldo Akhir di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	25.763.965.766,00	(2.712.239.226,00)	68.223.843.455,00	52.791.160.518,00	38.484.409.477,00	31.827.095.656,00	6.657.313.821,00
		Biaya Eksekusi	4.466.906.250,00	109.770.100,00	1.139.073.000,00	622.472.000,00	5.093.277.350,00	4.413.248.850,00	680.028.500,00
		Biaya Konsinyasi	28.452.028.737,44	(553.394.700,00)	453.200.800,00	1.163.777.944,44	27.188.056.893,00	26.899.328.659,00	288.728.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	58.682.900.753,44	(3.155.863.826,00)	69.816.117.255,00	54.577.410.462,44	70.765.743.720,00	63.139.673.165,00	7.626.070.555,00
2	Februari	Biaya Perkara	38.484.409.477,00		45.231.265.900,00	45.250.619.750,00	38.465.055.627,00	31.366.423.477,00	7.098.632.150,00
		Biaya Eksekusi	5.093.277.350,00		573.827.000,00	660.698.000,00	5.006.406.350,00	4.397.110.850,00	609.295.500,00
		Biaya Konsinyasi	27.188.056.893,00		188.350.000,00	4.577.730.500,00	22.798.676.393,00	22.551.343.159,00	247.333.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	70.765.743.720,00		45.993.442.900,00	50.489.048.250,00	66.270.138.370,00	58.314.877.486,00	7.955.260.884,00
3	Maret	Biaya Perkara	38.465.055.627,00		52.711.362.759,00	53.968.032.754,00	37.208.385.632,00	30.560.154.272,00	6.648.231.360,00
		Biaya Eksekusi	5.006.406.350,00		603.371.500,00	727.080.400,00	4.882.697.450,00	4.306.206.870,00	576.490.580,00
		Biaya Konsinyasi	22.798.676.393,00		1.971.318.026,00	938.509.319,00	23.831.485.100,00	23.610.536.666,00	220.948.434,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	66.270.138.370,00		55.286.052.285,00	55.633.622.473,00	65.922.568.182,00	58.476.897.808,00	7.445.670.374,00
4	April	Biaya Perkara	37.208.385.632,00		29.048.599.543,00	36.781.022.005,00	29.475.963.170,00	22.818.275.180,00	6.657.687.990,00
		Biaya Eksekusi	4.882.697.450,00		585.495.000,00	569.114.000,00	4.899.078.450,00	4.237.590.950,00	661.487.500,00
		Biaya Konsinyasi	23.831.485.100,00		319.560.000,00	1.488.527.330,00	22.662.517.770,00	22.429.623.536,00	232.894.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	65.922.568.182,00		29.953.654.543,00	38.838.663.335,00	57.037.559.390,00	49.485.489.666,00	7.552.069.724,00
5	Mei	Biaya Perkara	29.475.963.170,00		49.128.711.172,00	37.832.921.622,00	40.771.752.720,00	34.020.722.003,00	6.751.030.717,00
		Biaya Eksekusi	4.899.078.450,00		983.281.854,00	361.135.900,00	5.521.224.404,00	4.859.865.804,00	661.358.600,00
		Biaya Konsinyasi	22.662.517.770,00		458.150.000,00	618.272.000,00	22.502.395.770,00	22.256.106.536,00	246.289.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	57.037.559.390,00		50.570.143.026,00	38.812.329.522,00	68.795.372.894,00	61.136.694.343,00	7.658.678.551,00
6	Juni	Biaya Perkara	40.771.752.720,00		60.658.192.440,00	61.795.718.192,00	39.634.226.968,00	32.816.840.626,00	6.817.386.342,00
		Biaya Eksekusi	5.521.224.404,00		816.783.000,00	1.336.696.554,00	5.001.310.850,00	4.267.308.350,00	734.002.500,00
		Biaya Konsinyasi	22.502.395.770,00		908.746.100,00	1.593.628.100,00	21.817.513.770,00	21.605.524.536,00	211.989.234,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	68.795.372.894,00		62.383.721.540,00	64.726.042.846,00	66.453.051.588,00	58.689.673.512,00	7.763.378.076,00
7	Juli	Biaya Perkara	39.634.226.968,00		49.223.030.402,00	50.977.769.091,00	37.879.488.279,00	30.818.554.908,00	7.060.933.371,00
		Biaya Eksekusi	5.001.310.850,00		938.643.000,00	654.210.900,00	5.285.742.950,00	4.575.711.250,00	710.031.700,00
		Biaya Konsinyasi	21.817.513.770,00		634.009.980,00	627.629.882,00	21.823.893.868,00	21.647.180.434,00	176.713.434,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	66.453.051.588,00		50.795.683.382,00	52.259.609.873,00	64.989.125.097,00	57.041.446.592,00	7.947.678.505,00
8	Agustus	Biaya Perkara	37.879.488.279,00		53.999.572.973,00	54.835.266.304,00	37.043.794.948,00	30.233.795.160,00	6.809.999.788,00
		Biaya Eksekusi	5.285.742.950,00		1.058.147.000,00	744.281.300,00	5.599.608.650,00	4.885.999.450,00	713.609.200,00
		Biaya Konsinyasi	21.823.893.868,00		634.915.000,00	12.008.812.600,00	10.449.996.268,00	10.280.672.268,00	169.324.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	64.989.125.097,00		55.692.634.973,00	67.588.360.204,00	53.093.399.866,00	45.400.466.878,00	7.692.932.988,00
9	September	Biaya Perkara	37.043.794.948,00		50.672.456.069,00	51.040.292.699,00	36.675.958.318,00	30.022.479.682,00	6.653.478.636,00
		Biaya Eksekusi	5.599.608.650,00		708.079.500,00	742.543.300,00	5.565.144.850,00	4.954.414.350,00	610.730.500,00
		Biaya Konsinyasi	10.449.996.268,00		352.813.766,00	376.410.000,00	10.426.400.034,00	10.257.562.268,00	168.837.766,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	53.093.399.866,00		51.733.349.335,00	52.159.245.999,00	52.667.503.202,00	45.234.456.300,00	7.433.046.902,00
10	Oktober	Biaya Perkara	36.675.958.318,00		48.495.922.575,00	50.144.771.460,00	35.027.109.433,00	28.134.073.079,00	6.893.036.354,00
		Biaya Eksekusi	5.565.144.850,00		914.552.100,00	859.187.600,00	5.620.509.350,00	4.924.597.850,00	695.911.500,00
		Biaya Konsinyasi	10.426.400.034,00		947.701.000,00	633.663.784,00	10.740.437.250,00	10.482.249.484,00	258.187.766,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	52.667.503.202,00		50.358.175.675,00	51.637.622.844,00	51.388.056.033,00	43.540.920.413,00	7.847.135.620,00
11	November	Biaya Perkara	35.027.109.433,00		49.832.422.727,00	51.666.380.334,00	33.193.151.826,00	26.576.975.409,00	6.616.176.417,00
		Biaya Eksekusi	5.620.509.350,00		790.353.000,00	828.690.900,00	5.582.171.450,00	4.954.079.450,00	628.092.000,00
		Biaya Konsinyasi	10.740.437.250,00		295.886.190,00	1.046.001.700,00	9.990.321.740,00	9.877.210.674,00	113.111.066,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	51.388.056.033,00		50.918.661.917,00	53.541.072.934,00	48.765.645.016,00	41.408.265.533,00	7.357.379.483,00
12	Desember	Biaya Perkara	33.193.151.826,00		32.568.886.364,00	43.909.544.074,00	21.852.494.116,00	16.518.865.526,00	5.333.628.590,00
		Biaya Eksekusi	5.582.171.450,00		718.484.000,00	1.050.966.000,00	5.249.689.450,00	4.830.974.950,00	418.714.500,00
		Biaya Konsinyasi	9.990.321.740,00		112.037.000,00	1.249.818.066,00	8.852.540.674,00	8.750.836.674,00	101.704.000,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	48.765.645.016,00		33.399.407.364,00	46.210.328.140,00	35.954.724.240,00	30.100.677.150,00	5.854.047.090,00

4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2022
(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						Saldo Akhir di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	2.497.897.376,00	(1.371.000,00)	613.429.200,00	571.082.700,00	2.538.872.876,00	2.190.328.283,00	348.544.593,00
		Biaya Eksekusi	55.927.300,00	0,00	1.350.000,00	2.228.200,00	55.049.100,00	55.049.100,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.553.824.676,00	(1.371.000,00)	614.779.200,00	573.310.900,00	2.593.921.976,00	2.245.377.383,00	348.544.593,00
2	Februari	Biaya Perkara	2.538.872.876,00		536.332.300,00	515.780.545,00	2.559.424.631,00	2.248.144.623,00	311.280.008,00
		Biaya Eksekusi	55.049.100,00		3.500.000,00	1.891.200,00	56.657.900,00	56.657.900,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.593.921.976,00		539.832.300,00	517.671.745,00	2.616.082.531,00	2.304.802.523,00	311.280.008,00
3	Maret	Biaya Perkara	2.559.424.631,00		712.962.000,00	704.986.650,00	2.567.399.981,00	2.272.414.023,00	294.985.958,00
		Biaya Eksekusi	56.657.900,00		4.250.000,00	2.065.500,00	58.842.400,00	57.122.400,00	1.720.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.616.082.531,00		717.212.000,00	707.052.150,00	2.626.242.381,00	2.329.536.423,00	296.705.958,00
4	April	Biaya Perkara	2.567.399.981,00		517.393.900,00	571.844.325,00	2.512.949.556,00	2.201.102.898,00	311.846.658,00
		Biaya Eksekusi	58.842.400,00		1.500.000,00	1.938.400,00	58.404.000,00	56.784.000,00	1.620.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.626.242.381,00		518.893.900,00	573.782.725,00	2.571.353.556,00	2.257.886.898,00	313.466.658,00
5	Mei	Biaya Perkara	2.512.949.556,00		551.267.850,00	455.131.328,00	2.609.086.078,00	2.253.420.673,00	355.665.405,00
		Biaya Eksekusi	58.404.000,00		8.650.000,00	8.479.600,00	58.574.400,00	55.068.400,00	3.506.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.571.353.556,00		559.917.850,00	463.610.928,00	2.667.660.478,00	2.308.489.073,00	359.171.405,00
6	Juni	Biaya Perkara	2.609.086.078,00		843.334.850,00	847.304.275,00	2.605.116.653,00	2.253.221.223,00	351.895.430,00
		Biaya Eksekusi	58.574.400,00		8.062.000,00	5.395.600,00	61.240.800,00	59.426.800,00	1.814.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.667.660.478,00		851.396.850,00	852.699.875,00	2.666.357.453,00	2.312.648.023,00	353.709.430,00
7	Juli	Biaya Perkara	2.605.116.653,00		682.560.250,00	666.672.450,00	2.621.004.453,00	2.324.484.937,00	296.519.516,00
		Biaya Eksekusi	61.240.800,00		1.780.000,00	1.369.000,00	61.651.800,00	58.475.800,00	3.176.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.666.357.453,00		684.340.250,00	668.041.450,00	2.682.656.253,00	2.382.960.737,00	299.695.516,00
8	Agustus	Biaya Perkara	2.621.004.453,00		727.950.050,00	745.046.895,00	2.603.907.608,00	2.340.602.641,00	263.304.967,00
		Biaya Eksekusi	61.651.800,00		8.100.000,00	1.984.650,00	67.767.150,00	64.190.150,00	3.577.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.682.656.253,00		736.050.050,00	747.031.545,00	2.671.674.758,00	2.404.792.791,00	266.881.967,00
9	September	Biaya Perkara	2.603.907.608,00		661.731.150,00	653.978.080,00	2.611.660.678,00	2.312.571.693,00	299.088.985,00
		Biaya Eksekusi	67.767.150,00		150.000,00	2.275.600,00	65.641.550,00	62.191.550,00	3.450.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.671.674.758,00		661.881.150,00	656.253.680,00	2.677.302.228,00	2.374.763.243,00	302.538.985,00
10	Oktober	Biaya Perkara	2.611.660.678,00		624.848.300,00	584.055.864,00	2.652.453.114,00	2.348.005.940,00	304.447.174,00
		Biaya Eksekusi	65.641.550,00		3.707.800,00	7.826.000,00	61.523.350,00	60.103.350,00	1.420.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.677.302.228,00		628.556.100,00	591.881.864,00	2.713.976.464,00	2.408.109.290,00	305.867.174,00
11	November	Biaya Perkara	2.652.453.114,00		832.053.208,00	853.774.252,00	2.630.732.070,00	2.401.727.666,00	229.004.404,00
		Biaya Eksekusi	61.523.350,00		1.835.808,00	3.555.850,00	59.803.308,00	58.383.308,00	1.420.000,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.713.976.464,00		833.889.016,00	857.330.102,00	2.690.535.378,00	2.460.110.974,00	230.424.404,00
12	Desember	Biaya Perkara	2.630.732.070,00		941.078.050,00	872.845.750,00	2.698.964.370,00	2.474.159.914,00	224.804.456,00
		Biaya Eksekusi	59.803.308,00		3.577.000,00	2.895.000,00	60.485.308,00	60.485.308,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.690.535.378,00		944.655.050,00	875.740.750,00	2.759.449.678,00	2.534.645.222,00	224.804.456,00

Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam CaLK Mahkamah Agung dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut:

Adanya penyalahgunaan uang perkara sebesar Rp400.991.711,00 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor periode 2000 sampai dengan 2003 yang hingga kini statusnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian RI;

a. Adanya penyalahgunaan uang perkara sebesar Rp605.515.577,55 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 1996 yang sudah meninggal dunia pada tanggal 5 November 1999 di rumah tahanan saat menjalani hukuman penjara atas perkara tersebut. Sesuai dengan angka 4 Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE004/J.A/8/1998 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan dalam hal terpidana meninggal dunia, maka untuk pembayaran pengganti berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada para ahli warisnya yang sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi. Oleh karena itu, yang berwenang melakukan penyitaan pembayaran pengganti adalah Jaksa sehingga Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk melakukan penyitaan tersebut;
b. Adanya penyalahgunaan uang perkara oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil sebesar Rp1.884.663.259,00 dan hingga kini yang bersangkutan sedang menjalani masa tahanan atas perkara tersebut;
c. Terdapat koreksi saldo awal Tahun 2022 disebabkan kesalahan input oleh Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN KOREKSI SALDO AWAL TAHUN 2022

(dalam satuan rupiah)

K/L : (005) Mahkamah Agung

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
1	PN Jakarta Timur	Terjadi kesalahan penginputan data, namun dalam pembukuan sudah benar	4.732.433.400,00	(16.644.363,00)	221.927.726,79	147.454.906.088,07	1.505.857.956,43	0,00	1.602.433.400,00	34.543.673,00	220.947.726,79	147.454.895.088,07	1.505.857.956,43	0,00
2	PN Sukabumi	BA KOREKSI AWAL TAHUN	77.787.000,00	0,00	22.365.000,00	0,00	0,00	0,00	55.422.000,00	0,00	22.365.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PN Cibadak	Kesalahan penginputan Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara dan Biaya Sita/Jaminan/Eksekusi/Lelang	132.627.680,00	848.500,00	92.415.000,00	16.490.983.185,00	0,00	0,00	132.657.680,00	848.500,00	94.755.000,00	16.490.983.185,00	0,00	0,00
4	PN Tegal	Koreksi saldo awal Biaya Eksekusi	106.734.122,00	11.110.778,00	103.489.575,00	7.668.044,00	0,00	0,00	106.734.122,00	11.110.778,00	103.525.575,00	7.668.044,00	0,00	0,00
5	PN Banda Aceh	Kesalahan perhitungan pada buku kas	118.579.671,26	3.545.450,00	208.562.355,00	492.736.503,00	5.177.192.346,00	19.175.000,00	118.362.171,26	3.495.450,00	196.233.355,00	492.736.503,00	5.177.192.346,00	19.175.000,00
6	PN Padang Sidempuan	Kesalahan input pada data awal tahun	262.166.453,00	16.094.500,00	49.518.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	262.166.453,00	16.094.500,00	63.369.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00
7	PN Bangkinang	Saldo akhir 2021 beda dengan saldo awal 2022 karena ada kesalahan memasukkan nominal uang penerimaan pada panjar biaya perkara	149.715.900,00	0,00	259.272.500,00	8.543.965.853,00	18.000.000,00	0,00	170.825.900,00	0,00	259.272.500,00	8.543.965.853,00	18.000.000,00	0,00
8	PT Manado	Koreksi saldo awal 2022 dikarenakan untuk menindaklanjuti hasil temuan surveilance dari Direktorat Badan Peradilan Umum di Pengadilan Tinggi Manado terkait ketidaktepatan penginputan data	2.134.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		laporan keuangan perkara di KOMDANAS. Adapun Saldo Awal Tahun 2022 sebelum koreksi sejumlah Rp 2.134.377,00 dikoreksi menjadi sejumlah Rp 672.000,00. Untuk sumber data yang diinput sebelumnya dari Buku Bantu Biaya Proses yang seharusnya sumber data dari Buku Induk Keuangan Perkata Perdata												
9	PN Donggala	Saldo Awal Panjar Biaya Perkara di bulan Januari 2022 yakni Rp. 28.673.233,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) bukan Rp. 28.673.500,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Adanya selisih tersebut diakibatkan oleh kesalahan pencatatan Panjar Biaya Perkara oleh Kasir di mana nilai Rp. 233,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sehingga seolah ada kelebihan uang senilai Rp. 267,- (dua ratus enam	28.673.500,00	3.065.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.673.233,00	3.065.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		puluh tujuh rupiah) pada Kas Pembukuan												
10	PN Parigi	Koreksi biaya perkara, biaya eksekusi dan biaya ATK	31.509.000,00	1.783.500,00	5.595.000,00	0,00	0,00	0,00	31.804.000,00	557.500,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
11	PN Sunggumi nasa	Koreksi Awal Tahun Konsinyasi 2022	20.730.000,00	4.808.900,00	92.831.450,00	6.376.502.722,00	0,00	0,00	20.730.000,00	4.808.900,00	92.831.450,00	6.376.502.278,00	0,00	0,00
12	PN Masamba	Saldo awal untuk bulan januari pada laporan pemeriksaan bulan desember adalah Rp.26.475.500, namun saat ingin melakukan pelaporan bulan januari dikomdanas saldo awal berubah, sehingga dilakukan koreksi.	26.555.500,00	550.000,00	20.958.000,00	795.711.000,00	0,00	0,00	26.475.500,00	0,00	20.958.000,00	795.711.000,00	0,00	0,00
13	PN Ambon	Terjadi kesalahan hitung pada rekening koran	449.445.296,00	178.654.590,00	538.712.230,00	9.416.444.858,00	2.703.259.958,00	5.891.000,00	460.538.631,00	37.143.000,00	533.720.330,00	9.416.445.128,00	2.541.150.558,00	5.891.000,00
14	PT Denpasar	Karena saldo awal komdanas dengan saldo di laporan manual tidak sinkron	5.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PN Sumbawa Besar	Saldo akhir desember 2021 Rp60.814.444 di perbaiki karena ada salah penginputan menjadi Rp60.820.444	60.816.444,00	0,00	78.122.000,00	1.494.781.889,00	102.000,00	0,00	60.820.444,00	0,00	78.122.000,00	1.494.781.889,00	102.000,00	0,00
16	PA Jakarta Utara	Petugas input komdanas salah input dibulan november 2022	162.567.500,00	24.944.595,00	97.543.000,00	10.475.000,00	0,00	0,00	153.477.500,00	24.944.595,00	97.543.000,00	10.475.000,00	0,00	0,00
17	PA Bandung	Adanya perubahan saldo awal karena adanya kesalahan input pada SIPP	257.885.800,00	70.397.000,00	14.279.000,00	0,00	0,00	0,00	257.825.800,00	70.417.000,00	14.279.000,00	0,00	0,00	0,00
18	PA Sumedang	Perubahan saldo awal	398.378.000,00	642.305.700,00	23.056.000,00	0,00	0,00	0,00	379.766.000,00	76.205.400,00	23.056.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
19	PA Ciamis	Saldo eksekusi belum tercatat,	131.269.000,00	8.312.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.644.000,00	8.312.750,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	PA Garut	Terdapat kesalahan input saldo eksekusi sejumlah Rp 6.860.000, uang tak bertuan sejumlah Rp 4.128.500 (sudah disetor ke kas negara tanggal 1 Agustus 2022), serta pembulatan saldo ATK sejumlah Rp 34	122.332.700,00	17.298.334,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	111.344.200,00	17.298.300,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
21	PA Cirebon	Setelah dikoreksi ada penyesuaian saldo awal sebesar 3.353000,-	11.908.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA Indramayu	Selisih 342.436.000 yang telah ditetapkan sebagai uang tidak bertuan dan telah di setor ke kas negara	658.202.800,00	49.962,00	22.005.000,00	0,00	0,00	0,00	315.766.800,00	49.962,00	22.005.000,00	0,00	0,00	0,00
23	PA Kuningan	Terdapat Kesalahan input tertulis 69.003.000 seharusnya 65.668.000	69.003.000,00	16.444.500,00	3.335.000,00	0,00	0,00	0,00	65.668.000,00	16.444.500,00	3.335.000,00	0,00	0,00	0,00
24	PA Bekasi	Berdasarkan penyisiran tim, kelebihan saldo sebesar Rp 173.098.000,-	528.987.800,00	12.000.000,00	33.529.000,00	2.333.771.014,00	0,00	0,00	366.111.800,00	12.000.000,00	33.529.000,00	2.333.771.014,00	0,00	0,00
25	PA Karawang	1.Penambahan uang tunai berdasarkan saldo awal e-keuangan 2.Selisih biaya ATK perkara eksekusi nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Krw sebesar Rp 50.000,00	36.773.600,00	21.512.400,00	16.408.000,00	0,00	0,00	0,00	75.747.750,00	21.562.400,00	16.408.000,00	0,00	0,00	0,00
26	PA Kota Cimahi	Koreksi awal tahun 2022	84.163.000,00	1.415.976,00	11.778.000,00	2.484.945.841,00	0,00	0,00	33.189.000,00	1.415.976,00	11.778.000,00	2.484.945.841,00	0,00	0,00
27	PA Ngamprah	Terdapat selisih sebesar Rp. 595.100,- sebagai	114.073.100,00	3.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.478.000,00	3.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		uang yang tidak diketahui pemiliknya												
28	PA Cibadak	Koreksi Rp. 500,- pada biaya perkara karena kesalahan input/pencatatan pada Komdanas	49.896.500,00	9.173.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	49.896.000,00	9.173.500,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
29	PA Sumber	Kesalahan input saldo	231.453.000,00	5.796.500,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	235.429.000,00	5.896.500,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
30	PA Cibinong	Terdapat selisih sebesar Rp 146.147.000 dikarenkan salah input	628.204.400,00	61.724.500,00	23.318.900,00	26.640.000,00	0,00	0,00	482.057.400,00	61.724.500,00	23.318.900,00	26.640.000,00	0,00	0,00
31	PA Cikarang	Kesalahan Input pada bulan Oktober tahun 2021 dan November	417.594.500,00	10.841.800,00	68.864.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00	230.983.500,00	11.341.800,00	68.474.000,00	9.605.000,00	0,00	0,00
32	PA Kota Tasik	Terdapat selisih Rp. 873.000 disebabkan oleh salah input.	32.928.000,00	2.067.500,00	6.069.000,00	0,00	0,00	0,00	32.055.000,00	2.067.500,00	6.069.000,00	0,00	0,00	0,00
33	PA Pemalang	Selesih di Saldo Awal	196.646.000,00	13.112.109,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00	192.186.000,00	13.112.109,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00
34	PA Demak	Kesalahan dalam penginputan di komdanas	96.085.000,00	68.321.250,00	0,00	56.750.000,00	0,00	0,00	94.675.000,00	68.321.250,00	0,00	56.750.000,00	0,00	0,00
35	PA Purwodadi	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan pada Perkara Eksekusi bulan Agustus Tahun 2021 dengan perkara nomor 1459/Pdt.G/2018/PA.Pwd tidak masuk dalam kolom Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	75.406.000,00	5.994.984,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	75.406.000,00	6.069.984,00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00
36	PA Pati	BERITA ACARA KOREKSI SALDO AWAL	198.288.000,00	43.588.500,00	0,00	34.900.000,00	0,00	0,00	102.020.000,00	43.588.500,00	96.268.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00
37	PA Rembang	- Saldo Awal tahun 2022 sejumlah Rp 42.770.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)bercampur dengan Keuangan	42.770.000,00	10.598.000,00	14.375.000,00	0,00	0,00	0,00	28.395.000,00	10.598.000,00	14.375.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Perkara Eksekusi yakni sejumlah Rp. 14.375.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).sehingga nilai saldo awal yang benar adalah sejumlah Rp. 28.395.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupaih).												
38	PA Magelang	Terdapat selisih pada saldo Eksekusi sebesar Rp. 45.561.000,00 yang di input dua kali yaitu pada menu biaya perkara/panjar biaya perkara dan menu biaya sita jaminan/eksekusi/lelang	69.330.300,00	0,00	45.561.000,00	0,00	0,00	0,00	23.769.300,00	0,00	45.561.000,00	0,00	0,00	0,00
39	PA Wonosobo	Adanya pemisahan saldo di aplikase E Keuangan badilag, di Biaya Perkara dan Biaya Eksekusi yang sebelumnya di gabung di saldo uang biaya perkara	91.791.900,00	14.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.901.900,00	14.632.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00
40	PA Purwokerto	Ada selisish saldo awal pada biaya perkara karena biaya keuangan Perkara dan keuangan eksekusi di masukan dalam satu form keuangan dan selisih sebesar Rp.25.158.000	133.796.500,00	82.276.850,00	24.976.000,00	0,00	0,00	0,00	108.046.500,00	82.276.650,00	25.158.000,00	0,00	0,00	0,00
41	PA Klaten	Ada kesalahan penginputan	66.422.000,00	661.000,00	53.235.000,00	0,00	0,00	0,00	67.442.000,00	1.111.000,00	53.235.000,00	0,00	0,00	0,00
42	PA Boyolali	Salah pemahaman penginputan pada Kolom Biaya Perkara	287.403.100,00	14.366.300,00	128.380.100,00	0,00	0,00	0,00	159.023.000,00	14.366.300,00	128.380.100,00	0,00	0,00	0,00
43	PA Sragen	Ada transaksi pembelanjaan ATK	193.532.800,00	15.892.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.532.800,00	13.213.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		yang belum diinput di komdanas sebesar Rp 2.779.500,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).												
44	PA Karangan yar	Selisih 39.735.000 merupakan keuangan eksekusi yang digabung dengan keuangan perkara	100.379.000,00	9.940.000,00	39.735.000,00	0,00	0,00	0,00	60.644.000,00	9.940.000,00	39.735.000,00	0,00	0,00	0,00
45	PA Surakarta	Koreksi data disesuaikan dengan data pada apliaksi aps badilag	42.265.000,00	4.674.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	40.005.000,00	4.674.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00
46	PA Kajen	Koreksi saldo awal di bulan Januari Tahun 2022 menyesuaikan data dari pencatatan di e-Keuangan Badilag.	36.616.000,00	8.578.500,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	37.301.000,00	8.653.500,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
47	PA Yogyakarta	Telah dilakukan perbaikan pada sipp dan telah di audit kembali serta mengoreksi pada sipp dan aps_badilag (E Keuangan)	41.824.300,00	11.132.800,00	39.376.950,00	9.226.789.884,00	0,00	0,00	47.098.000,00	6.690.250,00	39.311.950,00	9.226.789.884,00	0,00	0,00
48	PA Sleman	Telah dilakukan audit oleh satker	86.943.500,00	13.367.980,00	182.056.000,00	0,00	0,00	0,00	85.804.000,00	13.367.980,00	183.280.000,00	0,00	0,00	0,00
49	PA Bantul	Telah dilakukan audit oleh satker	90.602.000,00	16.235.265,00	47.042.000,00	0,00	0,00	0,00	90.740.000,00	15.604.765,00	46.904.000,00	0,00	0,00	0,00
50	PA Wonosari	Penyesuaian saldo awal pada E-Keuangan Badilag yang dimana Biaya Transaksi Lain-Lain tidak terinput pada BIKP E-Keuangan APS Badilag	45.595.000,00	28.114.285,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	42.096.000,00	28.114.285,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
51	PA Surabaya	KESALAHAN PENGHITUNGAN PADA SALDO AWAL	632.466.200,00	3.081.412,00	125.320.700,00	93.000.000,00	0,00	0,00	817.954.700,00	3.081.412,00	139.622.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
52	PA Sidoarjo	Pembenahan keuangan dengan Aplikasi APS	400.339.100,00	20.922.311,00	157.429.500,00	173.309.000,00	0,00	0,00	406.049.100,00	0,00	157.429.500,00	173.309.000,00	0,00	0,00
53	PA Jombang	Tidak ada selisih SALDO AWAL	0,00	16.185.597,00	8.580.000,00	0,00	0,00	0,00	149.801.000,00	16.185.597,00	8.580.000,00	0,00	0,00	0,00
54	PA Gresik	Pembulatan uang kecil	106.357.223,00	1.256.250,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	106.357.250,00	1.256.250,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00
55	PA Tulungagung	Saldo awal biaya perkara tercampur dengan saldo awal biaya eksekusi	328.364.000,00	1.650.685,00	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00	326.428.000,00	1.650.685,00	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00
56	PA Malang	Rp. 107.972.400 Merupakan saldo lebih yang tidak bertuan	381.492.000,00	18.439.511,00	116.056.000,00	0,00	0,00	0,00	273.519.600,00	18.439.511,00	116.056.000,00	0,00	0,00	0,00
57	PA Kraksaan	Terdapat selisih sebesar RP. 6.341.000 Karena kesalahan input data	146.142.000,00	12.908.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801.000,00	12.908.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PA Kediri	Terdapat Selisih pada Keuanagn Perkara Senilai : 7.006.022 yang disebabkan oleh adanya sisa panjar tak bertuan sebesar Rp 7.006.000.- dan kesulitan memperoleh pecahan Rp 22.- sedangkan pada Keuangan Biaya ATK terdapat selisih lebih Rp. 99,- karena kesulitan memperoleh pecahan Rp. 1 ,-.	48.565.000,00	3.572.401,00	33.264.000,00	0,00	0,00	0,00	41.559.000,00	3.572.500,00	33.264.000,00	0,00	0,00	0,00
59	PA Kab. Malang	Penyesuaian angka berdasarkan pembukuan keuangan perkara	780.079.400,00	43.689.500,00	13.641.000,00	105.750.000,00	0,00	0,00	767.239.400,00	43.689.500,00	2.330.000,00	105.750.000,00	0,00	0,00
60	PA Gunung Sitoli	Perbedaan dalam penetapan saldo BKU	4.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PA Sei Rampah	Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 8 September 2022 menerangkan bahwa	32.210.000,00	23.060.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	32.210.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		telah terjadi kesalahan penginputan biaya Proses/Alat Tulis Kantor (ATK) di aplikasi Komdanas pada tahun 2021 sejumlah Rp.23.060.000,- yang seharusnya saldo akhir biaya Proses/Alat Tulis Kantor (ATK) pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 0 ,- (Nihil).												
62	PA Solok	Saldo keuangan Perkara pada Komdanas sebelumnya digabung dengan saldo biaya keuangan eksekusi sedangkan pada aplikasi e-keuangan dipisah	4.810.000,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1.312.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
63	PA Batusangkar	Karena adanya selisih antara buku induk keuangan manual dengan data yang ada pada SIPP, yang benarnya saldo pada SIPP	8.212.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	PA Padang	Koreksi Saldo Awal yang terdapat pada Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara dan Saldo Awal Biaya Proses/ATK/Pemberkasan serta Saldo Awal Biaya Eksekusi	101.206.722,00	35.362.100,00	51.041.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	78.850.000,00	22.309.650,00	32.703.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00
65	PA Koto Baru	Perbaikan saldo awal tahun 2022, disebabkan ada kesalahan mengimput jumlah penerimaan laporan keuangan perkara di E-Keuangan dengan	10.843.000,00	3.393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833.000,00	3.393.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Komdanas, sehingga terjadi perbedaan saldo akhir Laporan keuangan perkara												
66	PA Lubuk Sikaping	Adanya kelebihan pengembalian sisa panjar pada tahun 2021 sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PA Talu	Salah catat pada BIK	19.505.000,00	0,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	19.505.000,00	0,00	15.285.000,00	0,00	0,00	0,00
68	PA Payakumbuh	Koreksi karena kesalahan penginputan saldo awal pada aplikasi e-keuangan	12.117.185,00	1.250.000,00	25.946.500,00	0,00	0,00	0,00	12.141.500,00	1.250.000,00	25.946.500,00	0,00	0,00	0,00
69	PA Tanjung Pati	Adanya pengembalian sisa panjar ke negara sebanyak Rp13.006.550	8.258.000,00	(3.443.900,00)	38.284.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	36.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00
70	PA Siak Sri Indrapura	Tercampurnya saldo Biaya Eksekusi (LIPA7b) dengan saldo biaya perkara/panjar Biaya Perkara (LIPA7a) sejumlah Rp4.095.000,00 (empat sembilan puluh lima ribu rupiah)	47.703.000,00	2.370.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	43.558.000,00	2.370.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
71	PA Teluk Kuantan	Ada kesalahan pengisian di saldo bank dan tunai akhir tahun 2021	973.600,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PA. Pasir Pangaraya an	Terdapat selisih antara saldo di komdanas dengan saldo di e-keuangan dan sudah dikoreksi.	16.818.203,00	2.148.550,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	20.554.000,00	2.148.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00
73	PA Pangkalan Kerinci		13.528.000,00	(193.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528.000,00	(193.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PA Bangko	Terdapat Pembulatan Rp 10	4.420.000,00	527.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	527.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	PTA Jambi	Tidak terdapat koreksi saldo untuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		saldo awal tahun 2022												
76	PA Pangkalan Balai	Sesuai dengan saldo biaya perkara pada aplikasi pendukung keuangan perkara	16.215.000,00	5.935.500,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	17.240.200,00	5.935.500,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
77	PA Pagaralam	Koreksi Awal Tahun 2022	4.800.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PA Palembang	Integrasi Aplikasi E-Keuangan	179.498.000,00	26.079.275,00	35.542.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	148.272.000,00	0,00	36.436.000,00	0,00	0,00	0,00
79	PA Baturaja	Koreksi saldo awal menjadi 20.274.500, karena ada biaya eksekusi hak tanggungan sebesar 62.185.000 yang sebelumnya tergabung dalam biaya perkara, dan sudah dimasukkan ke biaya sita jaminan/eksekusi	88.723.500,00	42.000,00	6.060.000,00	750.000,00	0,00	0,00	20.274.500,00	42.000,00	68.245.000,00	750.000,00	0,00	0,00
80	PA Lubuk Linggau	Terjadi kekeliruan dalam penginputan data	25.425.000,00	6.600.000,00	7.770.000,00	6.104.000,00	0,00	0,00	25.425.000,00	6.600.000,00	7.770.000,00	6.104.000,00	0,00	0,00
81	PA Sekayu	Tidak ada selisih di saldo awal tahun 2022	46.392.000,00	784.500,00	5.860.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	40.532.000,00	0,00	5.860.000,00	0,00	0,00	0,00
82	PA Sukadana	Biaya proses atau ATK yang tadi nya 0 sudah dirubah menjadi senilaidiatas.	53.220.000,00	3.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.220.000,00	3.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PA Nanga Pinoh	Tidak ada selisih dan koreksi di PA Nanga Pinoh	2.424.000,00	7.563.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	7.563.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PA Ketapang	Saldo Awal Tahun 2022	18.865.000,00	4.128.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865.000,00	4.128.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PA Sanggau	Salah input data biaya eksekusi	9.860.000,00	4.619.400,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860.000,00	4.619.400,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
86	PA Sintang	Koreksi dilaksanakan karena kesalahan input pengeluaran pada saldo akhir 2021	11.087.700,00	68.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.700,00	68.159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PA Nanga Bulik	Berdasarkan hasil rapat koordinasi	1.565.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka saldo keuangan perkara disesuaikan dengan saldo BKU agar tidak terdapat selisih pada saldo awal tahun 2022.												
88	PA Tamiang Layang	Terjadi Kesalahan Input Saldo Awal Tahun	120.000,00	11.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	PA Kuala Kurun	Terjadi kesalahan input nominal saldo awal tahun pada poin biaya proses/atk	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PA Palangkaraya	Uang sisa panjar eksekusi telah dikembalikan ke pemohon eksekusi pada 10 Desember 2021 dan telah dicatat di SIPP	18.443.500,00	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	19.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PA Muara Teweh	Kesalahan infut saldo biaya proses yang seharusnya 0 terinfut 4.500	7.155.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PA Sampit	Berita acara revisi saldo awal biaya perkara bulan januari 2022 yang semula Rp. 2.024.000 menjadi Rp. 40. 477.000,serta revisi salso awal pada biaya proses/ATK pada bulan Januari 2022 yang semula Rp. 416.330.00 menjadi Rp. 14.380.00	2.024.000,00	416.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.477.000,00	416.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PA Pelaihari	Terdapat kekurangan input pengeluaran Biaya Proses/ATK sebesar Rp.35.000,- pada bulan Nopember tahun 2021, dan	7.195.000,00	10.966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195.000,00	6.046.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		sebesar Rp.4.885.000,- pada bulan Desember tahun 2021 sehingga saldo akhir Biaya Proses/ATK pada bulan Desember tahun 2021 tidak sama dengan saldo pada e-keuangan APS Badilag yaitu sebesar Rp.10.966.300,- yang seharusnya adalah sebesar Rp.6.046.300,-												
94	PA Kandangan	Berdasarkan Hasil Laporan Pengelolaan Biaya Proses Bulan Desember 2021	5.043.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.000,00	3.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PA Tenggarong	Koreksi awal tahun 2022	47.343.000,00	1.524.180,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	46.912.000,00	1.524.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
96	PA Samarinda	Saldo awal menyesuaikan aps dikarenakan saldo awal telah di tambahkan dengan saldo awal esekusi	97.415.900,00	6.922.125,00	2.441.000,00	0,00	0,00	0,00	94.974.900,00	6.922.125,00	2.441.000,00	0,00	0,00	0,00
97	PA Tanah Grogot	Saldo Awal 15.992.000	17.996.900,00	50.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	14.682.000,00	50.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
98	PA Tanjung Redep	Koreksi Saldo Awal dan Saldo ATK, Saldo Biaya Eksekusi	33.492.400,00	3.434.550,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	28.542.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PA Nunukan	Terjadi kesalahan input	21.917.000,00	3.145.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	20.582.000,00	3.145.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00
100	PA Boroko	Telah dilakukan Revisi Saldo Awal Biaya Proses/ATK Tahun 2022 dikarenakan terdapat perbedaan antara saldo akhir Biaya Proses / ATK riil yang sejumlah Rp. 0 dengan saldo keuangan komdanas yang masih tercatat sebesar 652.700,-	3.100.000,00	652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
101	PA Jeneponto	Berdasarkan LAPORAN KEUANGAN PERKARA LIPA7 PERIODE 01/01/2022 S/D 31/01/2022 PENGADILAN AGAMA JENEPONTO yang diupdate pada aplikasi SIPP	26.297.000,00	1.200.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	0,00	26.297.000,00	1.200.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	0,00
102	PA Barru	Terjadi salah penginputan pada sub panggilan dan ATK perkara pada bulan November 2021	30.414.000,00	375.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	30.214.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
103	PA Sunggumi nasa	Koreksi saldo awal biaya proses/ATK	54.571.500,00	13.309.150,00	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00	54.571.500,00	4.759.500,00	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00
104	PA Sengkang	Koreksi saldo awal tercantum 56.236.000 seharusnya 55.456.000 dan eksekusi dari 3.885.000 seharusnya 940.000	56.236.000,00	0,00	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00	55.456.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
105	PA Watan Soppeng	Terjadi kesalahan penginputan pada saldo awal	14.927.500,00	3.990.975,00	8.753.000,00	0,00	0,00	0,00	14.927.500,00	0,00	8.753.000,00	0,00	0,00	0,00
106	PA Bantaeng	Adanya perbedaan saldo awal Biaya Proses karena salah inputan pada aplikasi Komdanas	19.970.000,00	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PA Bulukumb a	Salah input data di saldo awal akhir tahun 2021	29.766.000,00	0,00	14.100.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00	29.766.000,00	578.000,00	14.100.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00
108	PA Enrekang	Adanya kelebihan biaya perkara sebesar Rp. 8.960.000 yang tidak dapat dijelaskan dan/atau terdapat uang/barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya	19.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
109	PA Sidenreng	Koreksi saldo awal tahun 2022	41.009.000,00	(22.586.750,00)	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	40.994.000,00	401.850,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00
110	PA Palopo	Sisa saldo ATK tahun 2021 sebesar Rp.350.000	6.006.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PA Kendari	Penyesuaian laporan keuangan dengan yang terbaca pada aplikasi e-keuangan badilag	44.911.500,00	721.650,00	8.525.000,00	0,00	0,00	0,00	36.356.500,00	0,00	8.555.000,00	0,00	0,00	0,00
112	PA Ambon	Hasil Pemeriksaan sesuai dengan aplikasi e keuangan RP, 37.009.950,00.	37.009.950,00	3.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009.950,00	3.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	PA Mataram	Koreksi Perubahan Berdasarkan BA Koreksi Saldo Awal 2022 No W22-A1/1344/HK.05/VIII/2022	57.670.000,00	39.550,00	85.261.000,00	163.322.000,00	0,00	0,00	63.081.000,00	0,00	78.900.000,00	163.322.000,00	0,00	0,00
114	PA Selong	Saldo tahun 2021Saldo tahun 2021Saldo tahun 2021	241.180.000,00	50.725.250,00	19.993.000,00	0,00	0,00	0,00	225.406.000,00	66.300,00	19.993.000,00	0,00	0,00	0,00
115	PA Bima	Koreksi Saldo awal sesuai Aplikasi e-Keuangan Badilag.	138.286.440,00	42.366.645,00	43.419.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	125.695.000,00	42.366.600,00	57.010.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00
116	PA Taliwang	Perubahan saldo awal terjadi dikarenakan dilakukan setting awal BKU di E-keuangan pada bulan Juni 2022 berkaitan dengan validasi di Kinstatker. Pada awalnya uang sejumlah Rp.4.665.000,- terinput sebagai saldo eksekusi, namun setelah dilakukan setting awal saldo tersebut diinput sebagai saldo panjar eksekusi untuk perkara kewarisan	10.196.459,00	1.050.000,00	4.665.000,00	0,00	0,00	0,00	12.157.000,00	0,00	4.665.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		0019/Pdt.G/2017/PA .Tlg												
117	PA Kupang	Pada hari ini Senin tanggal 3 Januari 2022, telah diketahui terjadi kesalahan pembukuan atas saldo awal Tahun 2022 Sejumlah Rp. 10.965.700 (sepuluh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada aplikasi Komdanas, ATK Perkara sejumlah Rp. 2.403.000 dan perkara eksekusi yang di terima pada bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 2.000.000 yang tidak terinput pada aplikasi KOMDANAS pada bulan Januari 2022 (awal tahun 2022) . Dimana seharusnya saldo awal tahun 2022 sejumlah Rp. 3.963.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan ATK perkara pada awal tahun 2022 sejumlah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dan saldo awal perkara eksekusi sejumlah Rp 1.940.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan aplikasi SIPP dan aplikasi APS BADILAG pada awal tahun 2022.	10.965.700,00	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.000,00	100.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumen sumber koreksi saldo awal pada tahun 2022 pada Aplikasi KOMDANAS.												
118	PA Kalabahi	Bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi ditemukan Selisih Panjar Biaya Perkara sebesar Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada Bulan Desember 2021. Hal ini dikarenakan tidak diinputnya biaya lain-lain sebesar Rp. 184.000 tersebut. Mohon untuk diperbaharui	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PA Ende	Perubahan Saldo awal terjadi karena ada transaksi di tahun 2021 yang tidak terinput di sipp dan E keuangan.	28.531.500,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.861.500,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA Manna	Kekurangan biaya perkara dari biaya sumber sebesar Rp. 135.000 kelebihan biaya Eksekusi dari biaya sumber sebesar Rp. 135.000 Kekurangan Biaya Proses sebesar Rp. 75.000	3.317.200,00	883.600,00	10.878.500,00	8.072.000,00	0,00	0,00	3.452.200,00	958.600,00	10.743.500,00	8.072.000,00	0,00	0,00
121	PA Pangkal Pinang	Data biaya proses/ATK/Pemberkasan	7.760.000,00	6.852.500,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.760.000,00	6.852.500,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
122	PA Mentok	Koreksi saldo awal uang proses	21.598.000,00	107.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598.000,00	1.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PA Gorontalo	Terdapat selisih sebesar 266.000	28.454.000,00	1.595.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	0,00	28.720.000,00	1.595.000,00	4.574.000,00	0,00	0,00	0,00
124	PTTUN Medan	Laporan Keuangan Perkara tingkat banding pada bulan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Satker	Catatan	Saldo Awal Asal						Saldo Awal Koreksi					
			Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI	Biaya Perkara	Biaya Proses	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Biaya Pidana	Biaya PHI
		Desember terdapat kesalahan dalam penjumlahan perkara												
125	PTUN Samarinda	Koreksi Saldo Biaya ATK dilakukan karena adanya kesalahan input data oleh Kasir pada periode bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Koreksi terlampir.	38.493.659,00	48.087.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PTUN Bengkulu	Terjadi penuploadan dua kali Biaya Eksekusi	47.946.850,00	4.832.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	47.325.850,00	4.832.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00

F.4.2. Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dan Luar Negeri

F.4.2.1. Penerimaan Hibah Mahkamah Agung RI

Penerimaan hibah Mahkamah Agung RI adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan hibah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan negara yang dapat dimanfaatkan. Penerimaan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan serta mendukung pelayanan peradilan.

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 atau periode Semester II ini mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri yang sudah disahkan sejumlah Rp70.284.339.793,00 ditambah dengan hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp19.068.832.217,00 sehingga jika ditotal, nilai perolehan hibah Semester II tahun 2022 sebesar Rp89.353.172.010,00 (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sepuluh rupiah*).

Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2022

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Sudah Disahkan	168	343	Rp	70.284.339.793,00
Hibah TAYL	35	49	Rp	19.068.832.217,00
TOTAL	**203**	**392**	**Rp**	**89.353.172.010,00**

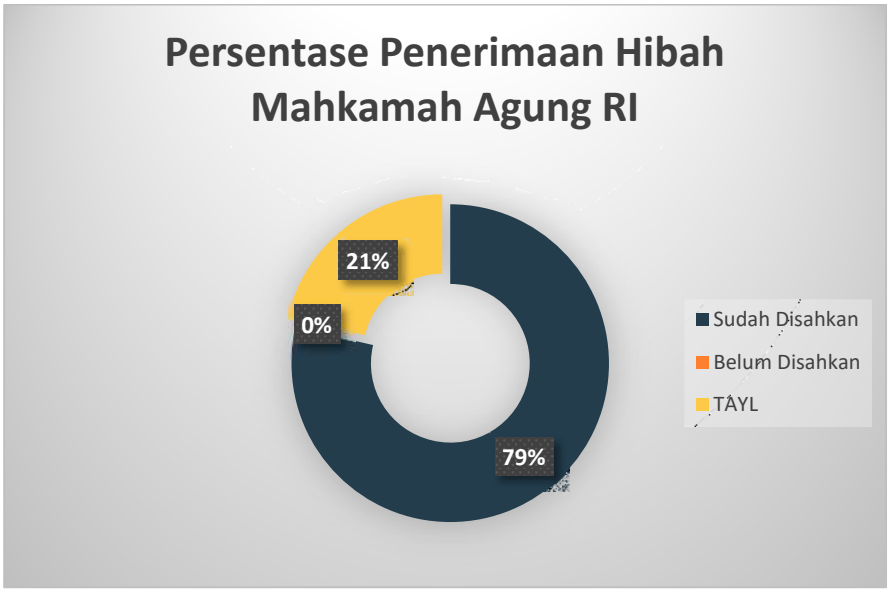

Jika dikelompokan menurut bentuknya, hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat dibagi menjadi hibah barang, hibah uang dan hibah jasa yang terdapat pada 203 satuan kerja dengan 392 dokumen pengesahan hibah yang dapat dijelaskan berikut ini:

Hibah Menurut Bentuknya Semester II Tahun 2022

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Barang	196	378	Rp	76.825.964.568,00
Hibah Uang	6	13	Rp	10.490.540.848
Hibah Jasa	1	1	Rp	2.036.666.594
TOTAL	**203**	**392**	**Rp**	**89.353.172.010,00**

Lebih lanjut jika dikelompokan menurut sumber asal hibahnya, secara umum satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menerima hibah yang bersumber dari dalam negeri baik berasal dari individu atau perseorangan, pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten), lembaga perbankan atau keuangan dan juga organisasi dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

Hibah Menurut Sumber Asal Hibahnya Semester II Tahun 2022

NO	ASAL HIBAH	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH		PERSENTASE (%)
1	Individu / Perseorangan	164	Rp	4.800.831.576,00	5,37%
2	Pemerintah Daerah	96	Rp	55.355.984.106,00	61,95%
3	Organisasi Lainnya	28	Rp	3.409.444.164,00	3,82%
4	Korporasi	7	Rp	110.599.759,00	0,12%
5	Bank BTN	57	Rp	22.314.127.659,00	24,97%
6	Lembaga Perbankan Lainnya	40	Rp	3.362.184.746,00	3,76%
TOTAL		**392**	**Rp**	**89.353.172.010,00**	**100%**

Jika dilihat dari persentase diatas, tahun ini Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya masih menerima hibah yang berasal dari Bank BTN yang sudah memenuhi syarat sahnya hibah sehingga dapat di catatkan sebagai penerimaan hibah masuk Mahkamah Agung dengan nilai perolehan hibah yang cukup besar, yakni 11,62% dari total penerimaan hibah Mahkamah Agung.

Adapun detail satuan kerja yang telah menerima hibah dari Bank BTN, akan tersaji dalam tabel berikut

ini:

Penerimaan Hibah dari Bank BTN Triwulan III Tahun 2022

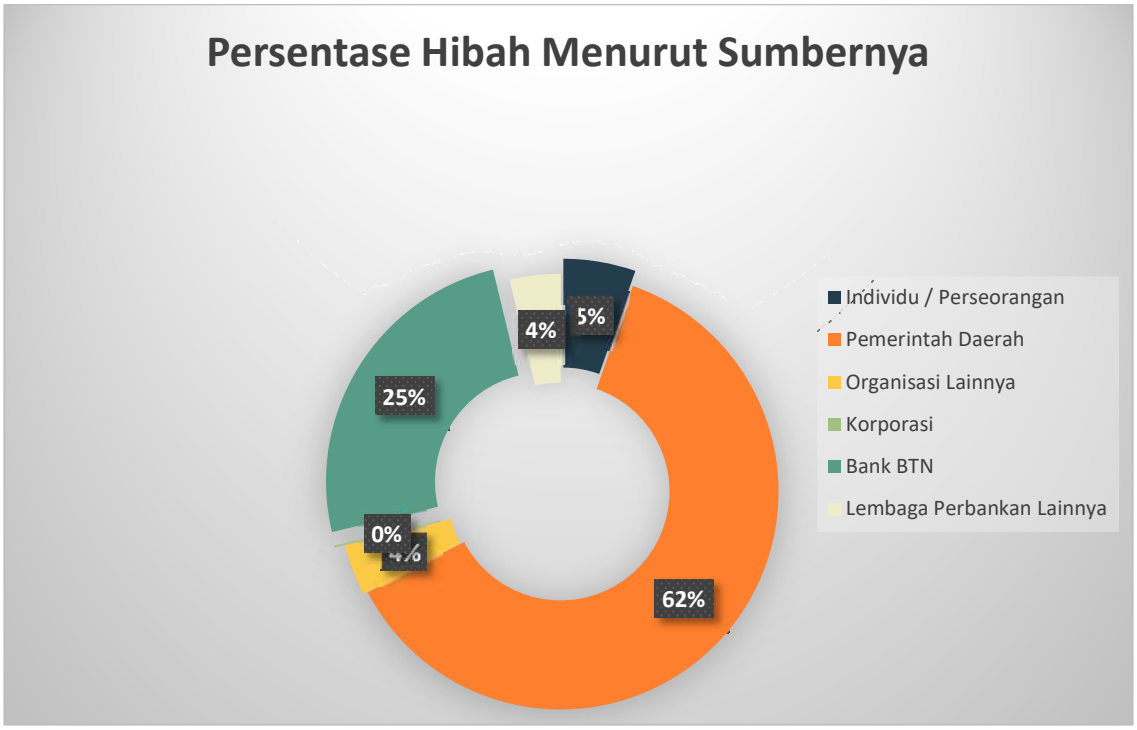

Jika dilihat dari persentase diatas, tahun 2022 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menerima hibah dari Bank BTN yang sudah memenuhi syarat sahnya hibah sehingga dapat di catatkan sebagai penerimaan hibah masuk Mahkamah Agung dengan total nilai perolehan hibah ke dua terbesar setelah hibah dari Pemerintah Daerah, yakni 24,97% dari total persentase penerimaan hibah Mahkamah Agung.

Adapun detail satuan kerja yang telah menerima hibah dari Bank BTN, akan tersaji dalam tabel berikut:

Penerimaan Hibah dari Bank BTN Semester II Tahun 2022

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
1	PN DENPASAR	PERALATAN DAN MESIN	Laptop Fujitsu	Rp 19.690.000	Rp 19.690.000,00	NPH.NO: 001/NPH/BCSU/DPS.II/I/2022 Tanggal : 31 Januari 2022	29SC2YPA
2	PN DENPASAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pos Jaga/Keamanan Lengkap	Rp 64.050.000	Rp 64.050.000,00	NPH.NO: 002/NPH/BCSU/DPS.II/I/2022 Tanggal: 3 Januari 2022	2H7B93JA
3	PN SIDOARJO	PERALATAN DAN MESIN	Lemari + Backdrop Uk. 5,8m	Rp 38.600.000	Rp 150.375.000,00	BAST.NO: 2015/S/SPA.II/BCSU-FUN/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020	29ETE8VA
			Meja Uk. 2m	Rp 4.700.000			
			Backdrop TV Uk. 4m	Rp 15.300.000			
			Lantai Vinyl Uk. 64m	Rp 13.500.000			
			Bongkar Pasang Plafon Uk. 64m	Rp 10.175.000			
			Lampu Plafon + Kabel	Rp 4.750.000			
			Cat Plafon Uk. 64m	Rp 4.750.000			
			Penambahan Kusen 2 Plong + Pintu	Rp 10.000.000			
			Wallapaper Uk. 45m	Rp 3.700.000			
			Partisi Dinding Tinggi 120 x 17 m	Rp 7.800.000			
			Sofa 5 Sit + Meja + Nakas 2 Buah	Rp 10.000.000			
			Gorden	Rp 5.000.000			
			Lampu	Rp 600.000			
		GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembuatan Kamar Mandi Ukuran 120x180	Rp 21.500.000			
4	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	Lenovo AIO A340 i3	Rp 11.200.000	Rp 34.000.000,00	NPH.NO: 53/PKS/PKL.III/FSU/IV/2022 Tanggal: 14 April 2022	2S1TTZEA
			TV TCL P615 Android	Rp 11.150.000			
			Bracket TV Standing	Rp 2.600.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Screen LCD Proyektor Motorized	Rp 3.750.000			
			Bracket LCD Gantung	Rp 500.000			
			Webcam Logitech Brio	Rp 4.800.000			
5	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Tunggu Pengunjung 4 Seat	Rp 45.500.000	Rp 45.500.000,00	BAST.NO: 71/HIBAH/YYK.II/III/2022 & W13-U3/873a/PL.04/3/2022 Tanggal: 28 Maret 2022	21XG95EA
6	PN MAROS	PERALATAN DAN MESIN	UPS 6 KVA	Rp 20.000.000	Rp 167.707.950,00	BAST.NO: W22.U4/2191.a/UM/XII/2021 Tanggal: 20 Desember 2021	21VU4W9A
			PC Komputer	Rp 10.000.000			
			Laptop	Rp 30.000.000			
			Televisi	Rp 13.100.000			
			Batery Charger	Rp 4.000.000			
			Charger Batery	Rp 500.000			
			Smartphone Tablet	Rp 23.750.000			
			Speaker Videotron	Rp 800.000			
			Printer	Rp 7.000.000			
			Printer Scanner	Rp 3.500.000			
			AC Split 0,5 PK	Rp 3.500.000			
			Hard Disk External 1 TB	Rp 800.000			
			Brangkas	Rp 9.000.000			
			Kursi Kerja	Rp 5.000.000			
			Mic Wireless	Rp 3.257.950			
			Box Arsip	Rp 13.500.000			
			Interior Ruangan	Rp 20.000.000			
7	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Backdrop Aula utama Kayu	Rp 28.000.000	Rp 100.000.000,00	BAST.NO: W12.U23/107/PL.04/12/20	2E8R9LAA
			Meja Kursi Kayu Majelis PP, Jaksa	Rp 18.000.000			
			Backdrop Teleconference Kayu	Rp 21.000.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			TV LED 32" Sharp	Rp 3.000.000		21 Tanggal: 8 Desember 2021	
			Komputer PC ASUS	Rp 17.000.000			
			Printer Scanner Folio HP	Rp 5.000.000			
			Speaker Dinding TOA	Rp 8.000.000			
8	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Kayu Tunggu Besi Stainless Steel	Rp 17.800.000	Rp 70.000.000,00	BAST.NO: W12.U23/874/PL.04/8/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2EH6T4YA
			Wastafel Batu Alam	Rp 2.800.000			
			Meja Meeting Finishing HPL	Rp 17.750.000			
			Smart TV Samsung 55"	Rp 8.795.000			
			Smart TV Samsung 50"	Rp 7.775.000			
			Smart TV Samsung 40"	Rp 4.940.000			
			Bracket TV Standing Samsung	Rp 2.000.000			
			Bracket TV Universal Samsung	Rp 300.000			
			Tong Sampah Stainless Kotak	Rp 2.140.000			
			Kursi dan Meja Tamu Kayu Jati	Rp 5.700.000			
9	PN BATANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penutupan Tembok Bagian Depan dan Belakang dengan Triplek	Rp 57.720.000	Rp 62.000.000,00	BAST.NO: 02/PKS/PKL.III/BCSU/I/2022 Tanggal: 13 Januari 2022	2R8NMWKA
			Lemari	Rp 2.000.000			
			Backdrop	Rp 2.280.000			
10	PN BATANG	PERALATAN DAN MESIN	Dispenser, Almari dan Rak Besi	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000,00	NPH.NO: 39/PKS/PKL.III/BCSU/VIII/2020 Tanggal: 18 Agustus 2020	25Y8YJ2A
11	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	Mesin Antrian Sidang	Rp 15.400.000	Rp 179.602.500,00	NPH.NO: W29.U3/324/UK.01.10/II/2022 & 36/BAST/047/II/2022 Tanggal: 2 Februari 2022	251JJG4A
			Lemari Locker	Rp 8.002.500			
			Printer	Rp 34.650.000			
			AC Split 2 PK	Rp 17.600.000			
			AC Split 1 PK	Rp 22.000.000			
			Scanner	Rp 13.200.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Loudspeaker	Rp 30.800.000			
			Kursi Besi/Metal	Rp 5.500.000			
			CCTV	Rp 5.500.000			
			HardDisk 1 Tera	Rp 2.750.000			
			Meja Kerja Kayu	Rp 11.000.000			
			Gordyn	Rp 11.000.000			
			Kabel UTP cat 6	Rp 2.200.000			
12	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	Backdrop PTSP	Rp 165.275.000	Rp 259.025.000,00	BAST.NO: 114/BAST/047/II/2021 & W29.U3/347/UK.01.10/II/2021 Tanggal: 3 Februari 2021	2EKG53HA
			Bangku Panjang Besi Metal	Rp 4.000.000			
			Kursi Besi Metal	Rp 21.000.000			
			Meja Resepsionis	Rp 57.750.000			
			AC Split 2 PK	Rp 11.000.000			
13	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Pembangunan Ruang Pengacara dan Jaksa PN Sumedang	Rp 170.348.000	Rp 170.348.000,00	NPH.NO: 0204/S/BDT/BCSU/I/2022 & W11.U13/221.a/PL.09/01/2022 Tanggal: 21 Januari 2022	2XAZTM9A
14	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Pimpinan PN Sumedang	Rp 157.834.495	Rp 157.834.495,00	NPH.NO: 462/S/BDT/BCSU/III/2022 & W11.U13/526.a/PL.09/3/2022 Tanggal: 4 Maret 2022	2TPQKGRA
15	PN TEMANGGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Layar Tripod 96"	Rp 2.000.000	Rp 8.999.999,00	NPH.NO: 12/PKS/MGL.III/III/2022 & W.12.U27/376/UM.09/3/2022 Tanggal: 24 Maret 2022	2UDN2N1A
			Camera Canon EOS M6 KIT	Rp 6.999.999			
16	PN KISARAN		Sofa Victoria/Milano	Rp 4.600.000	Rp 86.086.000,00		2XTD5Q5A

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
		PERALATAN DAN MESIN	Sofa Grandic	Rp 12.500.000		BAST.NO: W2.U11/2003/BAST/3/2021 Tanggal: 22 Maret 2021	
			Meja Sofa	Rp 1.200.000			
			Kursi Airpot (Duduk 3 Orang)	Rp 1.600.000			
			Kursi Teras Kayu Santai	Rp 1.200.000			
			Rak Buku	Rp 1.600.000			
			Meja+Kursi Tempahan	Rp 4.600.000			
			Lemari Kabinet Buku	Rp 5.200.000			
			Meja Granie Untuk Sofa	Rp 5.200.000			
			Lemari Baju Gantung tempahan	Rp 4.900.000			
			TV LED 70' Sharp	Rp 18.500.000			
			AC Samsung 2 PK	Rp 7.750.000			
			Pembelian Karpet	Rp 3.261.000			
			Pembayaran Wallpaper	Rp 13.975.000			
17	PN KISARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP	Rp 34.963.977	Rp 42.117.500,00	BAST.NO: 02/BA/STR/BCSU/IV/2021 Tanggal: 26 April 2021	2RR3NNEA
		PERALATAN DAN MESIN	TV Sharp 32 Inch	Rp 2.600.000			
			Refurbish Meja PTSP	Rp 846.381			
			Downlight	Rp 1.168.005			
			Lampu Strip	Rp 1.805.612			
			Lampu Sorot	Rp 733.530			
18	PN JANTHOI	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Toyota Haice M/T	Rp 520.561.080	Rp 520.561.080,00	NPH.NO: W1.U18/94A/NPHD/2022 Tanggal: 10 Januari 2022	2G8JCKVA
19	PN KISARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	A. Ruang Lobby		Rp 282.139.990,00	BAST.NO: W2.U11/6422/UM.01.10/12/2021 Tanggal: 01 Desember 2021	261BZGBA
			Pekerjaan Dinding dan Pintu				
			Pemasangan dinding partisi gypsum 2 sisi+cat	Rp 15.848.250			
			Pemasanagan Partisi dan Pintu UPVC	Rp 41.098.750			
			Pemasangan Furniture Dinding	Rp 27.297.600			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Pemasanga Plint	Rp 2.805.000			
			Pemasangan Wallpaper	Rp 2.344.980			
			Pemasangan Akses Card Pintu	Rp 6.270.000			
			Pekerjaan Furtniture Lapis Dinding	Rp 4.950.000			
			Pekerjaan pintu UPVC uk.2,30x0,8m	Rp 5.280.000			
			Bongkar dan Pasang Pintu Alumunium	Rp 2.310.000			
			Bongkar dan Pasang Pintu Akses	Rp 1.430.000			
			Pekerjaan Plafond	Rp -			
			Pemasangan Plafond Gypsum	Rp 20.858.750			
			Pekerjaan Pengecatan	Rp -			
			Pengecatan Plafond Gypsum	Rp 2.931.500			
			Pekerjaan Listrik	Rp -			
			Instalasi lampi+switch	Rp 3.866.500			
			Pemasangan Lampu LED	Rp 3.135.000			
			Pekerjaan Pagar dan Kanopi	Rp -			
			Pemsasangan pagar pembatas	Rp 18.835.575			
			Pemasangan Kanopi Rangka Hollow atap Spandek	Rp 20.571.760			
			B. Ruang Menyusui	Rp -			
			Pekerjaan Dinding dan Meja	Rp -			
			Pemasangan partisi dinding triplek	Rp 6.286.500			
			Pemasangan meja Lapis HPL	Rp 5.335.000			
			Pemasangan Wallpaper	Rp 3.010.645			
			C . Ruang Tunggu Samping	Rp -			
			Pekerjaan Lantai	Rp -			
			Pasangan Keramik lantai Uk.40x40cm	Rp 28.156.700			
			Pekerjaan Lantai	Rp -			
			Pemasangan Kanopi Rangka Hollow atap Spandek	Rp 26.077.480			
			C . Ruang Ketua dan Panitera	Rp -			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Pekerjaan Instalasi Listrik dan Asesoris	Rp -			
			Pemasangan Instalasi Wifi	Rp 1.980.000			
			Pemasangan Instalasi CCTV	Rp 2.530.000			
			Pemasangan AC 1 PK + Asesoris	Rp 12.100.000			
			Pemasangan Kipas Standing	Rp 1.980.000			
			Pengadaan + Pemasangan TV 45"	Rp 14.850.000			
20	PN CILACAP	PERALATAN DAN MESIN	CCTV HIK Vision 8 Channel	Rp 8.500.000	Rp 24.500.000,00	NPH.NO: 12.A/PKS/PWK/FSU/II/2022 & W12.U7/463/PL.07/3/2022 Tanggal: 15 Februari 2022	2U6W5GRA
			AC Split Daikin 2 PK	Rp 7.151.000			
			Laptop HP 14s	Rp 6.499.000			
			Printer Canon G3010	Rp 2.350.000			
21	PN KLUNGKUNG	PERALATAN DAN MESIN	Printer wifi/LAN merk Epson	Rp 47.502.000	Rp 688.976.300,00	BAST.NO: 28/BAST/DPS.II/BCSU/IV/2022 Tanggal: 5 April 2022	23AGR2AA
			Scanner Epson	Rp 81.606.000			
			Samsung Smart TV 55 Inch	Rp 114.999.500			
			Pemasangan CCTV 2 Titik	Rp 6.600.000			
			Laptop ASUS Warna Grey Dan Lillac	Rp 120.277.500			
			Kursi Leather Ichiko back high rest	Rp 8.635.000			
			Kursi Atria High Office Chair	Rp 42.240.000			
			AC Standar 2 PK Merk Daikin	Rp 29.341.620			
			AC Standar 1 PK Merk Daikin	Rp 17.774.680			
			Logitech Camrea PTZ Pro 2	Rp 10.600.000			
			TV LED LG 70 Inch	Rp 19.700.000			
			TOA BS 301 Campak Stalite Speker	Rp 9.200.000			
			Digital Clock Omegastar	Rp 1.500.000			
			Wireless Microsound 1 Rec 4 Mic	Rp 3.750.000			
			Amplifier BMB DA 3000 Pro	Rp 6.000.000			
			Ruang Command Center	Rp 169.250.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
22	PN TANGERANG	JASA	Jasa Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional Dalam Rangka Pelayanan Publik	Rp 2.036.666.594	Rp 2.036.666.594,00	NPH.NO: W29.U4/5435/PL.01.03/VII /2022 & 70/TGR.I/PKS/FSU/VII/202 2 Tanggal: 1 Juli 2022	2YWLVVZA
23	PTA BENGKULU	PERALATAN DAN MESIN	Laptop HP 14s	Rp 9.400.000	Rp 28.500.000,00	NPH.NO: W7-A/2106/PL.04/8/2022 Tanggal: 9 Agustus 2022	2F2UR9EA
			SmarTV Samsung 32 Inch	Rp 6.100.000			
			AC Split Sharp 2 PK	Rp 13.000.000			
24	PN SINGKAWANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Layanan PTSP	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000,00	NPH.NO: W17-U2/348/KU.06/02/2022 & 060/PKS/042/II/2022 Tanggal: 18 Februari 2022	281GMZNA
25	PN MAROS	PERALATAN DAN MESIN	Printer Epson Jurusita	Rp 2.000.000	Rp 177.534.246,00	NPH.NO: 008/BAST/MKS/FSU/V/202 2 & W22.U4/863/UM/V/2022 Tanggal: 20 Mei 2022	23R8V1AA
			Pinter Epson PP	Rp 2.000.000			
			Printer Epson Perdata	Rp 2.000.000			
			Printer Epson Loby	Rp 2.000.000			
			Printer Epson PTIP	Rp 2.000.000			
			Prinler Scan Pidana	Rp 5.500.000			
			Kurs Hakim	Rp 38.918.000			
			Meja Pelan6kan	Rp 4.000.000			
			Meja Tanda Tangan Absen	Rp 3.200.000			
			Meja Buffet HPL	Rp 4.500.000			
			Meja Komputer Anjungan Mandiri	Rp 3.300.000			
			Akses Poin	Rp 8.400.000			
			Hardisk Server	Rp 3.000.000			
			AC Split 2 PK	Rp 25.500.000			
			Running Teks Loby	Rp 15.716.246			
			Video wall	Rp 42.000.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Kursi Tinggi Anjungan Mandri	Rp 4.000.000			
			MIC	Rp 3.500.000			
			Box	Rp 1.800.000			
			Digital TV 43 Inch	Rp 4.200.000			
26	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kegiatan Pejeraan Perbaikan dan Pemeliharaan Instalasi Gedung	Rp 253.530.000	Rp 235.530.000,00	NPH.NO: W11.U13/691.a/PL.09/4/2022 Tanggal 1 April 2022	2SBSWDNA
27	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Digital AD Display Floorstand 49' Touchscreen	Rp 37.242.400	Rp 280.282.420,00	NPH.NO: W11.U13/811.a/PL.09/4/2022 Tanggal 26 April 2022	21258K9A
			Touchscreen Monitor 49"	Rp 25.480.000			
			Controller Box -Software ADS Touchscreen	Rp 8.106.000			
			Vesa (mm) 300x400	Rp 300.000			
			LG Smart TV 50" Non Touchscreen	Rp 72.000.000			
			LG Smart TV 50" Non Touchscreen	Rp 16.048.000			
			Mini PC, i3*4GB SSD 120	Rp 10.120.000			
			Bracket Floorstand (add on roda-custom)	Rp 3.600.000			
			Camera Logitech BCC950	Rp 7.788.000			
			Power Mixer "AUDETPRO" AP-908PM USB, 8 Channel rekam	Rp 17.550.000			
			Sett Speaker Pasif "Auderpro" AP-08KX, 8 Inch KX-Wireless	Rp 5.850.000			
			AUDERPRO' AP-949WMT-4CH (1 set=6mic meja)	Rp 41.216.000			
			Sett Stand Tripod Spk "Renxa" RZ-520ST/Bracket RZ-320WB	Rp 660.000			
			Kabel peaker AUDEERPRO AP-280CS (35 Meter)	Rp 841.800			
			Jasa Pengiriman, Akomodasi, Transport, Setting, Testing, Commisioning, 1st Deploy Content, Training	Rp 8.000.000			
			PPN 10%	Rp 25.480.220			
28	PN SUMEDANG		Smart TV 50", Briket, Cabeling	Rp 13.293.967	Rp 65.187.086,00		21PVS9RA

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
		PERALATAN DAN MESIN	Smart TV 42-43", Briket, Cabeling	Rp 30.039.702		NPH.NO: W11.U13/524.a/PL.09/3/2022 Tanggal 4 Maret 2022	
			Web Cam	Rp 2.417.792			
			Pemasangan, Perbaikan CCTV dan DVR	Rp 19.435.625			
29	PN BANYUWANGI	PERALATAN DAN MESIN	Kipas Angin Maspion	Rp 2.025.000	Rp 22.800.000,00	NPH.NO: 287/PKS/BWI.III/FSU/X/2022 & W14.U16/2410/HM.01/10/2022 Tanggal: 13 Oktober 2022	2FB4VC9A
			AC Standing Daikin 3 PK	Rp 19.000.000			
			Kaca Film 40% + Pemasangan	Rp 1.775.000			
30	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sidang pada Pengadilan Tinggi Bandung	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000,00	NPH.NO: 464/S/BDT/BCSU/III/2022 & W11.U/1526/KU.06/04/2022 Tanggal: 4 Maret 2022	2TG135BA
31	PN TANGERANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional	Rp 6.747.393.420	Rp 6.747.393.420,00	NPH.NO: W29.U4/7107/PL.01.03/VII/2022 & 100/TGR.I/PKS/FSU/VII/2022 Tanggal: 1 Juli 2022	23ZRCWYA
32	PN KAYU AGUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Interior Ruang Ramah Anak dan Ruang Panitera	Rp 114.830.610	Rp 114.830.610,00	NPH.NO: W6-U2/123/OT.01.1/03/2022 Tanggal: 15 Maret 2022	21XVZSDA
33	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Server PC Asus RS520-E9 Intel Xeon	Rp 97.528.000	Rp 144.107.000,00	NPH.NO: 05/PLB.II/PKS/BFSU/XI/2022 & W6.U2/939.a/OT.01.1/11/2022 Tanggal: 15 November 2022	2B68CY7A
			PC Intel Core i5-10500T	Rp 19.209.000			
			Stabilizer Ica Ferro Resonant	Rp 25.600.000			
			Ica Online Sinewave UPS	Rp 1.770.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
34	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Elise Coffe Table Rect White	Rp 2.421.750	Rp 125.083.750,00	NPH.NO: W6-U2/125/OT.01.1/03/2022 Tanggal: 15 Maret 2022	2U9SWKSA
			Langley Sofa 2s Grey	Rp 6.099.000			
			PC Lenovo AIO A340	Rp 11.763.000			
			AC Split Panasonic 0,5 PK	Rp 5.100.000			
			Kulkas Panasonic	Rp 2.100.000			
			Notebook Asus ROG	Rp 44.600.000			
			Notebook HP Pavilion	Rp 32.600.000			
			Mixer Analog Yamaha	Rp 3.800.000			
			Scanner Brother ADS-2400N	Rp 9.900.000			
			Scanner Brother ADS-2200	Rp 6.700.000			
35	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Shield Task Chair Black	Rp 25.441.000	Rp 28.695.000,00	NPH.NO: 05/PLB.II/PKS/BFSU/VI/2022 & W6-U2/401.a/OT.01.1/06/2022 Tanggal: 7 Juni 2022	293XUTJA
			Stacy Stool Roud Light Grey	Rp 1.049.000			
			Stacy Stool Roud Dark Grey	Rp 1.049.000			
			Plan Stand SH9 Black	Rp 1.156.000			
36	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Biaya atas Pekerjaan ME Ruang Pusat Kendali dan Pekerjaan Penataan Interior Ruang Command Centre	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000,00	NPH.NO: 1956/S/BDT/BCSU/XI/2022 & W11.U/6563/KU.06/11/2022 Tanggal: 1 November 2022	2PSAPAVA
37	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Pembangunan Rumah Genset	Rp 40.800.000	Rp 124.717.600,00	NPH.NO: 004/BA/CRB/I/2022 & W11.U14/01/BAST/I/2022 Tanggal: 25 Januari 2022	2616N38A
			Penambahan Daya Listrik	Rp 18.002.600			
			Laptop Asus Vivobook i5 K413	Rp 12.500.000			
			AC Split Panasonic 1 PK	Rp 22.715.000			
			SmartTV Samsung 4K 50 Inch	Rp 7.700.000			
			SmartTV Samsung	Rp 7.800.000			
			Printer Epson L3150	Rp 15.200.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
38	PN TANJUNG PINANG	PERALATAN DAN MESIN	LED Running Text	Rp 13.689.500	Rp 13.689.500,00	NPH.NO:W4.U2/149/KS.01/1/2022 & 003/PKS/148/I/2022 Tanggal: 28 Maret 2022	2AAEM6PA
39	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional	Rp 5.297.828.186	Rp 5.297.828.186,00	NPH.NO: W29.U4/5434/PL.01.03/VII/2022 & 69/TGR.I/PKS/FSU/VII/2022 Tanggal: 1 Juli 2022	2ZQ44BGA
40	PN BATAM	PERALATAN DAN MESIN	Meja Ruang Tamu Terbuka	Rp 9.000.000	Rp 90.000.000,00	NPH.NO: 80/BAST/BTM/IV/2022 & W4.U8/1479/UM.01.10/IV/2022 Tanggal: 5 April 2022	2LCC52MA
			AC Split Ruang PTSP	Rp 11.270.000			
			Meja Teleconference	Rp 5.500.000			
			Kursi Teleconference	Rp 3.690.000			
			Kursi Kerja Pimpinan	Rp 17.640.000			
			Microphone Wireless	Rp 1.900.000			
			Meja Majelis Hakim	Rp 10.200.000			
			Meja Panitera Pengganti	Rp 4.000.000			
			Meja Para Pihak	Rp 10.000.000			
			Kursi Ruang Sidang Kayu Jati	Rp 16.800.000			
41	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Router Wi-Fi	Rp 6.400.000	Rp 6.400.000,00	NPH.NO: 250/BA/CRB/III/2022 & W11.U14/01/PL.07/III/2022 Tanggal: 1 Maret 2022	2DA2NJ2A
42	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	UPS	Rp 7.000.000	Rp 59.000.000,00	NPH.NO: 253/BA/CRB/XI/2022 & W11.U14/03/PL.07/XI/2022 Tanggal: 30 November 2022	29QN823A
			CCTV	Rp 18.000.000			
			SmartTV Samsung 50 Inch	Rp 8.000.000			
			Kursi Direksi	Rp 10.000.000			
			Meja Kerja 1/2 Biro	Rp 8.000.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Kursi Besi Pengunjung	Rp 3.000.000			
			Sice	Rp 5.000.000			
43	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Meja Rapat	Rp 8.580.000	Rp 42.122.000,00	NPH.NO: W11.U7/1730/PL.04/12/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2UMC3WKA
			Kursi Besi / Metal	Rp 4.596.000			
			Kursi Putar Fiber Glass	Rp 3.596.000			
			Bangku Panjang Kayu	Rp 5.850.000			
			AC Split	Rp 11.000.000			
			Mini PC	Rp 8.500.000			
44	PN PURWAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP	Rp 92.756.000	Rp 132.692.000,00	NPH.NO: W11.U7/1732/PL.04/12/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2R5Q8X3A
			Renovasi Ruang Perpustakaan	Rp 39.936.000			
45	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Renovasi Ruang Kerja Pengadilan Negeri Kayu Agung	Rp 593.834.460	Rp 593.834.460,00	NPH.NO: 07/PLB.II/PKS/BFSU/XII/2022 & W6-U2/312.a/OT.01.07/04/2022 Tanggal: 28 April 2022	2J44VDJA
46	PN BALIGE	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Kabinet Buku	Rp 12.250.000	Rp 23.850.000,00	NPH.NO: 01/PKS/STR/BCSU/II/2022 & W2.U18/372/PL.04/2/2022 Tanggal: 22 Februari 2022	2X5XXHLA
			Meja Acrylic	Rp 7.000.000			
			SmartTV LED 43 Inch	Rp 4.600.000			
47	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	PC AIO Asus V222GAK	Rp 8.000.000	Rp 45.000.000,00	NPH.NO: 172/PKS/PKL.III/BFSU/XI/2022 Tanggal: 29 November 2022	2VH6XLPA
			Printer HP Tank 315	Rp 8.000.000			
			SmartTV Samsung 43 Inch	Rp 13.000.000			
			Mini PC Beelink GK35	Rp 6.600.000			
			Dispenser Sanken	Rp 1.900.000			
			Kursi Tamu	Rp 7.500.000			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
48	PN SURAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Speaker Aktif	Rp 18.000.000	Rp 237.994.000,00	NPH.NO: W12-U2/1104/PL.03/12/2022 & 47A/PKS/SLO.II/FSU/XII/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2TGSRWMA
			Mixer	Rp 9.000.000			
			Microphone Wireless	Rp 5.500.000			
			Microphone Clip On	Rp 2.500.000			
			Stand Microphone	Rp 2.000.000			
			Stand Speaker	Rp 2.000.000			
			Meja Kerja	Rp 14.000.000			
			Lemari Berkas	Rp 18.000.000			
			Komputer All In One	Rp 40.000.000			
			Printer	Rp 18.000.000			
			Rak Arsip	Rp 10.000.000			
			Kamera Mirrorless	Rp 15.000.000			
			Kursi Kerja	Rp 6.000.000			
			Meja Oval	Rp 2.500.000			
			Meja Pelayanan PTSP	Rp 19.550.000			
			Meja Credensa	Rp 9.224.000			
			Meja Satpam	Rp 12.905.000			
			Meja Kasir	Rp 3.000.000			
			Lemari Penghargaan	Rp 4.700.000			
			Lemari Difabel	Rp 6.502.500			
			Lemari Buku	Rp 6.912.000			
			Sofa Tamu	Rp 4.400.000			
			Lampu Hias	Rp 8.300.000			
49	PN BALE BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung PTSP	Rp 479.436.473	Rp 479.436.473,00	BAST.NO: 01/BAST/091/BFSU/I/2022 & W11.U6/1091/PL.01/3/2022 Tanggal: 17 Januari 2022	2ABYDBQA

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
50	PN LUMAJANG	PERALATAN DAN MESIN	SmartTV Changhong 58 Inch 4K UHD	Rp 5.874.000	Rp 6.985.000,00	NPH.NO: W14.U14/1368/UM.01/X/2020 & 159/PKS/JMB.III/BCSU/X/2020 Tanggal: 22 Oktober 2020	24971ENA
			Mic Shure Beta 99	Rp 312.000			
			Polytron Pas 22	Rp 799.000			
51	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kursi Council Chair High Back	Rp 61.397.140	Rp 250.000.000,00	NPH.NO: 2387/S/BDT/BFSU/XII/2022 & W11.U13/2708/PL.09/12/2022 Tanggal: 23 Desember 2022	295282RA
			Kursi Council Chair Low Back	Rp 73.086.940			
			Kursi President Dire	Rp 14.086.192			
			Kursi Susun	Rp 9.329.650			
			Meja Staff	Rp 92.100.078			
52	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Atap dan Plafon Ruang Kantor pada PN Sumedang	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000,00	NPH.NO: 2354/S/BDT/BFSU/XII/2022 & W11.U13/2669/PL.09/12/2022 Tanggal: 19 Desember 2022	2UZ351AA
53	PN KARANGANYAR	PERALATAN DAN MESIN	Printer Canon G3010	Rp 6.000.000	Rp 10.500.000,00	NPH.NO: 47/PKS/SLO.II/FSU/XII/2022 & W12.U31/3452/PL.09/12/2022 Tanggal: 1 Desember 2022	2SL1MW3A
			AC Split Sharp 1 PK	Rp 4.500.000			
54	PN TUBAN	PERALATAN DAN MESIN	PC Desktop Core i5/ RAM 4GB	Rp 47.775.000	Rp 258.445.400,00	NPH.NO: 93/GRS.III/PKS/IX/2022 & W14.U29/1697/HM.01.01/I	2V22GQFA
			Laptop Dell Inspiron	Rp 15.185.000			
			Printer Epson L1210	Rp 24.000.000			
			Team SSD M.2 512 GB	Rp 1.524.600			

No	Satker	Aset	Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan	BAST/NPH	Nomor Register
			Scanner Plustek Smart PS3140U	Rp 59.270.400		X/2022 Tanggal: 6 September 2022	
			SmartTV Aquos 32 Inch	Rp 3.467.100			
			AC Split Daikin 2 PK	Rp 6.600.000			
			AC Split FTC 1 PK	Rp 24.543.750			
			Kipas Angin Tornado 3 in 1	Rp 877.800			
			Standing Dispenser Sharp	Rp 3.045.000			
			Brankas Urban Guard	Rp 27.195.000			
			Brankas Truesafes Size 2	Rp 20.700.000			
			Lemari Arsip Besi Filling	Rp 1.655.000			
			Lemari Arsip 4 Door	Rp 1.622.500			
			Meja Makan Kaca Bulat	Rp 4.184.250			
			Kamera Nikon Coolpix P1000	Rp 16.800.000			
55	PN PEKALONGAN	PERALATAN DAN MESIN	Printer Epson L3110	Rp 7.275.000	Rp 10.000.000,00	NPH.NO: 10/PKS/PKL.III/BCSU/II/2022 & W12.U4/215/UM.01.01/1/2022 Tanggal: 4 Februari 2022	2Y1REXDA
			Showcase Sharp	Rp 2.725.000			
56	PN CIBINONG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Epson Workforce DS-410	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000,00	BAST.NO: 039.a/BA/CBN.III/BFSU/II/2022 Tanggal: 10 Februari 2022	22QGNUSA
57	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	PERALATAN DAN MESIN	Proyektor Epson EB-L200X 3LCD XGA	Rp 42.400.000	Rp 191.109.100,00	NPH.NO: 25/PKS/IFD/XI/2022 & 292/BUA.1/OT.01.01/11/2022 Tanggal: 29 November 2022	27Q94EMA
			Apple Macbook Pro 13 Inch M2 8/512	Rp 138.000.000			
			SmartTV Samsung QA55Q60BAKXXD 4K QLED HDR	Rp 10.709.100			
TOTAL PEROLEHAN HIBAH DARI BANK BTN							**Rp 22.314.127.659**

F.4.2.1.1. Hibah Tahun Berjalan Yang Sudah Disahkan

Mahkamah Agung RI menerima hibah langsung dari dalam negeri yang sudah dilakukan pengesahan hibahnya baik yang disahkan pada tahun berjalan maupun yang sudah lewat tahun, dengan bentuk hibah berupa:

A. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Uang

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa uang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp10.490.540.848,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdapat pada 6 satuan kerja dengan 13 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset apa saja yang diterima pada hibah dalam negeri berupa uang:

Hibah Dalam Negeri Berupa Uang dan Aset Yang Telah Dibelanjakan

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
1	PN CIBINONG	PEMKAB. BOGOR	Meubelair Ruang Kantor (Rp.229.235.738)	Pertama	Belanja	Rp 78.840.000	Rp 1.404.540.848,00	NPH.NO: 978.4/054-Bakesbangpol/IX/2022 & W11-U20/4713/Hib.PL.04.05/9/2022 Tanggal: 20 September 2022
			Alat Pengolah Data Persidangan (Rp.275.350.000)	Kedua	Belanja	Rp 261.208.000		
			Perangkat Ruang Sidang Elektronik (Rp.839.995.110)	Ketiga	Belanja	Rp 901.234.500		
			Pengelolaan Operasional Kegiatan (Rp.60.000.000)	Keempat	Belanja	Rp 161.269.355		
				Kelima	Pengembalian	Rp 1.988.993		
2	PN DATARAN HUNIMOA	PEMKAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Barang Konsumsi	Pertama	Belanja	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000,00	NPH.NO: 061/311/NPHD/2022 & W27-U8/206/HM.01.1/04/2022 Tanggal: 25 April 2022
3	PTUN PALEMBANG	PEMPROV. SUMATERA SELATAN	Biaya Penimbunan Tanah 5.000 m2 (Rp.1.759.500.000)	Pertama	Belanja	Rp 1.979.570.607	Rp 2.186.000.000,00	NPH.NO: 060/NPHD/I/2022 & W1-TUN2/1188/PL.02/X/2022 Tanggal: 10 Oktober 2022
			Biaya Perencanaan Konstruksi (Rp.202.520.000)					
			Biaya Pengawasan Kontruksi (Rp.126.960.000)					
			Biaya Pengelolaan Kegiatan (97.020.000)					
				Pertama	Pengembalian	Rp 206.429.393		

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
4	PN KUNINGAN	PEMKAB. KUNINGAN	PC AIO	17	Unit	Rp 255.255.000	Rp 700.000.000,00	NPH.NO: NPHD/900/227-Bakesbangpol/2022 & W11-U16/327/KU.01/02/2022 Tanggal: 17 Februari 2022
			Laptop i5-1135G7 14" 256GB SSD Intel Iris XE	1	Unit	Rp 11.508.025		
			Printer	12	Unit	Rp 48.600.000		
			AC	7	Unit	Rp 63.830.000		
			Scanner	5	Unit	Rp 40.377.500		
			LED TV	9	Unit	Rp 79.110.000		
			Kamera	4	Unit	Rp 52.404.850		
			Bracket	4	Unit	Rp 2.020.000		
			Mixer	2	Paket	Rp 13.000.000		
			Speaker	5	Unit	Rp 19.490.625		
			Microphone	4	Unit	Rp 5.728.000		
			Kursi Kerja	40	Unit	Rp 79.176.000		
			Meja Kerja	3	Unit	Rp 25.000.000		
			Lemari Kayu	2	Unit	Rp 4.500.000		
5	PN SINGKAWANG	PEMKOT. SINGKAWANG	AC Floor Standing 5 PK Changhong	1	Unit	Rp 26.500.000	Rp 150.000.000,00	NPH.NO: 400/156/SETDA.KESRA-C & W17-U2/2109/KU.06/11/2022 Tanggal: 22 November 2022
			AC Split Panasonic 2 PK	2	Unit	Rp 21.000.000		
			Smart TV 55 Inch Changhong	3	Unit	Rp 24.840.000		
			Smart TV 50 Inch Changhong	2	Unit	Rp 12.960.000		
			Kursi Pengunjung Ruang Sidang	8	Unit	Rp 19.600.000		
			Kursi Hadap	16	Unit	Rp 25.600.000		
			Meja Rapat	1	Unit	Rp 19.000.000		
			Honorarium Pejabat PBJ	1	Paket	Rp 500.000		
6	PN CIKARANG			Pertama	Belanja	Rp 4.690.000	Rp 6.000.000.000,00	

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
		PEMKAB. BEKASI	Bantuan Keuangan Pengadaan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang	Sisa	Saldo	Rp 5.995.310.000		NPH.NO: PM.01.02/2913/Bakesbangpol/ 2022 & W11.U23/4206/ KU.01.07/XI/2022 Tanggal: 22 November 2022
JUMLAH TOTAL PEROLEHAN HIBAH UANG								**Rp 10.490.540.848,00**

Terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsun dengan rincian sebagai berikut:

AKUN : 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

NO	KODE	NMSATKER	RPHREAL
1	005.01.097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	300
2	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	19.88.993
TOTAL			**19.89.293**

F.4.2.1.1.1. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 baik penerimaan di tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu (TAYL) sejumlah **Rp76.825.964.568,00** (*tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdapat pada 196 satuan kerja dengan 378 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset apa saja yang diterima pada hibah dalam negeri berupa barang:

Hibah Dalam Negeri Berupa Barang Per Jenis Aset Sudah Disahkan

NO	ASET YANG DITERIMA	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
1	Tanah	26	Rp	20.823.908.359,00
2	Gedung dan Bangunan	74	Rp	35.915.121.408,00
3	Kendaraan Roda 4	8	Rp	3.965.284.630,00
4	Kendaraan Roda 2	1	Rp	118.891.650,00
5	Peralatan dan Mesin	269	Rp	16.002.758.521,00
TOTAL		**378**	**Rp**	**76.825.964.568,00**

F.4.2.1.1.2. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 hanya diterima oleh 1 satuan kerja yakni Pengadilan Negeri Tangerang yang berasal dari Bank BTN berupa Jasa Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional Dalam Rangka Pelayanan Publik senilai **Rp2.036.666.594,00** (*dua milyar tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*).

F.4.2.1.1.3. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) merupakan hibah langsung yang diterima pada tahun 2021 dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang Naskah Perjanjian Hibah atau Berita Acara Serah Terima Hibahnya belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah. Dalam pelaksanaan tata kelola hibah yang baik di Mahkamah Agung, satker harus memastikan semua penerimaan hibah harus tercatat dan terkelola administrasinya secara akuntabel. Jika tidak, akan berpotensi menjadi temuan oleh BPK. Oleh sebab itu, masih terdapat satker yang mengajukan permohonan registrasi atas hibah langsung yang diterima pada TAYL dan belum dicatat pada laporan keuangan.

Pengajuan permohonan nomor register hibah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 dengan dilampiri hasil Reviu APIP Kementerian/Lembaga atas penerimaan

hibah langsung bentuk uang/barang/jasa. Mekanisme review atas penerimaan hibah tahun anggaran yang lalu sepenuhnya ke APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Dari total hibah langsung dalam negeri berupa barang sesuai pada tabel 2.2, di dalamnya terdapat hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar **Rp19.068.832.217,00** (*sembilan belas milyar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah)* pada 35 satuan kerja dengan 49 dokumen pengesahan hibah yang Naskah Perjanjian Hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima Hibahnya tertanggal sudah lewat tahun berjalan. Secara lebih detail dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Hibah Barang Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
1	MS IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	TANAH	Rp652.252.212,00	590/10492/2021 Tanggal: 27 Oktober 2021	2SH4BU5A
2	PTA KENDARI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp21.500.000,00	W21-A/1693.a/PL.01/12/2021 Tanggal: 3 Desember 2021	2U7EXF9A
3	PTA KENDARI	OTHER ORGANIZATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp4.000.000,00	W21.A/1598.a/PL.01/12/2021 Tanggal: 9 November 2021	2KCAJVUA
4	PN SIDOARJO	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN + GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp150.375.000,00	2015/S/SPA.II/BCSU-FUN/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020	29ETE8VA
5	PA SENDAWAR	PEMKAB. KUTAI BARAT	TANAH	Rp3.037.149.000,00	130/1932/HK-TU.P/XI/2021 dan W17-A12/1056.a/PL.02/11/2021 Tanggal: 2 November 2021	22BZ8N6A
6	PN MAROS	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp167.707.950,00	W22.U4/2191.a/UM/XII/2021 Tanggal: 20 Desember 2021	21VU4W9A
7	PN SUMBER	PEMKAB. CIREBON	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp536.400.000,00	978/1062/Bakesbangpol/2021 dan W11.U19/2367/PL.06/VIII/2021 Tanggal: 23 Agustus 2021	2G9DTAZA
8	PN DEMAK	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp100.000.000,00	W12.U23/107/PL.04/12/2021 Tanggal: 8 Desember 2021	2E8R9LAA
9	PN DEMAK	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp70.000.000,00	W12.U23/874/PL.04/8/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2EH6T4YA
10	PN DEMAK	PEMKAB. DEMAK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp524.281.000,00	031/2597Tanggal: 23 Desember 2021	26NJHFCA
11	PN DEMAK	PEMKAB. DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Rp171.882.967,00	028/873.1/2021 Tanggal: 30 Desember 2021	2PLHMHTA
12	PN BATANG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.000.000,00	39/PKS/PKL.III/BCSU/VIII/2020 Tanggal: 18 Agustus 2020	25Y8YJ2A

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
13	PA SELAT PANJANG	PEMKAB. BENGKALIS	TANAH	Rp384.000.000,00	940/NHBMD/2021/03 Tanggal: 13 September 2021	2GUDDWGA
14	PN KAB. KEDIRI	PEMKAB. KEDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp1.709.609.772,00	641/9615/418.32/2020 Tanggal: 30 Desember 2020	2WCLHECA
15	PN RANGKAS BITUNG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp259.025.000,00	114/BAST/047/II/2021 & W29.U3/347/UK.01.10/II/2021 Tanggal: 3 Februari 2021	2EKG53HA
16	PN PASAMAN BARAT	BANK BRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp196.612.000,00	B.1326.KC.III/LYI/07/2021 Tanggal: 16 Juli 2021	2E2SELYA
17	PN SIGLI	PEMKAB. PIDIE	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp399.077.000,00	645/761/NPHD/PRKP/2021 Tanggal: 15 November 2021	2GJX7CWA
18	PN KISARAN	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp86.086.000,00	W2.U11/2003/BAST/3/2021 Tanggal: 22 Maret 2021	2XTD5Q5A
19	PN KISARAN	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN + GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp42.117.500,00	02/BA/STR/BCSU/IV/2021 Tanggal: 26 April 2021	2RR3NNEA
20	PN MENGGALA	BANK MANDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp500.000.000,00	W9.UG/1257/HK.02/VIII/2021 Tanggal: 25 Agustus 2021	2HD4WT2A
21	PA MUARA TEWE	PEMKAB. MURUNG RAYA	TANAH	Rp1.068.000.000,00	027/230/DPRKPP/2021 Tanggal: 5 November 2021	2RVBTMXA
22	PN TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp186.320.000,00	43/BKBP-SET/XI/2021 Tanggal: 2 November 2021	2C3HGTDA
23	PA KUALA KAPUAS	OTHER ORGANIZATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp5.850.000,00	01/Pos.LKBHFasya/01/2021 Tanggal: 14 Januari 2021	2GR89PDA
24	PN KISARAN	BANK BTN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp282.139.990,00	W2.U11/6422/UM.01.10/12/ 2021 Tanggal: 01 Desember 2021	261BZGBA
25	PT MALUKU UTARA	PEMKAB. PULAU MUROTAI	TANAH	Rp678.732.000,00	W28-U/1058/OT.01.1/9/2019 Tanggal: 20 September 2019	2M7V8YJA

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
26	PA REMBANG	PEMKAB. REMBANG	PERALATAN DAN MESIN	Rp87.840.500,00	030/2568/2021 & W11-A18/2236/HM.01.1/XII/2021 Tanggal: 16 Desember 2021	27WHZ6VA
27	PN BREBES	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp7.000.000,00	01/V/2020 Tanggal: 27 Mei 2020	2KUKP49A
28	PA BREBES	PEMKAB. BREBES	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp201.473.000,00	050/43475 & W11-A2/3510/PL.01/X/2020 Tanggal: 12 Oktober 2020	213G76NA
29	PA BREBES	PEMKAB. BREBES	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp126.704.000,00	050/11484 & W11-A2/1284/PL.01/III/2020 Tanggal: 18 Maret 2020	213M8GEA
30	PN SOASIU	PEMKAB. HALMAHERA TIMUR	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp364.436.000,00	035/82/06/2020 & W28-U1/893/PL.01/IX/2020 Tanggal: 19 Juni 2020	2BQ23L9A
31	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp1.034.376.000,00	1059/NPHD/BPKAD/2020 & W6.U10/1151/PL.06/XII/2020 Tanggal: 7 Desember 2020	2V7FM7DA
32	PN MENGGALA	BANK MANDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp810.000.000,00	BSJ.R02.Ar.BDL/ATF.309/2020 Tanggal: 20 Juli 2020	2EUEGHXA
33	PN MAJALENGKA	PEMKAB. MAJALENGKA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp299.378.000,00	978/1716.B/DPUTR Tanggal: 5 November 2021	2CLXD1LA
34	PN BANJAR	BANK BRI	PERALATAN DAN MESIN	Rp80.000.000,00	B.12451.e-LYI/10/2020 & W11.U22/783.a/KU.06/10/2022 Tanggal: 30 September 2020	2PEPANCA
35	MS KOTACANE	PEMKAB. ACEH TENGGARA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp90.895.000,00	600/568.1/NPHD/PUPR-AGR/2021 & W1.A7/858/PL.01/IX/2021 Tanggal: 20 September 2021	25P8D66A
36	PA PALEMBANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp84.200.000,00	W6-A1/1857a/PL.07/VIII/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2KHKL67A

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
37	PN BALIGE	PEMPROV. SUMATERA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Rp78.801.000,00	041/3064/DPA/III/2019 Tanggal: 7 Agustus 2019	2DFM7VGA
38	PN SINGKIL	PEMKOT. SUBULUSSALAM	TANAH	Rp1.893.569.000,00	424/032/2021 & W1.U11/924/PL.02/VII/2021 Tanggal: 28 Juli 2021	25E1WPQA
39	PA SUNGGUMINASA	CORPORATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp9.000.000,00	217/SKU/MGM/XI/2021 Tanggal: 25 November 2021	27H2GSRA
40	PA SUNGGUMINASA	BANK BSI	PERALATAN DAN MESIN	Rp11.000.000,00	01/008/440/XI Tanggal: 25 November 2021	2WBRC3GA
41	PA AMURANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN + TANAH	Rp2.476.737.326,00	W18-A6/528/PL.02/09/2022 Tanggal: 12 September 2019	2FJTF4GA
42	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.400.000,00	W2.U5/578/PL.01.10/IV/2019 Tanggal: 10 April 2019	2ZCX12GA
43	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/445/PL.01.10/III/2020 Tanggal: 16 Maret 2020	2CALLBVA
44	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/583.A/PL.01.10/III/2021 Tanggal: 19 Maret 2021	23LPDNEA
45	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.400.000,00	W2.U5/560/PL.01.10/IV/2020 Tanggal: 7 April 2020	28NL2B1A
46	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/603/PL.01.10/IV/2020 Tanggal: 15 April 2020	2TCK51TA
47	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/296.a/PL.01.10/II/2021 Tanggal: 15 Februari 2021	2EGMQ39A
48	PN LUMAJANG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.985.000,00	W14.U14/1368/UM.01/X/2020 & 159/PKS/JMB.III/BCSU/X/2020 Tanggal: 22 Oktober 2020	24971ENA

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
49	PA TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	TANAH	Rp136.320.000,00	W4-A4/192.a/KU.01.1/II/2018 Tanggal: 7 Februari 2018	2JLDNGCA
TOTAL				**Rp19.068.832.217,00**		

Namun dalam pencatatan dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI, total hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar Rp18.862.402.824,00 (*delapan belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)* terdapat selisih antara total angka pada dokumen pengesahan hibah dengan aplikasi SAKTI senilai Rp206.429.393,00. Hal ini disebabkan karena ada angka debit dari PTUN Palembang yang berasal dari pengesahan pengembalian sisa hibah uang (SP3HL) yang seharusnya diinput pada kas lainnya, namun satker tersebut diberi petunjuk dari HAI DJPB melalui email disarankan mengubah hibah Tahun Anggaran Berjalan (TAB) ke Hibah hibah sudah disahkan TAYL karena satker terkendala dalam melakukan penginputan pada aplikasi SAKTInya agar dapat melakukan proses pembuatan SPM SP4HL hibah, sehingga ketika diinput muncul angka debit pada akun hibah sudah disahkan TAYL yang menyebabkan total angka hibah sudah disahkan TAYL berkurang.

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D 31 DESEMBER 2022

AKUN : 391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	(259.025.000,)
0.0	005.01.097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	(299.378.000,)
0.0	005.01.097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	(7.000.000,)
0.0	005.01.097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	(866.163.967,)
0.0	005.01.097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	(3.000.000,)
0.0	005.01.098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	(150.375.000,)
0.0	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	(6.985.000,)
0.0	005.01.098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	(399.077.000,)
0.0	005.01.098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	(1.893.569.000,)
0.0	005.01.098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	(34.000.000,)
0.0	005.01.098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	(186.320.000,)
0.0	005.01.099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	(167.707.950,)
0.0	005.01.099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	(364.436.000,)
0.0	005.01.307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	(20.000.000,)
0.0	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	(410.343.490,)
0.0	005.01.400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	(536.400.000,)
0.0	005.01.400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	(1.709.609.772,)
0.0	005.01.400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	(328.177.000,)

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	(87.840.500,)
0.0	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	(652.252.212,)
0.0	005.01.401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	(90.895.000,)
0.0	005.01.401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	(3.037.149.000,)
0.0	005.01.401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	(1.034.376.000,)
0.0	005.01.401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	(80.000.000,)
0.0	005.01.402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	(136.320.000,)
0.0	005.01.402132	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	(384.000.000,)
0.0	005.01.402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	(84.200.000,)
0.0	005.01.402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	(1.068.000.000,)
0.0	005.01.402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	(5.850.000,)
0.0	005.01.477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	(196.612.000,)
0.0	005.01.526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	206.429.393,
0.0	005.01.576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	(25.500.000,)
0.0	005.01.663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	(1.310.000.000,)
0.0	005.01.664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	(678.732.000,)
0.0	005.01.672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	(78.801.000,)
0.0	005.01.682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	(2.476.737.326,)
TOTAL			**(18.862.402.824,)**

F.4.2.2. Hibah Tahun Berjalan Yang Belum Disahkan

Dalam proses penatausahaan hibah per tanggal 31 Desember 2022 atau selama periode SAKTI Mahkamah Agung Semester II ini tutup, tidak terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung yang belum melakukan proses pengajuan pengesahan hibah ke KPPN atau baru memulai mengajukan nomor register hibah ke Kanwil DJPB setempat.



LAMPIRAN A1
PENYUSUTAN ASET TETAP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN NILAI PEROLEHAN, BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI, AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI, DAN NILAI BUKU ASET TETAP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
131111	**Tanah**	**8.047.595,00**	**19.986.074.179.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.986.074.179.582,00**
20101	TANAH PERSIL	7.936.066,00	19.820.791.330.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820.791.330.995,00
20102	TANAH NON PERSIL	110.670,00	163.893.541.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.893.541.837,00
20103	LAPANGAN	859,00	1.389.306.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.306.750,00
132111	**Peralatan dan Mesin**	**609.547,00**	**4.462.524.660.536,00**	**(3.031.872.114.535,00)**	**(345.621.115.721,00)**	**0,00**	**(3.377.493.230.256,00)**	**1.085.031.430.280,00**
30101	ALAT BESAR DARAT	17,00	87.713.000,00	(23.000.000,00)	(3.235.650,00)	0,00	(26.235.650,00)	61.477.350,00
30103	ALAT BANTU	1.117,00	135.862.858.933,00	(97.319.170.190,00)	(12.422.552.801,00)	0,00	(109.741.722.991,00)	26.121.135.942,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7.450,00	581.957.761.035,00	(511.192.886.356,00)	(8.640.279.013,00)	0,00	(519.833.165.369,00)	62.124.595.666,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	853,00	2.041.113.828,00	(1.325.211.651,00)	(294.293.235,00)	0,00	(1.619.504.886,00)	421.608.942,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	85,00	10.302.547.121,00	(9.803.806.472,00)	(92.328.964,00)	0,00	(9.896.135.436,00)	406.411.685,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	357,00	842.905.918,00	(755.050.370,00)	(16.793.815,00)	0,00	(771.844.185,00)	71.061.733,00
30303	ALAT UKUR	482,00	2.879.020.142,00	(2.344.912.524,00)	(166.327.893,00)	0,00	(2.511.240.417,00)	367.779.725,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	1.074,00	4.827.150.936,00	(3.829.487.218,00)	(174.545.480,00)	0,00	(4.004.032.698,00)	823.118.238,00
30501	ALAT KANTOR	93.182,00	499.340.117.232,00	(425.303.780.529,00)	(22.058.373.846,00)	0,00	(447.362.154.375,00)	51.977.962.857,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	361.343,00	1.167.977.114.081,00	(894.344.523.434,00)	(58.959.488.311,00)	0,00	(953.304.011.745,00)	214.673.102.336,00
30601	ALAT STUDIO	18.982,00	180.695.950.228,00	(95.068.319.740,00)	(17.231.685.481,00)	0,00	(112.300.005.221,00)	68.395.945.007,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	8.491,00	50.284.428.265,00	(40.575.809.112,00)	(1.356.105.043,00)	0,00	(41.931.914.155,00)	8.352.514.110,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	1.091,00	106.291.679.674,00	(37.112.741.214,00)	(7.768.784.053,00)	0,00	(44.881.525.267,00)	61.410.154.407,00
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	13,00	135.022.941,00	(103.083.819,00)	(8.903.712,00)	0,00	(111.987.531,00)	23.035.410,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	2.487,00	10.998.481.971,00	(7.666.121.618,00)	(631.007.027,00)	0,00	(8.297.128.645,00)	2.701.353.326,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	136,00	1.049.491.236,00	(587.413.322,00)	76.391.116,00	0,00	(511.022.206,00)	538.469.030,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1.869,00	18.951.972.547,00	(5.599.605.988,00)	(1.866.466.485,00)	0,00	(7.466.072.473,00)	11.485.900.074,00
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	20,00	176.934.616,00	(78.922.372,00)	4.850.629,00	0,00	(74.071.743,00)	102.862.873,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	378,00	1.811.467.537,00	(481.862.446,00)	(74.366.451,00)	0,00	(556.228.897,00)	1.255.238.640,00
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	8,00	759.650.700,00	(113.118.750,00)	(65.615.275,00)	0,00	(178.734.025,00)	580.916.675,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	11,00	44.618.878,00	(42.353.122,00)	(1.510.504,00)	0,00	(43.863.626,00)	755.252,00
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	17,00	1.487.052.840,00	(531.628.751,00)	(99.136.858,00)	0,00	(630.765.609,00)	856.287.231,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	21,00	167.349.000,00	(43.511.850,00)	(8.739.200,00)	0,00	(52.251.050,00)	115.097.950,00
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	70,00	7.050.687.779,00	(6.508.705.979,00)	(194.744.913,00)	0,00	(6.703.450.892,00)	347.236.887,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	258,00	2.270.892.730,00	(1.047.691.750,00)	(296.128.363,00)	0,00	(1.343.820.113,00)	927.072.617,00
31001	KOMPUTER UNIT	67.682,00	887.101.556.005,00	(541.858.189.798,00)	(90.149.596.194,00)	0,00	(632.007.785.992,00)	255.093.770.013,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	40.594,00	747.952.408.282,00	(332.556.419.707,00)	(120.335.788.322,00)	0,00	(452.892.208.029,00)	295.060.200.253,00
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	3,00	8.426.920,00	(4.576.920,00)	(1.925.000,00)	0,00	(6.501.920,00)	1.925.000,00
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	11,00	303.380.109,00	(79.158.695,00)	(23.656.991,00)	0,00	(102.815.686,00)	200.564.423,00
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	9,00	56.290.000,00	(5.050.000,00)	(4.847.000,00)	0,00	(9.897.000,00)	46.393.000,00
31301	SUMUR	17,00	384.987.059,00	(252.032.885,00)	(32.072.983,00)	0,00	(284.105.868,00)	100.881.191,00
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	14,00	6.459.000,00	(4.667.088,00)	(398.208,00)	0,00	(5.065.296,00)	1.393.704,00
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18,00	17.655.000,00	(17.655.000,00)	0,00	0,00	(17.655.000,00)	0,00
31501	ALAT DETEKSI	6,00	148.020.000,00	(1.500.000,00)	(14.652.000,00)	0,00	(16.152.000,00)	131.868.000,00
31502	ALAT PELINDUNG	9,00	3.290.450,00	(3.290.450,00)	0,00	0,00	(3.290.450,00)	0,00
31503	ALAT SAR	19,00	1.533.086.350,00	(1.523.614.700,00)	(2.650.413,00)	0,00	(1.526.265.113,00)	6.821.237,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1.073,00	29.120.342.363,00	(7.070.919.685,00)	(2.404.249.628,00)	0,00	(9.475.169.313,00)	19.645.173.050,00
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	45,00	297.828.145,00	(94.564.709,00)	(24.336.388,00)	0,00	(118.901.097,00)	178.927.048,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	54,00	585.008.789,00	(361.703.283,00)	(45.479.529,00)	0,00	(407.182.812,00)	177.825.977,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	21,00	5.659.063.168,00	(5.610.026.046,00)	(4.622.880,00)	0,00	(5.614.648.926,00)	44.414.242,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	160,00	1.052.875.728,00	(626.026.992,00)	(226.669.557,00)	0,00	(852.696.549,00)	200.179.179,00
133111	**Gedung dan Bangunan**	**8.795,00**	**10.461.107.316.949,00**	**(1.521.889.706.225,00)**	**(383.669.171.787,00)**	**0,00**	**(1.905.558.878.012,00)**	**8.555.548.438.937,00**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3.351,00	9.044.466.385.894,00	(1.262.579.233.422,00)	(322.091.392.352,00)	0,00	(1.584.670.625.774,00)	7.459.795.760.120,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4.696,00	1.193.025.967.463,00	(237.737.609.265,00)	(56.515.307.563,00)	0,00	(294.252.916.828,00)	898.773.050.635,00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	2,00	418.676.000,00	(33.939.610,00)	(9.624.736,00)	0,00	(43.564.346,00)	375.111.654,00
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	8,00	2.322.448.084,00	(287.695.026,00)	(71.401.945,00)	0,00	(359.096.971,00)	1.963.351.113,00
40401	TUGU/TANDA BATAS	738,00	220.873.839.508,00	(21.251.228.902,00)	(4.981.445.191,00)	0,00	(26.232.674.093,00)	194.641.165.415,00
134111	**Jalan dan Jembatan**	**139.624,00**	**40.210.658.512,00**	**(14.728.197.277,00)**	**(3.813.451.876,00)**	**0,00**	**(18.541.649.153,00)**	**21.669.009.359,00**
50101	JALAN	139.437,00	36.059.488.412,00	(14.337.191.138,00)	(3.727.875.881,00)	0,00	(18.065.067.019,00)	17.994.421.393,00
50102	JEMBATAN	187,00	4.151.170.100,00	(391.006.139,00)	(85.575.995,00)	0,00	(476.582.134,00)	3.674.587.966,00
134112	**Irigasi**	**277,00**	**23.980.707.438,00**	**(4.480.972.181,00)**	**(1.440.317.003,00)**	**0,00**	**(5.921.289.184,00)**	**18.059.418.254,00**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	23,00	2.095.568.000,00	(214.459.543,00)	(51.324.709,00)	0,00	(265.784.252,00)	1.829.783.748,00
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	3,00	749.697.588,00	(25.366.463,00)	(11.078.691,00)	0,00	(36.445.154,00)	713.252.434,00
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	3,00	54.719.000,00	(13.377.610,00)	(3.330.722,00)	0,00	(16.708.332,00)	38.010.668,00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	15,00	3.949.620.681,00	(1.756.936.618,00)	(680.692.806,00)	0,00	(2.437.629.424,00)	1.511.991.257,00
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	92,00	6.407.606.112,00	(1.136.293.291,00)	(267.540.118,00)	0,00	(1.403.833.409,00)	5.003.772.703,00

50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	100,00	5.744.456.057,00	(778.148.180,00)	(171.018.145,00)	0,00	(949.166.325,00)	4.795.289.732,00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	41,00	4.979.040.000,00	(556.390.476,00)	(255.331.812,00)	0,00	(811.722.288,00)	4.167.317.712,00
134113	**Jaringan**	**1.348,00**	**198.121.492.187,00**	**(85.164.476.772,00)**	**(4.891.456.581,00)**	**0,00**	**(90.055.933.353,00)**	**108.065.558.834,00**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	83,00	13.159.509.383,00	(4.381.936.466,00)	(438.844.785,00)	0,00	(4.820.781.251,00)	8.338.728.132,00
50302	INSTALASI AIR KOTOR	30,00	4.609.393.349,00	(1.407.372.864,00)	(153.646.449,00)	0,00	(1.561.019.313,00)	3.048.374.036,00
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3,00	590.680.659,00	(590.680.659,00)	0,00	0,00	(590.680.659,00)	0,00
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	11,00	377.496.350,00	(111.550.709,00)	(9.431.158,00)	0,00	(120.981.867,00)	256.514.483,00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	139,00	78.753.857.921,00	(19.102.065.450,00)	(1.971.837.830,00)	0,00	(21.073.903.280,00)	57.679.954.641,00
50307	INSTALASI PERTAHANAN	10,00	74.886.000,00	(25.692.298,00)	(2.580.087,00)	0,00	(28.272.385,00)	46.613.615,00
50309	INSTALASI PENGAMAN	26,00	401.902.915,00	(197.316.836,00)	(20.020.146,00)	0,00	(217.336.982,00)	184.565.933,00
50310	INSTALASI LAIN	306,00	43.805.802.474,00	(42.977.240.211,00)	(553.046.394,00)	0,00	(43.530.286.605,00)	275.515.869,00
50401	JARINGAN AIR MINUM	26,00	1.260.921.549,00	(447.956.150,00)	(43.308.013,00)	0,00	(491.264.163,00)	769.657.386,00
50402	JARINGAN LISTRIK	381,00	42.604.476.922,00	(10.459.299.622,00)	(1.009.846.920,00)	0,00	(11.469.146.542,00)	31.135.330.380,00
50403	JARINGAN TELEPON	331,00	8.915.423.665,00	(3.513.455.461,00)	(568.533.430,00)	0,00	(4.081.988.891,00)	4.833.434.774,00
50404	JARINGAN GAS	2,00	3.567.141.000,00	(1.949.910.046,00)	(120.361.369,00)	0,00	(2.070.271.415,00)	1.496.869.585,00
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**5,00**	**3.151.159.400,00**	**(1.046.358.598,00)**	**1.041.591.931,00**	**0,00**	**(4.766.667,00)**	**3.146.392.733,00**
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0,00	0,00	(19.995.000,00)	19.995.000,00	0,00	0,00	0,00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	3,00	541.875.400,00	(1.026.363.598,00)	1.021.596.931,00	0,00	(4.766.667,00)	537.108.733,00
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2,00	2.609.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.284.000,00
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1.076.299,00**	**48.939.236.176,00**	**(532.030.618,00)**	**(32.049.028,00)**	**0,00**	**(564.079.646,00)**	**48.375.156.530,00**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.074.179,00	35.924.970.145,00	(2.683.400,00)	0,00	0,00	(2.683.400,00)	35.922.286.745,00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK	38,00	7.882.158.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882.158.518,00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	723,00	2.236.821.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.821.379,00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	456,00	2.270.360.917,00	(529.347.218,00)	(32.049.028,00)	0,00	(561.396.246,00)	1.708.964.671,00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	381,00	579.160.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.160.267,00
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	522,00	45.764.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.764.950,00
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi**	**75.294,00**	**145.364.364.071,00**	**(144.747.342.209,00)**	**12.453.016.443,00**	**0,00**	**(132.294.325.766,00)**	**13.070.038.305,00**
20101	TANAH PERSIL	840,00	268.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.783.000,00
30101	ALAT BESAR DARAT	1,00	100.000,00	(10.096.244,00)	9.996.244,00	0,00	(100.000,00)	0,00
30103	ALAT BANTU	67,00	2.230.448.480,00	(2.680.075.924,00)	449.627.444,00	0,00	(2.230.448.480,00)	0,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	532,00	11.164.314.505,00	(9.187.676.231,00)	(1.975.566.846,00)	0,00	(11.163.243.077,00)	1.071.428,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	39,00	13.373.200,00	(13.961.200,00)	588.000,00	0,00	(13.373.200,00)	0,00
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2,00	623.405.000,00	(623.405.000,00)	0,00	0,00	(623.405.000,00)	0,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0,00	0,00	(4.906.000,00)	4.906.000,00	0,00	0,00	0,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	21,00	78.984.700,00	(87.535.370,00)	8.550.670,00	0,00	(78.984.700,00)	0,00
30303	ALAT UKUR	25,00	97.267.570,00	(104.374.040,00)	7.106.470,00	0,00	(97.267.570,00)	0,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	76,00	240.070.762,00	(208.495.761,00)	(31.575.001,00)	0,00	(240.070.762,00)	0,00
30501	ALAT KANTOR	9.438,00	16.521.802.209,00	(17.563.091.643,00)	1.064.964.514,00	0,00	(16.498.127.129,00)	23.675.080,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	29.040,00	38.286.243.654,00	(34.093.395.568,00)	(4.122.301.694,00)	0,00	(38.215.697.262,00)	70.546.392,00
30601	ALAT STUDIO	703,00	1.951.380.093,00	(10.886.481.632,00)	8.943.184.981,00	0,00	(1.943.296.651,00)	8.083.442,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	1.021,00	1.931.503.480,00	(2.180.160.969,00)	249.407.189,00	0,00	(1.930.753.780,00)	749.700,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	63,00	1.201.627.609,00	(1.279.771.162,00)	129.369.563,00	0,00	(1.150.401.599,00)	51.226.010,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	96,00	280.274.667,00	(830.702.667,00)	550.428.000,00	0,00	(280.274.667,00)	0,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	26,00	539.853.500,00	(20.791.000,00)	(294.332.500,00)	0,00	(315.123.500,00)	224.730.000,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	48,00	282.378.148,00	(470.196.040,00)	187.817.892,00	0,00	(282.378.148,00)	0,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	26,00	146.107.750,00	(50.107.163,00)	(79.976.088,00)	0,00	(130.083.251,00)	16.024.499,00
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1,00	350.000,00	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)	0,00
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1,00	7.000.000,00	(7.919.333,00)	919.333,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3,00	4.426.001,00	(4.426.001,00)	0,00	0,00	(4.426.001,00)	0,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2,00	44.488.950,00	(11.000.000,00)	(33.488.950,00)	0,00	(44.488.950,00)	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	3.891,00	40.137.812.168,00	(47.170.368.247,00)	7.075.208.038,00	0,00	(40.095.160.209,00)	42.651.959,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	2.844,00	7.012.799.490,00	(7.653.134.703,00)	653.073.463,00	0,00	(7.000.061.240,00)	12.738.250,00
31301	SUMUR	1,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	0,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7,00	99.105.000,00	(56.861.504,00)	(41.466.496,00)	0,00	(98.328.000,00)	777.000,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10,00	37.344.650,00	(43.443.650,00)	6.099.000,00	0,00	(37.344.650,00)	0,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2,00	520.000,00	(500.000,00)	(20.000,00)	0,00	(520.000,00)	0,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	30,00	19.115.924,00	(23.948.875,00)	4.832.951,00	0,00	(19.115.924,00)	0,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	47,00	15.103.961.871,00	(5.546.952.715,00)	(1.930.058.558,00)	0,00	(7.477.011.273,00)	7.626.950.598,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	59,00	5.014.827.910,00	(2.923.342.624,00)	944.537.377,00	0,00	(1.978.805.247,00)	3.036.022.663,00
40401	TUGU/TANDA BATAS	3,00	169.979.000,00	(76.037.685,00)	15.159.891,00	0,00	(60.877.794,00)	109.101.206,00
50101	JALAN	357,00	62.900.000,00	(718.841.500,00)	655.941.500,00	0,00	(62.900.000,00)	0,00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	2,00	22.145.001,00	(9.464.699,00)	(567.635,00)	0,00	(10.032.334,00)	12.112.667,00
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1,00	5.000.000,00	(1.937.500,00)	(125.000,00)	0,00	(2.062.500,00)	2.937.500,00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2,00	57.632.000,00	(20.075.050,00)	(1.440.800,00)	0,00	(21.515.850,00)	36.116.150,00
50310	INSTALASI LAIN	11,00	49.878.600,00	(44.828.600,00)	(5.050.000,00)	0,00	(49.878.600,00)	0,00
50401	JARINGAN AIR MINUM	1,00	144.010,00	(144.010,00)	0,00	0,00	(144.010,00)	0,00
50402	JARINGAN LISTRIK	1,00	64.205.595,00	(20.866.815,00)	(1.605.140,00)	0,00	(22.471.955,00)	41.733.640,00
50403	JARINGAN TELEPON	18,00	119.547.290,00	(90.763.279,00)	8.872.631,00	0,00	(81.890.648,00)	37.656.642,00
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	25.755,00	1.321.579.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.579.440,00
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK	2,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	17,00	119.668.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.668.999,00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	7,00	23.701.805,00	(23.411.805,00)	0,00	0,00	(23.411.805,00)	290.000,00
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	25,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.000,00
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	130,00	2.815.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.040,00
JUMLAH		**9.958.784,00**	**35.369.473.774.851,00**	**(4.804.461.198.415,00)**	**(725.972.953.622,00)**	**0,00**	**(5.530.434.152.037,00)**	**29.839.039.622.814,00**



LAMPIRAN A2
TABEL KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

MAHKAMAH AGUNG RI
DAFTAR SATUAN KERJA YANG TERDAPAT KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Presentasi Pengerjaan	Sub Nilai KDP	Total Nilai KDP	Status KDP			Keterangan
									Dilanjutkan	Dihentikan	Dihentikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	SALDO AWAL						✓			Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W16-	931.800.000	28%	254.127.272					Uang Muka jasa Konsultansi Kontruksi
						51%	207.325.500					Pembayaran Termin II
						75%	207.325.500					PembayaranTtermin III
						90%	138.679.228					PembayaranTtermin IV
						100%	87.422.500					Termin I (Lanjutan dari Termin IV)
			Total					894.880.000,00				
			Pelaksanaan	W16/A7/596/PL.00/VII/2	21.500.925.330	8%	1.075.046.267					Uang Muka
						30%	3.063.881.859					Termin I
						52%	3.063.881.859					Termin II
						73%	3.063.881.859					Termin III
						100%	3.706.447.156					Termin IV
			Total					13.973.139.000,00				
			Pengawasan	W16-	719.546.400	100%	447.452.000					Termin I
			Total					447.452.000,00				
			Pengelola				2.737.600					
					208.131.000	17%	34.710.080					W16-A7/186/PL.00/II/2022
						28%	23.856.400					W16-A7/497/PL.00/III/2022
						51%	47.320.070					W16-A7/530/PL.00/IV/2022
						70%	39.926.937					W16-A7/547/PL.00/VI/2022
						71%	2.990.000					W16-A7/625/PL.00/VII/2022
						79%	15.700.000					W16-A7/710/PL.00/IX/2022
						80%	2.280.000					W16-A7/824/PL.00/X/2022
						95%	32.695.985					W16-A7/658/PL.00/XI/2022
						100%	8.651.528					W16-A7/959/PL.00/XII/2022
								208.131.000,00				
			TOTAL KDP					15.523.602.000,00				
2	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	Saldo awal					-	✓			Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	08/Kontrak/PRC-	918.405.600	#REF!	734.724.480					
							45.920.280					
							75.217.419					
							7.439.085					
			Total					863.301.264				
			Pelaksanaan 2	05/KONTRAK/FISIK-	23.016.762.961	#REF!	2.762.011.556					
							2.762.011.556					
							2.762.011.556					
							2.762.011.556					
							1.553.017.277					
							1.270.650.499					
			Total Pelaksanna					13.871.714.000,00				
			Pengawasan 1	04/PWS-PA.Ksn/VI/2022	962.469.900	60%	433.111.455					
							92.397.110					
							51.973.375					
			Total					577.481.940,00				
			Pengelola	Pengelola Kegiatan	239.802.000	100%	3.715.875					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							3.715.875					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.208.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.239.518					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.035.240					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.254.518					Pembangunan Gedung Satker Baru/

							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							300.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							550.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.911.295					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.488.715					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							550.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							550.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							1.200.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							900.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							11.253.546					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							11.738.460					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							11.838.224					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.072.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							9.864.714					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							9.560.145					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							8.364.902					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.939.169					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.819.208					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.013.720					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker Baru /
							550.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							550.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							2.120.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							2.120.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							2.120.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							2.120.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							2.120.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.951.641					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							550.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							7.152.722					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							990.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							990.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							900.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							700.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							4.954.199					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.045.280					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.306.567					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.510.074					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							5.708.463					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.047.762					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							2.765.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							350.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							550.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							2.700.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							1.659.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							1.659.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							350.000					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.246.267					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.607.441					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.534.089					Pembangunan Gedung Satker Baru/
							6.496.098					Pembangunan Gedung Satker Baru/
			Total Pengelola					239.706.727,00				
			TOTAL KDP					15.552.203.931,00				

3	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	SALDO AWAL					27.508.714.594	✓			Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	No.W23-	28.123.696	100%	Rp 28.123.696					
			Total					28.123.696,00				
			Pelaksanaan	No.W23-	6.363.217.400	100%	1.431.723.915					
							1.431.723.915					
							1.908.965.220					
							1.590.804.350					
			Total					6.363.217.400,00				
			Pengawasan	No.W23-	187.408.600	100%	93.704.300					
							84.333.870					
							9.370.430					
			Total					187.408.600,00				
			Pengelola		78.330.000	100%	18.278.840					
							2.647.000					
							11.890.000					
							17.970.779					
							11.628.098					
							3.099.800					
							1.599.800					
							1.599.801					
							2.534.200					
							7.000.000					
			Total Pengelola					78.248.318,00				
			TOTAL KDP					34.165.712.608,00				
4	401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	SALDO AWAL						✓			Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W30-	871.881.554	100%	392.960.700					Termin 1
							392.960.700					Termin 2
							49.120.088					Termin 3
							36.840.066					Termin 4
			Total					871.881.554,00				
			Pelaksanaan	W30-	12.993.282.737	100%	8.293.584.726					Pembayaran Uang Muka
							4.699.698.011					Termin 1
			Total					12.993.282.737,00				
			Pengawasan	W30-	252.500.025	100%	151.500.015					Pembayaran Uang Muka
							25.250.003					Termin 1
							25.250.002					Termin 2
							25.250.003					Termin 3
							25.250.002					Termin 4
			Total					252.500.025,00				
			Pengelola		304.003.000	97%	294.897.124					
			Total Pengelola					294.897.124,00				
			TOTAL KDP					14.412.561.440,00				
5	099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	SALDO AWAL						✓			Renovasi Gedung Kantor Lanjut TA
			Perencanaan	W22.U1/17/PPK/PL.01/6	724.625.000	100%	72.462.500					Termin 1 Perencanaan
							144.925.000					Termin 2 Perencanaan
							181.156.250					Termin 3 Perencanaan
							181.156.250					Termin 4 Perencanaan
							36.231.250					Termin 5 Perencanaan
							108.693.750					Termin 6 Perencanaan
			Total					724.625.000,00				
			Pelaksanaan	W22.U1/103/PPK/PL.01/	8.866.500.000	100%	2.191.625.000					Termin 1 Pelaksanaan
							3.944.925.000					Termin 2 Pelaksanaan
							2.511.554.000					Termin 3 Pelaksanaan
							218.396.000					Bank Garansi Pelaksanaan
			Total					8.866.500.000,00				
			Pengawasan	W22.U1/102/PPK/PL.01/	422.500.000	100%	359.125.000					Pengawasan
							63.375.000					Bank Garansi Pengawasan

			Total					422.500.000,00					
			Pengelola		123.217.529,00	100%	3.060.000						Bayar honorarium kelompok kerja
							5.254.800						Melakukan konsultasi dan asistensi
							9.134.630						Melakukan konsultasi dan asistensi
							9.134.630						Melakukan konsultasi dan asistensi
							9.134.630						Melakukan konsultasi dan asistensi
							5.340.000						Bayar honorarium kelompok kerja
							2.550.000						Bayar honorarium kelompok kerja
							7.643.700						Melakukan koordinasi lanjutan ke Biro
							5.499.400						Memenuhi undangan permintaan
							2.587.300						Memenuhi undangan permintaan
							5.665.813						Memenuhi undangan permintaan
							5.092.313						Memenuhi undangan permintaan
							4.681.813						Memenuhi undangan permintaan
							578.500						Beli atk untuk keperluan pekerjaan
							23.680.000						Bayar honorarium pengelola teknis,
							19.980.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
							900.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
							1.500.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
							1.500.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
							300.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
			Total Pengelola					123.217.529,00					
			Jumlah					10.136.842.529,00					
			KOREKSI NILAI					218.396.000,00					terdapat selisih dari nilai realisasi dan
			TOTAL KDP					9.918.446.529,					
6	401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	SALDO AWAL					23.391.099.652	✓				
			Perencanaan	W26-	59.996.000	100%	59.996.000						Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Total					59.996.000					
			Pelaksanaan	W26-	1.439.172.746	100%	1.439.172.746						
			Total					1.439.172.746					
			Pengawasan	W26-	89.523.000	100%	89.523.000						
			Total					89.523.000					
			Pengelola				49.956.200						
			Total Pengelolaan					49.956.200					
			TOTAL KDP					25.029.747.598,00					
7	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	SALDO AWAL					26.465.416.633	✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanan	W16-	28.115.052	100%	28.115.052						
			Total					28.115.052					
			Pelaksanaan	W16-	6.080.635.500	100%	6.080.635.500						
			Total					6.080.635.500					
			Pengawasan	W16-	184.081.845	100%	184.081.845						
			Total					184.081.845					
			Pengelola		53.855.807	100%	53.855.807						
			Total Pengelola					53.855.807					
			Perencanan	W16-	8.940.000	100%	8.940.000						
			Total					8.940.000					
			Pelaksanaan	W16-	180.300.000	100%	180.300.000						
			Total					180.300.000					
			Pengawasan	W16-	6.999.640	100%	6.999.640						
			Total					6.999.640					
			Pengelola		1.440.000	100%	1.440.000						
			Total Pengelola					1.440.000					
			TOTAL KDP					33.009.784.477					
8	401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	SALDO AWAL						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanan	W23-U8/10/PERC.FNSH-	29.754.000	100%	29.754.000						
			Total					29.754.000					
			Pelaksanaan	W23-U8/08/KONST.FG-	1.001.834.000	100%	1.001.834.000						

			Total					1.001.834.000					
			Pengawasan	W23-U8/14/PWS-	59.584.800	100%	59.584.800						
			Total					59.584.800					
			Pengelola		37.722.034	100%	37.722.034						
			Total Pengelola					37.722.034					
			Perencanan	W23-	99.895.000	100%	99.895.000						
			Total					99.895.000					
			Pelaksanaan	W23-U8/08/	3.741.617.000	100%	3.741.617.000						
			Total					3.741.617.000					
			Pengawasan	W23-U8/14/PWS-	89.688.000	100%	89.688.000						
			Total					89.688.000					
			Pengelola		39.731.602	100%	39.731.602						
			Jumlah					5.060.094.834,00					
			KOREKSI NILAI					1.210.360.338,					Selisih di karenakan untuk
			TOTAL KDP					3.849.734.496,					
9	099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	SALDO AWAL						✓				Pembangunan Gedung Pasca
			Perencanaan	W22.U12/737/PPK/IV/20	919.820.000	100%	919.820.000						
			Total					919.820.000					
			Pelaksanaan	W22-	8.365.590.000	61%	8.365.590.000						
			Total					5.097.990.546					
			Pengawasan	W22-	358.457.000	90%	358.457.000						
			Total					322.611.300					
			Pengelola		152.696.000	100%	152.696.000						
			Total Pengelola					152.695.084					
			Jumlah					6.493.116.930					
			KOREKSI NILAI					3.236.000					Selisih pencatatan Pengembalian
			TOTAL KDP					6.489.880.930,					
10	578850	PTUN PALU	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Pasca
			Perencanaan	W4-	1.851.725.000	100%	1.851.725.000						
			Total					1.851.725.000					
			Pelaksanaan	W4-	5.593.893.000	100%	5.593.893.000						
			Total					5.593.893.000					
			Pengawasan	W4-	204.969.825	100%	204.969.825						
			Total					204.969.825					
			Pengelola		224.007.000	100%	212.837.550						
			Total Pengelola					224.007.000					
			Pengurusan				99.700.000	99.700.000					
			TOTAL KDP					7.974.294.825					
11	401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W14-	24.878.430.000	20%	2.985.411.600						Uang Muka Kerja
							6.965.960.400						Pembayaran termin ke-1
							4.975.686.000						Pembayaran termin ke-2
			Total					14.927.058.000					
			Pelaksanaan	W14-	868.533.325	80%	616.658.661						Pembayaran termin ke-1
							38.541.166						Pembayaran termin ke-2 (tahap
							115.623.499						Pembayaran termin ke-3 (tahap
			Total					770.823.326					
			Pengawasan	W16-	649.531.074	20%	116.915.593						Uang Muka Kerja
							142.896.836						Pembayaran termin ke-1
							129.906.214						Pembayaran termin ke-2
			Total					389.718.643					
			Pengelola				6.560.000						Honor Pokja dan Perjadin dalam
							36.945.891						Perjadin dan konsumsi rapat dalam
							11.545.800						Perjadin dalam rangka pembangunan
							18.431.000						Perjadin dalam rangka pembangunan
							12.283.983						Perjadin, konsumsi rapat dan cetak
							13.259.000						Perjadin, konsumsi rapat, sewa
							4.345.000						Perjadin, konsumsi rapat dalam

							6.180.000						Perjadin dalam rangka pembangunan
							35.124.412						Honor Pokja dan Perjadin dalam
							32.588.064						Perjadin dalam rangka pembangunan
			Total Pengelola					177.263.150					
			TOTAL					16.264.863.119					
12	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W21-A8/127/PKP/ADD-	998.091.600	93%	930.720.417						
			Pelaksanaan	W21-A8/125.A/PKK/ADD-	23.280.000.000	55%	12.799.620.000						
			Pengawasan	W21-A8/128/PKP/ADD-	993.948.000	55%	546.671.400						
			Pengelola		214.783.971	100%	214.783.971						
			TOTAL					14.491.795.788					
13	099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Pasca
			Perencanaan	W15.U8/586/PL.01/07/202	980.005.400	100%	784.004.320						
							49.000.270						
							147.000.810						
			Total					980.005.400,00					
			Pelaksanaan	W15.U8/1526/PL.01/08/20	6.393.506.381	100%	1.278.701.276						
				W15.U8/2062/PL.01/11/20	6.492.500.000		2.606.899.362						
							2.282.274.362						
							324.625.000						
			Total					6.492.500.000					
			Pengawasan	W15.U8/1535/PL.01/08/20	209.000.000	100%	104.500.000						
							104.500.000						
			Total					209.000.000,00					
			Pengelola				85.516.000						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							11.547.500						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							16.518.700						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							39.055.050						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							9.188.000						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							8.080.000						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							11.300.000						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							1.915.000						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							7.400.000						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
							4.810.000						Honor POKJA / Pengelola Kegiatan
			Total Pengelola					195.330.250,00					
			TOTAL					7.876.835.650					
14	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W16-	49.900.000	100%	49.900.000						
			Pelaksanaan	W16-	3.153.900.000	100%	3.187.900.000						
			Pengawasan	W16-	99.000.000	100%	99.000.000						
			Pengelola		37.497.200	100%	37.497.200						
			TOTAL					3.374.297.200					
15	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	Saldo awal						✓				
			Perencanaan	W18-	767.456.465	100%	613.965.172						
				W18-			38.372.823						
							115.118.470						
			Total					767.456.465					
			Pelaksanaan	W18-	8.738.690.300	100%	2.621.607.090						Renovasi dan Perluasan Gedung
							2.140.979.124						
							2.140.979.124						
							1.398.190.448						
							436.934.514						
			Total					8.738.690.300					
			Pengawasan	W18-	370.051.562	100%	74.010.312						
							129.518.047						

							129.518.047						
							37.005.156						
			Total					370.051.562					
			Pengelola				42.000.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							25.000.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							3.900.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							3.660.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							82.175.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							750.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							11.440.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							5.600.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
							5.600.000						Pembayaran Administrasi Renovasi
			Total Pengelola					180.125.000					
			TOTAL					10.056.323.327					
16	401868	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W21-	553.371.500	80%	442.042.268						
			Pelaksanaan	W21-	16.046.768.493	29%	4.630.291.535						
			Pengawasan	W21-	399.083.850	32%	127.972.350						
			Pengelola			100%	186.142.262						
			TOTAL					5.386.448.415					
17	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W18-	98.235.000	100%	98.235.000						
			Pelaksanaan	W18-	4.750.738.282	100%	4.750.738.282						
			Pengawasan	W18-	89.177.300	100%	89.177.300						
			Pengelola		48.701.732	100%	48.701.732						
			TOTAL					4.986.852.314					
18	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	22/PPK-	99.924.000	100%	99.924.000						
			Pelaksanaan	29/PPK-	2.610.177.000	100%	2.610.177.000						
			Pengawasan	28/PPK-	89.797.000	100%	89.797.000						
			Pengelola	xxxxxx	194.936.000	100%	194.936.000						
			TOTAL					2.994.834.000					
19	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	Saldo awal					17.936.727.725	✓				seharusnya telah definitif pada tahun anggaran 2022. tetapi baru didefinitifkan pada aplikasi sakti tahun anggaran 2023
			Perencanaan	W16-	498.000.000	100%	498.000.000						
			Pelaksanaan	W16-	12.900.000.000	100%	12.900.000.000						
			Pengawasan	W16-	297.901.800	100%	297.901.800						
			Pengelola	xxxxxx	94.470.399	100%	94.470.399						
			TOTAL					31.727.099.924					
20	400534	PENGADILAN TINGGI PALU	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	W21-	1.978.265.000	88%	1.738.265.000						
			Pelaksanaan	W21-	10.480.000.000	100%	10.480.000.000						
			Pengawasan	W21-	1.399.809.000	20%	279.703.000						
			Penyusunana	W21-	99.700.000	100%	99.700.000						
			Penyusunana	W21-	98.397.000	100%	98.397.000						
			Pengelola	xxxxxx	143.764.154	100%	143.764.154						
			TOTAL					12.839.829.154					
21	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Saldo awal						✓				Pembangunan Gedung Kantor Baru
			Perencanaan	02/SP-PRC/PPK/03/2022	994.830.000	89%	882.913.000						
			Pelaksanaan	04/SP.ONS/PPK/10/2022	7.239.000.000	100%	7.239.000.000						
			Pengawasan	03B/SP.PWS/PPK/10/2022	230.590.000	100%	230.590.000						
			Pengelola		312.944.000	86%	267.979.698						
			TOTAL					8.620.482.698					
22	401785	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	Saldo awal						✓				

			Perencanaan	W16-	925.360.400	60%	740.288.320					Pembayaran Termin ke - 1
				W16-			46.268.020					Pembayaran Termin ke - 2
				W16-			83.282.436					Pembayaran Pembangunan Gedung
			Total					869.838.776,00				
			Pelaksanaan	W16-	24.440.000.700	60%	2.932.800.084					Uang Muka Kerja
				W16-			2.932.800.084					Pembayaran Termin ke - 2
				W16-	14.664.000.420		2.932.800.084					Pembayaran Termin ke - 3
				W16-			2.932.800.084					Pembayaran Termin ke - 1
				W16-			2.932.800.084					Pembayaran Pembangunan Gedung
			Total					14.664.000.420,00				
			Pengawasan	W16-	774.025.200		116.103.780					Pembayaran Termin ke - 1
				W16-	774.025.200		232.207.560					Pembayaran Termin ke - 2
				W16-	774.025.200		116.103.780					Pembayaran Termin ke - 3
			Total					464.415.120,00				
			Pengelola		226.099.000		9.897.796					Perjadin Pembangunan Gedung
							9.662.447					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.534.741					Perjadin Pembangunan Gedung
							8.611.055					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.315.500					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.114.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							1.650.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.200.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							5.525.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.517.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.447.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.557.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							12.524.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							11.933.977					Perjadin Pembangunan Gedung
							5.861.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.499.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							12.868.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.087.197					Perjadin Pembangunan Gedung
							5.873.697					Perjadin Pembangunan Gedung
							5.939.697					Perjadin Pembangunan Gedung
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker
							1.020.000					Pembangunan Gedung Satker
							6.230.500					Perjadin Pembangunan Gedung
							5.869.400					Perjadin Pembangunan Gedung
							6.573.400					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.434.100					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.082.900					Perjadin Pembangunan Gedung
							4.834.500					Perjadin Pembangunan Gedung
							1.100.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.140.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.140.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.140.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.140.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.140.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.900.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.900.000					Perjadin Pembangunan Gedung
							3.850.000					Perjadin Pembangunan Gedung
			Total Pengelola					205.192.907,00				
			TOTAL					16.203.447.223				
23	401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	Saldo awal						✓			
			Perencanaan	W28-	1.235.432.000	88.87 %	296.503.680					Termin 1
							691.841.920					Termin 2

							61.715.400						Termin 3
			Total					1.050.061.000					
			Pelaksanaan	W28-	21.232.590.000	100%	7.878.739.768						Termin 1
							6.676.925.132						Termin 2
							5.615.295.600						Termin 3
							1.061.629.500						Termin 4
			Total					21.232.590.000					
			Pengawasan	W28-	1.243.477.000	100%	398.400.000						Termin 1
							265.600.000						Termin 2
			Total					664.000.000					
			Pengelola		325.000.000	83.43 %	14.970.311						
							14.532.500						
							14.597.825						
							14.935.900						
							14.957.418						
							14.975.879						
							13.063.200						
							13.548.000						
							14.874.600						
							14.587.566						
							15.000.000						
							15.000.000						
							14.758.000						
							14.580.000						
							15.000.000						
							14.910.000						
							14.919.800						
							14.571.750						
							7.372.250						
			Total Pengelola					271.154.999					
			TOTAL					23.217.805.999					
24	097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	RENOVASI ATAP	W11.U3/1215/SPK.FISIK.P	545.500.000		146.937.000		✓				Pembayaran Belanja Modal sesuai SPK
							27.275.000						Pembayaran Blanja Modal sesuai
							371.288.000						Pembayaran Belanja modal sesuai
			Total Renovasi					545.500.000					
			PERENCANA		55.500.000		55.500.000						Pertanggung jawaban tambahan Uang
			Total					55.500.000					
			Pengawasan	W11.U3/9/SPK.PWS-PN-	48.700.000		48.700.000						Pembayaran Belanja Modal
			Total					48.700.000					
			Administrasi		36.081.500		14.221.500						Pertanggung jawaban Tambahan Uang
							21.860.000						Pertanggung jawaban Tambahan Uang
			Total Administrasi					36.081.500					
			TOTAL					685.781.500					
25	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Administrasi		4.690.000		4.690.000		✓				
			Total Administrasi					4.690.000					
			TOTAL					4.690.000					
26	097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	Rumah Dinas Ketua	W12.U12/14/PL.01/6/2022	546.957.400		346.957.400		✓				Pembayaran Belanja Modal berupa UM
							200.000.000						Pembayaran Belanja Modal Termin-1
			Total Rumah					546.957.400					
			Rumah Dinas	W12.U12/14/PL.01/6/2022	426.957.400		146.957.400						Pembayaran Belanja Modal Termin-1
							280.000.000						Pembayaran Belanja Modal Termin-2
			Total Rumah					426.957.400					
			Rumah Dinas	W12.U12/14/PL.01/6/2022	563.914.800		66.957.400						Pembayaran Belanja Modal Termin-2
							346.957.400						Pembayaran Belanja Modal Termin-3
							150.000.000						Pbyrn blj Mdl T-4 renov RumDin PN
			Total Rumah Dinas					563.914.800					
			Rumah Dinas	W12.U12/14/PL.01/6/2022	299.699.000		207.822.570						Pbyrn blj Mdl T-4 renov RumDin PN
							91.876.430						Pembayaran belanja modal T-5 SPK

			Total Rumah Dinas					299.699.000					
			Perencanaan	W12.U12/6/PL.01/3/2022	240.112.000		204.095.200						Pembayaran Belanja Modal Termin ke 1
							36.016.800						Pembayaran belanja modal T-2 (100%)
			Total Perencanaan					240.112.000					
			Pengawasan		147.250.000		29.450.000						Pembayaran Belanja Modal berupa UM
							29.450.000						Pembayaran Belanja Modal Termin-1
							29.450.000						Pembayaran Belanja Modal Termin-2
							29.450.000						Pembayaran Belanja Modal Termin-3
							22.087.500						Pembayaran Belanja Modal Termin-4
							7.362.500						Pembayaran Belanja Modal Termin-5
			Total Pengawasan					147.250.000					
			Administrasi	-	132.522.647		7.766.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			3.471.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			7.890.501						Penggantian uang persediaan untuk
				-			13.710.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			11.250.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			13.200.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			7.160.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			8.790.146						Penggantian uang persediaan untuk
				-			12.705.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			18.500.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.200.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			3.700.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			2.220.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			2.960.000						Penggantian uang persediaan untuk
			Total Administrasi					132.522.647					
			TOTAL					2.357.413.247					
27	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	Pengadaan Sarana	W11-	30.000.000		30.000.000		✓				Pembayaran Pengadaan Prasarana
			Total Pengadaan					30.000.000					
			Konstruksi Fisik	W11-	198.000.000		198.000.000						Pembayaran Renovasi Ruang Tunggu
		nilai kdp 19.400.000	Total Konstruksi					198.000.000					
			Perencanaan	W11-A1/1060.a/PL.04/II/	15.000.000		12.000.000						Pembayaran Perencanaan Gedung Ruang
							3.000.000						PEMBAYARAN PERENCANAAN
			Total Perencanaan					15.000.000					
			Pengawasan	W11-	10.000.000		10.000.000						Pembayaran Pengawasan Renovasi
			Total Pengawasan					10.000.000					
			Administrasi	-	4.400.000		982.500						Pengganti Uang Persediaan Untuk
				-			2.197.500						Pembayaran Belanja Modal
				-			1.220.000						Pertanggungjawaban Pengganti Uang
			Total Administrasi					4.400.000					
			Tambah Daya	-	194.933.000		194.933.000						PEMBAYARAN PENGADAAN TAMBAH
			Total Tambah Daya					194.933.000					
								452333000					
28	098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	Konstruksi Fisik	W1.U/3526/PL.01/VIII/202	7.456.969.000		2.161.499.700		✓				Pembayaran Belanja Modal sesuai SPK
							2.215.179.382						Pembayaran Belanja Modal Termin II
							1.476.786.255						Pembayaran Belanja Modal Termin III
							1.230.655.213						Pembayaran Belanja Modal Termin IV
							372.848.450						Pembayaran Belanja Modal Retensi
			Total Konstruksi					7.456.969.000					
			Perencanaan	W1.U/722/PL.01/II/2022	1.298.886.000		259.777.200						Pembayaran Belanja Modal Jasa
							389.665.800						Pembayaran Jasa Konsultansi Termin-2
							454.610.100						Pembayaran Jasa Konsultansi Termin-3
							194.832.900						Pembayaran Jasa Konsultansi Termin-3
			Total Perencanaan					1.298.886.000					
			Pengawasan	W1.U/3814/PL.01/IX/2022	319.157.000		63.831.400						Pembayaran Belanja Modal Termin-1
							95.747.100						Pembayaran Belanja Modal Termin-2
							95.747.100						Pembayaran Belanja Modal Termin-3
							63.831.400						Pembayaran Belanja Modal Termin-4
			Total Pengawasan					319.157.000					

			Administrasi	-	137.632.266		4.550.000					Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			25.268.900					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-			16.437.382					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-			43.910.700					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-			886.800					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
				-			12.250.000					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
				-			30.328.484					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
				-			4.000.000					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Administrasi					137.632.266				
			TOTAL					9.212.644.266				
29	098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	Honor Pokja		-				✓			
			Honor Pokja	-	3.000.000		3.000.000					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
			Total Honor Pokja					3.000.000				
			Konstruksi Fisik	WI-	11.670.277.000		3.501.083.100					Pembayaran Belanja Modal Uang Muka
							2.450.758.170					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							2.450.758.170					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							2.684.163.710					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							583.513.850					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
			Total Konstruksi					11.670.277.000				
			Perencanaan	W1.U1/1067/PL.08/II/2022	1.418.008.800		280.836.160					Pembayaran Belanja Modal Termin ke 1
							337.003.392					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							337.003.392					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							168.501.696					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							6.914.000					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
							6.914.000					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
							280.836.160					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
			Total Perencanaan					1.418.008.800				
			Pengawasan	W1-	310.895.700		93.268.710					Pembayaran Belanja Modal Uang Muka
							108.813.495					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							77.723.925					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							31.089.570					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
			Total Pengawasan					310.895.700				
			Administrasi	-	89.850.000		41.599.200					Penggantian Uang Persediaan (RM)
				-			9.350.400					Penggantian Uang Persediaan (RM)
				-			38.900.400					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
			Total Administrasi					89.850.000				
			Honor Pokja Fisik	-	10.600.000		10.600.000					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
			Total Honor Pokja					10.600.000				
			TOTAL					13.502.631.500				
30	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	Fisik	W1-	8.627.112.000		5.059.350.000		✓			Pembayaran Belanja Modal berupa
							3.567.762.000					
			Total Fisik					8.627.112.000				
			Perencanaan	W1-U21/310/PL.01/2/2022	**750.225.226**		706.094.330					Pembayaran Belanja Modal Termin ke I
							44.130.896					PembayaranBelanjaModalberupaPengad
			Total Perencanaan					750.225.226				
			Pengawasan	W1-U21/1591/PL.01/12/202	294.000.000		176.400.000					Pembayaran Belanja Modal
							117.600.000					
			Total Pengawasan					294.000.000				
			Pengelola Kegiatan	-	140.899.072		57.416.152					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-			17.973.400					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-			18.480.520					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
				-			19.656.000					Penggantian uang persediaan rupiah
				-			27.373.000					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola					140.899.072				
			TOTAL					9.812.236.298				
31	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	Fisik	W1-A21/754/PL.01/06/2022	29.104.560.000		1.819.035.000		✓			PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							2.273.793.750					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							2.273.793.750					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN

							6.730.429.500					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN-
							7.276.140.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
							8.731.368.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
			Total Fisik					29.104.560.000				
			Perencanaan	W1-A21/88/PL.01/01/2022	1.279.383.000		256.662.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							834.151.500					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
							188.569.500					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
			Total Perencanaan					1.279.383.000				
			Pengawasan	W1-A21/671/PL.01/06/2022	1.002.592.000		62.662.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN
							78.327.500					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN-
							78.327.500					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN-
							231.849.400					PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN-
							250.648.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
							300.777.600					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
			Total Pengawasan					1.002.592.000				
			Pengelola Kegiatan	-	353.040.038		3.790.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			3.490.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			360.000					PERBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			2.160.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			4.550.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			9.890.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			1.710.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			38.803.200					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			15.780.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			9.280.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			5.580.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			3.040.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			4.980.000					PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA
				-			4.550.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			12.250.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			2.960.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			22.706.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			15.050.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			4.160.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			23.869.200					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			4.480.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			18.520.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			14.155.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			11.355.500					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			22.766.400					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			12.275.300					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			2.500.000					PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN
				-			78.029.438					PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN
			Total Pengelola	-				353.040.038				
			TOTAL					31.739.575.038				
32	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	Fisik	W1-A23/553/PL.01/06/2022	32.305.600.000		6.461.120.000		✓			Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang
							8.076.400.000					Pembayaran Belanja Modal Termin-II
							8.076.400.000					Pembayaran Belanja Modal Termin-III
							9.691.680.000					Pembayaran Belanja Modal Termin
			Total Fisik					32.305.600.000				
			Perencanaan	W1-A23/159/PL.01/01/2022	1.350.081.900		270.630.000					Pembayaran Belanja Modal Termin 1
							879.547.500					Pembayaran Belanja Modal Berupa
							199.904.400					Pembayaran Belanja Modal Berupa Jasa
			Total Perencanaan					1.350.081.900				
			Pengawasan	W1-	1.046.547.200		209.309.440					Pembayaran Belanja Modal Termin 1
							156.982.080					Pembayaran Belanja Modal Termin-II
							156.982.080					Pembayaran Belanja Modal Termin-III
							156.982.080					Pembayaran Belanja Modal Termin-IV
							156.982.080					Pembayaran Belanja Modal Termin-V
							209.309.440					Pembayaran Belanja Modal Jasa

			Total Pengawasan					1.046.547.200					
			Pengelola Kegiatan	-	317.849.600		7.600.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
				-			6.640.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
				-			1.820.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			2.780.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			5.340.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			5.330.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
				-			3.140.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
				-			2.730.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			15.127.000						Penggantian Uang Persediaan untuk
				-			10.460.400						Pembayaran Belanja Modal berupa
				-			12.860.400						Penggantian Uang Persediaan untuk
				-			16.293.800						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			8.325.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			6.900.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			7.295.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
				-			6.400.000						Pembayaran Belanja Modal berupa
				-			14.450.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			4.550.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			15.500.000						Penggantian Uang Persedian Untuk
				-			15.500.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			8.300.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			5.980.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			2.990.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			2.860.000						Pembayaran Modal Berupa Perjalanan
				-			2.030.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			2.400.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			4.560.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
				-			17.096.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			2.400.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			2.400.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			3.200.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			8.335.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			21.039.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			2.400.000						Penggantian Uang Persediaan Rupiah
				-			62.818.000						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola	-				317.849.600					
			TOTAL					35.020.078.700					
33	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	Pembangunan	W1.U19/1225/PL.01/VI/20	670.829.399		182.969.837		✓				Pembayaran Belanja Modal Berupa
							106.732.404						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2
							106.732.404						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3
							106.732.404						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-4
							134.117.880						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-5
							33.544.470						Pembayaran Belanja Modal Termin Ke-6
			Total					670.829.399					
			Perencanaan	-	23.863.600		23.183.600						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			680.000						Pembayaran Belanja Barang Berupa
			Total Perencanaan	-				23.863.600					
			Pengawasan	W1-U19/1233/PL.01/VI/202	22.291.700		680.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
							21.611.700						Pembayaran Belanja Modal Berupa
			Total Pengawasan					22.291.700					
			Pengelola Kegiatan	-	8.140.000		680.000						Pebayaran Belanja Modal Berupa Honor
				-			720.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			720.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			720.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			680.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			1.960.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			1.440.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			150.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				-			1.070.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk

			Total Pengelola	-				8.140.000					
			Renovasi Pos	W1-U19/2368.a/PL.01/XI/2(	63.900.000		32.000.000						Pembayaran Belanja Modal Berupa
				W1-			31.900.000						Pembayaran Belanja Modal
			Total Renovasi Pos					63.900.000					
			TOTAL					789.024.699					
34	401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	Fisik	U20/10-1/PK-Gdg/PPK/08/2	10.767.921.000		2.153.584.200		✓				Pby blj mdl brp UM (20%)Pek jasa
							3.661.093.140						Pby blj mdl berupa Termin I(Progress
							2.584.301.040						Pby blj mdl brp Termin II (progres
							2.368.942.620						Pby blj mdl brp termin III (Progres
			Total Fisik					10.767.921.000					
			Perencanaan	W2.U20/5/PPK/3/2022	933.807.088								
							841.741.600						Pembayaran belanja modal berupa
							52.608.850						Pembayaran belanja modal berupa
							39.456.638						Pby blj mdl brp termin III (Progress
			Total Perencanaan					933.807.088					
			Pengawasan	W2-U20/09-1/PWS-	225.400.000		45.080.000						Pby blj mdl brp UM (20%)pek jasa
							76.636.000						Pby blj mdl brp Termin I (40%)pek jasa
							54.096.000						Pby blj mdl brp termin II (Progress 30%)
							49.588.000						Pby blj mdl brp termin III (Progress 22%)
			Total Pengawasan					225.400.000					
			Pengelola Kegiatan	-	221.757.000		20.300.000						Penggantian uang persedian untuk
				-			25.398.023						Penggantian uang persediaan untuk
				-			16.197.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			29.951.195						Penggantian uang persediaan untuk
				-			15.482.278						Penggantian uang persediaan untuk
				-			15.739.200						Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.748.000						Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.617.612						Penggantian uang Persediaan untuk
				-			17.569.127						Penggantian uang persediaan untuk
				-			19.998.565						Penggantian uang persediaan untuk
				-			21.756.000						Penggantian uang persediaan untuk
			Total Pengelola	-				221.757.000					
			TOTAL					12.148.885.088					
35	401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	Fisik	W2-A22/728/PL.01/VIII/202	7.956.383.000		1.591.276.600		✓				Pby Blj Mdl brp UM (20%)Pek Jasa
							1.790.186.175						Pembayaran Belanja Modal berupa
							1.790.186.175						Pembayaran Belanja Modal berupa
							2.784.734.050						Pembayaran Belanja Modal berupa
			Total Fisik					7.956.383.000					
			Perencanaan	W2-A22/256/2022	815.708.350		183.821.600						Pby Blj Mdl brp UM (20%)Pek Jasa
							183.821.600						Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
							367.643.200						Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
							45.955.400						Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
							34.466.550						Pby Blj Modal berupa pekerjaan jasa
			Total Perencanaan					815.708.350					
			Pengawasan	W2-A22/732/PL.01/VIII/202	233.400.000		70.020.000						Pby Blj Modal berupa UM (30%)Pek Jasa
							91.026.000						Pembayaran Belanja Modal berupa Pek
							72.354.000						Pby Belanja Modal berupa pekerjaan
			Total Pengawasan					233.400.000					
			Pengelola Kegiatan		177.782.044		22.490.403						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							20.439.744						Penggantian uang Persediaan untuk
							24.468.948						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							23.179.943						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							16.358.112						Penggantian uang Persediaan untuk
							29.229.665						Penggantian uang Persediaan untuk
							20.235.229						Penggantian uang Persediaan untuk
							21.380.000						Penggantian uang Persediaan untuk
			Total Pengelola					177.782.044					
			TOTAL					9.183.273.394					

36	401907		Fisik	TRAK/PK-SRG-GDG/PPK-Plj/	21.542.478.000		580.511.267		✓			Pembayaran Belanja Modal Termyn I
							580.511.267					Pembayaran Belanja Modal Termyn II
							580.511.267					Pembayaran Belanja Modal Termyn III
							863.666.199					Pembayaran Belanja Modal Termyn IV
							601.200.000					Pembayaran Belanja Modal Termyn V
							601.200.000					Pembayaran Belanja Modal Termyn VI
							200.400.000					Pembayaran Belanja Modal Termyn VII
				08/KONTRAK/PK-			3.368.337.840					Paket Pekerjaan Kontruksi Pengadaan
				08/KONTRAK/PK-			14.166.140.160					Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
			Total Fisik					21.542.478.000				
			Pengawas	04/PGS.Srg.Gdg/PPK-	939.505.000		99.563.000					Pembayaran Belanja Modal 100%
				09/Kontrak/PWS-Gdg/PPK-			176.387.820					Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan
				09/Kontrak/PWS-Gdg/PPK-			663.554.180					Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan
			Total Pengawas					939.505.000				
		PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	Perencana	04/Perc.Srg.Gdg/PPK-	832.114.000		84.713.550					Pembayaran Belanja Modal Termyn I
							14.949.450					Pembayaran Belanja Modal Termyn II
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-			585.960.800					Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-			36.622.550					Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-			109.867.650					Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
			Total Perencana					832.114.000				
			Pengelola Kegiatan		476.990.707		16.586.840					Penggantian Uang Persediaan untuk
							4.323.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							24.507.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							14.045.900					Penggantian Uang Persediaan untuk
							17.010.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							2.240.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							4.300.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.102.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							223.876.681					Pengelola Kegiatan untuk pekerjaan
							153.999.286					Pengelola Kegiatan untuk pekerjaan
			Total Pengelola					476.990.707				
			TOTAL					23.791.087.707				
37			Fisik	11/Kontrak/PK-Gdg/PPK-	25.061.142.000		1.007.426.500		✓			Pembayaran belanja modal Termin ke I
							1.007.426.500	-				Pembayaran belanja modal Termin ke II
							1.208.911.800					Pembayaran belanja modal Termin ke III
							205.487.500					Pembayaran Belanja Modal Termin ke V
							680.497.700					Pembayaran Belanja modal Termin ke IV
				07/Kontrak/PK-Gdg/PPK-			4.724.000.000					Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
				07/Kontrak/PK-Gdg/PPK-			16.227.392.000					Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
			Total Fisik					25.061.142.000				
			Perencaan	04/Perc.Gdg/PPK.PN.Plj/VI	1.039.050.000		84.719.500					Pembayaran belanja modal sesuai
							14.950.500					Pembayaran Belanja Modal Termin ke II
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-			751.504.000					Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-			46.969.000					Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
				03/Kontrak/Prc-Gdg/PPK-			140.907.000					Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
			Total Perencaan					1.039.050.000				
			Pengawasan	04/Kontrak/Pgws.Gdg/PPK-	911.916.000		99.751.000					Pembayaran Belanja Modal sesuai
				05/Kontrak/Was-Gdg/PPK-			190.858.775					PEKERJAAN KONSULTANSI
				05/Kontrak/Was-Gdg/PPK-			621.306.225					PEKERJAAN KONSULTANSI
			Total Pengawasan					911.916.000				
			pengelola Kegiatan		214.337.531		4.180.000					
							6.897.054					Penggantian uang persediaan untuk
							630.000					Penggantian uang persediaan KKP untuk
							3.450.000					Penggantian uang persediaan untuk
							11.730.000					Penggantian uang persediaan dana
				GU ADM PROYEK 2021			760.000					Pertanggungjawaban tambahan uang
							380.000					Penggantian uang persediaan
		PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG					14.146.190					Penggantian uang persediaan
							5.820.000					Penggantian uang persediaan
							10.251.998					Penggantian uang persediaan

							3.420.000						Penggantian uang persediaan
							5.040.000						Penggantian uang persediaan
							1.010.000						Penggantian uang persediaan
							1.160.000						Penggantian uang persediaan
							1.910.000						Penggantian uang persediaan
							380.000						Penggantian uang persediaan
							960.000						Penggantian uang persediaan
							5.160.000						Penggantian uang persediaan
				GU ADM PROYEK 2020			9.188.600						Penggantian uang persediaan
							10.029.775						Penggantian uang persediaan
							9.490.800						Penggantian uang persediaan
							11.620.709						Penggantian uang persediaan
							15.016.034						Penggantian uang persediaan
							17.466.970						Penggantian uang persediaan
							4.904.903						Penggantian uang persediaan
							2.375.000						Penggantian uang persediaan
							5.658.407						Penggantian uang persediaan
							580.000						Penggantian uang persediaan
							10.798.197						Penggantian uang persediaan
							22.634.894						Penggantian uang persediaan
							7.250.000						Penggantian uang persediaan
							10.715.000						Penggantian uang persediaan
							-677.000						Penggantian uang persediaan
			Total pengelola					214.337.531					Pengembalian Uang Pengelola Kegiatan
			TOTAL					27.226.445.531					
38	401939	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	Fisik	W7-A6/999/PL.01/8/2022	4.619.084.736		1.319.738.496		✓				Pembayaran belanja modal Uang Muka
							1.649.673.120						Pembayaran belanja Modal Termin ke-1
							1.649.673.120						Pembayaran belanja modal termin ke-2
			Total Fisik					4.619.084.736					
			Perencanaan	W7-A6/285/PL.01/2/2022	634.830.459		214.590.578						Pembayaran belanja modal termin ke-1
							357.650.963						Pembayaran belanja modal termin ke-2
							35.765.097						Pembayaran belanja modal termin ke III
							26.823.821						Pembayaran belanja modal termin ke IV
			Total Perencanaan					634.830.459					
			Pengawasan	W7-A6/998/PL.01/8/2022	52.682.695		52.682.695						Pembayaran belanja modal Uang Muka
			Total Pengawasan					52.682.695					
			Pengelola Kegiatan		147.166.350		33.195.000						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
							37.746.800						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
							14.510.400						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
							8.660.000						Penggantian uang persediaan untuk
							11.699.400						Penggantian uang persediaan untuk
							3.801.000						Penggantian uang persediaan untuk
							3.120.000						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
							34.433.750						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola					147.166.350					
			TOTAL					5.453.764.240					
39	401940		Fisik	W7-A7/1148/PL.01/8/2022	11.140.778.000,00		1.052.184.600		✓				Pembayaran Belanja Modal Termin Ke 1
							1.578.276.900						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							3.765.170.805						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							2.063.107.500						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							2.682.038.195						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
			Total Fisik					11.140.778.000,00					
			Perencanaan	W7-A7/347/PL.01/2/2022	516.987.000		167.558.985						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							279.264.975						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							27.926.498						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							42.236.542						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
			Total Perencanaan					516.987.000					
			Pengawasan	W7-A7/1045/PL.01/7/2022	210.816.000		63.244.800						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							105.408.000						Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan

							42.163.200					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
								210.816.000				
		PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	Pengelola Kegiatan		132.343.221		13.206.600					Penggantian Uang Persediaan untuk
							29.043.146					Penggantian Uang Persediaan untuk
							2.880.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							20.966.600					Penggantian Uang Persediaan untuk
							300.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							4.820.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							13.993.481					Penggantian Uang Persediaan untuk
							12.440.918					Penggantian Uang Persediaan untuk
							10.880.000					Penggantian Uang Persediaan Untuk
							3.410.000					Penggantian Uang Persediaan untk
							900.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							15.827.476					Penggantian Uang Persediaan untuk
							480.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							1.420.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							1.775.000					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola					132.343.221				
			TOTAL					12.000.924.221				
40	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	Fisik	W7-A8/1077/PL.01/8/2022	12.291.162.030,00		2.341.173.720		✓			Pembayaran Belanja Modal berupa
							2.926.467.150					Pembayaran Belanja Modal berupa
							3.024.016.055					Pembayaran Belanja Modal berupa
							3.999.505.105					Pembayaran Belanja Modal Termin 3
			Total Fisik					12.291.162.030,00				
			Perencana	W7-A8/373/PL.01/2/2022	950.553.300		301.922.700					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							503.204.500					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							31.450.282					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
							113.975.818					Pembayaran Belanja Modal Pekerjaan
			Total Perencana					950.553.300				
			Pengawas	W7-A8/1078/PL.01/8/2022	368.665.290		70.221.960					Pembayaran Belanja Modal berupa
							87.777.450					Pembayaran Belanja Modal Termin
							90.703.365					Pembayaran Belanja Modal Termin 2
							119.962.515					Pembayaran Belanja Modal Termin 3
								368.665.290				
			Pengelola Kegiatan		169.291.700		7.850.000					Pembayaran Belanja Modal Berupa
							5.650.000					Pembayaran Belanja Modal Berupa
							54.390.540					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
							16.657.800					Penggantian uang Persediaan Rupiah
							19.055.000					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
							6.250.000					Pembayaran Belanja Modal Berupa
							4.832.160					Penggantian Uang Persediaan Rupiah
							23.950.000					Pertanggungjawaban tambahan Uang
							30.656.200					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola Kegiatan					169.291.700				
			TOTAL					13.779.672.320				
41	401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	Fisik	)K.PPK/Fsk-Gdg/PA.MPR/VII	5.405.281.000		2.702.640.500		✓			Pembayaran Belanja Modal sesuai
							2.702.640.500					Pembayaran Belanja Modal sesuai
			Total Fisik					5.405.281.000				
			Perencana	)K.PPK/RNC-GDG/PA.MPR/II	1.200.106.000		96.078.500					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
							192.157.000					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2
							240.196.250					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3
							240.196.250					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-4
							23.932.100					Pembayaran Belanja Modal sesuai
							47.864.200					Pembayaran Belanja Modal sesuai
							59.830.250					Pembayaran Belanja Modal sesuai
							59.830.250					Pembayaran Belanja Modal sesuai
							60.005.300					Pembayaran Belanja Modal sesuai

							180.015.900					Pembayaran Belanja Modal sesuai
			Total Perencana					1.200.106.000				
			Pengawas	K.PPK/Fsk-Gdg/PA.MPR/VII	281.600.000		140.800.000					Pembayaran Belanja Modal sesuai
							140.800.000					Pembayaran Belanja Modal sesuai
			Total Pengawas					281.600.000				
			Pengelola Kegiatan		148.233.452		25.117.729					Penggantian uang persediaan untuk
							21.956.717					Penggantian uang persediaan untuk
							19.126.730					Penggantian uang persediaan untuk
							7.681.362					Penggantian uang persediaan untuk
							10.668.888					Penggantian uang persediaan untuk
							17.219.667					Penggantian uang persediaan untuk
							10.992.496					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
							13.561.446					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
							4.275.000					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
							17.633.417					Penggantian Uang Persediaan RM untuk
			Total Pengelola Kegiatan					148.233.452				
			Pengadaan	W6-A9/2011/KU.01/XI/2022	9.000.000		9.000.000					Pembayaran Belanja Modal sesuai
			Total Pengadaan Sertifikat Tanah					9.000.000				
			TOTAL					7.044.220.452,				
42	401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	Fisik	W8-A10/0763/PL.01/05/202	22.245.471.000,00		2.186.034.960		✓			Pembayaran belanja modal sesuai No.
							1.748.827.968					Pembayaran belanja modal sesuai
							1.748.827.968					Pembayaran belanja modal sesuai
							1.748.827.968					Pembayaran belanja modal sesuai
							3.423.503.288					Pembayaran belanja modal sesuai
							3.423.503.288					Pembayaran belanja modal sesuai
							3.860.710.280					Pembayaran belanja modal sesuai
							4.105.235.280					Pembayaran belanja modal sesuai No.
			Total Fisik					22.245.471.000,00				
			Perencana	W8-A10/407/PL.01/3/2022	745.461.875		231.900.000					Pembayaran belanja modal sesuai
							386.500.000					Pembayaran belanja modal sesuai
							34.301.875					Pembayaran belanja modal sesuai
							92.760.000					Pembayaran belanja modal sesuai
			Total Perencana					745.461.875				
			Pengawasan	A10/0760/Add-02/PL.01/8/	758.148.000		303.259.200					Pembayaran belanja modal sesuai
							454.888.800					Pembayaran belanja modal sesuai No.
			Total Pengawasan					758.148.000				
			Pengelola Kegiatan		288.396.429		84.403.000					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
							1.500.000					Penggantian uang persediaan untuk
							28.486.280					Penggantian uang persediaan untuk
							30.776.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.377.449					Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.236.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							7.300.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							9.690.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							28.820.200					Penggantian Uang Persediaan untuk
							21.327.500					Penggantian Uang Persediaan untuk
							19.230.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							24.250.000					Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola					288.396.429				
			TOTAL					24.037.477.304				

43	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	Fisik	U10/49/KONTRAK-FISIK/X/2	25.174.158.235		1.147.416.450		✓			Pembayaran Belanja Modal berupa
							879.685.945					Pembayaran Belanja Modal berupa
							803.191.515					Pembayaran Belanja Modal berupa
							994.427.590					Pembayaran Belanja Modal Berupa
							1.384.145.250					Pembayaran Belanja Modal Berupa
							2.828.487.750					Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang
				W6-			16.435.320.000					W6-
				W6-			701.483.735					W6-U10/874/SPK/KONS.PENG/X/2020
			Total Fisik					25.174.158.235				
			Perencanaan	W6.U10/136/PL.01/II/2020	958.109.000		66.777.600					Pembayaran Belanja Modal berupa
							16.694.400					Pembayaran Belanja Modal berupa
							174.927.400					Pembayaran Uang Muka Belanja Modal
							279.883.840					Pembayaran belanja modal berupa
							279.705.554					Pembayaran belanja modal berupa
							140.120.206					W6_U10/136/PL.01/II/2020
			Total Perencanaan					958.109.000				
			Pengawasan	W6-U10/52/KU.01/10/2022	295.747.000		89.210.700					Pembayaran Belanja Modal berupa
							9.912.300					Pembayaran Belanja Modal berupa
							73.772.800					Pembayaran Belanja Modal Berupa
							122.851.200					Pembayaran Belanja Modal Berupa Uang
			Total Pengawasan					295.747.000				
			Pengelola Kegiatan		320.818.053,00		4.197.300					Penggantian Uang Persediaan untuk
							4.006.048					Penggantian Uang Persediaan untuk
							15.300.322					Penggantian Uang Persediaan untuk
							20.863.500					Penggantian Uang Persediaan untuk
							2.895.002					Penggantian Uang Persediaan untuk
							12.648.300					Penggantian Uang Persediaan untuk
							1.204.100					Pengesahan atas Pertanggungjawaban
							2.255.200					Penggantian uang persediaan untuk
							28.735.082					Penggantian uang persediaan untuk
							22.239.785					Penggantian uang persediaan untuk
							30.183.000					Penggantian Uang Persediaan untuk
							10.392.954					Penggantian Uang Persediaan untuk
							10.600.000					Penggantian uang persediaan untuk
							4.019.500					Penggantian uang persediaan untuk
							3.477.800					Penggantian uang persediaan untuk
							16.497.500					Penggantian uang persediaan untuk
							18.138.300					Penggantian uang persediaan untuk
							5.342.524					Penggantian uang persediaan untuk
							10.565.000					Penggantian uang persediaan untuk
							5.357.600					Penggantian uang persediaan untuk
							18.536.400					Penggantian uang persediaan untuk
							8.576.250					Penggantian uang persediaan untuk
							4.473.200					Penggantian uang persediaan untuk
							14.138.649					Penggantian uang persediaan untuk
							13.949.834					Penggantian uang persediaan untuk
							24.365.148					Penggantian uang persediaan untuk
							7.859.755					Penggantian uang persediaan untuk
			Total Pengelola					320.818.053,00				
			TOTAL					26.748.832.288				
44	401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	Fisik	W6-A8/927/PL.01/VI/2022	19.024.926.463		3.082.432.350		✓			Pembayaran Belanja Modal berupa
							2.928.310.732					Pembayaran Belanja Modal berupa
							2.465.945.880					Pembayaran Belanja Modal Paket
							4.285.674.019					Pembayaran Belanja Modal Paket
							4.285.674.018					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2
							668.761.071					Pembayaran Belanja Modal untuk Jasa
							41.797.567					Pembayaran Belanja Modal Jasa
							207.339.479					Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3
							227.969.500					Pembayaran Belanja Modal berupa

							205.172.550						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
							314.857.950						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
							24.477.550						Penggantian Uang Persediaan untuk
							31.992.632						Penggantian Uang Persediaan untuk
							18.784.555						Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.654.484						Penggantian Uang Persediaan untuk
							29.704.236						Penggantian Uang Persediaan untuk
							30.273.319						Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.713.575						Penggantian Uang Persediaan untuk
							28.676.319						Penggantian Uang Persediaan untuk
							113.714.677						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Fisik					19.024.926.463					
			TOTAL					19.024.926.463					
45			Fisik	V6-A10/1163/PL.01/VIII/202	4.924.596.000,00		984.919.200		✓				Pembayaran Belanjal Modal (53) sesuai
							2.462.298.000						Pembayaran Belanjal Modal (53) sesuai
							1.477.378.800						Pembayaran Belanjal Modal (53) sesuai
			Total Fisik					4.924.596.000,00					
			Perencana	W6-A10/332/PL.01/III/2022	1.128.223.000		508.495.200						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-1
							508.495.200						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-2
							63.561.600						Pembayaran Belanja Modal Termin ke-3
							47.671.000						Pembayaran Belanja Modal (53) Sesuai
			Total Perencana					1.128.223.000					
			Pengawasan	W6-A10/332/PL.01/III/2022	206.034.000		82.413.600						Pembayaran Belaja Modal (53) sesuai
							123.620.400						Pembayaran Belaja Modal (53) sesuai
	401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	Total Pengawasan					206.034.000					
			Pengelola Kegiatan		113.571.634		17.604.632						Penggantian uang persediaan untuk
							19.991.127						Penggantian uang persediaan untuk
							16.260.333						Penggantian uang persediaan untuk
							2.717.703						Penggantian uang persediaan untuk
							15.700.000						Penggantian uang persediaan untuk
							1.701.000						Penggantian uang persediaan untuk
							5.844.852						Penggantian uang persediaan untuk
							6.600.000						Penggantian uang persediaan untuk
							5.334.500						Penggantian uang persediaan untuk
							12.200.000						Penggantian uang persediaan untuk
							9.617.487						Pertanggungjawaban Tambahan Uang
			Total Pengelola Kegiatan					113.571.634					
			TOTAL					6.372.424.634					
46	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	Fisik		6.211.011.011		6.211.011.011		✓				Paket Pekerjaan Konstruksi
			Total Fisik					6.211.011.011					
			Perencana		968.233.213		109.096.700						Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							218.193.400						Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							272.741.750						Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							242.058.303						Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							48.411.660						Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
							77.731.400						Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
								968.233.213					
			Pengawas		254.943.750		254.943.750						Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi
			Total Pengawas					254.943.750					
			Pengelola Kegiatan		184.647.214		7.830.391						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							15.660.001						Penggantian Uang Persediaan untuk
							11.527.974						Penggantian Uang Persedian untuk
							11.391.527						Penggantian Uang Persediaan untuk
							7.854.000						Penggantian Uang Persediaan untuk
							16.132.135						Penggantian Uang Persediaan untuk
							12.067.474						Penggantian Uang Persediaan untuk
							5.678.900						Penggantian Uang Persediaan untuk
							6.856.230						Penggantian Uang Persediaan untuk
							11.862.272						Penggantian Uang Persediaan untuk

							16.800.547						Penggantian Uang Persedian Untuk
							5.629.370						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							6.850.047						Penggantian Uang Persediaan untuk
							4.800.046						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							1.985.000						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							7.952.400						Penggantian Uang Persediaan Untuk
							2.738.000						Penggantian Uang Persediaan untuk
							3.890.000						Penggantian Uang Persediaan untuk
							8.696.350						Penggantian Uang Persediaan untuk
							10.863.200						Penggantian Uang Persedian Untuk
							5.946.350						Penggantian Uang Persedian Untuk
							1.635.000						Penggantian Uang Persediaan (RM)
			Total Pengelola					184.647.214					
			TOTAL					7.618.835.188,					
47	477306	PENGADILAN NEGERI	TOTAL					437.898.000,				✓	mangkrak akan dilakukan
48	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	TOTAL					36.460.994.468,	✓				kdp masih berlangsung



LAMPIRAN A3
HIBAH

Lampiran A3 :
Hibah Tahun Anggaran Berjalan Yang Sudah Disahkan – Semesrer II TA 2022

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	099010	2Z43A93A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
2	098963	2LLG1QGA	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp 46.500.000,00
3	099780	29SC2YPA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 19.690.000,00
4	099780	2234U9CA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 5.070.000,00
5	099780	23XRHVCA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 12.050.000,00
6	099780	26S1R88A	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 12.050.000,00
7	099780	2H7B93JA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 64.050.000,00
8	662972	2DKK6DYA	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp 277.503.459,00
9	400936	2ATRJ4LA	PA KENDAL	BARANG	DN	Rp 11.999.000,00
10	477380	2DC38Y7A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
11	477380	2D2D2HFA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
12	477380	2HMB554A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
13	477380	2ET7772A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
14	477380	2S6BLRSA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
15	477380	23J1PB8A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
16	099574	2GWF2ZJA	PN SINJAI	BARANG	DN	Rp 10.654.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
17	099574	2ZEWTQHA	PN SINJAI	BARANG	DN	Rp 2.375.150,00
18	307555	29USX7AA	PA SINJAI	BARANG	DN	Rp 21.500.000,00
19	099003	2PQG872A	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 1.000.000,00
20	099450	2C6MQ7AA	PN BARRU	BARANG	DN	Rp 196.698.000,00
21	097780	2S1TTZEA	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp 34.000.000,00
22	401390	23A8EASA	PA TRENGGALEK	BARANG	DN	Rp 520.075.105,00
23	097624	2FBG4TYA	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp 191.725.000,00
24	663403	2DXS24ZA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
25	098061	21XG95EA	PN WATES	BARANG	DN	Rp 45.500.000,00
26	099003	2PWED99A	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
27	401055	2N8R6P1A	PA KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
28	400421	23GB5RYA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 32.750.000,00
29	400741	2Q8WQF6A	PA CIANJUR	BARANG	DN	Rp 175.000.000,00
30	099926	28S2L76A	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
31	099926	2SJUVQXA	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
32	098675	2T3AC8QA	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp 118.891.650,00
33	663398	2N7XULWA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 1.800.000,00
34	663398	2LLGV4LA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 5.500.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
35	663398	23KVZ9VA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 4.350.000,00
36	663398	234V9MEA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 2.300.000,00
37	099162	2D81N5WA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 9.696.000,00
38	402191	25GXSJEA	PA MUARA BUNGO	BARANG	DN	Rp 138.000.000,00
39	099162	2LLWAGXA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 11.663.000,00
40	400772	2TEAZ86A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 2.138.000,00
41	400772	2Q2NV62A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
42	400772	2ZPRPNRA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 4.950.000,00
43	400772	2KMG37KA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 3.250.000,00
44	400772	2PK54JNA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
45	401915	2EUPPH2A	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp 1.603.619.000,00
46	401957	2TKNZQPA	PA SOREANG	BARANG	DN	Rp 72.348.600,00
47	099045	2H4RRTJA	PN METRO	BARANG	DN	Rp 199.743.000,00
48	097872	2R8NMWKA	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 62.000.000,00
49	097577	251JJG4A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 179.602.500,00
50	401307	2C55Q4HA	PA BOJONEGORO	BARANG	DN	Rp 825.839.780,00
51	098544	2YATGQ5A	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
52	097577	2EAYNF9A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 7.650.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
53	098544	2HMQJNCA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 2.200.000,00
54	099162	27TK8KDA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
55	400678	265ZUGTA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 132.700.000,00
56	099176	2BL45Z7A	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp 4.785.000,00
57	097872	2XAZTM9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 170.348.000,00
58	097872	2TPQKGRA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 157.834.495,00
59	401488	2V5Q7LSA	PA MADIUN	BARANG	DN	Rp 28.000.000,00
60	099802	2EC8DFSA	PN NEGARA	BARANG	DN	Rp 30.657.000,00
61	401709	2N7PRCCA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 7.200.000,00
62	401910	22A3KDBA	PN MUKOMUKO	BARANG	DN	Rp 777.799.650,00
63	099820	2X7GYQJA	PN TABANAN	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
64	400704	2KX2Y12A	PA TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 33.266.759,00
65	307907	2QFUPCHA	PA PRAYA	BARANG	DN	Rp 80.000.000,00
66	097912	2UDN2N1A	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	Rp 8.999.999,00
67	099286	2R78HMUA	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 9.800.000,00
68	401904	2PND2C3A	PN SUKA MAKMUE	BARANG	DN	Rp 187.450.000,00
69	097872	2LM7FS9A	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp 198.931.700,00
70	400421	2FQGFCKA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 45.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
71	098917	2HBDNGBA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	Rp 205.493.495,00
72	098917	2KBMWRRA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	Rp 424.486.682,00
73	682150	2RXFN2MA	PA KOTA TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 106.987.664,00
74	097755	2QF6VURA	PN KUDUS	BARANG	DN	Rp 424.800.000,00
75	670206	2M2HRJAA	PN BATULICIN	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
76	097886	2C3SA5WA	PN PURWOREJO	BARANG	DN	Rp 2.165.741.250,00
77	402101	229D8AHA	PA BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 47.640.000,00
78	401271	238Y39AA	PA JOMBANG	BARANG	DN	Rp 661.400.000,00
79	402101	2VVFLD5A	PA BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 150.000.000,00
80	578864	2L6REEGA	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp 42.660.000,00
81	098874	2WQZUVEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 11.100.000,00
82	098938	2392TD4A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
83	098938	2HQWKY1A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
84	098938	23WCFMPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
85	098938	2GBPMB5A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
86	098938	2Z6E3LNA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.700.000,00
87	097908	27RGLNUA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 12.012.000,00
88	400891	2ET6BMMA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
89	099031	21THL5DA	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp 12.000.000,00
90	098938	2RA7G8ZA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 4.400.000,00
91	098938	286KM9NA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.700.000,00
92	400327	2SR2PNGA	PN DUMAI	BARANG	DN	Rp 23.450.000,00
93	401375	213RHZEA	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp 322.541.788,00
94	681422	2UEUSX7A	PN PASANGKAYU	BARANG	DN	Rp 197.411.966,00
95	097542	2UVHW84A	PN GARUT	BARANG	DN	Rp 5.750.000,00
96	097542	2VWDQDLA	PN GARUT	BARANG	DN	Rp 5.750.000,00
97	097603	2VEY2ECA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 39.050.000,00
98	401876	2KKWXGHA	PA KUALA KURUN	BARANG	DN	Rp 338.162.000,00
99	098310	2F4YN6BA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
100	098310	2F9TBSEA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
101	099024	21SAJ1AA	PN SUNGAILIAT	BARANG	DN	Rp 70.000.000,00
102	670227	2F25XX3A	PA SURAKARTA	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
103	559857	29RMM13A	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 29.000.000,00
104	400690	2U3C6V2A	PA CIAMIS	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
105	400415	2G8JCKVA	PN JANTHOI	BARANG	DN	Rp 520.561.080,00
106	400492	22PN216A	PT RIAU	BARANG	DN	Rp 52.100.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
107	672980	25U13T6A	PN PARIGI	BARANG	DN	Rp 449.200.000,00
108	097652	2HU2UJRA	PN SUKABUMI	BARANG	DN	Rp 35.780.000,00
109	099773	2L3QVBBA	PT DENPASAR	BARANG	DN	Rp 5.016.854.000,00
110	402468	289MT84A	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 4.550.000,00
111	307644	2GM1K39A	PA MAJENE	BARANG	DN	Rp 11.000.000,00
112	098310	24X1N5VA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 32.000.000,00
113	098874	27ZUDQFA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00
114	400559	2458MQ2A	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp 6.549.000,00
115	400559	21CBPCTA	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp 12.550.000,00
116	099155	2J1137ZA	PN KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 35.400.000,00
117	662972	27A755DA	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp 11.667.000,00
118	402519	28VPDLFA	PA MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 181.309.150,00
119	098015	2U6W5GRA	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp 24.500.000,00
120	400239	2WU22KVA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 800.000,00
121	400239	29F9R9MA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
122	097908	2QP8RQSA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 8.000.000,00
123	604723	2CJJHDUA	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	Rp 235.500.000,00
124	673013	25J4YG7A	PN MALILI	BARANG	DN	Rp 524.533.560,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
125	402302	23FDWSVA	PA PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 83.016.000,00
126	099439	2L64TBDA	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 45.850.000,00
127	099926	2CHUPMGA	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
128	477380	2863U8ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
129	477380	2JV32PXA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 4.050.000,00
130	670227	293811GA	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
131	652123	23NLRY5A	PA BANGGAI	BARANG	DN	Rp 32.225.000,00
132	098942	2DNTQS7A	PN PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 12.100.000,00
133	400126	2HHDQE9A	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
134	400126	2G1SWB7A	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 12.500.000,00
135	400126	26GFT7WA	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
136	400512	24LQ3D8A	PT BENGKULU	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
137	401938	2CBAFAKA	PA TELUK KUANTAN	BARANG	DN	Rp 570.000.000,00
138	400735	2U25DZZA	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp 24.894.000,00
139	400678	212LMLGA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 27.500.000,00
140	417657	2HPLP3WA	PA TANJUNG SELOR	BARANG	DN	Rp 1.370.294.550,00
141	099816	23AGR2AA	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	Rp 688.976.300,00
142	099340	2MMSRVJA	PN TAHUNA	BARANG	DN	Rp 54.490.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
143	098900	2THSDN6A	PN MUARA BUNGO	BARANG	DN	Rp 149.555.000,00
144	400832	212679TA	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp 21.540.000,00
145	400832	21QBBV9A	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp 69.750.000,00
146	099947	2GALK3VA	PN SO'E	BARANG	DN	Rp 35.000.000,00
147	098938	24FV3A7A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 2.240.000,00
148	098938	2SGNM2CA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 12.200.000,00
149	098938	2K275EVA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
150	098938	2KLH5LPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 5.925.000,00
151	098938	2Z2XQ7RA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 4.050.000,00
152	098938	2Y2MA4JA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 2.350.000,00
153	401936	2RTZK12A	PA PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	Rp 198.669.994,00
154	098942	2EVL9GLA	PN PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 16.500.000,00
155	576274	28FQA32A	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 7.300.000,00
156	576274	2SY41AEA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 43.500.000,00
157	576274	2F2UR9EA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 28.500.000,00
158	576274	25ZUYHDA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 12.500.000,00
159	477249	2W628Y4A	PN ROTE NDAO	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
160	400512	224SBGXA	PT BENGKULU	BARANG	DN	Rp 7.300.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
161	099070	281GMZNA	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp 65.000.000,00
162	402820	2JVYPNDA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 1.600.000,00
163	402820	2JGQCQJA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 1.400.000,00
164	402820	2PRV8G9A	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
165	402820	2X8MPJQA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 5.400.000,00
166	402820	2NHHAG8A	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 5.400.000,00
167	402820	2FAVV4EA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
168	098959	2YBDB7QA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 255.912.200,00
169	663403	2CWNVALA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
170	663403	2KN4F76A	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
171	663403	2NRVC3GA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.500.000,00
172	099010	25LBHRLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 13.500.000,00
173	099010	2QETUP6A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 4.650.000,00
174	098938	2X177DFA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 3.300.000,00
175	307729	2D5QJU9A	PA BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 16.000.000,00
176	477224	2GNGUTUA	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
177	400141	2N2MH71A	PN BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 311.687.534,00
178	099471	23R8V1AA	PN MAROS	BARANG	DN	Rp 177.534.246,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
179	417722	2GJNVE1A	PN TANJUNG SELOR	BARANG	DN	Rp 1.370.294.550,00
180	097872	2PVA4JTA	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 439.202.000,00
181	400075	2Z4VMY5A	PN SORONG	BARANG	DN	Rp 299.580.000,00
182	400540	284BX3EA	PT KENDARI	BARANG	DN	Rp 539.078.000,00
183	097872	2SBSWDNA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 235.530.000,00
184	097872	21258K9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 280.282.420,00
185	097872	21PVS9RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 65.187.086,00
186	662986	2MRYTCKA	PN SANGATTA	BARANG	DN	Rp 10.200.000,00
187	662986	23AK2ELA	PN SANGATTA	BARANG	DN	Rp 6.600.000,00
188	098214	2FB4VC9A	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp 22.800.000,00
189	400967	2TJSCEMA	PA PATI	BARANG	DN	Rp 475.000.000,00
190	559857	25XAVENA	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 25.400.000,00
191	307712	2RX33TPA	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp 1.925.000,00
192	097500	2TG135BA	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00
193	097535	2S83Y8DA	PN TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 134.462.500,00
194	402540	2XH5PPYA	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
195	402540	2QBNMJTA	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp 7.700.000,00
196	098544	2DY4ZXKA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 149.105.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
197	307712	2V4WKRLA	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
198	307232	278J6DFA	PA KOTAMUBAGU	BARANG	DN	Rp 33.925.000,00
199	099638	2AT7UBQA	PN MAMUJU	BARANG	DN	Rp 162.000.000,00
200	098310	2WRQDQHA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 44.219.000,00
201	098310	2Z8LZ3YA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
202	098310	2T45PQUA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 13.325.000,00
203	402525	2LWCRFVA	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp 117.500.000,00
204	402525	2KRRP9PA	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp 4.800.000,00
205	098874	2AYMXHAA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 47.175.000,00
206	098874	2BKWLRNA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 175.844.000,00
207	098874	27HBVCUA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 175.778.000,00
208	477380	2GZLS6ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 1.787.146.700,00
209	400879	2T1ZPLCA	PA PEMALANG	BARANG	DN	Rp 33.750.000,00
210	400879	23TBNC5A	PA PEMALANG	BARANG	DN	Rp 29.117.000,00
211	099180	2YGE422A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 3.696.500,00
212	099180	23BHDD6A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 6.700.000,00
213	099752	2869FYCA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
214	099752	27JGB2DA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 12.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
215	099752	2ZBF8PDA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
216	401929	27187KPA	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 6.750.000,00
217	401929	2PFAYAJA	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 9.650.000,00
218	401929	2DSUPG7A	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 3.850.000,00
219	401929	25PSLW4A	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 419.872.006,00
220	098832	2YQP6Y6A	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
221	098832	235MPPTA	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp 5.999.000,00
222	099752	22U38QVA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
223	099752	2L9D8M1A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
224	099752	2YNSUJ3A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
225	099752	2FKDTF7A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 26.500.000,00
226	099752	2S1M4CLA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 43.000.000,00
227	099752	2GM28WHA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 500.000,00
228	099752	29H7V5PA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
229	099752	2832ZE4A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
230	099752	2V3JBR8A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
231	099010	2QNDZYLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 4.200.000,00
232	099862	2DU5LHYA	PN MATARAM	BARANG	DN	Rp 1.690.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
233	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp 214.525.150,00
234	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp 356.400.000,00
235	400571	2D68V6KA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 4.900.000,00
236	400571	2K5B33HA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 3.300.000,00
237	400571	26GMWEAA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.050.000,00
238	400571	2PMRJ2YA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.375.000,00
239	400571	28FVQSDA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
240	400571	2UPD1MCA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.575.000,00
241	400571	2W3AAHTA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.575.000,00
242	400571	26FNR2LA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.700.000,00
243	400571	2MWL153A	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.350.000,00
244	099176	2N1CFU6A	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
245	097598	23ZRCWYA	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp 6.747.393.420,00
246	401907	2F3AP18A	PN PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	Rp 198.010.000,00
247	099162	22ZVSDHA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
248	098959	21XVZSDA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 114.830.610,00
249	098959	2B68CY7A	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 144.107.000,00
250	098959	2U9SWKSA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 125.083.750,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
251	098959	293XUTJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 28.695.000,00
252	099752	2K2XRSXA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
253	097500	2PSAPAVA	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp 750.000.000,00
254	400492	23YMFCDA	PT RIAU	BARANG	DN	Rp 40.000.000,00
255	097691	2616N38A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 124.717.600,00
256	097890	2RKUAD3A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
257	097890	2YN6RDMA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
258	097890	2PB6B6HA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.100.000,00
259	097890	26KJQR9A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 2.800.000,00
260	097890	2PDYBP7A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
261	097890	26KBMLWA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.850.000,00
262	401884	2U1VZFEA	PA AMPANA	BARANG	DN	Rp 147.243.139,00
263	098881	2BYWNXDA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 924.688.000,00
264	098881	2AAEM6PA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 13.689.500,00
265	097908	2GYKFK1A	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 3.800.000,00
266	097598	2ZQ44BGA	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp 5.297.828.186,00
267	400126	2ZK8QRGA	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 199.867.000,00
268	108309	2LCC52MA	PN BATAM	BARANG	DN	Rp 90.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
269	097691	2DA2NJ2A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 6.400.000,00
270	400239	2P6FF32A	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 302.894.027,00
271	477306	22Y38MLA	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	Rp 193.903.614,00
272	097691	29QN823A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 59.000.000,00
273	098192	2W6R8ZJA	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	Rp 13.000.000,00
274	400823	2W53PPPA	PA TANGERANG	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
275	400823	2PXF91MA	PA TANGERANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
276	098256	2D1JGX7A	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	Rp 10.450.000,00
277	097603	2UMC3WKA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 42.122.000,00
278	097603	2R5Q8X3A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 132.692.000,00
279	097603	23EMJ9DA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
280	097603	2JK5HPQA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
281	097603	2782DL5A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 9.400.000,00
282	097603	2ZKZH4XA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 9.400.000,00
283	672910	2BQA2LGA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 30.600.000,00
284	401709	29KG64BA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 197.962.000,00
285	098959	2J44VDJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 593.834.460,00
286	559857	2QFJNACA	PTUN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
287	672910	2U8PTTVA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
288	672910	2X5XXHLA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 23.850.000,00
289	673062	23V3KT6A	PN SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	Rp 198.634.000,00
290	098874	29RU9UEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 199.851.000,00
291	098874	2JHP2P5A	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 151.620.000,00
292	097780	2VH6XLPA	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp 45.000.000,00
293	098743	2MDHA7BA	PT PADANG	BARANG	DN	Rp 718.529.500,00
294	098743	2D7618YA	PT PADANG	BARANG	DN	Rp 447.106.946,00
295	098722	22EQ8K1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
296	098061	2FY9M59A	PN WATES	BARANG	DN	Rp 68.000.000,00
297	099230	21Z88U4A	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 5.850.000,00
298	099230	232LG2XA	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 16.977.600,00
299	400421	2D79E5CA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 7.925.000,00
300	098860	2EW2HGLA	PN RENGAT	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
301	308021	2CPNYVZA	PA CURUP	BARANG	DN	Rp 4.749.000,00
302	401174	2V8PY87A	PA KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 290.711.900,00
303	097933	2TGSRWMA	PN SURAKARTA	BARANG	DN	Rp 237.994.000,00
304	400483	2ABYDBQA	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	Rp 479.436.473,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
305	099003	21JNHQGA	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 739.470.000,00
306	663051	21APMVVA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 17.625.000,00
307	663051	2WDAXWNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 23.850.000,00
308	663051	2K9MEKNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 9.773.000,00
309	663051	21H1DZDA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 6.850.000,00
310	098881	2BKWC4GA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 34.854.000,00
311	098881	251G48FA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 349.560.508,00
312	400282	2Z4373RA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 4.950.000,00
313	400282	24PBJ4GA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 11.050.000,00
314	400282	2TRMR4JA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 27.500.000,00
315	097872	295282RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
316	097872	2UZ351AA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
317	097975	2SL1MW3A	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 10.500.000,00
318	097975	2HG2TCRA	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 409.000.000,00
319	099375	2Q9NDL3A	PN PALU	BARANG	DN	Rp 100.069.000,00
320	097762	2A9T9JQA	PN PATI	BARANG	DN	Rp 36.335.000,00
321	099663	213Y168A	PN BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 19.088.000,00
322	099663	2WJ4N6MA	PN BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 1.250.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
323	098132	2V22GQFA	PN TUBAN	BARANG	DN	Rp 258.445.400,00
324	097762	2L8M632A	PN PATI	BARANG	DN	Rp 199.500.000,00
325	097741	2Y1REXDA	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
326	099286	2R7A9W4A	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 907.442.400,00
327	613519	22QGNUSA	PN CIBINONG	BARANG	DN	Rp 32.400.000,00
328	682164	27Q94EMA	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	Rp 47.419.000,00
329	663157	27Q94EMA	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp 191.109.100,00
330	097598	2YWLVVZA	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp 2.036.666.594,00
331	613519	2ENK2HKA	PN CIBINONG	UANG	DN	Rp 1.404.540.848,00
332	401971	2UGZN68A	PN DATARAN HUNIMOA	UANG	DN	Rp 50.000.000,00
333	526750	21FPKXHA	PTUN PALEMBANG	UANG	DN	Rp 2.186.000.000,00
334	097709	2HH6RWGA	PN KUNINGAN	UANG	DN	Rp 700.000.000,00
335	099070	27FDBQ1A	PN SINGKAWANG	UANG	DN	Rp 150.000.000,00
336	401915	2KS1A39A	PN CIKARANG	UANG	DN	Rp 6.000.000.000,00
TOTAL						**Rp 70.284.339.793,00**

Lampiran A3 :
Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Sudah Disahkan – Semester II TA 2022

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	401670	2SH4BU5A	MS IDI	BARANG	DN	Rp 652.252.212,00
2	576253	2U7EXF9A	PTA KENDARI	BARANG	DN	Rp 21.500.000,00
3	576253	2KCAJVUA	PTA KENDARI	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
4	098167	29ETE8VA	PN SIDOARJO	BARANG	DN	Rp 150.375.000,00
5	401878	22BZ8N6A	PA SENDAWAR	BARANG	DN	Rp 3.037.149.000,00
6	099471	21VU4W9A	PN MAROS	BARANG	DN	Rp 167.707.950,00
7	400477	2G9DTAZA	PN SUMBER	BARANG	DN	Rp 536.400.000,00
8	097802	2E8R9LAA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 100.000.000,00
9	097802	2EH6T4YA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 70.000.000,00
10	097802	26NJHFCA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 524.281.000,00
11	097802	2PLHMHTA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 171.882.967,00
12	097872	25Y8YJ2A	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
13	402132	2GUDDWGA	PA SELAT PANJANG	BARANG	DN	Rp 384.000.000,00
14	400580	2WCLHECA	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp 1.709.609.772,00
15	097577	2EKG53HA	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 259.025.000,00
16	477352	2E2SELYA	PN PASAMAN BARAT	BARANG	DN	Rp 196.612.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
17	098462	2GJX7CWA	PN SIGLI	BARANG	DN	Rp 399.077.000,00
18	400389	2XTD5Q5A	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 86.086.000,00
19	400389	2RR3NNEA	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 42.117.500,00
20	663026	2HD4WT2A	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp 500.000.000,00
21	402443	2RVBTMXA	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp 1.068.000.000,00
22	098874	2C3HGTDA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 186.320.000,00
23	402468	2GR89PDA	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 5.850.000,00
24	400389	261BZGBA	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 282.139.990,00
25	664522	2M7V8YJA	PT MALUKU UTARA	BARANG	DN	Rp 678.732.000,00
26	400998	27WHZ6VA	PA REMBANG	BARANG	DN	Rp 87.840.500,00
27	097776	2KUKP49A	PN BREBES	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
28	400891	213G76NA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 201.473.000,00
29	400891	213M8GEA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 126.704.000,00
30	099769	2BQ23L9A	PN SOASIU	BARANG	DN	Rp 364.436.000,00
31	401909	2V7FM7DA	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp 1.034.376.000,00
32	663026	2EUEGHXA	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp 810.000.000,00
33	097691	2CLXD1LA	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 299.378.000,00
34	401914	2PEPANCA	PN BANJAR	BARANG	DN	Rp 80.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
35	401715	25P8D66A	MS KOTACANE	BARANG	DN	Rp 90.895.000,00
36	402242	2KHKL67A	PA PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 84.200.000,00
37	672910	2DFM7VGA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 78.801.000,00
38	098608	25E1WPQA	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp 1.893.569.000,00
39	307491	27H2GSRA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
40	307491	2WBRC3GA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 11.000.000,00
41	682171	2FJTF4GA	PA AMURANG	BARANG	DN	Rp 2.476.737.326,00
42	098722	2ZCX12GA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
43	098722	2CALLBVA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
44	098722	23LPDNEA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
45	098722	28NL2B1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
46	098722	2TCK51TA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
47	098722	2EGMQ39A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
48	098310	24971ENA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 6.985.000,00
49	402097	2JLDNGCA	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 136.320.000,00
TOTAL						**Rp 19.068.832.217,00**



LAPORAN PENDUKUNG

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



TAHUN 2022

AUDITED



DAFTAR ISI

- BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN *(FACE)*
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
- LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
- NERACA *(FACE)*
- NERACA PERCOBAAN SALDO AWAL, KAS DAN AKRUAL
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- CALBMN, LAPORAN POSISI BMN DI NERACA, LBP INTRA, LBP EKSTRA, & LBP INTRA-EKSTRA, LAPORAN PENYUSUTAN INTRA DAN LAPORAN PENYUSUTAN EKSTRA, LBP ASET TAK BERWUJUD, LAPORAN AMORTISASI BPP ASET TAK BERWUJUD, LBP KDP, LBP BARANG BERSEJARAH, LAPORAN CRBMN INTRA-EKSTRA, DAN LAPORAN PERSEDIAAN
- RENCANA AKSI *(ACTION PLAN)* TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
- CATATAN HASIL REVIU (CHR) BADAN PENGAWASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 *UNAUDITED*
- KERTAS KERTA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR REKENING PEMERINTAH DAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA BESERTA MONITORING PENUTUPAN REKENING PEMERINTAH
- KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP, KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN, DAN KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DARI HIBAH
- NERACA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
- BELANJA MODAL DIBAYAR DIMUKA *(PREPAID)*
- PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
- PENJELASAN LIST JURNAL MANUAL SAKTI MODUL GLP
- MONITORING TRANSFER KELUAR – TRANSFER MASUK
- KOREKSI NILAI ASET TETAP/ASET LAINNYA NON REVALUASI
- KETIDAKSESUAIAN AKUN VS KODE BMN/PERSEDIAAN
- REKAPITULASI KOREKSI *AUDITED* BPK DAN MAHKAMAH AGUNG
- PENDAPATAN DAN BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
- BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL
- BEBAN KERUGIAN PELEPASAN ASET
- LAPORAN HIBAH
- LAPORAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG



BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Jalan Medan Merdeka Utara No.9, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10110
Telepon: (021) 3843348, 3810350 (Hunting) Tromol Pos No. 1020

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Nomor : 120/BUA.4/PL.07/05/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Yudi Cahyadi, ST.
NIP : 197707162006041006
Jabatan : Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Biro Perlengkapan, BUA
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Rama Rahim, SE., MM., MBA.
NIP : 198105202009121002
Jabatan : Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Tahunan - Tahun Anggaran 2022 (Audited), dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited)		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) + (4)*
I	***POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)***	***29.539.185.345.962,00***	***996.338.778.809,00***	***30.535.524.124.771,00***
A	**ASET LANCAR**	**21.944.823.818,00**	**(2.279.801.233,00)**	**19.665.022.585,00**
1	Persediaan	21.944.823.818,00	(2.279.801.233,00)	19.665.022.585,00
B	**ASET TETAP**	**29.480.165.355.628,00**	**1.002.107.880.788,00**	**30.482.273.236.416,00**
1	Tanah	19.805.288.980.810,00	180.785.198.772,00	19.986.074.179.582,00
2	Peralatan dan Mesin	3.808.622.153.369,00	653.902.507.167,00	4.462.524.660.536,00
3	Gedung dan Bangunan	9.582.390.434.389,00	878.716.882.560,00	10.461.107.316.949,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	258.176.969.852,00	4.135.888.285,00	262.312.858.137,00
5	Aset Tetap dalam Renovasi	18.559.040.336,00	(15.407.880.936,00)	3.151.159.400,00
6	Aset Tetap Lainnya	49.445.018.506,00	(505.782.330,00)	48.939.236.176,00
7	Kontruksi Dalam Pengerjaan	617.396.614.572,00	38.907.037.335,00	656.303.651.907,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.659.713.856.206,00)	(738.425.970.065,00)	(5.398.139.826.271,00)
C	**ASET LAINNYA**	**37.075.166.516,00**	**(3.489.300.746,00)**	**33.585.865.770,00**
1	Aset Tidak Berwujud	65.269.905.024,00	1.435.942.890,00	66.705.847.914,00
2	Aset Lain-lain	159.843.755.689,00	(12.725.477.458,00)	147.118.278.231,00
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(188.038.494.197,00)	7.800.233.822,00	(180.238.260.375,00)
II	***BMN NON NERACA***	***6.026.902.093,00***	***4.473.803.182,00***	***10.500.705.275,00***
1	Ekstrakomptabel	22.429.659.750,00	6.212.929.032,00	28.642.588.782,00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(16.402.757.657,00)	(1.739.125.850,00)	(18.141.883.507,00)
III	***TOTAL GABUNGAN (I + II)***	***29.545.212.248.055,00***	***1.000.812.581.991,00***	***30.546.024.830.046,00***

Rincian terlampir.

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited), dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unit Akuntansi Pengguna Barang,	**Unit Akuntansi Pengguna Anggaran,**
Yudi Cahyadi, ST.	**Rama Rahim, SE., MM., MBA.**
NIP. 197707162006041006	NIP. 198105202009121002

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

LAMPIRAN II.b

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang

II. PERIODE	
1 2 /	2 2
<bulan/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 0 0 5 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - K P
   <bagian anggaran> <eselon1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama: MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	ASET BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)**	**29.539.185.345.962,00**	**29.539.185.345.962,00**	**29.539.185.345.962,00**
A	ASET LANCAR	**21.944.823.818,00**	**21.944.823.818,00**	**21.944.823.818,00**
A.1	Persediaan	21.944.823.818,00	21.944.823.818,00	21.944.823.818,00
B	ASET TETAP	**29.480.165.355.628,00**	**29.484.565.270.783,00**	**29.480.165.355.628,00**
B.1	Tanah	19.805.288.980.810,00	19.805.288.980.810,00	19.805.288.980.810,00
B.2	Peralatan dan Mesin	3.808.622.153.369,00	3.808.622.153.369,00	3.808.622.153.369,00
B.3	Gedung dan Bangunan	9.582.390.434.389,00	9.582.390.434.389,00	9.582.390.434.389,00
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	258.176.969.852,00	258.176.969.852,00	258.176.969.852,00
B.5	Aset Tetap Lainnya	68.004.058.842,00	72.403.973.997,00	68.004.058.842,00
B.6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	617.396.614.572,00	617.396.614.572,00	617.396.614.572,00
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.659.713.856.206,00)	(4.659.713.856.206,00)	(4.659.713.856.206,00)
C	ASET LAINNYA	**37.075.166.516,00**	**37.075.166.516,00**	**37.075.166.516,00**
C.1	Aset Tidak Berwujud	65.269.905.024,00	65.269.905.024,00	65.269.905.024,00
C.2	Aset Lain-lain	159.843.755.689,00	159.843.755.689,00	159.843.755.689,00
C.3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
C.4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(188.038.494.197,00)	(188.038.494.197,00)	(188.038.494.197,00)
II	**BMN NON NERACA**	**6.026.902.093,00**	**6.026.902.093,00**	**6.026.902.093,00**
1	Ekstrakomptabel	22.429.659.750,00	22.429.659.750,00	22.429.659.750,00
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(16.402.757.657,00)	(16.402.757.657,00)	(16.402.757.657,00)
III	**TOTAL (I+II)**	**29.545.212.248.055,00**	**29.545.212.248.055,00**	**29.545.212.248.055,00**

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
A	**ASET LANCAR**	**21.944.823.818,00**	-	-	**21.944.823.818,00**
A.1	Persediaan	21.944.823.818,00	-	-	21.944.823.818,00
B	**ASET TETAP**	**34.139.879.211.834,00**	-	-	**34.139.879.211.834,00**
B.1	Tanah	19.805.288.980.810,00	-	-	19.805.288.980.810,00
B.2	Peralatan dan Mesin	3.808.622.153.369,00	-	-	3.808.622.153.369,00
B.3	Gedung dan Bangunan	9.582.390.434.389,00	-	-	9.582.390.434.389,00
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	258.176.969.852,00	-	-	258.176.969.852,00
B.5	Aset Tetap Lainnya	68.004.058.842,00	-	-	68.004.058.842,00
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	617.396.614.572,00	-	-	617.396.614.572,00
C	**ASET LAINNYA**	**225.113.660.713,00**	-	-	**225.113.660.713,00**
C.1	Aset Tidak Berwujud	65.269.905.024,00	-	-	65.269.905.024,00
C.2	Aset Lain-lain	159.843.755.689,00	-	-	159.843.755.689,00
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**34.386.937.696.365,00**	-	-	**34.386.937.696.365,00**
E	**Ekstrakomptabel**	22.429.659.750,00	-	-	22.429.659.750,00
F	**TOTAL (D+E)**	**34.409.367.356.115,00**	-	-	**34.409.367.356.115,00**

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN		II. PERIODE
keuangan	barang	12 / 22
		<bulan/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 00 - 0000 - 000000 - 000 - KP
   <bagian anggaran> <eselon1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama: MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	Belanja Modal	Belanja Non Modal			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)
A	**ASET LANCAR**	**0**	**96.055.278.115**	**0**	**0**	**96.055.278.115**
A.1	Persediaan	0	96.055.278.115	0	0	
B	**ASET TETAP**	**1.581.993.318.226**	**3.111.294.014**	**0**	**0**	**1.585.104.612.240**
B.1	Tanah	64.800.555.731	0	0	0	
B.2	Peralatan dan Mesin	509.839.989.662	1.952.240.893	0	0	
B.3	Gedung dan Bangunan	46.988.993.326	131.896.758	0	0	
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.151.113.480	0	0	0	
B.5	Aset Tetap Lainnya	5.918.030.063	973.197.250	0	0	
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	952.294.635.964	53.959.113	0	0	
C	**ASET LAINNYA**	**1.321.681.184**	**0**	**0**	**0**	**1.321.681.184**
C.1	Aset Tidak Berwujud	1.321.681.184	0	0	0	
C.2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	
D	**SUB JUMLAH (A+B+C)**	**1.583.314.999.410**	**99.166.572.129**	**0**	**0**	**1.682.481.571.539**
E	**Ekstrakomptabel**	0	0	0	0	0
F	**TOTAL (D+E)**	**1.583.314.999.410**	**99.166.572.129**	**0**	**0**	**1.682.481.571.539**

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) adalah sebesar Rp12.179.667.199,00

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PADA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA (K/L)

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN		II. PERIODE
keuangan	barang	12 / 22 <bulan/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 00 - 0000 - 000000 - 000 - KP
   <bagian anggaran> <eselon1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama: MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL. SP2D	JENIS BLJ	URAIAN JENIS BELANJA	RUPIAH SPM	TOTAL RUPIAH SPP	SELISIH
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL. SP2D	JENIS BLJ	URAIAN JENIS BELANJA	RUPIAH SPM	TOTAL RUPIAH SPP	SELISIH
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL. SP2D	JENIS BLJ	URAIAN JENIS BELANJA	RUPIAH SPM	KETERANGAN
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



LAPORAN REALISASI ANGGARAN *(FACE)*

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_kl_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	78,474,597,000	105,590,154,119	27,115,557,119	135	69,800,945,000	96,521,922,988	(26,720,977,988)	138
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	78,474,597,000	105,590,154,119	27,115,557,119	135	69,800,945,000	96,521,922,988	(26,720,977,988)	138
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	7,221,624,128,000	7,048,276,739,941	173,347,388,059	98	6,920,337,809,000	6,780,138,260,234	140,199,548,766	98
	BELANJA BARANG	2,678,566,650,000	2,634,148,576,563	44,418,073,437	98	2,206,573,688,000	2,136,635,079,145	69,938,608,855	97
	BELANJA MODAL	1,614,279,207,000	1,596,501,752,127	17,777,454,873	99	1,600,979,128,000	1,592,533,967,690	8,445,160,310	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM

lap_lra_face_kl_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	11,514,469,985,000	11,278,927,068,631	235,542,916,369	98	10,727,890,625,000	10,509,307,307,069	218,583,317,931	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

LRA PENDAPATAN MENURUT AKUN, LRA PENDAPATAN MENURUT ORGANISASI, LRA PENDAPATAN MENURUT ORGANISASI AKUN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.1
Tanggal : 10/05/23 3:43 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,818,000	0	18,818,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	57,340,000	1,495,799,657	0	1,495,799,657	2,608.65
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7,838,000	2,506,979,027	0	2,506,979,027	31,984.93
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,205,337,000	8,167,908,143	9,837,628	8,158,070,515	113.22
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	7,270,515,000	12,189,504,827	9,837,628	12,179,667,199	167.52
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	236,670,000	172,160,000	0	172,160,000	72.74
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2,803,121,000	2,875,580,000	0	2,875,580,000	102.58
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23,170,714,000	24,898,990,000	0	24,898,990,000	107.46
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	44,741,442,000	51,894,595,893	7,320,000	51,887,275,893	115.97
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	70,951,947,000	79,841,325,893	7,320,000	79,834,005,893	112.52
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	159,516,500	0	159,516,500	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	16,575,000	0	16,575,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	110,693,622	0	110,693,622	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	286,785,122	0	286,785,122	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	153,140,000	4,448,754,045	0	4,448,754,045	2,905.02
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	153,140,000	4,448,754,045	0	4,448,754,045	2,905.02
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	468,000	527,168,234	0	527,168,234	112,642.79
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8,573,000	4,847,014,441	0	4,847,014,441	56,538.14

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	89,953,000	3,179,744,552	0	3,179,744,552	3,534.9
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	281,795,607	0	281,795,607	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	5,219,026	0	5,219,026	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	98,995,000	8,840,941,860	0	8,840,941,860	8,930.7
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	78,474,597,000	105,607,311,747	17,157,628	105,590,154,119	134.55
	JUMLAH PENDAPATAN	78,474,597,000	105,607,311,747	17,157,628	105,590,154,119	134.55

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**					
005010100KD	BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA					
097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	32,163,000	57,068,002	0	57,068,002	177.43
097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	85,699,000	186,883,210	0	186,883,210	218.07
097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	57,811,000	172,956,688	0	172,956,688	299.18
097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	10,083,000	222,750	0	222,750	2.21
400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	0	4,943,276	0	4,943,276	0
400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	0	116,071,874	0	116,071,874	0
400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	3,179,000	1,161,800	0	1,161,800	36.55
400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	103,636,000	0	0	0	0
400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	1,407,000	19,127,564	0	19,127,564	1359.46
400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	27,621,000	3,961,822	0	3,961,822	14.34
400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	795,000	1,192,077	0	1,192,077	149.95
401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	29,816,000	23,710,612	0	23,710,612	79.52
526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	0	44,482,657	0	44,482,657	0
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	942,000	11,309,691	0	11,309,691	1200.6
663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	20,885,000	24,885,000	0	24,885,000	119.15
663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	3,600,000	11,539,877	0	11,539,877	320.55
663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	0	12,353	0	12,353	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010100KD BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA	377,637,000	679,529,253	0	679,529,253	179.94
005010100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	637,603,000	3,745,304,363	0	3,745,304,363	587.4
	JUMLAH PENDAPATAN 005010100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	637,603,000	3,745,304,363	0	3,745,304,363	587.4
005010200KD	BA(005) ES1(01) JAWA BARAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	109,090,000	162,290,706	0	162,290,706	148.77
097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	20,129,000	37,323,046	0	37,323,046	185.42
097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	7,631,000	12,157,865	0	12,157,865	159.32
097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	10,419,000	139,423,950	0	139,423,950	1338.17
097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	12,008,000	19,090,900	0	19,090,900	158.98
097556	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	12,560,000	11,701,700	0	11,701,700	93.17
097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	16,106,000	18,320,416	0	18,320,416	113.75
097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	28,876,000	4,824,402	0	4,824,402	16.71
097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	27,312,000	42,641,917	0	42,641,917	156.13
097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	2,131,000	3,055,147	0	3,055,147	143.37
097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	8,308,000	25,345,847	0	25,345,847	305.08
097652	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	23,665,000	31,434,586	0	31,434,586	132.83
097666	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	23,879,000	37,680,750	0	37,680,750	157.8
097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	3,300,000	21,342,427	0	21,342,427	646.74
097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	7,033,000	37,557,431	0	37,557,431	534.02
097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	12,517,000	20,755,150	0	20,755,150	165.82
097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	8,337,000	13,587,397	0	13,587,397	162.98
308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	71,224,000	105,195,897	0	105,195,897	147.7
400409	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	10,189,000	8,693,695	0	8,693,695	85.32
400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	4,849,000	1,753,500	0	1,753,500	36.16
400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	23,480,000	10,620,300	0	10,620,300	45.23
400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	0	53,991,722	0	53,991,722	0
400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	0	74,278,429	0	74,278,429	0
400690	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	0	390,117	0	390,117	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	2,323,000	7,265,113	0	7,265,113	312.75
400710	PENGADILAN AGAMA GARUT	0	19,892,388	0	19,892,388	0
400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	480,000	9,393,357	0	9,393,357	1956.95
400750	PENGADILAN AGAMA CIREBON	6,426,000	6,426,030	0	6,426,030	100
400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	1,926,000	1,926,000	0	1,926,000	100
400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	2,616,000	13,881,000	0	13,881,000	530.62
400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	0	35,150	0	35,150	0
400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	0	1,000,080	0	1,000,080	0
400848	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	450,000	2,000,411	0	2,000,411	444.54
400854	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	3,874,000	6,770,648	0	6,770,648	174.77
401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	0	598,520	0	598,520	0
401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	1,443,000	218,885,543	0	218,885,543	15168.78
401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	35,000	9,290,000	0	9,290,000	26542.86
402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	869,000	13,524,000	0	13,524,000	1556.27
402995	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	327,000	9,671,046	0	9,671,046	2957.51
403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	0	207,471	0	207,471	0
477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	2,079,000	14,173,600	0	14,173,600	681.75
531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	0	74,192,200	0	74,192,200	0
604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	1,427,000	2,709,897	0	2,709,897	189.9
613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	34,497,000	38,147,629	0	38,147,629	110.58
614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	1,560,000	769,580	0	769,580	49.33
652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	13,135,000	29,175,598	0	29,175,598	222.12
682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	0	9,267,572	0	9,267,572	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010200KD BA(005) ES1(01) JAWA BARAT	516,510,000	1,382,660,130	0	1,382,660,130	267.69

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005010300KD	BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH					
097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	52,858,000	57,777,372	0	57,777,372	109.31
097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	15,300,000	49,072,418	0	49,072,418	320.73
097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	15,810,000	19,539,557	0	19,539,557	123.59
097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	1,256,000	837,144	0	837,144	66.65
097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	6,466,000	7,019,956	0	7,019,956	108.57
097762	PENGADILAN NEGERI PATI	9,811,000	9,879,926	0	9,879,926	100.7
097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	578,000	2,383,898	0	2,383,898	412.44
097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	2,134,000	9,738,019	0	9,738,019	456.33
097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	17,259,000	12,277,849	0	12,277,849	71.14
097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	2,720,000	4,149,762	0	4,149,762	152.56
097819	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	7,511,000	10,754,667	0	10,754,667	143.19
097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	11,566,000	6,757,860	0	6,757,860	58.43
097830	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	7,397,000	18,805,999	0	18,805,999	254.24
097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	3,476,000	4,589,960	0	4,589,960	132.05
097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	6,390,000	7,195,221	0	7,195,221	112.6
097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	1,606,000	28,290,600	0	28,290,600	1761.56
097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	2,408,000	1,719,764	0	1,719,764	71.42
097886	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	5,354,000	5,205,000	0	5,205,000	97.22
097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	3,269,000	6,791,898	0	6,791,898	207.77
097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	7,509,000	3,009,000	0	3,009,000	40.07
097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	8,569,000	5,174,206	0	5,174,206	60.38
097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	6,382,000	192,049,808	0	192,049,808	3009.24
097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	4,165,000	17,717,100	0	17,717,100	425.38

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	9,081,000	8,240,000	0	8,240,000	90.74
097954	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	2,528,000	7,754,868	0	7,754,868	306.76
097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	4,085,000	10,486,243	0	10,486,243	256.7
097975	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	2,700,000	5,833,357	0	5,833,357	216.05
097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	568,000	5,673,981	0	5,673,981	998.94
097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	15,312,000	40,973,151	0	40,973,151	267.59
098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	10,935,000	27,468,683	0	27,468,683	251.2
098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	14,360,000	56,730,199	0	56,730,199	395.06
098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	7,492,000	10,326,878	0	10,326,878	137.84
098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	1,457,000	82,774,213	0	82,774,213	5681.14
098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	12,641,000	6,254,160	0	6,254,160	49.48
400565	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	16,405,000	369,861,872	0	369,861,872	2254.57
400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	1,028,000	4,111,079	0	4,111,079	399.91
400860	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	3,874,000	0	0	0	0
400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	0	1,500,000	0	1,500,000	0
400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	0	2,900,156	0	2,900,156	0
400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	0	4,162,188	0	4,162,188	0
400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	0	28,000,000	0	28,000,000	0
400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	0	6,789,678	0	6,789,678	0
400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	173,000	2,471,700	0	2,471,700	1428.73
400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	0	57,200,000	0	57,200,000	0
400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	1,756,000	2,201,056	0	2,201,056	125.34
400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	0	4,503,303	0	4,503,303	0
400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	0	1,888,920	0	1,888,920	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	0	329,808	0	329,808	0
401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	0	6,666,666	0	6,666,666	0
401024	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	0	555,264	0	555,264	0
401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	0	123,392	0	123,392	0
401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	0	58	0	58	0
401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	0	79	0	79	0
401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	0	252,000	0	252,000	0
401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	0	559,944	0	559,944	0
401086	PENGADILAN AGAMA CILACAP	0	1,943,770	0	1,943,770	0
401092	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	0	914,431	0	914,431	0
401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	0	1,200,000	0	1,200,000	0
401121	PENGADILAN AGAMA KLATEN	0	3,367,135	0	3,367,135	0
401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	0	53	0	53	0
401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	0	2,281,176	0	2,281,176	0
401152	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	0	338	0	338	0
401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	0	462,384	0	462,384	0
401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	0	175,000	0	175,000	0
402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	0	23,067,657	0	23,067,657	0
402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	0	41,916,200	0	41,916,200	0
403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	25,140,000	25,140,000	0	25,140,000	100
531830	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	0	8,471,664	0	8,471,664	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010300KD BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH	329,329,000	1,346,269,688	0	1,346,269,688	408.79
005010400KD	BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098057	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	0	20,321,050	0	20,321,050	0
098061	PENGADILAN NEGERI WATES	28,256,000	20,234,727	0	20,234,727	71.61
098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	7,098,000	18,514,340	0	18,514,340	260.84
098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	21,020,000	28,815,241	0	28,815,241	137.08
400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	8,490,000	8,325,440	0	8,325,440	98.06
400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	31,431,000	52,595,710	0	52,595,710	167.34
401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	4,743,000	15,969,807	0	15,969,807	336.7
401200	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	2,306,000	2,936,244	0	2,936,244	127.33
401219	PENGADILAN AGAMA WATES	248,000	247,500	0	247,500	99.8
401225	PENGADILAN AGAMA BANTUL	100,000	15,999,999	0	15,999,999	16000
401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	472,000	3,472,851	0	3,472,851	735.77
547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	19,385,000	91,470,843	0	91,470,843	471.86
578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	0	10,169,000	0	10,169,000	0
663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	0	11,022,011	0	11,022,011	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010400KD BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA	123,549,000	300,094,763	0	300,094,763	242.9
005010500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya					
098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	23,072,000	8,213,451	0	8,213,451	35.6
098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	37,569,000	44,916,777	0	44,916,777	119.56
098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	7,940,000	10,121,576	0	10,121,576	127.48
098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	10,462,000	7,239,488	0	7,239,488	69.2
098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	5,285,000	18,530,373	0	18,530,373	350.62
098150	PENGADILAN NEGERI GRESIK	13,224,000	13,162,140	0	13,162,140	99.53
098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	1,008,000	874,089	0	874,089	86.72

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	1,427,000	5,714,800	0	5,714,800	400.48
098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	8,548,000	12,000,185	0	12,000,185	140.39
098192	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	7,200,000	7,178,000	0	7,178,000	99.69
098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	18,236,000	22,262,444	0	22,262,444	122.08
098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	26,677,000	30,391,228	0	30,391,228	113.92
098221	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	3,339,000	3,060,552	0	3,060,552	91.66
098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	22,833,000	25,489,800	0	25,489,800	111.64
098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	15,141,000	17,582,774	0	17,582,774	116.13
098256	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	4,500,000	4,472,869	0	4,472,869	99.4
098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	7,106,000	104,859,115	0	104,859,115	1475.64
098277	PENGADILAN NEGERI BLITAR	14,944,000	16,460,510	0	16,460,510	110.15
098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	1,219,000	1,668,970	0	1,668,970	136.91
098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	4,460,000	13,302,379	0	13,302,379	298.26
098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	6,139,000	9,749,591	0	9,749,591	158.81
098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	2,662,000	3,088,144	0	3,088,144	116.01
098324	PENGADILAN NEGERI BANGIL	5,308,000	5,218,259	0	5,218,259	98.31
098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	3,142,000	3,310,002	0	3,310,002	105.35
098345	PENGADILAN NEGERI MADIUN	10,995,000	2,087,832	0	2,087,832	18.99
098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	9,857,000	20,626,138	0	20,626,138	209.25
098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	8,152,000	8,144,635	0	8,144,635	99.91
098370	PENGADILAN NEGERI NGAWI	1,316,000	1,740,233	0	1,740,233	132.24
098387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	3,396,000	7,378,900	0	7,378,900	217.28
098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	15,141,000	1,405,148	0	1,405,148	9.28
098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	9,152,000	8,593,284	0	8,593,284	93.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	3,176,000	1,481,421	0	1,481,421	46.64
098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	7,845,000	13,676,596	0	13,676,596	174.34
308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	48,342,000	107,699,806	0	107,699,806	222.79
400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	11,923,000	10,978,452	0	10,978,452	92.08
400596	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	7,998,000	6,321,250	0	6,321,250	79.04
401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	1,286,000	3,456,000	0	3,456,000	268.74
401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	5,400,000	4,236,999	0	4,236,999	78.46
401262	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	0	3,858,346	0	3,858,346	0
401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	746,000	1,883,490	0	1,883,490	252.48
401287	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	1,244,000	9,287,443	0	9,287,443	746.58
401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	10,182,000	803,624	0	803,624	7.89
401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	581,000	371,250	0	371,250	63.9
401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	5,363,000	6,879,021	0	6,879,021	128.27
401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	1,346,000	1,574,300	0	1,574,300	116.96
401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	962,000	0	0	0	0
401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	2,299,000	5,053,750	0	5,053,750	219.82
401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	896,000	1,453,200	0	1,453,200	162.19
401375	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	2,103,000	62,000	0	62,000	2.95
401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	12,022,000	48,682,081	0	48,682,081	404.94
401390	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	1,782,000	814,670	0	814,670	45.72
	JUMLAH PENDAPATAN 005010500KD Pengadilan Tinggi Surabaya	434,946,000	667,417,385	0	667,417,385	153.45
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	2,315,000	344,904	0	344,904	14.9
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	2,315,000	344,904	0	344,904	14.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005010500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya					
401410	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	899,000	694,730	0	694,730	77.28
401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	2,520,000	1,026,432	0	1,026,432	40.73
401432	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	1,023,000	0	0	0	0
401463	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	0	74	0	74	0
401472	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	100
401488	PENGADILAN AGAMA MADIUN	306,000	306,000	0	306,000	100
401508	PENGADILAN AGAMA NGAWI	0	135,262	0	135,262	0
401520	PENGADILAN AGAMA PACITAN	686,000	4,757,976	0	4,757,976	693.58
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	180,000	0	0	0	0
401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	760,000	1,368,432	0	1,368,432	180.06
401560	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000	200
401576	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	495,000	415,000	0	415,000	83.84
403030	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	102,000	900,712	0	900,712	883.05
403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	570,000	3,799,999	0	3,799,999	666.67
450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	0	445,530	0	445,530	0
526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	3,428,000	2,877,500	0	2,877,500	83.94
548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	8,584,000	5,669,003	0	5,669,003	66.04
604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	16,205,000	0	0	0	0
626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	0	7,630,960	0	7,630,960	0
663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	0	1,265,636	0	1,265,636	0
663321	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	0	50,000	0	50,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010500KD Pengadilan Tinggi Surabaya	40,258,000	37,043,246	0	37,043,246	92.01
005010600KD	BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	73,509,000	948,344,165	0	948,344,165	1290.11
098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	9,563,000	296,906,500	0	296,906,500	3104.74
098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	10,859,000	10,887,534	0	10,887,534	100.26
098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	4,796,000	9,704,326	0	9,704,326	202.34
098476	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	8,621,000	5,893,120	0	5,893,120	68.36
098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	7,870,000	180,701,775	408,672	180,293,103	2290.89
098497	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	7,674,000	11,461,847	0	11,461,847	149.36
098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	9,142,000	15,939,000	0	15,939,000	174.35
098519	PENGADILAN NEGERI LANGSA	7,822,000	7,927,892	0	7,927,892	101.35
098523	PENGADILAN NEGERI IDI	4,272,000	11,322,100	0	11,322,100	265.03
098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	15,652,000	15,969,400	0	15,969,400	102.03
098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	10,520,000	14,225,036	0	14,225,036	135.22
098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	21,625,000	18,064,624	0	18,064,624	83.54
098565	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	17,474,000	21,826,113	0	21,826,113	124.91
098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	14,465,000	14,446,000	0	14,446,000	99.87
098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	13,708,000	39,926,326	0	39,926,326	291.26
098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	9,420,000	12,485,977	0	12,485,977	132.55
098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	7,268,000	10,112,256	0	10,112,256	139.13
400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	7,147,000	56,551,167	0	56,551,167	791.26
401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	23,009,000	380,041,980	0	380,041,980	1651.71
401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	2,700,000	7,200,000	0	7,200,000	266.67
401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	3,274,000	4,839,600	0	4,839,600	147.82
401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	1,338,000	18,779,600	0	18,779,600	1403.56
401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	1,198,000	2,286,902	0	2,286,902	190.89

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	100,000	0	0	0	0
401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	2,385,000	883,500	0	883,500	37.04
401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	4,149,000	3,174,000	0	3,174,000	76.5
401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	842,000	0	0	0	0
401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	1,907,000	2,035,420	0	2,035,420	106.73
401689	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	3,419,000	3,841,992	0	3,841,992	112.37
401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	2,158,000	2,613,600	0	2,613,600	121.11
401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	1,605,000	2,288,388	0	2,288,388	142.58
401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	1,004,000	3,027,030	0	3,027,030	301.5
401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	880,000	418,572	0	418,572	47.57
401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	563,000	583,226	0	583,226	103.59
401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	1,500,000	2,750,000	0	2,750,000	183.33
401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	431,000	1,293,600	0	1,293,600	300.14
401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	270,000	0	0	0	0
401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	0	273,736	0	273,736	0
401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	78,000	53	0	53	0.07
401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	90,953,000	90,952,997	0	90,952,997	100
401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	0	185,142	0	185,142	0
402607	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	132,000	2,978,713	0	2,978,713	2256.6
578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	12,657,000	14,737,118	0	14,737,118	116.43
663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	1,630,000	1,629,500	0	1,629,500	99.97
673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	739,000	70,296	0	70,296	9.51
	JUMLAH PENDAPATAN 005010600KD BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	420,328,000	2,249,580,123	408,672	2,249,171,451	535.2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005010700KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA					
098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	84,080,000	86,478,613	0	86,478,613	102.85
098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	51,370,000	63,643,720	0	63,643,720	123.89
098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	17,728,000	25,511,512	0	25,511,512	143.91
098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	6,168,000	1,435,104	0	1,435,104	23.27
098654	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	15,308,000	15,306,215	0	15,306,215	99.99
098661	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	17,326,000	9,823,569	0	9,823,569	56.7
098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	5,454,000	2,541,607	0	2,541,607	46.6
098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	2,481,000	13,616,542	0	13,616,542	548.83
098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	3,132,000	4,165,459	0	4,165,459	133
098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	10,738,000	13,144,153	0	13,144,153	122.41
098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	1,606,000	2,094,032	0	2,094,032	130.39
098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	9,209,000	9,638,776	0	9,638,776	104.67
098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	3,681,000	18,200,422	0	18,200,422	494.44
108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	8,644,000	8,696,317	0	8,696,317	100.61
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	11,647,000	18,605,104	0	18,605,104	159.74
400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	21,708,000	21,716,640	0	21,716,640	100.04
400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	18,240,000	109,971,943	0	109,971,943	602.92
401777	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	22,116,000	121,892,050	0	121,892,050	551.15
401783	PENGADILAN AGAMA BINJAI	600,000	0	0	0	0
401792	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	829,000	1,228,069	0	1,228,069	148.14
401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	1,915,000	7,747,500	0	7,747,500	404.57
401812	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	923,000	780,071	0	780,071	84.51
401834	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	360,000	3,950,000	0	3,950,000	1097.22

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 14
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401840	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	1,935,000	1,995,465	0	1,995,465	103.12
401859	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	533,000	2,988,700	0	2,988,700	560.73
401865	PENGADILAN AGAMA BALIGE	1,311,000	10,529,883	0	10,529,883	803.19
401871	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	1,430,000	1,717,465	0	1,717,465	120.1
401896	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	4,851,000	6,259,850	0	6,259,850	129.04
401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	627,000	34,949	0	34,949	5.57
401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	0	79,438	0	79,438	0
401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	465,000	0	0	0	0
403061	PENGADILAN AGAMA KISARAN	2,363,000	685,608	0	685,608	29.01
403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	991,000	7,760,031	0	7,760,031	783.05
403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	0	487,916	0	487,916	0
477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	7,702,000	6,174,800	0	6,174,800	80.17
526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	12,996,000	13,832,186	0	13,832,186	106.43
526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	18,016,000	10,650,660	0	10,650,660	59.12
547682	PENGADILAN AGAMA STABAT	0	405,000	0	405,000	0
604744	PENGADILAN AGAMA PANDAN	1,350,000	1,271,008	0	1,271,008	94.15
631978	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	0	60,424	0	60,424	0
631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	0	119,157	0	119,157	0
663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	5,337,000	8,073,111	0	8,073,111	151.27
672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	0	427,556	0	427,556	0
682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	1,333,000	1,239,584	0	1,239,584	92.99
	JUMLAH PENDAPATAN 005010700KD BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA	376,503,000	634,980,209	0	634,980,209	168.65
005010800KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
098743	PENGADILAN TINGGI PADANG	36,448,000	36,837,408	0	36,837,408	101.07
098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	11,407,000	23,440,072	0	23,440,072	205.49
098764	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	7,874,000	26,869,404	0	26,869,404	341.24
098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	11,378,000	8,720,281	0	8,720,281	76.64
098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	10,086,000	18,780,000	0	18,780,000	186.2
098792	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	10,518,000	10,814,980	0	10,814,980	102.82
098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	2,418,000	6,214,452	0	6,214,452	257.01
098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	13,660,000	21,077,338	0	21,077,338	154.3
098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	12,942,000	11,438,872	0	11,438,872	88.39
098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	11,741,000	30,065,574	0	30,065,574	256.07
400188	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	6,476,000	21,422,400	0	21,422,400	330.8
400333	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	3,696,000	6,557,998	0	6,557,998	177.44
400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	8,126,000	24,841,019	0	24,841,019	305.7
400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	14,000,000	24,311,000	0	24,311,000	173.65
400461	PENGADILAN NEGERI MUARO	1,796,000	8,399,900	0	8,399,900	467.7
401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	16,042,000	6,808,194	0	6,808,194	42.44
401916	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	0	4,015,568	0	4,015,568	0
401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	100
401947	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	0	138,417	0	138,417	0
401953	PENGADILAN AGAMA PADANG	0	497,550	0	497,550	0
401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	1,857,000	1,591,368	0	1,591,368	85.7
401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	0	3,283,632	0	3,283,632	0
401990	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	2,327,000	2,215,200	0	2,215,200	95.2
402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	581,000	835,420	0	835,420	143.79

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	384,000	6,100,100	0	6,100,100	1588.57
402029	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	0	74,745	0	74,745	0
402035	PENGADILAN AGAMA TALU	299,000	272,066	0	272,066	90.99
402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	159,000	0	0	0	0
402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	0	240	0	240	0
402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	1,688,000	1,687,956	0	1,687,956	100
477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	11,778,000	9,510,900	0	9,510,900	80.75
531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	20,908,000	22,493,020	0	22,493,020	107.58
663204	PENGADILAN MILITER I - 03 DI PADANG	0	6,767,849	0	6,767,849	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010800KD BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT	219,849,000	347,342,923	0	347,342,923	157.99
005010900KD	BA(005) ES1(01) RIAU					
098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	15,860,000	21,866,556	0	21,866,556	137.87
098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	20,296,000	45,639,274	0	45,639,274	224.87
098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	0	5,923,399	0	5,923,399	0
098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	13,213,000	10,696,500	0	10,696,500	80.95
400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	0	13,253,600	0	13,253,600	0
400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	11,256,000	12,484,671	0	12,484,671	110.92
400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	34,766,000	27,071,345	0	27,071,345	77.87
401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	0	958,384	0	958,384	0
402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	0	3,411,819	0	3,411,819	0
402081	PENGADILAN AGAMA RENGAT	0	1,902,880	0	1,902,880	0
402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	0	3,579,628	0	3,579,628	0
402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	0	3,620,430	0	3,620,430	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 17
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402117	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	0	1,488,000	0	1,488,000	0
402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	0	3,257,308	0	3,257,308	0
402622	PENGADILAN AGAMA DUMAI	0	1,138,483	0	1,138,483	0
402970	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	0	70,170,934	0	70,170,934	0
477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	27,000,000	23,738,907	0	23,738,907	87.92
477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	22,522,000	30,097,578	0	30,097,578	133.64
477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	0	13,364,476	0	13,364,476	0
578822	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	25,392,000	16,341,220	0	16,341,220	64.36
631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	0	37,610,500	0	37,610,500	0
632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	0	2,643,564	0	2,643,564	0
662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	0	20,570,044	0	20,570,044	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005010900KD BA(005) ES1(01) RIAU	170,305,000	370,829,500	0	370,829,500	217.74
005011000KD	BA(005) ES1(01) JAMBI					
098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	5,795,000	12,803,884	0	12,803,884	220.95
098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	11,327,000	15,336,624	0	15,336,624	135.4
098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	5,635,000	7,463,360	0	7,463,360	132.45
098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	2,250,000	3,350,000	0	3,350,000	148.89
400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	4,140,000	21,400,000	0	21,400,000	516.91
400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	14,000,000	20,407,156	0	20,407,156	145.77
400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	30,410,000	143,448,232	0	143,448,232	471.71
402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	580,000	1,160,350	0	1,160,350	200.06
402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	550,000	1,777,902	0	1,777,902	323.25
402220	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	0	302,700	0	302,700	0
403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	0	100,900	0	100,900	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 18
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	4,028,000	7,525,822	0	7,525,822	186.84
477374	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	20,800,000	21,139,000	0	21,139,000	101.63
477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	2,427,000	0	0	0	0
547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	11,879,000	27,579,528	0	27,579,528	232.17
578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	8,094,000	8,262,870	0	8,262,870	102.09
632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	370,000	50,450	0	50,450	13.64
652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	303,000	1,525,584	0	1,525,584	503.49
652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	385,000	6	0	6	0
663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	525,000	671,200	0	671,200	127.85
	JUMLAH PENDAPATAN 005011000KD BA(005) ES1(01) JAMBI	123,498,000	294,305,568	0	294,305,568	238.31
005011100KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN					
098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	0	49,223,546	0	49,223,546	0
098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	49,382,000	12,877,792	0	12,877,792	26.08
098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	14,234,000	25,447,610	0	25,447,610	178.78
098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	0	16,148,768	0	16,148,768	0
098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	3,185,000	11,526,060	0	11,526,060	361.89
098984	PENGADILAN NEGERI LAHAT	0	17,399,168	0	17,399,168	0
098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	11,795,000	9,897,685	0	9,897,685	83.91
099003	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	27,730,000	32,053,924	0	32,053,924	115.59
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	0	157	0	157	0
401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	0	103,950	0	103,950	0
401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	0	94,885	0	94,885	0
401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	0	2	0	2	0
402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	10,456,000	5,462,863	0	5,462,863	52.25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	0	11,308,521	0	11,308,521	0
402251	PENGADILAN AGAMA LAHAT	0	298,662	0	298,662	0
402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	0	1,113,750	0	1,113,750	0
402273	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	365,000	492,454	0	492,454	134.92
402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	1,965,000	54,927	0	54,927	2.8
402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	800,000	328,292	0	328,292	41.04
402638	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	0	950,400	0	950,400	0
526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	12,960,000	30,382,746	0	30,382,746	234.43
663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	0	370,100	0	370,100	0
672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	2,382,000	53	0	53	0
672969	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	0	709,980	0	709,980	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011100KD BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN	135,254,000	226,246,295	0	226,246,295	167.28
005011200KD	BA(005) ES1(01) LAMPUNG					
099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	23,747,000	62,478,621	0	62,478,621	263.1
099045	PENGADILAN NEGERI METRO	15,589,000	15,011,935	0	15,011,935	96.3
099052	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	9,394,000	8,791,069	0	8,791,069	93.58
400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	45,132,000	46,503,070	0	46,503,070	103.04
400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	6,564,000	20,815,693	0	20,815,693	317.12
401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	2,256,000	2,865,630	0	2,865,630	127.02
401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	0	54,996	0	54,996	0
401952	PENGADILAN AGAMA MESUJI	0	168	0	168	0
401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	522,000	103,727	0	103,727	19.87
402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	257,000	3,010,856	0	3,010,856	1171.54

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 20
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	1,968,000	2,152,810	0	2,152,810	109.39
402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	0	168,053	0	168,053	0
402355	PENGADILAN AGAMA METRO	1,312,000	54	0	54	0
402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	0	34,558	0	34,558	0
477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	3,426,000	5,812,642	0	5,812,642	169.66
547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	20,425,000	70,715,577	0	70,715,577	346.22
559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	9,827,000	8,026,391	0	8,026,391	81.68
614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	1,104,000	1,152,000	0	1,152,000	104.35
614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	0	58	0	58	0
614883	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	10,049,000	8,507,822	0	8,507,822	84.66
652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	3,556,000	6,870,268	0	6,870,268	193.2
652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	717,000	727,176	0	727,176	101.42
663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	10,663,000	32,914,266	0	32,914,266	308.68
663030	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	20,505,000	15,589,032	0	15,589,032	76.03
663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	3,661,000	4,123,742	0	4,123,742	112.64
663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	7,358,000	8,492,669	0	8,492,669	115.42
	JUMLAH PENDAPATAN 005011200KD BA(005) ES1(01) LAMPUNG	198,032,000	324,922,883	0	324,922,883	164.08
005011300KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	9,086,000	21,638,653	0	21,638,653	238.15
099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	5,988,000	16,142,725	0	16,142,725	269.58
099087	PENGADILAN NEGERI SINTANG	12,648,000	14,232,671	0	14,232,671	112.53
099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	3,198,000	5,727,135	0	5,727,135	179.08
099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	4,693,000	14,086,346	0	14,086,346	300.16
099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	14,790,000	19,779,720	0	19,779,720	133.74

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	4,985,000	4,630,000	0	4,630,000	92.88
400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	38,297,000	210,717,333	0	210,717,333	550.22
401960	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	0	1,376,400	0	1,376,400	0
402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	4,717,000	6,386,556	0	6,386,556	135.39
402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	3,050,000	6,180,460	0	6,180,460	202.64
402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	852,000	1,021,922	0	1,021,922	119.94
402392	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	5,499,000	16,681,180	0	16,681,180	303.35
402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	2,772,000	2,771,508	0	2,771,508	99.98
402412	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	4,861,000	5,465,200	0	5,465,200	112.43
402650	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	25,244,000	26,380,708	0	26,380,708	104.5
402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	3,813,000	693,200	0	693,200	18.18
531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	0	9,770,362	0	9,770,362	0
632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	100,000	0	0	0	0
670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	5,336,000	11,490,422	0	11,490,422	215.34
670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	3,727,000	16,135,500	0	16,135,500	432.94
681450	PENGADILAN NEGERI NGABANG	0	3,854,449	0	3,854,449	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011300KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	153,656,000	415,162,450	0	415,162,450	270.19
005011400KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH					
099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	11,945,000	15,813,614	0	15,813,614	132.39
099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	17,314,000	17,781,113	0	17,781,113	102.7
099141	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	9,960,000	32,436,080	0	32,436,080	325.66
099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	6,375,000	6,509,652	0	6,509,652	102.11
099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	11,836,000	12,097,364	0	12,097,364	102.21

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	16,126,000	16,558,652	0	16,558,652	102.68
400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	35,311,000	26,672,653	0	26,672,653	75.54
401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	0	74,761	0	74,761	0
401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	0	657,061	0	657,061	0
402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	452,000	654,144	0	654,144	144.72
402437	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	381,000	542,850	0	542,850	142.48
402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	463,000	11,257,910	0	11,257,910	2431.51
402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	1,592,000	3,607,780	0	3,607,780	226.62
402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	889,000	2,780,260	0	2,780,260	312.74
402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	11,439,000	6,372,984	0	6,372,984	55.71
578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	13,916,000	15,542,698	0	15,542,698	111.69
670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	0	2,954,160	0	2,954,160	0
672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	600,000	675,221	0	675,221	112.54
	JUMLAH PENDAPATAN 005011400KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH	138,599,000	172,988,957	0	172,988,957	124.81
005011500KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN					
099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	18,204,000	26,931,158	0	26,931,158	147.94
099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	34,522,000	22,829,974	0	22,829,974	66.13
099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	11,555,000	10,926,367	0	10,926,367	94.56
099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	7,712,000	16,658,392	0	16,658,392	216.01
099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	16,521,000	20,169,634	0	20,169,634	122.08
099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	7,301,000	30,407,289	0	30,407,289	416.48
099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	12,950,000	12,590,596	0	12,590,596	97.22
099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	16,243,000	14,084,844	0	14,084,844	86.71

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 23
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	13,130,000	378,451,548	0	378,451,548	2882.34
307101	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	3,771,000	4,845,835	0	4,845,835	128.5
307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	2,210,000	1,492,150	0	1,492,150	67.52
307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	4,059,000	2,930,928	0	2,930,928	72.21
400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	20,422,000	2,297,687,514	0	2,297,687,514	11251.04
400282	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	18,764,000	28,182,350	0	28,182,350	150.19
401921	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	0	91	0	91	0
402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	20,246,000	14,150,401	0	14,150,401	69.89
402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	4,033,000	11,499,164	0	11,499,164	285.13
402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	0	221,009	0	221,009	0
402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	4,041,000	8,675,163	0	8,675,163	214.68
402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	4,919,000	2,470,800	0	2,470,800	50.23
402540	PENGADILAN AGAMA BARABAI	0	2,099,999	0	2,099,999	0
402556	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	3,808,000	4,177,402	0	4,177,402	109.7
402562	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	8,959,000	8,772,456	0	8,772,456	97.92
402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	2,470,000	4,213,400	0	4,213,400	170.58
531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	9,789,000	29,961,927	0	29,961,927	306.08
653458	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	15,230,000	29,719,584	0	29,719,584	195.14
670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	20,323,000	21,781,312	0	21,781,312	107.18
682260	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	0	860	0	860	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011500KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	281,182,000	3,005,932,147	0	3,005,932,147	1,069.03
005011600KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR					
099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	64,024,000	57,421,107	0	57,421,107	89.69

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 24
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	6,274,000	5,094,400	0	5,094,400	81.2
099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	30,575,000	35,829,297	0	35,829,297	117.18
307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	717,000	8,027,484	0	8,027,484	1119.59
307178	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	0	3,104,870	0	3,104,870	0
307182	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	855,000	0	0	0	0
307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	330,000	1,025,104	0	1,025,104	310.64
307204	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	1,081,000	1,080,828	0	1,080,828	99.98
400291	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	5,065,000	10,806,138	0	10,806,138	213.35
400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	7,313,000	14,305,932	0	14,305,932	195.62
400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	28,385,000	20,371,876	0	20,371,876	71.77
401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	0	188,455,550	0	188,455,550	0
401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	0	13,519,070	0	13,519,070	0
401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	115,000	487,957,971	0	487,957,971	424311.28
402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	14,596,000	4,924,106	0	4,924,106	33.74
477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	1,753,000	14,041,379	0	14,041,379	800.99
559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	9,134,000	11,048,000	0	11,048,000	120.95
652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	0	3,000,000	0	3,000,000	0
662972	PENGADILAN NEGERI BONTANG	24,666,000	31,470,200	0	31,470,200	127.59
662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	5,286,000	6,888,079	0	6,888,079	130.31
	JUMLAH PENDAPATAN 005011600KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR	200,169,000	918,371,391	0	918,371,391	458.8
005011700KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA					
099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	62,020,000	129,837,133	0	129,837,133	209.35
099329	PENGADILAN NEGERI MANADO	22,757,000	11,987,118	0	11,987,118	52.67

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 25
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099333	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	11,826,000	6,694,974	0	6,694,974	56.61
099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	24,861,000	27,527,360	0	27,527,360	110.73
099354	PENGADILAN NEGERI TONDANO	19,256,000	21,521,528	0	21,521,528	111.77
307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	0	4,567,778	0	4,567,778	0
307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	0	614,864	0	614,864	0
307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	7,562,000	19,964,899	0	19,964,899	264.02
401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	0	267,193,824	0	267,193,824	0
401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	0	3,201,440	0	3,201,440	0
401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	0	311,382,824	0	311,382,824	0
402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	13,713,000	173,693,733	0	173,693,733	1266.64
402701	PENGADILAN AGAMA TONDANO	890,000	1,335,000	0	1,335,000	150
531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	11,344,000	14,871,882	0	14,871,882	131.1
568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	9,071,000	11,780,402	0	11,780,402	129.87
604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	1,256,000	1,534,860	0	1,534,860	122.2
663360	PENGADILAN MILITER III - 17 DI MANADO	0	2,380,000	0	2,380,000	0
670210	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	4,904,000	0	0	0	0
673034	PENGADILAN NEGERI AMURANG	0	1,016,816	0	1,016,816	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011700KD BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA	189,460,000	1,011,106,435	0	1,011,106,435	533.68
005011800KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA					
099375	PENGADILAN NEGERI PALU	15,967,000	15,296,667	0	15,296,667	95.8
099382	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	3,392,000	6,624,255	0	6,624,255	195.29
099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	24,710,000	27,529,139	0	27,529,139	111.41
099401	PENGADILAN NEGERI POSO	15,008,000	22,686,869	0	22,686,869	151.17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 26
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	5,323,000	4,634,228	0	4,634,228	87.06
307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	3,163,000	759,000	0	759,000	24
307292	PENGADILAN AGAMA POSO	0	7,308,000	0	7,308,000	0
307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	953,000	5,772,870	0	5,772,870	605.76
400534	PENGADILAN TINGGI PALU	16,776,000	17,513,592	0	17,513,592	104.4
401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	0	12	0	12	0
477202	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	15,539,000	19,010,690	0	19,010,690	122.34
576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	22,260,000	20,229,801	0	20,229,801	90.88
578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	13,094,000	231,974,950	0	231,974,950	1771.61
604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	2,054,000	3,283,464	0	3,283,464	159.86
652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	3,734,000	3,654,140	0	3,654,140	97.86
652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	3,106,000	8,619,994	0	8,619,994	277.53
652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	1,461,000	909,216	0	909,216	62.23
670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	9,852,000	13,753,776	0	13,753,776	139.6
672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	0	43	0	43	0
682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	0	303,376	0	303,376	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011800KD BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA SULTENG]	156,392,000	409,864,082	0	409,864,082	262.07
005011900KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	31,862,000	34,695,830	0	34,695,830	108.89
099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	19,661,000	32,997,719	0	32,997,719	167.83
099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	12,127,000	27,423,346	0	27,423,346	226.13
099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	9,541,000	1,739,900	0	1,739,900	18.24
099450	PENGADILAN NEGERI BARRU	6,118,000	19,026,694	0	19,026,694	311

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	15,239,000	10,234,256	0	10,234,256	67.16
099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	10,118,000	14,889,181	0	14,889,181	147.16
099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	7,334,000	13,701,551	0	13,701,551	186.82
099492	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	7,045,000	10,024,290	0	10,024,290	142.29
099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	660,000	55,659,444	0	55,659,444	8433.25
099511	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	4,369,000	8,758,952	0	8,758,952	200.48
099528	PENGADILAN NEGERI PINRANG	6,078,000	20,956,812	0	20,956,812	344.8
099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	19,201,000	21,177,718	0	21,177,718	110.29
099549	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	9,085,000	21,309,375	0	21,309,375	234.56
099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	100,000	10,121,870	0	10,121,870	10121.87
099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	0	28,738,500	0	28,738,500	0
099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	2,680,000	1,147,222	0	1,147,222	42.81
099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	26,604,000	22,263,840	0	22,263,840	83.69
099595	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	19,000,000	29,324,110	0	29,324,110	154.34
099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	15,178,000	21,533,251	0	21,533,251	141.87
099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	15,318,000	26,883,327	0	26,883,327	175.5
307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	0	16,007,056	0	16,007,056	0
307431	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	76,000	3,200,000	0	3,200,000	4210.53
307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	3,309,000	86,622	0	86,622	2.62
307452	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	0	4,082,654	0	4,082,654	0
307466	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	0	1,936,197	0	1,936,197	0
307470	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	45,000	3,060,000	0	3,060,000	6800
307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	1,991,000	1,291,000	0	1,291,000	64.84
307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	22,875,000	9,663,310	0	9,663,310	42.24

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
307513	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	977,000	1,186,482	0	1,186,482	121.44
307520	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	4,050,000	7,894,401	0	7,894,401	194.92
307534	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	0	2,345,678	0	2,345,678	0
307541	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	4,277,000	0	0	0	0
307555	PENGADILAN AGAMA SINJAI	2,312,000	11,121,630	0	11,121,630	481.04
307562	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	530,000	1,463,050	0	1,463,050	276.05
307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	1,586,000	13,286,806	0	13,286,806	837.76
307580	PENGADILAN AGAMA PINRANG	132,000	0	0	0	0
307602	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	0	29,263	0	29,263	0
307619	PENGADILAN AGAMA PALOPO	1,689,000	5,809,814	0	5,809,814	343.98
307623	PENGADILAN AGAMA MAKALE	4,886,000	4,885,980	0	4,885,980	100
401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	8,034,000	0	0	0	0
526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	13,471,000	31,353,853	0	31,353,853	232.75
526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	8,925,000	40,400,025	0	40,400,025	452.66
663356	PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR	0	64	0	64	0
673013	PENGADILAN NEGERI MALILI	0	118,676	0	118,676	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011900KD BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN	316,483,000	591,829,749	0	591,829,749	187
005012000KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA					
099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	11,365,000	11,657,798	0	11,657,798	102.58
099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	6,265,000	6,071,400	0	6,071,400	96.91
099670	PENGADILAN NEGERI RAHA	3,557,000	13,455,000	0	13,455,000	378.27
099684	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	4,968,000	4,488,900	0	4,488,900	90.36
307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	384,000	104,758	0	104,758	27.28

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
307708	PENGADILAN AGAMA RAHA	1,500,000	2,643,450	0	2,643,450	176.23
307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	0	6,749,822	0	6,749,822	0
307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	2,495,000	3,532,597	0	3,532,597	141.59
400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	18,956,000	9,682,029	0	9,682,029	51.08
401886	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	0	8,625,800	0	8,625,800	0
401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	0	72,126,522	0	72,126,522	0
401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	0	201,737,000	0	201,737,000	0
477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	2,974,000	4,241,108	0	4,241,108	142.61
576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	24,897,000	22,756,609	0	22,756,609	91.4
578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	15,716,000	17,389,862	0	17,389,862	110.65
681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	0	411,500	0	411,500	0
681443	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	50,000	0	0	0	0
682211	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	0	82,500	0	82,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012000KD BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA	93,127,000	385,756,655	0	385,756,655	414.23
005012100KD	BA(005) ES1(01) MALUKU					
099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	28,009,000	16,353,874	0	16,353,874	58.39
099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	16,168,000	13,346,914	0	13,346,914	82.55
099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	9,420,000	16,353,909	0	16,353,909	173.61
099727	PENGADILAN NEGERI TUAL	12,296,000	12,837,730	0	12,837,730	104.41
307754	PENGADILAN AGAMA AMBON	8,694,000	14,869,012	0	14,869,012	171.03
307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	1,007,000	1,005,953	0	1,005,953	99.9
307775	PENGADILAN AGAMA MASOHI	0	4,554,000	0	4,554,000	0
401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	495,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	630,000	282,050	0	282,050	44.77
401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	0	31,189,350	0	31,189,350	0
401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	0	76,044	0	76,044	0
402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	19,793,000	11,306,927	0	11,306,927	57.13
539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	6,731,000	4,894,856	0	4,894,856	72.72
672931	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	16,677,000	18,695,820	0	18,695,820	112.11
	JUMLAH PENDAPATAN 005012100KD BA(005) ES1(01) MALUKU	119,920,000	145,766,439	0	145,766,439	121.55
005012200KD	BA(005) ES1(01) BALI					
099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	59,132,000	63,291,067	0	63,291,067	107.03
099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	31,000,000	42,292,651	0	42,292,651	136.43
099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	16,580,000	18,074,299	600,000	17,474,299	105.39
099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	36,372,000	33,678,212	0	33,678,212	92.59
099816	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	10,065,000	11,006,400	0	11,006,400	109.35
099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	24,832,000	20,300,204	0	20,300,204	81.75
099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	0	37,996,054	0	37,996,054	0
099841	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	5,044,000	9,471,518	0	9,471,518	187.78
099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	17,778,000	24,746,739	6,968,556	17,778,183	100
307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	5,028,000	3,646,220	0	3,646,220	72.52
307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	2,397,000	2,799,720	0	2,799,720	116.8
402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	613,000	8,443,512	0	8,443,512	1377.41
402741	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	3,000,000	0	0	0	0
402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	6,744,000	7,884,615	0	7,884,615	116.91
402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	6,000,000	6,207,900	0	6,207,900	103.47
402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	14,000,000	18,576,668	0	18,576,668	132.69
663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	0	7,757,777	0	7,757,777	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012200KD BA(005) ES1(01) BALI	244,585,000	322,173,556	7,568,556	314,605,000	131.72
005012300KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	19,942,000	30,585,243	0	30,585,243	153.37
099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	27,854,000	33,902,698	0	33,902,698	121.72
099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	9,326,000	7,918,205	0	7,918,205	84.9
099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	25,714,000	94,630,140	0	94,630,140	368.01
099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	5,026,000	19,404,620	0	19,404,620	386.08
099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	11,677,000	9,029,224	0	9,029,224	77.32
307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	1,500,000	0	0	0	0
307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	525,000	4,178,631	0	4,178,631	795.93
307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	36,000	0	0	0	0
307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	10,050,000	10,033,738	0	10,033,738	99.84
307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	0	3,245,448	0	3,245,448	0
400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	27,161,000	119,181,884	0	119,181,884	438.8
402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	15,722,000	14,156,534	1,500,000	12,656,534	80.5
	JUMLAH PENDAPATAN 005012300KD BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	154,533,000	346,266,365	1,500,000	344,766,365	224.07
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	14,245,000	11,552,400	0	11,552,400	81.1
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	14,245,000	11,552,400	0	11,552,400	81.1
005012300KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT					
614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	1,578,000	1,978,750	0	1,978,750	125.4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 32
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	600,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012300KD BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	2,178,000	1,978,750	0	1,978,750	90.85
005012400KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR					
099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	7,732,000	15,522,493	0	15,522,493	200.76
099930	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	33,052,000	33,105,691	0	33,105,691	100.16
099947	PENGADILAN NEGERI SO'E	8,836,000	10,427,555	0	10,427,555	118.01
099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	8,542,000	11,346,484	0	11,346,484	132.83
099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	16,669,000	16,786,923	0	16,786,923	100.71
099972	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	11,164,000	54,900,876	0	54,900,876	491.77
099989	PENGADILAN NEGERI ENDE	4,963,000	2,627,120	0	2,627,120	52.93
099993	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	4,794,000	7,564,478	0	7,564,478	157.79
307949	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	398,000	433,920	0	433,920	109.03
307953	PENGADILAN AGAMA KUPANG	863,000	1,312,005	0	1,312,005	152.03
307974	PENGADILAN AGAMA ENDE	1,939,000	2,276,160	0	2,276,160	117.39
307981	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	419,000	418,572	0	418,572	99.9
400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	6,097,000	9,090,303	0	9,090,303	149.09
400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	5,151,000	14,288,112	0	14,288,112	277.39
400157	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	2,143,000	3,434,431	0	3,434,431	160.26
400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	4,198,000	40,893,882	0	40,893,882	974.13
400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	23,277,000	21,727,628	0	21,727,628	93.34
402794	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	2,451,000	2,192,562	0	2,192,562	89.46
402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	178,000	44,550	0	44,550	25.03
402820	PENGADILAN AGAMA SOE	2,250,000	2,625,000	0	2,625,000	116.67

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	107,000	210	0	210	0.2
402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	277,000	989,288	0	989,288	357.14
402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	1,940,000	2,054,873	0	2,054,873	105.92
477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	9,962,000	12,238,088	0	12,238,088	122.85
477249	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	16,332,000	14,926,230	0	14,926,230	91.39
539121	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	9,621,000	14,256,000	0	14,256,000	148.18
576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	12,777,000	39,213,720	0	39,213,720	306.91
632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	0	298,662	0	298,662	0
673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	1,168,000	6,564,040	0	6,564,040	561.99
682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	1,378,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012400KD BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR	198,678,000	341,559,856	0	341,559,856	171.92
005012500KD	BA(005) ES1(01) PAPUA					
400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	40,753,000	27,773,991	0	27,773,991	68.15
400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	16,739,000	57,885,364	0	57,885,364	345.81
400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	2,809,000	5,247,247	0	5,247,247	186.8
400050	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	162,085,000	168,183,447	0	168,183,447	103.76
400090	PENGADILAN NEGERI BIAK	2,811,000	3,175,027	0	3,175,027	112.95
400101	PENGADILAN NEGERI NABIRE	5,720,000	7,882,881	0	7,882,881	137.81
400276	PENGADILAN NEGERI SERUI	2,990,000	2,790,082	0	2,790,082	93.31
402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	22,953,000	50,734,241	0	50,734,241	221.04
402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	655,000	1,403,325	0	1,403,325	214.25
402891	PENGADILAN AGAMA BIAK	6,019,000	6,549,743	0	6,549,743	108.82
402927	PENGADILAN AGAMA NABIRE	2,292,000	2,193,500	0	2,193,500	95.7

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402933	PENGADILAN AGAMA WAMENA	1,695,000	2,694,504	0	2,694,504	158.97
402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	2,982,000	2,183,230	0	2,183,230	73.21
402958	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	419,000	313,929	0	313,929	74.92
539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	15,807,000	23,884,178	0	23,884,178	151.1
614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	22,700,000	909,216	0	909,216	4.01
614890	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	6,357,000	10,472,467	0	10,472,467	164.74
682300	PENGADILAN AGAMA ARSO	0	2,818,600	0	2,818,600	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012500KD BA(005) ES1(01) PAPUA	315,786,000	377,094,972	0	377,094,972	119.41
005012600KD	BA(005) ES1(01) BENGKULU					
308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	2,124,000	24,510,596	0	24,510,596	1153.98
308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	4,677,000	4,677,276	0	4,677,276	100.01
308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	2,512,000	2,721,238	0	2,721,238	108.33
308152	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	1,079,000	1,617,852	0	1,617,852	149.94
400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	12,533,000	16,393,892	0	16,393,892	130.81
400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	18,900,000	22,703,135	0	22,703,135	120.12
400132	PENGADILAN NEGERI MANNA	26,352,000	37,789,265	0	37,789,265	143.4
400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	8,866,000	24,681,535	0	24,681,535	278.38
400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	17,195,000	143,452,704	0	143,452,704	834.27
401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	0	24,401,436	0	24,401,436	0
401939	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	0	46	0	46	0
576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	15,000,000	84,368,279	0	84,368,279	562.46
578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	5,292,000	3,663,612	0	3,663,612	69.23
672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	2,167,000	2,871,098	0	2,871,098	132.49
673009	PENGADILAN NEGERI TAIS	0	3,666,666	0	3,666,666	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	270,000	1,027,500	0	1,027,500	380.56
673055	PENGADILAN NEGERI TUBEI	784,000	717,552	0	717,552	91.52
	JUMLAH PENDAPATAN 005012600KD BA(005) ES1(01) BENGKULU	117,751,000	399,263,682	0	399,263,682	339.07
005012800KD	BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA					
099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	0	21,354,486	0	21,354,486	0
099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	2,619,000	132,868,633	0	132,868,633	5073.26
099752	PENGADILAN NEGERI LABUHA	5,131,000	4,978,328	0	4,978,328	97.02
099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	2,944,000	3,131,138	0	3,131,138	106.36
307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	308,000	2,502,240	0	2,502,240	812.42
307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	1,560,000	1,559,592	0	1,559,592	99.97
307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	1,717,000	4,323,000	0	4,323,000	251.78
401972	PENGADILAN NEGERI SANANA	0	265,500	0	265,500	0
401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	0	346,231	0	346,231	0
440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	25,071,000	15,960,531	0	15,960,531	63.66
664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	32,160,000	9,498,687	0	9,498,687	29.54
	JUMLAH PENDAPATAN 005012800KD BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA	71,510,000	196,788,366	0	196,788,366	275.19
005012900KD	BA(005) ES1(01) BANTEN					
097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	15,873,000	42,190,960	0	42,190,960	265.8
097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	12,404,000	16,804,000	0	16,804,000	135.47
097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	45,253,000	308,386,375	0	308,386,375	681.47
400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	829,000	10,390,422	0	10,390,422	1253.37
400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	0	493,894	0	493,894	0
400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	0	1,000,159	0	1,000,159	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	2,592,000	3,436,316	0	3,436,316	132.57
417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	0	12,717,383	0	12,717,383	0
440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	9,766,000	87,751,480	0	87,751,480	898.54
604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	10,452,000	22,628,037	0	22,628,037	216.49
652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	0	69,288,998	0	69,288,998	0
663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	49,302,000	41,477,200	0	41,477,200	84.13
689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	0	5,028,612	0	5,028,612	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005012900KD BA(005) ES1(01) BANTEN	146,471,000	621,593,836	0	621,593,836	424.38
005013000KD	BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG					
099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	18,159,000	18,022,050	0	18,022,050	99.25
099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	17,142,000	16,349,500	0	16,349,500	95.38
400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	16,934,000	18,641,537	0	18,641,537	110.08
401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	0	1,088,940,505	0	1,088,940,505	0
401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	0	159,278,952	0	159,278,952	0
401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	0	360,400	360,400	0	0
402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	9,544,000	5,449,780	0	5,449,780	57.1
402318	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	617,000	616,968	0	616,968	99.99
403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	2,381,000	2,741,618	0	2,741,618	115.15
440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	37,327,000	33,138,801	0	33,138,801	88.78
663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	40,824,000	42,086,299	0	42,086,299	103.09
	JUMLAH PENDAPATAN 005013000KD BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG	142,928,000	1,385,626,410	360,400	1,385,266,010	969.46
005013100KD	BA(005) ES1(01) GORONTALO					
099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	23,231,000	19,385,942	0	19,385,942	83.45

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
307250	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	0	6,731,712	0	6,731,712	0
400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	17,311,000	47,799,875	0	47,799,875	276.12
401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	0	1,768	0	1,768	0
401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	102,000	140,200	0	140,200	137.45
402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	0	7,153,088	0	7,153,088	0
440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	0	148,205,567	0	148,205,567	0
477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	18,179,000	15,754,000	0	15,754,000	86.66
652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	0	6,014,984	0	6,014,984	0
664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	34,656,000	23,016,754	0	23,016,754	66.41
670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	8,309,000	9,955,800	0	9,955,800	119.82
	JUMLAH PENDAPATAN 005013100KD BA(005) ES1(01) GORONTALO	101,788,000	284,159,690	0	284,159,690	279.17
005013200KD	PENGADILAN AGAMA BATAM					
098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	0	30,349,757	0	30,349,757	0
108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	0	42,852,334	0	42,852,334	0
402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	0	6,826,000	0	6,826,000	0
402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	0	370,074	0	370,074	0
402179	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	0	29	0	29	0
547699	PENGADILAN AGAMA BATAM	9,920,000	7,838,000	0	7,838,000	79.01
614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	0	3,450,716	0	3,450,716	0
663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	0	16,209,428	0	16,209,428	0
672948	PENGADILAN NEGERI RANAI	0	452,760	0	452,760	0
689309	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	0	300,111	0	300,111	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005013200KD PENGADILAN AGAMA BATAM	9,920,000	108,649,209	0	108,649,209	1,095.25
005012500KD	BA(005) ES1(01) PAPUA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	25,854,000	14,378,206	0	14,378,206	55.61
400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	7,366,000	9,361,280	0	9,361,280	127.09
400081	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	7,256,000	5,770,576	0	5,770,576	79.53
401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	40,000	0	0	0	0
402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	3,432,000	689,118	0	689,118	20.08
402902	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	7,544,000	2,777,808	0	2,777,808	36.82
402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	9,514,000	1,979,207	0	1,979,207	20.8
	JUMLAH PENDAPATAN 005012500KD BA(005) ES1(01) PAPUA	61,006,000	34,956,195	0	34,956,195	57.3
005011900KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
099621	PENGADILAN NEGERI MAJENE	12,703,000	13,955,840	0	13,955,840	109.86
099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	25,157,000	4,261,508	0	4,261,508	16.94
099642	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	4,034,000	4,308,895	0	4,308,895	106.81
307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	999,000	1,093,253	0	1,093,253	109.43
307644	PENGADILAN AGAMA MAJENE	0	580,000	0	580,000	0
307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	0	33,264	0	33,264	0
401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	0	291	0	291	0
681422	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	1,143,000	20,317,570	0	20,317,570	1777.57
	JUMLAH PENDAPATAN 005011900KD BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN	44,036,000	44,550,621	0	44,550,621	101.17
005011600KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR					
099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	20,013,000	16,984,818	0	16,984,818	84.87
402675	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	6,557,000	4,319,111	0	4,319,111	65.87
417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	0	1,351,655	0	1,351,655	0
417704	PENGADILAN NEGERI MALINAU	4,628,000	4,486,608	0	4,486,608	96.94

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 39
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	2,289,000	2,433,070	0	2,433,070	106.29
477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	0	370,840	0	370,840	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005011600KD BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR	33,487,000	29,946,102	0	29,946,102	89.43
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7,413,806,000	24,169,809,548	9,837,628	24,159,971,920	326.01
02	**KEPANITERAAN**					
005020100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
004028	KEPANITERAAN	143,458,000	440,847,237	0	440,847,237	307.3
	JUMLAH PENDAPATAN 005020100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	143,458,000	440,847,237	0	440,847,237	307.3
	JUMLAH PENDAPATAN 02 KEPANITERAAN	143,458,000	440,847,237	0	440,847,237	307.3
03	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**					
005030100KD	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA					
099062	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	15,740,000	21,170,000	0	21,170,000	134.5
099063	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	1,405,465,000	1,851,812,250	0	1,851,812,250	131.76
099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	277,818,000	410,022,000	0	410,022,000	147.59
099065	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	253,290,000	328,634,000	0	328,634,000	129.75
400215	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	276,303,000	528,377,300	0	528,377,300	191.23
400221	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	240,230,000	272,034,300	0	272,034,300	113.24
	JUMLAH PENDAPATAN 005030100KD BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	2,468,846,000	3,412,049,850	0	3,412,049,850	138.2
005030100KP	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA					
097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	103,532,000	183,703,555	0	183,703,555	177.44
	JUMLAH PENDAPATAN 005030100KP BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	103,532,000	183,703,555	0	183,703,555	177.44
005030200KD	BA(005) ES1(03) JAWA BARAT					
099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	24,700,000	28,650,000	0	28,650,000	115.99

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099068	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	524,049,000	561,669,500	0	561,669,500	107.18
099069	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	21,442,000	38,518,500	0	38,518,500	179.64
099071	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	40,422,000	88,779,000	0	88,779,000	219.63
099072	PENGADILAN NEGERI GARUT	22,459,000	38,597,500	0	38,597,500	171.86
099073	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	20,748,000	22,475,500	0	22,475,500	108.33
099078	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	29,055,000	38,370,500	0	38,370,500	132.06
099079	PENGADILAN NEGERI BEKASI	169,250,000	358,883,300	0	358,883,300	212.04
099080	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	54,989,000	91,839,000	0	91,839,000	167.01
099081	PENGADILAN NEGERI SUBANG	3,226,000	31,681,500	0	31,681,500	982.07
099082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	72,060,000	73,901,500	0	73,901,500	102.56
099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	11,578,000	19,192,500	0	19,192,500	165.77
099084	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	33,957,000	39,572,000	0	39,572,000	116.54
099085	PENGADILAN NEGERI CIREBON	24,964,000	31,121,000	0	31,121,000	124.66
099086	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	44,165,000	20,953,000	0	20,953,000	47.44
099088	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	10,044,000	14,288,000	0	14,288,000	142.25
099089	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	16,274,000	18,401,000	0	18,401,000	113.07
400410	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	21,865,000	23,997,500	0	23,997,500	109.75
400478	PENGADILAN NEGERI SUMBER	45,584,000	46,388,000	0	46,388,000	101.76
400484	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	142,800,000	168,518,500	0	168,518,500	118.01
402022	PENGADILAN NEGERI BANJAR	5,744,000	7,980,000	0	7,980,000	138.93
402023	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	87,316,000	102,613,500	0	102,613,500	117.52
477293	PENGADILAN NEGERI DEPOK	172,523,000	189,436,000	0	189,436,000	109.8
613520	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	0	165,760,500	0	165,760,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005030200KD BA(005) ES1(03) JAWA BARAT	1,599,214,000	2,221,587,300	0	2,221,587,300	138.92

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005030300KD	BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH					
099090	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	11,210,000	15,380,000	0	15,380,000	137.2
099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	309,697,000	285,578,500	0	285,578,500	92.21
099093	PENGADILAN NEGERI TEGAL	25,057,000	18,107,500	0	18,107,500	72.27
099094	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	37,278,000	29,796,500	0	29,796,500	79.93
099095	PENGADILAN NEGERI KUDUS	41,182,000	29,610,000	0	29,610,000	71.9
099096	PENGADILAN NEGERI PATI	49,899,000	48,303,000	0	48,303,000	96.8
099097	PENGADILAN NEGERI BREBES	26,974,000	37,409,000	0	37,409,000	138.69
099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	22,916,000	42,691,500	0	42,691,500	186.3
099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	32,620,000	51,511,000	0	51,511,000	157.91
099100	PENGADILAN NEGERI DEMAK	28,606,000	41,670,950	0	41,670,950	145.67
099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	41,554,000	32,375,500	0	32,375,500	77.91
099102	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	20,830,000	29,295,500	0	29,295,500	140.64
099103	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	43,222,000	46,768,500	0	46,768,500	108.21
099104	PENGADILAN NEGERI JEPARA	46,189,000	37,092,000	0	37,092,000	80.3
099105	PENGADILAN NEGERI BLORA	8,700,000	33,097,500	0	33,097,500	380.43
099106	PENGADILAN NEGERI REMBANG	9,592,000	16,442,850	0	16,442,850	171.42
099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	45,196,000	32,782,000	0	32,782,000	72.53
099108	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	42,113,000	40,310,000	0	40,310,000	95.72
099110	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	18,777,000	12,800,000	0	12,800,000	68.17
099111	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	3,175,000	18,688,650	0	18,688,650	588.62
099112	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	17,258,000	19,393,500	0	19,393,500	112.37
099114	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	35,759,000	34,584,000	0	34,584,000	96.71
099115	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	95,671,000	87,989,500	0	87,989,500	91.97

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099116	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	31,241,000	53,340,650	0	53,340,650	170.74
099117	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	27,001,000	21,551,500	0	21,551,500	79.82
099118	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	59,335,000	59,351,100	0	59,351,100	100.03
099119	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	36,101,000	39,798,000	0	39,798,000	110.24
099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	23,056,000	24,663,500	0	24,663,500	106.97
099122	PENGADILAN NEGERI KLATEN	60,780,000	70,585,500	0	70,585,500	116.13
099123	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	44,391,000	43,852,500	0	43,852,500	98.79
099124	PENGADILAN NEGERI CILACAP	49,973,000	46,329,000	0	46,329,000	92.71
099125	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	0	18,357,000	0	18,357,000	0
099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	32,596,000	21,433,500	0	21,433,500	65.76
099127	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	22,991,000	15,012,000	0	15,012,000	65.3
400566	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	41,182,000	23,365,500	0	23,365,500	56.74
400572	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	25,126,000	30,882,500	0	30,882,500	122.91
	JUMLAH PENDAPATAN 005030300KD BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH	1,467,248,000	1,510,199,700	0	1,510,199,700	102.93
005030400KD	BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA					
099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	0	95,266,400	0	95,266,400	0
099129	PENGADILAN NEGERI WATES	15,383,000	33,914,500	0	33,914,500	220.47
099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	36,666,000	29,673,000	0	29,673,000	80.93
099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	135,333,000	214,511,000	0	214,511,000	158.51
400173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	62,241,000	52,033,000	0	52,033,000	83.6
400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	3,250,000	3,630,000	0	3,630,000	111.69
	JUMLAH PENDAPATAN 005030400KD BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA	252,873,000	429,027,900	0	429,027,900	169.66
005030500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099132	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	11,980,000	21,370,000	0	21,370,000	178.38
099133	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	1,171,321,000	1,737,374,208	0	1,737,374,208	148.33
099135	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	48,249,000	27,694,500	0	27,694,500	57.4
099136	PENGADILAN NEGERI TUBAN	77,970,000	34,487,500	0	34,487,500	44.23
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	29,112,000	34,267,500	0	34,267,500	117.71
099138	PENGADILAN NEGERI GRESIK	44,449,000	77,384,500	0	77,384,500	174.1
099139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	181,014,000	182,575,500	0	182,575,500	100.86
099140	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	67,331,000	69,208,000	0	69,208,000	102.79
099142	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	46,815,000	30,778,000	0	30,778,000	65.74
099143	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	18,705,000	22,290,000	0	22,290,000	119.17
099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	63,200,000	72,650,000	0	72,650,000	114.95
099145	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	51,106,000	99,558,000	0	99,558,000	194.81
099146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	26,164,000	36,819,500	0	36,819,500	140.73
099147	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	29,967,000	29,332,300	0	29,332,300	97.88
099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	25,773,000	50,690,500	0	50,690,500	196.68
099149	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	37,264,000	45,206,000	0	45,206,000	121.31
099150	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	26,754,000	13,198,500	0	13,198,500	49.33
099151	PENGADILAN NEGERI BLITAR	71,247,000	59,709,000	0	59,709,000	83.81
099152	PENGADILAN NEGERI MALANG	203,633,000	179,124,000	0	179,124,000	87.96
099153	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	28,642,000	19,637,190	0	19,637,190	68.56
099154	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	16,731,000	16,868,000	0	16,868,000	100.82
099156	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	13,409,000	32,232,500	0	32,232,500	240.38
099157	PENGADILAN NEGERI BANGIL	61,291,000	71,380,000	0	71,380,000	116.46
099158	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	16,727,000	13,215,000	0	13,215,000	79

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099159	PENGADILAN NEGERI MADIUN	24,452,000	27,799,000	0	27,799,000	113.69
099160	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	40,415,000	31,665,397	0	31,665,397	78.35
099161	PENGADILAN NEGERI PACITAN	6,818,000	8,011,000	0	8,011,000	117.5
099163	PENGADILAN NEGERI NGAWI	21,508,000	15,474,000	0	15,474,000	71.95
099164	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	21,387,000	26,696,000	0	26,696,000	124.82
099165	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	10,500,000	10,174,000	0	10,174,000	96.9
099166	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	8,359,000	10,067,500	0	10,067,500	120.44
099167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	27,852,000	27,044,500	0	27,044,500	97.1
099168	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	6,401,000	7,750,000	0	7,750,000	121.07
400581	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	57,209,000	75,096,000	0	75,096,000	131.27
400597	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	21,741,000	47,064,500	0	47,064,500	216.48
626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	98,052,000	93,571,600	0	93,571,600	95.43
	JUMLAH PENDAPATAN 005030500KD Pengadilan Tinggi Surabaya	2,713,548,000	3,357,463,695	0	3,357,463,695	123.73
005030600KD	BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
099169	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	1,100,000	1,900,000	0	1,900,000	172.73
099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	40,810,000	48,951,500	0	48,951,500	119.95
099171	PENGADILAN NEGERI SABANG	4,840,000	4,149,000	0	4,149,000	85.72
099172	PENGADILAN NEGERI SIGLI	31,701,000	24,545,000	0	24,545,000	77.43
099173	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	19,227,000	13,415,000	0	13,415,000	69.77
099174	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	14,270,000	29,982,500	0	29,982,500	210.11
099175	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	15,582,000	13,010,500	0	13,010,500	83.5
099177	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	10,340,000	7,770,500	0	7,770,500	75.15
099178	PENGADILAN NEGERI LANGSA	11,119,000	11,165,500	0	11,165,500	100.42
099179	PENGADILAN NEGERI IDI	7,519,000	6,048,000	0	6,048,000	80.44

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099181	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	7,002,000	10,311,500	0	10,311,500	147.27
099182	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	0	2,208,500	0	2,208,500	0
099183	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	9,298,000	6,077,500	0	6,077,500	65.36
099184	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	12,571,000	8,684,500	0	8,684,500	69.08
099185	PENGADILAN NEGERI CALANG	3,916,000	2,941,000	0	2,941,000	75.1
099186	PENGADILAN NEGERI SINABANG	3,904,000	6,085,500	0	6,085,500	155.88
099187	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	0	9,479,500	0	9,479,500	0
099188	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	4,351,000	5,179,000	0	5,179,000	119.03
400416	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	23,939,000	24,987,000	0	24,987,000	104.38
402008	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	4,973,000	5,268,500	0	5,268,500	105.94
402009	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	9,467,000	7,489,500	0	7,489,500	79.11
402012	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	9,965,000	11,706,000	0	11,706,000	117.47
689969	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	3,726,000	5,732,500	0	5,732,500	153.85
	JUMLAH PENDAPATAN 005030600KD BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	249,620,000	267,088,000	0	267,088,000	107
005030700KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA					
099189	PENGADILAN TINGGI MEDAN	12,570,000	14,730,000	0	14,730,000	117.18
099190	PENGADILAN NEGERI MEDAN	444,079,000	505,260,500	0	505,260,500	113.78
099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI	22,189,000	21,606,000	0	21,606,000	97.37
099192	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	41,724,000	24,547,000	0	24,547,000	58.83
099193	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	21,794,000	19,484,500	0	19,484,500	89.4
099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	18,697,000	18,025,000	0	18,025,000	96.41
099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	75,470,000	50,334,500	0	50,334,500	66.69
099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	5,899,000	14,864,000	0	14,864,000	251.97

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099198	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	31,611,000	55,760,000	0	55,760,000	176.39
099199	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	39,191,000	41,824,500	0	41,824,500	106.72
099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	69,276,000	48,531,000	0	48,531,000	70.05
099201	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	25,567,000	26,522,000	0	26,522,000	103.74
099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	29,243,000	38,426,000	0	38,426,000	131.4
109063	PENGADILAN NEGERI STABAT	22,181,000	42,969,506	0	42,969,506	193.72
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	38,337,000	76,952,000	40,000	76,912,000	200.62
400390	PENGADILAN NEGERI KISARAN	39,718,000	49,948,500	0	49,948,500	125.76
400396	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	101,450,000	162,279,000	0	162,279,000	159.96
402013	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	22,711,000	29,015,500	0	29,015,500	127.76
402014	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	11,427,000	8,245,500	0	8,245,500	72.16
477401	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	8,099,000	16,366,000	0	16,366,000	202.07
672911	PENGADILAN NEGERI BALIGE	0	50,022,500	0	50,022,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005030700KD BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA	1,081,233,000	1,315,713,506	40,000	1,315,673,506	121.69
005030800KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT					
099204	PENGADILAN TINGGI PADANG	4,270,000	4,480,000	0	4,480,000	104.92
099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	116,677,000	113,709,846	0	113,709,846	97.46
099206	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	2,691,000	1,714,000	0	1,714,000	63.69
099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	13,703,000	16,830,500	0	16,830,500	122.82
099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	11,903,000	12,386,000	0	12,386,000	104.06
099209	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	32,203,000	49,430,500	0	49,430,500	153.5
099210	PENGADILAN NEGERI PAINAN	16,970,000	22,246,000	0	22,246,000	131.09
099211	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	31,170,000	34,569,500	0	34,569,500	110.91

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099212	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	20,656,000	10,285,500	0	10,285,500	49.79
099213	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	16,534,000	28,349,500	0	28,349,500	171.46
400189	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	5,710,000	6,736,500	0	6,736,500	117.98
400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	14,551,000	19,796,000	0	19,796,000	136.05
400422	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	9,167,000	17,556,500	0	17,556,500	191.52
400447	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	13,971,000	22,530,500	0	22,530,500	161.27
400462	PENGADILAN NEGERI MUARO	3,471,000	6,046,500	0	6,046,500	174.2
402015	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	4,304,000	3,675,500	0	3,675,500	85.4
477353	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	33,591,000	29,287,000	0	29,287,000	87.19
	JUMLAH PENDAPATAN 005030800KD BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT	351,542,000	399,629,846	0	399,629,846	113.68
005030900KD	BA(005) ES1(03) RIAU					
099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	191,400,000	604,000,569	0	604,000,569	315.57
099215	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	28,011,000	18,622,000	0	18,622,000	66.48
099216	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	15,981,000	17,530,500	0	17,530,500	109.7
099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	8,892,000	10,455,780	0	10,455,780	117.59
400142	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	8,892,000	40,714,200	0	40,714,200	457.87
400328	PENGADILAN NEGERI DUMAI	29,202,000	20,261,500	0	20,261,500	69.38
400493	PENGADILAN TINGGI RIAU	4,580,000	5,460,000	0	5,460,000	119.21
402016	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	37,617,000	11,476,000	0	11,476,000	30.51
477256	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	17,312,000	34,627,000	0	34,627,000	200.02
477262	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	16,494,000	28,672,500	0	28,672,500	173.84
477344	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	28,677,000	25,466,000	0	25,466,000	88.8
662991	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	40,160,000	22,408,000	0	22,408,000	55.8

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 005030900KD BA(005) ES1(03) RIAU	427,218,000	839,694,049	0	839,694,049	196.55
005031000KD	BA(005) ES1(03) JAMBI					
099220	PENGADILAN NEGERI JAMBI	60,516,000	77,623,500	0	77,623,500	128.27
099221	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	21,862,000	19,586,500	0	19,586,500	89.59
099222	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	10,614,000	17,873,000	0	17,873,000	168.39
099224	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	17,293,000	35,389,500	0	35,389,500	204.65
400312	PENGADILAN NEGERI BANGKO	15,259,000	28,688,000	0	28,688,000	188.01
400431	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	7,038,000	12,955,500	0	12,955,500	184.08
400504	PENGADILAN TINGGI JAMBI	2,230,000	2,020,000	0	2,020,000	90.58
477369	PENGADILAN NEGERI TEBO	5,468,000	12,469,500	0	12,469,500	228.04
477375	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	8,519,000	11,545,000	0	11,545,000	135.52
477402	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	4,086,000	8,653,500	0	8,653,500	211.78
663013	PENGADILAN NEGERI SENGETI	14,820,000	20,692,500	0	20,692,500	139.63
	JUMLAH PENDAPATAN 005031000KD BA(005) ES1(03) JAMBI	167,705,000	247,496,500	0	247,496,500	147.58
005031100KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN					
099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	3,230,000	4,410,000	0	4,410,000	136.53
099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	133,595,000	154,239,500	0	154,239,500	115.45
099227	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	26,318,000	33,338,000	0	33,338,000	126.67
099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	31,071,000	39,144,000	0	39,144,000	125.98
099229	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	31,195,000	42,970,000	0	42,970,000	137.75
099231	PENGADILAN NEGERI LAHAT	38,037,000	68,942,000	0	68,942,000	181.25
099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	42,738,000	39,777,500	0	39,777,500	93.07
099233	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	0	33,663,000	0	33,663,000	0
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	16,028,000	24,056,500	0	24,056,500	150.09

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 49
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
672953	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	4,564,000	8,724,500	0	8,724,500	191.16
672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	3,296,000	5,494,000	0	5,494,000	166.69
	JUMLAH PENDAPATAN 005031100KD BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN	330,072,000	454,759,000	0	454,759,000	137.78
005031200KD	BA(005) ES1(03) LAMPUNG					
099236	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	71,649,000	70,201,500	0	70,201,500	97.98
099237	PENGADILAN NEGERI METRO	22,726,000	15,484,000	0	15,484,000	68.13
099238	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	12,741,000	11,759,000	0	11,759,000	92.29
400365	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	2,920,000	3,070,000	0	3,070,000	105.14
400453	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	34,389,000	30,930,002	0	30,930,002	89.94
402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	10,713,000	8,664,500	0	8,664,500	80.88
477307	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	17,119,000	13,327,000	0	13,327,000	77.85
614884	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	4,479,000	10,171,200	0	10,171,200	227.09
663027	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	19,867,000	91,865,550	0	91,865,550	462.4
663031	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	12,524,000	14,728,500	0	14,728,500	117.6
663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	14,230,000	14,097,000	0	14,097,000	99.07
663052	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	8,825,000	9,172,000	0	9,172,000	103.93
	JUMLAH PENDAPATAN 005031200KD BA(005) ES1(03) LAMPUNG	232,182,000	293,470,252	0	293,470,252	126.4
005031300KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT					
099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	95,638,000	120,438,500	0	120,438,500	125.93
099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	30,923,000	32,790,500	0	32,790,500	106.04
099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	26,329,000	29,008,000	0	29,008,000	110.18
099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	20,574,000	26,441,000	0	26,441,000	128.52
099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	46,800,000	60,554,000	0	60,554,000	129.39

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 50
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	14,598,000	16,992,500	0	16,992,500	116.4
400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	8,615,000	9,116,500	0	9,116,500	105.82
400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	1,055,000	1,630,000	0	1,630,000	154.5
670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	24,193,000	28,041,200	0	28,041,200	115.91
670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	6,670,000	7,194,000	0	7,194,000	107.86
689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	44,048,000	18,049,500	0	18,049,500	40.98
	JUMLAH PENDAPATAN 005031300KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT	319,443,000	350,255,700	0	350,255,700	109.65
005031400KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH					
099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	66,952,000	84,414,700	0	84,414,700	126.08
099247	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	18,481,000	25,226,000	0	25,226,000	136.5
099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	10,452,000	17,477,000	0	17,477,000	167.21
099249	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	16,740,000	21,261,000	0	21,261,000	127.01
099250	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	20,604,000	17,828,000	0	17,828,000	86.53
099252	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	64,182,000	48,173,500	0	48,173,500	75.06
400359	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	1,310,000	1,400,000	0	1,400,000	106.87
402024	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	6,642,000	10,966,000	0	10,966,000	165.1
402025	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	12,312,000	9,540,000	0	9,540,000	77.49
402026	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	4,081,000	4,245,000	0	4,245,000	104.02
670192	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	7,516,000	12,220,500	0	12,220,500	162.59
679426	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	8,078,000	7,382,500	0	7,382,500	91.39
	JUMLAH PENDAPATAN 005031400KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH	237,350,000	260,134,200	0	260,134,200	109.6
005031500KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN					
099253	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	2,430,000	1,830,000	0	1,830,000	75.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099254	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	191,400,000	73,550,000	0	73,550,000	38.43
099255	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	6,844,000	18,269,500	0	18,269,500	266.94
099256	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	12,877,000	14,838,500	0	14,838,500	115.23
099257	PENGADILAN NEGERI BARABAI	4,016,000	6,832,000	0	6,832,000	170.12
099258	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	34,479,000	43,477,000	0	43,477,000	126.1
099259	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	23,938,000	14,183,500	0	14,183,500	59.25
099260	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	6,436,000	12,220,000	0	12,220,000	189.87
099266	PENGADILAN NEGERI RANTAU	10,550,000	14,658,500	0	14,658,500	138.94
400261	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	4,192,000	9,245,000	0	9,245,000	220.54
400283	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	9,501,000	26,567,500	0	26,567,500	279.63
402027	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	7,066,000	4,988,500	0	4,988,500	70.6
653459	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	25,396,000	30,381,000	0	30,381,000	119.63
690019	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	15,267,000	16,107,500	0	16,107,500	105.51
	JUMLAH PENDAPATAN 005031500KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN	354,392,000	287,148,500	0	287,148,500	81.03
005031600KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR					
099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	231,657,000	163,281,500	0	163,281,500	70.48
099291	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	47,134,000	51,389,000	0	51,389,000	109.03
099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	97,576,000	111,822,500	0	111,822,500	114.6
400292	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	29,847,000	25,881,462	0	25,881,462	86.71
400303	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	18,210,000	11,597,500	0	11,597,500	63.69
400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	4,270,000	4,340,000	0	4,340,000	101.64
402028	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	10,087,000	17,545,848	0	17,545,848	173.95
477381	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	13,016,000	18,404,000	0	18,404,000	141.4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
662973	PENGADILAN NEGERI BONTANG	17,613,000	12,144,000	0	12,144,000	68.95
662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	20,015,000	26,902,500	0	26,902,500	134.41
	JUMLAH PENDAPATAN 005031600KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR	489,425,000	443,308,310	0	443,308,310	90.58
005031700KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA					
099313	PENGADILAN TINGGI MANADO	3,550,000	2,800,000	0	2,800,000	78.87
099330	PENGADILAN NEGERI MANADO	119,095,000	190,225,000	0	190,225,000	159.73
099334	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	44,627,000	75,985,000	0	75,985,000	170.27
099341	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	20,617,000	40,405,990	0	40,405,990	195.98
099355	PENGADILAN NEGERI TONDANO	107,625,000	82,159,500	0	82,159,500	76.34
402031	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	12,351,000	13,447,000	0	13,447,000	108.87
568726	PENGADILAN NEGERI BITUNG	32,091,000	43,623,500	0	43,623,500	135.94
670211	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	83,155,000	76,332,279	0	76,332,279	91.8
673035	PENGADILAN NEGERI AMURANG	20,277,000	37,396,000	0	37,396,000	184.43
	JUMLAH PENDAPATAN 005031700KD BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA	443,388,000	562,374,269	0	562,374,269	126.84
005031800KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI					
099376	PENGADILAN NEGERI PALU	28,153,000	52,151,500	0	52,151,500	185.24
099383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	11,057,000	9,737,100	0	9,737,100	88.06
099397	PENGADILAN NEGERI LUWUK	32,062,000	37,802,500	0	37,802,500	117.9
099402	PENGADILAN NEGERI POSO	34,677,000	35,757,500	0	35,757,500	103.12
400535	PENGADILAN TINGGI PALU	680,000	860,000	0	860,000	126.47
477203	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	10,109,000	24,929,000	0	24,929,000	246.6
670249	PENGADILAN NEGERI BUOL	2,979,000	4,896,500	0	4,896,500	164.37
672981	PENGADILAN NEGERI PARIGI	17,904,000	22,656,500	0	22,656,500	126.54

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 005031800KD BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI SULTENG]	137,621,000	188,790,600	0	188,790,600	137.18
005031900KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN					
099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	8,489,000	11,830,000	0	11,830,000	139.36
099423	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	267,622,000	252,471,000	0	252,471,000	94.34
099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	38,421,000	45,215,000	0	45,215,000	117.68
099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	116,321,000	13,919,000	0	13,919,000	11.97
099451	PENGADILAN NEGERI BARRU	14,669,000	13,532,000	0	13,532,000	92.25
099465	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	17,314,000	25,501,500	0	25,501,500	147.29
099472	PENGADILAN NEGERI MAROS	38,282,000	25,779,500	0	25,779,500	67.34
099486	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	13,072,000	14,242,000	0	14,242,000	108.95
099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	17,098,000	19,503,000	0	19,503,000	114.07
099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	6,345,000	17,543,000	0	17,543,000	276.49
099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	17,942,000	24,443,500	0	24,443,500	136.24
099529	PENGADILAN NEGERI PINRANG	5,196,000	16,626,000	0	16,626,000	319.98
099533	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	38,633,000	55,632,000	0	55,632,000	144
099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	7,868,000	8,983,500	0	8,983,500	114.18
099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	34,477,000	28,090,000	0	28,090,000	81.47
099561	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	5,770,000	8,369,000	0	8,369,000	145.04
099575	PENGADILAN NEGERI SINJAI	12,313,000	16,679,000	0	16,679,000	135.46
099582	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	29,913,000	27,009,500	0	27,009,500	90.29
099596	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	6,482,000	9,051,000	0	9,051,000	139.63
099601	PENGADILAN NEGERI PALOPO	15,253,000	17,688,000	0	17,688,000	115.96
099618	PENGADILAN NEGERI MAKALE	32,066,000	43,438,500	0	43,438,500	135.47

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402034	PENGADILAN NEGERI BELOPA	8,603,000	17,668,000	0	17,668,000	205.37
672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	6,919,000	22,953,500	0	22,953,500	331.75
673014	PENGADILAN NEGERI MALILI	13,888,000	15,469,500	0	15,469,500	111.39
	JUMLAH PENDAPATAN 005031900KD BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN	772,956,000	751,637,000	0	751,637,000	97.24
005032000KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA					
099660	PENGADILAN NEGERI KENDARI	37,646,000	56,523,500	0	56,523,500	150.14
099664	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	19,675,000	22,585,500	132,500	22,453,000	114.12
099671	PENGADILAN NEGERI RAHA	7,980,000	22,431,500	0	22,431,500	281.1
099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	13,620,000	19,611,500	0	19,611,500	143.99
400541	PENGADILAN TINGGI KENDARI	1,780,000	2,730,000	0	2,730,000	153.37
402032	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	2,056,000	2,838,500	0	2,838,500	138.06
402033	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	1,830,000	7,180,500	0	7,180,500	392.38
477225	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	12,336,000	26,716,000	0	26,716,000	216.57
681440	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	3,424,000	14,926,500	0	14,926,500	435.94
681444	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	9,251,000	19,443,500	0	19,443,500	210.18
	JUMLAH PENDAPATAN 005032000KD BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA	109,598,000	194,987,000	132,500	194,854,500	177.91
005032100KD	BA(005) ES1(03) MALUKU					
099692	PENGADILAN TINGGI AMBON	1,170,000	9,117,000	0	9,117,000	779.23
099707	PENGADILAN NEGERI AMBON	38,903,000	129,013,000	0	129,013,000	331.63
099711	PENGADILAN NEGERI MASOHI	7,005,000	9,077,000	0	9,077,000	129.58
099728	PENGADILAN NEGERI TUAL	6,620,000	5,766,500	0	5,766,500	87.11
402037	PENGADILAN NEGERI DOBO	3,369,000	4,162,500	0	4,162,500	123.55
402038	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	3,885,000	8,138,500	0	8,138,500	209.49

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
403431	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	0	11,300,000	0	11,300,000	0
403433	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	6,829,000	6,110,500	0	6,110,500	89.48
672932	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	11,836,000	11,889,500	0	11,889,500	100.45
	JUMLAH PENDAPATAN 005032100KD BA(005) ES1(03) MALUKU	79,617,000	194,574,500	0	194,574,500	244.39
005032200KD	BA(005) ES1(03) BALI					
099774	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	3,800,000	6,330,000	0	6,330,000	166.58
099781	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	299,473,000	409,352,600	0	409,352,600	136.69
099795	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	110,593,000	104,993,500	0	104,993,500	94.94
099803	PENGADILAN NEGERI NEGARA	25,774,000	32,146,500	0	32,146,500	124.72
099817	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	24,857,000	47,464,664	0	47,464,664	190.95
099821	PENGADILAN NEGERI TABANAN	61,315,000	72,830,500	0	72,830,500	118.78
099838	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	39,322,000	44,683,985	0	44,683,985	113.64
099842	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	64,577,000	76,078,500	0	76,078,500	117.81
099859	PENGADILAN NEGERI BANGLI	18,468,000	22,253,000	37,500	22,215,500	120.29
	JUMLAH PENDAPATAN 005032200KD BA(005) ES1(03) BALI	648,179,000	816,133,249	37,500	816,095,749	125.91
005032300KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA BARAT					
099863	PENGADILAN NEGERI MATARAM	139,274,000	161,625,000	0	161,625,000	116.05
099880	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	28,524,000	24,752,000	0	24,752,000	86.78
099884	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	21,223,000	25,674,500	0	25,674,500	120.97
099891	PENGADILAN NEGERI SELONG	129,703,000	102,263,050	0	102,263,050	78.84
099906	PENGADILAN NEGERI DOMPU	16,636,000	18,098,000	0	18,098,000	108.79
099913	PENGADILAN NEGERI PRAYA	73,629,000	94,377,000	0	94,377,000	128.18
400560	PENGADILAN TINGGI MATARAM	4,140,000	3,290,000	0	3,290,000	79.47
	JUMLAH PENDAPATAN 005032300KD BA(005) ES1(03) NUSA	413,129,000	430,079,550	0	430,079,550	104.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	TENGGARA BARAT					
005032400KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR					
099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	81,404,000	105,748,500	0	105,748,500	129.91
099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	18,219,000	28,225,500	0	28,225,500	154.92
099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	17,153,000	23,557,000	0	23,557,000	137.33
099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	13,241,000	7,812,000	0	7,812,000	59
099969	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	19,896,000	21,825,500	0	21,825,500	109.7
099973	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	7,222,000	13,876,000	0	13,876,000	192.14
099990	PENGADILAN NEGERI ENDE	13,420,000	15,000,500	0	15,000,500	111.78
099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	9,426,000	15,120,500	0	15,120,500	160.41
240166	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	21,718,000	24,721,400	0	24,721,400	113.83
400008	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	11,799,000	11,560,500	0	11,560,500	97.98
400014	PENGADILAN NEGERI RUTENG	13,097,000	18,708,000	0	18,708,000	142.84
400158	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	19,743,000	22,740,500	0	22,740,500	115.18
400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	7,581,000	14,298,500	0	14,298,500	188.61
400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	2,560,000	2,130,000	0	2,130,000	83.2
477231	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	7,299,000	11,296,000	0	11,296,000	154.76
477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	8,558,000	8,865,500	0	8,865,500	103.59
673021	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	20,874,000	30,102,500	0	30,102,500	144.21
	JUMLAH PENDAPATAN 005032400KD BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR	293,210,000	375,588,400	0	375,588,400	128.1
005032500KD	BA(005) ES1(03) PAPUA					
400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	960,000	1,820,000	0	1,820,000	189.58
400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	95,986,000	90,026,000	0	90,026,000	93.79

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400045	PENGADILAN NEGERI WAMENA	7,366,000	8,652,500	0	8,652,500	117.47
400051	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	19,893,000	34,801,000	0	34,801,000	174.94
400091	PENGADILAN NEGERI BIAK	12,353,000	16,870,500	0	16,870,500	136.57
400102	PENGADILAN NEGERI NABIRE	13,363,000	23,856,600	0	23,856,600	178.53
400277	PENGADILAN NEGERI SERUI	8,442,000	8,197,000	0	8,197,000	97.1
614891	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	14,655,000	32,834,000	0	32,834,000	224.05
	JUMLAH PENDAPATAN 005032500KD BA(005) ES1(03) PAPUA	173,018,000	217,057,600	0	217,057,600	125.45
005032600KD	BA(005) ES1(03) BENGKULU					
400111	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	24,202,000	25,938,500	0	25,938,500	107.18
400127	PENGADILAN NEGERI CURUP	19,611,000	13,191,500	0	13,191,500	67.27
400133	PENGADILAN NEGERI MANNA	8,181,000	6,928,000	0	6,928,000	84.68
400240	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	8,145,000	13,927,000	0	13,927,000	170.99
400513	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	810,000	1,030,000	0	1,030,000	127.16
402018	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	14,274,000	6,351,000	0	6,351,000	44.49
672995	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	24,409,000	11,968,500	0	11,968,500	49.03
673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	22,389,000	14,719,000	0	14,719,000	65.74
673042	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	2,814,000	2,698,500	0	2,698,500	95.9
673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI	2,376,000	2,267,500	0	2,267,500	95.43
	JUMLAH PENDAPATAN 005032600KD BA(005) ES1(03) BENGKULU	127,211,000	99,019,500	0	99,019,500	77.84
005032800KD	BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA					
099732	PENGADILAN NEGERI TERNATE	0	30,498,000	0	30,498,000	0
099749	PENGADILAN NEGERI TOBELO	17,406,000	19,644,000	0	19,644,000	112.86
099753	PENGADILAN NEGERI LABUHA	13,465,000	35,749,500	0	35,749,500	265.5
099770	PENGADILAN NEGERI SOASIU	5,309,000	6,783,000	0	6,783,000	127.76

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
403434	PENGADILAN NEGERI SANANA	3,674,000	1,890,000	0	1,890,000	51.44
403435	PENGADILAN NEGERI BOBONG	664,000	560,000	0	560,000	84.34
664523	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	450,000	690,000	0	690,000	153.33
	JUMLAH PENDAPATAN 005032800KD BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA	40,968,000	95,814,500	0	95,814,500	233.88
005032900KD	BA(005) ES1(03) BANTEN					
099074	PENGADILAN NEGERI SERANG	128,376,000	102,450,500	0	102,450,500	79.81
099075	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	13,029,000	25,691,000	0	25,691,000	197.18
099077	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	333,754,000	242,369,500	0	242,369,500	72.62
417845	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	9,500,000	9,115,000	0	9,115,000	95.95
663399	PENGADILAN TINGGI BANTEN	6,710,000	9,330,000	0	9,330,000	139.05
	JUMLAH PENDAPATAN 005032900KD BA(005) ES1(03) BANTEN	491,369,000	388,956,000	0	388,956,000	79.16
005033000KD	BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG					
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	22,642,000	31,149,000	0	31,149,000	137.57
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	18,476,000	26,039,000	0	26,039,000	140.93
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	24,478,000	16,160,500	0	16,160,500	66.02
402020	PENGADILAN NEGERI KOBA	7,240,000	11,191,500	0	11,191,500	154.58
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	9,864,000	10,113,000	0	10,113,000	102.52
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	290,000	260,000	0	260,000	89.66
	JUMLAH PENDAPATAN 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG	82,990,000	94,913,000	0	94,913,000	114.37
005033100KD	BA(005) ES1(03) GORONTALO					
099362	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	46,954,000	76,624,321	0	76,624,321	163.19
400209	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	25,458,000	24,252,500	0	24,252,500	95.26
477219	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	4,799,000	9,821,000	0	9,821,000	204.65

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
664540	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	380,000	530,000	0	530,000	139.47
670185	PENGADILAN NEGERI MARISA	7,118,000	9,628,000	0	9,628,000	135.26
	JUMLAH PENDAPATAN 005033100KD BA(005) ES1(03) GORONTALO	84,709,000	120,855,821	0	120,855,821	142.67
005030900KD	BA(005) ES1(03) RIAU					
099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	55,631,000	44,001,000	0	44,001,000	79.09
109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	142,647,000	150,037,500	0	150,037,500	105.18
663006	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	16,427,000	22,934,500	0	22,934,500	139.61
672949	PENGADILAN NEGERI RANAI	1,123,000	4,311,500	0	4,311,500	383.93
	JUMLAH PENDAPATAN 005030900KD BA(005) ES1(03) RIAU	215,828,000	221,284,500	0	221,284,500	102.53
005032500KD	BA(005) ES1(03) PAPUA					
400070	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	51,225,000	31,685,500	0	31,685,500	61.86
400076	PENGADILAN NEGERI SORONG	23,576,000	35,977,500	0	35,977,500	152.6
400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	3,940,000	10,949,000	0	10,949,000	277.89
402039	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	0	9,228,500	0	9,228,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005032500KD BA(005) ES1(03) PAPUA	78,741,000	87,840,500	0	87,840,500	111.56
005033400KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT					
099622	PENGADILAN NEGERI MAJENE	26,180,000	8,316,000	0	8,316,000	31.76
099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	18,415,000	17,521,500	0	17,521,500	95.15
099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	22,473,000	34,997,500	0	34,997,500	155.73
689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	7,875,000	8,064,500	0	8,064,500	102.41
	JUMLAH PENDAPATAN 005033400KD BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT	74,943,000	68,899,500	0	68,899,500	91.94
005031600KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR					
099273	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	23,779,000	20,213,000	0	20,213,000	85

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 60
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
417705	PENGADILAN NEGERI MALINAU	4,479,000	6,037,500	0	6,037,500	134.8
417723	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	18,839,000	12,654,000	0	12,654,000	67.17
477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	7,823,000	12,366,000	0	12,366,000	158.07
	JUMLAH PENDAPATAN 005031600KD BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR	54,920,000	51,270,500	0	51,270,500	93.35
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	17,167,838,000	21,232,805,852	210,000	21,232,595,852	123.68
04	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**					
005040100KD	PA Jakarta Pusat					
400617	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	225,514,000	289,691,500	0	289,691,500	128.46
400623	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	341,127,000	347,703,000	0	347,703,000	101.93
400632	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	380,248,000	474,372,500	0	474,372,500	124.75
400648	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	566,353,000	657,017,000	0	657,017,000	116.01
400654	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	592,172,000	627,876,000	0	627,876,000	106.03
401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	1,550,000	2,250,001	0	2,250,001	145.16
	JUMLAH PENDAPATAN 005040100KD PA Jakarta Pusat	2,106,964,000	2,398,910,001	0	2,398,910,001	113.86
005043000KD	BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG					
440729	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	160,000	160,000	0	160,000	100
	JUMLAH PENDAPATAN 005043000KD BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG	160,000	160,000	0	160,000	100
005040100KP	BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA					
663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	2,921,000	33,479,000	0	33,479,000	1146.15
	JUMLAH PENDAPATAN 005040100KP BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA	2,921,000	33,479,000	0	33,479,000	1,146.15
005040200KD	BA(005) ES1(04) JAWA BARAT					
309124	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	3,150,000	3,570,000	0	3,570,000	113.33
400663	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	571,322,000	603,503,500	0	603,503,500	105.63

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 61
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
400679	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	432,052,000	488,453,000	0	488,453,000	113.05
400691	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	628,787,000	604,822,300	0	604,822,300	96.19
400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	585,695,000	552,970,000	0	552,970,000	94.41
400711	PENGADILAN AGAMA GARUT	501,784,000	601,739,000	0	601,739,000	119.92
400730	PENGADILAN AGAMA BOGOR	188,449,000	232,117,500	0	232,117,500	123.17
400736	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	76,747,000	96,931,000	0	96,931,000	126.3
400742	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	461,981,000	422,826,000	0	422,826,000	91.52
400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	119,129,000	108,713,000	0	108,713,000	91.26
400767	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	930,196,000	1,246,379,514	0	1,246,379,514	133.99
400773	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	540,355,000	455,465,000	0	455,465,000	84.29
400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	333,062,000	399,419,000	0	399,419,000	119.92
400833	PENGADILAN AGAMA BEKASI	407,156,000	538,969,500	0	538,969,500	132.37
400849	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	432,025,000	477,180,250	0	477,180,250	110.45
400855	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	240,234,000	391,031,800	0	391,031,800	162.77
402588	PENGADILAN AGAMA SUBANG	472,115,000	558,348,100	0	558,348,100	118.27
402996	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	239,648,000	277,447,000	0	277,447,000	115.77
403010	PENGADILAN AGAMA SUMBER	749,247,000	815,998,000	0	815,998,000	108.91
403419	PENGADILAN AGAMA SOREANG	914,974,000	801,801,000	0	801,801,000	87.63
	JUMLAH PENDAPATAN 005040200KD BA(005) ES1(04) JAWA BARAT	8,828,108,000	9,677,684,464	0	9,677,684,464	109.62
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403420	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	175,367,000	166,787,000	0	166,787,000	95.11
403421	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	332,328,000	325,069,000	0	325,069,000	97.82
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	507,695,000	491,856,000	0	491,856,000	96.88
005040200KD	BA(005) ES1(04) JAWA BARAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
604720	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	648,899,000	938,026,900	0	938,026,900	144.56
614707	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	217,385,000	400,558,000	0	400,558,000	184.26
652063	PENGADILAN AGAMA DEPOK	405,251,000	457,445,000	0	457,445,000	112.88
690023	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	212,433,000	234,414,500	0	234,414,500	110.35
690030	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	99,487,000	97,703,500	0	97,703,500	98.21
	JUMLAH PENDAPATAN 005040200KD BA(005) ES1(04) JAWA BARAT	1,583,455,000	2,128,147,900	0	2,128,147,900	134.4
005040300KD	BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH					
400861	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	58,920,000	56,293,000	0	56,293,000	95.54
400880	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	464,865,000	434,188,000	0	434,188,000	93.4
400886	PENGADILAN AGAMA TEGAL	71,640,000	59,432,500	0	59,432,500	82.96
400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	492,556,000	556,995,500	0	556,995,500	113.08
400906	PENGADILAN AGAMA BATANG	214,380,000	216,261,000	0	216,261,000	100.88
400912	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	326,307,000	361,405,500	0	361,405,500	110.76
400921	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	141,059,000	40,962,500	0	40,962,500	29.04
400937	PENGADILAN AGAMA KENDAL	300,724,000	279,348,000	0	279,348,000	92.89
400943	PENGADILAN AGAMA DEMAK	296,194,000	323,595,000	0	323,595,000	109.25
400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	457,727,000	378,855,000	0	378,855,000	82.77
400968	PENGADILAN AGAMA PATI	320,594,000	341,061,500	0	341,061,500	106.38
400974	PENGADILAN AGAMA KUDUS	155,405,000	196,158,500	0	196,158,500	126.22
400983	PENGADILAN AGAMA JEPARA	254,954,000	274,939,000	0	274,939,000	107.84
400999	PENGADILAN AGAMA REMBANG	115,969,000	137,193,500	0	137,193,500	118.3
401003	PENGADILAN AGAMA BLORA	226,107,000	252,026,600	0	252,026,600	111.46
401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	28,563,000	29,346,500	0	29,346,500	102.74
401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	171,830,000	160,532,500	0	160,532,500	93.43

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 63
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401031	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	252,486,000	253,079,500	0	253,079,500	100.24
401050	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	192,398,000	186,724,000	0	186,724,000	97.05
401056	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	325,967,000	303,078,500	0	303,078,500	92.98
401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	296,103,000	307,136,592	0	307,136,592	103.73
401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	185,181,000	179,465,500	0	179,465,500	96.91
401087	PENGADILAN AGAMA CILACAP	636,442,000	674,847,000	0	674,847,000	106.03
401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	289,550,000	285,195,000	0	285,195,000	98.5
401107	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	327,248,000	305,153,000	0	305,153,000	93.25
401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	162,585,000	233,084,000	0	233,084,000	143.36
401138	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	227,971,000	203,152,500	0	203,152,500	89.11
401144	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	266,480,000	272,209,000	0	272,209,000	102.15
401153	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	187,907,000	191,309,500	0	191,309,500	101.81
401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	187,907,000	176,963,000	0	176,963,000	94.18
401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	176,501,000	158,636,500	0	158,636,500	89.88
401181	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	95,385,000	111,214,500	0	111,214,500	116.6
402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	125,143,000	449,029,500	0	449,029,500	358.81
402965	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4,060,000	4,510,000	0	4,510,000	111.08
403016	PENGADILAN AGAMA SLAWI	279,890,000	313,628,500	0	313,628,500	112.05
403022	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	260,697,000	280,637,500	0	280,637,500	107.65
614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	192,630,000	241,819,000	0	241,819,000	125.54
	JUMLAH PENDAPATAN 005040300KD BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH	8,770,325,000	9,229,466,692	0	9,229,466,692	105.24
005040400KD	BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA					
401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	87,768,000	98,055,000	0	98,055,000	111.72

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401202	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	0	207,770,000	0	207,770,000	0
401220	PENGADILAN AGAMA WATES	89,641,000	72,860,500	0	72,860,500	81.28
401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	262,760,000	200,164,500	0	200,164,500	76.18
401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	167,558,000	162,076,500	0	162,076,500	96.73
547658	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	69,817,000	790,000	0	790,000	1.13
	JUMLAH PENDAPATAN 005040400KD BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA	677,544,000	741,716,500	0	741,716,500	109.47
005040500KD	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya					
309125	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	5,230,000	5,160,000	0	5,160,000	98.66
401241	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	863,938,000	951,712,000	0	951,712,000	110.16
401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	324,961,000	352,158,000	0	352,158,000	108.37
401263	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	363,216,000	529,198,000	0	529,198,000	145.7
401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	368,317,000	388,081,974	0	388,081,974	105.37
401288	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	14,915,000	18,897,000	0	18,897,000	126.7
401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	262,826,000	262,879,500	0	262,879,500	100.02
401308	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	311,785,000	306,865,000	0	306,865,000	98.42
401323	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	284,279,000	298,040,000	0	298,040,000	104.84
401339	PENGADILAN AGAMA JEMBER	767,635,000	796,957,500	0	796,957,500	103.82
401345	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	247,869,000	243,824,500	0	243,824,500	98.37
401351	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	246,582,000	243,207,500	0	243,207,500	98.63
401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	593,289,000	576,561,500	0	576,561,500	97.18
401376	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	422,888,000	441,859,000	0	441,859,000	104.49
401382	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	368,246,000	333,952,500	0	333,952,500	90.69
401391	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	244,771,000	211,328,500	0	211,328,500	86.34

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
401403	PENGADILAN AGAMA BLITAR	543,524,000	475,469,400	0	475,469,400	87.48
401411	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	246,692,000	244,825,000	0	244,825,000	99.24
401427	PENGADILAN AGAMA MALANG	297,356,000	372,372,900	0	372,372,900	125.23
401433	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	226,814,000	263,201,000	0	263,201,000	116.04
401442	PENGADILAN AGAMA BANGIL	268,172,000	298,083,500	0	298,083,500	111.15
401458	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	63,603,000	63,345,000	0	63,345,000	99.59
401464	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	305,248,000	357,581,000	7,110,000	350,471,000	114.82
401473	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	389,976,000	324,803,000	0	324,803,000	83.29
401489	PENGADILAN AGAMA MADIUN	47,095,000	47,761,500	0	47,761,500	101.42
401495	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	183,274,000	168,421,500	0	168,421,500	91.9
401509	PENGADILAN AGAMA NGAWI	202,693,000	218,557,500	0	218,557,500	107.83
401515	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	176,690,000	202,738,500	0	202,738,500	114.74
401521	PENGADILAN AGAMA PACITAN	145,551,000	130,060,500	0	130,060,500	89.36
401540	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	188,830,000	204,063,000	0	204,063,000	108.07
401546	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	194,438,000	217,633,500	0	217,633,500	111.93
401552	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	146,037,000	184,453,500	0	184,453,500	126.31
401561	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	209,561,000	208,208,000	0	208,208,000	99.35
401577	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	65,735,000	67,722,500	0	67,722,500	103.02
403031	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	198,854,000	173,692,000	0	173,692,000	87.35
403047	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	96,687,000	108,599,522	0	108,599,522	112.32
450738	PENGADILAN AGAMA TUBAN	297,512,000	322,236,500	0	322,236,500	108.31
604731	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	832,342,000	856,308,500	0	856,308,500	102.88
	JUMLAH PENDAPATAN 005040500KD Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	11,017,431,000	11,470,819,796	7,110,000	11,463,709,796	104.12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005040600KD	BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
401583	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	1,110,000	1,420,000	0	1,420,000	127.93
401592	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	73,266,000	86,095,500	0	86,095,500	117.51
401603	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	7,413,000	10,374,000	0	10,374,000	139.94
401612	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	97,650,000	78,226,500	0	78,226,500	80.11
401628	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	27,300,000	20,320,000	0	20,320,000	74.43
401634	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	52,966,000	90,170,500	0	90,170,500	170.24
401643	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	97,901,000	119,880,500	0	119,880,500	122.45
401659	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	62,315,000	74,524,500	0	74,524,500	119.59
401665	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	43,753,000	43,191,500	0	43,191,500	98.72
401671	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	45,046,000	84,356,500	0	84,356,500	187.27
401690	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	38,647,000	33,664,500	0	33,664,500	87.11
401696	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	51,288,000	59,500,000	0	59,500,000	116.01
401710	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	49,844,000	11,545,000	0	11,545,000	23.16
401716	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	30,952,000	38,439,000	0	38,439,000	124.19
401722	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	57,555,000	36,924,500	0	36,924,500	64.16
401731	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	12,815,000	11,720,000	0	11,720,000	91.46
401747	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	18,266,000	15,964,500	0	15,964,500	87.4
401753	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	12,865,000	18,311,000	0	18,311,000	142.33
401762	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	22,572,000	25,273,000	0	25,273,000	111.97
402608	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	55,639,000	74,449,000	0	74,449,000	133.81
403426	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	22,146,000	20,348,000	0	20,348,000	91.88
403427	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	24,912,000	41,930,500	0	41,930,500	168.31
403428	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	12,400,000	19,819,500	0	19,819,500	159.83

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 67
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
690108	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG	43,359,000	43,412,000	0	43,412,000	100.12
	JUMLAH PENDAPATAN 005040600KD BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	961,980,000	1,059,860,000	0	1,059,860,000	110.17
005040700KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA					
401778	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	1,590,000	1,520,000	0	1,520,000	95.6
401784	PENGADILAN AGAMA BINJAI	62,124,000	79,190,710	0	79,190,710	127.47
401793	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	15,818,000	22,588,500	0	22,588,500	142.8
401804	PENGADILAN AGAMA MEDAN	293,691,000	353,051,000	0	353,051,000	120.21
401813	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	145,417,000	139,950,500	0	139,950,500	96.24
401829	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	26,023,000	36,098,000	0	36,098,000	138.72
401835	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	42,136,000	47,819,500	0	47,819,500	113.49
401841	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	6,460,000	7,080,500	0	7,080,500	109.61
401860	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	21,561,000	22,023,500	0	22,023,500	102.15
401866	PENGADILAN AGAMA BALIGE	961,000	3,449,000	0	3,449,000	358.9
401872	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	8,760,000	12,694,500	0	12,694,500	144.91
401881	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	26,487,000	69,786,000	0	69,786,000	263.47
401897	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	4,305,000	7,673,500	0	7,673,500	178.25
402040	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	58,745,000	62,748,500	0	62,748,500	106.82
403062	PENGADILAN AGAMA KISARAN	198,709,000	221,307,000	0	221,307,000	111.37
403078	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	249,369,000	263,235,500	0	263,235,500	105.56
403084	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	108,226,000	126,106,500	0	126,106,500	116.52
403399	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	81,852,000	103,647,000	0	103,647,000	126.63
547683	PENGADILAN AGAMA STABAT	158,900,000	199,542,000	0	199,542,000	125.58
604745	PENGADILAN AGAMA PANDAN	19,829,000	24,969,000	0	24,969,000	125.92

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
631980	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	1,130,000	2,610,000	0	2,610,000	230.97
631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	57,529,000	56,486,500	0	56,486,500	98.19
690112	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	42,134,000	41,732,500	0	41,732,500	99.05
	JUMLAH PENDAPATAN 005040700KD BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA	1,631,756,000	1,905,309,710	0	1,905,309,710	116.76
005040800KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT					
401901	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	610,000	660,000	0	660,000	108.2
401917	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	104,304,000	126,538,000	0	126,538,000	121.32
401923	PENGADILAN AGAMA SOLOK	33,390,000	34,884,500	0	34,884,500	104.48
401932	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	15,879,000	17,523,000	0	17,523,000	110.35
401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	65,593,000	61,062,000	0	61,062,000	93.09
401954	PENGADILAN AGAMA PADANG	108,004,000	200,182,500	0	200,182,500	185.35
401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	30,486,000	29,597,000	0	29,597,000	97.08
401979	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	33,649,000	36,158,500	0	36,158,500	107.46
401985	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	69,256,000	63,470,600	0	63,470,600	91.65
401991	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	39,044,000	34,567,000	0	34,567,000	88.53
402005	PENGADILAN AGAMA PAINAN	56,170,000	65,783,000	0	65,783,000	117.11
402030	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	47,352,000	39,449,500	0	39,449,500	83.31
402036	PENGADILAN AGAMA TALU	81,665,000	75,578,500	0	75,578,500	92.55
402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	18,606,000	18,867,000	0	18,867,000	101.4
402051	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	36,817,000	73,282,500	0	73,282,500	199.05
402067	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	41,000,000	45,579,000	0	45,579,000	111.17
402614	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	42,224,000	42,522,500	0	42,522,500	100.71
403400	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	31,540,000	31,739,000	0	31,739,000	100.63

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402011	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	59,138,000	82,604,500	0	82,604,500	139.68
	JUMLAH PENDAPATAN 005040800KD BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT	914,727,000	1,080,048,600	0	1,080,048,600	118.07
005040900KD	BA(005) ES1(04) RIAU					
402073	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	176,872,000	221,697,500	0	221,697,500	125.34
402082	PENGADILAN AGAMA RENGAT	78,504,000	83,161,588	0	83,161,588	105.93
402098	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	118,786,000	189,756,000	0	189,756,000	159.75
402102	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	108,982,000	165,429,450	0	165,429,450	151.8
402118	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	61,749,000	77,320,500	0	77,320,500	125.22
402124	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	118,310,000	110,781,000	0	110,781,000	93.64
402133	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	29,800,000	32,611,500	0	32,611,500	109.43
402623	PENGADILAN AGAMA DUMAI	52,093,000	55,935,000	0	55,935,000	107.38
402971	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	980,000	1,070,000	0	1,070,000	109.18
403402	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	65,706,000	67,813,500	0	67,813,500	103.21
403403	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	46,845,000	47,842,500	0	47,842,500	102.13
632000	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	41,050,000	59,081,000	0	59,081,000	143.92
632002	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	67,062,000	91,604,000	0	91,604,000	136.6
	JUMLAH PENDAPATAN 005040900KD BA(005) ES1(04) RIAU	966,739,000	1,204,103,538	0	1,204,103,538	124.55
005041000KD	BA(005) ES1(04) JAMBI					
402186	PENGADILAN AGAMA JAMBI	100,918,000	126,493,000	0	126,493,000	125.34
402192	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	44,499,000	47,508,500	0	47,508,500	106.76
402206	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	73,621,000	57,699,500	0	57,699,500	78.37
402212	PENGADILAN AGAMA BANGKO	39,552,000	48,995,500	0	48,995,500	123.88
402221	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	57,413,000	52,517,000	0	52,517,000	91.47

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 70
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
403053	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	44,736,000	51,840,500	0	51,840,500	115.88
547662	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	370,000	290,000	0	290,000	78.38
632019	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	38,330,000	44,706,500	0	44,706,500	116.64
632023	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	42,847,000	46,524,500	0	46,524,500	108.58
652021	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	0	62,280,000	0	62,280,000	0
652035	PENGADILAN AGAMA SENGETI	59,527,000	60,355,000	0	60,355,000	101.39
	JUMLAH PENDAPATAN 005041000KD BA(005) ES1(04) JAMBI	501,813,000	599,210,000	0	599,210,000	119.41
005041100KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN					
402237	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	326,307,000	660,000	0	660,000	0.2
402243	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	272,294,000	307,515,500	0	307,515,500	112.94
402252	PENGADILAN AGAMA LAHAT	70,524,000	120,130,500	0	120,130,500	170.34
402268	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	61,799,000	67,312,500	0	67,312,500	108.92
402274	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	166,701,000	159,478,500	0	159,478,500	95.67
402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	125,587,000	126,708,000	0	126,708,000	100.89
402299	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	161,292,000	175,114,000	0	175,114,000	108.57
402639	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	69,148,000	98,064,000	0	98,064,000	141.82
403408	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	326,307,000	95,845,200	0	95,845,200	29.37
403409	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	94,330,000	131,870,000	0	131,870,000	139.8
403410	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	30,644,000	39,797,500	0	39,797,500	129.87
403411	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	27,325,000	28,604,500	0	28,604,500	104.68
403412	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	56,116,000	40,628,500	0	40,628,500	72.4
	JUMLAH PENDAPATAN 005041100KD BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN	1,788,374,000	1,391,728,700	0	1,391,728,700	77.82
005041200KD	BA(005) ES1(04) LAMPUNG					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402325	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	151,115,000	201,872,500	0	201,872,500	133.59
402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	62,910,000	63,641,000	0	63,641,000	101.16
402350	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	103,616,000	95,473,000	0	95,473,000	92.14
402356	PENGADILAN AGAMA METRO	84,176,000	67,003,500	0	67,003,500	79.6
402645	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	159,370,000	212,229,000	0	212,229,000	133.17
403413	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	57,314,000	73,772,000	0	73,772,000	128.72
403414	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	75,101,000	80,329,000	0	80,329,000	106.96
403415	PENGADILAN AGAMA MESUJI	31,673,000	40,915,000	0	40,915,000	129.18
403416	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	46,005,000	70,809,000	0	70,809,000	153.92
403418	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	233,700,000	251,822,500	0	251,822,500	107.75
547679	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	460,000	630,000	0	630,000	136.96
614685	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	0	58,426,000	0	58,426,000	0
614692	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	79,568,000	96,422,500	0	96,422,500	121.18
652042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	220,776,000	289,326,500	0	289,326,500	131.05
652056	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	47,568,000	59,992,500	0	59,992,500	126.12
	JUMLAH PENDAPATAN 005041200KD BA(005) ES1(04) LAMPUNG	1,353,352,000	1,662,664,000	0	1,662,664,000	122.86
005041300KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT					
402362	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	128,329,000	144,745,000	0	144,745,000	112.79
402371	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	182,461,000	210,443,000	0	210,443,000	115.34
402387	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	90,774,000	102,459,500	0	102,459,500	112.87
402393	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	41,416,000	47,137,500	0	47,137,500	113.81
402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	41,340,000	57,355,000	0	57,355,000	138.74
402413	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	25,275,000	27,438,000	0	27,438,000	108.56
402651	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	310,000	300,000	0	300,000	96.77

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402670	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	52,139,000	76,115,500	0	76,115,500	145.99
403422	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	0	36,359,500	0	36,359,500	0
403424	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	19,096,000	25,221,000	0	25,221,000	132.07
403425	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	85,971,000	97,641,500	0	97,641,500	113.57
632040	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	15,409,000	16,781,500	0	16,781,500	108.91
	JUMLAH PENDAPATAN 005041300KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT	682,520,000	841,997,000	0	841,997,000	123.37
005041400KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH					
401974	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	15,300,000	27,785,000	0	27,785,000	181.6
401975	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	11,083,000	13,189,000	0	13,189,000	119
401976	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	14,830,000	22,563,000	0	22,563,000	152.14
401977	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	15,129,000	14,812,500	0	14,812,500	97.91
401980	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	10,623,000	10,616,500	0	10,616,500	99.94
401981	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	16,305,000	20,134,500	0	20,134,500	123.49
401982	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	4,083,000	4,812,500	0	4,812,500	117.87
402422	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	54,946,000	53,271,500	0	53,271,500	96.95
402438	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	83,330,000	67,539,000	0	67,539,000	81.05
402444	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	41,379,000	57,065,500	0	57,065,500	137.91
402453	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	30,738,000	48,183,250	0	48,183,250	156.75
402469	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	56,994,000	90,311,084	0	90,311,084	158.46
402475	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	79,662,000	93,933,500	0	93,933,500	117.92
402990	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	160,000	300,000	0	300,000	187.5
	JUMLAH PENDAPATAN 005041400KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH	434,562,000	524,516,834	0	524,516,834	120.7
005041500KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
309048	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	64,030,000	62,227,500	0	62,227,500	97.18
309049	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	122,808,000	101,178,000	0	101,178,000	82.39
309050	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	58,412,000	53,328,000	0	53,328,000	91.3
402450	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	470,000	560,000	0	560,000	119.15
402501	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	163,547,000	174,451,500	0	174,451,500	106.67
402520	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	115,761,000	105,147,500	0	105,147,500	90.83
402526	PENGADILAN AGAMA RANTAU	43,899,000	54,761,000	0	54,761,000	124.74
402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	36,971,000	51,135,500	0	51,135,500	138.31
402541	PENGADILAN AGAMA BARABAI	67,598,000	66,074,500	0	66,074,500	97.75
402557	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	83,624,000	81,358,000	0	81,358,000	97.29
402563	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	55,724,000	60,235,000	0	60,235,000	108.1
402572	PENGADILAN AGAMA NEGARA	14,276,000	16,386,000	0	16,386,000	114.78
632044	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	70,135,000	95,819,000	0	95,819,000	136.62
690140	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	105,982,000	88,644,000	0	88,644,000	83.64
	JUMLAH PENDAPATAN 005041500KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	1,003,237,000	1,011,305,500	0	1,011,305,500	100.8
005041600KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR					
309052	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	156,028,000	180,293,000	0	180,293,000	115.55
309053	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	238,340,000	241,060,000	0	241,060,000	101.14
309054	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	70,279,000	76,834,000	0	76,834,000	109.33
309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	206,081,000	225,481,700	0	225,481,700	109.41
309056	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	57,943,000	60,404,000	0	60,404,000	104.25
401983	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	46,537,000	48,861,550	0	48,861,550	105
401986	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	16,808,000	20,533,000	0	20,533,000	122.16

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402481	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	450,000	620,000	0	620,000	137.78
652081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	50,295,000	65,529,500	0	65,529,500	130.29
652098	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	71,867,000	95,603,800	0	95,603,800	133.03
	JUMLAH PENDAPATAN 005041600KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR	914,628,000	1,015,220,550	0	1,015,220,550	111
005041700KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA					
309058	PENGADILAN AGAMA MANADO	49,446,000	41,039,000	0	41,039,000	83
309059	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	55,445,000	36,943,000	0	36,943,000	66.63
309060	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	8,881,000	4,995,000	0	4,995,000	56.24
401996	PENGADILAN AGAMA LOLAK	62,280,000	49,910,000	0	49,910,000	80.14
401997	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	18,601,000	15,921,500	0	15,921,500	85.59
401998	PENGADILAN AGAMA BOROKO	0	25,730,000	0	25,730,000	0
401999	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	15,761,000	12,162,500	0	12,162,500	77.17
402682	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	130,000	130,000	0	130,000	100
402702	PENGADILAN AGAMA TONDANO	8,795,000	10,842,000	0	10,842,000	123.27
604752	PENGADILAN AGAMA BITUNG	0	33,445,000	0	33,445,000	0
682172	PENGADILAN AGAMA AMURANG	3,763,000	6,655,000	0	6,655,000	176.85
	JUMLAH PENDAPATAN 005041700KD BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA	223,102,000	237,773,000	0	237,773,000	106.58
005041800KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA					
309062	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	95,059,000	98,948,500	0	98,948,500	104.09
309063	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	45,434,000	40,737,500	0	40,737,500	89.66
309064	PENGADILAN AGAMA POSO	21,410,000	19,689,000	0	19,689,000	91.96
309066	PENGADILAN AGAMA LUWUK	91,647,000	66,312,500	0	66,312,500	72.36
401992	PENGADILAN AGAMA AMPANA	26,265,000	28,581,000	0	28,581,000	108.82

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
576250	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	270,000	140,000	0	140,000	51.85
604766	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	0	49,675,000	0	49,675,000	0
652103	PENGADILAN AGAMA BUOL	23,576,000	26,245,000	0	26,245,000	111.32
652120	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	53,738,000	57,881,500	0	57,881,500	107.71
652124	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	26,942,000	29,975,000	0	29,975,000	111.26
690072	PENGADILAN AGAMA PARIGI	58,800,000	51,919,500	0	51,919,500	88.3
	JUMLAH PENDAPATAN 005041800KD BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA PALU]	443,141,000	470,104,500	0	470,104,500	106.08
005041900KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN					
309067	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	1,670,000	1,800,000	0	1,800,000	107.78
309068	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	73,079,000	62,771,000	0	62,771,000	85.89
309069	PENGADILAN AGAMA MAROS	211,307,000	108,027,000	0	108,027,000	51.12
309070	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	234,749,000	380,369,500	0	380,369,500	162.03
309071	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	67,114,000	59,700,500	0	59,700,500	88.95
309073	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	37,195,000	74,614,375	0	74,614,375	200.6
309074	PENGADILAN AGAMA BARRU	45,897,000	50,723,000	0	50,723,000	110.51
309075	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	126,573,000	130,029,000	0	130,029,000	102.73
309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	211,307,000	171,137,500	0	171,137,500	80.99
309077	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	155,084,000	250,855,850	0	250,855,850	161.75
309078	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	89,065,000	97,598,500	0	97,598,500	109.58
309079	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	46,566,000	42,585,000	0	42,585,000	91.45
309080	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	115,149,000	94,671,000	0	94,671,000	82.22
309081	PENGADILAN AGAMA SINJAI	55,490,000	57,634,000	0	57,634,000	103.86
309082	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	18,522,000	19,037,000	0	19,037,000	102.78

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
309083	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	56,898,000	64,606,500	0	64,606,500	113.55
309084	PENGADILAN AGAMA PINRANG	144,628,000	129,010,500	0	129,010,500	89.2
309085	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	52,665,000	44,505,000	0	44,505,000	84.51
309087	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	109,045,000	109,110,500	0	109,110,500	100.06
309088	PENGADILAN AGAMA PALOPO	46,929,000	43,980,000	0	43,980,000	93.72
309089	PENGADILAN AGAMA MAKALE	13,467,000	9,644,000	0	9,644,000	71.61
401987	PENGADILAN AGAMA BELOPA	66,117,000	82,099,500	0	82,099,500	124.17
401989	PENGADILAN AGAMA MALILI	55,557,000	51,054,500	0	51,054,500	91.9
632052	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	65,264,000	51,095,000	0	51,095,000	78.29
	JUMLAH PENDAPATAN 005041900KD BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN	2,099,337,000	2,186,658,725	0	2,186,658,725	104.16
005042000KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA					
309094	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	47,238,000	58,261,000	0	58,261,000	123.34
309095	PENGADILAN AGAMA RAHA	45,823,000	50,815,500	0	50,815,500	110.9
309096	PENGADILAN AGAMA KENDARI	109,716,000	119,700,500	0	119,700,500	109.1
309097	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	0	50,871,000	0	50,871,000	0
401993	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	27,430,000	27,568,000	0	27,568,000	100.5
401994	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	23,361,000	28,472,500	0	28,472,500	121.88
401995	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	17,561,000	30,286,500	0	30,286,500	172.46
576254	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	80,000	430,000	0	430,000	537.5
604773	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	65,679,000	55,445,500	0	55,445,500	84.42
690086	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	35,509,000	47,118,500	0	47,118,500	132.69
690090	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	43,130,000	45,694,000	0	45,694,000	105.94
	JUMLAH PENDAPATAN 005042000KD BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	415,527,000	514,663,000	0	514,663,000	123.86

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 77
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005042100KD	BA(005) ES1(04) MALUKU					
309098	PENGADILAN AGAMA AMBON	62,951,000	70,714,500	0	70,714,500	112.33
309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	16,840,000	14,442,500	0	14,442,500	85.76
309100	PENGADILAN AGAMA MASOHI	21,983,000	18,898,500	0	18,898,500	85.97
402002	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	4,286,000	14,720,500	0	14,720,500	343.46
402003	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	3,916,000	10,876,000	0	10,876,000	277.73
402006	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	21,101,000	44,054,500	0	44,054,500	208.78
402711	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	70,000	140,000	0	140,000	200
	JUMLAH PENDAPATAN 005042100KD BA(005) ES1(04) MALUKU	131,147,000	173,846,500	0	173,846,500	132.56
005042200KD	BA(005) ES1(04) BALI					
309105	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	53,505,000	63,989,500	0	63,989,500	119.6
309106	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	18,977,000	16,595,500	0	16,595,500	87.45
402727	PENGADILAN AGAMA BANGLI	1,271,000	860,000	0	860,000	67.66
402733	PENGADILAN AGAMA NEGARA	27,024,000	24,370,000	0	24,370,000	90.18
402742	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	3,538,000	3,936,000	0	3,936,000	111.25
402758	PENGADILAN AGAMA TABANAN	6,608,000	9,123,500	0	9,123,500	138.07
402764	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	901,000	1,829,000	0	1,829,000	203
402773	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	2,350,000	3,995,000	0	3,995,000	170
614732	PENGADILAN AGAMA BADUNG	22,000,000	33,347,500	0	33,347,500	151.58
	JUMLAH PENDAPATAN 005042200KD BA(005) ES1(04) BALI	136,174,000	158,046,000	0	158,046,000	116.06
005042300KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT					
309107	PENGADILAN AGAMA MATARAM	77,935,000	76,297,000	0	76,297,000	97.9
309109	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	92,460,000	120,647,500	0	120,647,500	130.49
309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	153,836,000	193,204,000	0	193,204,000	125.59

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
309111	PENGADILAN AGAMA SELONG	157,992,000	172,359,000	0	172,359,000	109.09
309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	196,036,000	189,073,000	0	189,073,000	96.45
309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	0	99,061,000	0	99,061,000	0
402789	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1,048,000	1,350,000	0	1,350,000	128.82
614728	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	168,463,000	180,776,000	0	180,776,000	107.31
690154	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	30,072,000	34,924,000	0	34,924,000	116.13
	JUMLAH PENDAPATAN 005042300KD BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT	877,842,000	1,067,691,500	0	1,067,691,500	121.63
005042400KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR					
309115	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	1,770,000	2,273,000	0	2,273,000	128.42
309116	PENGADILAN AGAMA KUPANG	14,583,000	21,714,700	0	21,714,700	148.9
309117	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	7,099,000	4,792,000	0	4,792,000	67.5
309118	PENGADILAN AGAMA ENDE	8,245,000	7,472,100	0	7,472,100	90.63
309119	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	1,461,000	2,001,500	0	2,001,500	137
402795	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	12,290,000	3,849,000	0	3,849,000	31.32
402809	PENGADILAN AGAMA RUTENG	2,579,000	4,185,000	0	4,185,000	162.27
402815	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	1,443,000	2,692,000	0	2,692,000	186.56
402821	PENGADILAN AGAMA SOE	796,000	1,151,500	0	1,151,500	144.66
402840	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	710,000	495,000	0	495,000	69.72
402846	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	1,416,000	1,787,500	0	1,787,500	126.24
402852	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	3,921,000	5,453,500	0	5,453,500	139.08
576261	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	80,000	80,000	0	80,000	100
632065	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	3,210,000	4,264,000	0	4,264,000	132.83
682282	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	8,083,000	6,366,500	0	6,366,500	78.76

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 005042400KD BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	67,686,000	68,577,300	0	68,577,300	101.32
005042500KD	BA(005) ES1(04) PAPUA					
402861	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	0	150,000	0	150,000	0
402877	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	3,490,000	48,922,000	0	48,922,000	1401.78
402892	PENGADILAN AGAMA BIAK	0	6,896,000	0	6,896,000	0
402928	PENGADILAN AGAMA NABIRE	0	15,837,500	0	15,837,500	0
402934	PENGADILAN AGAMA WAMENA	0	4,127,500	0	4,127,500	0
402943	PENGADILAN AGAMA SERUI	0	4,430,000	0	4,430,000	0
402959	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	0	36,400,500	0	36,400,500	0
614770	PENGADILAN AGAMA SENTANI	0	17,381,000	0	17,381,000	0
614774	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	0	27,816,000	0	27,816,000	0
614781	PENGADILAN AGAMA PANIAI	0	774,500	0	774,500	0
690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	0	11,298,500	0	11,298,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005042500KD BA(005) ES1(04) PAPUA	3,490,000	174,033,500	0	174,033,500	4,986.63
005042600KD	BA(005) ES1(04) BENGKULU					
309120	PENGADILAN AGAMA MANNA	45,197,000	45,319,000	0	45,319,000	100.27
309121	PENGADILAN AGAMA CURUP	0	56,137,500	0	56,137,500	0
309122	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	77,062,000	81,508,500	0	81,508,500	105.77
309123	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	104,355,000	110,024,500	0	110,024,500	105.43
403404	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	35,254,000	34,553,000	0	34,553,000	98.01
403405	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	23,206,000	24,984,500	0	24,984,500	107.66
403406	PENGADILAN AGAMA TAIS	33,668,000	46,297,000	0	46,297,000	137.51
403407	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	40,140,000	41,469,000	0	41,469,000	103.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 80
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
576275	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	210,000	230,000	0	230,000	109.52
690133	PENGADILAN AGAMA LEBONG	18,045,000	23,321,000	0	23,321,000	129.24
	JUMLAH PENDAPATAN 005042600KD BA(005) ES1(04) BENGKULU	377,137,000	463,844,000	0	463,844,000	122.99
005042800KD	BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA					
309101	PENGADILAN AGAMA TERNATE	78,883,000	96,961,500	0	96,961,500	122.92
309102	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	7,636,000	29,124,000	0	29,124,000	381.4
309103	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	24,532,000	28,850,500	0	28,850,500	117.6
309104	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	29,538,000	34,504,000	0	34,504,000	116.81
440741	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	190,000	190,000	0	190,000	100
	JUMLAH PENDAPATAN 005042800KD BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA	140,779,000	189,630,000	0	189,630,000	134.7
005042900KD	BA(005) ES1(04) BANTEN					
400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	565,951,000	628,042,500	0	628,042,500	110.97
400818	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	173,743,000	161,535,000	0	161,535,000	92.97
400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	338,184,000	431,746,650	0	431,746,650	127.67
417851	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	149,730,000	171,750,500	0	171,750,500	114.71
440713	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	900,000	1,160,001	0	1,160,001	128.89
604724	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	616,714,000	755,804,700	0	755,804,700	122.55
652077	PENGADILAN AGAMA CILEGON	89,995,000	97,024,000	0	97,024,000	107.81
	JUMLAH PENDAPATAN 005042900KD BA(005) ES1(04) BANTEN	1,935,217,000	2,247,063,351	0	2,247,063,351	116.11
005043000KD	BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG					
402303	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	55,921,000	53,598,000	0	53,598,000	95.85
402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	115,847,000	104,678,000	0	104,678,000	90.36
403093	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	96,169,000	126,185,501	0	126,185,501	131.21

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
690129	PENGADILAN AGAMA MENTOK	30,625,000	40,817,000	0	40,817,000	133.28
	JUMLAH PENDAPATAN 005043000KD BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG	298,562,000	325,278,501	0	325,278,501	108.95
005043100KD	BA(005) ES1(04) GORONTALO					
309061	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	69,817,000	69,501,500	0	69,501,500	99.55
402000	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	0	63,362,000	0	63,362,000	0
402001	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	45,519,000	39,529,500	0	39,529,500	86.84
402691	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	84,005,000	113,271,000	0	113,271,000	134.84
440735	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	310,000	180,000	0	180,000	58.06
652131	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	44,772,000	25,648,500	0	25,648,500	57.29
682186	PENGADILAN AGAMA MARISA	36,440,000	50,051,500	0	50,051,500	137.35
	JUMLAH PENDAPATAN 005043100KD BA(005) ES1(04) GORONTALO	280,863,000	361,544,000	0	361,544,000	128.73
005043200KD	PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG					
402149	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	78,975,000	98,081,000	0	98,081,000	124.19
402155	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	21,910,000	20,937,000	0	20,937,000	95.56
402161	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	58,433,000	56,807,500	0	56,807,500	97.22
402180	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	15,858,000	12,318,500	0	12,318,500	77.68
547700	PENGADILAN AGAMA BATAM	196,272,000	229,719,000	0	229,719,000	117.04
614671	PENGADILAN AGAMA NATUNA	22,700,000	21,528,500	0	21,528,500	94.84
	JUMLAH PENDAPATAN 005043200KD PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	394,148,000	439,391,500	0	439,391,500	111.48
005043300KD	BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT					
402007	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	0	7,457,500	0	7,457,500	0
402883	PENGADILAN AGAMA SORONG	0	42,371,000	0	42,371,000	0
402903	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	0	11,753,000	0	11,753,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402912	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	0	45,546,500	0	45,546,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005043300KD BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT	0	107,128,000	0	107,128,000	
005043400KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT					
309091	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	110,015,000	117,188,500	0	117,188,500	106.52
309092	PENGADILAN AGAMA MAJENE	40,401,000	34,386,000	0	34,386,000	85.11
309093	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	43,177,000	59,496,500	0	59,496,500	137.8
401988	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	19,774,000	28,038,000	0	28,038,000	141.79
	JUMLAH PENDAPATAN 005043400KD BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT	213,367,000	239,109,000	0	239,109,000	112.06
005041600KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR					
402676	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	67,235,000	66,680,000	0	66,680,000	99.17
417658	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	49,315,000	62,973,500	0	62,973,500	127.7
690175	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	40,566,000	39,715,000	0	39,715,000	97.9
	JUMLAH PENDAPATAN 005041600KD BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR	157,116,000	169,368,500	0	169,368,500	107.8
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	52,842,926,000	58,061,955,662	7,110,000	58,054,845,662	109.88
05	**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**					
005050100KD	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA					
526705	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	0	12,911,000	0	12,911,000	0
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	0	94,220,000	0	94,220,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005050100KD BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	0	107,131,000	0	107,131,000	
005050100KP	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA					
663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	0	1,704,500	0	1,704,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005050100KP BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	0	1,704,500	0	1,704,500	
005050200KD	BA(005) ES1(05) JAWA BARAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
531824	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	0	47,784,000	0	47,784,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005050200KD BA(005) ES1(05) JAWA BARAT	0	47,784,000	0	47,784,000	
005050300KD	BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH					
531831	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	0	30,453,000	0	30,453,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005050300KD BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH	0	30,453,000	0	30,453,000	
005050400KD	BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA					
578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	0	4,363,900	0	4,363,900	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005050400KD BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA	0	4,363,900	0	4,363,900	
005050500KD	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya					
526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	57,233,000	97,999,000	0	97,999,000	171.23
548941	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	0	1,970,000	0	1,970,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005050500KD Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	57,233,000	99,969,000	0	99,969,000	174.67
005050600KD	BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
578819	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	12,582,000	13,061,000	0	13,061,000	103.81
	JUMLAH PENDAPATAN 005050600KD BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	12,582,000	13,061,000	0	13,061,000	103.81
005050700KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA					
526726	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	3,100,000	3,650,000	0	3,650,000	117.74
526747	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	65,920,000	53,871,500	0	53,871,500	81.72
	JUMLAH PENDAPATAN 005050700KD BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA	69,020,000	57,521,500	0	57,521,500	83.34
005050800KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT					
531845	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	14,726,000	32,895,650	0	32,895,650	223.38
	JUMLAH PENDAPATAN 005050800KD BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT	14,726,000	32,895,650	0	32,895,650	223.38
005050900KD	BA(005) ES1(05) RIAU					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 84
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
578823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	27,132,000	44,348,100	0	44,348,100	163.45
	JUMLAH PENDAPATAN 005050900KD BA(005) ES1(05) RIAU	27,132,000	44,348,100	0	44,348,100	163.45
005051000KD	BA(005) ES1(05) JAMBI					
578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	14,199,000	17,514,500	0	17,514,500	123.35
	JUMLAH PENDAPATAN 005051000KD BA(005) ES1(05) JAMBI	14,199,000	17,514,500	0	17,514,500	123.35
005051100KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN					
526751	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	32,858,000	72,673,000	0	72,673,000	221.17
	JUMLAH PENDAPATAN 005051100KD BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN	32,858,000	72,673,000	0	72,673,000	221.17
005051200KD	BA(005) ES1(05) LAMPUNG					
559841	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	12,436,000	14,883,500	0	14,883,500	119.68
	JUMLAH PENDAPATAN 005051200KD BA(005) ES1(05) LAMPUNG	12,436,000	14,883,500	0	14,883,500	119.68
005051300KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT					
531852	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	3,050,000	13,517,400	0	13,517,400	443.19
	JUMLAH PENDAPATAN 005051300KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT	3,050,000	13,517,400	0	13,517,400	443.19
005051400KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH					
578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	15,167,000	12,235,800	0	12,235,800	80.67
	JUMLAH PENDAPATAN 005051400KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH	15,167,000	12,235,800	0	12,235,800	80.67
005051500KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN					
531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	0	8,954,000	0	8,954,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005051500KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN	0	8,954,000	0	8,954,000	
005051600KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR					
559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	30,848,000	28,208,400	0	28,208,400	91.44
	JUMLAH PENDAPATAN 005051600KD BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR	30,848,000	28,208,400	0	28,208,400	91.44

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
005051700KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA					
531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	12,462,000	24,993,200	0	24,993,200	200.56
	JUMLAH PENDAPATAN 005051700KD BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA	12,462,000	24,993,200	0	24,993,200	200.56
005051800KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH					
578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	19,994,000	31,177,000	0	31,177,000	155.93
	JUMLAH PENDAPATAN 005051800KD BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH	19,994,000	31,177,000	0	31,177,000	155.93
005051900KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN					
526712	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	0	2,190,000	0	2,190,000	0
526772	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	40,884,000	35,994,000	0	35,994,000	88.04
	JUMLAH PENDAPATAN 005051900KD BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN	40,884,000	38,184,000	0	38,184,000	93.4
005052000KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA					
578865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	35,701,000	27,010,200	0	27,010,200	75.66
	JUMLAH PENDAPATAN 005052000KD BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA	35,701,000	27,010,200	0	27,010,200	75.66
005052100KD	BA(005) ES1(05) MALUKU					
539118	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	9,965,000	3,918,900	0	3,918,900	39.33
	JUMLAH PENDAPATAN 005052100KD BA(005) ES1(05) MALUKU	9,965,000	3,918,900	0	3,918,900	39.33
005052200KD	BA(005) ES1(05) BALI					
559862	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	15,120,000	16,604,700	0	16,604,700	109.82
	JUMLAH PENDAPATAN 005052200KD BA(005) ES1(05) BALI	15,120,000	16,604,700	0	16,604,700	109.82
005052300KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT					
578872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	1,030,000	18,725,500	0	18,725,500	1818.01
	JUMLAH PENDAPATAN 005052300KD BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT	1,030,000	18,725,500	0	18,725,500	1,818.01
005052400KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM
Halaman : 86
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
539122	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	0	11,785,000	0	11,785,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005052400KD BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR	0	11,785,000	0	11,785,000	
005052500KD	BA(005) ES1(05) PAPUA					
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	25,587,000	27,212,500	0	27,212,500	106.35
	JUMLAH PENDAPATAN 005052500KD BA(005) ES1(05) PAPUA	25,587,000	27,212,500	0	27,212,500	106.35
005052600KD	BA(005) ES1(05) BENGKULU					
578886	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	18,037,000	20,437,000	0	20,437,000	113.31
	JUMLAH PENDAPATAN 005052600KD BA(005) ES1(05) BENGKULU	18,037,000	20,437,000	0	20,437,000	113.31
005052900KD	BA(005) ES1(05) BANTEN					
690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	0	40,944,000	0	40,944,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 005052900KD BA(005) ES1(05) BANTEN	0	40,944,000	0	40,944,000	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	6,059,000	6,972,000	0	6,972,000	115.07
403430	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	419,987,000	8,984,500	0	8,984,500	2.14
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	426,046,000	15,956,500	0	15,956,500	3.75
005053200KD	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG					
690197	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	10,439,000	12,382,000	0	12,382,000	118.61
	JUMLAH PENDAPATAN 005053200KD PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG	10,439,000	12,382,000	0	12,382,000	118.61
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	904,516,000	896,548,750	0	896,548,750	99.12
06	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN**					
005060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	2,052,000	805,344,648	0	805,344,648	39246.82
	JUMLAH PENDAPATAN 005060100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	2,052,000	805,344,648	0	805,344,648	39,246.82

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 10/05/23 3:50 PM

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 06 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	2,052,000	805,344,648	0	805,344,648	39,246.82
07	**BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG**					
005070100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada					
663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	1,000	50	0	50	5
	JUMLAH PENDAPATAN 005070100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	1,000	50	0	50	5
	JUMLAH PENDAPATAN 07 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	1,000	50	0	50	5
	JUMLAH PENDAPATAN	78,474,597,000	105,607,311,747	17,157,628	105,590,154,119	134.58

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI					
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,818,000	0	18,818,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	57,340,000	1,462,450,657	0	1,462,450,657	2550.49
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	7,838,000	2,491,423,472	0	2,491,423,472	31786.47
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,096,494,000	7,999,909,143	9,837,628	7,990,071,515	112.59
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,634	0	1,634	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	16,575,000	0	16,575,000	0
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0	110,693,622	0	110,693,622	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	153,140,000	4,448,699,045	0	4,448,699,045	2904.99
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	467,000	510,427,303	0	510,427,303	109299.21
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8,573,000	3,685,012,022	0	3,685,012,022	42983.93
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	89,953,000	3,142,942,217	0	3,142,942,217	3493.98
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	281,795,607	0	281,795,607	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,061,826	0	1,061,826	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7,413,806,000	24,169,809,548	9,837,628	24,159,971,920	326.01
02	KEPANITERAAN					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	338,000	0	0	0	0
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000	100
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	131,720,000	144,080,000	0	144,080,000	109.38
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,306,176	0	2,306,176	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	283,061,061	0	283,061,061	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 KEPANITERAAN	143,458,000	440,847,237	0	440,847,237	307.3
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	15,555,555	0	15,555,555	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	103,532,000	167,869,000	0	167,869,000	162.14
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	210,100,000	154,890,000	0	154,890,000	73.72
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	717,241,000	838,940,000	0	838,940,000	116.97
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	5,293,399,000	5,779,070,000	0	5,779,070,000	109.18
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10,843,566,000	14,015,994,735	210,000	14,015,784,735	129.25
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	159,092,362	0	159,092,362	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	101,361,500	0	101,361,500	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	32,700	0	32,700	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN	17,167,838,000	21,232,805,852	210,000	21,232,595,852	123.68
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	33,349,000	0	33,349,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,921,000	130,000	0	130,000	4.45
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	26,540,000	17,270,000	0	17,270,000	65.07
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2,048,570,000	2,013,370,000	0	2,013,370,000	98.28
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	17,661,435,000	18,884,170,000	0	18,884,170,000	106.92
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	33,103,460,000	37,087,296,908	7,110,000	37,080,186,908	112.01
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	422,504	0	422,504	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	55,000	0	55,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,857,250	0	21,857,250	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,035,000	0	4,035,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN	52,842,926,000	58,061,955,662	7,110,000	58,054,845,662	109.88
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	37,310,000	23,270,000	0	23,270,000	62.37
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	204,480,000	224,350,000	0	224,350,000	109.72
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	662,696,000	647,224,250	0	647,224,250	97.67
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,615,000	0	1,615,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	89,500	0	89,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN	904,516,000	896,548,750	0	896,548,750	99.12
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,052,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,819,705	0	12,819,705	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	755,722,608	0	755,722,608	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,802,335	0	36,802,335	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 BADAN PENELITIAN DAN	2,052,000	805,344,648	0	805,344,648	39,246.82
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000	50	0	50	5
	JUMLAH PENDAPATAN 07 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH	1,000	50	0	50	5
	JUMLAH PENDAPATAN	78,474,597,000	105,607,311,747	17,157,628	105,590,154,119	134.58



LAPORAN REALISASI BELANJA

LRA BELANJA DALAM RANGKA COVID-19, LRA BELANJA MENURUT AKUN, LRA BELANJA MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI, LRA BELANJA MENURUT ORGANISASI, LRA BELANJA MENURUT ORGANISASI AKUN, LRA BELANJA MENURUT SUMBER DANA JENIS BELANJA AKUN, LRA BELANJA MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 10/05/23 3:59 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,357,189,000	6,594,297,000	6,402,006,203	0	6,402,006,203	97.08	192,290,797
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	6,357,189,000	6,594,297,000	6,402,006,203	0	6,402,006,203	97.08	192,290,797
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,416,583,000	822,962,000	737,010,584	0	737,010,584	89.56	85,951,416
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,416,583,000	822,962,000	737,010,584	0	737,010,584	89.56	85,951,416
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2,313,458,000	542,095,000	528,238,845	0	528,238,845	97.44	13,856,155
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,313,458,000	542,095,000	528,238,845	0	528,238,845	97.44	13,856,155
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28,827,433,000	18,706,301,000	17,914,053,780	0	17,914,053,780	95.76	792,247,220
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,827,433,000	18,706,301,000	17,914,053,780	0	17,914,053,780	95.76	792,247,220
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	39,914,663,000	26,665,655,000	25,581,309,412	0	25,581,309,412	95.93	1,084,345,588
	JUMLAH BELANJA	39,914,663,000	26,665,655,000	25,581,309,412	0	25,581,309,412	95.93	1,084,345,588

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,550,521,156,000	1,639,044,848,000	1,605,400,790,205	195,456,478	1,605,205,333,727	97.95	33,839,514,273
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,216,000	27,523,000	23,253,975	413,021	22,840,954	84.49	4,682,046
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	134,219,640,000	121,240,323,000	115,722,944,811	27,235,889	115,695,708,922	95.45	5,544,614,078
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33,890,934,000	34,393,276,000	32,800,536,728	7,597,041	32,792,939,687	95.37	1,600,336,313
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	38,519,021,000	37,966,272,000	36,362,977,521	55,613,202	36,307,364,319	95.78	1,658,907,681
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,075,924,954,000	2,108,274,044,000	2,067,311,916,997	769,160,296	2,066,542,756,701	98.06	41,731,287,299
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	422,474,699,000	323,066,807,000	304,667,157,269	17,052,475	304,650,104,794	94.3	18,416,702,206
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81,814,294,000	87,633,830,000	85,334,892,150	8,651,928	85,326,240,222	97.38	2,307,589,778
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	618,400,000	20,260,000	20,250,000	0	20,250,000	99.95	10,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	294,358,944,000	277,501,653,000	259,057,625,188	58,595,200	258,999,029,988	93.35	18,502,623,012
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	77,300,000	78,175,000	70,725,000	0	70,725,000	90.47	7,450,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	6,627,238,000	4,819,564,000	4,704,845,000	2,640,000	4,702,205,000	97.62	117,359,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	69,000,000	68,980,000	0	0	0	0	68,980,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,795,929,000	23,032,411,000	19,359,403,630	158,696,047	19,200,707,583	84.05	3,831,703,417
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	76,430,630,000	64,638,847,000	60,163,130,312	39,000,000	60,124,130,312	93.08	4,514,716,688
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	121,262,800,000	105,212,829,000	101,780,575,000	0	101,780,575,000	96.74	3,432,254,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,866,630,155,000	4,827,019,642,000	4,692,781,023,786	1,340,111,577	4,691,440,912,209	97.22	135,578,729,791
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri							
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	29,000	29,000	0	0	0	0	29,000
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	13,720,000	15,680,000	13,720,000	0	13,720,000	87.5	1,960,000
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	47,724,978,000	38,763,359,000	36,616,058,457	0	36,616,058,457	94.46	2,147,300,543
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	4,347,576,000	4,454,342,000	3,484,585,254	1,952,370	3,482,632,884	78.23	971,709,116
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	105,300,000	105,300,000	70,200,000	0	70,200,000	66.67	35,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	52,191,603,000	43,338,710,000	40,184,563,711	1,952,370	40,182,611,341	92.72	3,156,098,659
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	2,748,900,000	2,951,480,000	2,937,480,000	0	2,937,480,000	99.53	14,000,000
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	42,000	42,000	39,100	0	39,100	93.1	2,900
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	274,890,000	297,248,000	283,248,000	1,260,000	281,988,000	95.29	15,260,000
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	7,056,000	9,968,000	9,828,000	0	9,828,000	98.6	140,000
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	50,760,962,000	51,633,078,000	51,626,076,000	218,562,000	51,407,514,000	99.99	225,564,000
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	12,217,324,000	12,979,028,000	12,972,014,974	0	12,972,014,974	99.95	7,013,026
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	85,176,000	106,470,000	106,457,400	217,260	106,240,140	99.99	229,860
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	6,650,000,000	4,972,800,000	4,994,000,000	33,900,833	4,960,099,167	100.43	12,700,833
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	72,744,350,000	72,950,114,000	72,929,143,474	253,940,093	72,675,203,381	99.97	274,910,619

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	570,996,000	721,636,000	603,274,000	0	603,274,000	83.6	118,362,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	570,996,000	721,636,000	603,274,000	0	603,274,000	83.6	118,362,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,493,865,217,000	2,277,594,026,000	2,243,681,575,109	306,836,099	2,243,374,739,010	98.51	34,219,286,990
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,493,865,217,000	2,277,594,026,000	2,243,681,575,109	306,836,099	2,243,374,739,010	98.51	34,219,286,990
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,486,002,321,000	7,221,624,128,000	7,050,179,580,080	1,902,840,139	7,048,276,739,941	97.63	173,347,388,059
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	705,858,715,000	686,308,327,000	682,662,290,177	79,916,954	682,582,373,223	99.47	3,725,953,777
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4,200,000	4,198,500	0	4,198,500	99.96	1,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,889,758,000	20,680,739,000	19,208,857,217	2,734,580	19,206,122,637	92.88	1,474,616,363
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	47,565,864,000	46,018,756,000	44,991,209,260	5,598,000	44,985,611,260	97.77	1,033,144,740
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	42,601,285,000	195,413,137,000	193,797,630,470	70,891,165	193,726,739,305	99.17	1,686,397,695
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,357,189,000	6,594,297,000	6,402,006,203	0	6,402,006,203	97.08	192,290,797
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	823,272,811,000	955,019,456,000	947,066,191,827	159,140,699	946,907,051,128	99.17	8,112,404,872
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	65,841,415,000	48,940,349,000	47,717,637,662	2,153,318	47,715,484,344	97.5	1,224,864,656
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,326,184,000	752,822,000	710,691,500	0	710,691,500	94.4	42,130,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,872,100,000	4,051,682,000	3,889,771,390	0	3,889,771,390	96	161,910,610
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,416,583,000	822,962,000	737,010,584	0	737,010,584	89.56	85,951,416
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	2,225,144,000	2,145,268,269	0	2,145,268,269	96.41	79,875,731
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	212,623,000	212,522,965	0	212,522,965	99.95	100,035
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	14,292,000	14,291,250	0	14,291,250	99.99	750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	73,456,282,000	57,019,874,000	55,427,193,620	2,153,318	55,425,040,302	97.21	1,594,833,698
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	77,891,561,000	95,246,416,000	94,611,722,118	170,000	94,611,552,118	99.33	634,863,882
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,000,000	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000	100	0
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2,313,458,000	542,095,000	528,238,845	0	528,238,845	97.44	13,856,155
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	80,206,019,000	95,791,041,000	95,142,490,963	170,000	95,142,320,963	99.32	648,720,037
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	136,308,239,000	148,941,290,000	144,791,033,728	14,317,504	144,776,716,224	97.21	4,164,573,776
522112	Belanja Langganan Telepon	9,197,125,000	4,126,928,000	3,149,034,431	590	3,149,033,841	76.3	977,894,159
522113	Belanja Langganan Air	8,767,433,000	6,983,493,000	6,154,644,308	0	6,154,644,308	88.13	828,848,692

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	659,900,000	669,290,000	667,816,940	0	667,816,940	99.78	1,473,060
522131	Belanja Jasa Konsultan	35,306,996,000	35,909,814,000	35,795,815,267	3,292,479	35,792,522,788	99.68	117,291,212
522141	Belanja Sewa	313,507,751,000	275,110,054,000	267,947,412,890	88,678,227	267,858,734,663	97.4	7,251,319,337
522151	Belanja Jasa Profesi	17,703,456,000	13,830,243,000	13,492,732,450	6,228,000	13,486,504,450	97.56	343,738,550
522191	Belanja Jasa Lainnya	37,554,998,000	78,477,666,000	78,017,474,734	39,778,390	77,977,696,344	99.41	499,969,656
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28,827,433,000	18,706,301,000	17,914,053,780	0	17,914,053,780	95.76	792,247,220
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	587,833,331,000	582,755,079,000	567,930,018,528	152,295,190	567,777,723,338	97.46	14,977,355,662
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241,790,235,000	260,290,846,000	258,578,659,020	221,712,730	258,356,946,290	99.34	1,933,899,710
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	40,136,833,000	38,839,000,000	38,599,241,271	3,225,252	38,596,016,019	99.38	242,983,981
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174,347,514,000	177,552,377,000	174,465,969,645	49,586,390	174,416,383,255	98.26	3,135,993,745
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	140,000,000	25,625,000	25,622,060	0	25,622,060	99.99	2,940
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	8,600,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	456,423,182,000	476,707,848,000	471,669,491,996	274,524,372	471,394,967,624	98.94	5,312,880,376
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	272,273,925,000	286,756,745,000	278,357,141,948	1,114,769,046	277,242,372,902	97.07	9,514,372,098
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	190,918,011,000	131,989,038,000	129,908,262,875	423,748,937	129,484,513,938	98.42	2,504,524,062
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,199,394,000	31,177,855,000	30,405,379,036	67,620,213	30,337,758,823	97.52	840,096,177
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,903,611,000	55,863,153,000	55,221,676,342	221,525,073	55,000,151,269	98.85	863,001,731
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	556,294,941,000	505,786,791,000	493,892,460,201	1,827,663,269	492,064,796,932	97.65	13,721,994,068
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	11,697,229,000	5,439,061,000	5,391,002,344	16,609	5,390,985,735	99.12	48,075,265
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,487,111,000	47,500,000	45,690,541	0	45,690,541	96.19	1,809,459
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	13,184,340,000	5,486,561,000	5,436,692,885	16,609	5,436,676,276	99.09	49,884,724
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,590,670,906,000	2,678,566,650,000	2,636,564,540,020	2,415,963,457	2,634,148,576,563	98.43	44,418,073,437
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	118,571,753,000	126,861,793,000	118,438,782,400	0	118,438,782,400	93.36	8,423,010,600
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	122,980,000	122,804,472	0	122,804,472	99.86	175,528
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	2,024,227,000	1,979,570,607	0	1,979,570,607	97.79	44,656,393
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	129,171,000	115,344,189	0	115,344,189	89.3	13,826,811
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	118,571,753,000	129,147,171,000	120,665,501,668	0	120,665,501,668	93.43	8,481,669,332
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529,676,952,000	648,525,844,000	646,946,798,641	1,826,000	646,944,972,641	99.76	1,580,871,359

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	23,962,000	23,962,000	0	23,962,000	100	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	485,095,000	549,258,000	545,883,500	0	545,883,500	99.39	3,374,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	530,162,047,000	649,099,064,000	647,516,644,141	1,826,000	647,514,818,141	99.76	1,584,245,859
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	982,698,872,000	684,262,760,000	677,720,256,706	10,075,900	677,710,180,806	99.04	6,552,579,194
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	111,012,501,000	150,036,143,000	148,897,329,768	1,290,000	148,896,039,768	99.24	1,140,103,232
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,093,711,373,000	834,298,903,000	826,617,586,474	11,365,900	826,606,220,574	99.08	7,692,682,426
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	0	94,457,000	94,456,560	0	94,456,560	100	440
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	94,457,000	94,456,560	0	94,456,560	100	440
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	800,000,000	1,456,600,000	1,437,743,500	0	1,437,743,500	98.71	18,856,500
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	215,000,000	183,012,000	183,011,684	0	183,011,684	100	316
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,015,000,000	1,639,612,000	1,620,755,184	0	1,620,755,184	98.85	18,856,816
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,743,460,173,000	1,614,279,207,000	1,596,514,944,027	13,191,900	1,596,501,752,127	98.9	17,777,454,873
	JUMLAH BELANJA	11,820,133,400,000	11,514,469,985,000	11,283,259,064,127	4,331,995,496	11,278,927,068,631	97.99	235,542,916,369

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	10,702,773,000	10,702,773,000	10,671,749,197	0	10,671,749,197	99.71	31,023,803
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	10,702,773,000	10,702,773,000	10,671,749,197	0	10,671,749,197	99.71	31,023,803
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	10,702,773,000	10,702,773,000	10,671,749,197	0	10,671,749,197	99.71	31,023,803
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	10,702,773,000	10,702,773,000	10,671,749,197	0	10,671,749,197	99.71	31,023,803
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1,500,000,000	1,500,000,000	1,496,379,233	55,161,452	1,441,217,781	96.08	58,782,219
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1,500,000,000	1,500,000,000	1,496,379,233	55,161,452	1,441,217,781	96.08	58,782,219
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1,500,000,000	1,500,000,000	1,496,379,233	55,161,452	1,441,217,781	96.08	58,782,219
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1,500,000,000	1,500,000,000	1,496,379,233	55,161,452	1,441,217,781	96.08	58,782,219
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	78,184,859,000	78,087,517,000	76,194,566,631	58,559,061	76,136,007,570	97.5	1,951,509,430
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	78,184,859,000	78,087,517,000	76,194,566,631	58,559,061	76,136,007,570	97.5	1,951,509,430
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	78,184,859,000	78,087,517,000	76,194,566,631	58,559,061	76,136,007,570	97.5	1,951,509,430
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	78,184,859,000	78,087,517,000	76,194,566,631	58,559,061	76,136,007,570	97.5	1,951,509,430
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64,360,706,000	64,360,706,000	62,798,418,235	58,216,056	62,740,202,179	97.48	1,620,503,821
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64,360,706,000	64,360,706,000	62,798,418,235	58,216,056	62,740,202,179	97.48	1,620,503,821
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64,360,706,000	64,360,706,000	62,798,418,235	58,216,056	62,740,202,179	97.48	1,620,503,821
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64,360,706,000	64,360,706,000	62,798,418,235	58,216,056	62,740,202,179	97.48	1,620,503,821
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Serta Kesyariahan	576,960,000	576,960,000	576,655,408	429,670	576,225,738	99.87	734,262
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Serta Kesyariahan	576,960,000	576,960,000	576,655,408	429,670	576,225,738	99.87	734,262

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Serta Kesyariahan	576,960,000	576,960,000	576,655,408	429,670	576,225,738	99.87	734,262
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Serta Kesyariahan	576,960,000	576,960,000	576,655,408	429,670	576,225,738	99.87	734,262
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	5,346,991,000	5,389,551,000	5,224,170,421	2,441,428	5,221,728,993	96.89	167,822,007
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	5,346,991,000	5,389,551,000	5,224,170,421	2,441,428	5,221,728,993	96.89	167,822,007
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	5,346,991,000	5,389,551,000	5,224,170,421	2,441,428	5,221,728,993	96.89	167,822,007
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	5,346,991,000	5,389,551,000	5,224,170,421	2,441,428	5,221,728,993	96.89	167,822,007
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3,493,510,000	3,536,070,000	3,438,901,107	15,951,934	3,422,949,173	96.8	113,120,827
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3,493,510,000	3,536,070,000	3,438,901,107	15,951,934	3,422,949,173	96.8	113,120,827
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3,493,510,000	3,536,070,000	3,438,901,107	15,951,934	3,422,949,173	96.8	113,120,827
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3,493,510,000	3,536,070,000	3,438,901,107	15,951,934	3,422,949,173	96.8	113,120,827
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	**657,007,196,000**	**656,617,828,000**	**641,606,880,928**	**763,038,404**	**640,843,842,524**	**97.714**	**15,773,985,476**
WA	Program Dukungan Manajemen							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	0	4,410,731	-4,410,731	0	4,410,731
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,967,936,328	8,682,985,419,981	97.67	207,426,442,019
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,967,936,328	8,682,985,419,981	97.67	207,426,442,019
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,967,936,328	8,682,985,419,981	97.67	207,426,442,019
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	0	4,410,731	-4,410,731	0	4,410,731
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,967,936,328	8,682,985,419,981	97.67	207,426,442,019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	0	4,410,731	-4,410,731	0	4,410,731
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	0	4,410,731	-4,410,731	0	4,410,731
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	0	4,410,731	-4,410,731	0	4,410,731
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	0	4,410,731	-4,410,731	0	4,410,731
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	0	0	4,410,731	-4,410,731	0	4,410,731
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,967,936,328	8,682,985,419,981	97.67	207,426,442,019
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,967,936,328	8,682,985,419,981	97.67	207,426,442,019
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,967,936,328	8,682,985,419,981	97.67	207,426,442,019
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	98.89	17,664,999,531
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	98.89	17,664,999,531
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	98.89	17,664,999,531
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	98.89	17,664,999,531

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	98.89	17,664,999,531
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	98.89	17,664,999,531
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	98.89	17,664,999,531
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	62,923,226,000	73,632,735,000	73,515,667,010	199,544,073	73,316,122,937	99.57	316,612,063
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	0	0	0	370,980	-370,980	0	370,980
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	62,923,226,000	73,632,735,000	73,515,667,010	199,544,073	73,316,122,937	99.57	316,612,063

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 7
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	0	0	0	370,980	-370,980	0	370,980
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	62,923,226,000	73,632,735,000	73,515,667,010	199,544,073	73,316,122,937	99.57	316,612,063
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	0	0	0	370,980	-370,980	0	370,980
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	62,923,226,000	73,632,735,000	73,515,667,010	199,544,073	73,316,122,937	99.57	316,612,063
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	0	0	0	370,980	-370,980	0	370,980
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	62,923,226,000	73,632,735,000	73,515,667,010	199,544,073	73,316,122,937	99.57	316,612,063
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	0	0	0	370,980	-370,980	0	370,980
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	62,923,226,000	73,632,735,000	73,515,667,010	199,544,073	73,316,122,937	99.57	316,612,063
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	0	0	0	370,980	-370,980	0	370,980
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 8
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	0	0	0	138	-138	0	138
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	0	0	0	138	-138	0	138
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	0	0	0	138	-138	0	138
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,030	15,067,753,617	98.67	203,365,383
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,030	15,067,753,617	98.67	203,365,383
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	0	0	0	138	-138	0	138
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,030	15,067,753,617	98.67	203,365,383
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	0	0	0	138	-138	0	138

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 9
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,030	15,067,753,617	98.67	203,365,383
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,030	15,067,753,617	98.67	203,365,383
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,030	15,067,753,617	98.67	203,365,383
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,030	15,067,753,617	98.67	203,365,383
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	0	0	0	138	-138	0	138
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	0	0	0	138	-138	0	138
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 10
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	0	0	0	1,170	-1,170	0	1,170
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,031,990	213,351,287,373	99.6	860,635,627
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,031,990	213,351,287,373	99.6	860,635,627
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	0	0	0	1,170	-1,170	0	1,170
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,031,990	213,351,287,373	99.6	860,635,627
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	0	0	0	1,170	-1,170	0	1,170
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,031,990	213,351,287,373	99.6	860,635,627
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	0	0	0	1,170	-1,170	0	1,170
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	0	0	0	1,170	-1,170	0	1,170
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,031,990	213,351,287,373	99.6	860,635,627
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	0	0	0	1,170	-1,170	0	1,170
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,031,990	213,351,287,373	99.6	860,635,627
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,031,990	213,351,287,373	99.6	860,635,627
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	0	0	0	1,170	-1,170	0	1,170
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 11
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 12
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6629	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	50,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6629	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	50,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6629	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	50,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6629	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	50,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6629	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	50,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6629	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	50,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 13
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 14
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**81,485,757,955,000**	**79,316,460,965,000**	**77,729,070,475,168**	**28,978,790,337**	**77,700,091,684,831**	**97.999**	**1,616,369,280,169**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**82,142,765,151,000**	**79,973,078,793,000**	**78,370,677,356,096**	**29,741,828,741**	**78,340,935,527,355**	**97.996**	**1,632,143,265,645**
04	**PNBP**							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	30,056,000	30,056,000	26,628,900	0	26,628,900	88.6	3,427,100
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	30,056,000	30,056,000	26,628,900	0	26,628,900	88.6	3,427,100
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	30,056,000	30,056,000	26,628,900	0	26,628,900	88.6	3,427,100
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	30,056,000	30,056,000	26,628,900	0	26,628,900	88.6	3,427,100
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3,676,507,000	3,676,507,000	3,390,814,244	1,408,704	3,389,405,540	92.19	287,101,460
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3,676,507,000	3,676,507,000	3,390,814,244	1,408,704	3,389,405,540	92.19	287,101,460
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3,676,507,000	3,676,507,000	3,390,814,244	1,408,704	3,389,405,540	92.19	287,101,460
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3,676,507,000	3,676,507,000	3,390,814,244	1,408,704	3,389,405,540	92.19	287,101,460
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	11,177,719,000	11,177,719,000	10,847,581,673	0	10,847,581,673	97.05	330,137,327
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	11,177,719,000	11,177,719,000	10,847,581,673	0	10,847,581,673	97.05	330,137,327
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	11,177,719,000	11,177,719,000	10,847,581,673	0	10,847,581,673	97.05	330,137,327
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	11,177,719,000	11,177,719,000	10,847,581,673	0	10,847,581,673	97.05	330,137,327

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 15
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	174,754,000	174,754,000	152,581,892	0	152,581,892	87.31	22,172,108
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	174,754,000	174,754,000	152,581,892	0	152,581,892	87.31	22,172,108
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	174,754,000	174,754,000	152,581,892	0	152,581,892	87.31	22,172,108
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	174,754,000	174,754,000	152,581,892	0	152,581,892	87.31	22,172,108
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	**60,236,144,000**	**60,236,144,000**	**57,670,426,836**	**5,634,816**	**57,664,792,020**	**95.741**	**2,571,351,980**
	JUMLAH BELANJA PNBP	**60,236,144,000**	**60,236,144,000**	**57,670,426,836**	**5,634,816**	**57,664,792,020**	**95.741**	**2,571,351,980**
08	**HIBAH DALAM NEGERI**							
WA	Program Dukungan Manajemen							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**1,050,000,000**	**1,050,000,000**	**0**	**1,050,000,000**	**100**	**0**
	JUMLAH BELANJA HIBAH DALAM NEGERI	**0**	**1,050,000,000**	**1,050,000,000**	**0**	**1,050,000,000**	**100**	**0**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
WA	Program Dukungan Manajemen							
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:00 PM
Halaman : 16
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	98.88	46,684,838
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	98.88	46,684,838
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	98.88	46,684,838
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	98.88	46,684,838
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	98.88	46,684,838
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	98.88	46,684,838
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	98.88	46,684,838
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**29,284,479,000**	**28,957,685,134**	**0**	**28,957,685,134**	**98.884**	**326,793,866**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**29,284,479,000**	**28,957,685,134**	**0**	**28,957,685,134**	**98.884**	**326,793,866**
	JUMLAH	**82,203,001,295,000**	**80,063,649,416,000**	**78,458,355,468,066**	**29,747,463,557**	**78,428,608,004,509**	**97.99**	**1,635,041,411,491**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI							
005010100KD	BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA							
097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	46,852,363,000	48,896,428,000	48,599,097,580	179	48,599,097,401	99.39	297,330,599
097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	43,201,738,000	44,143,694,000	42,709,736,376	24,002,023	42,685,734,353	96.7	1,457,959,647
097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	26,232,608,000	26,715,756,000	26,641,534,363	370,321	26,641,164,042	99.72	74,591,958
097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	25,300,962,000	22,130,004,000	21,817,122,565	279	21,817,122,286	98.59	312,881,714
400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	22,934,222,000	24,827,778,000	24,687,156,780	57,897,658	24,629,259,122	99.2	198,518,878
400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	42,545,143,000	42,495,143,000	42,100,265,082	30	42,100,265,052	99.07	394,877,948
400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	10,686,679,000	11,691,687,000	11,597,888,985	1,033,824	11,596,855,161	99.19	94,831,839
400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	10,505,464,000	12,284,524,000	12,266,843,942	454	12,266,843,488	99.86	17,680,512
400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	10,861,504,000	11,750,884,000	11,731,905,377	420,514	11,731,484,863	99.83	19,399,137
400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	14,277,451,000	14,256,875,000	14,045,970,962	5,811,736	14,040,159,226	98.48	216,715,774
400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	15,084,736,000	15,297,736,000	15,279,231,952	2,273,334	15,276,958,618	99.86	20,777,382
401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	31,226,017,000	23,229,781,000	22,776,864,063	185,559	22,776,678,504	98.05	453,102,496
526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	17,091,349,000	15,618,537,000	14,673,203,551	217	14,673,203,334	93.95	945,333,666
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	14,564,453,000	19,649,788,000	18,142,951,113	8,400,471	18,134,550,642	92.29	1,515,237,358
663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	6,592,102,000	5,873,311,000	5,585,593,852	74	5,585,593,778	95.1	287,717,222
663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	11,038,323,000	11,259,927,000	11,066,432,156	40	11,066,432,116	98.28	193,494,884
663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	6,751,308,000	6,776,308,000	5,723,100,232	94	5,723,100,138	84.46	1,053,207,862
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) DKI JAKARTA	355,746,422,000	356,898,161,000	349,444,898,931	100,396,807	349,344,502,124	97.91	7,553,658,876
005010100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	3,553,803,149,000	3,476,457,303,000	3,428,391,224,016	1,548,713,972	3,426,842,510,044	98.57	49,614,792,956
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	3,553,803,149,000	3,476,457,303,000	3,428,391,224,016	1,548,713,972	3,426,842,510,044	98.62	49,614,792,956
005010200KD	BA(005) ES1(01) JAWA BARAT							
097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	43,066,986,000	43,964,860,000	43,689,520,992	6,295,850	43,683,225,142	99.36	281,634,858
097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	30,016,484,000	31,001,173,000	29,586,794,955	894,584	29,585,900,371	95.43	1,415,272,629
097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	6,745,396,000	6,405,241,000	6,383,322,549	500,504	6,382,822,045	99.65	22,418,955
097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	10,978,423,000	10,781,312,000	10,759,037,532	640,206	10,758,397,326	99.79	22,914,674
097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	6,150,209,000	6,834,764,000	6,517,342,911	572	6,517,342,339	95.36	317,421,661
097556	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	5,327,891,000	4,638,828,000	4,617,916,108	2	4,617,916,106	99.55	20,911,894
097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	8,201,913,000	7,604,254,000	7,546,616,818	764	7,546,616,054	99.24	57,637,946
097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	25,397,830,000	19,598,051,000	17,468,076,684	3,065,750	17,465,010,934	89.12	2,133,040,066
097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	8,827,590,000	11,033,692,000	10,974,588,946	715	10,974,588,231	99.46	59,103,769
097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	6,777,477,000	6,874,477,000	6,774,140,323	177	6,774,140,146	98.54	100,336,854

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	10,256,191,000	10,209,651,000	10,185,310,899	1,594,814	10,183,716,085	99.75	25,934,915
097652	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	6,355,126,000	5,550,078,000	5,534,953,746	300,472	5,534,653,274	99.72	15,424,726
097666	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	6,724,641,000	6,204,446,000	6,180,145,450	202	6,180,145,248	99.61	24,300,752
097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	8,660,341,000	7,362,889,000	7,232,052,450	571	7,232,051,879	98.22	130,837,121
097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	6,737,471,000	6,825,445,000	6,786,777,967	185,310	6,786,592,657	99.43	38,852,343
097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	5,946,625,000	5,886,841,000	5,600,190,030	3,288,793	5,596,901,237	95.07	289,939,763
097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	6,555,368,000	6,754,895,000	6,697,032,715	2,840,354	6,694,192,361	99.1	60,702,639
308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	23,561,215,000	19,872,095,000	19,772,172,335	2,983,064	19,769,189,271	99.48	102,905,729
400409	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	6,579,616,000	6,254,373,000	6,107,144,162	851	6,107,143,311	97.65	147,229,689
400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	7,541,056,000	9,424,829,000	9,329,560,982	874	9,329,560,108	98.99	95,268,892
400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	15,904,360,000	13,768,835,000	13,631,161,250	7,610,278	13,623,550,972	98.94	145,284,028
400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	12,970,648,000	12,150,272,000	11,954,193,432	282	11,954,193,150	98.39	196,078,850
400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	8,695,907,000	8,627,407,000	8,469,345,128	223,304	8,469,121,824	98.17	158,285,176
400690	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	11,031,158,000	10,033,398,000	9,762,301,239	185,567	9,762,115,672	97.3	271,282,328
400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	8,983,293,000	9,440,701,000	9,326,543,173	370,454	9,326,172,719	98.79	114,528,281
400710	PENGADILAN AGAMA GARUT	10,183,261,000	10,665,241,000	10,643,764,131	185,326	10,643,578,805	99.8	21,662,195
400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	9,999,007,000	7,934,207,000	7,577,669,115	10,513,318	7,567,155,797	95.37	367,051,203
400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	3,609,543,000	4,295,223,000	4,202,441,819	32,385,064	4,170,056,755	97.09	125,166,245
400741	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	6,580,858,000	6,780,858,000	6,762,021,109	340,028	6,761,681,081	99.72	19,176,919
400750	PENGADILAN AGAMA CIREBON	5,110,830,000	5,611,610,000	5,463,490,195	15,695,559	5,447,794,636	97.08	163,815,364
400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	11,117,687,000	12,516,687,000	12,441,776,932	534	12,441,776,398	99.4	74,910,602
400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	9,953,090,000	8,819,090,000	8,633,193,105	185,340	8,633,007,765	97.89	186,082,235
400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	7,803,248,000	7,967,728,000	7,271,219,507	185,387	7,271,034,120	91.26	696,693,880
400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	10,174,563,000	10,449,563,000	10,386,330,387	1,611,142	10,384,719,245	99.38	64,843,755
400848	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	8,843,997,000	9,829,437,000	9,707,369,021	1,811,668	9,705,557,353	98.74	123,879,647
400854	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	5,491,447,000	6,196,407,000	5,892,248,162	185,298	5,892,062,864	95.09	304,344,136
401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	10,859,919,000	11,131,319,000	10,839,632,848	185,356	10,839,447,492	97.38	291,871,508
401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	8,355,004,000	10,027,733,000	9,925,116,821	998,342	9,924,118,479	98.97	103,614,521
401957	PENGADILAN AGAMA SOREANG	8,869,587,000	9,438,387,000	9,044,451,288	555,582	9,043,895,706	95.82	394,491,294
401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	47,752,153,000	47,075,753,000	46,683,556,024	4,687,117	46,678,868,907	99.16	396,884,093
401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	5,344,621,000	42,851,306,000	41,721,238,082	735,362	41,720,502,720	97.36	1,130,803,280
402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	8,379,038,000	8,938,558,000	8,902,645,623	433	8,902,645,190	99.6	35,912,810
402995	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	5,139,926,000	6,294,486,000	5,912,140,470	18,170,268	5,893,970,202	93.64	400,515,798
403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	13,435,287,000	12,024,167,000	11,451,296,314	765	11,451,295,549	95.24	572,871,451

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	10,413,682,000	11,402,947,000	10,875,323,441	559	10,875,322,882	95.37	527,624,118
531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	10,717,769,000	11,390,361,000	11,365,507,773	2,821,896	11,362,685,877	99.76	27,675,123
604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	10,769,262,000	14,353,062,000	14,043,554,465	838	14,043,553,627	97.84	309,508,373
613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	17,451,743,000	18,003,378,000	17,958,077,500	815	17,958,076,685	99.75	45,301,315
614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	8,285,770,000	7,322,170,000	7,078,468,914	303,043	7,078,165,871	96.67	244,004,129
652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	10,230,579,000	12,081,379,000	11,421,868,367	959,039	11,420,909,328	94.53	660,469,672
663271	PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG	6,069,682,000	4,729,682,000	4,172,109,040	0	4,172,109,040	88.21	557,572,960
682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	5,212,410,000	5,275,370,000	5,189,305,618	185,296	5,189,120,322	98.37	86,249,678
682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	3,574,723,000	3,935,643,000	3,913,476,054	365,932	3,913,110,122	99.43	22,532,878
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) JAWA BARAT	577,721,901,000	614,444,559,000	600,365,534,901	124,053,621	600,241,481,280	97.71	14,203,077,720
005010300KD	BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH							
097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	42,892,152,000	43,745,188,000	41,816,182,461	3,710,719	41,812,471,742	95.58	1,932,716,258
097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	28,009,640,000	30,211,140,000	30,026,761,974	264	30,026,761,710	99.39	184,378,290
097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	8,444,120,000	8,474,540,000	8,329,640,484	545,530	8,329,094,954	98.28	145,445,046
097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	6,269,644,000	5,235,748,000	5,167,307,563	501	5,167,307,062	98.69	68,440,938
097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	6,768,184,000	5,820,684,000	5,647,678,654	370,488	5,647,308,166	97.02	173,375,834
097762	PENGADILAN NEGERI PATI	9,309,567,000	8,817,067,000	8,615,274,976	208	8,615,274,768	97.71	201,792,232
097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	5,337,730,000	5,519,230,000	5,457,125,334	136	5,457,125,198	98.87	62,104,802
097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	4,854,743,000	5,561,602,000	5,419,462,828	365	5,419,462,463	97.44	142,139,537
097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	6,720,649,000	6,220,249,000	5,991,963,645	672,958	5,991,290,687	96.32	228,958,313
097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	5,862,141,000	5,193,641,000	5,161,855,399	16,787,355	5,145,068,044	99.06	48,572,956
097819	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	5,447,219,000	5,443,719,000	5,365,752,553	180,186	5,365,572,367	98.56	78,146,633
097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	8,192,382,000	7,954,122,000	7,902,414,008	152	7,902,413,856	99.35	51,708,144
097830	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	7,397,375,000	6,798,875,000	6,771,761,859	77	6,771,761,782	99.6	27,113,218
097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	5,318,081,000	5,424,066,000	5,105,569,852	110	5,105,569,742	94.13	318,496,258
097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	6,170,784,000	6,200,524,000	6,147,932,276	400	6,147,931,876	99.15	52,592,124
097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	6,101,618,000	5,627,298,000	5,509,022,065	544	5,509,021,521	97.9	118,276,479
097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	4,742,789,000	4,764,050,000	4,618,717,884	1,850,501	4,616,867,383	96.91	147,182,617
097886	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	6,282,740,000	6,274,240,000	5,725,647,237	370,000	5,725,277,237	91.25	548,962,763
097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	6,180,386,000	6,051,886,000	5,988,537,163	1,120	5,988,536,043	98.95	63,349,957
097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	5,869,361,000	5,716,237,000	5,627,031,329	17	5,627,031,312	98.44	89,205,688
097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	6,015,509,000	5,217,009,000	5,205,965,656	307	5,205,965,349	99.79	11,043,651
097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	4,611,897,000	4,561,397,000	4,522,995,711	354	4,522,995,357	99.16	38,401,643
097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	20,303,081,000	21,602,692,000	21,566,141,514	488	21,566,141,026	99.83	36,550,974

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	7,752,225,000	9,325,825,000	9,291,173,499	246	9,291,173,253	99.63	34,651,747
097954	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	5,457,966,000	5,573,466,000	5,464,691,182	1,170,350	5,463,520,832	98.03	109,945,168
097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	10,288,607,000	10,740,107,000	10,706,303,751	219	10,706,303,532	99.69	33,803,468
097975	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	6,359,088,000	5,638,741,000	5,600,097,707	89	5,600,097,618	99.31	38,643,382
097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	5,945,846,000	5,517,346,000	5,412,687,883	555,217	5,412,132,666	98.09	105,213,334
097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	10,744,044,000	12,958,699,000	12,081,101,418	990,381	12,080,111,037	93.22	878,587,963
098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	7,390,300,000	7,384,200,000	7,253,713,672	259,670	7,253,454,002	98.23	130,745,998
098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	8,692,986,000	9,038,886,000	9,017,978,938	219	9,017,978,719	99.77	20,907,281
098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	5,499,927,000	5,181,427,000	4,891,513,995	106	4,891,513,889	94.4	289,913,111
098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	5,263,794,000	4,915,294,000	4,822,365,480	364	4,822,365,116	98.11	92,928,884
098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	4,818,928,000	5,040,428,000	5,026,516,448	119	5,026,516,329	99.72	13,911,671
400565	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	5,692,559,000	5,465,229,000	5,371,303,711	450,479	5,370,853,232	98.27	94,375,768
400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	5,838,034,000	5,769,434,000	5,740,797,961	1,693,814	5,739,104,147	99.47	30,329,853
400860	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	4,906,302,000	5,231,802,000	5,138,412,500	180,436	5,138,232,064	98.21	93,569,936
400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	8,870,720,000	7,825,320,000	7,765,400,727	1,048,132	7,764,352,595	99.22	60,967,405
400885	PENGADILAN AGAMA TEGAL	3,763,942,000	3,938,442,000	3,813,619,210	340,002	3,813,279,208	96.82	125,162,792
400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	8,810,590,000	8,305,090,000	8,244,623,971	458	8,244,623,513	99.27	60,466,487
400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	4,193,371,000	4,343,471,000	4,108,122,768	0	4,108,122,768	94.58	235,348,232
400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	9,267,440,000	9,272,340,000	9,224,226,805	108	9,224,226,697	99.48	48,113,303
400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	5,015,730,000	5,507,230,000	5,496,216,580	1,290,082	5,494,926,498	99.78	12,303,502
400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	9,531,250,000	9,725,750,000	9,660,625,754	1,089	9,660,624,665	99.33	65,125,335
400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	4,881,846,000	4,683,346,000	4,676,831,201	64	4,676,831,137	99.86	6,514,863
400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	9,390,922,000	7,583,922,000	7,429,196,576	387	7,429,196,189	97.96	154,725,811
400967	PENGADILAN AGAMA PATI	10,289,807,000	11,074,307,000	11,066,851,043	27	11,066,851,016	99.93	7,455,984
400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	4,894,357,000	4,604,857,000	4,583,967,362	370,246	4,583,597,116	99.54	21,259,884
400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	4,985,336,000	5,127,336,000	5,056,705,842	184,505,471	4,872,200,371	95.02	255,135,629
400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	4,029,524,000	3,771,024,000	3,761,382,152	180,254	3,761,201,898	99.74	9,822,102
401002	PENGADILAN AGAMA BLORA	4,364,778,000	4,148,778,000	4,137,840,848	340,016	4,137,500,832	99.73	11,277,168
401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	3,311,121,000	3,352,621,000	3,210,233,997	153	3,210,233,844	95.75	142,387,156
401024	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	4,325,485,000	4,330,485,000	4,195,347,386	37,085,060	4,158,262,326	96.02	172,222,674
401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	8,436,176,000	7,087,676,000	6,946,175,540	254	6,946,175,286	98	141,500,714
401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	4,380,508,000	4,661,608,000	4,631,249,063	159	4,631,248,904	99.35	30,359,096
401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	8,310,823,000	8,499,323,000	8,469,033,921	655,332	8,468,378,589	99.64	30,944,411
401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	7,609,234,000	8,453,834,000	7,885,475,748	416	7,885,475,332	93.28	568,358,668

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	3,771,310,000	3,890,810,000	3,878,997,829	1,485,168	3,877,512,661	99.66	13,297,339
401086	PENGADILAN AGAMA CILACAP	10,166,842,000	12,088,342,000	12,057,385,782	740,753	12,056,645,029	99.74	31,696,971
401092	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	4,265,469,000	4,526,969,000	4,464,780,669	185,036	4,464,595,633	98.62	62,373,367
401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	5,324,640,000	5,935,140,000	5,930,957,559	480,286	5,930,477,273	99.92	4,662,727
401121	PENGADILAN AGAMA KLATEN	5,067,310,000	5,203,910,000	5,169,740,596	1,462,334	5,168,278,262	99.32	35,631,738
401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	5,242,675,000	5,205,275,000	5,071,847,481	365,269	5,071,482,212	97.43	133,792,788
401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	8,211,749,000	9,084,749,000	8,650,345,497	1,256	8,650,344,241	95.22	434,404,759
401152	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	4,837,463,000	4,418,963,000	4,327,453,191	212	4,327,452,979	97.93	91,510,021
401168	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	4,559,101,000	4,125,601,000	4,081,156,361	13,924,666	4,067,231,695	98.59	58,369,305
401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	3,975,488,000	4,244,988,000	4,221,178,571	3,149,304	4,218,029,267	99.36	26,958,733
401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	9,763,975,000	9,965,775,000	9,870,777,401	541	9,870,776,860	99.05	94,998,140
402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	4,270,109,000	4,533,609,000	4,526,600,557	180,250	4,526,420,307	99.84	7,188,693
402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	60,108,268,000	21,977,729,000	21,920,013,529	390,035	21,919,623,494	99.74	58,105,506
403015	PENGADILAN AGAMA SLAWI	7,413,460,000	7,654,960,000	7,500,074,856	470,315	7,499,604,541	97.97	155,355,459
403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	5,408,158,000	5,996,338,000	5,988,846,043	1,820,998	5,987,025,045	99.84	9,312,955
531830	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	9,404,285,000	10,682,837,000	10,595,870,989	185,523	10,595,685,466	99.18	87,151,534
614710	PENGADILAN AGAMA KAJEN	5,007,104,000	4,710,604,000	4,702,239,700	121	4,702,239,579	99.82	8,364,421
663288	PENGADILAN MILITER II - 10 DI SEMARANG	5,287,097,000	4,188,594,000	3,885,113,159	0	3,885,113,159	92.75	303,480,841
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) JAWA TENGAH	602,499,861,000	568,948,041,000	558,715,906,834	280,454,266	558,435,452,568	98.2	10,512,588,432
005010400KD	BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
098057	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	20,281,966,000	16,984,478,000	16,924,990,531	176,411	16,924,814,120	99.65	59,663,880
098061	PENGADILAN NEGERI WATES	7,409,693,000	7,031,662,000	6,994,622,913	1,100,794	6,993,522,119	99.46	38,139,881
098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	5,831,249,000	5,014,302,000	4,973,893,255	334	4,973,892,921	99.19	40,409,079
098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	12,360,362,000	14,865,553,000	14,808,724,167	1,529	14,808,722,638	99.62	56,830,362
400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	8,132,881,000	7,661,890,000	7,650,688,273	978,396	7,649,709,877	99.84	12,180,123
400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	38,229,398,000	38,157,761,000	38,096,399,518	6,631,780	38,089,767,738	99.82	67,993,262
401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	9,446,856,000	9,584,736,000	9,574,307,821	564,513	9,573,743,308	99.89	10,992,692
401200	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	9,484,151,000	11,404,251,000	11,097,715,265	2,634,927	11,095,080,338	97.29	309,170,662
401219	PENGADILAN AGAMA WATES	4,316,331,000	4,356,331,000	4,344,074,806	2,596,970	4,341,477,836	99.66	14,853,164
401225	PENGADILAN AGAMA BANTUL	7,170,961,000	6,388,016,000	6,343,302,779	2,432,839	6,340,869,940	99.26	47,146,060
401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	5,645,232,000	4,801,397,000	4,703,855,196	185,161	4,703,670,035	97.96	97,726,965
547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	16,797,855,000	16,597,423,000	16,567,235,303	185,124	16,567,050,179	99.82	30,372,821
578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	7,998,004,000	7,998,004,000	6,719,051,216	185,059	6,718,866,157	84.01	1,279,137,843
663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	3,886,276,000	3,886,276,000	3,420,772,948	4,139,900	3,416,633,048	87.92	469,642,952

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) DI YOGYAKARTA	156,991,215,000	154,732,080,000	152,219,633,991	21,813,737	152,197,820,254	98.38	2,534,259,746
005010500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya							
098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	56,012,091,000	56,068,544,000	50,705,370,462	36	50,705,370,426	90.43	5,363,173,574
098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	35,474,069,000	34,598,040,000	34,042,462,238	22,557,246	34,019,904,992	98.33	578,135,008
098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	4,951,541,000	6,338,500,000	5,921,085,481	845	5,921,084,636	93.41	417,415,364
098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	5,430,687,000	6,683,592,000	6,638,928,330	564	6,638,927,766	99.33	44,664,234
098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	6,638,905,000	7,398,028,000	7,075,977,992	186,616	7,075,791,376	95.64	322,236,624
098150	PENGADILAN NEGERI GRESIK	10,573,888,000	11,373,079,000	11,184,577,768	186,256	11,184,391,512	98.34	188,687,488
098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	19,227,298,000	26,661,483,000	23,063,897,924	5,400,197	23,058,497,727	86.49	3,602,985,273
098171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	7,436,291,000	6,833,875,000	6,816,160,703	15,696,779	6,800,463,924	99.51	33,411,076
098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	5,835,676,000	6,384,303,000	6,352,018,311	370,322	6,351,647,989	99.49	32,655,011
098192	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	5,317,608,000	5,173,448,000	5,166,289,429	83	5,166,289,346	99.86	7,158,654
098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	9,134,300,000	8,834,300,000	8,822,971,444	908	8,822,970,536	99.87	11,329,464
098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	8,785,937,000	8,412,869,000	8,392,187,012	3,759,416	8,388,427,596	99.71	24,441,404
098221	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	5,476,905,000	5,923,727,000	5,912,543,281	351	5,912,542,930	99.81	11,184,070
098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	7,476,007,000	7,429,776,000	7,418,822,421	119	7,418,822,302	99.85	10,953,698
098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	5,854,085,000	6,335,156,000	6,266,388,301	185,345	6,266,202,956	98.91	68,953,044
098256	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	6,768,108,000	6,900,045,000	6,885,796,249	13,150,632	6,872,645,617	99.6	27,399,383
098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	4,734,464,000	4,641,236,000	4,545,429,949	14,237,444	4,531,192,505	97.63	110,043,495
098277	PENGADILAN NEGERI BLITAR	5,869,350,000	7,050,673,000	7,037,030,319	2,069,412	7,034,960,907	99.78	15,712,093
098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	11,924,947,000	12,531,947,000	12,114,795,647	722,311	12,114,073,336	96.67	417,873,664
098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	5,765,324,000	5,055,542,000	5,052,368,241	737,836	5,051,630,405	99.92	3,911,595
098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	4,447,761,000	3,992,810,000	3,978,617,920	236	3,978,617,684	99.64	14,192,316
098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	4,658,925,000	4,790,955,000	4,788,746,548	730	4,788,745,818	99.95	2,209,182
098324	PENGADILAN NEGERI BANGIL	7,230,255,000	7,941,489,000	7,940,430,993	145	7,940,430,848	99.99	1,058,152
098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	6,054,744,000	6,450,244,000	5,938,687,529	370,888	5,938,316,641	92.06	511,927,359
098345	PENGADILAN NEGERI MADIUN	8,239,277,000	7,141,323,000	7,132,589,846	0	7,132,589,846	99.88	8,733,154
098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	5,502,027,000	6,187,443,000	6,145,537,040	210	6,145,536,830	99.32	41,906,170
098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	4,811,454,000	4,047,719,000	4,030,163,858	552	4,030,163,306	99.57	17,555,694
098370	PENGADILAN NEGERI NGAWI	4,905,282,000	4,989,067,000	4,963,629,300	253	4,963,629,047	99.49	25,437,953
098387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	5,376,191,000	5,211,503,000	5,198,005,255	225,258	5,197,779,997	99.74	13,723,003
098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	8,739,215,000	8,447,701,000	8,000,337,445	351	8,000,337,094	94.7	447,363,906
098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	8,470,448,000	15,806,982,000	15,303,037,938	370,163	15,302,667,775	96.81	504,314,225
098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	6,480,157,000	6,013,263,000	5,090,813,995	152	5,090,813,843	84.66	922,449,157

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	5,112,187,000	5,210,978,000	5,208,322,156	90	5,208,322,066	99.95	2,655,934
308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	25,672,119,000	23,404,066,000	23,307,738,718	1,110,252	23,306,628,466	99.58	97,437,534
400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	7,249,037,000	8,538,048,000	8,536,893,605	186,244	8,536,707,361	99.98	1,340,639
400596	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	5,185,951,000	5,072,261,000	5,066,249,653	462	5,066,249,191	99.88	6,011,809
401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	15,137,625,000	14,769,075,000	14,668,328,287	185,260	14,668,143,027	99.32	100,931,973
401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	6,146,251,000	6,968,926,000	6,661,463,984	185,218	6,661,278,766	95.59	307,647,234
401262	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	12,879,708,000	13,168,398,000	13,146,201,695	1,063,593	13,145,138,102	99.82	23,259,898
401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	4,815,811,000	6,564,952,000	6,521,684,487	185,052	6,521,499,435	99.34	43,452,565
401287	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	2,957,994,000	2,815,879,000	2,691,200,416	185,028	2,691,015,388	95.57	124,863,612
401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	5,518,941,000	5,593,031,000	5,511,934,348	1,535,318	5,510,399,030	98.52	82,631,970
401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	8,934,770,000	9,283,364,000	9,203,657,642	370,423	9,203,287,219	99.14	80,076,781
401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	12,589,885,000	12,815,643,000	12,622,461,491	106	12,622,461,385	98.49	193,181,615
401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	13,007,765,000	12,520,365,000	12,250,941,149	370,858	12,250,570,291	97.85	269,794,709
401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	5,141,226,000	5,148,476,000	5,119,371,500	555,300	5,118,816,200	99.42	29,659,800
401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	3,941,765,000	4,775,656,000	4,768,312,544	2,466,331	4,765,846,213	99.79	9,809,787
401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	10,896,021,000	10,847,381,000	10,774,968,164	555,523	10,774,412,641	99.33	72,968,359
401375	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	8,216,024,000	10,400,374,000	10,183,330,429	567,631	10,182,762,798	97.91	217,611,202
401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	10,276,925,000	9,074,662,000	9,025,543,635	185,770	9,025,357,865	99.46	49,304,135
401390	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	4,224,087,000	4,436,740,000	4,416,193,789	316,364	4,415,877,425	99.53	20,862,575
401410	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	4,912,414,000	5,733,511,000	5,665,784,244	185,155	5,665,599,089	98.82	67,911,911
401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	10,668,871,000	10,552,625,000	10,477,585,171	549	10,477,584,622	99.29	75,040,378
401432	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	5,239,237,000	5,692,142,000	5,629,908,575	156	5,629,908,419	98.91	62,233,581
401441	PENGADILAN AGAMA BANGIL	5,326,022,000	4,880,672,000	4,832,954,752	186,439	4,832,768,313	99.02	47,903,687
401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	4,052,761,000	4,107,750,000	4,094,459,147	185,050	4,094,274,097	99.67	13,475,903
401463	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	4,421,630,000	5,597,346,000	5,590,615,940	185,084	5,590,430,856	99.88	6,915,144
401472	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	9,870,392,000	7,702,940,000	7,676,156,520	370,162	7,675,786,358	99.65	27,153,642
401488	PENGADILAN AGAMA MADIUN	4,947,557,000	4,715,018,000	4,683,345,850	185,064	4,683,160,786	99.32	31,857,214
401494	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	5,077,907,000	4,459,403,000	4,378,632,076	47	4,378,632,029	98.19	80,770,971
401508	PENGADILAN AGAMA NGAWI	4,615,290,000	5,186,830,000	5,162,826,393	44	5,162,826,349	99.54	24,003,651
401514	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	5,249,679,000	5,646,519,000	5,491,267,744	370,220	5,490,897,524	97.24	155,621,476
401520	PENGADILAN AGAMA PACITAN	4,506,079,000	4,293,389,000	4,284,808,357	370,052	4,284,438,305	99.79	8,950,695
401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	4,658,502,000	4,894,513,000	4,808,396,840	185,094	4,808,211,746	98.24	86,301,254
401545	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	5,578,892,000	5,116,206,000	5,076,112,396	555,223	5,075,557,173	99.21	40,648,827
401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	4,285,483,000	4,562,583,000	4,357,762,074	555,097	4,357,206,977	95.5	205,376,023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401560	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	4,522,037,000	4,969,313,000	4,950,199,428	18,585,731	4,931,613,697	99.24	37,699,303
401576	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	3,072,259,000	3,296,614,000	3,283,105,645	802,680	3,282,302,965	99.57	14,311,035
403030	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	4,968,016,000	4,684,086,000	4,616,568,687	185,136	4,616,383,551	98.55	67,702,449
403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	4,323,217,000	5,019,189,000	4,994,124,236	185,205	4,993,939,031	99.5	25,249,969
450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	6,912,701,000	8,464,778,000	8,463,556,062	252	8,463,555,810	99.99	1,222,190
526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	10,385,232,000	12,472,827,000	12,313,018,366	417	12,313,017,949	98.72	159,809,051
548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	15,263,648,000	17,526,470,000	17,383,029,356	19,485,408	17,363,543,948	99.07	162,926,052
604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	15,045,760,000	14,927,580,000	14,841,056,193	330,337	14,840,725,856	99.42	86,854,144
626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	8,115,538,000	9,146,799,000	9,089,244,264	436	9,089,243,828	99.37	57,555,172
663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	8,989,215,000	8,688,877,000	8,179,581,434	2,605,103	8,176,976,331	94.11	511,900,669
663314	PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA	8,286,271,000	4,566,135,000	4,487,957,837	58	4,487,957,779	98.29	78,177,221
663321	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	3,874,662,000	3,074,662,000	3,003,684,293	0	3,003,684,293	97.69	70,977,707
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Surabaya	648,676,581,000	673,035,714,000	655,426,238,741	135,770,678	655,290,468,063	97.38	17,745,245,937
005010600KD	BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	33,950,880,000	33,834,900,000	33,517,511,109	22,587,181	33,494,923,928	99	339,976,072
098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	30,262,295,000	28,085,797,000	27,841,486,709	3,535,457	27,837,951,252	99.12	247,845,748
098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	4,215,504,000	4,327,624,000	4,132,086,496	757	4,132,085,739	95.48	195,538,261
098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	5,680,559,000	5,296,822,000	5,129,413,907	1,229,344	5,128,184,563	96.82	168,637,437
098476	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	5,180,025,000	4,852,245,000	4,842,502,943	181,300	4,842,321,643	99.8	9,923,357
098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	4,639,903,000	6,634,767,000	6,274,183,659	0	6,274,183,659	94.57	360,583,341
098497	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	5,570,665,000	5,198,672,000	5,151,992,312	7,721,354	5,144,270,958	98.95	54,401,042
098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	3,692,055,000	4,132,368,000	4,014,578,368	360,588	4,014,217,780	97.14	118,150,220
098519	PENGADILAN NEGERI LANGSA	4,720,729,000	4,001,145,000	3,954,267,499	360,927	3,953,906,572	98.82	47,238,428
098523	PENGADILAN NEGERI IDI	4,294,665,000	4,580,740,000	4,450,125,456	996	4,450,124,460	97.15	130,615,540
098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	4,890,281,000	4,535,653,000	4,467,789,307	180,614	4,467,608,693	98.5	68,044,307
098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	3,320,693,000	3,677,865,000	3,484,891,787	180,971	3,484,710,816	94.75	193,154,184
098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	4,309,789,000	4,685,639,000	4,543,783,796	1,094	4,543,782,702	96.97	141,856,298
098565	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	3,682,169,000	3,841,755,000	3,826,936,888	496	3,826,936,392	99.61	14,818,608
098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	3,245,037,000	3,373,287,000	3,351,583,096	180,956	3,351,402,140	99.35	21,884,860
098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	3,526,682,000	3,899,886,000	3,855,027,836	550,564	3,854,477,272	98.84	45,408,728
098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	3,655,356,000	3,985,322,000	3,910,220,361	180,719	3,910,039,642	98.11	75,282,358
098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	3,534,887,000	4,002,953,000	3,846,579,932	180,772	3,846,399,160	96.09	156,553,840
400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	7,061,096,000	7,231,513,000	6,859,791,523	180,940	6,859,610,583	94.86	371,902,417
401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	17,626,046,000	17,611,703,000	17,567,886,656	582	17,567,886,074	99.75	43,816,926

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	13,360,510,000	12,689,343,000	11,831,922,644	0	11,831,922,644	93.24	857,420,356
401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	2,783,327,000	2,893,357,000	2,851,300,572	78	2,851,300,494	98.55	42,056,506
401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	6,319,304,000	5,056,701,000	4,937,226,263	2,717,003	4,934,509,260	97.58	122,191,740
401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	3,538,814,000	3,574,293,000	3,532,515,110	184	3,532,514,926	98.83	41,778,074
401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	6,919,006,000	4,807,006,000	4,561,190,719	154	4,561,190,565	94.89	245,815,435
401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	3,721,823,000	4,303,242,000	4,300,168,783	550,617	4,299,618,166	99.92	3,623,834
401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	5,918,765,000	4,456,251,000	4,434,801,223	8	4,434,801,215	99.52	21,449,785
401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	8,158,157,000	4,274,157,000	4,249,239,049	729,605	4,248,509,444	99.4	25,647,556
401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	3,311,016,000	2,977,158,000	2,967,943,892	365,316	2,967,578,576	99.68	9,579,424
401689	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	3,796,655,000	4,143,306,000	3,945,581,999	365,179	3,945,216,820	95.22	198,089,180
401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	3,947,352,000	3,903,316,000	3,860,846,670	185,064	3,860,661,606	98.91	42,654,394
401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	2,917,054,000	3,271,106,000	3,264,308,034	180,207	3,264,127,827	99.79	6,978,173
401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	3,590,790,000	3,906,903,000	3,872,755,643	180,168	3,872,575,475	99.12	34,327,525
401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	3,491,925,000	3,151,897,000	3,137,668,962	112	3,137,668,850	99.55	14,228,150
401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	3,918,238,000	3,836,723,000	3,663,218,662	195	3,663,218,467	95.48	173,504,533
401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	3,378,400,000	3,359,971,000	3,227,492,970	365,374	3,227,127,596	96.05	132,843,404
401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	2,784,355,000	3,011,876,000	2,876,403,914	619,428	2,875,784,486	95.48	136,091,514
401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	3,883,312,000	3,945,414,000	3,932,035,787	365,216	3,931,670,571	99.65	13,743,429
401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	13,352,611,000	16,008,749,000	15,940,175,427	360,689	15,939,814,738	99.57	68,934,262
401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	40,455,664,000	13,504,199,000	13,433,861,160	976	13,433,860,184	99.48	70,338,816
401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	4,385,042,000	6,574,381,000	6,257,341,305	180,353	6,257,160,952	95.17	317,220,048
401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	42,594,069,000	34,641,468,000	34,448,514,222	1,185,163	34,447,329,059	99.44	194,138,941
401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	2,635,790,000	5,512,752,000	5,507,167,364	120	5,507,167,244	99.9	5,584,756
401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	46,344,201,000	37,859,705,000	37,662,333,667	0	37,662,333,667	99.48	197,371,333
402607	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	4,736,002,000	4,675,483,000	4,527,292,835	0	4,527,292,835	96.83	148,190,165
578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	5,919,006,000	6,562,824,000	6,244,089,729	2,387,550	6,241,702,179	95.11	321,121,821
663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	5,778,440,000	4,770,160,000	4,607,347,348	4,526,329	4,602,821,019	96.49	167,338,981
673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	4,044,740,000	4,627,516,000	4,294,993,364	17	4,294,993,347	92.81	332,522,653
682228	MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG	3,619,654,000	3,674,370,000	3,627,996,400	180,224	3,627,816,176	98.73	46,553,824
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	416,663,338,000	373,764,283,000	367,020,373,357	53,060,941	366,967,312,416	98.2	6,796,970,584
005010700KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA							
098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	30,263,817,000	38,814,336,000	38,596,244,459	1,770,370	38,594,474,089	99.43	219,861,911
098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	36,463,845,000	30,802,273,000	30,247,084,859	1,093	30,247,083,766	98.2	555,189,234
098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	6,808,309,000	7,048,289,000	6,761,409,731	1,620,120	6,759,789,611	95.91	288,499,389

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	3,417,861,000	4,572,861,000	4,510,899,726	180,690	4,510,719,036	98.64	62,141,964
098654	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	4,066,412,000	3,874,508,000	3,857,415,956	185,216	3,857,230,740	99.55	17,277,260
098661	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	6,918,684,000	6,520,877,000	6,354,747,379	17	6,354,747,362	97.45	166,129,638
098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	5,665,927,000	5,464,327,000	5,432,780,027	365,439	5,432,414,588	99.42	31,912,412
098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	5,783,286,000	5,758,523,000	5,474,086,005	32	5,474,085,973	95.06	284,437,027
098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	5,299,363,000	5,593,264,000	5,316,777,229	370,313	5,316,406,916	95.05	276,857,084
098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	5,881,973,000	5,736,249,000	5,714,575,437	156,760	5,714,418,677	99.62	21,830,323
098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	4,121,936,000	5,137,704,000	5,118,660,108	926,468	5,117,733,640	99.61	19,970,360
098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	4,673,401,000	5,662,604,000	5,559,481,472	185,106	5,559,296,366	98.18	103,307,634
098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	3,800,938,000	5,087,938,000	5,071,941,748	366,738	5,071,575,010	99.68	16,362,990
108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	7,300,694,000	6,716,664,000	6,296,409,422	272	6,296,409,150	93.74	420,254,850
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5,962,311,000	5,585,705,000	5,580,833,102	365,463	5,580,467,639	99.91	5,237,361
400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	5,469,605,000	5,517,105,000	5,500,505,077	180,319	5,500,324,758	99.7	16,780,242
400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	12,920,839,000	14,785,898,000	14,361,742,649	1,212	14,361,741,437	97.13	424,156,563
401777	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	45,833,302,000	16,829,739,000	16,502,657,194	223,883	16,502,433,311	98.06	327,305,689
401783	PENGADILAN AGAMA BINJAI	3,724,220,000	3,547,829,000	3,482,930,911	185,079	3,482,745,832	98.17	65,083,168
401792	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	2,413,766,000	2,425,335,000	2,406,846,128	93	2,406,846,035	99.24	18,488,965
401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	13,288,452,000	12,855,768,000	12,096,879,124	622	12,096,878,502	94.1	758,889,498
401812	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	4,815,873,000	3,710,457,000	3,397,590,524	0	3,397,590,524	91.57	312,866,476
401828	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	2,872,957,000	2,776,566,000	2,769,580,067	56	2,769,580,011	99.75	6,985,989
401834	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	2,952,945,000	3,017,405,000	3,012,115,858	294,578	3,011,821,280	99.81	5,583,720
401840	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	2,117,942,000	2,067,942,000	1,971,361,808	113	1,971,361,695	95.33	96,580,305
401859	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	3,104,526,000	3,094,526,000	3,015,417,976	830,050	3,014,587,926	97.42	79,938,074
401865	PENGADILAN AGAMA BALIGE	2,506,715,000	2,659,050,000	2,647,025,635	365,136	2,646,660,499	99.53	12,389,501
401871	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	2,563,833,000	2,628,866,000	2,577,438,316	185,197	2,577,253,119	98.04	51,612,881
401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	1,978,475,000	2,545,882,000	2,482,968,433	430	2,482,968,003	97.53	62,913,997
401896	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	2,906,003,000	2,821,003,000	2,710,580,210	5,076,330	2,705,503,880	95.91	115,499,120
401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	4,515,813,000	6,027,060,000	5,976,700,260	1,344	5,976,698,916	99.16	50,361,084
401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	49,609,650,000	15,470,787,000	15,408,399,423	566	15,408,398,857	99.6	62,388,143
401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	36,961,632,000	12,169,246,000	12,079,690,222	365,467	12,079,324,755	99.26	89,921,245
401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	3,497,078,000	6,846,385,000	6,330,885,934	122	6,330,885,812	92.47	515,499,188
403061	PENGADILAN AGAMA KISARAN	5,405,102,000	5,402,102,000	4,981,582,203	0	4,981,582,203	92.22	420,519,797
403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	8,119,961,000	6,119,961,000	5,647,859,013	300,057	5,647,558,956	92.28	472,402,044
403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	4,014,759,000	3,864,759,000	3,689,612,525	365,125	3,689,247,400	95.46	175,511,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	2,608,445,000	4,186,694,000	4,173,066,159	909	4,173,065,250	99.67	13,628,750
526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	13,974,369,000	14,034,535,000	12,716,086,539	5,853,484	12,710,233,055	90.56	1,324,301,945
526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	11,095,649,000	10,252,788,000	10,063,612,140	388	10,063,611,752	98.15	189,176,248
547682	PENGADILAN AGAMA STABAT	5,342,204,000	4,870,204,000	4,744,123,460	2	4,744,123,458	97.41	126,080,542
604744	PENGADILAN AGAMA PANDAN	2,445,159,000	2,646,421,000	2,646,360,703	185,070	2,646,175,633	99.99	245,367
631978	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	2,146,444,000	2,131,444,000	2,098,548,029	545,050	2,098,002,979	98.43	33,441,021
631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	2,933,050,000	2,942,102,000	2,922,611,988	1,677,896	2,920,934,092	99.28	21,167,908
663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	8,118,977,000	7,770,266,000	7,594,134,832	11	7,594,134,821	97.73	176,131,179
663199	PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN	4,395,134,000	4,285,133,000	4,230,588,807	122	4,230,588,685	98.73	54,544,315
672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	4,327,172,000	4,332,072,000	3,973,186,547	1,390	3,973,185,157	91.72	358,886,843
682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	2,024,420,000	2,338,290,000	2,289,227,654	11,748	2,289,215,906	97.9	49,074,094
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SUMATERA UTARA	417,433,228,000	339,349,742,000	330,395,263,008	23,145,946	330,372,117,062	97.36	8,977,624,938
005010800KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT							
098743	PENGADILAN TINGGI PADANG	21,535,919,000	21,087,402,000	20,408,349,321	6,806,721	20,401,542,600	96.75	685,859,400
098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	19,338,955,000	15,866,745,000	15,537,047,631	5,619,875	15,531,427,756	97.89	335,317,244
098764	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	3,287,191,000	3,585,634,000	3,478,054,698	365,828	3,477,688,870	96.99	107,945,130
098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	4,640,268,000	4,512,277,000	4,488,097,338	365,719	4,487,731,619	99.46	24,545,381
098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	3,994,275,000	4,249,065,000	4,043,726,352	365,895	4,043,360,457	95.16	205,704,543
098792	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	5,096,586,000	5,470,082,000	5,461,147,597	365,604	5,460,781,993	99.83	9,300,007
098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	3,791,130,000	3,731,975,000	3,699,344,568	365,650	3,698,978,918	99.12	32,996,082
098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	5,636,408,000	6,102,152,000	6,071,594,827	175	6,071,594,652	99.5	30,557,348
098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	4,052,034,000	4,393,788,000	4,234,290,129	3,374,512	4,230,915,617	96.29	162,872,383
098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	4,535,762,000	5,016,374,000	4,518,733,664	180,884	4,518,552,780	90.08	497,821,220
400188	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	4,114,066,000	4,087,215,000	4,003,755,979	365,534	4,003,390,445	97.95	83,824,555
400333	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	4,629,464,000	4,630,729,000	4,595,896,319	563,522	4,595,332,797	99.24	35,396,203
400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	4,649,952,000	3,887,152,000	3,876,705,143	185,236	3,876,519,907	99.73	10,632,093
400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	4,237,437,000	4,583,676,000	4,523,376,330	518	4,523,375,812	98.68	60,300,188
400461	PENGADILAN NEGERI MUARO	3,336,656,000	3,733,415,000	3,601,106,154	813,761	3,600,292,393	96.43	133,122,607
401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	14,748,055,000	13,964,281,000	13,958,423,131	1,195,130	13,957,228,001	99.95	7,052,999
401907	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	3,125,660,000	8,844,911,000	8,453,701,977	300,404	8,453,401,573	95.57	391,509,427
401916	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	7,769,256,000	5,149,256,000	5,131,434,551	615,619	5,130,818,932	99.64	18,437,068
401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	3,118,585,000	3,619,585,000	3,606,031,525	762,044	3,605,269,481	99.6	14,315,519
401931	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	2,793,629,000	3,010,629,000	2,993,412,746	224	2,993,412,522	99.43	17,216,478
401936	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	3,664,133,000	8,136,753,000	8,086,245,282	365,050	8,085,880,232	99.37	50,872,768

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 12
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401947	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	6,059,445,000	4,589,445,000	4,585,051,532	625,166	4,584,426,366	99.89	5,018,634
401953	PENGADILAN AGAMA PADANG	11,965,533,000	10,932,533,000	10,889,986,445	365,619	10,889,620,826	99.61	42,912,174
401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	3,288,967,000	3,589,927,000	3,569,680,285	40,002	3,569,640,283	99.43	20,286,717
401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	2,898,896,000	3,416,896,000	3,401,443,892	180,159	3,401,263,733	99.54	15,632,267
401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	3,509,235,000	3,823,235,000	3,785,013,280	950,826	3,784,062,454	98.98	39,172,546
401990	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	3,221,120,000	2,888,120,000	2,863,152,986	365,164	2,862,787,822	99.12	25,332,178
402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	3,154,797,000	3,176,797,000	3,140,160,121	180,096	3,139,980,025	98.84	36,816,975
402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	6,224,557,000	5,431,597,000	5,429,645,722	365,210	5,429,280,512	99.96	2,316,488
402029	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	2,751,330,000	3,185,123,000	3,140,230,883	365,133	3,139,865,750	98.58	45,257,250
402035	PENGADILAN AGAMA TALU	3,240,317,000	3,403,317,000	3,401,275,413	365,174	3,400,910,239	99.93	2,406,761
402041	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	3,214,355,000	3,097,355,000	3,094,283,720	161	3,094,283,559	99.9	3,071,441
402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	4,977,367,000	3,820,367,000	3,565,307,974	365,179	3,564,942,795	93.31	255,424,205
402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	4,024,848,000	4,078,848,000	4,064,650,152	1,077,224	4,063,572,928	99.63	15,275,072
402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	3,298,334,000	3,296,334,000	3,260,060,054	365,128	3,259,694,926	98.89	36,639,074
477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	4,248,211,000	4,060,679,000	4,057,794,985	366,260	4,057,428,725	99.92	3,250,275
531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	5,935,086,000	5,976,960,000	5,588,377,468	104	5,588,377,364	93.5	388,582,636
663204	PENGADILAN MILITER I - 03 DI PADANG	3,416,796,000	3,408,780,000	3,400,729,775	0	3,400,729,775	99.76	8,050,225
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SUMATERA BARAT	207,524,615,000	209,839,409,000	206,007,319,949	28,954,510	205,978,365,439	98.17	3,861,043,561
005010900KD	BA(005) ES1(01) RIAU							
098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	13,622,026,000	12,686,033,000	12,538,589,901	263	12,538,589,638	98.84	147,443,362
098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	5,471,222,000	5,663,024,000	5,633,333,966	366,568	5,632,967,398	99.47	30,056,602
098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	4,886,128,000	4,330,931,000	4,259,284,734	80	4,259,284,654	98.35	71,646,346
098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	4,969,180,000	4,048,074,000	4,013,470,596	366,450	4,013,104,146	99.14	34,969,854
400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	12,642,032,000	12,653,244,000	12,591,733,466	1,900,502	12,589,832,964	99.5	63,411,036
400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	7,032,919,000	7,452,300,000	7,411,636,732	4,524,050	7,407,112,682	99.39	45,187,318
400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	23,705,754,000	24,512,067,000	24,504,169,934	27,963,256	24,476,206,678	99.85	35,860,322
401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	4,613,253,000	6,728,894,000	6,709,295,332	744	6,709,294,588	99.71	19,599,412
401937	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	3,513,881,000	3,300,269,000	3,233,279,157	344	3,233,278,813	97.97	66,990,187
401938	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	3,507,920,000	3,565,393,000	3,550,391,877	180,217	3,550,211,660	99.57	15,181,340
402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	12,401,765,000	13,557,795,000	13,500,437,455	1,717,645	13,498,719,810	99.56	59,075,190
402081	PENGADILAN AGAMA RENGAT	4,651,957,000	3,818,941,000	3,799,571,432	780,130	3,798,791,302	99.47	20,149,698
402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	3,966,323,000	3,988,369,000	3,930,999,953	818	3,930,999,135	98.56	57,369,865
402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	5,382,409,000	5,482,911,000	5,479,520,935	180,024	5,479,340,911	99.93	3,570,089
402117	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	3,910,927,000	4,190,867,000	4,162,496,677	87	4,162,496,590	99.32	28,370,410

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 13
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	4,433,739,000	4,417,992,000	4,234,328,344	180,465	4,234,147,879	95.84	183,844,121
402132	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	3,381,628,000	3,373,528,000	3,287,345,458	180,028	3,287,165,430	97.44	86,362,570
402622	PENGADILAN AGAMA DUMAI	4,071,879,000	4,211,042,000	4,197,940,474	3,194,648	4,194,745,826	99.61	16,296,174
402970	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	16,105,241,000	15,776,681,000	14,176,606,519	3,691,689	14,172,914,830	89.83	1,603,766,170
477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	6,408,991,000	5,926,092,000	5,910,086,439	542,134	5,909,544,305	99.72	16,547,695
477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	4,825,782,000	4,385,421,000	4,373,268,081	897,012	4,372,371,069	99.7	13,049,931
477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	5,365,609,000	4,306,537,000	4,264,386,478	830	4,264,385,648	99.02	42,151,352
578822	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	7,523,410,000	6,923,756,000	6,604,445,951	3,762,755	6,600,683,196	95.33	323,072,804
631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	4,200,811,000	3,625,261,000	3,614,347,661	184	3,614,347,477	99.7	10,913,523
632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	3,978,897,000	3,988,428,000	3,868,654,910	18,580,568	3,850,074,342	96.53	138,353,658
662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	4,385,417,000	4,917,325,000	4,724,352,103	366,365	4,723,985,738	96.07	193,339,262
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) RIAU	178,959,100,000	177,831,175,000	174,573,974,565	69,377,856	174,504,596,709	98.17	3,326,578,291
005011000KD	BA(005) ES1(01) JAMBI							
098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	15,801,232,000	14,025,327,000	13,849,099,754	1,152,332	13,847,947,422	98.74	177,379,578
098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	4,728,657,000	5,206,850,000	5,151,634,074	186,837	5,151,447,237	98.94	55,402,763
098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	4,889,277,000	4,593,324,000	4,563,966,397	365,960	4,563,600,437	99.35	29,723,563
098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	3,627,318,000	3,978,961,000	3,924,476,359	365,675	3,924,110,684	98.62	54,850,316
400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	4,528,501,000	6,150,649,000	5,768,180,605	180,362	5,768,000,243	93.78	382,648,757
400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	4,256,783,000	4,719,500,000	4,482,574,602	615,962	4,481,958,640	94.97	237,541,360
400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	25,114,672,000	28,285,805,000	28,149,947,682	5,658,232	28,144,289,450	99.5	141,515,550
402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	9,494,124,000	8,974,113,000	8,962,774,179	705,851	8,962,068,328	99.87	12,044,672
402191	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	3,111,208,000	3,354,054,000	3,348,560,440	0	3,348,560,440	99.84	5,493,560
402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	3,731,043,000	4,083,314,000	3,834,567,752	250,126	3,834,317,626	93.9	248,996,374
402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	4,102,876,000	3,296,651,000	3,272,926,223	0	3,272,926,223	99.28	23,724,777
402220	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	3,354,607,000	3,394,211,000	3,380,538,935	380	3,380,538,555	99.6	13,672,445
403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	4,311,511,000	4,053,499,000	4,045,472,737	297	4,045,472,440	99.8	8,026,560
477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	5,406,194,000	5,190,003,000	5,174,383,695	555,909	5,173,827,786	99.69	16,175,214
477374	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	4,508,848,000	3,985,803,000	3,946,279,756	366,760	3,945,912,996	99	39,890,004
477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	4,167,156,000	4,157,757,000	4,142,548,104	1,242	4,142,546,862	99.63	15,210,138
547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	11,352,760,000	13,738,179,000	13,586,140,267	476	13,586,139,791	98.89	152,039,209
578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	4,820,527,000	4,658,589,000	4,504,961,609	365,701	4,504,595,908	96.69	153,993,092
632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	3,629,567,000	3,544,242,000	3,482,993,896	1,944,036	3,481,049,860	98.22	63,192,140
632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	3,371,194,000	3,496,708,000	3,471,630,317	376	3,471,629,941	99.28	25,078,059
652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	2,996,086,000	2,684,344,000	2,667,404,384	0	2,667,404,384	99.37	16,939,616

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	5,466,488,000	4,714,079,000	4,696,474,012	950,000	4,695,524,012	99.61	18,554,988
663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	6,612,627,000	6,372,984,000	6,365,482,112	1,170	6,365,480,942	99.88	7,503,058
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) JAMBI	143,383,256,000	146,658,946,000	144,773,017,891	13,667,684	144,759,350,207	98.71	1,899,595,793
005011100KD	BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	27,709,582,000	27,571,304,000	27,381,697,722	21,236,886	27,360,460,836	99.24	210,843,164
098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	18,827,945,000	19,092,907,000	18,146,359,507	661,035	18,145,698,472	95.04	947,208,528
098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	5,818,674,000	6,322,287,000	6,183,724,395	556,157	6,183,168,238	97.8	139,118,762
098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	5,860,182,000	5,807,275,000	5,358,522,038	356,752	5,358,165,286	92.27	449,109,714
098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	6,857,603,000	6,882,835,000	6,780,903,533	495	6,780,903,038	98.52	101,931,962
098984	PENGADILAN NEGERI LAHAT	5,141,543,000	4,277,793,000	4,211,517,023	12,390,538	4,199,126,485	98.16	78,666,515
098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	5,619,549,000	5,123,189,000	4,821,520,065	952	4,821,519,113	94.11	301,669,887
099003	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	6,090,892,000	5,347,851,000	4,987,317,827	160,621	4,987,157,206	93.26	360,693,794
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	4,986,169,000	9,122,156,000	8,862,932,310	839	8,862,931,471	97.16	259,224,529
401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	26,646,017,000	22,864,632,000	22,746,619,837	341	22,746,619,496	99.48	118,012,504
401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	29,347,514,000	11,291,411,000	11,090,010,710	241	11,090,010,469	98.22	201,400,531
401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	25,203,976,000	9,152,950,000	9,124,314,225	227	9,124,313,998	99.69	28,636,002
401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	30,827,619,000	10,833,040,000	10,387,134,509	185,132	10,386,949,377	95.88	446,090,623
401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	9,941,468,000	9,863,301,000	9,707,335,649	56	9,707,335,593	98.42	155,965,407
402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	12,001,145,000	13,574,851,000	13,450,564,159	1,090,314	13,449,473,845	99.08	125,377,155
402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	12,115,493,000	10,627,357,000	9,777,712,773	365,480	9,777,347,293	92	850,009,707
402251	PENGADILAN AGAMA LAHAT	3,515,704,000	3,966,699,000	3,760,332,110	46	3,760,332,064	94.8	206,366,936
402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	4,189,470,000	4,439,794,000	4,250,668,079	180,491	4,250,487,588	95.74	189,306,412
402273	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	4,938,056,000	4,444,318,000	4,365,317,144	465,082	4,364,852,062	98.21	79,465,938
402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	4,764,913,000	4,737,913,000	4,595,215,720	703,337	4,594,512,383	96.97	143,400,617
402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	4,189,202,000	4,954,288,000	4,739,018,682	185,433	4,738,833,249	95.65	215,454,751
402638	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	3,863,512,000	4,224,329,000	4,169,342,448	365,129	4,168,977,319	98.69	55,351,681
526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	7,774,276,000	10,670,909,000	10,475,168,465	365,177	10,474,803,288	98.16	196,105,712
663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	4,579,316,000	4,439,353,000	4,390,831,972	0	4,390,831,972	98.91	48,521,028
672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	5,792,448,000	6,078,223,000	5,450,472,298	1,008	5,450,471,290	89.67	627,751,710
672969	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	3,967,705,000	3,883,964,000	3,750,184,891	0	3,750,184,891	96.56	133,779,109
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SUMATERA SELATAN	280,569,973,000	229,594,929,000	222,964,738,091	39,271,769	222,925,466,322	97.11	6,669,462,678
005011200KD	BA(005) ES1(01) LAMPUNG							
099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	19,886,556,000	16,848,654,000	16,636,340,793	0	16,636,340,793	98.74	212,313,207
099045	PENGADILAN NEGERI METRO	7,109,030,000	7,493,565,000	7,426,216,047	771	7,426,215,276	99.1	67,349,724

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 15
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099052	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	5,494,467,000	4,931,179,000	4,903,083,445	518	4,903,082,927	99.43	28,096,073
400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	28,305,765,000	31,880,694,000	31,681,938,768	274	31,681,938,494	99.38	198,755,506
400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	6,127,175,000	6,090,115,000	6,079,933,380	1,432	6,079,931,948	99.83	10,183,052
401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	5,300,996,000	8,177,022,000	8,135,847,298	180,792	8,135,666,506	99.49	41,355,494
401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	33,036,510,000	27,498,793,000	27,434,068,328	1,775,190	27,432,293,138	99.76	66,499,862
401951	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	9,158,922,000	14,477,541,000	14,381,599,587	185,388	14,381,414,199	99.34	96,126,801
401952	PENGADILAN AGAMA MESUJI	3,653,211,000	3,546,317,000	3,491,900,557	185,180	3,491,715,377	98.46	54,601,623
401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	24,294,174,000	24,335,774,000	24,107,757,499	0	24,107,757,499	99.06	228,016,501
401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	9,187,389,000	15,466,989,000	15,340,095,125	2,700,361	15,337,394,764	99.16	129,594,236
402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	9,530,285,000	9,138,943,000	7,748,815,768	19,983,285	7,728,832,483	84.57	1,410,110,517
402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	3,347,272,000	3,831,865,000	3,726,746,867	35,280	3,726,711,587	97.26	105,153,413
402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	4,454,924,000	5,107,139,000	4,983,404,958	185,523	4,983,219,435	97.57	123,919,565
402355	PENGADILAN AGAMA METRO	6,421,753,000	5,718,393,000	5,391,294,737	1,715,478	5,389,579,259	94.25	328,813,741
402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	4,631,838,000	4,955,035,000	4,722,517,675	41	4,722,517,634	95.31	232,517,366
477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	3,820,705,000	4,661,629,000	4,000,012,658	3,041,336	3,996,971,322	85.74	664,657,678
547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	15,362,301,000	15,102,468,000	14,993,345,617	4,880,339	14,988,465,278	99.25	114,002,722
559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	7,472,798,000	6,363,094,000	6,325,405,716	435,350	6,324,970,366	99.4	38,123,634
614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	3,843,561,000	4,006,561,000	3,627,266,579	56	3,627,266,523	90.53	379,294,477
614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	4,651,896,000	4,201,471,000	4,073,203,987	185,050	4,073,018,937	96.94	128,452,063
614883	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	4,645,833,000	3,802,099,000	3,739,084,660	192	3,739,084,468	98.34	63,014,532
652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	4,374,814,000	5,801,292,000	5,361,198,593	0	5,361,198,593	92.41	440,093,407
652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	3,087,951,000	3,864,284,000	3,846,296,159	268	3,846,295,891	99.53	17,988,109
663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	4,326,085,000	4,590,887,000	4,466,649,235	113,426	4,466,535,809	97.29	124,351,191
663030	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	4,643,150,000	5,048,655,000	5,019,228,162	262,513	5,018,965,649	99.41	29,689,351
663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	4,696,018,000	4,371,360,000	4,287,111,658	782	4,287,110,876	98.07	84,249,124
663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	4,142,470,000	4,197,258,000	4,176,614,878	49,500,290	4,127,114,588	98.33	70,143,412
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) LAMPUNG	245,007,849,000	255,509,076,000	250,106,978,734	85,369,115	250,021,609,619	97.89	5,487,466,381
005011300KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT							
099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	15,450,221,000	15,042,895,000	14,978,800,369	3,755,176	14,975,045,193	99.55	67,849,807
099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	6,355,568,000	6,036,221,000	5,930,709,270	11,092,304	5,919,616,966	98.07	116,604,034
099087	PENGADILAN NEGERI SINTANG	4,209,964,000	3,825,373,000	3,821,154,324	952	3,821,153,372	99.89	4,219,628
099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	4,192,717,000	4,875,684,000	4,790,750,643	8,956,568	4,781,794,075	98.07	93,889,925
099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	5,130,628,000	5,062,247,000	5,047,409,558	4,400,568	5,043,008,990	99.62	19,238,010
099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	4,529,045,000	4,903,575,000	4,866,046,206	1,816,001	4,864,230,205	99.2	39,344,795

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 16
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	3,755,855,000	3,890,710,000	3,841,271,769	1,116	3,841,270,653	98.73	49,439,347
400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	21,412,352,000	23,986,924,000	23,929,455,659	323	23,929,455,336	99.76	57,468,664
401960	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	3,176,450,000	3,157,397,000	3,151,685,086	555,413	3,151,129,673	99.8	6,267,327
401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	29,967,334,000	20,313,297,000	19,242,417,498	53	19,242,417,445	94.73	1,070,879,555
401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	4,058,905,000	20,215,797,000	17,987,707,326	334	17,987,706,992	88.98	2,228,090,008
402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	8,103,726,000	8,716,996,000	8,061,247,319	540,127	8,060,707,192	92.47	656,288,808
402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	4,205,153,000	4,483,803,000	4,463,376,703	1,350,019	4,462,026,684	99.51	21,776,316
402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	4,068,984,000	4,138,519,000	4,064,500,460	353	4,064,500,107	98.21	74,018,893
402392	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	3,519,121,000	3,433,213,000	3,400,332,237	180,173	3,400,152,064	99.04	33,060,936
402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	3,380,322,000	3,055,164,000	2,938,642,546	1,125,180	2,937,517,366	96.15	117,646,634
402412	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	3,084,835,000	2,649,893,000	2,616,017,225	2,826,960	2,613,190,265	98.61	36,702,735
402650	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	10,405,844,000	12,303,444,000	12,274,474,132	837,791	12,273,636,341	99.76	29,807,659
402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	4,517,021,000	3,571,343,000	3,562,092,632	180,018	3,561,912,614	99.74	9,430,386
531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	7,246,370,000	7,374,190,000	6,359,708,406	185,027	6,359,523,379	86.24	1,014,666,621
632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	3,463,500,000	9,705,761,000	6,077,073,048	430,328	6,076,642,720	62.61	3,629,118,280
663225	PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK	3,870,820,000	3,801,820,000	3,715,933,039	0	3,715,933,039	97.74	85,886,961
670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	4,947,151,000	4,946,851,000	4,829,885,629	386,068	4,829,499,561	97.63	117,351,439
670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	4,052,207,000	4,659,495,000	4,586,605,475	840	4,586,604,635	98.44	72,890,365
681450	PENGADILAN NEGERI NGABANG	3,360,274,000	4,212,540,000	3,982,474,875	1,344	3,982,473,531	94.54	230,066,469
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	170,464,367,000	188,363,152,000	178,519,771,434	38,623,036	178,481,148,398	94.77	9,882,003,602
005011400KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH							
099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	12,214,997,000	12,094,997,000	12,039,986,462	310	12,039,986,152	99.55	55,010,848
099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	5,106,669,000	5,216,669,000	5,211,014,889	1,350,252	5,209,664,637	99.87	7,004,363
099141	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	4,447,112,000	4,562,112,000	4,524,133,151	88	4,524,133,063	99.17	37,978,937
099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	5,254,471,000	4,524,471,000	4,518,419,506	1,653,037	4,516,766,469	99.83	7,704,531
099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	3,607,332,000	4,311,633,000	4,244,749,728	0	4,244,749,728	98.45	66,883,272
099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	6,820,053,000	5,277,190,000	5,219,995,975	27,300,023	5,192,695,952	98.4	84,494,048
400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	25,019,174,000	25,987,782,000	25,688,787,949	33,300,138	25,655,487,811	98.72	332,294,189
401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	27,795,820,000	18,548,692,000	18,463,269,227	377	18,463,268,850	99.54	85,423,150
401869	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	2,840,829,000	2,654,829,000	2,596,523,080	725,523	2,595,797,557	97.78	59,031,443
401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	3,987,300,000	4,689,293,000	3,957,507,282	235	3,957,507,047	84.39	731,785,953
401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	29,371,319,000	18,711,775,000	18,367,834,093	185,192	18,367,648,901	98.16	344,126,099
401874	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	2,692,551,000	4,908,963,000	4,732,316,412	185,186	4,732,131,226	96.4	176,831,774
401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	30,323,882,000	19,184,333,000	19,140,033,398	370,216	19,139,663,182	99.77	44,669,818

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 17
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401876	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	2,612,090,000	2,491,207,000	2,411,437,940	967,994	2,410,469,946	96.76	80,737,054
401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	17,892,705,000	17,892,705,000	17,555,873,888	1,150,944	17,554,722,944	98.11	337,982,056
401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	9,954,358,000	10,096,333,000	9,837,303,911	1,200	9,837,302,711	97.43	259,030,289
401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	3,878,602,000	7,617,002,000	7,599,601,158	248	7,599,600,910	99.77	17,401,090
402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	7,646,856,000	7,224,445,000	6,776,154,857	365,107	6,775,789,750	93.79	448,655,250
402437	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	3,656,671,000	3,356,671,000	3,323,413,353	365,224	3,323,048,129	99	33,622,871
402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	3,461,382,000	3,313,493,000	3,075,478,005	365,002	3,075,113,003	92.81	238,379,997
402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	2,983,743,000	2,825,046,000	2,815,810,625	2	2,815,810,623	99.67	9,235,377
402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	4,585,928,000	4,150,928,000	3,916,527,829	74	3,916,527,755	94.35	234,400,245
402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	4,389,005,000	3,939,005,000	3,818,030,604	365,426	3,817,665,178	96.92	121,339,822
402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	11,030,855,000	14,816,048,000	14,616,697,746	6,365,232	14,610,332,514	98.61	205,715,486
578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	5,140,484,000	5,534,502,000	5,498,329,858	239	5,498,329,619	99.35	36,172,381
670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	3,944,232,000	4,387,539,000	4,354,820,103	882	4,354,819,221	99.25	32,719,779
672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	4,526,021,000	3,927,021,000	3,897,668,993	0	3,897,668,993	99.25	29,352,007
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH	245,184,441,000	222,244,684,000	218,201,720,022	75,018,151	218,126,701,871	98.18	4,117,982,129
005011500KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	30,027,999,000	31,576,798,000	31,247,896,737	6,102,002	31,241,794,735	98.94	335,003,265
099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	15,329,734,000	14,114,734,000	13,405,690,093	158	13,405,689,935	94.98	709,044,065
099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	5,092,277,000	4,856,516,000	4,846,557,052	3,419,290	4,843,137,762	99.72	13,378,238
099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	4,819,709,000	4,596,686,000	4,576,300,386	185,830	4,576,114,556	99.55	20,571,444
099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	5,697,015,000	5,747,645,000	5,571,029,697	201,623	5,570,828,074	96.92	176,816,926
099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	6,824,884,000	7,543,268,000	7,389,521,477	4,420,608	7,385,100,869	97.9	158,167,131
099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	4,260,937,000	4,360,937,000	4,125,508,357	186,442	4,125,321,915	94.6	235,615,085
099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	4,369,921,000	4,974,921,000	4,748,114,986	212,258	4,747,902,728	95.44	227,018,272
099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	14,159,920,000	13,611,385,000	12,529,989,260	1,022	12,529,988,238	92.06	1,081,396,762
307101	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	3,964,305,000	3,673,202,000	3,660,696,988	180,188	3,660,516,800	99.65	12,685,200
307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	5,177,924,000	4,520,701,000	4,480,979,867	365,133	4,480,614,734	99.11	40,086,266
307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	3,757,229,000	3,023,822,000	3,009,425,519	185,140	3,009,240,379	99.52	14,581,621
400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	5,043,419,000	5,002,678,000	4,741,572,672	610	4,741,572,062	94.78	261,105,938
400282	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	5,759,729,000	5,148,272,000	5,135,502,427	1,131	5,135,501,296	99.75	12,770,704
401921	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	4,170,942,000	4,035,613,000	3,755,684,316	105,752	3,755,578,564	93.06	280,034,436
402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	17,920,763,000	15,976,844,000	15,887,573,468	190,173	15,887,383,295	99.44	89,460,705
402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	12,458,298,000	11,968,138,000	11,813,450,254	370,931	11,813,079,323	98.7	155,058,677
402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	5,716,269,000	5,743,429,000	5,404,732,872	983,255	5,403,749,617	94.09	339,679,383

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 18
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	3,485,617,000	3,649,117,000	3,616,240,666	1,165,298	3,615,075,368	99.07	34,041,632
402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	3,424,311,000	3,414,771,000	3,177,592,600	74	3,177,592,526	93.05	237,178,474
402540	PENGADILAN AGAMA BARABAI	4,272,454,000	4,039,334,000	4,028,842,743	365,099	4,028,477,644	99.73	10,856,356
402556	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	5,318,978,000	4,605,858,000	4,539,875,241	284	4,539,874,957	98.57	65,983,043
402562	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	2,887,981,000	2,827,706,000	2,820,485,785	198	2,820,485,587	99.74	7,220,413
402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	2,585,207,000	3,133,447,000	3,062,750,964	139	3,062,750,825	97.74	70,696,175
531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	8,244,005,000	9,103,201,000	7,030,126,238	28	7,030,126,210	77.23	2,073,074,790
632043	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	4,859,893,000	4,530,604,000	4,371,759,806	2,263,452	4,369,496,354	96.44	161,107,646
653458	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	5,616,441,000	5,970,901,000	5,956,044,696	11,051,206	5,944,993,490	99.57	25,907,510
663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	3,639,799,000	3,639,799,000	3,271,972,825	160	3,271,972,665	89.89	367,826,335
670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	4,974,317,000	4,291,152,000	4,204,828,389	1,183	4,204,827,206	97.99	86,324,794
682260	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	3,820,530,000	3,796,676,000	3,766,656,378	1,084	3,766,655,294	99.21	30,020,706
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	207,680,807,000	203,478,155,000	196,177,402,759	31,959,751	196,145,443,008	96.41	7,332,711,992
005011600KD	BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR							
099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	5,086,277,000	4,510,019,000	4,488,856,903	3,325,188	4,485,531,715	99.46	24,487,285
099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	14,041,251,000	11,403,551,000	11,384,350,338	1,542	11,384,348,796	99.83	19,202,204
099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	6,435,419,000	5,426,785,000	5,402,622,655	975,091	5,401,647,564	99.54	25,137,436
099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	9,456,443,000	8,581,694,000	8,568,178,001	5,670,594	8,562,507,407	99.78	19,186,593
307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	5,378,461,000	4,178,461,000	4,091,434,072	0	4,091,434,072	97.92	87,026,928
307178	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	9,301,814,000	7,401,814,000	7,234,290,740	735,312	7,233,555,428	97.73	168,258,572
307182	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	3,896,638,000	3,403,152,000	3,242,280,740	13,563,104	3,228,717,636	94.87	174,434,364
307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	9,603,818,000	7,475,293,000	7,370,218,736	180,184	7,370,038,552	98.59	105,254,448
307204	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	3,751,975,000	3,541,160,000	3,510,595,174	199	3,510,594,975	99.14	30,565,025
400291	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	4,048,703,000	4,239,840,000	4,234,015,148	793,950	4,233,221,198	99.84	6,618,802
400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	4,060,847,000	4,118,567,000	4,108,641,731	1,561,206	4,107,080,525	99.72	11,486,475
400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	24,769,635,000	27,830,613,000	27,634,956,138	5,711,071	27,629,245,067	99.28	201,367,933
401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	11,122,737,000	10,875,863,000	10,810,495,998	365	10,810,495,633	99.4	65,367,367
401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	2,868,665,000	2,857,165,000	2,674,312,717	1,580,136	2,672,732,581	93.54	184,432,419
401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	4,570,905,000	10,026,051,000	9,817,842,637	942	9,817,841,695	97.92	208,209,305
402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	10,464,014,000	15,343,775,000	15,295,968,150	4,195,116	15,291,773,034	99.66	52,001,966
402675	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	3,349,627,000	3,009,283,000	2,992,049,294	365,000	2,991,684,294	99.42	17,598,706
417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	3,921,932,000	4,537,929,000	4,499,425,153	800,231	4,498,624,922	99.13	39,304,078
417704	PENGADILAN NEGERI MALINAU	3,865,235,000	3,403,152,000	3,259,876,619	180,024	3,259,696,595	95.78	143,455,405
417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	4,352,593,000	5,690,200,000	5,670,940,626	365,378	5,670,575,248	99.66	19,624,752

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 19
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	5,308,291,000	4,190,665,000	4,135,308,493	550,630	4,134,757,863	98.67	55,907,137
477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	4,780,591,000	4,099,699,000	4,061,251,567	387,468	4,060,864,099	99.05	38,834,901
559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	5,669,481,000	6,200,893,000	6,026,784,429	370,106	6,026,414,323	97.19	174,478,677
652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	3,253,691,000	3,222,191,000	3,166,222,563	365,104	3,165,857,459	98.25	56,333,541
652097	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	3,207,783,000	3,792,783,000	3,754,234,869	365,788	3,753,869,081	98.97	38,913,919
662972	PENGADILAN NEGERI BONTANG	4,573,120,000	4,084,424,000	4,064,950,092	365,782	4,064,584,310	99.51	19,839,690
662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	4,358,956,000	4,288,326,000	4,270,710,563	0	4,270,710,563	99.59	17,615,437
663246	PENGADILAN MILITER I - 07 DI BALIKPAPAN	4,151,315,000	4,151,315,000	3,432,007,121	0	3,432,007,121	82.67	719,307,879
682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	3,581,857,000	3,098,657,000	3,053,441,798	0	3,053,441,798	98.54	45,215,202
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR	183,232,074,000	184,983,320,000	182,256,263,065	42,409,511	182,213,853,554	98.53	2,769,466,446
005011700KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA							
099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	20,639,556,000	22,552,853,000	21,928,155,018	545,138	21,927,609,880	97.23	625,243,120
099329	PENGADILAN NEGERI MANADO	13,319,539,000	13,269,539,000	12,294,975,439	1,060	12,294,974,379	92.66	974,564,621
099333	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	6,553,726,000	6,228,726,000	5,970,380,103	906,737	5,969,473,366	95.84	259,252,634
099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	8,751,749,000	5,645,749,000	5,424,060,378	365,511	5,423,694,867	96.07	222,054,133
099354	PENGADILAN NEGERI TONDANO	5,548,675,000	5,195,562,000	5,176,086,829	550,346	5,175,536,483	99.61	20,025,517
307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	6,748,200,000	6,504,203,000	6,145,548,196	365,329	6,145,182,867	94.48	359,020,133
307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	5,281,222,000	5,439,203,000	5,086,125,662	1,037,635	5,085,088,027	93.49	354,114,973
307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	13,859,233,000	13,329,048,000	13,104,906,551	192	13,104,906,359	98.32	224,141,641
401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	3,531,892,000	4,321,624,000	4,268,234,923	370,868	4,267,864,055	98.76	53,759,945
401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	2,928,992,000	2,862,737,000	2,588,628,104	370,282	2,588,257,822	90.41	274,479,178
401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	3,014,832,000	2,980,469,000	2,952,000,451	185,098	2,951,815,353	99.04	28,653,647
401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	2,833,092,000	2,998,953,000	2,883,252,993	14,185,266	2,869,067,727	95.67	129,885,273
401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	5,536,440,000	6,910,595,000	6,850,168,665	185,290	6,849,983,375	99.12	60,611,625
402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	9,265,325,000	11,530,328,000	11,333,200,539	920,559	11,332,279,980	98.28	198,048,020
402701	PENGADILAN AGAMA TONDANO	3,615,094,000	3,611,094,000	3,393,698,488	954,100	3,392,744,388	93.95	218,349,612
531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	5,573,995,000	6,972,266,000	6,915,707,543	42	6,915,707,501	99.19	56,558,499
568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	7,097,609,000	7,990,609,000	7,952,520,799	365,382	7,952,155,417	99.52	38,453,583
604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	3,432,060,000	3,497,109,000	3,353,411,532	365,100	3,353,046,432	95.88	144,062,568
663360	PENGADILAN MILITER III - 17 DI MANADO	4,062,141,000	3,278,818,000	3,265,748,543	104	3,265,748,439	99.6	13,069,561
670210	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	5,544,058,000	6,377,858,000	5,854,810,746	1,092	5,854,809,654	91.8	523,048,346
673034	PENGADILAN NEGERI AMURANG	5,132,204,000	4,781,204,000	4,780,288,231	1,352	4,780,286,879	99.98	917,121
682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	3,405,039,000	2,911,857,000	2,787,667,039	0	2,787,667,039	95.74	124,189,961
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI UTARA	145,674,673,000	149,190,404,000	144,309,576,772	21,676,483	144,287,900,289	96.73	4,902,503,711

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 20
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
005011800KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA							
099375	PENGADILAN NEGERI PALU	16,279,498,000	14,611,226,000	14,089,130,170	1,538,644	14,087,591,526	96.42	523,634,474
099382	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	4,326,904,000	4,230,396,000	4,217,380,703	398,530	4,216,982,173	99.68	13,413,827
099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	5,235,735,000	4,449,623,000	4,443,113,223	905	4,443,112,318	99.85	6,510,682
099401	PENGADILAN NEGERI POSO	6,048,773,000	6,131,436,000	5,874,329,324	48	5,874,329,276	95.81	257,106,724
307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	11,088,674,000	7,214,501,000	7,169,626,844	694	7,169,626,150	99.38	44,874,850
307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	4,121,050,000	3,736,862,000	3,728,373,809	180,140	3,728,193,669	99.77	8,668,331
307292	PENGADILAN AGAMA POSO	3,579,805,000	3,348,930,000	3,345,337,838	365,328	3,344,972,510	99.88	3,957,490
307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	4,428,930,000	4,991,024,000	4,788,040,781	550,108	4,787,490,673	95.92	203,533,327
400534	PENGADILAN TINGGI PALU	37,481,470,000	35,285,254,000	35,229,323,112	1,960,651	35,227,362,461	99.84	57,891,539
401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	3,905,170,000	3,384,351,000	3,338,471,560	185,108	3,338,286,452	98.64	46,064,548
477202	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	5,181,502,000	4,462,421,000	4,467,623,386	15,576,022	4,452,047,364	99.77	10,373,636
576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	13,006,747,000	13,474,789,000	13,436,975,508	365,674	13,436,609,834	99.72	38,179,166
578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	13,541,038,000	13,106,377,000	13,079,289,503	98	13,079,289,405	99.79	27,087,595
604765	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	4,131,829,000	4,772,034,000	4,716,456,648	169	4,716,456,479	98.84	55,577,521
652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	2,941,783,000	3,154,709,000	3,137,747,097	365,050	3,137,382,047	99.45	17,326,953
652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	3,291,929,000	3,336,600,000	3,327,220,000	160	3,327,219,840	99.72	9,380,160
652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	5,079,108,000	2,834,094,000	2,831,872,021	73	2,831,871,948	99.92	2,222,052
670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	3,849,339,000	3,668,001,000	3,635,622,677	730,466	3,634,892,211	99.1	33,108,789
672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	4,505,039,000	4,866,922,000	4,806,110,913	3,120,163	4,802,990,750	98.69	63,931,250
682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	3,998,308,000	3,863,380,000	3,854,321,988	0	3,854,321,988	99.77	9,058,012
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI AGAMA SULTENG]	156,022,631,000	144,922,930,000	143,516,367,105	25,338,031	143,491,029,074	99.03	1,431,900,926
005011900KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	34,844,692,000	39,247,871,000	39,205,277,507	916,145	39,204,361,362	99.89	43,509,638
099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	35,721,683,000	38,905,791,000	38,594,006,213	377,946	38,593,628,267	99.2	312,162,733
099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	11,255,943,000	9,924,416,000	9,889,141,947	16,309,982	9,872,831,965	99.48	51,584,035
099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	5,626,796,000	6,145,878,000	6,059,025,869	912	6,059,024,957	98.59	86,853,043
099450	PENGADILAN NEGERI BARRU	4,458,498,000	4,703,259,000	4,619,126,098	112	4,619,125,986	98.21	84,133,014
099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	5,456,165,000	5,500,217,000	5,382,659,969	888	5,382,659,081	97.86	117,557,919
099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	7,203,570,000	7,619,162,000	7,569,525,840	194,328	7,569,331,512	99.35	49,830,488
099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	5,560,251,000	5,171,271,000	5,132,836,724	740,758	5,132,095,966	99.24	39,175,034
099492	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	6,519,056,000	6,361,636,000	6,322,291,171	180,704	6,322,110,467	99.38	39,525,533
099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	3,962,671,000	4,537,510,000	4,282,439,728	180,014	4,282,259,714	94.37	255,250,286
099511	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	5,052,792,000	4,820,807,000	4,811,123,673	195,017	4,810,928,656	99.8	9,878,344

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099528	PENGADILAN NEGERI PINRANG	4,622,198,000	4,602,345,000	4,598,836,334	550,290	4,598,286,044	99.91	4,058,956
099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	7,347,206,000	8,903,972,000	8,754,552,643	601,573	8,753,951,070	98.32	150,020,930
099549	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	4,448,775,000	4,285,921,000	4,258,830,891	370,886	4,258,460,005	99.36	27,460,995
099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	5,806,003,000	6,480,636,000	6,221,473,734	365,000	6,221,108,734	96	259,527,266
099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	5,026,572,000	5,318,238,000	5,298,537,895	366,063	5,298,171,832	99.62	20,066,168
099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	4,313,095,000	4,781,406,000	4,740,763,917	365,499	4,740,398,418	99.14	41,007,582
099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	5,653,196,000	5,639,556,000	5,621,158,846	161	5,621,158,685	99.67	18,397,315
099595	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	4,592,041,000	4,635,052,000	4,620,873,500	365,885	4,620,507,615	99.69	14,544,385
099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	4,995,405,000	5,284,870,000	5,238,773,508	1,110,072	5,237,663,436	99.11	47,206,564
099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	4,709,218,000	6,138,734,000	6,109,302,863	14,190,062	6,095,112,801	99.29	43,621,199
099621	PENGADILAN NEGERI MAJENE	4,083,867,000	3,910,546,000	3,803,441,734	575,980	3,802,865,754	97.25	107,680,246
099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	17,646,913,000	18,753,079,000	18,700,534,171	3,237,072	18,697,297,099	99.7	55,781,901
099642	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	4,298,447,000	4,476,428,000	4,460,475,794	1,397,215	4,459,078,579	99.61	17,349,421
307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	18,129,036,000	18,854,285,000	18,691,208,973	180,573	18,691,028,400	99.13	163,256,600
307431	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	4,397,342,000	4,417,242,000	4,392,387,619	102	4,392,387,517	99.44	24,854,483
307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	7,351,257,000	7,005,183,000	5,970,263,024	725,195	5,969,537,829	85.22	1,035,645,171
307452	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	14,869,694,000	17,246,119,000	17,083,832,033	186,814	17,083,645,219	99.06	162,473,781
307466	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	3,385,077,000	3,529,156,000	3,429,574,895	0	3,429,574,895	97.18	99,581,105
307470	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	4,650,572,000	4,029,272,000	3,949,822,533	730,181	3,949,092,352	98.01	80,179,648
307487	PENGADILAN AGAMA BARRU	3,697,893,000	3,984,122,000	3,966,831,590	365,086	3,966,466,504	99.56	17,655,496
307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	7,062,760,000	7,076,613,000	7,032,150,064	111	7,032,149,953	99.37	44,463,047
307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	12,464,156,000	13,537,916,000	13,526,393,067	365,476	13,526,027,591	99.91	11,888,409
307513	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	6,148,119,000	5,187,039,000	4,704,869,658	226	4,704,869,432	90.7	482,169,568
307520	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	7,405,001,000	5,503,001,000	5,195,026,315	66	5,195,026,249	94.4	307,974,751
307534	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	3,749,883,000	3,846,241,000	3,838,990,155	730,446	3,838,259,709	99.79	7,981,291
307541	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	4,091,617,000	4,254,996,000	4,244,890,884	550,115	4,244,340,769	99.75	10,655,231
307555	PENGADILAN AGAMA SINJAI	3,364,730,000	3,364,730,000	3,269,114,010	80	3,269,113,930	97.16	95,616,070
307562	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	3,082,531,000	3,391,318,000	3,234,133,753	365,103	3,233,768,650	95.35	157,549,350
307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	6,905,876,000	5,379,576,000	5,121,686,751	365,087	5,121,321,664	95.2	258,254,336
307580	PENGADILAN AGAMA PINRANG	6,936,914,000	7,054,239,000	4,930,889,556	545,257	4,930,344,299	69.89	2,123,894,701
307597	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	3,070,833,000	3,540,348,000	3,376,625,849	365,252	3,376,260,597	95.37	164,087,403
307602	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	4,148,058,000	4,148,058,000	3,964,975,455	550,216	3,964,425,239	95.57	183,632,761
307619	PENGADILAN AGAMA PALOPO	3,903,363,000	3,903,363,000	3,326,843,098	365,134	3,326,477,964	85.22	576,885,036
307623	PENGADILAN AGAMA MAKALE	2,911,616,000	2,872,816,000	2,835,511,113	180,079	2,835,331,034	98.7	37,484,966

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	5,120,384,000	4,883,523,000	4,241,453,080	1,095,052	4,240,358,028	86.83	643,164,972
307644	PENGADILAN AGAMA MAJENE	3,669,374,000	3,669,374,000	3,104,649,317	365,000	3,104,284,317	84.6	565,089,683
307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	3,321,992,000	4,782,415,000	4,728,602,838	124	4,728,602,714	98.87	53,812,286
401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	9,229,573,000	9,314,973,000	8,952,600,410	185,319	8,952,415,091	96.11	362,557,909
401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	3,113,165,000	6,325,252,000	6,177,511,937	1,398,128	6,176,113,809	97.64	149,138,191
401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	3,282,972,000	3,358,472,000	3,353,801,673	405,244	3,353,396,429	99.85	5,075,571
401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	4,159,122,000	5,866,066,000	5,787,222,630	1,112	5,787,221,518	98.66	78,844,482
526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	13,797,701,000	11,760,557,000	11,594,172,709	72,685,152	11,521,487,557	97.97	239,069,443
526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	9,836,571,000	10,343,662,000	10,200,375,326	1,480,358	10,198,894,968	98.6	144,767,032
632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	3,346,989,000	3,408,769,000	3,367,672,495	296	3,367,672,199	98.79	41,096,801
663356	PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR	4,600,126,000	4,188,221,000	3,778,786,602	4,034,870	3,774,751,732	90.13	413,469,268
672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	4,258,619,000	3,659,919,000	3,612,962,142	180,827	3,612,781,315	98.71	47,137,685
673013	PENGADILAN NEGERI MALILI	3,675,976,000	3,620,731,000	3,576,386,708	672	3,576,386,036	98.78	44,344,964
681422	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	4,526,754,000	4,727,985,000	4,597,286,462	1,828	4,597,284,634	97.24	130,700,366
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI SELATAN	410,870,699,000	428,184,153,000	417,454,515,293	130,997,145	417,323,518,148	97.49	10,860,634,852
005012000KD	BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA							
099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	11,265,762,000	12,677,595,000	12,506,177,083	522	12,506,176,561	98.65	171,418,439
099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	6,670,977,000	5,191,357,000	4,930,137,459	280	4,930,137,179	94.97	261,219,821
099670	PENGADILAN NEGERI RAHA	5,438,808,000	5,214,743,000	4,965,479,471	820	4,965,478,651	95.22	249,264,349
099684	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	6,581,514,000	6,291,772,000	6,222,593,264	365,230	6,222,228,034	98.89	69,543,966
307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	3,555,872,000	3,555,872,000	3,334,905,225	225,371	3,334,679,854	93.78	221,192,146
307708	PENGADILAN AGAMA RAHA	3,739,125,000	3,739,125,000	3,432,455,502	648,676	3,431,806,826	91.78	307,318,174
307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	9,746,203,000	7,535,038,000	7,091,505,636	6,051,087	7,085,454,549	94.03	449,583,451
307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	3,247,153,000	3,620,365,000	3,555,779,780	13,596,062	3,542,183,718	97.84	78,181,282
400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	22,180,682,000	20,890,913,000	20,180,285,318	104	20,180,285,214	96.6	710,627,786
401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	34,649,360,000	18,082,742,000	17,370,592,378	533,142	17,370,059,236	96.06	712,682,764
401886	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	4,036,260,000	5,468,480,000	4,837,827,178	495,681	4,837,331,497	88.46	631,148,503
401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	21,571,818,000	14,576,791,000	13,922,542,797	2	13,922,542,795	95.51	654,248,205
401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	4,948,041,000	9,716,260,000	9,314,426,281	1,001	9,314,425,280	95.86	401,834,720
401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	13,752,787,000	13,148,155,000	13,121,457,028	816	13,121,456,212	99.8	26,698,788
477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	5,464,444,000	5,609,664,000	5,546,648,715	2,610,123	5,544,038,592	98.83	65,625,408
576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	14,147,530,000	15,066,867,000	14,932,375,249	550,208	14,931,825,041	99.1	135,041,959
578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	5,906,677,000	5,906,677,000	5,397,817,827	1,285,108	5,396,532,719	91.36	510,144,281
604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	4,685,447,000	4,881,447,000	4,627,363,449	365,182	4,626,998,267	94.79	254,448,733

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	4,165,425,000	3,968,925,000	3,884,636,983	550,884	3,884,086,099	97.86	84,838,901
681443	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	5,048,753,000	4,574,143,000	4,542,114,286	365,536	4,541,748,750	99.29	32,394,250
682207	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	3,475,118,000	3,920,118,000	3,560,889,586	550,222	3,560,339,364	90.82	359,778,636
682211	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	3,591,439,000	3,638,560,000	3,499,974,121	550,557	3,499,423,564	96.18	139,136,436
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) SULAWESI TENGGARA	197,869,195,000	177,275,609,000	170,777,984,616	28,746,614	170,749,238,002	96.33	6,526,370,998
005012100KD	BA(005) ES1(01) MALUKU							
099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	21,443,736,000	18,829,330,000	17,927,544,556	316	17,927,544,240	95.21	901,785,760
099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	13,181,831,000	13,738,479,000	13,494,824,849	5,407,000	13,489,417,849	98.19	249,061,151
099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	5,215,524,000	5,381,524,000	5,153,678,453	1,141	5,153,677,312	95.77	227,846,688
099727	PENGADILAN NEGERI TUAL	5,818,385,000	5,330,909,000	5,321,395,284	186,074	5,321,209,210	99.82	9,699,790
307754	PENGADILAN AGAMA AMBON	7,729,855,000	7,630,378,000	7,594,776,108	316,538	7,594,459,570	99.53	35,918,430
307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	3,888,308,000	3,261,308,000	3,260,580,454	185,052	3,260,395,402	99.97	912,598
307775	PENGADILAN AGAMA MASOHI	4,220,516,000	3,929,110,000	3,919,294,893	477	3,919,294,416	99.75	9,815,584
401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	3,576,758,000	3,382,958,000	3,360,988,716	555,596	3,360,433,120	99.33	22,524,880
401895	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	3,506,142,000	3,773,531,000	3,613,361,413	583	3,613,360,830	95.76	160,170,170
401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	10,685,294,000	13,053,261,000	12,154,065,627	334	12,154,065,293	93.11	899,195,707
401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	38,926,182,000	12,462,806,000	12,246,999,159	866	12,246,998,293	98.27	215,807,707
401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	14,547,232,000	17,016,977,000	16,866,844,367	185,904	16,866,658,463	99.12	150,318,537
401970	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	4,756,197,000	3,890,022,000	3,866,292,761	180,752	3,866,112,009	99.39	23,909,991
401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	3,823,009,000	4,014,024,000	3,817,284,238	28,395,982	3,788,888,256	94.39	225,135,744
402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	11,510,100,000	13,559,190,000	13,547,842,962	2,705,685	13,545,137,277	99.9	14,052,723
539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	5,603,174,000	6,011,019,000	5,923,351,616	185,426	5,923,166,190	98.54	87,852,810
663377	PENGADILAN MILITER III - 18 DI AMBON	5,202,468,000	4,437,663,000	4,042,203,418	2	4,042,203,416	91.09	395,459,584
672931	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	4,692,194,000	4,460,312,000	4,422,731,461	277	4,422,731,184	99.16	37,580,816
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) MALUKU	168,326,905,000	144,162,801,000	140,534,060,335	38,308,005	140,495,752,330	97.48	3,667,048,670
005012200KD	BA(005) ES1(01) BALI							
099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	31,021,482,000	35,735,275,000	35,503,679,202	487,154	35,503,192,048	99.35	232,082,952
099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	18,537,128,000	17,246,128,000	16,998,947,876	366,800	16,998,581,076	98.56	247,546,924
099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	8,289,611,000	7,446,728,000	7,185,671,293	375,308	7,185,295,985	96.49	261,432,015
099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	5,266,377,000	4,667,377,000	4,646,341,213	741,415	4,645,599,798	99.53	21,777,202
099816	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	5,997,782,000	6,016,472,000	6,004,404,890	365,786	6,004,039,104	99.79	12,432,896
099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	7,087,052,000	7,148,980,000	7,064,051,792	1,290,700	7,062,761,092	98.79	86,218,908
099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	4,961,400,000	5,059,858,000	5,033,846,905	1,086,204	5,032,760,701	99.46	27,097,299
099841	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	7,500,175,000	7,277,175,000	7,153,464,924	1,482	7,153,463,442	98.3	123,711,558

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	4,563,649,000	4,670,179,000	4,645,052,981	730,765	4,644,322,216	99.45	25,856,784
307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	7,903,464,000	6,898,784,000	6,318,881,885	279	6,318,881,606	91.59	579,902,394
307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	3,223,671,000	2,923,312,000	2,913,011,478	645	2,913,010,833	99.65	10,301,167
402726	PENGADILAN AGAMA BANGLI	3,080,512,000	3,080,512,000	2,766,015,196	0	2,766,015,196	89.79	314,496,804
402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	3,122,438,000	3,655,174,000	3,455,806,598	185,248	3,455,621,350	94.54	199,552,650
402741	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	3,025,373,000	3,025,373,000	2,747,307,595	122	2,747,307,473	90.81	278,065,527
402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	3,177,234,000	3,177,234,000	2,919,362,206	0	2,919,362,206	91.88	257,871,794
402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	3,221,468,000	2,803,555,000	2,663,983,982	103	2,663,983,879	95.02	139,571,121
402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	3,408,693,000	3,408,693,000	2,790,624,392	189	2,790,624,203	81.87	618,068,797
559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	7,616,286,000	8,646,186,000	8,503,085,158	365,182	8,502,719,976	98.34	143,466,024
614731	PENGADILAN AGAMA BADUNG	3,965,664,000	3,946,843,000	3,278,370,401	121	3,278,370,280	83.06	668,472,720
663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	5,906,138,000	3,807,643,000	3,804,300,013	370,000	3,803,930,013	99.9	3,712,987
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BALI	140,875,597,000	140,641,481,000	136,396,209,980	6,367,503	136,389,842,477	96.98	4,251,638,523
005012300KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT							
099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	15,763,985,000	16,152,345,000	16,106,947,199	1,091,535	16,105,855,664	99.71	46,489,336
099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	7,256,435,000	6,919,575,000	6,379,149,486	540,949	6,378,608,537	92.18	540,966,463
099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	5,398,925,000	5,398,925,000	5,219,571,591	735,501	5,218,836,090	96.66	180,088,910
099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	7,878,106,000	7,613,599,000	6,848,504,517	365,422	6,848,139,095	89.95	765,459,905
099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	5,665,281,000	5,665,281,000	5,490,132,788	1,587,536	5,488,545,252	96.88	176,735,748
099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	7,422,292,000	7,331,104,000	7,158,778,746	220,645	7,158,558,101	97.65	172,545,899
307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	9,623,456,000	8,496,886,000	8,456,274,208	185,366	8,456,088,842	99.52	40,797,158
307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	5,213,795,000	5,231,591,000	5,145,700,387	25,695	5,145,674,692	98.36	85,916,308
307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	8,297,487,000	9,133,267,000	9,044,533,130	41	9,044,533,089	99.03	88,733,911
307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	7,281,226,000	7,413,866,000	7,199,020,275	243,358	7,198,776,917	97.1	215,089,083
307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	6,976,124,000	7,119,424,000	6,842,391,735	460	6,842,391,275	96.11	277,032,725
307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	5,115,947,000	5,125,397,000	4,827,875,913	225	4,827,875,688	94.2	297,521,312
400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	24,002,637,000	27,072,479,000	26,995,222,808	505	26,995,222,303	99.71	77,256,697
402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	17,367,980,000	19,342,636,000	19,070,825,415	2,705,098	19,068,120,317	98.58	274,515,683
614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	6,579,962,000	6,824,862,000	6,695,200,019	466	6,695,199,553	98.1	129,662,447
682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	4,278,050,000	3,578,946,000	3,465,135,263	141	3,465,135,122	96.82	113,810,878
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA BARAT	144,121,688,000	148,420,183,000	144,945,263,480	7,702,943	144,937,560,537	97.66	3,482,622,463
005012400KD	BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR							
099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	14,260,937,000	14,216,437,000	12,393,449,379	51,113	12,393,398,266	87.18	1,823,038,734
099930	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	6,289,763,000	5,444,960,000	4,884,321,855	985,125	4,883,336,730	89.69	561,623,270

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 25
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099947	PENGADILAN NEGERI SO'E	5,068,767,000	4,802,196,000	4,740,352,630	1,559	4,740,351,071	98.71	61,844,929
099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	3,864,315,000	4,494,518,000	4,176,083,940	472	4,176,083,468	92.92	318,434,532
099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	4,811,722,000	4,923,007,000	4,832,237,726	800,739	4,831,436,987	98.14	91,570,013
099972	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	4,934,905,000	4,274,018,000	4,220,207,390	900	4,220,206,490	98.74	53,811,510
099989	PENGADILAN NEGERI ENDE	4,511,486,000	4,624,586,000	3,731,747,300	980	3,731,746,320	80.69	892,839,680
099993	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	4,770,695,000	4,953,395,000	4,812,210,853	816	4,812,210,037	97.15	141,184,963
307949	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	2,801,274,000	2,600,030,000	2,467,677,188	309	2,467,676,879	94.91	132,353,121
307953	PENGADILAN AGAMA KUPANG	3,857,017,000	3,539,575,000	3,539,089,790	3,241,548	3,535,848,242	99.89	3,726,758
307960	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	3,215,263,000	3,044,583,000	2,931,090,845	0	2,931,090,845	96.27	113,492,155
307974	PENGADILAN AGAMA ENDE	2,967,187,000	3,174,734,000	3,173,225,765	173	3,173,225,592	99.95	1,508,408
307981	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	2,683,110,000	2,675,543,000	2,641,002,047	36,339,299	2,604,662,748	97.35	70,880,252
400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	4,020,484,000	4,085,284,000	3,886,979,720	1,365	3,886,978,355	95.15	198,305,645
400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	3,761,387,000	3,872,897,000	3,835,125,951	720,772	3,834,405,179	99.01	38,491,821
400157	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	4,133,105,000	4,268,005,000	4,186,638,203	0	4,186,638,203	98.09	81,366,797
400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	5,831,995,000	5,548,513,000	5,315,192,504	2,539,344	5,312,653,160	95.75	235,859,840
400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	24,714,494,000	23,559,586,000	23,418,872,953	35,738,323	23,383,134,630	99.25	176,451,370
402794	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	2,856,779,000	2,810,771,000	2,802,242,860	56	2,802,242,804	99.7	8,528,196
402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	2,960,676,000	3,352,788,000	3,328,230,618	5,766,064	3,322,464,554	99.1	30,323,446
402814	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	2,657,622,000	2,799,868,000	2,783,885,067	185,089	2,783,699,978	99.42	16,168,022
402820	PENGADILAN AGAMA SOE	2,721,512,000	2,517,798,000	2,511,188,437	166	2,511,188,271	99.74	6,609,729
402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	2,678,010,000	2,652,858,000	2,631,067,985	185,216	2,630,882,769	99.17	21,975,231
402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	3,240,616,000	2,977,031,000	2,976,590,067	95	2,976,589,972	99.99	441,028
402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	2,947,082,000	2,805,015,000	2,691,187,255	555,218	2,690,632,037	95.92	114,382,963
477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	3,517,381,000	3,786,381,000	3,597,079,746	185,494	3,596,894,252	95	189,486,748
477249	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	4,438,393,000	4,438,393,000	4,068,793,178	1,188	4,068,791,990	91.67	369,601,010
539121	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	6,374,064,000	6,424,064,000	5,581,651,513	1,232,474	5,580,419,039	86.87	843,644,961
576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	14,076,333,000	13,752,723,000	13,745,470,622	2,270,321	13,743,200,301	99.93	9,522,699
632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	3,168,309,000	3,023,261,000	3,014,027,909	84	3,014,027,825	99.69	9,233,175
663342	PENGADILAN MILITER III - 15 DI KUPANG	3,311,271,000	2,937,718,000	2,923,305,299	85	2,923,305,214	99.51	14,412,786
673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	4,070,164,000	4,423,164,000	4,371,810,954	792,296	4,371,018,658	98.82	52,145,342
681418	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	4,998,861,000	4,811,383,000	4,744,229,244	809	4,744,228,435	98.6	67,154,565
682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	3,197,586,000	2,847,232,000	2,742,534,692	185,136	2,742,349,556	96.32	104,882,444
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR	173,712,565,000	170,462,315,000	163,698,801,485	91,782,628	163,607,018,857	96.03	6,855,296,143
005012500KD	BA(005) ES1(01) PAPUA							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	23,398,066,000	18,661,764,000	18,305,046,766	2,511,575	18,302,535,191	98.08	359,228,809
400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	12,461,049,000	14,963,901,000	14,339,097,304	186,249,391	14,152,847,913	94.58	811,053,087
400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	10,425,114,000	9,031,972,000	8,980,973,635	991	8,980,972,644	99.44	50,999,356
400050	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	6,128,021,000	5,426,238,000	5,389,284,119	676	5,389,283,443	99.32	36,954,557
400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	8,365,604,000	9,678,283,000	9,095,473,065	515	9,095,472,550	93.98	582,810,450
400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	9,408,866,000	8,320,877,000	8,284,022,728	412,495	8,283,610,233	99.55	37,266,767
400081	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	5,759,038,000	4,965,141,000	4,748,289,719	150	4,748,289,569	95.63	216,851,431
400090	PENGADILAN NEGERI BIAK	4,893,308,000	4,893,308,000	4,439,765,882	1,760	4,439,764,122	90.73	453,543,878
400101	PENGADILAN NEGERI NABIRE	5,982,296,000	5,154,048,000	4,710,895,280	1,016	4,710,894,264	91.4	443,153,736
400276	PENGADILAN NEGERI SERUI	4,891,848,000	4,588,941,000	4,498,810,434	33,084,320	4,465,726,114	97.31	123,214,886
401899	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	3,616,402,000	9,242,202,000	8,234,331,195	4	8,234,331,191	89.09	1,007,870,809
401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	63,715,522,000	18,899,542,000	18,818,052,919	185,749	18,817,867,170	99.57	81,674,830
402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	14,565,969,000	14,782,180,000	14,615,551,526	37,148,325	14,578,403,201	98.62	203,776,799
402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	5,310,755,000	4,442,449,000	4,053,827,743	14	4,053,827,729	91.25	388,621,271
402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	4,146,600,000	3,410,777,000	3,403,346,403	185,583	3,403,160,820	99.78	7,616,180
402891	PENGADILAN AGAMA BIAK	3,404,210,000	2,597,782,000	2,544,308,417	402,196	2,543,906,221	97.93	53,875,779
402902	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	4,104,663,000	3,268,610,000	3,183,658,959	20,131,308	3,163,527,651	96.79	105,082,349
402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	3,285,542,000	4,873,951,000	4,803,798,301	370,220	4,803,428,081	98.55	70,522,919
402927	PENGADILAN AGAMA NABIRE	3,376,684,000	2,868,223,000	2,667,661,366	730,156	2,666,931,210	92.98	201,291,790
402933	PENGADILAN AGAMA WAMENA	6,970,634,000	6,030,501,000	5,862,243,106	448	5,862,242,658	97.21	168,258,342
402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	4,791,085,000	4,359,594,000	4,241,952,075	260	4,241,951,815	97.3	117,642,185
402958	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	4,186,741,000	3,518,753,000	3,370,843,950	8,500,276	3,362,343,674	95.55	156,409,326
539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	6,118,078,000	6,373,136,000	6,335,385,318	370,579	6,335,014,739	99.4	38,121,261
614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	4,300,624,000	3,816,190,000	3,817,702,584	5,250,246	3,812,452,338	99.9	3,737,662
614773	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	3,314,415,000	2,894,812,000	2,852,096,082	476	2,852,095,606	98.52	42,716,394
614780	PENGADILAN AGAMA PANIAI	6,564,552,000	5,384,443,000	5,374,075,755	1,124,635	5,372,951,120	99.79	11,491,880
614890	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	5,524,318,000	6,356,818,000	5,978,308,995	496	5,978,308,499	94.05	378,509,501
663381	PENGADILAN MILITER III - 19 DI JAYAPURA	4,304,787,000	3,369,590,000	3,267,757,261	75	3,267,757,186	96.98	101,832,814
682300	PENGADILAN AGAMA ARSO	4,011,043,000	3,800,481,000	3,755,153,856	0	3,755,153,856	98.81	45,327,144
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) PAPUA	247,325,834,000	195,974,507,000	189,971,714,743	296,663,935	189,675,050,808	96.94	6,299,456,192
005012600KD	BA(005) ES1(01) BENGKULU							
308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	3,991,928,000	4,003,318,000	3,594,679,930	185,377	3,594,494,553	89.79	408,823,447
308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	4,167,433,000	4,069,695,000	3,767,145,514	403	3,767,145,111	92.57	302,549,889
308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	4,921,340,000	4,312,216,000	4,279,815,634	222,008	4,279,593,626	99.24	32,622,374

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 27
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
308152	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	8,817,222,000	7,983,555,000	7,950,608,757	370,736	7,950,238,021	99.58	33,316,979
400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	14,073,566,000	11,466,566,000	11,423,909,095	955,178	11,422,953,917	99.62	43,612,083
400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	4,973,656,000	4,845,656,000	4,841,879,404	878,802	4,841,000,602	99.9	4,655,398
400132	PENGADILAN NEGERI MANNA	4,333,426,000	4,114,426,000	4,088,982,894	1,321	4,088,981,573	99.38	25,444,427
400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	4,608,903,000	4,550,860,000	4,396,460,296	688	4,396,459,608	96.61	154,400,392
400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	23,440,400,000	21,197,043,000	21,069,397,736	490,385	21,068,907,351	99.4	128,135,649
401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	4,231,042,000	6,499,371,000	6,446,653,982	860	6,446,653,122	99.19	52,717,878
401939	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	25,451,315,000	10,514,356,000	8,296,418,015	185,604	8,296,232,411	78.9	2,218,123,589
401940	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	25,187,617,000	15,122,627,000	14,794,418,065	66	14,794,417,999	97.83	328,209,001
401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	24,689,293,000	17,215,337,000	17,143,596,168	9,285,303	17,134,310,865	99.53	81,026,135
401942	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	2,722,289,000	4,838,447,000	4,830,912,928	409,092	4,830,503,836	99.84	7,943,164
576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	12,877,741,000	13,749,675,000	13,696,757,342	1,081,208	13,695,676,134	99.61	53,998,866
578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	5,340,968,000	5,176,050,000	4,974,645,672	180,200	4,974,465,472	96.11	201,584,528
672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	3,934,782,000	3,893,782,000	3,812,343,076	3,381,870	3,808,961,206	97.82	84,820,794
673009	PENGADILAN NEGERI TAIS	4,347,742,000	4,687,742,000	4,546,516,105	625	4,546,515,480	96.99	141,226,520
673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	3,845,573,000	3,820,573,000	3,745,010,785	180,958	3,744,829,827	98.02	75,743,173
673055	PENGADILAN NEGERI TUBEI	3,126,090,000	3,786,090,000	3,720,831,204	731	3,720,830,473	98.28	65,259,527
682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	2,814,592,000	3,513,654,000	3,308,937,136	1,250,254	3,307,686,882	94.14	205,967,118
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BENGKULU	191,896,918,000	159,361,039,000	154,729,919,738	19,061,669	154,710,858,069	97.09	4,650,180,931
005012800KD	BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA							
099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	13,985,222,000	12,273,766,000	11,398,003,940	780,168	11,397,223,772	92.86	876,542,228
099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	4,454,395,000	4,587,976,000	4,171,697,946	582,810	4,171,115,136	90.91	416,860,864
099752	PENGADILAN NEGERI LABUHA	5,840,550,000	4,882,712,000	4,797,527,210	842	4,797,526,368	98.26	85,185,632
099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	5,802,710,000	5,134,085,000	5,070,577,353	830	5,070,576,523	98.76	63,508,477
307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	4,824,590,000	5,275,267,000	5,240,217,047	0	5,240,217,047	99.34	35,049,953
307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	4,044,999,000	3,794,999,000	3,766,617,059	400,154	3,766,216,905	99.24	28,782,095
307801	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	4,283,645,000	4,140,863,000	4,115,556,195	412	4,115,555,783	99.39	25,307,217
307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	3,699,442,000	3,448,591,000	3,412,432,025	555,540	3,411,876,485	98.94	36,714,515
401972	PENGADILAN NEGERI SANANA	6,181,817,000	5,092,342,000	4,821,127,547	1,079	4,821,126,468	94.67	271,215,532
401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	48,256,882,000	27,218,173,000	26,972,301,385	216	26,972,301,169	99.1	245,871,831
440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	13,720,970,000	13,324,687,000	12,883,337,504	370,415	12,882,967,089	96.68	441,719,911
664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	17,713,958,000	13,642,503,000	13,598,939,350	389	13,598,938,961	99.68	43,564,039
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) MALUKU UTARA	132,809,180,000	102,815,964,000	100,248,334,561	2,692,855	100,245,641,706	97.5	2,570,322,294
005012900KD	BA(005) ES1(01) BANTEN							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 28
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	18,979,744,000	15,844,829,000	14,914,845,200	1,718,241	14,913,126,959	94.12	931,702,041
097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	7,097,084,000	5,456,549,000	5,365,060,807	11,542,912	5,353,517,895	98.11	103,031,105
097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	22,947,673,000	24,828,908,000	24,319,192,509	371,042	24,318,821,467	97.95	510,086,533
400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	8,984,006,000	11,138,888,000	10,593,766,839	52	10,593,766,787	95.11	545,121,213
400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	4,087,063,000	4,451,172,000	4,358,431,260	185,161	4,358,246,099	97.91	92,925,901
400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	9,395,486,000	9,716,969,000	9,682,402,447	370,681	9,682,031,766	99.64	34,937,234
417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	5,755,764,000	6,466,244,000	6,387,640,403	280	6,387,640,123	98.78	78,603,877
417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	4,231,640,000	4,504,400,000	4,484,326,041	185,487	4,484,140,554	99.55	20,259,446
440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	14,823,645,000	14,227,520,000	14,217,559,566	24	14,217,559,542	99.93	9,960,458
604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	10,725,480,000	12,572,349,000	11,882,652,696	0	11,882,652,696	94.51	689,696,304
652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	4,636,169,000	4,302,953,000	4,273,483,918	132	4,273,483,786	99.32	29,469,214
663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	26,184,644,000	24,815,678,000	24,620,085,249	423	24,620,084,826	99.21	195,593,174
689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	8,272,895,000	8,272,895,000	8,162,096,081	370,134	8,161,725,947	98.66	111,169,053
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BANTEN	146,121,293,000	146,599,354,000	143,261,543,016	14,744,569	143,246,798,447	97.72	3,352,555,553
005013000KD	BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG							
099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	9,424,214,000	10,473,005,000	10,446,813,852	267	10,446,813,585	99.75	26,191,415
099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	8,171,243,000	6,646,243,000	6,593,333,364	191	6,593,333,173	99.2	52,909,827
400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	5,365,655,000	5,008,655,000	4,918,847,128	2	4,918,847,126	98.21	89,807,874
401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	4,821,701,000	4,750,850,000	4,696,037,449	1,120	4,696,036,329	98.85	54,813,671
401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	13,718,472,000	15,714,659,000	15,630,720,934	1,282	15,630,719,652	99.47	83,939,348
401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	12,236,998,000	13,406,212,000	13,109,205,692	901,667	13,108,304,025	97.78	297,907,975
402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	4,000,625,000	4,249,768,000	4,214,940,188	4,155,679	4,210,784,509	99.08	38,983,491
402318	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	3,468,762,000	3,683,054,000	3,677,612,559	3,222,038	3,674,390,521	99.76	8,663,479
403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	3,780,838,000	4,233,365,000	4,225,515,306	370,144	4,225,145,162	99.81	8,219,838
440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	7,401,151,000	10,575,738,000	10,491,845,910	48	10,491,845,862	99.21	83,892,138
663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	15,802,120,000	17,696,211,000	17,615,507,198	284	17,615,506,914	99.54	80,704,086
682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	3,066,576,000	3,066,576,000	3,005,445,313	185,070	3,005,260,243	98	61,315,757
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) BANGKA BELITUNG	91,258,355,000	99,504,336,000	98,625,824,893	8,837,792	98,616,987,101	99.12	887,348,899
005013100KD	BA(005) ES1(01) GORONTALO							
099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	9,715,610,000	9,942,410,000	9,877,956,920	578,672	9,877,378,248	99.35	65,031,752
307250	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	8,402,019,000	6,749,885,000	6,736,875,161	386	6,736,874,775	99.81	13,010,225
400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	6,447,920,000	6,535,319,000	6,483,371,733	225,091	6,483,146,642	99.2	52,172,358
401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	10,067,946,000	11,706,673,000	11,701,106,803	185,208	11,700,921,595	99.95	5,751,405
401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	4,309,188,000	4,532,584,000	4,455,959,309	199	4,455,959,110	98.31	76,624,890

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 29
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	4,939,622,000	4,989,775,000	4,852,093,231	185,374	4,851,907,857	97.24	137,867,143
402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	4,553,302,000	5,055,678,000	5,045,418,096	155	5,045,417,941	99.8	10,260,059
440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	10,717,931,000	13,410,462,000	13,355,530,401	365,084	13,355,165,317	99.59	55,296,683
477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	4,723,987,000	4,720,845,000	4,714,580,676	365,891	4,714,214,785	99.86	6,630,215
652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	3,377,264,000	3,666,675,000	3,619,322,411	365,404	3,618,957,007	98.7	47,717,993
664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	17,152,580,000	15,819,618,000	15,731,901,584	185,022	15,731,716,562	99.44	87,901,438
670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	4,919,429,000	4,383,438,000	4,371,315,681	1,840	4,371,313,841	99.72	12,124,159
682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	3,071,874,000	3,414,995,000	3,401,960,586	123	3,401,960,463	99.62	13,034,537
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(01) GORONTALO	92,398,672,000	94,928,357,000	94,347,392,592	2,458,449	94,344,934,143	99.39	583,422,857
005013200KD	PENGADILAN AGAMA BATAM							
098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	15,556,767,000	15,579,783,000	15,441,988,105	5,453,469	15,436,534,636	99.08	143,248,364
108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	11,403,922,000	12,799,141,000	12,763,789,760	514,482	12,763,275,278	99.72	35,865,722
402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	8,388,114,000	7,113,530,000	7,012,044,667	180,232	7,011,864,435	98.57	101,665,565
402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	3,401,064,000	3,401,064,000	2,920,268,764	180,000	2,920,088,764	85.86	480,975,236
402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	3,961,554,000	4,017,718,000	3,655,907,639	987,361	3,654,920,278	90.97	362,797,722
402179	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	4,588,213,000	4,597,719,000	3,389,922,369	180,000	3,389,742,369	73.73	1,207,976,631
547699	PENGADILAN AGAMA BATAM	5,555,091,000	8,234,908,000	8,123,393,081	180,121	8,123,212,960	98.64	111,695,040
614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	11,632,008,000	10,483,352,000	10,428,141,443	0	10,428,141,443	99.47	55,210,557
663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	4,875,213,000	4,746,946,000	4,658,965,184	453,532	4,658,511,652	98.14	88,434,348
672948	PENGADILAN NEGERI RANAI	5,914,676,000	5,947,076,000	5,713,267,184	1,058,018	5,712,209,166	96.05	234,866,834
689309	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	5,538,412,000	5,751,412,000	5,020,008,097	370,209	5,019,637,888	87.28	731,774,112
	JUMLAH BELANJA PENGADILAN AGAMA BATAM	80,815,034,000	82,672,649,000	79,127,696,293	9,557,424	79,118,138,869	95.71	3,554,510,131
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	9,911,964,000	9,925,902,000	9,800,719,214	850	9,800,718,364	98.74	125,183,636
578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	5,913,920,000	6,603,728,000	6,482,651,286	2,603,076	6,480,048,210	98.13	123,679,790
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	15,825,884,000	16,529,630,000	16,283,370,500	2,603,926	16,280,766,574	98.51	248,863,426
	JUMLAH BELANJA 01	11,127,467,300,000	10,777,778,441,000	10,553,788,835,691	3,419,601,322	10,550,369,234,369	97.92	227409206631
02	KEPANITERAAN							
005020100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
004028	KEPANITERAAN	189,994,752,000	224,944,752,000	224,345,697,460	296,033,160	224,049,664,300	99.6	895,087,700
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	189,994,752,000	224,944,752,000	224,345,697,460	296,033,160	224,049,664,300	99.73	895,087,700
	JUMLAH BELANJA 02	189,994,752,000	224,944,752,000	224,345,697,460	296,033,160	224,049,664,300	99.73	895087700
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM							
005030100KD	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 30
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099062	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	620,350,000	620,350,000	620,291,025	0	620,291,025	99.99	58,975
099063	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	1,304,658,000	1,204,658,000	1,153,353,600	0	1,153,353,600	95.74	51,304,400
099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	736,481,000	736,481,000	721,961,160	0	721,961,160	98.03	14,519,840
099065	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	560,815,000	560,815,000	523,500,635	0	523,500,635	93.35	37,314,365
400215	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	852,280,000	852,280,000	843,294,332	0	843,294,332	98.95	8,985,668
400221	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	895,508,000	895,508,000	880,952,054	0	880,952,054	98.37	14,555,946
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	4,970,092,000	4,870,092,000	4,743,352,806	0	4,743,352,806	97.4	126,739,194
005030100KP	BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA							
097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	58,886,062,000	58,886,062,000	58,620,320,603	188,656,366	58,431,664,237	99.23	454,397,763
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) DKI JAKARTA	58,886,062,000	58,886,062,000	58,620,320,603	188,656,366	58,431,664,237	99.55	454,397,763
005030200KD	BA(005) ES1(03) JAWA BARAT							
099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	588,300,000	888,300,000	882,570,485	0	882,570,485	99.36	5,729,515
099068	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	1,238,920,000	1,038,920,000	1,019,673,740	0	1,019,673,740	98.15	19,246,260
099069	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	147,080,000	147,080,000	146,476,860	0	146,476,860	99.59	603,140
099071	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	134,354,000	134,354,000	133,728,375	0	133,728,375	99.53	625,625
099072	PENGADILAN NEGERI GARUT	232,572,000	232,572,000	230,486,730	0	230,486,730	99.1	2,085,270
099073	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	124,900,000	124,900,000	123,892,500	0	123,892,500	99.19	1,007,500
099078	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	279,740,000	223,950,000	208,241,880	0	208,241,880	92.99	15,708,120
099079	PENGADILAN NEGERI BEKASI	495,050,000	495,050,000	426,949,525	0	426,949,525	86.24	68,100,475
099080	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	122,260,000	122,260,000	122,260,000	0	122,260,000	100	0
099081	PENGADILAN NEGERI SUBANG	245,475,000	245,475,000	240,982,400	0	240,982,400	98.17	4,492,600
099082	PENGADILAN NEGERI BOGOR	131,699,000	131,699,000	118,895,175	0	118,895,175	90.28	12,803,825
099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	202,980,000	202,980,000	202,552,000	0	202,552,000	99.79	428,000
099084	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	188,932,000	188,932,000	186,714,500	0	186,714,500	98.83	2,217,500
099085	PENGADILAN NEGERI CIREBON	143,172,000	143,172,000	142,613,874	0	142,613,874	99.61	558,126
099086	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	218,037,000	218,037,000	217,099,000	0	217,099,000	99.57	938,000
099088	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	88,710,000	88,710,000	88,067,000	0	88,067,000	99.28	643,000
099089	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	113,654,000	113,654,000	113,604,000	0	113,604,000	99.96	50,000
400410	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	222,481,000	222,481,000	198,605,500	0	198,605,500	89.27	23,875,500
400478	PENGADILAN NEGERI SUMBER	191,266,000	191,266,000	188,956,400	0	188,956,400	98.79	2,309,600
400484	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	293,890,000	293,890,000	292,745,991	0	292,745,991	99.61	1,144,009
402022	PENGADILAN NEGERI BANJAR	71,725,000	71,725,000	71,414,570	0	71,414,570	99.57	310,430
402023	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	322,490,000	322,490,000	318,690,334	0	318,690,334	98.82	3,799,666
477293	PENGADILAN NEGERI DEPOK	394,602,000	394,602,000	390,079,400	0	390,079,400	98.85	4,522,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 31
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
613520	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	426,518,000	426,518,000	421,702,050	0	421,702,050	98.87	4,815,950
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) JAWA BARAT	6,618,807,000	6,663,017,000	6,487,002,289	0	6,487,002,289	97.36	176,014,711
005030300KD	BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH							
099090	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	609,910,000	609,910,000	601,656,285	0	601,656,285	98.65	8,253,715
099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	518,780,000	518,780,000	494,799,600	0	494,799,600	95.38	23,980,400
099093	PENGADILAN NEGERI TEGAL	104,230,000	104,230,000	101,149,350	0	101,149,350	97.04	3,080,650
099094	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	159,880,000	159,880,000	155,219,308	0	155,219,308	97.08	4,660,692
099095	PENGADILAN NEGERI KUDUS	102,364,000	102,364,000	101,689,459	0	101,689,459	99.34	674,541
099096	PENGADILAN NEGERI PATI	197,364,000	177,271,000	176,692,125	0	176,692,125	99.67	578,875
099097	PENGADILAN NEGERI BREBES	107,646,000	107,646,000	103,867,550	0	103,867,550	96.49	3,778,450
099098	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	127,871,000	127,871,000	125,776,420	0	125,776,420	98.36	2,094,580
099099	PENGADILAN NEGERI KENDAL	91,847,000	91,847,000	91,185,200	0	91,185,200	99.28	661,800
099100	PENGADILAN NEGERI DEMAK	110,046,000	110,046,000	109,462,800	0	109,462,800	99.47	583,200
099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	229,357,000	187,357,000	184,021,975	0	184,021,975	98.22	3,335,025
099102	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	141,750,000	141,750,000	141,213,500	0	141,213,500	99.62	536,500
099103	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG DI UNGARAN	109,007,000	109,007,000	108,456,400	0	108,456,400	99.49	550,600
099104	PENGADILAN NEGERI JEPARA	105,364,000	105,364,000	105,194,250	0	105,194,250	99.84	169,750
099105	PENGADILAN NEGERI BLORA	84,956,000	90,226,000	89,667,500	0	89,667,500	99.38	558,500
099106	PENGADILAN NEGERI REMBANG	135,182,000	135,182,000	133,580,535	0	133,580,535	98.82	1,601,465
099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	96,600,000	96,600,000	95,603,309	0	95,603,309	98.97	996,691
099108	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	79,763,000	91,263,000	89,554,500	0	89,554,500	98.13	1,708,500
099110	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	109,192,000	71,531,000	71,283,150	0	71,283,150	99.65	247,850
099111	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	76,206,000	76,206,000	75,825,000	0	75,825,000	99.5	381,000
099112	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	109,192,000	79,899,000	78,951,600	0	78,951,600	98.81	947,400
099114	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	160,773,000	88,628,000	83,353,425	0	83,353,425	94.05	5,274,575
099115	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	310,923,000	310,923,000	309,169,500	0	309,169,500	99.44	1,753,500
099116	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	74,178,000	74,178,000	73,467,000	0	73,467,000	99.04	711,000
099117	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	63,860,000	63,860,000	62,882,250	0	62,882,250	98.47	977,750
099118	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	121,621,000	121,621,000	118,663,250	0	118,663,250	97.57	2,957,750
099119	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	146,409,000	146,409,000	144,791,150	0	144,791,150	98.89	1,617,850
099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	92,453,000	110,995,000	110,291,000	0	110,291,000	99.37	704,000
099122	PENGADILAN NEGERI KLATEN	144,382,000	144,382,000	141,039,551	0	141,039,551	97.68	3,342,449
099123	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	132,550,000	132,550,000	130,940,775	0	130,940,775	98.79	1,609,225
099124	PENGADILAN NEGERI CILACAP	240,047,000	240,047,000	233,578,850	0	233,578,850	97.31	6,468,150

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 32
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099125	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	67,346,000	67,346,000	65,627,000	0	65,627,000	97.45	1,719,000
099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	122,505,000	122,505,000	120,437,500	0	120,437,500	98.31	2,067,500
099127	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	100,091,000	100,091,000	97,484,550	0	97,484,550	97.4	2,606,450
400566	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	110,373,000	132,723,000	131,959,650	0	131,959,650	99.42	763,350
400572	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	116,061,000	116,061,000	115,937,400	0	115,937,400	99.89	123,600
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH	5,410,079,000	5,266,549,000	5,174,472,667	0	5,174,472,667	98.25	92,076,333
005030400KD	BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA							
099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	300,860,000	300,860,000	295,219,810	0	295,219,810	98.13	5,640,190
099129	PENGADILAN NEGERI WATES	121,585,000	121,585,000	119,975,400	0	119,975,400	98.68	1,609,600
099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	100,044,000	100,044,000	99,958,699	0	99,958,699	99.91	85,301
099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	342,442,000	342,442,000	339,982,750	0	339,982,750	99.28	2,459,250
400173	PENGADILAN NEGERI BANTUL	136,945,000	136,945,000	136,919,842	0	136,919,842	99.98	25,158
400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	241,605,000	241,605,000	239,436,800	0	239,436,800	99.1	2,168,200
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) DI YOGYAKARTA	1,243,481,000	1,243,481,000	1,231,493,301	0	1,231,493,301	99.04	11,987,699
005030500KD	Pengadilan Tinggi Surabaya							
099132	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	644,860,000	764,354,000	722,056,387	0	722,056,387	94.47	42,297,613
099133	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	987,782,000	971,782,000	954,111,859	0	954,111,859	98.18	17,670,141
099135	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	208,404,000	187,404,000	185,048,700	0	185,048,700	98.74	2,355,300
099136	PENGADILAN NEGERI TUBAN	310,007,000	259,518,000	258,409,787	0	258,409,787	99.57	1,108,213
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	137,030,000	137,030,000	136,530,200	0	136,530,200	99.64	499,800
099138	PENGADILAN NEGERI GRESIK	150,245,000	169,074,000	163,703,325	0	163,703,325	96.82	5,370,675
099139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	308,659,000	308,659,000	297,387,600	0	297,387,600	96.35	11,271,400
099140	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	193,753,000	193,753,000	190,771,400	0	190,771,400	98.46	2,981,600
099142	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	114,185,000	114,185,000	113,292,831	0	113,292,831	99.22	892,169
099143	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	138,130,000	128,280,000	127,801,500	0	127,801,500	99.63	478,500
099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	310,290,000	310,290,000	308,690,000	0	308,690,000	99.48	1,600,000
099145	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	215,701,000	215,701,000	214,206,985	0	214,206,985	99.31	1,494,015
099146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	97,815,000	97,815,000	96,714,400	0	96,714,400	98.87	1,100,600
099147	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	134,512,000	92,523,000	86,722,550	0	86,722,550	93.73	5,800,450
099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	142,806,000	142,806,000	137,235,000	0	137,235,000	96.1	5,571,000
099149	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	192,750,000	176,350,000	161,649,600	0	161,649,600	91.66	14,700,400
099150	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	114,377,000	99,337,000	89,414,800	0	89,414,800	90.01	9,922,200
099151	PENGADILAN NEGERI BLITAR	189,803,000	189,803,000	189,115,700	0	189,115,700	99.64	687,300
099152	PENGADILAN NEGERI MALANG	385,637,000	385,637,000	378,956,930	0	378,956,930	98.27	6,680,070

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 33
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099153	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	121,093,000	121,093,000	121,082,530	0	121,082,530	99.99	10,470
099154	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	118,725,000	118,725,000	115,214,860	0	115,214,860	97.04	3,510,140
099156	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	172,700,000	195,651,000	194,566,468	0	194,566,468	99.45	1,084,532
099157	PENGADILAN NEGERI BANGIL	221,835,000	221,835,000	221,763,590	0	221,763,590	99.97	71,410
099158	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	161,736,000	161,736,000	161,594,188	0	161,594,188	99.91	141,812
099159	PENGADILAN NEGERI MADIUN	66,550,000	66,550,000	66,442,800	0	66,442,800	99.84	107,200
099160	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	253,955,000	232,599,000	214,892,850	0	214,892,850	92.39	17,706,150
099161	PENGADILAN NEGERI PACITAN	57,890,000	57,890,000	57,081,000	0	57,081,000	98.6	809,000
099163	PENGADILAN NEGERI NGAWI	137,712,000	137,712,000	135,348,500	0	135,348,500	98.28	2,363,500
099164	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	160,960,000	160,960,000	156,918,000	0	156,918,000	97.49	4,042,000
099165	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	90,401,000	90,401,000	87,632,905	0	87,632,905	96.94	2,768,095
099166	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	96,601,000	96,601,000	96,087,500	0	96,087,500	99.47	513,500
099167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	76,851,000	76,851,000	76,065,000	0	76,065,000	98.98	786,000
099168	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	161,078,000	161,078,000	160,567,060	0	160,567,060	99.68	510,940
400581	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	118,302,000	118,302,000	117,752,045	0	117,752,045	99.54	549,955
400597	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	153,040,000	142,290,000	139,950,000	0	139,950,000	98.36	2,340,000
626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	174,453,000	174,453,000	173,682,900	0	173,682,900	99.56	770,100
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Surabaya	7,320,628,000	7,279,028,000	7,108,461,750	0	7,108,461,750	97.66	170,566,250
005030600KD	BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
099169	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	411,920,000	411,920,000	392,755,975	0	392,755,975	95.35	19,164,025
099170	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	354,687,000	354,687,000	342,813,800	0	342,813,800	96.65	11,873,200
099171	PENGADILAN NEGERI SABANG	48,693,000	48,693,000	48,690,000	2,310,000	46,380,000	95.25	2,313,000
099172	PENGADILAN NEGERI SIGLI	126,060,000	126,060,000	121,681,450	0	121,681,450	96.53	4,378,550
099173	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	141,525,000	141,525,000	141,072,500	0	141,072,500	99.68	452,500
099174	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	180,075,000	180,075,000	178,969,650	0	178,969,650	99.39	1,105,350
099175	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	178,376,000	178,376,000	175,686,190	100,000	175,586,190	98.44	2,789,810
099177	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	54,412,000	54,412,000	53,280,000	0	53,280,000	97.92	1,132,000
099178	PENGADILAN NEGERI LANGSA	84,555,000	84,555,000	84,288,985	0	84,288,985	99.69	266,015
099179	PENGADILAN NEGERI IDI	124,975,000	104,120,000	100,250,900	0	100,250,900	96.28	3,869,100
099181	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	140,500,000	129,958,000	118,217,020	0	118,217,020	90.97	11,740,980
099182	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	48,700,000	48,700,000	48,525,300	50,000	48,475,300	99.54	224,700
099183	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	100,578,000	100,578,000	92,128,000	0	92,128,000	91.6	8,450,000
099184	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	123,720,000	123,720,000	123,149,500	0	123,149,500	99.54	570,500
099185	PENGADILAN NEGERI CALANG	50,700,000	50,700,000	50,506,794	0	50,506,794	99.62	193,206

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099186	PENGADILAN NEGERI SINABANG	33,950,000	33,950,000	33,526,500	0	33,526,500	98.75	423,500
099187	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	67,677,000	67,677,000	64,200,000	0	64,200,000	94.86	3,477,000
099188	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	268,412,000	357,912,000	339,334,750	1,945,000	337,389,750	94.27	20,522,250
400416	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	158,343,000	158,343,000	155,308,850	0	155,308,850	98.08	3,034,150
402008	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	60,717,000	60,717,000	60,083,500	0	60,083,500	98.96	633,500
402009	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	95,031,000	95,031,000	94,107,950	0	94,107,950	99.03	923,050
402012	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	77,100,000	77,100,000	76,508,000	0	76,508,000	99.23	592,000
689969	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	67,950,000	67,950,000	62,433,665	24,080	62,409,585	91.85	5,540,415
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2,998,656,000	3,056,759,000	2,957,519,279	4,429,080	2,953,090,199	96.75	103,668,801
005030700KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA							
099189	PENGADILAN TINGGI MEDAN	538,180,000	538,180,000	512,114,444	0	512,114,444	95.16	26,065,556
099190	PENGADILAN NEGERI MEDAN	1,416,920,000	1,397,420,000	1,287,258,000	0	1,287,258,000	92.12	110,162,000
099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI	161,040,000	161,040,000	159,900,500	140,000	159,760,500	99.21	1,279,500
099192	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN	152,916,000	152,916,000	152,350,718	0	152,350,718	99.63	565,282
099193	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	125,436,000	125,436,000	125,143,500	0	125,143,500	99.77	292,500
099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	205,990,000	172,240,000	169,462,625	0	169,462,625	98.39	2,777,375
099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	366,198,000	366,198,000	363,129,726	0	363,129,726	99.16	3,068,274
099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	137,688,000	137,688,000	136,135,400	0	136,135,400	98.87	1,552,600
099198	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	236,395,000	236,395,000	226,778,500	0	226,778,500	95.93	9,616,500
099199	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	156,162,000	156,162,000	153,774,910	0	153,774,910	98.47	2,387,090
099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	269,318,000	269,318,000	267,118,000	0	267,118,000	99.18	2,200,000
099201	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	418,418,000	418,418,000	414,263,634	0	414,263,634	99.01	4,154,366
099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	179,900,000	179,900,000	179,713,000	0	179,713,000	99.9	187,000
109063	PENGADILAN NEGERI STABAT	635,682,000	635,682,000	611,745,840	0	611,745,840	96.23	23,936,160
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	336,100,000	336,100,000	335,899,710	0	335,899,710	99.94	200,290
400390	PENGADILAN NEGERI KISARAN	264,400,000	264,400,000	263,506,150	0	263,506,150	99.66	893,850
400396	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	509,764,000	509,764,000	504,388,000	0	504,388,000	98.95	5,376,000
402013	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	244,000,000	244,000,000	243,559,000	0	243,559,000	99.82	441,000
402014	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	97,880,000	108,380,000	106,741,640	0	106,741,640	98.49	1,638,360
477401	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	229,990,000	229,990,000	228,265,500	0	228,265,500	99.25	1,724,500
672911	PENGADILAN NEGERI BALIGE	265,331,000	265,331,000	264,260,500	0	264,260,500	99.6	1,070,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SUMATERA UTARA	6,947,708,000	6,904,958,000	6,705,509,297	140,000	6,705,369,297	97.11	199,588,703
005030800KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT							
099204	PENGADILAN TINGGI PADANG	366,320,000	440,320,000	436,972,814	0	436,972,814	99.24	3,347,186

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 35
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	453,115,000	453,115,000	449,943,557	0	449,943,557	99.3	3,171,443
099206	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	56,530,000	56,530,000	56,266,790	0	56,266,790	99.53	263,210
099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	88,840,000	88,840,000	84,807,800	0	84,807,800	95.46	4,032,200
099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	50,025,000	50,025,000	44,160,000	0	44,160,000	88.28	5,865,000
099209	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	215,520,000	215,520,000	213,780,000	0	213,780,000	99.19	1,740,000
099210	PENGADILAN NEGERI PAINAN	106,427,000	106,427,000	102,167,250	0	102,167,250	96	4,259,750
099211	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	103,240,000	103,240,000	103,204,000	0	103,204,000	99.97	36,000
099212	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	57,050,000	57,050,000	56,521,950	0	56,521,950	99.07	528,050
099213	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	88,200,000	88,200,000	86,860,550	1,120,000	85,740,550	97.21	2,459,450
400189	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	49,216,000	46,116,000	44,529,850	0	44,529,850	96.56	1,586,150
400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	111,150,000	111,150,000	109,604,320	0	109,604,320	98.61	1,545,680
400422	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	148,320,000	140,320,000	140,213,200	0	140,213,200	99.92	106,800
400447	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	144,450,000	144,450,000	140,467,000	0	140,467,000	97.24	3,983,000
400462	PENGADILAN NEGERI MUARO	63,407,000	63,407,000	62,939,000	0	62,939,000	99.26	468,000
402015	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	70,743,000	70,743,000	68,867,050	70,000	68,797,050	97.25	1,945,950
477353	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	306,418,000	306,418,000	304,795,550	0	304,795,550	99.47	1,622,450
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SUMATERA BARAT	2,478,971,000	2,541,871,000	2,506,100,681	1,190,000	2,504,910,681	98.59	36,960,319
005030900KD	BA(005) ES1(03) RIAU							
099214	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	541,600,000	541,600,000	528,805,887	9,659,000	519,146,887	95.85	22,453,113
099215	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	540,858,000	540,858,000	531,480,500	0	531,480,500	98.27	9,377,500
099216	PENGADILAN NEGERI RENGAT/INDRAGIRI	138,873,000	138,873,000	133,702,345	0	133,702,345	96.28	5,170,655
099217	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	150,853,000	150,853,000	148,185,210	0	148,185,210	98.23	2,667,790
099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	646,490,000	592,610,000	574,263,744	0	574,263,744	96.9	18,346,256
109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	430,048,000	430,048,000	424,436,786	0	424,436,786	98.7	5,611,214
400142	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	187,864,000	187,864,000	187,232,500	0	187,232,500	99.66	631,500
400328	PENGADILAN NEGERI DUMAI	220,730,000	220,730,000	219,745,350	0	219,745,350	99.55	984,650
400493	PENGADILAN TINGGI RIAU	428,790,000	428,790,000	437,664,761	9,484,667	428,180,094	99.86	609,906
402016	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	162,085,000	205,965,000	204,413,800	0	204,413,800	99.25	1,551,200
477256	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	194,245,000	194,245,000	193,149,620	0	193,149,620	99.44	1,095,380
477262	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	195,939,000	195,939,000	195,351,952	0	195,351,952	99.7	587,048
477344	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	132,883,000	132,883,000	131,912,706	0	131,912,706	99.27	970,294
662991	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	95,635,000	95,635,000	91,329,675	0	91,329,675	95.5	4,305,325
663006	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	120,952,000	120,952,000	117,708,430	0	117,708,430	97.32	3,243,570
672949	PENGADILAN NEGERI RANAI	141,828,000	87,828,000	87,004,764	0	87,004,764	99.06	823,236

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 36
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) RIAU	4,329,673,000	4,265,673,000	4,206,388,030	19,143,667	4,187,244,363	98.61	78,428,637
005031000KD	BA(005) ES1(03) JAMBI							
099220	PENGADILAN NEGERI JAMBI	264,405,000	356,219,000	307,330,942	5,069,000	302,261,942	84.85	53,957,058
099221	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	134,217,000	134,217,000	133,913,200	0	133,913,200	99.77	303,800
099222	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	119,500,000	119,500,000	114,950,000	0	114,950,000	96.19	4,550,000
099224	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	90,596,000	90,596,000	90,284,586	0	90,284,586	99.66	311,414
400312	PENGADILAN NEGERI BANGKO	159,575,000	159,575,000	159,461,845	0	159,461,845	99.93	113,155
400431	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	117,966,000	117,966,000	116,862,700	0	116,862,700	99.06	1,103,300
400504	PENGADILAN TINGGI JAMBI	283,840,000	329,311,000	328,012,350	0	328,012,350	99.61	1,298,650
477369	PENGADILAN NEGERI TEBO	109,710,000	109,710,000	109,593,200	0	109,593,200	99.89	116,800
477375	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	110,500,000	110,500,000	109,757,160	0	109,757,160	99.33	742,840
477402	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	70,500,000	70,500,000	68,645,850	0	68,645,850	97.37	1,854,150
663013	PENGADILAN NEGERI SENGETI	142,702,000	142,702,000	140,996,450	0	140,996,450	98.8	1,705,550
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) JAMBI	1,603,511,000	1,740,796,000	1,679,808,283	5,069,000	1,674,739,283	96.5	66,056,717
005031100KD	BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN							
099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	315,490,000	315,490,000	285,248,182	0	285,248,182	90.41	30,241,818
099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	617,252,000	723,335,000	689,424,710	0	689,424,710	95.31	33,910,290
099227	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	252,365,000	252,365,000	245,702,600	0	245,702,600	97.36	6,662,400
099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	641,515,000	641,515,000	558,607,721	0	558,607,721	87.08	82,907,279
099229	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	390,180,000	390,180,000	378,962,400	0	378,962,400	97.13	11,217,600
099231	PENGADILAN NEGERI LAHAT	354,429,000	354,429,000	354,050,363	0	354,050,363	99.89	378,637
099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	331,200,000	331,200,000	329,409,880	0	329,409,880	99.46	1,790,120
099233	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	295,828,000	235,437,000	234,978,849	0	234,978,849	99.81	458,151
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	73,905,000	136,228,000	127,511,300	0	127,511,300	93.6	8,716,700
672953	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	89,115,000	89,115,000	89,016,900	0	89,016,900	99.89	98,100
672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	57,383,000	57,383,000	54,521,575	0	54,521,575	95.01	2,861,425
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SUMATERA SELATAN	3,418,662,000	3,526,677,000	3,347,434,480	0	3,347,434,480	94.92	179,242,520
005031200KD	BA(005) ES1(03) LAMPUNG							
099236	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	561,850,000	561,850,000	536,267,850	0	536,267,850	95.45	25,582,150
099237	PENGADILAN NEGERI METRO	91,164,000	91,164,000	90,590,000	0	90,590,000	99.37	574,000
099238	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	229,125,000	229,125,000	229,124,420	0	229,124,420	100	580
400365	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	329,010,000	329,010,000	319,431,031	0	319,431,031	97.09	9,578,969
400453	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	255,450,000	255,450,000	251,760,800	0	251,760,800	98.56	3,689,200
402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	130,722,000	130,722,000	130,711,400	0	130,711,400	99.99	10,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 37
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
477307	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	107,085,000	107,085,000	106,819,500	0	106,819,500	99.75	265,500
614884	PENGADILAN NEGERI LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT	110,145,000	110,145,000	107,066,700	0	107,066,700	97.21	3,078,300
663027	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	197,700,000	197,700,000	180,591,580	0	180,591,580	91.35	17,108,420
663031	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	232,700,000	232,700,000	221,693,350	0	221,693,350	95.27	11,006,650
663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	246,540,000	246,540,000	243,986,400	0	243,986,400	98.96	2,553,600
663052	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	123,360,000	123,360,000	123,316,500	0	123,316,500	99.96	43,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) LAMPUNG	2,614,851,000	2,614,851,000	2,541,359,531	0	2,541,359,531	97.19	73,491,469
005031300KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT							
099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	489,680,000	489,680,000	488,993,275	0	488,993,275	99.86	686,725
099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	112,402,000	112,402,000	112,401,050	0	112,401,050	100	950
099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	210,500,000	188,520,000	188,490,000	0	188,490,000	99.98	30,000
099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	102,000,000	100,800,000	99,300,000	0	99,300,000	98.51	1,500,000
099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	156,550,000	156,550,000	156,347,145	0	156,347,145	99.87	202,855
099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	296,921,000	296,921,000	295,805,600	0	295,805,600	99.62	1,115,400
400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	85,980,000	80,480,000	79,916,075	0	79,916,075	99.3	563,925
400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	276,090,000	287,076,000	285,331,585	0	285,331,585	99.39	1,744,415
670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	83,712,000	105,692,000	105,682,000	0	105,682,000	99.99	10,000
670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	129,450,000	128,892,000	122,500,000	0	122,500,000	95.04	6,392,000
689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	93,025,000	89,297,000	88,964,375	0	88,964,375	99.63	332,625
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN BARAT	2,036,310,000	2,036,310,000	2,023,731,105	0	2,023,731,105	99.38	12,578,895
005031400KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH							
099246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	293,130,000	293,130,000	281,935,540	0	281,935,540	96.18	11,194,460
099247	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	143,822,000	143,822,000	143,802,500	0	143,802,500	99.99	19,500
099248	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	134,480,000	134,480,000	133,936,000	0	133,936,000	99.6	544,000
099249	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	125,970,000	175,461,000	175,459,000	0	175,459,000	100	2,000
099250	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	90,500,000	90,500,000	79,109,500	0	79,109,500	87.41	11,390,500
099252	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	209,264,000	209,264,000	209,124,600	0	209,124,600	99.93	139,400
400359	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	297,411,000	307,411,000	283,368,064	0	283,368,064	92.18	24,042,936
402024	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	55,500,000	55,500,000	54,503,800	0	54,503,800	98.21	996,200
402025	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	70,363,000	70,363,000	70,356,750	0	70,356,750	99.99	6,250
402026	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	65,500,000	65,500,000	64,892,900	0	64,892,900	99.07	607,100
670192	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	58,704,000	58,704,000	58,632,000	0	58,632,000	99.88	72,000
679426	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	79,648,000	79,648,000	79,424,000	0	79,424,000	99.72	224,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH	1,624,292,000	1,683,783,000	1,634,544,654	0	1,634,544,654	97.08	49,238,346

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 38
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
005031500KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN							
099253	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	282,925,000	305,925,000	293,994,285	0	293,994,285	96.1	11,930,715
099254	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	391,300,000	391,300,000	385,618,050	410,000	385,208,050	98.44	6,091,950
099255	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	179,220,000	161,720,000	161,410,700	0	161,410,700	99.81	309,300
099256	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	189,948,000	189,948,000	189,890,500	0	189,890,500	99.97	57,500
099257	PENGADILAN NEGERI BARABAI	82,685,000	82,685,000	76,594,000	0	76,594,000	92.63	6,091,000
099258	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	193,460,000	193,460,000	192,315,250	0	192,315,250	99.41	1,144,750
099259	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	78,780,000	78,780,000	77,361,110	0	77,361,110	98.2	1,418,890
099260	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	57,735,000	57,735,000	56,028,640	0	56,028,640	97.04	1,706,360
099266	PENGADILAN NEGERI RANTAU	75,090,000	75,090,000	74,740,350	0	74,740,350	99.53	349,650
400261	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	130,602,000	130,602,000	126,142,310	0	126,142,310	96.59	4,459,690
400283	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	166,974,000	166,974,000	162,645,100	0	162,645,100	97.41	4,328,900
402027	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	57,735,000	57,735,000	55,654,680	0	55,654,680	96.4	2,080,320
653459	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	93,597,000	93,597,000	93,364,128	0	93,364,128	99.75	232,872
690019	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	117,314,000	117,314,000	117,118,000	0	117,118,000	99.83	196,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN SELATAN	2,097,365,000	2,102,865,000	2,062,877,103	410,000	2,062,467,103	98.1	40,397,897
005031600KD	BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR							
099273	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	159,030,000	159,030,000	158,283,000	0	158,283,000	99.53	747,000
099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	355,735,000	355,735,000	354,397,322	0	354,397,322	99.62	1,337,678
099291	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	152,380,000	152,380,000	148,320,060	0	148,320,060	97.34	4,059,940
099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	225,652,000	225,652,000	224,776,885	0	224,776,885	99.61	875,115
400292	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	110,460,000	110,460,000	107,982,770	0	107,982,770	97.76	2,477,230
400303	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	42,296,000	42,296,000	42,270,460	0	42,270,460	99.94	25,540
400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	363,810,000	363,810,000	363,333,969	0	363,333,969	99.87	476,031
402028	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	64,740,000	64,740,000	64,712,800	0	64,712,800	99.96	27,200
417705	PENGADILAN NEGERI MALINAU	87,921,000	87,921,000	85,719,950	0	85,719,950	97.5	2,201,050
417723	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	60,780,000	60,780,000	60,478,800	0	60,478,800	99.5	301,200
477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	77,832,000	77,832,000	76,238,600	0	76,238,600	97.95	1,593,400
477381	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	87,228,000	87,228,000	86,535,400	0	86,535,400	99.21	692,600
662973	PENGADILAN NEGERI BONTANG	98,920,000	98,920,000	97,811,750	0	97,811,750	98.88	1,108,250
662987	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	121,392,000	121,392,000	116,771,500	0	116,771,500	96.19	4,620,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) KALIMANTAN TIMUR	2,008,176,000	2,008,176,000	1,987,633,266	0	1,987,633,266	98.98	20,542,734
005031700KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA							
099313	PENGADILAN TINGGI MANADO	296,595,000	296,595,000	293,593,258	0	293,593,258	98.99	3,001,742

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 39
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099330	PENGADILAN NEGERI MANADO	271,430,000	271,430,000	267,884,029	0	267,884,029	98.69	3,545,971
099334	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	149,799,000	149,799,000	148,333,825	0	148,333,825	99.02	1,465,175
099341	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	383,060,000	383,060,000	347,920,335	0	347,920,335	90.83	35,139,665
099355	PENGADILAN NEGERI TONDANO	146,356,000	146,356,000	146,133,630	0	146,133,630	99.85	222,370
402031	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	67,971,000	67,971,000	67,762,300	0	67,762,300	99.69	208,700
568726	PENGADILAN NEGERI BITUNG	122,700,000	122,700,000	121,623,203	0	121,623,203	99.12	1,076,797
670211	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	93,280,000	93,280,000	92,008,640	0	92,008,640	98.64	1,271,360
673035	PENGADILAN NEGERI AMURANG	104,142,000	104,142,000	102,971,890	0	102,971,890	98.88	1,170,110
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI UTARA	1,635,333,000	1,635,333,000	1,588,231,110	0	1,588,231,110	97.12	47,101,890
005031800KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI							
099376	PENGADILAN NEGERI PALU	292,975,000	292,975,000	288,381,130	0	288,381,130	98.43	4,593,870
099383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	73,418,000	73,418,000	73,125,500	0	73,125,500	99.6	292,500
099397	PENGADILAN NEGERI LUWUK	115,000,000	115,000,000	113,916,800	0	113,916,800	99.06	1,083,200
099402	PENGADILAN NEGERI POSO	238,074,000	238,074,000	238,074,000	0	238,074,000	100	0
400535	PENGADILAN TINGGI PALU	252,412,000	252,412,000	250,534,462	0	250,534,462	99.26	1,877,538
477203	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	91,216,000	91,216,000	91,128,550	0	91,128,550	99.9	87,450
670249	PENGADILAN NEGERI BUOL	91,296,000	91,296,000	90,900,871	0	90,900,871	99.57	395,129
672981	PENGADILAN NEGERI PARIGI	78,784,000	78,784,000	77,867,820	0	77,867,820	98.84	916,180
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN TINGGI SULTENG]	1,233,175,000	1,233,175,000	1,223,929,133	0	1,223,929,133	99.25	9,245,867
005031900KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN							
099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	458,350,000	458,350,000	450,658,116	0	450,658,116	98.32	7,691,884
099423	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	523,325,000	483,005,000	415,296,144	0	415,296,144	85.98	67,708,856
099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	97,700,000	97,700,000	97,592,600	0	97,592,600	99.89	107,400
099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	61,000,000	61,000,000	56,742,640	0	56,742,640	93.02	4,257,360
099451	PENGADILAN NEGERI BARRU	58,540,000	58,540,000	55,566,280	0	55,566,280	94.92	2,973,720
099465	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	107,712,000	107,712,000	103,392,620	0	103,392,620	95.99	4,319,380
099472	PENGADILAN NEGERI MAROS	137,220,000	137,220,000	134,911,640	0	134,911,640	98.32	2,308,360
099486	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	87,420,000	87,420,000	86,685,200	0	86,685,200	99.16	734,800
099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	100,415,000	100,415,000	100,118,400	0	100,118,400	99.7	296,600
099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	97,680,000	97,680,000	75,501,650	0	75,501,650	77.29	22,178,350
099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	77,636,000	77,636,000	77,339,857	0	77,339,857	99.62	296,143
099529	PENGADILAN NEGERI PINRANG	105,700,000	105,700,000	105,665,249	0	105,665,249	99.97	34,751
099533	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	121,384,000	121,384,000	113,116,875	0	113,116,875	93.19	8,267,125
099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	78,512,000	78,512,000	76,866,000	0	76,866,000	97.9	1,646,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 40
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	122,988,000	122,988,000	120,992,000	0	120,992,000	98.38	1,996,000
099561	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	89,130,000	76,454,000	75,680,400	0	75,680,400	98.99	773,600
099575	PENGADILAN NEGERI SINJAI	129,654,000	129,654,000	127,959,275	0	127,959,275	98.69	1,694,725
099582	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	103,050,000	103,050,000	102,782,850	0	102,782,850	99.74	267,150
099596	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	171,888,000	171,888,000	170,816,617	0	170,816,617	99.38	1,071,383
099601	PENGADILAN NEGERI PALOPO	141,640,000	141,640,000	141,222,900	0	141,222,900	99.71	417,100
099618	PENGADILAN NEGERI MAKALE	77,455,000	77,455,000	74,700,000	0	74,700,000	96.44	2,755,000
402034	PENGADILAN NEGERI BELOPA	78,720,000	78,720,000	72,404,800	0	72,404,800	91.98	6,315,200
672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	84,304,000	84,304,000	83,501,500	0	83,501,500	99.05	802,500
673014	PENGADILAN NEGERI MALILI	82,436,000	82,436,000	81,124,190	0	81,124,190	98.41	1,311,810
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI SELATAN	3,193,859,000	3,140,863,000	3,000,637,803	0	3,000,637,803	95.54	140,225,197
005032000KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA							
099660	PENGADILAN NEGERI KENDARI	274,965,000	274,965,000	261,072,645	0	261,072,645	94.95	13,892,355
099664	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	90,500,000	90,500,000	89,802,000	0	89,802,000	99.23	698,000
099671	PENGADILAN NEGERI RAHA	199,020,000	199,020,000	198,250,000	0	198,250,000	99.61	770,000
099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	184,300,000	184,300,000	173,514,277	0	173,514,277	94.15	10,785,723
400541	PENGADILAN TINGGI KENDARI	278,740,000	278,740,000	277,556,136	0	277,556,136	99.58	1,183,864
402032	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	103,740,000	103,740,000	103,302,800	0	103,302,800	99.58	437,200
402033	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	143,068,000	115,068,000	111,759,000	0	111,759,000	97.12	3,309,000
477225	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	119,336,000	119,336,000	118,532,600	0	118,532,600	99.33	803,400
681440	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	83,568,000	83,568,000	82,419,000	0	82,419,000	98.63	1,149,000
681444	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	190,596,000	190,596,000	188,111,172	0	188,111,172	98.7	2,484,828
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI TENGGARA	1,667,833,000	1,639,833,000	1,604,319,630	0	1,604,319,630	97.83	35,513,370
005032100KD	BA(005) ES1(03) MALUKU							
099692	PENGADILAN TINGGI AMBON	387,740,000	428,060,000	411,417,160	0	411,417,160	96.11	16,642,840
099707	PENGADILAN NEGERI AMBON	285,000,000	285,000,000	271,882,100	0	271,882,100	95.4	13,117,900
099711	PENGADILAN NEGERI MASOHI	71,083,000	71,083,000	70,174,000	0	70,174,000	98.72	909,000
099728	PENGADILAN NEGERI TUAL	64,948,000	44,948,000	44,948,000	0	44,948,000	100	0
402037	PENGADILAN NEGERI DOBO	49,570,000	49,570,000	47,825,000	0	47,825,000	96.48	1,745,000
402038	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	51,950,000	51,950,000	51,468,000	0	51,468,000	99.07	482,000
403431	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	40,000,000	40,000,000	39,526,000	0	39,526,000	98.82	474,000
403433	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	65,500,000	65,500,000	65,051,150	0	65,051,150	99.31	448,850
672932	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	139,838,000	139,838,000	130,157,000	0	130,157,000	93.08	9,681,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) MALUKU	1,155,629,000	1,175,949,000	1,132,448,410	0	1,132,448,410	96.3	43,500,590

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
005032200KD	BA(005) ES1(03) BALI							
099774	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	308,840,000	308,840,000	299,320,915	0	299,320,915	96.92	9,519,085
099781	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	849,820,000	849,820,000	834,144,522	0	834,144,522	98.16	15,675,478
099795	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	219,760,000	219,760,000	218,515,096	0	218,515,096	99.43	1,244,904
099803	PENGADILAN NEGERI NEGARA	132,147,000	132,147,000	129,632,775	0	129,632,775	98.1	2,514,225
099817	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	134,605,000	134,605,000	134,116,750	0	134,116,750	99.64	488,250
099821	PENGADILAN NEGERI TABANAN	103,671,000	103,671,000	95,759,300	0	95,759,300	92.37	7,911,700
099838	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	65,788,000	56,190,000	55,464,500	0	55,464,500	98.71	725,500
099842	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	135,060,000	117,830,000	117,710,000	0	117,710,000	99.9	120,000
099859	PENGADILAN NEGERI BANGLI	69,420,000	69,420,000	68,485,000	0	68,485,000	98.65	935,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BALI	2,019,111,000	1,992,283,000	1,953,148,858	0	1,953,148,858	98.04	39,134,142
005032300KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA BARAT							
099863	PENGADILAN NEGERI MATARAM	429,405,000	429,405,000	409,902,350	0	409,902,350	95.46	19,502,650
099880	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	239,490,000	239,490,000	239,430,090	0	239,430,090	99.97	59,910
099884	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	147,516,000	147,516,000	143,243,805	0	143,243,805	97.1	4,272,195
099891	PENGADILAN NEGERI SELONG	174,556,000	164,056,000	162,464,309	0	162,464,309	99.03	1,591,691
099906	PENGADILAN NEGERI DOMPU	113,016,000	113,016,000	112,937,160	0	112,937,160	99.93	78,840
099913	PENGADILAN NEGERI PRAYA	120,200,000	120,200,000	118,910,160	0	118,910,160	98.93	1,289,840
400560	PENGADILAN TINGGI MATARAM	258,330,000	258,330,000	249,063,165	0	249,063,165	96.41	9,266,835
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA BARAT	1,482,513,000	1,472,013,000	1,435,951,039	0	1,435,951,039	97.55	36,061,961
005032400KD	BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR							
099927	PENGADILAN NEGERI KUPANG	404,520,000	409,920,000	402,026,600	5,803,000	396,223,600	96.66	13,696,400
099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	72,090,000	72,090,000	69,230,000	0	69,230,000	96.03	2,860,000
099948	PENGADILAN NEGERI SO'E	97,475,000	97,475,000	95,510,600	0	95,510,600	97.98	1,964,400
099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	53,136,000	53,136,000	52,742,000	0	52,742,000	99.26	394,000
099969	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	107,148,000	107,148,000	106,843,305	0	106,843,305	99.72	304,695
099973	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	96,192,000	96,192,000	94,560,000	0	94,560,000	98.3	1,632,000
099990	PENGADILAN NEGERI ENDE	103,012,000	117,570,000	109,948,000	0	109,948,000	93.52	7,622,000
099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	80,966,000	80,966,000	78,638,925	0	78,638,925	97.13	2,327,075
240166	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	120,666,000	120,666,000	118,362,500	0	118,362,500	98.09	2,303,500
400008	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	72,400,000	72,400,000	71,779,500	0	71,779,500	99.14	620,500
400014	PENGADILAN NEGERI RUTENG	97,842,000	97,842,000	97,465,000	0	97,465,000	99.61	377,000
400158	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	72,885,000	72,885,000	72,111,000	0	72,111,000	98.94	774,000
400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	104,046,000	104,046,000	104,046,000	0	104,046,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
400246	PENGADILAN TINGGI KUPANG	460,360,000	430,802,000	433,611,920	3,550,647	430,061,273	99.83	740,727
477231	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	42,085,000	42,085,000	40,930,300	0	40,930,300	97.26	1,154,700
477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	73,596,000	73,596,000	72,451,600	0	72,451,600	98.45	1,144,400
673021	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	61,824,000	61,824,000	60,328,500	0	60,328,500	97.58	1,495,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) NUSA TENGGARA TIMUR	2,120,243,000	2,110,643,000	2,080,585,750	9,353,647	2,071,232,103	98.58	39,410,897
005032500KD	BA(005) ES1(03) PAPUA							
400023	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	452,755,000	452,755,000	414,939,391	0	414,939,391	91.65	37,815,609
400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	255,070,000	255,070,000	230,810,630	3,679,500	227,131,130	89.05	27,938,870
400045	PENGADILAN NEGERI WAMENA	46,586,000	46,586,000	39,222,000	0	39,222,000	84.19	7,364,000
400051	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	258,498,000	258,498,000	258,286,647	0	258,286,647	99.92	211,353
400070	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	440,687,000	440,687,000	384,973,850	0	384,973,850	87.36	55,713,150
400076	PENGADILAN NEGERI SORONG	117,106,000	117,106,000	101,548,650	0	101,548,650	86.72	15,557,350
400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	75,496,000	75,496,000	73,695,320	0	73,695,320	97.61	1,800,680
400091	PENGADILAN NEGERI BIAK	95,076,000	95,076,000	84,806,000	0	84,806,000	89.2	10,270,000
400102	PENGADILAN NEGERI NABIRE	165,564,000	165,564,000	162,454,000	0	162,454,000	98.12	3,110,000
400277	PENGADILAN NEGERI SERUI	90,285,000	90,285,000	90,285,000	0	90,285,000	100	0
402039	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	40,054,000	40,054,000	35,950,000	0	35,950,000	89.75	4,104,000
614891	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	106,466,000	106,466,000	103,363,000	0	103,363,000	97.09	3,103,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) PAPUA	2,143,643,000	2,143,643,000	1,980,334,488	3,679,500	1,976,654,988	92.38	166,988,012
005032600KD	BA(005) ES1(03) BENGKULU							
400111	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	564,860,000	564,860,000	559,349,460	0	559,349,460	99.02	5,510,540
400127	PENGADILAN NEGERI CURUP	82,793,000	82,793,000	82,412,200	0	82,412,200	99.54	380,800
400133	PENGADILAN NEGERI MANNA	51,574,000	51,574,000	50,903,000	0	50,903,000	98.7	671,000
400240	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	103,388,000	146,738,000	145,727,380	240,000	145,487,380	99.15	1,250,620
400513	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	271,840,000	271,840,000	264,693,600	0	264,693,600	97.37	7,146,400
402018	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	91,356,000	91,356,000	90,330,400	0	90,330,400	98.88	1,025,600
672995	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	55,292,000	60,922,000	59,725,850	0	59,725,850	98.04	1,196,150
673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	108,057,000	108,057,000	107,796,300	0	107,796,300	99.76	260,700
673042	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	115,464,000	115,464,000	113,557,200	0	113,557,200	98.35	1,906,800
673056	PENGADILAN NEGERI TUBEI	46,176,000	46,176,000	35,283,200	0	35,283,200	76.41	10,892,800
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BENGKULU	1,490,800,000	1,539,780,000	1,509,778,590	240,000	1,509,538,590	98.05	30,241,410
005032800KD	BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA							
099732	PENGADILAN NEGERI TERNATE	501,260,000	501,260,000	482,754,500	1,430,000	481,324,500	96.02	19,935,500
099749	PENGADILAN NEGERI TOBELO	344,500,000	344,500,000	337,940,000	0	337,940,000	98.1	6,560,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099753	PENGADILAN NEGERI LABUHA	64,680,000	64,680,000	62,800,000	0	62,800,000	97.09	1,880,000
099770	PENGADILAN NEGERI SOASIU	340,345,000	340,345,000	333,238,400	0	333,238,400	97.91	7,106,600
403434	PENGADILAN NEGERI SANANA	247,000,000	247,000,000	231,630,500	0	231,630,500	93.78	15,369,500
403435	PENGADILAN NEGERI BOBONG	64,040,000	64,040,000	60,875,000	0	60,875,000	95.06	3,165,000
664523	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	287,553,000	287,553,000	285,978,578	290,000	285,688,578	99.35	1,864,422
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) MALUKU UTARA	1,849,378,000	1,849,378,000	1,795,216,978	1,720,000	1,793,496,978	97.07	55,881,022
005032900KD	BA(005) ES1(03) BANTEN							
099074	PENGADILAN NEGERI SERANG	587,870,000	587,870,000	523,488,214	0	523,488,214	89.05	64,381,786
099075	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	101,100,000	101,100,000	99,907,000	0	99,907,000	98.82	1,193,000
099077	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	347,320,000	347,320,000	334,402,750	0	334,402,750	96.28	12,917,250
417845	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	144,420,000	144,420,000	143,725,000	0	143,725,000	99.52	695,000
663399	PENGADILAN TINGGI BANTEN	242,245,000	242,245,000	239,460,385	0	239,460,385	98.85	2,784,615
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BANTEN	1,422,955,000	1,422,955,000	1,340,983,349	0	1,340,983,349	94.24	81,971,651
005033000KD	BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG							
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	389,980,000	389,980,000	385,500,500	0	385,500,500	98.85	4,479,500
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	290,525,000	290,525,000	285,164,000	0	285,164,000	98.15	5,361,000
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	149,120,000	149,120,000	143,203,500	0	143,203,500	96.03	5,916,500
402020	PENGADILAN NEGERI KOBA	102,838,000	102,838,000	101,745,213	0	101,745,213	98.94	1,092,787
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	129,351,000	104,351,000	104,073,541	0	104,073,541	99.73	277,459
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	231,780,000	231,780,000	219,200,160	0	219,200,160	94.57	12,579,840
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG	1,293,594,000	1,268,594,000	1,238,886,914	0	1,238,886,914	97.66	29,707,086
005033100KD	BA(005) ES1(03) GORONTALO							
099362	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	310,030,000	310,030,000	298,723,630	10,260,000	288,463,630	93.04	21,566,370
400209	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	111,740,000	111,740,000	109,164,050	0	109,164,050	97.69	2,575,950
477219	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	77,772,000	77,772,000	76,442,650	0	76,442,650	98.29	1,329,350
664540	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	243,185,000	243,185,000	241,154,400	0	241,154,400	99.16	2,030,600
670185	PENGADILAN NEGERI MARISA	83,400,000	83,400,000	83,400,000	0	83,400,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) GORONTALO	826,127,000	826,127,000	808,884,730	10,260,000	798,624,730	97.91	27,502,270
005033400KD	BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT							
099622	PENGADILAN NEGERI MAJENE	61,028,000	61,028,000	58,609,000	0	58,609,000	96.04	2,419,000
099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	97,558,000	97,558,000	89,886,000	0	89,886,000	92.14	7,672,000
099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	90,320,000	90,320,000	86,624,000	0	86,624,000	95.91	3,696,000
689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	57,135,000	57,135,000	57,135,000	0	57,135,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(03) SULAWESI BARAT	306,041,000	306,041,000	292,254,000	0	292,254,000	95.5	13,787,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA 03	140,447,558,000	140,447,558,000	138,003,599,907	244,291,260	137,759,308,647	98.26	2688249353
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA							
005040100KD	PA Jakarta Pusat							
400617	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	145,220,000	145,220,000	145,053,400	0	145,053,400	99.89	166,600
400623	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	650,780,000	650,780,000	635,899,944	0	635,899,944	97.71	14,880,056
400632	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	146,900,000	146,900,000	143,182,000	0	143,182,000	97.47	3,718,000
400648	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	161,800,000	161,800,000	151,149,000	0	151,149,000	93.42	10,651,000
400654	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	165,900,000	165,900,000	165,713,000	0	165,713,000	99.89	187,000
401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	212,224,000	212,224,000	190,583,000	0	190,583,000	89.8	21,641,000
	JUMLAH BELANJA PA Jakarta Pusat	1,482,824,000	1,482,824,000	1,431,580,344	0	1,431,580,344	96.54	51,243,656
005040100KP	BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA							
663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	44,099,110,000	43,871,933,000	43,718,973,689	21,829,012	43,697,144,677	99.6	174,788,323
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) DKI JAKARTA	44,099,110,000	43,871,933,000	43,718,973,689	21,829,012	43,697,144,677	99.65	174,788,323
005040200KD	BA(005) ES1(04) JAWA BARAT							
309124	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	619,495,000	619,495,000	619,228,165	0	619,228,165	99.96	266,835
400663	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	178,280,000	178,280,000	177,399,350	0	177,399,350	99.51	880,650
400679	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	284,698,000	284,698,000	284,371,925	0	284,371,925	99.89	326,075
400691	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	665,872,000	665,872,000	586,474,250	0	586,474,250	88.08	79,397,750
400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	313,965,000	313,965,000	300,910,000	0	300,910,000	95.84	13,055,000
400711	PENGADILAN AGAMA GARUT	308,425,000	322,275,000	319,011,700	0	319,011,700	98.99	3,263,300
400730	PENGADILAN AGAMA BOGOR	148,926,000	148,926,000	132,188,985	0	132,188,985	88.76	16,737,015
400736	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	90,000,000	90,000,000	86,412,500	0	86,412,500	96.01	3,587,500
400742	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	393,528,000	393,528,000	390,840,100	0	390,840,100	99.32	2,687,900
400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	84,926,000	84,926,000	82,732,185	0	82,732,185	97.42	2,193,815
400767	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	360,252,000	360,252,000	347,285,500	0	347,285,500	96.4	12,966,500
400773	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	222,951,000	222,951,000	222,149,912	0	222,149,912	99.64	801,088
400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	253,628,000	253,628,000	229,885,700	0	229,885,700	90.64	23,742,300
400833	PENGADILAN AGAMA BEKASI	135,228,000	135,228,000	133,844,828	0	133,844,828	98.98	1,383,172
400849	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	334,988,000	334,988,000	326,072,019	0	326,072,019	97.34	8,915,981
400855	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	196,426,000	196,426,000	189,369,400	0	189,369,400	96.41	7,056,600
402588	PENGADILAN AGAMA SUBANG	189,528,000	189,528,000	187,164,000	0	187,164,000	98.75	2,364,000
402996	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	307,996,000	307,996,000	307,836,064	0	307,836,064	99.95	159,936
403010	PENGADILAN AGAMA SUMBER	229,152,000	229,152,000	228,891,600	0	228,891,600	99.89	260,400
403419	PENGADILAN AGAMA SOREANG	375,052,000	375,052,000	367,826,720	0	367,826,720	98.07	7,225,280

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
604720	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	580,652,000	580,652,000	580,185,496	0	580,185,496	99.92	466,504
614707	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	202,953,000	202,953,000	202,858,000	0	202,858,000	99.95	95,000
652063	PENGADILAN AGAMA DEPOK	281,628,000	281,628,000	273,680,514	0	273,680,514	97.18	7,947,486
690023	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	104,926,000	104,926,000	103,287,701	0	103,287,701	98.44	1,638,299
690030	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	62,000,000	62,000,000	60,526,700	0	60,526,700	97.62	1,473,300
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) JAWA BARAT	6,925,475,000	6,939,325,000	6,740,433,314	0	6,740,433,314	97.13	198,891,686
005040300KD	BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH							
400861	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	34,700,000	34,700,000	34,690,000	0	34,690,000	99.97	10,000
400880	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	107,230,000	107,230,000	106,932,000	0	106,932,000	99.72	298,000
400886	PENGADILAN AGAMA TEGAL	35,420,000	35,420,000	32,002,964	0	32,002,964	90.35	3,417,036
400892	PENGADILAN AGAMA BREBES	163,870,000	163,870,000	153,118,700	0	153,118,700	93.44	10,751,300
400906	PENGADILAN AGAMA BATANG	78,970,000	78,970,000	72,007,500	0	72,007,500	91.18	6,962,500
400912	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	135,540,000	135,540,000	130,670,000	0	130,670,000	96.41	4,870,000
400921	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	77,580,000	77,580,000	77,330,000	0	77,330,000	99.68	250,000
400937	PENGADILAN AGAMA KENDAL	222,000,000	222,000,000	219,180,000	0	219,180,000	98.73	2,820,000
400943	PENGADILAN AGAMA DEMAK	89,480,000	89,480,000	89,085,000	0	89,085,000	99.56	395,000
400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	165,040,000	165,040,000	164,617,500	0	164,617,500	99.74	422,500
400968	PENGADILAN AGAMA PATI	142,640,000	142,640,000	140,979,281	0	140,979,281	98.84	1,660,719
400974	PENGADILAN AGAMA KUDUS	79,150,000	79,150,000	78,601,500	0	78,601,500	99.31	548,500
400983	PENGADILAN AGAMA JEPARA	135,120,000	135,120,000	133,810,000	0	133,810,000	99.03	1,310,000
400999	PENGADILAN AGAMA REMBANG	93,370,000	93,370,000	92,160,000	0	92,160,000	98.7	1,210,000
401003	PENGADILAN AGAMA BLORA	103,930,000	103,930,000	101,930,000	0	101,930,000	98.08	2,000,000
401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	39,500,000	39,500,000	39,500,000	0	39,500,000	100	0
401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	77,400,000	77,400,000	77,360,000	0	77,360,000	99.95	40,000
401031	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	126,620,000	126,620,000	122,790,000	0	122,790,000	96.98	3,830,000
401050	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	93,680,000	93,680,000	93,161,000	0	93,161,000	99.45	519,000
401056	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	228,740,000	228,740,000	228,727,390	0	228,727,390	99.99	12,610
401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	91,050,000	91,050,000	88,072,600	0	88,072,600	96.73	2,977,400
401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	109,470,000	109,470,000	108,616,500	0	108,616,500	99.22	853,500
401087	PENGADILAN AGAMA CILACAP	172,340,000	172,340,000	170,834,000	0	170,834,000	99.13	1,506,000
401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	109,080,000	109,080,000	109,080,000	0	109,080,000	100	0
401107	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	181,600,000	181,600,000	180,995,250	0	180,995,250	99.67	604,750
401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	83,970,000	83,970,000	83,970,000	0	83,970,000	100	0
401138	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	90,530,000	90,530,000	90,046,602	0	90,046,602	99.47	483,398

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 46
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401144	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	140,710,000	140,710,000	138,890,000	0	138,890,000	98.71	1,820,000
401153	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	105,590,000	105,590,000	99,775,000	0	99,775,000	94.49	5,815,000
401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	78,160,000	78,160,000	78,160,000	0	78,160,000	100	0
401175	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	111,680,000	111,680,000	111,358,000	0	111,358,000	99.71	322,000
401181	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	42,460,000	42,460,000	41,981,300	0	41,981,300	98.87	478,700
402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	90,180,000	90,180,000	88,440,000	0	88,440,000	98.07	1,740,000
402965	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	737,368,000	737,368,000	715,834,850	0	715,834,850	97.08	21,533,150
403016	PENGADILAN AGAMA SLAWI	120,820,000	120,820,000	120,027,650	0	120,027,650	99.34	792,350
403022	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	163,020,000	163,020,000	162,742,000	0	162,742,000	99.83	278,000
614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	80,720,000	80,720,000	80,539,300	0	80,539,300	99.78	180,700
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) JAWA TENGAH	4,738,728,000	4,738,728,000	4,658,015,887	0	4,658,015,887	98.3	80,712,113
005040400KD	BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA							
401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	123,862,000	123,862,000	122,920,000	0	122,920,000	99.24	942,000
401202	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	137,230,000	137,230,000	133,125,000	0	133,125,000	97.01	4,105,000
401220	PENGADILAN AGAMA WATES	66,420,000	66,420,000	65,310,000	0	65,310,000	98.33	1,110,000
401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	111,288,000	111,288,000	110,345,400	240,000	110,105,400	98.94	1,182,600
401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	133,152,000	133,152,000	132,950,589	0	132,950,589	99.85	201,411
547658	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	237,401,000	237,401,000	237,593,665	1,200,000	236,393,665	99.58	1,007,335
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) DI YOGYAKARTA	809,353,000	809,353,000	802,244,654	1,440,000	800,804,654	99.12	8,548,346
005040500KD	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya							
309125	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	760,664,000	760,664,000	757,624,704	0	757,624,704	99.6	3,039,296
401241	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	186,800,000	186,800,000	186,607,000	0	186,607,000	99.9	193,000
401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	214,140,000	214,140,000	214,133,172	0	214,133,172	100	6,828
401263	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	197,920,000	197,920,000	195,293,000	0	195,293,000	98.67	2,627,000
401272	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	225,640,000	225,640,000	225,577,006	0	225,577,006	99.97	62,994
401288	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	100	0
401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	129,210,000	129,210,000	128,515,406	0	128,515,406	99.46	694,594
401308	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	213,540,000	213,540,000	213,540,000	0	213,540,000	100	0
401323	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	248,040,000	248,040,000	247,065,000	0	247,065,000	99.61	975,000
401339	PENGADILAN AGAMA JEMBER	246,120,000	246,120,000	236,495,000	0	236,495,000	96.09	9,625,000
401345	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	221,160,000	221,160,000	220,145,750	0	220,145,750	99.54	1,014,250
401351	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	207,020,000	207,020,000	207,020,000	0	207,020,000	100	0
401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	245,420,000	245,420,000	245,286,954	0	245,286,954	99.95	133,046
401376	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	183,040,000	183,040,000	167,802,936	0	167,802,936	91.68	15,237,064

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 47
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401382	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	232,440,000	232,440,000	232,313,400	0	232,313,400	99.95	126,600
401391	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	246,200,000	246,200,000	246,012,000	0	246,012,000	99.92	188,000
401403	PENGADILAN AGAMA BLITAR	179,820,000	179,820,000	158,055,900	36,479	158,019,421	87.88	21,800,579
401411	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	213,310,000	213,310,000	212,649,583	0	212,649,583	99.69	660,417
401427	PENGADILAN AGAMA MALANG	217,280,000	217,280,000	200,216,400	0	200,216,400	92.15	17,063,600
401433	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	113,320,000	113,320,000	113,199,600	0	113,199,600	99.89	120,400
401442	PENGADILAN AGAMA BANGIL	124,990,000	124,990,000	124,424,000	0	124,424,000	99.55	566,000
401458	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	65,630,000	65,630,000	65,630,000	0	65,630,000	100	0
401464	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	155,460,000	155,460,000	155,456,836	0	155,456,836	100	3,164
401473	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	157,240,000	157,240,000	157,240,000	0	157,240,000	100	0
401489	PENGADILAN AGAMA MADIUN	63,600,000	63,600,000	63,479,000	0	63,479,000	99.81	121,000
401495	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	153,410,000	153,410,000	145,121,500	0	145,121,500	94.6	8,288,500
401509	PENGADILAN AGAMA NGAWI	96,860,000	96,860,000	96,226,038	0	96,226,038	99.35	633,962
401515	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	114,160,000	114,160,000	114,160,000	0	114,160,000	100	0
401521	PENGADILAN AGAMA PACITAN	104,560,000	104,560,000	104,422,658	0	104,422,658	99.87	137,342
401540	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	102,860,000	102,860,000	100,247,500	0	100,247,500	97.46	2,612,500
401546	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	184,860,000	184,860,000	183,730,452	0	183,730,452	99.39	1,129,548
401552	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	102,710,000	102,710,000	82,794,000	0	82,794,000	80.61	19,916,000
401561	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	165,710,000	165,710,000	165,710,000	0	165,710,000	100	0
401577	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	86,500,000	86,500,000	86,500,000	0	86,500,000	100	0
403031	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	135,160,000	135,160,000	131,229,500	0	131,229,500	97.09	3,930,500
403047	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	142,500,000	142,500,000	142,500,000	0	142,500,000	100	0
450738	PENGADILAN AGAMA TUBAN	185,400,000	185,400,000	185,280,800	0	185,280,800	99.94	119,200
604731	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	241,920,000	241,920,000	241,437,500	0	241,437,500	99.8	482,500
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	6,902,614,000	6,902,614,000	6,791,142,595	36,479	6,791,106,116	98.39	111,507,884
005040600KD	BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
401583	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	508,636,000	508,636,000	508,636,000	0	508,636,000	100	0
401592	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	135,605,000	135,605,000	131,460,000	0	131,460,000	96.94	4,145,000
401603	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	46,800,000	46,800,000	46,776,160	0	46,776,160	99.95	23,840
401612	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	156,948,000	156,948,000	156,860,400	200,000	156,660,400	99.82	287,600
401628	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	62,750,000	62,750,000	59,080,000	0	59,080,000	94.15	3,670,000
401634	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	121,128,000	121,128,000	121,125,000	0	121,125,000	100	3,000
401643	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	164,283,000	164,283,000	156,850,400	0	156,850,400	95.48	7,432,600
401659	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	164,800,000	164,800,000	160,068,720	0	160,068,720	97.13	4,731,280

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
401665	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	75,725,000	75,725,000	71,122,000	0	71,122,000	93.92	4,603,000
401671	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	136,575,000	136,575,000	136,390,000	0	136,390,000	99.86	185,000
401690	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	70,475,000	70,475,000	70,475,000	0	70,475,000	100	0
401696	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	149,250,000	149,250,000	144,007,840	0	144,007,840	96.49	5,242,160
401710	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	68,100,000	68,100,000	64,320,000	0	64,320,000	94.45	3,780,000
401716	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	95,575,000	95,575,000	82,345,000	0	82,345,000	86.16	13,230,000
401722	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	65,050,000	65,050,000	65,050,000	0	65,050,000	100	0
401731	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	100,650,000	100,650,000	98,055,000	0	98,055,000	97.42	2,595,000
401747	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	92,925,000	92,925,000	92,922,000	0	92,922,000	100	3,000
401753	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	55,900,000	55,900,000	55,900,000	0	55,900,000	100	0
401762	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	104,725,000	104,725,000	104,725,000	0	104,725,000	100	0
402608	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	151,525,000	151,525,000	151,525,000	0	151,525,000	100	0
403426	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	104,325,000	104,325,000	104,259,000	0	104,259,000	99.94	66,000
403427	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	69,375,000	69,375,000	69,375,000	0	69,375,000	100	0
403428	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	81,575,000	81,575,000	81,575,000	0	81,575,000	100	0
690108	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG	104,350,000	104,350,000	103,024,900	0	103,024,900	98.73	1,325,100
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2,887,050,000	2,887,050,000	2,835,927,420	200,000	2,835,727,420	98.23	51,322,580
005040700KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA							
401778	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	581,637,000	581,637,000	577,222,900	309,800	576,913,100	99.19	4,723,900
401784	PENGADILAN AGAMA BINJAI	116,140,000	113,540,000	113,540,000	0	113,540,000	100	0
401793	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	89,250,000	80,250,000	75,170,000	0	75,170,000	93.67	5,080,000
401804	PENGADILAN AGAMA MEDAN	158,560,000	158,560,000	156,740,500	0	156,740,500	98.85	1,819,500
401813	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	171,512,000	171,512,000	170,546,000	0	170,546,000	99.44	966,000
401829	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	172,400,000	172,400,000	172,400,000	0	172,400,000	100	0
401835	PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI	62,050,000	62,050,000	62,010,014	0	62,010,014	99.94	39,986
401841	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	64,200,000	64,200,000	64,200,000	0	64,200,000	100	0
401860	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	60,500,000	60,500,000	60,284,000	0	60,284,000	99.64	216,000
401866	PENGADILAN AGAMA BALIGE	56,000,000	56,000,000	55,420,000	0	55,420,000	98.96	580,000
401872	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	37,250,000	35,000,000	34,750,000	0	34,750,000	99.29	250,000
401881	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	63,200,000	63,200,000	63,200,000	0	63,200,000	100	0
401897	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	48,220,000	48,220,000	48,220,000	0	48,220,000	100	0
402040	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	75,610,000	75,610,000	75,610,000	7,500,000	68,110,000	90.08	7,500,000
403062	PENGADILAN AGAMA KISARAN	163,512,000	163,512,000	152,645,000	0	152,645,000	93.35	10,867,000
403078	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	273,312,000	273,312,000	272,382,950	0	272,382,950	99.66	929,050

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 49
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
403084	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	250,212,000	250,212,000	250,119,660	0	250,119,660	99.96	92,340
403399	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	99,030,000	99,030,000	98,566,000	0	98,566,000	99.53	464,000
547683	PENGADILAN AGAMA STABAT	171,202,000	171,202,000	170,640,000	0	170,640,000	99.67	562,000
604745	PENGADILAN AGAMA PANDAN	98,900,000	98,900,000	98,900,000	0	98,900,000	100	0
631980	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	44,000,000	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000	100	0
631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	103,580,000	103,580,000	103,580,000	0	103,580,000	100	0
690112	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	34,200,000	34,200,000	34,200,000	0	34,200,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA	2,994,477,000	2,980,627,000	2,954,347,024	7,809,800	2,946,537,224	99.12	34,089,776
005040800KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT							
401901	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	388,802,000	388,802,000	388,395,102	0	388,395,102	99.9	406,898
401917	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	116,524,000	116,524,000	116,524,000	0	116,524,000	100	0
401923	PENGADILAN AGAMA SOLOK	125,500,000	125,500,000	125,500,000	0	125,500,000	100	0
401932	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	121,000,000	121,000,000	118,400,000	0	118,400,000	97.85	2,600,000
401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	119,060,000	119,060,000	118,506,000	0	118,506,000	99.53	554,000
401954	PENGADILAN AGAMA PADANG	209,760,000	221,760,000	221,438,880	0	221,438,880	99.86	321,120
401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	78,250,000	78,250,000	76,150,000	0	76,150,000	97.32	2,100,000
401979	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	129,100,000	129,100,000	128,995,000	0	128,995,000	99.92	105,000
401985	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	250,000,000	244,000,000	237,999,000	0	237,999,000	97.54	6,001,000
401991	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	106,000,000	106,000,000	106,000,000	0	106,000,000	100	0
402005	PENGADILAN AGAMA PAINAN	89,500,000	89,500,000	89,500,000	0	89,500,000	100	0
402011	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	161,200,000	167,200,000	167,200,000	0	167,200,000	100	0
402030	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	250,850,000	238,850,000	216,761,028	0	216,761,028	90.75	22,088,972
402036	PENGADILAN AGAMA TALU	115,000,000	115,000,000	115,000,000	0	115,000,000	100	0
402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	92,700,000	92,700,000	92,600,000	0	92,600,000	99.89	100,000
402051	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	38,520,000	38,520,000	38,516,800	0	38,516,800	99.99	3,200
402067	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	275,800,000	275,800,000	275,411,400	13,650,000	261,761,400	94.91	14,038,600
402614	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	111,800,000	111,800,000	111,800,000	0	111,800,000	100	0
403400	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	71,275,000	71,275,000	71,220,000	0	71,220,000	99.92	55,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SUMATERA BARAT	2,850,641,000	2,850,641,000	2,815,917,210	13,650,000	2,802,267,210	98.78	48,373,790
005040900KD	BA(005) ES1(04) RIAU							
402073	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	98,760,000	98,760,000	98,760,000	0	98,760,000	100	0
402082	PENGADILAN AGAMA RENGAT	142,200,000	142,200,000	142,200,000	0	142,200,000	100	0
402098	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	176,476,000	176,476,000	176,402,000	0	176,402,000	99.96	74,000
402102	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	174,825,000	174,825,000	174,822,500	0	174,822,500	100	2,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 50
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402118	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	405,000,000	405,000,000	404,971,950	0	404,971,950	99.99	28,050
402124	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	177,100,000	177,100,000	176,362,805	0	176,362,805	99.58	737,195
402133	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	151,220,000	151,220,000	151,220,000	0	151,220,000	100	0
402623	PENGADILAN AGAMA DUMAI	131,580,000	131,580,000	131,580,000	0	131,580,000	100	0
402971	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	478,654,000	478,654,000	477,018,300	414,000	476,604,300	99.57	2,049,700
403402	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	273,400,000	273,400,000	273,061,000	0	273,061,000	99.88	339,000
403403	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	87,000,000	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	100	0
632000	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	89,910,000	89,910,000	89,910,000	0	89,910,000	100	0
632002	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	84,900,000	84,900,000	84,609,740	0	84,609,740	99.66	290,260
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) RIAU	2,471,025,000	2,471,025,000	2,467,918,295	414,000	2,467,504,295	99.87	3,520,705
005041000KD	BA(005) ES1(04) JAMBI							
402186	PENGADILAN AGAMA JAMBI	131,130,000	131,130,000	130,550,950	0	130,550,950	99.56	579,050
402192	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	100,600,000	116,000,000	116,000,000	0	116,000,000	100	0
402206	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	81,750,000	81,750,000	79,650,000	0	79,650,000	97.43	2,100,000
402212	PENGADILAN AGAMA BANGKO	107,250,000	107,250,000	107,250,000	0	107,250,000	100	0
402221	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	73,700,000	85,050,000	85,050,000	0	85,050,000	100	0
403053	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	119,750,000	119,750,000	119,750,000	0	119,750,000	100	0
547662	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	339,505,000	339,505,000	289,151,573	0	289,151,573	85.17	50,353,427
632019	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	88,190,000	98,190,000	98,092,500	0	98,092,500	99.9	97,500
632023	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	75,450,000	75,450,000	74,500,000	0	74,500,000	98.74	950,000
652021	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	214,000,000	161,750,000	146,735,000	0	146,735,000	90.72	15,015,000
652035	PENGADILAN AGAMA SENGETI	90,400,000	105,900,000	105,900,000	0	105,900,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) JAMBI	1,421,725,000	1,421,725,000	1,352,630,023	0	1,352,630,023	95.14	69,094,977
005041100KD	BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN							
402237	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	285,816,000	285,816,000	284,796,382	0	284,796,382	99.64	1,019,618
402243	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	111,340,000	111,340,000	108,605,000	0	108,605,000	97.54	2,735,000
402252	PENGADILAN AGAMA LAHAT	199,500,000	199,500,000	198,750,000	0	198,750,000	99.62	750,000
402268	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	100	0
402274	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	184,374,000	184,374,000	175,414,000	0	175,414,000	95.14	8,960,000
402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	179,194,000	179,194,000	174,662,228	0	174,662,228	97.47	4,531,772
402299	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	243,274,000	243,274,000	243,255,706	0	243,255,706	99.99	18,294
402639	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	153,000,000	153,000,000	150,530,000	0	150,530,000	98.39	2,470,000
403408	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	135,500,000	135,500,000	135,250,000	0	135,250,000	99.82	250,000
403409	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	244,443,000	244,443,000	232,052,980	0	232,052,980	94.93	12,390,020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 51
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
403410	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	92,600,000	92,600,000	92,565,000	0	92,565,000	99.96	35,000
403411	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	39,000,000	39,000,000	38,950,000	0	38,950,000	99.87	50,000
403412	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	37,450,000	37,450,000	36,090,000	0	36,090,000	96.37	1,360,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN	2,025,491,000	2,025,491,000	1,990,921,296	0	1,990,921,296	98.29	34,569,704
005041200KD	BA(005) ES1(04) LAMPUNG							
402325	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	79,760,000	79,760,000	76,619,500	0	76,619,500	96.06	3,140,500
402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	148,500,000	148,500,000	148,500,000	0	148,500,000	100	0
402350	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	231,788,000	231,788,000	220,300,000	0	220,300,000	95.04	11,488,000
402356	PENGADILAN AGAMA METRO	62,956,000	62,656,000	60,883,600	0	60,883,600	97.17	1,772,400
402645	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	309,248,000	309,248,000	308,800,900	0	308,800,900	99.86	447,100
403413	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	86,000,000	85,700,000	85,080,000	0	85,080,000	99.28	620,000
403414	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	68,000,000	68,000,000	67,828,000	0	67,828,000	99.75	172,000
403415	PENGADILAN AGAMA MESUJI	99,500,000	100,700,000	100,580,000	0	100,580,000	99.88	120,000
403416	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	118,100,000	117,900,000	115,840,000	0	115,840,000	98.25	2,060,000
403418	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	153,288,000	152,888,000	152,605,778	0	152,605,778	99.82	282,222
547679	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	309,218,000	309,218,000	302,783,852	0	302,783,852	97.92	6,434,148
614685	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	142,000,000	142,000,000	141,396,000	0	141,396,000	99.57	604,000
614692	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	133,256,000	133,256,000	132,784,800	0	132,784,800	99.65	471,200
652042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	303,718,000	303,718,000	302,949,922	0	302,949,922	99.75	768,078
652056	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	219,500,000	219,500,000	219,500,000	0	219,500,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) LAMPUNG	2,464,832,000	2,464,832,000	2,436,452,352	0	2,436,452,352	98.85	28,379,648
005041300KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT							
402362	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	166,760,000	166,760,000	153,035,000	0	153,035,000	91.77	13,725,000
402371	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	293,150,000	293,150,000	292,409,900	0	292,409,900	99.75	740,100
402387	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	245,084,000	245,084,000	237,534,000	0	237,534,000	96.92	7,550,000
402393	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	139,000,000	139,000,000	137,996,000	0	137,996,000	99.28	1,004,000
402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	166,000,000	166,000,000	163,087,000	0	163,087,000	98.25	2,913,000
402413	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	145,000,000	145,000,000	138,030,000	0	138,030,000	95.19	6,970,000
402651	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	328,357,000	328,357,000	328,243,119	0	328,243,119	99.97	113,881
402670	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	184,636,000	184,636,000	184,532,250	0	184,532,250	99.94	103,750
403422	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	69,200,000	69,200,000	69,200,000	0	69,200,000	100	0
403424	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	47,300,000	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000	100	0
403425	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	109,650,000	109,650,000	108,841,000	0	108,841,000	99.26	809,000
632040	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	109,000,000	109,000,000	109,000,000	0	109,000,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 52
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN BARAT	2,003,137,000	2,003,137,000	1,969,208,269	0	1,969,208,269	98.31	33,928,731
005041400KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH							
401974	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	90,500,000	90,500,000	86,790,000	2,100,000	84,690,000	93.58	5,810,000
401975	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	47,000,000	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000	100	0
401976	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	65,900,000	65,900,000	56,552,000	0	56,552,000	85.81	9,348,000
401977	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	53,200,000	53,200,000	53,200,000	0	53,200,000	100	0
401980	PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG	89,780,000	89,780,000	89,780,000	0	89,780,000	100	0
401981	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000	100	0
401982	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	67,650,000	67,650,000	67,050,000	0	67,050,000	99.11	600,000
402422	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	129,920,000	129,920,000	129,875,025	0	129,875,025	99.97	44,975
402438	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	144,000,000	144,000,000	143,890,000	0	143,890,000	99.92	110,000
402444	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	104,000,000	104,000,000	103,990,000	0	103,990,000	99.99	10,000
402453	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	159,700,000	159,700,000	159,700,000	3,080,000	156,620,000	98.07	3,080,000
402469	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	133,500,000	133,500,000	131,360,000	0	131,360,000	98.4	2,140,000
402475	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	188,600,000	188,600,000	188,075,000	0	188,075,000	99.72	525,000
402990	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	393,877,000	393,877,000	377,630,845	720,000	376,910,845	95.69	16,966,155
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH	1,726,627,000	1,726,627,000	1,693,892,870	5,900,000	1,687,992,870	98.1	38,634,130
005041500KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN							
309048	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	52,760,000	52,760,000	52,760,000	0	52,760,000	100	0
309049	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	178,270,000	178,270,000	178,270,000	1,000,000	177,270,000	99.44	1,000,000
309050	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	48,880,000	48,880,000	48,728,750	0	48,728,750	99.69	151,250
402450	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	376,863,000	376,863,000	375,846,000	0	375,846,000	99.73	1,017,000
402501	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	137,260,000	137,260,000	137,250,000	0	137,250,000	99.99	10,000
402520	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	157,435,000	157,435,000	157,387,000	0	157,387,000	99.97	48,000
402526	PENGADILAN AGAMA RANTAU	77,600,000	77,600,000	77,595,000	0	77,595,000	99.99	5,000
402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	123,500,000	123,500,000	123,500,000	0	123,500,000	100	0
402541	PENGADILAN AGAMA BARABAI	102,000,000	102,000,000	101,650,000	0	101,650,000	99.66	350,000
402557	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	143,285,000	143,285,000	137,605,160	0	137,605,160	96.04	5,679,840
402563	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	106,150,000	106,150,000	104,642,000	0	104,642,000	98.58	1,508,000
402572	PENGADILAN AGAMA NEGARA	77,000,000	77,000,000	77,000,000	0	77,000,000	100	0
632044	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	100	0
690140	PENGADILAN AGAMA BATU LICIN	190,920,000	190,920,000	185,530,400	0	185,530,400	97.18	5,389,600
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	1,856,923,000	1,856,923,000	1,842,764,310	1,000,000	1,841,764,310	99.24	15,158,690
005041600KD	BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
309052	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	412,412,000	412,412,000	412,335,155	0	412,335,155	99.98	76,845
309053	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	108,990,000	108,990,000	104,939,800	0	104,939,800	96.28	4,050,200
309054	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	118,000,000	118,000,000	118,000,000	0	118,000,000	100	0
309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	153,972,000	153,972,000	144,431,696	0	144,431,696	93.8	9,540,304
309056	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	307,400,000	307,900,000	307,400,000	0	307,400,000	99.84	500,000
401983	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	85,000,000	85,000,000	82,929,673	0	82,929,673	97.56	2,070,327
401986	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	218,315,000	217,815,000	194,816,000	0	194,816,000	89.44	22,999,000
402481	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	516,149,000	516,149,000	513,388,647	0	513,388,647	99.47	2,760,353
402676	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	67,000,000	67,000,000	66,549,000	1,200,000	65,349,000	97.54	1,651,000
417658	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	350,703,000	350,703,000	330,075,000	0	330,075,000	94.12	20,628,000
652081	PENGADILAN AGAMA BONTANG	62,000,000	62,000,000	61,390,000	0	61,390,000	99.02	610,000
652098	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	204,226,000	204,226,000	201,546,010	0	201,546,010	98.69	2,679,990
690175	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	405,850,000	405,850,000	340,070,500	0	340,070,500	83.79	65,779,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) KALIMANTAN TIMUR	3,010,017,000	3,010,017,000	2,877,871,481	1,200,000	2,876,671,481	95.61	133,345,519
005041700KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA							
309058	PENGADILAN AGAMA MANADO	227,350,000	227,350,000	185,118,000	0	185,118,000	81.42	42,232,000
309059	PENGADILAN AGAMA KOTAMUBAGU	111,400,000	111,400,000	111,400,000	150,000	111,250,000	99.87	150,000
309060	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	302,550,000	302,550,000	302,550,000	0	302,550,000	100	0
401996	PENGADILAN AGAMA LOLAK	155,000,000	155,000,000	144,874,000	0	144,874,000	93.47	10,126,000
401997	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	146,000,000	146,000,000	142,365,750	0	142,365,750	97.51	3,634,250
401998	PENGADILAN AGAMA BOROKO	116,960,000	116,960,000	104,137,550	0	104,137,550	89.04	12,822,450
401999	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	129,980,000	129,980,000	129,980,000	0	129,980,000	100	0
402682	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	300,202,000	300,202,000	300,016,842	0	300,016,842	99.94	185,158
402702	PENGADILAN AGAMA TONDANO	69,450,000	69,450,000	68,988,000	0	68,988,000	99.33	462,000
604752	PENGADILAN AGAMA BITUNG	130,500,000	130,500,000	128,430,000	0	128,430,000	98.41	2,070,000
682172	PENGADILAN AGAMA AMURANG	64,320,000	64,320,000	64,320,000	0	64,320,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI UTARA	1,753,712,000	1,753,712,000	1,682,180,142	150,000	1,682,030,142	95.92	71,681,858
005041800KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA							
309062	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	171,440,000	171,440,000	162,699,600	0	162,699,600	94.9	8,740,400
309063	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	191,400,000	191,400,000	191,399,000	0	191,399,000	100	1,000
309064	PENGADILAN AGAMA POSO	140,010,000	140,010,000	139,980,000	0	139,980,000	99.98	30,000
309066	PENGADILAN AGAMA LUWUK	350,900,000	350,900,000	348,680,000	0	348,680,000	99.37	2,220,000
401992	PENGADILAN AGAMA AMPANA	198,200,000	198,200,000	193,649,500	0	193,649,500	97.7	4,550,500
576250	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	304,163,000	304,163,000	286,862,900	0	286,862,900	94.31	17,300,100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
604766	PENGADILAN AGAMA PALU KAB. DONGGALA	365,172,000	365,172,000	335,921,800	0	335,921,800	91.99	29,250,200
652103	PENGADILAN AGAMA BUOL	170,400,000	170,400,000	164,200,000	0	164,200,000	96.36	6,200,000
652120	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	154,710,000	154,710,000	154,680,000	0	154,680,000	99.98	30,000
652124	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	100,600,000	100,600,000	100,512,000	0	100,512,000	99.91	88,000
690072	PENGADILAN AGAMA PARIGI	114,700,000	114,700,000	105,770,000	0	105,770,000	92.21	8,930,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGAH [PENGADILAN AGAMA KODYA PALU]	2,261,695,000	2,261,695,000	2,184,354,800	0	2,184,354,800	96.58	77,340,200
005041900KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN							
309067	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	599,317,000	599,317,000	561,375,305	0	561,375,305	93.67	37,941,695
309068	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	130,592,000	130,592,000	122,610,000	0	122,610,000	93.89	7,982,000
309069	PENGADILAN AGAMA MAROS	115,807,000	115,807,000	110,722,965	0	110,722,965	95.61	5,084,035
309070	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	265,060,000	265,060,000	259,549,850	300,000	259,249,850	97.81	5,810,150
309071	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	129,600,000	129,600,000	119,900,000	0	119,900,000	92.52	9,700,000
309073	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	82,800,000	82,800,000	82,700,000	0	82,700,000	99.88	100,000
309074	PENGADILAN AGAMA BARRU	181,500,000	181,500,000	181,500,000	0	181,500,000	100	0
309075	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	157,612,000	157,612,000	153,976,634	0	153,976,634	97.69	3,635,366
309076	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	222,553,000	222,553,000	222,520,870	0	222,520,870	99.99	32,130
309077	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	159,396,000	159,396,000	159,356,000	0	159,356,000	99.97	40,000
309078	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	117,092,000	117,092,000	117,092,000	0	117,092,000	100	0
309079	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	106,550,000	106,550,000	84,408,000	0	84,408,000	79.22	22,142,000
309080	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	132,196,000	132,196,000	130,296,920	0	130,296,920	98.56	1,899,080
309081	PENGADILAN AGAMA SINJAI	97,830,000	97,830,000	93,560,000	0	93,560,000	95.64	4,270,000
309082	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	215,500,000	215,500,000	214,775,000	170,000	214,605,000	99.58	895,000
309083	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	77,500,000	77,500,000	77,500,000	0	77,500,000	100	0
309084	PENGADILAN AGAMA PINRANG	173,196,000	173,196,000	173,188,000	0	173,188,000	100	8,000
309085	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	100	0
309087	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	146,426,000	146,426,000	145,965,548	0	145,965,548	99.69	460,452
309088	PENGADILAN AGAMA PALOPO	54,000,000	54,000,000	53,740,000	0	53,740,000	99.52	260,000
309089	PENGADILAN AGAMA MAKALE	106,500,000	106,500,000	106,135,000	110,000	106,025,000	99.55	475,000
401987	PENGADILAN AGAMA BELOPA	139,200,000	139,200,000	139,200,000	0	139,200,000	100	0
401989	PENGADILAN AGAMA MALILI	95,550,000	95,550,000	95,550,000	0	95,550,000	100	0
632052	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	144,920,000	144,920,000	144,920,000	0	144,920,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI SELATAN	3,720,697,000	3,720,697,000	3,620,542,092	580,000	3,619,962,092	97.31	100,734,908
005042000KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA							
309094	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	167,000,000	167,000,000	166,999,000	0	166,999,000	100	1,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
309095	PENGADILAN AGAMA RAHA	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100	0
309096	PENGADILAN AGAMA KENDARI	213,610,000	212,900,000	204,369,500	0	204,369,500	95.99	8,530,500
309097	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	133,200,000	133,200,000	133,200,000	0	133,200,000	100	0
401993	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	167,700,000	167,700,000	167,635,000	0	167,635,000	99.96	65,000
401994	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	64,294,000	64,294,000	64,294,000	0	64,294,000	100	0
401995	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	74,200,000	74,200,000	74,124,000	0	74,124,000	99.9	76,000
576254	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	303,657,000	304,367,000	287,864,900	0	287,864,900	94.58	16,502,100
604773	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	316,476,000	316,476,000	316,476,000	0	316,476,000	100	0
690086	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	228,252,000	228,252,000	228,070,000	0	228,070,000	99.92	182,000
690090	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	111,000,000	111,000,000	110,851,000	0	110,851,000	99.87	149,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	2,079,389,000	2,079,389,000	2,053,883,400	0	2,053,883,400	98.77	25,505,600
005042100KD	BA(005) ES1(04) MALUKU							
309098	PENGADILAN AGAMA AMBON	366,000,000	366,000,000	365,622,400	0	365,622,400	99.9	377,600
309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	322,020,000	322,020,000	321,495,000	0	321,495,000	99.84	525,000
309100	PENGADILAN AGAMA MASOHI	306,575,000	306,575,000	306,220,000	0	306,220,000	99.88	355,000
402002	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	252,609,000	252,609,000	246,184,996	0	246,184,996	97.46	6,424,004
402003	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	369,435,000	369,435,000	367,195,000	0	367,195,000	99.39	2,240,000
402006	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	251,080,000	251,080,000	250,780,000	0	250,780,000	99.88	300,000
402711	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	286,331,000	286,331,000	273,874,380	600	273,873,780	95.65	12,457,220
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) MALUKU	2,154,050,000	2,154,050,000	2,131,371,776	600	2,131,371,176	98.95	22,678,824
005042200KD	BA(005) ES1(04) BALI							
309105	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	53,500,000	53,500,000	53,450,000	0	53,450,000	99.91	50,000
309106	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	48,030,000	48,030,000	48,027,000	0	48,027,000	99.99	3,000
402727	PENGADILAN AGAMA BANGLI	31,050,000	31,050,000	31,050,000	0	31,050,000	100	0
402733	PENGADILAN AGAMA NEGARA	39,750,000	39,750,000	39,750,000	0	39,750,000	100	0
402742	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	33,500,000	33,500,000	33,500,000	0	33,500,000	100	0
402758	PENGADILAN AGAMA TABANAN	32,800,000	32,800,000	32,800,000	0	32,800,000	100	0
402764	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	32,750,000	32,750,000	32,750,000	0	32,750,000	100	0
402773	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	35,500,000	35,500,000	34,230,000	0	34,230,000	96.42	1,270,000
614732	PENGADILAN AGAMA BADUNG	50,000,000	50,000,000	49,980,000	0	49,980,000	99.96	20,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BALI	356,880,000	356,880,000	355,537,000	0	355,537,000	99.62	1,343,000
005042300KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT							
309107	PENGADILAN AGAMA MATARAM	236,160,000	236,160,000	153,754,250	0	153,754,250	65.11	82,405,750
309109	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	240,530,000	240,530,000	240,530,000	2,280,000	238,250,000	99.05	2,280,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
309110	PENGADILAN AGAMA PRAYA	517,680,000	517,680,000	427,983,800	0	427,983,800	82.67	89,696,200
309111	PENGADILAN AGAMA SELONG	453,530,000	453,530,000	269,824,700	0	269,824,700	59.49	183,705,300
309113	PENGADILAN AGAMA BIMA	280,430,000	280,430,000	273,896,000	0	273,896,000	97.67	6,534,000
309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	150,920,000	150,920,000	144,328,000	0	144,328,000	95.63	6,592,000
402789	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	464,448,000	464,448,000	467,399,560	3,112,000	464,287,560	99.97	160,440
614728	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	626,010,000	626,010,000	611,557,000	0	611,557,000	97.69	14,453,000
690154	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	129,300,000	129,300,000	124,644,700	3,360,000	121,284,700	93.8	8,015,300
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT	3,099,008,000	3,099,008,000	2,713,918,010	8,752,000	2,705,166,010	87.57	393,841,990
005042400KD	BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR							
309115	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	44,392,000	44,392,000	38,654,000	0	38,654,000	87.07	5,738,000
309116	PENGADILAN AGAMA KUPANG	122,680,000	122,680,000	122,260,000	0	122,260,000	99.66	420,000
309117	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	120,600,000	120,600,000	92,894,000	0	92,894,000	77.03	27,706,000
309118	PENGADILAN AGAMA ENDE	106,040,000	106,040,000	106,040,000	0	106,040,000	100	0
309119	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	45,660,000	45,660,000	45,660,000	0	45,660,000	100	0
402795	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	134,340,000	134,340,000	115,588,000	0	115,588,000	86.04	18,752,000
402809	PENGADILAN AGAMA RUTENG	160,140,000	160,140,000	160,140,000	0	160,140,000	100	0
402815	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	87,210,000	87,210,000	87,210,000	0	87,210,000	100	0
402821	PENGADILAN AGAMA SOE	36,550,000	36,550,000	35,695,000	0	35,695,000	97.66	855,000
402840	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	39,440,000	39,440,000	39,160,000	0	39,160,000	99.29	280,000
402846	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	110,583,000	110,583,000	78,320,000	0	78,320,000	70.82	32,263,000
402852	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	112,914,000	112,914,000	112,614,000	0	112,614,000	99.73	300,000
576261	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	394,695,000	394,695,000	387,426,846	0	387,426,846	98.16	7,268,154
632065	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	97,040,000	97,040,000	86,660,000	0	86,660,000	89.3	10,380,000
682282	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	100,719,000	100,719,000	100,569,000	0	100,569,000	99.85	150,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	1,713,003,000	1,713,003,000	1,608,890,846	0	1,608,890,846	93.92	104,112,154
005042500KD	BA(005) ES1(04) PAPUA							
402861	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	500,423,000	500,423,000	476,264,046	0	476,264,046	95.17	24,158,954
402877	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	93,680,000	93,680,000	92,690,000	0	92,690,000	98.94	990,000
402892	PENGADILAN AGAMA BIAK	51,000,000	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	100	0
402928	PENGADILAN AGAMA NABIRE	94,000,000	94,000,000	93,445,000	0	93,445,000	99.41	555,000
402934	PENGADILAN AGAMA WAMENA	103,382,000	103,382,000	100,377,930	0	100,377,930	97.09	3,004,070
402943	PENGADILAN AGAMA SERUI	85,980,000	85,980,000	85,980,000	1,121,000	84,859,000	98.7	1,121,000
402959	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	174,880,000	194,880,000	194,267,343	0	194,267,343	99.69	612,657
614770	PENGADILAN AGAMA SENTANI	115,010,000	125,010,000	124,790,000	1,056,000	123,734,000	98.98	1,276,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 57
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
614774	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	58,635,000	58,635,000	58,219,000	0	58,219,000	99.29	416,000
614781	PENGADILAN AGAMA PANIAI	65,000,000	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	100	0
690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	67,800,000	67,800,000	66,435,000	0	66,435,000	97.99	1,365,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) PAPUA	1,409,790,000	1,409,790,000	1,378,468,319	2,177,000	1,376,291,319	97.78	33,498,681
005042600KD	BA(005) ES1(04) BENGKULU							
309120	PENGADILAN AGAMA MANNA	83,000,000	83,000,000	82,662,500	0	82,662,500	99.59	337,500
309121	PENGADILAN AGAMA CURUP	161,400,000	161,400,000	159,286,000	0	159,286,000	98.69	2,114,000
309122	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	129,876,000	129,876,000	129,511,000	0	129,511,000	99.72	365,000
309123	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	126,760,000	126,760,000	126,560,000	0	126,560,000	99.84	200,000
403404	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	78,800,000	78,800,000	78,800,000	0	78,800,000	100	0
403405	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	60,812,000	60,812,000	60,792,000	0	60,792,000	99.97	20,000
403406	PENGADILAN AGAMA TAIS	97,960,000	97,960,000	97,960,000	0	97,960,000	100	0
403407	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	108,600,000	108,600,000	108,600,000	0	108,600,000	100	0
576275	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	234,281,000	234,281,000	219,905,600	0	219,905,600	93.86	14,375,400
690133	PENGADILAN AGAMA LEBONG	58,600,000	58,600,000	58,600,000	0	58,600,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BENGKULU	1,140,089,000	1,140,089,000	1,122,677,100	0	1,122,677,100	98.47	17,411,900
005042800KD	BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA							
309101	PENGADILAN AGAMA TERNATE	167,682,000	167,682,000	166,905,000	0	166,905,000	99.54	777,000
309102	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	167,000,000	167,000,000	166,382,000	0	166,382,000	99.63	618,000
309103	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	163,120,000	163,120,000	157,493,000	0	157,493,000	96.55	5,627,000
309104	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	156,000,000	156,000,000	154,801,000	0	154,801,000	99.23	1,199,000
440741	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	246,580,000	246,580,000	244,556,900	0	244,556,900	99.18	2,023,100
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) MALUKU UTARA	900,382,000	900,382,000	890,137,900	0	890,137,900	98.86	10,244,100
005042900KD	BA(005) ES1(04) BANTEN							
400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	393,020,000	393,020,000	383,239,000	0	383,239,000	97.51	9,781,000
400818	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	143,394,000	143,394,000	141,167,000	0	141,167,000	98.45	2,227,000
400824	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	169,502,000	169,502,000	152,287,600	0	152,287,600	89.84	17,214,400
417851	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	337,394,000	337,394,000	316,616,500	0	316,616,500	93.84	20,777,500
440713	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	178,314,000	178,314,000	177,984,200	0	177,984,200	99.82	329,800
604724	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	413,438,000	413,438,000	410,165,500	0	410,165,500	99.21	3,272,500
652077	PENGADILAN AGAMA CILEGON	81,000,000	81,000,000	75,651,900	0	75,651,900	93.4	5,348,100
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BANTEN	1,716,062,000	1,716,062,000	1,657,111,700	0	1,657,111,700	96.56	58,950,300
005043000KD	BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG							
402303	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	93,800,000	93,800,000	90,998,000	0	90,998,000	97.01	2,802,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 58
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	224,970,000	224,970,000	224,446,277	100,000	224,346,277	99.72	623,723
403093	PENGADILAN AGAMA SUNGAI LIAT	235,810,000	235,810,000	226,279,300	0	226,279,300	95.96	9,530,700
440729	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	171,686,000	171,686,000	155,374,562	0	155,374,562	90.5	16,311,438
690129	PENGADILAN AGAMA MENTOK	117,640,000	117,640,000	115,295,000	0	115,295,000	98.01	2,345,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) BANGKA BELITUNG	843,906,000	843,906,000	812,393,139	100,000	812,293,139	96.27	31,612,861
005043100KD	BA(005) ES1(04) GORONTALO							
309061	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	244,000,000	244,000,000	243,998,815	0	243,998,815	100	1,185
402000	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	189,800,000	193,850,000	193,394,000	0	193,394,000	99.76	456,000
402001	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	124,000,000	124,000,000	123,672,235	0	123,672,235	99.74	327,765
402691	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	217,830,000	217,830,000	217,734,800	0	217,734,800	99.96	95,200
440735	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	259,014,000	259,014,000	258,929,750	0	258,929,750	99.97	84,250
652131	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	204,420,000	200,370,000	200,370,000	0	200,370,000	100	0
682186	PENGADILAN AGAMA MARISA	128,400,000	128,400,000	128,329,840	0	128,329,840	99.95	70,160
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) GORONTALO	1,367,464,000	1,367,464,000	1,366,429,440	0	1,366,429,440	99.92	1,034,560
005043200KD	PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG							
402149	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	114,700,000	114,700,000	112,730,000	0	112,730,000	98.28	1,970,000
402155	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	110,660,000	110,660,000	101,893,000	0	101,893,000	92.08	8,767,000
402161	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	154,470,000	154,470,000	154,470,000	0	154,470,000	100	0
402180	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	83,930,000	83,930,000	83,135,000	0	83,135,000	99.05	795,000
547700	PENGADILAN AGAMA BATAM	136,055,000	136,055,000	135,728,192	0	135,728,192	99.76	326,808
614671	PENGADILAN AGAMA NATUNA	107,536,000	107,536,000	107,536,000	0	107,536,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG	707,351,000	707,351,000	695,492,192	0	695,492,192	98.32	11,858,808
005043300KD	BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT							
402007	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	145,260,000	145,260,000	135,780,000	0	135,780,000	93.47	9,480,000
402883	PENGADILAN AGAMA SORONG	484,560,000	484,560,000	476,866,600	0	476,866,600	98.41	7,693,400
402903	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	138,800,000	138,800,000	137,780,000	0	137,780,000	99.27	1,020,000
402912	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) PAPUA BARAT	1,018,620,000	1,018,620,000	1,000,426,600	0	1,000,426,600	98.21	18,193,400
005043400KD	BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT							
309091	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	145,196,000	145,196,000	142,640,000	0	142,640,000	98.24	2,556,000
309092	PENGADILAN AGAMA MAJENE	105,200,000	105,200,000	105,184,000	0	105,184,000	99.98	16,000
309093	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	78,400,000	78,400,000	78,399,996	0	78,399,996	100	4
401988	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	96,250,000	96,250,000	92,639,000	4,780,000	87,859,000	91.28	8,391,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(04) SULAWESI BARAT	425,046,000	425,046,000	418,862,996	4,780,000	414,082,996	98.55	10,963,004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403420	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	130,926,000	130,926,000	123,371,000	0	123,371,000	94.23	7,555,000
403421	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	287,228,000	287,228,000	287,168,600	0	287,168,600	99.98	59,400
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	418,154,000	418,154,000	410,539,600	0	410,539,600	98.18	7,614,400
	JUMLAH BELANJA 04	117,755,347,000	117,528,170,000	115,483,458,085	70,018,891	115,413,439,194	98.26	2114730806
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN							
005050100KD	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA							
526705	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	265,479,000	265,479,000	243,722,175	0	243,722,175	91.8	21,756,825
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	48,850,000	59,300,000	57,976,000	0	57,976,000	97.77	1,324,000
663162	PENGADILAN MILITER UTAMA	511,285,000	511,285,000	507,606,761	0	507,606,761	99.28	3,678,239
663251	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	264,290,000	264,290,000	250,132,507	0	250,132,507	94.64	14,157,493
663268	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	177,392,000	177,392,000	175,938,075	0	175,938,075	99.18	1,453,925
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	1,267,296,000	1,277,746,000	1,235,375,518	0	1,235,375,518	96.68	42,370,482
005050100KP	BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA							
663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	22,728,222,000	21,479,734,000	21,425,418,787	25,860,122	21,399,558,665	99.63	80,175,335
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) DKI JAKARTA	22,728,222,000	21,479,734,000	21,425,418,787	25,860,122	21,399,558,665	99.75	80,175,335
005050200KD	BA(005) ES1(05) JAWA BARAT							
531824	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	60,000,000	60,000,000	59,250,000	0	59,250,000	98.75	750,000
663272	PENGADILAN MILITER II - 09 DI BANDUNG	136,168,000	136,168,000	135,987,000	0	135,987,000	99.87	181,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) JAWA BARAT	196,168,000	196,168,000	195,237,000	0	195,237,000	99.53	931,000
005050300KD	BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH							
531831	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	49,452,000	46,852,000	45,280,500	0	45,280,500	96.65	1,571,500
663289	PENGADILAN MILITER II - 10 DI SEMARANG	73,154,000	73,154,000	66,900,450	0	66,900,450	91.45	6,253,550
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) JAWA TENGAH	122,606,000	120,006,000	112,180,950	0	112,180,950	93.48	7,825,050
005050400KD	BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA							
578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	37,030,000	37,030,000	33,662,000	0	33,662,000	90.9	3,368,000
663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	83,000,000	83,000,000	80,092,300	0	80,092,300	96.5	2,907,700
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA	120,030,000	120,030,000	113,754,300	0	113,754,300	94.77	6,275,700
005050500KD	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya							
526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	49,700,000	49,700,000	49,652,417	807,000	48,845,417	98.28	854,583
548941	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	237,779,000	240,379,000	227,721,670	7,027,898	220,693,772	91.81	19,685,228
663301	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	434,133,000	434,133,000	431,828,900	429,628	431,399,272	99.37	2,733,728
663315	PENGADILAN MILITER III - 12 DI SURABAYA	163,140,000	163,140,000	160,097,550	0	160,097,550	98.14	3,042,450
663322	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	62,828,000	62,828,000	61,125,200	0	61,125,200	97.29	1,702,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 60
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	947,580,000	950,180,000	930,425,737	8,264,526	922,161,211	97.92	28,018,789
005050600KD	BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
578819	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	38,316,000	38,316,000	37,098,000	0	37,098,000	96.82	1,218,000
663183	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	195,000,000	195,000,000	192,276,021	0	192,276,021	98.6	2,723,979
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	233,316,000	233,316,000	229,374,021	0	229,374,021	98.31	3,941,979
005050700KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA							
526726	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	352,117,000	341,667,000	335,435,407	0	335,435,407	98.18	6,231,593
526747	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	44,600,000	44,600,000	42,359,000	0	42,359,000	94.98	2,241,000
663179	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	505,585,000	505,585,000	476,665,837	0	476,665,837	94.28	28,919,163
663200	PENGADILAN MILITER I - 02 DI MEDAN	160,000,000	160,000,000	141,341,125	0	141,341,125	88.34	18,658,875
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SUMATERA UTARA	1,062,302,000	1,051,852,000	995,801,369	0	995,801,369	94.67	56,050,631
005050800KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT							
531845	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	37,000,000	37,000,000	35,347,900	304,300	35,043,600	94.71	1,956,400
663205	PENGADILAN MILITER I - 03 DI PADANG	184,865,000	184,865,000	175,133,794	61,800	175,071,994	94.7	9,793,006
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SUMATERA BARAT	221,865,000	221,865,000	210,481,694	366,100	210,115,594	94.87	11,749,406
005050900KD	BA(005) ES1(05) RIAU							
578823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU	37,700,000	37,700,000	35,003,902	0	35,003,902	92.85	2,696,098
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) RIAU	37,700,000	37,700,000	35,003,902	0	35,003,902	92.85	2,696,098
005051000KD	BA(005) ES1(05) JAMBI							
578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	36,941,000	36,941,000	35,950,695	0	35,950,695	97.32	990,305
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) JAMBI	36,941,000	36,941,000	35,950,695	0	35,950,695	97.32	990,305
005051100KD	BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN							
526751	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	41,700,000	41,700,000	38,700,000	0	38,700,000	92.81	3,000,000
663212	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	175,700,000	175,700,000	159,103,400	0	159,103,400	90.55	16,596,600
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SUMATERA SELATAN	217,400,000	217,400,000	197,803,400	0	197,803,400	90.99	19,596,600
005051200KD	BA(005) ES1(05) LAMPUNG							
559841	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	39,854,000	39,854,000	39,144,000	0	39,144,000	98.22	710,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) LAMPUNG	39,854,000	39,854,000	39,144,000	0	39,144,000	98.22	710,000
005051300KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT							
531852	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	36,780,000	36,780,000	34,800,000	0	34,800,000	94.62	1,980,000
663226	PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK	83,000,000	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN BARAT	119,780,000	119,780,000	117,800,000	0	117,800,000	98.35	1,980,000
005051400KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH							
578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	37,000,000	37,000,000	35,500,000	0	35,500,000	95.95	1,500,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM
Halaman : 61
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH	37,000,000	37,000,000	35,500,000	0	35,500,000	95.95	1,500,000
005051500KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN							
531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	38,800,000	38,800,000	36,772,200	0	36,772,200	94.77	2,027,800
663233	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	66,000,000	66,000,000	61,351,350	0	61,351,350	92.96	4,648,650
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN SELATAN	104,800,000	104,800,000	98,123,550	0	98,123,550	93.63	6,676,450
005051600KD	BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR							
559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	36,500,000	36,500,000	32,159,000	0	32,159,000	88.11	4,341,000
663247	PENGADILAN MILITER I - 07 DI BALIKPAPAN	103,600,000	103,600,000	103,374,620	0	103,374,620	99.78	225,380
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR	140,100,000	140,100,000	135,533,620	0	135,533,620	96.74	4,566,380
005051700KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA							
531873	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	49,600,000	49,600,000	48,547,500	0	48,547,500	97.88	1,052,500
663361	PENGADILAN MILITER III - 17 DI MANADO	139,760,000	139,760,000	137,686,940	0	137,686,940	98.52	2,073,060
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI UTARA	189,360,000	189,360,000	186,234,440	0	186,234,440	98.35	3,125,560
005051800KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH							
578851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	47,100,000	47,100,000	45,000,000	0	45,000,000	95.54	2,100,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGAH	47,100,000	47,100,000	45,000,000	0	45,000,000	95.54	2,100,000
005051900KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN							
526712	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	283,479,000	283,479,000	257,343,480	0	257,343,480	90.78	26,135,520
526772	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	51,000,000	51,000,000	47,936,500	0	47,936,500	93.99	3,063,500
663357	PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR	165,780,000	165,780,000	151,142,100	0	151,142,100	91.17	14,637,900
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI SELATAN	500,259,000	500,259,000	456,422,080	0	456,422,080	91.24	43,836,920
005052000KD	BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA							
578865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	42,000,000	42,000,000	39,300,000	0	39,300,000	93.57	2,700,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) SULAWESI TENGGARA	42,000,000	42,000,000	39,300,000	0	39,300,000	93.57	2,700,000
005052100KD	BA(005) ES1(05) MALUKU							
539118	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	39,017,000	39,017,000	38,000,000	0	38,000,000	97.39	1,017,000
663378	PENGADILAN MILITER III - 18 DI AMBON	208,841,000	208,841,000	181,705,000	0	181,705,000	87.01	27,136,000
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) MALUKU	247,858,000	247,858,000	219,705,000	0	219,705,000	88.64	28,153,000
005052200KD	BA(005) ES1(05) BALI							
559862	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	40,400,000	40,400,000	39,063,500	0	39,063,500	96.69	1,336,500
663336	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	78,450,000	78,450,000	77,055,603	0	77,055,603	98.22	1,394,397
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) BALI	118,850,000	118,850,000	116,119,103	0	116,119,103	97.7	2,730,897
005052300KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT							
578872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	36,500,000	36,500,000	36,428,200	601,000	35,827,200	98.16	672,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA BARAT	36,500,000	36,500,000	36,428,200	601,000	35,827,200	99.8	672,800
005052400KD	BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR							
539122	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	36,900,000	36,900,000	35,498,500	0	35,498,500	96.2	1,401,500
663343	PENGADILAN MILITER III - 15 DI KUPANG	82,585,000	82,585,000	80,882,900	0	80,882,900	97.94	1,702,100
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR	119,485,000	119,485,000	116,381,400	0	116,381,400	97.4	3,103,600
005052500KD	BA(005) ES1(05) PAPUA							
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	49,000,000	44,000,000	42,979,892	0	42,979,892	97.68	1,020,108
663382	PENGADILAN MILITER III - 19 DI JAYAPURA	386,765,000	386,765,000	385,971,400	0	385,971,400	99.79	793,600
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) PAPUA	435,765,000	430,765,000	428,951,292	0	428,951,292	99.58	1,813,708
005052600KD	BA(005) ES1(05) BENGKULU							
578886	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	37,000,000	37,000,000	35,431,500	0	35,431,500	95.76	1,568,500
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) BENGKULU	37,000,000	37,000,000	35,431,500	0	35,431,500	95.76	1,568,500
005052900KD	BA(005) ES1(05) BANTEN							
690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	36,900,000	41,900,000	40,077,100	0	40,077,100	95.65	1,822,900
	JUMLAH BELANJA BA(005) ES1(05) BANTEN	36,900,000	41,900,000	40,077,100	0	40,077,100	95.65	1,822,900
005053200KD	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG							
690197	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	37,420,000	37,420,000	35,339,000	0	35,339,000	94.44	2,081,000
	JUMLAH BELANJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG	37,420,000	37,420,000	35,339,000	0	35,339,000	94.44	2,081,000
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	37,050,000	37,050,000	35,154,992	0	35,154,992	94.89	1,895,008
403430	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	36,250,000	36,250,000	36,249,700	0	36,249,700	100	300
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	73,300,000	73,300,000	71,404,692	0	71,404,692	97.41	1,895,308
	JUMLAH BELANJA 05	29,554,757,000	28,306,269,000	27,969,702,350	35,091,748	27,934,610,602	98.81	371658398
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN							
005060100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	174,752,945,000	188,504,054,000	186,986,988,516	261,728,031	186,725,260,485	99.06	1,778,793,515
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	174,752,945,000	188,504,054,000	186,986,988,516	261,728,031	186,725,260,485	99.2	1,778,793,515
	JUMLAH BELANJA 06	174,752,945,000	188,504,054,000	186,986,988,516	261,728,031	186,725,260,485	99.2	1778793515
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG							
005070100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
663136	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI	40,160,741,000	36,960,741,000	36,680,782,118	5,231,084	36,675,551,034	99.23	285,189,966
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	40,160,741,000	36,960,741,000	36,680,782,118	5,231,084	36,675,551,034	99.24	285,189,966
	JUMLAH BELANJA 07	40,160,741,000	36,960,741,000	36,680,782,118	5,231,084	36,675,551,034	99.24	285189966
	JUMLAH BELANJA	11,820,133,400,000	11,514,469,985,000	11,283,259,064,127	4,331,995,496	11,278,927,068,631	97.99	235,542,916,369

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI							
51	BELANJA PEGAWAI	7,273,874,227,000	6,979,539,137,000	6,808,685,751,561	1,389,825,100	6,807,295,926,461	97.53	172,243,210,539
52	BELANJA BARANG	2,123,224,508,000	2,202,832,916,000	2,167,395,188,019	2,016,584,322	2,165,378,603,697	98.3	37,454,312,303
53	BELANJA MODAL	1,730,368,565,000	1,595,406,388,000	1,577,707,896,111	13,191,900	1,577,694,704,211	98.89	17,711,683,789
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI	11,127,467,300,000	10,777,778,441,000	10,553,788,835,691	3,419,601,322	10,550,369,234,369	97.92	227,409,206,631
02	KEPANITERAAN							
51	BELANJA PEGAWAI	161,805,616,000	193,555,616,000	193,205,825,675	295,575,108	192,910,250,567	99.67	645,365,433
52	BELANJA BARANG	26,161,636,000	29,361,636,000	29,113,459,335	458,052	29,113,001,283	99.15	248,634,717
53	BELANJA MODAL	2,027,500,000	2,027,500,000	2,026,412,450	0	2,026,412,450	99.95	1,087,550
	JUMLAH BELANJA (02) KEPANITERAAN	189,994,752,000	224,944,752,000	224,345,697,460	296,033,160	224,049,664,300	99.73	895,087,700
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM							
51	BELANJA PEGAWAI	12,456,223,000	9,370,644,000	9,306,514,199	2,035,868	9,304,478,331	99.29	66,165,669
52	BELANJA BARANG	127,199,335,000	129,949,569,000	127,599,614,608	242,255,392	127,357,359,216	98.01	2,592,209,784
53	BELANJA MODAL	792,000,000	1,127,345,000	1,097,471,100	0	1,097,471,100	97.35	29,873,900
	JUMLAH BELANJA (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN	140,447,558,000	140,447,558,000	138,003,599,907	244,291,260	137,759,308,647	98.26	2,688,249,353
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA							
51	BELANJA PEGAWAI	7,182,278,000	6,572,278,000	6,506,782,398	3,156,316	6,503,626,082	98.96	68,651,918
52	BELANJA BARANG	108,530,871,000	108,913,694,000	106,949,461,410	66,862,575	106,882,598,835	98.14	2,031,095,165
53	BELANJA MODAL	2,042,198,000	2,042,198,000	2,027,214,277	0	2,027,214,277	99.27	14,983,723
	JUMLAH BELANJA (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN	117,755,347,000	117,528,170,000	115,483,458,085	70,018,891	115,413,439,194	98.26	2,114,730,806
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN							
51	BELANJA PEGAWAI	6,253,433,000	5,072,670,000	5,037,838,022	14,783,526	5,023,054,496	99.02	49,615,504
52	BELANJA BARANG	23,035,333,000	22,967,608,000	22,666,024,328	20,308,222	22,645,716,106	98.6	321,891,894
53	BELANJA MODAL	265,991,000	265,991,000	265,840,000	0	265,840,000	99.94	151,000
	JUMLAH BELANJA (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN	29,554,757,000	28,306,269,000	27,969,702,350	35,091,748	27,934,610,602	98.81	371,658,398
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN							
51	BELANJA PEGAWAI	18,543,139,000	21,226,378,000	21,175,073,546	196,529,053	20,978,544,493	98.83	247,833,507
52	BELANJA BARANG	148,320,375,000	154,585,330,000	153,133,209,275	65,198,978	153,068,010,297	99.02	1,517,319,703
53	BELANJA MODAL	7,889,431,000	12,692,346,000	12,678,705,695	0	12,678,705,695	99.89	13,640,305
	JUMLAH BELANJA (06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	174,752,945,000	188,504,054,000	186,986,988,516	261,728,031	186,725,260,485	99.2	1,778,793,515
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG							
51	BELANJA PEGAWAI	5,887,405,000	6,287,405,000	6,261,794,679	935,168	6,260,859,511	99.58	26,545,489
52	BELANJA BARANG	34,198,848,000	29,955,897,000	29,707,583,045	4,295,916	29,703,287,129	99.16	252,609,871
53	BELANJA MODAL	74,488,000	717,439,000	711,404,394	0	711,404,394	99.16	6,034,606

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/23 6:52 PM

Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA (07) BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	40,160,741,000	36,960,741,000	36,680,782,118	5,231,084	36,675,551,034	99.24	285,189,966
	JUMLAH BELANJA	11,820,133,400,000	11,514,469,985,000	11,283,259,064,127	4,331,995,496	11,278,927,068,631	97.99	235,542,916,369

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,550,521,156,000	1,639,044,848,000	1,605,400,790,205	195,456,478	1,605,205,333,727	97.95	33,839,514,273
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,216,000	27,523,000	23,253,975	413,021	22,840,954	84.49	4,682,046
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	134,219,640,000	121,240,323,000	115,722,944,811	27,235,889	115,695,708,922	95.45	5,544,614,078
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33,890,934,000	34,393,276,000	32,800,536,728	7,597,041	32,792,939,687	95.37	1,600,336,313
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	38,519,021,000	37,966,272,000	36,362,977,521	55,613,202	36,307,364,319	95.78	1,658,907,681
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,075,924,954,000	2,108,274,044,000	2,067,311,916,997	769,160,296	2,066,542,756,701	98.06	41,731,287,299
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	422,474,699,000	323,066,807,000	304,667,157,269	17,052,475	304,650,104,794	94.3	18,416,702,206
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81,814,294,000	87,633,830,000	85,334,892,150	8,651,928	85,326,240,222	97.38	2,307,589,778
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	618,400,000	20,260,000	20,250,000	0	20,250,000	99.95	10,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	294,358,944,000	277,501,653,000	259,057,625,188	58,595,200	258,999,029,988	93.35	18,502,623,012
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	77,300,000	78,175,000	70,725,000	0	70,725,000	90.47	7,450,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	6,627,238,000	4,819,564,000	4,704,845,000	2,640,000	4,702,205,000	97.62	117,359,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	69,000,000	68,980,000	0	0	0	0	68,980,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,795,929,000	23,032,411,000	19,359,403,630	158,696,047	19,200,707,583	84.05	3,831,703,417
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	76,430,630,000	64,638,847,000	60,163,130,312	39,000,000	60,124,130,312	93.08	4,514,716,688
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	121,262,800,000	105,212,829,000	101,780,575,000	0	101,780,575,000	96.74	3,432,254,000
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	29,000	29,000	0	0	0	0	29,000
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	13,720,000	15,680,000	13,720,000	0	13,720,000	87.5	1,960,000
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	47,724,978,000	38,763,359,000	36,616,058,457	0	36,616,058,457	94.46	2,147,300,543
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	4,347,576,000	4,454,342,000	3,484,585,254	1,952,370	3,482,632,884	78.23	971,709,116
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	105,300,000	105,300,000	70,200,000	0	70,200,000	66.67	35,100,000
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	2,748,900,000	2,951,480,000	2,937,480,000	0	2,937,480,000	99.53	14,000,000
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	42,000	42,000	39,100	0	39,100	93.1	2,900
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	274,890,000	297,248,000	283,248,000	1,260,000	281,988,000	95.29	15,260,000
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	7,056,000	9,968,000	9,828,000	0	9,828,000	98.6	140,000
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	50,760,962,000	51,633,078,000	51,626,076,000	218,562,000	51,407,514,000	99.99	225,564,000
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	12,217,324,000	12,979,028,000	12,972,014,974	0	12,972,014,974	99.95	7,013,026
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	85,176,000	106,470,000	106,457,400	217,260	106,240,140	99.99	229,860
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	6,650,000,000	4,972,800,000	4,994,000,000	33,900,833	4,960,099,167	100.43	12,700,833
512211	Belanja Uang Lembur	570,996,000	721,636,000	603,274,000	0	603,274,000	83.6	118,362,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,493,865,217,000	2,277,594,026,000	2,243,681,575,109	306,836,099	2,243,374,739,010	98.51	34,219,286,990
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**7,486,002,321,000**	**7,221,624,128,000**	**7,050,179,580,080**	**1,902,840,139**	**7,048,276,739,941**	**97.63**	**169,541,707,781**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	705,858,715,000	686,308,327,000	682,662,290,177	79,916,954	682,582,373,223	99.47	3,725,953,777
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4,200,000	4,198,500	0	4,198,500	99.96	1,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,889,758,000	20,680,439,000	19,208,557,217	2,734,580	19,205,822,637	92.88	1,474,616,363
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	47,565,864,000	46,018,756,000	44,991,209,260	5,598,000	44,985,611,260	97.77	1,033,144,740

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	42,601,285,000	195,402,349,000	193,786,930,470	70,891,165	193,716,039,305	99.17	1,686,309,695
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,357,189,000	6,594,297,000	6,402,006,203	0	6,402,006,203	97.08	192,290,797
521211	Belanja Bahan	63,932,838,000	47,241,856,000	46,230,943,537	2,153,318	46,228,790,219	97.86	1,013,065,781
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,326,184,000	752,822,000	710,691,500	0	710,691,500	94.4	42,130,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,872,100,000	4,051,682,000	3,889,771,390	0	3,889,771,390	96	161,910,610
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,409,083,000	822,962,000	737,010,584	0	737,010,584	89.56	85,951,416
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	2,225,144,000	2,145,268,269	0	2,145,268,269	96.41	79,875,731
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	212,623,000	212,522,965	0	212,522,965	99.95	100,035
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	14,292,000	14,291,250	0	14,291,250	99.99	750
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	77,891,561,000	95,213,018,000	94,581,751,218	170,000	94,581,581,218	99.34	631,436,782
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	1,000,000	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000	100	0
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2,313,458,000	542,095,000	528,238,845	0	528,238,845	97.44	13,856,155
522111	Belanja Langganan Listrik	136,308,239,000	148,941,290,000	144,791,033,728	14,317,504	144,776,716,224	97.21	4,164,573,776
522112	Belanja Langganan Telepon	9,197,125,000	4,126,928,000	3,149,034,431	590	3,149,033,841	76.3	977,894,159
522113	Belanja Langganan Air	8,767,433,000	6,983,493,000	6,154,644,308	0	6,154,644,308	88.13	828,848,692
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	659,900,000	669,290,000	667,816,940	0	667,816,940	99.78	1,473,060
522131	Belanja Jasa Konsultan	35,306,996,000	35,909,814,000	35,795,815,267	3,292,479	35,792,522,788	99.68	117,291,212
522141	Belanja Sewa	313,507,751,000	275,110,054,000	267,947,412,890	88,678,227	267,858,734,663	97.4	7,251,319,337
522151	Belanja Jasa Profesi	17,176,956,000	13,502,256,000	13,225,872,450	6,228,000	13,219,644,450	97.95	282,611,550
522191	Belanja Jasa Lainnya	37,554,998,000	78,477,666,000	78,017,474,734	39,778,390	77,977,696,344	99.41	499,969,656
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28,378,072,000	18,584,500,000	17,823,793,780	0	17,823,793,780	95.91	760,706,220
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241,790,235,000	260,290,846,000	258,578,659,020	221,712,730	258,356,946,290	99.34	1,933,899,710
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	40,136,833,000	38,839,000,000	38,599,241,271	3,225,252	38,596,016,019	99.38	242,983,981
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174,347,514,000	177,552,377,000	174,465,969,645	49,586,390	174,416,383,255	98.26	3,135,993,745
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	140,000,000	25,625,000	25,622,060	0	25,622,060	99.99	2,940
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	8,600,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	260,767,328,000	274,674,604,000	266,540,159,364	1,113,360,342	265,426,799,022	97.04	9,247,804,978
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	190,266,950,000	131,468,091,000	129,455,571,075	423,748,937	129,031,822,138	98.47	2,436,268,862
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,199,394,000	31,039,015,000	30,266,572,536	67,620,213	30,198,952,323	97.51	840,062,677
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51,894,171,000	55,738,242,000	55,096,765,542	221,525,073	54,875,240,469	98.85	863,001,531
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	11,697,229,000	5,439,061,000	5,391,002,344	16,609	5,390,985,735	99.12	48,075,265
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,487,111,000	47,500,000	45,690,541	0	45,690,541	96.19	1,809,459
	JUMLAH BELANJA BARANG	**2,575,611,870,000**	**2,663,507,044,000**	**2,622,146,363,311**	**2,414,554,753**	**2,619,731,808,558**	**98.45**	**38,946,125,936**
53	**BELANJA MODAL**							
531111	Belanja Modal Tanah	118,571,753,000	126,861,793,000	118,438,782,400	0	118,438,782,400	93.36	8,423,010,600
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	122,980,000	122,804,472	0	122,804,472	99.86	175,528
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	100	0
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	129,171,000	115,344,189	0	115,344,189	89.3	13,826,811
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529,676,952,000	646,236,834,000	644,659,817,086	1,826,000	644,657,991,086	99.76	1,578,842,914
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	23,962,000	23,962,000	0	23,962,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2022

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	485,095,000	549,258,000	545,883,500	0	545,883,500	99.39	3,374,500
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	982,698,872,000	684,258,070,000	677,715,566,706	10,075,900	677,705,490,806	99.04	6,552,579,194
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	111,012,501,000	150,036,143,000	148,897,329,768	1,290,000	148,896,039,768	99.24	1,140,103,232
534131	Belanja Modal Jaringan	0	94,457,000	94,456,560	0	94,456,560	100	440
536111	Belanja Modal Lainnya	800,000,000	1,441,600,000	1,422,743,500	0	1,422,743,500	98.69	18,856,500
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	215,000,000	183,012,000	183,011,684	0	183,011,684	100	316
	JUMLAH BELANJA MODAL	**1,743,460,173,000**	**1,609,946,280,000**	**1,592,228,701,865**	**13,191,900**	**1,592,215,509,965**	**98.9**	**17,704,386,235**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**11,805,074,364,000**	**11,495,077,452,000**	**11,264,554,645,256**	**4,330,586,792**	**11,260,224,058,464**	**97.99**	**226,192,219,952**
04	**PNBP**							
52	**BELANJA BARANG**							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	10,788,000	10,700,000	0	10,700,000	99.18	88,000
521211	Belanja Bahan	1,908,577,000	1,698,493,000	1,486,694,125	0	1,486,694,125	87.53	211,798,875
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	7,500,000	0	0	0	0	0	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	32,828,000	29,400,900	0	29,400,900	89.56	3,427,100
522151	Belanja Jasa Profesi	526,500,000	327,987,000	266,860,000	0	266,860,000	81.36	61,127,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	449,361,000	121,801,000	90,260,000	0	90,260,000	74.1	31,541,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,506,597,000	12,082,141,000	11,816,982,584	1,408,704	11,815,573,880	97.81	266,567,120
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	651,061,000	520,947,000	452,691,800	0	452,691,800	86.9	68,255,200
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	138,840,000	138,806,500	0	138,806,500	99.98	33,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,440,000	124,911,000	124,910,800	0	124,910,800	100	200
	JUMLAH BELANJA BARANG	**15,059,036,000**	**15,059,036,000**	**14,417,606,709**	**1,408,704**	**14,416,198,005**	**95.74**	**640,020,587**
	JUMLAH PNBP	**15,059,036,000**	**15,059,036,000**	**14,417,606,709**	**1,408,704**	**14,416,198,005**	**95.74**	**640,020,587**
08	**HIBAH DALAM NEGERI**							
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**100**	**0**
	JUMLAH HIBAH DALAM NEGERI	**0**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**100**	**0**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
52	**BELANJA BARANG**							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	**0**	**570,000**	**570,000**	**0**	**570,000**	**100**	**0**
53	**BELANJA MODAL**							
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	2,024,227,000	1,979,570,607	0	1,979,570,607	97.79	44,656,393
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2,139,010,000	2,136,981,555	0	2,136,981,555	99.91	2,028,445
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	4,690,000	4,690,000	0	4,690,000	100	0
536111	Belanja Modal Lainnya	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**4,182,927,000**	**4,136,242,162**	**0**	**4,136,242,162**	**98.88**	**46,684,838**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**4,183,497,000**	**4,136,812,162**	**0**	**4,136,812,162**	**98.88**	**46,684,838**
	TOTAL	**11,820,133,400,000**	**11,514,469,985,000**	**11,283,259,064,127**	**4,331,995,496**	**11,278,927,068,631**	**97.99**	**226,878,925,377**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	10,702,773,000	10,702,773,000	10,671,749,197	0	10,671,749,197	99.71	31,023,803
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	1,500,000,000	1,500,000,000	1,496,379,233	55,161,452	1,441,217,781	96.08	58,782,219
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	78,184,859,000	78,087,517,000	76,194,566,631	58,559,061	76,136,007,570	40362.78	1,951,509,430
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64,360,706,000	64,360,706,000	62,798,418,235	58,216,056	62,740,202,179	43293.08	1,620,503,821
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Serta Kesyariahan	576,960,000	576,960,000	576,655,408	429,670	576,225,738	99.87	734,262
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	5,346,991,000	5,389,551,000	5,224,170,421	2,441,428	5,221,728,993	2307.33	167,822,007
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3,493,510,000	3,536,070,000	3,438,901,107	15,951,934	3,422,949,173	3348.09	113,120,827
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	43,000,000	440,000	440,000	0	440,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	**164,251,799,000**	**164,154,457,000**	**160,401,720,232**	**190,759,601**	**160,210,960,631**	**97.714**	**3,943,496,369**
WA	Program Dukungan Manajemen							
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	22,725,828,000	40,199,973,000	39,777,248,464	288,393,763	39,488,854,701	98.23	711,118,299
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	8,572,892,000	9,188,916,000	9,158,382,201	9,969,181	9,148,413,020	99.56	40,502,980
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9,137,559,379,000	8,890,411,862,000	8,685,953,356,309	2,972,347,059	8,682,981,009,250	88595.3	207,430,852,750
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	12,956,513,000	13,067,928,000	12,200,739,878	110,922,851	12,089,817,027	92.52	978,110,973
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang	6,975,240,000	5,647,516,000	5,637,870,630	2,918,000	5,634,952,630	99.78	12,563,370
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	6,332,350,000	6,332,350,000	6,296,220,582	21,858,568	6,274,362,014	99.08	57,987,986
1070	Pelaksanaan pembinaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung	201,976,533,000	217,477,898,000	217,011,512,096	0	217,011,512,096	99.79	466,385,904

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1,730,368,565,000	1,591,118,501,000	1,573,466,693,369	13,191,900	1,573,453,501,469	90305.66	17,664,999,531
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	40,300,422,000	35,797,232,000	35,543,029,576	640,744	35,542,388,832	99.29	254,843,168
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	16,299,151,000	15,846,600,000	15,641,179,142	356,609	15,640,822,533	98.7	205,777,467
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	62,923,226,000	73,632,735,000	73,515,667,010	199,915,053	73,315,751,957	99.57	316,983,043
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	55,230,146,000	63,227,487,000	62,287,112,788	60,815,625	62,226,297,163	98.42	1,001,189,837
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	6,104,553,000	5,454,553,000	5,451,932,419	1,926,902	5,450,005,517	99.92	4,547,483
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	7,347,125,000	6,665,484,000	6,628,117,036	1,742,041	6,626,374,995	99.41	39,109,005
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	15,639,478,000	15,271,119,000	15,068,688,647	935,168	15,067,753,479	98.67	203,365,521
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5,977,429,000	5,227,429,000	5,221,696,594	626,973	5,221,069,621	99.88	6,359,379
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5,092,156,000	4,342,156,000	4,310,347,422	0	4,310,347,422	99.27	31,808,578
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	179,261,923,000	214,211,923,000	213,647,319,363	296,033,160	213,351,286,203	99.6	860,636,797
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48,127,676,000	49,147,004,000	48,904,495,820	9,700,123	48,894,795,697	99.49	252,208,303
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	39,273,817,000	39,093,817,000	38,942,027,412	9,929,479	38,932,097,933	99.59	161,719,067
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	18,428,128,000	17,547,814,000	17,499,320,903	15,678,832	17,483,642,071	99.63	64,171,929
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5,714,036,000	5,213,691,000	5,200,438,433	94,970,493	5,105,467,940	97.92	108,223,060
6628	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	10,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6629	Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	50,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	3,184,480,000	2,820,839,000	2,816,905,546	24,491,427	2,792,414,119	98.99	28,424,881
6631	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	2,366,145,000	2,318,968,000	2,318,775,357	1,443,686	2,317,331,671	99.93	1,636,329
6632	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	1,078,535,000	923,535,000	921,862,965	0	921,862,965	99.82	1,672,035

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
6633	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	946,839,000	733,665,000	731,985,062	1,019,554	730,965,508	99.63	2,699,492
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**11,640,822,565,000**	**11,330,922,995,000**	**11,104,152,925,024**	**4,139,827,191**	**11,100,013,097,833**	**97.999**	**230,909,897,167**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**11,805,074,364,000**	**11,495,077,452,000**	**11,264,554,645,256**	**4,330,586,792**	**11,260,224,058,464**	**97.995**	**234,853,393,536**
04	**PNBP**							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara	30,056,000	30,056,000	26,628,900	0	26,628,900	88.6	3,427,100
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	3,676,507,000	3,676,507,000	3,390,814,244	1,408,704	3,389,405,540	11097.58	287,101,460
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	11,177,719,000	11,177,719,000	10,847,581,673	0	10,847,581,673	19575.61	330,137,327
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	174,754,000	174,754,000	152,581,892	0	152,581,892	349.24	22,172,108
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	**15,059,036,000**	**15,059,036,000**	**14,417,606,709**	**1,408,704**	**14,416,198,005**	**95.741**	**642,837,995**
	JUMLAH BELANJA PNBP	**15,059,036,000**	**15,059,036,000**	**14,417,606,709**	**1,408,704**	**14,416,198,005**	**95.741**	**642,837,995**
08	**HIBAH DALAM NEGERI**							
WA	Program Dukungan Manajemen							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**100**	**0**
	JUMLAH BELANJA HIBAH DALAM NEGERI	**0**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**100**	**0**
10	**HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**							
WA	Program Dukungan Manajemen							
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	0	570,000	570,000	0	570,000	100	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	4,182,927,000	4,136,242,162	0	4,136,242,162	497.65	46,684,838

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2022

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 10/05/23 4:16 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**0**	**4,183,497,000**	**4,136,812,162**	**0**	**4,136,812,162**	**98.884**	**46,684,838**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	**0**	**4,183,497,000**	**4,136,812,162**	**0**	**4,136,812,162**	**98.884**	**46,684,838**
	JUMLAH	**11,820,133,400,000**	**11,514,469,985,000**	**11,283,259,064,127**	**4,331,995,496**	**11,278,927,068,631**	**97.99**	**235,542,916,369**



NERACA *(FACE)*

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak 09/05/23 2:42 PM
Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	271,770,124	151,248,877	120,521,247	79.68
Kas di Bendahara Penerimaan	4,894,000	111,492,300	(106,598,300)	(95.61)
Kas Lainnya dan Setara Kas	6,064,885,817	328,806,675	5,736,079,142	1,744.51
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	24,432,411,476	16,752,286,066	7,680,125,410	45.85
Piutang Bukan Pajak	5,493,589,931	1,506,868,229	3,986,721,702	264.57
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(27,220,491)	(7,534,341)	(19,686,150)	261.29
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	5,466,369,440	1,499,333,888	3,967,035,552	264.59
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	110,693,622	(110,693,622)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(553,468)	553,468	(100.00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	110,140,154	(110,140,154)	(100.00)
Persediaan	19,665,022,585	21,944,823,818	(2,279,801,233)	(10.39)
JUMLAH ASET LANCAR	**55,905,353,442**	**40,898,131,778**	**15,007,221,664**	**36.69**
ASET TETAP				
Tanah	19,986,074,179,582	19,805,288,980,810	180,785,198,772	0.91
Peralatan dan Mesin	4,462,524,660,536	3,808,622,153,369	653,902,507,167	17.17
Gedung dan Bangunan	10,461,107,316,949	9,582,390,434,389	878,716,882,560	9.17
Jalan, Irigasi dan Jaringan	262,312,858,137	258,176,969,852	4,135,888,285	1.60
Aset Tetap Lainnya	52,090,395,576	68,004,058,842	(15,913,663,266)	(23.40)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	656,303,651,907	617,396,614,572	38,907,037,335	6.30
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,398,139,826,271)	(4,659,713,856,206)	(738,425,970,065)	15.85
JUMLAH ASET TETAP	**30,482,273,236,416**	**29,480,165,355,628**	**1,002,107,880,788**	**3.40**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	48,752,226	51,752,226	(3,000,000)	(5.80)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(48,752,226)	(51,752,226)	3,000,000	(5.80)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	66,705,847,914	65,269,905,024	1,435,942,890	2.20
Aset Lain-lain	147,118,278,231	159,843,755,689	(12,725,477,458)	(7.96)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(180,238,260,375)	(188,038,494,197)	7,800,233,822	(4.15)
JUMLAH ASET LAINNYA	**33,585,865,770**	**37,075,166,516**	**(3,489,300,746)**	**(9.41)**
JUMLAH ASET	**30,571,764,455,628**	**29,558,138,653,922**	**1,013,625,801,706**	**3.43**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	42,970,421,804	25,691,256,213	17,279,165,591	67.26
Pendapatan Diterima Dimuka	2,831,281,278	3,076,249,032	(244,967,754)	(7.96)

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak 09/05/23 2:42 PM

lap_neraca_kl_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Uang Muka dari KPPN	271,770,124	151,248,877	120,521,247	79.68
Utang Jangka Pendek Lainnya	4,706,430	1,072,735	3,633,695	338.73
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**46,078,179,636**	**28,919,826,857**	**17,158,352,779**	**59.33**
JUMLAH KEWAJIBAN	**46,078,179,636**	**28,919,826,857**	**17,158,352,779**	**59.33**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,525,686,275,992	29,529,218,827,065	996,467,448,927	3.37
JUMLAH EKUITAS	**30,525,686,275,992**	**29,529,218,827,065**	**996,467,448,927**	**3.37**
JUMLAH EKUITAS	**30,525,686,275,992**	**29,529,218,827,065**	**996,467,448,927**	**3.37**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**30,571,764,455,628**	**29,558,138,653,922**	**1,013,625,801,706**	**3.43**

Keterangan :

BELUM FINAL



NERACA PERCOBAAN SALDO AWAI, KAS DAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Tgl. Cetak 11/05/2023
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	14,900,389	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	136,348,488	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	111,492,300	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	328,806,675	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	16,752,286,066	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	463,420,092	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,043,448,137	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	110,693,622	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	2,317,101
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	5,217,240
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	553,468
0.0	117111	Barang Konsumsi	20,889,488,455	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,055,335,363	0
0.0	131111	Tanah	19,805,288,980,810	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,808,622,153,369	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,582,390,434,389	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	36,903,172,225	0
0.0	134112	Irigasi	23,376,482,850	0
0.0	134113	Jaringan	197,897,314,777	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	18,559,040,336	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	49,445,018,506	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	617,396,614,572	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,026,372,270,835
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,527,389,549,925
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	14,728,197,277
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,480,972,181
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	85,164,476,772
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,578,389,216
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	51,752,226	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	51,752,226
0.0	162151	Software	45,027,276,908	0
0.0	162161	Lisensi	18,437,759,516	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,804,868,600	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	158,165,584,539	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,678,171,150	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	144,747,342,209
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	39,418,705,685
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	2,198,237,653

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG

Tgl. Cetak 11/05/2023
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,674,208,650
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	9,022,237,836
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	16,667,503,377
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,515,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	3,076,249,032
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	151,248,877
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	1,072,735
0.0	391111	Ekuitas	0	29,529,218,827,065
JUMLAH			**34,405,950,844,360**	**34,405,950,844,360**

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	545,471	11,278,927,614,102
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	105,590,154,119	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,888,000	20,706,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,495,799,657
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,506,979,027
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,167,908,143
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	9,837,628	0
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	10,000	10,000
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	172,160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	2,875,580,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	24,898,990,000
3.1	425239	Pengembalian Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	7,320,000	0
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,894,595,893
3.0	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1,330,840	1,330,840
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1,634	159,518,134
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	413,041	413,041
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	16,575,000
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	405,600	405,600
3.0	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	110,693,622
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,448,754,045
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	527,168,234
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	4,847,014,441
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	2,275,000	3,182,019,552
3.0	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran	340	340
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	281,795,607
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	552,000	552,000
3.1	425999	Pengembalian Pendapatan Anggaran Lain-lain	8	8
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,109,352	6,328,378
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,605,400,790,205	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	195,456,478
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,476,985,369	1,453,731,394
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,141,804	5,554,825
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	115,722,944,811	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	27,235,889
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	7,597,041
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32,800,536,728	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,362,977,521	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	55,613,202

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	769,160,296
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,067,311,916,997	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	17,052,475
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	304,667,157,269	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	85,334,892,150	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	8,651,928
3.0	511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	169,050,000	148,800,000
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	58,595,200
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	259,057,625,988	800
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70,725,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	2,640,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	4,704,845,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	158,696,047
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,359,403,630	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	60,163,130,312	0
3.1	511157	Pengembalian Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	39,000,000
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	101,780,575,000	0
3.0	511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	13,720,000	0
3.0	511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	36,616,058,457	0
3.1	511225	Pengembalian Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	44,609,747	46,562,117
3.0	511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	3,484,585,254	0
3.0	511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	70,200,000	0
3.0	511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	2,937,480,000	0
3.0	511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	39,100	0
3.0	511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	283,248,000	0
3.1	511321	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	0	1,260,000
3.0	511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	9,828,000	0
3.1	511323	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	0	218,562,000
3.0	511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	51,626,076,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	12,972,014,974	0
3.1	511325	Pengembalian Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	0	217,260
3.0	511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	106,457,400	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,994,000,000	0
3.1	511332	Pengembalian Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	33,900,833
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	603,274,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,243,681,575,109	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	306,836,099
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	1,262	79,918,216

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	682,662,290,177	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4,198,500	0
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	2,734,580
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,208,857,217	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44,991,209,260	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,002,500	6,600,500
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	70,891,165
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	193,797,630,470	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	6,402,006,203	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	321,000	2,474,318
3.0	521211	Belanja Bahan	47,717,637,662	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	710,691,500	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,889,771,390	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	737,010,584	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,145,268,269	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	212,522,965	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	14,291,250	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	94,611,722,118	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	170,000
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	2,530,000	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	528,238,845	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	144,791,033,728	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	14,317,504
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,149,034,431	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	590
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,154,644,308	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	667,816,940	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	35,795,815,267	0
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	3,292,479
3.0	522141	Belanja Sewa	267,947,412,890	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	88,678,227
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	6,228,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	13,492,732,450	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	78,017,474,734	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	39,778,390
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17,914,053,780	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	258,578,659,020	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	221,712,730

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,599,241,271	0
3.1	523119	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	3,225,252
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174,465,969,645	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	49,586,390
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	25,622,060	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	278,357,141,948	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,114,769,046
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	423,748,937
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	129,908,262,875	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	67,620,213
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,405,379,036	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	55,221,676,342	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	221,525,073
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5,391,002,344	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	16,609
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	45,690,541	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	118,438,782,400	0
3.0	531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	122,804,472	0
3.0	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	9,000,000	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	1,979,570,607	0
3.0	531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	115,344,189	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	646,946,798,641	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,802,182	4,628,182
3.0	532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	23,962,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	545,883,500	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	10,075,900
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	677,720,256,706	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	148,897,329,768	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	1,290,000
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	94,456,560	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,437,743,500	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	183,011,684	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM
Halaman : 5
lap_neraca_percobaan_kas_kl

JUMLAH	**11,390,531,317,849**	**11,390,531,317,849**

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:42 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	37,636,380	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	234,133,744	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	4,894,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	69,575,817	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	5,995,310,000	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	18,022,743,374	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	6,409,668,102	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	473,368,015	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	5,020,221,916	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	2,119,382
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	25,101,109
0.0	117111	Barang Konsumsi	18,602,549,741	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,062,329,844	0
0.0	117131	Bahan Baku	143,000	0
0.0	131111	Tanah	19,986,074,179,582	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,462,524,660,536	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,461,107,316,949	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	40,210,658,512	0
0.0	134112	Irigasi	23,980,707,438	0
0.0	134113	Jaringan	198,121,492,187	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	3,151,159,400	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	48,939,236,176	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	656,303,651,907	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,377,493,230,256
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,905,558,878,012
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	18,541,649,153
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,921,289,184
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	90,055,933,353
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	568,846,313
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	48,752,226	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	0	48,752,226
0.0	162151	Software	45,585,850,298	0
0.0	162161	Lisensi	19,315,129,016	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,804,868,600	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	145,364,364,071	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,753,914,160	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	132,294,325,766
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	42,092,126,197

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:42 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	4,100,144,252
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	1,751,664,160
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	8,718,469,347
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	34,239,146,457
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	12,805,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,831,281,278
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	271,770,124
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,706,430
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,274,640,256,469
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	105,590,154,119	0
0.0	313211	Transfer Keluar	609,346,606,825	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	607,164,620,871
0.0	391111	Ekuitas	0	29,529,218,827,065
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	737,584,260
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	97,531,352,646
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	572,089,384
0.0	391119	Koreksi Lainnya	271,426,058	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	70,284,339,793
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	1,989,293	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	18,862,402,824
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	134,596,433	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,818,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,495,799,657
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,506,979,027
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,400,868,192
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	172,160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	2,873,419,700
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	24,858,158,500
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	51,823,668,393
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	159,516,500
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	13,575,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,448,754,045
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	424,161,712
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,913,067,958
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	778,240,450
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	281,795,607
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	5,219,026

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:42 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	9,319,394,177
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	25,597,189,511
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,605,121,413,870	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	32,119,442	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115,696,561,637	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,791,729,598	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36,339,939,319	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,066,496,800,292	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	304,621,318,466	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	85,322,981,322	0
3.0	511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS	20,250,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	258,586,681,758	0
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	70,725,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4,702,333,750	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,200,272,583	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	60,134,630,312	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	101,850,575,000	0
3.0	511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	13,720,000	0
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	36,614,898,457	0
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	3,482,632,884	0
3.0	511227	Beban Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	70,200,000	0
3.0	511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	2,937,480,000	0
3.0	511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	39,100	0
3.0	511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	281,988,000	0
3.0	511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	9,828,000	0
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	51,407,514,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	12,972,014,974	0
3.0	511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	106,240,140	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,960,099,167	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	604,650,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,243,593,748,352	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	682,155,943,442	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4,198,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,309,700,389	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,988,408,178	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	207,484,539,732	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	6,369,221,562	0
3.0	521211	Beban Bahan	47,698,911,924	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:42 PM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	710,691,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,886,586,390	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	715,210,584	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,053,170,361	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	259,472,965	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	14,291,250	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	148,104,048,347	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,134,085,650	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,175,064,559	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	669,273,540	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	35,792,522,788	0
3.0	522141	Beban Sewa	265,954,372,898	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	13,486,504,450	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	81,765,071,772	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17,949,515,570	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	256,438,504,204	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,550,240,781	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173,965,518,095	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	25,622,060	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	277,854,859,883	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	129,684,270,338	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,337,758,823	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53,744,199,705	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5,390,985,735	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	45,690,541	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	374,731,496,009	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	342,302,974,181	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,344,087,296	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,399,372,403	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,873,410,143	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	176,825,087	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,392,595,231	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	1,872,274,899	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	2,562,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	1,216,953,757	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	94,286,979,901	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,302,841,563	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	20,667,012,553	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:42 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	0	199,122
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	19,885,272	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	3,000,000
3.0	594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	0	553,468
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,948,133,537	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	658,409,765	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	29,335,903,099	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	781,403,502	0
JUMLAH			**47,360,638,250,356**	**47,360,638,250,356**

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:44 PM
Halaman : 1
lap_lo_kl

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	92,741,764,356	86,793,728,206	5,948,036,150	6.853
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	92,741,764,356	86,793,728,206	5,948,036,150	6.853
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	92,741,764,356	86,793,728,206	5,948,036,150	6.853
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,048,043,385,423	6,780,962,599,442	267,080,785,981	3.939
Beban Persediaan	94,286,979,901	95,503,112,886	(1,216,132,985)	(1.273)
Beban Barang dan Jasa	1,592,628,939,888	1,301,888,339,402	290,740,600,486	22.332
Beban Pemeliharaan	478,941,136,468	373,677,670,889	105,263,465,579	28.17
Beban Perjalanan Dinas	497,057,765,025	366,131,582,680	130,926,182,345	35.759
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	733,312,551,506	619,706,020,768	113,606,530,738	18.332
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	16,132,682	(1,036,637)	17,169,319	(1,656.252)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,444,286,890,893	9,537,868,289,430	906,418,601,463	9.503
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,351,545,126,537)	(9,451,074,561,224)	(900,470,565,313)	9.528
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(25,314,306,415)	(12,793,529,466)	(12,520,776,949)	97.868
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4,021,596,684	3,824,572,872	197,023,812	5.152
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	29,335,903,099	16,618,102,338	12,717,800,761	76.53
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	18,879,008,360	3,695,057,998	15,183,950,362	410.926
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40,327,424,415	4,206,050,761	36,121,373,654	858.795
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21,448,416,055	510,992,763	20,937,423,292	4,097.401
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(6,435,298,055)	(9,098,471,468)	2,663,173,413	(29.271)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,357,980,424,592)	(9,460,173,032,692)	(897,807,391,900)	9.49
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,357,980,424,592)	(9,460,173,032,692)	(897,807,391,900)	9.49

Keterangan :

BELUM FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl Data : 09/05/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/23 2:45 PM
Halaman : 1
lap_lpe_kl

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	29,529,218,827,065	28,772,957,024,392	756,261,802,673	2.628
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,357,980,424,592)	(9,460,173,032,692)	(897,807,391,900)	9.49
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	98,435,003,799	(241,377,789,918)	339,812,793,717	(140.78)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	737,584,260	36,134,712	701,449,548	1,941.207
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(134,596,433)	(32,664,518,258)	32,529,921,825	(99.588)
SELISIH REVALUASI ASET	0	155,857,561	(155,857,561)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	98,103,442,030	(209,195,042,665)	307,298,484,695	(146.896)
LAIN-LAIN	(271,426,058)	289,778,732	(561,204,790)	(193.667)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,256,012,869,720	10,457,812,625,283	798,200,244,437	7.633
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	996,467,448,927	756,261,802,673	240,205,646,254	31.762
EKUITAS AKHIR	30,525,686,275,992	29,529,218,827,065	996,467,448,927	3.375

Keterangan :

BELUM FINAL



CALBMN, LAPORAN POSISI BMN DI NERACA, LBP INTRA, LBP EKSTRA, & LBP INTRA-EKSTRA, LAPORAN PENYUSUTAN INTRA DAN LAPORAN PENYUSUTAN EKSTRA, LBP ASET TAK BERWUJUD, LAPORAN AMORTISASI BPP ASET TAK BERWUJUD, LBP KDP, LBP BARANG BERSEJARAH, LAPORAN CRBMN INTRA-EKSTRA, DAN LAPORAN PERSEDIAAN

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERIODE LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
(AUDITED)

RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022 (AUDITED)

1. Saldo Awal

Nilai Saldo awal BMN Peroide Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) adalah sebesar Rp.33.703.077.841.551,00 (tiga puluh tiga triliun tujuh ratus tiga milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp.33.680.648.181.801,00 (tiga puluh tiga triliun enam ratus delapan puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.22.429.659.750,00 (dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara PeriodeTahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited)

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp.19.668.562.387,00 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.21.944.823.818,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan mutasi sebesar Rp.2.279.801.233,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pada periode ini terdapat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan koreksi persediaan pada Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, namun tidak bisa dilakukan koreki karena sudah ada layer persediaan 2023 yang terbentuk, adapun tindak lanjut terhadap ini adalah dengan melakukan opname fisik pada tahun anggaran 2023.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
Barang Konsumsi	20,929,831,968.00	(2,323,742,425.00)	18,606,089,543.00
Bahan untuk Pemeliharaan	998,739,855.00	63,589,989.00	1,062,329,844.00

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) seluas 8.047.595m2 dengan nilai sebesar 19.986.074.179.582,00 (sembilan belas triliun sembilan ratus delapan puluh enam milyar tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Mutasi Tanah untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
201	TANAH	8,047,595	19,986,074,179,582	8,047,595	19,986,074,179,582	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	7,583,609	19,805,288,980,810	7,583,609	19,805,288,980,810	0	0
100	Saldo Awal	26,894	169,972,021,336	26,894	169,972,021,336	0	0
101	Pembelian	213,137	54,744,936,338	213,137	54,744,936,338	0	0
102	Transfer Masuk	15,652	217,431,521,000	15,652	217,431,521,000	0	0
103	Hibah Masuk	190,455	17,659,656,646	190,455	17,659,656,646	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	17,620	64,535,458,461	17,620	64,535,458,461	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	200	83,800,000	200	83,800,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	18,266	180,555,991,650	18,266	180,555,991,650	0	0
111	Pertukaran	130	613,523,000	130	613,523,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	13,370	36,413,888,000	13,370	36,413,888,000	0	0
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	139	243,470,000	139	243,470,000	0	0
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	(1,402,963,929)	0	(1,402,963,929)	0	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	11,794,090,000	0	11,794,090,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	41,061,237,645	0	41,061,237,645	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	2,321,054,000	0	2,321,054,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(2,765,409,930)	0	(2,765,409,930)	0	0
297	Koreksi Kuantitas Tinjut Normalisasi BMN	1,403,178,004	0	1,403,178,004	0	0	0
301	Penghapusan	(200)	(83,800,000)	(200)	(83,800,000)	0	0
302	Transfer Keluar	(15,399)	(217,076,534,000)	(15,399)	(217,076,534,000)	0	0
303	Hibah Keluar	(2,164)	(5,696,251,000)	(2,164)	(5,696,251,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(30,783)	(181,555,665,650)	(30,783)	(181,555,665,650)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(196,951)	(209,093,040,724)	(196,951)	(209,093,040,724)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(455)	(374,748,000)	(455)	(374,748,000)	0	0

c. Peralatan Dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) adalah sebesar 4.486.745.933.105,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp.4.462.524.660.536,00 (empat triliun empat ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.24.221.272.569,00 (dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pada periode ini terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pengadilan Neger Kuala Kurun terkait hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah sebesar Rp1.405.000,00 namun tidak dilakukan koreksi karena akan ditatausahakan pada periode tahun anggaran 2023, terdapat temuan BPK pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk melakukan penghentian penggunaan terhadap sepeda motor yang telah hilang, namun tidak bisa dilakukan karena posisi sepeda motor tersebut sudah dihentikan penggunaan.

Mutasi Peralatan dan Mesin untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
301	ALAT BESAR	1,250	135,982,790,732	1,134	135,950,571,933		32,218,799
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1,058	118,367,845,220	1,012	118,358,387,902	46	9,457,318
100	Saldo Awal	6	4,158,646,520	6	4,158,646,520	0	0
101	Pembelian	214	9,064,836,322	126	9,026,012,339	88	38,823,983
103	Hibah Masuk	31	30,342,252	11	29,534,592	20	807,660
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11	3,276,824,770	10	3,276,012,770	1	812,000
107	Reklasifikasi Masuk	15	1,614,318,845	15	1,614,318,845	0	0
112	Perolehan Lainnya	14	507,627,750	14	507,627,750	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1	200,000,000	1	200,000,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	2	1,800,000	2	1,800,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	83,478,600	0	83,478,600	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	756,252,910	0	756,252,910	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	403,524,834	0	403,524,834	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(371,790,421)	0	(371,790,421)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(45)	(829,841,581)	(11)	(816,351,419)	(34)	(13,490,162)
305	Koreksi Pencatatan	(43)	(1,161,577,289)	(40)	(1,159,185,289)	(3)	(2,392,000)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(2)	(1,800,000)	0	0	(2)	(1,800,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(15)	(207,398,000)	(15)	(207,398,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	3	89,700,000	3	89,700,000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN	8,376	584,638,522,843	8,303	583,998,874,863		639,647,980
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	8,281	567,541,575,561	8,215	566,899,097,581	66	642,477,980
100	Saldo Awal	11	999,607,000	11	999,607,000	0	0
101	Pembelian	234	18,811,759,937	224	18,803,989,937	10	7,770,000
102	Transfer Masuk	22	3,365,553,440	22	3,365,553,440	0	0
103	Hibah Masuk	24	4,783,689,816	24	4,783,689,816	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4	14,283,360	4	14,283,360	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	5	559,616,940	5	559,616,940	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	48	1,578,551,500	9	1,570,751,500	39	7,800,000
112	Perolehan Lainnya	27	459,761,910	27	459,761,910	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	4	188,775,000	4	188,775,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	2	400,000	2	400,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	7,229,000	0	7,229,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	35,292,351	0	35,292,351	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(84,307,532)	0	(84,307,532)	0	0
301	Penghapusan	(2)	(559,474,440)	(2)	(559,474,440)	0	0
302	Transfer Keluar	(22)	(3,365,553,440)	(22)	(3,365,553,440)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(13)	(1,235,491,464)	(13)	(1,235,491,464)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(64)	(3,168,057,104)	(26)	(3,160,057,104)	(38)	(8,000,000)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(2)	(400,000)	0	0	(2)	(400,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(210)	(5,725,222,537)	(208)	(5,715,222,537)	(2)	(10,000,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	27	430,933,545	27	430,933,545	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1,174	14,102,098,484	924	14,024,473,181		77,625,303
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1,083	14,011,554,664	911	13,969,598,966	172	41,955,698
100	Saldo Awal	3	11,132,000	3	11,132,000	0	0
101	Pembelian	294	224,684,008	27	146,454,308	267	78,229,700
103	Hibah Masuk	4	11,194,747	3	10,950,000	1	244,747
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	25,000,000	1	25,000,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	8	11,268,864	2	6,857,706	6	4,411,158
112	Perolehan Lainnya	13	27,757,510	6	23,037,510	7	4,720,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	21,118,000	1	21,118,000	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1	702,000	0	0	1	702,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	5	5,000,000	0	0	5	5,000,000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	5	3,125,000	5	3,125,000	0	0

204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	1,875,000	0	1,875,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(1,875,000)	0	0	0	(1,875,000)
304	Reklasifikasi Keluar	(53)	(59,476,900)	(13)	(50,861,900)	(40)	(8,615,000)
305	Koreksi Pencatatan	(167)	(101,938,000)	(3)	(57,863,000)	(164)	(44,075,000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(5)	(5,000,000)	(5)	(5,000,000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(5)	(3,125,000)	0	0	(5)	(3,125,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(15)	(81,048,409)	(14)	(80,950,409)	(1)	(98,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1	150,000	0	0	1	150,000
304	ALAT PERTANIAN	1,620	4,851,907,195	1,074	4,827,150,936		24,756,259
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1,508	4,088,469,126	974	4,072,295,366	534	16,173,760
101	Pembelian	127	515,826,475	113	506,363,975	14	9,462,500
103	Hibah Masuk	2	8,502,500	2	8,502,500	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2	60,806,688	2	60,806,688	0	0
112	Perolehan Lainnya	5	252,134,928	4	251,534,928	1	600,000
304	Reklasifikasi Keluar	(12)	(38,457,520)	(11)	(37,577,520)	(1)	(880,000)
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(600,000)	0	0	(1)	(600,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(12)	(35,075,002)	(11)	(35,075,001)	(1)	(1)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1	300,000	1	300,000	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	536,531	1,687,584,589,303	454,525	1,667,317,231,313		20,267,357,990
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	511,263	1,522,470,818,067	438,225	1,507,287,863,358	73,038	15,182,954,709
100	Saldo Awal	1,550	8,484,608,469	1,160	8,416,376,269	390	68,232,200
101	Pembelian	23,483	116,430,014,951	14,541	111,610,371,616	8,942	4,819,643,335
102	Transfer Masuk	9,775	39,158,761,180	4,749	36,385,770,280	5,026	2,772,990,900
103	Hibah Masuk	2,481	11,183,375,612	1,694	10,953,810,350	787	229,565,262
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	794	17,176,168,188	794	17,176,168,188	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	37	32,003,314	35	31,773,314	2	230,000
107	Reklasifikasi Masuk	764	9,618,752,651	348	9,514,212,676	416	104,539,975
112	Perolehan Lainnya	4,892	58,219,242,918	4,245	57,895,930,074	647	323,312,844
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	6,355,600	2	6,355,600	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	15	14,998,000	2	6,500,000	13	8,498,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	5	8,847,000	0	0	5	8,847,000
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	305	337,919,062	177	326,137,781	128	11,781,281
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	118	79,399,362	118	79,399,362	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	22,774,519,680	0	22,774,519,680	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	533,934,320	0	487,436,600	0	46,497,720
208	Pengembangan Melalui KDP	0	1,807,104,790	0	1,807,104,790	0	0
214	Koreksi Susulan	0	3,996,000	0	3,996,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(4,996,827,092)	0	(4,990,755,408)	0	(6,071,684)
301	Penghapusan	(127)	(359,773,560)	(119)	(358,373,560)	(8)	(1,400,000)
302	Transfer Keluar	(9,775)	(39,158,761,180)	(4,749)	(36,385,770,280)	(5,026)	(2,772,990,900)
304	Reklasifikasi Keluar	(216)	(5,840,036,342)	(182)	(5,827,420,391)	(34)	(12,615,951)
305	Koreksi Pencatatan	(1,650)	(50,672,617,280)	(770)	(50,411,836,394)	(880)	(260,780,886)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1)	(2,000,000)	(1)	(2,000,000)	0	0
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(5)	(8,847,000)	(5)	(8,847,000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(118)	(79,399,362)	0	0	(118)	(79,399,362)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(7,806)	(20,664,734,668)	(6,397)	(20,474,155,609)	(1,409)	(190,579,059)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	745	1,026,766,623	658	1,012,664,017	87	14,102,606
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	34,102	338,641,484,619	28,577	337,407,081,108		1,234,403,511
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	30,334	256,335,319,995	25,316	255,369,179,965	5,018	966,140,030
100	Saldo Awal	241	1,491,384,966	121	1,468,355,224	120	23,029,742
101	Pembelian	3,899	79,292,516,750	3,538	79,063,850,210	361	228,666,540
102	Transfer Masuk	2,828	38,039,274,920	2,828	38,039,274,920	0	0
103	Hibah Masuk	159	1,059,811,981	113	1,047,532,017	46	12,279,964
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	50	2,292,698,338	21	2,274,010,800	29	18,687,538
106	Pembatalan Penghapusan	4	5,591,410	4	5,591,410	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	57	1,581,097,619	53	1,578,273,729	4	2,823,890
112	Perolehan Lainnya	124	2,344,419,180	103	2,328,422,629	21	15,996,551

115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	8	1,814,600	0	0	8	1,814,600
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	1	1,440,000	0	0	1	1,440,000
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	4	2,196,000	4	2,196,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	2	1,200,000	2	1,200,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	391,710,347	0	391,710,347	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	119,945,257	0	119,945,257	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	286,927,325	0	286,927,325	0	0
214	Koreksi Susulan	0	36,975,785	0	36,975,785	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(191,767,300)	0	(191,007,300)	0	(760,000)
301	Penghapusan	(11)	(64,750,000)	(11)	(64,750,000)	0	0
302	Transfer Keluar	(2,828)	(38,039,274,920)	(2,828)	(38,039,274,920)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(29)	(1,504,801,300)	(21)	(1,496,961,300)	(8)	(7,840,000)
305	Koreksi Pencatatan	(138)	(2,616,534,288)	(110)	(2,599,277,954)	(28)	(17,256,334)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(1)	(1,440,000)	(1)	(1,440,000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(2)	(1,200,000)	0	0	(2)	(1,200,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(631)	(2,285,351,354)	(579)	(2,273,975,344)	(52)	(11,376,010)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	31	62,279,308	24	60,322,308	7	1,957,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6,520	12,464,213,369	2,623	12,047,973,207		416,240,162
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	5,190	10,479,587,817	1,596	10,217,194,084	3,594	262,393,733
100	Saldo Awal	9	23,915,000	6	23,075,000	3	840,000
101	Pembelian	790	1,828,288,446	519	1,679,240,486	271	149,047,960
102	Transfer Masuk	1	1,870,000	1	1,870,000	0	0
103	Hibah Masuk	41	58,650,000	22	49,050,000	19	9,600,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	561	3,470,255,346	556	3,468,609,371	5	1,645,975
107	Reklasifikasi Masuk	101	175,771,491	66	163,394,550	35	12,376,941
112	Perolehan Lainnya	55	122,182,324	25	107,986,771	30	14,195,553
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	1,116,500	0	1,116,500	0	0
302	Transfer Keluar	(1)	(1,870,000)	(1)	(1,870,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(183)	(3,135,437,055)	(133)	(3,105,302,055)	(50)	(30,135,000)
305	Koreksi Pencatatan	(13)	(73,827,000)	(4)	(71,077,000)	(9)	(2,750,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(31)	(486,289,500)	(30)	(485,314,500)	(1)	(975,000)
308	ALAT LABORATORIUM	3,147	23,512,735,254	2,324	23,399,046,118		113,689,136
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	2,184	13,986,682,389	1,458	13,899,945,241	726	86,737,148
100	Saldo Awal	90	885,359,300	90	885,359,300	0	0
101	Pembelian	1,575	18,020,656,354	1,479	17,989,944,837	96	30,711,517
102	Transfer Masuk	12	39,111,100	12	39,111,100	0	0
103	Hibah Masuk	72	525,579,897	54	521,046,729	18	4,533,168
105	Penyelesaian Pembangunan	18	21,669,420	6	15,249,180	12	6,420,240
107	Reklasifikasi Masuk	9	171,497,000	6	168,500,000	3	2,997,000
112	Perolehan Lainnya	45	298,392,967	38	294,342,967	7	4,050,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	107,931,090	0	107,931,090	0	0
209	Koreksi Manual	0	680,000	0	680,000	0	0
214	Koreksi Susulan	0	200,000	0	200,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(58,570,000)	0	(58,570,000)	0	0
302	Transfer Keluar	(12)	(39,111,100)	(12)	(39,111,100)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(623)	(7,342,308,873)	(590)	(7,322,788,936)	(33)	(19,519,937)
305	Koreksi Pencatatan	(210)	(2,760,692,832)	(204)	(2,758,452,832)	(6)	(2,240,000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(3)	(227,000,000)	(3)	(227,000,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(15)	(121,871,000)	(15)	(121,871,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	5	4,529,542	5	4,529,542	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN	633	9,369,299,409	328	9,321,580,509		47,718,900
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	486	8,699,079,732	282	8,682,685,532	204	16,394,200
100	Saldo Awal	12	10,510,200	0	0	12	10,510,200
101	Pembelian	181	1,103,414,959	112	1,078,479,820	69	24,935,139
103	Hibah Masuk	68	128,893,426	18	122,393,426	50	6,500,000
107	Reklasifikasi Masuk	1	815,000	0	0	1	815,000
112	Perolehan Lainnya	2	1,319,985	1	1,174,510	1	145,475
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	41,910,000	0	41,910,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	45,000	0	45,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(78)	(535,306,731)	(48)	(523,903,817)	(30)	(11,402,914)
305	Koreksi Pencatatan	(37)	(47,760,012)	(36)	(47,715,012)	(1)	(45,000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1)	(133,200)	0	0	(1)	(133,200)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1)	(33,488,950)	(1)	(33,488,950)	0	0
310	KOMPUTER	111,144	1,636,304,799,380	108,276	1,635,053,964,287		1,250,835,093

000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	93,909	1,285,889,556,466	91,553	1,285,010,592,596	2,356	878,963,870
100	Saldo Awal	318	2,756,512,690	252	2,747,629,690	66	8,883,000
101	Pembelian	10,139	236,759,317,924	9,699	236,411,279,911	440	348,038,013
102	Transfer Masuk	11,962	231,837,799,668	11,952	231,828,499,668	10	9,300,000
103	Hibah Masuk	407	10,022,971,697	370	9,997,879,097	37	25,092,600
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	62	1,348,533,466	61	1,347,833,466	1	700,000
106	Pembatalan Penghapusan	41	227,244,684	39	226,763,527	2	481,157
107	Reklasifikasi Masuk	838	10,526,965,899	829	10,524,375,899	9	2,590,000
112	Perolehan Lainnya	10,952	220,840,990,592	10,924	220,819,060,592	28	21,930,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	12	161,988,000	12	161,988,000	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	9	33,591,000	2	27,000,000	7	6,591,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	9	26,482,500	0	0	9	26,482,500
193	Batal Transfer Keluar	192	2,843,040,000	192	2,843,040,000	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	34	195,999,729	34	195,999,729	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	464,840,000	0	464,840,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	3,674,504,414	0	3,674,504,414	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	21,721,528,000	0	21,721,528,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(3,655,041,590)	0	(3,636,071,590)	0	(18,970,000)
301	Penghapusan	(89)	(820,477,278)	(89)	(820,477,278)	0	0
302	Transfer Keluar	(12,154)	(234,680,839,668)	(12,144)	(234,671,539,668)	(10)	(9,300,000)
304	Reklasifikasi Keluar	(254)	(3,542,092,152)	(253)	(3,541,412,152)	(1)	(680,000)
305	Koreksi Pencatatan	(3,777)	(140,470,070,270)	(3,728)	(140,458,634,380)	(49)	(11,435,890)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(9)	(26,482,500)	(9)	(26,482,500)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1,572)	(11,058,777,149)	(1,535)	(11,020,945,992)	(37)	(37,831,157)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	115	1,226,713,258	115	1,226,713,258	0	0
311	ALAT EKSPLORASI	19	312,027,029	14	311,807,029		220,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	17	303,177,029	12	302,957,029	5	220,000
100	Saldo Awal	1	3,850,000	1	3,850,000	0	0
101	Pembelian	4	21,125,000	4	21,125,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(16,125,000)	(3)	(16,125,000)	0	0
312	ALAT PENGEBORAN	17	59,690,000	9	56,290,000		3,400,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	2	5,050,000	2	5,050,000	0	0
101	Pembelian	15	54,640,000	7	51,240,000	8	3,400,000
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	33	392,040,059	31	391,446,059		594,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	33	392,040,059	31	391,446,059	2	594,000
101	Pembelian	1	845,000	0	0	1	845,000
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(845,000)	0	0	(1)	(845,000)
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	18	17,655,000	18	17,655,000		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	18	17,655,000	18	17,655,000	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	1,150	30,832,921,328	1,107	30,804,739,163		28,182,165
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	871	22,243,181,811	864	22,242,456,535	7	725,276
100	Saldo Awal	77	648,184,260	57	630,184,260	20	18,000,000
101	Pembelian	201	7,355,946,687	183	7,345,319,798	18	10,626,889
103	Hibah Masuk	38	246,587,000	38	246,587,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	56,562,270	1	56,562,270	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	2	380,867,000	2	380,867,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	3	275,724,298	2	275,174,298	1	550,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	12,400,000	1	12,400,000	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1	166,400,000	1	166,400,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	480,253,000	0	480,253,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	595,050,000	0	595,050,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(46)	(1,180,013,000)	(44)	(1,179,013,000)	(2)	(1,000,000)
305	Koreksi Pencatatan	(5)	(395,807,000)	(4)	(395,087,000)	(1)	(720,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(61,965,000)	(3)	(61,965,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	9	9,550,002	9	9,550,002	0	0
316	ALAT PERAGA	88	321,269,384	45	297,828,145		23,441,239
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	37	269,223,527	26	264,699,827	11	4,523,700
101	Pembelian	46	46,847,092	17	30,076,450	29	16,770,642
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2	2,985,868	2	2,985,868	0	0

112	Perolehan Lainnya	6	4,389,897	0	0	6	4,389,897
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	66,000	0	66,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(2,243,000)	0	0	(3)	(2,243,000)
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	79	592,485,124	54	585,008,789		7,476,335
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	76	475,162,819	52	468,636,484	24	6,526,335
101	Pembelian	1	950,000	0	0	1	950,000
112	Perolehan Lainnya	3	116,575,305	3	116,575,305	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(203,000)	(1)	(203,000)	0	0
318	RAMBU - RAMBU	1,131	5,709,588,068	21	5,659,063,168		50,524,900
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1,166	5,649,264,118	18	5,616,454,618	1,148	32,809,500
101	Pembelian	329	325,667,551	11	276,907,151	318	48,760,400
112	Perolehan Lainnya	1	2,371,750	1	2,371,750	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(283)	(38,306,711)	(3)	(8,306,711)	(280)	(30,000,000)
305	Koreksi Pencatatan	(5)	(228,343,640)	(5)	(228,343,640)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(77)	(1,065,000)	(1)	(20,000)	(76)	(1,045,000)
319	PERALATAN OLAH RAGA	177	1,055,816,525	160	1,052,875,728		2,940,797
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	175	1,002,680,773	157	999,564,976	18	3,115,797
100	Saldo Awal	1	1,750,000	1	1,750,000	0	0
101	Pembelian	3	51,434,752	3	51,434,752	0	0
112	Perolehan Lainnya	1	2,676,000	1	2,676,000	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(2,725,000)	(2)	(2,550,000)	(1)	(175,000)

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) adalah sebesar 10.463.926.058.564,00 (sepuluh triliun empat ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp.10.461.107.316.949,00 (sepuluh triliun empat ratus enam puluh satu milyar seratus tujuh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.2.818.741.615,00 (dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pada periode ini terdapat kurang catat Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebesar Rp.31.727.099.924,00 yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak bisa dilakukan koreksi karena sudah dilakukan koreksi pada tahun anggaran 2023, terdapat temuan BPK terhadap Pengadilan Tatausaha Negara Bandar Lampung untuk melakukan reklasifikasi dari jalan dan jembatan kepada gedung dan bangunan yang tidak bisa dilakukan koreksi pada periode ini karena sudah dilakukan koreksi pada periode 13 2022.

Mutasi Gedung dan Bangunan untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL &		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
401	BANGUNAN GEDUNG	8,198	10,240,083,771,532	8,047	10,237,492,353,357		2,591,418,175
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	8,013	9,374,382,990,577	7,886	9,372,080,546,485	127	2,302,444,092
100	Saldo Awal	47	63,332,790,523	32	63,094,131,327	15	238,659,196
101	Pembelian	557	31,503,614,749	168	30,490,749,979	389	1,012,864,770
102	Transfer Masuk	12	76,861,540,996	12	76,861,540,996	0	0
103	Hibah Masuk	86	37,078,641,633	77	36,966,361,033	9	112,280,600
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	72	482,524,775,568	43	482,380,680,890	29	144,094,678
106	Pembatalan Penghapusan	5	463,702,000	5	463,702,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	64	71,773,217,451	60	71,727,032,451	4	46,185,000
111	Pertukaran	1	230,629,000	1	230,629,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	16	39,441,728,748	7	39,321,002,248	9	120,726,500
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	46	1,759,108,390	17	1,544,978,390	29	214,130,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	1	24,120,500	0	0	1	24,120,500
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	4	598,331,000	4	598,331,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	7	23,476,506	7	23,476,506	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	10,963,957,326	0	10,963,957,326	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	169,114,559,765	0	169,114,559,765	0	0
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	6,348,283,254	0	6,348,283,254	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	304,708,209,444	0	304,708,209,444	0	0
209	Koreksi Manual	0	224,763,994	0	224,763,994	0	0
214	Koreksi Susulan	0	1,926,256,792	0	1,926,256,792	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(37,886,238,718)	0	(37,867,806,218)	0	(18,432,500)
301	Penghapusan	(5)	(2,740,245,220)	(5)	(2,740,245,220)	0	0
302	Transfer Keluar	(14)	(77,196,015,996)	(14)	(77,196,015,996)	0	0
303	Hibah Keluar	(2)	(930,813,000)	(2)	(930,813,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(56)	(71,373,294,643)	(52)	(71,238,258,917)	(4)	(135,035,726)
305	Koreksi Pencatatan	(623)	(220,850,769,801)	(174)	(219,409,627,372)	(449)	(1,441,142,429)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(1)	(24,120,500)	(1)	(24,120,500)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(7)	(23,476,506)	0	0	(7)	(23,476,506)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(33)	(26,013,038,800)	(32)	(26,007,038,800)	(1)	(6,000,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	8	3,837,086,500	8	3,837,086,500	0	0
402	MONUMEN	5	427,688,953	2	418,676,000		9,012,953
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	5	427,688,953	2	418,676,000	3	9,012,953
403	BANGUNAN MENARA	8	2,322,448,084	8	2,322,448,084		0

000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	8	2,263,954,500	8	2,263,954,500	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	58,493,584	0	58,493,584	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	767	221,092,149,995	738	220,873,839,508		218,310,487
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	746	202,345,724,191	717	202,127,413,704	29	218,310,487
100	Saldo Awal	5	727,077,885	3	726,006,885	2	1,071,000
101	Pembelian	64	2,671,800,485	21	2,497,517,022	43	174,283,463
103	Hibah Masuk	4	1,219,523,000	4	1,219,523,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11	17,665,401,405	8	17,655,289,405	3	10,112,000
107	Reklasifikasi Masuk	10	878,554,052	2	774,607,052	8	103,947,000
112	Perolehan Lainnya	2	925,169,090	2	925,169,090	0	0
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	4	90,073,000	2	75,313,000	2	14,760,000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	2	5,648,000	0	0	2	5,648,000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	7	72,031,000	7	72,031,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	85,692,000	0	85,692,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	4,240,951,366	0	4,240,951,366	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	1,119,455,500	0	1,119,455,500	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(4,706,434,932)	0	(4,706,434,932)	0	0
301	Penghapusan	(1)	(353,905,000)	(1)	(353,905,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(13,801,740)	0	0	(2)	(13,801,740)
305	Koreksi Pencatatan	(76)	(5,520,286,307)	(25)	(5,296,297,584)	(51)	(223,988,723)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	(7)	(72,031,000)	0	0	(7)	(72,031,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(344,204,000)	(3)	(344,204,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1	55,712,000	1	55,712,000	0	0

e. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 40.210.658.512,00 (empat puluh milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah).

Mutasi Jalan dan Jembatan untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL &		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
501	JALAN DAN JEMBATAN	139,624	40,210,658,512	139,624	40,210,658,512	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	137,312	36,903,172,225	137,312	36,903,172,225	0	0
101	Pembelian	1	29,820,675	1	29,820,675	0	0
103	Hibah Masuk	405	311,687,534	405	311,687,534	0	0
112	Perolehan Lainnya	5	2,461,444,990	5	2,461,444,990	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	256	81,737,000	256	81,737,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	169,903,263	0	169,903,263	0	0
297	Koreksi Kuantitas Tinjut Normalisasi BMN	696	0	696	0	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(29,820,675)	(1)	(29,820,675)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1)	(375,163,000)	(1)	(375,163,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	951	657,876,500	951	657,876,500	0	0

f. Irigasi

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 23.980.707.438,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Mutasi Irigasi untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
502	BANGUNAN AIR	277	23,980,707,438	277	23,980,707,438		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	276	23,376,482,850	276	23,376,482,850	0	0
101	Pembelian	1	1,250,000	1	1,250,000	0	0
103	Hibah Masuk	1	90,988,000	1	90,988,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	1	114,947,500	1	114,947,500	0	0
112	Perolehan Lainnya	1	513,236,588	1	513,236,588	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	90,988,000	0	90,988,000	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(2)	(92,238,000)	(2)	(92,238,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1)	(114,947,500)	(1)	(114,947,500)	0	0

g. Jaringan

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 198.121.492.187,00 (seratus sembilan puluh delapan milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Mutasi Jaringan untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI

1	2	3	4	5	6	7	8
503	INSTALASI	608	141,773,529,051	608	141,773,529,051		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	615	141,565,843,051	615	141,565,843,051	0	0
100	Saldo Awal	1	6,526,000	1	6,526,000	0	0
101	Pembelian	5	351,603,950	5	351,603,950	0	0
103	Hibah Masuk	1	235,530,000	1	235,530,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(190,800,000)	(2)	(190,800,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(3)	(160,803,950)	(3)	(160,803,950)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(9)	(34,370,000)	(9)	(34,370,000)	0	0
504	JARINGAN	740	56,347,963,136	740	56,347,963,136		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	716	56,331,471,726	716	56,331,471,726	0	0
100	Saldo Awal	16	30,858,050	16	30,858,050	0	0
101	Pembelian	21	1,356,769,677	21	1,356,769,677	0	0
103	Hibah Masuk	3	17,691,400	3	17,691,400	0	0
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	3	182,050,915	3	182,050,915	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	59,715,000	0	59,715,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	180,653,400	0	180,653,400	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(17,500,000)	0	(17,500,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(4)	(362,396,850)	(4)	(362,396,850)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(14)	(1,406,391,182)	(14)	(1,406,391,182)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1)	(24,959,000)	(1)	(24,959,000)	0	0

h. Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 3.151.159.400,00 (tiga milyar seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Mutasi Aset Tetap Renovasi untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5	3,151,159,400	5	3,151,159,400		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	47	18,559,040,336	47	18,559,040,336	0	0
101	Pembelian	31	5,987,328,385	31	5,987,328,385	0	0
102	Transfer Masuk	1	356,475,247	1	356,475,247	0	0
103	Hibah Masuk	3	689,214,027	3	689,214,027	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	1	30,000,000	1	30,000,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	3	5,668,780,100	3	5,668,780,100	0	0
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	5	605,147,255	5	605,147,255	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(172,900,000)	0	(172,900,000)	0	0
302	Transfer Keluar	(6)	(8,696,931,454)	(6)	(8,696,931,454)	0	0
303	Hibah Keluar	(38)	(1,416,203,925)	(38)	(1,416,203,925)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(92,393,510)	(3)	(92,393,510)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(40)	(18,509,397,061)	(40)	(18,509,397,061)	0	0
955	Perolehan Lainnya Aset Tetap Renovasi	1	143,000,000	1	143,000,000	0	0

i. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 49.144.176.970,00 (empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Mutasi Aset Tetap Lainnya untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	1,074,988	46,043,998,042	1,074,940	46,043,950,042		48,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1,082,084	46,670,595,711	1,082,036	46,670,547,711	48	48,000
100	Saldo Awal	2	4,400,000	2	4,400,000	0	0
101	Pembelian	136	245,213,423	136	245,213,423	0	0
102	Transfer Masuk	100	198,924,000	100	198,924,000	0	0
103	Hibah Masuk	600	59,940,000	600	59,940,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	4	23,670,320	4	23,670,320	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	12	2,645,000	12	2,645,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	16	106,241,500	16	106,241,500	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	1	38,750	1	38,750	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	35,000	0	35,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(2,161,362)	0	(2,161,362)	0	0
301	Penghapusan	(359)	(292,042,250)	(359)	(292,042,250)	0	0
302	Transfer Keluar	(100)	(198,924,000)	(100)	(198,924,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(6)	(10,976,000)	(6)	(10,976,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(50)	(50)	(50)	(50)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(7,452)	(763,602,000)	(7,452)	(763,602,000)	0	0
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1,565	2,904,470,179	1,359	2,895,286,134		9,184,045
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1,378	2,829,890,790	1,172	2,820,706,745	206	9,184,045

101	Pembelian	376	39,247,000	376	39,247,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	7	69,512,389	7	69,512,389	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	17	4,559,000	17	4,559,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	600,000	0	600,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0	(250,000)	0	(250,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	(200)	(29,919,000)	(200)	(29,919,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13)	(9,170,000)	(13)	(9,170,000)	0	0
605	TANAMAN	3,353	195,708,749	0	0		195,708,749
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	3,351	181,417,499	0	0	3,351	181,417,499
101	Pembelian	2	14,291,250	0	0	2	14,291,250

i. Konstruksi Dalam Pekerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 656.303.651.907,00 (enam ratus lima puluh enam milyar tiga ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

Pada periode ini terdapat lebih catat KDP pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebesar Rp.31.727.099.924,00 yang merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak bisa dilakukan koreksi karena sudah dilakukan koreksi pada tahun anggaran 2023, terdapat temuan BPK pada PA Rumbia, Pa Lasusua, PN Ujung Pandang dan PN Mamuju terhadap pengembangan KDP yang masih diakui sebagai belanja dibayar dimuka namun tdak dilakukan koreksi sesuai dengan kesepakatan yang dibahas dengan Kementerian Keuangan bahwa hal tersebut dilakukan pada saat pembangunan sudah selesai dengan didukung dokumen Berita Acara Serah Terima 100%.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL &		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
701	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	(11,863)	656,303,651,907	(11,863)	656,303,651,907		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	146	617,396,614,572	146	617,396,614,572	0	0
501	Saldo Awal KDP	1	22,658,798,266	1	22,658,798,266	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	1,420	258,341,073,280	1,420	258,341,073,280	0	0
503	Pengembangan KDP	0	692,009,459,651	0	692,009,459,651	0	0
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0	132,442,463,821	0	132,442,463,821	0	0
505	Penghapusan/Penghentian KDP	(140)	(73,417,633,497)	(140)	(73,417,633,497)	0	0
508	Hibah Masuk KDP	1	169,250,000	1	169,250,000	0	0
510	Perolehan Lainnya KDP	430	140,493,641,528	430	140,493,641,528	0	0
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(7)	(4,175,414,220)	(7)	(4,175,414,220)	0	0
514	Reklasifikasi Masuk KDP	362	4,175,414,220	362	4,175,414,220	0	0
517	Koreksi Pencatatan KDP	(519)	(192,949,525,025)	(519)	(192,949,525,025)	0	0
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0	(16,001,263,648)	0	(16,001,263,648)	0	0
579	Normalisasi KDP	0	(5,642,394,497)	0	(5,642,394,497)	0	0
597	Perolehan Tinjut Normalisasi KDP	1	5,642,394,497	1	5,642,394,497	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(13,558)	(924,839,227,041)	(13,558)	(924,839,227,041)	0	0

j. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 68.459.762.074,00 (enam puluh delapan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).

Mutasi Aset Tak Berwujud untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

KODE	URAIAN	NILAI
1	2	3
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	65.269.905.024,00
101	Pembelian	1.129.816.500,00
100	Saldo Awal	743.898.650,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	219.320.625,00
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	206.864.684,00
112	Perolehan Lainnya	202.400.000,00
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	51.865.000,00
103	Hibah Masuk	49.692.500,00
106	Pembatalan Penghapusan	47.190.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	34.650.000,00
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.552.159,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(34.650.000,00)
305	Koreksi Pencatatan	(108.780.000,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1.104.772.910,00)

k. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 146.761.997.875,00 (seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut :

JENIS TRANSAKSI		GABUNGAN INTRAKOMPTABEL & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
201	TANAH	840	268,783,000	840	268,783,000		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	600	4,000,000	600	4,000,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	455	374,748,000	455	374,748,000	0	0

301	Penghapusan	(215)	(109,965,000)	(215)	(109,965,000)	0	0
301	ALAT BESAR	68	2,230,548,480	68	2,230,548,480		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	75	2,691,315,025	75	2,691,315,025	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(3)	(89,700,000)	(3)	(89,700,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15	207,398,000	15	207,398,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(24)	(1,034,759,545)	(24)	(1,034,759,545)	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	5	456,295,000	5	456,295,000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN	579	11,846,197,705	573	11,801,092,705		45,105,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	581	9,863,458,217	576	9,828,256,717	5	35,201,500
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(27)	(430,933,545)	(27)	(430,933,545)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	210	5,725,222,537	208	5,715,222,537	2	10,000,000
301	Penghapusan	(6)	(129,391,000)	(6)	(129,391,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(184)	(3,243,718,504)	(183)	(3,243,622,004)	(1)	(96,500)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	5	61,560,000	5	61,560,000	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	64	177,766,270	46	176,252,270		1,514,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	70	198,943,410	48	196,815,410	22	2,128,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(1)	(150,000)	0	0	(1)	(150,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15	81,048,409	14	80,950,409	1	98,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(23)	(102,212,549)	(19)	(101,650,549)	(4)	(562,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	3	137,000	3	137,000	0	0
304	ALAT PERTANIAN	79	240,370,763	76	240,070,762		300,001
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	71	208,795,761	69	208,495,761	2	300,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(1)	(300,000)	(1)	(300,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	12	35,075,002	11	35,075,001	1	1
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(3)	(3,200,000)	(3)	(3,200,000)	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	47,483	55,987,917,144	38,478	54,808,045,863		1,179,871,281
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	55,253	53,059,975,989	44,911	51,699,548,693	10,342	1,360,427,296
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(745)	(1,026,766,623)	(658)	(1,012,664,017)	(87)	(14,102,606)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	7,806	20,664,734,668	6,397	20,474,155,609	1,409	190,579,059
299	Normalisasi BMN	(5)	(600,000)	0	0	(5)	(600,000)
301	Penghapusan	(533)	(309,135,880)	(431)	(290,763,021)	(102)	(18,372,859)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(15,459)	(17,927,807,248)	(12,594)	(17,529,588,659)	(2,865)	(398,218,589)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1,166	1,527,516,238	853	1,467,357,258	313	60,158,980
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2,067	5,127,449,987	1,787	5,084,511,182		42,938,805
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	2,150	14,506,376,319	1,831	14,456,224,524	319	50,151,795
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(31)	(62,279,308)	(24)	(60,322,308)	(7)	(1,957,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	631	2,285,351,354	579	2,273,975,344	52	11,376,010
301	Penghapusan	(43)	(82,152,874)	(43)	(82,152,874)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(728)	(11,694,058,822)	(640)	(11,677,077,822)	(88)	(16,981,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	88	174,213,318	84	173,864,318	4	349,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	123	820,138,167	122	820,128,167		10,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	108	900,313,667	107	900,303,667	1	10,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	31	486,289,500	30	485,314,500	1	975,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(16)	(566,465,000)	(15)	(565,490,000)	(1)	(975,000)
308	ALAT LABORATORIUM	76	435,835,898	76	435,835,898		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	138	561,494,485	131	560,518,790	7	975,695
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(5)	(4,529,542)	(5)	(4,529,542)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15	121,871,000	15	121,871,000	0	0
301	Penghapusan	(19)	(22,915,030)	(19)	(22,915,030)	0	0

911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(55)	(230,945,015)	(48)	(229,969,320)	(7)	(975,695)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	2	10,860,000	2	10,860,000	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN	5	48,914,951	5	48,914,951		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	4	15,426,001	4	15,426,001	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	33,488,950	1	33,488,950	0	0
310	KOMPUTER	6,929	47,261,176,375	6,735	47,150,611,658		110,564,717
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	8,057	54,991,641,281	7,783	54,900,634,947	274	91,006,334
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(115)	(1,226,713,258)	(115)	(1,226,713,258)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1,572	11,058,777,149	1,535	11,020,945,992	37	37,831,157
301	Penghapusan	(68)	(300,607,500)	(68)	(300,607,500)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(2,812)	(18,888,934,679)	(2,667)	(18,853,950,009)	(145)	(34,984,670)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	295	1,627,013,382	267	1,610,301,486	28	16,711,896
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1	3,500,000	1	3,500,000		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	7	99,105,000	7	99,105,000		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	14	59,670,002	14	59,670,002	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(9)	(9,550,002)	(9)	(9,550,002)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	61,965,000	3	61,965,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1)	(12,980,000)	(1)	(12,980,000)	0	0
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	11	37,619,650	10	37,344,650		275,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	13	43,718,650	12	43,443,650	1	275,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(2)	(6,099,000)	(2)	(6,099,000)	0	0
318	RAMBU - RAMBU	78	1,565,000	2	520,000		1,045,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1	500,000	1	500,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	77	1,065,000	1	20,000	76	1,045,000
319	PERALATAN OLAH RAGA	34	19,875,924	30	19,115,924		760,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	39	25,302,875	34	23,948,875	5	1,354,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	2,725,000	2	2,550,000	1	175,000
301	Penghapusan	(1)	(175,000)	0	0	(1)	(175,000)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(8)	(11,276,951)	(7)	(10,682,951)	(1)	(594,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	1	3,300,000	1	3,300,000	0	0
401	BANGUNAN GEDUNG	109	20,128,609,781	106	20,118,789,781		9,820,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	124	20,130,582,281	121	20,120,762,281	3	9,820,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(8)	(3,837,086,500)	(8)	(3,837,086,500)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	33	26,013,038,800	32	26,007,038,800	1	6,000,000
301	Penghapusan	(1)	(159,200,000)	(1)	(159,200,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(39)	(22,018,724,800)	(38)	(22,012,724,800)	(1)	(6,000,000)
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	5	174,379,000	3	169,979,000		4,400,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	7	336,057,000	5	331,657,000	2	4,400,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(1)	(55,712,000)	(1)	(55,712,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	344,204,000	3	344,204,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(4)	(450,170,000)	(4)	(450,170,000)	0	0
501	JALAN DAN JEMBATAN	357	62,900,000	357	62,900,000		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	1,308	720,776,500	1,308	720,776,500	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(951)	(657,876,500)	(951)	(657,876,500)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	375,163,000	1	375,163,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1)	(375,163,000)	(1)	(375,163,000)	0	0
502	BANGUNAN AIR	2	22,145,001	2	22,145,001		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	2	22,145,001	2	22,145,001	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	114,947,500	1	114,947,500	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(1)	(114,947,500)	(1)	(114,947,500)	0	0
503	INSTALASI	14	112,510,600	14	112,510,600		0

000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	12	107,460,600	12	107,460,600	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	9	34,370,000	9	34,370,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(7)	(29,320,000)	(7)	(29,320,000)	0	0
504	JARINGAN	20	183,896,895	20	183,896,895		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	35	210,896,895	35	210,896,895	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	24,959,000	1	24,959,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(16)	(51,959,000)	(16)	(51,959,000)	0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	25,774	1,441,598,439	25,774	1,441,598,439		0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	31,318	1,032,289,355	31,318	1,032,289,355	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	7,452	763,602,000	7,452	763,602,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(13,010)	(439,681,916)	(13,010)	(439,681,916)	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	14	85,389,000	14	85,389,000	0	0
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	179	29,193,845	162	28,163,845		1,030,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	183	28,024,845	166	26,994,845	17	1,030,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	13	9,170,000	13	9,170,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(17)	(8,001,000)	(17)	(8,001,000)	0	0

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2022

Tgl.Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:51 AM

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	18,602,549,741
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,062,329,844
117131	Bahan Baku	143,000
131111	Tanah	19,986,074,179,582
132111	Peralatan dan Mesin	4,462,524,660,536
133111	Gedung dan Bangunan	10,461,107,316,949
134111	Jalan dan Jembatan	40,210,658,512
134112	Irigasi	23,980,707,438
134113	Jaringan	198,121,492,187
135111	Aset Tetap Renovasi	3,151,159,400
135121	Aset Tetap Lainnya	48,939,236,176
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	656,303,651,907
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,377,493,230,256)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,905,558,878,012)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(18,541,649,153)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(5,921,289,184)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(90,055,933,353)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(568,846,313)
162151	Software	45,585,850,298
162161	Lisensi	19,315,129,016
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1,804,868,600
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	145,364,364,071
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,753,914,160
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(132,294,325,766)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(42,092,126,197)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(4,100,144,252)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(1,751,664,160)
J U M L A H		**30,535,524,124,771**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**7,583,609**	**19,805,288,980,810**	**1,403,916,443**	**797,430,648,076**	**1,403,452,457**	**616,645,449,304**	**8,047,595**	**19,986,074,179,582**
20101	TANAH PERSIL	7,480,170	19,646,655,500,973	1,403,904,861	789,737,868,326	1,403,448,965	615,602,038,304	7,936,066	19,820,791,330,995
20102	TANAH NON PERSIL	102,616	157,292,976,837	10,570	6,929,409,000	2,516	328,844,000	110,670	163,893,541,837
20103	LAPANGAN	823	1,340,503,000	1,012	763,370,750	976	714,567,000	859	1,389,306,750
132111	**Peralatan dan Mesin**	**570,722**	**3,814,075,761,119**	**73,893**	**1,239,380,546,466**	**35,068**	**590,931,647,049**	**609,547**	**4,462,524,660,536**
30101	ALAT BESAR DARAT	4	23,000,000	13	64,713,000	0	0	17	87,713,000
30103	ALAT BANTU	1,008	118,335,387,902	175	20,082,196,160	66	2,554,725,129	1,117	135,862,858,933
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7,524	565,506,371,483	166	30,482,559,640	240	14,031,170,088	7,450	581,957,761,035
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	691	1,392,726,098	193	737,324,159	31	88,936,429	853	2,041,113,828
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	71	10,284,570,111	17	105,855,510	3	87,878,500	85	10,302,547,121
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	351	812,592,433	22	106,234,014	16	75,920,529	357	842,905,918
30303	ALAT UKUR	489	2,872,436,422	9	37,460,000	16	30,876,280	482	2,879,020,142
30401	ALAT PENGOLAHAN	974	4,072,295,366	122	827,508,091	22	72,652,521	1,074	4,827,150,936
30501	ALAT KANTOR	91,548	476,223,479,551	3,556	33,699,194,998	1,922	10,582,557,317	93,182	499,340,117,232
30502	ALAT RUMAH TANGGA	346,677	1,031,064,383,807	24,967	244,789,331,599	10,301	107,876,601,325	361,343	1,167,977,114,081
30601	ALAT STUDIO	15,598	135,337,358,138	6,480	84,733,185,299	3,096	39,374,593,209	18,982	180,695,950,228
30602	ALAT KOMUNIKASI	8,734	44,212,843,866	181	6,900,753,008	424	829,168,609	8,491	50,284,428,265
30603	PERALATAN PEMANCAR	973	75,696,102,961	148	35,058,501,713	30	4,462,925,000	1,091	106,291,679,674
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	11	122,875,000	2	12,147,941	0	0	13	135,022,941
30701	ALAT KEDOKTERAN	1,495	9,065,533,564	1,133	5,084,961,067	141	3,152,012,660	2,487	10,998,481,971
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	101	1,151,660,520	62	409,381,611	27	511,550,895	136	1,049,491,236
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,107	10,209,642,335	1,519	18,725,627,930	757	9,983,297,718	1,869	18,951,972,547
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	18	164,686,616	4	232,138,000	2	219,890,000	20	176,934,616
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	281	1,387,454,872	161	744,460,315	64	320,447,650	378	1,811,467,537
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	8	565,130,300	1	198,678,900	1	4,158,500	8	759,650,700
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	11	44,618,878	0	0	0	0	11	44,618,878
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	1,465,493,240	2	21,559,600	0	0	17	1,487,052,840
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	18	62,919,000	3	104,430,000	0	0	21	167,349,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	60	6,831,645,579	10	219,042,200	0	0	70	7,050,687,779
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	222	1,851,039,953	121	1,024,960,556	85	605,107,779	258	2,270,892,730
31001	KOMPUTER UNIT	54,776	673,325,597,039	26,971	522,429,395,419	14,065	308,653,436,453	67,682	887,101,556,005
31002	PERALATAN KOMPUTER	36,777	611,684,995,557	7,510	221,789,539,832	3,693	85,522,127,107	40,594	747,952,408,282
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	4,576,920	2	9,975,000	1	6,125,000	3	8,426,920
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	298,380,109	3	15,000,000	2	10,000,000	11	303,380,109
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	2	5,050,000	7	51,240,000	0	0	9	56,290,000
31301	SUMUR	17	384,987,059	0	0	0	0	17	384,987,059
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	14	6,459,000	0	0	0	0	14	6,459,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18	17,655,000	0	0	0	0	18	17,655,000
31501	ALAT DETEKSI	4	1,500,000	2	146,520,000	0	0	6	148,020,000
31502	ALAT PELINDUNG	9	3,290,450	0	0	0	0	9	3,290,450
31503	ALAT SAR	16	1,523,614,700	3	9,471,650	0	0	19	1,533,086,350
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	835	20,714,051,385	289	10,042,355,978	51	1,636,065,000	1,073	29,120,342,363
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	26	264,699,827	19	33,128,318	0	0	45	297,828,145
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	52	468,636,484	3	116,575,305	1	203,000	54	585,008,789
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	18	5,616,454,618	12	279,278,901	9	236,670,351	21	5,659,063,168
31901	PERALATAN OLAH RAGA	157	999,564,976	5	55,860,752	2	2,550,000	160	1,052,875,728
133111	**Gedung dan Bangunan**	**8,613**	**9,576,890,590,689**	**491**	**1,330,331,493,799**	**309**	**446,114,767,539**	**8,795**	**10,461,107,316,949**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3,205	8,233,616,627,555	356	1,204,138,029,737	210	393,288,271,398	3,351	9,044,466,385,894
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,681	1,138,463,918,930	85	96,687,703,158	70	42,125,654,625	4,696	1,193,025,967,463
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	2	418,676,000	0	0	0	0	2	418,676,000
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	8	2,263,954,500	0	58,493,584	0	0	8	2,322,448,084
40401	TUGU/TANDA BATAS	717	202,127,413,704	50	29,447,267,320	29	10,700,841,516	738	220,873,839,508
134111	**Jalan dan Jembatan**	**137,312**	**36,903,172,225**	**2,314**	**3,712,469,962**	**2**	**404,983,675**	**139,624**	**40,210,658,512**
50101	JALAN	137,129	33,698,791,225	2,310	2,765,680,862	2	404,983,675	139,437	36,059,488,412
50102	JEMBATAN	183	3,204,381,000	4	946,789,100	0	0	187	4,151,170,100
134112	**Irigasi**	**276**	**23,376,482,850**	**4**	**811,410,088**	**3**	**207,185,500**	**277**	**23,980,707,438**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	23	2,095,568,000	1	1,250,000	1	1,250,000	23	2,095,568,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	236,461,000	1	513,236,588	0	0	3	749,697,588
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	3	54,719,000	0	0	0	0	3	54,719,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	15	3,858,632,681	1	181,976,000	1	90,988,000	15	3,949,620,681
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	92	6,407,606,112	0	0	0	0	92	6,407,606,112
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	100	5,744,456,057	1	114,947,500	1	114,947,500	100	5,744,456,057
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	41	4,979,040,000	0	0	0	0	41	4,979,040,000
134113	**Jaringan**	**1,331**	**197,897,314,777**	**50**	**2,421,398,392**	**33**	**2,197,220,982**	**1,348**	**198,121,492,187**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	83	13,159,509,383	0	0	0	0	83	13,159,509,383
50302	INSTALASI AIR KOTOR	30	4,609,393,349	0	0	0	0	30	4,609,393,349
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3	590,680,659	0	0	0	0	3	590,680,659
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	11	377,496,350	0	0	0	0	11	377,496,350
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	138	78,518,327,921	3	523,027,950	2	287,497,950	139	78,753,857,921
50307	INSTALASI PERTAHANAN	10	74,886,000	0	0	0	0	10	74,886,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	26	401,902,915	1	25,405,000	1	25,405,000	26	401,902,915
50310	INSTALASI LAIN	314	43,833,646,474	3	45,227,000	11	73,071,000	306	43,805,802,474
50401	JARINGAN AIR MINUM	24	1,253,088,349	2	7,833,200	0	0	26	1,260,921,549

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50402	JARINGAN LISTRIK	360	42,780,822,112	40	1,617,401,842	19	1,793,747,032	381	42,604,476,922
50403	JARINGAN TELEPON	331	8,752,270,265	0	180,653,400	0	17,500,000	331	8,915,423,665
50404	JARINGAN GAS	1	3,545,291,000	1	21,850,000	0	0	2	3,567,141,000
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**47**	**18,559,040,336**	**45**	**13,479,945,014**	**87**	**28,887,825,950**	**5**	**3,151,159,400**
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	19,995,000	0	0	1	19,995,000	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	44	15,929,761,336	44	13,449,945,014	85	28,837,830,950	3	541,875,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	2,609,284,000	1	30,000,000	1	30,000,000	2	2,609,284,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,083,208**	**49,491,254,456**	**1,271**	**755,026,382**	**8,180**	**1,307,044,662**	**1,076,299**	**48,939,236,176**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,081,285	36,655,834,733	856	535,965,073	7,962	1,266,829,661	1,074,179	35,924,970,145
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	39	7,882,158,519	0	0	1	1	38	7,882,158,518
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	712	2,132,554,459	15	105,142,920	4	876,000	723	2,236,821,379
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	454	2,273,650,917	8	5,150,000	6	8,440,000	456	2,270,360,917
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	203	500,819,878	383	108,759,389	205	30,419,000	381	579,160,267
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	515	46,235,950	9	9,000	2	480,000	522	45,764,950
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi**	**89,164**	**158,165,584,539**	**18,012**	**72,430,198,704**	**31,882**	**85,231,419,172**	**75,294**	**145,364,364,071**
20101	TANAH PERSIL	600	4,000,000	455	374,748,000	215	109,965,000	840	268,783,000
30101	ALAT BESAR DARAT	2	10,096,244	0	0	1	9,996,244	1	100,000
30103	ALAT BANTU	73	2,681,218,781	20	663,693,000	26	1,114,463,301	67	2,230,448,480
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	550	9,190,890,517	190	5,773,129,537	208	3,799,705,549	532	11,164,314,505
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	24	13,961,200	23	3,653,000	8	4,241,000	39	13,373,200
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2	623,405,000	0	0	0	0	2	623,405,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	4,906,000	1	65,760,500	3	70,666,500	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	23	87,535,370	10	11,153,379	12	19,704,049	21	78,984,700
30303	ALAT UKUR	23	104,374,040	6	4,173,530	4	11,280,000	25	97,267,570
30401	ALAT PENGOLAHAN	69	208,495,761	11	35,075,001	4	3,500,000	76	240,070,762
30501	ALAT KANTOR	11,052	17,566,808,883	1,708	4,385,837,542	3,322	5,430,844,216	9,438	16,521,802,209
30502	ALAT RUMAH TANGGA	33,859	34,132,739,810	5,542	17,555,675,325	10,361	13,402,171,481	29,040	38,286,243,654
30601	ALAT STUDIO	736	10,910,625,886	273	1,008,349,507	306	9,967,595,300	703	1,951,380,093
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,022	2,183,106,029	375	716,343,355	376	967,945,904	1,021	1,931,503,480
30603	PERALATAN PEMANCAR	73	1,362,492,609	15	723,146,800	25	884,011,800	63	1,201,627,609
30701	ALAT KEDOKTERAN	105	831,002,667	6	14,762,000	15	565,490,000	96	280,274,667
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2	69,301,000	24	470,552,500	0	0	26	539,853,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	103	474,571,040	9	10,691,000	64	202,883,892	48	282,378,148
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	25	77,112,750	8	122,040,000	7	53,045,000	26	146,107,750
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1	350,000	0	0	0	0	1	350,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	2	8,485,000	0	0	1	1,485,000	1	7,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	4,426,001	0	0	0	0	3	4,426,001

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	11,000,000	1	33,488,950	0	0	2	44,488,950
31001	KOMPUTER UNIT	4,587	47,245,201,696	990	10,423,159,267	1,686	17,530,548,795	3,891	40,137,812,168
31002	PERALATAN KOMPUTER	3,196	7,655,433,251	812	2,208,088,211	1,164	2,850,721,972	2,844	7,012,799,490
31301	SUMUR	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	14	59,670,002	3	61,965,000	10	22,530,002	7	99,105,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	12	43,443,650	0	0	2	6,099,000	10	37,344,650
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	500,000	1	20,000	0	0	2	520,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	34	23,948,875	3	5,850,000	7	10,682,951	30	19,115,924
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	48	13,080,526,371	27	25,042,579,800	28	23,019,144,300	47	15,103,961,871
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	73	7,040,235,910	5	964,459,000	19	2,989,867,000	59	5,014,827,910
40401	TUGU/TANDA BATAS	5	331,657,000	3	344,204,000	5	505,882,000	3	169,979,000
50101	JALAN	1,308	720,776,500	1	375,163,000	952	1,033,039,500	357	62,900,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	2	22,145,001	1	114,947,500	1	114,947,500	2	22,145,001
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	57,632,000	0	0	0	0	2	57,632,000
50310	INSTALASI LAIN	9	44,828,600	9	34,370,000	7	29,320,000	11	49,878,600
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	144,010	0	0	0	0	1	144,010
50402	JARINGAN LISTRIK	1	64,205,595	1	24,959,000	1	24,959,000	1	64,205,595
50403	JARINGAN TELEPON	33	146,547,290	0	0	15	27,000,000	18	119,547,290
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	31,298	912,193,856	7,466	848,991,000	13,009	439,605,416	25,755	1,321,579,440
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	2	350,000	0	0	0	0	2	350,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	18	119,745,499	0	0	1	76,500	17	119,668,999
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	3	23,411,805	6	8,190,000	2	7,900,000	7	23,701,805
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	35	1,248,000	5	500,000	15	101,000	25	1,647,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	128	2,335,040	2	480,000	0	0	130	2,815,040
TOTAL			**33,680,648,181,801**		**3,460,753,136,883**		**1,771,927,543,833**		**35,369,473,774,851**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	**Peralatan dan Mesin**	**86,969**	**18,152,163,054**	**19,144**	**9,708,175,962**	**8,451**	**3,639,066,447**	**97,662**	**24,221,272,569**
30101	ALAT BESAR DARAT	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
30103	ALAT BANTU	45	9,307,318	109	40,443,643	39	17,682,162	115	32,068,799
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	51	634,841,700	1	600,000	3	10,600,000	49	624,841,700
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	15	7,636,280	48	14,970,000	39	7,800,000	24	14,806,280
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	1,323,500	28	10,898,000	0	0	34	12,221,500
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	146	27,751,198	225	67,703,865	209	56,973,000	162	38,482,063
30303	ALAT UKUR	20	12,881,000	35	14,855,740	1	815,000	54	26,921,740
30401	ALAT PENGOLAHAN	534	16,173,760	15	10,062,500	3	1,480,001	546	24,756,259
30501	ALAT KANTOR	19,478	2,654,899,581	1,429	440,028,834	786	115,536,980	20,121	2,979,391,435
30502	ALAT RUMAH TANGGA	53,560	12,528,055,128	15,014	7,968,212,289	6,689	3,208,300,862	61,885	17,287,966,555
30601	ALAT STUDIO	2,561	538,364,650	379	211,750,177	25	15,313,584	2,915	734,801,243
30602	ALAT KOMUNIKASI	2,308	413,811,091	171	70,409,598	33	4,420,010	2,446	479,800,679
30603	PERALATAN PEMANCAR	149	13,964,289	47	24,536,050	32	18,698,750	164	19,801,589
30701	ALAT KEDOKTERAN	3,536	238,940,883	274	157,136,751	47	29,791,000	3,763	366,286,634
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	58	23,452,850	89	30,569,678	13	4,069,000	134	49,953,528
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	693	77,222,107	101	30,833,685	25	17,570,897	769	90,484,895
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	6	450,000	23	8,700,240	10	1,480,000	19	7,670,240
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	24	7,952,001	12	9,178,000	3	1,846,000	33	15,284,001
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2	963,040	0	0	1	863,040	1	100,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	13	1,235,000	3	733,200	1	133,200	15	1,835,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	191	15,159,200	130	42,172,614	31	11,447,914	290	45,883,900
31001	KOMPUTER UNIT	272	292,603,706	27	10,312,957	30	32,813,957	269	270,102,706
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,084	586,360,164	582	439,775,313	67	45,403,090	2,599	980,732,387
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5	220,000	0	0	0	0	5	220,000
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	8	3,400,000	0	0	8	3,400,000
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2	594,000	1	845,000	1	845,000	2	594,000
31502	ALAT PELINDUNG	6	675,276	0	0	0	0	6	675,276
31503	ALAT SAR	1	50,000	6	2,065,445	0	0	7	2,115,445
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	33	27,111,444	3	1,720,000	30	25,391,444
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	11	4,523,700	35	21,160,539	3	2,243,000	43	23,441,239
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	24	6,526,335	1	950,000	0	0	25	7,476,335
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	948	26,809,500	318	48,760,400	356	31,045,000	910	44,524,900
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	200	6,000,000	0	0	0	0	200	6,000,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	18	3,115,797	0	0	1	175,000	17	2,940,797
133111	**Gedung dan Bangunan**	**159**	**2,529,767,532**	**545**	**2,222,882,707**	**521**	**1,933,908,624**	**183**	**2,818,741,615**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	111	1,633,080,566	371	1,511,863,947	351	1,260,189,864	131	1,884,754,649
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	16	669,363,526	114	401,197,297	110	363,897,297	20	706,663,526
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	3	9,012,953	0	0	0	0	3	9,012,953
40401	TUGU/TANDA BATAS	29	218,310,487	60	309,821,463	60	309,821,463	29	218,310,487
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**3,605**	**190,649,544**	**2**	**14,291,250**	**0**	**0**	**3,607**	**204,940,794**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	48	48,000	0	0	0	0	48	48,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	286,000	0	0	0	0	1	286,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	11	522,000	0	0	0	0	11	522,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	194	8,376,045	0	0	0	0	194	8,376,045
60501	TANAMAN	3,351	181,417,499	2	14,291,250	0	0	3,353	195,708,749
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan**	**11,000**	**1,557,079,620**	**1,926**	**335,299,103**	**3,316**	**494,744,919**	**9,610**	**1,397,633,804**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	35,105,000	2	10,000,000	0	0	6	45,105,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	96,500	0	0	1	96,500	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	18	1,678,000	1	98,000	5	712,000	14	1,064,000
30303	ALAT UKUR	4	450,000	0	0	0	0	4	450,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	2	300,000	1	1	0	0	3	300,001
30501	ALAT KANTOR	2,012	238,181,456	508	59,128,464	578	70,738,803	1,942	226,571,117
30502	ALAT RUMAH TANGGA	8,330	1,122,245,840	1,214	191,609,575	2,481	360,555,251	7,063	953,300,164
30601	ALAT STUDIO	52	10,185,200	12	4,196,000	23	5,693,000	41	8,688,200
30602	ALAT KOMUNIKASI	263	39,443,795	37	4,769,010	69	10,965,000	231	33,247,805
30603	PERALATAN PEMANCAR	4	522,800	7	2,760,000	3	2,280,000	8	1,002,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	10,000	1	975,000	1	975,000	1	10,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	851,967	0	0	6	851,967	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	123,728	0	0	1	123,728	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	39	60,713,832	15	40,526,157	19	22,649,314	35	78,590,675
31002	PERALATAN KOMPUTER	235	30,292,502	50	14,016,896	126	12,335,356	159	31,974,042
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	275,000	0	0	0	0	1	275,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	76	1,045,000	0	0	76	1,045,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	5	1,354,000	1	175,000	2	769,000	4	760,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	9,620,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	9,620,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	200,000	0	0	0	0	2	200,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	2	4,400,000	0	0	0	0	2	4,400,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	17	1,030,000	0	0	0	0	17	1,030,000
TOTAL			**22,429,659,750**		**12,280,649,022**		**6,067,719,990**		**28,642,588,782**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	**Tanah**	**7,583,609**	**19,805,288,980,810**	**1,403,916,443**	**797,430,648,076**	**1,403,452,457**	**616,645,449,304**	**8,047,595**	**19,986,074,179,582**
20101	TANAH PERSIL	7,480,170	19,646,655,500,973	1,403,904,861	789,737,868,326	1,403,448,965	615,602,038,304	7,936,066	19,820,791,330,995
20102	TANAH NON PERSIL	102,616	157,292,976,837	10,570	6,929,409,000	2,516	328,844,000	110,670	163,893,541,837
20103	LAPANGAN	823	1,340,503,000	1,012	763,370,750	976	714,567,000	859	1,389,306,750
132111	**Peralatan dan Mesin**	**657,691**	**3,832,227,924,173**	**93,037**	**1,249,088,722,428**	**43,519**	**594,570,713,496**	**707,209**	**4,486,745,933,105**
30101	ALAT BESAR DARAT	5	23,150,000	13	64,713,000	0	0	18	87,863,000
30103	ALAT BANTU	1,053	118,344,695,220	284	20,122,639,803	105	2,572,407,291	1,232	135,894,927,732
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7,575	566,141,213,183	167	30,483,159,640	243	14,041,770,088	7,499	582,582,602,735
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	706	1,400,362,378	241	752,294,159	70	96,736,429	877	2,055,920,108
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	77	10,285,893,611	45	116,753,510	3	87,878,500	119	10,314,768,621
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	497	840,343,631	247	173,937,879	225	132,893,529	519	881,387,981
30303	ALAT UKUR	509	2,885,317,422	44	52,315,740	17	31,691,280	536	2,905,941,882
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,508	4,088,469,126	137	837,570,591	25	74,132,522	1,620	4,851,907,195
30501	ALAT KANTOR	111,026	478,878,379,132	4,985	34,139,223,832	2,708	10,698,094,297	113,303	502,319,508,667
30502	ALAT RUMAH TANGGA	400,237	1,043,592,438,935	39,981	252,757,543,888	16,990	111,084,902,187	423,228	1,185,265,080,636
30601	ALAT STUDIO	18,159	135,875,722,788	6,859	84,944,935,476	3,121	39,389,906,793	21,897	181,430,751,471
30602	ALAT KOMUNIKASI	11,042	44,626,654,957	352	6,971,162,606	457	833,588,619	10,937	50,764,228,944
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,122	75,710,067,250	195	35,083,037,763	62	4,481,623,750	1,255	106,311,481,263
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	11	122,875,000	2	12,147,941	0	0	13	135,022,941
30701	ALAT KEDOKTERAN	5,031	9,304,474,447	1,407	5,242,097,818	188	3,181,803,660	6,250	11,364,768,605
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	159	1,175,113,370	151	439,951,289	40	515,619,895	270	1,099,444,764
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,800	10,286,864,442	1,620	18,756,461,615	782	10,000,868,615	2,638	19,042,457,442
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	24	165,136,616	27	240,838,240	12	221,370,000	39	184,604,856
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	305	1,395,406,873	173	753,638,315	67	322,293,650	411	1,826,751,538
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	8	565,130,300	1	198,678,900	1	4,158,500	8	759,650,700
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	11	44,618,878	0	0	0	0	11	44,618,878
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	16	1,465,643,240	2	21,559,600	0	0	18	1,487,202,840
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	20	63,882,040	3	104,430,000	1	863,040	22	167,449,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	73	6,832,880,579	13	219,775,400	1	133,200	85	7,052,522,779
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	413	1,866,199,153	251	1,067,133,170	116	616,555,693	548	2,316,776,630
31001	KOMPUTER UNIT	55,048	673,618,200,745	26,998	522,439,708,376	14,095	308,686,250,410	67,951	887,371,658,711
31002	PERALATAN KOMPUTER	38,861	612,271,355,721	8,092	222,229,315,145	3,760	85,567,530,197	43,193	748,933,140,669
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	4,576,920	2	9,975,000	1	6,125,000	3	8,426,920
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	15	298,600,109	3	15,000,000	2	10,000,000	16	303,600,109
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	2	5,050,000	15	54,640,000	0	0	17	59,690,000
31301	SUMUR	17	384,987,059	0	0	0	0	17	384,987,059
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	16	7,053,000	1	845,000	1	845,000	16	7,053,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18	17,655,000	0	0	0	0	18	17,655,000
31501	ALAT DETEKSI	4	1,500,000	2	146,520,000	0	0	6	148,020,000
31502	ALAT PELINDUNG	15	3,965,726	0	0	0	0	15	3,965,726
31503	ALAT SAR	17	1,523,664,700	9	11,537,095	0	0	26	1,535,201,795
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	835	20,714,051,385	322	10,069,467,422	54	1,637,785,000	1,103	29,145,733,807
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	37	269,223,527	54	54,288,857	3	2,243,000	88	321,269,384
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	76	475,162,819	4	117,525,305	1	203,000	79	592,485,124
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	966	5,643,264,118	330	328,039,301	365	267,715,351	931	5,703,588,068
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	200	6,000,000	0	0	0	0	200	6,000,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	175	1,002,680,773	5	55,860,752	3	2,725,000	177	1,055,816,525
133111	**Gedung dan Bangunan**	**8,772**	**9,579,420,358,221**	**1,036**	**1,332,554,376,506**	**830**	**448,048,676,163**	**8,978**	**10,463,926,058,564**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3,316	8,235,249,708,121	727	1,205,649,893,684	561	394,548,461,262	3,482	9,046,351,140,543
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,697	1,139,133,282,456	199	97,088,900,455	180	42,489,551,922	4,716	1,193,732,630,989
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	427,688,953	0	0	0	0	5	427,688,953
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	8	2,263,954,500	0	58,493,584	0	0	8	2,322,448,084
40401	TUGU/TANDA BATAS	746	202,345,724,191	110	29,757,088,783	89	11,010,662,979	767	221,092,149,995
134111	**Jalan dan Jembatan**	**137,312**	**36,903,172,225**	**2,314**	**3,712,469,962**	**2**	**404,983,675**	**139,624**	**40,210,658,512**
50101	JALAN	137,129	33,698,791,225	2,310	2,765,680,862	2	404,983,675	139,437	36,059,488,412
50102	JEMBATAN	183	3,204,381,000	4	946,789,100	0	0	187	4,151,170,100
134112	**Irigasi**	**276**	**23,376,482,850**	**4**	**811,410,088**	**3**	**207,185,500**	**277**	**23,980,707,438**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	23	2,095,568,000	1	1,250,000	1	1,250,000	23	2,095,568,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	236,461,000	1	513,236,588	0	0	3	749,697,588
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	3	54,719,000	0	0	0	0	3	54,719,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	15	3,858,632,681	1	181,976,000	1	90,988,000	15	3,949,620,681
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	92	6,407,606,112	0	0	0	0	92	6,407,606,112
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	100	5,744,456,057	1	114,947,500	1	114,947,500	100	5,744,456,057
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	41	4,979,040,000	0	0	0	0	41	4,979,040,000
134113	**Jaringan**	**1,331**	**197,897,314,777**	**50**	**2,421,398,392**	**33**	**2,197,220,982**	**1,348**	**198,121,492,187**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	83	13,159,509,383	0	0	0	0	83	13,159,509,383
50302	INSTALASI AIR KOTOR	30	4,609,393,349	0	0	0	0	30	4,609,393,349
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3	590,680,659	0	0	0	0	3	590,680,659
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	11	377,496,350	0	0	0	0	11	377,496,350
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	138	78,518,327,921	3	523,027,950	2	287,497,950	139	78,753,857,921
50307	INSTALASI PERTAHANAN	10	74,886,000	0	0	0	0	10	74,886,000
50309	INSTALASI PENGAMAN	26	401,902,915	1	25,405,000	1	25,405,000	26	401,902,915
50310	INSTALASI LAIN	314	43,833,646,474	3	45,227,000	11	73,071,000	306	43,805,802,474

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50401	JARINGAN AIR MINUM	24	1,253,088,349	2	7,833,200	0	0	26	1,260,921,549
50402	JARINGAN LISTRIK	360	42,780,822,112	40	1,617,401,842	19	1,793,747,032	381	42,604,476,922
50403	JARINGAN TELEPON	331	8,752,270,265	0	180,653,400	0	17,500,000	331	8,915,423,665
50404	JARINGAN GAS	1	3,545,291,000	1	21,850,000	0	0	2	3,567,141,000
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**47**	**18,559,040,336**	**45**	**13,479,945,014**	**87**	**28,887,825,950**	**5**	**3,151,159,400**
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	19,995,000	0	0	1	19,995,000	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	44	15,929,761,336	44	13,449,945,014	85	28,837,830,950	3	541,875,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	2,609,284,000	1	30,000,000	1	30,000,000	2	2,609,284,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,086,813**	**49,681,904,000**	**1,273**	**769,317,632**	**8,180**	**1,307,044,662**	**1,079,906**	**49,144,176,970**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,081,333	36,655,882,733	856	535,965,073	7,962	1,266,829,661	1,074,227	35,925,018,145
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	39	7,882,158,519	0	0	1	1	38	7,882,158,518
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	712	2,132,554,459	15	105,142,920	4	876,000	723	2,236,821,379
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	455	2,273,936,917	8	5,150,000	6	8,440,000	457	2,270,646,917
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	214	501,341,878	383	108,759,389	205	30,419,000	392	579,682,267
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	709	54,611,995	9	9,000	2	480,000	716	54,140,995
60501	TANAMAN	3,351	181,417,499	2	14,291,250	0	0	3,353	195,708,749
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan**	**100,164**	**159,722,664,159**	**19,938**	**72,765,497,807**	**35,198**	**85,726,164,091**	**84,904**	**146,761,997,875**
20101	TANAH PERSIL	600	4,000,000	455	374,748,000	215	109,965,000	840	268,783,000
30101	ALAT BESAR DARAT	2	10,096,244	0	0	1	9,996,244	1	100,000
30103	ALAT BANTU	73	2,681,218,781	20	663,693,000	26	1,114,463,301	67	2,230,448,480
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	554	9,225,995,517	192	5,783,129,537	208	3,799,705,549	538	11,209,419,505
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	25	14,057,700	23	3,653,000	9	4,337,500	39	13,373,200
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2	623,405,000	0	0	0	0	2	623,405,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	4,906,000	1	65,760,500	3	70,666,500	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	41	89,213,370	11	11,251,379	17	20,416,049	35	80,048,700
30303	ALAT UKUR	27	104,824,040	6	4,173,530	4	11,280,000	29	97,717,570
30401	ALAT PENGOLAHAN	71	208,795,761	12	35,075,002	4	3,500,000	79	240,370,763
30501	ALAT KANTOR	13,064	17,804,990,339	2,216	4,444,966,006	3,900	5,501,583,019	11,380	16,748,373,326
30502	ALAT RUMAH TANGGA	42,189	35,254,985,650	6,756	17,747,284,900	12,842	13,762,726,732	36,103	39,239,543,818
30601	ALAT STUDIO	788	10,920,811,086	285	1,012,545,507	329	9,973,288,300	744	1,960,068,293
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,285	2,222,549,824	412	721,112,365	445	978,910,904	1,252	1,964,751,285
30603	PERALATAN PEMANCAR	77	1,363,015,409	22	725,906,800	28	886,291,800	71	1,202,630,409
30701	ALAT KEDOKTERAN	106	831,012,667	7	15,737,000	16	566,465,000	97	280,284,667
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	2	69,301,000	24	470,552,500	0	0	26	539,853,500
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	109	475,423,007	9	10,691,000	70	203,735,859	48	282,378,148
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	26	77,236,478	8	122,040,000	8	53,168,728	26	146,107,750
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1	350,000	0	0	0	0	1	350,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	2	8,485,000	0	0	1	1,485,000	1	7,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	4,426,001	0	0	0	0	3	4,426,001
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	11,000,000	1	33,488,950	0	0	2	44,488,950
31001	KOMPUTER UNIT	4,626	47,305,915,528	1,005	10,463,685,424	1,705	17,553,198,109	3,926	40,216,402,843
31002	PERALATAN KOMPUTER	3,431	7,685,725,753	862	2,222,105,107	1,290	2,863,057,328	3,003	7,044,773,532
31301	SUMUR	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	14	59,670,002	3	61,965,000	10	22,530,002	7	99,105,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	13	43,718,650	0	0	2	6,099,000	11	37,619,650
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	500,000	77	1,065,000	0	0	78	1,565,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	39	25,302,875	4	6,025,000	9	11,451,951	34	19,875,924
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	49	13,090,146,371	28	25,048,579,800	29	23,025,144,300	48	15,113,581,871
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	75	7,040,435,910	5	964,459,000	19	2,989,867,000	61	5,015,027,910
40401	TUGU/TANDA BATAS	7	336,057,000	3	344,204,000	5	505,882,000	5	174,379,000
50101	JALAN	1,308	720,776,500	1	375,163,000	952	1,033,039,500	357	62,900,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	2	22,145,001	1	114,947,500	1	114,947,500	2	22,145,001
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	57,632,000	0	0	0	0	2	57,632,000
50310	INSTALASI LAIN	9	44,828,600	9	34,370,000	7	29,320,000	11	49,878,600
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	144,010	0	0	0	0	1	144,010
50402	JARINGAN LISTRIK	1	64,205,595	1	24,959,000	1	24,959,000	1	64,205,595
50403	JARINGAN TELEPON	33	146,547,290	0	0	15	27,000,000	18	119,547,290
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	31,298	912,193,856	7,466	848,991,000	13,009	439,605,416	25,755	1,321,579,440
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	2	350,000	0	0	0	0	2	350,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	18	119,745,499	0	0	1	76,500	17	119,668,999
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	3	23,411,805	6	8,190,000	2	7,900,000	7	23,701,805
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	35	1,248,000	5	500,000	15	101,000	25	1,647,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	145	3,365,040	2	480,000	0	0	147	3,845,040
TOTAL			**33,703,077,841,551**		**3,473,033,785,905**		**1,777,995,263,823**		**35,398,116,363,633**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:54 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
131111	**Tanah**	**8,047,595**	**19,986,074,179,582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,986,074,179,582**
20101	TANAH PERSIL	7,936,066	19,820,791,330,995	0	0	0	0	19,820,791,330,995
20102	TANAH NON PERSIL	110,670	163,893,541,837	0	0	0	0	163,893,541,837
20103	LAPANGAN	859	1,389,306,750	0	0	0	0	1,389,306,750
132111	**Peralatan dan Mesin**	**609,547**	**4,462,524,660,536**	**(3,031,872,114,535)**	**(345,621,115,721)**	**0**	**(3,377,493,230,256)**	**1,085,031,430,280**
30101	ALAT BESAR DARAT	17	87,713,000	(23,000,000)	(3,235,650)	0	(26,235,650)	61,477,350
30103	ALAT BANTU	1,117	135,862,858,933	(97,319,170,190)	(12,422,552,801)	0	(109,741,722,991)	26,121,135,942
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7,450	581,957,761,035	(511,192,886,356)	(8,640,279,013)	0	(519,833,165,369)	62,124,595,666
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	853	2,041,113,828	(1,325,211,651)	(294,293,235)	0	(1,619,504,886)	421,608,942
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	85	10,302,547,121	(9,803,806,472)	(92,328,964)	0	(9,896,135,436)	406,411,685
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	357	842,905,918	(755,050,370)	(16,793,815)	0	(771,844,185)	71,061,733
30303	ALAT UKUR	482	2,879,020,142	(2,344,912,524)	(166,327,893)	0	(2,511,240,417)	367,779,725
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,074	4,827,150,936	(3,829,487,218)	(174,545,480)	0	(4,004,032,698)	823,118,238
30501	ALAT KANTOR	93,182	499,340,117,232	(425,303,780,529)	(22,058,373,846)	0	(447,362,154,375)	51,977,962,857
30502	ALAT RUMAH TANGGA	361,343	1,167,977,114,081	(894,344,523,434)	(58,959,488,311)	0	(953,304,011,745)	214,673,102,336
30601	ALAT STUDIO	18,982	180,695,950,228	(95,068,319,740)	(17,231,685,481)	0	(112,300,005,221)	68,395,945,007
30602	ALAT KOMUNIKASI	8,491	50,284,428,265	(40,575,809,112)	(1,356,105,043)	0	(41,931,914,155)	8,352,514,110
30603	PERALATAN PEMANCAR	1,091	106,291,679,674	(37,112,741,214)	(7,768,784,053)	0	(44,881,525,267)	61,410,154,407
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	13	135,022,941	(103,083,819)	(8,903,712)	0	(111,987,531)	23,035,410
30701	ALAT KEDOKTERAN	2,487	10,998,481,971	(7,666,121,618)	(631,007,027)	0	(8,297,128,645)	2,701,353,326
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	136	1,049,491,236	(587,413,322)	76,391,116	0	(511,022,206)	538,469,030
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,869	18,951,972,547	(5,599,605,988)	(1,866,466,485)	0	(7,466,072,473)	11,485,900,074
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	20	176,934,616	(78,922,372)	4,850,629	0	(74,071,743)	102,862,873
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	378	1,811,467,537	(481,862,446)	(74,366,451)	0	(556,228,897)	1,255,238,640
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	8	759,650,700	(113,118,750)	(65,615,275)	0	(178,734,025)	580,916,675
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	11	44,618,878	(42,353,122)	(1,510,504)	0	(43,863,626)	755,252
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	17	1,487,052,840	(531,628,751)	(99,136,858)	0	(630,765,609)	856,287,231
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	21	167,349,000	(43,511,850)	(8,739,200)	0	(52,251,050)	115,097,950
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	70	7,050,687,779	(6,508,705,979)	(194,744,913)	0	(6,703,450,892)	347,236,887
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	258	2,270,892,730	(1,047,691,750)	(296,128,363)	0	(1,343,820,113)	927,072,617
31001	KOMPUTER UNIT	67,682	887,101,556,005	(541,858,189,798)	(90,149,596,194)	0	(632,007,785,992)	255,093,770,013
31002	PERALATAN KOMPUTER	40,594	747,952,408,282	(332,556,419,707)	(120,335,788,322)	0	(452,892,208,029)	295,060,200,253
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	3	8,426,920	(4,576,920)	(1,925,000)	0	(6,501,920)	1,925,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	11	303,380,109	(79,158,695)	(23,656,991)	0	(102,815,686)	200,564,423
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	9	56,290,000	(5,050,000)	(4,847,000)	0	(9,897,000)	46,393,000
31301	SUMUR	17	384,987,059	(252,032,885)	(32,072,983)	0	(284,105,868)	100,881,191
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	14	6,459,000	(4,667,088)	(398,208)	0	(5,065,296)	1,393,704

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:54 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	18	17,655,000	(17,655,000)	0	0	(17,655,000)	0
31501	ALAT DETEKSI	6	148,020,000	(1,500,000)	(14,652,000)	0	(16,152,000)	131,868,000
31502	ALAT PELINDUNG	9	3,290,450	(3,290,450)	0	0	(3,290,450)	0
31503	ALAT SAR	19	1,533,086,350	(1,523,614,700)	(2,650,413)	0	(1,526,265,113)	6,821,237
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1,073	29,120,342,363	(7,070,919,685)	(2,404,249,628)	0	(9,475,169,313)	19,645,173,050
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	45	297,828,145	(94,564,709)	(24,336,388)	0	(118,901,097)	178,927,048
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	54	585,008,789	(361,703,283)	(45,479,529)	0	(407,182,812)	177,825,977
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	21	5,659,063,168	(5,610,026,046)	(4,622,880)	0	(5,614,648,926)	44,414,242
31901	PERALATAN OLAH RAGA	160	1,052,875,728	(626,026,992)	(226,669,557)	0	(852,696,549)	200,179,179
133111	**Gedung dan Bangunan**	**8,795**	**10,461,107,316,949**	**(1,521,889,706,225)**	**(383,669,171,787)**	**0**	**(1,905,558,878,012)**	**8,555,548,438,937**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3,351	9,044,466,385,894	(1,262,579,233,422)	(322,091,392,352)	0	(1,584,670,625,774)	7,459,795,760,120
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,696	1,193,025,967,463	(237,737,609,265)	(56,515,307,563)	0	(294,252,916,828)	898,773,050,635
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	2	418,676,000	(33,939,610)	(9,624,736)	0	(43,564,346)	375,111,654
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	8	2,322,448,084	(287,695,026)	(71,401,945)	0	(359,096,971)	1,963,351,113
40401	TUGU/TANDA BATAS	738	220,873,839,508	(21,251,228,902)	(4,981,445,191)	0	(26,232,674,093)	194,641,165,415
134111	**Jalan dan Jembatan**	**139,624**	**40,210,658,512**	**(14,728,197,277)**	**(3,813,451,876)**	**0**	**(18,541,649,153)**	**21,669,009,359**
50101	JALAN	139,437	36,059,488,412	(14,337,191,138)	(3,727,875,881)	0	(18,065,067,019)	17,994,421,393
50102	JEMBATAN	187	4,151,170,100	(391,006,139)	(85,575,995)	0	(476,582,134)	3,674,587,966
134112	**Irigasi**	**277**	**23,980,707,438**	**(4,480,972,181)**	**(1,440,317,003)**	**0**	**(5,921,289,184)**	**18,059,418,254**
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	23	2,095,568,000	(214,459,543)	(51,324,709)	0	(265,784,252)	1,829,783,748
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	3	749,697,588	(25,366,463)	(11,078,691)	0	(36,445,154)	713,252,434
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	3	54,719,000	(13,377,610)	(3,330,722)	0	(16,708,332)	38,010,668
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	15	3,949,620,681	(1,756,936,618)	(680,692,806)	0	(2,437,629,424)	1,511,991,257
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	92	6,407,606,112	(1,136,293,291)	(267,540,118)	0	(1,403,833,409)	5,003,772,703
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	100	5,744,456,057	(778,148,180)	(171,018,145)	0	(949,166,325)	4,795,289,732
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	41	4,979,040,000	(556,390,476)	(255,331,812)	0	(811,722,288)	4,167,317,712
134113	**Jaringan**	**1,348**	**198,121,492,187**	**(85,164,476,772)**	**(4,891,456,581)**	**0**	**(90,055,933,353)**	**108,065,558,834**
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	83	13,159,509,383	(4,381,936,466)	(438,844,785)	0	(4,820,781,251)	8,338,728,132
50302	INSTALASI AIR KOTOR	30	4,609,393,349	(1,407,372,864)	(153,646,449)	0	(1,561,019,313)	3,048,374,036
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3	590,680,659	(590,680,659)	0	0	(590,680,659)	0
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	11	377,496,350	(111,550,709)	(9,431,158)	0	(120,981,867)	256,514,483
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	139	78,753,857,921	(19,102,065,450)	(1,971,837,830)	0	(21,073,903,280)	57,679,954,641
50307	INSTALASI PERTAHANAN	10	74,886,000	(25,692,298)	(2,580,087)	0	(28,272,385)	46,613,615
50309	INSTALASI PENGAMAN	26	401,902,915	(197,316,836)	(20,020,146)	0	(217,336,982)	184,565,933
50310	INSTALASI LAIN	306	43,805,802,474	(42,977,240,211)	(553,046,394)	0	(43,530,286,605)	275,515,869
50401	JARINGAN AIR MINUM	26	1,260,921,549	(447,956,150)	(43,308,013)	0	(491,264,163)	769,657,386
50402	JARINGAN LISTRIK	381	42,604,476,922	(10,459,299,622)	(1,009,846,920)	0	(11,469,146,542)	31,135,330,380

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:54 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
50403	JARINGAN TELEPON	331	8,915,423,665	(3,513,455,461)	(568,533,430)	0	(4,081,988,891)	4,833,434,774
50404	JARINGAN GAS	2	3,567,141,000	(1,949,910,046)	(120,361,369)	0	(2,070,271,415)	1,496,869,585
135111	**Aset Tetap Renovasi**	**5**	**3,151,159,400**	**(1,046,358,598)**	**1,041,591,931**	**0**	**(4,766,667)**	**3,146,392,733**
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	(19,995,000)	19,995,000	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	3	541,875,400	(1,026,363,598)	1,021,596,931	0	(4,766,667)	537,108,733
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	2	2,609,284,000	0	0	0	0	2,609,284,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**1,076,299**	**48,939,236,176**	**(532,030,618)**	**(32,049,028)**	**0**	**(564,079,646)**	**48,375,156,530**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,074,179	35,924,970,145	(2,683,400)	0	0	(2,683,400)	35,922,286,745
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	38	7,882,158,518	0	0	0	0	7,882,158,518
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	723	2,236,821,379	0	0	0	0	2,236,821,379
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	456	2,270,360,917	(529,347,218)	(32,049,028)	0	(561,396,246)	1,708,964,671
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	381	579,160,267	0	0	0	0	579,160,267
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	522	45,764,950	0	0	0	0	45,764,950
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan**	**75,294**	**145,364,364,071**	**(144,747,342,209)**	**12,453,016,443**	**0**	**(132,294,325,766)**	**13,070,038,305**
20101	TANAH PERSIL	840	268,783,000	0	0	0	0	268,783,000
30101	ALAT BESAR DARAT	1	100,000	(10,096,244)	9,996,244	0	(100,000)	0
30103	ALAT BANTU	67	2,230,448,480	(2,680,075,924)	449,627,444	0	(2,230,448,480)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	532	11,164,314,505	(9,187,676,231)	(1,975,566,846)	0	(11,163,243,077)	1,071,428
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	39	13,373,200	(13,961,200)	588,000	0	(13,373,200)	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	2	623,405,000	(623,405,000)	0	0	(623,405,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	(4,906,000)	4,906,000	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	21	78,984,700	(87,535,370)	8,550,670	0	(78,984,700)	0
30303	ALAT UKUR	25	97,267,570	(104,374,040)	7,106,470	0	(97,267,570)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	76	240,070,762	(208,495,761)	(31,575,001)	0	(240,070,762)	0
30501	ALAT KANTOR	9,438	16,521,802,209	(17,563,091,643)	1,064,964,514	0	(16,498,127,129)	23,675,080
30502	ALAT RUMAH TANGGA	29,040	38,286,243,654	(34,093,395,568)	(4,122,301,694)	0	(38,215,697,262)	70,546,392
30601	ALAT STUDIO	703	1,951,380,093	(10,886,481,632)	8,943,184,981	0	(1,943,296,651)	8,083,442
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,021	1,931,503,480	(2,180,160,969)	249,407,189	0	(1,930,753,780)	749,700
30603	PERALATAN PEMANCAR	63	1,201,627,609	(1,279,771,162)	129,369,563	0	(1,150,401,599)	51,226,010
30701	ALAT KEDOKTERAN	96	280,274,667	(830,702,667)	550,428,000	0	(280,274,667)	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	26	539,853,500	(20,791,000)	(294,332,500)	0	(315,123,500)	224,730,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	48	282,378,148	(470,196,040)	187,817,892	0	(282,378,148)	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	26	146,107,750	(50,107,163)	(79,976,088)	0	(130,083,251)	16,024,499
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1	350,000	(350,000)	0	0	(350,000)	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	7,000,000	(7,919,333)	919,333	0	(7,000,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	4,426,001	(4,426,001)	0	0	(4,426,001)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	44,488,950	(11,000,000)	(33,488,950)	0	(44,488,950)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:54 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_kl

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
31001	KOMPUTER UNIT	3,891	40,137,812,168	(47,170,368,247)	7,075,208,038	0	(40,095,160,209)	42,651,959
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,844	7,012,799,490	(7,653,134,703)	653,073,463	0	(7,000,061,240)	12,738,250
31301	SUMUR	1	3,500,000	(3,500,000)	0	0	(3,500,000)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	99,105,000	(56,861,504)	(41,466,496)	0	(98,328,000)	777,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10	37,344,650	(43,443,650)	6,099,000	0	(37,344,650)	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	520,000	(500,000)	(20,000)	0	(520,000)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	30	19,115,924	(23,948,875)	4,832,951	0	(19,115,924)	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	47	15,103,961,871	(5,546,952,715)	(1,930,058,558)	0	(7,477,011,273)	7,626,950,598
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	59	5,014,827,910	(2,923,342,624)	944,537,377	0	(1,978,805,247)	3,036,022,663
40401	TUGU/TANDA BATAS	3	169,979,000	(76,037,685)	15,159,891	0	(60,877,794)	109,101,206
50101	JALAN	357	62,900,000	(718,841,500)	655,941,500	0	(62,900,000)	0
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	2	22,145,001	(9,464,699)	(567,635)	0	(10,032,334)	12,112,667
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1	5,000,000	(1,937,500)	(125,000)	0	(2,062,500)	2,937,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	57,632,000	(20,075,050)	(1,440,800)	0	(21,515,850)	36,116,150
50310	INSTALASI LAIN	11	49,878,600	(44,828,600)	(5,050,000)	0	(49,878,600)	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	144,010	(144,010)	0	0	(144,010)	0
50402	JARINGAN LISTRIK	1	64,205,595	(20,866,815)	(1,605,140)	0	(22,471,955)	41,733,640
50403	JARINGAN TELEPON	18	119,547,290	(90,763,279)	8,872,631	0	(81,890,648)	37,656,642
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	25,755	1,321,579,440	0	0	0	0	1,321,579,440
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	2	350,000	0	0	0	0	350,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	17	119,668,999	0	0	0	0	119,668,999
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	7	23,701,805	(23,411,805)	0	0	(23,411,805)	290,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	25	1,647,000	0	0	0	0	1,647,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	130	2,815,040	0	0	0	0	2,815,040
JUMLAH		**9,958,784**	**35,369,473,774,851**	**(4,804,461,198,415)**	**(725,972,953,622)**	**0**	**(5,530,434,152,037)**	**29,839,039,622,814**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:54 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	**Peralatan dan Mesin**	**97,662**	**24,221,272,569**	**(14,240,303,038)**	**(1,850,239,321)**	**0**	**(16,090,542,359)**	**8,130,730,210**
30101	ALAT BESAR DARAT	1	150,000	(150,000)	0	0	(150,000)	0
30103	ALAT BANTU	115	32,068,799	(5,600,532)	(3,368,792)	0	(8,969,324)	23,099,475
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	49	624,841,700	(634,841,700)	10,000,000	0	(624,841,700)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	24	14,806,280	(6,953,780)	(2,312,500)	0	(9,266,280)	5,540,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	34	12,221,500	(1,309,750)	(608,400)	0	(1,918,150)	10,303,350
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	162	38,482,063	(18,822,718)	(4,028,071)	0	(22,850,789)	15,631,274
30303	ALAT UKUR	54	26,921,740	(8,705,000)	(3,646,682)	0	(12,351,682)	14,570,058
30401	ALAT PENGOLAHAN	546	24,756,259	(13,841,885)	(2,223,799)	0	(16,065,684)	8,690,575
30501	ALAT KANTOR	20,121	2,979,391,435	(2,262,046,647)	(136,896,355)	0	(2,398,943,002)	580,448,433
30502	ALAT RUMAH TANGGA	61,885	17,287,966,555	(9,625,920,615)	(1,412,295,946)	0	(11,038,216,561)	6,249,749,994
30601	ALAT STUDIO	2,915	734,801,243	(366,362,798)	(74,562,017)	0	(440,924,815)	293,876,428
30602	ALAT KOMUNIKASI	2,446	479,800,679	(331,256,180)	(38,326,364)	0	(369,582,544)	110,218,135
30603	PERALATAN PEMANCAR	164	19,801,589	(10,059,553)	(537,727)	0	(10,597,280)	9,204,309
30701	ALAT KEDOKTERAN	3,763	366,286,634	(189,727,085)	(32,560,889)	0	(222,287,974)	143,998,660
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	134	49,953,528	(3,274,260)	(8,770,855)	0	(12,045,115)	37,908,413
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	769	90,484,895	(47,356,192)	(3,717,798)	0	(51,073,990)	39,410,905
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	19	7,670,240	(375,000)	(270,675)	0	(645,675)	7,024,565
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	33	15,284,001	(2,224,328)	(676,635)	0	(2,900,963)	12,383,038
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	150,000	(125,000)	(10,000)	0	(135,000)	15,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1	100,000	(143,152)	43,152	0	(100,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	15	1,835,000	(901,666)	(233,334)	0	(1,135,000)	700,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	290	45,883,900	(11,598,763)	(12,109,584)	0	(23,708,347)	22,175,553
31001	KOMPUTER UNIT	269	270,102,706	(283,536,671)	20,960,226	0	(262,576,445)	7,526,261
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,599	980,732,387	(374,218,869)	(138,138,950)	0	(512,357,819)	468,374,568
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5	220,000	(220,000)	0	0	(220,000)	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	8	3,400,000	0	(310,000)	0	(310,000)	3,090,000
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2	594,000	(415,800)	(39,600)	0	(455,400)	138,600
31502	ALAT PELINDUNG	6	675,276	(675,276)	0	0	(675,276)	0
31503	ALAT SAR	7	2,115,445	(50,000)	(672,316)	0	(722,316)	1,393,129
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	30	25,391,444	0	(1,269,574)	0	(1,269,574)	24,121,870
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	43	23,441,239	(1,351,535)	(1,573,377)	0	(2,924,912)	20,516,327
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	25	7,476,335	(2,444,398)	(741,375)	0	(3,185,773)	4,290,562
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	910	44,524,900	(26,678,088)	(1,516,084)	0	(28,194,172)	16,330,728
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	200	6,000,000	(6,000,000)	0	0	(6,000,000)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	17	2,940,797	(3,115,797)	175,000	0	(2,940,797)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**	**183**	**2,818,741,615**	**(618,498,548)**	**(48,997,164)**	**0**	**(667,495,712)**	**2,151,245,903**

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:54 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_kl

UAKPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	131	1,884,754,649	(261,638,891)	(15,864,228)	0	(277,503,119)	1,607,251,530
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20	706,663,526	(305,979,297)	(28,332,718)	0	(334,312,015)	372,351,511
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	3	9,012,953	(1,337,204)	(180,260)	0	(1,517,464)	7,495,489
40401	TUGU/TANDA BATAS	29	218,310,487	(49,543,156)	(4,619,958)	0	(54,163,114)	164,147,373
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**3,607**	**204,940,794**	**(286,000)**	**0**	**0**	**(286,000)**	**204,654,794**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	48	48,000	0	0	0	0	48,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	286,000	(286,000)	0	0	(286,000)	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	11	522,000	0	0	0	0	522,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	194	8,376,045	0	0	0	0	8,376,045
60501	TANAMAN	3,353	195,708,749	0	0	0	0	195,708,749
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan**	**9,610**	**1,397,633,804**	**(1,543,670,071)**	**160,110,635**	**0**	**(1,383,559,436)**	**14,074,368**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6	45,105,000	(35,105,000)	(10,000,000)	0	(45,105,000)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	(96,500)	96,500	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	14	1,064,000	(1,678,000)	614,000	0	(1,064,000)	0
30303	ALAT UKUR	4	450,000	(450,000)	0	0	(450,000)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	3	300,001	(300,000)	(1)	0	(300,001)	0
30501	ALAT KANTOR	1,942	226,571,117	(238,142,456)	12,141,339	0	(226,001,117)	570,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,063	953,300,164	(1,120,848,548)	169,265,584	0	(951,582,964)	1,717,200
30601	ALAT STUDIO	41	8,688,200	(9,801,200)	1,368,000	0	(8,433,200)	255,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	231	33,247,805	(39,218,795)	5,970,990	0	(33,247,805)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	8	1,002,800	(522,800)	(480,000)	0	(1,002,800)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	10,000	(10,000)	0	0	(10,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	(851,967)	851,967	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	(109,980)	109,980	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	35	78,590,675	(60,713,832)	(17,876,843)	0	(78,590,675)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	159	31,974,042	(30,292,502)	(1,203,415)	0	(31,495,917)	478,125
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	275,000	(275,000)	0	0	(275,000)	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	76	1,045,000	0	(1,045,000)	0	(1,045,000)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	4	760,000	(1,354,000)	594,000	0	(760,000)	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	9,620,000	(2,693,600)	(192,400)	0	(2,886,000)	6,734,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	200,000	(58,000)	(4,000)	0	(62,000)	138,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	2	4,400,000	(1,147,891)	(100,066)	0	(1,247,957)	3,152,043
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	17	1,030,000	0	0	0	0	1,030,000
JUMLAH		**111,062**	**28,642,588,782**	**(16,402,757,657)**	**(1,739,125,850)**	**0**	**(18,141,883,507)**	**10,500,705,275**

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM

Kode Lap : lap_atb_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	**Software**	**1,785**	**45,027,276,908**	**21**	**1,725,178,459**	**82**	**1,166,605,069**	**1,724**	**45,585,850,298**
80101	ASET TAK BERWUJUD	1,785	45,027,276,908	21	1,725,178,459	82	1,166,605,069	1,724	45,585,850,298
162161	**Lisensi**	**103**	**18,437,759,516**	**3**	**915,869,500**	**1**	**38,500,000**	**105**	**19,315,129,016**
80101	ASET TAK BERWUJUD	103	18,437,759,516	3	915,869,500	1	38,500,000	105	19,315,129,016
162171	**Hasil Kajian/Penelitian**	**10**	**1,804,868,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**1,804,868,600**
80101	ASET TAK BERWUJUD	10	1,804,868,600	0	0	0	0	10	1,804,868,600
162191	**Aset Tak Berwujud Lainnya**	**0**	**0**	**4**	**44,650,000**	**4**	**44,650,000**	**0**	**0**
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	4	44,650,000	4	44,650,000	0	0
166113	**Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan**	**97**	**1,678,171,150**	**83**	**1,134,472,910**	**85**	**1,058,729,900**	**95**	**1,753,914,160**
80101	ASET TAK BERWUJUD	97	1,678,171,150	83	1,134,472,910	85	1,058,729,900	95	1,753,914,160
TOTAL			**66,948,076,174**		**3,820,170,869**		**2,308,484,969**		**68,459,762,074**

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT KL
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:54 AM

Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162151	**Software**	**1,724**	**45,585,850,298**	**(39,418,705,685)**	**(2,673,420,512)**	**0**	**(42,092,126,197)**	**3,493,724,101**
80101	ASET TAK BERWUJUD	1,724	45,585,850,298	(39,418,705,685)	(2,673,420,512)	0	(42,092,126,197)	3,493,724,101
162161	**Lisensi**	**105**	**19,315,129,016**	**(2,198,237,653)**	**(1,901,906,599)**	**0**	**(4,100,144,252)**	**15,214,984,764**
80101	ASET TAK BERWUJUD	105	19,315,129,016	(2,198,237,653)	(1,901,906,599)	0	(4,100,144,252)	15,214,984,764
162171	**Hasil Kajian/Penelitian**	**10**	**1,804,868,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,804,868,600**
80101	ASET TAK BERWUJUD	10	1,804,868,600	0	0	0	0	1,804,868,600
162191	**Aset Tak Berwujud Lainnya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0
166113	**Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan**	**95**	**1,753,914,160**	**(1,674,208,650)**	**(77,455,510)**	**0**	**(1,751,664,160)**	**2,250,000**
80101	ASET TAK BERWUJUD	95	1,753,914,160	(1,674,208,650)	(77,455,510)	0	(1,751,664,160)	2,250,000
JUMLAH		**1,934**	**68,459,762,074**	**(43,291,151,988)**	**(4,652,782,621)**	**0**	**(47,943,934,609)**	**20,515,827,465**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM

Kode Lap : lap_kdp_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2022	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	**Konstruksi Dalam pengerjaan**	**617,396,614,572**	**1,255,932,495,263**	**1,217,025,457,928**	**656,303,651,907**	
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	0	106,228,552,461	106,219,552,461	9,000,000	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	149,864,272,468	149,864,272,468	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	617,396,614,572	999,412,104,534	960,514,067,199	656,294,651,907	
7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	0	427,565,800	427,565,800	0	
162311	**Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		**617,396,614,572**	**1,255,932,495,263**	**1,217,025,457,928**	**656,303,651,907**	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT KL
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 03/05/23 6:00 AM
Tanggal : 03/05/23 7:52 AM

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_kl

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	4	5	6	7
131111	**Tanah**	**5**	**0**	**0**	**5**
2010311001	Tanah Untuk Monumen	5	0	0	5
132111	**Peralatan dan Mesin**	**1**	**0**	**0**	**1**
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	0	0	1
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	0	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**	**82**	**0**	**0**	**82**
6010101001	Monografi	82	0	0	82
TOTAL		**88**	**0**	**0**	**88**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Tanggal : 03/05/2023 07.54.09
NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG
Halaman : 1 dari 31
131111 Tanah
Kode Lap : lap_crbmn_kl

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	TANAH		8,047,595	19,986,074,179,582	8,047,595	19,986,074,179,58	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	7,583,609	19,805,288,980,810	7,583,609	19,805,288,980,81	0	0
100	Saldo Awal	-	26,894	169,972,021,336	26,894	169,972,021,336	0	0
101	Pembelian	-	213,137	54,744,936,338	213,137	54,744,936,338	0	0
102	Transfer Masuk	-	15,652	217,431,521,000	15,652	217,431,521,000	0	0
103	Hibah Masuk	-	190,455	17,659,656,646	190,455	17,659,656,646	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	17,620	64,535,458,461	17,620	64,535,458,461	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	200	83,800,000	200	83,800,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	18,266	180,555,991,650	18,266	180,555,991,650	0	0
111	Pertukaran	-	130	613,523,000	130	613,523,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	13,370	36,413,888,000	13,370	36,413,888,000	0	0
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	139	243,470,000	139	243,470,000	0	0
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	-	(1,402,963,929)	0	(1,402,963,929)	0	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	11,794,090,000	0	11,794,090,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	41,061,237,645	0	41,061,237,645	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	2,321,054,000	0	2,321,054,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(2,765,409,930)	0	(2,765,409,930)	0	0
297	Koreksi Kuantitas Tinjut Normalisasi BMN	-	1,403,178,004	0	1,403,178,004	0	0	0
301	Penghapusan	-	(200)	(83,800,000)	(200)	(83,800,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(15,399)	(217,076,534,000)	(15,399)	(217,076,534,000)	0	0
303	Hibah Keluar	-	(2,164)	(5,696,251,000)	(2,164)	(5,696,251,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(30,783)	(181,555,665,650)	(30,783)	(181,555,665,650)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

131111 Tanah

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	Koreksi Pencatatan	-	(196,951)	(209,093,040,724)	(196,951)	(209,093,040,724)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(455)	(374,748,000)	(455)	(374,748,000)	0	0
TOTAL				**19,986,074,179,582**		**19,986,074,179,582**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	ALAT BESAR		1,250	135,982,790,732	1,134	135,950,571,933	116	32,218,799
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1,058	118,367,845,220	1,012	118,358,387,902	46	9,457,318
100	Saldo Awal	-	6	4,158,646,520	6	4,158,646,520	0	0
101	Pembelian	-	214	9,064,836,322	126	9,026,012,339	88	38,823,983
103	Hibah Masuk	-	31	30,342,252	11	29,534,592	20	807,660
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	11	3,276,824,770	10	3,276,012,770	1	812,000
107	Reklasifikasi Masuk	-	15	1,614,318,845	15	1,614,318,845	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	14	507,627,750	14	507,627,750	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	1	200,000,000	1	200,000,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	2	1,800,000	2	1,800,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	83,478,600	0	83,478,600	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	756,252,910	0	756,252,910	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	403,524,834	0	403,524,834	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(371,790,421)	0	(371,790,421)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(45)	(829,841,581)	(11)	(816,351,419)	(34)	(13,490,162)
305	Koreksi Pencatatan	-	(43)	(1,161,577,289)	(40)	(1,159,185,289)	(3)	(2,392,000)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(2)	(1,800,000)	0	0	(2)	(1,800,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(15)	(207,398,000)	(15)	(207,398,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	3	89,700,000	3	89,700,000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		8,376	584,638,522,843	8,303	583,998,874,863	73	639,647,980
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	8,281	567,541,575,561	8,215	566,899,097,581	66	642,477,980
100	Saldo Awal	-	11	999,607,000	11	999,607,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Pembelian	-	234	18,811,759,937	224	18,803,989,937	10	7,770,000
102	Transfer Masuk	-	22	3,365,553,440	22	3,365,553,440	0	0
103	Hibah Masuk	-	24	4,783,689,816	24	4,783,689,816	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	4	14,283,360	4	14,283,360	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	5	559,616,940	5	559,616,940	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	48	1,578,551,500	9	1,570,751,500	39	7,800,000
112	Perolehan Lainnya	-	27	459,761,910	27	459,761,910	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	4	188,775,000	4	188,775,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	2	400,000	2	400,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	7,229,000	0	7,229,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	35,292,351	0	35,292,351	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(84,307,532)	0	(84,307,532)	0	0
301	Penghapusan	-	(2)	(559,474,440)	(2)	(559,474,440)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(22)	(3,365,553,440)	(22)	(3,365,553,440)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(13)	(1,235,491,464)	(13)	(1,235,491,464)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(64)	(3,168,057,104)	(26)	(3,160,057,104)	(38)	(8,000,000)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(2)	(400,000)	0	0	(2)	(400,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(210)	(5,725,222,537)	(208)	(5,715,222,537)	(2)	(10,000,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	27	430,933,545	27	430,933,545	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		1,174	14,102,098,484	924	14,024,473,181	250	77,625,303
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1,083	14,011,554,664	911	13,969,598,966	172	41,955,698
100	Saldo Awal	-	3	11,132,000	3	11,132,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Pembelian	-	294	224,684,008	27	146,454,308	267	78,229,700
103	Hibah Masuk	-	4	11,194,747	3	10,950,000	1	244,747
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	1	25,000,000	1	25,000,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	8	11,268,864	2	6,857,706	6	4,411,158
112	Perolehan Lainnya	-	13	27,757,510	6	23,037,510	7	4,720,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	1	21,118,000	1	21,118,000	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	1	702,000	0	0	1	702,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	5	5,000,000	0	0	5	5,000,000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	5	3,125,000	5	3,125,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	1,875,000	0	1,875,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(1,875,000)	0	0	0	(1,875,000)
304	Reklasifikasi Keluar	-	(53)	(59,476,900)	(13)	(50,861,900)	(40)	(8,615,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(167)	(101,938,000)	(3)	(57,863,000)	(164)	(44,075,000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	(5)	(5,000,000)	(5)	(5,000,000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(5)	(3,125,000)	0	0	(5)	(3,125,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(15)	(81,048,409)	(14)	(80,950,409)	(1)	(98,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	1	150,000	0	0	1	150,000
304	ALAT PERTANIAN		1,620	4,851,907,195	1,074	4,827,150,936	546	24,756,259
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1,508	4,088,469,126	974	4,072,295,366	534	16,173,760
101	Pembelian	-	127	515,826,475	113	506,363,975	14	9,462,500
103	Hibah Masuk	-	2	8,502,500	2	8,502,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	2	60,806,688	2	60,806,688	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	5	252,134,928	4	251,534,928	1	600,000
304	Reklasifikasi Keluar	-	(12)	(38,457,520)	(11)	(37,577,520)	(1)	(880,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(600,000)	0	0	(1)	(600,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(12)	(35,075,002)	(11)	(35,075,001)	(1)	(1)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	1	300,000	1	300,000	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		536,531	1,687,584,589,303	454,525	1,667,317,231,313	82,006	20,267,357,990
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	511,263	1,522,470,818,067	438,225	1,507,287,863,358	73,038	15,182,954,709
100	Saldo Awal	-	1,550	8,484,608,469	1,160	8,416,376,269	390	68,232,200
101	Pembelian	-	23,483	116,430,014,951	14,541	111,610,371,616	8,942	4,819,643,335
102	Transfer Masuk	-	9,775	39,158,761,180	4,749	36,385,770,280	5,026	2,772,990,900
103	Hibah Masuk	-	2,481	11,183,375,612	1,694	10,953,810,350	787	229,565,262
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	794	17,176,168,188	794	17,176,168,188	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	37	32,003,314	35	31,773,314	2	230,000
107	Reklasifikasi Masuk	-	764	9,618,752,651	348	9,514,212,676	416	104,539,975
112	Perolehan Lainnya	-	4,892	58,219,242,918	4,245	57,895,930,074	647	323,312,844
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	2	6,355,600	2	6,355,600	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	15	14,998,000	2	6,500,000	13	8,498,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	5	8,847,000	0	0	5	8,847,000
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	305	337,919,062	177	326,137,781	128	11,781,281
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	118	79,399,362	118	79,399,362	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	22,774,519,680	0	22,774,519,680	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	533,934,320	0	487,436,600	0	46,497,720
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	1,807,104,790	0	1,807,104,790	0	0
214	Koreksi Susulan	-	0	3,996,000	0	3,996,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(4,996,827,092)	0	(4,990,755,408)	0	(6,071,684)
301	Penghapusan	-	(127)	(359,773,560)	(119)	(358,373,560)	(8)	(1,400,000)
302	Transfer Keluar	-	(9,775)	(39,158,761,180)	(4,749)	(36,385,770,280)	(5,026)	(2,772,990,900)
304	Reklasifikasi Keluar	-	(216)	(5,840,036,342)	(182)	(5,827,420,391)	(34)	(12,615,951)
305	Koreksi Pencatatan	-	(1,650)	(50,672,617,280)	(770)	(50,411,836,394)	(880)	(260,780,886)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-	(1)	(2,000,000)	(1)	(2,000,000)	0	0
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	(5)	(8,847,000)	(5)	(8,847,000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(118)	(79,399,362)	0	0	(118)	(79,399,362)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(7,806)	(20,664,734,668)	(6,397)	(20,474,155,609)	(1,409)	(190,579,059)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	745	1,026,766,623	658	1,012,664,017	87	14,102,606
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		34,102	338,641,484,619	28,577	337,407,081,108	5,525	1,234,403,511
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	30,334	256,335,319,995	25,316	255,369,179,965	5,018	966,140,030
100	Saldo Awal	-	241	1,491,384,966	121	1,468,355,224	120	23,029,742
101	Pembelian	-	3,899	79,292,516,750	3,538	79,063,850,210	361	228,666,540
102	Transfer Masuk	-	2,828	38,039,274,920	2,828	38,039,274,920	0	0
103	Hibah Masuk	-	159	1,059,811,981	113	1,047,532,017	46	12,279,964
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	50	2,292,698,338	21	2,274,010,800	29	18,687,538
106	Pembatalan Penghapusan	-	4	5,591,410	4	5,591,410	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	57	1,581,097,619	53	1,578,273,729	4	2,823,890

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Perolehan Lainnya	-	124	2,344,419,180	103	2,328,422,629	21	15,996,551
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	8	1,814,600	0	0	8	1,814,600
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	1	1,440,000	0	0	1	1,440,000
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	4	2,196,000	4	2,196,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	2	1,200,000	2	1,200,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	391,710,347	0	391,710,347	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	119,945,257	0	119,945,257	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	286,927,325	0	286,927,325	0	0
214	Koreksi Susulan	-	0	36,975,785	0	36,975,785	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(191,767,300)	0	(191,007,300)	0	(760,000)
301	Penghapusan	-	(11)	(64,750,000)	(11)	(64,750,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(2,828)	(38,039,274,920)	(2,828)	(38,039,274,920)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(29)	(1,504,801,300)	(21)	(1,496,961,300)	(8)	(7,840,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(138)	(2,616,534,288)	(110)	(2,599,277,954)	(28)	(17,256,334)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	(1)	(1,440,000)	(1)	(1,440,000)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(2)	(1,200,000)	0	0	(2)	(1,200,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(631)	(2,285,351,354)	(579)	(2,273,975,344)	(52)	(11,376,010)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	31	62,279,308	24	60,322,308	7	1,957,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		6,520	12,464,213,369	2,623	12,047,973,207	3,897	416,240,162
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	5,190	10,479,587,817	1,596	10,217,194,084	3,594	262,393,733
100	Saldo Awal	-	9	23,915,000	6	23,075,000	3	840,000
101	Pembelian	-	790	1,828,288,446	519	1,679,240,486	271	149,047,960

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Transfer Masuk	-	1	1,870,000	1	1,870,000	0	0
103	Hibah Masuk	-	41	58,650,000	22	49,050,000	19	9,600,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	561	3,470,255,346	556	3,468,609,371	5	1,645,975
107	Reklasifikasi Masuk	-	101	175,771,491	66	163,394,550	35	12,376,941
112	Perolehan Lainnya	-	55	122,182,324	25	107,986,771	30	14,195,553
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	1,116,500	0	1,116,500	0	0
302	Transfer Keluar	-	(1)	(1,870,000)	(1)	(1,870,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(183)	(3,135,437,055)	(133)	(3,105,302,055)	(50)	(30,135,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(13)	(73,827,000)	(4)	(71,077,000)	(9)	(2,750,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(31)	(486,289,500)	(30)	(485,314,500)	(1)	(975,000)
308	ALAT LABORATORIUM		3,147	23,512,735,254	2,324	23,399,046,118	823	113,689,136
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	2,184	13,986,682,389	1,458	13,899,945,241	726	86,737,148
100	Saldo Awal	-	90	885,359,300	90	885,359,300	0	0
101	Pembelian	-	1,575	18,020,656,354	1,479	17,989,944,837	96	30,711,517
102	Transfer Masuk	-	12	39,111,100	12	39,111,100	0	0
103	Hibah Masuk	-	72	525,579,897	54	521,046,729	18	4,533,168
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	18	21,669,420	6	15,249,180	12	6,420,240
107	Reklasifikasi Masuk	-	9	171,497,000	6	168,500,000	3	2,997,000
112	Perolehan Lainnya	-	45	298,392,967	38	294,342,967	7	4,050,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	107,931,090	0	107,931,090	0	0
209	Koreksi Manual	-	0	680,000	0	680,000	0	0
214	Koreksi Susulan	-	0	200,000	0	200,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(58,570,000)	0	(58,570,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(12)	(39,111,100)	(12)	(39,111,100)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(623)	(7,342,308,873)	(590)	(7,322,788,936)	(33)	(19,519,937)
305	Koreksi Pencatatan	-	(210)	(2,760,692,832)	(204)	(2,758,452,832)	(6)	(2,240,000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-	(3)	(227,000,000)	(3)	(227,000,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(15)	(121,871,000)	(15)	(121,871,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	5	4,529,542	5	4,529,542	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		633	9,369,299,409	328	9,321,580,509	305	47,718,900
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	486	8,699,079,732	282	8,682,685,532	204	16,394,200
100	Saldo Awal	-	12	10,510,200	0	0	12	10,510,200
101	Pembelian	-	181	1,103,414,959	112	1,078,479,820	69	24,935,139
103	Hibah Masuk	-	68	128,893,426	18	122,393,426	50	6,500,000
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	815,000	0	0	1	815,000
112	Perolehan Lainnya	-	2	1,319,985	1	1,174,510	1	145,475
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	41,910,000	0	41,910,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	45,000	0	45,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(78)	(535,306,731)	(48)	(523,903,817)	(30)	(11,402,914)
305	Koreksi Pencatatan	-	(37)	(47,760,012)	(36)	(47,715,012)	(1)	(45,000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	-	(1)	(133,200)	0	0	(1)	(133,200)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1)	(33,488,950)	(1)	(33,488,950)	0	0
310	KOMPUTER		111,144	1,636,304,799,380	108,276	1,635,053,964,287	2,868	1,250,835,093
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	93,909	1,285,889,556,466	91,553	1,285,010,592,596	2,356	878,963,870

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Saldo Awal	-	318	2,756,512,690	252	2,747,629,690	66	8,883,000
101	Pembelian	-	10,139	236,759,317,924	9,699	236,411,279,911	440	348,038,013
102	Transfer Masuk	-	11,962	231,837,799,668	11,952	231,828,499,668	10	9,300,000
103	Hibah Masuk	-	407	10,022,971,697	370	9,997,879,097	37	25,092,600
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	62	1,348,533,466	61	1,347,833,466	1	700,000
106	Pembatalan Penghapusan	-	41	227,244,684	39	226,763,527	2	481,157
107	Reklasifikasi Masuk	-	838	10,526,965,899	829	10,524,375,899	9	2,590,000
112	Perolehan Lainnya	-	10,952	220,840,990,592	10,924	220,819,060,592	28	21,930,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	12	161,988,000	12	161,988,000	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	9	33,591,000	2	27,000,000	7	6,591,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	9	26,482,500	0	0	9	26,482,500
193	Batal Transfer Keluar	-	192	2,843,040,000	192	2,843,040,000	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	34	195,999,729	34	195,999,729	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	464,840,000	0	464,840,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	3,674,504,414	0	3,674,504,414	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	21,721,528,000	0	21,721,528,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(3,655,041,590)	0	(3,636,071,590)	0	(18,970,000)
301	Penghapusan	-	(89)	(820,477,278)	(89)	(820,477,278)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(12,154)	(234,680,839,668)	(12,144)	(234,671,539,668)	(10)	(9,300,000)
304	Reklasifikasi Keluar	-	(254)	(3,542,092,152)	(253)	(3,541,412,152)	(1)	(680,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(3,777)	(140,470,070,270)	(3,728)	(140,458,634,380)	(49)	(11,435,890)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	(9)	(26,482,500)	(9)	(26,482,500)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1,572)	(11,058,777,149)	(1,535)	(11,020,945,992)	(37)	(37,831,157)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	115	1,226,713,258	115	1,226,713,258	0	0
311	ALAT EKSPLORASI		19	312,027,029	14	311,807,029	5	220,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	17	303,177,029	12	302,957,029	5	220,000
100	Saldo Awal	-	1	3,850,000	1	3,850,000	0	0
101	Pembelian	-	4	21,125,000	4	21,125,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(3)	(16,125,000)	(3)	(16,125,000)	0	0
312	ALAT PENGEBORAN		17	59,690,000	9	56,290,000	8	3,400,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	2	5,050,000	2	5,050,000	0	0
101	Pembelian	-	15	54,640,000	7	51,240,000	8	3,400,000
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		33	392,040,059	31	391,446,059	2	594,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	33	392,040,059	31	391,446,059	2	594,000
101	Pembelian	-	1	845,000	0	0	1	845,000
304	Reklasifikasi Keluar	-	(1)	(845,000)	0	0	(1)	(845,000)
314	ALAT BANTU EKSPLORASI		18	17,655,000	18	17,655,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	18	17,655,000	18	17,655,000	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		1,150	30,832,921,328	1,107	30,804,739,163	43	28,182,165
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	871	22,243,181,811	864	22,242,456,535	7	725,276
100	Saldo Awal	-	77	648,184,260	57	630,184,260	20	18,000,000
101	Pembelian	-	201	7,355,946,687	183	7,345,319,798	18	10,626,889
103	Hibah Masuk	-	38	246,587,000	38	246,587,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	1	56,562,270	1	56,562,270	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	Reklasifikasi Masuk	-	2	380,867,000	2	380,867,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	3	275,724,298	2	275,174,298	1	550,000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	1	12,400,000	1	12,400,000	0	0
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	1	166,400,000	1	166,400,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	480,253,000	0	480,253,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	595,050,000	0	595,050,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(46)	(1,180,013,000)	(44)	(1,179,013,000)	(2)	(1,000,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(5)	(395,807,000)	(4)	(395,087,000)	(1)	(720,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(3)	(61,965,000)	(3)	(61,965,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	9	9,550,002	9	9,550,002	0	0
316	ALAT PERAGA		88	321,269,384	45	297,828,145	43	23,441,239
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	37	269,223,527	26	264,699,827	11	4,523,700
101	Pembelian	-	46	46,847,092	17	30,076,450	29	16,770,642
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	2	2,985,868	2	2,985,868	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	6	4,389,897	0	0	6	4,389,897
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	66,000	0	66,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(3)	(2,243,000)	0	0	(3)	(2,243,000)
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		79	592,485,124	54	585,008,789	25	7,476,335
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	76	475,162,819	52	468,636,484	24	6,526,335
101	Pembelian	-	1	950,000	0	0	1	950,000
112	Perolehan Lainnya	-	3	116,575,305	3	116,575,305	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(1)	(203,000)	(1)	(203,000)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	RAMBU - RAMBU		1,131	5,709,588,068	21	5,659,063,168	1,110	50,524,900
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1,166	5,649,264,118	18	5,616,454,618	1,148	32,809,500
101	Pembelian	-	329	325,667,551	11	276,907,151	318	48,760,400
112	Perolehan Lainnya	-	1	2,371,750	1	2,371,750	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(283)	(38,306,711)	(3)	(8,306,711)	(280)	(30,000,000)
305	Koreksi Pencatatan	-	(5)	(228,343,640)	(5)	(228,343,640)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(77)	(1,065,000)	(1)	(20,000)	(76)	(1,045,000)
319	PERALATAN OLAH RAGA		177	1,055,816,525	160	1,052,875,728	17	2,940,797
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	175	1,002,680,773	157	999,564,976	18	3,115,797
100	Saldo Awal	-	1	1,750,000	1	1,750,000	0	0
101	Pembelian	-	3	51,434,752	3	51,434,752	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	1	2,676,000	1	2,676,000	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(3)	(2,725,000)	(2)	(2,550,000)	(1)	(175,000)
TOTAL				**4,486,745,933,105**		**4,462,524,660,536**		**24,221,272,569**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

133111 Gedung dan Bangunan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	BANGUNAN GEDUNG		8,198	10,240,083,771,532	8,047	10,237,492,353,35	151	2,591,418,175
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	8,013	9,374,382,990,577	7,886	9,372,080,546,485	127	2,302,444,092
100	Saldo Awal	-	47	63,332,790,523	32	63,094,131,327	15	238,659,196
101	Pembelian	-	557	31,503,614,749	168	30,490,749,979	389	1,012,864,770
102	Transfer Masuk	-	12	76,861,540,996	12	76,861,540,996	0	0
103	Hibah Masuk	-	86	37,078,641,633	77	36,966,361,033	9	112,280,600
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	72	482,524,775,568	43	482,380,680,890	29	144,094,678
106	Pembatalan Penghapusan	-	5	463,702,000	5	463,702,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	64	71,773,217,451	60	71,727,032,451	4	46,185,000
111	Pertukaran	-	1	230,629,000	1	230,629,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	16	39,441,728,748	7	39,321,002,248	9	120,726,500
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	46	1,759,108,390	17	1,544,978,390	29	214,130,000
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	1	24,120,500	0	0	1	24,120,500
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	4	598,331,000	4	598,331,000	0	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	7	23,476,506	7	23,476,506	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	10,963,957,326	0	10,963,957,326	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	169,114,559,765	0	169,114,559,765	0	0
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	0	6,348,283,254	0	6,348,283,254	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	304,708,209,444	0	304,708,209,444	0	0
209	Koreksi Manual	-	0	224,763,994	0	224,763,994	0	0
214	Koreksi Susulan	-	0	1,926,256,792	0	1,926,256,792	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(37,886,238,718)	0	(37,867,806,218)	0	(18,432,500)

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

133111 Gedung dan Bangunan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	Penghapusan	-	(5)	(2,740,245,220)	(5)	(2,740,245,220)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(14)	(77,196,015,996)	(14)	(77,196,015,996)	0	0
303	Hibah Keluar	-	(2)	(930,813,000)	(2)	(930,813,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(56)	(71,373,294,643)	(52)	(71,238,258,917)	(4)	(135,035,726)
305	Koreksi Pencatatan	-	(623)	(220,850,769,801)	(174)	(219,409,627,372)	(449)	(1,441,142,429)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	-	(1)	(24,120,500)	(1)	(24,120,500)	0	0
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(7)	(23,476,506)	0	0	(7)	(23,476,506)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(33)	(26,013,038,800)	(32)	(26,007,038,800)	(1)	(6,000,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	8	3,837,086,500	8	3,837,086,500	0	0
402	MONUMEN		5	427,688,953	2	418,676,000	3	9,012,953
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	5	427,688,953	2	418,676,000	3	9,012,953
403	BANGUNAN MENARA		8	2,322,448,084	8	2,322,448,084	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	8	2,263,954,500	8	2,263,954,500	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	58,493,584	0	58,493,584	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		767	221,092,149,995	738	220,873,839,508	29	218,310,487
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	746	202,345,724,191	717	202,127,413,704	29	218,310,487
100	Saldo Awal	-	5	727,077,885	3	726,006,885	2	1,071,000
101	Pembelian	-	64	2,671,800,485	21	2,497,517,022	43	174,283,463
103	Hibah Masuk	-	4	1,219,523,000	4	1,219,523,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	11	17,665,401,405	8	17,655,289,405	3	10,112,000
107	Reklasifikasi Masuk	-	10	878,554,052	2	774,607,052	8	103,947,000
112	Perolehan Lainnya	-	2	925,169,090	2	925,169,090	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

133111 Gedung dan Bangunan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	4	90,073,000	2	75,313,000	2	14,760,000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-	2	5,648,000	0	0	2	5,648,000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	7	72,031,000	7	72,031,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	85,692,000	0	85,692,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	4,240,951,366	0	4,240,951,366	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	-	0	1,119,455,500	0	1,119,455,500	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(4,706,434,932)	0	(4,706,434,932)	0	0
301	Penghapusan	-	(1)	(353,905,000)	(1)	(353,905,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(2)	(13,801,740)	0	0	(2)	(13,801,740)
305	Koreksi Pencatatan	-	(76)	(5,520,286,307)	(25)	(5,296,297,584)	(51)	(223,988,723)
399	Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	-	(7)	(72,031,000)	0	0	(7)	(72,031,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(3)	(344,204,000)	(3)	(344,204,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	1	55,712,000	1	55,712,000	0	0
TOTAL				**10,463,926,058,564**		**10,461,107,316,949**		**2,818,741,615**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

134111 Jalan dan Jembatan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	JALAN DAN JEMBATAN		139,624	40,210,658,512	139,624	40,210,658,512	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	137,312	36,903,172,225	137,312	36,903,172,225	0	0
101	Pembelian	-	1	29,820,675	1	29,820,675	0	0
103	Hibah Masuk	-	405	311,687,534	405	311,687,534	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	5	2,461,444,990	5	2,461,444,990	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	256	81,737,000	256	81,737,000	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	169,903,263	0	169,903,263	0	0
297	Koreksi Kuantitas Tinjut Normalisasi BMN	-	696	0	696	0	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(1)	(29,820,675)	(1)	(29,820,675)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1)	(375,163,000)	(1)	(375,163,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	951	657,876,500	951	657,876,500	0	0
TOTAL				**40,210,658,512**		**40,210,658,512**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

134112 Irigasi

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
502	BANGUNAN AIR		277	23,980,707,438	277	23,980,707,438	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	276	23,376,482,850	276	23,376,482,850	0	0
101	Pembelian	-	1	1,250,000	1	1,250,000	0	0
103	Hibah Masuk	-	1	90,988,000	1	90,988,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	1	114,947,500	1	114,947,500	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	1	513,236,588	1	513,236,588	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	90,988,000	0	90,988,000	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(2)	(92,238,000)	(2)	(92,238,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1)	(114,947,500)	(1)	(114,947,500)	0	0
TOTAL				**23,980,707,438**		**23,980,707,438**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

134113 Jaringan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
503	INSTALASI		608	141,773,529,051	608	141,773,529,051	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	615	141,565,843,051	615	141,565,843,051	0	0
100	Saldo Awal	-	1	6,526,000	1	6,526,000	0	0
101	Pembelian	-	5	351,603,950	5	351,603,950	0	0
103	Hibah Masuk	-	1	235,530,000	1	235,530,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(2)	(190,800,000)	(2)	(190,800,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(3)	(160,803,950)	(3)	(160,803,950)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(9)	(34,370,000)	(9)	(34,370,000)	0	0
504	JARINGAN		740	56,347,963,136	740	56,347,963,136	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	716	56,331,471,726	716	56,331,471,726	0	0
100	Saldo Awal	-	16	30,858,050	16	30,858,050	0	0
101	Pembelian	-	21	1,356,769,677	21	1,356,769,677	0	0
103	Hibah Masuk	-	3	17,691,400	3	17,691,400	0	0
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	3	182,050,915	3	182,050,915	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	0	59,715,000	0	59,715,000	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	180,653,400	0	180,653,400	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(17,500,000)	0	(17,500,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(4)	(362,396,850)	(4)	(362,396,850)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(14)	(1,406,391,182)	(14)	(1,406,391,182)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(1)	(24,959,000)	(1)	(24,959,000)	0	0
TOTAL				**198,121,492,187**		**198,121,492,187**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

135111 Aset Tetap Renovasi

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI		5	3,151,159,400	5	3,151,159,400	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	47	18,559,040,336	47	18,559,040,336	0	0
101	Pembelian	-	31	5,987,328,385	31	5,987,328,385	0	0
102	Transfer Masuk	-	1	356,475,247	1	356,475,247	0	0
103	Hibah Masuk	-	3	689,214,027	3	689,214,027	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	1	30,000,000	1	30,000,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	3	5,668,780,100	3	5,668,780,100	0	0
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	5	605,147,255	5	605,147,255	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(172,900,000)	0	(172,900,000)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(6)	(8,696,931,454)	(6)	(8,696,931,454)	0	0
303	Hibah Keluar	-	(38)	(1,416,203,925)	(38)	(1,416,203,925)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(3)	(92,393,510)	(3)	(92,393,510)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(40)	(18,509,397,061)	(40)	(18,509,397,061)	0	0
955	Perolehan Lainnya Aset Tetap Renovasi	-	1	143,000,000	1	143,000,000	0	0
TOTAL				**3,151,159,400**		**3,151,159,400**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

135121 Aset Tetap Lainnya

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		1,074,988	46,043,998,042	1,074,940	46,043,950,042	48	48,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1,082,084	46,670,595,711	1,082,036	46,670,547,711	48	48,000
100	Saldo Awal	-	2	4,400,000	2	4,400,000	0	0
101	Pembelian	-	136	245,213,423	136	245,213,423	0	0
102	Transfer Masuk	-	100	198,924,000	100	198,924,000	0	0
103	Hibah Masuk	-	600	59,940,000	600	59,940,000	0	0
106	Pembatalan Penghapusan	-	4	23,670,320	4	23,670,320	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	-	12	2,645,000	12	2,645,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	16	106,241,500	16	106,241,500	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	1	38,750	1	38,750	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	35,000	0	35,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(2,161,362)	0	(2,161,362)	0	0
301	Penghapusan	-	(359)	(292,042,250)	(359)	(292,042,250)	0	0
302	Transfer Keluar	-	(100)	(198,924,000)	(100)	(198,924,000)	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	-	(6)	(10,976,000)	(6)	(10,976,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(50)	(50)	(50)	(50)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(7,452)	(763,602,000)	(7,452)	(763,602,000)	0	0
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		1,565	2,904,470,179	1,359	2,895,286,134	206	9,184,045
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1,378	2,829,890,790	1,172	2,820,706,745	206	9,184,045
101	Pembelian	-	376	39,247,000	376	39,247,000	0	0
112	Perolehan Lainnya	-	7	69,512,389	7	69,512,389	0	0
197	Perolehan Tinjut Normalisasi BMN	-	17	4,559,000	17	4,559,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

135121 Aset Tetap Lainnya

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	0	600,000	0	600,000	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	0	(250,000)	0	(250,000)	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(200)	(29,919,000)	(200)	(29,919,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(13)	(9,170,000)	(13)	(9,170,000)	0	0
605	TANAMAN		3,353	195,708,749	0	0	3,353	195,708,749
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	3,351	181,417,499	0	0	3,351	181,417,499
101	Pembelian	-	2	14,291,250	0	0	2	14,291,250
TOTAL				**49,144,176,970**		**48,939,236,176**		**204,940,794**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		(11,863)	656,303,651,907	(11,863)	656,303,651,907	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	146	617,396,614,572	146	617,396,614,572	0	0
501	Saldo Awal KDP	-	1	22,658,798,266	1	22,658,798,266	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	-	1,420	258,341,073,280	1,420	258,341,073,280	0	0
503	Pengembangan KDP	-	0	692,009,459,651	0	692,009,459,651	0	0
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	-	0	132,442,463,821	0	132,442,463,821	0	0
505	Penghapusan/Penghentian KDP	-	(140)	(73,417,633,497)	(140)	(73,417,633,497)	0	0
508	Hibah Masuk KDP	-	1	169,250,000	1	169,250,000	0	0
510	Perolehan Lainnya KDP	-	430	140,493,641,528	430	140,493,641,528	0	0
513	Reklasifikasi Keluar KDP	-	(7)	(4,175,414,220)	(7)	(4,175,414,220)	0	0
514	Reklasifikasi Masuk KDP	-	362	4,175,414,220	362	4,175,414,220	0	0
517	Koreksi Pencatatan KDP	-	(519)	(192,949,525,025)	(519)	(192,949,525,025)	0	0
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	-	0	(16,001,263,648)	0	(16,001,263,648)	0	0
579	Normalisasi KDP	-	0	(5,642,394,497)	0	(5,642,394,497)	0	0
597	Perolehan Tinjut Normalisasi KDP	-	1	5,642,394,497	1	5,642,394,497	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	-	(13,558)	(924,839,227,041)	(13,558)	(924,839,227,041)	0	0
TOTAL				**656,303,651,907**		**656,303,651,907**		**0**

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	TANAH		840	268,783,000	840	268,783,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	600	4,000,000	600	4,000,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	455	374,748,000	455	374,748,000	0	0
301	Penghapusan	-	(215)	(109,965,000)	(215)	(109,965,000)	0	0
301	ALAT BESAR		68	2,230,548,480	68	2,230,548,480	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	75	2,691,315,025	75	2,691,315,025	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(3)	(89,700,000)	(3)	(89,700,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	15	207,398,000	15	207,398,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(24)	(1,034,759,545)	(24)	(1,034,759,545)	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	5	456,295,000	5	456,295,000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN		579	11,846,197,705	573	11,801,092,705	6	45,105,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	581	9,863,458,217	576	9,828,256,717	5	35,201,500
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(27)	(430,933,545)	(27)	(430,933,545)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	210	5,725,222,537	208	5,715,222,537	2	10,000,000
301	Penghapusan	-	(6)	(129,391,000)	(6)	(129,391,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(184)	(3,243,718,504)	(183)	(3,243,622,004)	(1)	(96,500)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	5	61,560,000	5	61,560,000	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		64	177,766,270	46	176,252,270	18	1,514,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	70	198,943,410	48	196,815,410	22	2,128,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(1)	(150,000)	0	0	(1)	(150,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset	-	15	81,048,409	14	80,950,409	1	98,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lainnya							
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(23)	(102,212,549)	(19)	(101,650,549)	(4)	(562,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	3	137,000	3	137,000	0	0
304	ALAT PERTANIAN		79	240,370,763	76	240,070,762	3	300,001
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	71	208,795,761	69	208,495,761	2	300,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(1)	(300,000)	(1)	(300,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	12	35,075,002	11	35,075,001	1	1
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(3)	(3,200,000)	(3)	(3,200,000)	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		47,483	55,987,917,144	38,478	54,808,045,863	9,005	1,179,871,281
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	55,253	53,059,975,989	44,911	51,699,548,693	10,342	1,360,427,296
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(745)	(1,026,766,623)	(658)	(1,012,664,017)	(87)	(14,102,606)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	7,806	20,664,734,668	6,397	20,474,155,609	1,409	190,579,059
299	Normalisasi BMN	-	(5)	(600,000)	0	0	(5)	(600,000)
301	Penghapusan	-	(533)	(309,135,880)	(431)	(290,763,021)	(102)	(18,372,859)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(15,459)	(17,927,807,248)	(12,594)	(17,529,588,659)	(2,865)	(398,218,589)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	1,166	1,527,516,238	853	1,467,357,258	313	60,158,980
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		2,067	5,127,449,987	1,787	5,084,511,182	280	42,938,805
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	2,150	14,506,376,319	1,831	14,456,224,524	319	50,151,795
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(31)	(62,279,308)	(24)	(60,322,308)	(7)	(1,957,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	631	2,285,351,354	579	2,273,975,344	52	11,376,010

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	Penghapusan	-	(43)	(82,152,874)	(43)	(82,152,874)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(728)	(11,694,058,822)	(640)	(11,677,077,822)	(88)	(16,981,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	88	174,213,318	84	173,864,318	4	349,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		123	820,138,167	122	820,128,167	1	10,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	108	900,313,667	107	900,303,667	1	10,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	31	486,289,500	30	485,314,500	1	975,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(16)	(566,465,000)	(15)	(565,490,000)	(1)	(975,000)
308	ALAT LABORATORIUM		76	435,835,898	76	435,835,898	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	138	561,494,485	131	560,518,790	7	975,695
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(5)	(4,529,542)	(5)	(4,529,542)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	15	121,871,000	15	121,871,000	0	0
301	Penghapusan	-	(19)	(22,915,030)	(19)	(22,915,030)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(55)	(230,945,015)	(48)	(229,969,320)	(7)	(975,695)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	2	10,860,000	2	10,860,000	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		5	48,914,951	5	48,914,951	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	4	15,426,001	4	15,426,001	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1	33,488,950	1	33,488,950	0	0
310	KOMPUTER		6,929	47,261,176,375	6,735	47,150,611,658	194	110,564,717
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	8,057	54,991,641,281	7,783	54,900,634,947	274	91,006,334
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(115)	(1,226,713,258)	(115)	(1,226,713,258)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset	-	1,572	11,058,777,149	1,535	11,020,945,992	37	37,831,157

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lainnya							
301	Penghapusan	-	(68)	(300,607,500)	(68)	(300,607,500)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(2,812)	(18,888,934,679)	(2,667)	(18,853,950,009)	(145)	(34,984,670)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	295	1,627,013,382	267	1,610,301,486	28	16,711,896
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA		7	99,105,000	7	99,105,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	14	59,670,002	14	59,670,002	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(9)	(9,550,002)	(9)	(9,550,002)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	3	61,965,000	3	61,965,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(1)	(12,980,000)	(1)	(12,980,000)	0	0
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		11	37,619,650	10	37,344,650	1	275,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	13	43,718,650	12	43,443,650	1	275,000
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(2)	(6,099,000)	(2)	(6,099,000)	0	0
318	RAMBU - RAMBU		78	1,565,000	2	520,000	76	1,045,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1	500,000	1	500,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	77	1,065,000	1	20,000	76	1,045,000
319	PERALATAN OLAH RAGA		34	19,875,924	30	19,115,924	4	760,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	39	25,302,875	34	23,948,875	5	1,354,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	3	2,725,000	2	2,550,000	1	175,000
301	Penghapusan	-	(1)	(175,000)	0	0	(1)	(175,000)

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(8)	(11,276,951)	(7)	(10,682,951)	(1)	(594,000)
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	1	3,300,000	1	3,300,000	0	0
401	BANGUNAN GEDUNG		109	20,128,609,781	106	20,118,789,781	3	9,820,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	124	20,130,582,281	121	20,120,762,281	3	9,820,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(8)	(3,837,086,500)	(8)	(3,837,086,500)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	33	26,013,038,800	32	26,007,038,800	1	6,000,000
301	Penghapusan	-	(1)	(159,200,000)	(1)	(159,200,000)	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(39)	(22,018,724,800)	(38)	(22,012,724,800)	(1)	(6,000,000)
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		5	174,379,000	3	169,979,000	2	4,400,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	7	336,057,000	5	331,657,000	2	4,400,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(1)	(55,712,000)	(1)	(55,712,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	3	344,204,000	3	344,204,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(4)	(450,170,000)	(4)	(450,170,000)	0	0
501	JALAN DAN JEMBATAN		357	62,900,000	357	62,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	1,308	720,776,500	1,308	720,776,500	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(951)	(657,876,500)	(951)	(657,876,500)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1	375,163,000	1	375,163,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(1)	(375,163,000)	(1)	(375,163,000)	0	0
502	BANGUNAN AIR		2	22,145,001	2	22,145,001	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	2	22,145,001	2	22,145,001	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1	114,947,500	1	114,947,500	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(1)	(114,947,500)	(1)	(114,947,500)	0	0
503	INSTALASI		14	112,510,600	14	112,510,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	12	107,460,600	12	107,460,600	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	9	34,370,000	9	34,370,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(7)	(29,320,000)	(7)	(29,320,000)	0	0
504	JARINGAN		20	183,896,895	20	183,896,895	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	35	210,896,895	35	210,896,895	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	1	24,959,000	1	24,959,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(16)	(51,959,000)	(16)	(51,959,000)	0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		25,774	1,441,598,439	25,774	1,441,598,439	0	0
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	31,318	1,032,289,355	31,318	1,032,289,355	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	7,452	763,602,000	7,452	763,602,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(13,010)	(439,681,916)	(13,010)	(439,681,916)	0	0
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	14	85,389,000	14	85,389,000	0	0
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		179	29,193,845	162	28,163,845	17	1,030,000
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	183	28,024,845	166	26,994,845	17	1,030,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	13	9,170,000	13	9,170,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(17)	(8,001,000)	(17)	(8,001,000)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

NAMA KL : 005 MAHKAMAH AGUNG

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				**146,761,997,875**		**145,364,364,071**		**1,397,633,804**

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	989,881,589
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	100,395,966
1010301003	Penjepit Kertas	253,459,227
1010301004	Penghapus/Korektor	52,097,793
1010301005	Buku Tulis	301,520,921
1010301006	Ordner Dan Map	968,031,303
1010301007	Penggaris	24,417,583
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	102,196,890
1010301009	Pita Mesin Ketik	4,462,500
1010301010	Alat Perekat	288,509,842
1010301011	Stadler HD	383,717,118
1010301012	Staples	73,071,910
1010301013	Isi Staples	75,115,375
1010301014	Barang Cetakan	2,487,337,593
1010301015	Seminar Kit	678,900
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	744,531,249
1010302001	Kertas HVS	1,717,091,287
1010302002	Berbagai Kertas	208,863,524
1010302003	Kertas Cover	54,398,048
1010302004	Amplop	283,544,696
1010302005	Kop Surat	68,730,925
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	63,343,322
1010303001	Transparant Sheet	7,097,004
1010303002	Tinta Cetak	73,840,687
1010303003	Plat Cetak	188,800
1010303004	Stensil Sheet	219,500
1010303005	Chenical/Bahan Kimia Cetak	85,000
1010303006	Film Cetak	676,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	44,230,913
1010304001	Continuous Form	31,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	3,444,532
1010304003	Pita Printer	3,127,700
1010304004	Tinta/Toner Printer	4,000,171,904
1010304005	Disket	9,409,688
1010304006	USB/Flash Disk	164,774,580
1010304007	kartu Memori	297,250
1010304008	CD/DVD Drive	21,161,883
1010304009	Harddisk Internal	4,543,379
1010304010	Mouse	24,152,998
1010304011	CD/DVD	40,072,670
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	161,161,904
1010306001	Kabel Listrik	46,426,944
1010306002	Lampu Listrik	419,104,059
1010306003	Stop Kontak	13,327,820
1010306004	Saklar	18,773,225

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode	Uraian	Jumlah
1010306005	Stacker	5,207,238
1010306006	Balast	24,006,108
1010306007	Starter	2,290,520
1010306008	Vitting	17,525,965
1010306010	Batu Baterai	202,478,532
1010306999	Alat Listrik Lainnya	109,056,220
1010307001	Bahan Baku Pakaian	4,969,350
1010307002	Penutup Kepala	810,000
1010307004	Penutup Tangan	254,000
1010307006	Atribut	1,602,141,225
1010307007	Perlengkapan Lapangan	1,355,000
1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	20,433,000
1010309001	Meterai	17,727,650
1010309003	Stempel	1,889,123
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	30,976,905
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	2,000,000
1010310003	Persediaan Berupa Alat Penunjang Studio Dan Komunikasi	870,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	11,700,908
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	8,227,800
1010312002	Persediaan Berupa Alat/Bahan Lalu Lintas	49,000
1010313001	Bahan Bakar Minyak (Barang Konsumsi)	280,000
1010313002	Minyak Pelumas (Barang Konsumsi)	32,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	95,872,927
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	196,951,999
1010314003	Obat Gas (Barang Konsumsi)	1,305,740
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	73,500
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	22,020,338
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	260,734,134
1010316002	Buku Nikah	315,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,659,155,558
1010701002	Minuman	123,000
Jumlah Barang Konsumsi		**18,602,549,741**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305001	Sapu Dan Sikat	54,057,491
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	94,761,041
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	4,559,124
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	40,845,159
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	3,686,006
1010305006	Alat Pengikat	13,689,385
1010305007	Peralatan Ledeng	372,700
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	260,857,284
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	5,573,844
1010305012	Pengharum Ruangan	174,093,496
1010305013	Kuas	61,700
1010305014	Segel/Tanda Pengaman	525,900

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

Kode	Uraian	Jumlah
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	409,246,714
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**1,062,329,844**
117131	**Bahan Baku**	
1010101999	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya	143,000
Jumlah Bahan Baku		**143,000**
TOTAL		**19,665,022,585**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 302,000 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 526,107,887 dalam kondisi usang.



RENCANA AKSI *(ACTION PLAN)* TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
PADA MAHKAMAH AGUNG

No. LHP : /LHP/XVI/05/2022
Tanggal : Mei 2022
AKN : Auditorat Utama Keuangan Negara III

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengelolaan Sewa Rumah Dinas Belum Sesuai Ketentuan yang Berlaku	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan: a. Sekretaris PN Bogor, Sekretaris PN Bekasi, dan Sekretaris PA Bogor selaku KPB untuk melakukan pemutakhiran perhitungan tarif pendapatan sewa rumah dinas menggunakan harga satuan bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah terbaru sesuai ketentuan yang berlaku; b. Sekretaris PN Bekasi dan Sekretaris PA Bogor selaku KPB lebih cermat dalam menetapkan penunjukan penggunaan rumah dinas antara lain dengan mencantumkan kewajiban penghuni rumah dinas sesuai ketentuan yang berlaku; c. Sekretaris PN Bogor selaku KPB lebih cermat dalam menyampaikan informasi pegawai PN Bogor yang	Sekretaris MA akan menginstruksikan: a. Sekretaris PN Bogor, Sekretaris PN Bekasi, dan Sekretaris PA Bogor selaku KPB untuk melakukan pemutakhiran perhitungan tarif pendapatan sewa rumah dinas menggunakan harga satuan bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah terbaru sesuai ketentuan yang berlaku; b. Sekretaris PN Bekasi dan Sekretaris PA Bogor selaku KPB lebih cermat dalam menetapkan penunjukan penggunaan rumah dinas antara lain dengan mencantumkan kewajiban penghuni rumah dinas sesuai ketentuan yang berlaku; c. Sekretaris PN Bogor selaku KPB lebih cermat dalam menyampaikan informasi pegawai PN Bogor yang menempati rumah dinas kepada Ketua	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		menempati rumah dinas kepada Ketua PN Bogor untuk ditetapkan dalam surat penunjukan penggunaan rumah dinas; d. Sekretaris PN Bogor, Sekretaris PN Bekasi dan Sekretaris PA Bogor selaku KPB untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait kewajiban pembayaran PBB-P2 rumah dinas; e. Sekretaris PN Bogor selaku KPB untuk membebankan kewajiban pembayaran PBB-P2 kepada penghuni rumah dinas pada PN Bogor; f. PPABP PN Bogor, PPABP PN Bekasi, dan PPABP PA Bogor lebih cermat dalam memutakhirkan data pegawai dalam pemotongan sewa rumah dinas.	PN Bogor untuk ditetapkan dalam surat penunjukan penggunaan rumah dinas; d. Sekretaris PN Bogor, Sekretaris PN Bekasi dan Sekretaris PA Bogor selaku KPB untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait kewajiban pembayaran PBB-P2 rumah dinas; e. Sekretaris PN Bogor selaku KPB untuk membebankan kewajiban pembayaran PBB-P2 kepada penghuni rumah dinas pada PN Bogor; f. PPABP PN Bogor, PPABP PN Bekasi, dan PPABP PA Bogor lebih cermat dalam memutakhirkan data pegawai dalam pemotongan sewa rumah dinas.		
2	Pengendalian Internal Pengembalian Belanja atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Biaya Transportasi Hakim Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan: a. KPA satker terkait lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengembalian tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim; b. Tim Penyelesaian Administrasi Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai dan Biaya Transportasi Hakim di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya TA 2021 dan TA 2022 lebih cermat dalam	Sekretaris MA akan menginstruksikan: a. KPA satker terkait lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengembalian tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim; b. Tim Penyelesaian Administrasi Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai dan Biaya Transportasi Hakim di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya TA 2021 dan TA 2022 lebih cermat dalam melaksanakan monitoring dan	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		melaksanakan monitoring dan verifikasi atas pengembalian tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim; c. Bendahara Pengeluaran BUA lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi atas pengembalian tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim; d. Bendahara Pengeluaran satker terkait: 1) Lebih cermat dalam mengembalikan kelebihan pembayaran biaya transportasi hakim ke rekening Bendahara Pengeluaran BUA; 2) Lebih cermat dalam melaporkan kelebihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran BUA atas setoran kelebihan pembayaran biaya transportasi hakim yang telah dikembalikan ke rekening Bendahara BUA; 3) Lebih cermat dalam melakukan penyetoran kelebihan tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim yaitu mencantumkan nama satker, jenis dan tahun anggaran dalam pengembalian belanja.	verifikasi atas pengembalian tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim; c. Bendahara Pengeluaran BUA lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi atas pengembalian tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim; d. Bendahara Pengeluaran satker terkait: 1) Lebih cermat dalam mengembalikan kelebihan pembayaran biaya transportasi hakim ke rekening Bendahara Pengeluaran BUA; 2) Lebih cermat dalam melaporkan kelebihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran BUA atas setoran kelebihan pembayaran biaya transportasi hakim yang telah dikembalikan ke rekening Bendahara BUA; 3) Lebih cermat dalam melakukan penyetoran kelebihan tunjangan khusus kinerja pegawai dan biaya transportasi hakim yaitu mencantumkan nama satker, jenis dan tahun anggaran dalam pengembalian belanja.		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Pembayaran Uang Makan kepada Pegawai yang Melaksanakan Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja MA Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA Badan Litbang Diklat Kumdil terkait supaya: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya; b. Memerintahkan PPK Badan Litbang Diklat Kumdil, PPK BUA, dan PPK Kepaniteraan lebih cermat dalam menguji kebenaran perhitungan tagihan dan menarik kelebihan pembayaran uang makan kepada pegawai pelaksana perjalanan dinas; c. Memerintahkan PPABP Badan Litbang Diklat Kumdil, PPABP BUA, dan PPABP Kepaniteraan lebih cermat dalam memproses pembuatan Daftar Perhitungan Uang Makan sesuai dengan kondisi pegawai yang sebenarnya; d. Memerintahkan PPSPM Badan Litbang Diklat Kumdil, PPSPM BUA, dan PPSPM Kepaniteraan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; e. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Litbang Kumdil, Bendahara Pengeluaran BUA,	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA Badan Litbang Diklat Kumdil terkait supaya: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya; b. Memerintahkan PPK Badan Litbang Diklat Kumdil, PPK BUA, dan PPK Kepaniteraan lebih cermat dalam menguji kebenaran perhitungan tagihan dan menarik kelebihan pembayaran uang makan kepada pegawai pelaksana perjalanan dinas; c. Memerintahkan PPABP Badan Litbang Diklat Kumdil, PPABP BUA, dan PPABP Kepaniteraan lebih cermat dalam memproses pembuatan Daftar Perhitungan Uang Makan sesuai dengan kondisi pegawai yang sebenarnya; d. Memerintahkan PPSPM Badan Litbang Diklat Kumdil, PPSPM BUA, dan PPSPM Kepaniteraan lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Litbang Kumdil, Bendahara Pengeluaran BUA, dan Bendahara Pengeluaran Kepaniteraan lebih cermat	Semester II Tahun 2022	Atas kelebihan pembayaran uang makan sebesar Rp15.546.100 telah disetorkan ke kas negara pada BUA telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp Rp15.546.100, dengan rincian Badan Litbang Diklat Kumdil sebesar Rp12.819.700, Kepaniteraan sebesar Rp 1.813.700 NTPN BF3C72G4V71F8BBA, dan BUA sebesar Rp912.700 NTPN D267061QUHD8TMTB .

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		dan Bendahara Pengeluaran Kepaniteraan lebih cermat dalam melakukan pengujian dan dan pembayaran tagihan.	dalam melakukan pengujian dan dan pembayaran tagihan.		
4	Realisasi Belanja Konsumsi Rapat pada Satuan Kerja MA Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan belanja konsumsi rapat. b. Memerintahkan PPK satker terkait lebih cermat dalam melakukan persetujuan pembebanan dan pembayaran atas belanja konsumsi rapat; c. Memerintahkan PPSPM satker terkait lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait lebih cermat dalam melakukan pengujian dan pembayaran atas belanja konsumsi rapat.	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait supaya: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan belanja konsumsi rapat. b. Memerintahkan PPK satker terkait lebih cermat dalam melakukan persetujuan pembebanan dan pembayaran atas belanja konsumsi rapat; c. Memerintahkan PPSPM satker terkait lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait lebih cermat dalam melakukan pengujian dan pembayaran atas belanja konsumsi rapat.	Semester II Tahun 2022	
5	Proses Pengadaan Barang Jasa pada Satuan Kerja MA Tidak Sesuai Ketentuan Pengadan Barang Jasa Pemerintah	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA satker terkait: a. Lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pada masing-masing satker sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku;	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA satker terkait: a. Lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pada masing-masing satker sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku;	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Memerintahkan PPK satker terkait lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan memedomani ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku; c. Memerintahkan Pokja Pemilihan pada UKPBJ satker terkait lebih cermat dalam melakukan verifikasi kualifikasi.	b. Memerintahkan PPK satker terkait lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan memedomani ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku; c. Memerintahkan Pokja Pemilihan pada UKPBJ satker terkait lebih cermat dalam melakukan verifikasi kualifikasi.		
6	Realisasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA Badan Litbang Diklat Kumdil supaya: a. Lebih optimal dalam mengendalikan pertanggungjawaban keuangan kegiatan; b. Memerintahkan PPK Badan Litbang Diklat Kumdil lebih cermat melaksanakan tanggung jawabnya dalam merencanakan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan; c. Memerintahkan PPSPM Badan Litbang Diklat Kumdil lebih cermat dalam menguji kebenaran dan menguji dokumen kelengkapan pengajuan tagihan; d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Badan Litbang Diklat Kumdil lebih cermat dalam	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA Badan Litbang Diklat Kumdil supaya: a. Lebih optimal dalam mengendalikan pertanggungjawaban keuangan kegiatan; b. Memerintahkan PPK Badan Litbang Diklat Kumdil lebih cermat melaksanakan tanggung jawabnya dalam merencanakan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan; c. Memerintahkan PPSPM Badan Litbang Diklat Kumdil lebih cermat dalam menguji kebenaran dan menguji dokumen kelengkapan pengajuan tagihan; d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Badan Litbang Diklat Kumdil lebih cermat dalam melaksanakan pengujian dan pembayaran tagihan.	Semester II Tahun 2022	Telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran kemahalan harga kuota pulsa oleh PT TPS sebesar Rp72.960.108 NTPN E1EBD55DEMQTN4OD, dan kelebihan pembayaran atas tenaga editor PT GMK yang tidak tercantum pada kontrak dan pemberian konsumsi kepada personil PT GMK sebesar Rp682.762.500 (Rp 375.795.000 + Rp306.967.500) NTPN 2DBE33C1F1M3OIMF.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		melaksanakan pengujian dan pembayaran tagihan.			
7	Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Mesin Fotokopi Tahun 2021 Sebesar Rp1.139.264.336	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar: a. Menginstruksikan Kepada Biro Perencanaan dann Organisasi untuk Menyusun pedoman pengadaan sewa mesin fotokopi sebelum akhir tahun anggaran berjalan berakhir sehingga pada awal tahun anggaran berikutnya satker dapat segera melaksanakan proses pengadaan sewa mesin forokopi; b. Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; c. Memerintahkan PPK satker terkait untuk: 1) Menarik kelebihan pembayaran pengadaan sewa mesin fotokopi total sebesar Rp1.139.264.336 kepada masing-masing penyedia jasa; 2) Lebih cermat dalam menetapkan jangka waktu perjanjian sewa dan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pendistribusikan barang sesuai ketentuan kontrak dan SPMK;	Sekretaris MA akan: a. Menginstruksikan Kepada Biro Perencanaan dann Organisasi untuk Menyusun pedoman pengadaan sewa mesin fotokopi sebelum akhir tahun anggaran berjalan berakhir sehingga pada awal tahun anggaran berikutnya satker dapat segera melaksanakan proses pengadaan sewa mesin forokopi; b. Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; c. Memerintahkan PPK satker terkait untuk: d. Menarik kelebihan pembayaran pengadaan sewa mesin fotokopi total sebesar Rp1.139.264.336 kepada masing-masing penyedia jasa; e. Lebih cermat dalam menetapkan jangka waktu perjanjian sewa dan lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pendistribusikan barang sesuai ketentuan kontrak dan SPMK; f. Memerintahkan PPSPM satker terkait lebih cermat dalam menguji SPP beserta dokumen pendukungnya;	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		d. Memerintahkan PPSPM satker terkait lebih cermat dalam menguji SPP beserta dokumen pendukungnya; e. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait lebih cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pembayaran.	g. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran satker terkait lebih cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pembayaran.		
8	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Dan Kantor Pada Satker BUA MA Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan PPK Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Kasubbag Angkutan dan Perjalanan Dinas, dan Kasubbag Pengadaan dan Penghapusan: a. Menyusun perencanaan kebutuhan dan peruntukan penggunaan kendaraan sewa jabatan dan operasional di Kantor Pusat MA, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan berpedoman pada ketentuan PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan BMN berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional; b. Menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur rencana kebutuhan kendaraan dinas, tata tertib penggunaan kendaraan dinas, dan monitoring evaluasi terhadap	Sekretaris MA akan menginstruksikan PPK Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan, Kasubbag Angkutan dan Perjalanan Dinas, dan Kasubbag Pengadaan dan Penghapusan: a. Menyusun perencanaan kebutuhan dan peruntukan penggunaan kendaraan sewa jabatan dan operasional di Kantor Pusat MA, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama dengan berpedoman pada ketentuan PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan BMN berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional; b. Menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur rencana kebutuhan kendaraan dinas, tata tertib penggunaan kendaraan dinas, dan monitoring evaluasi terhadap	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		penggunaan kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.	penggunaan kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.		
9	Pemberian sewa rumah dinas pada tiga satuan kerja belum mempertimbangkan ketersediaan dan pemanfaatan aset rumah dinas	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar: a. Melakukan revisi surat Sekretaris MA Nomor 3 Tahun 2020, dengan mengatur kewajiban satker untuk menganalisa dan mempertimbangkan kondisi kelayakan dan kecukupan jumlah rumah dinas jabatan yang dikuasai oleh satker, sebelum merencanakan dan merealisasikan sewa rumah dinas bagi Hakim dan Hakim *Ad Hoc*; b. Menginstruksikan Sekretaris PN Semarang, PT Semarang, dan PTA Semarang selaku KPB lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan realisasi belanja sewa rumah dinas jabatan, dan penatausahaan aset tetap rumah dinas yang dikuasai satker.	Sekretaris MA akan: a. Melakukan revisi surat Sekretaris MA Nomor 3 Tahun 2020, dengan mengatur kewajiban satker untuk menganalisa dan mempertimbangkan kondisi kelayakan dan kecukupan jumlah rumah dinas jabatan yang dikuasai oleh satker, sebelum merencanakan dan merealisasikan sewa rumah dinas bagi Hakim dan Hakim *Ad Hoc*; b. Menginstruksikan Sekretaris PN Semarang, PT Semarang, dan PTA Semarang selaku KPB lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan realisasi belanja sewa rumah dinas jabatan, dan penatausahaan aset tetap rumah dinas yang dikuasai satker.	Semester II Tahun 2022	
10	Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Barang pada BUA MA Tidak Memadai	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kepegawaian, dan Kepala Biro Hukum Humas memerintahkan kepada PPK kegiatan terkait untuk lebih cermat dalam	Sekretaris MA akan menginstruksikan Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kepegawaian, dan Kepala Biro Hukum Humas memerintahkan kepada PPK kegiatan terkait untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan barang/jasa	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan barang/jasa.			
11	Belanja Paket Meeting Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pada PTA Semarang Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan Sekretaris PTA Semarang selaku KPA agar: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya; b. Memerintahkan PPK PTA Semarang lebih cermat dalam menguji kebenaran perhitungan tagihan dan membebankan tagihan sesuai ketentuan; c. Memerintahkan PPSPM PTA Semarang lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; d. Bendahara Pengeluaran PTA Semarang lebih cermat dalam melakukan pengujian dan pembayaran.	Sekretaris MA akan menginstruksikan Sekretaris PTA Semarang selaku KPA agar: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya; b. Memerintahkan PPK PTA Semarang lebih cermat dalam menguji kebenaran perhitungan tagihan dan membebankan tagihan sesuai ketentuan; c. Memerintahkan PPSPM PTA Semarang lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; d. Bendahara Pengeluaran PTA Semarang lebih cermat dalam melakukan pengujian dan pembayaran.	Semester II Tahun 2022	
12	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pemeliharaan Laptop dan	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA pada satker Kepaniteraan dan PN Semarang:	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA pada satker Kepaniteraan dan PN Semarang:	Semester II Tahun 2022	Atas biaya penggunaan anti virus yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban, dan realisasi biaya

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Komputer Tidak Sesuai Ketentuan	a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Memerintahkan PPK pada satker Kepaniteraan MA dan PN Semarang: 1) Menyusun perencanaan pemeliharaan laptop dan personal *computer* sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan laptop dan personal *computer* yang tercantum pada daftar BMN; 2) Lebih cermat dalam menguji kebenaran material dokumen bukti mengenai hak pihak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.	a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Memerintahkan PPK pada satker Kepaniteraan MA dan PN Semarang: 1) Menyusun perencanaan pemeliharaan laptop dan personal *computer* sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan laptop dan personal *computer* yang tercantum pada daftar BMN; 2) Lebih cermat dalam menguji kebenaran material dokumen bukti mengenai hak pihak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.		servis yang tidak sesuai dengan ketentuan telah disetor ke kas negara pada satker Kepaniteraan sebesar Rp29.100.000 NTPN 4F8C3C1F1M4V583
13	Pengendalian Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Tidak Memadai	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan: a. Kepala Biro Umum BUA MA untuk: 1) Menyusun Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengisian BBM untuk kendaraan dinas/operasional pada BUA	Sekretaris MA akan menginstruksikan: a. Kepala Biro Umum BUA MA untuk: 1) Menyusun Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengisian BBM untuk kendaraan dinas/operasional pada BUA 2) Memerintahkan PPK dan Kepala Sub Bagian Pengangkutan dan	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		2) Memerintahkan PPK dan Kepala Sub Bagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas Biro Umum pada BUA yang bertanggungjawab atas pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas/Operasional lebih cermat mengendalikan pelaksanaan perjanjian pengadaan BBM untuk kendaraan dinas operasional jabatan terutama terkait penggunaan RFID sehingga tidak terjadi permasalahan berulang berupa: a) Penggunaan BBM tidak sesuai dengan spesifikasi jenis BBM kendaraan dinas/operasional; b) Penggunaan BBM tidak sesuai dengan kapasitas maksimum kendaraan dinas/operasional dalam satu hari; c) Pengisian minimal BBM untuk mengantisipasi pengisian pada kendaraan roda dua; d) Pengembalian sisa deposit pengadaan BBM PT PR pada akhir tahun. b. Sekretaris PN Bogor dan Sekretaris PA Singaraja selaku KPA memerintahkan: 1) PPK PN Bogor dan PA Singaraja lebih cermat dalam melaksanakan	Perjalanan Dinas Biro Umum pada BUA yang bertanggungjawab atas pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas/Operasional lebih cermat mengendalikan pelaksanaan perjanjian pengadaan BBM untuk kendaraan dinas operasional jabatan terutama terkait penggunaan RFID sehingga tidak terjadi permasalahan berulang berupa: a) Penggunaan BBM tidak sesuai dengan spesifikasi jenis BBM kendaraan dinas/operasional; b) Penggunaan BBM tidak sesuai dengan kapasitas maksimum kendaraan dinas/operasional dalam satu hari; c) Pengisian minimal BBM untuk mengantisipasi pengisian pada kendaraan roda dua; d) Pengembalian sisa deposit pengadaan BBM PT PR pada akhir tahun.		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		pengujian dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 2) PPSPM pada BUA MA, PN Bogor dan PA Singaraja lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; 3) Bendahara Pengeluaran pada PN Bogor dan PA Singaraja lebih cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pembayaran.	b. Sekretaris PN Bogor dan Sekretaris PA Singaraja selaku KPA memerintahkan: 1) PPK PN Bogor dan PA Singaraja lebih cermat dalam melaksanakan pengujian dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 2) PPSPM pada BUA MA, PN Bogor dan PA Singaraja lebih cermat dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya; 3) Bendahara Pengeluaran pada PN Bogor dan PA Singaraja lebih cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pembayaran.		
14	Kekurangan Volume Pekerjaan atas Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima Satuan Kerja MA Sebesar Rp1.211.053.633,07 Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar menginstruksikan KPA masing-masing satuan kerja terkait supaya: a. Lebih cermat melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; b. Memerintahkan PPK satker terkait: 1) Menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi	Sekretaris MA akan menginstruksikan KPA masing-masing satuan kerja terkait supaya: a. Lebih cermat melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; b. Memerintahkan PPK satker terkait: 1) Menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kontrak	Semester II Tahun 2022	Telah dilakukan penyetoran ke kas negara kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada: a. PN Slawi telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp350.495.153,03

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	teknis Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada dua Satuan Kerja MA Sebesar Rp159.592.836,63 Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada dua Satuan Kerja MA sebesar belum dipungut dari penyedia jasa sebesar Rp5.633.537,87 Potensi pendapatan pembongkaran tidak dapat dipungut pada Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Jabatan dan Perluasan Flat Rumah Dinas MA	pekerjaan dengan kontrak sebesar Rp782.398.713,14 yang terdiri dari: a) Kekurangan volume atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Induk MA sebesar Rp276.065.256,41; b) Kekurangan volume atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung F dan G pada MA sebesar Rp16.315.366,69; c) Kekurangan volume atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung MA sebesar Rp48.095.741; d) Kekurangan volume atas Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Jabatan dan Perluasan Flat Rumah Dinas MA sebesar Rp74.820.000; e) Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor PN Jakarta Utara sebesar Rp367.102.349,04; 2) Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Renovasi Gedung	sebesar Rp782.398.713,14 yang terdiri dari: a) Kekurangan volume atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Induk MA sebesar Rp276.065.256,41; b) Kekurangan volume atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung F dan G pada MA sebesar Rp16.315.366,69; c) Kekurangan volume atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung MA sebesar Rp48.095.741; d) Kekurangan volume atas Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Jabatan dan Perluasan Flat Rumah Dinas MA sebesar Rp74.820.000; e) Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor PN Jakarta Utara sebesar Rp367.102.349,04;		NTPN C3D3AB1QIJHD5TPCE b. PN Wonosobo telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp80.654.108,00 NTPN 5C69E61QUHAK8B12 dan dan sebesar Rp100.363.571,69 NTPN 2F1EF8N3E14GGM57; c. PN Purbalingga telah dilakukan penyetoran lunas ke Kas Negara sebesar Rp56.734.924,00 pada tanggal 23 Mei 2022 dengan NTPN 23AB70N9VHS9KJ3M.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		PN Jakarta Utara sebesar Rp5.633.537,87. 3) Supaya lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.	2) Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Renovasi Gedung PN Jakarta Utara sebesar Rp5.633.537,87. 3) Supaya lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.		
15	Penatausahaan Aset Tanah Pada Pengadilan Negeri Tabanan Belum Tertib	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar mengisntruksikan Sekretaris PN Tabanan selaku KPB lebih optimal dalam upaya pengamanan dan penyelesaian pensertifikatan tanah atas nama PN Tabanan/MA.	Sekretaris MA akan mengisntruksikan Sekretaris PN Tabanan selaku KPB lebih optimal dalam upaya pengamanan dan penyelesaian pensertifikatan tanah atas nama PN Tabanan/MA.	Semester II Tahun 2022	
16	Pemberian Fasilitas Kendaraan Jabatan pada Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan agar Sekretaris MA menginstruksikan Sekretaris PN Tangerang selaku KPB meninjau kembali keputusan tentang pengguna kendaraan dinas jabatan dengan memedomani ketentuan tentang standar barang dan standar kebutuhan BMN, serta berkoordinasi dengan Biro Umum terkait peruntukan kendaraan dinas jabatan yang tidak sesuai ketentuan.	Sekretaris MA akan menginstruksikan Sekretaris PN Tangerang selaku KPB meninjau kembali keputusan tentang pengguna kendaraan dinas jabatan dengan memedomani ketentuan tentang standar barang dan standar kebutuhan BMN, serta berkoordinasi dengan Biro Umum terkait peruntukan kendaraan dinas jabatan yang tidak sesuai ketentuan.	Semester II Tahun 2022	
17	Penatausahaan aset tetap Gedung dan Bangunan pada	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menginstruksikan Sekretaris PN Bekasi selaku KPB untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan	Sekretaris MA akan menginstruksikan Sekretaris PN Bekasi selaku KPB untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	PN Bekasi tidak tertib	Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terkait penghapusan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah dibongkar untuk direnovasi dan selanjutnya melakukan pencatatan atas nilai Gedung dan Bangunan hasil renovasi.	Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan terkait penghapusan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah dibongkar untuk direnovasi dan selanjutnya melakukan pencatatan atas nilai Gedung dan Bangunan hasil renovasi.		
18	Aset Tetap Renovasi belum diserahkan kepada Instansi Pemerintah Pemilik Gedung dan Bangunan	BPK merekomendasikan Sekretaris MA selaku Pengguna Barang untuk segera memproses dan menyelesaikan penyerahan ATR kepada instansi pemilik gedung dan bangunan.	Sekretaris MA selaku Pengguna Barang akan segera memproses dan menyelesaikan penyerahan ATR kepada instansi pemilik gedung dan bangunan.	Semester II Tahun 2022	
19	Aset Gedung dan Bangunan yang Sudah Dihentikan Penggunaannya Belum Dilakukan Penghapusan	BPK merekomendasikan Sekretaris MA selaku Pengguna Barang agar mengisntruksikan KPB untuk memproses dan menyelesaikan penghapusan BMN Rumah Negara atas delapan rumah negara yang sudah dihentikan penggunaannya dan telah dilakukan pembangunan bangunan pengganti.	Sekretaris MA selaku Pengguna Barang akan mengisntruksikan KPB untuk memproses dan menyelesaikan penghapusan BMN Rumah Negara atas delapan rumah negara yang sudah dihentikan penggunaannya dan telah dilakukan pembangunan bangunan pengganti.	Semester II Tahun 2022	
20	Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Sekretaris MA agar: a. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan supaya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Kepaniteraan untuk menyusun petunjuk teknis	Sekretaris MA akan: a. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan supaya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Kepaniteraan untuk menyusun petunjuk teknis penggunaan aplikasi terkait cara	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		penggunaan aplikasi terkait cara penginputan, data yang diinput, dokumen pendukung yang harus diunggah guna keseragaman pelaporan keuangan perkara; b. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan untuk mengungkapkan uang perkara yang disalahgunakan dalam CaLK MA; c. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait pertanggungjwaban pengelolaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam hal: 1) Pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada Aplikasi Komdanas; 2) Verifikasi atas akurasi saldo biaya proses dan uang titipan pihak ketiga yang diinput oleh kasir/inputer komdanas; 3) Penyelesaian saldo kas kurang atas uang perkara yang dikelola satker. d. Menginstruksikan Sekretaris PN Bogor dan PN Surabaya belum mengungkapkan uang perkara yang disalahgunakan dalam CaLK satker; e. Menginstruksikan Sekretaris PN terkait supaya: 1) Memerintahkan Kasir/inputer komdanas Biaya Proses satker	penginputan, data yang diinput, dokumen pendukung yang harus diunggah guna keseragaman pelaporan keuangan perkara; b. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan untuk mengungkapkan uang perkara yang disalahgunakan dalam CaLK MA; c. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait pertanggungjwaban pengelolaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam hal: 1) Pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada Aplikasi Komdanas; 2) Verifikasi atas akurasi saldo biaya proses dan uang titipan pihak ketiga yang diinput oleh kasir/inputer komdanas; 3) Penyelesaian saldo kas kurang atas uang perkara yang dikelola satker. d. Menginstruksikan Sekretaris PN Bogor dan PN Surabaya belum mengungkapkan uang perkara yang disalahgunakan dalam CaLK satker; e. Menginstruksikan Sekretaris PN terkait supaya:		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		terkait supaya lebih cermat dalam melakukan penginputan data biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam Aplikasi Komdanas sesuai dengan ketentuan; 2) Berkoordinasi dengan Panitera PN terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga.	1) Memerintahkan Kasir/inputer komdanas Biaya Proses satker terkait supaya lebih cermat dalam melakukan penginputan data biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam Aplikasi Komdanas sesuai dengan ketentuan; 2) Berkoordinasi dengan Panitera PN terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga.		
21	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa Perolehan dari BTN Perolehan Tahun 2021 Tidak Sesuai Ketentuan dan Pengendalian atas Pengelolaan Hasil Kerjasama *Sponsorship* dengan BTN Belum Memadai	BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar: a. Menyusun regulasi terkait kerjasama dan hasil yang diperoleh MA dari bank mitra, yang diantaranya mengatur tentang bentuk penerimaan hasil kerjasama, pemanfaatan hasil kerjasama, pelaporan, serta monitoring evaluasi hasil kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan sementara penerimaan hasil kerjasama sampai dengan regulasi terkait kerjasama dan hasil yang diperoleh MA dari bank mitra disusun dan ditetapkan;	Sekretaris MA akan: a. Menyusun regulasi terkait kerjasama dan hasil yang diperoleh MA dari bank mitra, yang diantaranya mengatur tentang bentuk penerimaan hasil kerjasama, pemanfaatan hasil kerjasama, pelaporan, serta monitoring evaluasi hasil kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan sementara penerimaan hasil kerjasama sampai dengan regulasi terkait kerjasama dan hasil yang diperoleh MA dari bank mitra disusun dan ditetapkan; c. Menginstruksikan kepada seluruh KPB pada MA dan Badan Peradilan	Semester II Tahun 2022	

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		c. Menginstruksikan kepada seluruh KPB pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang mendapatkan perolehan manfaat dari BTN untuk menginventarisir perolehan manfaat berupa barang-barang yang diterima dari BTN namun belum dicatat sebagai BMN kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencatat barang-barang yang diterima dari BTN sebagai BMN.	yang berada di bawahnya yang mendapatkan perolehan manfaat dari BTN untuk menginventarisir perolehan manfaat berupa barang-barang yang diterima dari BTN namun belum dicatat sebagai BMN kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencatat barang-barang yang diterima dari BTN sebagai BMN.		

Jakarta, Mei 2022

Sekretaris Mahkamah Agung,

Hasbi Hasan



CATATAN HASIL REVIU (CHR) BADAN PENGAWASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 *UNAUDITED*

RENCANA AKSI
TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEMESTER II TA 2022
31 DESEMBER 2022

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
Penyelenggaraan Akuntansi					
1.	Penugasan Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023 s/d 3 Maret 2023 dan dilakukan setelah tutup buku periode 13 SAKTI pada modul Persediaan, Modul Aset Tepat dan modul GLP secara permanen tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan pukul 17.00 WIB.	Terhadap hasil Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan perbaikan pada periode 14 SAKTI pada modul Persediaan, Modul Aset Tepat dan modul GLP (audited).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)		-
2.	Terdapat entitas akuntansi tahun 2022 teralokasi DIPA tahun 2022 sebanyak 1827 satuan kerja dengan	Terhadap entitas akuntansi tahun 2022 teralokasi DIPA tahun 2022 sebanyak 1827 satuan kerja dengan	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)		-

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	alokasi anggaran Rp.11.514.469.985.000,- direalisasikan untuk periode berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp.11.278.926.698.631,- (97,95%).	alokasi anggaran Rp.11.514.469.985.000,- direalisasikan untuk periode berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp.11.278.926.698.631,- (97,95%) sudah dilakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan disampaikan kepada BPK dan Kemenkeu.			
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 telah menggunakan SAKTI full module untuk seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung yang masih terdapat proses migrasi data ke SAKTI sehingga proses reviu atas LK terbatas pada data Aplikasi MonSakti per tanggal 25-02-2023.	Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022 telah menggunakan SAKTI full module dan untuk seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung yang masih dalam proses migrasi data ke SAKTI akan dilakukan perbaikan pada periode 14 (audited)	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	5 Bagian pada Biro Keuangan BUA dan Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan	Sudah dilakukan migrasi data.
4.	Terdapat 12 (dua belas) Pungutan Pajak Belum Setor sebesar Rp.	Atas Pungutan Pajak Belum Setor sebesar Rp. 4.706.430 (empat juta	Semester II Tahun	Bagian Akuntansi, Bagian	Satuan Kerja telah melakukan penyetoran pada bulan Januari 2023, telah diungkapkan/dijelaskan pada

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	4.706.430 (empat juta tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) pada 5 (lima) satuan kerja, yaitu : PN Situbondo, PA Payakumbuh, PA Kuala Tungkal, PT Banten dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.	tujuh ratus enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) pada 5 (lima) satuan kerja, yaitu : PN Situbondo, PA Payakumbuh, PA Kuala Tungkal, PT Banten dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN sudah disetorkan pada tahun 2023 dan diungkap pada Laporan Keuangan.	2022 (*Audited*)	Perbendaharaan Biro Keuangan BUA dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilmiltun	CaLK Neraca Tahun 2022 (*Unaudited*) dan akan diungkapkan kembali dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Audited*).
5.	Terdapat 16 (enam belas) BAST-BG (Jaminan Akhir Tahun) belum BAST Final pada 4 (empat) satuan kerja, yaitu : PN Ujung Pandang, PN Mamuju, PA Rumbia, PN Lasusua.	Terhadap Jaminan Akhir Tahun belum final agar dilakukan monitoring pada periode pelaporan selanjutnya.	Semester I Tahun 2023	Bagian Akuntansi dan Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BUA	BAST-BG Final pada 4 satuan kerja akan dicatat di aplikasi SAKTI periode pelaporan Semester I Tahun 2023.
6.	Terdapat rincian saldo akun tidak normal periode sampai dengan bulan 13 tahun 2022 sebanyak 1 transaksi pada 1 satuan kerja (PA Malang Kab. Malang).	Terhadap saldo akun tidak normal agar dilakukan koreksi pada periode 14 (audited).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Akuntansi dan Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan BUA	Satuan kerja akan melakukan ralat akun atas SPM Nomor 00163A tanggal 8 desember 2022 ke KPPN setempat pada periode 14 (*Audited*) dan telah dijelaskan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
Laporan Realisasi Anggaran – Pendapatan					
1.	Terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan / Jasa Giro (akun : 425764) pada 15 satuan kerja yaitu: PA Simalungun, PA Depok, PA Purwokerto, PN Kuala Kapuas, PN Penajam, PN Gorontalo, PA Suwawa, PN Jakarta Pusat, PN Airmadidi, PA Rengat, PA Jombang, PN Menggala, PA Binjai, PN Liwa dan PN Klungkung sebesar Rp 159.516.500 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).	Terhadap Akun Pendapatan Jasa Giro yang masih terdapat pada 15 satuan kerja atas pengelolaan rekening satuan kerja agar dilakukan penertiban rekening pemerintah pada satuan kerja yaitu Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang mewajibkan pengelolaanya melalui TNP (Treasury National Pooling).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian PNBP, Bagian Perbendaharaan, Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilum, Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilag	Pada 15 satuan kerja tersebut telah dijelaskan dan diungkapakan pada CaLK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Unaudited* dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited* serta akan disampaikan surat perintah agar tidak terdapat jasa giro tahun berikutnya.
2.	Terdapat Pendapatan Anggaran Lain-Lain (akun : 425999) pada 9 (sembilan) satuan kerja yaitu: PA Sidenreng, PN Enrekang, PN Toli Toli,	Terhadap Pendapatan Anggaran Lain-Lain (akun : 425999) pada 9 (sembilan) satuan kerja yaitu: PA Sidenreng, PN Enrekang, PN Toli Toli,	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian PNBP, Bagian Akuntansi Biro Keuangan, Bagian Perencanaan	Pada 9 satuan kerja telah dijelaskan dan diungkapakan pada CaLK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Unaudited* dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	PN Kab. Malang, PA Magetan, Dirjen Badimiltun, Dilmil II - 08 di Jakarta, PN Jepara, PA Rangkas Bitung sebesar Rp 5.219.026,-(Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).	PN Kab. Malang, PA Magetan, Dirjen Badimiltun, Dilmil II - 08 di Jakarta, PN Jepara, PA Rangkas Bitung sebesar Rp 5.219.026,-(Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah). Akan dilakukan perbaikan di periode 14 (audited)		dan Keuangan Ditjen. Badilum, Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilag dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilmiltun	
Laporan Realisasi Anggaran – Belanja					
1.	Terdapat realisasi belanja akun 521111, 521119, 521131, 521211, 521241, 521252, 522141, 522192, 523111, 523119, 523121, 532111, 533111, 533121 yang membentuk Barang persediaan sebesar Rp944.673.262,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta enam	Terhadap akun 521111, 521119, 521131, 521211, 521241, 521252, 522141, 522192, 523111, 523119, 523121, 532111, 533111, 533121 yang membentuk akun persediaan agar dilakukan sosialisasi/ pembinaan/ TOT terkait penginputan Modul komitmen.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntnasi Biro Keuangan	Pada 14 akun tersebut telah dijelaskan dan diungkapakan pada CaLK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Unaudited* dan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited.* Sekretaris Mahkamah Agung akan membuat surat edaran kepada seluruh satuan kerja terkait penginputan Modul Komitmen atas 14 akun tersebut dan dilakukan Sosialisasi/Pembinaan dan ToT.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) pada 44 satuan kerja dikarenakan ketidakcermatan operator/ PPK dalam menginput kode barang pada modul komitmen.				Berikut link penjelasan dari Ketidaksesuaian Kode Akun vs Persediaan: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_iixYkZGQg3J5ADjmONZPNPt5YmYPUf/edit#gid=813547671
2.	Terdapat Realisasi Belanja Modal Akun 532111, 532118, 533111, 533121 yang yang tidak sesuai dengan kode BMN sebesar Rp30.368.876.460,00 (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) pada 233 satuan kerja dikarenakan ketidakcermatan operator/ PPK dalam menginput kode barang pada modul komitmen.	Terhadap Belanja Modal Akun 532111, 532118, 533111, 533121 yang direalisasikan menjadi aset ekstrakomptabel (dibawah nilai kapitalisasi) agar dilakukan sosialisasi/ pembinaan/ TOT terkait penginputan Modul komitmen.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntnasi Biro Keuangan	Pada 4 Akun tersebut telah dijelaskan dan diungkapkan pada CaLK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Unaudited* dan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022. Sekretaris Mahkamah Agung akan membuat surat edaran kepada seluruh satuan kerja terkait penginputan Modul Komitmen atas 4 akun tersebut serta akan dilakukan Sosialisasi/Pembinaan dan ToT. Berikut link penjelasan dari Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ruytMGnGxU6pfk3waUPlSLQ494bj

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					aFRZ/edit?usp=share_link&ouid=117703344789286048571&rtpof=true&sd=true
3.	Terdapat Belanja Peralatan dan mesin - ekstrakomptabel diatas nilai kapitalisasi sebesar Rp17.404.500 (tujuh belas juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) pada 7 satker.	Terhadap Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel diatas nilai kapitalisasi agar ke depan Pengelola Keuangan lebih cermat dalam merealisasikan anggarannya.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Biro Keuangan	Pada 7 satuan kerja: - Pengadilan Negeri Sampang - Pengadilan Agama Maros - Pengadilan Agama Jakarta Utara - Pengadilan Agama Purwodadi - Pengadilan Agama Payakumbuh - Pengadilan Agama Sintang - Pengadilan Agama Buntok akan dijelaskan dan diungkapakan kembali pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) dan membuat surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Laporan Operasional					
1.	Terdapat Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.948.133.537 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan	Terhadap Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel agar ke depan Pengelola Keuangan lebih cermat dalam merealisasikan anggarannya.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan, Bagian Akuntansi, dan	Akun Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin telah dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK Laporan Operasional (LO) *Unaudited* dan dan diungkap kembali pada Laporan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).			Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan	Keuangan *Audited*. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi (Pembinaan/ToT). Penjelasan lebih lanjut pada tautan di bawah ini: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hyGAKgyTtw0v8yR6Zc8MdQ_L3hs-TvEC/edit#gid=796079099
2.	Terdapat Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 658.409.765 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah.	Terhadap Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel agar ke depan Pengelola Keuangan lebih cermat dalam merealisasikan anggarannya.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan, Bagian Akuntansi, dan Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan	Akun Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan telah dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK Laporan Operasional (LO) *Unaudited* dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited*. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi (Pembinaan/ToT). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hyGAKgyTtw0v8yR6Zc8MdQ_L3hs-TvEC/edit#gid=1077271710
Laporan Perubahan Ekuitas					
1.	Terdapat Koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 737.584.260 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh	Terhadap koreksi nilai persediaan agar pengelola persediaan lebih tertib dalam	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan,	Akun Koreksi Nilai Persediaan telah dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) *Unaudited* dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited*.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	empat ribu dua ratus enam puluh rupiah)	penatausahaan barang persediaan.		Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilum	Disamping itu akan dilakukan sosialisasi (Pembinaan/TOT). Penjelasan atas koreksi nilai persediaan telah dituangkan dalam LK tahunan 2022 Mahkamah Agung: https://drive.google.com/file/d/1nZRsOIFO0qoe_s0h8g4wmlC6iHVPdjW2/view?usp=share_link
2.	Terdapat Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya senilai Rp134.596.433 (Seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) pada 9 satuan kerja.	Terhadap Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya agar pengelola aset lebih tertib dalam penatausahaan BMN.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Tidak ada selisih RK/RM atas akun Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Hal tersebut telah dijelaskan/diungkapkan dalam CaLK Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) *Unaudited* dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan MA Tahun 2022 (*Audited*). Penjelasan atas koreksi RK/RM telah dituangkan dalam LK tahunan 2022 Mahkamah Agung: https://drive.google.com/file/d/19XRJnAO7VXmEduY1z4YsVFRu7vIP0_uH/view?usp=share_link

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
3.	Terdapat selisih transfer keluar/masuk sebesar Rp12.735.055 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).	Terhadap selisih Transfer keluar/masuk agar dilakukan identifikasi dan dilakukan koreksi pencatatan.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan, Bagian Akuntansi Biro Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilum	Selisih Transfer Keluar/Masuk telah dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) *Unaudited* dan akan dilakukan koreksi jurnal yang *double* pada periode 14 Modul GLP.
4.	Terdapat reklas keluar/masuk sebesar Rp134.596.433 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) pada 9 satuan kerja.	Terhadap selisih reklas keluar/masuk agar dilakukan identifikasi dan dilakukan koreksi pencatatan.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan	Tidak terdapat selisih Reklas Keluar/Reklas Masuk, terdapat nilai sebesar Rp134.596.433 pada monitoring reklasifikasi keluar/reklasifikasi masuk berasal dari: 1. Akumulasi penyusutan atas transaksi Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap maupun sebaliknya dengan nilai aset di atas kapitalisasi sebesar Rp8.354.167. 2. Reklasifikasi Persediaan ke Aset Tetap maupun sebaliknya dengan nilai aset di bawah kapitalisasi sebesar Rp142.950.600 Hal tersebut telah dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) *Unaudited* dan

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited.*
			Neraca		
1.	Terdapat Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.271.770.124 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah) pada Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.	Terhadap Kas di Bendahara Pengeluaran sudah disetorkan pada tahun 2023 dan diungkap pada Laporan Keuangan serta kedepannya Bendahara Pengeluaran akan lebih tertib dalam Pengelolaan Kas (baik dalam brankas maupun rekening).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilag, Bagian Akuntansi dan Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BUA.	Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri atas Kas di Bendahara Pengeluaran UP sebesar Rp37.636.380 pada 6 satuan kerja dan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp234.133.744 pada 4 satker merupakan sisa UP/TUP yang terlambat disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2022. Satuan kerja telah melakukan penyetoran pada bulan Januari tahun 2023 dan telah diungkapkan/dijelaskan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited)* dan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited.*
2.	Terdapat Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.6.544.000 (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.	Terhadap Kas di bendahara Penerimaan sudah disetorkan ke kas negara pada tahun 2023 dan diungkap pada Laporan Keuangan serta kedepannya Bendahara Penerimaan akan lebih tertib dalam penyetoran PNBP.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilum, Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilag, Bagian Akuntansi dan	Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.894.000 pada 7 satuan kerja merupakan PNBP yang diterima pada akhir Desember 2022 dan baru disetorkan pada bulan Januari 2023 serta telah diungkapkan/ dijelaskan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
				Bagian PNBP Biro Keuangan BUA.	Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.650.000 pada Satuan Kerja 005.04.1000.652035 Pengadilan Agama Sengeti merupakan kesalahan pencatatan transaksi uang masuk yang telah dihapuskan pada Modul Bendahara namun tidak terposting oleh sistem. Satuan kerja telah mengajukan tiket ke HAIDJPb namun belum mendapatkan balasan. Akan dilakukan perbaikan pada LK MA Tahun 2022 (*Audited*) dan telah diungkapkan/dijelaskan pada CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*). Hal ini akan dikomunikasikan dan ditindaklanjuti bersama BPK dan Kementerian Keuangan.
3.	Terdapat Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp.234.133.744 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Agama Lolak, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan	Terhadap Kas di Bendahara Pengeluaran sudah disetorkan pada tahun 2023 dan diungkap pada Laporan Keuangan serta kedepannya Bendahara Pengeluaran akan lebih tertib dalam Pengelolaan Kas (baik dalam brankas maupun rekening).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Akuntansi dan Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BUA.	Merupakan sisa TUP yang terlambat disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2022. Satuan kerja telah melakukan penyetoran pada bulan Januari tahun 2023. Penjelasan atas Kas di Bendahara Pengeluaran TUP telah diungkapkan/dijelaskan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*) dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited.*

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Badan Urusan Administrasi.				
4.	Terdapat Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.43.571.855 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) pada 7 (tujuh) satuan kerja.	Terhadap Kas di Bendahara Pengeluaran agar kedepannya Bendahara Pengeluaran lebih tertib dalam Pengelolaan Kas (baik dalam brankas maupun rekening).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilmiltun, Bagian Perencanaan dan Keuangan Balitbang Diklat Kumdil, Bagian Akuntansi dan Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BUA.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.706.430 pada 5 satuan kerja merupakan utang pajak yang belum disetorkan pada tahun 2022. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.805.000 pada Satuan Kerja 005.01.0199.663157 Badan Urusan Administrasi merupakan kelebihan tunjangan kinerja Badan Litbang Diklat Kumdil TA 2022. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp26.060.425 pada Satuan Kerja 005.06.0199.309055 Badan Litbang Diklat Kumdil merupakan sisa belanja barang TA 2022. Satuan kerja telah melakukan penyetoran pada bulan Januari tahun 2023. Penjelasan atas Kas di Bendahara Pengeluaran TUP telah diungkapkan/dijelaskan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*) dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan *Audited*.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
5.	Terdapat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp.5.995.310.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada Pengadilan Negeri Cikarang.	Terhadap Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp.5.995.310.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pada Pengadilan Negeri Cikarang akan direalisasikan pada tahun 2023.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA, Bagian Rencana Program Biro Perencanaan BUA, dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA.	Merupakan penerimaan Hibah pada Satuan Kerja 005.01.0200.401915 Pengadilan Negeri Cikarang di TA 2022 yang belum dilakukan realisasi dan pengesahan dari KPPN. Satuan kerja akan melakukan realisasi belanja atas Hibah tersebut pada TA 2023. Hal tersebut telah diungkapkan/dijelaskan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*) dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*).
6.	Terdapat Bahan baku sebesar Rp.143.000 (Seratus empat puh tiga ribu rupiah) pada Pengadilan Tinggi Jambi.	Terhadap Bahan Baku yang tercatat agar dilakukan identifikasi dan melakukan koreksi pada periode 14 (audited).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilum, Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA.	Terdapat Bahan Baku senilai Rp143.000,00 karena kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen. Koreksi reklasifikasi sudah tidak bisa dilakukan karena sudah dihabispakaikan di periode Januari 2023. Sudah mengajukan tiket ke haidjpb untuk pembatalan transaksi habis pakai tetapi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan pada januari 2023 sudah terdapat transaksi TKTM. Satuan kerja telah bertiket ke Haidjpb untuk menghapus transaksi TK/TM di tahun 2023, jawaban dari Haidjpb bahwa transaksi tersebut tidak bisa dihapus.

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
					Penjelasan atas Bahan Baku akan diungkap pada Laporan Keuangan MA Tahun 2022 (*Audited*).
7.	Terdapat Irigasi sebesar Rp.23.980.707.438 (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).	Terhadap Aset Irigasi agar dilakukan identifikasi dan melakukan koreksi pada periode 14 (audited).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA.	Bagian IKN Biro Perlengkapan sudah melakukan proses verifikasi kepada masing-masing satuan kerja, atas hasil verifikasi tersebut untuk aset yang bukan merupakan aset irigasi akan dilakukan koreksi reklasifikasi ke aset yang seharusnya pada periode 14 (*Audited*). Penjelasan atas Irigasi telah dijelaskan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*) dan akan diungkapkan kembali pada CaLK MA Tahun 2022 (*Audited*).
8.	Terdapat Aset Tetap Renovasi sebesar Rp2.879.201.000 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah) pada Pengadilan Negeri Manokwari, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama	Terhadap Aset Tetap Renovasi agar dilakukan identifikasi dan melakukan penyerahan aset pada periode pelaporan selanjutnya.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA.	Terhadap aset tetap renovasi: 1. PA Jakarta Utara dan PA Manokwari sedang dilakukan Hibah Keluar Aset Tetap Renovasi ke Pemerintah Daerah. 2. PA Jakarta Pusat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Jakarta Pusat terhadap Aset Tetap Renovasi tersebut. Penjelasan atas Aset Tetap Renovasi telah dijelaskan dalam CaLK MA Tahun

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	Jakarta Utara.				2022 (*Unaudited*) dan akan diungkap kembali pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hyGAKgyTtw0v8yR6Zc8MdQ_L3hs-TvEC/edit#gid=1767022042
9.	Terdapat kurang catat Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.624.913.729 (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu empat tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atas tunggakan biaya pindah tenaga teknis pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama TA 2022.	Terhadap kurang catat Utang Kepada Pihak Ketiga agar dilakukan koreksi pencatatan periode 14 (audited).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilag, Bagian Akuntansi dan Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BUA.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen. Badilag akan melakukan perbaikan dengan melakukan jurnal koreksi akrual Utang Kepada Pihak Ketiga pada periode 14 (*Audited*).
10.	Terdapat Persediaan senilai Rp302.000 (tiga ratus dua ribu rupiah) dalam kondisi rusak dan persediaan senilai Rp526.107.887 (lima	Terhadap Barang Persediaan yang rusak dan usang agar dilakukan identifikasi dan melakukan penghapusan pada	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA dan Bagian Inventarisasi Kekayaan	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA akan melakukan verifikasi kepada satuan kerja dan akan melakukan penghapusan pada periode 14 (*Audited*).

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
	ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dalam kondisi usang.	periode pelaporan selanjutnya.		Negara Biro Perlengkapan BUA.	Penjelasan atas Persediaan Rusak/Usang telah dijelaskan/diungkapkan dalam CaLK MA Tahun 2022 (*Unaudited*). Penjelasan lebih lanjut terhadap persediaan usang dan/atau rusak berat pada link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gy_fERVVqCF6KOaKHbc3-tZP7S98edFo/edit?usp=share_link&ouid=109627060809420314772&rtpof=true&sd=true
11.	Terdapat Aset Tak berwujud berupa website yang dicatat sebagai software sebesar Rp2.465.784.312 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) pada 61 (enam puluh satu) satuan kerja.	Terhadap Aset Tak Berwujud berupa website dicatat sebagai software agar dilakukan identifikasi dan melakukan koreksi pada periode 14 (audited).	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)	Bagian Akuntansi Biro Keuangan BUA dan Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA.	Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA akan melakukan verifikasi dan validasi kepada satuan kerja, untuk aset berupa website akan dilakukan koreksi reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud Lainnya (8010101999) pada periode 14 (*Audited*).
Catatan atas Laporan Keuangan					

No.	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Batas Waktu	Penanggung Jawab	Tindak Lanjut
1.	Tim Reviu memperoleh dokumen CALK pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul 19.00 WIB.	CaLK yang merupakan satu kesatuan Laporan Keuangan yang tidak terpisahkan sehingga wajib untuk dibuat bersamaan dengan Laporan Keuangan.	Semester II Tahun 2022 (*Audited*)		

Jakarta, Maret 2023
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.



KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

4. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat KL

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
TAHUNAN TA 2022

Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	√		Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak

	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	√		Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)	√		Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	-	-	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	-	-	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	-	-	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial	√		Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	-	-	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	-	-	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	-	-	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	-	-	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	-	-	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		**-**	
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		**2.181.985.954**	
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	√		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	√		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	√		Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	-	-	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-	-	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	√		Tidak

7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya

	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	-	-	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	-	-	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	-	-	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	-	-	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	-	-	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	-	-	Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	-	-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	-	-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	-	-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	-	-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	-	-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	-	-	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

	PENGECEKAN PADA MONSAKTI
	To Do List
1.	Realisasi belanja barang melebihi pagu (Pagu Minus) pada Satuan Kerja 00504.0600.401583 Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar Rp5.969.000,00 pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Biasa disebabkan oleh: - SPM Nomor 00004A tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp143.481.000,00 merupakan pagu yang berasal dari PNBP. Transaksi tersebut merupakan MP (Maksimum Pencairan) PNBP Tahap ke II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-165/PB/2022. - Terjadi kesalahan pembebanan akun, pada saat diajukan ke KPPN yaitu akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp143.481.000,00 seharusnya pembebanan pada 2 akun, yaitu : akun 521211 - Belanja Bahan sebesar Rp5.969.000,00 sedangkan akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp137.512.000,00. Kondisi tersebut menyebabkan pagu minus pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

5.	a. Terdapat Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan yang menggunakan akun: 1) 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran 2) 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 3) 521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 4) 521211 - Belanja Bahan 5) 521241 - Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 6) 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 7) 522141 - Belanja Sewa 8) 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9) 523119 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 10) 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11) 532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12) 533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13) 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan b. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan disebabkan oleh: 1) Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, yang seharusnya tidak perlu dirincikan sebagai persediaan dikarenakan barang tersebut tidak distok. 2) Kesalahan penggunaan akun saat merealisasikan belanja barang persediaan.
9.	a. Terdapat Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Barang Aset Tetap/ATB yang menggunakan akun: 1) 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran 2) 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 3) 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 4) 521254 - Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel 5) 521811 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6) 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7) 523119 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 8) 532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9) 532118 - Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 10) 532121 - Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 11) 533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12) 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 13) 536111 - Belanja Modal Lainnya b. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB disebabkan oleh: 1) Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, yang seharusnya tidak perlu dirincikan sebagai aset. 2) Kesalahan penggunaan akun saat merealisasikan belanja modal atas aset dengan nilai diatas kapitalisasi.
	Daftar MONSAKTI
4.	Realisasi belanja barang melebihi pagu (Pagu Minus) pada Satuan Kerja 00504.0600.401583 Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar Rp5.969.000,00 pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Biasa disebabkan oleh: - SPM Nomor 00004A tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp143.481.000,00 merupakan pagu yang berasal dari PNBP. Transaksi tersebut merupakan MP (Maksimum Pencairan) PNBP Tahap ke II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-165/PB/2022. - Terjadi kesalahan pembebanan akun, pada saat diajukan ke KPPN yaitu akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp143.481.000,00 seharusnya pembebanan pada 2 akun, yaitu : akun 521211 - Belanja Bahan sebesar Rp5.969.000,00 sedangkan akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp137.512.000,00. Kondisi tersebut menyebabkan pagu minus pada akun 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL
	Akun-akun yang tidak boleh ada
13.	Terdapat akun Bahan Baku pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jambi (005.03.1000.400504) yang disebabkan oleh kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen. Koreksi reklasifikasi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan sudah dihabispakaikan di periode januari 2023. Sudah mengajukan tiket ke haidjpb untuk pembatalan transaksi habispakai tetapi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan pada Januari 2023 sudah terdapat transaksi TKTM.
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas
1.	Terdapat akun Bahan Baku pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jambi (005.03.1000.400504) yang disebabkan oleh kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen. Koreksi reklasifikasi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan sudah dihabispakaikan di periode januari 2023. Sudah mengajukan tiket ke haidjpb untuk pembatalan transaksi habispakai tetapi sudah tidak bisa dilakukan dikarenakan pada Januari 2023 sudah terdapat transaksi TKTM.
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)
2.	Terdapat 1 satuan kerja yang belum tuntas dalam melakukan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang pada Modul Aset Tetap atas Pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu, yakni Badan Urusan Administrasi (005.01.0199.663157) sebesar Rp778.240.450.
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)

2.	Terdapat 2 satuan kerja yang melakukan pencatatan Perolehan Lainnya: 1. Pengadilan Agama Kebumen (005.01.0300.401055) merupakan perolehan lainnya berupa tanah bangunan rumah negara gol.1 atas perolehan tanah idle karena tidak ada ADK dari satker pemberi sehigga masuk ke perolehan lainnya sebesar 803.000.000. 2. Pengadilan Negeri Blangpidie (005.01.0600.401902) merupakan Perolehan Lainnya berupa Paket Meubelair yang diperoleh dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai Pada Periode 13 adalah -5.536.194.599. Dan Perolehan Lainnya Paket Pekerjaan Sarana Lingkungan yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai pada Periode 13 adalah - 2.974.681.578 (Jalan Khusus Lainnya -1.154.655.890, Jembatan Penyeberangan Kendaraan - 946.789.100, Saluran Sekunder Pembuangan (Saluran Pembuang Pasang Surut) -513.236.588). Perlu Adanya Koreksi Kembali atas Perolehan Lainnya tersebut akibat nilai harga satuan yang termutlipikasi hasil generate aplikasi SAKTI sehingga nilai keseluruhan Perolehan Lainnya melampaui nilai Perolehan yang diperoleh dari hasil pemecahan KDP.
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
1.	a. Terdapat akun 491511 - Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 - Beban Penyesuaian Nilai Persediaan yang disebabkan oleh pencatatan koreksi kuantitas dan koreksi nilai pada Modul Persediaan.
	PENGECEKAN NERACA
	Pengecekan Pos-Pos Neraca
6.	Terdapat kenaikan yang signifikan pada kelompok akun: a. Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar 1.736,61%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Cikarang (005.01.0200.401915) sebesar Rp5.995.310.000. Saldo tersebut merupakan Penerimaan Hibah Uang di Tahun 2022 yang belum direalisasikan/dibelanjakan. b. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar 338.73%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan masa pelaporan tahun 2022 berakhir sebesar Rp4.706.430.
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL
	Pengecekan Pos-Pos LO
5.	a. Terdapat kenaikan signifikan pada pos Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar 1.656,252% disebabkan oleh bertambahnya piutang pada periode audited tahun 2022. b. Terdapat kenaikan signifikan pada Surplus/Defisit-LO dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar 410,926% pada akun: 1) 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu disebabkan oleh Temuan Pemeriksaan BPK dan Badan Pengawasan atas kelebihan realisasi Belanja Modal pada satuan kerja. 2) 491429 - Pendapatan Perolehan Aset Lainnya pada 2 satuan kerja: - Pengadilan Agama Kebumen (005.01.0300.401055) merupakan perolehan lainnya berupa tanah bangunan rumah negara gol.1 atas perolehan tanah idle karena tidak ada ADK dari satker pemberi sehigga masuk ke perolehan lainnya sebesar 803.000.000. - Pengadilan Negeri Blangpidie (005.01.0600.401902) merupakan Perolehan Lainnya berupa Paket Meubelair yang diperoleh dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai Pada Periode 13 adalah -5.536.194.599. Dan Perolehan Lainnya Paket Pekerjaan Sarana Lingkungan yang sebelumnya dicatatkan dalam 1 NUP KDP dengan nilai pada Periode 13 adalah - 2.974.681.578 (Jalan Khusus Lainnya -1.154.655.890, Jembatan Penyeberangan Kendaraan - 946.789.100, Saluran Sekunder Pembuangan (Saluran Pembuang Pasang Surut) -513.236.588). Perlu Adanya Koreksi Kembali atas Perolehan Lainnya tersebut akibat nilai harga satuan yang termutlipikasi hasil generate aplikasi SAKTI sehingga nilai keseluruhan Perolehan Lainnya melampaui nilai Perolehan yang diperoleh dari hasil pemecahan KDP. 3) 491511 - Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan disebabkan oleh pencatatan koreksi kuantitas dan koreksi nilai pada Modul Persediaan. 4) 593311 - Beban Penyesuaian Nilai Persediaan disebabkan oleh pencatatan koreksi kuantitas dan koreksi nilai pada Modul Persediaan.
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
	Pengecekan Pos-Pos LPE
2.	a. Terdapat kenaikan signifikan pada pos Koreksi Nilai Persediaan yang disebabkan oleh koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas persediaan menjadi harga dan harga menjadi kuantitas. b. Terdapat penurunan signifikan pada pos-pos LPE sebagai berikut: 1) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan pendetailan aset sehingga dilakukan koreksi yang menghasilkan jurnal koreksi aset tetap non revaluasi. 2) Koreksi Lain-Lain yang disebabkan oleh koreksi lebih catat beban/kewajiban tahun 2021 yang dibebankan pada tahun 2022.
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN
1.	Dokumen Piutang TP/TGR lengkap, namun dokumen Piutang PNBP dan Piutang Lainnya belum lengkap karena belum adanya SOP terkait pencatatan dan penyajian piutang dari bagian-bagian terkait pada Mahkamah Agung.

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(Rama Rahim, S.E., M.M., M.B.A.)
NIP. 19810520 200912 1 002

Jakarta, 5 Mei 2023
Penelaah,

(Nugroho Urip Widodo, S.E, M.M.)
NIP. 19800523 200912 1 002

DAFTAR REKENING PEMERINTAH DAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA BESERTA MONITORING PENUTUPAN REKENING PEMERINTAH

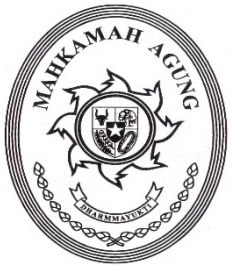

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN REKENING LAINNYA/PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DIBAWAHNYA BESERTA MONITORING PENUTUPAN REKENING

PERIODE 31 DESEMBER 2022

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 01 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2022

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
1	004028	KEPANITERAAN	005	01	VA	651520040281000	KEPANITERAAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1493/WPB.12/KP.06/2020 8 JUNE 2020	TNP	Rp -
2	097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	005	01	VA	653240974671000	BPG175.PENGADILAN TINGGI JAKARTA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
3	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	005	01	VA	8100120974711000	BPG 175 PN JAKPUS 097471	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
4	097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	005	01	VA	653240974881000	BPG175 PENGADILAN NEGERI JAKBAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
5	097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	005	01	VA	653240974921000	BP175PENGADILAN NEGERI JAKTIM DIPA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
6	097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	005	01	VA	653240975001000	BPG 095 PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
7	097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	005	01	VA	653240975141000	BPG 095 PN BANDUNG01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
8	097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	005	01	VA	8100120975211000	BPG 087 PN SUMEDANG 097521	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-2754/WPB.12/KP.06/2020 20 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
9	097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	005	01	VA	653240975351000	BPG 025 PENGADILAN NEGERI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/ WPB.12/ KP.06/ 2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
10	097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	005	01	VA	653240975421000	BPG 096 PN GARUT 00501	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
11	097556	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	005	01	VA	653240975561000	BPG 025 PENGADILAN NEGERI CIAMIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
12	097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	005	01	VA	653240975601000	BPG 020 PN SERANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
13	097577	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	005	01	VA	653240975771000	BPG161 PN RKBT 097577	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
14	097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	005	01	VA	653240975981000	BPG 127 PENGADILAN NEGERI TANGERANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
15	097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	005	01	VA	653240976031000	BPG 021 PN PURWAKARTA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	00046 2 JUNE 2021	TNP	Rp -
16	097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	005	01	VA	653240976101000	BPG 171 PENGADILAN NEGERI BEKASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
17	097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	005	01	VA	9899680976241000	BPG 086 PENGADILAN NEGERI KARAWANG	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
18	097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	005	01	VA	653240976311000	BPG 021 PN SUBANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
19	097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	005	01	VA	653240976451000	BPG023 PENGADILAN NEGERI BOGOR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
20	097652	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	005	01	VA	653240976521000	BPG 128 PN SUKABUMI 097652	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
21	097666	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	005	01	VA	653240976661000	BPG 128 PN CIANJUR 097666	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B-26/BUA.3/KU.03/5/2021 19 MAY 2021	TNP	Rp -
22	097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	005	01	VA	653250976701000	BPG 024 PENGADILAN NEGERI CIREBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
23	097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	005	01	VA	653240976871000	BPG 024 PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
24	097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	005	01	VA	653240976911000	BPG 147 PN MAJALENGKA 097691	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2019	TNP	Rp -
25	097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	005	01	VA	653250977091000	BPG 147 PN KUNINGAN 097709	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
26	097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	005	01	VA	653240977131000	BPG 134 PENGADILAN TINGGI SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
27	097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	005	01	VA	653240977201000	BPG 134 PENGADILAN NEGERI SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
28	097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	005	01	VA	653240977341000	BPG 118 PN TEGAL-097734	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
29	097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	005	01	VA	653240977411000	BPG 072 PN PEKALONGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
30	097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	005	01	VA	653250977551000	BPG129 PENGADILAN NEGERI KUDUS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
31	097762	PENGADILAN NEGERI PATI	005	01	VA	653240977621000	BPG 097 PN PATI BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
32	097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	005	01	VA	653240977761000	BPG 118 PN BREBES 097776	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
33	097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	005	01	VA	653240977801000	BPG 118 PN PEMALANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
34	097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	005	01	VA	653240977971000	BPG 134 PENGADILAN NEGERI KENDAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
35	097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	005	01	VA	653240978021000	BPG 129 PN DEMAK 097802	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
36	097819	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	005	01	VA	653240978191000	BPG 163 PN PURWODADI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
37	097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	005	01	VA	653240978231000	BPG 134 PENGADILAN NEGERI SALATIGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
38	097830	PENGADILAN NEGERI UNGARAN	005	01	VA	653250978301000	BPG 134 PN KAB. SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
39	097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	005	01	VA	653240978441000	BPG 129 PENGADILAN NEGERI JEPARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
40	097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	005	01	VA	653240978511000	BPG 163 PN BLORA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
41	097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	005	01	VA	653240978651000	BPG 097 PN REMBANG BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
42	097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	005	01	VA	653240978721000	BPG 072 PN BATANG 097872	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
43	097886	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	005	01	VA	653250978861000	BPG 027 PENGADILAN NEGERI KAB PWR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
44	097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	005	01	VA	653240978901000	BPG 115 PENGADILAN NEGERI MAGELANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06.2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
45	097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	005	01	VA	653240979081000	BPG 027 PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
46	097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	005	01	VA	653240979121000	BPG 115 PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
47	097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	005	01	VA	653240979291000	BPG 164 PN WONOSOBO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
48	097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	005	01	VA	653240979331000	BPG 028 PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
49	097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	005	01	VA	653240979401000	BPG 162 PN SRAGEN BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
50	097954	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	005	01	VA	653240979541000	BPG 028 PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000061/028 20 APRIL 2021	TNP	Rp -
51	097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	005	01	VA	653250979611000	BPG 028 PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000068/028 23 APRIL 2021	TNP	Rp -
52	097975	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	005	01	VA	653240979751000	BPG 162 PENGADILAN NEGERI KRA BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
53	097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	005	01	VA	653240979821000	BPG 148 PN BOYOLALI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
54	097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	005	01	VA	653240979961000	BPG 148 PENGADILAN NEGERI KLATEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
55	098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	005	01	VA	653240980011000	BPG 029 PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
56	098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	005	01	VA	653240980151000	BPG 130 PN CILACAP 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
57	098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	005	01	VA	653250980221000	BPG 029 PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.1513.E-INS/ISS/05/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
58	098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	005	01	VA	653240980361000	BPG 029 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S- 811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
59	098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	005	01	VA	653240980401000	BPG 164 PN BANJARNEGARA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
60	098057	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	005	01	VA	653240980571000	BPG 030 PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
61	098061	PENGADILAN NEGERI WATES	005	01	VA	653240980611000	BPG 176 PENGADILAN NEGERI WATES	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
62	098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	005	01	VA	653250980781000	BPG 149 PENGADILAN NEGERI WONOSARI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
63	098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	005	01	VA	653240980821000	BPG 030 PENGADILAN NEGERI SLEMAN QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
64	098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	005	01	VA	653240981041000	BPG 135 PT SBY 098104	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.05/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
65	098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	005	01	VA	653240981111000	BPG 135 PN SURABAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
66	098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	005	01	VA	653240981251000	BPG 073 PN BOJONEGORO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
67	098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	005	01	VA	9899680981321000	BPG 166 PENGADILAN NEGERI TUBAN	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-287/WPB.12/KP.06/2022 21 JANUARY 2022	TNP	Rp -
68	098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	005	01	VA	653240981461000	BPG 073 PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
69	098150	PENGADILAN NEGERI GRESIK	005	01	VA	653240981501000	BPG 135 PENGADILAN NEGERI GRESIK 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
70	098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	005	01	VA	8100120981671000	BPG 165 PN SIDOARJO	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 9 JUNE 2021	TNP	Rp -
71	098171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	005	01	VA	653240981711000	BPG 098 PN MOJOKERTO 098171	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/098 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
72	098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	005	01	VA	653240981881000	BPG 098 PN JOMBANG 098188	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
73	098192	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	005	01	VA	653240981921000	BPG 035 PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000614/035 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
74	098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	005	01	VA	653240982001000	BPG 131 PENGADILAN NEGERI JEMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
75	098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	005	01	VA	653240982141000	BPG 100 PN BANYUWANGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	NO : S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
76	098221	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	005	01	VA	653240982211000	BPG 035 PN SITUBONDO 098221	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000638/035 1 JUNE 2021	TNP	Rp -
77	098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	005	01	VA	653240982351000	BPG 034 PENGADILAN NEGERI KEDIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/4/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
78	098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	005	01	VA	653240982421000	BPG 034 PENGADILAN NEGERI NGANJUK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
79	098256	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	005	01	VA	653240982561000	BPG 150 PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG QQ 098256	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.02/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
80	098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	005	01	VA	653240982601000	BPG 034 PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/ WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
81	098277	PENGADILAN NEGERI BLITAR	005	01	VA	653240982771000	BPG 150 PN BLITAR QQ 098277	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
82	098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	005	01	VA	653240982811000	BPG 032 PN MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
83	098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	005	01	VA	653240982981000	BPG 032 PENGADILAN NEGERI PAS (098298)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
84	098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	005	01	VA	653240983031000	BPG 035 PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000643/035 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
85	098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	005	01	VA	653240983101000	BPG 131 PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
86	098324	PENGADILAN NEGERI BANGIL	005	01	VA	653240983241000	BPG 032 PENGADILAN NEGERI BANGIL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
87	098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	005	01	VA	653240983311000	BPG 035 PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN (098331)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000649/035 14 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
88	098345	PENGADILAN NEGERI MADIUN	005	01	VA	653240983451000	BPG :033 PN MADIUN (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
89	098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	005	01	VA	653240983521000	BPG 033 PN PONOROGO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
90	098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	005	01	VA	653240983661000	BPG 099 PENGADILAN NEGERI PACITAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
91	098370	PENGADILAN NEGERI NGAWI	005	01	VA	653240983701000	BPG 033 PN NGAWI DIPA 05 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
92	098387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	005	01	VA	653240983871000	BPG 033 PN MAGETAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
93	098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	005	01	VA	653240983911000	BPG 036 PN PAMEKASAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
94	098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	005	01	VA	653240984091000	BPG 036 PN SUMENEP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021/036 28 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
95	098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	005	01	VA	653240984131000	BPG 036 KANTOR PN BANGKALAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
96	098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	005	01	VA	653250984201000	BPG036PENGADILANNEGERISAMPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
97	098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	005	01	VA	8100770984341000	BPG 001 PENGADILAN TINGGI BNA 434	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
98	098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	005	01	VA	8100770984411000	BPG 001 PN BANDA ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021/001 12 JULY 2021	TNP	Rp -
99	098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	005	01	VA	8100770984551000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI SABANG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
100	098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	005	01	VA	8100770984621000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI SIGLI 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
101	098476	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	005	01	VA	8100770984761000	BPG 089 PN BIREUEN 098476	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2771/WPB.12/KP.06/2021 5 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
102	098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	005	01	VA	8100770984801000	BPG 089 PN LHOKSUKON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
103	098497	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	005	01	VA	8100770984971000	BPG 089 PENGADILAN NEGERI LSW	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
104	098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	005	01	VA	8100770985021000	BPG 122 PENGADILAN NEGERI TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-677/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
105	098519	PENGADILAN NEGERI LANGSA	005	01	VA	8100770985191000	BPG 002 PN LANGSA 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
106	098523	PENGADILAN NEGERI IDI	005	01	VA	8100770985231000	BPG 002 PN IDI 098523	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
107	098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	005	01	VA	8100770985301000	BPG 002 PN KUALASIMPANG 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
108	098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	005	01	VA	8100770985441000	BPG 105 PN BKJ 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
109	098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	005	01	GIRO	1056197377	BPG 105 PN KUTACANE 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-167/WPB.01/KP.06/2021 9 JULY 2021	TNP	Rp -
110	098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	005	01	VA	8100770985511000	BPG 105 PN KUTACANE 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
111	098565	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	005	01	VA	8100770985651000	BPG 003 PN MEULABOH 1	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
112	098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	005	01	VA	8100770985721000	BPG 003 PN CALANG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
113	098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	005	01	VA	8100770985861000	BPG 003 PN SINABANG 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
114	098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	005	01	VA	8100770985901000	BPG 074 PN TAPAKTUAN 098590	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
115	098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	005	01	VA	8100770986081000	BPG 074 PENGADILAN NEGERI SINGKIL 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
116	098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	005	01	VA	653240986121000	BPG 123 PENGADILAN TINGGI MEDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
117	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	005	01	GIRO	005301001246301	BPG 123 PN MEDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-881/WPB.02/KP.123/2015 29 JUNE 2015	TNP	Rp -
118	098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	005	01	VA	653240986331000	BPG 123 PN KLAS I-B BINJAI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
119	098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI	005	01	VA	653240986401000	BPG 076 PN TANJUNG BALAI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000033/076 28 APRIL 2021	TNP	Rp -
120	098654	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	005	01	VA	653250986541000	BPG 119 PN SIDIKALANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
121	098661	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	005	01	VA	653240986611000	BPG 119 PN KABANJAHE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WPB.12/KP.06/2020/119 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
122	098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	005	01	VA	653240986751000	BPG 075 PN RANTAUPRAPAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
123	098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	005	01	VA	653240986821000	BPG 124 PN TEBING TINGGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
124	098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	005	01	VA	653240986961000	BPG 007 PN GUNUNGSITOLI QQ 098696	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
125	098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	005	01	VA	653240987011000	BPG 005 PN PEMATANGSIANTAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
126	098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	005	01	VA	653240987181000	BPG 125 PN TARUTUNG 098718	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
127	098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	005	01	VA	653240987221000	BPG 006 PN PADANGSIDIMPUAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000047 22 APRIL 2021	TNP	Rp -
128	098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	005	01	VA	653240987221000	BPG 006 PN PADANGSIDIMPUAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000047 22 APRIL 2021	TNP	Rp -
129	098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	005	01	VA	653250987391000	BPG 106 PN SIBOLGA BADAN URUSAN ADM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
130	098743	PENGADILAN TINGGI PADANG	005	01	VA	653240987431000	BPG 010 PENGADILAN TINGGI PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
131	098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	005	01	VA	653240987501000	BPG 010 PENGADILAN NEGERI PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
132	098764	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	005	01	VA	653240987641000	BPG 077 PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
133	098764	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	005	01	VA	654440992061000	BPG 077 PN SAWAHLUNTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
134	098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	005	01	VA	653240987711000	BPG 011 PN BATUSANGKAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
135	098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	005	01	VA	653250987851000	BPG 090 PENGADILAN NEGERI SOLOK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
136	098792	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	005	01	VA	653240987921000	BPG 010 PN PARIAMAN 098792	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB3 /2021 29 APRIL 2020	TNP	Rp -
137	098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	005	01	VA	653240988071000	BPG 142 PENGADILAN NEGERI PAINAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
138	098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	005	01	VA	653240988111000	BPG 011 PN BUKITTINGGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-347/WPB.03/KP.0330/2015 25 MARCH 2015	TNP	Rp -
139	098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	005	01	VA	653240988281000	BPG 091 PN LUBUK SIKAPING	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
140	098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	005	01	VA	653240988321000	BPG 011 PN PAYAKUMBUH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
141	098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	005	01	VA	653240988531000	BPG 120 PN BENGKALIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
142	098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT INDRAGIRI HULU	005	01	VA	653250988601000	BPG 092 PN RENGAT INDRAGIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
143	098860	PENGADILAN NEGERI RENGAT INDRAGIRI HULU	005	01	VA	654440992161000	BPG 092 PN RENGAT INDRAGIRI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
144	098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	005	01	VA	653240988741000	BPG 092 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2021	TNP	Rp -
145	098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	005	01	VA	653240988811000	BPG 009 PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG ES01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/009 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
146	098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	005	01	VA	653240988951000	BPG 012 PENGADILAN NEGERI JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
147	098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	005	01	VA	653240989001000	BPG 078 PN MA BUNGO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
148	098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	005	01	VA	653240989171000	BPG 143 PENGADILAN NEGERI KLT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
149	098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	005	01	VA	653240989211000	BPG (013) PENGADILAN NEGERI SPN (098921)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
150	098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	005	01	VA	653240989381000	BPG 014 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.03/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
151	098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	005	01	VA	653240989421000	BPG 014 PENGADILAN NEGERI PALEMBANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
152	098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	005	01	VA	654440992261000	BPG 014 PN PALEMBANG 02	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
153	098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	005	01	VA	653240989591000	BPG 014 PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
154	098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	005	01	VA	653240989631000	BPG 109 PN BATURAJA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
155	098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU	005	01	VA	653240989701000	BPG 070 PN LUBUKLINGGAU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
156	098984	PENGADILAN NEGERI LAHAT	005	01	VA	653240989841000	BPG 144 PN LAHAT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
157	098984	PENGADILAN NEGERI LAHAT	005	01	VA	654440992311000	BPG 144 PN LAHAT 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
158	098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	005	01	VA	653250989911000	BPG 144 PN MUARA ENIM 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
159	099003	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	005	01	VA	653240990031000	BPG 160 PENGADILAN NEGERI SEKAYU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
160	099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	005	01	VA	653240990101000	BPG 015 PN PANGKALPINANG-01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
161	099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	005	01	VA	653240990241000	BPG 015 PN SUNGAILIAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
162	099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	005	01	VA	654440992351000	BPG015 PN SUNGAILIAT 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
163	099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	005	01	VA	653240990311000	BPG 017 PN TANJUNGKARANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-372/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
164	099045	PENGADILAN NEGERI METRO	005	01	VA	653240990451000	BPG 126 PN METRO (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
165	099052	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	005	01	VA	653250990521000	BPG STKR099052 PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
166	099052	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	005	01	VA	654440992381000	BPG 116 PN KOTABUMI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WBP.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
167	099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	005	01	VA	653240990661000	BPG 042 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
168	099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	005	01	VA	653240990701000	BPG 093 PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
169	099087	PENGADILAN NEGERI SINTANG	005	01	VA	653240990871000	BPG 079 PENGADILAN NEGERI SINTANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
170	099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	005	01	VA	653240990911000	BPG 094 PENGADILAN NEGERI KETAPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1888/WPB.12/KP.06/2021 26 AUGUST 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
171	099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	005	01	VA	653240991091000	BPG 042 PN MEMPAWAH 099109	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
172	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	005	01	VA	653240991131000	BPG 167 PN SANGGAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
173	099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	005	01	VA	653240991201000	BPG 043 PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
174	099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	005	01	VA	653240991341000	BPG 102 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
175	099141	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	005	01	VA	653240991411000	BPG 080 PN MUARA TEWEH ADMINISTRASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	2732/WPB.12/KP.06/2020/080 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
176	099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	005	01	VA	653240991551000	BPG 043 PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS 099155	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
177	099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	005	01	VA	653240991621000	BPG 080 PN BUNTOK ADMINISTRASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
178	099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	005	01	VA	9896640992501000	BPG 080 PN BUNTOK PERADILAN UMUM	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
179	099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	005	01	VA	653240991761000	BPG 044 PENGADILAN NEGERI SAMPIT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
180	099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	005	01	VA	653240991801000	BPG 045 PENGADILAN TINGGI BJM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
181	099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	005	01	VA	9899680991971000	BPG 045 PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
182	099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	005	01	VA	653240992021000	BPG 110 PN KANDANGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
183	099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	005	01	VA	653240992191000	BPG 081 PN KOTABARU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
184	099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	005	01	VA	653240992231000	BPG 110 PN BARABAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
185	099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	005	01	VA	653240992301000	BPG 045 PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
186	099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	005	01	VA	653240992441000	BPG 151 PENGADILAN NEGERI TANJUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
187	099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	005	01	VA	653240992511000	BPG 151 PENGADILAN NEGERI AMUNTAI KAB.HSU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
188	099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	005	01	VA	653240992651000	BPG 110 PN BUA RANTAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/HP.06/2020/110 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
189	099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	005	01	VA	653240992721000	BPG 175 048 099272 0	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
190	099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	005	01	VA	653240992861000	BPG 046 PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
191	099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	005	01	VA	653240992901000	BPG 046 PENGADILAN NEGRI TENGGARONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
192	099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	005	01	VA	653240993081000	BPG 047 KANTOR PN BALIKPAPAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
193	099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	005	01	VA	653240993121000	BPG 049 PENGADILAN TINGGI MANADO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
194	099329	PENGADILAN NEGERI MANADO	005	01	VA	653240993291000	BPG 049 PENGADILAN NEGERI MANADO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
195	099333	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	005	01	VA	653240993331000	BPG 158 PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
196	099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	005	01	VA	653240993401000	BPG 083 PENGADILAN NEGERI TAHUNA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
197	099354	PENGADILAN NEGERI TONDANO	005	01	VA	653240993541000	BPG 049 PENGADILAN NEGERI TONDANO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
198	099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	005	01	VA	653240993611000	BPG 050 PENGADILAN NEGERI GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
199	099375	PENGADILAN NEGERI PALU	005	01	VA	653240993751000	BPG 051 PENGADILAN NEGERI PALU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
200	099382	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	005	01	VA	653240993821000	BPG 082 PN TOLI TOLI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
201	099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	005	01	VA	653240993961000	BPG 053 PN LUWUK 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
202	099401	PENGADILAN NEGERI POSO	005	01	VA	653240994011000	BPG 052 PENGADILAN NEGERI POSO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	1674/SEK.KU.01/9/2020 25 SEPTEMBER 2020	TNP	Rp -
203	099418	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	005	01	VA	653240994181000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG 099418	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1448/WPB.25/KP.02/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
204	099422	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	005	01	VA	8100120994221000	BPG 136 PN UJUNG PANDANG	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
205	099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	005	01	VA	653240994391000	BPG 136 PN SUNGGUMINASA 099439	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1766/WPB.25/KP/02/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
206	099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	005	01	VA	653240994431000	BPG 136 PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE (099443)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-902/WPB.24/KP.0250/2015 2 APRIL 2015	TNP	Rp -
207	099450	PENGADILAN NEGERI BARRU	005	01	VA	653240994501000	BPG 057 PN BARRU (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000077 27 APRIL 2021	TNP	Rp -
208	099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	005	01	VA	653240994641000	BPG 136 PENGADILAN NEGERI TAKALAR 099464	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1364/WPB.25/KP.02/2021 22 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
209	099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	005	01	VA	653240994711000	BPG 136 PENGADILAN NEGERI MAROS 099471	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	PMK183/PMK.05/2019 5 DECEMBER 2019	TNP	Rp -
210	099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	005	01	VA	653240994851000	BPG PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
211	099492	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	005	01	VA	653240994921000	BPG 057 PENGADILAN NEGERI PAREPARE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000061 16 APRIL 2021	TNP	Rp -
212	099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	005	01	VA	653250995071000	BPG 057 PENGADILAN NEGERI ENREKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 9 JUNE 2021	TNP	Rp -
213	099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	005	01	VA	653250995071000	BPG PENGADILAN NEGERI ENREKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 9 JUNE 2021	TNP	Rp -
214	099511	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	005	01	VA	653240995111000	BPG 057 PENGADILAN NEGERI SIDRAP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
215	099528	PENGADILAN NEGERI PINRANG	005	01	VA	653240995281000	BPG 057 PENGADILAN NEGERI PINRANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000062 16 APRIL 2021	TNP	Rp -
216	099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	005	01	VA	653240995321000	BPG 055 PENGADILAN NEGERI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK/.05/2019 5 DECEMBER 2019	TNP	Rp -
217	099549	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	005	01	VA	653240995491000	BPG 055 PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
218	099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	005	01	VA	653250995531000	BPG 055 PENGADILAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
219	099560	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	005	01	VA	653240995601000	BPG 056 PENGADILAN NEGERI BANTAENG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
220	099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	005	01	VA	653240995741000	BPG 177 PENGADILAN NEGERI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
221	099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	005	01	VA	653240995811000	BPG 056 PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
222	099595	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	005	01	VA	653240995951000	BPG:155 PN SELAYAR (099595)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
223	099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	005	01	VA	653240996001000	BPG 058 PENGADILAN NEGERI PALOPO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
224	099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	005	01	VA	653240996171000	BPG 170 PENGADILAN NEGERI MAKALE099617	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
225	099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	005	01	VA	654440996181000	BPG 170 PENGADILAN NEGERI MAKALE099618	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
226	099621	PENGADILAN NEGERI MAJENE	005	01	VA	653240996211000	BPG 059 099621 PN MJN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
227	099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	005	01	VA	653250996381000	BPG 178 PENGADILAN NEGERI MAMUJU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
228	099642	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	005	01	VA	653240996421000	BPG 059 099642 PN PLW	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
229	099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	005	01	VA	653240996591000	BPG 060 PN KENDARI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
230	099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	005	01	VA	653240996631000	BPG 103 PENGADILAN NEGERI BAUBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
231	099670	PENGADILAN NEGERI RAHA	005	01	VA	653240996701000	BPG 157 PENGADILAN NEGERI RAHA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 20 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
232	099684	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	005	01	VA	653250996841000	BPG 156 PENGADILAN NEGERI KOLAKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
233	099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	005	01	VA	653240996911000	BPG 061 PENGADILAN TINGGI AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020/ 061 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
234	099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	005	01	VA	653240997061000	BPG (061) PENGADILAN NEGERI AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-718/WPB.31/KP.061.3/2015 11 MAY 2015	TNP	Rp -
235	099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	005	01	VA	653240997101000	PENGADILAN NEGERI MASOHI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 19 APRIL 2021	TNP	Rp -
236	099727	PENGADILAN NEGERI TUAL	005	01	VA	653240997271000	BPG 084 PN TUAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
237	099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	005	01	VA	653240997311000	BPG 062 PENGADILAN NEGERI TERNATE 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B. 81/KC-XII/OPS/04/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
238	099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	005	01	VA	653240997481000	BPG 112 PN TOBELO QQ SETMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
239	099752	PENGADILAN NEGERI LABUHA	005	01	VA	653240997521000	BPG 062 PENGADILAN NEGERI LABUHA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W28-U3/120/KU.01/V/2021 3 MAY 2021	TNP	Rp -
240	099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	005	01	VA	653250997691000	BPG062 PENGADILAN NEGERI SOASIO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
241	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	005	01	VA	653240997731000	BPG 037 PENGADILAN TINGGI DENPASAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
242	099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	005	01	VA	653240997941000	BPG 132 PN SINGARAJA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
243	099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	005	01	VA	653240998021000	BPG 132 PENGADILAN NEGERI NEGARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
244	099816	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	005	01	VA	653240998161000	BPG 154 PN SEMARAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
245	099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	005	01	VA	653240998201000	BPG 037 PENGADILAN NEGERI TABANAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001687/037 23 APRIL 2021	TNP	Rp -
246	099837	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	005	01	VA	653240998371000	BPG 154 PN AMLAPURA(01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
247	099841	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	005	01	VA	653240998411000	BPG 037 PENGADILAN NEGERI GIANYAR 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
248	099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	005	01	VA	653240998581000	BPG 154 PN BANGLI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
249	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	005	01	VA	653240998621000	BPG 038 PENGADILAN NEGERI MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
250	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	005	01	VA	653240998831000	BPG 101 PN SUMBAWA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
251	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	005	01	VA	653250998901000	BPG 169 PENGADILAN NEGERI SELONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
252	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	005	01	VA	653240999051000	BPG 071 PN DOMPU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
253	099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	005	01	VA	653240999121000	BPG 038 PENGADILAN NEGERI PRAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
254	099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	005	01	VA	9899680999261000	BPG 039 PN KUPANG (099926)	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WBP.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
255	099930	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	005	01	VA	653240999301000	BPG 172 PENGADILAN NEGERI 01 ATAMBUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 20 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
256	099947	PENGADILAN NEGERI SOE	005	01	VA	653240999471000	BPG 039 PN SOE (099947)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
257	099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	005	01	VA	653240999511000	BPG 172 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
258	099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	005	01	VA	653240999681000	BPG 041 PENGADILAN NEGERI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
259	099972	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	005	01	VA	9899680999721000	BPG 041 PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK 01	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06.2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
260	099989	PENGADILAN NEGERI ENDE	005	01	VA	653240999891000	BPK 040 PENGADILAN NEGERI ENDE.01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
261	099993	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	005	01	VA	653240999931000	BPG 040 PENGADILAN NEGERI MAUMERE 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB-12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
262	108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	005	01	VA	653241080251000	BPG 123 PN STABAT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
263	108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	005	01	VA	9899681083091000	BPG 137 PN BATAM 108309	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
264	307101	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	005	01	VA	653253071011000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
265	307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	005	01	VA	653243071151000	BPG 168 PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
266	307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	005	01	VA	653253071221000	BPG 081 PA KOTABARU QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
267	307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	005	01	VA	653243071611000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA TENGGARONG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
268	307178	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	005	01	VA	653253071781000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
269	307182	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	005	01	VA	653243071821000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
270	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	005	01	VA	653243071991000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
271	307204	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	005	01	VA	653243072041000	BPG 153 KANTOR PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
272	307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	005	01	VA	651543090581000	BPG 049 PA MANADO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
273	307225	PENGADILAN AGAMA MANADO	005	01	VA	653243072251000	BPG PENGADILAN AGAMA MANADO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
274	307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	005	01	VA	653243072321000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
275	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	005	01	VA	653243072461000	BPG 083 PENGADILAN AGAMA TAHUNA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
276	307250	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	005	01	VA	653243072501000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
277	307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	005	01	VA	653243072711000	BPG 051 PA KODYA PALU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
278	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	005	01	VA	653243072881000	BPG 082 PA TOLITOLI QQ 307288	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-384/WPB.26/KP.0430/2015 23 APRIL 2015	TNP	Rp -
279	307292	PENGADILAN AGAMA POSO	005	01	VA	8100773072921000	BPG 052 PA POSO 307292	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
280	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	005	01	VA	653243073001000	BPG 053 PENGADILAN AGAMA LUWUK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
281	307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	005	01	VA	653243074241000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR 307424	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
282	307431	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	005	01	VA	653243074311000	BPG 136 PA PANGKAJENE (307431)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-3701-WPB.25/KP.02/2021 4 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
283	307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	005	01	VA	653243074451000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA MAROS 307445	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
284	307452	PENGADILAN AGAMA MAKASSAR	005	01	VA	653243074521000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG 307452	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1385/WPB.25/KP.02/2021 26 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
285	307466	PENGADILAN AGAMA JENEPONTO	005	01	VA	653243074661000	BPG 056 PENGADILAN AGAMA JENEPONTO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
286	307470	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	005	01	VA	653243074701000	BPG 136 PA TAKALAR 307470	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
287	307487	PENGADILAN AGAMA BARRU	005	01	VA	653243074871000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA BARRU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
288	307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	005	01	VA	653243074911000	BPG 136 PA SUNGGUMINASA 307491	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
289	307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	005	01	VA	653243075091000	BPG 055 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
290	307513	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	005	01	VA	653243075131000	BPG 055 PENGADILAN AGAMA SENGKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
291	307520	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	005	01	VA	653243075201000	BPG 055 PA WATANSOPPENG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-146/WPB.24/KP.0830/2015 TANGGAL 03 FEBRUARI 2015 3 FEBRUARY 2015	TNP	Rp -
292	307534	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	005	01	VA	653243075341000	BPG 056 PENGADILAN AGAMA BANTAENG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
293	307541	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	005	01	VA	653243075411000	BPG 056 PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 12 APRIL 2021	TNP	Rp -
294	307555	PENGADILAN AGAMA SINJAI	005	01	VA	653243075551000	BPG 177 PENGADILAN AGAMA SINJAI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
295	307562	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	005	01	VA	653243075621000	BPG 155 PENGADILAN AGAMA SELAYAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
296	307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	005	01	VA	653243075761000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA PAREPARE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000051 13 APRIL 2021	TNP	Rp -
297	307580	PENGADILAN AGAMA PINRANG	005	01	VA	653243075801000	BPG 057 PENGELUARAN PENGADILAN AGAMA PINRANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
298	307597	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	005	01	VA	653243075971000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA ENREKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
299	307602	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	005	01	VA	653243076021000	BPG 057 PA SIDRAP QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000076 27 APRIL 2021	TNP	Rp -
300	307619	PENGADILAN AGAMA PALOPO	005	01	VA	653243076191000	BPG 058 KANTOR PENGADILAN AGAMA PALOPO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	NO. S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 SEPTEMBER 2020	TNP	Rp -
301	307623	PENGADILAN AGAMA MAKALE	005	01	VA	653253076231000	BPG 170 PENGADILAN AGAMA MAKALE 307623	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
302	307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	005	01	VA	653243076301000	BPG 059 307630 PENGADILAN AGAMA PLW	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
303	307644	PENGADILAN AGAMA MAJENE	005	01	VA	653243076441000	BPG 059 307644 PA MJ	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
304	307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	005	01	VA	653243076511000	BPG 178 PENGADILAN AGAMA MAMUJU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
305	307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	005	01	VA	653243076901000	BPG 156 PENGADILAN AGAMA KOLAKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
306	307708	PENGADILAN AGAMA RAHA	005	01	VA	653253077081000	BPG 157 PENGADILAN AGAMA RAHA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
307	307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	005	01	VA	653243077121000	BPG 060 PA KENDARI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
308	307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	005	01	VA	653243077291000	BPG 103 PENGADILAN AGAMA BAUBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
309	307729	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	005	01	VA	651543090971000	BPG 103 PENGADILAN AGAMA BAUBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
310	307754	PENGADILAN AGAMA AMBON	005	01	VA	653253077541000	BPG 061 PENGADILAN AGAMA AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
311	307775	PENGADILAN AGAMA MASOHI	005	01	VA	653243077751000	BPG 173 PENGADILAN AGAMA MASOHI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
312	307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	005	01	VA	653243077821000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA TERNATE 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
313	307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	005	01	VA	653243077961000	BPG 112 PENGADILAN AGAMA MOROTAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
314	307801	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	005	01	VA	653243078011000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA SOASIO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
315	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	005	01	VA	653243078181000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA LABUHA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 6 JULY 2021	TNP	Rp -
316	307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	005	01	VA	653253078391000	BPG 132 PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
317	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	005	01	VA	653253078851000	BPG 038 PENGADILAN AGAMA MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
318	307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	005	01	VA	653243078921000	BPG101 PENGADILAN AGAMA SUMBAWA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
319	307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	005	01	VA	653243079071000	BPG 038 PENGADILAN AGAMA PRAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
320	307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	005	01	VA	653243079111000	BPG 169 PENGADILAN AGAMA SELONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
321	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	005	01	VA	653243079281000	BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN AGAMA BIMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000195/071 5/27/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
322	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	005	01	VA	653243079321000	BPG 071 PA DOMPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-259/WPB.12/KP.06/2021 5 FEBRUARY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
323	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	005	01	VA	651543091141000	BPG 071 PA DOMPU 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	MENTERI KEUANGAN S-259/ WPB.12/ KP.06/ 2021 05-02-2021 5 FEBRUARY 2021	TNP	Rp -
324	307949	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	005	01	VA	653243079491000	BPG 041 PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
325	307953	PENGADILAN AGAMA KUPANG	005	01	VA	653243079531000	BPG 039 PA KUPANG (307953)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
326	307960	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	005	01	VA	653253079601000	BPG 039 PA KALABAHI 307960	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
327	307974	PENGADILAN AGAMA ENDE	005	01	VA	653243079741000	BPG 040 PENGADILAN AGAMA ENDE 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
328	307981	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	005	01	VA	653243079811000	BPG 041 PENGADILAN AGAMA WAINGAPU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
329	308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	005	01	VA	653243080141000	BPG 121 PENGADILAN AGAMA MANNA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
330	308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	005	01	VA	653253080211000	BPG 146 PENGADILAN AGAMA CURUP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
331	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	005	01	VA	653243080351000	BPG 016 PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
332	308152	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	005	01	VA	653253081521000	BPG 016 PENGADILAN AGAMA BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
333	308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	005	01	VA	653243081661000	BPG 095 PTA BANDUNG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
334	308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT	005	01	VA	651543091241000	BPG 095 PTA BANDUNG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
335	308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	005	01	VA	653243081701000	BPG 135 PTA SURABAYA QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
336	400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	005	01	VA	653244000071000	BPG174 PENGADILAN NEGERI LARANTUKA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
337	400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	005	01	VA	653244000131000	BPG 111 PENGADILAN NEGERI RUTENG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
338	400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	005	01	VA	653244000221000	BPG 063 PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732WTB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
339	400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	005	01	VA	653244000381000	BPG 063 PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
340	400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	005	01	VA	653244000441000	BPG 113 PENGADILAN NEGERI WAMENA 400044	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000065 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
341	400050	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	005	01	VA	653244000501000	BPG 068 PENGADILAN NEGERI MERAUKE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
342	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	005	01	VA	653244000691000	BPG 065 PN MANOKWARI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 4 MARCH 2020	TNP	Rp -
343	400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	005	01	VA	653244000751000	BPG 066 PENGADILAN NEGERI SORONG (01))	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
344	400081	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	005	01	VA	654444000821000	BPG 067 PENGADILAN NEGERI FAKFAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000040 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
345	400081	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	005	01	VA	653244000811000	BPG 067 PENGADILAN NEGERI FAKFAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000039 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
346	400090	PENGADILAN NEGERI BIAK	005	01	VA	653244000901000	BPG:064 PENGADILAN NEGERI BIAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186?WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
347	400101	PENGADILAN NEGERI NABIRE	005	01	VA	653244001011000	BPG 085 PENGADILAN NEGERI NABIRE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
348	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	005	01	VA	653244001101000	BPG 016 PENGADILAN NEGERI BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
349	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	005	01	VA	653254001261000	BPG 146 PENGADILAN NEGERI CURUP 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
350	400132	PENGADILAN NEGERI MANNA	005	01	VA	653244001321000	BPG 121 PENGADILAN NEGERI MANNA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
351	400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	005	01	VA	653244001411000	BPG 008 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
352	400157	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	005	01	VA	653244001571000	BPG 111 PENGADILAN NEGERI BAJAWA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
353	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	005	01	VA	653244001631000	BPG 039 PN KALABAHI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
354	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	005	01	VA	653254001721000	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
355	400188	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	005	01	VA	653244001881000	BPG 011 PN PADANG PANJANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
356	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	005	01	VA	653244001941000	BPG 117 PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
357	400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	005	01	VA	653244002081000	BPG 050 PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
358	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	005	01	VA	653244002141000	BPG 175 PN JAKSEL (400214)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-661/WPB.11/KP.01/2008 28 JANUARY 2008	TNP	Rp -
359	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	005	01	VA	653244002201000	BPG175PENGADILAN NEGERI JAKUT 400220	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
360	400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	005	01	VA	653244002391000	BPG 016 PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
361	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	005	01	VA	9899684002451000	BPG 039 PENGADILAN TINGGI KUPANG (400245)	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06.2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
362	400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	005	01	VA	653254002511000	BPG 042 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/042 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
363	400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	005	01	VA	653244002601000	BPG 045 PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
364	400276	PENGADILAN NEGERI SERUI	005	01	VA	653244002761000	BPG 138 PENGADILAN NEGERI SERUI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2724/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
365	400282	PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	005	01	VA	653244002821000	BPG 168 PENGADILAN NEGERI PELAIHARI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.19/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
366	400291	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	005	01	VA	653244002911000	BPG 153 PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB (291)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
367	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	005	01	VA	653244003021000	BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
368	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	005	01	VA	653244003111000	BPG 159 PENGADILAN NEGERI BANGKO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
369	400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	005	01	VA	653244003271000	BPG 120 PENGADILAN NEGERI DUMAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
370	400333	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	005	01	VA	653244003331000	BPG 011 PN LUBUK BASUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/011 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
371	400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	005	01	VA	9899684003421000	BPG 030 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
372	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	005	01	VA	653244003581000	BPG 043 PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
373	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	005	01	VA	653244003641000	BPG 017 PENGADILAN TINGGI TKG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
374	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	005	01	VA	654444003651000	BPG 017 PT TKG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
375	400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	005	01	VA	653244003701000	BPG 005 PN SIMALUNGUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
376	400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	005	01	VA	653244003951000	BPG 124 PN LUBUK PAKAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-522/WPB.02/KP.02.10/2007 28 AUGUST 2007	TNP	Rp -
377	400409	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	005	01	VA	653244004091000	BPG 128 PENGADILAN NEGERI CIBADAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
378	400415	PENGADILAN NEGERI JANTHO	005	01	VA	8100774004151000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI JANTHO	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
379	400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	005	01	VA	653244004211000	BPG 011 PN TANJUNG PATI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
380	400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	005	01	VA	653244004301000	BPG 012 PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
381	400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	005	01	VA	653244004461000	BPG 090 PN KOTOBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
382	400452	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	005	01	VA	653244004521000	BPG 017 PN KALIANDA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
383	400461	PENGADILAN NEGERI MUARO	005	01	VA	653254004611000	BPG 077 PENGADILAN NEGERI MUARO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
384	400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	005	01	VA	653244004771000	BPG 024 PENGADILAN NEGERI SUMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
385	400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	005	01	VA	653244004831000	BPG 095 PN BALE BANDUNG (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/095 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
386	400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	005	01	VA	653244004921000	BPG 008 PT PEKANBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001412/008 31 MAY 2021	TNP	Rp -
387	400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	005	01	VA	653244005031000	BPG 012 PENGADILAN TINGGI JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-27732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
388	400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	005	01	VA	653244005121000	BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
389	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	005	01	VA	653244005281000	BPG 046 PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
390	400534	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	005	01	VA	653244005341000	BPG 051 PENGADILAN TINGGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
391	400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	005	01	VA	653254005401000	BPG 060 PT KENDARI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-0416/WPB.27/KP.060/2015 30 MARCH 2015	TNP	Rp -
392	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	005	01	VA	653244005591000	BPG 038 PENGADILAN TINGGI MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
393	400565	PENGADILAN NEGERI SLAWI	005	01	VA	653244005651000	BPG 118 PN SLAWI-400565	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
394	400571	PENGADILAN NEGERI MUNGKID	005	01	VA	653244005711000	BPG 115 PENGADILAN NEGERI KAB. MAGELANG DI MUNGKID	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 10 MAY 2021	TNP	Rp -
395	400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	005	01	VA	653244005801000	BPG 034 PN KAB KEDIRI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/034 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
396	400596	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	005	01	VA	653254005961000	BPG 033 PN KAB MADIUN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
397	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	005	01	VA	653244006001000	BPG 107 PN TANJUNG PANDAN (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
398	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	005	01	VA	653244006161000	BPG175PENGADILANAGAMAJAKPUS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
399	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	005	01	VA	653244006221000	BPG175PENGADILAN AGAMA JAKUT 400622	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
400	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	005	01	VA	653244006311000	BPG 175 PENGADILAN AGAMA JAKBAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
401	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	005	01	VA	653244006471000	BPG175 PENGADILAN AGAMA JAKTIM 400648	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
402	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	005	01	VA	651544006481000	BPG175PENGADILAN AGAMA JAKTIM 400648	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
403	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	005	01	VA	653244006531000	BPG175PENGADILAN AGAMA JAKSEL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
404	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	005	01	VA	653244006621000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA BANDUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
405	400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	005	01	VA	653244006781000	BPG 087 PA 400678 SMD	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06.2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
406	400690	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	005	01	VA	653244006901000	BPG 025 PA CIAMIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
407	400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	005	01	VA	653254007041000	BPG 025 PENGADILAN AGAMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
408	400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	005	01	VA	651544007051000	BPG 025 PENGADILAN AGAMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
409	400710	PENGADILAN AGAMA GARUT	005	01	VA	653244007101000	BPG 096 PA GARUT 400710	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B-21/BUA.3/KU.03/4/2021 3 APRIL 2021	TNP	Rp -
410	400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	005	01	VA	653244007291000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA BOGOR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/023 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
411	400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	005	01	VA	653244007351000	BPG 128 PA SUKABUMI 400735	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	PMK NO. 183/PMK.05/2019 5 DECEMBER 2019	TNP	Rp -
412	400741	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	005	01	VA	653244007411000	BPG 128 PA CIANJUR 400741	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
413	400750	PENGADILAN AGAMA CIREBON	005	01	VA	653254007501000	BPG 024 PENGADILAN AGAMA CIREBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
414	400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	005	01	VA	653244007721000	BPG 147 PA MAJALENGKA (400772)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
415	400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	005	01	VA	653244007811000	BPG 147 PA KUNINGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
416	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	005	01	VA	653244008171000	BPG : 161 PENGADILAN AGAMA RKBT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000397/161 15 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
417	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	005	01	VA	653244008231000	BPG 127 PA TANGERANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
418	400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	005	01	VA	653244008321000	BPG 171 PENGADILAN AGAMA BEKASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
419	400848	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	005	01	VA	653244008481000	BPG. 086 PENGADILAN AGAMA KARAWANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
420	400854	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	005	01	VA	653244008541000	BPG 021 PA PURWAKARTA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
421	400860	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	005	01	VA	653244008601000	BPG 072 PA PEKALONGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
422	400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	005	01	VA	653244008791000	BPG 118 PA PEMALANG 400879	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
423	400885	PENGADILAN AGAMA TEGAL	005	01	VA	653254008851000	BPG 118 PA TEGAL 005	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B-22/BUA.3/KU.03/4/2021 27 APRIL 2021	TNP	Rp -
424	400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	005	01	VA	653244008911000	BPG 118 PA BREBES 400891	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
425	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	005	01	VA	653244009051000	BPG 072 PA BATANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
426	400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	005	01	VA	653244009111000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
427	400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	005	01	VA	653244009201000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
428	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	005	01	VA	653244009361000	BPG 134 PA KENDAL (400936)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
429	400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	005	01	VA	653244009421000	BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
430	400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	005	01	VA	653244009511000	BPG 163 PA PURWODADI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
431	400967	PENGADILAN AGAMA PATI	005	01	VA	653244009671000	BPG 097 PA PATI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
432	400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	005	01	VA	653244009731000	BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400973	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
433	400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	005	01	VA	653244009821000	BPG 129 PA JEPARA 400982	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1308/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
434	400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	005	01	VA	653244009981000	BPG 097 PA REMBANG BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
435	401002	PENGADILAN AGAMA BLORA	005	01	VA	653244010021000	BPG 163 PENGADILAN AGAMA BLORA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
436	401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	005	01	VA	653244010181000	PENGADILAN AGAMA KOTA MAGELANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
437	401024	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	005	01	VA	653244010241000	BPG 115 PA TEMANGGUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
438	401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	005	01	VA	653244010301000	BPG 164 PA WONOSOBO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
439	401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	005	01	VA	653244010491000	BPG 027 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
440	401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	005	01	VA	653244010551000	BPG 027 PA KEBUMEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
441	401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	005	01	VA	653244010611000	BPG 029 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
442	401061	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	005	01	VA	651544010621000	BPG 029 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
443	401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	005	01	VA	653244010701000	BPG 029 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
444	401086	PENGADILAN AGAMA CILACAP	005	01	VA	653244010861000	BPG 130 PENGADILAN AGAMA CILACAP 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2754/WPB.12/KP.06/2020 20 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
445	401092	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	005	01	VA	653244010921000	BPG 029 PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
446	401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	005	01	VA	653254011061000	BPG 164 PA BANJARNEGARA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
447	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	005	01	VA	653244011121000	BPG175PTA JAKARTA 401112	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
448	401121	PENGADILAN AGAMA KLATEN	005	01	VA	653244011211000	BPG 148 PENGADILAN AGAMA KLATEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
449	401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	005	01	VA	653244011371000	BPG 148 PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
450	401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	005	01	VA	653244011431000	BPG 162 PENGADILAN AGAMA SRAGEN BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
451	401152	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	005	01	VA	653254011521000	BPG 028 PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
452	401168	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	005	01	VA	653244011681000	BPG 028 PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000072 28 APRIL 2021	TNP	Rp -
453	401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	005	01	VA	653244011741000	BPG 162 PENGADILAN AGAMA KAB KARANGANYAR BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
454	401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	005	01	VA	653244011801000	BPG 028 PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
455	401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	005	01	VA	653244011991000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
456	401200	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	005	01	VA	653244012001000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA SLEMAN QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
457	401219	PENGADILAN AGAMA WATES	005	01	VA	653244012191000	BPG 176 PENGADILAN AGAMA WATES	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
458	401225	PENGADILAN AGAMA BANTUL	005	01	VA	653244012251000	BPG 030 SATKER PA BANTUL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
459	401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	005	01	VA	653254012311000	BPG 149 PENGADILAN AGAMA WONOSARI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.23/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
460	401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	005	01	VA	653244012401000	BPG 135 PA SURABAYA QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
461	401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	005	01	VA	653244012561000	BPG 098 PA MOJOKERTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
462	401262	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	005	01	VA	653244012621000	165 PENGADILAN AGAMA SIDOARJO 401262	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
463	401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	005	01	VA	653244012711000	BPG 098 PA JOMBANG 401271	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
464	401287	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	005	01	VA	653254012871000	BPG 135 PENGADILAN AGAMA BAWEAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
465	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	005	01	VA	653244012931000	BPG 135 PENGADILAN AGAMA GRESIK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
466	401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	005	01	VA	653244013071000	BPG 073 BOJONEGORO BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
467	401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	005	01	VA	653244013221000	BPG 073 PA LAMONGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000033 13 JULY 2021	TNP	Rp -
468	401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	005	01	VA	653244013381000	BPG 131 PENGADILAN AGAMA JEMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-316/WPB.16/KP.131/2015 24 MARCH 2015	TNP	Rp -
469	401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	005	01	VA	653244013441000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO 401344	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
470	401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	005	01	VA	653244013501000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 401350	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
471	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	005	01	VA	653244013691000	BPG 100 PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (401369)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
472	401375	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	005	01	VA	653244013751000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA KEDIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1308/WPB.12/KP.6/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
473	401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	005	01	VA	653244013811000	BPG 150 PENGADILAN AGAMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000092/150 2 JUNE 2021	TNP	Rp -
474	401390	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	005	01	VA	653244013901000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
475	401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	005	01	VA	653244014011000	BPG 150 PENGADILAN AGAMA BLITAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000095 16 JUNE 2021	TNP	Rp -
476	401410	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	005	01	VA	653244014101000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA NGANJUK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
477	401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	005	01	VA	653244014261000	BPG 032 PA MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
478	401432	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	005	01	VA	653244014321000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA PASURUAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
479	401441	PENGADILAN AGAMA BANGIL	005	01	VA	653254014411000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA BANGIL 401441	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	110534/032 22 APRIL 2021	TNP	Rp -
480	401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	005	01	VA	653244014571000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO 401457	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000630/035 5 MAY 2021	TNP	Rp -
481	401463	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	005	01	VA	653244014631000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN (401463)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-357/WPB.16/KP.09.20/2015 24 MARCH 2015	TNP	Rp -
482	401472	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	005	01	VA	653244014721000	BPG 131 PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
483	401488	PENGADILAN AGAMA MADIUN	005	01	VA	8100774014881000	BPG 033 PA KOTA MADIUN 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
484	401494	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	005	01	VA	653244014941000	BPG 033 PENGADILAN AGAMA MAGETAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-000174/WPB.16/KP.07/2021 3 AUGUST 2021	TNP	Rp -
485	401508	PENGADILAN AGAMA NGAWI	005	01	VA	653244015081000	BPG 033 PA NGAWI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
486	401514	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	005	01	VA	653244015141000	BPG 033 PA PONOROGO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
487	401520	PENGADILAN AGAMA PACITAN	005	01	VA	653254015201000	BPG 099 PENGADILAN AGAMA PACITAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
488	401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	005	01	VA	653244015391000	BPG 036 KANTOR PA PAMEKASAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
489	401545	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	005	01	VA	653244015451000	BPG 036 PA BANGKALAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
490	401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	005	01	VA	653244015511000	BPG 036 PENGADILAN AGAMA SAMPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
491	401560	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	005	01	VA	653244015601000	BPG 036 PA SUMENEP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-483/WPB.16/KP.0530/2015 26 MARCH 2015	TNP	Rp -
492	401576	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	005	01	VA	653254015761000	BPG 036 PA KANGEAN SUMENEP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
493	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	005	01	VA	8100774015821000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021/001 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
494	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	005	01	VA	8100774015911000	BPG 001 MS BANDA ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1310/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
495	401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	005	01	VA	8100774016021000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH SABANG 02	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
496	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	005	01	VA	8100774016111000	BPG001 MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
497	401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	005	01	VA	8100774016271000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH MEUREUDU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2771/WPB.12/KP.06/2021 5 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
498	401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	005	01	VA	8100774016331000	BPG 089 MS BIREUEN 401633	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
499	401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	005	01	VA	8100774016421000	BPG 089 MS LHOKSUKON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1197/WPB.01/KP/02/2021 5 AUGUST 2021	TNP	Rp -
500	401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	005	01	VA	8100774016581000	BPG 122 MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
501	401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE	005	01	VA	8100774016641000	BPG 089 MS LHOKSEUMAWE 401664	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1310/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
502	401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	005	01	VA	8100774016701000	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH IDI	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2771/WPB.12/KP.06/2021 5 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
503	401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	005	01	GIRO	1057521747	BPG 002 MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-315/WPB.01/KP.04/2021 3 AUGUST 2021	TNP	Rp -
504	401689	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	005	01	VA	8100774016891000	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH LANGSA	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2022	TNP	Rp -
505	401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	005	01	VA	8100774016951000	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH KSP	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-3173/WPB.12/KP.06/2021 6 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
506	401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	005	01	VA	8100774017091000	BPG 105 MS BLANGKEJEREN 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
507	401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE	005	01	VA	8100774017151000	BPG 105 MAHKAMAH SYARIYAH KUTACANE	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WBP.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
508	401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	005	01	VA	8100774017211000	BPG 003 MAHKAMAH SYARIYAH MEULABOH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
509	401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	005	01	VA	8100774017301000	BPG 003 MS SINABANG 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1118/PB.3/2021 22 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
510	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	005	01	VA	8100774017461000	BPG 003 MS CALANG 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
511	401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	005	01	VA	8100774017611000	BPG MS TAPAKTUAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
512	401777	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	005	01	VA	653244017771000	BPG 123 PT AGAMA MEDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
513	401783	PENGADILAN AGAMA BINJAI	005	01	VA	653244017831000	BPG 123 PA BINJAI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
514	401792	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	005	01	VA	653244017921000	BPG 119 PA KABANJAHE 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
515	401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	005	01	VA	653244018031000	BPG 123 PAMEDAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
516	401812	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	005	01	VA	653244018121000	BPG 075 PA RANTAUPRAPAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
517	401828	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	005	01	VA	653244018281000	BPG 076 PA TANJUNG BALAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000035/076 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
518	401840	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	005	01	VA	653244018401000	BPG 119 PA SIDIKALANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
519	401859	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	005	01	VA	653244018591000	BPG 005 01 PA P. SIANTAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
520	401865	PENGADILAN AGAMA BALIGE	005	01	VA	653254018651000	BPG 125 PA BALIGE 401865	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S.2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
521	401865	PENGADILAN AGAMA BALIGE	005	01	VA	651544018661000	BPG 125 PA BALIGE 401866	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
522	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	005	01	VA	653244018681000	BPG 102 PA NANGA BULIK 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
523	401869	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	005	01	VA	653254018691000	BPG 102 PA SUKAMARA 401869	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/102 6 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
524	401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	005	01	VA	653244018701000	BPG PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/044 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
525	401871	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	005	01	VA	8100774018711000	BPG 106 PA SIBOLGA BUA	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2755/WPB.12/KP.06/2020 20 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
526	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	005	01	VA	653244018731000	BPG 044 PENGADILAN AGAMA KASONGAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 23 APRIL 2021	TNP	Rp -
527	401874	PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG	005	01	VA	653244018741000	BPG 080 PA T. LAYANG ADMINISTRASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
528	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	005	01	VA	653244018751000	BPG 043 PA PULANG PISAU 401875	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
529	401876	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	005	01	VA	653244018761000	BPG 043 PA KUALA KURUN 401876	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
530	401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	005	01	VA	8100774018771000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA PENAJAM	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
531	401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	005	01	VA	653244018781000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA SENDAWAR 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
532	401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	005	01	VA	653244018791000	BPG 058 PA BELOPA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
533	401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	005	01	VA	653244018801000	BPG 006 PA PADANGSIDEMPUAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
534	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	005	01	VA	653244018821000	BPG 178 PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
535	401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	005	01	VA	653244018831000	BPG 058 PENGADILAN AGAMA MALILI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1308/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
536	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	005	01	VA	8100774018841000	BPG 052 PA. AMPANA 401884	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2075/WPB.12/KP.06/2021 9 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
537	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	005	01	VA	653244018851000	BPG 103 PA WANGI WANGI 401885	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
538	401886	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	005	01	VA	653244018861000	BPG 156 PENGADILAN AGAMA LASUSUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
539	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	005	01	VA	653244018871000	BPG 060 PENGADILAN AGAMA RUMBIA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
540	401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	005	01	VA	653244018881000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA LOLAK 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
541	401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	005	01	VA	653244018891000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
542	401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	005	01	VA	653244018901000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA BOROKO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
543	401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	005	01	VA	653244018911000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1916/WPB.12/KP.06/2021 30 AUGUST 2021	TNP	Rp -
544	401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	005	01	VA	653244018921000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA SUWAWA 401892	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
545	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	005	01	VA	653244018931000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA KWANDANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
546	401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	005	01	VA	653244018941000	BPG 173 PA DATARAN HUNIPOPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
547	401895	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA	005	01	VA	653244018951000	BPG 173 PA DATARAN HUNIMOA 401895	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	KPPN S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
548	401896	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	005	01	VA	653244018961000	BPG 007 PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI QQ 401896	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
549	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	005	01	VA	653244018981000	BPG 061 PENGADILAN AGAMA NAMLEA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-721/PB.3/2021/061 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
550	401899	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	005	01	VA	653244018991000	BPG 067 PA KAIMANA 401899	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
551	401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	005	01	VA	653244019001000	BPG 010 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
552	401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	005	01	VA	8100774019021000	BPG 074 PN BLANGPIDIE 401902	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2771/WPB.12/KP.06/2021 5 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
553	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	005	01	VA	8100774019031000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
554	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	005	01	VA	8101254020091000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
555	401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	005	01	VA	8100774019041000	BPG 003 PN SUKAMAKMUE 401904	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
556	401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	005	01	VA	653244019051000	BPG 124 PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
557	401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	005	01	VA	653244019061000	BPG 006 SBH 401906	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
558	401907	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	005	01	VA	653244019071000	BPG 077 PN PULAU PUNJUNG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
559	401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	005	01	VA	653244019081000	BPG 092 PN TELUK KUANTAN 08	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
560	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	005	01	VA	653244019091000	BPG 160 PN PANGKALAN BALAI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
561	401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	005	01	VA	653244019101000	BPG 181 PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 401910	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
562	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	005	01	VA	653244019111000	BPG 017 PN GEDONG TATAAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
563	401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	005	01	VA	653244019121000	BPG 015 PN KOBA 401912	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
564	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	005	01	VA	653244019131000	BPG 015 PN MENTOK 401913	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
565	401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	005	01	VA	653244019141000	BPG 025 PN BANJAR 401914	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
566	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	005	01	VA	653244019151000	BPG 171 PENGADILAN NEGERI CIKARANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB..12/KP.06/2020/171 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
567	401916	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	005	01	VA	653244019161000	BPG 010 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN 401916	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
568	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	005	01	VA	653244019181000	BPG 043 PN KUALA KURUN 401918	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 12 JANUARY 2021	TNP	Rp -
569	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	005	01	VA	653244019191000	BPG 102 PN NANGA BULIK 401919	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
570	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	005	01	VA	653244019201000	BPG 043 PN PULANG PISAU 401920	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
571	401921	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	005	01	VA	653244019211000	BPG 151 PN PARINGIN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
572	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	005	01	VA	653244019221000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA SOLOK (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06.2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
573	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	005	01	VA	653244019241000	BPG 047 PN PENAJAM KELAS II	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
574	401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	005	01	VA	653244019251000	BPG 179 PN MELONGUANE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
575	401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	005	01	VA	653244019261000	BPG 156 PENGADILAN NEGERI LASUSUA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
576	401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	005	01	VA	654444020321000	BPG 156 PN LASUSUA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
577	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	005	01	VA	653244019271000	BPG 103 PN WANGI WANGI 401927	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
578	401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	005	01	VA	653244019281000	BPG 058 PENGADILAN NEGERI BELOPA 401928	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
579	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	005	01	VA	653244019291000	BPG 084 PENGADILAN NEGERI DOBO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
580	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	005	01	VA	653244019301000	BPG 061 PENGADILAN NEGERI NAMLEA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
581	401931	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	005	01	VA	653244019311000	BPG 077 PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
582	401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	005	01	VA	653244019331000	BPG 067 PN KAIMANA 401933	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
583	401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	005	01	VA	653244019341000	BPG 006 PA SBH 401934	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
584	401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	005	01	VA	653244019351000	BPG 124 PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
585	401936	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	005	01	VA	653244019361000	BPG 077 PA PULAU PUNJUNG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S.2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
586	401936	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	005	01	VA	651544034001000	BPG 077 PA PULAU PUNJUNG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
587	401937	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	005	01	VA	653244019371000	BPG 008 PA SIAK 401937	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
588	401938	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	005	01	VA	653244019381000	BPG 092 PA TELUK KUANTAN 38	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
589	401939	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	005	01	VA	653244019391000	BPG 181 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO 401939	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
590	401940	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	005	01	VA	653254019401000	BPG 121 PA BINTUHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
591	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	005	01	VA	653244019411000	BPG 121 PA TAIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
592	401942	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	005	01	VA	653254019421000	BPG 146 PA KEPAHIANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
593	401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	005	01	VA	653244019431000	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
594	401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA PLG	005	01	VA	653254019441000	BPG 109 PA MARTAPURA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
595	401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	005	01	VA	653244019451000	BPG 109 PA MUARADUA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
596	401946	PENGADILAN AGAMA PAGARALAM	005	01	VA	653254019461000	BPG 144 PENGADILAN AGAMA (01) PAGAR ALAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
597	401947	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	005	01	VA	653244019471000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 01 BATUSANGKAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
598	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	005	01	VA	653244019491000	BPG 014 PA PRABU KLS II 401949	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
599	401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	005	01	VA	653244019501000	BPG 017 PA GEDONG TATAAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
600	401951	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	005	01	VA	8100774019511000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
601	401952	PENGADILAN AGAMA MESUJI	005	01	VA	653244019521000	BPG 116 PA MESUJI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1308/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
602	401953	PENGADILAN AGAMA PADANG	005	01	VA	653244019531000	BPG 010 PENGADILAN AGAMA PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
603	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	005	01	GIRO	219201000562306	BPG 116 PENGADILAN AGAMA TUBA TENGAH 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-010/WBP.08/KP.0304/2019 4 JANUARY 2019	TNP	Rp -
604	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	005	01	VA	653244019561000	BPG 126 PA SUKADANA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
605	401957	PENGADILAN AGAMA SOREANG	005	01	VA	653244019571000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA SOREANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
606	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	005	01	VA	653244019581000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
607	401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	005	01	VA	653244019591000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S709/PB.3/4/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
608	401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	005	01	VA	651544034211000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S709/PB.3/4/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
609	401960	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	005	01	VA	653244019601000	BPG 093 PA SINGKAWANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2372/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
610	401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	005	01	VA	653244019611000	BPG 079 PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH 401961	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
611	401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	005	01	VA	653244019621000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 01 PDG PANJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
612	401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	005	01	VA	653244019641000	BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
613	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	005	01	VA	8100774019651000	BPG 074 MS BLANGPIDIE 401965	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	000126/074 3 FEBRUARY 2022	TNP	Rp -
614	401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	005	01	VA	8100774019661000	BPG 003 MS SUKA MAKMUE 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
615	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	005	01	VA	8100774019671000	BPG 074 MS SSALAM 401967	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021/074 12 JULY 2021	TNP	Rp -
616	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	005	01	VA	653244019681000	BPG 015 PTUN PKP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
617	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	005	01	VA	651554034291000	BPG 015 PTUN PKP 403429	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
618	401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	005	01	VA	653244019691000	BPG 050 PENGADILAN TATA USAHA GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
619	401970	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	005	01	VA	653244019701000	BPG 173 PN DATARAN HUNIPOPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
620	401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	005	01	VA	653244019711000	BPG 173 PN DATARAN HUNIMOA 401971	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1335/ WPB.32/ KP.0402/ 2018 31 DECEMBER 2018	TNP	Rp -
621	401972	PENGADILAN NEGERI SANANA	005	01	VA	653244019721000	BPG 062 PN SANANA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
622	401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	005	01	VA	653244019731000	BPG 062 PN. BOBONG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
623	401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	005	01	VA	653244019781000	BPG 077 PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
624	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	005	01	VA	653244019841000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA KOTO BARU (BUA MARI)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-623/PB.3/2021 30 MARCH 2021	TNP	Rp -
625	401990	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	005	01	VA	653254019901000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.21/BUA.3/KU.03/4/2021 12 APRIL 2021	TNP	Rp -
626	402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	005	01	VA	653244020041000	BPG 142 PENGADILAN AGAMA PAINAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.02/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
627	402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	005	01	VA	651544020051000	BPG 142 PENGADILAN AGAMA PAINAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.02/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
628	402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	005	01	VA	653244020101000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 01 BUKITTINGGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
629	402029	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	005	01	VA	653244020291000	BPG 091 PA LUBUK SIKAPING BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
630	402035	PENGADILAN AGAMA TALU	005	01	VA	653244020351000	BPG 091 PA TALU (BUA)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
631	402041	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	005	01	VA	653244020411000	BPG 011 PA 01 MANINJAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
632	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	005	01	VA	653244020501000	BPG 011 PA PAYAKUMBUH 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
633	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	005	01	VA	653244020661000	BPG 011 PA TANJUNG PATI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
634	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	005	01	GIRO	9899684020721000	BPG 008 PA PEKANBARU 402072	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-082/WPB.04/KP.008/2018 8 JANUARY 2018	TNP	Rp -
635	402081	PENGADILAN AGAMA RENGAT	005	01	VA	653244020811000	BPG 092 PENGADILAN AGAMA RENGAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
636	402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	005	01	VA	653244020971000	BPG 092 PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
637	402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	005	01	VA	653244021011000	BPG 008 PENGADILAN AGAMA BKN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
638	402117	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	005	01	VA	653244021171000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
639	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	005	01	VA	653244021231000	BPG 008 PA PASIR PENGARAIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
640	402132	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	005	01	VA	653254021321000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
641	402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	005	01	VA	653244021481000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG ES 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
642	402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	005	01	VA	653244021541000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP ES01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
643	402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	005	01	VA	653244021601000	BPG 137 PA TBK 402160	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-724/WPB.31/KP.0230/2015 17 JUNE 2015	TNP	Rp -
644	402179	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	005	01	VA	653244021791000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA TAREMPA ES01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
645	402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	005	01	VA	653244021851000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
646	402191	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	005	01	VA	653244021911000	BPG 078 PA MA BUNGO01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
647	402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	005	01	VA	653244022051000	BPG 143 PA KUALA TUNGKAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
648	402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	005	01	VA	653254022111000	BPG 159 PENGADILAN AGAMA BANGKO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
649	402220	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	005	01	VA	653244022201000	BPG (013) PENGADILAN AGAMA SPN (402220)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
650	402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	005	01	VA	653244022361000	BPG 014 PENGADILAN TINGGI AGAMA PLG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
651	402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	005	01	VA	653244022421000	BPG 014 PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KD 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA NO. S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
652	402251	PENGADILAN AGAMA LAHAT	005	01	VA	653244022511000	BPG 144 PENGADILAN AGAMA LAHAT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1472/WPB.12/KP.06/2021 4 JUNE 2020	TNP	Rp -
653	402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	005	01	VA	653254022671000	BPG 109 PA BATURAJA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 APRIL 2020	TNP	Rp -
654	402273	PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG	005	01	VA	653244022731000	BPG 014 PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB12/KP.06/2020 6 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
655	402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	005	01	VA	653244022821000	BPG 144 PA MUARA ENIM (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
656	402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	005	01	VA	653244022981000	BPG 070 PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
657	402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	005	01	VA	653244023021000	BPG 015 PA PANGKALPINANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
658	402318	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	005	01	VA	653244023181000	BPG 107 PA TANJUNG PANDAN (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
659	402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	005	01	VA	653244023241000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
660	402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	005	01	VA	653244023301000	BPG 145 PENGADILAN AGAMA KRUI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
661	402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	005	01	VA	653244023491000	BPG 116 KOTABUMI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1888/WPB.12/KP.06/2021 26 AUGUST 2021	TNP	Rp -
662	402355	PENGADILAN AGAMA METRO	005	01	VA	653244023551000	BPG 126 PA METRO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
663	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	005	01	VA	653244023611000	BPG 042 PA PONTIANAK 402361	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
664	402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	005	01	VA	653244023701000	BPG 093 PENGADILAN AGAMA SAMBAS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2372/WPB.12/KP.06/2020/093 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
665	402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	005	01	VA	653244023861000	BPG 094 PA KETAPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
666	402392	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	005	01	VA	653254023921000	BPG 167 PA SANGGAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
667	402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	005	01	VA	653244024061000	BPG 079 PENGADILAN AGAMA SINTANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-177/WPB.17/KP.0530/2015 18 MARCH 2015	TNP	Rp -
668	402412	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	005	01	VA	653244024121000	BPG 117 PENGADILAN AGAMA PUTUSSSIBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB/12.KP.06/2020 TANGGAL 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
669	402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	005	01	VA	653254024211000	BPG 043 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA 402421	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
670	402437	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	005	01	VA	653244024371000	BPG 102 PA PANGKALAN BUN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
671	402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH	005	01	VA	653244024431000	BPG 080 PA MUARA TEWEH ADMINISTRASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
672	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	005	01	VA	653254024491000	BPG 045 PTA BANJARMASIN 402449	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
673	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	005	01	VA	653244024521000	BPG 080 PA BUNTOK ADMINISTRASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
674	402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	005	01	VA	653244024681000	BPG 043 PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021/043 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
675	402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	005	01	VA	653244024741000	BPG 044 PENGADILAN AGAMA SAMPIT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
676	402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	005	01	VA	653244024801000	BPG 046 PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/046 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
677	402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	005	01	VA	653254025001000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA BJM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
678	402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	005	01	VA	653244025191000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
679	402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	005	01	VA	653244025251000	BPG 110 PA RANTAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
680	402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	005	01	VA	653244025311000	BPG 110 PA BUA KANDANGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
681	402540	PENGADILAN AGAMA BARABAI	005	01	VA	653244025401000	BPG 110 PA BARABAI BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
682	402556	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	005	01	VA	653254025561000	BPG 151 PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
683	402562	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	005	01	VA	653244025621000	BPG 151 PENGADILAN AGAMA TANJUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
684	402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	005	01	VA	653244025711000	BPG 110 PA (01) NEGARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1888/WPB.12/KP.06/2021 26 AUGUST 2021	TNP	Rp -
685	402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	005	01	VA	653244025871000	BPG 021 PA SUBANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000038/021 28 APRIL 2021	TNP	Rp -
686	402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	005	01	VA	653244025931000	BPG 134 KANTOR PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	871/SEK.KU.01/V/2020 20 MAY 2021	TNP	Rp -
687	402607	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	005	01	VA	8100774026071000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH JANTHO 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
688	402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	005	01	VA	653244026131000	BPG 011 PA LUBUK BASUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
689	402622	PENGADILAN AGAMA DUMAI	005	01	VA	653244026221000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA DUMAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
690	402638	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	005	01	VA	653244026381000	160 PENGADILAN AGAMA SEKAYU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
691	402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	005	01	VA	653244026441000	BPG 017 PA KALIANDA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
692	402650	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	005	01	VA	653244026501000	BPG 042 PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/042 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
693	402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	005	01	VA	653244026691000	BPG 042 PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
694	402675	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	005	01	VA	653244026751000	BPG 048 PENGADILAN AGAMA TARAKAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
695	402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	005	01	VA	653254026811000	BPG 049 PTA MANADO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/049 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
696	402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	005	01	VA	653244026901000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
697	402701	PENGADILAN AGAMA TONDANO	005	01	VA	653244027011000	BPG 049 PENGADILAN AGAMA TONDANO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
698	402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	005	01	VA	653254027101000	BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06.2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
699	402726	PENGADILAN AGAMA BANGLI	005	01	VA	653244027261000	BPG 154 PA BANGLI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
700	402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	005	01	VA	653244027321000	BPG 132 PENGADILAN AGAMA NEGARA 402732	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
701	402741	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	005	01	VA	653244027411000	BPG 154 PA KARANGASEM (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2372/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
702	402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	005	01	VA	653244027571000	BPG 037 PENGADILAN AGAMA TABANAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001763/037 31 MAY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
703	402757	PENGADILAN AGAMA TABANAN	005	01	VA	651544027581000	BPG 037 PENGADILAN AGAMA TABANAN 02	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001775 3 JUNE 2021	TNP	Rp -
704	402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	005	01	VA	653244027631000	BPG 154 PA KLUNGKUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/20220 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
705	402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	005	01	VA	653244027721000	BPG 037 PENGADILAN AGAMA GIANYAR 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
706	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	005	01	VA	653244027881000	BPG 038 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
707	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	005	01	VA	651544027891000	BPG 038 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
708	402794	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	005	01	VA	653244027941000	BPG 174 PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
709	402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	005	01	VA	9899684028081000	BPG175111402808	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WBP.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
710	402814	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	005	01	VA	653244028141000	BPG 172 PENGADILAN AGAMA 01 ATAMBUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
711	402820	PENGADILAN AGAMA SOE	005	01	VA	653244028201000	BPG 039 PA SOE 402820	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
712	402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	005	01	VA	653244028391000	BPG 172 PA 01 KEFAMENANU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	- 4 MAY 2021	TNP	Rp -
713	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	005	01	VA	653254028451000	BPG 111 PENGADILAN AGAMA BAJAWA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
714	402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	005	01	VA	653244028511000	BPG 040 PA MAUMERE 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
715	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	005	01	VA	653244028601000	BPG 063 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
716	402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	005	01	VA	653244028761000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
717	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	005	01	VA	9899684028821000	BPG 066 PENGADILAN AGAMA SORONG 01	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
718	402891	PENGADILAN AGAMA BIAK	005	01	VA	653254028911000	BPG 064 PENGADILAN AGAMA BIAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2723/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
719	402902	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	005	01	VA	653244029021000	BPG 067 PENGADILAN AGAMA FAKFAK 402902	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000022 19 APRIL 2021	TNP	Rp -
720	402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	005	01	VA	653244029111000	BPG 065 PA MANOKWARI 402911	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
721	402927	PENGADILAN AGAMA NABIRE	005	01	VA	653244029271000	BPG 085 PENGADILAN AGAMA NABIRE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
722	402933	PENGADILAN AGAMA WAMENA	005	01	VA	653244029331000	BPG 113 PENGADILAN AGAMA WAMENA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
723	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	005	01	VA	653244029421000	BPG 138 PENGADILAN AGAMA SERUI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-99/WPB.34/KP.04/2021 25 FEBRUARY 2021	TNP	Rp -
724	402958	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	005	01	VA	653244029581000	BPG 068 PENGADILAN AGAMA MERAUKE QQ 402958	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-288/WPB.33/KP.0430/2015 11 MARCH 2015	TNP	Rp -
725	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	005	01	VA	653244029641000	BPG 134 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
726	402970	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	005	01	VA	653254029701000	BPG 008 PTA PEKANBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001506 1 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
727	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	005	01	VA	653244029891000	BPG 043 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
728	402995	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	005	01	VA	653244029951000	BPG 128 PENGADILAN AGAMA CIBADAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
729	403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	005	01	VA	653244030091000	BPG 024 PA SUMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
730	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	005	01	VA	653244030211000	BPG 115 PENGADILAN AGAMA MUNGKID	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 6 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
731	403030	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	005	01	VA	653244030301000	BPG: 033 PA KAB. MADIUN (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.16/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
732	403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	005	01	VA	653244030461000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA KEDIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
733	403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	005	01	VA	653244030521000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
734	403061	PENGADILAN AGAMA KISARAN	005	01	VA	653244030611000	BPG 076 PENGADILAAN AGAMA KISARAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000038/076 5 MAY 2021	TNP	Rp -
735	403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	005	01	VA	653254030831000	BPG 005 PA SIMALUNGUN KODE SATKER 403083	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
736	403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	005	01	VA	653244030921000	BPG 015 PA SUNGAILIAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
737	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	005	01	GIRO	30601000320307	BPG 185 PA TJ SELOR 01 417657	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1997/WPB.20/KP.048/2017 27 DECEMBER 2017	TNP	Rp -
738	417704	PENGADILAN NEGERI MALINAU	005	01	VA	653244177041000	BPG 185 PN MLN 01 417704	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
739	417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	005	01	VA	653244177221000	BPG 185 PN TJ SELOR 01417722	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1888/WPB.12/KP.06/2021 21 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
740	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	005	01	VA	653244178441000	BPG 161 PENGADILAN NEGERI PDG 417844	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
741	417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	005	01	VA	653244178501000	BPG 161 PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG PDG 417850	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
742	440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	005	01	VA	653244407121000	BPG 020 PTA BANTEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1308/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
743	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	005	01	VA	653244407281000	BPG 015 PTA BABEL-01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
744	440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	005	01	VA	653254407341000	BPG 050 PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
745	440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	005	01	VA	653244407401000	BPG 062 PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 NOVEMBER 2020	TNP	Rp -
746	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	005	01	VA	653244507371000	BPG 166 PENGADILAN AGAMA TUBAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
747	477202	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	005	01	VA	653254772021000	BPG 051 PENGADILAN NEGERI DONGGALA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/20201 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
748	477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	005	01	VA	653244772181000	BPG.180.PN TILAMUTA 477218	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
749	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	005	01	VA	653244772241000	BPG 060 PN UNAAHA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-273/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
750	477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	005	01	GIRO	9899684772301000	BPG174 PENGADILAN NEGERI LEMBATA 01	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-276/WPB.23/KP.174/2015 8 MAY 2015	TNP	Rp -
751	477249	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	005	01	VA	653244772491000	BPG.049 PN ROTE NDAO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B-22/BUA.3/KU.03/4/2021 27 APRIL 2021	TNP	Rp -
752	477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	005	01	VA	653244772551000	BPG 008 PN PELALAWAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
753	477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	005	01	VA	653244772611000	BPG 120 PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
754	477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	005	01	VA	653244772701000	BPG 152 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN 477270	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
755	477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	005	01	VA	653244772921000	BPG 023 PENGADILAN NEGERI DEPOK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
756	477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	005	01	VA	653244773061000	BPG 017 PN KOTA AGUNG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
757	477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	005	01	VA	653244773431000	BPG 008 PENGADILAN NEGERI SIAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001546/008 4 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
758	477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	005	01	VA	653244773521000	BPG 091 PN PASBAR (477352)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
759	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	005	01	VA	653244773681000	BPG078 PN TEBO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
760	477374	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	005	01	VA	653244773741000	BPG 159 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
761	477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	005	01	VA	653244773801000	BPG 046 PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
762	477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	005	01	VA	653244773991000	BPG 006 PN MANDAILING NATAL 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
763	477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	005	01	VA	653244774001000	BPG 143 PN TJT 477400	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
764	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	005	01	VA	653245267041000	BPG175.PT TATA USAHA NEGARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
765	526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	005	01	VA	653245267111000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI TUN UJUNGPANDANG (526711)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1429/WPB.25/KP.02/2021 28 APRIL 2021	TNP	Rp -
766	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	005	01	VA	653255267321000	BPG175PENGADILAN TUN 526732	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
767	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	005	01	VA	653245267461000	BPG 123 PTUN MEDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
768	526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	005	01	VA	653245267501000	BPG 014 PTUN PALEMBANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
769	526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	005	01	VA	653245267671000	BPG 165 PTUN SURABAYA QQ 526767	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
770	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	005	01	VA	653245267711000	BPG 136 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000139/136 17 JULY 2021	TNP	Rp -
771	531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	005	01	VA	653245318231000	BPG 095 PTUN BANDUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
772	531830	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	005	01	VA	653255318301000	BPG 134 PTUN SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
773	531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	005	01	VA	653245318441000	BPG 010 PTUN PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
774	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	005	01	VA	653245318511000	BPG 042 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
775	531851	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	005	01	VA	651555318521000	BPG 042 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-549/PB.3/2021 26 MARCH 2021	TNP	Rp -
776	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	005	01	VA	653245318651000	BPG 045 PTUN BANJARMASIN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
777	531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	005	01	VA	653245318721000	BPG 049 PTUN MANADO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
778	539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	005	01	VA	653255391171000	BPG PTUN AMBON 1	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
779	539121	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	005	01	VA	653245391211000	BPG 039 PTUN KPG 539121	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
780	539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	005	01	VA	653245391381000	BPG 063 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
781	547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	005	01	VA	653245476571000	BPG 030 PTA YOGYAKARTA QQ 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
782	547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	005	01	VA	653245476611000	BPG 012 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
783	547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	005	01	VA	653245476781000	BPG 017 PENGADILAN TINGGI AGAMA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
784	547682	PENGADILAN AGAMA STABAT	005	01	VA	653245476821000	BPG 123 PA STABAT 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/123 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
785	547699	PENGADILAN AGAMA BATAM	005	01	VA	9899685476991000	BPG 137 PA BATAM 547699	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	000142 26 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
786	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	005	01	VA	653255489401000	BPG 135 PT TUN SBY 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
787	559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	005	01	VA	653245598401000	BPG 017 PTUN BANDAR LAMPUNG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
788	559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	005	01	VA	653245598571000	BPG 046 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
789	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	005	01	VA	653245598611000	BPG 037 PTUN DENPASAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001704 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
790	576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	005	01	VA	653245762491000	BPG 051 PTA PALU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
791	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	005	01	VA	653245762531000	BPG 060 PTA KENDARI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
792	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	005	01	VA	653245762601000	BPG 039 PTA KUPANG 576260	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
793	576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	005	01	VA	80052005762741000	BPG 016 PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	S-1925/WPB.12/KP.06/2021 30 AUGUST 2021	TNP	Rp -
794	578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	005	01	VA	653245788011000	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
795	578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	005	01	VA	8100775788181000	BPG 001 PTUN BANDA ACEH 578818	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
796	578822	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU	005	01	VA	8100775788221000	BPG 008 PTUN PEKANBARU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	001573/008 6 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
797	578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	005	01	VA	653245788391000	BPG 012 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
798	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	005	01	VA	653245788431000	BPG 043 PTUN PALANGKA RAYA 578843	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
799	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	005	01	VA	653245788501000	BPG 051 PTUN PALU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
800	578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	005	01	VA	653245788641000	BPG 060 PTUN KENDARI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
801	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	005	01	VA	653245788711000	BPG 038 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
802	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	005	01	VA	653245788851000	BPG 016 PTUN BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
803	604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	005	01	VA	653246047191000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA CIBINONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
804	604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	005	01	VA	653246047231000	BPG 127 PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
805	604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	005	01	VA	653246047301000	BPG 032 PA KAB MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	110680/032 8 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
806	604744	PENGADILAN AGAMA PANDAN	005	01	VA	653256047441000	BPG 106 PENGADILAN AGAMA PANDAN 1	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
807	604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	005	01	VA	653196047521000	BPG 179 BANTUAN HUKUM PA BITUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W18-A5/ 839/ KU.03/ 12/ 2021 22 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
808	604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	005	01	VA	8100776047511000	BPG 179 PA BITUNG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2384/KPN.1206/2022 21 NOVEMBER 2022	TNP	Rp -
809	604765	PENGADILAN AGAMA DONGGALA	005	01	VA	653246047651000	BPG 051 PENGADILAN AGAMA DONGGALA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
810	604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	005	01	VA	653246047721000	BPG 060 PA UNAAHA (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
811	613519	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	005	01	VA	653246135191000	BPG 023 PN CIBINONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
812	614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	005	01	VA	653246146701000	BPG 009 PA NATUNA ES01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WBP.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
813	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	005	01	VA	653256146841000	BPG 116 PA TULANG BAWANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
814	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	005	01	VA	653246146911000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
815	614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	005	01	VA	653246147061000	BPG 171 PENGADILAN AGAMA CIKARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
816	614710	PENGADILAN AGAMA KAJEN	005	01	VA	653246147101000	BPG 072 PENGADILAN AGAMA KAJEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
817	614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	005	01	VA	653246147271000	BPG 175 038 614727 0	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
818	614731	PENGADILAN AGAMA BADUNG	005	01	VA	653246147311000	BPG 037 PENGADILAN AGAMA BADUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001824 9 AUGUST 2021	TNP	Rp -
819	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	005	01	VA	653256147691000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA SENTANI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
820	614773	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	005	01	VA	653246147731000	BPG 141 PENGADILAN AGAMA MIMIKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
821	614780	PENGADILAN AGAMA PANIAI	005	01	VA	653246147801000	BPG 085 PENGADILAN AGAMA PANIAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
822	614883	PENGADILAN NEGERI LIWA	005	01	VA	653246148831000	BPG 145 PENGADILAN NEGERI LIWA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
823	614890	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	005	01	VA	653256148901000	BPG 141 P N KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
824	626156	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN	005	01	VA	653246261561000	BPG 032 PN KAB MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 12 APRIL 2021	TNP	Rp -
825	631978	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	005	01	VA	653246319781000	BPG 125 PA TARUTUNG 631978	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
826	631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	005	01	VA	653246319821000	BPG 006 PA PANYABUNGAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
827	631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	005	01	VA	653246319991000	BPG 008 PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
828	632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	005	01	VA	8100776320011000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2755/WPB.12/KP.06/2021 20 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
829	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	005	01	VA	653246320181000	BPG 159 PA SAROLANGUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
830	632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	005	01	VA	653246320221000	BPG 143 PA MUARA SABAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2021 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
831	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	005	01	VA	653246320391000	BPG 093 PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/ WPB/ 12.KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
832	632043	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	005	01	VA	653246320431000	BPG 045 KANTOR PA BANJARBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
833	632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	005	01	VA	653246320501000	BPG 058 PENGADILAN AGAMA MASAMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
834	632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	005	01	VA	653246320641000	BPG174 PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
835	652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	005	01	VA	653256520201000	BPG 078 PA MA TEBO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
836	652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	005	01	VA	653246520341000	BPG 012 PA SENGETI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
837	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	005	01	VA	653246520411000	BPG 126 PA GUNUNG SUGIH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
838	652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	005	01	VA	653246520551000	BPG 116 PA BLAMBANGAN UMPU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1888/WPB.12/KP.06/2021 26 AUGUST 2021	TNP	Rp -
839	652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	005	01	VA	653246520621000	BPG 023 PA DEPOK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
840	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	005	01	VA	653256520761000	BPG 020 PA CILEGON BUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
841	652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	005	01	VA	653246520801000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA BONTANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
842	652097	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	005	01	VA	653246520971000	BPG 046 PA SANGATTA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2752/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
843	652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	005	01	VA	653246521021000	BPG: 082 PA BUOL 652102	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000040/082 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
844	652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	005	01	VA	653246521191000	BPG 052 PA BUNGKU 652119	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
845	652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	005	01	VA	653246521231000	BPG 053 PA.BANGGAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
846	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	005	01	VA	653246521301000	BPG 180 PA TILAMUTA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
847	653458	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	005	01	VA	653246534581000	BPG 045 PN.BANJARBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
848	662972	PENGADILAN NEGERI BONTANG	005	01	VA	653246629721000	BPG 046 PENGADILAN NEGERI BONTANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
849	662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	005	01	VA	653256629861000	BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
850	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	005	01	VA	653246629901000	BPG 008 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
851	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	005	01	VA	654446629911000	BPG 008 PN PASIR PENGARAIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
852	663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	005	01	VA	653246630051000	BPG 137 PN TBK 663005	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-543/WPB.31/KP.0230/2015 21 MAY 2015	TNP	Rp -
853	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	005	01	VA	653246630121000	BPG 012 PENGADILAN NEGERI SENGETI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
854	663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	005	01	GIRO	60501000082307	BPG 116 PENGADILAN NEGERI MENGGALA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-418/WPB.08/KP.0330/2015 30 APRIL 2015	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
855	663030	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	005	01	VA	653246630301000	BPG126 PN GUNUNG SUGIH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
856	663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	005	01	VA	653246630471000	BPG 126 PN SUKADANA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
857	663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	005	01	VA	653246630511000	BPG 116 PENGADILAN NEGERI BL UMPU 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
858	663136	BADAN PENGAWASAN	005	01	VA	32901004336308	RKK BAWAS MA OPS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1109/WPB.12/KP.06/2020 9 APRIL 2020	TNP	Rp -
859	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	005	01	VA	653246631611000	BPG175PENGADILAN MILITER UTAMA 663161	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
860	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I MEDAN	005	01	VA	653246631781000	BPG 123 P MILTI I MEDAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
861	663182	PENGADILAN MILITER I - 01 BANDA ACEH	005	01	GIRO	8100776631821000	BPG 001 DILMIL I 01 BNA 663182	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 29 AUGUST 2021	TNP	Rp -
862	663199	PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN	005	01	VA	653246631991000	BPG 123 P MILITER I-02 MEDAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
863	663204	PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG	005	01	VA	653246632041000	BPG 010 DILMIL I-03 PADANG 663204	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
864	663211	PENGADILAN MILITER I - 04 PALEMBANG	005	01	VA	653246632111000	BPG 014 DILMIL I-04 PALEMBANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
865	663225	PENGADILAN MILITER I - 05 PONTIANAK	005	01	VA	6532 4663 2251 000	BPG 042 PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
866	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 BANJARMASIN	005	01	VA	653246632321000	BPG 045 PENGADILAN MILITER I06 BJM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
867	663246	PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN	005	01	VA	653246632461000	BPG 047 PENGADILAN MILITER I 07 BALIKPAPAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
868	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA	005	01	VA	653246632501000	BPG175.PMT II JAKARTA (663250)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
869	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA	005	01	VA	653246632671000	BPG175PENGADILAN MILITER II08 663267	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
870	663271	PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG	005	01	GIRO	0001073850001	PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	S-463/WPK/13/095/2015 27 FEBRUARY 2015	TNP	Rp -
871	663288	PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG	005	01	VA	653246632881000	BPG 134 KANTOR PENGADILAN MILITER II 10 SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
872	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA	005	01	VA	653246632921000	BPG DILMIL II 11 YOGYAKARTA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
873	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA	005	01	VA	653246633001000	BPG 135 PM TINGGI III SBY	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
874	663314	PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA	005	01	VA	653256633141000	BPG 135 DILMIL III-12 SBY	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
875	663321	PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN	005	01	VA	653246633211000	BPG 033 DILMIL III-13 MADIUN (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
876	663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DENPASAR	005	01	VA	653246633351000	BPG 037 DILMIL III-14 DENPASAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001679/037 22 APRIL 2021	TNP	Rp -
877	663342	PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG	005	01	VA	653246633421000	BPG 039 PENGADILAN MILITER III-15	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S.985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
878	663356	PENGADILAN MILITER III - 16 MAKASSAR	005	01	VA	653246633561000	BPG 136 PENGADILAN MILITER III-16 DI MAKASSAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
879	663360	PENGADILAN MILITER III - 17 MANADO	005	01	VA	653256633601000	BPG 049 DILMIL III-17 MANADO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2730/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
880	663377	PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON	005	01	VA	653246633771000	BPG (061) PENGADILAN MILITER III-18 AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
881	663381	PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA	005	01	VA	653246633811000	BPG 063 PENGADILAN MILITER III 19 JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/220 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
882	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	005	01	VA	653246633981000	BPG PENGADILAN TINGGI BANTEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
883	663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	005	01	VA	653246634031000	BPG 015 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
884	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	005	01	VA	653246645221000	BPG 062 PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
885	664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	005	01	VA	653246645391000	BPG 050 KANTOR PENGADILAN TINGGI GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
886	670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	005	01	VA	653246701841000	BPG.180.PN MARISA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
887	670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	005	01	VA	653246701911000	BPG 080 PNTAMIANGLAYANG ADMINISTRASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
888	670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	005	01	VA	653246702061000	BPG 081 PN BATULICIN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
889	670210	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	005	01	VA	653256702101000	BPG 179 PN AIRMADIDI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
890	670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	005	01	VA	653246702271000	BPG 093 PENGADILAN NEGERI SAMBAS 670227	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
891	670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	005	01	VA	653246702311000	BPG 093 PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG 670231	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
892	670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	005	01	VA	653246702481000	BPG : 082 PN BUOL 670248	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
893	672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	005	01	GIRO	31401000525300	BPG 125 PN BALIGE 672910	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-0317/WPB.02/KP.125/2015 10 MARCH 2015	TNP	Rp -
894	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	005	01	VA	653246729271000	BPG 058 PENGADILAN NEGERI MASAMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
895	672931	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	005	01	VA	653256729311000	BPG 104 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI UNTUK BA 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 25 MAY 2021	TNP	Rp -
896	672948	PENGADILAN NEGERI RANAI	005	01	VA	653246729481000	BPG 009 PENGADILAN NEGERI RANAI ES01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
897	672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	005	01	VA	653246729521000	BPG 014 PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
898	672969	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	005	01	VA	653246729691000	BPG 144 PN PAGAR ALAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
899	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	005	01	VA	653246729731000	BPG 044 PENGADILAN NEGERI KASONGAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
900	672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	005	01	VA	8100776729801000	BPG 051 PENGADILAN NEGERI PARIGI	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2061/KPN.1206/2022 5 OCTOBER 2022	TNP	Rp -
901	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	005	01	VA	653246729941000	BPG 121 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
902	673009	PENGADILAN NEGERI TAIS	005	01	VA	653246730091000	BPG 121 PENGADILAN NEGERI TAIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
903	673013	PENGADILAN NEGERI MALILI	005	01	VA	653246730131000	BPG 058 P N MALILI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
904	673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	005	01	VA	653246730201000	BPG111 PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/111 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
905	673034	PENGADILAN NEGERI AMURANG	005	01	VA	653246730341000	BPG 049 PN AMURANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
906	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	005	01	VA	653246730411000	BPG 146 PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
907	673055	PENGADILAN NEGERI TUBEI	005	01	VA	653246730551000	BPG 146 PN TUBEI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
908	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	005	01	VA	8100776730621000	BPG 122 PENGADILAN NEGERI STR	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -
909	681418	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	005	01	VA	653246814181000	BPG 039 PENGADILAN NEGERI OELAMASI (681418)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021/039 24 MAY 2021	TNP	Rp -
910	681422	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	005	01	VA	9899686814221000	BPG 178 PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2736/WPB.12/KP.06/2020 16 SEPTEMBER 2020	TNP	Rp -
911	681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	005	01	GIRO	653246814391000	BPG 060 PN ANDOOLO (01)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
912	681443	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	005	01	VA	653246814431000	BPG 103 PN PASARWAJO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
913	681450	PENGADILAN NEGERI NGABANG	005	01	VA	653246814501000	BPG: 167 PN NGABANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
914	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	005	01	VA	653246821501000	BPG 025 PA KOTA TSM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
915	682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	005	01	VA	653256821641000	BPG 025 PA BANJAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
916	682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	005	01	VA	651546900301000	BPG 025 PA BANJAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
917	682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	005	01	VA	653246821711000	BPG 049 PENGADILAN AGAMA AMURANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
918	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	005	01	VA	653246821851000	BPG180PA MARISA 682185	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
919	682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	005	01	VA	653246821921000	BPG 051 PENGADILAN AGAMA PARIGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020/051 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
920	682207	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	005	01	VA	653246822071000	BPG 060 PA ANDOOLO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
921	682211	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	005	01	VA	653246822111000	BPG 103 PA PASARWAJO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
922	682228	MS SIMPANG TIGA REDELONG	005	01	VA	8100776822281000	BPG 122 MAHKAMAH SYARIAH STR	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-290/WPB.12/KP.06/2022 24 JANUARY 2022	TNP	Rp -
923	682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN	005	01	VA	653246822321000	BPG 006 PA KOTA PADANGSIDIMPUAN 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
924	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	005	01	VA	653256822491000	BPG 015 PENGADILAN AGAMA MENTOK 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
925	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	005	01	VA	653246822531000	BPG 146 PENGADILAN AGAMA LEBONG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
926	682260	PENGADILAN AGAMA BATULICIN	005	01	VA	653246822601000	BPG 081 PA BATULICIN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
927	682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	005	01	VA	653246822741000	BPG 01 PENGADILAN AGAMA TALIWANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-811/PB.3/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -
928	682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	005	01	VA	653246822811000	BPG 111 PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
929	682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	005	01	VA	653256822951000	BPG 152 PA NUNUKAN 682295	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
930	682300	PENGADILAN AGAMA ARSO	005	01	VA	653246823001000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA ARSO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
931	689309	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	005	01	VA	8100776893091000	BPG 137 PTUN TANJUNG PINANG 689309	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1980/KPN.1206/2022 22 SEPTEMBER 2022	TNP	-
932	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	005	01	VA	653246893131000	BPG 020 PTUN SRG 689313	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 03 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA

PERIODE 31 DESEMBER 2022

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
1	097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	005	03	VA	9896640990621000	BPG175.PENGADILAN TINGGI JKT (099062)	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
2	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	005	03	VA	8100120990631000	BPG175.PN JAKPUS (099063)	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-985/ WPB.12/ KP.06/ 2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
3	097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	005	03	VA	654440990641000	BPG 175 PN JAKBAR 099064	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
4	097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	005	03	VA	6013010900333908	BPG175 PN JAKTIM DIPA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
5	097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	005	03	VA	654450990671000	BPG 095 PT BANDUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
6	097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	005	03	VA	9896640990681000	BPG 095 PN BANDUNG_03	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
7	097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	005	03	VA	8100120990691000	BPG 087 PN SUMEDANG 099069	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-152/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
8	097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	005	03	VA	654440990711000	BPG 025 PN TASIKMALAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
9	097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	005	03	VA	654440990721000	BPG 096 PN GARUT 00503	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	39/DJU.1/KU.01/1/2021 18 JANUARY 2021	TNP	Rp -
10	097556	PENGADILAN NEGERI CIAMIS	005	03	VA	654440990731000	BPG 025 PN CIAMIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
11	097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	005	03	VA	654440990741000	BPG 020 PN SERANG 099074	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
12	097577	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	005	03	VA	654440990751000	BPG161 PN RKBT 099075	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
13	097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	005	03	VA	654440990771000	BPG 127 PN TANGERANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/202 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
14	097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	005	03	VA	654440990781000	BPG 021 PN PURWAKARTA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S,930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
15	097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	005	03	VA	654440990791000	BPG 171 PN BEKASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
16	097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	005	03	VA	9896640990801000	BPG 086 PENGADILAN NEGERI KARAWANG	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
17	097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	005	03	VA	654440990811000	BPG 021 PN SUBANG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000061/021 1 JULY 2021	TNP	Rp -
18	097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	005	03	VA	654440990821000	BPG 023 PENGAILAN NEGERI BOGOR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
19	097652	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	005	03	VA	654440990831000	BPG 128 PN SUKABUMI 099083	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
20	097666	PENGADILAN NEGERI CIANJUR	005	03	VA	654440990841000	BPG 128 PN CIANJUR 099084	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	418/DJU.1/KU.01/5/2021 19 MAY 2021	TNP	Rp -
21	097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	005	03	VA	6544440990851000	BPG 024 PN CIREBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
22	097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	005	03	VA	654440990861000	BPG 024 INDRAMAYU 099086	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
23	097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	005	03	VA	654440990881000	BPG 147 PN MAJALENGKA 099088	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
24	097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	005	03	VA	654440990891000	BPG 147 PN KUNINGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
25	097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	005	03	VA	654440990901000	BPG 134 PENGADILAN TINGGI SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
26	097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	005	03	VA	654440990921000	BPG 134 PN SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
27	097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	005	03	VA	654440990931000	BPG 118 PN TEGAL 099093	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
28	097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	005	03	VA	654440990941000	BPG 072 PN PEKALONGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
29	097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	005	03	VA	654440990951000	BPG 129 PN KUDUS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
30	097762	PENGADILAN NEGERI PATI	005	03	VA	654440990961000	BPG 097 PN PATI BADILUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
31	097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	005	03	VA	654440990971000	BPG 118 PN BREBES	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
32	097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	005	03	VA	654440990981000	BPG 118 PN PEMALANG099098	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
33	097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	005	03	VA	654440990991000	BPG 134 PN KENDAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
34	097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	005	03	VA	654440991001000	BPG 129 PN DEMAK 099100 BRI CABANG DEMAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
35	097819	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	005	03	VA	654440991011000	BPG 163 PN PURWODADI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
36	097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	005	03	VA	654440991021000	BPG 134 PN SALATIGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
37	097830	PENGADILAN NEGERI UNGARAN	005	03	VA	654440991031000	BPG. 134 PN KAB.SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
38	097844	PENGADILAN NEGERI JEPARA	005	03	VA	654440991041000	BPG 129 PENGADILAN NEGERI JEPARA 099104	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W12-U19/1522/KU.01/8/2021 31 AUGUST 2021	TNP	Rp -
39	097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	005	03	VA	654440991051000	BPG 163PN BLORA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
40	097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	005	03	VA	654440991061000	BPG 097 PN REMBANG BADILUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
41	097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	005	03	VA	654440991071000	BPG 072 PN BATANG 099107	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
42	097886	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	005	03	VA	654440991081000	BPG 027 PN KAB PURWOREJO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
43	097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	005	03	VA	654440991101000	BPG 115 PN MAGELANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
44	097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	005	03	VA	654440991111000	BPG 027 PN KEBUMEN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
45	097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	005	03	VA	654440991121000	BPG 115 PN TEMANGGUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
46	097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	005	03	VA	654440991141000	BPG 164 PN WONOSOBO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
47	097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	005	03	VA	654440991151000	BPG 028 PN SURAKARTA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
48	097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	005	03	VA	654440991161000	BPG 162 PENGADILAN NEGERI SRAGEN BADILUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
49	097954	PENGADILAN NEGERI WONOGIRI	005	03	VA	654440991171000	BPG 028 PENGADILAN NEGERI WONOGIRI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000084/028 3 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
50	097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	005	03	VA	654440991181000	BPG 028 PN SUKOHARJO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000112 30 JUNE 2021	TNP	Rp -
51	097975	PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR	005	03	VA	654440991191000	BPG 162 PN KRA BADILUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/ WPB.12/ KP.06/ 2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
52	097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	005	03	VA	654440991211000	BPG 148 PN BOYOLALI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
53	097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	005	03	VA	654440991221000	BPG 148 PN KLATEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
54	098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	005	03	VA	654440991231000	BPG 029 PN PURWOKERTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
55	098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	005	03	VA	654440991241000	BPG 130 PN CILACAP 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
56	098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	005	03	VA	654440991251000	BPG 029 PN BANYUMAS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.1186.E-INS/ISS/04/2021 26 APRIL 2021	TNP	Rp -
57	098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	005	03	VA	654440991261000	BPG 029 PN PURBALINGGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S- 820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
58	098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	005	03	VA	654440991271000	BPG 164 PN BANJARNEGARA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPG.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
59	098057	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	005	03	VA	654440991281000	BPG 030 PN YOGYAKARTA QQ 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
60	098061	PENGADILAN NEGERI WATES	005	03	VA	654440991291000	BPG 176 PN WATES	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
61	098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	005	03	VA	654440991301000	BPG 149 PN WONOSARI QQ 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
62	098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	005	03	VA	654440991311000	BPG 030 PN SLEMAN QQ 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
63	098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	005	03	VA	654440991321000	BPG 135 PT SBY 099132	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
64	098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	005	03	VA	654440991331000	BPG 135 PN SURABAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
65	098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	005	03	VA	654440991351000	BPG 073 PN BOJONEGORO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
66	098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	005	03	VA	9896640991361000	BPG 166 PN TUBAN 03	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-281/WPB.12/KP.06/2022 21 JANUARY 2022	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
67	098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	005	03	VA	654440991371000	BPG 073 PN LAMONGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
68	098150	PENGADILAN NEGERI GRESIK	005	03	VA	654440991381000	BPG 135 PENGADILAN NEGERI GRESIK 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
69	098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	005	03	VA	810012099139100	BPG 165 PENGADILAN NEGERI SDA 098167	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1579/WPB.12/KP.06/2021 3 AUGUST 2021	TNP	Rp -
70	098171	PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	005	03	VA	654450991401000	BPG 098 PN MOJOKERTO 099140	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021/098 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
71	098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	005	03	VA	654450991421000	BPG 098 PN JOMBANG 099142	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
72	098192	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO	005	03	VA	654440991431000	BPG 035 PN BONDOWOSO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000647 1 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
73	098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	005	03	VA	654450991441000	BPG 131 PN JEMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
74	098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	005	03	VA	654440991451000	BPG 100 PN BANYUWANGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
75	098221	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	005	03	VA	654450991461000	BPG 035 PN SITUBONDO 099146	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000642/035 14 JUNE 2021	TNP	Rp -
76	098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	005	03	VA	654440991471000	BPG 034 PN KEDIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	-
77	098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	005	03	GIRO	005601002062304	BPG 034 PENGADILAN NEGERI NGANJUK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1640/WPB.16/KP.0804/208 27 DECEMBER 2018	TNP	Rp -
78	098256	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	005	03	VA	654440991491000	BPG 150 PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
79	098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	005	03	VA	654440991501000	BPG 034 PN TRENGGALEK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.02/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
80	098277	PENGADILAN NEGERI BLITAR	005	03	VA	654440991511000	BPG 150 PENGADILAN NEGERI BLITAR QQ 099151	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
81	098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	005	03	VA	654440991521000	BPG 032 PN MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
82	098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	005	03	VA	654440991531000	BPG 032 PN PAS (099153)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
83	098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	005	03	VA	654440991541000	BPG. 035 PERADILAN UMUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000664/035 23 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
84	098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	005	03	VA	654440991561000	BPG 131 PN LUMAJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
85	098324	PENGADILAN NEGERI BANGIL	005	03	VA	654440991571000	BPG 032 PENGADILAN NEGERI BANGIL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
86	098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	005	03	VA	8100120991581000	BPG 035 PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	000648 1 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
87	098345	PENGADILAN NEGERI MADIUN	005	03	VA	654440991591000	BPG 033 PENGADILAN NEGERI MADIUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
88	098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	005	03	VA	654440991601000	BPG 033 PN PONOROGO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
89	098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	005	03	VA	654440991611000	BPG 099 PN PACITAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
90	098370	PENGADILAN NEGERI NGAWI	005	03	VA	654440991631000	BPG 033 PN NGAWI DIPA 0503	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
91	098387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	005	03	VA	654440991641000	BPG 033 PN MAGETAN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
92	098391	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	005	03	VA	654440991651000	BPG 036 PN PAMEKASAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
93	098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	005	03	VA	654440991661000	BPG 036 KANTOR PN SUMENEP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
94	098413	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	005	03	GIRO	601000503309	BPG 036 KANTOR PN BANGKALAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-666/WPB.16/KP.05.093/2015 27 APRIL 2015	TNP	Rp -
95	098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	005	03	VA	654440991681000	BPG036PN1SAMPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
96	098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	005	03	VA	8101250991691000	BPG 001 PENGADILAN TINGGI BNA 169	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
97	098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	005	03	VA	8100770991701000	BPG 001 PN BANDA ACEH 099170	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021/001 12 JULY 2021	TNP	Rp -
98	098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	005	03	VA	8101250991711000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI SABANG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
99	098476	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	005	03	VA	8101250991731000	BPG 089 PN BIREUEN 099173	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
100	098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	005	03	VA	8101250991741000	BPG 089 PN LHOKSUKON 099174	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
101	098497	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE	005	03	VA	8101250991751000	BPG 089 PENGADILAN NEGERI LSW	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
102	098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	005	03	VA	8101250991771000	BPG 122 PENGADILAN NEGERI TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JUNE 2021	TNP	Rp -
103	098523	PENGADILAN NEGERI IDI	005	03	VA	8101250991791000	BPG 002 PN IDI 099179	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
104	098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	005	03	GIRO	1057281304	BPG 002 PN KUALASIMPANG 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-305/WPB.01/KP.04/2021 29 JULY 2021	TNP	Rp -
105	098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	005	03	VA	8101250991821000	BPG 105 PN BKJ 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
106	098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	005	03	VA	8101250991831000	BPG 105 PN KUTACANE 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
107	098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	005	03	GIRO	1056198195	BPG 105 PN KUTACANE 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-166/WPB.01/KP.06/2021 9 JULY 2021	TNP	Rp -
108	098565	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	005	03	GIRO	1055563396	BPG 003 PN MEULABOH 3	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-493/WPB.01/KP.03/2020 13 JULY 2020	TNP	Rp -
109	098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	005	03	VA	8101250991851000	BPG 003 PN CALANG 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	NOMOR : S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
110	098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	005	03	VA	8101250991861000	BPG 003 PN SINABANG 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1019/WPB.12/KP.6/2021 9 JUNE 2021	TNP	Rp -
111	098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	005	03	VA	8101250991871000	BPG 074 PN TAPAKTUAN 099187	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
112	098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	005	03	VA	8101250991881000	BPG 074 PENGADILAN NEGERI SINGKIL 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
113	098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	005	03	VA	65440991891000	BPG 123 PENGADILAN TINGGI MEDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
114	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	005	03	GIRO	005301002708306	BPG 123 PN MEDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-882/WPB.02/KP.123/2015 29 JUNE 2015	TNP	Rp -
115	098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	005	03	VA	654440991911000	BPG 123 PN KLAS I-B BINJAI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
116	098640	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI	005	03	VA	654450991921000	BPG 076 PN TANJUNG BALAI 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000043/076 1 JULY 2021	TNP	Rp -
117	098654	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG	005	03	VA	654440991931000	BPG 119 PN SIDIKALANG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
118	098661	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	005	03	VA	654450991941000	BPG 119 PN KABANJAHE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
119	098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	005	03	VA	654440991951000	BPG 075 RANTAUPRAPAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
120	098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	005	03	VA	654450991961000	BPG 124 PN TEBING TINGGI BADILUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
121	098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	005	03	VA	654450991981000	BPG 007 PN GUNUNGSITOLI QQ 099198	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
122	098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	005	03	VA	654440991991000	BPG 005 PN PEMATANG SIANTAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
123	098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	005	03	VA	654440992001000	BPG 125 PN TARUTUNG 099200	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
124	098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	005	03	VA	654440992011000	BPG 006 PN PADANGSIDIMPUAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
125	098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	005	03	VA	654440992031000	BPG 106 PN SIBOLGA BADAN PERADILAN UMUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
126	098743	PENGADILAN TINGGI PADANG	005	03	VA	654440992041000	BPG 010 PT DIPA BADILUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
127	098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	005	03	VA	654440992051000	BPG 010 PN PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
128	098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	005	03	VA	654440992071000	BPG 011 PN BATUSANGKAR 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
129	098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	005	03	VA	654440992081000	BPG 090 PN SOLOK BADILUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
130	098792	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	005	03	VA	654440992091000	BPG 010 PN PARIAMAN 099209	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
131	098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	005	03	VA	654440992101000	BPG 142 PN PAINAN DIPA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153.WPB.12/KP.06/201 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
132	098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	005	03	VA	654440992111000	BPG 011 PN BUKITTINGGI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-347/WPB.03/KP.0330/2015 25 MARCH 2015	TNP	Rp -
133	098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	005	03	VA	654440992121000	BPG 091 PN LUBUK SIKAPING 099212	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
134	098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	005	03	VA	654440992131000	BPG 011 PN PAYAKUMBUH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
135	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	005	03	VA	654440992141000	BPG 008 PN PEKANBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001475/008 16 JULY 2021	TNP	Rp -
136	098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	005	03	VA	654440992151000	BPG 120 PN BENGKALIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
137	098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	005	03	VA	654440992171000	BPG 092 PN TEMBILAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
138	098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	005	03	VA	654440992181000	BPG 009 PN TANJUNGPINANG ES03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
139	098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	005	03	VA	654440992201000	BPG 012 PENGADILAN NEGERI JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
140	098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	005	03	VA	654450992211000	BPG078 PN NEGERI MA BUNGO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
141	098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	005	03	VA	654440992221000	BPG 143 PN KLT 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
142	098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	005	03	VA	654440992241000	BPG (013) PN SPN (099224)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
143	098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	005	03	VA	654450992251000	BPG 014 PT PALEMBANG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
144	098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	005	03	VA	654450992271000	BPG 014 PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG 02	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
145	098963	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	005	03	VA	654440992281000	BPG 109 PENGADILAN NEGERI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
146	098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU	005	03	VA	654450992291000	BPG 070 PN LUBUKLINGGAU 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
147	098991	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	005	03	VA	654440992321000	BPG 144 PN MUARA ENIM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
148	099003	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	005	03	VA	654440992331000	BPG 160 PN SEKAYU 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
149	099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	005	03	VA	654440992341000	BPG 015 PN PANGKALPINANG-03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
150	099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	005	03	VA	654440992361000	BPG 017 PN TANJUNGKARANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
151	099045	PENGADILAN NEGERI METRO	005	03	VA	654440992371000	BPG 126 PN METRO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
152	099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	005	03	VA	654440992391000	BPG 042 PN PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
153	099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	005	03	VA	654440992401000	BPG 093 PN SINGKAWANG 099240	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
154	099087	PENGADILAN NEGERI SINTANG	005	03	VA	654440992411000	BPG 079 PENGADILAN NEGERI SINTANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
155	099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	005	03	VA	654440992421000	BPG 094 PN KETAPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
156	099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	005	03	VA	654440992431000	BPG 042 PN MEMPAWAH 099243	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
157	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	005	03	VA	654440992451000	BPG 167 PN SANGGAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
158	099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	005	03	VA	654440992461000	BPG 043 PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021/043 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
159	099134	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	005	03	VA	654440992471000	BPG 102 PN PANGKALAN BUN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
160	099141	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH	005	03	VA	654440992481000	BPG 080 PN MUARA TEWEH PERADILAN UMUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021/080 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
161	099155	PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS	005	03	VA	654440992491000	BPG 043 PN KUALA KAPUAS 099249	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
162	099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	005	03	VA	654440992521000	BPG 044 PN SAMPIT 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 22 APRIL 2021	TNP	Rp -
163	099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	005	03	VA	654440992531000	BPG 045 PT BJM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
164	099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	005	03	VA	654440992541000	BPG 045 PN BANJARMASIN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
165	099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	005	03	VA	654440992551000	BPG 110 PN KANDANGAN QQ 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000171 14 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
166	099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	005	03	VA	654440992561000	BPG 081 PN KOTABARU 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
167	099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	005	03	VA	654440992571000	BPG 110 PN BARABAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
168	099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	005	03	VA	654440992581000	BPG 045 PN MARTAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
169	099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	005	03	VA	654440992591000	BPG 151 PN TANJUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
170	099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	005	03	VA	654440992601000	BPG 151 PN AMUNTAI KAB HSU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
171	099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	005	03	VA	654440992661000	BPG 110 PN BADILUM RANTAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
172	099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	005	03	VA	8100120992731000	BPG 048 PN TARAKAN 03	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1391/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
173	099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	005	03	VA	654440992871000	BPG 046 PN SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
174	099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	005	03	VA	654440992911000	BPG 046 PN TENGGARONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
175	099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	005	03	VA	654440993091000	BPG 047 KANTOR PN BALIKPAPAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
176	099312	PENGADILAN TINGGI MANADO	005	03	VA	654440993131000	BPG 049 PT MANADO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
177	099329	PENGADILAN NEGERI MANADO	005	03	VA	654440993301000	BPG 049 PN MANADO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
178	099333	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	005	03	VA	654440993341000	BPG 158 PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
179	099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	005	03	VA	654440993411000	BPG 083 PN TAHUNA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
180	099354	PENGADILAN NEGERI TONDANO	005	03	VA	654440993551000	BPG 049 PN TONDANO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
181	099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	005	03	VA	654440993621000	BPG 050 PN GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
182	099375	PENGADILAN NEGERI PALU	005	03	VA	654440993761000	BPG 051 PN PALU 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
183	099382	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	005	03	VA	8100120993831000	BPG 082 PN TOLITOLI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1579/WPB.12/KP.06/2021 3 AUGUST 2015	TNP	Rp -
184	099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	005	03	VA	654440993971000	BPG 053 PN LUWUK 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
185	099401	PENGADILAN NEGERI POSO	005	03	VA	654440994021000	BPG052PNPOSO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000111/052 14 JULY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
186	099418	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	005	03	VA	654440994191000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG (099419)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-3115/WPB.25 /KP.02/2021 16 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
187	099422	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	005	03	VA	654440994231000	BPG 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099423)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-3388/WPB.25/ KP.02/2021 12 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
188	099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	005	03	VA	654440994401000	BPG 136 PN SUNGGUMINASA 099440	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-4220/WPB.25/KP.02/2021 8 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
189	099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	005	03	VA	654440994441000	BPG 136 PN PANGKAJENE (099444)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-752/WPB.24/PB.0230/2011 18 MARCH 2011	TNP	Rp -
190	099450	PENGADILAN NEGERI BARRU	005	03	VA	654440994511000	BPG 057 PN BARRU (03)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000096 27 MAY 2021	TNP	Rp -
191	099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	005	03	VA	654440994651000	BPG 136 PN TAKALAR 099465 TAKALAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2345/WPB.25/KP.02/2021 9 JULY 2021	TNP	Rp -
192	099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	005	03	VA	654440994721000	BPG 136 PN MAROS 099472	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S - 761/PB./2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
193	099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	005	03	VA	654440994861000	BPG 056 PN JENEPONTO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
194	099492	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	005	03	VA	654440994931000	BPG 057 PN PAREPARE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000105 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
195	099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	005	03	VA	654440995081000	BPG 057 PN ENREKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-39/DJU.I/KU.01/I/2021 18 JANUARY 2021	TNP	Rp -
196	099511	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	005	03	VA	654450995121000	BPG 057 PENGADILAN NEGERI SIDRAP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
197	099528	PENGADILAN NEGERI PINRANG	005	03	VA	654440995291000	BPG 057 PN PINRANG (03)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000073 26 APRIL 2021	TNP	Rp -
198	099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	005	03	VA	654440995331000	BPG 055 PN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
199	099549	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	005	03	VA	654440995501000	BPG 055 PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
200	099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	005	03	VA	654440995541000	BPG 055 PENGADILAN NEGERI SENGKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
201	099560	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	005	03	VA	654440995611000	BPG 056 PN BANTAENG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
202	099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	005	03	VA	654440995751000	BPG 177 PN SINJAI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 28 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
203	099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	005	03	VA	654440995821000	BPG 056 PN BULUKUMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
204	099595	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	005	03	VA	654440995961000	BPG:155 PN SELAYAR (099596)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1493/WPB.12/KP.06/2020 8 JUNE 2020	TNP	Rp -
205	099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	005	03	VA	654440996011000	BPG 058 PN PALOPO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
206	099621	PENGADILAN NEGERI MAJENE	005	03	VA	654440996221000	BPG 059 099622 MJN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
207	099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	005	03	VA	654440996391000	BPG 178 PN MAMUJU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
208	099642	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	005	03	VA	654450996431000	BPG 059 099643 PN PLW	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
209	099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	005	03	VA	654440996601000	BPG 060 PN KENDARI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/1/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
210	099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	005	03	VA	654440996641000	BPG 103 PN BAUBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
211	099670	PENGADILAN NEGERI RAHA	005	03	VA	654440996711000	BPG 157 PENGADILAN NEGERI RAHA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
212	099684	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	005	03	GIRO	21601000836303	BPG 156 PENGADILAN NEGERI KOLAKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-194/WPB.27/KP.0430/2015 9 MARCH 2015	TNP	Rp -
213	099691	PENGADILAN TINGGI AMBON	005	03	VA	654440996921000	BPG 061 PT AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020/ 061 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
214	099706	PENGADILAN NEGERI AMBON	005	03	VA	654440997071000	BPG (061) PN AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-718/WPB.31/KP.061.3/2015 11 MAY 2015	TNP	Rp -
215	099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	005	03	VA	654440997111000	BPG 173 PENGADILAN NEGERI MASOHI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
216	099727	PENGADILAN NEGERI TUAL	005	03	VA	654450997281000	BPG 084 PN TUAL 099728	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
217	099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	005	03	VA	654440997321000	BPG 062 PN TERNATE 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B. 74/KC-XII/OPS/04/2021 28 APRIL 2021	TNP	Rp -
218	099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	005	03	VA	654440997491000	BPG 112 PN TOBELO QQ DJBPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
219	099752	PENGADILAN NEGERI LABUHA	005	03	VA	654440997531000	BPG 062 PENGADILAN NEGERI LABUHA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-252/WPB.30/KP.0130/2015 5 FEBRUARY 2015	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
220	099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	005	03	VA	654450997701000	BPG 062 PN SOASIO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
221	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	005	03	VA	654450997741000	BPG 037 PT DENPASAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
222	099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	005	03	VA	654440997811000	BPG 037 PN DENPASAR 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
223	099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	005	03	VA	654440997951000	BPG132PENGADILANNEGERISINGARAJA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
224	099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	005	03	VA	654450998031000	BPG 132 PN NEGARA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
225	099816	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	005	03	VA	654440998171000	BPG PN SEMARAPURA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 18 JUNE 2020	TNP	Rp -
226	099820	PENGADILAN NEGERI TABANAN	005	03	VA	654440998211000	BPG 037 PN TABANAN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001712/037 3 MAY 2021	TNP	Rp -
227	099837	PENGADILAN NEGERI AMLAPURA	005	03	VA	654440998381000	BPG 154 PN AMLAPURA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.0/6/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
228	099841	PENGADILAN NEGERI GIANYAR	005	03	VA	654440998421000	BPG 037 PN GIANYAR 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
229	099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	005	03	VA	654450998591000	BPG 154 PN BANGLI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
230	099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	005	03	VA	65440998631000	BPG 038 PN MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
231	099879	PENGADILAN NEGERI BIMA	005	03	VA	654440998801000	BPG 071 PN RABA BIMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
232	099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	005	03	VA	654440998841000	BPG 101 PN SUMBAWA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
233	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	005	03	VA	654440998911000	BPG 169 PN SELONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
234	099905	PENGADILAN NEGERI DOMPU	005	03	VA	654440999061000	BPG 071 PN DOMPU 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
235	099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	005	03	VA	654440999131000	BPG 038 PN PRAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
236	099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	005	03	VA	9896640999271000	BPG 039 PN KUPANG-99927	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-931/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
237	099930	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	005	03	VA	654440999311000	BPG 172 PN 03 ATAMBUA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
238	099947	PENGADILAN NEGERI SOE	005	03	VA	654440999481000	BPG 039 PN SOE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
239	099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	005	03	VA	654440999521000	BPG 172 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
240	099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	005	03	VA	9896640999691000	BPG 041 PENGADILAN NEGERI WAINGAPU/03	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
241	099972	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	005	03	VA	9896640999731000	BPG 041 PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK 03	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1193/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
242	099989	PENGADILAN NEGERI ENDE	005	03	VA	654440999901000	BPG 040 PN END.03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
243	099993	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	005	03	VA	654440999941000	BPG 040 PN MAUMERE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
244	108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	005	03	VA	654441090631000	BPG 123 PN STABAT 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
245	108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	005	03	VA	9896641090641000	BPG 137 PN BATAM 109064	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
246	400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	005	03	VA	9896644000081000	BPG 174 PENGADILAN NEGERI LARANTUKA03	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
247	400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	005	03	VA	654444000141000	BPG 111 PENGADILAN NEGERI RUTENG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
248	400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	005	03	VA	654444000231000	BPG 063 PT JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	Non TNP	Rp -
249	400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	005	03	VA	654444000391000	BPG 063 PN JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
250	400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	005	03	VA	654444000451000	BPG 113 PN WAMENA 400045	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	00123 6 SEPTEMBER 2022	Non TNP	Rp 3.733.000
251	400050	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	005	03	VA	654444000511000	BPG 068 PN MERAUKE QQ 400051	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
252	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	005	03	VA	654444000701000	BPG 065 PN MANOKWARI 400070	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
253	400075	PENGADILAN NEGERI SORONG	005	03	VA	654444000761000	BPG 066 PN 3	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
254	400090	PENGADILAN NEGERI BIAK	005	03	VA	654444000911000	BPG:064 PN BIAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
255	400101	PENGADILAN NEGERI NABIRE	005	03	VA	654444001021000	BPG 085 PN NABIRE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
256	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	005	03	VA	654444001111000	BPG 016 PN BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
257	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	005	03	VA	654444001271000	BPG 146 PN CURUP 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
258	400132	PENGADILAN NEGERI MANNA	005	03	VA	654454001331000	BPG 121 PN MANNA DJBPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
259	400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	005	03	VA	654444001421000	BPG 008 PN BANGKINANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
260	400157	PENGADILAN NEGERI BAJAWA	005	03	VA	654444001581000	BPG 111 PN BAJAWA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-207/WPB.23/KP.0530/2015 12 FEBRUARY 2015	TNP	Rp -
261	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	005	03	VA	654444001641000	BPG 039 BENDAHARA PN KALABAHI 400164	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
262	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	005	03	VA	654444001731000	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
263	400188	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG	005	03	VA	654454001891000	BPG 011 PN PADANG PANJANG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
264	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	005	03	VA	654444001951000	BPG 117 PN PUTUSSIBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
265	400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO	005	03	VA	654444002091000	BPG 050 PN LIMBOTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
266	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	005	03	VA	654444002151000	BPG175 PENGADILAN NEGERI JAKSEL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
267	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	005	03	VA	654444002211000	BPG175 PN JAKUT 400221	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-0921/WPB.12/KP.175/2015 22 FEBRUARY 2015	TNP	Rp -
268	400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	005	03	GIRO	654444002401000	BPG 016 PN ARGA MAKMUR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 26 JUNE 2021	TNP	Rp -
269	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	005	03	VA	9896644002461000	BPG 039 PT KUPANG (400246)	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
270	400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	005	03	VA	654444002521000	BPG 042 PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
271	400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	005	03	VA	654444002611000	BPG 045 PN MARABAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
272	400276	PENGADILAN NEGERI SERUI	005	03	VA	8100124002771000	BPG 138 PENGADILAN NEGERI SERUI	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1579/WPB.12/KP.06/2021 3 AUGUST 2021	TNP	Rp -
273	400282	PENGADILAN NEGERI PELAIHARI	005	03	VA	654444002831000	BPG 168 PN PELAIHARI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
274	400291	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	005	03	VA	654444002921000	BPG 153 PN TANJUNG REDEB 292	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	MENTERI KEUANGAN S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 NOVEMBER 2020	TNP	Rp -
275	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	005	03	VA	654444003031000	BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
276	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	005	03	VA	654444003121000	BPG 159 PN BANGKO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
277	400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	005	03	VA	654444003281000	BPG 120 PN DUMAI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
278	400333	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	005	03	VA	654444003341000	BPG 011 PN LUBUK BASUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021/011 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
279	400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	005	03	VA	9896644003431000	BPG 030 PT YOGYAKARTA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-931/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
280	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	005	03	VA	654444003591000	BPG 043 PT PALANGKARAYA 400359	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
281	400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	005	03	VA	654444003711000	BPG 005 PN SIMALUNGUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
282	400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	005	03	GIRO	26601000696300	BPG 124 PN LUBUK PAKAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S2131/MPB.02/KP.124/2014 3 DECEMBER 2014	TNP	Rp -
283	400409	PENGADILAN NEGERI CIBADAK	005	03	VA	654444004101000	BPG 128 PN CIBADAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.6/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
284	400415	PENGADILAN NEGERI JANTHO	005	03	VA	8101254004161000	BPG 001 PENGADILAN NEGERI JANTHO	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -
285	400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	005	03	VA	654454004221000	BPG 011 PN TANJUNG PATI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
286	400430	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	005	03	VA	654444004311000	BPG 012 PN MUARA BULIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
287	400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	005	03	VA	654444004471000	BPG : 090 : PN KOTO BARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
288	400452	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	005	03	VA	654444004531000	BPG 017 PN KALIADA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	KPPN S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16-10-2020 16 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
289	400461	PENGADILAN NEGERI MUARO	005	03	VA	654444004621000	BPG 077 PN MUARO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
290	400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	005	03	VA	654454004781000	BPG 024 PN SUMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2-21 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
291	400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	005	03	VA	654444004841000	BPG 095 PN BALE BANDUNG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
292	400492	PENGADILAN TINGGI RIAU	005	03	VA	654444004931000	BPG 008 PT PEKANBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001537/008 27 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
293	400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	005	03	VA	654444005041000	BPG012 PT JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
294	400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	005	03	VA	654444005131000	BPG 016 PT BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
295	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	005	03	VA	654444005291000	BPG 046 PT SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
296	400534	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH	005	03	VA	654444005351000	BPG 051 PT PALU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
297	400540	PENGADILAN TINGGI KENDARI	005	03	VA	654444005411000	BPG 060 PT KENDARI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-0416/WPB.27/KP.060/2015 30 MARCH 2015	TNP	Rp -
298	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	005	03	VA	654444005601000	BPG 038 PENGADILAN TINGGI MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
299	400565	PENGADILAN NEGERI SLAWI	005	03	VA	654444005661000	BPG 118 PN SLAWI-400566	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
300	400571	PENGADILAN NEGERI MUNGKID	005	03	VA	654444005721000	BPG 115 PN KAB MAGELANG DI MUNGKID	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
301	400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	005	03	VA	654444005811000	BPG 034 PN KAB. KEDIRI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021/034 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
302	400596	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	005	03	VA	654444005971000	BPG 033 PN KABMADIUN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2020	TNP	Rp -
303	400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	005	03	VA	654444006011000	BPG 107 PN TANJUNG PANDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
304	401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	005	03	VA	8101254020121000	BPG 003 PN SUKA MAKMUE 402012	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1253/WPB.12/KP.06/2021 8 JULY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
305	401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	005	03	VA	654444020131000	BPG 124 PN SEI RAMPAH 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
306	401906	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN	005	03	VA	654454020141000	BPG 006 PN SBH 402014	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
307	401907	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	005	03	VA	654444020151000	BPG 077 PN PULAU PUNJUNG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
308	401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	005	03	VA	654454020161000	BPG 092 PN TELUK KUANTAN 16	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
309	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	005	03	VA	654444020171000	BPG 160 PN PANGKALAN BALAI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
310	401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	005	03	VA	654454020181000	BPG 181 PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO 402018	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
311	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	005	03	VA	654444020191000	BPG 017 PN GEDONG TATAAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
312	401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	005	03	VA	654444020201000	BPG 015 PN KOBA 402020	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
313	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	005	03	VA	654444020211000	BPG 015 PN MENTOK 402021	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
314	401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	005	03	VA	654444020221000	BPG 025 PN BANJAR 402022	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
315	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	005	03	VA	654444020231000	BPG 171 PN CIKARANG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021/171 27 MAY 2021	TNP	Rp -
316	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	005	03	VA	654444020241000	BPG 043 PN KUALA KURUN 402024	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
317	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	005	03	VA	654444020251000	BPG 102 PN NANGA BULIK 402025	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
318	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	005	03	VA	654444020261000	BPG 043 PN PULANG PISAU 402026	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
319	401921	PENGADILAN NEGERI PARINGIN	005	03	VA	654444020271000	BPG 151 PN PARINGIN03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-119/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
320	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	005	03	VA	654444020281000	BPG 047 PN PENAJAM DIPA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
321	401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	005	03	VA	654444020311000	BPG 179 PN MELONGUANE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
322	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	005	03	VA	654444020331000	BPG 103 PN WANGI-WANGI 402033	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/ KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
323	401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	005	03	VA	654444020341000	BPG 058 PN BELOPA 402034	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
324	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	005	03	VA	654444020371000	BPG 084 PN DOBO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
325	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	005	03	VA	654444020381000	BPG 061 PN NAMLEA (03)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
326	401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	005	03	VA	654444020391000	BPG 067 PN KAIMANA 402039	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
327	401970	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	005	03	VA	654444034311000	BPG 173 PN DATARAN HUNIPOPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
328	401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	005	03	VA	654444034331000	BPG 173 PN DATARAN HUNMOA 403433	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1335/ WPB.32/ KP.0402/ 2018 31 DECEMBER 2018	TNP	Rp -
329	401972	PENGADILAN NEGERI SANANA	005	03	VA	654444034341000	BPG 062 PN SANANA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
330	401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	005	03	VA	654444034351000	BPG 062 PN BOBONG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
331	417704	PENGADILAN NEGERI MALINAU	005	03	VA	654444177051000	BPG 185 PN MLN 03 417705	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
332	417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	005	03	VA	654444177231000	BPG 185 PN TJ SELOR 03 417723	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.112/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
333	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	005	03	VA	654444178451000	BPG 161 PENGADILAN NEGERI PDG 417845	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
334	477202	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	005	03	VA	654444772031000	BPG051 PNDONGGALA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
335	477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA	005	03	VA	654454772191000	BPG 180 PN TILAMUTA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
336	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	005	03	VA	654444772251000	BPG 060 PN UNAAHA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
337	477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	005	03	GIRO	9896644772311000	BPG 174 PENGADILAN NEGERI LEMBATA 03	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1193/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
338	477249	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	005	03	VA	654444772501000	BPG. 039 PN ROTE NDAO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	375/DJU.1/KU.01/4/2021 29 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
339	477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	005	03	VA	654444772561000	BPG 008 PN PELALAWAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001491/008 16 AUGUST 2021	TNP	Rp -
340	477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	005	03	VA	654444772621000	BPG 120 PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
341	477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	005	03	VA	654444772711000	BPG 152 PN NUNUKAN 477271	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
342	477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	005	03	VA	654444772931000	BPG 023 PN DEPOK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1125/WPB.12/KP.06/2021 21 JUNE 2021	TNP	Rp -
343	477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	005	03	VA	654444773071000	BPG 017 PN KOTA AGUNG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
344	477343	PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA	005	03	VA	654454773441000	BPG 008 PN SIAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
345	477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	005	03	VA	654444773531000	BPG 091 PN PASBAR (477353)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
346	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	005	03	VA	654444773691000	BPG078 PN TEBO 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
347	477374	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	005	03	VA	654444773751000	BPG 159 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
348	477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	005	03	VA	654444773811000	BPG 046 PN KUTAI BARAT 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
349	477399	PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL	005	03	VA	654444774011000	BPG 006 PN MANDAILING NATAL 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
350	477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	005	03	VA	654444774021000	BPG 143 PN TJT 477400	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
351	613519	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	005	03	VA	654446135201000	BPG 023 PENGADILAN NEGERI CIBINONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
352	614883	PENGADILAN NEGERI LIWA	005	03	VA	654446148841000	BPG 145 PN LIWA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
353	614890	PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	005	03	GIRO	56101000346307	BPG 141 PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-139/WPN.30/KP.141/2015 13 MARCH 2015	TNP	Rp -
354	626156	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN	005	03	VA	654446261571000	BPG 032 PN KAB MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
355	653458	PENGADILAN NEGERI BANJARBARU	005	03	VA	654446534591000	BPG 045PN BANJARBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
356	662972	PENGADILAN NEGERI BONTANG	005	03	VA	654456629731000	BPG 046 PN BONTANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
357	662986	PENGADILAN NEGERI SANGATTA	005	03	VA	654446629871000	BPG 046 PN SANGATTA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021/046 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
358	663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	005	03	VA	654446630061000	BPG 137 PN TBK 663006	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-986/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
359	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	005	03	VA	654446630131000	BPG 012 PN SENGETI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
360	663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	005	03	GIRO	60501000146305	BPG 116 PENGADILAN NEGERI MENGGALA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-418 /WPB.08/KP.0330/2015 30 APRIL 2015	TNP	Rp -
361	663030	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	005	03	VA	654446630311000	BPG 126 PN GUNUNG SUGIH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
362	663047	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	005	03	VA	654446630481000	BPG 126PN SUKADANA 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
363	663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	005	03	VA	654446630521000	BPG 116 PN BLAMBANGANUMPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
364	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	005	03	VA	654446633991000	BPG 020 PT BANTEN 663399	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
365	663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	005	03	VA	654456634041000	BPG 015 PT BABEL 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
366	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	005	03	VA	654446645231000	BPG 062 PT MALUT 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
367	664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	005	03	VA	654446645401000	BPG 050 PT GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
368	670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	005	03	VA	654446701851000	BPG.180.PN MARISA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
369	670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	005	03	VA	654456701921000	BPG 080 PN TAMIANG LAYANG PERADILAN UMUM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
370	670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	005	03	VA	654446900191000	BPG 081 PN BATULICIN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -
371	670210	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	005	03	VA	654446702111000	BPG 179 PN AIRMADIDI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S -1197 / WPB.12 /KP.06/ 2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
372	670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	005	03	VA	654446702281000	BPG 093 PN SAMBAS 670228	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
373	670231	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	005	03	VA	654446702321000	BPG 093 PN BENGKAYANG 670232	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
374	670248	PENGADILAN NEGERI BUOL	005	03	VA	654446702491000	BPG:082 PN BUOL 670249	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
375	672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	005	03	GIRO	31401000604308	BPG 125 PN BALIGE 672911	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-0317/WPB.02/KP.125/2015 10 MARCH 2015	TNP	Rp -
376	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	005	03	VA	654446729281000	BPG 058 PN MASAMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
377	672931	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	005	03	VA	654446729321000	BPG 104 PN SAUMLAKI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
378	672948	PENGADILAN NEGERI RANAI	005	03	VA	654446729491000	BPG 009 PENGADILAN NEGERI RANAI ES03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-820/PB.3/2021 30 APRIL 2021	TNP	Rp -
379	672952	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	005	03	VA	654446729531000	BPG 014 PN PRABUMULIH 02	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1197/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
380	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	005	03	VA	654446794261000	BPG 044 PN KASONGAN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-896/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
381	672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	005	03	VA	654446729811000	BPG 051 PENGADILAN NEGERI PARIGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-761/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
382	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	005	03	VA	654446729951000	BPG 121 PN BINTUHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
383	673009	PENGADILAN NEGERI TAIS	005	03	VA	654446730101000	BPG 121 PN TAIS DJBPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
384	673013	PENGADILAN NEGERI MALILI	005	03	VA	654446730141000	BPG 058 PN MALILI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
385	673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	005	03	VA	654446730211000	BPG 111 PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021/111 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
386	673034	PENGADILAN NEGERI AMURANG	005	03	VA	654446730351000	BPG 049 PN AMURANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
387	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	005	03	VA	654446730421000	BPG 146 PN KEPAHIANG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153.WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
388	673055	PENGADILAN NEGERI TUBEI	005	03	VA	654446730561000	BPG 146 PN TUBEI 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
389	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	005	03	VA	8101256899691000	BPG 122 PENGADILAN NEGERI STR	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1309/WPB.12/KP.06/2021 12 JULY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
390	681418	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	005	03	VA	654442401661000	BPG 039 PENGADILAN NEGERI OELAMASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-153/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
391	681422	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	005	03	VA	9896646899801000	BPG 178 PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1193/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
392	681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	005	03	GIRO	654440938841000	BPG 060 PN ANDOOLO 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
393	681443	PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	005	03	VA	9896646814441000	BPG103 PENGADILAN NEGERI PASARWAJO	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-159/WPB.12/KP.06/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
394	681450	PENGADILAN NEGERI NGABANG	005	03	VA	654446899941000	BPG: 167 PN NGABANG 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-930/WPB.12/KP.06/2021 27 MAY 2021	TNP	Rp -

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2022

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
1	307101	PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	005	04	VA	651543090481000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA MARABAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
2	307115	PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	005	04	VA	651543090491000	BPG 168 PENGADILAN AGAMA PELAIHARI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
3	307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	005	04	VA	651543090501000	BPG 081 PA KOTABARU 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
4	307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	005	04	VA	651543090521000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA TENGGARONG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
5	307178	PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	005	04	VA	651543090531000	BPG046 PENGADILAN AGAMA SAMARINDA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
6	307182	PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT	005	04	VA	651543090541000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
7	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	005	04	VA	651543090551000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
8	307204	PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEP	005	04	VA	651543090561000	BPG 153 KANTOR PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 14 APRIL 2020	TNP	Rp -
9	307232	PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU	005	01/04	VA	651543090591000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-/654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
10	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	005	04	VA	651543090601000	BPG 083 PENGADILAN AGAMA TAHUNA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
11	307250	PENGADILAN AGAMA GORONTALO	005	04	VA	653193090611000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
12	307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	005	04	VA	651543090621000	BPG 051 PA KODYA PALU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
13	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	005	04	VA	653193090631000	BPG 082 PA TOLITOLI QQ 309063	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-384/WPB.26/KP.0430/2015 23 APRIL 2015	TNP	Rp -
14	307292	PENGADILAN AGAMA POSO	005	04	VA	8100123090641000	BPG 052 PA POSO 309064	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1621/WPB.12/KP.06/2020 18 JUNE 2020	TNP	Rp -
15	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	005	04	VA	651543090661000	BPG 053 PENGADILAN AGAMA LUWUK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
16	307424	PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	005	04	VA	653193090671000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR 309067	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
17	307431	PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE	005	04	VA	651543090681000	BPG 136 PA PANGKAJENE (309068)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-3541/WPB.25/KP.02/2021 28 OCTOBER 2021	Non TNP	Rp -
18	307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	005	04	VA	653193090691000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA MAROS 309069	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
19	307452	PENGADILAN AGAMA MAKASSAR	005	04	VA	651543090701000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1384/WPB.25/KP.02/2021 26 APRIL 2021	TNP	Rp -
20	307466	PENGADILAN AGAMA JENEPONTO	005	04	VA	651543090711000	BPG 056 PENGADILAN AGAMA JENEPONTO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
21	307470	PENGADILAN AGAMA TAKALAR	005	04	VA	651543090731000	BPG 136 PENGADILAN AGAMA TAKALAR 309073	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
22	307487	PENGADILAN AGAMA BARRU	005	04	VA	651543090741000	BPG 057PENGADILAN AGAMA BARRU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
23	307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	005	04	VA	651543090751000	BPG 136 PA SUNGGUMINASA 309075	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
24	307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	005	04	VA	651543090761000	BPG 055 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
25	307513	PENGADILAN AGAMA SENGKANG	005	04	VA	651543090771000	BPG 55 PENGADILAN AGAMA SENGKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
26	307520	PENGADILAN AGAMA WATAN SOPPENG	005	04	VA	651543090781000	BPG 055 PA WATANSOPPENG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-146/WPB.24/KP.0830/2015 TANGGAL 03 FEBRUARI 2015 3 FEBRUARY 2015	TNP	Rp -
27	307534	PENGADILAN AGAMA BANTAENG	005	04	VA	651543090791000	BPG 056 PENGADILAN AGAMA BANTAENG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
28	307541	PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA	005	04	VA	651543090801000	BPG 056 PENGDILAN AGAMA BULUKUMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 12 APRIL 2021	TNP	Rp -
29	307555	PENGADILAN AGAMA SINJAI	005	04	VA	651543090811000	BPG 177 PENGADILAN AGAMA SINJAI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
30	307562	PENGADILAN AGAMA SELAYAR	005	04	VA	651543090821000	BPG 155 PENGADILAN AGAMA SELAYAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1392/WPB.12/KP.06/2020 26 MAY 2020	TNP	Rp -
31	307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	005	04	VA	651543090831000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA PAREPARE 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000074 26 APRIL 2021	TNP	Rp -
32	307580	PENGADILAN AGAMA PINRANG	005	04	VA	651543090841000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA PINRANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
33	307597	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	005	04	VA	651543090851000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA ENREKANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
34	307602	PENGADILAN AGAMA SIDENRENG	005	04	VA	651543090871000	BPG 057 PENGADILAN AGAMA SIDRAP QQ 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000104 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
35	307619	PENGADILAN AGAMA PALOPO	005	04	VA	651543090881000	BPG 058 PENGADILAN AGAMA PALOPO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WP.B12/KP.06/2020 16 APRIL 2020	TNP	Rp -
36	307623	PENGADILAN AGAMA MAKALE	005	04	VA	651543090891000	BPG 170 PENGADILAN AGAMA MAKALE 309089	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
37	307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	005	04	VA	651543090911000	BPG 059 309091 PENGADILAN AGAMA PLW	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
38	307644	PENGADILAN AGAMA MAJENE	005	04	VA	651543090921000	BPG 059 309092 PA MJN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
39	307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	005	04	VA	651543090931000	BPG 178 PENGADILAN AGAMA MAMUJU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
40	307690	PENGADILAN AGAMA KOLAKA	005	04	VA	651543090941000	BPG 156 PENGADILAN AGAMA KOLAKA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
41	307708	PENGADILAN AGAMA RAHA	005	04	VA	651543090951000	BPG 157 PENGADILAN AGAMA RAHA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
42	307712	PENGADILAN AGAMA KENDARI	005	04	VA	651543090961000	BPG 060 PA KENDARI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
43	307754	PENGADILAN AGAMA AMBON	005	04	VA	651543090981000	BPG 061 PENGADILAN AGAMA AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
44	307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	005	04	GIRO	28101001083302	BPG 084 04 PENGADILAN AGAMA TUAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-288/WPB.31/KP.0330/2015 4 FEBRUARY 2015	TNP	Rp -
45	307775	PENGADILAN AGAMA MASOHI	005	04	VA	651543091001000	BPG 173 PENGADILAN AGAMA MASOHI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
46	307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	005	04	VA	651543091011000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA TERNATE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
47	307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	005	04	VA	651543091021000	BPG 112 PENGADILAN AGAMA MOROTAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
48	307801	PENGADILAN AGAMA SOA SIO	005	04	VA	651543091031000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA SOASIO 02	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
49	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	005	01/04	VA	651543091041000	BPG 062 PENGADILAN AGAMA LABUHA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-985/WPB.12/KP.06/2021 6 JULY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
50	307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	005	04	VA	651543091051000	BPG 037 PENGADILAN AGAMA DENPASAR 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
51	307839	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	005	04	VA	651543091061000	BPG 132 PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 MAY 2020	TNP	Rp -
52	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	005	04	VA	9893003091071000	BPG 038 PENGADILAN AGAMA MATARAM	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1632/WPB.12/KP.06/2021 19 JUNE 2021	TNP	Rp -
53	307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	005	04	VA	651543091091000	BPG 101 PENGADILAN AGAMA SUMBAWA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
54	307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	005	04	VA	651543091101000	BPG 038 PENGADILAN AGAMA PRAYA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
55	307911	PENGADILAN AGAMA SELONG	005	04	VA	651543091111000	BPG 169 PENGADILAN AGAMA SELONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
56	307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	005	04	VA	651543091131000	BPG 071 PA BIMA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000218/0717/9/2021 9 JULY 2021	TNP	Rp -
57	307949	PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK	005	04	VA	651543091151000	BPG 041 PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
58	307953	PENGADILAN AGAMA KUPANG	005	04	VA	651543091161000	BPG 039 PENGADILAN AGAMA KUPANG (309116)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
59	307960	PENGADILAN AGAMA KALABAHI	005	04	VA	651543091171000	BPG 039 PA KALABAHI 309117	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
60	307974	PENGADILAN AGAMA ENDE	005	04	VA	651543091181000	BPG 040 PENGADILAN AGAMA ENDE 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
61	307981	PENGADILAN AGAMA WAINGAPU	005	04	VA	651543091191000	BPG 041 PA WAINGAPU 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
62	308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	005	04	VA	651543091201000	PENGADILAN AGAMA MANNA DJBPA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB .12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
63	308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	005	04	VA	651543091211000	BPG 146 PENGADILAN AGAMA CURUP 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
64	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	005	04	VA	651543091221000	BPG 016 PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
65	308152	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	005	04	VA	651543091231000	BPG 016 PENGADILAN AGAMA BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
66	308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	005	04	VA	651543091251000	BPG 135 PTA SURABAYA QQ 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
67	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	005	04	VA	651544006171000	BPG.175.PENGADILAN AGAMA JAKPUS (400617)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
68	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	005	04	VA	651544006231000	BPG175PENGADILAN AGAMA JAKUT 400623	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
69	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	005	04	VA	651544006321000	BPG 175 PA JAKBAR (400632)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
70	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	005	04	VA	651544006541000	BPG175PENGADILAN AGAMA JAKSEL 400654	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
71	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	005	04	VA	651544006631000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA BANDUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
72	400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	005	04	VA	651544006791000	BPG 087 PA 400679 SMD	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 MAY 2021	TNP	Rp -
73	400690	PENGADILAN AGAMA CIAMIS	005	04	VA	651544006911000	BPG 025 PA CIAMIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 6 APRIL 2021	TNP	Rp -
74	400710	PENGADILAN AGAMA GARUT	005	04	VA	651544007111000	BPG 096 PA GARUT 400711	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 26 APRIL 2021	TNP	Rp -
75	400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	005	04	VA	651544007301000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA BOGOR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 APRIL 2021	TNP	Rp -
76	400735	PENGADILAN AGAMA SUKABUMI	005	04	VA	651544007361000	BPG 128 PENGADILAN AGAMA SUKABUMI 400736	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	183/PMK.05/2019 5 DECEMBER 2019	TNP	Rp -
77	400741	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	005	04	VA	651544007421000	BPG 128 PA CIANJUR 400742	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
78	400750	PENGADILAN AGAMA CIREBON	005	04	VA	651544007511000	BPG 024 PENGADILAN AGAMA CIREBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
79	400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	005	04	VA	651544007671001	BPG 024 PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	1103/DJA.1/KU.01/04/2021 1 APRIL 2021	TNP	Rp -
80	400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	005	04	VA	651544007731000	BPG 147 PA MAJALENGKA (400773)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
81	400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	005	04	VA	651544007821000	BPG 147 PA KUNINGAN (400782)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
82	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	005	04	VA	651544008181000	BPG :161 PENGADILAN AGAMA RKBT (400818)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
83	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	005	04	VA	651544008241000	BPG 127 PENGADILAN AGAMA TANGERANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
84	400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	005	04	VA	651544008331000	BPG 171 PENGADILAN AGAMA BEKASI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
85	400848	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	005	04	VA	653194008491000	BPG. 086 PENGADILAN AGAMA KARAWANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
86	400860	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	005	04	VA	651544008611000	BPG 072 MANAJEMEN PENGADILAN AGAMA PKL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 MAY 2020	TNP	Rp -
87	400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	005	04	VA	651544008801000	BPG 118 PA PEMALANG04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
88	400885	PENGADILAN AGAMA TEGAL	005	04	VA	651544008861000	BPG 118 PA TEGAL 005.04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	2117/DJA/KU.03/6/2020 12 JUNE 2020	TNP	Rp -
89	400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	005	04	VA	651544008921000	BPG 118 PA BREBES400892	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
90	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	005	04	VA	651544009061000	BPG 072 MANAJEMEN PA BATANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
91	400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	005	04	VA	651544009121000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
92	400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	005	04	VA	651544009211000	BPG 134 PENGADILAN AGAMA SALATIGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
93	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	005	04	VA	651544009371000	BPG 134 KANTOR PENGADILAN AGAMA KENDAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
94	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	005	04	GIRO	7155400937	BPN 134 PA KELAS IA KENDAL	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1515/WPB.14/KP.0204/2018 20 JULY 2018	TNP	Rp -
95	400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	005	04	VA	651544009431000	BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
96	400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	005	04	VA	651544009521000	BPG 163 PA PURWODADI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654WPB.12/KP.06.2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
97	400967	PENGADILAN AGAMA PATI	005	04	VA	651544009681000	BPG 097 PA PATI BADILAG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
98	400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	005	04	VA	653194009741000	BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400974	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
99	400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	005	04	VA	5000804009831000	BPG 129 PA JEPARA 400983	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1986/WPB.12/KP.06/2021 3 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
100	400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	005	04	VA	651544009991000	BPG 097 PA REMBANG BADILAG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
101	401002	PENGADILAN AGAMA BLORA	005	04	VA	651544010031000	BPG 163 PENGADILAN AGAMA BLORA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
102	401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	005	04	VA	651544010191000	BPG 115 MANAJEMEN PA MGL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
103	401024	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	005	04	VA	651544010251000	BPG 115 MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
104	401030	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	005	04	VA	653194010311000	BPG 164 PA WONOSOBO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
105	401049	PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	005	04	VA	651544010501000	BPG 027 PENGADILAN AGAMA KAB PURWOREJO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
106	401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	005	04	VA	651544010561000	BPG 027 PA KEBUMEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2020	TNP	Rp -
107	401070	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	005	04	VA	651544010711000	BPG 029 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
108	401086	PENGADILAN AGAMA CILACAP	005	04	VA	653194010871000	BPG 130 PENGADILAN AGAMA CILACAP 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 26 JUNE 2020	TNP	Rp -
109	401092	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	005	04	VA	651544010931000	BPG 029 MANAJEMEN PERADILAN AGAMA PA PURBALINGGA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
110	401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	005	04	VA	651544011071000	BPG 164 PA BANJARNEGARA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2021 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
111	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	005	04	VA	651544011131000	BPG175PTA JAKARTA 401113	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
112	401121	PENGADILAN AGAMA KLATEN	005	04	VA	651544011221000	BPG 148 PENGADILAN AGAMA KLATEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
113	401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	005	04	VA	651544011381000	BPG 148 PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
114	401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	005	04	VA	651544011441000	BPG 162 PENGADILAN AGAMA SRAGEN BADILAG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
115	401152	PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	005	04	VA	651544011531000	BPG 028 PENGADILAN AGAMA WONOGIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
116	401168	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	005	04	VA	651544011691000	BPG 028 MANAGEMEN PENGADILAN AGAMA SKH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000070/028 27 APRIL 2021	TNP	Rp -
117	401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	005	04	VA	651544011751000	BPG 162 PENG AGAMA KARANGANYAR BADILAG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
118	401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	005	04	VA	651544011811000	BPG 028 MANAJEMEN PA SURAKARTA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
119	401199	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	005	04	VA	651544012011000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA QQ 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
120	401200	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	005	04	VA	651544012021000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA SLEMAN QQ 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
121	401219	PENGADILAN AGAMA WATES	005	04	VA	651544012201000	BPG 176 PENGADILAN AGAMA WATES	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
122	401225	PENGADILAN AGAMA BANTUL	005	04	VA	651544012261000	BPG 030 SATKER PENGADILAN AGAMA BANTUL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
123	401231	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	005	04	VA	651544012321000	BPG 149 PENGADILAN AGAMA WONOSARI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
124	401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	005	04	VA	65319401241100	BPG 135 PENGADILAN AGAMA SURABAYA QQ 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
125	401256	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	005	04	VA	651544012571000	BPG 098 PA MOJOKERTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
126	401262	PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	005	04	VA	651544012631000	BPG 165 PENGADILAN AGAMA SIDOARJO 401263	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
127	401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	005	04	VA	651544012721000	BPG 098 PA JOMBANG 401272	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
128	401287	PENGADILAN AGAMA BAWEAN	005	04	VA	651544012881000	BPG 135 PENGADILAN AGAMA BAWEAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/135 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
129	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	005	04	VA	651544012941000	BPG 135 PENGADILAN AGAMA GRESIK 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
130	401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	005	04	VA	651544013081000	BPG 073 PA BOJONEGORO BPA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
131	401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	005	04	GIRO	4101000395300	BPG 073 PA LAMONGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-279/WPB.16/ KP.07330/2015 25 MARCH 2015	TNP	Rp -
132	401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	005	04	VA	651544013391000	BPG 131 PENGADILAN AGAMA JEMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-315/ WPB.16/ KP.131/ 2015 25 MARCH 2015	TNP	Rp -
133	401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	005	04	VA	651544013451000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO 401345	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
134	401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	005	04	VA	651544013511000	BPG 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 401351	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
135	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	005	04	VA	653194013701000	BPG 100 PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (401370)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	900044 5 AUGUST 2021	TNP	Rp -
136	401375	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	005	04	VA	653194013761000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA KEDIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
137	401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	005	04	VA	651544013821000	BPG 150 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG QQ 401382	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000099/150 29 JULY 2021	TNP	Rp -
138	401390	PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK	005	04	VA	651544013911000	BPG 034 PA TRENGGALEK 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
139	401401	PENGADILAN AGAMA BLITAR	005	04	VA	653194014031000	BPG 150 PENGADILAN AGAMA BLITAR 401403	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654MPB .12LKP.OGL2020 24 JUNE 2021	TNP	Rp -
140	401410	PENGADILAN AGAMA NGANJUK	005	04	VA	651544014111000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA NGANJUK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
141	401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	005	04	VA	651544014271000	BPG 032 PA MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
142	401432	PENGADILAN AGAMA PASURUAN	005	04	VA	651544014331000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA PASURUAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
143	401441	PENGADILAN AGAMA BANGIL	005	04	VA	651544014421000	BPG 032 PENGADILAN AGAMA BANGIL 401442	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	110528/032 19 APRIL 2021	TNP	Rp -
144	401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	005	04	VA	651544014581000	BPG 035 PA PROBOLINGGO (401458)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000636/035 20 MAY 2021	TNP	Rp -
145	401463	PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN	005	04	VA	651544014641000	BPG 035 PA KRAKSAAN (401464	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000640 9 JUNE 2021	TNP	Rp -
146	401472	PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	005	04	VA	651544014731000	BPG 131 PENGADILAN AGAMA LUMAJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/ 2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
147	401488	PENGADILAN AGAMA MADIUN	005	04	VA	651544014891000	BPG. 033 PA KOTA MADIUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
148	401494	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	005	04	VA	651544014951000	BPG 033 PA MAGETAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000175/033 3 AUGUST 2021	TNP	Rp -
149	401514	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	005	04	VA	651544015151000	BPG 033 PA PONOROGO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
150	401520	PENGADILAN AGAMA PACITAN	005	04	VA	651544015211000	BPG 099 PENGADILAN AGAMA PACITAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
151	401539	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	005	04	VA	651544015401000	BPG 036 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
152	401545	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	005	04	VA	651544015461000	BPG 036 PA BANGKALAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
153	401551	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	005	04	VA	651544015521000	BPG 036 PENGADILAN AGAMA SAMPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
154	401560	PENGADILAN AGAMA SUMENEP	005	04	VA	651544015611000	BPG PA 1 SUMENEP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S.965/WPB.16.KP.05.093/2015 26 JUNE 2015	Non TNP	Rp -
155	401576	PENGADILAN AGAMA KANGEAN	005	04	VA	651544015771000	BPG 036 PA KANGEAN SUMENEP	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
156	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	005	04	VA	8100124015831000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-853/WPB.12/KP.06/2021 20 MAY 2021	TNP	Rp -
157	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	005	04	VA	8100124015921000	BPG 001 MAHKMAH SYARIAH BANDA ACEH 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
158	401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	005	04	VA	8100124016031000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH SABANG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
159	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	005	04	VA	8100124016121000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
160	401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	005	04	VA	8100124016281000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH MEUREUDU 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
161	401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	005	04	VA	8100124016341000	BPG 089 MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
162	401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	005	04	VA	8100124016431000	BPG 089 MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSUKON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1195/WPB.01/02.2021/ 4 AUGUST 2021	TNP	Rp -
163	401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	005	04	VA	8100124016591000	BPG 122 MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
164	401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE	005	04	VA	8100124016651000	BPG 089 MAHKAMAH SYARIAH LHOKSEUMAWE	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S- 2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
165	401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	005	04	VA	8100124016711000	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH IDI	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2208/WPB.12/KP.06/2021 22 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
166	401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	005	04	GIRO	1057521615	BPG 002 MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI 401671	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-315/WPB.01/KP.04/2021 3 AUGUST 2021	TNP	Rp -
167	401689	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	005	04	VA	8100124016901000	BPG 002 MS LANGSA 401690	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
168	401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	005	04	VA	8100124016961000	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH KSP DIPA 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
169	401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	005	04	VA	8100124017101000	BPG 105 MAHKAMAH SYARIYAH BLANGKEJEREN 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
170	401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE	005	04	VA	8100124017161000	BPG 105 MAHKAMAH SYARIAH KUTACANE 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-191/WPB.01/KP.06/2021 19 JULY 2021	TNP	Rp -
171	401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE	005	04	GIRO	1053539315	BPN 105 MS KUTACANE	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-198/WPB.01/KP.06/2021 21 JULY 2021	TNP	Rp -
172	401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	005	04	VA	8100124017221000	BPG 003 MAHKAMAH SYARIYAH MEULABOH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
173	401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	005	04	VA	8100124017311000	BPG 003 MAHKAMAH SYARIYAH SINABANG 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
174	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	005	04	VA	8100124017471000	BPG 003 MAHKAMAH SYARIYAH CALANG 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
175	401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	005	04	VA	8100124017531000	BPG 074 MAHKAMAH SYARIYAH SINGKIL 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	000131/074 15 FEBRUARY 2022	TNP	Rp -
176	401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	005	01/04	VA	8100774017521000	BPG 074 MS SINGKIL 401752	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	000129/074 10 FEBRUARY 2022	TNP	Rp -
177	401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	005	04	VA	8100124017621000	BPG 074 MAHKAMAH SYARIYAH TAPAKTUAN 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
178	401777	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	005	04	VA	651544017781000	BPG 123 PT AGAMA MEDAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
179	401783	PENGADILAN AGAMA BINJAI	005	04	VA	651544017841000	BPG 123 PA BINJAI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
180	401792	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	005	04	VA	651544017931000	BPG 119 PA KABANJAHE 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
181	401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	005	04	VA	651544018041000	BPG 123 PA MEDAN KELAS IA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
182	401812	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	005	04	VA	651544018131000	BPG 075 PA RANTAUPRAPAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
183	401828	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	005	04	VA	9893004018291000	BPG 076 PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	000039/076 4 JUNE 2021	TNP	Rp -
184	401840	PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG	005	04	VA	651544018411000	BPG 119 PA SIDIKALANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
185	401859	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	005	04	VA	651544018601000	BPG 005 04 PA P.SIANTAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
186	401868	PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK	005	04	VA	651544019741000	BPG 102 PA NANGA BULIK 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
187	401869	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	005	04	VA	651544019751000	BPG 102 PA SUKAMARA 401975	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
188	401870	PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG	005	04	VA	651544019761000	BPG 044 PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/044 7 APRIL 2021	TNP	Rp -
189	401871	PENGADILAN AGAMA SIBOLGA	005	04	VA	651544018721000	BPG 106 PENGADILAN AGAMA SIBOLGA BADILAG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
190	401873	PENGADILAN AGAMA KASONGAN	005	04	VA	651544019771000	BPG 044 PENGADILAN AGAMA KASONGAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 7 APRIL 2021	TNP	Rp -
191	401874	PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG	005	04	VA	651544019801000	BPG 080 PA T LAYANG PERADILAN AGAMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1026/WPB.18/KP.0204/2018 26 DECEMBER 2018	TNP	Rp -
192	401875	PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU	005	04	VA	651544019811000	BPG 043 PA PULANG PISAU 401981	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
193	401876	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	005	04	VA	651544019821000	BPG 043 PA KUALA KURUN 401982	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
194	401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	005	04	VA	8100124019831000	BPG 047 PENGADILAN AGAMA PENAJAM 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1659/WPB.20/KP.0204/2018 27 DECEMBER 2018	TNP	Rp -
195	401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	005	04	VA	651544019861000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA SENDAWAR 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
196	401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	005	04	VA	651544019871000	BPG 058 PA BELOPA 401987	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
197	401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	005	04	VA	651544018811000	BPG 006 PA PADANGSIDEMPUAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
198	401882	PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	005	04	VA	651544019881000	BPG 178 PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
199	401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	005	04	VA	651544019891000	BPG 058 PENGADILAN AGAMA MALILI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2494/WPB.12/KP.06/2021 12 OCTOBER 2021	TNP	Rp -
200	401884	PENGADILAN AGAMA AMPANA	005	04	VA	8100124019921000	BPG 052 PA AMPNA 401992	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	1621/WPB.12/KP.06/2020 18 JUNE 2020	TNP	Rp -
201	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	005	04	VA	651544019931000	BPG 103 PA WANGIWANGI 401993	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
202	401886	PENGADILAN AGAMA LASUSUA	005	04	VA	651544019941000	BPG 156 PENGADILAN AGAMA LASUSUA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
203	401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	005	04	VA	651544019951000	BPG 060 PENGADILAN AGAMA RUMBIA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
204	401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	005	04	VA	651544019961000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA LOLAK 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1407/WPB.12/KP.06/2020 27 MAY 2020	TNP	Rp -
205	401889	PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI	005	04	VA	651544019971000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 APRIL 2021	TNP	Rp -
206	401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	005	04	GIRO	773401000067309	158 PDT PA BOROKO UNTUK BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-231/WPB.30/KP.1582020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
207	401890	PENGADILAN AGAMA BOROKO	005	04	VA	651544019981000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA BOROKO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 APRIL 2021	TNP	Rp -
208	401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	005	04	VA	651544019991000	BPG 158 PENGADILAN AGAMA TUTUYAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1916/WPB.12/KP.06/2021 30 AUGUST 2021	TNP	Rp -
209	401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	005	04	VA	651544020001000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA SUWAWA 402000	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
210	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG	005	04	VA	651544020011000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA KWANDANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB. 12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
211	401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	005	04	VA	651544020021000	BPG 173 PA DATARAN HUNIPOPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
212	401896	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	005	04	VA	651544018971000	BPG 007 PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI QQ 401897	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
213	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	005	04	VA	651544020061000	BPG 061 PENGADILAN AGAMA NAMLEA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
214	401899	PENGADILAN AGAMA KAIMANA	005	04	VA	651544020071000	BPG 067 PA KAIMANA 402007	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
215	401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	005	04	VA	651544019011000	BPG 010 PTA PADANG 401901	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
216	401916	PENGADILAN AGAMA PARIAMAN	005	04	VA	651544019171000	BPG 010 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN 401917	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
217	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	005	04	VA	651544019231000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA SOLOK 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
218	401931	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	005	04	VA	651544019321000	BPG 077 PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
219	401934	PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN	005	04	VA	651544020401000	BPG 006 PA SBH 402040	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
220	401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	005	04	VA	651544033991000	BPG 124 PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 MAY 2020	TNP	Rp -
221	401937	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	005	04	VA	651544034021000	BPG 008 PA SIAK 403402	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
222	401938	PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN	005	04	VA	8100124034031000	BPG 092PA TELUK KUANTAN03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2162-WPB.12/KP.06/2021/092 7 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
223	401939	PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO	005	04	VA	651544034041000	BPG 181 PENGADILAN AGAMA 403404	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
224	401940	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	005	04	VA	651544034051000	BPG 121 PA BINTUHAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
225	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	005	04	VA	651544034061000	BPG 121 PENGADILAN AGAMA TAIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 APRIL 2021	TNP	Rp -
226	401942	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	005	04	VA	651544034071000	BPG 146 PA KEPAHIANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
227	401943	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	005	04	VA	651544034081000	BPG 160 PA PANGKALAN BALAI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
228	401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA PLG	005	04	VA	8100124034091000	BPG 109 PA MARTAPURA 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
229	401945	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	005	04	VA	651544034101000	BPG 109 PA MUARADUA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
230	401946	PENGADILAN AGAMA PAGARALAM	005	04	VA	653194034111000	BPG 144 PA (04) PAGAR ALAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 11 MAY 2021	TNP	Rp -
231	401947	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	005	04	VA	651544019481000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 BATUSANGKAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
232	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	005	04	VA	651544034121000	BPG 014 PA PRABU KLS II 403412	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
233	401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	005	04	VA	653194034131000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1645/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
234	401951	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	005	04	VA	8100124034141000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2634/ WPB.08/KP.01/2020 20 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
235	401952	PENGADILAN AGAMA MESUJI	005	04	GIRO	060501001076309	BPG 116 PA MESUJI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-88/WPB.08/KP.03/2021 21 JANUARY 2021	TNP	Rp -
236	401953	PENGADILAN AGAMA PADANG	005	04	VA	653194019541000	BPG 010 PENGADILAN AGAMA PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
237	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	005	04	GIRO	219201000563302	BPG 116 PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-011/WBP.08/KP.0304/2019 4 JANUARY 2019	TNP	Rp -
238	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	005	04	VA	651544034181000	BPG 126 PA SUKADANA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
239	401957	PENGADILAN AGAMA SOREANG	005	04	VA	653194034191000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA SOREANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
240	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	005	04	VA	651544034201000	BPG 095 PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 APRIL 2021	TNP	Rp -
241	401960	PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG	005	04	VA	651544034221000	BPG 093 PA SINGKAWANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
242	401961	PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH	005	04	VA	651544034241000	BPG 079 PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH 403424	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB .12/KP.O6/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
243	401962	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	005	04	VA	651544019631000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 PDG PANJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
244	401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	005	04	VA	651544034251000	BPG 042 PA SUNGAI RAYA 403425	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
245	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	005	04	VA	8100124034261000	BPG 074 MS BLANGPIDIE 403426	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	000127/074 3 FEBRUARY 2022	TNP	Rp -
246	401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	005	04	VA	8100124034271000	BPG 003 MS SUKA MAKMUE 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
247	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	005	04	VA	8100124034281000	BPG 074 MS SSALAM 403428	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021/074 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
248	401978	PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	005	04	VA	651544019791000	BPG PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
249	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	005	04	VA	651544019851000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA KOTO BARU BADILAG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	1715/DJA.1/KU.01/5/2021 31 MAY 2021	TNP	Rp -
250	401990	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	005	04	VA	651544019911000	BPG 090 PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 JULY 2021	TNP	Rp -
251	402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	005	04	VA	653194020111000	BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 BUKITTINGGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
252	402029	PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING	005	04	VA	651544020301000	BPG 091 PA LUBUK SIKAPING BPA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
253	402035	PENGADILAN AGAMA TALU	005	04	VA	651544020361000	BPG 091 PA TALU (BPA)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
254	402041	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	005	04	VA	651544020421000	BPG 011 PA 04 MANINJAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
255	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	005	04	VA	651544020511000	BPG 011 PA PAYAKUMBUH 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
256	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	005	04	VA	653194020671000	BPG 011 PA TANJUNG PATI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/011 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
257	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	005	04	VA	9893004020731000	BPG 008 PA PEKANBARU	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1632/WPB.12/KP.06/2020 19 JUNE 2020	TNP	Rp -
258	402081	PENGADILAN AGAMA RENGAT	005	04	VA	651544020821000	BPG 092 PENGADILAN AGAMA RENGAT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.0/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
259	402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	005	04	GIRO	651544020981000	BPG PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
260	402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	005	04	VA	651544021021000	BPG 008 PENGADILAN AGAMA BKN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	1674/SEK.KU.01/9/2020 25 SEPTEMBER 2020	TNP	Rp -
261	402117	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	005	04	VA	651544021181000	BPG 120 PENGADIALAN AGAMA BENGKALIS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
262	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	005	04	VA	651544021241000	008 PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001449/008 22 JUNE 2021	TNP	Rp -
263	402132	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	005	04	VA	651544021331000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
264	402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	005	04	VA	651544021491000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG ES 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
265	402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	005	04	VA	651544021551000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA DBSES04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
266	402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	005	04	VA	651544021611000	BPG 137 PA TBK 402161	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W4-A10/590/KU.05/8/2022 15 AUGUST 2022	TNP	Rp -
267	402179	PENGADILAN AGAMA TAREMPA	005	04	VA	651544021801000	BPG 009 PENGADILAN AGAMA TAREMPAES 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
268	402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	005	04	VA	651544021861000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
269	402191	PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO	005	04	VA	653194021921000	BPG 078 PA MABUNGO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
270	402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	005	04	VA	651544022061000	BPG 143 PA KUALA TUNGKAL 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
271	402211	PENGADILAN AGAMA BANGKO	005	04	VA	651544022121000	BPG 159 PENGADILAN AGAMA BANGKO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
272	402220	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	005	04	VA	653194022211000	BPG (013) PENGADILAN AGAMA SPN (402221)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
273	402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	005	04	VA	651544022371000	BPG 014 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
274	402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	005	04	VA	651544022431000	BPG 014 PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KD 02	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	DIREKTORAT PENGELOAAN KAS NEGARA NO. S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
275	402251	PENGADILAN AGAMA LAHAT	005	04	VA	651544022521000	BPG 144 PENGADILAN AGAMA LAHAT (04)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 16 MAY 2020	TNP	Rp -
276	402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	005	04	VA	8100124022681000	BPG 109 PA_BATURAJA_BPU	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1621WPB.12/KP.06/2020 18 JUNE 2020	TNP	Rp -
277	402273	PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG	005	04	VA	651544022741000	BPG 014 PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG 02	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
278	402282	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	005	04	VA	8100124022831000	BPG 144 PA MUARA ENIM (04)	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1622/WPB.12/KP.06/2020 18 JUNE 2020	TNP	Rp -
279	402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	005	04	VA	651544022991000	BPG 070 PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
280	402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	005	04	VA	651544023031000	BPG 015 PA PANGKALPINANG-04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
281	402318	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	005	04	VA	651544023191000	BPG 107 PA TANJUNG PANDAN (04)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S.665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
282	402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	005	04	VA	651544023251000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
283	402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	005	04	VA	651544023311000	BPG 145 PENGADILAN AGAMA KRUI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
284	402349	PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	005	04	VA	653194023501000	BPG 116 PA KOTABUMI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B-57/BUA.3/KU.03/8/2021 26 AUGUST 2021	TNP	Rp -
285	402355	PENGADILAN AGAMA METRO	005	04	VA	653194023561000	BPG 126 PA METRO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
286	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	005	04	VA	651544023621000	BPG 042 PENGADILAN AGAMA PONTIANAK 402362	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
287	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	005	04	GIRO	1001003336	PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT	S-2779/MK.5/2015 7 APRIL 2015	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
288	402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	005	04	VA	651544023711000	BPG 093 PENGADILAN AGAMA SAMBAS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/093 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
289	402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	005	04	VA	651544023871000	BPG 094 PENGADILAN AGAMA KETAPANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
290	402392	PENGADILAN AGAMA SANGGAU	005	04	VA	651544023931000	BPG 167 PA SANGGAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 MAY 2020	TNP	Rp -
291	402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	005	04	VA	651544024071000	BPG 079 PENGADILAN AGAMA SINTANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	Non TNP	Rp -
292	402412	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	005	04	VA	651544024131000	BPG 117 PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1564/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
293	402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	005	04	VA	651544024221000	BPG 043 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA 402422	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
294	402437	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN	005	04	VA	651544024381000	BPG 102 PA PANGKALAN BUN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
295	402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH	005	04	VA	651544024441000	BPG 080 PA MUARA TEWEH PERADILAN AGAMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/080 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
296	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	005	04	VA	651544024501000	BPG 045 PTA BJM 402450	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
297	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	005	04	VA	651544024531000	BPG 080 PA BUNTOK PERADILAN AGAMA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
298	402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	005	04	VA	651544024691000	BPG 043 PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS 402469	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021/043 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
299	402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	005	04	VA	651544024751000	BPG 044 PENGADILAN AGAMA SAMPIT 402475	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
300	402480	PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	005	04	VA	653194024811000	BPG 046 PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/046 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
301	402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	005	04	VA	651544025011000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA BJM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
302	402519	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	005	04	VA	651544025201000	BPG 045 PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
303	402525	PENGADILAN AGAMA RANTAU	005	04	GIRO	651544025261000	BPG 110 PA 04 RANTAU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
304	402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	005	04	VA	651544025321000	BPG 110 PA BADILAG KANDANGAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
305	402540	PENGADILAN AGAMA BARABAI	005	04	VA	8100124025411000	BPG 110 PA BARABAI (BADILAG)	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1622/WPB.12/KP.06/2020 18 JUNE 2020	TNP	Rp -
306	402556	PENGADILAN AGAMA AMUNTAI	005	04	VA	651544025571000	BPG 151 PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
307	402562	PENGADILAN AGAMA TANJUNG	005	04	VA	651544025631000	BPG 151 PENGADILAN AGAMA TANJUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	NOMOR S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
308	402571	PENGADILAN AGAMA NEGARA	005	04	VA	651544025721000	BPG 110 PA (04) NEGARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
309	402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	005	04	VA	651544025881000	BPG 021 PA SUBANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000037/021 28 APRIL 2021	TNP	Rp -
310	402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	005	04	VA	651544025941000	BPG 134 KANTOR PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
311	402607	MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO	005	04	VA	8100124026081000	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH JANTHO 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
312	402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	005	04	VA	651544026141000	BPG 011 PA LUBUK BASUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
313	402622	PENGADILAN AGAMA DUMAI	005	04	VA	651544026231000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA DUMAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
314	402638	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	005	04	VA	651544026391000	BPG 160 PENGADILAN AGAMA SEKAYU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WBP.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
315	402644	PENGADILAN AGAMA KALIANDA	005	04	VA	653194026451000	BPG 017 PA KALIANDA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
316	402650	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	005	04	VA	651544026511000	BPG 042 PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/042 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
317	402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	005	04	VA	651544026701000	BPG 042 PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
318	402675	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	005	04	VA	651544026761000	BPG 048 PENGADILAN AGAMA TARAKAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
319	402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	005	04	VA	651544026821000	BPG 049 PTA MANADO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
320	402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	005	04	VA	653194026911000	BPG 050 PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
321	402701	PENGADILAN AGAMA TONDANO	005	04	VA	651544027021000	BPG 049 PENGADILAN AGAMA TONDANO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
322	402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	005	04	VA	651544027111000	BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
323	402726	PENGADILAN AGAMA BANGLI	005	04	VA	651544027271000	BPG 154 PENGADILAN AGAMA BANGLI (04)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/ KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
324	402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	005	04	VA	651544027331000	BPG 132 PENGADILAN AGAMA NEGARA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1338/WPB.12/KP.06/2020 18 MAY 2020	TNP	Rp -
325	402741	PENGADILAN AGAMA KARANGASEM	005	04	VA	651544027421000	BPG 154 PA KARANGASEM (04)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
326	402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	005	04	VA	651544027641000	BPG 154 PA KLUNGKUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
327	402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	005	04	VA	651544027731000	BPG 037 PENGADILAN AGAMA GIANYAR 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
328	402794	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	005	04	VA	651544027951000	BPG 174 PENGADILAN AGAMA LARANTUKA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 21 APRIL 2021	TNP	Rp -
329	402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	005	04	VA	653194028091000	BPG 111 PENGADILAN AGAMA RUTENG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WBP.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
330	402814	PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	005	04	VA	9893004028151000	BPG 172 PENGADILAN AGAMA ATAMBUA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-907/WPB.12/KP.06/2021 24 MAY 2021	TNP	Rp -
331	402820	PENGADILAN AGAMA SOE	005	04	VA	651544028211000	BPG 039 PA SOE 402821	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
332	402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	005	04	VA	651544028401000	BPG 172 PA 04KEFAMENANU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	- 4 MAY 2021	TNP	Rp -
333	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	005	04	VA	651544028461000	BPG 111 PENGADILAN AGAMA BAJAWA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
334	402851	PENGADILAN AGAMA MAUMERE	005	04	VA	9893004028521000	BPG RE 04	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1632/WPB.12/KP.06/2020 19 JUNE 2020	TNP	Rp -
335	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	005	04	VA	651544028611000	BPG 063 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
336	402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	005	04	VA	651544028771000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
337	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	005	04	VA	9893004028831000	BPG 066 PENGADILAN AGAMA SORONG (04)	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1318/WPB.12/KP.06/2021 13 JULY 2021	TNP	Rp -
338	402891	PENGADILAN AGAMA BIAK	005	04	VA	651544028921000	BPG 064 PENGADILAN AGAMA BIAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 JULY 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
339	402902	PENGADILAN AGAMA FAK FAK	005	04	VA	651544029031000	BPG 067 PENGADILAN AGAMA FAKFAK 402903 FAKFAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000044/067 7 JULY 2021	TNP	Rp -
340	402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	005	04	VA	651544029121000	BPG 065 PA MANOKWARI 402912	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
341	402927	PENGADILAN AGAMA NABIRE	005	04	VA	651544029281000	BPG 085 PENGADILAN AGAMA NABIRE (04)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
342	402933	PENGADILAN AGAMA WAMENA	005	04	VA	653194029341000	BPG 113 PENGADILAN AGAMA WAMENA 402934	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000104 30 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
343	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	005	04	VA	651544029431000	BPG 138 PENGADILAN AGAMA SERUI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
344	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	005	04	GIRO	30901000587309	BPN 138 PENGADILAN AGAMA SERUI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-249/WPB.133/KP.138/2015 19 MAY 2015	TNP	Rp -
345	402958	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	005	04	GIRO	035201001644305	BPG 068 PENGADILAN AGAMA MERAUKE QQ 402959	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-288/WPB.33/KP.0430/2015 11 MARCH 2015	TNP	Rp -
346	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	005	04	VA	651544029651000	BPG 134 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
347	402970	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	005	04	VA	651544029711000	BPG 008 PTA PEKANBARU 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	NO. 001507/008 1 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
348	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	005	04	VA	651544029901000	BPG 043 PENGADILAN TINGGI AGAMA 402990	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
349	402995	PENGADILAN AGAMA CIBADAK	005	04	VA	651544029961000	BPG 128 PENGADILAN AGAMA CIBADAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
350	403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	005	04	VA	651544030101000	BPG 024 PENGADILAN AGAMA SUMBER	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
351	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	005	04	VA	651544030221000	BPG 115 MANAJEMEN PA MUNGKID	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 20 JUNE 2020	TNP	Rp -
352	403030	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	005	04	VA	651544030311000	BPG:033 PA KAB MADIUN (04)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
353	403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	005	04	VA	653194030471000	BPG 034 PENGADILAN AGAMA KEDIRI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/034 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
354	403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	005	04	VA	651544030531000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
355	403061	PENGADILAN AGAMA KISARAN	005	04	VA	651544030621000	BPG 076 PENGADILAN AGAMA KISARAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
356	403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	005	04	VA	651544030841000	BPG 005 PA SIMALUNGUN KODE SATKER 403084	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
357	403092	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	005	04	VA	653194030931000	BPG 015 PA SUNGAILIAT-04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
358	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	005	04	GIRO	30601000510300	BPG 185 PA TJ SELOR 04 417658	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1997/WPB.20/KP.048/2017 27 DECEMBER 2017	TNP	Rp -
359	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	005	04	VA	651544176581000	BPG 185 PA TJ SELOR 04 417658	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 JULY 2021	TNP	Rp -
360	417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	005	04	VA	651544178511000	BPG 161 PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG PDG 417851	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
361	440712	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	005	04	VA	651544407131000	BPG 020 PTA 440713	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
362	440728	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	005	04	VA	651544407291000	BPG 015 PENGADILAN TINGGI AGAMA BABEL04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
363	440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	005	04	VA	651544407351000	BPG 050 PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
364	440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	005	04	VA	8100124407411000	BPG 062 PTA MALUT 04	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-567/WPB.12/KP.06/2021 9 APRIL 2021	TNP	Rp -
365	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	005	04	VA	651544507381000	BPG 166 PENGADILAN AGAMA TUBAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
366	547657	PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	005	04	VA	651545476581000	BPG 030 PTA YOGYAKARTA QQ 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
367	547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	005	04	VA	651545476621000	BPG 012 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
368	547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	005	04	GIRO	651545476791000	BPG 017 PENGADILAN TINGGI AGAMA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-3124/WPB.08/KP.017/2015 23 JUNE 2015	TNP	Rp -
369	547682	PENGADILAN AGAMA STABAT	005	04	VA	653195476831000	BPG 123 PA STABAT 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2021	TNP	Rp -
370	547699	PENGADILAN AGAMA BATAM	005	04	VA	9893005477001000	BPG 137 PA BATAM 547700	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	000145 29 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
371	576249	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	005	04	VA	8100125762501000	BPG 051 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-1622/WPB.12/KP.06/2020 18 JUNE 2020	TNP	Rp -
372	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	005	04	VA	651545762541000	BPG 060 PTA KENDARI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
373	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	005	04	VA	651545762611000	BPG 039 PTA KUPANG 576261	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
374	576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	005	04	VA	651545762751000	BPG 016 PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
375	604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	005	04	VA	651546047201000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA CIBINONG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
376	604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	005	04	VA	651546047241000	BPG 127 PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	0S-2732/WPB.12/KP.05/202- 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
377	604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	005	04	VA	651546047311000	BPG 032 PA KAB MALANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	110681/032 9 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
378	604744	PENGADILAN AGAMA PANDAN	005	04	VA	651546047451000	BPG 106 PENGADILAN AGAMA PANDAN 2	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
379	604765	PENGADILAN AGAMA DONGGALA	005	04	VA	651546047661000	BPG 051 PENGADILAN AGAMA DONGGALA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
380	604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	005	04	VA	651546047731000	BPG 060 PA UNAAHA (04)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
381	614670	PENGADILAN AGAMA NATUNA	005	04	VA	651546146711000	BPG 009 PA NATUNA_ES04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WBP.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
382	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	005	04	VA	651546146851000	BPG 116 PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 JULY 2021	TNP	Rp -
383	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	005	04	VA	653196146921000	BPG 017 PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
384	614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	005	04	VA	651546147071000	BPG 171 PENGADILAN AGAMA CIKARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
385	614710	PENGADILAN AGAMA KAJEN	005	04	VA	651546147111000	BPG 072 MANAJEMEN PENGADILAN AGAMA KAJEN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
386	614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	005	04	VA	651546147281000	BPG 038 PA GIRI MENANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1186/WPB.12/KP.06/2021 29 JUNE 2021	TNP	Rp -
387	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	005	04	VA	651546147701000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA SENTANI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
388	614773	PENGADILAN AGAMA MIMIKA	005	04	VA	651546147741000	BPG 141 PENGADILAN AGAMA MIMIKA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665-PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
389	614780	PENGADILAN AGAMA PANIAI	005	04	VA	651546147811000	BPG 085 PENGADILAN AGAMA PANIAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
390	631978	PENGADILAN AGAMA TARUTUNG	005	04	VA	651546319801000	BPG 125 PA TARUTUNG 631980	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
391	631982	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	005	04	VA	653196319831000	BPG 006 PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
392	631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	005	04	VA	651546320001000	BPG 008 PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001441 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
393	632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	005	04	VA	8100126320021000	BPG 120 PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (04)	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2683/WPB.12/KP.06/2021 29 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
394	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	005	04	VA	651546320191000	BPG 159 PA SAROLANGUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
395	632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	005	04	VA	651546320231000	BPG 143 PA MUARA SABAK 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
396	632039	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	005	04	VA	653196320401000	PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 16 DECEMBER 2020	TNP	Rp -
397	632043	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	005	04	VA	653196320441000	BPG 045 PA BANJARBARU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
398	632050	PENGADILAN AGAMA MASAMBA	005	04	VA	651546320521000	BPG 058 PENGADILAN AGAMA MASAMBA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
399	632064	PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	005	04	VA	651546320651000	BPG 174 PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
400	652020	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	005	04	VA	651546520211000	BPG078 PA. MUARA TEBO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
401	652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	005	04	VA	651546520351000	BPG 012 PENGADILAN AGAMA SENGETI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-762/PB.3/2021 23 MARCH 2021	TNP	Rp -
402	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	005	04	VA	651546520421000	BPG 126 PA GUNUNG SUGIH	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-989/WPB.12/KP.06/2021 7 JUNE 2021	TNP	Rp -
403	652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	005	04	VA	651546520561000	BPG 116 PA BLAMBANGAN UMPU 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1217/WPB.12/KP.06/2021 2 JULY 2021	TNP	Rp -
404	652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	005	04	VA	651546520631000	BPG 023 PENGADILAN AGAMA DEPOK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
405	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	005	04	VA	651546520771000	BPG 020 PA CILEGON BADILAG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
406	652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	005	04	VA	651546520811000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA BONTANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
407	652097	PENGADILAN AGAMA SANGATTA	005	04	VA	651546520981000	BPG 046 PA SANGATTA 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
408	652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	005	04	VA	651546521031000	BPG: 082 PA BUOL 652103	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000041/082 28 JUNE 2021	TNP	Rp -
409	652119	PENGADILAN AGAMA BUNGKU	005	04	VA	651546521201000	BPG 052 PA BUNGKU 652120	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 7 APRIL 2021	TNP	Rp -
410	652123	PENGADILAN AGAMA BANGGAI	005	04	VA	651546521241000	BPG 053 PA BANGGAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000690/053 9 JULY 2021	TNP	Rp -
411	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	005	04	VA	651546521311000	BPG 180 PA TILAMUTA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	1715/DJA.1/KU.01/5/2021 31 MAY 2021	TNP	Rp -
412	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	005	04	VA	9893006637121000	BENDAHARA PENGELUARAN DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA MARI	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1632/WPB.12/KP.06/2020 19 JUNE 2020	Non TNP	Rp -
413	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	005	04	GIRO	3937412790	BPN 175 DITJEN BADILAG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	001827/175 7 JUNE 2022	Non TNP	Rp -
414	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	005	04	VA	651546900231000	BPG 025 PA KOTA TSM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-709/PB.3/2021 14 APRIL 2021	TNP	Rp -
415	682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	005	04	VA	653196821721000	BPG 049 PENGADILAN AGAMA AMURANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB .12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
416	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	005	04	VA	651546821861000	BPG180 PA MARISA 682186	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/MPB .12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
417	682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	005	04	VA	651546900721000	BPG 051 PENGADILAN AGAMA PARIGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020/051 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
418	682207	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	005	04	VA	651546900861000	BPG060PAANDOOLO04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
419	682211	PENGADILAN AGAMA PASARWAJO	005	04	VA	651546900901000	BPG 103 PA PASARWAJO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP,06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
420	682228	MS SIMPANG TIGA REDELONG	005	04	VA	8100126901081000	BPG 122 MAHKAMAH SYARIAH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2837/WPB.12/KP.06/2021 11 NOVEMBER 2021	TNP	Rp -
421	682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN	005	04	VA	651546901121000	BPG 006 PA KOTA PADANGSIDIMPUAN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
422	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	005	04	VA	651546901291000	BPG 015 PENGADILAN AGAMA MENTOK04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
423	682253	PENGADILAN AGAMA LEBONG	005	04	VA	653196901331000	BPG 146 PENGADILAN AGAMA LEBONG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
424	682260	PENGADILAN AGAMA BATULICIN	005	04	VA	651546901401000	BPG 081 PA BATULICIN 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1654/WPB.12/KP.06/2020 23 JUNE 2020	TNP	Rp -
425	682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	005	04	VA	651546901541000	BPG 101 PENGADILAN AGAMA TALIWANG 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
426	682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	005	04	VA	651546822821000	BPG 111 PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -
427	682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	005	04	VA	651546901751000	BPG152 PA NUNUKAN 690175	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
428	682300	PENGADILAN AGAMA ARSO	005	04	VA	651546901821000	BPG 063 PENGADILAN AGAMA ARSO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-665/PB.3/2021 5 APRIL 2021	TNP	Rp -

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 05 MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA

PERIODE 31 DESEMBER 2022

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022
1	663377	PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON	005	05	VA	651556633781000	BPG (061) PENGADILAN MILITER III-18 AMBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
2	663182	PENGADILAN MILITER I - 01 BANDA ACEH	005	05	VA	903190006631831000	BPG 001 KANTOR PENGADILAN MILITER I 01 BANDA ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2898/WPB.12/KP.06/2020 9 NOVEMBER 2020	TNP	Rp -
3	578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	005	05	VA	8100825788191000	BPG 001 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2077/WPB.12/KP.06/2021 9 SEPTEMBER 2021	TNP	Rp -
4	578822	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU	005	05	VA	8100825788231000	BPG 008 PTUN PEKANBARU 05	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	001574/008 6 DECEMBER 2021	TNP	Rp -
5	663204	PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG	005	05	VA	651556632051000	BPG 010 DILMIL I-03 PADANG 663205	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
6	531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	005	05	VA	652355318451000	BPG 010 PTUN PADANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JUNE 2020	TNP	Rp -
7	578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	005	05	VA	651555788401000	BPG 012 PTUN JAMBI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
8	663211	PENGADILAN MILITER I - 04 PALEMBANG	005	05	VA	651556632121000	BPG 014 DILMIL I-04 PALEMBANG 01	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
9	526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	005	05	VA	651555267511000	BPG 014 PTUN PALEMBANG 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
10	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	005	05	VA	651555788861000	BPG 016 PTUN BENGKULU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
11	559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	005	05	VA	651555598411000	BPG 017 PTUN BANDAR LAMPUNG 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
12	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	005	05	VA	651556902021000	BPG 020 PTUN SRG 690202	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
13	578801	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	005	05	VA	651555788021000	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
14	663321	PENGADILAN MILITER III - 13 MADIUN	005	05	VA	651556633221000	BPG 033 DILMIL III-13 MADIUN (05)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
15	663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DENPASAR	005	05	VA	651556633361000	BPG 037 PENGADILAN MILITER III-14 DI DENPASAR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001644/037 8 APRIL 2021	TNP	Rp -
16	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	005	05	VA	651555598621000	BPG 037 PTUN DENPASAR (05)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	001706 2 MAY 2021	TNP	Rp -
17	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	005	05	VA	651555788721000	BPG 038 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022
18	663342	PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG	005	05	GIRO	3901002450309	BPG 039 PENGADILAN MILITER KUPANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S.1912/WPPB.23/KP.0130/2015 11 AUGUST 2015	TNP	Rp -
19	539121	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG	005	05	VA	652355391221000	BPG 039 PTUN KUPANG 539122	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
20	663225	PENGADILAN MILITER I - 05 PONTIANAK	005	05	VA	6515 5663 2261 000	BPG 042 PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 DECEMBER 2020	TNP	Rp -
21	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	005	05	VA	651555788441000	BPG 043 PTUN PALANGKA RAYA 578844	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1034/WPB.12/KP.06/2021 10 JUNE 2021	TNP	Rp -
22	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 BANJARMASIN	005	01/05	VA	651556632331000	BPG 045 PENGADILAN MILITER I06 BJM	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
23	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	005	05	VA	651555318661000	BPG 045 PTUN BANJARMASIN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
24	559857	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	005	05	VA	651555598581000	BPG 046 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
25	663246	PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN	005	05	VA	651556632471000	BPG 047 PENGADILAN MILITER I07 BALIKPAPAN 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-549/PB.3/2021 26 MARCH 2021	TNP	Rp -
26	663360	PENGADILAN MILITER III - 17 MANADO	005	05	VA	651556633611000	BPG 049 DILMIL III17 MANADO	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
27	531872	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO	005	05	VA	8100125318731000	BPG 049 PTUN MANADO 05	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	S-2731/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
28	401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	005	05	VA	651554034301000	BPG 050 PTUN GTO 403430	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
29	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	005	05	VA	651555788511000	BPG 051 PTUN PALU 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
30	578864	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	005	05	VA	651555788651000	BPG 060PTUN KENDARI 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
31	539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	005	05	VA	651555391181000	BPG 061 PTUN AMBON 2	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1102/WPB.12/KP.06/2021 17 JUNE 2021	TNP	Rp -
32	663381	PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA	005	05	VA	651556633821000	BPG 063 PENGADILAN MILITER III 19 JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
33	539138	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	005	05	VA	651555391391000	BPG 063 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-549/PB.3/2021 26 MARCH 2021	TNP	Rp -
34	663271	PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG	005	05	GIRO	0013251312001	BPG 095 PENGADILAN MILITER BANDUNG	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	S-487/WPK/13/095/2015 3 MARCH 2015	TNP	Rp -
35	531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	005	05	VA	651555318241000	BPG 095 PTUN BANDUNG_(05)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022
36	663199	PENGADILAN MILITER I - 02 MEDAN	005	05	VA	651556632001000	BPG 123 P MILITER I-02 MEDAN 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
37	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I MEDAN	005	05	VA	651556631791000	BPG 123 P. MILITER MEDAN 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
38	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	005	01/05	VA	652355267471000	BPG 123 PTUN MEDAN 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
39	663288	PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG	005	05	VA	651556632891000	BPG 134 KANTOR PENGADILAN MILITER II10 SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	KPPN S-2732/ WPB.12/ KP.06/ 2020 16 OCTOBER 2020	TNP	Rp -
40	531830	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG	005	05	VA	651555318311000	BPG 134 PTUN SEMARANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
41	663314	PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA	005	05	VA	651556633151000	BPG 135 DILMIL III-12 SBY	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
42	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA	005	05	VA	651556633011000	BPG 135 PM TINGGI III SBY	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
43	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	005	05	VA	651555489411000	BPG 135 PT TUN SBY 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
44	663356	PENGADILAN MILITER III - 16 MAKASSAR	005	05	VA	9891906633571000	BPG 136 PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR 663357	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1830/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
45	526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	005	05	VA	651555267121000	BPG 136 PENGADILAN TINGGI TUN UJUNGPANDANG (526712)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1110/WPB.25/KP.02/2021 1 APRIL 2021	TNP	Rp -
46	689309	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	005	05	VA	8100826901971000	BPG 137 PTUN TANJUNG PINANG 690197	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-2058/KPN.1206/2022 5 OCTOBER 2022	TNP	-
47	526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	005	05	VA	651555267681000	BPG 165 PTUN SURABAYA QQ 526768	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -
48	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 YOGYAKARTA	005	05	VA	651556632931000	BPG DILMIL II11 YOGYAKARTA 05	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 18 JULY 2020	TNP	Rp -
49	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR	005	05	VA	651555267721000	BPG136 PENGADILAN TAT USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	000140/136 17 JULY 2021	TNP	Rp -
50	526704	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	005	05	VA	651555267051000	BPG175 PENGADILAN TINGGI TUN (526705))	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1194/WPB.12/KP.0430/2012 29 FEBRUARY 2012	TNP	Rp -
51	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA	005	05	VA	651556632511000	BPG175.PMT II JAKARTA (663251)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1034/WPB.12/KP.06/2021 10 JUNE 2021	TNP	Rp -
52	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	005	05	VA	651556631221000	BPG175DITJEN BADILMIL TUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-0917/WPB.12/KP.175/2015 10 MARCH 2015	TNP	Rp -
53	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA	005	05	VA	651556632681000	BPG175PENGADILAN MILITER II08 663268	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-549/PB.3/2021 26 MARCH 2021	TNP	Rp -

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022
54	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	005	05	VA	651556631621000	BPG175PENGADILAN MILITER UTAMA 663162	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-549/PB.3/2021 26 MARCH 2021	TNP	Rp -
55	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	005	05	VA	651555267331000	BPG175PENGADILAN TUN 526733	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1829/WPB.12/KP.06/2020 8 JULY 2020	TNP	Rp -

DAFTAR REKENING PADA UNIT ESELON 1 MAHKAMAH AGUNG
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor surat Izin	Status TNP	Saldo 31 Des 2022
1	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	VA	653246631571000	BPG175.BADAN URUSAN ADMINISTRASI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	12.805.000
3	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	329110772	BPP175 BUA BIRO HUKUM DAN HUMAS	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
4	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	329788011	BPP175 BUA BIRO KEPEGAWAIAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
5	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	336108888	BPP175 BUA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
6	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	330791642	BPP175 BUA BIRO KEUANGAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
7	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	333495438	BPP175 BUA BIRO PERENCANAAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
8	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	359861326	BPP175 BUA BIRO PERLENGKAPAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
9	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	329089409	BPP175 BUA BIRO UMUM	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
10	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	005	01	GIRO	329080994	BPP175 BUA PERJADIN PIMPINAN PEMERINTAH	PT BANK SYARIAH INDONESIA	S-1878/WPB.12/KP.175/2015 12 MAY 2015	TNP	0,00
11	004028	KEPANITERAAN MA RI	005	01	VA	651520040281000	KEPANITERAAN	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-1493/WPB.12/KP.06/2020 8 JUNE 2020	TNP	0,00
12	097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	005	03	VA	654440974501000	BPG175DITJEN BADILUM MA	PT. BANK BRI CABANG CUT MUTIAH JAKARTA	S1856/WPB.11/KP.01/2007 1 JANUARY 2021	TNP	0,00
13	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	005	04	VA	9893006637121000	BPG175.DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	PT. BANK BNI CABANG PECENONGAN	0101010101 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
14	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	005	05	VA	651556631221000	BPG175DITJEN BADILMIL TUN	BRI CABANG VETERAN JAKARTA-PUSAT	S-0917/WPB.12/KP.175/2015 10 MARCH 2015	TNP	0,00
15	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	VA	9891426103781000	BPG 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA-RI (9891426103781000)	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015	TNP	0,00
16	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	983873410	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 01	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015	TNP	0,00
17	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	1501300011289	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 01	PT. BANK TABUNGAN NEGARA	S-381/WPB.13/KP.023/2015	TNP	0,00
18	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	983900911	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 02	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015	TNP	0,00
19	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	1501300011297	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 02	PT. BANK TABUNGAN NEGARA	S-381/WPB.13/KP.023/2015	TNP	0,00
20	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	983933084	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 03	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 1975	TNP	0,00
21	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	1501300011530	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 03	PT. BANK TABUNGAN NEGARA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 1976	TNP	0,00
22	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	983909765	BPP 023 BALITBANG DIKLAT KUMDIL 04	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 1977	TNP	0,00
23	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	005	01	GIRO	210270387	BPG 023 BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA	PT. BANK NEGARA INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00
24	663712	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	005	07	VA	650586631361000	BPG 175 BADAN PENGAWAS MA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA	S-381/WPB.13/KP.023/2015 1 JANUARY 2015	TNP	0,00

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DI BAWAHNYA
PERIODE 31 DESEMBER 2022

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IZIN	STATUS TNP	SALDO AKHIR DESEMBER 2022
1	098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	005	03	GIRO	17601001684301	BPN 007 PN GUNUNGSITOLI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	00020 19 NOVEMBER 2021	TNP	Rp 10.000
2	099621	PENGADILAN NEGERI MAJENE	005	03	GIRO	004701001203306	BPN 059 PN MJN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-128/WPB.26/KP.02/2020 19 FEBRUARY 2020	TNP	Rp -
3	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	005	04	GIRO	7155400937	BPN 134 PA KELAS IA KENDAL	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-1515/WPB.14/KP.0204/2018 20 JULY 2018	TNP	Rp -
4	401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUTACANE	005	04	GIRO	1053539315	BPN 105 MS KUTACANE	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-198/WPB.01/KP.06/2021 21 JULY 2021	TNP	Rp -
5	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	005	04	GIRO	30901000587309	BPN 138 PENGADILAN AGAMA SERUI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-249/WPB.133/KP.138/2015 19 MAY 2015	TNP	Rp -
6	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	005	05	GIRO	12201001969302	BPN175.PENGADILANTUN (526733)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-1029/WPB.12/KP.175/2015 16 MARCH 2015	TNP	Rp -
7	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MARI	005	04	GIRO	3937412790	BPN 175 DITJEN BADILAG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	001827/175 7 JUNE 2022	Non TNP	Rp -

MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK PADA MAHKAMAH AGUNG DAN SATUAN KERJA DIBAWAHNYA
TAHUN 2022

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
1	097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	005	03	GIRO	33701001451308	RPL 095 PN BDG UTK BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.1155-VI/KC/OPS/09/2021 9 SEPTEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
2	097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	005	01	VA	653250976241000	BPG 086 PN KARAWANG 097624	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	- 5 FEBRUARY 2023	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
3	097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	005	03	GIRO	10101000659302	BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN NEGERI TEGAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.02 KC-VIII/OPS/01/2022 3 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
4	097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	005	01	GIRO	10101000564303	BPG 118 PN. TEGAL-097734	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.02 KC-VIII/OPS/01/2022 3 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
5	097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	005	03	GIRO	8101000030300	RPL 134 PN SALATIGA UNTUK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W12.U12/197/KU.01.10/06/2022 27 JUNE 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
6	097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	005	03	GIRO	4801000837300	RPL 115 PN MAGELANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.2073-VII/KC/OPS/8/2022 10 AUGUST 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
7	098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	005	01	VA	653240981321000	BPG 166 PENGADILAN NEGERI TUBAN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	002639 14 APRIL 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
8	098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	005	03	VA	654440991361000	BPG 166 PN TUBAN 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	002640 14 APRIL 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
9	098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	005	03	GIRO	1780002776314	RPL 073 PDT PN LAMONGAN UTK UANG PERKARA	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	- 31 AUGUST 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
10	098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	005	03	GIRO	0000026101300000796	RPL 098 PN JOMBANG	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	W14.U19/96/KU.03/01/2022 10 JANUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
11	098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	005	03	GIRO	3301002788300	BPG 034 PENGADILAN NEGERI KEDIRI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W14-U4/ /KU.01/6/2022 3 JUNE 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
12	098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	005	03	GIRO	0022501300000130	RPL 032 PN PASURUAN UTK BIAYA PERKARA	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	W14.U9/2063/KU.05/11/2022 25 NOVEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
13	098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	005	03	GIRO	1054749119	BPG 001 PENGADILAN TINGGI BNA 169	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	NO. / 12 / KCP 28 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
14	098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	005	03	GIRO	1053966768	BPG 001 PENGADILAN NEGERI SABANG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B.22/3/I/KCP SABANG 3 26 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
15	098455	PENGADILAN NEGERI SABANG	005	03	GIRO	1055543972	RPL 001 PDT PN SABANG UTK TITIPAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	02/0112-3/9279 29 SEPTEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
16	098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	005	03	GIRO	1054982174	BPG 001 PENGADILAN NEGERI SIGLI 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/518-3/9053 2 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
17	098476	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	005	03	GIRO	1053469368	BPG 089 PN BIREUEN 099173	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-U3/195/KU.04.2/I/2022 31 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
18	098476	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	005	01	GIRO	1053469597	BPG 089 PN BIREUEN 098476	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-U3/178/KU.04.2/I/2022 26 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
19	098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	005	03	GIRO	1056689369	BPG 089 PN LHOKSUKON 099174	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	02/13-3/ID0019284 25 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
20	098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	005	01	GIRO	1056690006	BPG 089 PN LHOKSUKON 098480	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	02/14-3/ID0019284 25 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
21	098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	005	01	GIRO	1059961418	BPG 122 PENGADILAN NEGERI TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/064-3/9054 18 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
22	098502	PENGADILAN NEGERI TAKENGON	005	03	GIRO	1059961485	BPG 122 PENGADILAN NEGERI TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	NO. 01/483-3/9054 25 APRIL 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
23	098523	PENGADILAN NEGERI IDI	005	03	GIRO	1055720537	BPG 002 PN IDI 099179	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	II/0010-3/9282 11 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
24	098530	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	005	01	GIRO	1057294511	BPG 002 PN KUALASIMPANG 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-U14/395/KU.05/1/2022 20 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
25	098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	005	01	GIRO	1055300816	BPG 105 PN BKJ 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-KCP-I/LYI/10/2022 10 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
26	098544	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	005	03	GIRO	1055300964	BPG 105 PN BKJ 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-KCP-I/LYI/02/2022 21 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
27	098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	005	01	GIRO	1056197377	BPG 105 PN KUTACANE 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-167/WPB.01/KP.06/2021 9 JULY 2021	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
28	098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	005	03	GIRO	1054752128	BPG 003 PN CALANG 03	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1.U7/273/KU.05/II/2022 24 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
29	098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	005	01	GIRO	1054752098	BPG 003 PN CALANG	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1.U7/74/KU.05/I/2022 14 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
30	098572	PENGADILAN NEGERI CALANG	005	03	GIRO	7124120602	RPL 003 PDT PN CALANG UNTUK ECOURT	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1.U7/682/KU.05/V/2022 19 MAY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
31	098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	005	03	GIRO	1054845622	BPG 074 PN TAPAKTUAN 099187	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-191-KC-I/OPS/02/2022 3 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
32	098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	005	01	GIRO	1054844677	BPG 074 PN TAPAKTUAN 098590	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-11-KC-I/OPS/01/2022 5 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
33	098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	005	01	GIRO	1050286335	BPG 074 PENGADILAN NEGERI SINGKIL 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-U11/392/KU.01/III/2022 16 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
34	098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	005	03	GIRO	17601000679303	BPG 007 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI 099198	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.314-II/KC/OPS/01/2022 21 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
35	098792	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	005	03	GIRO	2021202261	RPL 010 PN PARIAMAN UTK	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	PDG/20.10/055 30 MARCH 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
36	099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	005	03	GIRO	003101000249302	BPG 110 PN KANDANGAN QQ 03	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.446.E-KC-RO-BJM/LYI/06/2022 24 JUNE 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
37	099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	005	03	GIRO	003101000513303	BPN 110 PENGADILAN N	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.446.E-KC-RO-BJM/LYI/06/2022 24 JUNE 2022	TNP	REKENING SUDAH TIDAK DIGUNAKAN
38	099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	005	03	GIRO	24901000430302	RPL 151 PN TANJUNG UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.909/KC-X/OPS/09/2022 12 SEPTEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
39	099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	005	03	GIRO	11001300004484	RPL 050 PDT PN GORONTALO UNTUK BIAYA PERKARA	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	W20-U1/3312/KU.03/XII/2022 8 DECEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
40	099375	PENGADILAN NEGERI PALU	005	03	GIRO	2501300005312	RPL 051 PN KLAS IA PALU	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	633/S/PLU/FSU/XII/2022 5 DECEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
41	099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	005	01	GIRO	11101000068300	BPG 055 PENGADILAN NEGERI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W22.U6/WTP/254/KU.01/II/2022 16 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
42	307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	005	04	GIRO	006001001841306	RPL 051 PA PALU UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W19-A1/856/HK.05/IV/2022 11 APRIL 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
43	307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	005	04	GIRO	022401001299305	RPL 136 PENGADILAN AGAMA MAROS	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W20-A.5/97/KU.01/I/2023 4 JANUARY 2023	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
44	307623	PENGADILAN AGAMA MAKALE	005	04	GIRO	341301000115304	BPN 170 PENGADILAN AGAMA MAKALE	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W21-A5/397/KU.01/IV/2021 19 APRIL 2022	TNP	REKENING SUDAH TIDAK DIGUNAKAN
45	307651	PENGADILAN AGAMA MAMUJU	005	04	GIRO	5555665557	RPL 178 PA MAMUJU UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	02/173-3/065 22 FEBRUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
46	307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	005	01	GIRO	28101000052308	BPG 084 PENGADILAN AGAMA TUAL	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	S-288/WBP.31/KP.0330/2015 4 FEBRUARY 2015	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
47	307796	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	005	04	GIRO	111401000112302	BPG 112 PENGADILAN AGAMA MOROTAI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W29-A4/147/KU.05/I/2022 17 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
48	307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	005	04	GIRO	1056874786	RPL 038 PDT PA MATARAM UTK PEKARA	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W22-A1/0069/KU.00/I/2022 7 JANUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
49	308152	PENGADILAN AGAMA BENGKULU	005	04	LAINNYA	011501003997300	RPL 016 PDT PA BKL UTK BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W7-A1/2194/KU.01/12/2022 27 DECEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
50	400044	PENGADILAN NEGERI WAMENA	005	03	GIRO	31101000607304	BPG 113 PENGADILAN NEGERI WAMENA 400045	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.1706/KACE-XVIII/OPS/08/2022 23 AUGUST 2022	Non TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
51	400141	PENGADILAN NEGERI BANGKINANG	005	03	GIRO	1115679620	RPL 008 PDT PN BANGKINANG UTK B PERKARA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	W4.U7/4219/KU.01/11/2022 28 NOVEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
52	400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	005	03	GIRO	0985075952	RPL 120 PDT PN DUMAI UTK BIAYA PERKARA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	W4.U6/4357/HT.02/IX/2022 29 SEPTEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
53	400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	005	03	GIRO	6901300001235	RPL 005 PDT PN SIMALUNGUN UNTUK BIAYA PERKARA	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	433/STR/BFSU/IX/2022 27 SEPTEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
54	400415	PENGADILAN NEGERI JANTHO	005	03	GIRO	1055130589	BPG 001 PENGADILAN NEGERI JANTHO	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1.U18/264KU.03/7/2022 31 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
55	400750	PENGADILAN AGAMA CIREBON	005	04	GIRO	040601000834304	BPN 024 PENGADILA AGAMA CIREBON	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W10-A17/0327/KU.01.1/II/2022 8 FEBRUARY 2022	TNP	REKENING SUDAH TIDAK DIGUNAKAN

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
56	400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	005	01	GIRO	2801000020305	BPG 024 PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	5 AUGUST 2022	Non TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
57	400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	005	04	GIRO	2801000415306	BPG 024 PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	5 AUGUST 2022	Non TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
58	400885	PENGADILAN AGAMA TEGAL	005	04	GIRO	10101001233303	BPG 118 PA TEGAL 005.04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.03 KC-VIII/OPS/01/2022 3 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
59	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	005	04	GIRO	15601000391307	RPL 072 PA BATANG UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	253/KC-VIII/OPS/02/2022 11 FEBRUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
60	401018	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	005	04	GIRO	4801001412307	RPL 115 PA MAGELANG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W11-A35/2040/KU.00.1/X/2022 31 OCTOBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
61	401168	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	005	04	GIRO	051101001192308	RPL 028 PS PA SUKOHARJO UTK BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B-3565KC/VIII/OPS/07/2022 21 JULY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
62	401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	005	04	GIRO	14901000431300	RPL 162 PAKARANGANYAR PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.751.E-KC-VII/OPS/06/2022 10 JUNE 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
63	401240	PENGADILAN AGAMA SURABAYA	005	04	VA	3258991010	RPL 135 PA SURABAYA UTK MENAMPUNG BIAYA PERKARA	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-959/KPN.1602/2022 13 SEPTEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
64	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	005	01	GIRO	1055711336	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	1/234-2/9045 4 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
65	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	005	04	GIRO	7155287785	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH ACEH	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	1/234-2/9045 4 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
66	401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	005	01	GIRO	1056832242	BPG 001 MAHKAMAH SYARIYAH SABANG 02	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-19/3//I/KCP SABANG 3 6 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
67	401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	005	01	GIRO	1057426442	BPG 001 MAHKAMAH SYARIAH MEUREUDU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/333-3/9053 14 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
68	401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	005	04	GIRO	1059137103	BPG 089 MS LHOKSUKON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-A11/290/KU.00/01/2022 21 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
69	401642	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON	005	01	GIRO	1058883588	BPG 089 MS LHOKSUKON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-A11/291/KU.00/01/2022 21 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
70	401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	005	01	GIRO	1059137348	BPG 122 MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/074-3/9054 19 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
71	401658	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	005	04	GIRO	1059137383	BPG 122 MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/073-3/9054 19 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
72	401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE	005	04	GIRO	1053616972	BPG 089 MS LHOKSEUMAWE 401665	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	18 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
73	401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE	005	01	GIRO	8778788724	BPG 089 MS LHOKSEUMSWE 401664	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-A5/ 18 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
74	401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	005	01	GIRO	1057521747	BPG 002 MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-315/WPB.01/KP.04/2021 3 AUGUST 2021	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
75	401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	005	01	GIRO	1057077928	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH KSP	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	02/441-3/9049 18 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
76	401695	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	005	04	GIRO	1057078193	BPG 002 MAHKAMAH SYARIAH KSP DIPA 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	02/440-3/9049 18 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
77	401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	005	04	GIRO	1055045457	BPG 105 MS BLANGKEJEREN 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B.35-KCP-I/LYI/02/2022 21 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
78	401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	005	01	GIRO	1055045538	BPG 105 MS BLANGKEJEREN 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B.34-KCP-I/LYI/02/2022 21 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
79	401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	005	04	GIRO	7142648298	BPG 003 MS SINABANG 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-A19/172/KU.05/01/2023 4 JANUARY 2023	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
80	401730	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG	005	01	GIRO	7142822525	BPG 003 MS SINABANG 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-A19/170/KU.05/1/2023 4 JANUARY 2023	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
81	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	005	01	GIRO	1055928203	BPG 003 MS CALANG 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	NO.01/005-3/9321 14 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
82	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	005	04	GIRO	1055928297	BPG 003 MS CALANG 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	NO.01/005-3/9321 14 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
83	401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	005	01	GIRO	1055857117	BPG 074 MS SINGKIL 401752	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-215-KC-I/OPS/022022 7 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
84	401752	MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL	005	04	GIRO	1056605459	BPG 074 MS SINGKIL 401753	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-18-KCP-SKLBAHARI/OPS/02/2022 8 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
85	401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	005	01	GIRO	1056593687	BPG 074 MS TAPAKTUAN 401761	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-197-KC-I/OPS/02/2022 3 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
86	401761	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAK TUAN	005	04	GIRO	1056595372	BPG 074 MS TAPAKTUAN 401762	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-198-KC-I/OPS/02/2022 3 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
87	401828	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI	005	04	GIRO	015401000978305	RPL 076 PA. TANJUNGBALAI UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W2-A3/1068/KU.01/XI/2022 3 NOVEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
88	401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	005	04	GIRO	0805684688	RPL 058 PDT PENGADILAN AGAMA BELOPA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	W20-A25/1338/KU.05/X/2022 3 OCTOBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
89	401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	005	04	GIRO	218901000631304	BPG 058 PENGADILAN AGAMA MALILI 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.41-KCP/XIII/OPS/02/2022 3 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
90	401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	005	04	GIRO	0793526619	RPL 058 PDT PENGADILAN AGAMA MALILI (401989)	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	W20-A27/1052/KU.05/VIII/2022 8 AUGUST 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
91	401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	005	03	GIRO	1054551777	BPG 074 PN BLANGPIDIE 402008	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-162-KC/OPS/02/2022 21 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
92	401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	005	01	GIRO	1054551618	BPG 074 PN BLANGPIDIE 401902	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	B-101-KC/OPS/02/2022 7 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
93	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	005	01	GIRO	1055618786	BPG 001 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	1233456 4 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
94	401903	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	005	03	GIRO	1059982881	BPG 001 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	1233456 4 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
95	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	005	03	GIRO	111301000516308	RPL 047 PDT PN PENAJAM UTK BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.190.E-KCP-X/OPS/12/2022 7 DECEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
96	401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	005	04	GIRO	066501000905309	BPG 124 PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH 04	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	SURAT KETERANGAN BANK 24 MARCH 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
97	401937	PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA	005	04	GIRO	119001000439304	RPL 008 PDT PA SIAK UNTUK BY PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W4-A17/212/KU.01/01/2022 18 JANUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
98	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	005	04	GIRO	4034060018	RPL 121 PA TAIS	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	02/088-3/8291 9 FEBRUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
99	401944	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA PLG	005	04	GIRO	7932011580	BPG 109 PA MARTAPURA 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W6-A9/154/KU.00.1/I/2022 17 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
100	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	005	01	GIRO	1053538537	BPG 074 MS BLANGPIDIE 401965	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	00000137130 3 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
101	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	005	04	GIRO	1053538645	BPG 074 MS BLANGPIDIE 403426	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	00000147909 3 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
102	401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	005	01	GIRO	1054540066	BPG 003 MS SUKA MAKMUE 01	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/147-3/0019285 6 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
103	401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	005	04	GIRO	1054543782	BPG 003 MS SUKA MAKMUE 04	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/147-3/0019285 6 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
104	401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	005	04	GIRO	1054678734	RPL 003 PDT MS SUKA MAKMUE	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	01/147-3/0019285 6 JANUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
105	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	005	01	GIRO	1055385153	BPG 074 MS SSALAM 401967	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W1-A23/ 244/KU.00/02/2022 21 FEBRUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
106	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	005	04	GIRO	1055384734	BPG 074 MS SSALAM 403428	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	37/OPS/KCP-SBS3/04/2022 12 APRIL 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
107	401971	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA	005	03	GIRO	497301000405306	RPL 173 PDHL PENGADILAN NEGERI DATARAN UNTUK 2UGZN68A	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W27-U8/38/KU.03/01/2023 20 JANUARY 2023	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
108	402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	005	04	GIRO	61801000168302	BPG 137 PA TBK 402161	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W4-A10/590/KU.05/8/2022 15 AUGUST 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
109	402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	005	04	LAINNYA	0821030000	RPL 137 PDTPA TB KARIMUN UTK BIAYA PERKARA	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-119/WPB.05/KP/02/2022 12 JANUARY 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
110	402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	005	04	GIRO	7140224531	RPL 145 PA KRUI UNTUK PENAMPUNGAN DANA TITIPAN	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	W8-A4/566/KU.02/6/2022 20 JUNE 2022	Non TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
111	402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	005	04	GIRO	016301001482306	RPL 044 PA SAMPIT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W16-A3/1650/KU.01/X/2022 26 OCTOBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
112	402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	005	04	GIRO	5616914307	RPL 042 PDT PA MEMPAWAH UTK BIAYA PERKARA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	W14-A3/1161/KU.01/XI/2022 2 NOVEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
113	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	005	04	GIRO	25101000677303	RPL 115 PA KLAS IB MUNGKID (PDT BIAYA PERKARA)	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W11-A30/3515/KU.01/10/2022 3 OCTOBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
114	403061	PENGADILAN AGAMA KISARAN	005	04	LAINNYA	111701300000346	RPL 076 PDT PA KIS UTK BIAYA PERKARA	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	514/STR/BFSU/XI/2022 29 NOVEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
115	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	005	03	GIRO	0384264727	RPL.060 PN UNAAHA	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	W23-U5/631/HK.02/3/2022 29 MARCH 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
116	477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	005	03	GIRO	577401000095300	RPL017 PN KOTA AGUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W9.U10/ 572 /HK.2/IV/2022 5 APRIL 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
117	568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	005	03	GIRO	0000010901300000734	RPL 179 PN BITUNG TITIPAN PRK PDT	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	W19-U5/527/KU/11/2022 1 NOVEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
118	604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	005	01	VA	653246047511000	BPG 179 PA BITUNG	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W18-A5/007/KU.05/1/2023 3 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
119	613519	PENGADILAN NEGERI CIBINONG	005	01	GIRO	013001300002470	RPL 023 PDHL PN CIBINONG UTK 23UQ96QA	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	1758/S/CBN.III/FSU/XII/2022 8 DECEMBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
120	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	005	04	GIRO	60401000380303	BPG 159 PA SAROLANGUN	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.106-IV/KC-OPS/01/2022 18 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
121	652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	005	04	LAINNYA	219101000557307	RPL 116 PDT PA BLAMBANGAN UMPU	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.49-KCP.XIX/OPS/04/2022 19 APRIL 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
122	663005	PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN	005	03	GIRO	61801000166300	BPG 137 PN TBK 663006	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B-996-KC.XVII/OPS/07/2022 28 JULY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
123	663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	005	03	GIRO	1140001858888	RPL 116 PDT PN MENGGALA UTK BIAYA PERKARA	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	W9.U6/1190/HK.02/VI/2022 8 JUNE 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
124	663271	PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG	005	01	GIRO	0001073850001	PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	S-463/WPK/13/095/2015 27 FEBRUARY 2015	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
125	670210	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	005	03	GIRO	1101300006945	RPL 179 PN AIRMADIDI UTK PDT BIAYA PRK	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	W19-U6/822/HK.02/III/2022 29 MARCH 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK

NO.	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT PENUTUPAN	STATUS TNP	PENJELASAN PENUTUPAN REKENING
126	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	005	03	GIRO	064101000680305	RPL 058 PN MASAMBA UTK PDT BIAYA PERKARA	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W22.U25/1134/KU.01/X/2022 4 OCTOBER 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
127	672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	005	01	VA	653246729801000	BPG 051 PENGADILAN NEGERI PARIGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W21-U7/213/KU.01/01/2023 19 JANUARY 2023	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
128	672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	005	03	GIRO	036301000777306	RPL 051 PN PARIGI UTK PDT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	W21-U7/214/KU.01/1/2023 19 JANUARY 2023	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
129	682192	PENGADILAN AGAMA PARIGI	005	04	GIRO	036301000764303	RPL 051 PA PARIGI	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.4986 OPS-KC/04/2022 22 APRIL 2022	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
130	682228	MS SIMPANG TIGA REDELONG	005	01	GIRO	1057509585	BPG 122 MAHKAMAH SYARIYAH STR	PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	S-290/WPB.12/KP.06/2022 24 JANUARY 2022	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT
131	682232	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN	005	04	GIRO	13501002801308	RPL 006 PA KOTA PSP UTK PDT	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.51-II/KC-OPS/01/2023 31 JANUARY 2023	TNP	UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN YANG LEBIH BAIK
132	682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	005	04	GIRO	0320299629	BPN 101 PENGADILAN AGAMA TALIWANG	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	SBW/20/149/2022 27 APRIL 2022	TNP	REKENING SUDAH TIDAK DIGUNAKAN
133	689309	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	005	01	VA	653246893091000	BPG 137 PTUN TANJUNG PINANG 689309	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	B.790-XVII/KC/OPS/01/2023 19-04-2023 6 JANUARY 2023	TNP	MIGRASI REKENING DARI GIRO MENJADI VIRTUAL ACCOUNT



KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TUP, KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN, DAN KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DARI HIBAH

DAFTAR SALDO KAS BENDAHAA PENGELUARAN MAHKAMAH AGUNG S.D. 31 DESEMBER 2022

AKUN: 111611 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor	
						Tanggal Dokumen	NTPN
005.01	0800	400333	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	16.834.000,	Sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 5 Januari 2023	05/01/2023	BF5FD2CNR1833GSE
	0800	401947	Pengadilan Agama Batusangkar	17.192.370,	sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 4 Januari 2023	04/01/2023	0DA896QRA640LSH3
	1300	402669	Pengadilan Agama Mempawah	10,	Sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada Tgl. 18 Januari 2023	18/01/2023	AAB510JSRC3NRJJG
Jumlah Kas Lainnya di Bendehara Pengeluaran 005.01				**34.026.380,00**			
005.04	0800	401979	Pengadilan Agama Sijunjung	145.000,	sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 2 Januari 2023	02/01/2023	AF5D145IQMCPSMUI
	1700	401996	Pengadilan Agama Lolak	3.395.000,	Sudah dilakukan Penyetoran Sisa UP ke Kas Negara	04/01/2023	9DB1A7N8Q0MDRFN4
	0900	402623	Pengadilan Agama Dumai	70.000,	sisa UP TA 2022 yg terlambat disetorkan namun sudah dilakukan penyetoran sisa UP ke kas Negara pada 4 Januari 2023	04/01/2023	2F90B6QRA6413FS1
Jumlah Kas Lainnya di Bendehara Pengeluaran 005.04				**3.610.000,00**			
Jumlah				**37.636.380,00**			

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	: 700230104564622
Tanggal Billing	: 04-01-2023 14:30
Tanggal Kadaluarsa	: 11-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	: 05-JAN-23 08.04.16.437502 AM
Bank/Pos Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Penyetor	: PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Kementerian / Lembaga	: 005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: 01-BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja	: 400333-PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Total Disetor	: 16.834.000 (IDR)
Terbilang	: Enam Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah (IDR)
Status	: TERBAYAR
NTPN	: BF5FD2CNR1833GSE
NTB	: 230105497124
KPPN	: BUKITTINGGI
Keterangan	: SISA PENGEMBALIAN UP TA 2022 DIPA BUA

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815114 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
Jumlah Setoran	: 16.834.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Batu Sangkar 27200

492340752

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 04-01-2023 10:51:39
No.Resi : 27200-10/2023/900177 Petugas : 55004027

Tanggal Buku	: 04-01-2023	NIP	: 932166957081
Kode Cabang Pos	: 026100	NTPN	: 0DA3960RA640L9H3
		STAN	: 957081
Waktu Transaksi	: 04-01-2023 10:51:37		
Kode Billing	: 700230104085027		
Nama Wajib Bayar	: Pengadilan Agama Batusangkar		
KPPN	: 005		
Unit Eselon	: 01		
Kode Satker	: 401947		
Jumlah Setoran	: Rp. 17.192.370	Mata Uang	: IDR

BATUSANGKAR 040123 2

Terbilang : (Tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

PB/IX/2022

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230104085027
Tanggal Billing	:04-01-2023 09:53
Tanggal Kadaluarsa	:11-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:-
Bank/Pos Bayar	:-
Channel Bayar	:-
Nama Penyetor	:Pengadilan Agama Batusangkar
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:01-BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja	:401947-PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
Total Disetor	:17.192.370 (IDR)
Terbilang	: Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah (IDR)
Status	:BELUM TERBAYAR
NTPN	:-
NTB	:-
KPPN	:BUKITTINGGI
Keterangan	:Pengembalian Sisa Uang Persediaan Satker 401947 Pengadilan Agama Batusangkar untuk Tahun Anggaran 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: Pengadilan Agama Batusangkar
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815114 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
Jumlah Setoran	: 17.192.370 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar	: 18/01/2023 08:59:47	NTB	: 230118320826
Tanggal Buku	: 18/01/2023	NTPN	: AAB510JSRC3NRJJG
Kode Cab. Bank	: 1782	STAN	: 669468

Data Setoran:

Kode Billing	: 700230118788720
Nama Wajib Bayar	: Pengadilan Agama Mempawah 402669
Kementerian/Lembaga	: 005
Unit Eselon I	: 01
Satuan Kerja	: 402669
Jumlah Setoran	: Rp. 10.00
Terbilang	: SEPULUH RUPIAH

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

Pengadilan Agama Mempawah 402669 0000 0000 10.00 18012023 18012023
AAB510JSRC3NRJJG 230118320826 669468 139

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	700230118788720
Tanggal Billing	: 18-01-2023 03:42
Tanggal Kadaluarsa	: 25-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Penyetor	: Pengadilan Agama Mempawah 402669
Kementerian / Lembaga	: 005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: 01-BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja	: 402669-PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH
Total Disetor	: 10 (IDR)
Terbilang	: Sepuluh Rupiah (IDR)
Status	: BELUM TERBAYAR
NTPN	: -
NTB	: -
KPPN	: PONTIANAK
Keterangan	: Pengembalian Sisa UP RM Tahun Anggaran 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: Pengadilan Agama Mempawah
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815114 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
Jumlah Setoran	: 10 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230102440914
Tanggal Billing	:02-01-2023 10:33
Tanggal Kadaluarsa	:09-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:02-JAN-23 10.50.00.006178 AM
Bank/Pos Bayar	:BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:Mobile Banking
Nama Penyetor	:BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:04-DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Satuan Kerja	:401979-PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG
Total Disetor	:145.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah (IDR)
Status	:TERBAYAR
NTPN	:AF5D145IQMCPSMUI
NTB	:230102615288
KPPN	:SIJUNJUNG
Keterangan	:Pengembalian Sisa UP 401979 Tahun 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENGELUARAN
Uraian	:	Periode : 012023 s/d 012023
Akun	:	815114 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
Jumlah Setoran	:	145.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230104891108
Tanggal Billing	:04-01-2023 13:19
Tanggal Kadaluarsa	:11-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:04-JAN-23 01.45.46.576918 PM
Bank/Pos Bayar	:BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:Teller
Nama Penyetor	:Idrus, Buhari, S.H.I
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:04-DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Satuan Kerja	:401996-PENGADILAN AGAMA LOLAK
Total Disetor	:3.395.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah (IDR)
Status	:TERBAYAR
NTPN	:9DB1A7N8Q0MDRFN4
NTB	:000000719962
KPPN	:KOTAMOBAGU
Keterangan	:Sisa UP TA 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	:	Bendahara Pengeluaran
Uraian	:	Periode : 012023 s/d 012023
Akun	:	815111 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan
Jumlah Setoran	:	3.395.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	: 700230104530817
Tanggal Billing	: 04-01-2023 18:17
Tanggal Kadaluarsa	: 11-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	: 04-JAN-23 06.20.07.550550 PM
Bank/Pos Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Penyetor	: BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian / Lembaga	: 005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: 04-DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Satuan Kerja	: 402623-PENGADILAN AGAMA DUMAI
Total Disetor	: 70.000 (IDR)
Terbilang	: Tujuh Puluh Ribu Rupiah (IDR)
Status	: TERBAYAR
NTPN	: 2F90B6QRA6413FS1
NTB	: 230104335490
KPPN	: DUMAI
Keterangan	: Setoran Sisa UP TAYL

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815114 - Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
Jumlah Setoran	: 70.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 04/01/2023 18:20:09	NTB	: 230104335490
Tanggal Buku	: 05/01/2023	NTPN	: 2F90B6QRA6413FS1
Kode Cabang Bank	: 8888	STAN	: 868957

Data Setoran:

Kode Billing	: 700230104530817	
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN	
Kementerian/Lembaga	: 005	
Unit Eselon I	: 04	
Satuan Kerja	: 402623	
Jumlah Setoran	: Rp. 70,000.00	Mata Uang : IDR
Terbilang	: TUJUH PULUH RIBU RUPIAH	

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

BENDAHARA PENGELUARAN 000 0000000000 70000.00 05012023 04012023
2F90B6QRA6413FS1 230104335490 868957 139

DAFTAR SALDO KAS BENDAHAA PENGELUARAN TUP
MAHKAMAH AGUNG S.D. 31 DESEMBER 2022

AKUN: 111613 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor	
						Tanggal Dokumen	NTPN
005.01	0200	097514	Pengadilan Negeri Bandung	88.452.000,	sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 06 Januari 2023	06/01/2023	05F88395ARQHCL93
	1700	401888	Pengadilan Agama Lolak	51.265.000,	Sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 04 Januari 2023	04/01/2023	7ED860JSRC39Q8FA
	1700	531872	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	37.214.139,	Adanya permasalahan pada aplikasi sakti pengguna (satker) di akhir tahun 2022 yang menyebabkan penyetoran sisa dana TUP RM ke kas negara dilakukan pada awal bulan Januari 2023	06/01/2023	1C0CF0JSRC3BULF4
	199	663157	Badan Urusan Administrasi	57.202.605,	Sudah dilakukan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada 04 Januari 2023	12/01/2023	782198N3E9VNN1NL
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 005.01				**234.133.744,00**			

496270817

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Bandung Cilaki 40115A

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 06-01-2023 14:06:39
No.Resi : 40115A-13/2023/800295 Petugas : 981438039

Tanggal Buku : 09-01-2023
Kode Cabang Pos : 040000

NIP : 941495992219
NTPN : 05F88395ARGHKL93
STAN : 992219

Waktu Transaksi : 06-01-2023 14:06:37
Kode Billing : 700230106535203
Nama Wajib Bayar: UJANG SUHERMAN
K / L : 005
Unit Eselon : 01
Kode Satker : 097514
Jumlah Setoran : Rp. 88.452.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS
POS INDONESIA
Surat dan Dokumen Resmi
Lacak status: https://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230106535203
Tanggal Billing	:06-01-2023 13:26
Tanggal Kadaluarsa	:13-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:-
Bank/Pos Bayar	:-
Channel Bayar	:-
Nama Penyetor	:UJANG SUHERMAN
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:01-BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja	:097514-PENGADILAN NEGERI BANDUNG
Total Disetor	:88.452.000 (IDR)
Terbilang	: Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah (IDR)
Status	:BELUM TERBAYAR
NTPN	:-
NTB	:-
KPPN	:BANDUNG II
Keterangan	:PENGEMBALIAN TUP UANG MAKAN

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815514 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 88.452.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://haikemenkeu.go.id/.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Billing Perbendaharaan

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA LAINNYA

JENIS PENERIMAAN NEGARA LAINNYA : SEMUA
KODE BA : 005 - MAHKAMAH AGUNG
UNIT ES 1 : 01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI
KODE SATKER : 097514 - PENGADILAN NEGERI BANDUNG
PERIODE TANGGAL BAYAR : 06 JANUARI 2023 .s/d. 06 JANUARI 2023
MATA UANG : IDR

NO	WAJIB BAYAR	KODE BILLING	NTPN	TGL BAYAR	BANK/POS/LPL	KODE LOKASI	PERIODE	KODE AKUN	NOMINAL
1	BENDAHARA PENGELUARAN	700230106535203	05F88395ARQHCL93	06-01-2023	POS INDONESIA	0212	Januari	815514	Rp 88.452.000,00
TOTAL									Rp 88.452.000,00

Dicetak oleh - UJANG SUHERMAN
Tanggal Cetak - 06-01-2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230104064490
Tanggal Billing	:04-01-2023 13:15
Tanggal Kadaluarsa	:11-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:04-JAN-23 01.46.16.271174 PM
Bank/Pos Bayar	:BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:Teller
Nama Penyetor	:Idrus, Buhari, S.H.I
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:04-DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Satuan Kerja	:401996-PENGADILAN AGAMA LOLAK
Total Disetor	:51.265.000 (IDR)
Terbilang	: Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah (IDR)
Status	:TERBAYAR
NTPN	:7ED860JSRC39Q8FA
NTB	:000000736739
KPPN	:KOTAMOBAGU
Keterangan	:Sisa UP TA 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	:	Bendahara Pengeluaran
Uraian	:	Periode : 012023 s/d 012023
Akun	:	815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
Jumlah Setoran	:	51.265.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

Dipindai dengan CamScanner

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Jl. Trans Sulawesi, Lalow - Kecamatan Lolak Telp. (0434) 2608191
Website : www.pa-lolak.go.id E-mail : pa.lolak.sulut@gmail.com
Lolak – 95761

Nomor : W18-A7/ 11 /KU.01/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Kepada Yth,
Kepala KPPN Kotamobagu
Jl. Paloko No.7
Di. –
Kotamobagu

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Lampiran Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara,

Sebagaimana bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto Copy Bukti Penerimaan Negara;
2. Lampiran Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut

Kuasa Pengguna Anggaran

Rachmat Enoch

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI

Unit Eselon I : 005 – 01 Badan Urusan Administrasi
Kode Satker : 401888 (Pengadilan Agama Lolak)

Tanggal Dokumen : 4 Januari 2023
Tanggal Setor : 4 Januari 2023

Semula

NTB	NTPN	PROGRAM	OUTPUT	DANA	BANK	KWN GN	LOKASI	ANGG ARAN	ANTAR ENTITAS	ANTAR SATKER	RP
000000736739	7ED860JSRC39Q8FA	0000	00000	00000000	0000	0	1700	0	815511	401996	51.265.000
									JUMLAH		**51.265.000**

Menjadi

NTB	NTPN	PROGRAM	OUTPUT	DANA	BANK	KWN GN	LOKASI	ANGG ARAN	ANTAR ENTITAS	ANTAR SATKER	RP
000000736739	7ED860JSRC39Q8FA	0000	00000	00000000	0000	0	1700	0	**815514**	**401888**	51.265.000
									JUMLAH		**51.265.000**

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230104064490
Tanggal Billing	:04-01-2023 13:15
Tanggal Kadaluarsa	:11-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:04-JAN-23 01.46.16.271174 PM
Bank/Pos Bayar	:BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:Teller
Nama Penyetor	:Idrus, Buhari, S.H.I
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:04-DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Satuan Kerja	:401996-PENGADILAN AGAMA LOLAK
Total Disetor	:51.265.000 (IDR)
Terbilang	: Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah (IDR)
Status	:TERBAYAR
NTPN	:7ED860JSRC39Q8FA
NTB	:000000736739
KPPN	:KOTAMOBAGU
Keterangan	:Sisa UP TA 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	:	Bendahara Pengeluaran
Uraian	:	Periode : 012023 s/d 012023
Akun	:	815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
Jumlah Setoran	:	51.265.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA PERBAIKAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor : 158/01/2023
Tanggal : 09-JAN-2023
Tahun Anggaran : 2023

KPPN : Kotamobagu
Kode Satker : 401888 PENGADILAN AGAMA LOLAK

No	NTPN No.Penerimaan	Tanggal Buku	Jenis Dokumen	Mata Uang	COA Awal	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Sebelum Koreksi	COA Baru	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Setelah Koreksi
1	7ED860JSRC39Q8FA/1	04-JAN-2023		IDR	401996.158.815511.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	51.265.000,00	401888.158.815514.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	51.265.000,00

Kotamobagu, Sulawesi Utara , 9 Januari 2023

Menyetujui
plh. Kepala Kantor

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMOBAGU
KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI UTARA

AGUNG ANGGA S.
NIP.198011042010121004

Deky Kurniadi
NIP.196809151989121001

Kepala Seksi Bank

Agung Angga Somantri
NIP.198011042010121004

Dicetak oleh : Jan Jack Jolly Rasubala,
Tanggal Cetak : 09-Jan-2023 04:04:27 MALAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA PERBAIKAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor : 158/01/2023
Tanggal : 09-JAN-2023
Tahun Anggaran : 2023

KPPN : Kotamobagu
Kode Satker : 401888 PENGADILAN AGAMA LOLAK

No	NTPN No.Penerimaan	Tanggal Buku	Jenis Dokumen	Mata Uang	COA Awal	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Sebelum Koreksi	COA Baru	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Setelah Koreksi
1	7ED860JSRC39Q8FA/1	04-JAN-2023		IDR	401996.158.815511.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	51.265.000,00	401888.158.815514.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	51.265.000,00

Kotamobagu, Sulawesi Utara , 9 Januari 2023

Menyetujui
Plh. Kepala Kantor

Deky Kurniadi
NIP.196809151989121001

Kepala Seksi Bank

Agung Angga Somantri
NIP.198611042010121004

Dicetak oleh : Jan Jack Jolly Rasubala,
Tanggal Cetak : 09-Jan-2023 04:04:27 MALAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA PERBAIKAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor : 158/01/2023
Tanggal : 09-JAN-2023
Tahun Anggaran : 2023

KPPN : Kotamobagu
Kode Satker : 401888 PENGADILAN AGAMA LOLAK

No	NTPN No.Penerimaan	Tanggal Buku	Jenis Dokumen	Mata Uang	COA Awal	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Sebelum Koreksi	COA Baru	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Setelah Koreksi
1	7ED860JSRC39Q8FA/1	04-JAN-2023		IDR	401996.158.815511.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	51.265.000,00	401888.158.815514.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	51.265.000,00

Menyetujui
Plh. Kepala Kantor

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMOBAGU

AGUNG ANGGA S.
NIP.198611042010121004

Deky Kurniadi
NIP.196809151989121001

Kotamobagu, Sulawesi Utara , 9 Januari 2023

Kepala Seksi Bank

Agung Angga Somantri
NIP.198611042010121004

Dicetak oleh : Jan Jack Jolly Rasubala,
Tanggal Cetak : 09-Jan-2023 04:04:27 MALAM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA PERBAIKAN
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor : 158/01/2023
Tanggal : 09-JAN-2023
Tahun Anggaran : 2023

KPPN : Kotamobagu
Kode Satker : 401888 PENGADILAN AGAMA LOLAK

No	NTPN No.Penerimaan	Tanggal Buku	Jenis Dokumen	Mata Uang	COA Awal	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Sebelum Koreksi	COA Baru	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Setelah Koreksi
1	7ED860JSRC39Q8FA/1	04-JAN-2023		IDR	401996.158.815511.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	51.265.000,00	401888.158.815514.0000000.0000000.0000000000.M9005.0.0000.0.000000.000000	PENGADILAN AGAMA LOLAK.Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	51.265.000,00

Kotamobagu, Sulawesi Utara , 9 Januari 2023

Menyetujui
Plt. Kepala Kantor

Deky Kurniadi
NIP.196809151989121001

Kepala Seksi Bank

Agung Angga Somantri
NIP.198611042010121004

Dicetak oleh : Jan Jack Jolly Rasubala,
Tanggal Cetak : 09-Jan-2023 04:04:27 MALAM

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Jl. Trans Sulawesi, Lalow - Kecamatan Lolak Telp. (0434) 2608191
Website : www.pa-lolak.go.id E-mail : pa.lolak.sulut@gmail.com
Lolak – 95761

Nomor	:	W18-A7/ 11 /KU.01/1/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (Satu) berkas
Perihal	:	Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Kepada Yth,
Kepala KPPN Kotamobagu
Jl. Paloko No.7
Di –
Kotamobagu

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Lampiran Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara;

Sebagaimana bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto Copy Bukti Penerimaan Negara;
2. Lampiran Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.

Kuasa Pengguna Anggaran

Rachmat Enoch

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI

Unit Eselon I : 005 – 01 Badan Urusan Administrasi
Kode Satker : 401888 (Pengadilan Agama Lolak)

Tanggal Dokumen : 4 Januari 2023
Tanggal Setor : 4 Januari 2023

Semula

NTB	NTPN	PROGRAM	OUTPUT	DANA	BANK	KWN GN	LOKASI	ANGGARAN	ANTAR ENTITAS	ANTAR SATKER	RP
[redacted]											
000000736739	7ED860JSRC39Q8FA	0000	00000	00000000	0000	0	1700	0	815511	401996	51.265.000
		JUMLAH							JUMLAH		51.265.000

Menjadi

NTB	NTPN	PROGRAM	OUTPUT	DANA	BANK	KWN GN	LOKASI	ANGGARAN	ANTAR ENTITAS	ANTAR SATKER	RP
[redacted]											
000000736739	7ED860JSRC39Q8FA	0000	00000	00000000	0000	0	1700	0	815514	401888	51.265.000
									JUMLAH		51.265.000

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230104064490
Tanggal Billing	:04-01-2023 13:15
Tanggal Kadaluarsa	:11-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:04-JAN-23 01.46.16.271174 PM
Bank/Pos Bayar	:BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:Teller
Nama Penyetor	:Idrus, Buhari, S.H.I
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:04-DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Satuan Kerja	:401996-PENGADILAN AGAMA LOLAK
Total Disetor	:51.265.000 (IDR)
Terbilang	: Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah (IDR)
Status	:TERBAYAR
NTPN	:7ED860JSRC39Q8FA
NTB	:000000736739
KPPN	:KOTAMOBAGU
Keterangan	:Sisa UP TA 2022

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: Bendahara Pengeluaran
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
Jumlah Setoran	: 51.265.000 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230106306020
Tanggal Billing	:06-01-2023 11:17
Tanggal Kadaluarsa	:13-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:06-JAN-23 12.54.34.307408 PM
Bank/Pos Bayar	:BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:Teller
Nama Penyetor	:Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:01-BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja	:531872-PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
Total Disetor	:37.214.139 (IDR)
Terbilang	: Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah (IDR)
Status	:TERBAYAR
NTPN	:1C0CF0JSRC3BULF4
NTB	:230106875933
KPPN	:MANADO
Keterangan	:Pengembalian Sisa Dana TUP

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: Bendahara Rutin PTUN Manado
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815514 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 37.214.139 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing	:700230106306020
Tanggal Billing	:06-01-2023 11:17
Tanggal Kadaluarsa	:13-01-2023 23:59
Tanggal Bayar	:06-JAN-23 12.54.34.307408 PM
Bank/Pos Bayar	:BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:Teller
Nama Penyetor	:Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Kementerian / Lembaga	:005-MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:01-BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja	:531872-PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
Total Disetor	:37.214.139 (IDR)
Terbilang	: Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah (IDR)
Status	:TERBAYAR
NTPN	:1C0CF0JSRC3BULF4
NTB	:230106875933
KPPN	:MANADO
Keterangan	:Pengembalian Sisa Dana TUP

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar	: Bendahara Rutin PTUN Manado
Uraian	: Periode : 012023 s/d 012023
Akun	: 815514 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 37.214.139 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Keluar

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Bank Syariah Indonesia | Penerimaan Negara Bukan Pajak | Kementerian Keuangan

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 12/01/2023 11:46:31	NTB	: FT23012254VT
Tanggal Buku	: 12/01/2023	NTPN	: 782198N3E9VNN1NL
Kode Cabang Bank	: 018123	STAN	: 613206

Data Setoran:

Kode Billing	: 820230112741109		
Nama Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan		
Kementerian/Lembaga	: 000		
Unit Eselon I	: 01		
Satuan Kerja	: 663157		
Jumlah Setoran	: 57,202,605	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Rupiah		

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP Jakarta Mahkamah Agung

DAFTAR SALDO KAS LAINNYA BENDAHAA PENGELUARAN
MAHKAMAH AGUNG S.D. 31 DESEMBER 2022

AKUN: 111821 Kas Lainnya di Bendehara Pengeluaran

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor	
						Tanggal Dokumen	NTPN
005.01	0500	098821	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	1.511.550,00	Pembayaran Pajak Uang Makan Bulan Desember 2022 yang disetor / dibayarkan pada Bulan Januari 2023	10/01/2023	537EA67NBQHQ6975
	0800	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	1.190.000,00	Pajak belum di setor, telah ditindaklanjuti dengan menyetor pajak trs pada bulan Januari 2023	02/01/2023	721CAP1PJKP5SCNQ
	1000	4022205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	3B6E91PJPKNSUGKQ
	1000	4022205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	F651E7440K67RP10
	1000	4022205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	4C6333IEP98LVM4K
	1000	4022205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	132.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	D9C6A67NBPJRKGKD
	1000	4022205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	35.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	D8F451PJPKNU7H4Q

	1000	4022205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	30.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	D4B8D7440K68TQQ8
	1000	4022205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	521.600,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	02/01/2023	9AF462M19FAAF439
	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	12.805.000,00	kelebihan tukin Badan Litbang Diklat Kumdil TA 2022	12/01/2023	D14B17QLUFD9DG0E
	2900	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	231.000,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	24/01/2023	B016A67N8RPI885L
	2900	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	246.400,00	Pajak yg belum disetor pada bulan desember sudah di setor di bulan januari 2023	24/01/2023	CC8592M19HG1B89T
	0199	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	26.003.962,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja Tahun 2022 pada BUA yang sudah disetorkan ke kas negara pada tahun 2023	21/03/2023	A95E28N3EA5UCVHR
Jumlah Kas Lainnya di Bendehara Pengeluaran 005.01				**43.102.512,00**			
005.05	0100	663122	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	412.880,00	-	-	-
Jumlah Kas Lainnya di Bendehara Pengeluaran 005.05 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA				**412.880,00**			
005.06	0100	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	660.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2022	BA6B31JNFLCHAP51
005.06	0100	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	780.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2022	33C7D7QLUFD85PCE

005.06	0100	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	960.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2022	AC8DC61QUQ8FBPDA
005.06	0100	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	896.633,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2022	85DFB7QLUFD85PEK
005.06	0100	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	11.960.000,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	10/01/2022	4A15A7QLUFD89VAI
005.06	0100	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	2.748.400,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	10/01/2022	2E0B00N9VQQ51V60
005.06	0100	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	8.055.392,00	sisa belanja barang tahun anggaran 2022, sudah disetor ditahun 2023	09/01/2022	6828561QUQ8FFV1D
Jumlah Kas Lainnya di Bendehara Pengeluaran 005.06 BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL				**26.060.425,00**			
Jumlah				**69.575.817,00**			

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.103.702.7-656.000
NAMA	:	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO BA
ALAMAT	:	JL. PB. SUDIRMAN NO. 97 - KAB. SITUBONDO
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	402
MASA PAJAK	:	12-12
TAHUN PAJAK	:	2022
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.1.511.550
TERBILANG	:	Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran Pajak Uang Makan bulan Desember tahun anggaran 2022
NPWP PENYETOR	:	00.103.702.7-656.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8220 6205 157
MASA AKTIF	:	08/02/2023 12:32:45

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar	: 10/01/2023 10:00:43	NTB	: 230110462801
Tanggal Buku	: 10/01/2023	NTPN	: 587EA67N8QHQ6975
Kode Cab. Bank	: 0090	STAN	: 305300

Data Setoran:

Kode Billing	: 027282206205157
NPWP	: 00.103.702.7-656 000
Nama Wajib Pajak	: PENGADILAN NEGERI SITUBONDO BA
Alamat	: JL. PB. SUDIRMAN NO. 97 - KAB. SITUBONDO
Nomor Objek Pajak	:
Akun	: 411121
Jenis Setoran	: 402
Masa Pajak	: 12122022
No Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Setoran	: Rp. 1,511,550.00 Mata Uang : IDR
Terbilang	: SATU JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

00.103702.7.656.000 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO BA 000411121 4021212202200
1511550.00 10012023 10012023 587EA67N8QHQ6975 230110462801 305300 139

0090 0090166 8736 4000011 10012023 100043
CASH IDR 1,511,550.00 Dr
032901003434307 REK PERSEPSI IDR 1,511,550.00 Cr
NTPN : 587EA67N8QHQ6975

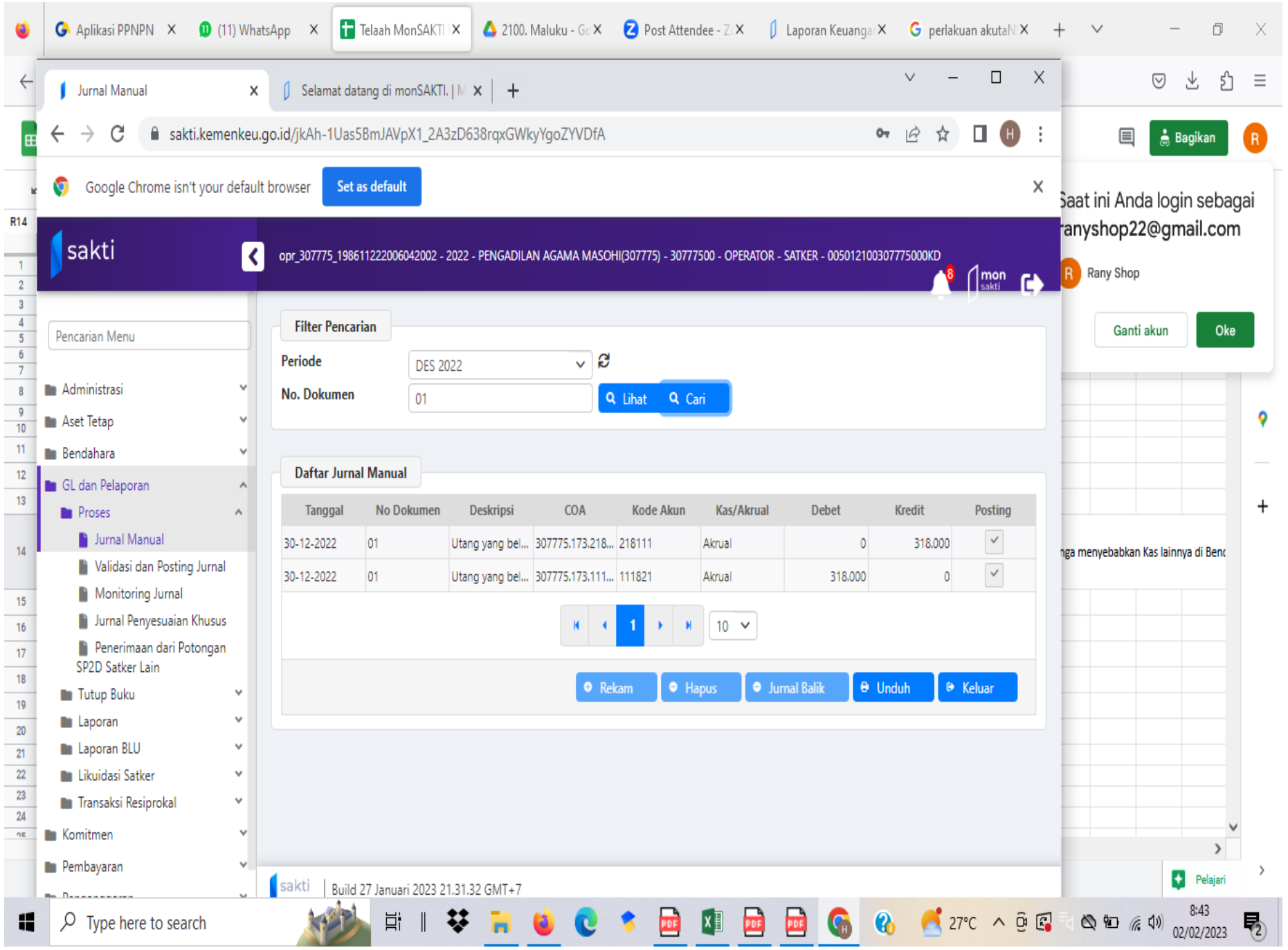
Jurnal Manual
Selamat datang di monSAKTI.
sakti.kemenkeu.go.id/jkAh-1Uas5BmJAVpX1_2A3zD638rqxGWkyYgoZYVDfA
Google Chrome isn't your default browser
Set as default
sakti
opr_307775_198611222006042002 - 2022 - PENGADILAN AGAMA MASOHI(307775) - 30777500 - OPERATOR - SATKER - 005012100307775000KD
Pencarian Menu
Administrasi
Aset Tetap
Bendahara
GL dan Pelaporan
Proses
Jurnal Manual
Validasi dan Posting Jurnal
Monitoring Jurnal
Jurnal Penyesuaian Khusus
Penerimaan dari Potongan SP2D Satker Lain
Tutup Buku
Laporan
Laporan BLU
Likuidasi Satker
Transaksi Resiprokal
Komitmen
Pembayaran
Filter Pencarian
Periode
DES 2022
No. Dokumen
01
Lihat
Cari
Daftar Jurnal Manual
Tanggal
No Dokumen
Deskripsi
COA
Kode Akun
Kas/Akrual
Debet
Kredit
Posting
30-12-2022
01
Utang yang bel...
307775.173.218...
218111
Akrual
0
318.000
30-12-2022
01
Utang yang bel...
307775.173.111...
111821
Akrual
318.000
0
10
Rekam
Hapus
Jurnal Balik
Unduh
Keluar
sakti
Build 27 Januari 2023 21.31.32 GMT+7
Bagikan
Saat ini Anda login sebagai
ranyshop22@gmail.com
Rany Shop
Ganti akun
Oke
Pelajari
Type here to search
27°C
8:43
02/02/2023

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596993

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:45
No.Resi : 36500-02/2023/800046 Petugas : 560000214

Tanggal Buku : 03-01-2023
Kode Cabang Pos : 036000

NTP : 965966930691
NTPN : 3B6E91PJPKNSUGKQ
STAN : 930691

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:43
Kode Billing : 027281200399002
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 132.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

PB/V/2022

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (fitrah) bulan nov
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 0399 002
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:34:40

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596991

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:44
No.Resi : 36500-02/2023/800044 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965961930680
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: F651E7440K67RP10
		STAN	: 930680

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:42
Kode Billing : 027281200899128
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 132.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

POS INDONESIA KUALA TU

KANTORPOS

POS INDONESIA

PB/V/2022

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (farhan) bulan nov
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 0899 128
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:36:28

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

: 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
S INDONESIA (PERSERO)
Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596992

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:45
No.Resi : 36500-02/2023/800045 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965963930685
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: 4C6333IEP99LVMAK
		STAN	: 930685

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:43
Kode Billing : 027281200634004
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 132.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

KANTOR POS INDONESIA KUALA TUNGKAL

KANTORPOS

POS INDONESIA

PB/V/2022

Syarat dan ketentuan berlaku
Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (fitrah) bulan des
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 0634 004
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:34:16

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596990

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:44
No.Resi : 36500-02/2023/800043 Petugas : 560000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965958730674
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: D9C6A67NRPJRKGKD
		STAN	: 930674
Waktu Transaksi	: 02-01-2023 13:54:42		
Kode Billing	: 027281201087117		
NPWP	: 001089218334000		
Nama Wajib Pajak	: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL		
Alamat	: JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 910		
Masa Pajak	: 01012023		
No SK	: 00000000000000		
NOP	:		
Jumlah Setoran	: Rp. 132.000	Mata Uang	: IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

POS INDONESIA KUALA TUNGKAL

KANTORPOS

POS INDONESIA

PBV/2022

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (farhan) bulan des
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 1087 117
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:37:10

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596988

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:43
No.Resi : 36500-02/2023/800041 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965954930667
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: D0F451PJPKNU7HA0
		STAN	: 930667

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:41
Kode Billing : 027281201743002
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 35.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh lima ribu rupiah)

KANTOR POS
POS INDONESIA

PB/V/2022

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	402
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.35.000
TERBILANG	:	Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembaaran PPh pasal 21 honor KPA
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 1743 002
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:38:24

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Kantor Knc. Kuala Tungkal 36500

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing) 452597871

Tanggal : 04-01-2023 14:32:58
No.Resi : 36500-02/2023/800256 Petugas : 550000214

Tanggal Buku : 05-01-2023
Kode Cabang Pos : 036000

NTP : 948678960420
NTPN : D4B8D7440K68TD0B
STAN : 960420

Waktu Transaksi : 04-01-2023 14:32:56
Kode Billing : 027781707015048
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL. PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 30.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS
POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

PB/V/2022

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	402
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.30.000
TERBILANG	:	Tiga Puluh Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembaaran PPh pasal 21 honor PPSPM
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 2015 048
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:40:47

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596989

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:43
No.Resi : 36500-02/2023/800042 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965957930670
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: 9AF462M19FAAF439
		STAN	: 930670
Waktu Transaksi	: 02-01-2023 13:54:42		
Kode Billing	: 027281201533033		
NPWP	: 001089218334000		
Nama Wajib Pajak	: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL		
Alamat	: JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Akun	: 411121		
Jenis Setoran	: 402		
Masa Pajak	: 01012023		
No SK	: 000000000000000		
NOP	:		
Jumlah Setoran	: Rp. 521.600	Mata Uang	: IDR

Terbilang : (Lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)

PBJV/2022

KANTORPOS
POS INDONESIA
Syarat dan ketentuan berlaku
Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	402
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.521.600
TERBILANG	:	Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPh pasl 21 berua uang makan pegawai
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 1533 033
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:38:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596993

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:45
No.Resi : 36500-02/2023/800046 Petugas : 560000214

Tanggal Buku : 03-01-2023
Kode Cabang Pos : 036000

NTP : 965966930691
NTPN : 3B6E91PJPKNSUGKQ
STAN : 930691

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:43
Kode Billing : 027281200399002
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 132.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

PB/V/2022

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (fitrah) bulan nov
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 0399 002
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:34:40

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596991

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:44
No.Resi : 36500-02/2023/800044 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965961930680
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: F651E7440K67RP10
		STAN	: 930680

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:42
Kode Billing : 027281200899128
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 132.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

POS INDONESIA KUALA TU

KANTORPOS

POS INDONESIA

PB/V/2022

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (farhan) bulan nov
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 0899 128
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:36:28

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

: 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
S INDONESIA (PERSERO)
Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596992

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:45
No.Resi : 36500-02/2023/800045 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965963930685
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: 4C6333IEP99LVMAK
		STAN	: 930685

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:43
Kode Billing : 027281200634004
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 132.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

KANTOR POS INDONESIA KUALA TUNGKAL

KANTORPOS

POS INDONESIA

PB/V/2022

Syarat dan ketentuan berlaku
Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (fitrah) bulan des
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 0634 004
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:34:16

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596990

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:44
No.Resi : 36500-02/2023/800043 Petugas : 560000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965958730674
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: D9C6A67NRPJRKGKD
		STAN	: 930674
Waktu Transaksi	: 02-01-2023 13:54:42		
Kode Billing	: 027281201087117		
NPWP	: 001089218334000		
Nama Wajib Pajak	: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL		
Alamat	: JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Akun	: 411211		
Jenis Setoran	: 910		
Masa Pajak	: 01012023		
No SK	: 00000000000000		
NOP	:		
Jumlah Setoran	: Rp. 132.000	Mata Uang	: IDR

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

POS INDONESIA KUALA TUNGKAL

KANTORPOS

POS INDONESIA

PBV/2022

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.132.000
TERBILANG	:	Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPN sewa rumah dinas hakim (farhan) bulan des
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 1087 117
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:37:10

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596988

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:43
No.Resi : 36500-02/2023/800041 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965954930667
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: D0F451PJPKNU7HA0
		STAN	: 930667

Waktu Transaksi : 02-01-2023 13:54:41
Kode Billing : 027281201743002
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 35.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh lima ribu rupiah)

KANTOR POS
POS INDONESIA

PB/V/2022

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	402
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.35.000
TERBILANG	:	Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembaaran PPh pasal 21 honor KPA
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 1743 002
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:38:24

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Kantor Knc. Kuala Tungkal 36500

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing) 452597871

Tanggal : 04-01-2023 14:32:58
No.Resi : 36500-02/2023/800256 Petugas : 550000214

Tanggal Buku : 05-01-2023
Kode Cabang Pos : 036000

NTP : 948678960420
NTPN : D4B8D7440K68TD0B
STAN : 960420

Waktu Transaksi : 04-01-2023 14:32:56
Kode Billing : 027781707015048
NPWP : 001089218334000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
Alamat : JL. PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 01012023
No SK : 00000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 30.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS
POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

PB/V/2022

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	402
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.30.000
TERBILANG	:	Tiga Puluh Ribu Rupiah
URAIAN	:	Pembaaran PPh pasal 21 honor PPSPM
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 2015 048
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:40:47

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Kuala Tungkal 36500

452596989

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 02-01-2023 13:54:43
No.Resi : 36500-02/2023/800042 Petugas : 550000214

Tanggal Buku	: 03-01-2023	NTP	: 965957930670
Kode Cabang Pos	: 036000	NTPN	: 9AF462M19FAAF439
		STAN	: 930670
Waktu Transaksi	: 02-01-2023 13:54:42		
Kode Billing	: 027281201533033		
NPWP	: 001089218334000		
Nama Wajib Pajak	: PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL		
Alamat	: JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		
Akun	: 411121		
Jenis Setoran	: 402		
Masa Pajak	: 01012023		
No SK	: 000000000000000		
NOP	:		
Jumlah Setoran	: Rp. 521.600	Mata Uang	: IDR

Terbilang : (Lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)

PBJV/2022

KANTORPOS
POS INDONESIA
Syarat dan ketentuan berlaku
Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.108.921.8-334.000
NAMA	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL
ALAMAT	:	JL PROF DR SRI SOEDEWI - KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	402
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2023
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.521.600
TERBILANG	:	Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah
URAIAN	:	Pembayaran PPh pasl 21 berua uang makan pegawai
NPWP PENYETOR	:	00.108.921.8-334.000
NAMA PENYETOR	:	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL BADAN URUSAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8120 1533 033
MASA AKTIF	:	01/02/2023 11:38:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

474593784

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. SERANG 42100

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 24-01-2023 15:06:57
No.Resi : 42100-16/2023/B02212 Petugas : 550000687

Tanggal Buku : 25-01-2023
Kode Cabang Pos : 042100

NTP : 927984180621
NTPN : B016A67N8RPI885L
STAN : 180621

Waktu Transaksi : 24-01-2023 15:06:54
Kode Billing : 027283540648117
NPWP : 001036425401000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN TINGGI BANTEN BADAN
Alamat : JL. RAYA PANDEGLANG KM. 6,6 SERANG, SERANG, BANTEN
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012022
No SK : 000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 231.000

Terbilang : (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

PB/VII/2022

474593785

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. SERANG 42100

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 24-01-2023 15:06:58
No.Resi : 42100-16/2023/B02213 Petugas : 550000687

Tanggal Buku : 25-01-2023
Kode Cabang Pos : 042100

NTP : 927985180622
NTPN : CC8592M19HG1B89T
STAN : 180622

Waktu Transaksi : 24-01-2023 15:06:55
Kode Billing : 027283540812093
NPWP : 001036425401000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN TINGGI BANTEN BADAN
Alamat : JL. RAYA PANDEGLANG KM. 6,6 SERANG, SERANG, BANTEN
Akun : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 01012022
No SK : 000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 246.400

Terbilang : (Dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.co.id

PB/VII/2022

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.103.627.6-024.000
NAMA	:	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERA
ALAMAT	:	GEDUNG SEKRETARIAT MA LT. 9 JALAN JENDERAL AHMAD Y
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411211
JENIS SETORAN	:	910
MASA PAJAK	:	12-12
TAHUN PAJAK	:	2022
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.349.360
TERBILANG	:	Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah
URAIAN	:	PPN Pemeliharaan Kendaraan Tahun 2022
NPWP PENYETOR	:	00.103.627.6-024.000
NAMA PENYETOR	:	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8316 7196 068
MASA AKTIF	:	16/02/2023 13:21:12

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Bank Syariah Indonesia | Penerimaan Pajak | Kementerian Keuangan

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 17/01/2023 13:28:20	NTB	: FT23017Y55MS
Tanggal Buku	: 18/01/2023	NTPN	: CBEAD744OMOR2CT4
Kode Cabang Bank	: 018125	STAN	: 626282

17 JAN 2023

Yuli Rachmani
Teller

Data Setoran:

Kode Billing	: 027203167196068
NPWP	: 001036276024000
Nama Wajib Pajak	: DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERA
Akun	: 411211
Alamat	: GEDUNG SEKRETARIAT MA LT. 9 JALAN JENDERAL AHMAD Y
Nomor Objek Pajak	:
Mata Anggaran	: 411211
Jenis Setoran	: 910
Masa Pajak	: 12122022
Nomor Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Setoran	: 349,360
Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga

Ratus Enam Puluh Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
Cetakan ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	00.103.627.6-024.000
NAMA	:	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERA
ALAMAT	:	GEDUNG SEKRETARIAT MA LT. 9 JALAN JENDERAL AHMAD Y
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411124
JENIS SETORAN	:	100
MASA PAJAK	:	12-12
TAHUN PAJAK	:	2022
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.63.520
TERBILANG	:	Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah
URAIAN	:	PPh 23 Perawatan kendaraan Dlnas Tahun 2022
NPWP PENYETOR	:	00.103.627.6-024.000
NAMA PENYETOR	:	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	0272 8316 5773 100
MASA AKTIF	:	16/02/2023 13:09:02

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Bank Syariah Indonesia — Penerimaan Pajak — Kementerian Keuangan

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 17/01/2023 13:28:52	NTB	: FT23017J7FD1
Tanggal Buku	: 18/01/2023	NTPN	: OAB69000Q1DMEV9C
Kode Cabang Bank	: 018125	STAN	: 626283

17 JAN 2023

Yuli Rachmani
Teller

Data Setoran:

Kode Billing	: 027283165773100
NPWP	: 001036276024000
Nama Wajib Pajak	: DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERA
Akun	: 411124
Alamat	: GEDUNG SEKRETARIAT MA LT. 9 JALAN JENDERAL AHMAD Y
Nomor Objek Pajak	:
Mata Anggaran	: 411124
Jenis Setoran	: 100
Masa Pajak	: 12122022
Nomor Ketetapan	: 000000000000000
Jumlah Setoran	: 63,520
Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil rekaman khusus dan tidak memerlukan tanda tangan

Daftar Pengembalian TAYL 2022 (TELAT BAYAR)

MENPIM

NO.	NAMA	AKUN	JUMLAH	Kode Billing	Tgl Bayar	NTB	NTPN	Keterangan	Keterangan untuk LK	Keterangan Untuk Catatan Atas Laporan Keuangan
1	SAANIH	425912	660.000	820230109455521	09-01-2022	230109302851	BA6B31JNFLCHAP51	Pengembalian Perjadin Latsar Gel. I Semarang	Pengembalian TAYL atas kelebihan biaya perjalanan dinas akun 52xxxx kegiatan xxx dengan nomor spm xxx tanggal xxx dan nomor sp2d xxx tanggal xxx	
2	SAANIH	425912	780.000	820230109455758	09-01-2022	230109302945	33C7D7QLUFD85PCE	Perjadin Latsar Perhubungan Ank. VIII	Pengembalian TAYL atas kelebihan biaya perjalanan dinas akun 52xxxx kegiatan xxx dengan nomor spm xxx tanggal xxx dan nomor sp2d xxx tanggal xxx	
3	SAANIH	425912	960.000	820230109455786	09-01-2022	230109303046	AC8DC61QUQ8FBPDA	Perjadin Latsar Jakarta Angk. II Gel. I	Pengembalian TAYL atas kelebihan biaya perjalanan dinas akun 52xxxx kegiatan xxx dengan nomor spm xxx tanggal xxx dan nomor sp2d xxx tanggal xxx	
4	SAANIH	425912	896.633	820230109455828	09-01-2022	230109348883	85DFB7QLUFD85PEK	Perjadin Latsar Jakarta Angk. II Gel. I	Pengembalian TAYL atas kelebihan biaya perjalanan dinas akun 52xxxx kegiatan xxx dengan nomor spm xxx tanggal xxx dan nomor sp2d xxx tanggal xxx	
5	SAANIH	425912	11.960.000	820230109592914	10-01-2022	001215344038	4A15A7QLUFD89VAI	Latsar Surabaya Gel. 2 Gol. II	Pengembalian TAYL atas kelebihan biaya perjalanan dinas akun 52xxxx kegiatan xxx dengan nomor spm xxx tanggal xxx dan nomor sp2d xxx tanggal xxx	
6	SAANIH	425912	2.748.400	820230109592792	10-01-2022	001215345445	2E0B00N9VQQ51V60	Latsar Surabaya Gel. 2 Gol. II	Pengembalian TAYL atas kelebihan biaya perjalanan dinas akun 52xxxx kegiatan xxx dengan nomor spm xxx tanggal xxx dan nomor sp2d xxx tanggal xxx	
7	SAANIH	425912	8.055.392	820230109592621	09-01-2022	001214771043	6828561QUQ8FFV1D	Latsar Makassar Gel. 5 Angk. XI	Pengembalian TAYL atas kelebihan biaya perjalanan dinas akun 52xxxx kegiatan xxx dengan nomor spm xxx tanggal xxx dan nomor sp2d xxx tanggal xxx	
			26.060.425							

Notes : Tolong di isi dan di rinci di kolom keterangan untuk LK yang ditandai xxx dan jelaskan juga di kolom Catatan Atas laporan keuangan mngenai kenapa hal tersebut bisa terjadi. Terima kasih
Lengkapi Kolom di Sheet Daftar Rincian

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230109455521
Tanggal Billing	:	09-01-2023 05:37:30
Tanggal Kedaluwarsa	:	16-01-2023 05:37:30
Tanggal Bayar	:	09-01-2023 06:34:53
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***06*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Satuan Kerja	:	***610378*** - BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
Total Disetor	:	660.000 (IDR)
Terbilang	:	*Enam Ratus Enam Puluh Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**230109302851**
NTPN	:	**BA6B31JNFLCHAP51**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	660.000 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Perjadin Latsar Gel. I Semarang

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230109455758
Tanggal Billing	:	09-01-2023 06:05:15
Tanggal Kedaluwarsa	:	16-01-2023 06:05:15
Tanggal Bayar	:	09-01-2023 06:37:33
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***06*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Satuan Kerja	:	***610378*** - BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
Total Disetor	:	780.000 (IDR)
Terbilang	:	*Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**230109302945**
NTPN	:	**33C7D7QLUFD85PCE**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	780.000 (IDR)
Keterangan	:	Perjadin Latsar Perhubungan Ank. VIII

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230109455786
Tanggal Billing	:	09-01-2023 06:07:36
Tanggal Kedaluwarsa	:	16-01-2023 06:07:36
Tanggal Bayar	:	09-01-2023 06:40:30
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***06*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Satuan Kerja	:	***610378*** - BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
Total Disetor	:	960.000 (IDR)
Terbilang	:	*Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**230109303046**
NTPN	:	**AC8DC61QUQ8FBPDA**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	960.000 (IDR)
Keterangan	:	Perjadin Latsar Jakarta Angk. II Gel. I

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230109455828
Tanggal Billing	:	09-01-2023 06:11:48
Tanggal Kedaluwarsa	:	16-01-2023 06:11:48
Tanggal Bayar	:	09-01-2023 13:46:05
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:	*Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***06*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Satuan Kerja	:	***610378*** - BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
Total Disetor	:	896.633 (IDR)
Terbilang	:	*Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**230109348883**
NTPN	:	**85DFB7QLUFD85PEK**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	896.633 (IDR)
Keterangan	:	Perjadin Monev 15

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230109592792
Tanggal Billing	:	09-01-2023 17:06:20
Tanggal Kedaluwarsa	:	16-01-2023 17:06:20
Tanggal Bayar	:	10-01-2023 11:17:46
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	PT. TOKOPEDIA
Channel Bayar	:	Dompet Elektronik
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***06*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Satuan Kerja	:	***610378*** - BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
Total Disetor	:	2.748.400 (IDR)
Terbilang	:	*Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**001215345445**
NTPN	:	**2E0B00N9VQQ51V6O**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	2.748.400 (IDR)
Keterangan	:	Latsar Makassar Gel. 5 Angk. XIII

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230109592914
Tanggal Billing	:	09-01-2023 17:08:14
Tanggal Kedaluwarsa	:	16-01-2023 17:08:14
Tanggal Bayar	:	10-01-2023 11:16:02
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	PT. TOKOPEDIA
Channel Bayar	:	Dompet Elektronik
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***06*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Satuan Kerja	:	***610378*** - BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
Total Disetor	:	11.960.000 (IDR)
Terbilang	:	*Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**001215344038**
NTPN	:	**4A15A7QLUFD89VAI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	11.960.000 (IDR)
Keterangan	:	Latsar Makassar Gel. 5 Angk. XI

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230109592621
Tanggal Billing	:	09-01-2023 17:03:52
Tanggal Kedaluwarsa	:	16-01-2023 17:03:52
Tanggal Bayar	:	09-01-2023 18:57:11
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	PT. TOKOPEDIA
Channel Bayar	:	Dompet Elektronik
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***06*** - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Satuan Kerja	:	***610378*** - BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL
Total Disetor	:	8.055.392 (IDR)
Terbilang	:	*Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**001214771043**
NTPN	:	**6828561QUQ8FFV1D**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	8.055.392 (IDR)
Keterangan	:	Latsar Surabaya Gel. 2 Gol. II

Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMARI PNBP

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230321077819
Tanggal Billing	: 21-03-2023 11:53:29
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-03-2023 23:59:00
Tanggal Bayar	: 21-03-2023 14:23:34
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Total Disetor	: 26.003.962 (IDR)
Terbilang	: *Dua Puluh Enam Juta Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua (IDR)*
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230321247475
NTPN	: A95E28N3EA5UCVHR

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 26.003.962 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Tunjangan Kinerja tahun 2022

DAFTAR SALDO KAS LAIN/HIBAH BENDAHARA PENGELUARAN
MAHKAMAH AGUNG S.D. 31 DESEMBER 2022

Akun: 11182 Kas lain dikementrian Negara/Lembaga Hibah

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	Keterangan	Bukti Setor	
						Tanggal Dokumen	NTPN
005.01	0200	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	5.995.310.000,	Penerimaan Hibah pada Tahun 2022, saldo di rekening adalah yg belum dilakukan realisasi & pengesahan dari KPPN	31/12/2022	-
TOTAL				**5.995.310.000,**			

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2927/SEK/OT.01.1/12/2022 19 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Persetujuan Hibah Uang pada Pengadilan Negeri Cikarang

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang
Di
Tempat

Sehubungan surat Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: W11.U23/4209/UM.01.10/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Laporan dan Permohonan Persetujuan Penerimaan Hibah berupa Uang dari PEMDA Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perma 5 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, permohonan hibah uang kami setujui;
2. Satuan kerja segera melakukan penatausahaan hibah tersebut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Melaporkan perkembangan realisasi hibah kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku pengguna anggaran c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi.

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengawasan;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Bupati Bekasi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. Kepala Biro Perlengkapan.

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Deltamas Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. (021) 89977188 / Fax. (021) 89977189
website : www.pn-cikarang.go.id

Nomor : W11.U23/4209/UM. 01.10/XI/2022 Cikarang, 28 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Laporan dan Permohonan Persetujuan Penerimaan Hibah berupa Uang dari PEMDA Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022**

YTH. **SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG R.I**

Cq. KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG R.I

d.a Mahkamah Agung R.I
Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13
Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10110

Bersama ini kami sampaikan laporan dan permohonan persetujuan penerimaan Hibah bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : PM.01.02/2913/Bakesbangpol/2022 dan Nomor : W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022, yang peruntukkannya dialokasikan untuk kegiatan Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II. (Naskah NPHD *terlampir*).

Demikian Laporan penerimaan hibah ini disampaikan, atas perkenanannya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA
SEKRETARIS,

NURMA SAOFIANE, S.H.
NIP. 19820419 200212 2 001

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang;
5. Arsip.

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KLAS II

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Deltamas, Nomor Telpon/Fax : (021) 89977188,89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor	:	W11.U23/4358/KU.10.10/XII/2022
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Perihal	:	Laporan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Pengadilan Negeri Cikarang

Cikarang, 19 Desember 2022

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bekasi
Di –
Jalan Pramuka No. 63 BEKASI

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga dan Surat Saudara Nomor : S-000135/WPB.13/KP.03/2022 Tanggal 16 Desember 2022 Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama Pengadilan Negeri Cikarang, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Lainnya dengan Nomor Rekening : **13301300006735** dengan nama Rekening : **RPL 171 PDHL PN CIKARANG UNTUK 2KS1A39A** pada tanggal 16 Desember 2022 pada Bank BTN Cabang Cikarang.

Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa Rekening tersebut agar dimasukkan dalam program *Treasury National Pooling* (TNP).

Demikian disampaikan, atas Kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Cikarang, 19 Desember 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NURMA SAOFIANE, SH.
NIP. 19820419 200212 2 001

DATE PRINTED: 30/12/22 16:52:09 | Period : 1/12/22 - 30/12/22 | 29/12/22 DDI230P Page 1

CIKARANG | Branch:00133

00000133-01-30-000873-5 | Last stmt : 0/00/00 | Last Bal : 5,995,310,000.00

RPL 171 PDHL PN CIKARANG UNTUK 2KS1A39A
KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BEKASI
DELTAMAS
CIKARANG PUSAT
BEKASI

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			B/F				.00
23/12/22	23/12/22	000552/RT/BAKESBANGPOL	0000/001		.00	5,999,970,000.00	5,999,970,000.00 Cr
29/12/22	29/12/22	PENGGANTIAN BIAYA RTGS	0000/001		.00	30,000.00	6,000,000,000.00 Cr
	29/12/22	CK/TUNAI/DESIANA/3402160512880004	0000/002	01029351	4,690,000.00	.00	5,995,310,000.00 Cr

* End of Report *

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI

Jalan Pramuka Nomor 63,Bekasi
Telp. 021 8842646 Fax :021 8845299
email kppn171@gmail.com

Nomor : S-000135/WPB.13/KP.03/2022 16 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Pengadilan Negeri Cikarang

Yth Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Cikarang
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 14 Desember 2022 Nomor W11.U23/4356/ KU.10.10/ XII/2022 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Tabungan Negara untuk keperluan Rekening untuk menampung pencairan dana hibah langsung dari Pemerintah Daerah, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 171 PDHL PN CIKARANG UNTUK 2KS1A39A
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20221714019150000015757 2

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Hajoe Saptaria , S.E.
NIP.197007231996032001

Tembusan:
1. Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Btn Kantor Cabang Cikarang
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KLAS II

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Deltamas, Nomor Telpon/Fax : (021) 89977188,89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : W11.U23/4354 /KU.01.07/XII/2022 Cikarang, 07 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Kepada Yth. Bapak Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat
Di –
Jl. Diponegoro No. 59 BANDUNG

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan penertiban nomor register hibah untuk proyek/kegiatan Pengadaan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen perjanjian hibah/dokumen lain yang dipersamakan;
2. Ringkasan hibah;dan
3. Dokumen pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada :

Nama : Pengadilan Negeri Cikarang
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi
No. Telpon : (021) 89977188,89977189
E-mail : keuangan.pncikarang@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NURMA SAOFIANE, SH.
Nip. 19820419 200212 2 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan & Organisasi
3. Yth. Kepala Biro Keuangan MA-RI
4. Yth. Kepala Badan Pengawas MA-RI
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (selaku Korwil)
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang (sebagai laporan)
7. Arsip

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KLAS II

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Deltamas, Nomor Telpon/Fax : (021) 89977188,89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah : Pengadaan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang
2. Nilai Hibah : Rp. 6.000.000.000,-
3. Mata Uang : Rupiah
4. Nomor Hibah : PM.01.02/2913/Bakesbangpol/2022
   W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022
5. Nomor Referensi Lain : -
6. Tanggal Penandatanganan : 05 Desember 2022
7. Kementrian/Lembaga Penerima/*Executing Agency* : Mahkamah Agung Kode Satuan Kerja : 005
8. Kode Satker : 401915
9. Implementing Agency /Beneficiary dan Kode Satuan Kerja(bisa lebih dari satu)

No.	Nama	Alamat	Kode Satker	Nomor Telpon	Fax	Email
1.	MAHKAMAH AGUNG RI	Komplek Perkantoran Pemda Kab. Bekasi Desa Sukamahi kecamatan Cikarang Pusat Deltamas Kab. Bekasi	401915	(021) 89977188	(021) 89977189	keuangan.pncikarang @gmail.com

10. Pemberi Hibah
    a. Nama : Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
    b. Alamat : Jalan Wibawa Mukti Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi
    c. No.Telpon / Fax : -
    d. E-mail : -
11. Sumber Pembiayaan : Pemerintah Daerah Kab. Bekasi
12. Jenis Pembiayaan : Pengadaan Rumah Dinas
13. Jenis Hibah : Langsung
14. Bentuk Hibah : Uang
15. Penarikan Hibah
    a. Tata Cara Penarikan : Hibah Langsung
    b. Rencana Penarikan /*Disburment plan* :

No.	Tanggal/Bulan/Tahun	Nilai
1.	Desember 2022	4.730.000,-
2.	Juni 2023	5.995.270.000,-
3.		

16. Sektor Pembiayaan : Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial

17. Lokasi / ALokasi Proyek :

No.	Lokasi	Alokasi
1.	JAWA BARAT	KAB. BEKASI

18. Tanggal Effektif / *Effective day* : 05 Desember 2022
19. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan / *Date effective Limit* : -
20. Tanggal Batas Penarikan / *Closing Date* : 31 Desember 2023
21. Tanggal Penutupan Rekening / *Date of Closing Account* : 31 Desember 2023
22. Ketentuan Pengiriman NoD : Tidak Ada
23. Persyaratan Pengefektifan/ *Conditions Precedent for Effectiveness* : -

Cikarang, 07 Desember 2022
Sekretaris
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang



NURMA SAOFIANE, SH.
NIP. 19820419 200212 2 001

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN
PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

Nomor : PM.01.02/2913/Bakesbangpol/2022
Nomor : W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022

PELAKSANAAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN
PENGADAAN RUMAH DINAS
PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini SENIN tanggal LIMA bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di Cikarang Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. ENCEP S JAYA, M.Si. : Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bekasi berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemberi hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NURMA SAOFIANE, S.H. : Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 202);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 221);
18. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : Ku.02.03/Kep.73-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.519-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai unsur Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum memberikan Hibah Bantuan Keuangan kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022; dan
b. bahwa Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang diperuntukan untuk Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).
(2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 2
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

(1) Untuk percepatan dan efesiensi penyelesaian tugas, fungsi serta pelayanan Pengadilan Negeri Cikarang;
(2) Untuk meningkatkan kinerja Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Negeri Cikarang;
(3) Mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
(4) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022;
(5) Uang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 sesuai dengan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah / Proposal yang disusun oleh PIHAK KEDUA dalam Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi;
(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
    a. Mempersiapkan anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
    b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pencairan yang telah ditetapkan;
(3) Hak PIHAK KEDUA adalah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dari PIHAK KESATU dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
    a. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunaan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. Bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. Dalam hal Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II

Kabupaten Bekasi masih terdapat sisa Dana Hibah, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi dan dikembalikan kepada kas daerah.

(5) Kegiatan pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarag Kelas II sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2023, dan dengan telah digunakannya hibah uang tersebut maka masa buku rekening berakhir atau tutup rekening.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

(1) Pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara di transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi ke rekening milik Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi;

(2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan;

a. Permohonan Pencairan Hibah Uang disertai dengan rincian penggunaan dana hibah;
b. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani diatas materai;
d. Foto copy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
e. Kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.

Pasal 5
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pembelian Rumah Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (*satu*) bulan setelah Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK KESATU melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian bantuan hibah Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang kelas II;

(2) Dalam melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh pihak lain.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dan terdapat kesalahan dalam penulisan nama penerima, alamat penerima untuk membuktikan kebenarannya penerima hibah melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh perangkat daerah terkait, maka dapat di proses sesuai dengan ketentuan;
(2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan, maka tidak dapat dilakukan penggantian nama penerima hibah dan peruntukannya;

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BEKASI	PIHAK KEDUA, KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
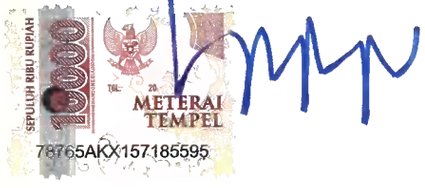	
Dr. H. ENCEP S JAYA, M.Si.	NURMA SAOFIANE, S.H.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 167 /SEK/SK/IX/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penatausahaan hibah langsung dalam bentuk uang/barang/jasa dari dalam negeri di lingkungan Mahkamah Agung;

c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perjanjian hibah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah;
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menandatangani Surat dan/atau Persetujuan atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/II/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkama Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung Menanda tangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada masing-masing satuan kerja di bawah Mahkamah Agung untuk menandatangani Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang/Barang/ Jasa dari Dalam Negeri.

KEDUA : Penandatanganan Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 167 /SEK/SK/IX/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penatausahaan hibah langsung dalam bentuk uang/barang/jasa dari dalam negeri di lingkungan Mahkamah Agung;

c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perjanjian hibah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah;
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menandatangani Surat dan/atau Persetujuan atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/II/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkama Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung Menanda tangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memberikan pendelegasian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada masing-masing satuan kerja di bawah Mahkamah Agung untuk menandatangani Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang/Barang/ Jasa dari Dalam Negeri.

KEDUA : Penandatanganan Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

RINGKASAN HIBAH

1. Nama Hibah : HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI KEPADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG
2. Nilai Hibah : 6,000,000,000.00
3. Mata Uang : IDR
4. Nomor Hibah : NPHD Nomor: PM.01.02/2913/Bakesbangpol/2022 dan Nomor: W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022
5. Nomor Referensi Lain : -
6. Tanggal Penandatanganan : 5 Desember 2022
7. Kementerian Lembaga Penerima / Executing Agency : MAHKAMAH AGUNG
8. Kode Satker : 097500
9. Implementing Agency / Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)

No	Nama	Alamat	Kode Satker	Nomor Telepon	Fax	Email
1	MAHKAMAH AGUNG	Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang	401915	02189977188	02189977189	keuangan.pncikarang@gmail.com

10. Donor / Pemberi Hibah
    a. Nama : PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
    b. Alamat : Jalan Wibawa Mukti Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi
    c. Nomor Telepon / Fax : 02189977188 / 02189977189
    d. E-mail : keuangan.pncikarang@gmail.com
11. Sumber Pembiayaan : PEMDA
12. Jenis Pembiayaan : Belanja Modal - Gedung dan Bangunan
13. Jenis Hibah : Langsung
14. Bentuk Hibah : KAS
15. Penarikan Hibah
    a. Tatacara Penarikan : HIBAH LANGSUNG
    b. Rencana Penarikan / Disbursement Plan

No	Tgl/Bulan/Tahun	Nilai
1	Desember 2022	6,000,000,000

16. Sektor Pembiayaan : Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
17. Lokasi / Alokasi Proyek

No	Lokasi	Kabupaten / Kota
1	JAWA BARAT	KAB. BEKASI

18. Tgl.Efektif / Effective Date : 5 Desember 2022
19. Tgl. Batas Waktu Pengefektifan / Date Effective Limit : 5 Desember 2022
20. Tgl. Batas Penarikan / Closing Date : 31 Desember 2023
21. Tgl. Penutupan Rekening / Date of Closing Account : 31 Desember 2023
22. Ketentuan pengiriman NOD : -
23. Persyaratan Pengefektifan / Condition Precedent of Effectiveness : -

CIKARANG, 7 Desember 2022

KANWIL JAWA BARAT

NURMA SAOFIANE, S.H.
198204192002122001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
Gedung Dwi Warna Jl. Diponegoro no. 59 Bandung 40123

Nomor : S-5464/WPB.13/2022 14 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Penerbitan Nomor Register Hibah Langsung kepada Pengadilan Negeri Cikarang

Yth. KPA Pengadilan Negeri Cikarang (401915)

Sehubungan dengan surat KPA Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: W11.U23/4354/KU.01.07/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang diterima tanggal 14 Desember 2022 hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor Register Hibah Langsung yang diterima Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 2KS1A39A sebagaimana terlampir.

Selanjutnya ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, khususnya terkait dengan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dan Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung agar dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik
Arif Wibawa

Tembusan:
1. Direktur Sistem Penganggaran, DJA, Kemenkeu
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPBN, Kemenkeu
3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR, Kemenkeu

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S-5464/WPB.13/2022
Tanggal : 14 Desember 2022

Penetapan Nomor Register

No	Pemberi Hibah	No Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl Penandatangan Perjanjian	Tgl Batas Penarikan/ Closing Date	Bentuk Hibah	Mata Uang	Nilai Hibah	No Register
1	PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI	NPHD Nomor: PM. 01.02/2913/Bakesbangpol/ 2022 dan Nomor: W11.U23/4206/KU.01.07/ XI/2022	HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI KEPADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG	5/12/2022	31/12/2023	KAS	IDR	6,000,000,000.00	2KS1A39A

Disclaimer
- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN
PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

Nomor : PM.01.02/2913/Bakesbangpol/2022
Nomor : W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022

PELAKSANAAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN
PENGADAAN RUMAH DINAS
PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini SENIN tanggal LIMA bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di Cikarang Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. ENCEP S JAYA, M.Si. : Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bekasi berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemberi hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NURMA SAOFIANE, S.H. : Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebagai penerima hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 202);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 221);
18. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : Ku.02.03/Kep.73-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.519-BPKD/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai unsur Penyelenggara Urusan Pemerintah Umum memberikan Hibah Bantuan Keuangan kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022; dan
b. bahwa Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang diperuntukan untuk Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).
(2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana pada ayat (1) bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 2
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

(1) Untuk percepatan dan efesiensi penyelesaian tugas, fungsi serta pelayanan Pengadilan Negeri Cikarang;
(2) Untuk meningkatkan kinerja Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Negeri Cikarang;
(3) Mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
(4) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022;
(5) Uang yang dihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 sesuai dengan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah / Proposal yang disusun oleh PIHAK KEDUA dalam Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU adalah menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi;
(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
    a. Mempersiapkan anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
    b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pencairan yang telah ditetapkan;
(3) Hak PIHAK KEDUA adalah menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dari PIHAK KESATU dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
    a. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunaan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. Bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    d. Dalam hal Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II

Kabupaten Bekasi masih terdapat sisa Dana Hibah, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah paling lambat 7 (*tujuh*) hari setelah Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi dan dikembalikan kepada kas daerah.

(5) Kegiatan pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarag Kelas II sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2023, dan dengan telah digunakannya hibah uang tersebut maka masa buku rekening berakhir atau tutup rekening.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

(1) Pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara di transfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi ke rekening milik Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi;

(2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan;

a. Permohonan Pencairan Hibah Uang disertai dengan rincian penggunaan dana hibah;
b. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani diatas materai;
d. Foto copy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
e. Kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel.

Pasal 5
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Pembelian Rumah Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (*satu*) bulan setelah Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK KESATU melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian bantuan hibah Pembelian Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang kelas II;

(2) Dalam melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh pihak lain.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dan terdapat kesalahan dalam penulisan nama penerima, alamat penerima untuk membuktikan kebenarannya penerima hibah melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh perangkat daerah terkait, maka dapat di proses sesuai dengan ketentuan;
(2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan, maka tidak dapat dilakukan penggantian nama penerima hibah dan peruntukannya;

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BEKASI	PIHAK KEDUA, KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
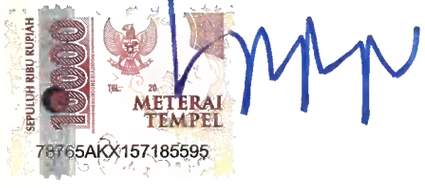	
Dr. H. ENCEP S JAYA, M.Si.	NURMA SAOFIANE, S.H.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221710000000026

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221710000000026	04-01-2023	31-12-2022	-5,995,310,000	00136T/401915/2022	31-12-2022	PENGESAHAN HIBAH	LAINNYA	Pengesahan hibah langsung bentuk uang triwulan ke-IV Tahun 2022 30 Desember 2022, sesuai NPHD PM.01.02/2913/Bakesbangpol/2022 dan Nomor: W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022 Tanggal 05 Desember 2022, Registe r Hibah Nomor: 2KS1A39A	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 04-01-23 14:28:09 oleh : 401915

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN NEGERI CIKARANG

SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Nomor 00136A | Tanggal 30-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bekasi (171)

Agar mengesahkan pendapatan hibah sejumlah Rp 6.000.000.000,00 dan belanja terkait hibah sejumah Rp

Untuk Periode Triwulan : IV

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor DIPA-005.01.2.401915/2022 Tanggal : 17-11-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021	Saldo Awal : Rp 0,00 Pendapatan : Rp 6.000.000.000,00 Belanja : Rp 4.690.000,00 Saldo Akhir : Rp 5.995.310.000,00	Jenis Tagihan : PENGESAHAN HIBAH Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan Nomor : 2KS1A39A

BELANJA	JUMLAH UANG
401915.171.533111.00501WA.1071EBB.J02KS1A39A.00000.2.0208.2.000000.000000	4.690.000,00
Jumlah Belanja	4.690.000,00

PENDAPATAN	JUMLAH UANG
977263.140.431133.9990200.0000000.J02KS1A39A.00000.2.0208.2.000000.000000	6.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	6.000.000.000,00

Kepada:

Nomor Supplier : 848594

Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengesahan hibah langsung bentuk uang triwulan ke-IV Tahun 2022 30 Desember 2022, sesuai NPHD PM.01.02/2913/Bakesbangpol/2022 dan Nomor: W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022 Tanggal 05 Desember 2022, Register Hibah Nomor: 2KS1A39A

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

KAB. BEKASI, 30 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTHA G AMALO, SE., MH.
NIP 19780725 2009042001

Dipindai dengan CamScanner

[Kode : PEM003]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00136A
Tanggal : 30-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401915.171.533111.00501WA.1071EBB.J02KS1A39A.00000.2.0208.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000090-Administrasi Pengadaan	4.690.000,00
	Jumlah	**4.690.000,00**
Jumlah		**4.690.000,00**

KAB. BEKASI, 30 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTHA G AMALO, SE., MH.
NIP 197907252009042001

Dipindai dengan CamScanner

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KLAS II

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Deltamas, Nomor Telpon/Fax : (021) 89977188,89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

Nomor : W11.U23/4664 /KU.01.07/XII/2022 Tanggal : 30 Desember 2022

Menyatakan bahwa Saya atas nama :

Kementrian Negara / Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI

Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi

Satuan Kerja : (401915) Pengadilan Negeri Cikarang

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa barang yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Nilai Hibah /Komitmen Hibah : Rp. 6.000.000,-

Digunakan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana tanpa melalui KPPN, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pendapatan		Belanja	
1.	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BAST terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja Pengadilan Negeri Cikarang untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cikarang, 30 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

NURMA SAOFIANE, SH.

NIP. 19820419 200212 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KLAS II

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi
Kecamatan Cikarang Pusat Deltamas, Nomor Telpon/Fax : (021) 89977188,89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL)

Nomor : W11.U23/4664 /KU.01.07/XII/2022 Tanggal : 30 Desember 2022

Menyatakan bahwa Saya atas nama :

Kementrian Negara / Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI

Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi

Satuan Kerja : (401915) Pengadilan Negeri Cikarang

Bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa barang yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Nilai Hibah /Komitmen Hibah : Rp. 6.000.000,-

Digunakan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana tanpa melalui KPPN, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pendapatan		Belanja	
1.	431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BAST terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja Pengadilan Negeri Cikarang untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cikarang, 30 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

NURMA SAOFIANE, SH.

NIP. 19820419 200212 2 001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
Gedung Dwi Warna Jl. Diponegoro no. 59 Bandung 40123

Nomor : S-5464/WPB.13/2022 14 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Penerbitan Nomor Register Hibah Langsung kepada Pengadilan Negeri Cikarang

Yth. KPA Pengadilan Negeri Cikarang (401915)

Sehubungan dengan surat KPA Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: W11.U23/4354/KU.01.07/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang diterima tanggal 14 Desember 2022 hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor Register Hibah Langsung yang diterima Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor 2KS1A39A sebagaimana terlampir.

Selanjutnya ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, khususnya terkait dengan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dan Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung agar dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik
Arif Wibawa

Tembusan:
1. Direktur Sistem Penganggaran, DJA, Kemenkeu
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPBN, Kemenkeu
3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR, Kemenkeu

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S-5464/WPB.13/2022
Tanggal : 14 Desember 2022

Penetapan Nomor Register

No	Pemberi Hibah	No Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl Penandatangan Perjanjian	Tgl Batas Penarikan/ Closing Date	Bentuk Hibah	Mata Uang	Nilai Hibah	No Register
1	PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI	NPHD Nomor: PM. 01.02/2913/Bakesbangpol/ 2022 dan Nomor: W11.U23/4206/KU.01.07/ XI/2022	HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI KEPADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG	5/12/2022	31/12/2023	KAS	IDR	6,000,000,000.00	2KS1A39A

Disclaimer
- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI

Jalan Pramuka Nomor 63,Bekasi
Telp. 021 8842646 Fax :021 8845299
email kppn171@gmail.com

Nomor : S-000135/WPB.13/KP.03/2022 16 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Pengadilan Negeri Cikarang

Yth Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Cikarang
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 14 Desember 2022 Nomor W11.U23/4356/ KU.10.10/ XII/2022 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Tabungan Negara untuk keperluan Rekening untuk menampung pencairan dana hibah langsung dari Pemerintah Daerah, Rekening tersebut akan diberi nama:
   RPL 171 PDHL PN CIKARANG UNTUK 2KS1A39A
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER
20221714019150000015757 2

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

Hajoe Saptaria , S.E.
NIP.197007231996032001

Tembusan:
1. Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Btn Kantor Cabang Cikarang
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2927/SEK/OT.01.1/12/2022 19 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Persetujuan Hibah Uang pada Pengadilan Negeri Cikarang

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang
Di
Tempat

Sehubungan surat Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: W11.U23/4209/UM.01.10/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Laporan dan Permohonan Persetujuan Penerimaan Hibah berupa Uang dari PEMDA Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perma 5 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, permohonan hibah uang kami setujui;
2. Satuan kerja segera melakukan penatausahaan hibah tersebut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Melaporkan perkembangan realisasi hibah kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku pengguna anggaran c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi.

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengawasan;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
3. Bupati Bekasi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. Kepala Biro Perlengkapan.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG

Nomor	:	00136T/401915/2022	KPPN	:	(171)BEKASI
Tanggal	:	31-12-2022	Tanggal	:	31-12-2022
Satker	:	401915 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Nomor	:	221710000000026
			Tahun Anggaran	:	2022

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	0
Pendapatan	Rp.	6.000.000.000
Belanja	Rp.	4.690.000
Saldo Akhir	Rp.	5.995.310.000

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran BELANJA MODAL, Register 2KS1A39A HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UA

Kuasa Bendahara Umum Negara

Bekasi, Jawa Barat, 31 DESEMBER 2022

Kepala Seksi Pencairan Dana

Afif Efendi

NIP. 19740311 199402 1 001

790899689

Plh. Kepala Seksi Bank/Giro Pos

~~Eny Kusrini~~ Ndaru Muchtaram A

NIP. 1~~9720211 199201 2 001~~ 199002112010121002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1079-4805-2410-7507

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401915/2022

Revisi ke 09
Tanggal : 27 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(01)	Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi	:	(02)	JAWA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(401915)	PENGADILAN NEGERI CIKARANG
Sebesar	:	Rp. 10.027.733.000	(SEPULUH MILIAR DUA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	10.023.043.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	4.690.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	4.690.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B E K A S I (171) Rp. 10.027.733.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401915/2022

DS:1079-4805-2410-7507

Satker : (401915) PENGADILAN NEGERI CIKARANG

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	10.027.733.000
WA.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	8.583.529.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	1.444.204.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401915/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1079-4805-2410-7507

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode/Nama Satker : (401915) PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Program	: 005.01.WA	Program Dukungan Manajemen				10.027.733.000
Kegiatan	: 1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				8.583.529.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Perolehan Opini WTP				
	2. 02	Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara				
	3. 03	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung				
	4. 04	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan	8.583.529.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	5.000.000
	02 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	8.578.529.000
Kegiatan	: 1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				1.444.204.000
	: 1. 01	Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan				
Klasifikasi Rincian Output 2	: 1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		13,00	Unit	1.444.204.000
Rincian Output	: 01 EBB.951	Layanan Sarana Internal		9.00	Unit	1.439.514.000
	02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal		4.00	Unit	4.690.000

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.

Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP 196705221993031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401915/2022

DS:1079-4805-2410-7507

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode/Nama Satker : (401915) PENGADILAN NEGERI CIKARANG

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	10.027.733.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	10.023.043.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	4.690.000		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 4.690		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAH KABUPATE	IDR	4.690,00					
		NPHDNomor:PM.01.0	USD						
		2KS1A39A	IDR	4.690,00					
					5	4.690			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401915/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1079-4805-2410-7507

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode/Nama Satker : (401915) PENGADILAN NEGERI CIKARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401915	**PENGADILAN NEGERI CIKARANG**	**6.702.108**	**1.881.421**	**1.444.204**	**-**	**-**	**10.027.733**		
005.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**6.702.108**	**1.881.421**	**1.444.204**	**-**	**-**	**10.027.733**		
1066	**Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**	**6.702.108**	**1.881.421**	**-**	**-**	**-**	**8.583.529**		
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.08 JAWA BARAT / KAB. BEKASI)	6.702.108	1.881.421	-	-	-	8.583.529	02 . 08	
01	RM	6.702.108	1.881.421	-	-	-	8.583.529	171	
1071	**Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**	**-**	**-**	**1.444.204**	**-**	**-**	**1.444.204**		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (02.08 JAWA BARAT / KAB. BEKASI)	-	-	1.444.204	-	-	1.444.204	02 . 08	
01	RM	-	-	1.439.514	-	-	1.439.514	171	
10	HLD	-	-	4.690	-	-	4.690	171	2KS1A39A
	JUMLAH	**6.702.108**	**1.881.421**	**1.444.204**	**-**	**-**	**10.027.733**		

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP 196705221993031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401915/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1079-4805-2410-7507

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode/Nama Satker : (401915) PENGADILAN NEGERI CIKARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**401915**	**PENGADILAN NEGERI CIKARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	470.547	547.815	574.119	953.815	656.607	634.352	1.369.521	816.504	823.526	657.114	1.814.608	709.205	10.027.733
		BELANJA PEGAWAI	420.668	455.450	478.581	802.870	553.782	505.780	992.516	495.600	476.155	473.220	481.319	566.166	6.702.108
		BELANJA BARANG	49.879	92.364	95.537	150.946	102.824	128.572	361.269	320.904	148.692	183.894	108.190	138.349	1.881.421
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	15.736	0	198.679	0	1.225.099	4.690	1.444.204
	005.01.WA.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	470.547	547.815	574.119	953.815	656.607	634.352	1.353.786	816.504	624.847	657.114	589.509	704.515	8.583.529
		51 BELANJA PEGAWAI	420.668	455.450	478.581	802.870	553.782	505.780	992.516	495.600	476.155	473.220	481.319	566.166	6.702.108
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	49.879	92.364	95.537	150.946	102.824	128.572	361.269	320.904	148.692	183.894	108.190	138.349	1.881.421
	005.01.WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	0	0	15.736	0	198.679	0	1.225.099	4.690	1.444.204
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	15.736	0	198.679	0	1.225.099	4.690	1.444.204
		PERKIRAAN PENERIMAAN	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	123	1.443
		- PNBP (425131)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	123	1.443

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP 196705221993031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401915/2022
IV A. B L O K I R

DS:1079-4805-2410-7507

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [401915] PENGADILAN NEGERI CIKARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP 196705221993031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401915/2022
IV B. C A T A T A N

DS:1079-4805-2410-7507

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [401915] PENGADILAN NEGERI CIKARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
NIP 196705221993031003



NERACA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN / TUNTUTAN GANTI RUGI

TABEL KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SATKER	WILAYAH	NAMA	KUALITAS PIUTANG	NILAI KERUGIAN	ANGSURAN	SISA	PIUTANG TP/TGR	PENYISIHAN	JENIS
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	KASUS
1	PN Sumbawa Besar	NTB	I Made Subagyo W	Macet	58.227.646,78	21.975.421,00	36.252.225,78	36.252.225,78	36.252.225,78	TGR Pihak ke-III
2	PN Pandeglang	Banten	Syamsudin UP	Macet	35.000.000,00	22.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	TGR
	Jumlah				**93.227.646,78**	**44.475.421,00**	**48.752.225,78**	**48.752.225,78**	**48.752.225,78**	

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK : AKN III
ENTITAS : MAHKAMAH AGUNG
TAHUN PEMERIKSAAN : S.D TAHUN 2022

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-	-
2006	7	156.821.300,00	10	102.000.000,00	10	102.000.000,00	0	-	0	-	0	-	102.000.000,00
2007	30	1.987.903.852,50	30	545.051.826,98	22	285.298.757,35	0	-	0	-	8	259.753.069,63	285.298.757,35
2008	25	1.179.088.506,33	43	770.918.650,10	43	770.918.650,10	0	-	0	-	0	-	770.918.650,10
2009	40	3.038.087.057,41	72	679.878.497,41	71	679.878.497,41	0	-	0	-	1	-	679.878.497,41
2010	27	262.900.617,00	54	223.212.117,00	53	223.212.117,00	0	-	0	-	1	-	223.212.117,00
2011	54	3.653.976.655,88	93	2.407.310.465,36	93	2.178.440.465,36	0	-	0	-	0	228.870.000,00	2.178.440.465,36
2012	43	2.167.061.048,04	78	1.517.393.798,04	78	1.496.837.298,04	0	-	0	-	0	20.556.500,00	1.496.837.298,04
2013	67	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	109	1.813.091.023,43	0	-	0	-	0	-	1.813.091.023,43
2014	71	3.416.145.288,06	144	2.441.023.459,62	143	1.936.047.709,62	0	-	0	-	1	504.975.750,00	1.936.047.709,62
2015	25	8.214.492.976,92	72	7.357.200.084,30	72	7.172.355.990,99	0	-	0	-	0	184.844.093,31	7.172.355.990,99
2016	27	5.262.286.278,77	97	4.838.353.457,77	97	4.838.353.457,77	0	-	0	-	0	-	4.838.353.457,77
2017	33	8.006.124.606,67	91	7.061.976.186,19	91	5.617.136.771,07	0	-	0	-	0	1.444.839.415,12	5.617.136.771,07
2018	59	3.909.863.007,00	158	3.480.250.657,00	158	3.480.250.657,00	0	-	0	-	0	-	3.480.250.657,00
2019	35	2.120.302.977,86	110	1.588.924.414,86	110	1.588.924.414,86	0	-	0	-	0	-	1.588.924.414,86
2020	27	1.610.670.108,00	72	1.013.502.250,00	72	1.013.502.250,00	0	-	0	-	0	-	1.013.502.250,00
2021	86	5.274.816.676,00	298	3.122.716.846,00	298	3.069.458.476,00	0	-	0	-	0	-	2.038.330.221,00
2022	21	3.904.851.871,57	70	1.927.296.587,01	69	1.654.560.701,00	1	267.102.348,14	0	-	0	-	1.977.555.284,56
Jumlah	**683**	**55.978.483.851,44**	**1.607**	**40.890.100.321,07**	**1.595**	**37.920.267.237,00**	**1**	**267.102.348,14**	**0**	**-**	**11**	**2.643.838.828,06**	**37.212.133.565,56**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
AUDITORAT III.A
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS KERUGIAN NEGARA
PADA
MAHKAMAH AGUNG
DI
JAKARTA
POSISI TAHUN 2003 S.D TAHUN 2022

No	Status Penyelesaian	Jumlah Kerugian		Pembayaran								Keterangan
				Angsuran		Selesai (Lunas)		Pembebasan		Sisa		
		Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	
A	**SUDAH PENETAPAN**											
1	TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950	-	-	3	303.824.891	1	810.422.059	-	-	
2	TGR NON BENDAHARA	253	3.113.789.047	3	52.929.228	250	2.806.859.819	1	241.500.000	1	12.500.000	
3	PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH A	**257**	**4.228.035.997**	**3**	**52.929.228**	**253**	**3.110.684.710**	**2**	**1.051.922.059**	**1**	**12.500.000**	
B	**PROSES PENETAPAN**											
1	TGR BENDAHARA	1	22.772.000	1	-	-	-	-	22.772.000	1	-	
2	TGR NON BENDAHARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH B	**1**	**22.772.000**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.772.000**	**1**	**-**	
	JUMLAH A + B	**258**	**4.250.807.997**	**4**	**52.929.228**	**253**	**3.110.684.710**	**2**	**1.074.694.059**	**2**	**12.500.000**	
C	**INFORMASI**											
1	BPK	441	25.105.030.305	-	-	427	23.642.832.341	14	1.462.197.964	-	-	
2	APIP	16	518.543.962	1	21.975.421	15	460.316.315	-	-	1	36.252.226	
	JUMLAH C	**457**	**25.623.574.267**	**1**	**21.975.421**	**442**	**24.103.148.656**	**14**	**1.462.197.964**	**1**	**36.252.226**	
	JUMLAH A + B + C	**715**	**29.874.382.264**	**5**	**74.904.649**	**695**	**27.213.833.366**	**16**	**2.536.892.023**	**3**	**48.752.226**	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TP (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2022	Sisa per Triwulan III Tahun 2022	Kategori	Keterangan	Pembebasan
1	Dian Permadi	Eks Bendahara Rutin Ditjen Badilum	TP	1996	80.498.350	80.498.350	-	-	Lunas	BPK telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 November 2014 untuk memulihkan kasus kerugian negara a.n Dian Parnadi	-
2	M. Safi Killow	PN Tabelo	TP	2000	33.798.600	33.798.600	-	-	Lunas	-	-
3	Suharta	Dilmil Bali	TP	2006	996.450.000	996.450.000	-	-	Penghapusan Bersyarat	SK Menteri Keuangan RI No. 400/KMK.06/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara C.Q. Mahkamah Agung Atas Nama Suharta (Alm.) sebesar Rp810.422.059	810.422.059

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TP (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2022	Sisa per Triwulan III Tahun 2022	Kategori	Keterangan	Pembebasan
									Penghapusan Mutlak	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 116/KM.6/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara c.q. Mahkamah Agung Atas Nama Suharta (Alm)	
4	Rahmat Darmadi, SE	Bendahara PN Cianjur	TP	2010	3.500.000	3.500.000	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
1	Garib Hamid	Eks Staf PN Waingapu	TGR	1988	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	Lunas	-
2	Martini Soegito, SH	PN Bogor	TGR	1997	30.000.000	-	27.000.000	3.000.000	3.000.000	-	Macet	-
3	Raulina Sibuea	Pansek PT Jakarta	TGR	2000	36.500.000	-	36.500.000	-	-	-	Lunas	-
4	Suheimi	Kasubag, Umum PTUN Pekanbaru	TGR	2001	8.700.000	-	8.700.000	-	-	-	Lunas	-
5	Josep Beruat Warin, SE	PT Irian Jaya	TGR	2001	8.700.000	-	8.700.000	-	-	-	Lunas	-
6	Syamsudin UP, SH	Wakil Ketua PN Pandeglang	TGR	2002	35.000.000	-	22.500.000	12.500.000	-	12.500.000	Macet	-
7	Anak Agung Gde Kusuma Widjaja	Wakil Sekretaris PN Surabaya	TGR	2003	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	Lunas	-
8	Djatnika Wiraatmadja	PN Sukabumi	TGR	2003	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
9	Tujiya	Staf Bag. Umum PN Jakarta Timur	TGR	2000	3.800.000		3.800.000	-	-	-	Lunas	-
10	HM Yusuf Hasan	PN Lhokseumawe Banda Aceh	TGR	2001	5.000.000		5.000.000	-	-	-	Lunas	-
11	Lattan Yunus	PN Kefamenanu	TGR	2000	975.000		975.000	-	-	-	Lunas	-
12	Moh. Fajrul Umam	PA Cimahi (PA Pemalang)	TGR	2006	12.100.000		12.100.000	-	-	-	Lunas	-
13	Romli	PT Bandung	TGR	2006	12.100.000		12.100.000	-	-	-	Lunas	-
14	Suwarno	Wasek PN Jombang	TGR	2006	12.600.000		12.600.000	-	-	-	Lunas	-
15	Ahmad Syahyuti, SH, MH	Wakil Ketua PN Calang NAD	TGR	2007	13.000.000		13.000.000	-	-	-	Lunas	-
16	Neldawati	Panmud Hukum PT Sumbar	TGR	2007	8.300.000		8.300.000	-	-	-	Lunas	-
17	M. Soid, SH, MA	Wakil Panitera PN Nganjuk	TGR	2007	12.600.000		12.600.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
18	Sarbini	PN Idi	TGR	2007	10.300.000		10.300.000	-	-	-	Lancar	-
19	A. Rahman	MS. Langsa	TGR	2007	5.000.000		5.000.000	-	-	-	Lunas	-
20	Yusi Wuryaningati	Kabag Keuangan	TGR	2008	81.000.000		81.000.000	-	-	-	Lunas	-
21	Lestijono Warsito, SH	Pansek PN Wates	TGR	2008	49.000.000		49.000.000	-	-	-	Lunas	-
22	Gempa Andey Setyo	PT Banten	TGR	2008	112.000.000		112.000.000	-	-	-	Lunas	-
23	Muhtaria, SH	PA Tulang Bawang	TGR	2008	1.900.000		1.900.000	-	-	-	Lunas	-
24	Suwandi	PA Sidoarjo	TGR	2008	15.100.000		15.100.000	-	-	-	Lunas	-
25	M. Khusnul Yakin, S.Ag.	Keur Kepegawaian PA Gresik	TGR	2008	15.100.000		15.100.000	-	-	-	Lunas	-
26	Alfitri, S.Ag	PA Kotabumi (pindah PA Tanjung Pandan)	TGR	2008	12.800.000		12.800.000	-	-	-	Lunas	-
27	M. Erfan Sulistianto	Jurusita PN Sampang	TGR	2008	9.000.000		9.000.000	-	-	-	Lunas	-
28	Drs. M. Yusuf Usman, SH	PT Banda Aceh	TGR	2008	10.600.000		10.600.000	-	-	-	Lunas	-
29	Minhad	PA Temanggung	TGR	2008	10.700.000		10.700.000	-	-	-	Lunas	-
30	Moch. Mansyur, SH	Pensiunan Wasek PN Malang	TGR	2008	19.500.000		19.500.000	-	-	-	Lunas	-
31	Sadat Prayudi, SH	Kaur Kepegawaian PN Baturaja	TGR	2008	8.900.000		8.900.000	-	-	-	Lunas	-
32	Dalim Tata, SH	PHI Jawa Barat	TGR	2008	14.900.000		14.900.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
33	Retno Purwandari Y., SH.	Ketua PN Menggala/Hakim PN Timur (PN Semarang)	TGR	2008	13.800.000		13.800.000	-	-	-	Lunas	-
34	Nana Rusmana, SH	PN Bale Bandung	TGR	2008	14.300.000		14.300.000	-	-	-	Lunas	-
35	Bambang Budi Setiawan	Wakil Panitera PN Gresik	TGR	2008	15.100.000		15.100.000	-	-	-	Lunas	-
36	Maulana Sudharto, SH	PN Medan	TGR	2008	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
37	Mulyadi Syahputra	PN Medan	TGR	2008	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
38	Zainal Arifin	Jurusita Pengganti PA Tangerang	TGR	2009	13.100.000		13.100.000	-	-	-	Lunas	-
39	Nur Alam	Kabag Keuangan Kepaniteraan MA	TGR	2009	81.000.000		81.000.000	-	-	-	Lunas	-
40	Debbi Aguma	Kepaniteraan	TGR	2009	104.000.000		104.000.000	-	-	-	Lunas	-
41	Endang Ridwan, S.Ag	Wakil Panitera PA Depok	TGR	2009	14.300.000		14.300.000	-	-	-	Lunas	-
42	Suparno	Kabag, Umum PTUN Jakarta (meninggal dunia, Taspen belum turun)	TGR	2009	18.800.000		18.800.000	-	-	-	Lunas	-
43	Ali Mustofa, SH	Panmud Gugatan PA Jaktim	TGR	2009	14.500.000		14.500.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
44	AK Bagus Indaryanto, SH	PN Curup	TGR	2009	8.800.000		8.800.000	-	-	-	Lunas	-
45	Fikri Hi Ansawi Amiruddin, S.Ag	PTA Gorontalo	TGR	2009	3.950.000		3.950.000	-	-	-	Lunas	-
46	Wagiah Astuti, SH	PT banda Aceh/PT Pekanbaru	TGR	2009	-		-	-	-	-	Sudah diganti barang sesuai BAST tgl 20 Nov 2012	-
47	Sri Widyastuti	Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi MA	TGR	2010	81.000.000		81.000.000	-	-	-	Lunas	-
48	Amir Basuki	Ditjen Badilum	TGR	2010	13.500.000		13.500.000	-	-	-	Lunas	-
49	Sumaryati, SH	Wasek PA Cibinong mutasi ke PA Bogor	TGR	2010	17.500.000		17.500.000	-	-	-	Lunas	-
50	Dicky Mulyawan, A.Md	PA Cibinong	TGR	2010	17.500.000		17.500.000	-	-	-	Lunas	-
51	Asep Soma Hidayat	PN Cibadak	TGR	2010	11.100.000		11.100.000	-	-	-	Lunas	-
52	Ike Wijayanto,SH	PN Bandung	TGR	2010	13.400.000		13.400.000	-	-	-	Lunas	-
53	Deny Setha Iskandar, S.Komp	Kasubag Pengembangan Sistem Aplikasi (Biro Hukum dan Humas BUA)	TGR	2010	9.500.000		9.500.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
54	Masrinedi, SH	PA Painan Panmud Hukum	TGR	2010	11.467.500		11.467.500	-	-	-	Lunas	-
55	Drs. Abdul Fatah	Ketua PA Rangkasbitung	TGR	2010	37.000.000		37.000.000	-	-	-	Lunas	-
56	Namawi, SH, MH		TGR	2010	2.000.000		2.000.000	-	-	-	Lunas	-
57	Drs. Nawawi	PA Baturaja (mutasi PTA Palembang)	TGR	2010	14.500.000		14.500.000	-	-	-	Lunas	-
58	Ishak Lanap, SH. (Ketua)	PTUN. Palangkaraya	TGR	2010	7.000.000		7.000.000	-	-	-	Lunas	-
59	Harmi Jaya, SH	Panmud Pidana PN Solok	TGR	2010	14.555.000		14.555.000	-	-	-	Lunas	-
60	Salpadin, SH	PN Palalawan	TGR	2010	8.800.000		8.800.000	-	-	-	Lunas	-
61	Yan Bonari Simanjuntak, SH, MH	PN Depok	TGR	2010	11.000.000		11.000.000	-	-	-	Lunas	-
62	M. Adir, SH	PN Tebo	TGR	2010	10.600.000		10.600.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
63	Moh. Muhyidin, SH		TGR	2010	-		-	-	-	-	Surat Panitera/Sekretaris PA Sidoarjo no. W13-A16/918/KS.01.5/IX/2011 tgl 15 Mar 2011 kepada PTA Surabaya tentang laporan kehilangan barang Surat pernyataan kesanggupan ybs mengganti kehilangan inventaris hingga akhir semester II 2011 Berita Acara serah terima barang Nomor:W13-A30/PL.07/681/VI/2012 tgl 28 Juni 2012 penggantian barang	-
64	Sima Sitepu	Pansek PTUN. Medan	TGR	2010	3.505.000		3.505.000	-	-	-	Lunas	-
65	Erly Suhermanto	Hakim PTUN. Medan	TGR	2010	8.835.500		8.835.500	-	-	-	Lunas	-
66	Damailiza, S.Ag.	PA. Baturaja (Wasek)	TGR	2011	9.800.000		9.800.000	-	-	-	Lunas	-
67	Lasmiati, SH.	PTUN. Jambi	TGR	2011	11.600.000		11.600.000	-	-	-	Lunas	-
68	Elvy Farida Saragih, SH	PN Simalungun	TGR	2011	11.100.000		11.100.000	-	-	-	Lunas	-
69	Moh. Iqbal Yunus	PN Jakarta Pusat	TGR	2011	19.400.000		19.400.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
70	Syafrudin, SH	Panitera Pengganti PN Tanjungkarang	TGR	2011	13.500.000		13.500.000	-	-	-	Lunas	-
71	Illiyan	Ditjen Badilag	TGR	2011	11.900.000		11.900.000	-	-	-	Lunas	-
72	Syaiful Akhyar, SH	PT Medan	TGR	2011	11.100.000		11.100.000	-	-	-	Lunas	-
73	Kamal Abdul Naser, SH	Wakil Panitera PN Bengkulu	TGR	2011	14.100.000		14.100.000	-	-	-	Lunas	-
74	Azhar	PN Kisaran	TGR	2011	13.200.000		13.200.000	-	-	-	Lunas	-
75	H.Zainuddin	PA.Malang	TGR	2011	8.003.526		8.003.526	-	-	-	Lunas	-
76	Yunita Eka Widyasari	PA.Malang	TGR	2011	8.089.800		8.089.800	-	-	-	Lunas	-
77	IGB Karyadi, SH	PTA Mataram	TGR	2012	12.200.000		12.200.000	-	-	-	Lunas	-
78	Zahri,Sm.Hk	PT Banda Aceh	TGR	2012	-		-	-	-	-	SKTJM tgl 9 Agt 2012 Sudah diganti barang sesuai BAST tgl 4 Oktober 2012	-
79	Iin Agustinara Dariatmi, SE	PA Balikpapan	TGR	2012	11.400.000		11.400.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
80	Kusnadi, SH	PA Rembang	TGR	2012	10.800.000		10.800.000	-	-	-	Lunas	-
81	Tri Diana Widowati, SH., M.Pd.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	TGR	2012	27.419.340		27.419.340	-	-	-	Lunas	-
82	Haryanti, SH.	Kepala Sub Bagian Umum	TGR	2012	12.800.000		12.800.000	-	-	-	Lunas	-
83	Luktiono, SH	PN Palembang (JSP)	TGR	2012	12.600.000		12.600.000	-	-	-	Lunas	-
84	Nurlaili, SH (Kasubbag Umum)	PTA Bengkulu	TGR	2012	11.400.000		11.400.000	-	-	-	Lunas	-
85	Sopian Badruzaman, SH (Kaur Kepeg.)	PN Pandeglang	TGR	2012	9.500.000		9.500.000	-	-	-	Lunas	-
86	Pamah, SH	PN Kabanjahe	TGR	2012	10.700.000		10.700.000	-	-	-	Lunas	-
87	Firdaus, SH (Wapan)	Wapan MS Tapaktuan	TGR	2012	12.500.000		12.500.000	-	-	-	Lunas	-
88	Yudo Ari Kasdaroyo/Sukarman	Staf Dilmil II-08 Jakarta	TGR	2012	14.200.000		14.200.000	-	-	-	Lunas	-
89	Rahma Karo - Karo	PT. TUN Medan	TGR	2012	12.200.000		12.200.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
90	Moch Hari Siswanto, SH	PN Probolinggo	TGR	2013	15.300.000		15.300.000	-	-	-	Lunas	-
91	Bambang Riswoyo, SH	PN Probolinggo	TGR	2013	13.500.000		13.500.000	-	-	-	Lunas	-
92	M. Yamin, SH	Wakil Panitera PN Liwa	TGR	2013	14.000.000		14.000.000	-	-	-	Lunas	-
93	Ismail	PN Jambi	TGR	2013	5.000.000		5.000.000	-	-	-	Lunas	-
94	Muksin, S.Ag	PA Sambas	TGR	2013	12.600.000		12.600.000	-	-	-	Lunas	-
95	Antin Rukmiyati, SH	PA Sambas	TGR	2013	11.700.000		11.700.000	-	-	-	Lunas	-
96	Drs. Masduki	PA Kotabaru	TGR	2013	2.205.000		2.205.000	-	-	-	Lunas	-
97	Roby Hidayat, ST	PN Rokan Hilir	TGR	2013	12.000.000		12.000.000	-	-	-	Lunas	-
98	Achmad Sodikin	Wapan PA Cibinong	TGR	2013	13.800.000		13.800.000	-	-	-	Lunas	-
99	Sunu Wilardi	Staf Pidana PN Cirebon	TGR	2013	14.200.000		14.200.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
100	Shodiqin	PP PA Bekasi pindah ke PA Cikarang	TGR	2013	13.800.000		13.800.000	-	-	-	Lunas	-
101	Mohan Ayusta Wijaya, SH	PN Malang	TGR	2013	13.300.000		13.300.000	-	-	-	Lunas	-
102	Tri Djoko Indarno	PN Pemalang	TGR	2013	6.235.400		6.235.400	-	-	-	Lunas	-
103	Gatot Supriyanto	PTUN Pekan Baru	TGR	2013	10.094.000		10.094.000	-	-	-	Lunas	-
104	H. Said Ali Gunadi, SH	PN Bangkalan	TGR	2013	11.900.000		11.900.000	-	-	-	Lunas	-
105	Drs. Muh. Ashar, SH, MM	Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI	TGR	2013	138.000.000		138.000.000	-	-	-	Lunas	-
106	Udin Ramdan	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim BUA MARI	TGR	2013	9.200.000		9.200.000	-	-	-	Lunas	-
107	Titirtololobi Alfaris	PT Ambon	TGR	2013	15.774.000		15.774.000	-	-	-	Lunas	-
108	Drs. Harun Al Rasyid	Pansek PA Cibinong (ex. Pansek PA Bogor)	TGR	2013	14.200.000		14.200.000	-	-	-	Lunas	-
109	Drs. H. Arifin Muhammad, SH	Waka PA Bengkayang	TGR	2013	12.300.000		12.300.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
110	Muhdi Kolil	PA Kangean	TGR	2013	12.500.000		12.500.000	-	-	-	Lunas	-
111	Tiomina Simanjuntak	PN Palangkaraya	TGR	2013	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
112	Demi Hadiantoro, SH.	Hakim PN. Raba Bima pindah ke PN. Madiun	TGR	2013	1.250.000		1.250.000	-	-	-	Lunas	-
113	Rahmat Supli	Wakil Pansek PA Palembang	TGR	2014	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
114	Mashuri ,S.Ag	PA.Kab. Madiun	TGR	2014	3.100.000		3.100.000	-	-	-	Lunas	-
115	Maria Nuraeni	PN. Surabaya	TGR	2014	11.000.000		11.000.000	-	-	-	Lunas	-
116	Ismet Wairoy	PN Fak-fak	TGR	2014	1.700.000		1.700.000	-	-	-	Lunas	-
117	Jacob Hindom	PN. Fak Fak	TGR	2014	4.700.000		4.700.000	-	-	-	Lunas	-
118	Hj.Hanifah Abdul Karim	PA.Sorong	TGR	2014	800.000		800.000	-	-	-	Lunas	-
119	Hj.Hanifah Abdul Karim	PA.Sorong	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
120	Efendi Siregar	PT Aceh	TGR	2014	10.070.000		10.070.000	-	-	-	Lunas	-
121	Edy Nasution	PN.Medan	TGR	2014	10.700.000		10.700.000	-	-	-	Lunas	-
122	Masni Singgaling	PT Medan	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
123	Ma'munu Heriyanto	PA.Purwokerto	TGR	2014	10.400.000		10.400.000	-	-	-	Lunas	-
124	Suwondo	PA. Sampit	TGR	2014	10.300.000		10.300.000	-	-	-	Lunas	-
125	Junior Sam Rambe, SH	PN. Medan	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
126	Faesol Hasbi, SE, SH	PA.Bondowoso	TGR	2014	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
127	Robert Sihaan, SH,MH	PN Indramayu mutasi ke PN Jakarta Pusat	TGR	2014	12.800.000		12.800.000	-	-	-	Lunas	-
128	Ari Widodo	PN Sumedang	TGR	2014	2.000.000		2.000.000	-	-	-	Lunas	-
129	Denny Suherlan, SH	PN Cianjur	TGR	2014	15.000.000		15.000.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
130	Hasyim Utina	PA Sentani	TGR	2014	-		-	-	-	-	SKTJM tgl 20 Mei 2014 Diganti dengan barang yang sama (Laptop) sesuai BAST Penggantian Barang tgl 20 Mei 2014.	-
131	Nurdiana	PA Sentani	TGR	2014	-		-	-	-	-	SKTJM tgl 20 Mei 2014 Diganti dengan barang yang sama (Laptop) sesuai BAST Penggantian Barang tgl 20 Mei 2014.	-
132	Kokoh Mukaedi, SH	PN Kendal	TGR	2014	11.300.000		11.300.000	-	-	-	Lunas	-
133	Syan'yansyah	PA Metro	TGR	2014	3.600.000		3.600.000	-	-	-	Lunas	-
134	Fathul Mubin Nurmusa	PA Poso	TGR	2014	6.500.000		6.500.000	-	-	-	Lunas	-
135	Drs. H. Ramzul Faiyad	PA Sekayu	TGR	2014	9.900.000		9.900.000	-	-	-	Lunas	-
136	Nurhairani, SH	PN Medan	TGR	2014	10.700.000		10.700.000	-	-	-	Lunas	-
137	Masni, SH	PT Palangkaraya	TGR	2014	6.500.000		6.500.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
138	Nur Alam	Badan Urusan Administras	TGR	2014	5.600.000		5.600.000	-	-	-	Lunas	-
139	Bambang Sukriyanto	Badan Urusan Administras	TGR	2014	414.053.250		414.053.250	-	-	-	Status 4 telah diterima	241.500.000
140	Syafri	PA Curup	TGR	2014	8.200.000		8.200.000	-	-	-	Lunas	-
141	Jasdar	Dimilti III Surabaya	TGR	2014	10.600.000		10.600.000	-	-	-	Lunas	-
142	M Rasyid	PN Sigli pindah ke PT Banda Aceh	TGR	2014	9.700.000		9.700.000	-	-	-	Lunas	-
143	Bakir Fuadi	PA Rengat	TGR	2014	4.600.000		4.600.000	-	-	-	Lunas	-
144	Abd Hamid	PA Rengat	TGR	2014	3.750.000		3.750.000	-	-	-	Lunas	-
145	Syahril J	PA Rengat	TGR	2014	3.250.000		3.250.000	-	-	-	Lunas	-
146	Drs. H.Syamsuddin, SH, MH	PA Lumajang	TGR	2014	8.500.000		8.500.000	-	-	-	Lunas	-
147	Sutadji	PA Bangil	TGR	2014	250.000		250.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
148	Drs. Muhamad Solikhan	PA Bangil	TGR	2014	2.100.000		2.100.000	-	-	-	Lunas	-
149	Abdul Kodir, S.Ag	PA Bangil	TGR	2014	3.650.000		3.650.000	-	-	-	Lunas	-
150	Andika Ricaldo,SE	PN Ranai-Kepulauan Riau	TGR	2014	5.000.000		5.000.000	-	-	-	Lunas	-
151	Arifin Sani	PT Maluku Utara	TGR	2014	6.500.000		6.500.000	-	-	-	Lunas	-
152	Wurhandono	PA Depok pindah PA Bekasi	TGR	2014	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
153	Siti Aspiyah	PA Kediri	TGR	2014	9.750.000		9.750.000	-	-	-	Lunas	-
154	Moch. Afif Afandi	PA Bangli	TGR	2014	450.000		450.000	-	-	-	Lunas	-
155	Sutrisno Setio Utomo	Pengadilan Militer I-02 Medan	TGR	2014	8.000.000		8.000.000	-	-	-	Lunas	-
156	Tje Tjep Hidayat	PN Sukabumi	TGR	2014	10.000.000		10.000.000	-	-	-	Lunas	-
157	Ganda Mana,SH,MH	PT Tanjung Karang-Lampung	TGR	2014	14.200.000		14.200.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
158	Jumadi, SH	PN. Pangkalan Bun	TGR	2014	3.500.000		3.500.000	-	-	-	Lunas	-
159	Uwes Amir Abubakar	PA Limboto-Gorontalo	TGR	2014	38.847.744		38.847.744	-	-	-	Lunas	-
160	Dra. Mardhiyah M. Hasan, MH	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
161	Elis F. Jon	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	-
162	Listya Rahma, A.Md	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	-
163	Yuskal Efendi	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	-
164	Salman	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	4.000.000		4.000.000	-	-	-	Lunas	-
165	Dra. Hj. Asmidar	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	4.000.000		4.000.000	-	-	-	Lunas	-
166	Firdaus, SH	PA Padang Panjang-Sumatera Barat	TGR	2014	2.050.000		2.050.000	-	-	-	Lunas	-
167	Drs. H.R.A Satibi, S.H., M.H	PA Cianjur-Jawa Barat	TGR	2014	4.000.000		4.000.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
168	Asep Nurdiansyah, S.H.	PA Dumai-Riau	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
169	Zulfadli,S.HI	PA Dumai-Riau	TGR	2014	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
170	Petrus Mitting, SH	PTUN Jayapura	TGR	2015	4.100.000		4.100.000	-	-	-	Lunas	-
171	Aser Libong, SH	PN Balige	TGR	2015	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	-
172	Supriono, SH	PN Tanjung Balai-Sumatera Utara	TGR	2015	8.000.000		8.000.000	-	-	-	Lunas	-
173	Ghufron, SH	PA Jepara	TGR	2015	8.000.000		8.000.000	-	-	-	Lunas	-
174	Dicky Royano Sugianto	PTUN Pekanbaru	TGR	2015	5.700.000		5.700.000	-	-	-	Lunas	-
175	M. Rofiq	PT Jayapura - Papua	TGR	2015	4.958.177		4.958.177	-	-	-	Lunas	-
176	Ventje R. E. Sumual	PTUN Jayapura - Papua	TGR	2015	14.950.000		14.950.000	-	-	-	Lunas	-
177	Besse Marwiyawati, SH	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
178	Syarifuddin Rauf, SH	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
179	Ambo Andi Manggaukang, SH	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
180	Irman Imran	PN Makassar - Sulawesi	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
181	Muchtar Made	PA Polewali - Sulawesi Barat	TGR	2015	800.000		800.000	-	-	-	Lunas	-
182	Fahruddin	PTA Jakarta - DKI Jakarta	TGR	2015	6.700.000		6.700.000	-	-	-	Lunas	-
183	Ahmad Letondot Basarin, SH	PN Kayuagung Sumatera Selatan	TGR	2015	6.454.536		6.454.536	-	-	-	Lunas	-
184	Jimmy Oktavianus, A. Md	PN Muara Enim Sumatera Selatan	TGR	2015	3.500.000		3.500.000	-	-	-	Lunas	-
185	M. Edy, SH	PN Tubei Bengkulu	TGR	2015	10.950.000		10.950.000	-	-	-	Lunas	-
186	Chairul Sutrisno Sama'a, SH, CN, MM	PN Pontianak - Kalimantan Barat	TGR	2015	2.100.000		2.100.000	-	-	-	Lunas	-
187	Hasahatan Sormin	PN Lubuk Linggau	TGR	2015	7.700.000		7.700.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
188	Zaenal Hasan	PTA Bandung	TGR	2015	7.250.000		7.250.000	-	-	-	Lunas	-
189	Ramadhani, SH	PM II-09 Bandung	TGR	2015	7.800.000		7.800.000	-	-	-	Lunas	-
190	Ahyan Azis	PN Metro	TGR	2015	12.000.000		12.000.000	-	-	-	Lunas	-
191	Huzairin	PN Sekayu	TGR	2015	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
192	Drs. M.G Zulzamar, SH,MHI	PA Sukabumi	TGR	2016	9.500.000		9.500.000	-	-	-	Lunas	-
193	Sulaimansyah	PN. Pekanbaru	TGR	2016	6.504.000		6.504.000	-	-	-	Lunas	-
194	Gusneti	PTUN Pekanbaru	TGR	2016	2.000.000		2.000.000	-	-	-	Lunas	-
195	Aas Sadiah	PA Cianjur	TGR	2016	3.000.000		3.000.000	-	-	-	Lunas	-
196	Suparta	PT Banten	TGR	2016	4.800.000		4.800.000	-	-	-	Lunas	-
197	Osdin Sidauruk, S.H.	PN Binjai	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
198	Muhammad Salahuddin, S.H	PN Bima	TGR	2016	7.250.000		7.250.000	-	-	-	Lunas	-
199	Syahbuddin Saleh, S.H	PN Dompu	TGR	2016	7.250.000		7.250.000	-	-	-	Lunas	-
200	Lalu Munir, S.H	PA Taliwang	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	Lunas	-
201	Safiudin	PA Probolinggo	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	Lunas	-
202	Raden Asnawi,S.H	PN Tebo	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	Lunas	-
203	Aswirman	PTUN Pekanbaru-Riau	TGR	2016	27.357.130		27.357.130	-	-	-	Lunas	-
204	Lalu Ruslan	PA Gianyar	TGR	2016	7.000.000		7.000.000	-	-	-	Lunas	-
205	Yudistira Adi Pinto, SE	PTA JAMBI	TGR	2017	2.800.000		2.800.000	-	-	-	Lunas	-
206	Upy Supriyatna, ST	PN Dompu	TGR	2017	2.800.000		2.800.000	-	-	-	Lunas	-
207	Sapiudin, SH	PA Mataram	TGR	2017	2.200.000		2.200.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
208	Alimin Hafizi,SH	PA Mataram	TGR	2017	2.200.000		2.200.000	-	-	-	Lunas	-
209	Drs. Ahmad, SH.MH	PA Giri Menang	TGR	2017	2.300.000		2.300.000	-	-	-	Lunas	-
210	H. Suhaeli, S.Ag	PA Giri Menang	TGR	2017	2.100.000		2.100.000	-	-	-	Lunas	-
211	Abdul Gafur, A.Md	PA Giri Menang	TGR	2017	5.500.000		5.500.000	-	-	-	Lunas	-
212	M. Fauzi, SE	PA Giri Menang	TGR	2017	5.500.000		5.500.000	-	-	-	Lunas	-
213	Drs. H. Djahidin	PA Sungai Penuh	TGR	2017	6.000.000		6.000.000	-	-	-	Lunas	-
214	Adi	PA Tuban	TGR	2017	7.200.000		7.200.000	-	-	-	Lunas	-
215	Dwie Irianto	PN Lamongan	TGR	2017	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	-
216	Muhammad Arif	PA Kotamobagu	TGR	2017	2.000.000		2.000.000	-	-	-	Lunas	-
217	Irdiansyah	PN Blangkajeren	TGR	2017	2.700.000		2.700.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
218	Sukeni, S.H.	PA Kudus	TGR	2017	500.000		500.000	-	-	-	Lunas	-
219	Leli Suhendri, S.H.	PN. Binjai	TGR	2017	3.100.000		3.100.000	-	-	-	Lunas	-
220	Hj. Erni Mutiara	PA. Batusangkar-PA. Bukittinggi	TGR	2017	3.200.000		3.200.000	-	-	-	Lunas	-
221	Hj. Atmiyarti	PA. Batusangkar-PA. Bukittinggi	TGR	2017	3.200.000		3.200.000	-	-	-	Lunas	-
222	Yan Mamary	PN Sorong	TGR	2017	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	-
223	Thomas P. Amena	PN Sorong	TGR	2017	2.000.000		2.000.000	-	-	-	Lunas	-
224	Mawardi	Bawas-Instansi Pusat	TGR	2018	3.210.144		3.210.144	-	-	-	Lunas	-
225	Asep Miftahudin	PN Ciamis	TGR	2018	3.800.000		3.800.000	-	-	-	Lunas	-
226	Ageng Suyanto, S.H.	MILTI - I Medan	TGR	2018	3.650.000		3.650.000	-	-	-	Lunas	-
227	Habiburrohman, S.H.	DILMIL III - 19-Papua	TGR	2018	8.100.000		8.100.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
228	H.M Ali Lutfi, SH.M.Hun	PA Ambarawa	TGR	2018	7.200.000		7.200.000	-	-	-	Lunas	-
229	T Jansen ST, MT	PT Medan	TGR	2018	2.000.000		2.000.000	-	-	-	Lunas	-
230	Steven Puturuhu, SE	PTUN Ambon	TGR	2018	2.600.000		2.600.000	-	-	-	Lunas	-
231	M. Usman R	PN Lhok Sukon	TGR	2018	2.700.000		2.700.000	-	-	-	Lunas	-
232	Reza Pahlipi	MILTI - I Medan	TGR	2018	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
233	H. Harmi Jaya, SH	PN Rokan Hilir	TGR	2019	6.500.000		6.500.000	-	-	-	Lunas	-
234	Irwan Sibarani	PN Pematang Siantar	TGR	2019	4.000.000		4.000.000	-	-	-	Lunas	-
235	Debie Rusdiansyah, S.H.	PN Curup	TGR	2019	5.000.000		5.000.000	-	-	-	Lunas	-
236	Sunita Br. Barus	PN Kabanjahe	TGR	2019	3.000.000		3.000.000	-	-	-	Lunas	-
237	Imanuel Mouw, SH	PTUN Jayapura	TGR	2019	3.000.000		3.000.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
238	Megawati, S.H., M.H.	PTA. Bengkulu	TGR	2019	4.000.000		4.000.000	-	-	-	Lunas	-
239	Hasan, S.H.	PT Jayapura	TGR	2020	5.500.000		5.500.000	-	-	-	Lunas	-
240	Muhammad Nur	PN Biereun	TGR	2020	2.800.000		2.800.000	-	-	-	Lunas	-
241	Ardiansyah Rusdin	PA Andoolo	TGR	2020	1.800.000		1.800.000	-	-	-	Lunas	-
242	Teuku Fachrurrazi, SH, MH	PN Lhokseumawe	TGR	2020	1.800.000		1.800.000	-	-	-	Lunas	-
243	Widodo Arif Wicaksono, S.Kom, SH	PTA Semarang	TGR	2021	24.000.000		24.000.000	-	-	-	Lunas	-
244	Ruben Harlen Panjaitan	PN Simalungun	TGR	2021	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
245	R. Aji Suryo	PN Stabat	TGR	2021	2.500.000		2.500.000	-	-	-	Lunas	-
246	Posma Tumangger	PN Sidikalang	TGR	2021	2.400.000		2.400.000	-	-	-	Lunas	-
247	Muhammad Ihsan Fauzi	PA Bandung	TGR	2021	66.300.000		66.300.000	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TGR (STATUS SUDAH PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan IV Tahun 2022	Sisa per Triwulan IV Tahun 2022	Kategori	Pembebasan
248	Sahruri	PN Sekayu	TGR	2021	350.000		350.000	-	-	-	Lunas	-
249	Dudun Achmad Mauludin	PA Tasikmalaya	TGR 2022	2022	5.000.000		-	-	5.000.000	-	Lunas	-
250	Desideria Meivania Waruwu, S.H.	PN Muara Bulian	TGR 2022	2022	5.000.000		-	-	5.000.000	-	Lunas	-
251	Ni Wayan Dhika Rulia, S.E.,M.H.	PA Balikpapan	TGR 2022	1976, 1980, 1977	875.000		-	-	875.000	-	Lunas	-
252	Tedy Markopolo, S.H.	Dilmilti I Medan	TGR 2022	2008	2.500.000		-	-	2.500.000	-	Lunas	-
253	Darahim, S.Ag	PA Palopo	TGR 2022	2013	200.000		-	-	200.000	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

TP (PROSES PENETAPAN)

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2022	Sisa per Triwulan III Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
1	Rohmawati	PA Pekalongan	TP	2011	22.772.000		22.772.000	-	-	-	Kasus telah selesai dengan mengganti uang persediaan yang dihilangkan (Status 4)	Lunas	22.772.000

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

INFORMASI APIP

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2022	Sisa per Triwulan III Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
1	I Made Subagio Wiryo	PN Sumbawa Besar	TGR	2007	58.227.647		21.975.421	36.252.226	-	36.252.226	-	Macet	
2	Putu Dalton, SH	PT Mataram	TGR	2009	37.017.000		37.017.000	-	-	-	-	Lunas	-
3	Rahalim	PN Lubuk	TGR	2009	43.790.954		43.790.954	-	-	-	-	Lunas	-
4	Aco Nur dkk	BUA	TGR	2016	31.651.392		31.651.392	-	-	-	-	Lunas	-
5	Abdul Hamid dkk.	Ditjen. Badilag	TGR	2016	135.305.114		135.305.114	-	-	-	-	Lunas	-
6	Aco Nur dkk	BUA	TGR	2016	853.400		853.400	-	-	-	-	Lunas	-
7	Agus Santosa dkk	Ditjen. Badilag	TGR	2016	4.693.400		4.693.400	-	-	-	-	Lunas	-
8	Auto dkk.	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	73.150.000		73.150.000	-	-	-	Review Bawas diterima	Review Bawas diterima	
9	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2016	5.617.000		5.617.000	-	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 SEPTEMBER 2022

INFORMASI APIP

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Triwulan III Tahun 2022	Sisa per Triwulan III Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
10	Ditjen. Badilag	Ditjen. Badilag	TGR	2016	6.346.900		6.346.900	-	-	-	-	Lunas	-
11	PT BMG		TGR	2016	9.840.000		9.840.000	-	-	-	-	Lunas	-
12	PT VI		TGR	2016	11.709.155		11.709.155	-	-	-	-	Lunas	-
13	PT BBU		TGR	2016	34.062.000		34.062.000	-	-	-	-	Lunas	-
14	PT LD		TGR	2016	6.410.000		6.410.000	-	-	-	-	Lunas	-
15	PT La'M		TGR	2016	57.005.000		57.005.000	-	-	-	-	Lunas	-
16	CV PEK		TGR	2016	2.865.000		2.865.000	-	-	-	-	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
1	Hakim ad hoc Tipikor MA Pusat	MA	TGR	2005	102.000.000		102.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
2	7 rekanan angkutan	MA	TGR	2005	148.460.652		148.460.652	-	-	-	Lunas	Lunas	-
3	PT Wahyu Warga Mandiri / Ditjen Badilum	Ditjen. Badilum	TGR	2009	15.846.880		15.846.880	-	-	-	Lunas	Lunas	-
4	PT Yasmina Pilar Utama / Biro Umum BUA	BUA	TGR	2010	45.474.402		45.474.402	-	-	-	Lunas	Lunas	-
5	PT SJ / BUA MA	PT SJ / BUA MA	TGR	2010			-	-	-	-	Lunas	Lunas	
6	Hakim Agung (MA)	Kepaniteraan	TGR	2010			-	-	-	-	Lunas	Lunas	
7	PT BDM	BUA	TGR	2010			-	-	-	-	Lunas	Lunas	
8	PT MCBP / BUA MA	BUA	TGR	2010			-	-	-	-	Lunas	Lunas	
9	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2010			-	-	-	-	Lunas	Lunas	
10	PT Sadar Dinamis / PA Tasikmalaya	PA Tasikmalaya	TGR	2010	52.918.149		52.918.149	-	-	-	Lunas	Lunas	-
11	PT Nugraha Adi Taruna / PN Ciamis	PN Ciamis	TGR	2010	17.519.453		17.519.453	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
12	PT Gelora Intan Reksa / Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-09 Bandung	TGR	2010	38.332.022		38.332.022	-	-	-	Lunas	Lunas	-
13	PT Gelora Intan Reksa / Dilmil II-09 Bandung	Dilmil II-09 Bandung	TGR	2010	12.273.910		12.273.910	-	-	-	Lunas	Lunas	-
14	PT Ciptapola Kharisma / PTUN Surabaya	PTUN Surabaya	TGR	2010	25.827.471		25.827.471	-	-	-	Lunas	Lunas	-
15	PT Cipta Karsa Bumi Lestari / Dilmilti III Surabaya	Dilmilti III Surabaya	TGR	2010	35.440.294		35.440.294	-	-	-	Lunas	Lunas	-
16	PT Sidoarjo Sucses Sentosa / Dilmil III-12 Surabaya	Dilmil III-12 Surabaya	TGR	2010	50.737.605		50.737.605	-	-	-	Lunas	Lunas	-
17	PT Karya Terpadu / PA Pare-Pare	PA Pare-Pare	TGR	2010	19.693.861		19.693.861	-	-	-	Lunas	Lunas	-
18	CV Lestari Indah / PA Takalar	PA Takalar	TGR	2010	2.800.000		2.800.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
19	PT Maribangun Nusantara / PA Takalar	PA Takalar	TGR	2010	59.525.468		59.525.468	-	-	-	Lunas	Lunas	-
20	CV Bumi Anugrah / PT TUN Makassar	PT TUN Makassar	TGR	2010	7.571.453		7.571.453	-	-	-	Lunas	Lunas	-
21	PT Sagita Utama Lestari / Dilmil III-16 Makassar	Dilmil III-16 Makassar	TGR	2010	17.664.088		17.664.088	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
22	CV MC / PA Binjai	PA Binjai	TGR	2010	3.740.545		3.740.545	-	-	-	Lunas	Lunas	-
23	PT PB / PA Binjai	PA Binjai	TGR	2010	15.245.175		15.245.175	-	-	-	Lunas	Lunas	-
24	PT PS / PT Medan	PT Medan	TGR	2010	56.468.272		56.468.272	-	-	-	Lunas	Lunas	-
25	CV RSA / PA Kisaran	PA Kisaran	TGR	2010	13.333.517		13.333.517	-	-	-	Lunas	Lunas	-
26	CV JMM & co / PA Kisaran	PA Kisaran	TGR	2010	26.940.818		26.940.818	-	-	-	Lunas	Lunas	-
27	PT Ikonexi Dharma / PN Jakarta Timur	PN Jakarta Timur	TGR	2010	82.543.408		82.543.408	-	-	-	Lunas	Lunas	-
28	PT Mutiara Murni Mandiri / Dilmiltama Jakarta	Dilmiltama Jakarta	TGR	2010	5.633.500		5.633.500	-	-	-	Lunas	Lunas	-
29	CV Reksa Utama / Dilmiltama Jakarta	Dilmiltama Jakarta	TGR	2010	50.982.286		50.982.286	-	-	-	Lunas	Lunas	-
30	CV Tenostarindo / Dilmil III-12 Surabaya	Dilmil III-12 Surabaya	TGR	2010	7.373.280		7.373.280	-	-	-	Lunas	Lunas	-
31	PT Amarta Karya / PN Jakarta Barat	PN Jakarta Barat	TGR	2010	87.659.100		87.659.100	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
32	PT PP Dirganeka / PN Jakarta Timur	PN Jakarta Timur	TGR	2010	355.393.220		355.393.220	-	-	-	Lunas	Lunas	-
33	CV Artindo / PTA Surabaya	PTA Surabaya	TGR	2010	6.593.304		6.593.304,00	-	-	-	Lunas	Lunas	-
34	Jak Tour / BUA MA	BUA	TGR	2010	32.921.600		32.921.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
35	PT DSH / BUA MA	BUA	TGR	2011	37.410.000		37.410.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
36	PT SBM / BUA MA	BUA	TGR	2011	49.555.584		49.555.584	-	-	-	Lunas	Lunas	-
37	PT SJ / BUA MA	BUA	TGR	2011	11.463.733		11.463.733	-	-	-	Lunas	Lunas	-
38	PT DSH / BUA MA	BUA	TGR	2011	13.806.000		13.806.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
39	CV KJA / BUA	BUA	TGR	2011	8.581.230		8.581.230	-	-	-	Lunas	Lunas	-
40	PT ABEP / BUA MA	BUA	TGR	2011	35.400.000		35.400.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
41	PT BDP / BUA MA	BUA	TGR	2011	21.289.942		21.289.942	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
42	PT MCBP / BUA MA	BUA	TGR	2011	32.241.564		32.241.564	-	-	-	Lunas	Lunas	-
43	PT GDSK / Badan Diklat Litbang Kumdil	Badan Diklat Litbang Kumdil	TGR	2011	21.937.520		21.937.520	-	-	-	Lunas	Lunas	-
44	PT LIP / Badan Diklat Litbang Kumdil	Badan Diklat Litbang Kumdil	TGR	2011	35.989.250		35.989.250	-	-	-	Lunas	Lunas	-
45	PT DI / Badan Diklat Litbang Kumdil	Badan Diklat Litbang Kumdil	TGR	2011	10.177.000		10.177.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
46	CV PSP / PN Tais	PN Tais	TGR	2011	7.960.034		7.960.034	-	-	-	Lunas	Lunas	-
47	CV B / PT Samarinda	PT Samarinda	TGR	2011	6.607.800		6.607.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-
48	CV PK (PT Banten)	PT Banten	TGR	2011	3.746.900		3.746.900	-	-	-	Lunas	Lunas	-
49	PT RC / PN Balikpapan	PN Balikpapan	TGR	2011	21.186.713		21.186.713	-	-	-	Lunas	Lunas	
50	CV KR / PN Pandeglang	PN Pandeglang	TGR	2011	35.345.300		35.345.300	-	-	-	Lunas	Lunas	
51	CV BA (PT Banten)	PT Banten	TGR	2011	8.507.700		8.507.700	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
52	PT AHP / PA Tigaraksa	PA Tigaraksa	TGR	2011	25.134.700		25.134.700	-	-	-	Lunas	Lunas	
53	CV RDU / PT Gorontalo	PT Gorontalo	TGR	2011	1.365.000		1.365.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
54	CV EB / PT Aceh	PT Aceh	TGR	2011	4.017.600		4.017.600	-	-	-	Lunas	Lunas	
55	CV A / MS Sabang	MS Sabang	TGR	2011	32.628.000		32.628.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
56	PT SW / PTUN Samarinda	PTUN Samarinda	TGR	2011	7.314.800		7.314.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-
57	CV CA / PN Kendari	PN Kendari	TGR	2011	1.450.000		1.450.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
58	CV CAP / PT Kendari	PT Kendari	TGR	2011	32.500.000		32.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
59	CV PMR / PTA Pekanbaru	PTA Pekanbaru	TGR	2011	6.821.484		6.821.484	-	-	-	Lunas	Lunas	
60	CV APM / PTA Pekanbaru	PTA Pekanbaru	TGR	2011	10.034.072		10.034.072	-	-	-	Lunas	Lunas	
61	CV CBI / PN Pekanbaru	PN Pekanbaru	TGR	2011	15.610.700		15.610.700	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
62	CV AA / PT Jambi	PT Jambi	TGR	2011	17.425.000		17.425.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
63	BUA	BUA	TGR	2011	81.507.275		81.507.275	-	-	-	Lunas	Lunas	
64	PT Banten	PT Banten	TGR	2011	3.000.000		3.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
65	PA Tigaraksa	PA Tigaraksa	TGR	2011	11.000.000		11.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
66	PA Tigaraksa	PA Tigaraksa	TGR	2011	4.030.200		4.030.200	-	-	-	Lunas	Lunas	-
67	PN Balikpapan	PN Balikpapan	TGR	2011	18.000.000		18.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
68	PN Balikpapan	PN Balikpapan	TGR	2011	31.200.000		31.200.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
69	PN Pandeglang	PN Pandeglang	TGR	2011	1.629.000		1.629.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
70	PTA Pekanbaru	PTA Pekanbaru	TGR	2011	6.500.000		6.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
71	CV PL / PT Samarinda	PT Samarinda	TGR	2011	954.545		954.545	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
72	PA Kendari (PT Hadji Kalla)	PA Kendari	TGR	2011	2.310.000		2.310.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
73	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	216.182		216.182	-	-	-	Lunas	Lunas	
74	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	1.549.113		1.549.113	-	-	-	Lunas	Lunas	
75	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	663.905		663.905	-	-	-	Lunas	Lunas	
76	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	354.365		354.365	-	-	-	Lunas	Lunas	
77	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	674.700		674.700	-	-	-	Lunas	Lunas	
78	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	433.595		433.595	-	-	-	Lunas	Lunas	
79	PA Kendari	PA Kendari	TGR	2011	954.409		954.409	-	-	-	Lunas	Lunas	
80	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2012	3.463.830		3.463.830	-	-	-	Lunas	Lunas	
81	PN Depok	PN Depok	TGR	2012	10.548.661		10.548.661	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
82	PN Depok	PN Depok	TGR	2012	6.126.250		6.126.250	-	-	-	Lunas	Lunas	
83	PA Palembang	PA Palembang	TGR	2012	19.187.887		19.187.887	-	-	-	Lunas	Lunas	
84	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	1.760.000		1.760.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
85	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	1.567.906		1.567.906	-	-	-	Lunas	Lunas	
86	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	255.000		255.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
87	PTA Padang	PTA Padang	TGR	2012	690.000		690.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
88	PT Padang	PT Padang	TGR	2012	3.318.837		3.318.837	-	-	-	Lunas	Lunas	
89	PA Pariaman	PA Pariaman	TGR	2012	560.121		560.121	-	-	-	Lunas	Lunas	-
90	PN Padang	PN Padang	TGR	2012	2.495.830		2.495.830	-	-	-	Lunas	Lunas	
91	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	821.765		821.765	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
92	PA Banjarbaru	PA Banjarbaru	TGR	2012	7.288.624		7.288.624	-	-	-	Lunas	Lunas	
93	PN Pangkal Pinang	PN Pangkal Pinang	TGR	2012	33.112.974		33.112.974	-	-	-	Lunas	Lunas	
94	PN Padang Panjang	PN Padang Panjang	TGR	2012	1.900.000		1.900.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
95	PA Sungai Liat	PA Sungai Liat	TGR	2012	3.205.980		3.205.980	-	-	-	Lunas	Lunas	
96	PA Sungai Liat	PA Sungai Liat	TGR	2012	40.847.620		40.847.620	-	-	-	Lunas	Lunas	
97	PA Banjarbaru	PA Banjarbaru	TGR	2012	3.900.000		3.900.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
98	BUA	BUA	TGR	2012	67.757.250		67.757.250	-	-	-	Lunas	Lunas	
99	PN Banjarmasin	PN Banjarmasin	TGR	2012	11.505.700		11.505.700	-	-	-	Lunas	Lunas	
100	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	1.867.500		1.867.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
101	PT Bandung	PT Bandung	TGR	2012	12.100.000		12.100.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
102	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	7.350.000		7.350.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
103	PN Padang Panjang	PN Padang Panjang	TGR	2012	49.500		49.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
104	PA Sungai Liat	PA Sungai Liat	TGR	2012	-		-	-	-	-	Lunas	Lunas	
105	PA Pangkal Pinang - Notebook	PA Pangkal Pinang - Notebook	TGR	2012	21.455.000		21.455.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
106	PA Pangkal Pinang - Camera DSLR	PA Pangkal Pinang - Camera DSLR	TGR	2012	6.700.000		6.700.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
107	PT Bandung	PT Bandung	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	Lunas	Lunas	
108	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui	
109	PA Pariaman	PA Pariaman	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui	
110	PA Samarinda	PA Samarinda	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui	
111	PN Samarinda	PN Samarinda	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
112	PA Banjarbaru	PA Banjarbaru	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui	
113	PA Pangkal Pinang	PA Pangkal Pinang	TGR	2012	-	-	-	-	-	-	Nilai BMN tidak diketahui	Nilai BMN tidak diketahui	
114	BUA	BUA	TGR	2012	31.123.462		31.123.462	-	-	-	Lunas	Lunas	-
115	CV P/ PT Palu	PT Palu	TGR	2012	5.107.484		5.107.484	-	-	-	Lunas	Lunas	
116	CV LKI/ PTUN Palu	PTUN Palu	TGR	2012	8.149.229		8.149.229	-	-	-	Lunas	Lunas	
117	CV GC/ PN Palu	PN Palu	TGR	2012	71.329.610		71.329.610	-	-	-	Lunas	Lunas	
118	CV JA/ PT Pontianak	PT Pontianak	TGR	2012	1.934.700		1.934.700	-	-	-	Lunas	Lunas	
119	CV PMJ/ PT Pontianak	PT Pontianak	TGR	2012	437.904		437.904	-	-	-	Lunas	Lunas	
120	CV CTM/ PN Pontianak	PN Pontianak	TGR	2012	5.500.000		5.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
121	CV RAI/ PN Pontianak	PN Pontianak	TGR	2012	5.333.580		5.333.580	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
122	PT APIK/ PN Jakarta Utara	PN Jakarta Utara	TGR	2012	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
123	PT JIMA/ PA Jakarta Pusat	PA Jakarta Pusat	TGR	2012	2.028.698		2.028.698	-	-	-	Lunas	Lunas	
124	CV Y/ PTA Yogyakarta	PTA Yogyakarta	TGR	2012	2.332.952		2.332.952	-	-	-	Lunas	Lunas	-
125	CV AB/ PA Batam	PA Batam	TGR	2012	7.486.000		7.486.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
126	PT KJ/ PN Batam	PN Batam	TGR	2012	48.739.000		48.739.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
127	CV TB/ PN Tanjung Pinang	PN Tanjung Pinang	TGR	2012	1.530.000		1.530.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
128	PT BDM/ BUA	BUA	TGR	2012	53.359.592		53.359.592	-	-	-	Lunas	Lunas	
129	PT SGU/ BUA	BUA	TGR	2012	47.401.818		47.401.818	-	-	-	Lunas	Lunas	
130	PT IL/ BUA	BUA	TGR	2012	59.636.637		59.636.637	-	-	-	Lunas	Lunas	-
131	PTUN Kupang	PTUN Kupang	TGR	2012	3.845.800		3.845.800	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
132	PT Jakarta	PT Jakarta	TGR	2012	1.560.800		1.560.800	-	-	-	Lunas	Lunas	
133	CV ISU/BUA	BUA	TGR	2012	16.734.385		16.734.385	-	-	-	Lunas	Lunas	
134	PT RAM/BUA	BUA	TGR	2012	7.670.133		7.670.133	-	-	-	Lunas	Lunas	
135	CV CN/BUA	BUA	TGR	2012	3.942.731		3.942.731	-	-	-	Lunas	Lunas	
136	PT TDP/BUA	BUA	TGR	2012	74.629.088		74.629.088	-	-	-	Lunas	Lunas	
137	PT ET/BUA	BUA	TGR	2012	77.503.242		77.503.242	-	-	-	Lunas	Lunas	
138	BUA	BUA	TGR	2013	260.060.494		260.060.494	-	-	-	Lunas	Lunas	
139	PT DBI	BUA	TGR	2013	6.057.000		6.057.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
140	PT SPJ	BUA	TGR	2013	57.976.800		57.976.800	-	-	-	Lunas	Lunas	
141	PT YPU	BUA	TGR	2013	99.889.280		99.889.280	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
142	PT RAM	BUA	TGR	2013	3.631.314		3.631.314	-	-	-	Lunas	Lunas	
143	CV ISU	BUA	TGR	2013	12.629.760		12.629.760	-	-	-	Lunas	Lunas	
144	CV KJA	BUA	TGR	2013	858.000		858.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
145	PT DAU	BUA	TGR	2013	6.112.260		6.112.260	-	-	-	Lunas	Lunas	
146	PT ET	BUA	TGR	2013	6.528.000		6.528.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
147	PT TDP	BUA	TGR	2013	93.780.480		93.780.480	-	-	-	Lunas	Lunas	
148	BUA	BUA	TGR	2013	178.022.250		178.022.250	-	-	-	Lunas	Lunas	-
149	PN Fak-fak	PN Fak-fak	TGR	2013	4.945.218		4.945.218	-	-	-	Lunas	Lunas	
150	PA Sorong	PA Sorong	TGR	2013	4.748.874		4.748.874	-	-	-	Lunas	Lunas	
151	PTA Malut	PTA Malut	TGR	2013	216.905.860		216.905.860	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
152	PN Ternate	PN Ternate	TGR	2013	46.336.500		46.336.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
153	CV ISU (BUA)	BUA	TGR	2013	55.000.000		55.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
154	PT BDM (BUA)	BUA	TGR	2013	20.119.554		20.119.554	-	-	-	Lunas	Lunas	
155	PT KAL (BUA)	BUA	TGR	2013	27.404.720		27.404.720	-	-	-	Lunas	Lunas	
156	PT IL (BUA)	BUA	TGR	2013	316.407.272		316.407.272	-	-	-	Lunas	Lunas	
157	PT TD (BUA)	BUA	TGR	2013	66.430.852		66.430.852	-	-	-	Lunas	Lunas	
158	CV KM (PT Manado)	PT Manado	TGR	2013	57.005.393		57.005.393	-	-	-	Lunas	Lunas	
159	CV NS (PTA Manado)	PTA Manado	TGR	2013	15.781.148		15.781.148	-	-	-	Lunas	Lunas	
160	CV MS (PTUN Manado)	PTUN Manado	TGR	2013	8.260.950		8.260.950	-	-	-	Lunas	Lunas	
161	PT PBP (PA Amurang)	PA Amurang	TGR	2013	223.635.972		223.635.972	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
162	CV AG (PA Amurang)	PA Amurang	TGR	2013	4.500.000		4.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
163	PT PBP (PA Amurang)	PA Amurang	TGR	2013	20.000.000		20.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
164	CV MA (PTUN Denpasar)	PTUN Denpasar	TGR	2013	9.053.930		9.053.930	-	-	-	Lunas	Lunas	
165	CV MS (PTA Ambon)	PTA Ambon	TGR	2013	32.754.439		32.754.439	-	-	-	Lunas	Lunas	
166	CV AJP (Dilmil Ambon)	Dilmil Ambon	TGR	2013	27.681.875		27.681.875	-	-	-	Lunas	Lunas	
167	CV DES (PTUN Ambon)	PTUN Ambon	TGR	2013	119.573.907		119.573.907	-	-	-	Lunas	Lunas	
168	CV RS (PT Bengkulu)	PT Bengkulu	TGR	2013	6.312.008		6.312.008	-	-	-	Lunas	Lunas	
169	CV OP (PT Bengkulu)	PT Bengkulu	TGR	2013	14.577.948		14.577.948	-	-	-	Lunas	Lunas	
170	CV Rian (PA Lebong)	PA Lebong	TGR	2013	2.804.641		2.804.641	-	-	-	Lunas	Lunas	
171	CV ST (PTA Malut)	PTA Malut	TGR	2013	27.722.877		27.722.877	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
172	PT AA (PN Ternate)	PN Ternate	TGR	2013	84.394.097		84.394.097	-	-	-	Lunas	Lunas	
173	CV ST (PA Ternate)	PA Ternate	TGR	2013	35.981.882		35.981.882	-	-	-	Lunas	Lunas	
174	PT MBS (PA Fakfak)	PA Fakfak	TGR	2013	78.153.032		78.153.032	-	-	-	Lunas	Lunas	
175	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2014	192.197.000		192.197.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
176	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2014	682.190.000		682.190.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
177	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag	TGR	2014	1.300.164.641		1.300.164.641	-	-	-	Lunas	Lunas	
178	BUA MA (AK)	BUA MA	TGR	2014	500.000		500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
179	BUA MA (WS)	BUA MA	TGR	2014	500.000		500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
180	BUA MA (NA)	BUA MA	TGR	2014	380.000		380.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
181	BUA MA (I. G. AS)	BUA MA	TGR	2014	2.000.000		2.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
182	BUA MA (RM)	BUA MA	TGR	2014	1.040.000		1.040.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
183	PT Banten	PT Banten	TGR	2014	32.025.000		32.025.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
184	PT Banten	PT Banten	TGR	2014	22.890.000		22.890.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
185	PT RAM (BUA)	BUA MA	TGR	2014	70.041.530		70.041.530	-	-	-	Lunas	Lunas	
186	CV KJA (BUA)	BUA MA	TGR	2014	12.502.270		12.502.270	-	-	-	Lunas	Lunas	
187	PT MJE (BUA)	BUA MA	TGR	2014	4.500.000		4.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
188	CV PU (BUA)	BUA MA	TGR	2014	63.527.184		63.527.184	-	-	-	Lunas	Lunas	
189	PT PCM (BUA)	BUA MA	TGR	2014	21.552.000		21.552.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
190	PT DAU (BUA)	BUA MA	TGR	2014	5.868.796		5.868.796	-	-	-	Lunas	Lunas	
191	PT SA (BUA)	BUA MA	TGR	2014	359.517.919		359.517.919	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
192	CV LA (BUA)	BUA MA	TGR	2014	34.794.588		34.794.588	-	-	-	Lunas	Lunas	
193	PT SSS (BUA)	BUA MA	TGR	2014	11.519.950		11.519.950	-	-	-	Lunas	Lunas	
194	CV SJ (PN Pati)	PN Pati	TGR	2014	3.326.683		3.326.683	-	-	-	Lunas	Lunas	
195	CV N (PA Jepara)	PA Jepara	TGR	2014	476.375		476.375	-	-	-	Lunas	Lunas	
196	Biro Umum (BUA)	BUA MA	TGR	2014	56.014.182		56.014.182	-	-	-	Lunas	Lunas	
197	Biro Hukum dan Humas BUA	BUA MA	TGR	2014	29.250.000		29.250.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
198	Kepaniteraan MA	Kepaniteraan MA	TGR	2014	264.588.000		264.588.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
199	CV GS		TGR	2014	12.074.424		12.074.424	-	-	-	Lunas	Lunas	
200	PT IMP		TGR	2014	17.925.510		17.925.510	-	-	-	Lunas	Lunas	
201	PT TUN Jakarta (PT SA)	PT TUN Jakarta	TGR	2014	996.446.292		996.446.292	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
202	PT Banten (PT KR)	PT Banten	TGR	2014	34.583.145		34.583.145	-	-	-	Lunas	Lunas	
203	PN Tangerang (PT IMP)	PN Tangerang	TGR	2014	23.000.000		23.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
204	PTUN Serang (PT VP)	PTUN Serang	TGR	2014	250.203.705		250.203.705	-	-	-	Lunas	Lunas	
205	PA Mimika (PT PNP)	PA Mimika	TGR	2014	21.738.371		21.738.371	-	-	-	Lunas	Lunas	
206	PA Mimika (CV DA)	PA Mimika	TGR	2014	43.476.998		43.476.998	-	-	-	Lunas	Lunas	
207	PN Jayapura (PT API)	PN Jayapura	TGR	2014	44.318.923		44.318.923	-	-	-	Lunas	Lunas	
208	PT Tipikor Banda Aceh (CV KJM)	PT Tipikor Banda Aceh	TGR	2014	2.250.000		2.250.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
209	MS Idi (PT PA)	MS Idi	TGR	2014	10.921.773		10.921.773	-	-	-	Lunas	Lunas	
210	MS Lhoksukon (PT KB)	MS Lhoksukon	TGR	2014	24.014.798		24.014.798	-	-	-	Lunas	Lunas	
211	PN Polewali (PT LPG)	PN Polewali	TGR	2014	24.982.449		24.982.449	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
212	PN Mamuju (PT PJ)	PN Mamuju	TGR	2014	19.104.401		19.104.401	-	-	-	Lunas	Lunas	
213	PA Jepara (PT MB)	PA Jepara	TGR	2014	122.039.126		122.039.126	-	-	-	Lunas	Lunas	
214	PA Koto Baru (PT PJP)	PA Koto Baru	TGR	2014	67.127.424		67.127.424	-	-	-	Lunas	Lunas	
215	PA Koto Baru (PT NSC)	PA Koto Baru	TGR	2014	28.575.000		28.575.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
216	PA Sawahlunto (PT TP)	PA Sawahlunto	TGR	2014	55.777.829		55.777.829	-	-	-	Lunas	Lunas	
217	PN Sawahlunto (PT SMK)	PN Sawahlunto	TGR	2014	11.490.739		11.490.739	-	-	-	Lunas	Lunas	
218	PTUN Semarang (CV AJ)	PTUN Semarang	TGR	2014	184.844.093	184.844.093	184.844.093	-	-	-	Status 4 telah diterima	Status 4 telah diterima	184.844.093
219	BUA (PT IL)	BUA MA	TGR	2014	50.915.539		50.915.539	-	-	-	Lunas	Lunas	
220	PA Jakarta Barat (PT WP)	PA Jakarta Barat	TGR	2014	86.823.638		86.823.638	-	-	-	Lunas	Lunas	
221	PT IK (PT Maluku Utara)	PT Maluku Utara	TGR	2014	1.404.537		1.404.537	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
222	CV AA (PN Ternate)	PN Ternate	TGR	2014	29.708.853		29.708.853	-	-	-	Lunas	Lunas	
223	PT NA (PTUN Palu)	PTUN Palu	TGR	2014	42.312.612		42.312.612	-	-	-	Lunas	Lunas	
224	CV ST (PA Ternate)	PA Ternate	TGR	2014	30.576.244		30.576.244	-	-	-	Lunas	Lunas	
225	PN Poso	PN Poso	TGR	2014	677.040		677.040	-	-	-	Lunas	Lunas	
226	PA Poso	PA Poso	TGR	2014	1.761.168		1.761.168	-	-	-	Lunas	Lunas	
227	PA Poso	PA Poso	TGR	2014	7.000.000		7.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
228	PT SJM (PA Garut)	PA Garut	TGR	2014	61.898.023		61.898.023	-	-	-	Lunas	Lunas	
229	PT WDM (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2014	138.990.162		138.990.162	-	-	-	Lunas	Lunas	
230	CV TSK (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2014	9.306.018		9.306.018	-	-	-	Lunas	Lunas	
231	CV HD (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2014	10.831.178		10.831.178	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
232	PT MKI (PT Jawa Barat)	PT Jawa Barat	TGR	2014	93.625.764		93.625.764	-	-	-	Lunas	Lunas	
233	PT HK (PN Jakarta Pusat)	PN Jakarta Pusat	TGR	2014	145.276.948		145.276.948	-	-	-	Lunas	Lunas	
234	PT VTM (PA Poso)	PA Poso	TGR	2014	154.732.489		154.732.489	-	-	-	Lunas	Lunas	
235	PN Poso (PT JBM)	PN Poso	TGR	2014	32.231.996		32.231.996	-	-	-	Lunas	Lunas	
236	CV ST (PA Ternate)	PA Ternate	TGR	2014	44.479.853		44.479.853	-	-	-	Lunas	Lunas	
237	PT IK (PT Maluku Utara)	PT Maluku Utara	TGR	2014	251.101.769		251.101.769	-	-	-	Lunas	Lunas	
238	CV PG (PA Cimahi)	PA Cimahi	TGR	2015	2.700.000		2.700.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
239	BUA	BUA MA	TGR	2015	71.400.000		71.400.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
240	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag	TGR	2015	9.900.000		9.900.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
241	Kepaniteraan	Kepaniteraan	TGR	2015	15.900.000		15.900.000	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
242	Suwardi	BUA MA	TGR	2015	9.761.912		9.761.912	-	-	-	Lunas	Lunas	
243	Takdir Rahmadi	BUA MA	TGR	2015	3.603.839		3.603.839	-	-	-	Lunas	Lunas	
244	I Gusti Agung Sumabatha	BUA MA	TGR	2015	9.761.912		9.761.912	-	-	-	Lunas	Lunas	
245	M. Hatta Ali	BUA MA	TGR	2015	11.269.286		11.269.286	-	-	-	Lunas	Lunas	
246	H. Imam Soebechi	BUA MA	TGR	2015	11.269.286		11.269.286	-	-	-	Lunas	Lunas	
247	Soeroso Ono	BUA MA	TGR	2015	8.097.419		8.097.419	-	-	-	Lunas	Lunas	
248	Prim Haryadi	BUA MA	TGR	2015	3.372.278		3.372.278	-	-	-	Lunas	Lunas	
249	Wenceslaus Tarenten	BUA MA	TGR	2015	3.372.278		3.372.278	-	-	-	Lunas	Lunas	
250	John Dekson Guntik	BUA MA	TGR	2015	3.372.278		3.372.278	-	-	-	Lunas	Lunas	
251	M. Syarifuddin	BUA MA	TGR	2015	5.111.213		5.111.213	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
252	Nurhadi Abdurahman	BUA MA	TGR	2015	4.220.113		4.220.113	-	-	-	Lunas	Lunas	
253	Herri Swantoro	BUA MA	TGR	2015	4.220.113		4.220.113	-	-	-	Lunas	Lunas	
254	Bahrin Lubis	BUA MA	TGR	2015	4.220.113		4.220.113	-	-	-	Lunas	Lunas	
255	Joko Upoyo Pribadi	BUA MA	TGR	2015	3.396.266		3.396.266	-	-	-	Lunas	Lunas	
256	John Dekson Guntik	BUA MA	TGR	2015	3.396.266		3.396.266	-	-	-	Lunas	Lunas	
257	Ropi'i	BUA MA	TGR	2015	3.379.453		3.379.453	-	-	-	Lunas	Lunas	
258	PT MBS (PTA Banjarmasin)	PTA Banjarmasin	TGR	2015	29.516.066		29.516.066	-	-	-	Lunas	Lunas	
259	CV Les (PTA Banjarmasin)	PTA Banjarmasin	TGR	2015	1.723.019		1.723.019	-	-	-	Lunas	Lunas	
260	PT BKS (PT Banjarmasin)	PT Banjarmasin	TGR	2015	7.507.383		7.507.383	-	-	-	Lunas	Lunas	
261	PT KS (PTUN Jayapura)	PTUN Jayapura	TGR	2015	66.378.761		66.378.761	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
262	CV KA (PT Jayapura)	PT Jayapura	TGR	2015	38.360.717		38.360.717	-	-	-	Lunas	Lunas	
263	PT Sy (PN Jayapura)	PN Jayapura	TGR	2015	49.551.698		49.551.698	-	-	-	Lunas	Lunas	
264	CV PC (PN Merauke)	PN Merauke	TGR	2015	123.904.297		123.904.297	-	-	-	Lunas	Lunas	
265	PT DMP (Badan Litbang Diklat Kumdil)	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2015	34.716.657		34.716.657	-	-	-	Lunas	Lunas	
266	PT SA (BUA)	BUA MA	TGR	2015	344.063.547		344.063.547	-	-	-	Lunas	Lunas	
267	PT SA (Ditjen Badilum)	Ditjen Badilum	TGR	2015	36.971.003		36.971.003	-	-	-	Lunas	Lunas	
268	PT SA (Ditjen Badilag)	Ditjen Badilag	TGR	2015	6.698.153		6.698.153	-	-	-	Lunas	Lunas	
269	PT SA (Kepaniteraan)	Kepaniteraan	TGR	2015	53.557.467		53.557.467	-	-	-	Lunas	Lunas	
270	PT SA (Ditjen Badimiltun)	Ditjen Badimiltun	TGR	2015	7.644.411		7.644.411	-	-	-	Lunas	Lunas	
271	PT DAU gedung MMU)	BUA MA	TGR	2015	2.895.647		2.895.647	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
272	PT DAU (gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	2.787.247		2.787.247	-	-	-	Lunas	Lunas	
273	PT DAU (gedung Pulomas)	BUA MA	TGR	2015	2.238.743		2.238.743	-	-	-	Lunas	Lunas	
274	PT RAM (gedung MMU)	BUA MA	TGR	2015	3.788.607		3.788.607	-	-	-	Lunas	Lunas	
275	PT RAM (gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	2.845.371		2.845.371	-	-	-	Lunas	Lunas	
276	PT RAM (gedung Pulomas)	BUA MA	TGR	2015	1.902.135		1.902.135	-	-	-	Lunas	Lunas	
277	PT RAM (genset gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	943.236		943.236	-	-	-	Lunas	Lunas	
278	PT RAM (genset gedung Pulomas)	BUA MA	TGR	2015	943.236		943.236	-	-	-	Lunas	Lunas	
279	PT RAM (sistem pelindung kebakaran gedung Ahmad Yani)	BUA MA	TGR	2015	943.236		943.236	-	-	-	Lunas	Lunas	
280	PT TDP		TGR	2015	37.791.964		37.791.964	-	-	-	Lunas	Lunas	
281	PT IP		TGR	2015	10.048.680		10.048.680	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
282	Biro Umum (BUA)	BUA MA	TGR	2015	28.258.500		28.258.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
283	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2015	435.811.785		435.811.785	-	-	-	Lunas	Lunas	
284	BUA	BUA MA	TGR	2015	14.403.654		14.403.654	-	-	-	Lunas	Lunas	
285	BUA	BUA MA	TGR	2015	32.609.797		32.609.797	-	-	-	Lunas	Lunas	
286	PT WK (BUA)	BUA MA	TGR	2015	3.227.369.568		3.227.369.568	-	-	-	Lunas	Lunas	
287	PT MPK (BUA)	BUA MA	TGR	2015	5.700.000		5.700.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
288	Biro Hukum dan Humas (59 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	19.358.800	4.753.270	19.358.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-
289	Biro Kepegawaian (87 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	38.304.536	20.794.186	38.304.536	-	-	-	Lunas	Lunas	-
290	Biro Sekretariat Pimpinan (246 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	135.418.260	99.910.700	135.418.260	-	-	-	Lunas	Lunas	-
291	Biro Keuangan (184 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	23.475.530	22.243.080	23.475.530	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
292	Biro Perencanaan dan Organisasi (328 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	148.061.748		148.061.748	-	-	-	Lunas	Lunas	-
293	Biro Perlengkapan (65 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	23.534.580	11.045.520	23.534.580	-	-	-	Lunas	Lunas	-
294	Biro Umum (603 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	504.486.242	118.361.456	504.486.242	-	-	-	Lunas	Lunas	-
295	WA dkk. (Badimiltun) 3 orang	BUA MA	TGR	2016	531.310		531.310	-	-	-	Lunas	Lunas	-
296	Badilag (467 orang)	BUA MA	TGR	2016	107.791.378	73.555.876	107.791.378	-	-	-	Lunas	Lunas	-
297	Biro Umum (116 orang)	BUA MA	TGR	2016	3.831.600	3.587.200	3.831.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
298	Biro Kepegawaian (111 orang)	BUA MA	TGR	2016	6.817.000		6.817.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
299	DN dkk. (Biro Perencanaan) 6 orang	BUA MA	TGR	2016	342.600		342.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
300	Biro Hukum dan Humas (16 orang)	BUA MA	TGR	2016	577.800		577.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-
301	HS dkk. (Biro Keuangan) 6 orang	BUA MA	TGR	2016	243.800		243.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
302	Biro Sekretariat Pimpinan (25 orang) - BUA	BUA MA	TGR	2016	881.600		881.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
303	Ditjen Badilmiltun (22 orang)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	982.600		982.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
304	Ditjen Badilag (52 Orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	2.439.000		2.439.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
305	Kepaniteraan (12 orang)	Kepaniteraan	TGR	2016	977.200		977.200	-	-	-	Lunas	Lunas	-
306	SN dkk. (Badan Litbang Diklat Kumdil) 4 orang	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2016	459.000		459.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
307	Ditjen Badilum (12 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	580.600		580.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
308	PT Ambon (12 orang)	PT Ambon	TGR	2016	970.400		970.400	-	-	-	Lunas	Lunas	-
309	PTA Banjarmasin (33 orang)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	1.332.000		1.332.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
310	PA Bandung (92 orang)	PA Bandung	TGR	2016	5.120.000		5.120.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
311	PA Kota Tasikmalaya (48 orang)	PA Kota Tasikmalaya	TGR	2016	2.144.000		2.144.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
312	Biro Umum (394 orang)	BUA MA	TGR	2016	79.668.600	12.360.200	79.668.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
313	Biro Kepegawaian (259 orang)	BUA MA	TGR	2016	40.075.000	20.449.600	40.075.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
314	Biro Perencanaan dan Organisasi(153 orang)	BUA MA	TGR	2016	11.066.000		11.066.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
315	Biro Perlengkapan (31 orang)	BUA MA	TGR	2016	2.497.000	1.551.400	2.497.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
316	Biro Hukum dan Humas (101 orang)	BUA MA	TGR	2016	6.848.800	5.572.200	6.848.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-
317	Biro Keuangan (54 orang)	BUA MA	TGR	2016	4.421.400		4.421.400	-	-	-	Lunas	Lunas	-
318	Biro Sekretariat Pimpinan (146 orang)	BUA MA	TGR	2016	15.150.600	7.740.600	15.150.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
319	Ditjen Badilag (85 Orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	3.522.000		3.522.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
320	Kepaniteraan (45 orang)	Kepaniteraan	TGR	2016	1.671.200		1.671.200	-	-	-	Lunas	Lunas	-
321	PT Ambon (44 orang)	PT Ambon	TGR	2016	7.990.800		7.990.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
322	BUA (21 orang)	BUA MA	TGR	2016	8.219.000		8.219.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
323	Ditjen Badilmiltun (14 orang)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	3.500.000		3.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
324	Ditjen Badilmiltun (17 orang)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	16.600.000		16.600.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
325	MAB dkk. (PA Ambon) 4 orang	PA Ambon	TGR	2016	4.235.000		4.235.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
326	Irw dkk. (PN Padang) 5 orang	PN Padang	TGR	2016	1.092.500		1.092.500	-	-	-	Lunas	Lunas	-
327	PN Jombang	PN Jombang	TGR	2016	1.228.040		1.228.040	-	-	-	Lunas	Lunas	-
328	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum	TGR	2016	47.676.726		47.676.726	-	-	-	Lunas	Lunas	-
329	BUA	BUA	TGR	2016	18.569.600		18.569.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
330	BUA	BUA	TGR	2016	17.856.000		17.856.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
331	BUA	BUA	TGR	2016	12.109.722		12.109.722	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
332	BUA	BUA	TGR	2016	873.326		873.326	-	-	-	Lunas	Lunas	-
333	Kepaniteraan	Kepaniteraan	TGR	2016	28.003.700		28.003.700	-	-	-	Lunas	Lunas	-
334	CV GS (BUA)	BUA	TGR	2016	15.110.130		15.110.130	-	-	-	Lunas	Lunas	-
335	CV GS (BUA)	BUA	TGR	2016	6.423.750		6.423.750	-	-	-	Lunas	Lunas	-
336	CV RL (Balitbangkumdil)	Balitbangkumdil	TGR	2016	30.583.125		30.583.125	-	-	-	Lunas	Lunas	-
337	CV MP (PN Jambi)	PN Jambi	TGR	2016	4.404.000		4.404.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
338	CV MP (PN Jambi)	PN Jambi	TGR	2016	2.002.000		2.002.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
339	PT AJA (PN Jambi)	PN Jambi	TGR	2016	3.234.700		3.234.700	-	-	-	Lunas	Lunas	-
340	CV ESU (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	1.112.940		1.112.940	-	-	-	Lunas	Lunas	-
341	CV MAS (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	75.000		75.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
342	CV LSP (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	355.650		355.650	-	-	-	Lunas	Lunas	-
343	BUA	BUA	TGR	2016	5.629.000		5.629.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
344	WS dan JS (PTUN Jambi)	PTUN Jambi	TGR	2016	1.101.276		1.101.276	-	-	-	Lunas	Lunas	-
345	Puslitbang (38 orang)	Puslitbang	TGR	2016	14.810.000		14.810.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
346	DH dkk. (Badilag) 4 orang	Ditjen. Badilag	TGR	2016	3.730.000		3.730.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
347	RN & SR (PT Banjarmasin)	PT Banjarmasin	TGR	2016	760.000		760.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
348	Balitbang Diklat Kumdil (139 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	119.880.000		119.880.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
349	Balitbang Diklat Kumdil (210 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	70.550.000		70.550.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
350	Balitbang Diklat Kumdil (247 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	24.920.000		24.920.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
351	Balitbang Diklat Kumdil (64 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	6.400.000		6.400.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
352	Kepaniteraan (941 orang)	Kepaniteraan	TGR	2016	694.180.000		694.180.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
353	MS dkk. (Kepaniteraan) 3 orang	Kepaniteraan	TGR	2016	1.200.000		1.200.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
354	Ditjen Badilum (17 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	19.840.000		19.840.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
355	JU (Biro Perencanaan dan Organisasi)	BUA	TGR	2016	840.000		840.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
356	YS dkk. (Biro Perencanaan dan Organisasi) 7 orang	BUA	TGR	2016	5.880.000		5.880.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
357	DA dkk. (Ditjen Badilag) 3 orang	Ditjen Badilag	TGR	2016	650.000		650.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
358	NS & DH (Ditjen Badilag)	Ditjen Badilag	TGR	2016	500.000		500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
359	MI & Wh (Ditjen Badilmiltun)	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	640.000		640.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
360	Balitbang Diklat Kumdil (60 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	33.952.000		33.952.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
361	Balitbang Diklat Kumdil (52 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	25.438.000		25.438.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
362	Balitbang Diklat Kumdil (28 orang)	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	68.428.460		68.428.460	-	-	-	Lunas	Lunas	-
363	IR dkk.(Balitbang Diklat Kumdil) 7 orang	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2016	11.588.000		11.588.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
364	Ditjen Badilum (14 Orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	11.924.495		11.924.495	-	-	-	Lunas	Lunas	-
365	US dkk. (Ditjen Badilum) 5 orang	Ditjen Badilum	TGR	2016	3.364.000		3.364.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
366	Ditjen Badilum (25 Orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	32.729.920		32.729.920	-	-	-	Lunas	Lunas	-
367	HS dkk. (Ditjen Badilag) 4 orang	Ditjen Badilag	TGR	2016	1.872.000		1.872.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
368	Ditjen Badilag (39 orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	6.157.600		6.157.600	-	-	-	Lunas	Lunas	-
369	PTA Banjarmasin (13 orang)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	8.343.400		8.343.400	-	-	-	Lunas	Lunas	-
370	PTA Banjarmasin (36 orang)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	5.474.000		5.474.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
371	JM dkk. (BUA) 3 orang	BUA	TGR	2016	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
372	PTUN Jambi (19 orang)	PTUN Jambi	TGR	2016	2.096.000		2.096.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
373	FH dkk (PTUN Jambi) 3 orang	PTUN Jambi	TGR	2016	1.700.000		1.700.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
374	ZI dkk (PN Jambi) 4 orang	PN Jambi	TGR	2016	600.000		600.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
375	SW & BRW (Puslitbang)	Puslitbang	TGR	2016	4.968.000		4.968.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
376	UI dkk. (Ditjen Badilag) 3 orang	Ditjen Badilag	TGR	2016	10.293.427		10.293.427	-	-	-	Lunas	Lunas	-
377	ARRA dkk. (Biro Keuangan) 7 orang	BUA	TGR	2016	33.695.676		33.695.676	-	-	-	Lunas	Lunas	-
378	DW dkk. (Ditjen Badilmiltun) 3 orang	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	855.000		855.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
379	AKS dkk. (Ditjen Badilum) 9 orang	Ditjen Badilum	TGR	2016	3.000.000		3.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
380	SR & HH (Ditjen Badilag)	Ditjen Badilag	TGR	2016	600.000		600.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
381	An dkk. (Biro Keuangan BUA) 7 orang	BUA	TGR	2016	4.865.000		4.865.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
382	EY dkk (Biro Perencanaan dan Organisasi) 3 orang	BUA	TGR	2016	1.500.000		1.500.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
383	Rk. Dkk (Ditjen Badilmiltun) 14 orang	Ditjen Badilmiltun	TGR	2016	4.575.000		4.575.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
384	Ditjen Badilag (26 orang)	Ditjen Badilag	TGR	2016	7.245.000		7.245.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
385	Ditjen Badilum (17 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2016	6.300.000		6.300.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
386	Biro Keuangan (58 orang)	BUA	TGR	2016	28.800.000		28.800.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
387	Biro Kepegawaian (16 orang)	BUA	TGR	2016	6.600.000		6.600.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
388	LS (Biro Umum)	BUA	TGR	2016	300.000		300.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
389	AN (Biro Setpim)	BUA	TGR	2016	2.400.000		2.400.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
390	Sr (Biro Hukum dan Humas)	BUA	TGR	2016	1.200.000		1.200.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
391	Biro Perencanaan dan Organisasi (48 orang) - BUA	BUA	TGR	2016	18.960.000		18.960.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
392	PT BMG (BUA)	BUA	TGR	2016	13.993.000		13.993.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
393	PT HIN (BUA)	BUA	TGR	2016	129.633.200		129.633.200	-	-	-	Lunas	Lunas	-
394	PT PRM (BUA)	BUA	TGR	2016	104.130.000		104.130.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
395	PT KB (BUA)	BUA	TGR	2016	183.114.548		183.114.548	-	-	-	Lunas	Lunas	-
396	PT AUK (BUA)	BUA	TGR	2016	212.693.622	-	212.693.622	-	-	-	Lunas	Lunas	-
397	PT BJM(BUA)	BUA	TGR	2016	66.140.064		66.140.064	-	-	-	Lunas	Lunas	-
398	PT JP (BUA)	BUA	TGR	2016	171.473.540		171.473.540	-	-	-	Lunas	Lunas	-
399	PT BT (PA Padang)	PA Padang	TGR	2016	6.929.388		6.929.388	-	-	-	Lunas	Lunas	-
400	CV YK (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	1.918.324		1.918.324	-	-	-	Lunas	Lunas	-
401	CV KS (PN Padang)	PN Padang	TGR	2016	1.240.800		1.240.800	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
402	PT BBU (PA Jakarta Timur)	PA Jakarta Timur	TGR	2016	118.112.186		118.112.186	-	-	-	Lunas	Lunas	-
403	PT JPK (PN Bulukumba)	PN Bulukumba	TGR	2016	49.679.900		49.679.900	-	-	-	Lunas	Lunas	-
404	PT BLJP (PN Jeneponto)	PN Jeneponto	TGR	2016	14.823.500		14.823.500	-	-	-	Lunas	Lunas	-
405	PT DUS (PN Medan)	PN Medan	TGR	2016	58.892.680		58.892.680	-	-	-	Lunas	Lunas	-
406	CV TR (PTA Medan)	PTA Medan	TGR	2016	6.789.327		6.789.327	-	-	-	Lunas	Lunas	-
407	CV PB (PN Lubuk Pakam)	PN Lubuk Pakam	TGR	2016	11.036.500		11.036.500	-	-	-	Lunas	Lunas	-
408	PT DB (PT Banjarmasin)	PT Banjarmasin	TGR	2016	133.312.395		133.312.395	-	-	-	Lunas	Lunas	-
409	PT Dam (PA Kota Tasikmalaya)	PA Kota Tasikmalaya	TGR	2016	36.625.825		36.625.825	-	-	-	Lunas	Lunas	-
410	PT ETB (PTUN Bandung)	PTUN Bandung	TGR	2016	89.108.900		89.108.900	-	-	-	Lunas	Lunas	-
411	CV AA (PA Bandung)	PA Bandung	TGR	2016	71.496.650		71.496.650	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
412	PT DM (PA Ambon)	PA Ambon	TGR	2016	48.919.912		48.919.912	-	-	-	Lunas	Lunas	-
413	PT KR (PT Ambon)	PT Ambon	TGR	2016	18.442.496		18.442.496	-	-	-	Lunas	Lunas	-
414	PT ECM (PN Kediri)	PN Kediri	TGR	2016	287.362.640		287.362.640	-	-	-	Lunas	Lunas	-
415	PT DKN (PN Surabaya)	PN Surabaya	TGR	2016	204.945.501		204.945.501	-	-	-	Lunas	Lunas	-
416	PT SAP (BUA)	BUA	TGR	2016	678.842.710	678.842.710	678.842.710	-	-	-	Status 4 telah diterima	Status 4 telah diterima	-
417	PT BMS (PTA Banjarmasin)	PTA Banjarmasin	TGR	2016	285.628.400		285.628.400	-	-	-	Lunas	Lunas	-
418	PT MS (BUA)	BUA	TGR	2016	91.610.000		91.610.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
419	CV CE (BUA)	BUA	TGR	2016	29.400.000		29.400.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
420	CV CHK (BUA)	BUA	TGR	2016	24.000.000		24.000.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
421	PT ADC (BUA)	BUA	TGR	2016	3.836.688		3.836.688	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
422	PT SUNC (BUA)	BUA	TGR	2016	15.232.042		15.232.042	-	-	-	Lunas	Lunas	-
423	CV GP (BUA)	BUA	TGR	2016	12.625.000		12.625.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
424	PT La'M (BUA)	BUA	TGR	2016	5.150.000		5.150.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
425	CV NMK (BUA)	BUA	TGR	2016	54.300.000		54.300.000	-	-	-	Lunas	Lunas	-
426	Balitbang Diklat Kumdil - BUA	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2017	1.177.370.300		1.177.370.300	-	-	-	Berdasarkan LHP BPK Tahun 2017 (Kepatuhan), temuan pada Balitband Diklat Kumdil adalah sebesar Rp1.164.085.300,00 dan telah disetorkan sebesar RP1.178.993.300,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp14.908.000,00	Berdasarkan LHP BPK Tahun 2017 (Kepatuhan), temuan pada Balitband Diklat Kumdil adalah sebesar Rp1.164.085.300,00 dan telah disetorkan sebesar RP1.178.993.300,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp14.908.000,00	
427	BUA	BUA	TGR	2017	448.716.436		448.716.436	-	-	-	Lunas	Lunas	
428	PT Banda Aceh dan PN Tangerang	PT Banda Aceh dan PN Tangerang	TGR	2017	6.098.400		6.098.400	-	-	-	Lunas	Lunas	
429	BUA	BUA	TGR	2017	93.159.202		93.159.202	-	-	-	Lunas	Lunas	-
430	BUA	BUA	TGR	2017	73.244.768		73.244.768	-	-	-	Lunas	Lunas	

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
431	Balitbang Diklat Kumdil	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2017	14.264.609		14.264.609	-	-	-	Lunas	Lunas	
432	PT Banten	PT Banten	TGR	2017	6.649.500		6.649.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
433	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Litbang Diklat Kumdil	TGR	2017	1.620.000		1.620.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
434	PN Amlapura	PN Amlapura	TGR	2017	4.987.500		4.987.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
435	Ditjen Badilag (2 orang)	Ditjen Badilag	TGR	2017	672.500		672.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
436	Ditjen Badilum (4 orang)	Ditjen Badilum	TGR	2017	1.345.000		1.345.000	-	-	-	Lunas	Lunas	
437	Ditjen badilmiltun dan Ditjen Badilag	Ditjen badilmiltun dan Ditjen Badilag	TGR	2017	4.352.500		4.352.500	-	-	-	Lunas	Lunas	
438	PT SSS (BUA)	BUA	TGR	2017	15.799.993		15.799.993	-	-	-	Lunas	Lunas	
439	CV KJA (BUA)	BUA	TGR	2017	1.338.767		1.338.767	-	-	-	Lunas	Lunas	
440	Hal 95 LHP 2018	Biro Umum PN. Lhoksukon	TGR	2017	862.734.070		862.734.070	-	-	-	Lunas	Lunas	-

DAFTAR PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG
PER 30 JUNI 2022

INFORMASI BPK

No	Nama	Penanggung Jawab, Unit Kerja	Jenis Kerugian	Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian	Review Bawas	Angsuran sd Semester II Tahun 2021	Sisa Per Semester II Tahun 2021	Angsuran sd Semester I Tahun 2022	Sisa per Semester I Tahun 2022	Keterangan	Kategori	Pembebasan
441	Balitbang Diklat Kumdil	Balitbang Diklat Kumdil	TGR	2017	101.960.000		101.960.000	-	-	-	Lunas	Lunas	



BELANJA MODAL DIBAYAR DIMUKA *(PREPAID)*

Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid) - 114115

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
1	005.01.099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	Rp 218.396.000,00	1 Merupakan jaminan pembayaran (bank garansi) atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi revitalisasi gedung cagar budaya kantor Pengadilan Negeri Makassar oleh CV Rafli sebesar Rp.218.396.000, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wanprestasi), jaminan bank berlaku tanggal 22 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 30 Januari 2023, pada tanggal 16 Desember 2022 muncul amandemen kontrak I sehingga jaminan bank diperpanjang menjadi tanggal 22 Desember 2022 s.d. 21 Maret 2023, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 20 April 2023, bank garansi tersebut sudah diklaim tanggal 9 Januari 2023 setelah terbitnya BAST pada tanggal 6 Januari 2023 dan pembayaran denda wanprestasi sebesar Rp.95.854.058 pada tanggal 9 Januari 2023.
2	005.01.099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	Rp 3.303.445.154,00	1 Merupakan jaminan pembayaran (bank garansi) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pasca gempa Pengadilan Negeri Mamuju oleh CV Asri Nusa sebesar Rp.3.267.599.454, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wanprestasi), jaminan bank berlaku tanggal 20 Desember 2022 s.d. 31 Desember 2022, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 30 Januari 2023, pada tanggal 30 Desember 2022 muncul addedum kontrak III sehingga jaminan bank diperpanjang menjadi tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 30 April 2023, bank garansi tersebut sudah diklaim tanggal 16 Februari 2023 setelah terbitnya BAST pada tanggal 9 Februari 2023 dan pembayaran denda wanprestasi sebesar Rp.49.691.605 pada tanggal 15 Februari 2023. 2 Merupakan jaminan pembayaran (SPTJM) atas pekerjaan pengawasan pembangunan fisik gedung kantor Pengadilan Negeri Mamuju oleh CV Cipta Estetika Konsultan sebesar Rp.35.845.700, jaminan tersebut dibayarkan pada 22 Desember 2022.
3	005.01.401887	PENGADILAN AGAMA RUMBIA	Rp 1.637.735.008,00	1 Merupakan jaminan pembayaran (bank garansi) yang dibayarkan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) ke PT Berkibar Bersama Bendera sebesar Rp.1.586.711.082, pelaksanaan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) ke PT Alocita Mandiri sebesar Rp.36.945.334, pelaksanaan pekerjaan pembayaran pengadaan jasa konsultasi perencanaan gedung kantor baru gedung kantor baru Pengadilan Agama Rumbia tahun jamak (2022 dan 2023) ke PT Skala Pilar Lima sebesar Rp.14.078.592, tanggal pembayaran 27 Desember 2022.
4	005.01.401926	PENGADILAN NEGERI LASUSUA	Rp 1.250.091.940,00	1 Merupakan jaminan pembayaran (bank garansi) atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan sarana lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh CV Antazena sebesar Rp.935.404.250 dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi finishing gedung kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh CV Dwi Karya Bakti sebesar Rp.250.458.500, karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wanprestasi), jaminan bank berlaku tanggal 22 Desember 2022 s.d. 23 Januari 2023, klaim penagihan jaminan paling lambat tanggal 22 Februari 2023, BAST CV Antazena tanggal 21 Januari 2023 dan BAST CV Dwi Karya Bakti tanggal 23 Januari 2023, sehingga bank garansi tersebut sudah diklaim per tanggal BAST, denda wanprestasi tersebut sudah dibayar per 26 Januari 2023 sebesar Rp.10.672.000 (CV Antazena) dan Rp.869.000 (CV Dwi Karya Bakti).

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
				2 Merupakan jaminan pembayaran (SPTJM) atas pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan sarana lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh oleh CV Kalimaya sebesar Rp.14.984.250, pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan sarana lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh oleh PT Arkan Jasa Rencana sebesar Rp.26.906.400, dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan finishing gedung kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh CV Kalimaya sebesar Rp.4.463.100, pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan finishing gedung kantor Pengadilan Negeri Lasusua oleh PT Arkan Jasa Rencana sebesar Rp.17.875.440, jaminan tersebut sudah dibayarkan per 23 Desember 2022.
Jumlah			**Rp 6.409.668.102,00**	

I. SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Revitallisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar
Nomor : W22.U1/ 103 /PPK/PL.01/9/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 049/POKJA-PNMks/IX/2022 tanggal 1 September 2012, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor W22.U1/93/PPK/PL.01/9/2022 tanggal 7 September 2022, antara:

Nama	:	*Maureen Magda Rubby Luhulima*
NIP	:	*1977081 200604 2 003*
Jabatan	:	*Pejabat Pembuat Komitmen*
Berkedudukan di	:	*Jl. Kartini No. 18/23, Makassar*

yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W22.U1/146/KU.01/4/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama	:	*Syafruddin, A.Md.*
Jabatan	:	*Direktur*
Berkedudukan di	:	*BTN Saumata Indah Blok M No. 2, Kabupaten Gowa*
Akta Notaris Nomor	:	*2*
Tanggal	:	*4 Maret 2022*
Notaris	:	*Arfin Bahter, S.H., M.Kn*

yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAFLI RIFKI selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Perawatan/penggantian atap dan material bagian gedung yang mengalami kerusakan sedang maupun berat sesuai ketentuan aturan pelestarian gedung cagar budaya.;
2. Pekerjaan non standar terkait penataan jaringan listrik dan jaringan komunikasi, utilitas serta peralatan pendukung.;
3. Adaptasi dalam bentuk penataan interior pada area pelayanan publik (ruang persidangan dan ruang tunggu).;
4. Finishing pada bangunan tanpa mengurangi substansi bangunan cagar budaya.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 8.766.500.000,- *(delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* dengan kode akun kegiatan 533121;

(2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengadilan Negeri Makassar Nomor : SP DIPA -005.01.2.099422/2022;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar Cabang Gowa rekening nomor : 131-003-000013963-7 atas nama Penyedia : CV. RAFLI RIFKI

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Surat Penawaran;
   d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
f. spesifikasi teknis dan gambar;
g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 105 *(seratus lima)* hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 *(seratus delapan puluh)* hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *CV. RAFLI RIFKI*	Untuk dan atas nama *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN*
SYAFRUDDIN, A.Md. Direktur	*MAUREEN MAGDA RUBBY LUHULIMA* *NIP. 19770801 200604 2 003*

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak Pengadilan Negeri Makassar : Nama : *Maureen Magda Rubby Luhulima* Alamat : *Jl. Kartini No. 18/23, Makassar* Website : *www.pn-makassar.go.id* *E-mail* : *pn.makassar@gmail.com* Faksimili : *0411-3634667* Penyedia : Nama : *CV. RAFLI RIFKI* Alamat : *BTN Saumata Indah Blok M No. 2, Kabupaten Gowa* E-mail : *islamiah_5@yahoo.co.id* Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : *Maureen Magda Rubby Luhulima* Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak Kuasa Pengguna Anggaran nomor *W22.U1/146/KU.01/4/2022* tanggal *26 April 2022* Untuk Penyedia: Nama : *Syafruddin, A.Md.*
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KPPN Makassar II
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 105 *[seratus lima hari]* hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)-	Tidak diberlakukan
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 *[seratus delapan puluh]* hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)

		seluruh Bagian Pekerjaan dinyatakan selesai.
33.19	**Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	Tidak diberlakukan
33.18	**Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)-**	Diberlakukan setelah seluruh Bagian Pekerjaan dinyatakan selesai
35.1	**Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**	Gambar "*As built*" diserahkan paling lambat 14 *(empat belas) hari kalender* dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 *(empat belas)* hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	**Penyesuaian Harga**	Penyesuaian harga tidak diberikan
45.b	**Pembayaran Tagihan**	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 *(tujuh)* hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.i	**Hak dan Kewajiban Penyedia**	Seperti yang tertuang dalam SSUK
56.3	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**	Seperti yang tertuang dalam SSUK
56.3	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan**	Memasukkan material/bahan/alat perlu mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan dituangkan dalam *Request Sheet.*
58	**Kepemilikan Dokumen**	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapatkan

<table>
<tr><td></td><td></td><td>persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak</td></tr>
<tr><td>65</td><td>Fasilitas</td><td>Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : -</td></tr>
<tr><td>66.1.h</td><td>Peristiwa Kompensasi</td><td>Tidak diberlakukan</td></tr>
<tr><td>70.1.e</td><td>Besaran Uang Muka</td><td>Tidak diberikan</td></tr>
<tr><td>70.2.d</td><td>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</td><td>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahapan pembayaran (milestone)</th><th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Termin I</td><td>25 %</td><td>Progres pekerjaan 30 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Termin II</td><td>45 %</td><td>Progres 75 %</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Termin III</td><td>30%</td><td>Progres 100%</td></tr>
</table>
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
3. Laporan Bulanan;
4. Foto Dokumentasi.
Dokumen - dokumen yang tidak diperselisihkan dan diterima oleh Pejabat yang menandatangani Kontrak dan memenuhi prosedur atau persyaratan pembayaran di KPPN Makassar II.</td></tr>
<tr><td>70.3.f</td><td>Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan</td><td>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:
1. Genteng dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan;
2. Marmer dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan;</td></tr>
<tr><td>70.4.c</td><td>Denda akibat Keterlambatan</td><td>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Bagian Kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam Kontrak dan belum diselesaikan.
Dalam hal bagian Kontrak di bawah ini telah selesai dilaksanakan, maka perhitungan denda keterlambatan berdasarkan bagian Kontrak yang belum selesai.</td></tr>
</table>

		Daftar Bagian Kontrak adalah sebagai berikut: 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Atap 3. Pekerjaan Plafond 4. Pekerjaan Lantai 5. Pekerjaan Pintu dan Jendela 6. Pekerjaan Elektrikal 7. Pekerjaan Instalasi Utilitas 8. Pekerjaan Pengecatan 9. Pekerjaan Interior 10. Pekerjaan Landscape 11. Pembersihan akhir dan Lain-lain
78.2	**Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan**	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama lebih dari 10 *(sepuluh)* tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. Pertanggungan terhadap Kegagalan Konstruksi/ Pekerjaan ditetapkan selama 10 *(sepuluh)* tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi fisik (*hardscape*);
79.3	**Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa**	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Pengadilan Negeri Makassar

BNI

B 415013

JAMINAN BANK

Nomor : **22/MKS/055/7043/KAMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ichsan Iskandar
Jabatan : Pemimpin

Bertindak untuk dan atas nama:
Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Berkedudukan di : Makassar
Alamat : Jl. Jend.Sudirman No.1 Makassar
Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:
Nama : Maureen Magda Rubby Luhulima
Berkedudukan di : Makassar
Alamat : Jln. R. A. Kartini No. 23/18 Makassar
Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",

setinggi-tingginya sebesar Rp. 218.396.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:
Nama : CV. RAFLI RIFKI
Berkedudukan di : Kab. Gowa
Alamat : BTN Saumata Indah M/02
Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

RP 218.396.000,00

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan kontrak nomor: W22.U1/103/PPK/PL.01/9/2022 tanggal 12 September 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN 136 MAKASSAR II), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN 136 MAKASSAR II berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2023 Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

Makassar, 22 Desember 2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG MAKASSAR

METERAI TEMPEL LUNAS RP. 10.000

Maureen Magda Rubby Luhulima
197708012006042003

Ichsan Iskandar
Pemimpin

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE: www.pn-makassar.go.id EMAIL:info@pn-makassar.go.id, pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

SURAT KUASA

Nomor: W22.U1/7201/KU.01/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Maureen Magda Ruby Luhulima, S.E.Ak
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Ujung Pandang Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Ujung Pandang Tanggal 9 Desember 2021 Nomor W22.U1/335/KPA-KPB/SK/12/2021

memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II

II. Nama : Arief Rahman Hakim
NIP : 196704091988021001

untuk mencairkan Jaminan Bank :

1. Bank : Bank Negara Indonesia
2. Tanggal Jaminan Bank : 22 Desember 2022
3. Nomor Jaminan Bank : 22/MKS/055/7043/KAMIS
4. Senilai : Rp 218.396.000,00
5. Untuk Pekerjaan : Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar
6. Sesuai dengan kontrak : Nomor W22.U1/103/PPK/PL.01/9/2022 tanggal 12-09-2022

dalam hal :

1. Pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi /tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN ;atau
2. PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada KPPN,

sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Bank tersebut di atas.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Desember 2022

Penerima Kuasa Kepala KPPN Makassar II,	Pemberi Kuasa Pejabat pembuat komitmen
Arief Rahman Hakim NIP 196704091988021001	Maureen Magda Ruby Luhulima, S.E.Ak NIP 19770801 200604 2 003

Mengetahui/menyetujui:
Pimpinan CV. RAFLI RIFKI

Syafruddin, A.Md.

I. SURAT PERJANJIAN

AMANDEMEN 1 SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Revitallisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar
Nomor : W22.U1/ 221 /PPK/PL.01/12/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 049/POKJA-PNMks/IX/2022 tanggal 1 September 2012, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor W22.U1/93/PPK/PL.01/9/2022 tanggal 7 September 2022, antara:

Nama	:	*Maureen Magda Rubby Luhulima*
NIP	:	*1977081 200604 2 003*
Jabatan	:	*Pejabat Pembuat Komitmen*
Berkedudukan di	:	*Jl. Kartini No. 18/23, Makassar*

yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W22.U1/146/KU.01/4/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama	:	*Syafruddin, A.Md.*
Jabatan	:	*Direktur*
Berkedudukan di	:	*BTN Saumata Indah Blok M No. 2, Kabupaten Gowa*
Akta Notaris Nomor	:	*2*
Tanggal	:	*4 Maret 2022*
Notaris	:	*Arfin Bahter, S.H., M.Kn*

yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAFLI RIFKI selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

1. Tetap;

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah semula sebesar Rp 8.766.500.000,- *(delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* menjadi Rp 8.866.500.000,- *(delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* dengan kode akun kegiatan 533121;
(2) Tetap;
(3) Tetap;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Tetap;
(2) Tetap;

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Tetap;
(2) Tetap;
(3) Tetap.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *CV. RAFLI RIFKI*	Untuk dan atas nama *PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN*
	
SYAFRUDDIN, A.Md. Direktur	*MAUREEN MAGDA RUBBY LUHULIMA* *NIP. 19770801 200604 2 003*

BNI

B 415035

JAMINAN BANK

Nomor : **23/MKS/003/7253/JUMAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Iskandar
Jabatan : Pemimpin

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
Berkedudukan di : Makassar
Alamat : Jl.Jend.Sudirman No.1, Makassar
Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama : Maureen Magda Rubby Luhulima
Berkedudukan di : Makassar
Alamat : Jln. R. A. Kartini No. 23/18
Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",

setinggi-tingginya sebesar Rp. 218.396.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:

Nama : CV. RAFLI RIFKI
Berkedudukan di : Kabupaten Gowa
Alamat : BTN. Saumata Indah Blok M/02 Kabupaten Gowa
Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan kontrak nomor: W22.U1/103/PPK/PL.01/9/2022 tanggal 12 September 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN 136 MAKASSAR II), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023.

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN 136 MAKASSAR II berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal 20 April 2023 Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar.

Makassar, 6 Januari 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar

BEA MATERAI LUNAS RP. 10.000

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Maureen Magda Rubby Luhulima
197708012000042002

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
BNI
KANTOR CABANG MAKASSAR

Ichsan Iskandar
Pemimpin

RP 218.396.000 ※

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00215A | Tanggal 27-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Makassar II (136)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 218.396.000,00

**** DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.099422/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/136.22001115/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 12-09-2022 Nomor Kontrak/SPK : W22.U1/103/PPK/PL.01/9/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
099422.136.533121.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000	218.396.000,00
Jumlah Pengeluaran	218.396.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	218.396.000,00

Kepada:

Nomor	: 127746	Bank / Pos	: BPD SULAWESI SELATAN
Nama Supplier	: CV. RAFLI RIFKI	Rekening	: 1310030000139637
NPWP1	: 029750726807000	Nama Pemilik	: CV. RAFLI RIFKI
NPWP2	: 001139732804000	Alamat	: BTN SAUMATA INDAH BLOK M No. 2
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Modal Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor PN Makassar sesuai SPK No W22.U1/103/PPK/PL.01/9/2022 tgl 12 September 2022 dan Bank Garansi No 22/MKS/055/7043/KAMIS tgl 22 Desember 2022		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Makassar, 27 Desember 2022
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

ANDI ASNI SANI, S.T.
III/d 197702242006042029

[Kode : PEM003]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00215A
Tanggal : 27-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
099422.136.533121.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.1951.2.000000.000000		
1	971.051.0B.000099-Kontruksi Fisik	218.396.000,00
	Jumlah	**218.396.000,00**
Jumlah		**218.396.000,00**

Makassar, 27 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

ANDIASNI SANI, S.T.
III/d 197702242006042029

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221361302016276

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221361302016276	27-12-2022	28-12-2022	218,396,000	00215T/099422/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor PN Makassar sesuai SPK No W22.U1/103/PPK/PL.01/9/2022 tgl 12 September 2022 dan Bank Garansi No 22/MKS/055/7 043/KAMIS tgl 22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 10-03-23 09:55:47 oleh : 099422

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
JALAN R.A. KARTINI NO. 23/18 TELP. 0411 - 3624058, Fax : 0411 – 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN/
PROVISIONAL HAND OVER (PHO)
No. W22-U1/ 277 /PPK/PL.01/1/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (06 – 01 – 2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **MAUREEN MAGDA RUBBY LUHULIMA**
   NIP : 19770801 200604 2 003
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. R.A Kartini no. 18/23, Makassar
   Dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Penandatangan Kontrak pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

1. Nama : **SYAFRUDDIN, A.Md.**
   Jabatan : Direktur Utama
   Perusahaan : CV. RAFLI RIFKI
   Alamat : BTN Saumata Indah Blok M No. 2, Kabupaten Gowa
   Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Kontrak nomor W22-U1/103/PPK/PL.01/9/2022 tanggal 12 September 2022 dan Amandemen Kontrak nomor W22-U1/221/PPK/PL.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Kontrak Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022 ;
2. Berita Acara Pekerjaan Selesai antara Penyedia dan PPK Nomor : W22-U1/ 276 /PPK/PL.01/1/2023 tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga ;
3. Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian B.3 butir 33 tentang Serah Terima Pekerjaan

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen) pada tanggal 06 Januari 2023 ;
   Catatan :
   Dirapikan dan disempurnakan sesuai catatan Konsultan Pengawas ;
2. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022 kepada Pihak Pertama Menerima Penyerahan tersebut ;
3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Gedung Cagar Budaya Kantor Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022 melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak ;
4. Masa Pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023 ;
5. Selama Masa Pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara Hasil Pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Penyerahan Pertama Pekerjaan sesuai Rencana Kegiatan Masa Pemeliharaan terlampir ;

6. Penyerahan Akhir Pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2023

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada tanggal tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
CV. RAFLI RIFKI	**Pejabat Pembuat Komitmen**
SYAFRUDDIN, A.Md.	**MAUREEN MAGDA RUBBY LUHULIMA**
Direktur Utama	NIP. 19770801 200604 2 003

Mengetahui;
Kuasa Pengguna Anggaran

IRFAN TAHIR ARNAN, S.Pi, S.H.
NIP. 19811026 200604 1 003

BUKTI SETOR DENDA PELAKSANA KONSTRUKSI CV. RAFLI RIFKI UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI REVITALISASI GEDUNG CAGAR BUDAYA KANTOR PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

livin' by mandiri

Bayar

Pembayaran Berhasil

09 Jan 2023 - 14:25:30 WIB - No. Ref. 702301091425171162

Penyedia Jasa

Pajak/PNBP/Cukai

820230108390365

Detail Pembayaran

Nominal Pembayaran	**Rp 95.854.058**
Biaya Transaksi	**Gratis**
Total Transaksi	**Rp 95.854.058**

Rekening Sumber

WELI KURNIAWAN

Bank Mandiri - ·····9152

Detail Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Data Pembayaran	-
Tanggal dan Jam Bayar	09/01/2023 14:25:28
Tanggal Buku	10/01/23
Kode Cabang Bank	008
NTB	682809657576
NTPN	0A02655DEVM1U8UT
STAN	857580
Data Setoran	-
Kode Billing	820230108390365
Nama Wajib Bayar	Bendahara Penerimaan
Kementrian / Lembaga	000
Unit Eselon 1	01
Satuan Kerja	099422
Jumlah Setoran	Rp. 95,854,058.00
Terbilang	sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah
Keterangan	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMARI PNBP

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230108390365
Tanggal Billing	: 08-01-2023 11:08:20
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-01-2023 23:59:00
Tanggal Bayar	: 09-01-2023 14:25:28
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	: PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Total Disetor	: 95.854.058 (IDR)
Terbilang	: *Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Delapan (IDR)*
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 682809657576
NTPN	: 0A02655DEVM1U8UT

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Kode Akun	: 425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Setoran	: 95.854.058 (IDR)
Keterangan	: DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN CV. RAFLI RIFKI

PENGADILAN NEGEI/PHI/TIPIKOR MAMUJU KELAS I.A
Jalan A.P. Pettarani No. 26 Mamuju Kode Pos 91511
Telepon : (0426) 21035, No Faximile : (0426) 21035
e-mail : mamujupn@gmail.com
e-mail : delegasi.pnmamuju@yahoo.com
Website : pn-mamuju.go.id

ADDENDUM KONTRAK II

Nomor : W22.U12/2515/PL.01/PPK/XI/2022
Tanggal 14 November 2022

DARI

ADDENDUM KONTRAK I

Nomor : W22.U12/1968.a/PL.01/VIII/2022
Tanggal 01 Agustus 2022

DARI

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Nomor : W22-U12/1432/PL.01/VII/2022
Tanggal 21 Juli 2022

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN GEDUNG PASCA GEMPA PENGADILAN NEGERI MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2022

"ADDENDUM KONTRAK" ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/UKPBJ/KONS-MMJ/7/2022 tanggal 04 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W22-U12/1395/PL.01/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022, antara :

Nama	:	**Drs. P A H A R**
NIP	:	19650228 199402 1 002
Jabatan	:	PPK Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Mamuju Kelas 1A
Berkedudukan di	:	Jl. A.P. Pettarani No. 26 Mamuju

yang bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Negeri Mamuju** yang berkedudukan di Jln. A.P. Pettarani No. 26 Mamuju, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A Nomor : W22-U12/1527/KU.01.04/8/2022, Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam kapasitas Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Mamuju Kelas IA Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **"PPK"**, dengan :

Nama	:	**SUARDI**
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jln. Borong Jambu STP IV/357 Makassar
Akta Notaris Nomor	:	15
Tanggal	:	23 Desember 2014
Notaris	:	Taufiq Arifin

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ASRI NUSA selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2019.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Dipindai dengan CamScanner

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

SEMULA BERBUNYI :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
II. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
III. PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG UTAMA
    A. SUB-STRUKTUR
    B. STRUKTUR LANTAI 01
    C. STRUKTUR LANTAI 02
IV. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 8.181.600.000** *(delapan milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)* dengan kode akun kegiatan **33104081**;
(2) Kontrak ini dibiayai dari APBN;
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Negara Indonesia Cabang Menara Bosowa** rekening nomor : **1432892785** atas nama Penyedia : CV. ASRI NUSA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Addendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).
e. Surat Penawaran;
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
h. spesifikasi teknis; dan
i. Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 *(seratus lima puluh)* hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (seratus delapan puluh)* hari kalender.

Dipindai dengan CamScanner

BERUBAH MENJADI :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
- T E T A P -

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN ..... BERUBAH
II. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI ..... BERUBAH
III. PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG UTAMA ..... BERUBAH
   A. SUB-STRUKTUR ..... BERUBAH
   B. STRUKTUR LANTAI 01 ..... BERUBAH
   C. STRUKTUR LANTAI 02 ..... BERUBAH
IV. PEKERJAAN PEMBERSIHAN ..... T E T A P

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Total Harga Kontrak Awal termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 8.181.600.000 *(delapan milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah),* bertambah menjadi **Rp. 8.365.590.000, 00** *(delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan **33104081**;

(2) T E T A P

(3) T E T A P

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) T E T A P

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

   a. Addendum Kontrak;
   b. T E T A P
   c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
   d. T E T A P

Dipindai dengan CamScanner

e. T E T A P
f. T E T A P
g. T E T A P
h. Spesifikasi teknis; dan
i. Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) T E T A P
(2) Masa Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan pada kontrak awal selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir di tanggal 17 Desember 2022, berubah menjadi 164 (seratus enam puluh empat) hari kerja atau kontrak addendum ini berakhir di tanggal 31 Desember 2022;
(3) T E T A P

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN NEGERI MAMUJU

Dr. PAHAR
Nip. 19650228 199402 1 002

Untuk dan atas nama
CV. ASRI NUSA

SUARDI
Direktur

JAMINAN BANK (BANK GARANSI)
Nomor : 22/MMU/065/9668/SELASA

BNI

B 416063

Yang bertanda tangan di bawah ini.----------

Nama---------- : ANDI EDI SULAIMAN----------
Jabatan---------- : Pemimpin----------
Bertindak untuk dan atas nama :----------

Bank---------- : PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk----------
Berkedudukan di---------- : Mamuju----------
Alamat---------- : Jl. Urip Sumoharjo No.125A----------
Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",----------

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kepada :----------

Nama---------- : PAHAR----------
Berkedudukan di---------- : MAMUJU----------
Alamat---------- : JL.AP PETTARANI NO.26 MAMUJU----------
Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",----------

Setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.267.599.454 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntuntan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :----------

Nama---------- : CV. ASRI NUSA----------
Berkedudukan di---------- : MAKASSAR----------
Alamat---------- : JL. BORONG JAMBU STP IV NO.357 RT005 RW009 KEL BANGKALA KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR----------
Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMINAN",----------

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pasca Gempa Pengadilan Negeri Mamuju sesuai dengan kontrak nomor W22-U12/1432/PL.01/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberkan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN 178 Mamuju), bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.----------

--------Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022----------

--------Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank ----------

--------Kepala KPPN 178 Mamuju berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2023 Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim ----------

--------Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut diatas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.----------

--------Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat timbul daripadanya, bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mamuju----------

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PAHAR
Nip. 19650228 199402 1 002

Garansi Bank (Juli'21) PBT

Mamuju, 20 Desember 2022
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Mamuju

METERAI TEMPEL 10000 BA9F9AKX120854201

ANDI EDI SULAIMAN
Pemimpin

Scanned with CamScanner

PENGADILAN NEGEI/PHI/TIPIKOR MAMUJU KELAS I.A
Jalan A.P. Pettarani No. 26 Mamuju Kode Pos 91511
Telepon : (0426) 21035, No Faximile : (0426) 21035
e-mail : mamujupn@gmail.com Website : pn-mamuju.go.id
e-mail : delegasi.pnmamuju@yahoo.com

ADDENDUM KONTRAK III

Nomor : W33-U1/2973/PL.01/PPK/XII/2022
Tanggal 30 Desember 2022

DARI

ADDENDUM KONTRAK II

Nomor : W22-U12/2515 /PL.01/PPK/XI/2022
Tanggal 14 November 2022

DARI

ADDENDUM KONTRAK I

Nomor : W22.U12/1968.a/PL.01/VIII/2022
Tanggal 01 Agustus 2022

DARI

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Nomor : W22-U12/1432/PL.01/VII/2022
Tanggal 21 Juli 2022

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN GEDUNG PASCA GEMPA PENGADILAN NEGERI MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2022

"ADDENDUM KONTRAK" ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 06/UKPBJ/KONS-MMJ/7/2022 tanggal 04 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W22-U12/1395/PL.01/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022, antara :

Nama	:	**Drs. P A H A R**
NIP	:	19650228 199402 1 002
Jabatan	:	PPK Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Mamuju Kelas 1A
Berkedudukan di	:	Jl. A.P. Pettarani No. 26 Mamuju

yang bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Negeri Mamuju** yang berkedudukan di Jln. A.P. Pettarani No. 26 Mamuju, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A Nomor : W22-U12/1527/KU.01.04/8/2022, Tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam kapasitas Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Mamuju Kelas IA Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **"PPK"**, dengan :

Nama	:	**SUARDI**
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jln. Borong Jambu STP IV/357 Makassar
Akta Notaris Nomor	:	15
Tanggal	:	23 Desember 2014
Notaris	:	Taufiq Arifin

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ASRI NUSA selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2019.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

SEMULA BERBUNYI :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN
II. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
III. PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG UTAMA
   A. SUB-STRUKTUR berubah di Addendum II
   B. STRUKTUR LANTAI 01 berubah di Addendum II
   C. STRUKTUR LANTAI 02 berubah di Addendum II
IV. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak setelah Addendum II termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 8.365.590.000** *(delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)* dengan kode akun kegiatan **33104081**;

(2) Kontrak ini dibiayai dari APBN;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Negara Indonesia Cabang Menara Bosowa** rekening nomor : **1432892785** atas nama Penyedia : CV. ASRI NUSA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Addendum Kontrak (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
d. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).
e. Surat Penawaran;
f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
h. spesifikasi teknis; dan
i. Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 164 *(seratus enam puluh empat)* hari kalender, namun setelah Addendum II berubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama *180 (seratus delapan puluh)* hari kalender.

BERUBAH MENJADI :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
- T E T A P -

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
- T E T A P -

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) T E T A P
(2) T E T A P
(3) T E T A P

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) T E T A P
(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
    a. Addendum Kontrak;
    b. T E T A P
    c. T E T A P
    d. T E T A P
    e. T E T A P
    f. T E T A P
    g. T E T A P
    h. T E T A P
    i. T E T A P

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) T E T A P

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan setelah Addendum II berubah menjadi selama 180 *(seratus delapan puluh)* hari kalender berakhir 31 Desember 2022 dan oleh karena belum terselesainya pekerjaan pada tanggal tersebut dengan capaian progres 85,15 %

pertanggal 30 Desember 2022 dan masih tersisa 14,85%, selanjutnya diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Maret 2023 dengan ketentuan :

1. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan
2. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan dikenakan denda keterlambatan;
3. Penyedia bersedia memperpanjang Jaminan Garansi Bank s.d. tanggal 31 Maret 2023;
4. Akibat wanprestasi ini, maka Saudara dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 /1000 (satu per seribu) dari sisa Nilai kontrak setiap hari keterlambatan (setelah tanggal kontrak berakhir yaitu setelah tanggal 31 Desember 2022). dari perhitungan sisa nilai kontrak dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut :

Perhitungan Denda

Nilai Kontrak Rp.	Prosentase Progres per 30 Desember 2022	Nilai Progres Rp.
8,365,590,000	85.15%	7,123,299,885
Nilai Kontrak Rp	**di Kurangi Nilai Progres Rp**	**Sisa Nilai Progres Rp**
8,365,590,000	7,123,299,885	1,242,290,115
Sisa Nilai Dikenakan Denda 14.85%	**Denda**	**Denda/ hari kalender Rp.**
1,242,290,115	1/1000	**1,242,290.12**

5. Selanjutnya bilamana tanggal 31 Maret 2023, tidak selesai, maka terhadap Kontrak tersebut akan dilakukan pemutusan dan dikenakan sanksi pemutusan Kontrak

(3) T E T A P.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak,

rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Mamuju 30 Desember 2022

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN NEGERI MAMUJU

Drs. PAHAR
Nip . 19650228 199402 1 002

Untuk dan atas nama
CV. ASRI NUSA

SUARDI
Direktur

JAMINAN BANK (BANK GARANSI)
Nomor : 22/MMU/065/9668/SELASA

B 416006

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI EDI SULAIMAN
Jabatan : Pemimpin
Bertindak untuk dan atas nama :

Bank : PT.Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk
Berkedudukan di : Mamuju
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.125A
Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kepada :

Nama : PAHAR
Berkedudukan di : MAMUJU
Alamat : JL.AP PETTARANI NO.26 MAMUJU
Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN",

Setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.267.599.454 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntuntan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :

Nama : CV. ASRI NUSA
Berkedudukan di : MAKASSAR
Alamat : JL. BORONG JAMBU STP IV NO.357 RT005 RW009 KEL BANGKALA KEC MANGGALA KOTA MAKASSAR
Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pasca Gempa Pengadilan Negeri Mamuju sesuai dengan kontrak nomor W22-U12/1432/PL.01/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepala KPPN 178 Mamuju), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

-------Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023

-------Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

-------Kepala KPPN 178 Mamuju berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 April 2023 Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

-------Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut diatas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

-------Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat timbul daripadanya, bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mamuju

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PAHAR
Nip. 19650228 199402 1 002

Mamuju, 03 Januari 2023
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Mamuju

METERAI TEMPEL
44AKX252906880

ANDI EDI SULAIMAN
Pemimpin

Scanned with CamScanner

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI MAMUJU
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00238A | Tanggal 22-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Mamuju (178)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.884.907.626,00

****** DUA MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH RIBU ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.099638/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/178.22000598/0/2 Tanggal Kontrak/SPK : 21-07-2022 Nomor Kontrak/SPK : W22-U12/1432/PL.01/VII/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
099638.178.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.3402.2.000000.000000	3.267.599.454,00
Jumlah Pengeluaran	*3.267.599.454,00*

POTONGAN	JUMLAH UANG
552006.178.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3402.2.000000.000000	58.875.666,00
552006.178.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3402.2.000000.000000	323.816.162,00
Jumlah Potongan	382.691.828,00
TOTAL PEMBAYARAN	*2.884.907.626,00*

Kepada:

Nomor	: 1023479	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: CV. ASRI NUSA	Rekening	: 1432892785
NPWP1	: 721403609805000	Nama Pemilik	: CV ASRI NUSA
NPWP2	: 001139948814000	Alamat	: Jl. Borong Jambu STP IV / 357 Makassar
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin ke-4 Pembangunan Gedung Kantor Pasca Gempa PN. Mamuju Sesuai Jaminan Bank No. 22/MMU/065/9668/SELASA Tgl. 20-12-2022, dan BAP No.W33-U1/2873/PL.01/XII/2022 Tanggal 21-12-2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

MAMUJU, 22 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

JUSRI
Penata Muda Tingkat I (III/b)

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI MAMUJU
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00238A
Tanggal : 22-Desember-2022

No	Detail Coa Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	Nilai
099638.178.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.3402.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000083-Kontruksi Fisik	3.267.599.454,00
	Jumlah	3.267.599.454,00
Jumlah		3.267.599.454,00

MAMUJU, 22 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

JUSRI
Penata Muda Tingkat I (III/b)
196709061990031003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAMUJU

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221781303005730 Tanggal : 23-12-2022 s.d. 27-12-2022

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221781303005730	23-12-2022	27-12-2022	2,884,907,626	00238T/099638/2022	22-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Termin ke-4 Pembangunan Gedung Kantor Pasca Gempa PN. Mamuju Sesuai Jaminan Bank No. 22/MMU/065/9668/SELASA Tgl. 20-12-2022, dan BAP No.W33-U1/2873/PL.01/XII/2022 Tanggal 21- 12-2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 06-03-23 14:07:33 oleh : 099638

PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR MAMUJU KLAS I.A
Jalan A.P. Pettarani No. 26 Mamuju Kode Pos 91511
Telepon : (0426) 21035-21104, No Faximile : (0426) 21035
e-mail : mamujupn@gmail.com Website : pn-mamuju.go.id
e-mail delegasi : delegasi.pnmamuju@yahoo.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
Nomor : W22-U12/[illegible]/PL.01/II/2023

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-02-2023)**, Kami selaku Tim Pemeriksa/Penerima Pekerjaan di Lapangan (PHO), berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W22.U12/1527/KU.01.04/8/2022, telah mengadakan Pemeriksaan atas penyelesaian pekerjaan untuk serah terima pertama pada :

- Kegiatan : Pembangunan Gedung Pasca Gempa Kantor Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2023.
- Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Gempa Kantor Pengadilan Negeri Mamuju.
- Lokasi : Jl. AP. Pettarani No.26 Mamuju
- Nomor/Kontrak : W22-U12/1432/PL.01/VII/2022, Tanggal 21 Juli 2022
- Nomor/Addendum II : W22-U12/2515/PL.01/PPK/XI/2022, Tanggal 14 November 2022
- Nilai Kontrak : Rp. 8.365.590.000,-
  (Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- Jangka Waktu Pelaksanaan: 164 (Seratus Enam Puluh Empat) hari kalender
- Pelaksana : **CV. ASRI NUSA**

Dengan ini menyatakan :

1. Kemajuan Fisik Pekerjaan telah mencapai bobot sebesar 100 % (Seratus Persen).
2. Bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Kontrak telah diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingga dapat diadakan serah terima pertama atas seluruh pekerjaan tersebut dan Kontraktor Pelaksana berhak mengajukan permintaan pembayaran sebesar 100 % (Seratus Persen) dengan menyertakan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak.
3. Kontraktor berkewajiban melaksanakan perbaikan atas kerusakan/cacat yang terjadi atas pekerjaan pada masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal serah terima pertama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN NEGERI PHI/TIPIKOR MAMUJU KLAS I.A
Jalan A.P. Pettarani No. 26 Mamuju Kode Pos 91511
Telepon : (0426) 21035-21104, No Faximile : (0426) 21035
e-mail : mamujupn@gmail.com Website : pn-mamuju.go.id
e-mail delegasi : delegasi.pnmamuju@yahoo.com

TIM PEMERIKSA/PENERIMA PEKERJAAN UNTUK SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

KEGIATAN

PEMBANGUNAN GEDUNG PASCA GEMPA KANTOR PENGADILAN NEGERI MAMUJU

TAHUN ANGGARAN 202.

PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PASCA GEMPA KANTOR PENGADILAN NEGERI MAMUJU.

KONTRAKTOR PELAKSANA CV. ASRI NUSA

Konsultan Pengawas	**Kontraktor Pelaksana**
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN	**CV. ASRI NUSA**
Ir. WUDI DARUL PUTRA ST.MT	**S U A R D I**
Direktur	**Direktur**

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN NEGERI MAMUJU

Dra. PAHAR
NIP. 19650228 199402 1 002

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230215441048
Tanggal Billing	:	15-02-2023 13:36:10
Tanggal Kedaluwarsa	:	22-02-2023 13:36:10
Tanggal Bayar	:	15-02-2023 13:53:47
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:	ATM
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	PENGADILAN NEGERI MAMUJU
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***01*** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	:	***099638*** - PENGADILAN NEGERI MAMUJU
Total Disetor	:	49.691.605 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**230215224731**
NTPN	:	**97A077QLUFGD86KO**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Kode Akun	:	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Setoran	:	49.691.605 (IDR)
Keterangan	:	Pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung kantor pasca gempa pengadilan negeri mamuju tahun 2022

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR MAMUJU KELAS I A
Jl. A. Pangeran Pettarani No. 26 Mamuju, Kode Pos 91511
Telp: (0426) 21035-21105, No. Faximile: (0426) 21035

ADENDUM KE – I
PPK dengan Direktur CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN
(Pergantian PPK)
Kontrak Lumpsum
Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Fisik Gedung Pasca Gempa
Pengadilan Negeri Mamuju
Nomor: W22.U12/ 1968.b /PL.01 / VIII /2022
Tanggal: 01 Agustus 2022

SURAT PERJANJIAN

Pada hari ini, ***Senin Satu Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua***, bertempat di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A, kami yang betandatangan dibawah ini :

Nama	: Drs. Pahar
Nip.	: 19650228 199402 1 002
Jabatan	: PPK Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022
Bekedudukan	: Jl. KS. Tubun No. 68, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, berdasakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A 2022, Nomor W22.U12 / 1527 / Ku.01.04/ 8 /2022,

Dipindai dengan CamScanner

.tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, tanggal, 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut **PPK**, dengan :

Nama	: **Ir. Wudi Darul Putra, ST.,M.T.**
Jabatan	: **Direktur CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**
Berkedudukan	: Jl..AP. Pettarani 2, No. 29, Makassar
Akta Notaris Nomor	: 08
Tanggal	: 28 Desember 2019
Notaris	: Fatmi Nuryanti, S.H.

Yang bertindak atas nama .***Perusahaan CV.*** **CIPTA ESTETIKA KONSULTAN,** selanjutnya disebut " **Penyedia** "

Dengan ini memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
8. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020, tentang APBN tahun 2021;
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

Digitized dengan CamScanner

12. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, Tentang pengalihan organisasi, Administrasi, dan Finansial dilinkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005, Tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia.
18. Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;.
19. Peraturan LKPP, Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia , tanggal 8 Juni 2018
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA-005.01.2.099638/2022, Tanggal 17 November 2021;

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. Telah dilaksanakan penadatanganan Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik Pengadilan Negeri Mamuju,Tahun Anggaran 2022, .Nomor:. W22.U12/1435/PL.01 / VII /2022, tanggal, 21 Juli 2022 antara KPA (KPA Rangkap PPK) Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A dengan Penyedia Direktur **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN.**
2. Telah dilaksanakan ***Adendum Ke - I*** Pergantian Penunjukan PPK Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Pasca Gempa Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini sebelumnya KPA merangkap jabatan PPK, selanjutnya memisahkan jabatan dirangkap KPA dan PPK dengan menunjuk PPK yang baru untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai PPK. Dalam Kapasitas

Digitized dengan CamScanner

Pembangunan Gedung Pasca Gempa Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022.

3. Telah diterbitkan Keputusan KPA. Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Nomor : W22.U12/1527/Ku.01.04/8/2022 tangga; 01 Agustus 2022. tentang Penunjukan PPK. Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022..
4. Telah diterbitkannya Keputusan KPA. Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A, Nomor : W22.U12/1968/Ku.01.04/VIII/2022, tentang Serah Terima Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). tangga; 01 Agustus 2022.yang ditandatangani bersama KPA dan PPK..
5. Hal-hal yang berhubungan dengan isi perjanjian kontrak yang dimaksud tidak ada perubahan.

Berdasarkan angka 2 dan 3 diatas nama PPK yag diganti **H. Surahman H, S.H.,** (PPK terdahulu) tidak lagi memiliki kewenangan melakukan sesuai dengan atas kontrak ini , maka oleh karena itu berdasarkan keterangan para pihak diatas yang merupakan satu kesatuan dengan ***Adendum .Ke-I*** ini, **PPK** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat dengan menyetujui hal-hal sbb :

Semula :

Nama	: **H. Surahman H, S.H.,**
Nip.	: 19700207 199203 1 001
Jabatan	: PPK. Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022
Berkedudukan	: Jl. AP.Pettarani No.26, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat .

Yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, Nomor:. W22.U12/2546/UK.01 / 12 / 2021, tanggal, 29 Desember 2021 .tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022.., selanjutnya disebut **PPK**".

Dipindai dengan CamScanner

Menjadi :

Nama	: **Drs. Pahar**
Nip.	: 19650228 199402 1 002
Jabatan	: PPK . Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A, Tahun Anggaran 2022..
Bekedudukan	: Jl. KS. Tubun No. 68, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Prov. Sulawesi Barat .

Atas nama. Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Mamuju Kelas I A, Nomor W22.U12/1527/Ku.01.04/8/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, tanggal, 01 Agustus 2022 selanjutnya disebut **PPK**".

Dengan demikian,**PPK** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani **Adendum Ke- I** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam dua (2) rangkap,masing-masing dibubuhi dengan materai,mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
CV. Cipta Estetika Konsultan

Ir. Wudi Darul Putra, ST.,M.T
Direktur

Untuk dan atas nama
PPK Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A
Tahun Anggaran 2022

Drs. Pahar
Nip.19650228 199402 1 002

PENGADILAN NEGEI/PHI/TIPIKOR MAMUJU KELAS I.A
Jalan A.P. Pettarani No. 26 Mamuju Kode Pos 91511
Telepon : (0426) 21035, No Faximile : (0426) 21035
e-mail : mamujupn@gmail.com
e-mail : delegasi.pnmamuju@yahoo.com
Website : pn-mamuju.go.id

ADENDUM KE-II
Nomor : W22.U12/2561.a/PL.01/PPK/XII/2022
Tanggal 5 Desember 2022
DARI
ADENDUM KE-I
Nomor : W22.U12/1968.b/PL.01/VIII/2022
Tanggal 01 Agustus 2022
DARI
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum
Nomor : W22-U12/1435/PL.01/VII/2022
Tanggal 21 Juli 2022

Paket Jasa Konsultansi
PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN FISIK
PENGADILAN NEGERI MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2022

"ADDENDUM KE-II" ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Lumsum Pengawasan Pembangunan Fisik Pengadilan Negeri Mamuju, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari **Senin** tanggal **Lima** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : /UKPBJ/KONS-MMJ/7/2022 tanggal Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W22-U12/1437/PL.01/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022, antara :

Nama	:	**Drs. Pahar**
NIP	:	19650228 199402 1 002
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022
Berkedudukan di	:	Jl. A.P. Pettarani No. 26 Mamuju

Yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A 2022, Nomor W22.U12 / 1527 / Ku.01.04/ 8 /2022, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022, tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut **"Pengguna Jasa"**, dengan :

Nama	:	**Ir. Wudi Darul Putra, ST., MT**
Jabatan	:	Direktur CV. Cipta Estetika Konsultan
Berkedudukan di	:	Jl. A.P. Pettarani 2 No. 29 Makassar.
Akta Notaris Nomor	:	08
Tanggal	:	28 Desember 2019
Notaris	:	Fatmi Nuryanti, SH

Digitized dengan CamScanner

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Cipta Estetika Konsultan, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

   1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Digitized dengan CamScanner

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasca Gempa Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju pada Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

SEMULA BERBUNYI :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanaj
3. PekerjaanTiang Pancang
4. Pekerjaan Struktur
5. Pekerjaan Akhir

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 358.457.000** *(tiga ratus limah puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)* dengan kode akun kegiatan **533111**;

(2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA APBN Pengadilan Negeri Mamuju Tahun Anggaran 2022;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Mandiri KCP Makassar** Slamet Riyadi, Rekening Nomor : **142008885088** atas nama Penyedia : **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN.**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
   a. Addendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Surat Penawaran;
   d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari atas Daftra Personil, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personil;
   e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   f. Kerangka Acuan Kerja;
   g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

Dipindai dengan CamScanner

h. Data Teknis selain KAK (contoh : Dokumen pengkajian, Dokumen feasibility study/pra Feasibility Study, dll); dan

i. Dokumen lainya seperti : SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka akan berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiaban para pihak;

(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

BERUBAH MENJADI :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
- T E T A P -

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan ..... Tetap
2. Pekerjaan Tanah ..... Berubah
3. PekerjaanTiang Pancang ..... Berubah
4. Pekerjaan Struktur ..... Berubah
5. Pekerjaan Akhir ..... Tetap

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) T E T A P

(2) T E T A P

(3) T E T A P

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :

a. Addendum Kontrak (apabila ada);

b. Tetap;

c. Tetap;

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari atas Daftra Personil, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personil;

Dipindai dengan CamScanner

e. Tetap;
f. Tetap;
g. Tetap;
h. Tetap; dan
i. Tetap.

(2) T E T A P

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) T E T A P

(2) Masa Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan pada kontrak awal selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan berakhir di tanggal 17 Desember 2022, berubah menjadi 164 (seratus enam puluh empat) hari kerja atau kontrak addendum ini berakhir di tanggal 31 Desember 2022;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** **PENGADILAN NEGERI MAMUJU**	Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**
Drs. P AH A R Nip . 19650228 199402 1 002	**Ir. WUDI DARUL PUTRA, ST., MT** Direktur

Dipindai dengan CamScanner

PENGADILAN NEGEI/PHI/TIPIKOR MAMUJU KELAS I.A

Jalan A.P. Pettarani No. 26 Mamuju Kode Pos 91511
Telepon : (0426) 21035. No Faximile : (0426) 21035
e-mail mamujupn@gmail.com Website pn-mamuju.go.id
e-mail delegasi.pnmamuju@; ahoo com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SEBAGAI PENJAMINAN

Nomor ;W33-U1/2896/PL.01/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Pahar

NIP : 19650228 199402 1 002

Jabatan : PPK Dalam Kapasitas Pembangunan Gedung Kantor Di Lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Mamuju Kelas I A Tahun Anggaran 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia untuk menjamin CV. Cipta Estetika Konsultan sehubungan dengan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor W22.U12/1435/PL.01/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Ademdum I Nomor /1968.b/PL.01/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, dan Ademdum II Nomor /2561.a/PL.01/PPK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan nilai kontak sebesar, Rp. **358.457.000,-** (*tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), dan sisa nilai kontrak sebesar Rp. **Rp. 35.845.700,-** (*tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).

2. Apabila di kemudian hari CV. Cipta Estetika Konsultan melakukan wanpretasi/ Pekerjaan yang tidak dapat di selesaikan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi /pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mamuju, 19 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Pahar
NIP. 19650228 199402 1 002

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI MAMUJU
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00237A | Tanggal 22-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Mamuju (178)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 31.163.153,00

****** TIGA PULUH SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH TIGA RIBU SERATUS LIMA PULUH TIGA RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.099638/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/178.22000601/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 21-07-2022 Nomor Kontrak/SPK : W22-U12/1435/PL.01.VII.2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
099638.178.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.3402.2.000000.000000	35.845.700,00
Jumlah Pengeluaran	*35.845.700,00*

POTONGAN	JUMLAH UANG
552006.178.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3402.2.000000.000000	1.130.270,00
552006.178.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.3402.2.000000.000000	3.552.277,00
Jumlah Potongan	4.682.547,00
TOTAL PEMBAYARAN	*31.163.153,00*

Kepada:

Nomor	: 1023847	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: CV. CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN	Rekening	: 1520088885088
NPWP1	: 724709811805000	Nama Pemilik	: CV CIPTA ESTETIKA KONSULTAN
NPWP2	: 001139948814000	Alamat	: Jl. A.P Pettarani 2 No. 29 Makassar
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik PN. Mamuju TA 2022 sesuai SPTJM No.W33-U1/2896/PL.01/XII/2022 Tanggal 19-12-2022 dan BAP No. W33-U1/2870/PPK/XII/2022 Tanggal 21-12-2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

MAMUJU, 22 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

JUSRI
Penata Muda Tingkat I (III/b)

[Kode : PEM003]

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN NEGERI MAMUJU

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00237A

Tanggal : 22-Desember-2022

No	*Detail Coa*	*Nilai*
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
099638.178.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.3402.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000085-Pengawas	35.845.700,00
	Jumlah	**35.845.700,00**
Jumlah		**35.845.700,00**

MAMUJU, 22 Desember 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM

JUSRI

Penata Muda Tingkat I (III/b)

196709061990031003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAMUJU

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221781302002361 Tanggal : 23-12-2022 s.d. 23-12-2022

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221781302002361	23-12-2022	23-12-2022	31,163,153	00237T/099638/2022	22-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Fisik PN. Mamuju TA 2022 sesuai SPTJM No.W33-U1/2896/PL.01/XII/2022 Tanggal 19-12-2022 dan BAP No. W33-U1/2870/PPK/XII/2022 Tanggal 21-1 2-2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 09-03-23 07:24:14 oleh : 099638

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

UNTUK PAKET PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BARU PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Pelaksana Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak". dibuat dan ditandatangani di Kantor Pengadilan Agama Rumbia pada hari Jumat tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**,** berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08/UKPBJ/KONS-PA.RUMBIA/9/2022 tanggal 26 September 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: W21-A10/46/SPPBJ/PPK/9/2022, tanggal 27 September 2022, untuk sumber dana APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor: SP DIPA-005.01.2.401887/2022, tanggal 17 November 2021, antara:

Nama	:	Ramliyanto, A.Md
NIP	:	198004152006041003
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana

yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Rumbia, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W21-A10/KPA/SK.01/KU.01/1/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut **" Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan

Nama	:	Anton Purwono, ST
Jabatan	:	Direktur Utama
Berkedudukan di	:	Jl. Dewi Sartika Barat 3B, Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Akta Notaris Nomor	:	22
Tanggal	:	10 Agustus 2012
Notaris	:	Ida Widiyanti, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA selanjutnya disebut **"Penyedia".**

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemelihan;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ***Nomor: W21-A10/46/SPPBJ/PPK/9/2022, Tanggal 27 September 2022*** untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia sebagaimana diterangkan dalam Kontrak ini, selanjutnya disebut "Pekerja Konstruksi".
c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kontrak ini;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian Kontrak ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung terdiri atas:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Galian, Urugan Tanah dan Pondasi
3. Pekerjaan Struktur Beton & Baja
   A. Pekerjaan struktur bawah
   B. Lantai I elevasi - 0.00 s.d + 4.45
   C. Lantai II elevasi + 4.45 s.d + 10.1
   D. Pekerjaan Atap
4. Pekerjaan Beton Praktis & Balok Lintle
   A. Lantai - I
   B. Lantai - II
5. Pekerjaan dinding dan plesteran
   A. Lantai - IB. Lantai - I
6. Pekerjaan Kusen Allumunium dan Railling
   A. Lantai - I
   B. Lantai – II
7. Pekerjaan Dinding Melekat (Interior)
8. Pekerjaan Lantai
   A. Lantai - I
   B. Lantai - II
9. Pekerjaan Plafond
   A. Lantai - I
   B. Lantai - II
10. pekerjaan pengecatan & laburan
    A. Lantai - I
    B. Lantai - II
11. Pekerjaan Sanitary
12. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
13. Pekerjaan Standar
    A. Pekerjaan Plumbing
       a. Instalasi air bersih
       b. Instalasi air kotor, bekas dan vent
       c. Instalasi air hujan
    B. Pekerjaan Elektrikal
       a. Penyambungan ke PLN 130 kva
       b. Pekerjaan panel dan kabel feeder
       c. Pekerjaan instalasi penerangan dan daya stop kontak
14. Pekerjaan Non Standar
    A. Pekerjaan Plumbing
       - Pekerjaan air bersih
    B. Pekerjan Tata Udara dan Ventilasi
       a. Pekerjaan tata udara
       b. Pekerjaan ventilasi
    C. Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat
       a. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan armatur
       b. Pekerjaan instalasi penangkal petir dan grounding
       c. Pekerjaan rak kabel
    D. Pekerjaan Elektronik

a. Pekerjaan fire alarm
b. Pekerjaan cctv
c. Pekerjaan data dan telekomunikasi
d. Pekerjaan tata suara
e. Pekerjaan master antena televisi (matv)

- Pokok pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa adalah Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia untuk tahun 2022;
- Penyedia jasa menyediakan pekerja untuk dipekerjakan di Pengadilan Agama Rumbia dan diharapkan mampu mempelajari dan mengkonfirmasikan berbagai kriteria, standar kompetensi petugas yang akan digunakan untuk setiap jenis kegiatan mengacu kepada persyaratan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Rumbia untuk setiap kegiatan dan posisi yang akan diisi.
- Penyedia Membuat Laporan

Pasal 3
JENIS KONTRAK, HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1) Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dengan Pembebanannya menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2022
2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 16.046.768.492,51 (enam belas miliyar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu rupiah) dengan kode akun kegiatan 005.01.WA.1071.EEB.A.051.533111
3) Kontrak ini dibiayai dari APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor DIPA-005.01.2.401887/2022 Tanggal 17 November 2021.
4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri rekening nomor: 1350088200884 atas nama Penyedia : PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial dan peralatan utama, lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barng/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-

jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Addendum (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
e. Syarat-syarat umum Kontrak;
f. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada koreksi aritmetik);

Pasal 5
MASA KONTRAK

1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 86 (delapan puluh enam) hari kalender.
3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

PENUTUP

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
PENYEDIA	**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA	**PENGADILAN AGAMA RUMBIA**
ANTON PURWONO, ST	**RAMLIYANTO, A.Md**
Direktur Utama	NIP. 198004152006041003

II. SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.3 **Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga** adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran

1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satuan jenis pekerjan tertentu per satu satuan tertentu.

1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak

mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

1.13 **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan** adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.

1.27 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/ Konsorsium Lembaga Penjaminan/ Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.

1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

untuk memulai melaksanakan pekerjaan.

1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia

4. Korespondensi

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK

5. Wakil Sah Para Pihak

5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.

5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak

6. Larangan Korupsi, Kolusi dan

6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau

	Nepotisme (KKN), Penyalagunaan Wewenang Serta Penipuan	menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
		6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
		6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat penandatangan kontrak sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK dan c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam
		6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA
		6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi dan /atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	**Asal Material/ Bahan**	7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat penandatangan Kontrak
		7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi
		7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan
8.	**Pembukuan**	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9.	**Perpajakan**	Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak
10.	**Pengalihan Seluruh Kontrak**	10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.

10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka

13. KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak

15. Tugas Dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi

terhadap hasil akhir pekerjaan;

e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
f. bertanggungjawab terhadap hasilpelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya ;memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
g. Memberikan laporan secara periodic kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan dalam Kontrak

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundangundangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Penjabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Penjabat penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan**.**

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebutPenyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B. 1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja

19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.

19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

19.6 Penyedia menyerahkan personil dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bukti sertifikat konpetensi:
   1) Personel manajerial pada pekerjaan Konstruksi atau
   2) Personil inti pada Jasa konsultansi Konstruksi
b. Bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam hutuf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan
c. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran
d. Melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan
e. Pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka

waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.1 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);
c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak

21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Rencana Keselamatan Konstruksi

22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.

22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak

22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak

22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap

pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Penerapan SMKK:
   1) RKK;
   2) RMPK;
   3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
   4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
b. Rencana Kerja;
c. organisasi kerja;
d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak:
   1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU Subkontraktor jasa spesialis yang dinominasikan dan/atau
   2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha Subkontraktor jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan

   Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
g. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, ruma, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama

25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

26. Menggunakan Produksi Dalam Negeri

26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran

26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK..

27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak..

27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK

27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba Pemberian Kesempatan ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil Penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50(lima puluh) hari kalender
2) Dalam hal telah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
   a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangkawaktu sesuai kebutuhan, atau
   b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal ini Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya
3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengaturpengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan(apabila ada)
4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran;

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan Kontrak serta pengenaan sanksi administrative dalam hal antara lain:
   1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
   2) Pekerjaan yang harus segerah dipenuhi dan tidak dapat di tunda, atau
   3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk meyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur:
   a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan
   b. Pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia
   c. Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, dan
   d. Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.

33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak

33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK

33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan

33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.

33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan

sebagian atau secara parsial yaitu:
a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara

34. Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar As-built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan

35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
a. Perubahan pekerjaan
b. Perubahan Harga Kontrak
c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
d. Perubahan personel manejerial dan/atau peralatan utama, dan/atau
e. Perubahan kontrakyang disebabkan masalah administrasi

36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam

Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum

38. Perubahan Harga

38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaian harga; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.

38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah

sebagai berikut:

a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum.

38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
c. Peristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
c. Keadaan Kahar.

39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b

39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

39.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.6 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40. Perubahan Personel manajerial dan/atau peralatan utama

40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencananon alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Kedaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
b. Kurva S pekerjaan; dan
c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5

41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan

terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
   a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan;
   b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
   c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
   d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;

41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia

41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
   a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
   b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak

41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak

43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak

44. Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
b. dokumen pendukung

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

45 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi

a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud

47. Berakhirnya Kontrak

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak Dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK

50. Penggunaan DokumenDokumen Kontrak dan Informas

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar- gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitungsejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan

Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
   i. segala risiko terhadap kecelakaan;
   ii. kerusakan akibat kecelakaan.
b. kehilangan; dan/atau
c. risiko lain yang tidak dapat diduga

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan Jasa atau Pengawas Pekerjaan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK

56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakantindakan berikut:

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana

Kerja dan metode kerja;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK

56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

57.3 Laporan harian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatangan Kontrak

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen- dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam

SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan, dan

b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
   1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
      a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
      b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
   2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
      a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
      b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU
   3) Dalam hal Pesrta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha papua
   4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan dan pembangunan kesejahteraan di Propinsi Papua dan Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2)

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada

pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/ Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
   1) Bank Umum;
   2) Perusahaan Asuransi;
   3) Perusahaan Penjaminan;
   4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
b. Penerbit jaminan peksanaan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh

persen) nilai HPS.

63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;

63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.

63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

64. Hak Dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
f. menilai kinerja Penyedia

65. Fasilitas

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau
h. ketentuan lain dalam SSKK

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.

66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi

67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan

68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus

sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak

69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak

69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
a. beban pajak;
b. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
d. biaya penerapan SMKK.

69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

70. Pembayaran

70.1 Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
   1) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
   2) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen);
   3) Nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
c. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen);
d. Besaran uang muka untuk Kontrak Tahun Jamak, diberikan uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen);
e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus

mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
e. pembayaran harus memperhitungkan:
   1) angsuran uang muka;
   2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
   3) denda (apabila ada);
   4) pajak; dan/atau
   5) uang retensi.
f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal- hal yang sedang menjadi perselisihan

70.3 Material on Site Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian

dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
    1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
    2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
    3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
    4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
    5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
    6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
d. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
e. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
f. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
    1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
    2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

    sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
c. Pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.

71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan

71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan

72. Perhitungan Akhir

72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

73.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkanPenyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

77. Perbaikan Cacat Mutu

77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak

77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya

perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pengguna Jasa.

77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan

78. Kegagalan Bangunan

78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun

78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

78.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban

untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui
a. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. Dewan sengketa konstruksi;
c. Pengadilan
Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	**Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Pengadilan Agama Rumbia Nama : Ramliyanto, A.Md Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana Telepon : 0401-3088873 *Website* : pa-rumbia.go.id Faksimili : 0401-3088873 *e-mail* : pengadilanagamarumbia@gmail.com Penyedia : **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA** Nama : Anton Purwono, ST Alamat : Jl. Dewi Sartika Barat 3B, Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah Telepon : (024) 86457522 *Website* : - Faksimili : - *e-mail* : berkibarbersamabendera@gmail.com
4.2 & 5.1	**Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Ramliyanto, A.Md Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W21-A10/KPA/SK.01/KU.01/1/2022, tanggal 3 Januari 2022. Untuk Penyedia: Nama : Anton Purwono, ST Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 15 November 2021
6.3.b & 6.3.c, 44.4 &44.6	**Pencairan Jaminan**	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari.
27.1	**Masa Pelaksanaan**	Masa Pelaksanaan selama 86 (delapan puluh enam) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
27.4	**Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama ..... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) … [diisi bagian pekerjaannya] selama ..... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)]

33.8 **Masa Pemeliharaan**

Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

33.19 **Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**

Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:

1. .....
2. .....

[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan(rancangankontrak)]

33.18 **Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**

1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)……[diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan …… [diisi bagian pekerjaannya].
2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)……[diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan …… [diisi bagian pekerjaannya].

Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

35.1 **Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**

Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
dan/atau
Pedoman pengoperasian dan Pemeliharaan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

38.7 **Penyesuaian Harga**

Penyesuaian hargatidak diberikan (dalam hal diberikan) maka rumusannya sebagai berikut:

Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.)
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, falam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15
B,c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+ dst adalah 1,00
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada b u l a n saat pekerjaan d i l a k sa na k a n.
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:

Pekerjaan	Koefisien Komponen				
	a	b	c	d	a+b+c+d
Timbunan	0,15	.....	.....	.....	1,00
Galian dengan alat	0,15	.....	.....	.....	1,00
Beton	0,15	.....	.....	.....	1,00
Beton Bertulang	0,15	.....	.....	.....	1,00

b. Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).

c. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

d. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

e. Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:

   Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.
   dst

   Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan

   Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

   V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

f. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

g. Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.

h. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

45.b Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak

diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

49.1	**Hak dan kewajiban Penyedia**	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Hak Penyedia adalah mendapatkan Kerjasama yang baik dengan Pejabat Penandatangan Kontrak beserta jajaranya dan mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaan 2. Kewajiban penyedia adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
56.3	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah : perubahan Kontrak, desain, spesifikasi teknis
56.3	**Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : Pekerjaan Utama
58	**Kepemilikan Dokumen**	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : softcopy autocad setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak
65	**Fasilitas**	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: softcopy autocad dan fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini
66.1.h	**Peristiwa Kompensasi**	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah .....[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK
70.1.e	**Besaran Uang Muka**	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
70.2.d	**Pembayaran Prestasi Pekerjaan**	Untuk Pekerjaan seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu sejumlah Harga Penawaran terkoreksi adalah sebesar ***Rp. 16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)*** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp.** ***16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)***

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 16.046.768.492,51) = Rp. 3.209.353.698,50 (tiga miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh rupian)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas

b) Pembayaran Tahap II sebesar 35% dari harga Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(35% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 5.616.368.972,38* potongan uang muka *(Rp. 5.616.368.972,38 – Rp. 3.209.353.698,50) = Rp 2.407.015.273,88 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 35% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

c) Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(30% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 4.814.030.547,75 (empat miliar delapan ratus empat belas juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 65% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

d) Pembayaran Tahap IV sebesar 30% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(30% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 4.814.030.547,75 (empat miliar delapan ratus empat belas juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima I (PHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

e) Pembayaran Tahap V (Retensi) 5% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(5% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 510.729.100,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)* yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

1. Mata uang pembayaran adalah: Rupiah

2. Pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari. Kepada PT. Berkibar Bersama Bendera yang memiliki Rekening pada **Bank Mandiri Cabang Semarang** dengan No Rekening: **1350088200884** atas nama **PT. BERKIBAR BERSAMA**

BENDERA atas beban DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 Nopember 2021

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan kemajuan pekerjaan
2. Berita Acara Kemajuan pekerjaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
6. Faktur Pajak

70.3.f	**Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan**	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut: 1. Alumunium, Pintu, Kaca, dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan; 2. ACP dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan; 3. HT dan Keramik dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan 4. Mekanikal, Elektrikal, Plumbing dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan 5. Sanitair dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan [contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor,
70.4.c	**Denda Akibat Keterlambatan**	Untuk pekerjaan ini Denda keterlambatan sebesar 1/1000 atau satu permil dari nilai kontrak atau bagian nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan
78.2	**Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap kegagalan Bangunan**	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3	**Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa**	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo

PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Jln. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana
Tlp: 0401-3088873 Website: pa-rumbia.go.id, E-mail :pengadilanagamarumbia@gmail.com
BOMBANA 93771

ADDENDUM I

SURAT PERJANJIAN ADDENDUM I KONTRAK

Nomor : **W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022**
Tanggal : **7 Oktober 2022**
Nilai Kontrak Addendum : **Rp. 16.046.768.492,51**

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor : **W21-A10/52/KONTRAK/ PPK/10/2022**
Tanggal : **7 Oktober 2022**
Nilai Kontrak : **Rp. 16.046.768.492,51**

Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia
Tahun Anggaran 2022

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

A D D E N D U M

SURAT PERJANJIAN ADDENDUM I KONTRAK

Nomor : **W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022**
Tanggal: **7 Oktober 2022**

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor : **W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/ 2022**
Tanggal : **7 Oktober 2022**

Untuk Paket Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia
Tahun Anggaran 2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Pelaksana Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bombana pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Addendum Nomor: W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022, Tanggal 7 Oktober 2022, ini (termasuk lampirannya) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08/UKPBJ/KONS-PA.RUMBIA/9/2022 tanggal 26 september 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: W21-A10/46/SPPBJ/PPK/9/2022 tanggal 27 September 2022, untuk sumber dana APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor: SP.DIPA.005.01.2.401887/2021 tanggal 17 November 2021, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/ 2022, Tanggal 7 Oktober 2022 antara :

Nama	:	Ramliyanto, A.Md
NIP	:	198004152006041003
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Rumbia
Berkedudukan di	:	Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Rumbia berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W21-A10/KPA/SK.01/KU.01/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

Nama	:	Anton Purwono, ST
Jabatan	:	Direktur Utama
Berkedudukan di	:	Jl. Dewi Sartika Barat 3B, Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Akta Notaris Nomor	:	22
Tanggal	:	10 Agustus 2012
Notaris	:	Ida Widiyanti, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA, selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
2. Pengguna/Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: W21-A10/46/SPPBJ/PPK/9/2022 tanggal 27 September 2022, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022, Tanggal 7 Oktober 2022 dan Surat Addendum Nomor: W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022 untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2022 sebagaimana diterangkan dalam Kontrak ini, selanjutnya disebut “Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi”.
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa/ Pejabat Penandatanganan Kontrak memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kontrak ini;
4. Pengguna Jasa/Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut ;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Berdasarkan :

1. Surat Sumber dana APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor: SP.DIPA.005.01.2.401887/ 2021 Tanggal 17 November 2021
2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2022
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401887/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia.
4. Surat Persetujuan Addendum Kontrak Nomor: W21-A10/52.e/PPK/PL.01/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022
5. Surat Kesanggupan Addendum Nomor: 014.A/BBB-PAR/EXT/X/2022, tanggal 7 Oktober 2022

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, hal-hal sebagai berikut :

Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022, Tanggal 7 Oktober 2022 diubah sebagaimana Daftar keluaran dan Harga pada lampiran Perintah Perubahan Kontrak Adenddum Nomor : W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022, Tanggal 7 Oktober 2022

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan konstruksi pembangunan gedung ini terdiri atas:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Galian, Urugan Tanah dan Pondasi
3. Pekerjaan Struktur Beton & Baja
    1) Pekerjaan struktur bawah
    2) Lantai I elevasi - 0.00 s.d + 4.45
    3) Lantai II elevasi + 4.45 s.d + 10.1
    4) Pekerjaan Atap
4. Pekerjaan Beton Praktis & Balok Lintle
    1) Lantai - I
    2) Lantai - II
5. Pekerjaan dinding dan plesteran
    1) Lantai - IB. Lantai - I
6. Pekerjaan Kusen Allumunium dan Railling
    1) Lantai - I
    2) Lantai – II
7. Pekerjaan Dinding Melekat (Interior)
8. Pekerjaan Lantai
    1) Lantai - I
    2) Lantai - II
9. Pekerjaan Plafond
    1) Lantai - I
    2) Lantai - II
10. pekerjaan pengecatan & laburan
    1) Lantai - I
    2) Lantai - II
11. Pekerjaan Sanitary
12. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

13. Pekerjaan Standar
    1) Pekerjaan Plumbing
        a. Instalasi air bersih
        b. Instalasi air kotor, bekas dan vent
        c. Instalasi air hujan
    2) Pekerjaan Elektrikal
        a. Penyambungan ke PLN 130 kva
        b. Pekerjaan panel dan kabel feeder
        c. Pekerjaan instalasi penerangan dan daya stop kontak
14. Pekerjaan Non Standar
    1) Pekerjaan Plumbing
        - Pekerjaan air bersih
    2) Pekerjan Tata Udara dan Ventilasi
        a. Pekerjaan tata udara
        b. Pekerjaan ventilasi
    3) Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat
        a. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan armatur
        b. Pekerjaan instalasi penangkal petir dan grounding
        c. Pekerjaan rak kabel
    4) Pekerjaan Elektronik
        a. Pekerjaan fire alarm
        b. Pekerjaan cctv
        c. Pekerjaan data dan telekomunikasi
        d. Pekerjaan tata suara
        e. Pekerjaan master antena televisi (matv)

Pokok pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa adalah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia untuk tahun Anggaran 2022;

- Penyedia jasa menyediakan pekerja untuk dipekerjakan di Pengadilan Agama Rumbia dan diharapkan mampu mempelajari dan mengkonfirmasikan berbagai kriteria, standar kompetensi petugas yang akan digunakan untuk setiap jenis kegiatan mengacu kepada persyaratan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Rumbia untuk setiap kegiatan dan posisi yang akan diisi.
- Penyedia membuat laporan mingguan, laporan bulanan, Mutual Chek 0 %, Mutual Chek 100 %, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Dokumentasi 0 %, Dokumentasi 50 %, Dokumentasi 100 %

Pasal 3
JENIS KONTRAK, HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1) Jenis Kontrak Tetap

2) Harga Kontrak Tetap

3) Sumber Pembiayaan

Semula Berbunyi :

Kontrak ini dibiayai dari APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor DIPA-005.01.2.401887/2022 Tanggal 17 November 2021

Berubah Menjadi :

Kontrak ini dibiayai dari APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor: **SP DIPA-005.01.2.401887/2022** tanggal **09 Agustus 2022** Untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 10.214.582.000,-** *(sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)* dan Sisa kontrak sebesar **Rp. 5.832.186.492,51,-** *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu)* menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Poin 70.2.d Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

Semula Berbunyi :

Untuk Pekerjaan seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu sejumlah Harga Penawaran terkoreksi adalah sebesar ***Rp. 16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)***

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan Ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:

Dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. *16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)***

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 16.046.768.492,51) = Rp. 3.209.353.698,50 (tiga miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh rupian)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas

b) Pembayaran Tahap II sebesar 35% dari harga Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(35% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 5.616.368.972,38* potongan uang muka *(Rp. 5.616.368.972,38 – Rp. 3.209.353.698,50) = Rp 2.407.015.273,88 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 35% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

c) Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(30% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 4.814.030.547,75 (empat miliar delapan ratus empat belas juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 65% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

d) Pembayaran Tahap IV sebesar 30% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(30% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 4.814.030.547,75 (empat miliar delapan ratus empat belas juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima I (PHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

e) Pembayaran Tahap V (Retensi) 5% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(5% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 510.729.100,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)* yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah

Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

.

Berubah Menjadi:

Pembayaran Prestasi Pekerjaan untuk Tahun Anggaran 2022
Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 10.214.582.000,00** ***(sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)*** Sisa kontrak sebesar **Rp. 5.832.186.492,51,-** *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu)* menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas

b) Pembayaran Tahap II sebesar 35% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(35% x Rp. 10.214.582.000.00) = Rp. 3.575.103.700,00* potongan uang muka *(Rp. 3.575.103.700,00 – Rp. 2.042.916.400,00) = Rp 1.532.187.300,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 35% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

c) Pembayaran Tahap III sebesar 40% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(40% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 4.085.832.800,00 (empat miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 75% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

d) Pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima I (PHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

e) Pembayaran Tahap V (Retensi) 5% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(5% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 510.729.100,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)* yang akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

f) Sisa kontrak sebesar **Rp. 5.832.186.492,51,-** *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu)* menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan kemajuan pekerjaan
2. Berita Acara Kemajuan pekerjaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Ketentuan – ketentuan lain yang tercantum dalam kontrak asli tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Adendum ini

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Addendum / perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Kontrak;
c. Surat Penawaran;
d. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
e. Syarat-syarat umum Kontrak;
f. Kerangka Acuan Kerja;
g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study / Pra Feasibility Study, dll); dan
i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5

MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan ;

(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

PENUTUP

Dengan demikian Addendum ini dibuat, Pengguna Jasa / Pejabat Penandatangan Kontrak

dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi metera, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan Adendum ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Untuk dan atas nama, **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA**	Untuk dan atas nama, **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** **PENGADILAN AGAMA RUMBIA**
ANTON PURWONO, ST Direktur Utama	**Ramliyanto, A.Md** NIP. 198004152006041003

MENYETUJUI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Asrin, S.E.I
NIP. 198309272007041001

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	**Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Pengadilan Agama Rumbia Nama : Ramliyanto, A.Md Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana Telepon : 0401-3088873 *Website* : pa-rumbia.go.id Faksimili : 0401-3088873 *e-mail* : pengadilanagamarumbia@gmail.com Penyedia : **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA** Nama : Anton Purwono, ST Alamat : Jl. Dewi Sartika Barat 3B, Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah Telepon : (024) 86457522 *Website* : - Faksimili : - *e-mail* : berkibarbersamabendera@gmail.com
4.2 & 5.1	**Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Ramliyanto, A.Md Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W21-A10/KPA/SK.01/KU.01/1/2022, tanggal 3 Januari 2022. Untuk Penyedia: Nama : Anton Purwono, ST Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 15 November 2021
6.3.b & 6.3.c, 44.4 &44.6	**Pencairan Jaminan**	Tetap
27.1	**Masa Pelaksanaan**	Tetap
27.4	**Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	1. Tetap 2. Tetap Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)]

33.8	**Masa Pemeliharaan**	Tetap
33.19	**Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	Tetap 1. Tetap 2. Tetap [diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan(rancangankontrak)]
33.18	**Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	1. Tetap 2. Tetap Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
35.1	**Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**	Tetap
38.7	**Penyesuaian Harga**	Tetap a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap d. Tetap e. Tetap: f. Tetap; g. Tetap; h. Tetap;
45.b	**Pembayaran Tagihan**	Tetap
49.1	**Hak dan kewajiban Penyedia**	Tetap 1. Tetap 2. Tetap
56.3	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah : Tetap
56.3	**Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : Tetap

	Pekerjaan	
58	**Kepemilikan Dokumen**	Tetap
65	**Fasilitas**	Tetap
66.1.h	**Peristiwa Kompensasi**	Tetap
70.1.e	**Besaran Uang Muka**	Tetap
70.2.d	**Pembayaran Prestasi Pekerjaan**	Semula Berbunyi: Untuk Pekerjaan seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu sejumlah Harga Penawaran terkoreksi adalah sebesar ***Rp. 16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)*** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. *16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)*** a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 16.046.768.492,51) = Rp. 3.209.353.698,50 (tiga miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh rupian)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas b) Pembayaran Tahap II sebesar 35% dari harga Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(35% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 5.616.368.972,38* potongan uang muka *(Rp. 5.616.368.972,38 – Rp. 3.209.353.698,50) = Rp 2.407.015.273,88 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 35% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK c) Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(30% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 4.814.030.547,75 (empat miliar delapan ratus empat belas juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 65% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

d) Pembayaran Tahap IV sebesar 30% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(30% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 4.814.030.547,75 (empat miliar delapan ratus empat belas juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima I (PHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

e) Pembayaran Tahap V (Retensi) 5% dari harga Kontrak TA 2022 yaitu *(5% x Rp. 16.046.768.492.51) = Rp. 510.729.100,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)* yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

Berubah Menjadi:

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 10.214.582.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** Sisa kontrak sebesar **Rp. 5.832.186.492,51,-** *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu)* menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas

b) Pembayaran Tahap II sebesar 35% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(35% x Rp. 10.214.582.000.00) = Rp. 3.575.103.700,00* potongan uang muka *(Rp. 3.575.103.700,00 – Rp. 2.042.916.400,00) = Rp 1.532.187.300,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 35% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

c) Pembayaran Tahap III sebesar 40% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(40% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 4.085.832.800,00 (empat miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 75% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

d) Pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima I (PHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

e) Pembayaran Tahap V (Retensi) 5% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(5% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 510.729.100,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)* yang akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

f) Sisa kontrak sebesar Rp. 5.832.186.492,51,- *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu)* menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

1. Mata uang pembayaran adalah: Rupiah
2. Pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari. Kepada PT. Berkibar Bersama Bendera yang memiliki Rekening pada **Bank Mandiri Cabang Semarang** dengan No Rekening: **1350088200884** atas nama **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA** atas beban DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 Nopember 2021

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Laporan kemajuan pekerjaan
2. Berita Acara Kemajuan pekerjaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi

70.3.f **Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan**

Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:
1. Tetap
2. Tetap
3. Tetap
4. Tetap
5. Tetap

[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor,

70.4.c	**Denda** **Akibat Keterlambatan**	Untuk pekerjaan ini Denda keterlambatan sebesar 1/1000 atau satu permil dari sisa pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan
78.2	**Umur** **Konstruksi** **dan** **Pertanggungan terhadap** **kegagalan Bangunan**	a. Tetap b. Tetap
79.3	**Penyelesaian Perselisihan/** **Sengketa**	Tetap

Untuk dan atas nama

PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA

ANTON PURWONO, ST

Direktur Utama

Untuk dan atas nama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Pamiyanto, A.Md

NIP 198004152006041003

PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Jln. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana
Tlp: 0401-3088873 Website: pa-rumbia.go.id, E-mail :pengadilanagamarumbia@gmail.com
BOMBANA 93771

ADDENDUM II (DUA)

SURAT PERJANJIAN ADDENDUM II KONTRAK

Nomor : **W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022**
Tanggal : **21 Desember 2022**
Nilai Kontrak Addendum : **Rp. 16.046.768.492,51**

TERHADAP

ADDENDUM KONTRAK

Nomor : **W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022**
Tanggal : **7 Oktober 2022**
Nilai Kontrak Addendum : **Rp. 16.046.768.492,51**

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Nomor : **W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022**
Tanggal : **7 Oktober 2022**
Nilai Kontrak : **Rp. 16.046.768.492,51**

Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia
Tahun Jamak 2022 dan 2023

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

A D D E N D U M II
SURAT PERJANJIAN ADDENDUM KONTRAK
Nomor : **W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022**
Tanggal : **21 Desember 2022**

TERHADAP

A D D E N D U M
Nomor : **W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022**
Tanggal : **7 Oktober 2022**

Untuk Paket Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia
Tahun Jamak 2022 dan 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Pelaksana Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bombana pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, Addendum II Nomor : W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 Tanggal : 21 Desember 2022, ini (termasuk lampirannya) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Penetapan Pemenang Nomor: 08/UKPBJ/KONS-PA.RUMBIA/9/2022 tanggal 26 september 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : W21-A10/46/SPPBJ/PPK/9/2022 tanggal 27 September 2022, untuk sumber dana APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor: SP.DIPA.005.01.2.401887/2021 tanggal: 17 November 2021, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022, Tanggal 7 Oktober 2022 dan Surat Addendum Nomor: W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022, antara :

Nama	:	**Ramliyanto, A.Md**
NIP	:	**198004152006041003**
Jabatan	:	**Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Rumbia**
Berkedudukan di	:	**Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Agama Rumbia berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W21-A10/KPA/SK.01/KU.01/1/2022 tanggal: 3 Januari 2022 selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan:

Nama	:	**Anton Purwono, ST**
Jabatan	:	**Direktur Utama**
Berkedudukan di	:	**Jl. Dewi Sartika Barat 3B, Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah**
Akta Notaris Nomor	:	**22**
Tanggal	:	**10 Agustus 2012**
Notaris	:	**Ida Widiyanti, S.H**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA**, selanjutnya disebut ”**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
2. Pengguna / Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W21-A10/46/SPPBJ/PPK/9/2022 tanggal 27 September 2022, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022, Tanggal 7 Oktober 2022, Surat Addendum Nomor : W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022, Surat Addendum II Nomor : W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 Tanggal 21 Desember 2022 untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia sebagaimana diterangkan dalam Kontrak ini,selanjutnya disebut “Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi”.
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa/ Pejabat Penandatanganan Kontrak memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kontrak ini;
4. Pengguna Jasa / Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki

kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

5. Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

019.A/BBB-PAR/EXT/X/2022

Berdasarkan :

1. Surat Sumber dana APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor : SP.DIPA.005.01.2.401995/ 2021 Tanggal 17 November 2021
2. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/ 2022 tanggal 7 Oktober 2022 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia
3. Surat Perjanjian Addendum Kontrak Nomor: W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2421/SEK/OT.01.1/10/2022 Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Gedung Kantor 22 (dua puluh dua) pada Taggal 13 Oktober 2022
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401887/ 2022 Tanggal 9 Agustus 2022 Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia.
6. Justifikasi teknik Nomor: 004.1/JT-ADDII/AM.PWS.PA-RUMBIA/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022
7. Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi Addendum II Perubahan Nilai Kontrak Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: W21-A10/05/PK/PL.01/12/2022 Tanggal : 16 Desember 2022
8. Surat Persetujuan Addendum II Kontrak Nomor: W21-A10/69.e/PPK/PL.01/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022
9. Surat Kesanggupan Addendum II Nomor: 019.A/BBB-PAR/EXT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, hal-hal sebagai berikut :

Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W21-A10/52/KONTRAK/PPK/10/2022, Tanggal 7 Oktober 2022 dan Kontrak

Addendum Nomor: W21-A10/53/KONTRAK/PPK/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 diubah sebagaimana Daftar keluaran dan Harga pada lampiran Perintah Perubahan Kontrak Adenddum II Nomor: W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022, Tanggal 21 Desember 2022.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung terdiri atas:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Galian, Urugan Tanah dan Pondasi
3. Pekerjaan Struktur Beton & Baja
   A. Pekerjaan struktur bawah
   B. Lantai I elevasi - 0.00 s.d + 4.45
   C. Lantai II elevasi + 4.45 s.d + 10.1
   D. Pekerjaan Atap
4. Pekerjaan Beton Praktis & Balok Lintle
   A. Lantai - I
   B. Lantai - II
5. Pekerjaan dinding dan plesteran
   A. Lantai - IB. Lantai - I
6. Pekerjaan Kusen Allumunium dan Railling
   A. Lantai - I
   B. Lantai – II
7. Pekerjaan Dinding Melekat (Interior)
8. Pekerjaan Lantai
   A. Lantai - I
   B. Lantai - II
9. Pekerjaan Plafond
   A. Lantai - I
   B. Lantai - II
10. pekerjaan pengecatan & laburan
    A. Lantai - I
    B. Lantai - II
11. Pekerjaan Sanitary
12. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
13. Pekerjaan Standar
    A. Pekerjaan Plumbing
       a. Instalasi air bersih
       b. Instalasi air kotor, bekas dan vent
       c. Instalasi air hujan
    B. Pekerjaan Elektrikal
       a. Penyambungan ke PLN 130 kva
       b. Pekerjaan panel dan kabel feeder
       c. Pekerjaan instalasi penerangan dan daya stop kontak
14. Pekerjaan Non Standar

A. Pekerjaan Plumbing
   - Pekerjaan air bersih

B. Pekerjan Tata Udara dan Ventilasi
   a. Pekerjaan tata udara
   b. Pekerjaan ventilasi

C. Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat
   a. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan armatur
   b. Pekerjaan instalasi penangkal petir dan grounding
   c. Pekerjaan rak kabel

D. Pekerjaan Elektronik
   a. Pekerjaan fire alarm
   b. Pekerjaan cctv
   c. Pekerjaan data dan telekomunikasi
   d. Pekerjaan tata suara
   e. Pekerjaan master antena televisi (matv)

Pokok pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa adalah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Rumbia untuk tahun Anggaran 2022;

- Penyedia jasa menyediakan pekerja untuk dipekerjakan di Pengadilan Agama Rumbia dan diharapkan mampu mempelajari dan mengkonfirmasikan berbagai kriteria, standar kompetensi petugas yang akan digunakan untuk setiap jenis kegiatan mengacu kepada persyaratan yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Rumbia untuk setiap kegiatan dan posisi yang akan diisi.

- Penyedia membuat laporan mingguan, laporan bulanan, Mutual Chek 0 %, Mutual Chek 100 %, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Dokumentasi 0 %, Dokumentasi 50 %, Dokumentasi 100 %

Pasal 3
JENIS KONRAK, HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Jenis Kontrak

Semula Berbunyi :

Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dengan Pembebanannya menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2022.

Berubah Menjadi :

Pengadaan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Tahun Jamak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dengan Pembebanannya menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2022 dan 2023

(2) Harga Kontrak

Semula Berbunyi :

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kontrak ini dibiayai dari Sumber dana APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor : SP.DIPA.005.01.2.401887/2021 Tanggal 17 November 2021 Untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 16.046.768.492,51 (*enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu rupiah*), nilai pembayaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.214.582.000,- (*sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 533111, Sisa Pembayaran Prestasi Pekerjaan menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ;

Berubah Menjadi :

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kontrak ini dibiayai dari Sumber dana APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor : SP DIPA – 005.01.2.401887/2022 tanggal : 29 November 2022 Untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebesar Rp. 16.046.768.492,51 (*enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu rupiah*) dengan tahap Pembiayaan Rp. 10.214.582.000,- di Tahun Anggaran 2022 dan Rp. 5.832.186.492,51,- di Tahun Tahun Anggaran 2023.

(3) Sumber Pembiayaan

Semula Berbunyi:

Kontrak ini dibiayai dari APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor : SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal: 9 Agustus 2022 Untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.214.582.000,- (*sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*)

Berubah Menjadi :

Kontrak ini dibiayai dari APBN DIPA Pengadilan Agama Rumbia Nomor : SP DIPA – 005.01.2.401887/2022 tanggal : 29 November 2022 Untuk Tahun Jamak 2022 dan 2023 sebesar Rp. 16.046.768.492,51 (*enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu rupiah*) dengan tahap Pembiayaan Rp. 10.214.582.000,- di Tahun Anggaran 2022 dan Rp. 5.832.186.492,51,- di Tahun Tahun Anggaran 2023.

Pada syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Poin 70.2.d Tetang Pembayaran Prestasi Pekerjaan :

Semula Berbunyi :

Pembayaran Prestasi Pekerjaan untuk Tahun Anggaran 2022
Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 10.214.582.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** Sisa Pembayaran Prestasi Pekerjaan menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas

b) Pembayaran Tahap II sebesar 35% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(35% x Rp. 10.214.582.000.00) = Rp. 3.575.103.700,00* potongan uang muka *(Rp. 3.575.103.700,00 – Rp. 2.042.916.400,00) = Rp 1.532.187.300,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 35% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

c) Pembayaran Tahap III sebesar 40% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(40% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 4.085.832.800,00 (empat miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 75% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

d) Pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima I (PHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

e) Pembayaran Tahap V (Retensi) 5% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(5% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 510.729.100,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)* yang akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

f) Sisa kontrak sebesar **Rp. 5.832.186.492,51,-** *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu)* menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Berubah Menjadi :

1. Nilai Kontrak Sebesar ***Rp. 16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)***
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin
3. Pembayaran pekerjaan dibagi 2 (dua) Tahun Anggaran:
   - Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 10.214.582.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** dan,
   - Pembayaran untuk tahun 2023 dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 5.832.186.492,51 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ratus ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu rupiah)**

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas untuk tahun anggaran 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas dan telah dibayarkan pada kontrak tahunan
b) Pembayaran Tahap II sebesar 80% dari Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(80% x Rp. 10.214.582.000.00)= Rp. 8.171.665.600,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK dengan melampirkan Garansi Bank apabila pekerjaan melewati batas pengajuan SPM akhir tahun anggaran

Pembayan Tahun Anggaran 2023

a. Pembayaran angsuran pertama / termijn I tahun 2023 sebesar 10 % dari nilai Kontrak Tahun Jamak atau yang diterima Penyedia Jasa sebesar :
   = Rp. 16.046.768.492,00 x 10 %
   = Rp. 1.604.676.849,00
   Yang dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 % (empat puluh lima persen) dari nilai Kontrak Tahun Jamak dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.
b. Pembayaran angsuran kedua / termijn II tahun 2023 sebesar 15,362 % dari nilai Kontrak atau yang diterima Penyedia Jasa sebesar :
   = Rp. 16.046.768.492,00 x 15,362 %
   = Rp. 2.465.087.620,00
   Yang dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 61 % (enam puluh satu persen) dari Nilai Kontrak dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.

c. Pembayaran angsuran ketiga / termijn III tahun 2023 sebesar 11,437 % dari nilai Kontrak atau yang diterima Penyedia Jasa sebesar :
= Rp. 16.046.768.492,00 x 11,437 %
= **Rp. 1.835.314.106,00**
Yang dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 55 % (Lima puluh lima persen) dari Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.

d. Pembayaran retensi sebesar 5 % dari nilai Kontrak yang diterima Penyedia Jasa sebesar :
= Rp 16.046.768.492,00 x 5 %
= **Rp. 802.338.425,00**

Yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Laporan kemajuan pekerjaan
2. Berita Acara Kemajuan pekerjaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Ketentuan – ketentuan lain yang tercantum dalam kontrak asli tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Adendum ini.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Addendum / perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
   b. Surat Kontrak;
   c. Surat Penawaran;
   d. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
   e. Syarat-syarat umum Kontrak;
   f. Kerangka Acuan Kerja;
   g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study / Pra Feasibility Study, dll); dan

i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

Semula Berbunyi :

1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 86 (delapan puluh enam) hari kalender.
3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Berubah Menjadi :

(1) Tetap

(2) Masa Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 selama 86 (delapan puluh enam hari kalender) terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
Serta Masa Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 selama 94 (sembilan puluh empat hari kalender) terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai 4 April 2023

(3) Tetap

PENUTUP

Dengan demikian Addendum II ini dibuat, Pengguna Jasa / Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat

bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi metera, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan Adendum ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Untuk dan atas nama, **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA**	Untuk dan atas nama, **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** **PENGADILAN AGAMA RUMBIA**
 **ANTON PURWONO, ST** Direktur Utama	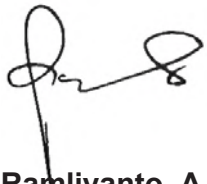 **Ramliyanto, A.Md** NIP. 198004152006041003

MENYETUJUI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA RUMBIA



Asfin, S.E.I
NIP. 198309272007041001

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	**Korespondensi**	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Pengadilan Agama Rumbia Nama : Ramliyanto, A.Md Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana Telepon : 0401-3088873 *Website* : pa-rumbia.go.id Faksimili : 0401-3088873 *e-mail* : pengadilanagamarumbia@gmail.com Penyedia : **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA** Nama : Anton Purwono, ST Alamat : Jl. Dewi Sartika Barat 3B, Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah Telepon : (024) 86457522 *Website* : - Faksimili : - *e-mail* : berkibarbersamabendera@gmail.com
4.2 & 5.1	**Wakil Sah Para Pihak**	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Ramliyanto, A.Md Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W21-A10/KPA/SK.01/KU.01/1/2022, tanggal 3 Januari 2022. Untuk Penyedia: Nama : Anton Purwono, ST Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 15 November 2021
6.3.b & 6.3.c, 44.4 &44.6	**Pencairan Jaminan**	Tetap

27.1	**Masa Pelaksanaan**	Semula berbunyi: Masa Pelaksanaan selama 86 (delapan puluh enam) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK Berubah menjadi: Masa Pelaksanaan selama 180 (serratus delapan) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
27.4	**Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	1. Tetap 2. Tetap Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)]
33.8	**Masa Pemeliharaan**	Tetap
33.19	**Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	Tetap 1. Tetap 2. Tetap [diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan(rancangankontrak)]
33.18	**Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**	1. Tetap 2. Tetap Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
35.1	**Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**	Tetap
38.7	**Penyesuaian Harga**	Tetap a. Tetap; b. Tetap; c. Tetap d. Tetap e. Tetap:

		f. Tetap; g. Tetap; h. Tetap;
45.b	**Pembayaran Tagihan**	Tetap
49.1	**Hak dan kewajiban Penyedia**	Tetap 1. Tetap 2. Tetap
56.3	**Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah : Tetap
56.3	**Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan**	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : Tetap
58	**Kepemilikan Dokumen**	Tetap
65	**Fasilitas**	Tetap
66.1.h	**Peristiwa Kompensasi**	Tetap
70.1.e	**Besaran Uang Muka**	Tetap
70.2.d	**Pembayaran Prestasi Pekerjaan**	Semula Berbunyi: Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 10.214.582.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** Sisa kontrak sebesar **Rp. 5.832.186.492,51,-** *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu*

empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu) menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas

b) Pembayaran Tahap II sebesar 35% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(35% x Rp. 10.214.582.000.00) = Rp. 3.575.103.700,00* potongan uang muka *(Rp. 3.575.103.700,00 – Rp. 2.042.916.400,00) = Rp 1.532.187.300,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 35% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

c) Pembayaran Tahap III sebesar 40% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(40% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 4.085.832.800,00 (empat miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 75% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

d) Pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima I (PHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

e) Pembayaran Tahap V (Retensi) 5% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(5% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 510.729.100,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)* yang akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak atau dibayarkan pada akhir masa pemeliharaan dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK

f) Sisa kontrak sebesar Rp. 5.832.186.492,51,- *(lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sertus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu)* menunggu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Berubah Menjadi:

1. Nilai Kontrak Sebesar ***Rp. 16.046.768.492,51 (enam belas miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma lima puluh satu rupiah)***
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin
3. Pembayaran pekerjaan dibagi 2 (dua) Tahun Anggaran:
   - Pembayaran untuk Tahun 2022 dari APBN DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar **Rp. 10.214.582.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** dan,
   - Pembayaran untuk tahun 2023 dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama PA. Rumbia Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp. 5.832.186.492,51 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ratus ribu empat ratus sembilan puluh dua koma lima puluh satu rupiah)**

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas untuk tahun anggaran 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pembayaran Tahap I Uang Muka sebesar 20% dari harga Adendum Kontrak TA 2022 yaitu *(20% x Rp. 10.214.582.000,00) = Rp. 2.042.916.400,00 (dua miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan uang muka senilai tersebut di atas dan telah dibayarkan pada kontrak tahunan

b) Pembayaran Tahap II sebesar 80% dari Kontrak TA 2022 setelah dukurangi 100% uang muka yaitu *(80% x Rp. 10.214.582.000.00)= Rp. 8.171.665.600,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)* yang akan dibayarkan setelah pekerjaan mencapai minimal 100% dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK dengan melampirkan Garansi Bank apabila pekerjaan melewati batas pengajuan SPM akhir tahun anggaran

Pembayan Tahun Anggaran 2023

a. Pembayaran angsuran pertama / termijn I tahun 2023 sebesar 10 % dari nilai Kontrak Tahun Jamak atau yang diterima Penyedia Jasa sebesar :
   Rp. 16.046.768.492,00 x 10% = **Rp. 1.604.676.849,00**

   Yang dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 % (empat puluh lima persen) dari nilai Kontrak Tahun Jamak dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.

b. Pembayaran angsuran kedua / termijn II tahun 2023 sebesar 15,362 % dari nilai Kontrak atau yang diterima Penyedia Jasa sebesar :

   Rp. 16.046.768.492,00 x 15,362 % = **Rp. 2.465.087.620,00**

   Yang dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 61 % (enam puluh satu persen) dari Nilai Kontrak dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.

c. Pembayaran angsuran ketiga / termijn III tahun 2023 sebesar 11,437 % dari nilai Kontrak atau yang diterima Penyedia Jasa sebesar :

   Rp. 16.046.768.492,00 x 11,437 % = **Rp. 1.835.314.106,00**

   Yang dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan mencapai 55 % (Lima puluh lima persen) dari Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa oleh direksi teknis/konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.

d. Pembayaran retensi sebesar 5 % dari nilai Kontrak yang diterima Penyedia Jasa sebesar :

   Rp 16.046.768.492,00 x 5 % = **Rp. 802.338.425,00**

   Yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa setelah Penyedia Jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan (dari Bank Umum atau asuransi sesuai ketentuan Menteri Keuangan) sebesar 5% dari nilai kontrak dan Penyedia Jasa telah memenuhi semua kewajiban selama masa pemeliharaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) yang telah diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK.

1. Mata uang pembayaran adalah: Rupiah
2. Pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari. Kepada PT. Berkibar Bersama Bendera yang memiliki Rekening pada **Bank Mandiri Cabang Semarang** dengan No Rekening: **1350088200884** atas nama **PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA** atas beban DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-005.01.2.401887/2022 tanggal 17 Nopember 2021

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan kemajuan pekerjaan
2. Berita Acara Kemajuan pekerjaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi

70.3.f	**Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan**	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut: 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap [contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor,
70.4.c	**Denda Akibat Keterlambatan**	Untuk pekerjaan ini Denda keterlambatan sebesar 1/1000 atau satu permil dari sisa pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan
78.2	**Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap kegagalan Bangunan**	a. Tetap b. Tetap
79.3	**Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa**	Tetap

Untuk dan atas nama

PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA

ANTON PURWONO, ST
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Rahliyanto, A.Md
NIP. 198004152006041003

BNI

A 525836

JAMINAN BANK

GARANSI BANK

Nomor : .22/KDR/95/7827/JUMAT

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Andi Muh. Yusuf
Jabatan : Pemimpin

Bertindak untuk dan atas nama:
Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Berkedudukan di : Kendari
Alamat : Jl. DR. Moh. Hatta No.69 Kendari
Yang selanjutnya disebut "PENJAMIN"

dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana PENJAMIN melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama : Ramliyanto
Berkedudukan : Kab. Bombana
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana
Yang selanjutnya disebut "PEMEGANG JAMINAN"

Setinggi-tingginya sebesar Rp. 53.251.397,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila:

Bank : PT. Skala Pilar Lima
Berkedudukan di : Kab. Ngawi
Alamat : Jl. Jawa No. 27 Karangarsi Kec. Ngawi Kab. Ngawi
Yang selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh PEMEGANG JAMINAN atas pelaksanaan pekerjaan Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Rumbia Tahun Jamak (2022 Dan 2023) sesuai dengan kontrak nomor: W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 Tanggal 21 Desember 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini Kepada KPPN 060 Kendari), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh PEMEGANG JAMINAN sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh YANG DIJAMIN atau PEMEGANG JAMINAN tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada KPPN, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala KPPN 060 Kendari berdasarkan surat kuasa PEMEGANG JAMINAN mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada PENJAMIN selambat-lambatnya telah diterima oleh PENJAMIN 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2023 Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada PENJAMIN pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka Jaminan Bank ini tidak mengikat lagi terhadap PENJAMIN.

Untuk keperluan pemberian Jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kendari.

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Rumbia

Ramliyanto
NIP. 198004152006041003

Kendari, 23 Desember 2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Kendari

METERAI TEMPEL
91A05AKX1979\0173

Andi Muh. Yusuf
Pemimpin

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00167A | Tanggal 27-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kendari (060)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 46.295.133,00

****** EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SERATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401887/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/060.22002171/1/0 Tanggal Kontrak/SPK : 21-12-2022 Nomor Kontrak/SPK : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401887.060.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2006.2.000000.000000	53.251.397,00
Jumlah Pengeluaran	53.251.397,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2006.2.000000.000000	1.679.098,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2006.2.000000.000000	5.277.166,00
Jumlah Potongan	6.956.264,00
TOTAL PEMBAYARAN	46.295.133,00

Kepada:

Nomor	: 498281	Bank / Pos	: BPD JAWA TIMUR
Nama Supplier	: PT. SKALA PILAR LIMA	Rekening	: 0101028887
NPWP1	: 847118288646000	Nama Pemilik	: SKALA PILAR LIMA, PT
NPWP2	: 001138981815000	Alamat	: JL. JAWA NO. 27, DS. KARANGSARI RT 05 RW 05
NOP	:		
Uraian	: PEMBAYARAN TERMIN I BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NOMOR : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 TANGGAL 21-12-2022 BG NOMOR : 22/KDR/95/7827/JUMAT TANGGAL 23-12-2022 BAP MOMOR : W21-A10/750.b/KU.01/12/2022 TANGGAL 23-12-2022		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

KAB. BOMBANA, 27 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUAMMAR HASNAWIR
NIP 198901182014081001

[Kode : PEM003]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00167A
Tanggal : 27-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401887.060.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2006.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000072-Perencana	53.251.397,00
	Jumlah	**53.251.397,00**
Jumlah		**53.251.397,00**

KAB. BOMBANA, 27 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUAMMAR HASNAWIR
NIP 198901182014081001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
3	220601302019354	29-12-2022	29-12-2022	4,927,155,466	00159T/401887/2022	29-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor: W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 tgl 21-12-2022 BG nomor: BG13622181331 tgl 21-12-2022 BAP nomor: W21-A10/748.d/KU.01/12/2022 tgl 23-12-2022	Cek Akun	☐
4	220601302019348	29-12-2022	29-12-2022	46,295,133	00167T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	PEMBAYARAN TERMIN I BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NOMOR : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 TANGGAL 21-12-2022 BG NOMOR : 22/KDR/95/7827/JUMAT TANGGAL 23-12-2022 BAP MOMOR : W21-A10/750.b/KU.01/12/2022 TA NGGAL 23-12-2022	Cek Akun	☐
5	220601301027283	28-12-2022	28-12-2022	111,255,241	00166T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor : W21-A10/76/KONTRAK/PPK/12/2022 tanggal 21-12-2022 BG nomor : BG13122182665 tanggal 20-12-2022 BAP nomor : W21-A10/749.b/KU.01/12/2022 tanggal 2 3-12-2022	Cek Akun	☐
6	220601302019346	27-12-2022	27-12-2022	24,928,148	00162T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	PEMBAYARAN TERMIN I BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NOMOR : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 TANGGAL 21-12-2022 BAPP NOMOR : W21-A10/750.a/KU.01/12/2022 TANGGAL 23-12-2022 BAP MOMOR : W21-A10/750.b/KU.01/1 2/2022 TANGGAL 23-12-2022	Cek Akun	☐
7	220601302019342	27-12-2022	27-12-2022	2,239,616,120	00158T/401887/2022	26-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor : W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 tanggal 21-12-2022 BAPP nomor : W21-A10/748.a/KU.01/12/2022 tanggal 23-12-2022 BAP nomor : W21-A10/748.b/KU.01/1 2/2022 tanggal 23-12-2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 07-03-23 17:57:49 oleh : 401887

mandiri

JAMINAN BANK
No. BG13622181331

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aan Muliyawan
Jabatan	:	Area SME Head

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Kendari Mesjid Agung
Berkedudukan di	:	Kendari
Alamat	:	Jl. Abdullah Silondae No 45 Kendari

Yang selanjutnya disebut "**PENJAMIN**",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana **PENJAMIN** melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama	:	Ramliyanto, A.Md Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Rumbia
Berkedudukan di	:	Rumbia
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana

Yang selanjutnya disebut "**PEMEGANG JAMINAN**",

setinggi-tingginya sebesar Rp 5.618.020.100 (lima milyar enam ratus delapan belas juta dua puluh ribu seratus rupiah) , atas dasar tuntutan /klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :

Nama	:	PT. Berkibar Bersama Bendera
Berkedudukan di	:	Semarang
Alamat	:	Jl. Dewi Sartika Barat 3B, Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Yang selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh **PEMEGANG JAMINAN** atas pelaksanaan pekerjaan **Pembangunan Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Rumbia Tahun Jamak (2022 dan 2023)** sesuai dengan **Surat Perjanjian Kontrak Tahun Jamak Nomor : W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 Tanggal 21 Desember 2022** atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini kepala **KPPN** 060 Kendari), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh **PEMEGANG JAMINAN** sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh **YANG DIJAMIN** atau **PEMEGANG JAMINAN** tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada **KPPN**, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank.

Kepala **KPPN** 060 Kendari berdasarkan surat kuasa **PEMEGANG JAMINAN** mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada **PENJAMIN** selambat-lambatnya telah diterima oleh **PENJAMIN** 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal **30 Januari 2023.** Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada **PENJAMIN** pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, **PEMEGANG JAMINAN** atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap **PENJAMIN.**

Untuk keperluan pemberian jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kendari

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Kantor Baru
Pengadilan Agama Rumbia

Ramliyanto, A.Md
NIP. 198004152006041003

Kendari,21 Desember 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KC Kendari Mesjid Agung

METERAI TEMPEL
ADB6FAKX198087372

Aan Muliyawan
Area SME Head

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00159A | Tanggal 29-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kendari (060)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 4.927.155.466,00

****** EMPAT MILYAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401887/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/060.22002170/1/0 Tanggal Kontrak/SPK : 21-12-2022 Nomor Kontrak/SPK : W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401887.060.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2006.2.000000.000000	5.618.020.100,00
Jumlah Pengeluaran	5.618.020.100,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2006.2.000000.000000	134.123.903,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2006.2.000000.000000	556.740.731,00
Jumlah Potongan	690.864.634,00
TOTAL PEMBAYARAN	4.927.155.466,00

Kepada:

Nomor	: 240543	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA	Rekening	: 1350088200884
NPWP1	: 032743817503000	Nama Pemilik	: PT. BERKIBAR BERSAMA BENDERA
NPWP2	: 001138981815000	Alamat	: JL DEWI SARTIKA BARAT III B RT.11 RW. 3 SUKOREJO
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor: W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 tgl 21-12-2022 BG nomor: BG13622181331 tgl 21-12-2022 BAP nomor: W21-A10/748.d/KU.01/12/2022 tgl 23-12-2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

KAB. BOMBANA, 29 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUAMMAR HASNAWIR
NIP 198901182014081001

[Kode : PEM003]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00159A
Tanggal : 29-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401887.060.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2006.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000071-Fisik	5.618.020.100,00
	Jumlah	**5.618.020.100,00**
Jumlah		**5.618.020.100,00**

KAB. BOMBANA, 29 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUAMMAR HASNAWIR
NIP 198901182014081001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
3	220601302019354	29-12-2022	29-12-2022	4,927,155,466	00159T/401887/2022	29-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor: W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 tgl 21-12-2022 BG nomor: BG13622181331 tgl 21-12-2022 BAP nomor: W21-A10/748.d/KU.01/12/2022 tgl 23-12-2022	Cek Akun	☐
4	220601302019348	29-12-2022	29-12-2022	46,295,133	00167T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	PEMBAYARAN TERMIN I BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NOMOR : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 TANGGAL 21-12-2022 BG NOMOR : 22/KDR/95/7827/JUMAT TANGGAL 23-12-2022 BAP MOMOR : W21-A10/750.b/KU.01/12/2022 TA NGGAL 23-12-2022	Cek Akun	☐
5	220601301027283	28-12-2022	28-12-2022	111,255,241	00166T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor : W21-A10/76/KONTRAK/PPK/12/2022 tanggal 21-12-2022 BG nomor : BG13122182665 tanggal 20-12-2022 BAP nomor : W21-A10/749.b/KU.01/12/2022 tanggal 2 3-12-2022	Cek Akun	☐
6	220601302019346	27-12-2022	27-12-2022	24,928,148	00162T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	PEMBAYARAN TERMIN I BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NOMOR : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 TANGGAL 21-12-2022 BAPP NOMOR : W21-A10/750.a/KU.01/12/2022 TANGGAL 23-12-2022 BAP MOMOR : W21-A10/750.b/KU.01/1 2/2022 TANGGAL 23-12-2022	Cek Akun	☐
7	220601302019342	27-12-2022	27-12-2022	2,239,616,120	00158T/401887/2022	26-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor : W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 tanggal 21-12-2022 BAPP nomor : W21-A10/748.a/KU.01/12/2022 tanggal 23-12-2022 BAP nomor : W21-A10/748.b/KU.01/1 2/2022 tanggal 23-12-2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 07-03-23 17:57:49 oleh : 401887

mandiri

JAMINAN BANK
No. BG13122182665

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Darmawansa
Jabatan	:	General Banker Manager

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Kendari Masjid Agung
Berkedudukan di	:	Kendari
Alamat	:	Jl. Abdullah Silondae No. 45 Kendari

Yang selanjutnya disebut "**PENJAMIN**",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana **PENJAMIN** melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama	:	Ramliyanto, A.Md PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Berkedudukan di	:	Rumbia
Alamat	:	Jln. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Rumbia

Yang selanjutnya disebut "**PEMEGANG JAMINAN**",

setinggi-tingginya sebesar Rp 127,972,350 (satu ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , atas dasar tuntutan /klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :

Nama	:	PT ALOCITA MANDIRI
Berkedudukan di	:	Bandung
Alamat	:	JL.Sansiviera IV No.07 Komp. Grand Sharon Residence, Cipamokolan Kota Bandung

Yang selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh **PEMEGANG JAMINAN** atas pelaksanaan pekerjaan PENGADAAN JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BARU PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN JAMAK (2022 DAN 2023) sesuai dengan kontrak nomor: W21-A10/76/KONTRAK/PPK/12/2022 Tanggal 21 Desember 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini kepala **KPPN** 060 KENDARI), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh **PEMEGANG JAMINAN** sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh **YANG DIJAMIN** atau **PEMEGANG JAMINAN** tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada **KPPN**, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank

Kepala **KPPN** 060 KENDARI berdasarkan surat kuasa **PEMEGANG JAMINAN** mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada **PENJAMIN** selambat-lambatnya telah diterima oleh **PENJAMIN** 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal **30 Januari 2023.** Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada **PENJAMIN** pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, **PEMEGANG JAMINAN** atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap **PENJAMIN**.

Untuk keperluan pemberian jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kendari.

Kendari,20 Desember 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KC Kendari Masjid Agung

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Ramliyanto, A.Md
198004152006041003

METERAI TEMPEL
98086AKX197951989

Darmawansa
General Banker Manager

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00166A | Tanggal 27-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kendari (060)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 111.255.241,00

****** SERATUS SEBELAS JUTA DUA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401887/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/060.22002168/1/0 Tanggal Kontrak/SPK : 21-12-2022 Nomor Kontrak/SPK : W21-A10/76/KONTRAK/PPK/12/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401887.060.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2006.2.000000.000000	127.972.350,00
Jumlah Pengeluaran	127.972.350,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2006.2.000000.000000	4.035.164,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2006.2.000000.000000	12.681.945,00
Jumlah Potongan	16.717.109,00
TOTAL PEMBAYARAN	111.255.241,00

Kepada:

Nomor	: 1033905	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. PT. ALOCITA MANDIRI	Rekening	: 032901004192306
NPWP1	: 015555477429000	Nama Pemilik	: ALOCITA MANDIRI
NPWP2	: 001138981815000	Alamat	: Jl. Sansiviera IV No. 7, Komplek Grand Sharon
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor : W21-A10/76/KONTRAK/PPK/12/2022 tanggal 21-12-2022 BG nomor : BG13122182665 tanggal 20-12-2022 BAP nomor : W21-A10/749.b/KU.01/12/2022 tanggal 23-12-2022		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

KAB. BOMBANA, 27 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUAMMAR HASNAWIR
NIP 198901182014081001

[Kode : PEM003]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00166A
Tanggal : 27-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401887.060.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2006.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000073-Pengawasan	127.972.350,00
	Jumlah	**127.972.350,00**
Jumlah		**127.972.350,00**

KAB. BOMBANA, 27 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MUAMMAR HASNAWIR
NIP 198901182014081001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
3	220601302019354	29-12-2022	29-12-2022	4,927,155,466	00159T/401887/2022	29-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor: W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 tgl 21-12-2022 BG nomor: BG13622181331 tgl 21-12-2022 BAP nomor: W21-A10/748.d/KU.01/12/2022 tgl 23-12-2022	Cek Akun	☐
4	220601302019348	29-12-2022	29-12-2022	46,295,133	00167T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	PEMBAYARAN TERMIN I BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NOMOR : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 TANGGAL 21-12-2022 BG NOMOR : 22/KDR/95/7827/JUMAT TANGGAL 23-12-2022 BAP MOMOR : W21-A10/750.b/KU.01/12/2022 TA NGGAL 23-12-2022	Cek Akun	☐
5	220601301027283	28-12-2022	28-12-2022	111,255,241	00166T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor : W21-A10/76/KONTRAK/PPK/12/2022 tanggal 21-12-2022 BG nomor : BG13122182665 tanggal 20-12-2022 BAP nomor : W21-A10/749.b/KU.01/12/2022 tanggal 2 3-12-2022	Cek Akun	☐
6	220601302019346	27-12-2022	27-12-2022	24,928,148	00162T/401887/2022	27-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	PEMBAYARAN TERMIN I BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NOMOR : W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022 TANGGAL 21-12-2022 BAPP NOMOR : W21-A10/750.a/KU.01/12/2022 TANGGAL 23-12-2022 BAP MOMOR : W21-A10/750.b/KU.01/1 2/2022 TANGGAL 23-12-2022	Cek Akun	☐
7	220601302019342	27-12-2022	27-12-2022	2,239,616,120	00158T/401887/2022	26-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Termin I Belanja Modal sesuai Kontrak nomor : W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022 tanggal 21-12-2022 BAPP nomor : W21-A10/748.a/KU.01/12/2022 tanggal 23-12-2022 BAP nomor : W21-A10/748.b/KU.01/1 2/2022 tanggal 23-12-2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 07-03-23 17:57:49 oleh : 401887

DAFTAR KLAIM PENCAIRAN JAMINAN BANK 2022
SATKER PENGADILAN AGAMA RUMBIA (401887)

NO.	JAMINAN BANK	KONTRAK	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KLAIM JAMINAN BANK
1.	22/KDR/95/7827/JUMAT	W21-A10/75/KONTRAK/PPK/12/2022	PEMBAYARAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN GEDUNG KANTOR BARU PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN JAMAK (2022	39.172.805
2.	BG13122182665	W21-A10/76/KONTRAK/PPK/12/2022	PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BARU PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN JAMAK (2022	91.027.016
3.	BG13622181331	W21-A10/74/KONTRAK/PPK/12/2022	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BARU PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN JAMAK (2022	4.031.309.018

Pejabat Pembuat Komitmen,

Ramliyanto, A.Md
NIP. 198004152006041003

Nomor : JRB.R07.Br.SPW/ 102 /2023
Tanggal : 27 Januari 2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Kantor Baru Pengadila Agama Rumbia
Jl. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala, Kec. Rumbia
Kab. Bombana

PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.
Cabang Semarang Pahlawan
Jl. Pahlawan No. 3
Semarang 50243 Indonesia
Telp. (62-024) 8415362
Facs. (62-024) 8311366
www.bankmandiri.co.id

Perihal : **Informasi Pembayaran Klaim Bank Garansi PT. Berkibar Bersama Bendera No. BG13622181331**

Menunjuk perihal tersebut di atas dan menindaklanjuti Surat No : S-171/KPN.2801/2023 Tanggal 20 Januari 2023 perihal permintaan pencairan/klaim Bank Garansi, dapat kami sampaikan bahwa kami telah memproses dan mentransfer klaim tersebut pada tanggal 27 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Billing : 820230127383944
Nama Wajib Setor : Pengadilan Agama Rumbia
Nominal Pembayaran Klaim : Rp 4.031.309.018,-

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami sampaikan Terimakasih

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KC Semarang Pahlawan
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CABANG SEMARANG PAHLAWAN

Anggrawati Pambudiningsih
Branch Manager

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230127383944
Tanggal Billing	:	27-01-2023 13:41:27
Tanggal Kedaluwarsa	:	03-02-2023 13:41:27
Tanggal Bayar	:	27-01-2023 15:13:21
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Overbooking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***01*** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	:	***401887*** - PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Total Disetor	:	4.031.309.018 (IDR)
Terbilang	:	*Empat Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Delapan Belas (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**428818700776**
NTPN	:	**DC91448VV547KTC8**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	4.031.309.018 (IDR)
Keterangan	:	Klaim Bank Garansi Bank Mandiri Nomor BG13622181331 tgl 21 Desember 2022 dengan pihak yang dijamin PT Berkibar Bersama Bendera

Nomor : R06.Br.Bsp/274/2023
Tanggal : 28 Februari 2023
Lampiran : -

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Branch Bandung Surapati
Jl. Surapati No. 2
Bandung 40115, Indonesia
Telp. (022) 4241411
Fax. (022) 4241436
13100.Hom@bankmandiri.co.id

Kepada
Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Rumbia
Jl. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala
Kec. Rumbia Kab. Bombana

Perihal : **Informasi Pembayaran Klaim Bank Garansi PT. Alocita Mandiri No. BG13122182665**

Menunujuk perihal tersebut di atas dan menindaklanjuti Surat No. S-170/KPN.2801/2023 Tanggal 20 Januari 2023 perihal permintaan pencairan/klaim bank garansi, dapat kami sampaikan bahwa kami telah memproses dan mentransfer klaim tersebut pada tanggal 26 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Billing : 820230119629183
Nama Wajib Setor : PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Nominal Pembayaran Klaim : Rp 91.027.016

Demikian surat keterangan ini kami buat tanpa mengikat pihak kami dan hanya dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
Cabang Bandung Surapati

Roslianti
General Banker Officer

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230119629183
Tanggal Billing	:	19-01-2023 22:05:58
Tanggal Kedaluwarsa	:	26-01-2023 22:05:58
Tanggal Bayar	:	26-01-2023 09:03:21
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Overbooking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***01*** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	:	***401887*** - PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Total Disetor	:	91.027.016 (IDR)
Terbilang	:	*Sembilan Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Belas (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**520885558069**
NTPN	:	**7C4523CIFAHJR8BV**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	91.027.016 (IDR)
Keterangan	:	Klaim Bank Garansi Bank Mandiri Nomor BG13122182665 tgl 20 Desember 2022 dengan pihak yang dijamin PT Alocita Mandiri

Kendari, 28 Februari 2023

Nomor : Kdr/4/141
Lampiran : -

Kepada Yth.
Ramliyanto, A.Md
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Rumbia
Jl. Yos Sudarso No. 351, Kel. Lampopala, Kec. Rumbia
Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara

Perihal : Informasi Pembayaran Klaim Bank Garansi PT Skala Pilar Lima
Nomor : 22/KDR/95/7827/JUMAT

Menunjuk perihal pada pokok surat di atas dan menindaklanjuti Surat No : S-169/KPN.2801/2023 Tanggal 20 Januari 2023 perihal Permintaan Pencairan/Klaim Bank Garansi, dapat kami sampaikan bahwa kami telah memproses dan mentransfer klaim tersebut pada tanggal 25 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Billing : 820230119628384
Nama Wajib Setor : Pengadilan Agama Rumbia
Nominal Pembayaran Klaim : Rp. 39.172.805,-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Kendari

ROSLAN JAYA GINTANG
PBN

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Kendari
Jl. DR. Moh. Hatta No. 69 Kendari
Telp. (0401) 321277
Fax. (0401) 326290

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230119628384
Tanggal Billing	:	19-01-2023 22:01:59
Tanggal Kedaluwarsa	:	26-01-2023 22:01:59
Tanggal Bayar	:	25-01-2023 14:44:27
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	:	*Overbooking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***01*** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	:	***401887*** - PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Total Disetor	:	39.172.805 (IDR)
Terbilang	:	*Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**000000258169**
NTPN	:	**DFB3948VV54087J0**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	:	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	:	39.172.805 (IDR)
Keterangan	:	Klaim Bank Garansi BNI Nomor 22/KDR/95/7827/JUMAT tgl 23 Desember 2022 dengan pihak yang dijamin PT Skala Pilar Lima

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA - 93911

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SEBAGAI PENJAMINAN
Nomor : W23-U8/25/PERC.SARLING-PN.LSS/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Henry Sollideo Sandu, SE
NIP	:	197711132009121005
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Lasusua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk menjamin CV. KALIMAYA sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Lingkungan Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor W23-U8/10/PERC.SARLING-PN.LSS/8/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 99.895.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 14.984.250,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

2. Apabila dikemudian hari CV. KALIMAYA melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Lasusua, 22 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Lasusua

Henry Sollideo Sandu, SE
NIP.197711132009121005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00140A | Tanggal 23-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 13.026.848,00

****** TIGA BELAS JUTA DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000110/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 30-08-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/10/PERC.SARLING-PN.LSS/8/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	14.984.250,00
Jumlah Pengeluaran	14.984.250,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	472.476,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	1.484.926,00
Jumlah Potongan	1.957.402,00
TOTAL PEMBAYARAN	13.026.848,00

Kepada:

Nomor	: 390429	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: CV. KALIMAYA	Rekening	: 0504109507
NPWP1	: 728217407423000	Nama Pemilik	: CV KALIMAYA
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: Jl. Tubagus Ismail Bawah No 19
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran belanja modal sesuai SPK No.W23-U8/10/PERC.SARLING-PN.LSS/8/2022 Tgl.30 Agustus 2022, BAP No.W23-U8/24/PERC.SARLING-PN.LSS/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PERC.SARLING-PN.LSS/12/2022 Tgl.22 Desember 2022		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00140A
Tanggal : 23-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000085-Perencana	14.984.250,00
	Jumlah	**14.984.250,00**
Jumlah		**14.984.250,00**

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561303000611

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561303000611	23-12-2022	27-12-2022	13,026,848	00140T/401926/2022	23-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran belanja modal sesuai SPK No.W23-U8/10/PERC.SARLING-PN.LSS/8/2022 Tgl.30 Agustus 2022, BAP No.W23-U8/24/PERC.SARLING-PN.LSS/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PERC.SARLING-PN.LSS/12/2022 Tgl.22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 06-03-23 23:27:32 oleh : 401926

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA – 93911

ADENDUM KONTRAK I

NOMOR : W23-U8/25/KONST.SL/12/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

ATAS

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK	:	W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022 TANGGAL 26 OKTOBER 2022
PAKET	:	PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SARANA LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LOKASI	:	JL. JENDRAL SUDIRMAN, KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA, KEC. LASUSUA, KAB.KOLAKA UTARA
PROVINSI	:	SULAWESI TENGGARA
SUMBER DANA	:	APBN
NILAI KONTRAK	:	Rp. 3.741.617.000,-
TAHUN ANGGARAN	:	2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. ANTAZENA

Desa Ataku Jaya, Alengge Agung, Kec.Andoolo, Kab.Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA – 93911

ADENDUM KONTRAK I

Nomor : W23-U8/25/KONST.SL/12/2022
Tanggal : 22 Desember 2022

ATAS

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan lumsum dan Harga Satuan

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN SARANA LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI LASUSUA
NOMOR: W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Addendum Kontrak I"** dibuat dan ditandatangani di Lasusua pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, antara :

Nama	:	**HENRY SOLLIDEO SANDU, SE**
NIP	:	19771113200912100 5
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab.Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Mahkamah Agung C.q Badan Urusan Administrasi C.q Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lasusua Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran W23-U8/2/KU.01/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Lasusua selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

Nama	:	**KHASANAH**
Jabatan	:	Direktur **CV. ANTAZENA**
Berkedudukan di	:	Desa Ataku Jaya, Alengge Agung, Kec. Andoolo, Kab.Konawes Selatan, Sulawesi Tenggara
Akta Notaris Nomor	:	11
Tanggal	:	07 September 2015
Notaris	:	Rayan Riadi, SH, M.Kn

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan presiden No 16 Tahun 2018 jo. Peraturan presiden No 12 Tahun 2021
2. Peraturan Kepala LKPP No.9 Tahun 2018 jo Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2021
3. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Lasusua, Kontrak Nomor : W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022, Tanggal 26 Oktober 2022.
   a. SSUK Huruf B.3 Nomor 34 (Perubahan Kontrak)
   b. SSUK Huruf B.3 Nomor 36 (Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan)

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk melakukan Adendum Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Lasusua, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN ..... Tetap
Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN ..... Tetap
Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN..... Tetap
Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK ..... Tetap
Pasal 5 MASA KONTRAK

Semula berbunyi :

1) Tetap
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 *(Enam Puluh)* harikalender.
3) Tetap.

Berubah menjadi :

1) Tetap
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 *(Enam Puluh)* hari kalender dan diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal **25 Desember 2022 sampai dengan 23 Januari 2023** berakhirnya masa kontrak, sehingga masa pelaksanaan menjadi **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender dan **dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan (sebelum PPN), Jaminan Pelaksanaan diperpanjang selama 30 (Tiga Puluh) hari**
3) Tetap.

Ketentuan – ketentuan lain yang tercantum dalam kontrak asli tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum ini.

Demikian Addendum ini dibuat pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut di atas dan sah berlaku setelah ditandatangani Kedua Belah Pihak, dan apa bila terjadI kekeliruan dalam penyusunan Adendum ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama Penyedia CV. ANTAZENA	Untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI LASUSUA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KHASANAH Direktur	**HENRY SOLLIDEO SANDU, SE** NIP. 197711132009121005

mandiri

JAMINAN BANK
No. **BG16222169601**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	CHARKI KASENDA
Jabatan	:	BRANCH MANAGER

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kolaka
Berkedudukan di	:	Kolaka
Alamat	:	Jl. Chairil Anwar No. 34BC, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka

Yang selanjutnya disebut "**PENJAMIN**",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana **PENJAMIN** melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama	:	HENRY SOLLIDEO SANDU, SE PENGADILAN NEGERI LASUSUA
Berkedudukan di	:	KOLAKA UTARA
Alamat	:	Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara

Yang selanjutnya disebut "**PEMEGANG JAMINAN**",

setinggi-tingginya sebesar Rp 935,404,250 (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) , atas dasar tuntutan /klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :

Nama	:	CV. ANTAZENA
Berkedudukan di	:	KONAWE SELATAN
Alamat	:	Desa Ataku Jaya Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan

Yang selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh **PEMEGANG JAMINAN** atas pelaksanaan pekerjaan PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SARANA LINGKUNGAN KANTOR PENGADILAN NEGERI LASUSUA sesuai dengan kontrak nomor: W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini kepala **KPPN** 156 KOLAKA), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh **PEMEGANG JAMINAN** sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh **YANG DIJAMIN** atau **PEMEGANG JAMINAN** tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada **KPPN**, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank

Kepala **KPPN** 156 KOLAKA berdasarkan surat kuasa **PEMEGANG JAMINAN** mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada **PENJAMIN** selambat-lambatnya telah diterima

Dipindai dengan CamScanner

oleh **PENJAMIN** 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal **22 Februari 2023.** Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada **PENJAMIN** pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, **PEMEGANG JAMINAN** atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap **PENJAMIN**.

Untuk keperluan pemberian jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kolaka.

Kolaka,22 Desember 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Kolaka

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN NEGERI LASUSUA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

10000 METERAI TEMPEL FBAKX197405487

HENRY SOLLIDEO SANDU, SE
197711132009121005

CHARKI KASENDA
BRANCH MANAGER

mandiri

Dipindai dengan CamScanner

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA – 93911

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : W23-U8/37/KONST.SL/1/2023

Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Output	:	Pembangunan Sarana Lingkungan Pengadilan Negeri Lasusua
Lokasi	:	Pengadilan Negeri Lasusua
Nomor Surat Perjanjian	:	W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022
Tanggal Surat Perjanjian	:	Tanggal 26 Oktober 2022
Tahun Anggaran	:	2022

Pada hari ini **SABTU** tanggal **DUA PULUH SATU** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **HENRY SOLLIDEO SANDU, SE**
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pengadilan Negeri Lasusua Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadillan Negeri Lasusua Nomor W23-U8/2/KU.01/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023
   Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA***

2. Nama : **KHASANAH**
   Jabatan : Direktur CV. ANTAZENA
   Alamat : Desa Ataku Jaya, Alengge Agung, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris RAYAN RIADI, SH., M.Kn, Nomor 11 Tanggal 7 September 2015 Selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
2. Kontrak Nomor : W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022.
3. Berita Acara Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan Nomor : W23-U8/35/KONST.SL/1/2023 Tanggal 21 Januari 2023.
4. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : W23-U8/36/KONST.SL/1/2023 Tanggal 21 Januari 2023.
5. Surat Penyedia Jasa CV.ANTAZENA Nomor: 0122/PHP-sarling-PN.Lasusua/Antazena/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

Maka semua pihak telah sepakat mengadakan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana Lingkungan Pengadilan Negeri Lasusua, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyerahkan sementara Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua yang telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan sementara pekerjaan dimaksud dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang Menyerahkan :	Yang Menerima :
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
CV. ANTAZENA	*Pejabat Pembuat Komitmen*
KHASANAH	**HENRY SOLLIDEO SANDU, SE**
Direktur	NIP. 19771113200912 1005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00148A | Tanggal 28-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 662.367.334,00

****** ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000138/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	748.323.400,00
Jumlah Pengeluaran	748.323.400,00
POTONGAN	**JUMLAH UANG**
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	11.797.891,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	74.158.175,00
Jumlah Potongan	85.956.066,00
TOTAL PEMBAYARAN	662.367.334,00

Kepada:

Nomor	: 283536	Bank / Pos	: BPD SULAWESI TENGGARA
Nama Supplier	: CV. ANTAZENA	Rekening	: 00101045208822
NPWP1	: 741679955811000	Nama Pemilik	: CV. ANTAZENA
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: DESA ATAKU JAYA
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin Ke 4 Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/28/KONST.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222169601 Tgl.22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

[Kode : PEM003]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00148A
Tanggal : 28-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000084-Fisik	748.323.400,00
	Jumlah	**748.323.400,00**
Jumlah		**748.323.400,00**

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002348

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002348	28-12-2022	28-12-2022	662,367,334	00148T/401926/2022	28-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Termin Ke 4 Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/28/KONST.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222169601 Tgl .22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 29-12-22 07:46:10 oleh : 401926

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00149A | Tanggal 28-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 165.591.833,00

****** SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000138/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	187.080.850,00
Jumlah Pengeluaran	187.080.850,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	2.949.473,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	18.539.544,00
Jumlah Potongan	21.489.017,00
TOTAL PEMBAYARAN	165.591.833,00

Kepada:

Nomor	: 283536	Bank / Pos	: BPD SULAWESI TENGGARA
Nama Supplier	: CV. ANTAZENA	Rekening	: 00101045208822
NPWP1	: 741679955811000	Nama Pemilik	: CV. ANTAZENA
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: DESA ATAKU JAYA
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/30/KONST.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222169601 Tgl.22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00149A
Tanggal : 28-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000084-Fisik	187.080.850,00
	Jumlah	**187.080.850,00**
Jumlah		**187.080.850,00**

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002349

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002349	28-12-2022	28-12-2022	165,591,833	00149T/401926/2022	28-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.SARLING-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/30/KONST.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222169601 Tgl.22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 29-12-22 07:48:11 oleh : 401926

516629746

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. [illegible] 90000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 26-01-2023 14:24:18
No.Resi : 90000-70/2023/001070 Petugas : [illegible]

Tanggal Buku : 27-01-2023
Kode Cabang Pos : 090000

NTP : [illegible]
NTPN : [illegible]
STAN : [illegible]

Waktu Transaksi : 26-01-2023 14:24:16
Kode Billing : 820230126290859
Nama Wajib Bayar: [illegible]
K / L : 005
Unit Eselon : 01
Kode Satker : 401926
Jumlah Setoran : Rp. 10.672.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indo

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Cek status : http://www.posindonesia.co.id

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230126240859
Tanggal Billing	:	26-01-2023 13:04:50
Tanggal Kedaluwarsa	:	02-02-2023 13:04:50
Tanggal Bayar	:	26-01-2023 14:24:16
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	POS INDONESIA
Channel Bayar	:	*Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***01*** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	:	***401926*** - PENGADILAN NEGERI LASUSUA
Total Disetor	:	10.672.000 (IDR)
Terbilang	:	*Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**919178200457**
NTPN	:	**F573B8N3EA04J12R**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Kode Akun	:	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Setoran	:	10.672.000 (IDR)
Keterangan	:	Denda Keterlambatan CV.ANTAZENA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA - 93911

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SEBAGAI PENJAMINAN
Nomor : W23-U8/25/PWS.SL/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Henry Sollideo Sandu, SE
NIP	:	197711132009121005
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Lasusua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk menjamin PT. ARKAN JASA RENCANA sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Lingkungan Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor W23-U8/14/PWS-SARLING.PN.LSS/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 89.688.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 26.906.400,- (dua puluh enam juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah).

2. Apabila dikemudian hari PT. ARKAN JASA RENCANA melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Lasusua, 22 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Lasusua

Henry Sollideo Sandu, SE
NIP.197711132009121005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00142A | Tanggal 23-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 15.594.400,00

****** LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000136/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/14/PWS-SARLING.PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	17.937.600,00
Jumlah Pengeluaran	17.937.600,00
POTONGAN	**JUMLAH UANG**
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	565.600,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	1.777.600,00
Jumlah Potongan	2.343.200,00
TOTAL PEMBAYARAN	15.594.400,00

Kepada:

Nomor	: 1044026	Bank / Pos	: BPD SULAWESI SELATAN
Nama Supplier	: PT. ARKAN JASA RENCANA	Rekening	: 1300030000271085
NPWP1	: 011254851804000	Nama Pemilik	: ARKAN JASA RENCANA, PT
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: Jl. Amirullah No. 32
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin ke 2 Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-SARLING.PN.LSS/10/2022 TgL.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/22/PWS.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PWS.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00142A
Tanggal : 23-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000086-Pengawas	17.937.600,00
	Jumlah	**17.937.600,00**
Jumlah		**17.937.600,00**

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002334

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002334	23-12-2022	23-12-2022	15,594,400	00142T/401926/2022	23-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Termin ke 2 Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-SARLING.PN.LSS/10/2022 TgL.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/22/PWS.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PWS.SL/12/2022 Tgl .22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 26-12-22 13:32:57 oleh : 401926

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00143A | Tanggal 23-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 7.797.200,00

****** TUJUH JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000136/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/14/PWS-SARLING.PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	8.968.800,00
Jumlah Pengeluaran	8.968.800,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	282.800,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	888.800,00
Jumlah Potongan	1.171.600,00
TOTAL PEMBAYARAN	7.797.200,00

Kepada:

Nomor	: 1044026	Bank / Pos	: BPD SULAWESI SELATAN
Nama Supplier	: PT. ARKAN JASA RENCANA	Rekening	: 1300030000271085
NPWP1	: 011254851804000	Nama Pemilik	: ARKAN JASA RENCANA, PT
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: Jl. Amirullah No. 32
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-SARLING.PN.LSS/10/2022 TgL.26 Oktober 2022, BAP No. W23-U8/24/PWS.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No. W23-U8/25/PWS.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00143A
Tanggal : 23-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0A.000086-Pengawas	8.968.800,00
	Jumlah	**8.968.800,00**
Jumlah		**8.968.800,00**

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002335

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002335	23-12-2022	23-12-2022	7,797,200	00143T/401926/2022	23-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-SARLING.PN.LSS/10/2022 TgL.26 Oktober 2022, BAP No. W23-U8/24/PWS.SL/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No. W23-U8/25/PWS.SL/12/2022 Tgl.22 Desemb er 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 26-12-22 13:27:29 oleh : 401926

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA - 93911

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SEBAGAI PENJAMINAN
Nomor : W23-U8/25/PERC.FNSH-PN.LSS/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Henry Sollideo Sandu, SE
NIP	:	197711132009121005
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Lasusua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk menjamin CV. KALIMAYA sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Finising Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor W23-U8/10/PERC.FNSH-PN.LSS/8/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29,754,000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 4.463.100,- (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

1. Apabila dikemudian hari CV. KALIMAYA melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Lasusua, 22 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Lasusua

Henry Sollideo Sandu, SE
NIP.197711132009121005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00141A | Tanggal 23-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.880.083,00

****** TIGA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000111/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 31-08-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/10/PERC.FNSH-PN.LSS/8/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	4.463.100,00
Jumlah Pengeluaran	4.463.100,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	140.728,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	442.289,00
Jumlah Potongan	583.017,00
TOTAL PEMBAYARAN	3.880.083,00

Kepada:

Nomor	: 390429	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: CV. KALIMAYA	Rekening	: 0504109507
NPWP1	: 728217407423000	Nama Pemilik	: CV KALIMAYA
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: Jl. Tubagus Ismail Bawah No 19
NOP	:		

Uraian : Pembayaran belanja modal sesuai SPK No. W23-U8/10/PERC.FNSH-PN.LSS/8/2022 Tgl. 31 AGUSTUS 2022, W23-U8/24/PERC.FNSH-PN.LSS/12/2022 Tgl. 22 Desember 2022, SPTJM No. W23-U8/25/PERC.FNSH-PN.LSS/12/2022 Tanggal 22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00141A
Tanggal : 23-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0B.000089-Perencana	4.463.100,00
	Jumlah	**4.463.100,00**
Jumlah		**4.463.100,00**

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561303000612

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561303000612	23-12-2022	27-12-2022	3,880,083	00141T/401926/2022	23-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran belanja modal sesuai SPK No. W23-U8/10/PERC.FNSH-PN.LSS/8/2022 Tgl. 31 AGUSTUS 2022, W23-U8/24/PERC.FNSH-PN.LSS/12/2022 Tgl. 22 Desember 2022, SPTJM No. W23-U8/25/PERC.FNSH-PN.LSS/12/2022 T anggal 22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 06-03-23 23:28:13 oleh : 401926

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA – 93911

ADENDUM KONTRAK I

NOMOR : W23-U8/23/KONST.FG/12/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

ATAS
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK	:	W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022 TANGGAL 26 OKTOBER 2022
PAKET	:	PEKERJAAN KONSTRUKSI FINISHING GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LOKASI	:	JL. JENDRAL SUDIRMAN, KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA, KEC. LASUSUA, KAB.KOLAKA UTARA
PROVINSI	:	SULAWESI TENGGARA
SUMBER DANA	:	APBN
NILAI KONTRAK	:	Rp. 1.001.834.000,-
TAHUN ANGGARAN	:	2022

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. DWI KARYA BAKTI

Jl. Durian, Kec.Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA – 93911

ADENDUM KONTRAK I

Nomor : W23-U8/23/KONST.FG/12/2022
Tanggal : 22 Desember 2022

ATAS

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan lumsum dan Harga Satuan

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

FINISHING GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI LASUSUA
NOMOR: W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Addendum Kontrak I"** dibuat dan ditandatangani di Lasusua pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, antara :

Nama	:	**HENRY SOLLIDEO SANDU, SE**
NIP	:	197711132009121005
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab.Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Mahkamah Agung C.q Badan Urusan Administrasi C.q Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lasusua Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran W23-U8/2/KU.01/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Lasusua selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

Nama	:	**MUH. NUZLAN**
Jabatan	:	Direktur **CV. DWI KARYA BAKTI**
Berkedudukan di	:	Jl.Durian, Kec.Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara
Akta Notaris Nomor	:	75
Tanggal	:	28 Desember 2015
Notaris	:	Rayan Riadi, SH, M.Kn

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan presiden No 16 Tahun 2018 jo. Peraturan presiden No 12 Tahun 2021
2. Peraturan Kepala LKPP No.9 Tahun 2018 jo Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2021
3. Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Finishing Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua, Kontrak Nomor : W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022, Tanggal 26 Oktober 2022.
   a. SSUK Huruf B.3 Nomor 34 (Perubahan Kontrak)
   b. SSUK Huruf B.3 Nomor 36 (Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan)

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk melakukan Adendum Kontrak Pekerjaan Konstruksi Finishing Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN ..... Tetap
Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN ..... Tetap
Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN..... Tetap
Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK ..... Tetap
Pasal 5 MASA KONTRAK

Semula berbunyi :

1) Tetap
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 *(Enam Puluh)* harikalender.
3) Tetap.

Berubah menjadi :

1) Tetap
2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 *(Enam Puluh)* hari kalender dan diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal **25 Desember 2022 sampai dengan 23 Januari 2023** berakhirnya masa kontrak, sehingga masa pelaksanaan menjadi **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender dan **dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan (sebelum PPN), Jaminan Pelaksanaan diperpanjang selama 30 (Tiga Puluh) hari**
3) Tetap.

Ketentuan – ketentuan lain yang tercantum dalam kontrak asli tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum ini.
Demikian Addendum ini dibuat pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut di atas dan sah berlaku setelah ditandatangani Kedua Belah Pihak, dan apa bila terjadl kekeliruan dalam penyusunan Adendum ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. DWI KARYA BAKTI



MUH. NUZLAN
Direktur

Untuk dan atas nama
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HENRY SOLLIDEO SANDU, SE
NIP. 197711132009121005

mandiri

JAMINAN BANK
No. **BG16222183933**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	CHARKI KASENDA
Jabatan	:	BRANCH MANAGER

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kolaka
Berkedudukan di	:	Kolaka
Alamat	:	Jl. Chairil Anwar No. 34BC, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka

Yang selanjutnya disebut "**PENJAMIN**",

Dengan ini menyatakan akan membayar sejumlah uang dengan merujuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana **PENJAMIN** melepaskan hak utamanya yang terdapat dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepada:

Nama	:	HENRY SOLLIDEO SANDU, SE PENGADILAN NEGERI LASUSUA
Berkedudukan di	:	KOLAKA UTARA
Alamat	:	Jl. Jenderal Sudirman Kompleks Perkantoran Pemda Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara

Yang selanjutnya disebut "**PEMEGANG JAMINAN**",

setinggi-tingginya sebesar Rp 250,458,500 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) , atas dasar tuntutan /klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang ditetapkan dalam Jaminan Bank ini apabila :

Nama	:	CV. DWI KARYA BAKTI
Berkedudukan di	:	KENDARI
Alamat	:	Jl. Durian No. 87 RT 005 RW 002 Kel. Wua-Wua, Kendari

Yang selanjutnya disebut "**YANG DIJAMIN**",

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas berlakunya Jaminan Bank ini, dinyatakan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya oleh **PEMEGANG JAMINAN** atas pelaksanaan pekerjaan PENGADAAN PEKERJAAAN KONSTRUKSI FINISHING GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI LASUSUA sesuai dengan kontrak nomor: W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 atau pernyataan tertulis dari yang diberikan kuasa (dalam hal ini kepala **KPPN** 156 KOLAKA), bahwa BAPP/BAST tidak diberikan oleh **PEMEGANG JAMINAN** sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak berakhir.

Jaminan Bank ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.

Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan yang dilakukan oleh **YANG DIJAMIN** atau **PEMEGANG JAMINAN** tidak menyampaikan BAPP/BAST kepada **KPPN**, dengan menyerahkan asli warkat Jaminan Bank

Kepala **KPPN** 156 KOLAKA berdasarkan surat kuasa **PEMEGANG JAMINAN** mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada **PENJAMIN** selambat-lambatnya telah diterima

Dipindai dengan CamScanner

oleh **PENJAMIN** 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal **22 Februari 2023.** Apabila tuntutan/klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada **PENJAMIN** pada saat dilakukannya tuntutan/klaim.

Apabila dalam sampai batas habisnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, **PEMEGANG JAMINAN** atau yang diberi kuasa tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka jaminan bank ini tidak mengikat lagi terhadap **PENJAMIN**.

Untuk keperluan pemberian jaminan Bank ini beserta akibat yang timbul daripadanya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kolaka.

Kolaka,22 Desember 2022
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Kolaka

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN NEGERI LASUSUA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA



HENRY SOLLIDEO SANDU, SE
197711132009121005

CHARKI KASENDA
BRANCH MANAGER

mandiri

Dipindai dengan CamScanner

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA – 93911

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : W23-U8/35/KONST.FG/1/2023

Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Output	:	Finishing Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua
Lokasi	:	Pengadilan Negeri Lasusua
Nomor Surat Perjanjian	:	W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022
Tanggal Surat Perjanjian	:	Tanggal 26 Oktober 2022
Tahun Anggaran	:	2022

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA PULUH TIGA** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **HENRY SOLLIDEO SANDU, SE**
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Pengadilan Negeri Lasusua Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Lasusua Nomor W23-U8/2/KU.01/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023
   Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA***

2. Nama : **MUH. NUZLAN**
   Jabatan : Direktur CV. DWI KARYA BAKTI
   Alamat : Jl. Durian, Kec.Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris RAYAN RIADI, SH., M.Kn, Nomor 75 Tanggal 28 Desember 2015

Selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
2. Kontrak Nomor : W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022.
3. Berita Acara Pemeriksaaan Hasil Pekerjaan Nomor : W23-U8/33/KONST.FG/1/2023 Tanggal 23 Januari 2023.
4. Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : W23-U8/34/KONST.FG/1/2023 Tanggal 23 Januari 2023.
5. Surat Penyedia Jasa CV. DWI KARYA BAKTI Nomor: 022/DKB/PHP--PN.LSS-FG/I/2023 tanggal 22 Januari 2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

Maka semua pihak telah sepakat mengadakan Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Finishing Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyerahkan sementara Pekerjaan Finishing Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua yang telah selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan sementara pekerjaan dimaksud dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang Menyerahkan :	Yang Menerima :
PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
CV. DWI KARYA BAKTI	*Pejabat Pembuat Komitmen*
MUH. NUZLAN	**HENRY SOLLIDEO SANIDU, SE**
Direktur	NIP. 197111132009121005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00146A | Tanggal 28-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 177.351.695,00

**** SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000137/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	200.366.800,00
Jumlah Pengeluaran	200.366.800,00
POTONGAN	**JUMLAH UANG**
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	3.158.936,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	19.856.169,00
Jumlah Potongan	23.015.105,00
TOTAL PEMBAYARAN	177.351.695,00

Kepada:

Nomor	: 283531	Bank / Pos	: BPD SULAWESI TENGGARA
Nama Supplier	: CV. DWI KARYA BAKTI	Rekening	: 10101041002806
NPWP1	: 749264115811000	Nama Pemilik	: CV. DWI KARYA BAKTI
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: JL. DURIAN
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Modal Termin Ke 4 Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/26/KONST.FG/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222183933 Tgl.22 Desember 2022		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00146A
Tanggal : 28-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0B.000088-FIsik	200.366.800,00
	Jumlah	**200.366.800,00**
Jumlah		**200.366.800,00**

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002350

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002350	28-12-2022	28-12-2022	177,351,695	00146T/401926/2022	28-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Termin Ke 4 Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/26/KONST.FG/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222183933 Tgl.22 D esember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 29-12-22 07:43:33 oleh : 401926

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00147A | Tanggal 28-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 44.337.924,00

****** EMPAT PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000137/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	50.091.700,00
Jumlah Pengeluaran	50.091.700,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	789.734,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	4.964.042,00
Jumlah Potongan	5.753.776,00
TOTAL PEMBAYARAN	44.337.924,00

Kepada:

Nomor	: 283531	Bank / Pos	: BPD SULAWESI TENGGARA
Nama Supplier	: CV. DWI KARYA BAKTI	Rekening	: 1010104100280 6
NPWP1	: 749264115811000	Nama Pemilik	: CV. DWI KARYA BAKTI
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: JL. DURIAN
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/28/KONST.FG/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222183933 Tgl.22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00147A
Tanggal : 28-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0B.000088-Fisik	50.091.700,00
	Jumlah	**50.091.700,00**
Jumlah		**50.091.700,00**

LASUSUA, 28 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002351

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002351	28-12-2022	28-12-2022	44,337,924	00147T/401926/2022	28-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/08/KONST.FG-PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022, BAP No.W23-U8/28/KONST.FG/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, Bank Garansi No.BG16222183933 Tgl.22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 29-12-22 07:42:27 oleh : 401926

516629747

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. MAKASAR 90000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 26-01-2023 14:24:19
No.Resi : 90000-70/2023/801071 Petugas : 550007673

Tanggal Buku : 27-01-2023 NTP : 919179200458
Kode Cabang Pos : 090000 NTPN : AF33D55DEVMIVOUV
STAN : 200458

Waktu Transaksi : 26-01-2023 14:24:16
Kode Billing : 820230126240735
Nama Wajib Bayar: LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H
K / L : 005
Unit Eselon : 01
Kode Satker : 401926
Jumlah Setoran : Rp. 869.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : http://www.posindonesia.

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820230126240735
Tanggal Billing	:	26-01-2023 13:01:20
Tanggal Kedaluwarsa	:	02-02-2023 13:01:20
Tanggal Bayar	:	26-01-2023 14:24:16
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	POS INDONESIA
Channel Bayar	:	*Teller*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H
Kementerian/Lembaga	:	***005*** - MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	:	***01*** - Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja	:	***401926*** - PENGADILAN NEGERI LASUSUA
Total Disetor	:	869.000 (IDR)
Terbilang	:	*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**919179200458**
NTPN	:	**AF33D55DEVMIV0UV**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Kode Akun	:	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Setoran	:	869.000 (IDR)
Keterangan	:	Denda keterlambatan CV. DWI KARYA BAKTI

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

Jl. Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemda, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Telepon (0405) 2330657 Situs web : www.pn-lasusua.go.id, E-mail : pn.lasusua@gmail.com
LASUSUA - 93911

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SEBAGAI PENJAMINAN
Nomor : W23-U8/25/PWS.FNSH/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Henry Sollideo Sandu, SE
NIP	:	197711132009121005
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Lasusua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk menjamin PT. ARKAN JASA RENCANA sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Finishing Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor W23-U8/14/PWS-FNSH.PN.LSS/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.584.800,- (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan sisa nilai kontrak sebesar Rp. 17.875.440,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

2. Apabila dikemudian hari PT. ARKAN JASA RENCANA melakukan wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi/pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Lasusua, 22 Desember 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Lasusua

Henry Sollideo Sandu, SE
NIP.197711132009121005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00144A | Tanggal 23-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 10.360.240,00

****** SEPULUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000135/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/14/PWS-FNSH.PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	11.916.960,00
Jumlah Pengeluaran	11.916.960,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	375.760,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	1.180.960,00
Jumlah Potongan	1.556.720,00
TOTAL PEMBAYARAN	10.360.240,00

Kepada:

Nomor	: 1044026	Bank / Pos	: BPD SULAWESI SELATAN
Nama Supplier	: PT. ARKAN JASA RENCANA	Rekening	: 1300030000271085
NPWP1	: 011254851804000	Nama Pemilik	: ARKAN JASA RENCANA, PT
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: Jl. Amirullah No. 32
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin ke 2 Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-FNSH.PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022 , BAP No.W23-U8/22/PWS.FNSH/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PWS.FNSH/12/2022 Tgl.22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00144A
Tanggal : 23-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0B.000090-Pengawas	11.916.960,00
	Jumlah	**11.916.960,00**
Jumlah		**11.916.960,00**

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002336

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002336	23-12-2022	23-12-2022	10,360,240	00144T/401926/2022	23-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Termin ke 2 Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-FNSH.PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022 , BAP No.W23-U8/22/PWS.FNSH/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PWS.FNSH/12/2022 T gl.22 Desember 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 26-12-22 13:29:30 oleh : 401926

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00145A | Tanggal 23-Des-2022 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Kolaka (156)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 5.180.120,00

****** LIMA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH ******

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-005.01.2.401926/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/156.22000135/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 26-10-2022 Nomor Kontrak/SPK : W23-U8/14/PWS-FNSH.PN.LSS/10/2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000	5.958.480,00
Jumlah Pengeluaran	5.958.480,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
409979.060.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	187.880,00
409979.060.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2051.2.000000.000000	590.480,00
Jumlah Potongan	778.360,00
TOTAL PEMBAYARAN	5.180.120,00

Kepada:

Nomor	: 1044026	Bank / Pos	: BPD SULAWESI SELATAN
Nama Supplier	: PT. ARKAN JASA RENCANA	Rekening	: 1300030000271085
NPWP1	: 011254851804000	Nama Pemilik	: ARKAN JASA RENCANA, PT
NPWP2	: 001140375815000	Alamat	: Jl. Amirullah No. 32
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-FNSH.PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022 , BAP No.W23-U8/24/PWS.FNSH/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PWS.FNSH/12/2022 Tgl.22 Desember 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00145A
Tanggal : 23-Desember-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401926.156.533111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2008.2.000000.000000		
1	971.051.0B.000090-Pengawas	5.958.480,00
	Jumlah	**5.958.480,00**
Jumlah		**5.958.480,00**

LASUSUA, 23 Desember 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

MARTAM TAMPUBOLON, S.Kom, SH
NIP 198703142011011016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 221561302002337

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	221561302002337	23-12-2022	23-12-2022	5,180,120	00145T/401926/2022	23-12-2022	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai SPK No.W23-U8/14/PWS-FNSH.PN.LSS/10/2022 Tgl.26 Oktober 2022 , BAP No.W23-U8/24/PWS.FNSH/12/2022 Tgl.22 Desember 2022, SPTJM No.W23-U8/25/PWS.FNSH/12/2022 Tgl.22 Desemb er 2022	Cek Akun	☐

tanggal cetak : 26-12-22 13:24:34 oleh : 401926



PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2022 *AUDITED*

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
	0100	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	Rp101.083.140,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kuningan	29 Desember 2021 s.d. 29 Desember 2024	Sewa Gedung dan/atau Bangunan untuk layanan perbankan
				Rp5.097.500,00	Sari Sahsiana	27 Oktober 2022 s.d. 27 Oktober 2023	Sewa selasar untuk kedai kopi
				Rp12.350.000,00	Hj. Farida Lubis	1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2026	Sewa ruangan basement untuk kantin
	0100	097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	Rp59.076.000,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciputat	01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023	Sewa Gedung dan/atau Bangunan untuk kegiatan perbankan
				Rp3.591.667,00	PT The Lokus Kopi	01 Mei 2022 s.d. 30 April 2023	Sewa lahan untuk kantin
				Rp2.961.000,00	Alwiyah Ahmad	01 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023	Sewa ruangan untuk kantin
				Rp2.108.667,00	Sunar	01 Mei 2022 s.d. 30 April 2023	Sewa ruangan untuk kantin
				Rp2.003.667,00	Megayani Pristika	01 Mei 2022 s.d. 30 April 2023	Sewa ruangan untuk kantin
				Rp1.841.667,00	Arifianto	01 Mei 2022 s.d. 30 April 2023	Sewa lahan untuk kegiatan jasa fotokopi
	0200	097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	Rp2.126.889,00	Iin Komalasari	21 Mei 2021 s.d 20 Mei 2024	Sewa lahan untuk kantin
	2900	097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	Rp6.357.500,00	Bank BTN	5 Juli 2021 s.d 5 Juli 2023	Sewa lahan untuk Bank BTN
				Rp3.048.333,00	Tia Nurul Aryanti	7 Juni 2022 s.d 7 Mei 2023	Sewa lahan untuk kantin
	2900	097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	Rp3.538.167,00	Tabroni	1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2025	Sewa lahan untuk kantin
	2900	097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	Rp62.769.833,00	Bank BTN	1 Agustus 2022 s.d. 31 Juli 2025	Sewa BTN
				Rp51.350.000,00	Bank BRI	21 Juni 2022 s.d. 21 Juni 2025	Sewa tanah bangunan dan sewa Bangunan kantor (ATM) BRI 21 Jun 2022 s.d. 21 Jun 2025
				Rp40.900.417,00	Sewa Kantin	25 November 2022 s.d. 25 November 2025	Sewa Bangunan Gedung Kantor Permanen Selama 3 (tiga) Tahun 25 Nov 2022 s.d. 25 Nov 2025
	0200	097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	Rp10.255.667,00	Bank BTN	20 Oktober 2020 s.d 19 Oktober 2023	Sewa Payment Point
	0200	097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	Rp30.735.250,00	Bank BNI	07 Oktober 2022 s.d 06 Oktober 2025	Sewa ATM
	0200	097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	Rp1.109.333,00	Sewa Kantin	6 September 2022 s.d. 6 September 2023	Sewa untuk kantin
	0200	097652	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	Rp2.552.682,00	Puji Rahayu, S.H., M.H.	01 Maret 2019 s.d 29 Februari 2024	Sewa lahan untuk kantin
	0200	097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	Rp362.667,00	Ai Lina	14 Maret 2022 s.d. 13 Maret 2023	Sewa untuk kantin
	0300	097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	Rp21.883.722,00	BRI KC Pandanaran	02 Juni 2022 s.d 31 Mei 2025	Pendapatan atas sewa ATM periode 2 Juni 2022 s.d 31 Mei 2025 (3 Tahun) senilai Rp27.166.000
				Rp1.847.083,00	Susana	02 Juni 2022 s.d 31 Mei 2023	Pendapatan atas sewa kantin periode Juni 2022 s.d Mei 2023 (1tahun) senilai Rp4.433.000
	0300	097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	Rp2.625.000,00	Sholikin	01 Oktober 2022 s.d 31 September 2023	Pendapatan atas sewa kantin periode 1 Oktober 2022-31 September 2023
	0300	097762	PENGADILAN NEGERI PATI	Rp1.375.000,00	SUDARMI	03 Desember 2021 s.d 02 Desember 2023	Sewa untuk Kantin

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
	0300	097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	Rp1.097.500,00	Koperasi	05 November 2021 s.d 05 November 2023	Pendapatan atas Sewa Kantin periode 5 Nov 2021 s.d 5 Nov 2023 (2 Tahun) senilai Rp. 2.634.000,-
	0300	097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	Rp2.162.000,00	Koperasi	01 September 2021 s.d 31 Agustus 2024	Pendapatan atas sewa kantin periode 1 januari 2023 sampai dengan 31 agustus 2024 (20 bulan)
	0300	097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	Rp1.150.000,00	Sukini	21 Desember 2021 s.d 20 Desember 2024	Sewa untuk Kantin selama 3 Tahun
	0300	097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Rp308.333,00	Ny.Ngartini	18 April 2022 s.d 17 April 2023	Sewa sebagian Tanah untuk Kantin
	0300	097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	Rp788.750,00	Karmono	02 Juli 2021 s.d 02 Juli 2023	Sewa untuk Kantin selama 2 tahun
	0300	097886	PENGADILAN NEGERI PURWOREJO	Rp1.375.000,00	Rina dan Umy Budiarty	15 Desember 2022 s.d 14 Desember 2023	Sewa Kantin jangka waktu 1 tahun untuk 2 orang penyewa
	0300	097890	PENGADILAN NEGERI MAGELANG	Rp932.400,00	Wiwik Utami	01 Januari 2023 s.d 31 Juli 2023	Pendapatan sewa tanah diterima dimuka (kantin) Januari-Juli 2023
	0300	097933	PENGADILAN NEGERI SURAKARTA	Rp375.000,00	Sri astani	05 Desember 2022 s.d 05 Desember 2025	sewa kantin bulan desember 2022
	0300	097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	Rp1.315.500,00	SUYONO	01 Juli 2022 s.d 30 Juni 2024	Sewa Kantin
	0300	097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	Rp1.528.333,00	GIYONO	01 Maret 2022 s.d	Sewa Kantin
	0300	097975	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	Rp23.912.000,00	Stikes 17 Surakarta	01 Oktober 2019 s.d 30 September 2024	Sewa tanah dan bangunan untuk kampus (5 tahun)
				Rp3.000.000,00	Tulus Widyastomo	11 November 2021 s.d 10 November 2023	Sewa tanah untuk kantin (2 tahun)
				Rp1.312.500,00	Warsini	11 November 2021 s.d 10 November 2023	Sewa tanah untuk kantin (2 tahun)
	0300	097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	Rp2.917.000,00	Sri Sudarti	01 November 2023 s.d 31 Oktober 2023	Pendapatan Sewa tanah, gedung, dan bangunan untuk kantin selama 1 tahun
	0300	098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	Rp750.000,00	Imam Widianto	01 Juli 2022 s.d 30 Juni 2023	Sewa tanah untuk kantin
	0300	098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	Rp2.153.250,00	irene ratih parwita	28 September 2021 s.d 28 Agustus 2023	Sewa kantin
	0300	098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	Rp1.243.375,00	Agus Triyono	17 Juni 2022 s.d 17 Juni 2025	Sewa lahan untuk kantin
	0400	098061	PENGADILAN NEGERI WATES	Rp625.000,00	Sulistiyo	1 April 2022 s.d 31 Maret 2024	sewa lahan untuk kantin
	0400	098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	Rp900.000,00	Sri Subiyandini	01 Oktober 2022 s.d 01 Oktober 2023	sewa lahan untuk kantin
	0500	098150	PENGADILAN NEGERI GRESIK	Rp86.828.000,00	PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Gresik	19 Februari 2019 s.d. 19 Februari 2024	Sewa bangunan untuk Kantor Payment Point Bank BTN
	0500	098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	Rp3.532.667,00	PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banyuwangi	30 September 2021 s.d. 30 September 2024	Sewa ATM BTN
				Rp2.004.750,00	Suminah	11 Oktober 2022 s.d. 11 Oktober 2023	Sewa kantin
	0500	098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	Rp10.000.000,00	Basori	31 Mei 2022 s.d. 31 Mei 2025	Sewa tanah untuk kantin
	0500	098256	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	Rp375.000,00	Wiwik Wahyuningsih	14 April 2021 s.d. 14 April 2023	Sewa kantin
	0500	098260	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	Rp100.000,00	Kusriati	19 Januari 2022 s.d. 18 Januari 2023	Sewa Kantin Tahun 2022 tgl 19 Jan 2022 s.d. 18 Jan 2023
	0500	098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	Rp1.297.500,00	Widyatmoko	09 September 2019 s.d. 8 September 2024	Sewa lahan untuk koperasi
	0500	098298	PENGADILAN NEGERI PASURUAN	Rp2.151.872,00	Solichin	01 November 2022 s.d. 01 November 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0500	098352	PENGADILAN NEGERI PONOROGO	Rp2.400.000,00	Yayuk Yuliani	01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0500	098387	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	Rp950.000,00	Parmi	16 Juli 2021 s.d. 16 Juli 2024	Sewa gedung untuk kantin
				Rp475.000,00	Jarwanti	17 Juli 2021 s.d. 17 Juli 2024	Sewa gedung untuk kantin

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
	0700	098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	Rp36.376.417,00	PT BRI Cabang Medan	13 Desember 2022 s.d. 13 Desember 2024	Sewa ATM BRI
				Rp1.395.000,00	Santi Indriani	08 Oktober 2021 s.d. 08 Oktober 2023	Sewa kantin
	0700	098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	Rp40.932.000,00	Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Negeri Medan	20 Desember 2022 s.d. 20 Desember 2025	Sewa koperasi
				Rp18.225.000,00	PT BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau	29 Desember 2021 s.d. 29 Desember 2023	Sewa ATM BRI
				Rp17.981.000,00	PT BRI Kantor Cabang Medan Putri Hijau	29 Desember 2021 s.d. 29 Desember 2023	Sewa Kantor Kas BRI
				Rp4.278.000,00	PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan	27 September 2021 s.d. 27 September 2023	Sewa Kantor BTN
	0700	098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	Rp250.000,00	Agustinus	14 Februari 2022 s.d. 14 Februari 2023	Sewa kantin
	0700	098682	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	Rp3.712.500,00	Saur Rumiris br Silaen	12 April 2022 s.d. 12 April 2024	Sewa tanah untuk lahan pertanian
	0700	098739	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	Rp4.349.417,00	Petmi Juniarpa	01 Agustus 2022 s.d. 31 Juli 2024	Sewa kantin
	0800	098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	Rp3.000.000,00	Nurbaini Bustami	21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0800	098771	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	Rp395.000,00	Meghi Okta Adpelra	14 Juni 2022 s.d 13 Juni 2023	Sewa Tanah untuk keperluan kantin atas nama Meghi Okta Adpelra selama 1 tahun
	0800	098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	Rp93.583,00	Yuanzalinda	3 Februari 2022 s.d 2 Februari 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0800	098807	PENGADILAN NEGERI PAINAN	Rp289.750,00	Feriyanti	1 April 2022 s.d 31 Maret 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0800	098828	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	Rp506.250,00	Gia Angraini, SH	1 Oktober 2022 s.d 1 Oktober 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0800	098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	Rp840.833,00	Saprial Ansori	1 November 2022 s.d 31 Oktober 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0900	098849	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	Rp1.875.000,00	Asbinsyah Pasaribu	05 Oktober 2022 s.d 04 Oktober 2023	Sewa tanah untuk kantin
	0900	098853	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	Rp1.066.917,00	Sasmita	19 Juli 2022 s.d 18 Juli 2023	Sewa tanah untuk kantin
	1000	098917	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	Rp1.440.000,00	Masitah	12 September 2022 s.d. 11 September 2023	Sewa tanah untuk kantin
	1100	098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	Rp6.564.000,00	Bank BRI	06 Oktober 2021 s.d 05 Oktober 2023	Sewa Tanah untuk ATM BRI
				Rp5.390.000,00	Bank BTN	01 September 2020 s.d 31 Agustus 2023	Sewa Tanah untuk PP BANK BTN
				Rp6.250.000,00	Ny. Rahmawati	22 Maret 2021 s.d 21 Maret 2024	Sewa Tanah untuk Kantin
	1100	098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	Rp3.109.000,00	Suwondo	06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2024	Sewa untuk Kantin
	3000	099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	Rp166.667,00	Susilawati	1 Maret 2022 s.d 28 Februari 2024	Sewa lahan untuk kantin
	1200	099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	Rp97.167,00	Ani Yunalian	8 Februari 2022 s.d 8 Februari 2023	Sewa lahan untuk kantin
				Rp29.863.333,00	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025	Sewa tanah untuk ATM Bank BRI
	1300	099066	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	Rp2.832.083,00	Yuniar Nelly, S.T., M.M.	03 Agustus 2022 s.d 03 Agustus 2023	Sewa tanah untuk kantin
				Rp1.654.333,00	Sewa kantin	22 Juli 2022 s.d. 22 Juli 2025	Sewa kantin

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
	1300	099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	Rp4.385.625,00	Sewa ATM	11 Juli 2022 s.d. 11 Juli 2025	Sewa Tanah untuk keperluan rumah makan
	1300	099109	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	Rp1.150.000,00	Sewa kantin	01 Desember 2022 s.d 30 November 2024	Sewa tanah untuk kantin
	1300	099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	Rp3.215.400,00	Eka Bhinekawati	01 Desember 2019 s.d 31 Desember 2023	Sewa tanah untuk kantin
	1400	099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Rp2.631.667,00	Mahming Pansari	17 Oktober 2022 s.d. 16 Oktober 2023	Sewa tanah untuk kantin
	1500	099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	Rp3.524.000,00	Ririn Puji Lestari	23 Agustus 2022 s.d 23 Agustus 2024	Sewa Bangunan untuk Kantin
	1500	099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	Rp2.089.328,00	Maelah	19 Agustus 2022 s.d 19 Agustus 2023	Sewa tanah untuk kantin
	1600	099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	Rp6.763.166,00	Kamariah	08 Februari 2022 s.d 07 Februari 2023	Sewa lahan untuk kantin
	1700	099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	Rp7.803.250,00	Silfani Pialambung	01 Oktober 2022 s.d 30 September 2024	Sewa tanah untuk kantin
	3100	099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	Rp5.951.400,00	Ramlah Dewi Idrak	1 Oktober 2019 s.d 30 September 2024	Sewa lahan untuk kantin
	1800	099375	PENGADILAN NEGERI PALU	Rp4.022.333,00	Amelia Astuti	23 November 2022 s.d 23 November 2023	Sewa lahan untuk kantin
	1900	099464	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	Rp130.667,00	Sadariah Dg. Kenang	26 Januari 2022 s.d 25 Januari 2023	Sewa lahan untuk kantin
	1900	099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	Rp3.760.417,00	Samsinah	30 Januari 2021 s.d 30 Januari 2024	Sewa lahan untuk kantin
	1900	099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	Rp745.000,00	Sitti Aisyah	01 November 2022 s.d 31 Oktober 2023	Sewa lahan untuk kantin
	1900	099528	PENGADILAN NEGERI PINRANG	Rp12.169.875,00	Bank BRI cab. Pinrang	31 Mei 2022 s.d 30 Mei 2024	Sewa lahan untuk ATM Bank BRI
	1900	099549	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	Rp2.506.000,00	Ariana Anwar	30 Desember 2022 s.d 29 Desember 2023	Sewa lahan untuk kantin
	1900	099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	Rp2.036.375,00	Rosdiana	20 Oktober 2022 s.d 20 Oktober 2024	Sewa lahan untuk kantin
	1900	099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	Rp928.000,00	Syamsidar	23 Desember 2021 s.d 22 Desember 2023	Sewa lahan untuk kantin
	1900	099617	PENGADILAN NEGERI MAKALE	Rp848.250,00	Yuspin Nete	11 Maret 2022 s.d 10 Maret 2024	Sewa lahan untuk kantin
	2800	099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	Rp2.590.000,00	Sewa kantin	1 November 2022 s.d. 31 Oktober 2023	Sewa kantin
	2800	099748	PENGADILAN NEGERI TOBELO	Rp2.547.917,00	Sewa kantin	17 Oktober 2022 s.d. 16 Oktober 2023	Sewa kantin
	2200	099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Rp3.215.909,00	Siti Colitijah	1 Agustus 2020 s.d 30 Juli 2023	Sewa lahan untuk kantin
	2200	099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	Rp38.365.750,00	Ni Komang Ambarayani	6 September 2021 s.d 6 September 2024	Sewa lahan untuk kantin
	2200	099794	PENGADILAN NEGERI SINGARAJA	Rp2.500.200,00	Luh Sriani	14 Juni 2022 s.d 14 Juni 2023	Sewa lahan untuk kantin
	2200	099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	Rp1.583.333,00	Ni Nyoman Hariani	9 Agustus 2022 s.d 8 Agustus 2024	Sewa lahan untuk kantin
	2300	099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	Rp974.000,00	Megawati	25 Agustus 2022 s.d 25 Agustus 2023	Sewa lahan untuk kantin
	2300	099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	Rp36.750.000,00	PT PLN (Persero) UP3 Mataram	06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2024	Sewa gedung untuk kantor
				Rp805.000,00	Ni Wayan Sumarni	20 April 2020 s.d 20 April 2023	Sewa lahan untuk kantin

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
005.01 BUA	2300	099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	Rp653.104,00	Husin Syarifudin	01 Desember 2021 s.d 30 November 2024	Sewa sebagian tanah untuk warung
				Rp1.359.999,00	Baiq Marniadi	01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2024	Sewa sebagian tanah untuk warung
				Rp500.000,00	Rusdi	01 Juni 2022 s.d 31 Mei 2023	Sewa sebagian bangunan untuk kantin
	2400	099930	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	Rp18.758.333,00	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)	27 Oktober 2022 s.d. 27 Oktober 2023	Sewa ATM BRI Atambua
	0700	108025	PENGADILAN NEGERI STABAT	Rp5.818.750,00	Sumadi	09 Desember 2022 s.d. 09 November 2025	Sewa kantin
	3200	108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	Rp13.755.750,00	Hartati	5 Oktober 2022 s.d. 4 Oktober 2023	Sewa kantin 1 tahun
				Rp12.488.250,00	Sepsioriza, PT Bank Negara Indonesia (BNI) KC Batam	1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023	Sewa BNI
	1900	307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	Rp753.083,00	Muh. Bakri	09 Agustus 2022 s.d 09 Agustus 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0200	308166	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	Rp2.022.000,00	Masngud	28 September 2022 s.d 27 September 2023	Sewa lahan untuk kantin
	2400	400007	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	Rp182.667,00	Maria Regina Lein, S.E.	21 Januari 2022 s.d 21 Januari 2023	Sewa tanah belakang kantor untuk kantin
	2500	400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	Rp16.246.200,00	PT BTN (PERSERO Tbk) diwakili oleh Bonsa Pasogit Rumapea	20 September 2018 s.d. 20 September 2023	sewa tanah ATM BTN KC Jayapura dan sewa tanah payment poit BTN KC Jayapura
	2600	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	Rp885.000,00	Syarifuddin	21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2023	Sewa Kantin selama 1 Tahun
	0400	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	Rp977.000,00	Chotimah	12 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023	Sewa Kantin selama 2 tahun
	1300	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	Rp858.333,00	Yosiawati	05 November 2022 s.d 04 November 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0100	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	Rp18.202.580,00	PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jakarta Kuningan	19 November 2021 s.d. 19 November 2023	Sewa tanah dan gedung untuk ATM
				Rp22.654.500,00	PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jakarta Kuningan	19 November 2021 s.d. 19 November 2023	Sewa tanah dan gedung untuk ATM
				Rp31.773.042,00	Hj. Sri Harti Supangat	22 November 2021 s.d. 22 November 2023	Sewa gedung untuk kantin
	1300	400251	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	Rp1.875.000,00	Yuyun Salilama	17 Maret 2021 s.d 16 Maret 2024	Sewa lahan untuk kantin
	1500	400282	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	Rp303.687,00	Malawik	22 Maret 2022 s.d 22 Maret 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0900	400327	PENGADILAN NEGERI DUMAI	Rp800.000,00	Yuliati	01 November 2021 s.d 31 Oktober 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0800	400333	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	Rp2.400.000,00	Samsi	18 Januari 2022 s.d 31 Desember 2024	Sewa lahan untuk kantin
	0400	400342	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	Rp2.112.458,00	Eni Wijiastuti	21 Oktober 2022 s.d 20 Oktober 2024	Sewa lahan untuk kantin
	1400	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	Rp6.584.411,00	PT. BRI Palangkaraya	11 Mei 2021 s.d 10 Mei 2023	Sewa Lahan untuk ATM BRI
	1200	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Rp29.863.333,00	Sewa ATM	1 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2025	Sewa ATM
	0700	400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	Rp2.304.000,00	Lisa Listiyorini	01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023	Sewa Gedung Kantin
	0700	400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	Rp2.032.875,00	Supriani	8 Februari 2022 s.d. 8 Februari 2024	Sewa Kantin

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
	0800	400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	Rp389.250,00	Andira Mardhiah, S.Kom (Bendahara Koperasi PN Tanjung Pati)	1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0800	400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	Rp245.750,00	Rezki Ramadhan	1 April 2022 s.d 31 Maret 2023	Sewa lahan untuk kantin
	1200	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	Rp1.728.333,00	Sdr. Risdianto	18 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2023	Sewa kantin
	0200	400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	Rp1.200.000,00	Masriah (Kantin Barokah)	14 Juni 2021 s.d 13 Juni 2024	Sewa lahan untuk kantin
	1000	400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	Rp12.934.167,00	BRI Cabang Jambi	01 November 2022 s.d 31 oktober 2023	Sewa tanah untuk ATM
				Rp670.333,00	Olza Akrianti(kantin)	11 Mei 2022 s.d 10 Mei 2023	Sewa lahan untuk kantin
	2600	400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	Rp1.993.333,00	Ely Kamsiah	30 September 2022 s.d 30 September 2024	Sewa lahan untuk kantin
	2300	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	Rp992.355,00	Anisa	18 November 2021 s.d 17 November 2024	Sewa lahan untuk kantin
	0300	400571	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	Rp1.020.000,00	M. Ridwan	21 Desember 2022 s.d 20 Desember 2023	Pendapatan Sewa tanah, gedung, dan bangunan untuk kantin selama 1 tahun
	0100	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	Rp13.704.917,00	PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jakarta Barat	01 Juni 2022 s.d. 31 Mei 2025	Sewa gedung untuk kegiatan layanan perbankan
	0100	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	Rp24.295.500,00	PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilandak	31 Agustus 2018 s.d. 01 September 2023	Sewa tanah gedung payment point
	0200	400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	Rp1.698.829,00	Firman Nurdiansyah	1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025	Sewa kantin
	0200	400729	PENGADILAN AGAMA BOGOR	Rp12.320.000,00	Bank BRI	05 Agustus 2021 s.d 04 Agustus 2023	Sewa tanah untuk ATM
	0200	400750	PENGADILAN AGAMA CIREBON	Rp5.890.500,00	Koperasi Konsumen PA Cirebon	01 Desember 2022 s.d 30 November 2023	Sewa Koperasi
	0200	400766	PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU	Rp321.000,00	Koperasi pegawai PA Indramayu	01 April 2022 s.d 01 Maret 2023	Sewa Koperasi
	0200	400772	PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	Rp654.000,00	Koperasi Sabar	01 April 2019 s.d 31 Maret 2024	Sewa Koperasi
	2900	400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	Rp420.000,00	Emilda	10 April 2022 s.d 10 April 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0200	400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	Rp416.667,00	PT POS Indonesia	18 Mei 2022 s.d 18 Mei 2023	Sewa lahan untuk Kantor Pos
	0200	400854	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	Rp3.020.333,00	Hilman Yusuf	01 Januari 2022 s.d 30 September 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0300	400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	Rp1.434.246,00	Sri Ani	16 Desember 2022 s.d 16 Desember 2023	Sewa Tanah dan Bangunan untuk Kantin untuk 1 tahun dengan sewa sebesar Rp. 1.500.000,-
	0300	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	Rp2.347.333,00	Sewa kantin	1 Mei 2022 s.d. 30 April 2025	Sewa kantin
	0300	400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	Rp500.000,00	Ahmad Mustofa	11 Juni 2021 s.d 11 Juni 2024	Pendapatan atas Sewa Kantin tahun 2022 dengan pembayaran uang sewa yang dilakukan setiap tahun sebesar Rp 1.200.000
	0300	400973	PENGADILAN AGAMA KUDUS	Rp200.000,00	Tubri	09 Maret 2022 s.d 09 Maret 2023	Pendapatan atas Sewa Kantin tahun 2022 dengan pembayaran uang sewa yang dilakukan setiap tahun sebesar Rp 1.200.000
	0300	401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	Rp750.000,00	Sulastri	19 April 2022 s.d 19 April 2024	Sewa Sebagian Tanah untuk Kantin (2 Thn)
	0500	401271	PENGADILAN AGAMA JOMBANG	Rp1.609.854,00	Agus Hariadi	21 Juli 2021 s.d. 21 Juli 2024	Sewa lahan untuk kantin
	0500	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	Rp1.410.500,00	Paguyuban Karyawan PA Gresik	28 Desember 2020 s.d. 28 Desember 2023	Sewa lahan untuk kantin
	0500	401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	Rp8.048.333,00	Cholifah	28 Oktober 2021 s.d. 28 Oktober 2024	Sewa lahan untuk kantin

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
	0500	401338		Rp2.375.000,00	PT Bank Rakyat Indonesia	01 Agustus 2021 s.d. 01 Agustus 2024	Sewa lahan untuk loket
	0500	401350	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	Rp1.833.722,00	Suanggak	09 Maret 2022 s.d. 09 Maret 2025	Sewa lahan untuk kantin
	0500	401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	Rp1.069.583,00	PT BPD Jawa Timur Cabang Tulungagung	08 Maret 2022 s.d. 08 Maret 2025	Sewa ATM
				Rp1.307.500,00	PT BRI Kantor Cabang Tulungagung	08 Maret 2022 s.d. 08 Maret 2024	Sewa ATM
				Rp915.521,00	Miftakul Rohmah	02 Desember 2021 s.d. 02 Desember 2024	Sewa bangunan untuk kantin
				Rp4.278.542,00	PT Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung	02 Desember 2021 s.d. 02 Desember 2024	Sewa bangunan untuk pelayanan perbankan
	0500	401488	PENGADILAN AGAMA MADIUN	Rp904.462,00	Sewa Kantin Gunarto	01 Maret 2021 s.d. 28 Februari 2024	Sewa Kantin
	0600	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	Rp20.000.000,00	Bank Aceh	01 Mei 2021 s.d 30 April 2024	Sewa tempat Bank Aceh
	0600	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	Rp3.125.000,00	Sewa Kantin	9 Februari 2022 s.d. 8 Januari 2025	Sewa kantin 3 tahun sebesar 4.500.000
	2600	401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Rp130.729,00	Sewa Kantin a.n. Hairul	1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2024	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.568.750
	1600	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Rp710.737,00	Sewa kantin a.n. Chofiyah	10 Mei 2022 s.d 09 Mei 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.280.000
	0200	401957	PENGADILAN AGAMA SOREANG	Rp2.291.667,00	Sewa kantin a.n. Weni Wulandari	21 Oktober 2021 s.d 20 Oktober 2024	Sewa kantin 3 tahun sebesar 3.750.000
				Rp2.291.667,00	Sewa kantin a.n. Nunung Nurhayati	21 Oktober 2021 s.d 20 Oktober 2024	Sewa kantin 3 tahun sebesar 3.750.000
				Rp2.291.667,00	Sewa kantin a.n. Lilis Suryani	21 Oktober 2021 s.d 20 Oktober 2024	Sewa kantin 3 tahun sebesar 3.750.000
				Rp2.291.666,00	Sewa kantin a.n. Ida Rosita	21 Oktober 2021 s.d 20 Oktober 2024	Sewa kantin 3 tahun sebesar 3.750.000
	0900	402081	PENGADILAN AGAMA RENGAT	Rp416.666,00	Sewa kantin a.n. Hanafiah	1 Juli 2022 s.d 30 Juni 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.000.000
	1200	402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	Rp97.167,00	Sewa kantin a.n. Ani Yunalian	8 Februari 2022 s.d 8 Februari 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.166.000
	0200	402587	PENGADILAN AGAMA SUBANG	Rp11.270.000,00	Sewa Kantin a.n. Indri Betrik	12 Juli 2022 s.d 12 Juli 2025	Sewa kantin 3 tahun sebesar 13.524.000
	2300	402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	Rp2.004.833,00	Sewa Kantin a.n. Koperasi Nurul Hijriah	20 November 2022 s.d 20 November 2024	Sewa kantin 2 tahun sebesar 2.092.000
	0500	403030	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN	Rp502.917,00	Sewa Lahan Parkir a.n. Lasidi	12 Juni 2019 s.d. 12 Juni 2024	Sewa lahan parkir 5 tahun sebesar 1.775.0000
				Rp139.417,00	Sewa Kantin a.n. Supriyati	10 Agustus 2018 s.d. 10 Agustus 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.195.000
	3500	417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	Rp1.006.667,00	Sewa Kantin a.n. Sulistyo	20 Oktober 2022 s.d 20 Oktober 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.208.000
	2900	417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	Rp2.454.667,00	Sewa Kantin a.n. Undayah	19 April 2022 s.d 19 April 2025	Sewa kantin 3 tahun sebesar 3.156.000
	2400	477230	PENGADILAN NEGERI LEMBATA	Rp352.500,00	Sewa Kantin	1 Maret 2022 s.d. 28 Februari 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.410.000
	1200	477306	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	Rp684.833,00	Sewa Kantin a.n. Ridwan	3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.174.000
				Rp587.417,00	Sewa Kantin a.n. Beny Winarto	3 Agustus 2022 s.d 2 Agustus 2023	Sewa kantin 1 tahun sebesar 1.007.000
	1000	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	Rp2.099.167,00	BRI Cabang PS Rimbo Bujang	21 Oktober 2021 s.d 21 Oktober 2023	sewa ATM BRI 5.038.000 untuk 2 tahun
	1600	477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	Rp4.518.667,00	Sewa Kantin a.n. Ananiati	27 April 2022 s.d 28 April 2024	Sewa kantin 2 tahun sebesar 6.778.000

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
	0100	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Rp7.101.000,00	Sewa Kantin a.n. KOPPEG PTUN Jakarta	30 Desember 2022 s.d. 30 Desember 2023	Sewa Kantin
	0700	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	Rp5.880.667,00	PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau	15 Mei 2021 s.d. 15 Mei 2023	sewa ATM BRI sebesar 35.284.000 untuk 2 tahun
	1100	526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	Rp990.500,00	Sewa Kantin a.n. Deli Afrialdi Marissa	13 Juli 2022 s.d. 12 Juli 2023	sewa kantin sebesar 1.981.000 untuk 1 tahun
				Rp7.688.916,00	Sewa ATM Bank BRI	3 Juni 2022 s.d. 2 Juni 2023	sewa ATM BRI sebesar 13.181.000 untuk 1 tahun
	0200	531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	Rp56.115.000,00	Sewa ATM Bank BRI	1 Juni 2022 s.d. 31 Mei 2025	sewa ATM BRI sebesar 69.660.000 untuk 3 tahun
	0800	531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	Rp3.551.167,00	Sewa Kantin a.n. Syuryati	1 Desember 2022 s.d. 30 November 2023	sewa kantin sebesar 3.874.000 untuk 1 tahun
				Rp2.193.583,00	Sewa Kantin a.n. Ade Febrianto	1 Desember 2022 s.d. 30 November 2023	sewa kantin sebesar 2.393.000 untuk 1 tahun
				Rp3.646.271,00	Sewa Kantin a.n. Jasrizal	1 Desember 2022 s.d. 30 November 2023	sewa kantin sebesar 3.977.750 untuk 1 tahun
				Rp4.159.604,00	Sewa Kantin a.n. Sadino	1 Desember 2022 s.d. 30 November 2023	sewa kantin sebesar 4.537.750 untuk 1 tahun
	2100	539117	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	Rp11.856.000,00	PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) diwakili oleh DIONNE E. LIMMON	15 Februari 2019 s.d. 14 Januari 2024	sewa lahan atm
	1000	547661	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	Rp11.645.625,00	PT BRI Cabang Jambi	18 Maret 2022 s.d 18 Maret 2024	sewa sebesar 18.633.000 untuk 2 tahun
	0200	604719	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	Rp14.213.222,00	Loket Pembayaran Bank BSI	28 Oktober 2021 s.d 28 Oktober 2024	sewa payment point bsi sebesar 23.258.000 3 tahun
	0900	631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	Rp4.133.333,00	Sewa Kantin a.n. Rosidi	25 Juli 2022 s.d 24 Juli 2025	sewa kantin 3 tahun sebesar Rp4.800.000
				Rp19.881.333,00	BRI Cabang Pangkalan Kerinci	09 Maret 2022 s.d 08 Maret 2025	sewa lahan atm bri sebesar 27.528.000 3 tahun
	1200	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	Rp2.116.500,00	Sewa Kantin a.n. Yatini	9 November 2022 s.d 9 November 2025	sewa kantin 3 tahun sebesar Rp2.241.000
	0200	652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	Rp3.148.438,00	Sewa Kantin a.n. Tedi Permana	25 Januari 2021 s.d 24 Januari 2024	Sewa Kantin
				Rp22.465.250,00	Sewa Payment Point Bank BSI	17 November 2022 s.d 17 November 2024	Sewa Kantin
	1600	662972	PENGADILAN NEGERI BONTANG	Rp1.063.667,00	Sewa kantin a.n. Lis Suryani	01 Maret 2018 s.d 28 Februari 2023	sewa kantin 1 tahun sebesar Rp1.800.000
	0100	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Rp75.400.000,00	Sewa atm Mandiri	25 Oktober 2022 s.d. 24 Oktober 2027	sewa atm sebesar 78.000.000 untuk 5 tahun
				Rp117.359.833,00	PT Pos Indonesia	26 Februari 2021 s.d. 25 Februari 2026	Sewa tempat PT Pos Indonesia
				Rp69.575.250,00	PT. dHost Telekomunikasi Nusantara	24 September 2021 s.d. 23 September 2026	Sewa lahan
				Rp123.656.000,00	Kopusma (Medan Merdeka Utara)	08 Januari 2020 s.d. 08 Januari 2025	Sewa Tempat Kopusma
				Rp85.184.917,00	Kopusma (Ahmad Yani)	16 Februari 2021 s.d. 15 Februari 2026	Sewa Tempat Kopusma
				Rp484.123.800,00	BNI Syariah (Medan Merdeka Utara)	13 Januari 2021 s.d. 12 Januari 2026	Sewa tempat BNI Syariah
				Rp304.898.250,00	BSI (A.Yani)	22 September 2021 s.d. 21 September 2026	Sewa tempat BSI

Kode Es. I	Kode Wilayah	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	Penyewa	Jangka Waktu	Keterangan
				Rp47.458.050,00	ATM BRI (Medan Merdeka Utara)	02 Februari 2021 s.d. 1 Februari 2026	Sewa tempat ATM BRI
	0700	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	Rp928.667,00	Sewa kantin a.n. Sri Handayani	1 Agustus 2022 s.d. 1 Agustus 2023	sewa kantin 1 tahun sebesar Rp1.592.000
	2900	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	Rp3.497.375,00	Sewa Kantin a.n. Nurfitri	1 Oktober 2021 s.d. 1 Oktober 2024	sewa kantin 3 tahun sebesar Rp5.995.500
	3100	670184	PENGADILAN NEGERI MARISA	Rp2.394.000,00	Sewa Kantin a.n. Ismail Buloto, S.H.	22 Desember 2022 s.d 22 Desember 2024	sewa kantin 2 tahun sebesar Rp2.394.000
	1500	670206	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	Rp1.562.917,00	Sewa Kantin a.n. Yunita Korompot Wahyu, S.IP.	01 Juni 2022 s.d 31 Mei 2023	Sewa kantin
	1300	670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	Rp1.338.000,00	Sewa Tanah a.n. Wahju Windajati, SP.	1 September 2022 s.d 1 September 2023	Sewa tanah sebesar 2.007.000
				Rp1.265.917,00	Sewa Kantin a.n. Endang Sri Muningsih	30 November 2022 s.d 30 November 2023	Sewa kantin sebesar 1.381.000 setahun
				Rp3.666.667,00	Sewa a.n. Yayasan Geratak Kab. Sambas	7 November 2022 s.d 7 November 2023	Sewa sebesar Rp4.000.000 2 tahun
	2600	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Rp336.500,00	Sewa Kantin a.n. Titin Marlena	30 Maret 2022 s.d 31 Maret 2023	sewa kantin sebesar 1.346.000 setahun
	2400	673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	Rp2.034.806,00	Sewa Tanah	3 Agust 2022 s.d. 2 Agust 2025	Sewa Tanah sebesar Rp2.363.000 slama 3 tahun
	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	Rp85.625,00	Sewa Kantin a.n. Sabirul Huda	11 Februari 2022 s.d 10 Februari 2023	sewa kantin sebesar 1.027.500
	0200	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	Rp183.333,00	Sewa Kantin a.n. H. Ili Sadeli BA	1 Maret 2018 s.d 28 Februari 2023	Sewa kantin sebesar 5.500.000 untuk 5 tahun
	2900	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Rp17.333.333,00	PT Bank BRI	1 Maret 2020 s.d 1 Maret 2025	Sewa lahan untuk ATM sebesar 40.000.000
				Rp978.000,00	Sewa Kantin a.n. Oom Romansyah	10 Januari 2022 s.d. 10 Januari 2024	Sewa kantin sebesar 1.956.000 2 tahun
Jumlah				**Rp2.831.281.278,00**			

PENJELASAN LIST JURNAL MANUAL SAKTI MODUL GLP

PENJELASAN JURNAL MANUAL AKUN KOREKSI NON REVALUASI ASET TETAP (391116)

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Deskripsi Transaksi	Kode Akun	Jumlah Debet	Jumlah Kredit	Selisih
1	'00501	'097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	Jurnal Eliminasi	391116	-	18.703.500	(18.703.500)
2	'00501	'097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	Jurnal Koreksi Nilai aset tetap non revaluasi	391116	18.703.500	-	18.703.500
3	'00501	'097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	Audit BPK atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan atas 8 kontrak Pemeliharaan Gedung dan Kantor Rp592.457.774,00 belum dikapitalisasi ke aset induk gedung dan bangunan	391116	294.460.174	-	294.460.174
4	'00501	'097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	(Audit BPK atas) koreksi lebih catat koreksi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan atas sebanyak 8 kontrak Pemeliharaan Gedung Rp592.457.774,00 belum dikapitalisasi ke aset induk	391116	-	27.605.640	(27.605.640)
5	'00501	'097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	(Audit BPK atas) batal koreksi	391116	27.605.640	-	27.605.640
6	'00501	'097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	Jurnal Penyesuaian Aset Tetap Belum Diregister (Koreksi KDP)	391116	-	150.127.500	(150.127.500)
7	'00501	'097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	Jurnal Koreksi Atas Kesalahan Pengelompokan Barang	391116	-	239.945.198	(239.945.198)
8	'00501	'097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	Jurnal atas pengembalian belanja modal TAYL	391116	-	104.007.770	(104.007.770)
9	'00501	'097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	Jurnal atas pengembalian belanja modal TAYL	391116	-	1.351.000	(1.351.000)

10	'00501	'097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	Jurnal penyesuaian beban kerugian pelepasan aset atas kesalahan pencatatan	391116	500.000	-	500.000
11	'00501	'097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	Jurnal atas pengembalian belanja modal TAYL	391116	-	24.218.819	(24.218.819)
12	'00501	'097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	Reklasifikasi keluar atas Lemari Besi/Metal (3.05.01.04.001) NUP 17 yang dicatat sebagai KDP	391116	680.000	-	680.000
13	'00501	'097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	Jurnal Eliminasi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	101.458.500	(101.458.500)
14	'00501	'097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	jurnal eliminasi pencatatan perolehan lainnya ke saldo awal	391116	-	340.560.000	(340.560.000)
15	'00501	'097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	Jurnal untuk BAST Hibah salah catat senilai 10.000.000.000	391116	-	10.000.000.000	(10.000.000.000)
16	'00501	'097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	Koreksi PNBP LO pengembalian belanja modal atas perolehan aset	391116	-	300.000	(300.000)
17	'00501	'097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	Koreksi pencatatan nilai bertambah bangunan gedung kantor permanen	391116	3.080.000	-	3.080.000
18	'00501	'097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	Jurnal Eliminasi	391116	-	10.000.000	(10.000.000)
19	'00501	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Jurnal Koreksi	391116	21.960.000	-	21.960.000
20	'00501	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Jurnal Koreksi karena kesalahan BAST	391116	96.968.800	-	96.968.800
21	'00501	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Jurnal Balik atas kesalahan pemilihan akun pada jurnal manual	391116	-	21.960.000	(21.960.000)
22	'00501	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Jurnal Manual karena kesalahan Pencatatan BAST AP (dibawah kapitalisasi) pada KDP Renovasi Rumah Dinas Semester I	391116	21.960.000	-	21.960.000

23	'00501	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Jurnal perbaikan atas jurnal 004 (Jurnal Manual atas Perolehan KDP Kapitalisasi-Konsultan Perencana Renov Rumdin pada Transaksi SEmester I TA 2022)	391116	-	44.901.450	(44.901.450)
24	'00501	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Jurnal perbaikan atas jurnal 006 (Jurnal Manual atas Perolehan KDP Kapitalisasi-Uang Muka Pekerjaan Renov Rumdin pada Transaksi Semester I TA 2022)	391116	-	145.453.200	(145.453.200)
25	'00501	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	Jurnal perbaikan atas jurnal 007 (Jurnal Manual atas Perolehan KDP Kapitalisasi -Termin I Pekerjaan Renov Rumdin pada Transaksi Semester I TA 2022)	391116	-	96.968.800	(96.968.800)
26	'00501	'097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	Jurnal Koreksi	391116	-	8.200.000	(8.200.000)
27	'00501	'097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN	391116	-	184.517.708	(184.517.708)
28	'00501	'098001	PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah untuk belanja modal TA 2022 (8 PC Unit dan 2 Printer) dari Honor Pejabat Pengadaan	391116	760.000	-	760.000

29	'00501	'098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	Jurnal Manual untuk menghilangkan beban aset ekstrakompetabel peralatan dan mesin.	391116	700.000	-	700.000
30	'00501	'098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	Koreksi atas temuan BPK	391116	-	56.734.924	(56.734.924)
31	'00501	'098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN	391116	-	540.000	(540.000)
32	'00501	'098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	Jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan KDP	391116	8.112.000	-	8.112.000
33	'00501	'098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	JURNAL ATAS KOREKSI PENCATATAN KDP YANG DIDETAILKAN KE GEDUNG DAN BANGUNAN DENGAN NILAI DI ATAS KAPITALISASI	391116	-	242.277.450	(242.277.450)
34	'00501	'098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	JURNAL KOREKSI AUDITED ATAS BELANJA MENAMBAH NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN MENGGUNAKAN BELANJA PEMELIHARAAN	391116	49.994.400	-	49.994.400
35	'00501	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	Jurnal koreksi kesalahan pengelompokkan barang menjadi persediaan yang seharusnya belanja modal menambah nilai gedung dan bangunan.	391116	29.170.000	-	29.170.000
36	'00501	'098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	Jurnal koreksi hibah yang belum disahkan	391116	-	6.985.000	(6.985.000)
37	'00501	'098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	Jurnal manual atas koreksi kesalahan pencatatan aset pada perolehan lainnya	391116	-	39.838.900	(39.838.900)

38	'00501	'098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	JURNAL MANUAL UNTUK MENGELEMINASI SALDO PENDAPATAN DAN KOREKSI ASET TETAP YANG BERASAL DARI KOREKSI ADMINISTRASI ASET ALAT PEREKAM SUARA	391116	-	551.000	(551.000)
39	'00501	'098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	Membalik Jurnal Manual Tanggal 22 Desember 2022	391116	551.000	-	551.000
40	'00501	'098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	Jurnal Manual Untuk Mengeliminasi Akun koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Akibat Kesalahan Administrasi Pencatatan Aset Tetap Alat Perekam Suara	391116	-	1.102.000	(1.102.000)
41	'00501	'098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	Jurnal eliminasi	391116	-	259.777.200	(259.777.200)
42	'00501	'098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	ganti 391116 ke 491429	391116	-	271.958.400	(271.958.400)
43	'00501	'098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	Audit BPK atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang direalisasikan untuk pembuatan partisi Gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh yang memenuhi batas minimum kapitalisasi	391116	271.958.400	-	271.958.400
44	'00501	'098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	Audit BPK atas Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin yang direalisasikan dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	391116	4.000.000	-	4.000.000
45	'00501	'098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	(Audit BPK atas) kesalahan input kode satker	391116	-	4.000.000	(4.000.000)

46	'00501	'098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	ganti 391116 ke 491429	391116	-	4.000.000	(4.000.000)
47	'00501	'098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	Audit BPK atas Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin yang direalisasikan dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	391116	4.000.000	-	4.000.000
48	'00501	'098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	KOREKSI PNBP LO PENGEMBALIAN BELANJA ATAS PEROLEHAN ASET	391116	-	167.341.384	(167.341.384)
49	'00501	'098497	PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE	jurnal manual atas akun yang tidak seharusnya di neraca percobaan akrual	391116	-	319.858.000	(319.858.000)
50	'00501	'098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	Jurnal koreksi keslahan akun atas mphlbjs nomor 113T berupa peralatan dan mesin berupa ac	391116	-	6.800.000	(6.800.000)
51	'00501	'098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	JURNAL BALIK KESALAHAN JURNAL	391116	6.800.000	-	6.800.000
52	'00501	'098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	Jurnal Penyesuaian karena tidak terbentuknya jurnal BAST No. W2.U5/296.B/PL.01.10/II/2021 sesuai tiket HAIdjpb 20230212-KID6DT	391116	-	6.800.000	(6.800.000)
53	'00501	'098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	Jurnal penyesuaian karena tidak terbentuknya jurnal BAST No. W2.U5/296.B/PL.O1.10/II/2021 Sesuai tiket HAiDJPB no 20230212-KID6DT	391116	6.800.000	-	6.800.000
54	'00501	'098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	Jurnal Koreksi untuk menghapus MPHLBJS No. 113A yang telah dibuatkan MPHLBJS yang baru dengan No 116A	391116	-	6.800.000	(6.800.000)

55	'00501	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	Jurnal kesalahan pencatatan aset tetap (genset)	391116	-	861.693.000	(861.693.000)
56	'00501	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	Jurnal untuk koreksi nilai aset tetap non revaluasi	391116	17.333.958	-	17.333.958
57	'00501	'098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	Koreksi Eliminasi TKTM yang masih muncul pada Monsakti atas perintah DJPB APK	391116	-	386.320.000	(386.320.000)
58	'00501	'098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	KOREKSI ASET EKTRAKOMPATIBEL GEDUNG DAN BANGUNAN ATAS HONORARIUM PENGAWASAN PBJ	391116	10.524.744	-	10.524.744
59	'00501	'099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	Jurnal Koreksi Beban aset ektrakomptabel gedung dan bangunan karena kesalahan pencatatan di aset dan sudah dilakukan koreksi pencatatan	391116	29.975.000	-	29.975.000
60	'00501	'099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan honorarium pada aset ekstrakomtabel	391116	680.000	-	680.000
61	'00501	'099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	Kesalahan pencatatan pembelian barang	391116	-	16.733.000	(16.733.000)
62	'00501	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	Jurnal Koreksi Kesalahan Input KDP	391116	-	14.636.780	(14.636.780)
63	'00501	'099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	Jurnal Manual Perolehan Lainnya terkait Koreksi Jumlah Aset berupa Sofa	391116	-	3.539.375	(3.539.375)
64	'00501	'099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	Jurnal Manual KDP	391116	-	6.707.500	(6.707.500)
65	'00501	'099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	pendapatan perolehan aset lainnya dan koreksi aset tetap non revaluasi	391116	-	85.516.000	(85.516.000)

66	'00501	'099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	Jurnal Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel sebesar Rp 400.000,-	391116	400.000	-	400.000
67	'00501	'099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	Perubahan akun dari 391116 koreksi nilai aset non revaluasi ke akun 596111 beban kerugian pelepasan aset, dikarenakan untuk menghilangkan nilai beban kerugian pelepasan aset	391116	375.000	-	375.000
68	'00501	'099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	Koreksi kesalahan pencatatan aset ektrakomtabel peralatan dan mesin	391116	504.800	-	504.800
69	'00501	'099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	Koreksi atas kesalahan pencatatan beban kerugian pelepasan aset	391116	585.000	-	585.000
70	'00501	'099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	Koreksi atas kesalahan penginputan pendapatan perolehan aset lainnya	391116	-	21.870.000	(21.870.000)
71	'00501	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	Perubahan Akun dari 595112 ke akun 391116 dikarenakan beban honor pokja membentuk NUP baru	391116	660.000	-	660.000
72	'00501	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	perubahan akun dari 595113 ke akun 396116 dikarenakan honor pokja membentuk NUP baru	391116	680.000	-	680.000
73	'00501	'099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	pembelian papan tulis menggunakan akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya, Keperluan sehari-hari perkantoran lainnya).	391116	-	1.350.000	(1.350.000)
74	'00501	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	Jurnal Manual Pendapatan perolehan Aset lainnya	391116	-	1.004.134.469	(1.004.134.469)

75	'00501	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	Jurnal Belanja Aset Ekstrakomptabel (GEDUNG dan BANGUNAN)	391116	81.935.458	-	81.935.458
76	'00501	'099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	Jurnal atas pendapatan perolehan aset lainnya	391116	-	579.700.000	(579.700.000)
77	'00501	'099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	Jurnal Manual Atas Pengembalian Belanja modal TYA Tahun 2021	391116	-	21.993.490	(21.993.490)
78	'00501	'099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	Jurnal penyesuaian atas perolehan lainnya peralatan dan mesin - ektrakomtabel	391116	-	5.000.000	(5.000.000)
79	'00501	'099507	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	Jurnal penyesuaian atas perolehan lainnya peralatan dan mesin - ektrakomtabel	391116	5.000.000	-	5.000.000
80	'00501	'099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	Jurnal untuk menutup akun pendapatan perolehan lainnya atas kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen	391116	-	10.000.000	(10.000.000)
81	'00501	'099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Aset ke KDP	391116	-	781.847.000	(781.847.000)
82	'00501	'099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	Jurnal atas perolehan aset tetap pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi SP W22-U12/2722/UM/XII/2022	391116	-	100.443.400	(100.443.400)
83	'00501	'099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	Jurnal atas perolehan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Nomor SP W22-U12/2746/UM/XII/2022	391116	-	88.300.000	(88.300.000)
84	'00501	'099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	Koreksi atas Pengembalian Belanja Modal	391116	-	3.236.000	(3.236.000)
85	'00501	'099659	PENGADILAN NEGERI KENDARI	Jurnal Koreksi pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	57.120.000	(57.120.000)

86	'00501	'099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	Jurnal Balik Koreksi aset tetap Room Freezer	391116	-	25.000.000	(25.000.000)
87	'00501	'099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	Jurnal balik Koreksi Aset Tetap AC Split	391116	-	9.000.000	(9.000.000)
88	'00501	'099663	PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	Jurnal Balik Koreksi Aset Tetap AC SPlit	391116	-	15.000.000	(15.000.000)
89	'00501	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	Jurnal Eliminasi	391116	-	132.244.160	(132.244.160)
90	'00501	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	Jurnal Eliminasi	391116	15.430.000	-	15.430.000
91	'00501	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	Jurnal Eliminasi	391116	30.000.000	-	30.000.000
92	'00501	'099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	jurnal eliminasi	391116	-	17.645.000	(17.645.000)
93	'00501	'099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Jurnal atas beban aset ekstrakomptabel yang bukan berbentuk aset tetapi honor pengadaan meja kerja kayu	391116	414.000	-	414.000
94	'00501	'099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Jurnal atas beban aset ekstrakomptabel yang bukan berbentuk aset tetapi honor pengadaan printer	391116	600.000	-	600.000
95	'00501	'099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	391116	-	108.000.000	(108.000.000)
96	'00501	'099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	Jurnal atas pengembalian belanja modal TAYL	391116	-	31.573.500	(31.573.500)
97	'00501	'099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	Koreksi atas kesalahan pencatatan honor pejabat pengadaan	391116	680.000	-	680.000
98	'00501	'099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	Jurnal Manual Koreksi Pembelian Aset Ekstrakomptabel	391116	6.800	-	6.800

99	'00501	'099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	Jurnal manual atas penyesuaian saldo tidak normal akibat selisih nilai BAST dengan SP2D.	391116	673.200	-	673.200
100	'00501	'099912	PENGADILAN NEGERI PRAYA	Jurnal Koreksi atas Perolehan Lainnya	391116	-	1.359.640.000	(1.359.640.000)
101	'00501	307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	Jurnal Pencatatan Koreksi nilai Aset Tetap non Revaluasi	391116	680.000	-	680.000
102	'00501	307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	Jurnal Pencatatan Koreksi nilai Aset Tetap non Revaluasi	391116	12.437.500	-	12.437.500
103	'00501	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (Honor Pejabat Pengadaan)	391116	680.000	-	680.000
104	'00501	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	Jurnal Manual untuk mengeliminasi Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (Dikarenakan Honor Pejabat Pengadaan Yang Membuat NUP baru)	391116	680.000	-	680.000
105	'00501	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	Jurnal koreksi pendapatan perolehan aset lainnya atas kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen	391116	-	67.000.000	(67.000.000)
106	'00501	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	Koreksi Penambahan KDP	391116	231.488.237	-	231.488.237
107	'00501	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	Koreksi saldo tidak normal akibat transaksi reklas aset bulan Juni 2022	391116	-	231.488.237	(231.488.237)
108	'00501	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	Jurnal Penyesuaian	391116	-	2.370.000	(2.370.000)
109	'00501	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	Jurnal Manual Koreksi atas kesalahan penginputan kode barang pada modul Komimen	391116	-	40.250.000	(40.250.000)
110	'00501	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	Koreksi atas Pengembangan KDP	391116	-	150.000.000	(150.000.000)

111	'00501	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	Jurnal Balik	391116	150.000.000	-	150.000.000
112	'00501	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	Jurnal terkait koreksi atas kesalahan penginputan kode barang pada mudol komitmen	391116	-	553.030.798	(553.030.798)
113	'00501	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	Jurnal Manual terkait beban ektrakompetabel peralatan dan mesin	391116	680.000	-	680.000
114	'00501	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	Jurnal Manual terkait beban aset ekstrakompetabel gedung dan bangunan	391116	34.285.179	-	34.285.179
115	'00501	307487	PENGADILAN AGAMA BARRU	Jurnal koreksi pendapatan perolehan aset lainnya atas kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen	391116	-	15.600.000	(15.600.000)
116	'00501	307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	Jurnal Koreksi Transaksi Perolehan Lainnya terkait kurang catat jumlah barang	391116	-	174.931.000	(174.931.000)
117	'00501	307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	Jurnal balik hibah langsung yang belum disahkan	391116	-	80.000.000	(80.000.000)
118	'00501	307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	Jurnal balik atas Hibah Langsung berupa sarana dan prasarana PTSP	391116	-	80.000.000	(80.000.000)
119	'00501	307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	Jurnal balik hibah langsung	391116	80.000.000	-	80.000.000
120	'00501	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	Jurnal Manual untuk Koreksi Pencatatan Aset (Printer)	391116	-	93.800.000	(93.800.000)
121	'00501	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	Jurnal Manual untuk Koreksi Pencatatan Aset (Printer)	391116	-	9.900.000	(9.900.000)
122	'00501	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	Jurnal Eliminasi Akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dikarenakan adanya kesalahan input	391116	-	572.020.000	(572.020.000)

123	'00501	308170	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	Jurna Koreksi Pencatatan Aset Ektrakomtabel	391116	14.320.000	-	14.320.000
124	'00501	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	JURNAL KOREKSI ATAS KOREKSI PENCATATAN ATR	391116	-	451.044.000	(451.044.000)
125	'00501	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	JURNAL ELIMINASI ATAS INPUT PENDAPATAN PEROLEHAN LAINNYA ATR	391116	-	143.000.000	(143.000.000)
126	'00501	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	Jurnal Koreksi Pencatatan Hibah	391116	-	12.500.000	(12.500.000)
127	'00501	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	Jurnal Koreksi Pencatatan Hibah	391116	-	7.000.000	(7.000.000)
128	'00501	400126	PENGADILAN NEGERI CURUP	Jurnal Koreksi Pencatatan Hibah	391116	-	7.000.000	(7.000.000)
129	'00501	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	Kesalahan Jurnal Manual	391116	-	476.587.950	(476.587.950)
130	'00501	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	Jurnal Koreksi Pencatatan BMN ke KDP	391116	476.587.950	-	476.587.950
131	'00501	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	jurnal eliminasi pendapatan pereolehanan aset lainnya atas kesalahan Penginputan barang pada modul komitmen berupa rehabilitasi 4 rumah dinas	391116	-	399.000.000	(399.000.000)
132	'00501	400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	Jurnal Koreksi	391116	1.800.000	-	1.800.000
133	'00501	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	Jurnal Balik Pembelian P.C. Unit (Honor)	391116	-	680.000	(680.000)
134	'00501	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	Jurnal Manual Pembelian P.C. Unit (Honor)	391116	680.000	-	680.000
135	'00501	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	Jurnal Manual Pembelian P.C. Unit (Honor)	391116	680.000	-	680.000
136	'00501	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	Koreksi Jurnal Atas Kesalahan Jurnal Koreksi Aset	391116	-	680.000	(680.000)

137	'00501	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	Jurnal Koreksi Atas Belanja Pembayaran Honor Pengadaan Peralatan dan Mesin dibawah Kapitalisasi	391116	680.000	-	680.000
138	'00501	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	jurnal koreksi atas pendapatan perolehan lainnya	391116	-	12.783.000	(12.783.000)
139	'00501	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	Audit BPK atas kesalahan pencatatan kuantitas dan nilai barang	391116	-	4.884.000	(4.884.000)
140	'00501	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	BELANJA MODAL KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN LANJUTAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TA 2022	391116	102.176.250	-	102.176.250
141	'00501	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	BELANJA MODAL KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN LANJUTAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TA 2022	391116	2.639.403.394	-	2.639.403.394
142	'00501	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	Jurnal Balik Koreksi	391116	-	2.639.403.394	(2.639.403.394)
143	'00501	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	Jurnal Balik Koreksi	391116	-	102.176.250	(102.176.250)
144	'00501	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	Jurnal Koreksi Pencatatan Meubelair	391116	-	970.061.000	(970.061.000)
145	'00501	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	Jurnal Eliminasi	391116	-	100.000.000	(100.000.000)
146	'00501	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	Jurnal Beban Ekstrakomptabel yg sudah dikoreksi tambah ke asetnya (peralatan kantor	391116	1.360.000	-	1.360.000
147	'00501	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	Jurnal Eliminasi Koreksi NIlai Aset Tetap Non Revaluasi Ekstrakomtabel gedung dan bangunan	391116	3.680.000	-	3.680.000

148	'00501	400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	Pendapatan Aset Lainnya	391116	-	1.327.295.500	(1.327.295.500)
149	'00501	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	Jurnal Beban Aset Ekstrakomptabel	391116	680.000	-	680.000
150	'00501	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	Jurnal Beban Aset Ekstrakomptabel	391116	680.000	-	680.000
151	'00501	400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	Beban Aset Ekstrakomtabel	391116	7.925.000	-	7.925.000
152	'00501	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	Perpindahan akun dari 595112 ke 391116 dikarenakan honorarium membentuk NUP baru.	391116	325.000	-	325.000
153	'00501	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	Perpindahan akun dari 595112 ke 391116 dikarenakan honorarium membentuk NUP baru.	391116	100.000	-	100.000
154	'00501	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	Honor Renovasi Atap	391116	18.748.460	-	18.748.460
155	'00501	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	Jurnal Balik Honorarium/Biaya AP Proyek Rehap Atap	391116	-	18.748.460	(18.748.460)
156	'00501	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	Jurnal Manual Periode 13 terhadap Pembayaran Honor Pejabat Rehap Atap	391116	18.748.460	-	18.748.460
157	'00501	400534	PENGADILAN TINGGI PALU	Jurnal Balik Atas Beban Kerugian Pelepasan Aset	391116	-	3.549.792.935	(3.549.792.935)
158	'00501	400559	PENGADILAN TINGGI MATARAM	Jurnal Eliminasi atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	6.049.000	(6.049.000)
159	'00501	400565	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	Jurnal koreksi aset atas temuan BPK	391116	-	350.495.200	(350.495.200)
160	'00501	400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	Jurnal atas pengembalian belanja modal TAYL	391116	-	53.849.222	(53.849.222)

161	'00501	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	koreksi jurnal eliminasi atas koreksi tambah aset ke intrakontrabel sehingga akun beban ekstrakontable dieliminasi	391116	340.000	-	340.000
162	'00501	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	koreksi jurnal eliminasi atau koreksi tambah aset ke intrakontrable sehingga akun beban ekstrakontable dieliminasi	391116	340.000	-	340.000
163	'00501	400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	Koreksi adm pengadaan dan Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Tunggu Sidang	391116	750.000	-	750.000
164	'00501	400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	Jurnal Koreksi Aset (Penjurnalan dilakukan untuk menghilangkan saldo tidak normal pada aplikasi MONSAKTI)	391116	-	1.290.000	(1.290.000)
165	'00501	400967	PENGADILAN AGAMA PATI	Jurnal koreksi atas pendapatan perolehan lainnya karena ruislag	391116	-	844.152.000	(844.152.000)
166	'00501	401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	Jurnal Terhadap BAST yang tidak di-SPP-kan, tetapi sudah tercatat dalam modul aset	391116	-	322.000	(322.000)
167	'00501	401381	PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	Jurnal Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Transaksi Penghapusan KDP Gedung dan Bangunan Kantor Permanen NUP 2, 4, dan 5	391116	28.696.680	-	28.696.680

168	'00501	401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	Jurnal Koreksi Audited 2022 atas belanja menambah nilai peralatan mesin menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	391116	10.515.000	-	10.515.000
169	'00501	401494	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	Jurnal atas kesalahan pencatatan transaksi aset yang seharusnya penambahan nilai gedung dan bangunan	391116	14.900.000	-	14.900.000
170	'00501	401520	PENGADILAN AGAMA PACITAN	jurnal manual terkait aset non revaluasi	391116	650.000	-	650.000
171	'00501	401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	Audit BPK atas Koreksi untuk mencatat Pengembangan Nilai Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi batas minimum kapitalisasi	391116	105.063.000	-	105.063.000
172	'00501	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	Audit BPK atas Koreksi untuk mencatat Pengembangan Nilai Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang memenuhi batas minimum kapitalisasi	391116	49.000.000	-	49.000.000

173	'00501	401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	belanja modal Peralatan dan Mesin (532111) dengan nilai dibawah kapitalisasi yaitu berupa Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan BAST Nomor : W2-A1/2211/KU.01.1/V/2022. 2. Sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah	391116	680.000	-	680.000
174	'00501	401879	PENGADILAN AGAMA BELOPA	Koreksi Pencatatan BMN	391116	-	1.449.095.000	(1.449.095.000)
175	'00501	401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	Jurnal Terkait Koreksi Aset	391116	-	14.491.795.788	(14.491.795.788)
176	'00501	401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	Jurnal Manual atas Pengembalian belanja Modal TAYL tahun 2021	391116	-	255.085.824	(255.085.824)
177	'00501	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	Jurnal Manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	2.905.304.431	(2.905.304.431)
178	'00501	401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN	391116	-	89.952.997	(89.952.997)
179	'00501	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	Jurnal Penyesuaian atas Aset Tetap Belum Diregister	391116	-	66.800.000	(66.800.000)
180	'00501	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	Koreksi pendapatan perolehan aset lainnya Rp. 107.916.426	391116	-	107.916.426	(107.916.426)
181	'00501	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	Koreksi akun utang yang belum diterima tagihannya	391116	-	1.700.000	(1.700.000)

182	'00501	401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	Jurnal Koreksi karena kesalahan pencatatan berupa gedung dan bangunan dalam pengerjaan dengan pembelian seharusnya masuk ke pengembangan dengan KDP dan sudah dilakukan koreksi pencatatan diaset	391116	9.865.000	-	9.865.000
183	'00501	401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	Jurnal koreksi karena kesalahan pencatatan berupa perolehan lainnya berupa 2 unit sepeda motor, yang sebelumnya data sudah ada di bmn tetapi tidak bisa cetak KIB, oleh operator aset diinput lagi ke perolehan lainnya, sudah dilakukan koreksi pencatatan	391116	-	32.200.000	(32.200.000)
184	'00501	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	Jurnal Koreksi Beban Kerugian Pelepasan Aset koreksi pencatatan KDP gedung dan bangunan (koreksi nilai aset berkurang) karena kesalahan pencatatan NUP	391116	6.335.737.486	-	6.335.737.486
185	'00501	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	Jurnal koreksi beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin berupa vertikal blind dan pembatas antrian karena koreksi pencatatan	391116	135.112.530	-	135.112.530
186	'00501	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	Jurnal Koreksi beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin berupa honor panitia pengadaan barang dan jasa dibawah kapitalisasi, sudah dilakukan koreksi di aset	391116	680.000	-	680.000

187	'00501	401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	JURNAL ATAS PENGEMBALIAN BELANJA MODAL TAYL	391116	-	218.142.864	(218.142.864)
188	'00501	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	Kesalahan pencatatan pembelian barang	391116	-	162.167.900	(162.167.900)
189	'00501	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	Kesalahan pencatatan pembelian barang	391116	-	26.486.099.655	(26.486.099.655)
190	'00501	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	Jurnal eliminasi beban kerugian pelepasan aset yang dikarenakan kesalahan catat KDP (tidak ada SK Penghapusan)	391116	26.486.099.655	-	26.486.099.655
191	'00501	401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	Jurnal eliminasi kesalahan pencatatan atas KDP	391116	-	8.584.422	(8.584.422)
192	'00501	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	Jurnal Koreksi Aset Non Revaluasi	391116	15.868.304	-	15.868.304
193	'00501	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Perpindahan Akun 595112 ke Akun 391116 dikarenakan honor Pokja yang membentuk NUP baru	391116	680.000	-	680.000
194	'00501	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Koreksi Akun 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dikarenakan Wanprestasi dari Pihak Kontraktor ke Akun 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	391116	-	371.106.261	(371.106.261)
195	'00501	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Jurnal terkait Honorarium yang membentuk NUP baru	391116	680.000	-	680.000
196	'00501	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	KESALAHAN PEMILIHAN AKUN KREDIT	391116	-	680.000	(680.000)
197	'00501	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Jurnal terkait Honorarium yang membentuk NUP baru	391116	680.000	-	680.000
198	'00501	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	Jurnal balik akibat double input dengan periode 12	391116	-	680.000	(680.000)

199	'00501	401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	Jurnal manual atas pengembalian belanja modal tayl tahun 2021	391116	-	302.301.454	(302.301.454)
200	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	20.175.892	(20.175.892)
201	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	20.854.546	(20.854.546)
202	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	7.134.223	(7.134.223)
203	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	15.640.946	(15.640.946)
204	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	35.481.819	(35.481.819)
205	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	122.630.676	(122.630.676)
206	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	111.854.676	(111.854.676)
207	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	115.676.460	(115.676.460)
208	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	8.629.563	(8.629.563)
209	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	327.972.387	(327.972.387)
210	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	77.100.806	(77.100.806)
211	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	8.364.223	(8.364.223)
212	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	4.122.158	(4.122.158)
213	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	166.672.562	(166.672.562)
214	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	80.726.081	(80.726.081)

215	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	39.468.504	(39.468.504)
216	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	9.787.500	(9.787.500)
217	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	58.856.892	(58.856.892)
218	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	117.913.784	(117.913.784)
219	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	21.372.446	(21.372.446)
220	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	166.295.384	(166.295.384)
221	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	114.688.249	(114.688.249)
222	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	71.808.840	(71.808.840)
223	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	24.665.150	(24.665.150)
224	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	30.020.906	(30.020.906)
225	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	73.979.122	(73.979.122)
226	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	51.067.115	(51.067.115)
227	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	26.518.252	(26.518.252)
228	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	101.584.899	(101.584.899)
229	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	27.236.469	(27.236.469)
230	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	73.790.676	(73.790.676)
231	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	24.849.373	(24.849.373)

232	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	32.314.223	(32.314.223)
233	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	39.138.430	(39.138.430)
234	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	57.955.338	(57.955.338)
235	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	54.033.784	(54.033.784)
236	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	47.685.561	(47.685.561)
237	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	33.171.115	(33.171.115)
238	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	54.957.161	(54.957.161)
239	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	38.319.969	(38.319.969)
240	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	PENDAPATAN PEROLEHAN ASET LAINNYA	391116	-	169.123.840	(169.123.840)
241	'00501	401927	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI	Perubahan Status Aset BMN Berupa Gedung dan Bangunan Menjadi Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	391116	-	34.165.712.608	(34.165.712.608)
242	'00501	401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	Koreksi Pendapatan Perolehan Lainnya Berupa Pagar 1 Unit	391116	-	405.128.290	(405.128.290)
243	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran Termin ke-2 atas jasa kontruksi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	1.041.224.000	-	1.041.224.000
244	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran Termin ke-3 atas jasa kontruksi perencanaan pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	183.095.154	-	183.095.154

245	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran Termin ke-1 atas jasa kontruksi pengawasan pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	230.590.000	-	230.590.000
246	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran termin ke-2 atas jasa konstruksi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	-	1.041.224.000	(1.041.224.000)
247	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran termin ke-3 atas jasa kontruksi perencanaan pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	-	183.095.154	(183.095.154)
248	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran termin ke-1 atas jasa konstruksi pengawasan pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	-	230.590.000	(230.590.000)
249	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Kesalahan Jurnal atas kesalahan penginputan kode akun	391116	230.590.000	-	230.590.000
250	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran Termin Ke-1 atas jasa konstruksi pengawasan pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	-	230.590.000	(230.590.000)
251	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Kesalahan Jurnal atas kesalahan penginputan kode akun	391116	1.041.224.000	-	1.041.224.000
252	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran Termin Ke-2 atas jasa konstruksi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	-	1.041.224.000	(1.041.224.000)
253	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Kesalahan Jurnal atas kesalahan penginputan kode akun	391116	183.095.154	-	183.095.154
254	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Pembayaran Termin Ke-3 atas jasa konstruksi perencanaan pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dobo	391116	-	183.095.154	(183.095.154)

255	'00501	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	Jurnal Eliminasi akun 391113 Koreksi Nilai Persediaan karena kesalahan jurnal di bulan september	391116	234.682.846	-	234.682.846
256	'00501	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	Jurnal Beban Kerugian Pelepasan Aset	391116	7.277.196.800	-	7.277.196.800
257	'00501	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	Koreksi Nilai Asset Tetap Non Revaluasi karena kesalahan pencatatan pada user komitmen	391116	-	47.842.538.695	(47.842.538.695)
258	'00501	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	Jurnal Eliminasi atas Pengembalian Belanja Modal TAYL setelah dilakukan pengurangan asetnya	391116	-	31.189.350	(31.189.350)
259	'00501	401933	PENGADILAN NEGERI KAIMANA	Koreksi Aset Belum Diregister KDP	391116	-	910.000	(910.000)
260	'00501	401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	Pendapatan perolehan aset lainnya	391116	-	27.896.177.434	(27.896.177.434)
261	'00501	401940	PENGADILAN AGAMA BINTUHAN	Jurnal manual atas koreksi pencatatan KDP pembangunan gedung kantor PA Bintuhan	391116	279.264.975	-	279.264.975
262	'00501	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	BAST yang tidak digunakan tetapi sudah menjadi transaksi aset sehingga tidak bisa dihapus.	391116	-	26.648.500	(26.648.500)
263	'00501	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	Jurnal Manual Atas Koreksi Pencatatan KDP Pembangunan Gedung Kantor PA Tais	391116	50.790.540	-	50.790.540
264	'00501	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	Perolehan Aset Lainnya karena Koreksi Pencatatan berupa Printer	391116	-	23.460.000	(23.460.000)
265	'00501	401950	PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN	jurnal penyesuaian atas saldo tidak normal aset tetap blm diregister	391116	-	9.982.000	(9.982.000)

266	'00501	401951	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	Jurnal Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	391116	-	6.326.500	(6.326.500)
267	'00501	401951	PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU	Koreksi Atas Penginputan Jumlah Barang pada Modul Komitmen	391116	-	117.717.065	(117.717.065)
268	'00501	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	Koreksi Akun Aset menjadi KDP 1	391116	284.970.900	-	284.970.900
269	'00501	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	Koreksi Kesalahan akun Aset menjadi KDP	391116	2.948.397.800	-	2.948.397.800
270	'00501	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	Koreksi Nilai KDP bertambah	391116	-	900.000	(900.000)
271	'00501	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	Jurnal Balik Koreksi Akun Aset Menajdi KDP	391116	900.000	-	900.000
272	'00501	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	Jurnal Balik Koreksi Akun Aset Menajdi KDP	391116	-	2.948.397.800	(2.948.397.800)
273	'00501	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	Jurnal Balik Koreksi Akun Aset Menajdi KDP	391116	-	284.970.900	(284.970.900)
274	'00501	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	Koreksi Persedian Menjadi KDP	391116	900.000	-	900.000
275	'00501	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	Jurnal untuk mengeliminasi akun null pada akun 533111	391116	-	2.700.000	(2.700.000)
276	'00501	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	Jurnal manual karena kesalahan penginputan kode barang pada modul komitmen	391116	-	897.756.012	(897.756.012)
277	'00501	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	jurnal aset tetap non revaluasi akibat kesalahan pencatatan modul komitmen	391116	3.344.000	-	3.344.000

278	'00501	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	jurnal aset tetap non revaluasi akibat kesalahan pencatatan modul komitmen	391116	1.850.000	-	1.850.000
279	'00501	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	jurnal aset tetap non revaluasi akibat kesalahan pencatatan modul komitmen	391116	1.350.000	-	1.350.000
280	'00501	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	jurnal aset tetap non revaluasi akibat kesalahan pencatatan modul komitmen	391116	18.761.550	-	18.761.550
281	'00501	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	jurnal aset tetap non revaluasi akibat kesalahan pencatatan modul komitmen	391116	3.991.000	-	3.991.000
282	'00501	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	Jurnal Manual Koreksi atas kesalahan penginputan kode barang	391116	-	48.000.000	(48.000.000)
283	'00501	401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	Jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan KDP Tanah	391116	-	35.610.520.000	(35.610.520.000)
284	'00501	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan saldo awal dan penghapusan KDP di modul aset tetap	391116	22.658.798.266	-	22.658.798.266
285	'00501	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Jurnal koreksi atas koreksi nilai berkurang peralatan dan mesin dalam pengerjaan dan pencatatan kembali peralatan dan mesin melalui menu perolehan lainnya (Modul Aset Tetap)	391116	-	1.826.659.690	(1.826.659.690)

286	'00501	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Jurnal koreksi pencatatan peralatan dan mesin yang masuk dalam perolehan gedung dan bangunan, yaitu perolehan lainnya peralatan dan mesin sebesar 3.545.903.743, gedung dan bangunan berupa rumah genset sebesar 368.464.526	391116	-	3.914.368.269	(3.914.368.269)
287	'00501	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	391116	-	680.000	(680.000)
288	'00501	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	jurnal balik utang yang belum ditagihkan	391116	680.000	-	680.000
289	'00501	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	koreksi nilai aset tetap non revaluasi	391116	8.540.000	-	8.540.000
290	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan keslahan pencatatan barang peralatan dan mesin ekstrakomtabel	391116	1.000.000	-	1.000.000
291	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal koreksi pencatatan keslahan barang peralatan dan mesin ektrakomtabel	391116	-	1.000.000	(1.000.000)
292	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan keslahan pencatatan barang peralatan mesin ekstrakomtabel	391116	-	1.000.000	(1.000.000)
293	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan kesalahan pencatatan barang perlatan mesin ekstrakomtabel	391116	1.000.000	-	1.000.000
294	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan kesalahan pencatatan barang peralatan dan mesin ekstrakomtabel	391116	1.000.000	-	1.000.000
295	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan kesahan barang peralatan dan mesin ekstrakomtabel	391116	-	1.000.000	(1.000.000)

296	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan keslahan pencatatan barang peralatan dan mesin ekstrakomtabel	391116	-	1.000.000	(1.000.000)
297	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan kesalahan pencatatan barang peralatan dan mesin ekstrakomtabel	391116	1.000.000	-	1.000.000
298	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan kesalahan pencatatan barang peralatan dan mesin ekstrakomtabel	391116	1.000.000	-	1.000.000
299	'00501	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	Jurnal perbaikan keslahan pencatatan barang peralatan dan mesin ekstrakomtabel	391116	-	1.000.000	(1.000.000)
300	'00501	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	Jurnal koreksi nilaia aset non revaluasi	391116	15.000.000	-	15.000.000
301	'00501	402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	Jurnal koreksi karena double input hibah	391116	-	136.320.000	(136.320.000)
302	'00501	402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	Jurnal koreksi karena double input hibah	391116	136.320.000	-	136.320.000
303	'00501	402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	Jurnal koreksi	391116	-	136.320.000	(136.320.000)
304	'00501	402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	Penghapusan hibah yang belum di sahkan berupa tanah karena salah pengelompokan akun yang seharusnya berupa rumah milik negara	391116	-	150.000.000	(150.000.000)
305	'00501	402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	Jurnal Koreksi nilai aset teatp non revaluasi	391116	-	8.600.000	(8.600.000)
306	'00501	402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	koreksi jurnal antar beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual	391116	1.640.000	-	1.640.000

307	'00501	402324	PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG	Dikarenakan salah Rekam BAST Non Kontraktual, namun sudah di detilkan di Aset (Aset sudah dilakukan penghapusan) tetapi untuk BAST Non Kontraktual tersebut tidak bisa di hapus karena data sudah di detilkan. Sehingga di lakukan koreksi pencatatan.	391116	-	145.000.000	(145.000.000)
308	'00501	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	Jurnal atas SK Perbaikan Reklasifikasi BMN	391116	-	149.580.000	(149.580.000)
309	'00501	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	SK Perbaikan Klasifikasi BMN	391116	600.000	-	600.000
310	'00501	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	Jurnal atas SK Perbaikan Klasifikasi BMN	391116	-	600.000	(600.000)
311	'00501	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	Jurnal atas SK Perbaikan Klasifikasi BMN	391116	600.000	-	600.000
312	'00501	402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	Jurnal Beban Aset Ekstrakomptabel	391116	700.000	-	700.000
313	'00501	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	Salah Pencatatan Jumlah BMN	391116	-	2.000.000	(2.000.000)
314	'00501	402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	Kesalahan pencatatan pembelian barang	391116	-	398.600.000	(398.600.000)
315	'00501	402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	Jurnal Eliminasi	391116	-	8.950.000	(8.950.000)
316	'00501	402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	Jurmal manual atas koreksi kesalahan pencatatan BAST Aset berupa AC	391116	-	15.025.000	(15.025.000)
317	'00501	402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	Jurnal koreksi atas beban aset ekstrakomptabel yang bukan berbentuk aset melainkan berupa honor pengadaan printer	391116	500.000	-	500.000

318	'00501	402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	Jurnal koreksi nilai aset tetap non Revaluasi ke beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	391116	2.280.000	-	2.280.000
319	'00501	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	jurnal eliminasi pendapatan pereolehanan aset lainnya atas kesalahan Penginputan barang pada modul komitmen berupa meubelair dan laptop	391116	-	566.463.500	(566.463.500)
320	'00501	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	Jurnal Eliminasi Beban Ektrakomptabel yang sudah Dilakukan koreksi bertambah pada Aset Meubelair	391116	3.470.000	-	3.470.000
321	'00501	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	jurnal balik eliminasi	391116	70.327.000	-	70.327.000
322	'00501	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	Jurnal eliminasi	391116	-	70.327.000	(70.327.000)
323	'00501	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	Jurnal Eliminasi_1	391116	-	70.327.000	(70.327.000)
324	'00501	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	Jurnal Manual Eliminasi beban extra hasil salah input 2022	391116	70.327.000	-	70.327.000
325	'00501	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	Koreksi beban aset ekstrakomtabel gedung dan bangunan	391116	23.900.000	-	23.900.000
326	'00501	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	Koreksi Aset Bangunan karena salah akun yang seharusnya KDP	391116	4.600.000	-	4.600.000
327	'00501	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	Koreksi Honor Pejabat Pembangunan Pos Satpam	391116	2.040.000	-	2.040.000

328	'00501	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	Jurnal balik atas koreksi pencatatan bangunan gedung tempat kerja lainnya (Ruang Tunggu PTSP Bangunan Gedung Kantor Permanen)	391116	-	198.000.000	(198.000.000)
329	'00501	403046	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	Jurnal Koreksi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya Atas Kesalahan Kode Barang Pagar	391116	-	26.784.500	(26.784.500)
330	'00501	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	Perbaikan/koreksi nilai kesalahan input kuitansi up	391116	-	2.000.000	(2.000.000)
331	'00501	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	Perbaikan/koreksi nilai kesalahan input kuitansi up	391116	-	8.400.000	(8.400.000)
332	'00501	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	Perbaikan/koreksi nilai kesalahan input kuitansi up	391116	-	4.020.000	(4.020.000)
333	'00501	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	Perbaikan/koreksi nilai kesalahan input kuitansi up	391116	-	12.490.000	(12.490.000)
334	'00501	403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	Koreksi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	49.670.000	(49.670.000)
335	'00501	403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	Koreksi Beban Kerugian Pelepasan Aset atas Kesalahan Penginputan KDP nomor 2 seharusnya KDP nomor 1	391116	11.900.000	-	11.900.000
336	'00501	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	Perpindahan akun dari 595112 ke akun 391116 dikarenakan honor pokja yang membentuk NUP baru	391116	650.000	-	650.000
337	'00501	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	Perpindahan akun dari 595112 ke akun 391116 dikarenakan honor pokja yang membentuk NUP baru	391116	760.000	-	760.000
338	'00501	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	Perpindahan akun dari 595112 ke akun 391116 dikarenakan honor pokja yang membentuk NUP baru	391116	760.000	-	760.000

339	'00501	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	Perpindahan akun dari 595112 ke akun 391116 dikarenakan honor pokja yang membentuk NUP baru	391116	760.000	-	760.000
340	'00501	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	Jurnal koreksi kesalahan pencatatan perolehan gedung dan bangunan	391116	24.730.000	-	24.730.000
341	'00501	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	Beban ekstrakomptable gedung dan bangunan	391116	21.800.700	-	21.800.700
342	'00501	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	Jurnal manual penyesuaian reklasifikasi masuk KDP	391116	-	49.395.000	(49.395.000)
343	'00501	477400	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	Koreksi Pendapatan dan Perolehan Lainnya atas kesalahan pemilihan jenis barang pada modul komitmen.	391116	-	88.424.820	(88.424.820)
344	'00501	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	Koreksi pendapatan perolehan aset lainnya atas kesalahan penginputan kode barang pada modul komitmen	391116	-	649.966.900	(649.966.900)
345	'00501	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	Jurnal balik karena kesalahan input nilai jurnal	391116	649.966.900	-	649.966.900
346	'00501	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	koreksi pendapatan perolehan aset lainnya atas kesalahan penginputan kode barang pada modul komitmen	391116	-	94.432.444	(94.432.444)
347	'00501	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	Koreksi pendapatan perolehan aset lainnya atas kesalahan penginputan kode barang pada modul komitmen	391116	-	64.996.900	(64.996.900)

348	'00501	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	Belanja Peralatan dan Mesin (532111) dibawah nilai kapitalisasi, berupa Honor Pejabat Pengadaan dengan BAST Nomor : 00004 dan 00008. 2. Sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah utk menambah nilai barang sesuai kode barang	391116	1.360.000	-	1.360.000
349	'00501	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	Belanja Pengadaan gedung dan bangunan : penambahan nilai gedung dan bangunan (533121) dibawah nilai kapitalisasi, berupa honor pejabat pengadaan dan honor pokja pembangunan gedung/ruang arsip dan renovasi rumah dinas dengan BAST Nonkontraktual nomor : 0	391116	5.950.000	-	5.950.000
350	'00501	526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Jurnal koreksi audited 2022 atas koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	391116	39.655.000	-	39.655.000
351	'00501	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	dilakukan jurnal manual untuk pendapatan perolehan aset lainnya dikarenakan kesalahan penginputan kode barang	391116	-	193.053.000	(193.053.000)
352	'00501	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Jurnal koreksi pendapatan perolehan aset lainnya atas koreksi pencatatan penambahan niai KDP	391116	-	427.102.500	(427.102.500)

353	'00501	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	JURNAL KOREKSI AUDITED ATAS PENAMBAHAN NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN BACKDROP LOBBY MENGGUNAKAN AKUN BELANJA PEMELIHARAAN	391116	37.640.100	-	37.640.100
354	'00501	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	Jurnal atas koreksi aset	391116	-	67.234.400	(67.234.400)
355	'00501	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	jurnal atas koreksi aset	391116	-	60.112.800	(60.112.800)
356	'00501	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	jurnal koreksi	391116	-	67.234.000	(67.234.000)
357	'00501	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	jurnal koreksi	391116	67.234.000	-	67.234.000
358	'00501	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	jurnal koreksi	391116	-	67.234.400	(67.234.400)
359	'00501	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	Jurnal pendapatan perolehan aset tetap lainnya karena koreksi pencatatan nilai aset	391116	-	4.500.000	(4.500.000)
360	'00501	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	Jurnal Eliminasi Beban Ekstrakomptabel yang sudah dilakukan koreksi nilai bertambah pada aset genset dan videotron	391116	2.960.000	-	2.960.000
361	'00501	576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	Jurnal koreksi atas kesalahan penginputan kode barang pada BAST di Modul Komitmen	391116	-	466.286.000	(466.286.000)
362	'00501	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	Kesalahan pencatatan pembelian barang	391116	-	15.096.000	(15.096.000)

363	'00501	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	jurnal koreksi KDP	391116	-	1.857.495.118	(1.857.495.118)
364	'00501	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	Salah Jurnal	391116	11.169.450	-	11.169.450
365	'00501	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	Jurnal Utang yang belum ditagihkan	391116	-	11.169.450	(11.169.450)
366	'00501	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	Jurnal Manual terkait belanja modal yang sudah didetailakan	391116	-	11.169.450	(11.169.450)
367	'00501	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	koreksi belanja Pengembalian belanja honor pejabat pengadaan	391116	-	1.066.000	(1.066.000)
368	'00501	604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	Jurnal Koreksi atas input akun yang tidak tepat dari modul komitmen sehingga dilakukan jurnal eliminasi	391116	-	161.235.300	(161.235.300)
369	'00501	613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	KOREKSI KESALAHAN METODE PENCATATAN ASET	391116	-	371.754.920	(371.754.920)
370	'00501	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	JURNAL KESALAHAN PENGINPUTAN KODE BARANG	391116	-	27.377.123	(27.377.123)
371	'00501	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	Kesalahan Jurnal	391116	27.377.123	-	27.377.123
372	'00501	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	Jurnal Kesalahan Penginputan Akun Beban Belanja Gedung dan Bangunan pada Beban Persediaan bahan baku	391116	27.377.123	-	27.377.123
373	'00501	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	Koreksi kesalahan pencatatan pengadaan Disabilitas	391116	26.127.273	-	26.127.273
374	'00501	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	Koreksi Kesalahan pencatatan pengadaan disabilitas	391116	1.522.727	-	1.522.727
375	'00501	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	-	391116	-	27.377.123	(27.377.123)

376	'00501	614727	PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG	Penyesuaian Perolehan Lainnya akibat kesalahan peginputan aset	391116	-	22.500.000	(22.500.000)
377	'00501	614731	PENGADILAN AGAMA BADUNG	Jurnal koreksi atas beban aset ekstrakomptabel yang bukan berbentuk aset tetapi merupakan honor pejabat pengadaan	391116	600.000	-	600.000
378	'00501	631999	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI	Jurnal Koreksi	391116	-	5.000.000	(5.000.000)
379	'00501	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	Koreksi beban aset Ekstrakombtable Peralatan dan Mesin atas honor Pejabat Pengadaan Genset	391116	720.000	-	720.000
380	'00501	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	Koreksi beban Aset Ekstakombtable Peralatan dan Mesin atas honor pejabat pengadaan Rumah Genset	391116	720.000	-	720.000
381	'00501	632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	KOREKSI ASET EKSTRA GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA HONOR TIM POKJA, BIAYA PERENCANAAN DAN BIAYA PENGAWASAN PENGADAAN POS JAGA	391116	32.640.000	-	32.640.000
382	'00501	652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	Jurnal atas pengembalian belanja modal peralatan dan mesin	391116	-	760.000	(760.000)
383	'00501	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	Koreksi atas kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen	391116	-	295.515.000	(295.515.000)
384	'00501	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	Jurnal Manual Koreksi Pencatatan KDP Gedung dan Bangunan;	391116	12.656.500	-	12.656.500

385	'00501	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	Jurnal Manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya atas Kesalahan Kode Barang pada Modul Komitmen (Stabilisator);	391116	-	63.825.000	(63.825.000)
386	'00501	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	Jurnal Manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya atas Kesalahan Kode Barang pada Modul Komitmen (KDP Gedung dan Bangunan);	391116	-	1.008.327.500	(1.008.327.500)
387	'00501	663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	Jurnal Koreksi Nilai Bertambah atas Renovasi Gedung dan Bangunan (Pembuatan Musholla Pengunjung Sidang)	391116	108.460.000	-	108.460.000
388	'00501	663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	Jurnal Koreksi Nilai Bertambah atas Renovasi Gedung dan Bangunan (Penambahan Atap baja ringan dan Lantai Keramik)	391116	119.290.000	-	119.290.000
389	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Koreksi Kesalahan Pencatatan Aset	391116	-	275.005.302.258	(275.005.302.258)
390	'00501	663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	Jurnal Manual atas belanja modal GENSET	391116	-	789.800.000	(789.800.000)
391	'00501	663225	PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK	Jurnal atas Koreksi kurang karena kesalahan pencatatan aset	391116	-	10.800.000	(10.800.000)
392	'00501	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	Pengembalian Belanja Modlal Gedung dan Bangunan Jasa Konstruksi dari CV Akhtar Karya	391116	-	2.339.900	(2.339.900)
393	'00501	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jasa Perencanaan dari CV Wastu Triade	391116	-	1.800.000	(1.800.000)
394	'00501	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	Koreksi Nilai Aset Gedung Pos Jaga Permanen	391116	-	37.517.000	(37.517.000)

395	'00501	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	koreksi atas beban ekstrakomtabel gedung dan bangunan	391116	5.810.000	-	5.810.000
396	'00501	663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	Jurnal manual untuk mencatat koreksi aset tetap atas pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa berupa Genset.	391116	680.000	-	680.000
397	'00501	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	Jurnal Koreksi Non Revaluasi Beban Aset Ekstrakomtable	391116	800.000	-	800.000
398	'00501	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	Kesalahan pencatatan pembelian barang	391116	-	200.000	(200.000)
399	'00501	673020	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO	Jurnal manual akibat koreksi Ralat SPM dari akun 532111 ke akun 523111 sehingga sesuai petunjuk hai DJPB dilakukan koreksi jurnal eliminasi	391116	-	6.762.000	(6.762.000)
400	'00501	682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	Jurnal Eliminasi Beban Ektrakomptabel yang sudah dilakukan koreksi bertambah pada aset printer	391116	600.000	-	600.000
401	'00501	682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	Perubahan Akun dari 595112 ke Akun 391116 dikarenakan honor Pokja yang membentuk NUP baru	391116	200.000	-	200.000
402	'00501	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Koreksi Beban Aset Ekstrakomtable	391116	1.330.000	-	1.330.000
403	'00501	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Jurnal Koreksi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	19.997.000	(19.997.000)
404	'00503	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	Koreksi atas kesalahan penginputan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	71.626.079	(71.626.079)

405	'00503	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	,m,m	391116	71.626.079	-	71.626.079
406	'00503	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	Kesalahasan double	391116	-	71.626.079	(71.626.079)
407	'00503	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	Koreksi atas kesalahan penginputan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	71.626.079	-	71.626.079
408	'00504	309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	Koreksi Kesalahan Pencatatan Jurnal Manual yang seharusnya tercatata pada Kode Satker 307199 namun tercatat di Kode Satker 309055	391116	-	680.000	(680.000)
409	'00504	309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	Jurnal Manual untuk Mengeliminasi Beban Aset Ekstrakomptabel Peraltan dan Mesin, Dikarenakan Honor Pejabat Pengadaan Yang Membuat NUP baru	391116	680.000	-	680.000
410	'00504	309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	Jurnal Manual untuk Mengeliminasi Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan, Dikarenakan Honor Pejabat Pengadaan Yang Membuat NUP baru	391116	680.000	-	680.000
411	'00504	309055	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	Koreksi Kesalahan Pencatatan Jurnal Manual yang seharusnya tercatat pada Kode Satker 307199 namun tercatat pada Kode Satker 309055	391116	-	680.000	(680.000)
412	'00504	309060	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	Kesalahan Jurnal Manual	391116	67.000.000	-	67.000.000

413	'00504	309060	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	Jurnal koreksi pendapatan perolehan aset lainnya atas kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen	391116	-	67.000.000	(67.000.000)
414	'00504	309097	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	jurnal pendapatan perolehan aset lainnya dan koreksi nilai aset tetap non revaluasi	391116	-	1.530.000	(1.530.000)
415	'00504	309097	PENGADILAN AGAMA BAU-BAU	kesalahan jurnal balik	391116	1.530.000	-	1.530.000
416	'00504	402005	PENGADILAN AGAMA PAINAN	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	391116	-	350.000	(350.000)
417	'00504	402005	PENGADILAN AGAMA PAINAN	Jurnal Koreksi atas kesalahan jurnal	391116	350.000	-	350.000
418	'00504	402067	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	jurnal koreksi aset tetap non revalausi	391116	15.000.000	-	15.000.000
419	'00504	402067	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	jurnal aset non revaluasi	391116	-	15.000.000	(15.000.000)
420	'00504	402691	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	Jurnal atas koreksi pencatatan modul komitmen	391116	-	1.795.000	(1.795.000)
421	'00504	402691	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	Jurnal koreksi atas kesalahan jurnal	391116	1.795.000	-	1.795.000
422	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	Jurnal Balik atas perolehan aset lainnya yang menghasilkan jurnal pendapatan aset lainnya	391116	-	217.090.502	(217.090.502)
423	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	Jurnal eliminasi akun Pengembalian Belanja Modal TAYL atas belanja modal tahun 2021 yg menjadi temuan pemeriksaan	391116	-	9.404.963	(9.404.963)
424	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	Jurnal eliminasi akun Pengembalian Belanja Modal TAYL atas belanja modal tahun 2021 yg menjadi temuan pemeriksaan	391116	-	3.850.000	(3.850.000)

425	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	Jurnal eliminasi akun Pengembalian Belanja Modal TAYL atas belanja modal tahun 2021 yg menjadi temuan pemeriksaan	391116	-	8.345.370	(8.345.370)
426	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	Jurnal eliminasi akun Pengembalian Belanja Modal TAYL atas belanja modal tahun 2021 yg menjadi temuan pemeriksaan	391116	-	6.653.841	(6.653.841)
427	'00506	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	Jurnal eliminasi akun Pengembalian Belanja Modal TAYL atas belanja modal tahun 2021 yg menjadi temuan pemeriksaan	391116	-	6.996.002	(6.996.002)
JUMLAH								**(448.961.048.550)**



MONITORING TRANSFER KELUAR – TRANSFER MASUK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
1	'00501	Sumatera Utara	'098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	117111	Barang Konsumsi	0	'00503	'099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	6.548.162	-6.548.162	terjadi penginputan transfer masuk manual senilai 6.548.162 telah dilakukan koreksi keluar senilai 6.548.162 dan terdapat transfer masuk online 6.548.162. Pada neraca seharusnya untuk akun neraca 313221 (transfer masuk) senilai 6.548.162 tetapi kenyataannya di neraca terbaca ganda (double) 13.096.324. "satuan kerja telah melakukan jurnal manual D : 313221 K : 391113 senilai 6.548.162"
2	'00501	Sumatera Utara	'098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	593311	Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	0	'00503	'099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	-6.548.162	6.548.162	terjadi penginputan transfer masuk manual senilai 6.548.162 telah dilakukan koreksi keluar senilai 6.548.162 dan terdapat transfer masuk online 6.548.162. Pada neraca seharusnya untuk akun neraca 313221 (transfer masuk) senilai 6.548.162 tetapi kenyataannya di neraca terbaca ganda (double) 13.096.324. "satuan kerja telah melakukan jurnal manual D : 313221 K : 391113 senilai 6.548.162"
3	'00501	Riau	'098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	'00501	'098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	-386320000	386.320.000	Satker melakukan penerimaan hibah renovasi melalui menu penerimaan ATR, sehingga membentuk jurnal Transfer masuk gedung, kemudian gedung tersebut dilakukan koreksi pencatatan dan dicatat ulang sebagai hibah masuk. Sehingga status TKTM nya hanya history, tidak terdapat selisih TKTM sebenarnya. Sudah dilakukan jurnal manual transfer masuk pada koreksi aset tetap non revaluasi sebesar 386.260.000
4	'00501	Jambi	'098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	117111	Barang Konsumsi	6.796.000	'00501	'098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	0	6.796.000	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
5	'00501	Jambi	'098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	322.000	'00501	'098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	0	322.000	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
6	'00501	Jambi	'098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-7118000	'00501	'098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	0	-7.118.000	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
7	'00501	Lampung	'099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00501	'099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	-14.299.379	14.299.379	Merupakan koreksi atas kesalahan transfer keluar dr DIPA 03 ke DIPA 01 seharusnya di transfer keluar ke DIPA 03. Sudah dilakukan Transfer Masuk pada DIPA 01 dan koreksi kuantitas untuk mengeluarkan persediaan tersbut dr Persediaan DIPA 01 dan dilakukan pencatatan perolehan lainnya pada DIPA 03. Atas koreksi tersebut menimbulkan akun koreksi nilai persediaan pada DIPA 01 dan Pendapatan perolehan aset lainnya pada DIPA 03. Sehingga dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer masuk pada neraca
8	'00501	Lampung	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00501	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	-6.130.436	6.130.436	Merupakan koreksi atas kesalahan transfer keluar dr DIPA 03 ke DIPA 01 seharusnya di transfer keluar ke DIPA 03. Sudah dilakukan Transfer Masuk pada DIPA 01 dan koreksi kuantitas untuk mengeluarkan persediaan tersbut dr Persediaan DIPA 01 dan dilakukan pencatatan perolehan lainnya pada DIPA 03. Atas koreksi tersebut menimbulkan akun koreksi nilai persediaan pada DIPA 01 dan Pendapatan perolehan aset lainnya pada DIPA 03. Sehingga dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer masuk pada neraca
9	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	133111	Gedung dan Bangunan	0	'00503	'097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	5.396.821.700	-5.396.821.700	aset tetap renovasi rumah dinas,Sudah sesuai transaksi
10	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	135111	Aset Tetap Renovasi	5396821700	'00503	'097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	0	5.396.821.700	aset tetap renovasi rumah dinas
11	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	133111	Gedung dan Bangunan	0	'00701	403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2961033550	-2.961.033.550	aset tetap renovasi berupa rumah dinas pimpinan
12	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	135111	Aset Tetap Renovasi	2961033550	'00701	403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	0	2.961.033.550	aset tetap renovasi berupa rumah dinas pimpinan
13	'00503	Jawa Barat	'099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	117111	Barang Konsumsi	5.733.191	'00503	'099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	7028595	-1.295.404	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti, satker penerima mencatat jumlah barang lebih banyak dari nilai transfer keluar manual, telah dilakukan perbaikan penginputan pada modul persediaan dan dilakukan jurnal pada modul GLP untuk menghilangkan selisih TKTM yang sudah habis pakai pada laporan persediaan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
14	'00503	Jawa Barat	'099067	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	-1.295.404	1.295.404	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti, satker penerima mencatat jumlah barang lebih banyak dari nilai transfer keluar manual, telah dilakukan perbaikan penginputan pada modul persediaan dan dilakukan jurnal pada modul GLP untuk menghilangkan selisih TKTM yang sudah habis pakai pada laporan persediaan.
15	'00503	Sumatera Barat	'099204	PENGADILAN TINGGI PADANG	117111	Barang Konsumsi	5010034	'00503	400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	10.020.068	-5.010.034	Terdapat transfer masuk manual pada PN. Lubuk Basung akibat satker terlalu cepat mencatat penerimaan barang dari PT. Padang yang belum melakukan transfer keluar, sehingga pada saat PT. Padang melakukan transfer keluar online, maka PN. Lubuk Basung mencatat kembali barang persediaan dengan menu transfer masuk online sehingga terbaca satker PN. Lubuk Basung mencatat 2x barang persediaan, sedangkan PT. Padang 1x melakukan transfer keluar.
16	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	117111	Barang Konsumsi	30.855.436	'00503	'099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	15.538.158	15.317.278	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
17	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-15.317.278	'00503	'099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	0	-15.317.278	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
18	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	117111	Barang Konsumsi	15.310.792	'00503	'099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	7760116	7.550.676	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
19	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-7.550.676	'00503	'099228	PENGADILAN NEGERI BATURAJA	0	-7.550.676	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
20	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	117111	Barang Konsumsi	19.315.448	'00503	'099229	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	9657724	9.657.724	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
21	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-9.657.724	'00503	'099229	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	0	-9.657.724	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
22	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	117111	Barang Konsumsi	8.602.269	'00503	'099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	8432319	169.950	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
23	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-169.950	'00503	'099232	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	0	-169.950	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
24	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	117111	Barang Konsumsi	17.618.888	'00503	'099233	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	8783594	8.835.294	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
25	'00503	Sumatera Selatan	'099225	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-8.835.294	'00503	'099233	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	0	-8.835.294	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Palembang, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker terhadap hal ini dilakukan jurnal Belanja Persediaan Konsumsi (D) Transfer Keluar (K).
26	'00503	Kalimantan Timur	'099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	-10674840	10.674.840	Terdapat selisih TKTM dikarenakan menu transfer keluar manual pada PT. Samarinda dan transfer masuk pada PN. Samarinda yang berbeda barang pada modul persediaan terhadap hal ini sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP akan tetapi masih menimbulkan selisih nilai persediaan
27	'00503	Kalimantan Timur	'099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	117111	Barang Konsumsi	0	'00503	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	12.735.055	-12.735.055	Terdapat selisih TKTM dikarenakan menu transfer keluar manual pada PT. Samarinda dan transfer masuk pada PN. Samarinda yang berbeda barang pada modul persediaan terhadap hal ini sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP akan tetapi masih menimbulkan selisih nilai persediaan
28	'00503	Kalimantan Timur	'099291	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	117111	Barang Konsumsi	0	'00503	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	6.403.127	-6.403.127	Terdapat selisih TKTM dikarenakan transfer keluar manual yang dilakukan PT. Samarinda pada satker PN. Tenggarong yang tidak di input tranfer masuk manual oleh satker. Terhadap hal tersebut PT. Samarinda sudah mengembalikan jumlah barang dengan menu transfer masuk manual untuk dapat dilakukan transfer keluar online pada satker PN. Tenggarong, sudah dilakukan transfer keluar online pada PT. Samarinda dan penginputan transfer masuk online pada PN. Tenggarong, terhadap perbedaan nilai transfer sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP akan tetapi masih terdapat selisih nilai persediaan.
29	'00503	Kalimantan Timur	'099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	117111	Barang Konsumsi	0	'00503	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	6.938.198	-6.938.198	Terdapat selisih TKTM dikarenakan transfer keluar manual yang dilakukan PT. Samarinda pada satker PN. Balikpapan yang tidak di input tranfer masuk manual oleh satker. Terhadap hal tersebut PT. Samarinda sudah mengembalikan jumlah barang dengan menu transfer masuk manual untuk dapat dilakukan transfer keluar online pada satker PN. Balikpapan, sudah dilakukan transfer keluar online pada PT. Samarinda dan penginputan transfer masuk online pada PN. Balikpapan, terhadap perbedaan nilai transfer sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP akan tetapi masih terdapat selisih nilai persediaan.
30	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	29836687	'00503	'099423	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	0	29.836.687	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
31	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099423	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	29.836.687	-29.836.687	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
32	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4658352	'00503	'099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	0	4.658.352	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
33	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	4658352	-4.658.352	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
34	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4595740	'00503	'099465	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	0	4.595.740	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
35	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099465	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	4595740	-4.595.740	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
36	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	5557800	'00503	'099472	PENGADILAN NEGERI MAROS	0	5.557.800	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
37	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099472	PENGADILAN NEGERI MAROS	5557800	-5.557.800	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
38	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4432786	'00503	'099486	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	0	4.432.786	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
39	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099486	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	4432786	-4.432.786	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
40	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4968888	'00503	'099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	0	4.968.888	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
41	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099493	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	4968888	-4.968.888	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
42	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4279858	'00503	'099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	0	4.279.858	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
43	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	4279858	-4.279.858	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
44	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4640032	'00503	'099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	0	4.640.032	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
45	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099512	PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	4640032	-4.640.032	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
46	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4324150	'00503	'099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	0	4.324.150	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
47	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099550	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	4324150	-4.324.150	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
48	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	5340528	'00503	'099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	0	5.340.528	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
49	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099554	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	5340528	-5.340.528	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
50	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4441987	'00503	'099561	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	0	4.441.987	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
51	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099561	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	4441987	-4.441.987	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
52	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4055662	'00503	'099596	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	0	4.055.662	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
53	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099596	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	4055662	-4.055.662	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
54	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	5340528	'00503	'099601	PENGADILAN NEGERI PALOPO	0	5.340.528	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
55	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099601	PENGADILAN NEGERI PALOPO	5340528	-5.340.528	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
56	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	4275230	'00503	'099622	PENGADILAN NEGERI MAJENE	0	4.275.230	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
57	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099622	PENGADILAN NEGERI MAJENE	4275230	-4.275.230	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
58	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	11550689	'00503	'099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	0	11.550.689	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
59	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	11550689	-11.550.689	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
60	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	5561065	'00503	'099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	0	5.561.065	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
61	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	'099643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	5561065	-5.561.065	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
62	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	3512020	'00503	402034	PENGADILAN NEGERI BELOPA	0	3.512.020	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
63	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	402034	PENGADILAN NEGERI BELOPA	3512020	-3.512.020	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
64	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	5126253	'00503	672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	0	5.126.253	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
65	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	672928	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	5126253	-5.126.253	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
66	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	117111	Barang Konsumsi	3354566	'00503	689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	0	3.354.566	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
67	'00503	Sulawesi Selatan	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	3354566	-3.354.566	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
68	'00503	Sulawesi Selatan	'099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	117111	Barang Konsumsi	12133607	'00503	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	0	12.133.607	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
69	'00503	Sulawesi Selatan	'099440	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-12.133.607	'00503	'099419	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	0	-12.133.607	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
70	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	27912696	'00503	'099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	13.956.348	13.956.348	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
71	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-13.956.348	'00503	'099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	0	-13.956.348	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
72	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	11.664.658	'00503	'099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	5832329	5.832.329	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
73	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-5.832.329	'00503	'099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	0	-5.832.329	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
74	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	21.924.680	'00503	'099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	10962340	10.962.340	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
75	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-10.962.340	'00503	'099241	PENGADILAN NEGERI SINTANG	0	-10.962.340	Selisih TKTM dikarenakan Menu transfer masuk manual sudah tidak ada di SAKTI sehingga telah dilakukan koreksi pada modul persediaan dan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer keluar pada neraca.
76	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	14.785.456	'00503	'099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	7392728	7.392.728	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
77	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-7.392.728	'00503	'099242	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	0	-7.392.728	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
78	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	12.530.178	'00503	'099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	6265089	6.265.089	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
79	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-6.265.089	'00503	'099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	0	-6.265.089	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
80	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	11.661.074	'00503	'099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	5830537	5.830.537	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
81	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-5.830.537	'00503	'099245	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	0	-5.830.537	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
82	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	9.539.122	'00503	400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	4769561	4.769.561	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
83	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-4.769.561	'00503	400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	0	-4.769.561	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
84	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	12.270.006	'00503	670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	6135003	6.135.003	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
85	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-6.135.003	'00503	670228	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	0	-6.135.003	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
86	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	10.511.946	'00503	670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	5255973	5.255.973	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
87	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-5.255.973	'00503	670232	PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	0	-5.255.973	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
88	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	117111	Barang Konsumsi	10.452.342	'00503	689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	5226171	5.226.171	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.
89	'00503	Kalimantan Barat	400252	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-5.226.171	'00503	689994	PENGADILAN NEGERI NGABANG	0	-5.226.171	Terdapat selisih transfer masuk dan transfer keluar karena penginputan transfer keluar manual pada Sakti yang dilakukan PT. Pontianak, satker penerima tidak mencatat karena transfer keluar manual tidak ada pada Sakti, dan satker pengirim tidak dapat menghapus karena sudah d Approve, untuk transaksi tersebut telah dikembalikan jumlah barangnya dengan Opname Fisk untuk dilakukan transfer keluar online pada satker, sehingga terbaca transfer keluar 2x dilakukan sedangkan transfer masuk 1x diterima satker, maka muncul Saldo Tidak Normal dan Beban Persediaan Konsumsi di Neraca. Untuk menghilangkan dilakukan pencatatan kembali barang-barang yang telah ditransfer keluar dengan menu perolehan lainnya kemudian melakukan Opname Fisik kembali untuk dkeluarkan barang yang telah terinput, dari transaksi ini, Saldo Tidak Normal di Neraca dapat dihilangkan akan tetapi muncul Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) terhadap hal ini dilakukan jurnal manual Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (D) Beban Persediaan Konsumsi (K), akibat dari jurnal tersebut, Pendapatan perolehan Aset Lainnya jadi hilang, Beban Persediaan Konsumsinya berkurang, selanjutnyua dilakukan jurnal khusus Beban Persediaan Konsumsinya (D) Transfer Keluar (K) ke satuan kerja dibawah.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
90	'00503	Sumatera Barat	400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	593111	Belanja Persediaan konsumsi	0	'00503	400334	PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG	-5010034	5.010.034	Terdapat transfer masuk manual pada PN. Lubuk Basung akibat satker terlalu cepat mencatat penerimaan barang dari PT. Padang yang belum melakukan transfer keluar, sehingga pada saat PT. Padang melakukan transfer keluar online, maka PN. Lubuk Basung mencatat kembali barang persediaan dengan menu transfer masuk online sehingga terbaca satker PN. Lubuk Basung mencatat 2x barang persediaan, sedangkan PT. Padang 1x melakukan transfer keluar.
91	'00503	Yogyakata	400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	117111	Barang Konsumsi	11.483.389	'00503	'099128	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	11.478.801	4.588	Terdapat selisih dengan dilakukan penginputan Transfer Keluar Manual pada Sakti dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, adanya selisih dari jumlah barang transfer keluar manual di PT. Yogyakarta yang lebih banyak 2 barang dari transfer masuk manual di PN. Yogyakarta, sudah dilakukan perbaikan dengan penginputan kembali barang tsb di PT. Yogyakarta dan habis pakai dan jurnal pada GLP
92	'00503	Yogyakata	400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	593111	Belanja Persediaan konsumsi	-4.588	'00503	400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	0	-4.588	Terdapat selisih dengan dilakukan penginputan Transfer Keluar Manual pada Sakti dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, adanya selisih dari jumlah barang transfer keluar manual di PT. Yogyakarta yang lebih banyak 2 barang dari transfer masuk manual di PN. Yogyakarta, sudah dilakukan perbaikan dengan penginputan kembali barang tsb di PT. Yogyakarta dan habis pakai dan jurnal pada GLP
93	'00503	Lampung	400365	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	117111	Barang Konsumsi	0	'00503	'099236	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	14.299.379	-14.299.379	Merupakan koreksi atas kesalahan transfer keluar dr DIPA 03 ke DIPA 01 seharusnya di transfer keluar ke DIPA 03. Sudah dilakukan Transfer Masuk pada DIPA 01 dan koreksi kuantitas untuk mengeluarkan persediaan tersbut dr Persediaan DIPA 01 dan dilakukan pencatatan perolehan lainnya pada DIPA 03. Atas koreksi tersebut menimbulkan akun koreksi nilai persediaan pada DIPA 01 dan Pendapatan perolehan aset lainnya pada DIPA 03. Sehingga dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer masuk pada neraca
94	'00503	Kalimantan Timur	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	117111	Barang Konsumsi	25.249.230	'00503	'099287	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	23189015	2.060.215	Terdapat selisih TKTM dikarenakan transfer keluar manual yang dilakukan PT. Samarinda pada satker PN. Tenggarong yang tidak di input tranfer masuk manual oleh satker. Terhadap hal tersebut PT. Samarinda sudah mengembalikan jumlah barang dengan menu transfer masuk manual untuk dapat dilakukan transfer keluar online pada satker PN. Tenggarong, sudah dilakukan transfer keluar online pada PT. Samarinda dan penginputan transfer masuk online pada PN. Tenggarong, terhadap perbedaan nilai transfer sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP akan tetapi masih terdapat selisih nilai persediaan.
95	'00503	Kalimantan Timur	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	117111	Barang Konsumsi	12.806.254	'00503	'099291	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	6.403.127	6.403.127	Terdapat selisih TKTM dikarenakan transfer keluar manual yang dilakukan PT. Samarinda pada satker PN. Tenggarong yang tidak di input tranfer masuk manual oleh satker. Terhadap hal tersebut PT. Samarinda sudah mengembalikan jumlah barang dengan menu transfer masuk manual untuk dapat dilakukan transfer keluar online pada satker PN. Tenggarong, sudah dilakukan transfer keluar online pada PT. Samarinda dan penginputan transfer masuk online pada PN. Tenggarong, terhadap perbedaan nilai transfer sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP akan tetapi masih terdapat selisih nilai persediaan.
96	'00503	Kalimantan Timur	400529	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	117111	Barang Konsumsi	13.877.801	'00503	'099309	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	6.939.603	6.938.198	Terdapat selisih TKTM dikarenakan transfer keluar manual yang dilakukan PT. Samarinda pada satker PN. Balikpapan yang tidak di input tranfer masuk manual oleh satker. Terhadap hal tersebut PT. Samarinda sudah mengembalikan jumlah barang dengan menu transfer masuk manual untuk dapat dilakukan transfer keluar online pada satker PN. Balikpapan, sudah dilakukan transfer keluar online pada PT. Samarinda dan penginputan transfer masuk online pada PN. Balikpapan, terhadap perbedaan nilai transfer sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP akan tetapi masih terdapat selisih nilai persediaan.
97	'00503	Lampung	402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	'00503	402019	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	6.130.436	-6.130.436	Merupakan koreksi atas kesalahan transfer keluar dr DIPA 03 ke DIPA 01 seharusnya di transfer keluar ke DIPA 03. Sudah dilakukan Transfer Masuk pada DIPA 01 dan koreksi kuantitas untuk mengeluarkan persediaan tersbut dr Persediaan DIPA 01 dan dilakukan pencatatan perolehan lainnya pada DIPA 03. Atas koreksi tersebut menimbulkan akun koreksi nilai persediaan pada DIPA 01 dan Pendapatan perolehan aset lainnya pada DIPA 03. Sehingga dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengeleminasi transfer masuk pada neraca
98	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	133111	Gedung dan Bangunan	0	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	339.076.204	-339.076.204	terdapat transfer keluar aset tetap renovasi ATR dari BALITBANGDIKLATKUMDIL kemudian BADAN URUSAN ADMINISTRASI melakukan transfer masuk berupa gedung dan bangunan
99	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	135111	Aset Tetap Renovasi	339.076.204	'00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	0	339.076.204	terdapat transfer keluar aset tetap renovasi ATR dari BALITBANGDIKLATKUMDIL kemudian BADAN URUSAN ADMINISTRASI melakukan transfer masuk berupa gedung dan bangunan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MONITORING TRANSFER KELUAR/MASUK SAMPAI DENGAN PERIODE BULAN 14
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Kode Akun	Nama Akun	Transfer Keluar	BAES1	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih	Penjelasan
100	'01504	Jawa Tengah	524948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP	133111	Gedung dan Bangunan	0	'00501	'098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	190.584.938	-190.584.938	terdapat transfer keluar aset tetap renovasi ATR dari KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP kemudian pengadilan negeri cilacap melakukan transfer masuk berupa gedung dan bangunan
101	'01504	Jawa Tengah	524948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP	135111	Aset Tetap Renovasi	547.060.185	'00501	'098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	356.475.247	190.584.938	terdapat transfer keluar aset tetap renovasi ATR dari KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP kemudian pengadilan negeri cilacap melakukan transfer masuk berupa gedung dan bangunan
102	'09301	Sumatera Utara	626397	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	133111	Gedung dan Bangunan	0	'00501	'098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	35.480.412	-35.480.412	dikarenakan transaksi atr dari kpk ke pn medan
103	'09301	Sumatera Utara	626397	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	135111	Aset Tetap Renovasi	35.480.412	'00501	'098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	0	35.480.412	dikarenakan transaksi atr dari kpk ke pn medan
104		Riau			133111	Gedung dan Bangunan	0	'00501	'098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	386.320.000	-386.320.000	Satker melakukan penerimaan hibah renovasi melalui menu penerimaan ATR, sehingga membentuk jurnal Transfer masuk gedung, kemudian gedung tersebut dilakukan koreksi pencatatan dan dicatat ulang sebagai hibah masuk. Sehingga status TKTM nya hanya history, tidak terdapat selisih TKTM sebenarnya. Sudah dilakukan jurnal manual transfer masuk pada koreksi aset tetap non revaluasi sebesar 386.260.000



KOREKSI NILAI ASET TETAP/ASET LAINNYA NON REVALUASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
1	Aceh	005.01.401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	(1.200.000,)	Terdapat koreksi aset non revaluasi karena adanya transaksi "Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Kursi Fiber Glas/Plastik"senilai -1.200.000
2	Aceh	005.01.401709	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKAJEREN	40.944.600,	teredapat koreksi aset tetap non revaluasi berupa Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, Koreksi Pencatatan dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai 40.944.600
3	Aceh	005.01.401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	23.142.858,	Terdapat koreksi aset tetap non reval ini terjadi karena terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dan Koreksi Pencatatan senilai 23.142.858
4	Aceh	005.01.401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	908.950,	Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi ini terjadi karena Reklasifikasi Masuk Gedung Pos Jaga Permanen senilai 908.950
5	Aceh	005.01.401689	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	975.111,	Terdapatkoreksi aset tetap non revaluasi berupa Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dan Koreksi Pencatatan KDP senilai 975.111
6	Aceh	005.01.401664	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE	1.365.754.210,	Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi ini terjadi karena "Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen", "Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Station Wagon",
7	Aceh	005.01.401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	(14.376.428,)	Terdapat koreksi aset tetapnon revaluasi terjadi karena koreksi pencatatan, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan, -14376428
8	Aceh	005.01.401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	(6.256.120,)	Terdapat koreksi aset tetap non reval terjadi karena terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen,
9	Aceh	005.01.663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	(25.741.106.576,)	Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi terjadi karena terdapat koreksi pencatatan berupa genset, dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa bangunan gedung kantor permanen
10	Aceh	005.01.098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	(4.616.800,)	terdapat koreksi aset tetap non reval karena terjadi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, Penghentiaan Aset Dari Penggunaan, Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang, Penghentiaan Aset Dari Penggunaan, senilai (4.616.800)
11	Aceh	005.01.098476	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	(30.585.414,)	Terdapat koreksi aset tetap non reval terjadi karena terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, Penghentiaan Aset Dari Penggunaan, Penghentiaan Aset Dari Penggunaan, Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif,
12	Aceh	005.01.401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	4.720.237.414,	Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi terjadi karena Penghentiaan Aset Dari Penggunaan,Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan, Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan,
13	Aceh	005.01.400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	4.500.000,	Terdapat Kesalahan Pencatatan KDP yang mana seharusnya masuk ke KDP 40, karna eror Aplikasi sehingga tidak tercatat kedalam KDP 40 dan dilakukan pencatatan KDP baru, Penjelasan dari KPPN dan Hasil Koordinasi Bersama Korwil akan dicatat sebagai penghapusan KDP dan Penambahan Aset
14	Aceh	005.01.098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	(7.255.399.668,)	Terdapat Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sepeda Motor, Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Sepeda Motor, Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Station Wagon, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Monografi
15	Aceh	005.01.098480	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	(550.404.283,)	Terdapat korekset tetap non reval karena terjadi Penghentiaan Aset Dari Penggunaan, dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai - 528649803
16	Aceh	005.01.098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	3.990.770,	Terdapat koreksi aset tetap non reval karena terjadi Hibah massuk, dan Penghentiaan Aset Dari Penggunaan senilai 3.990.770

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
17	Aceh	005.01.673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	(52.545.300,)	Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi terjadi karena terdapat transaksi koreksi pencatatan berupa pagar permanen Koreksi Nilai KDP Bertambah Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan
18	Aceh	005.01.098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	18.935.690,	Nilai ini merupakan penyusutan dari Hibah Tanah dari Pemko Subuulussalam dengan Tahun perolehan Hibah Tahun 2021, sedangkan pengesahan hibah ditahun 2022
19	Aceh	005.01.098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	(790.000,)	Koreksi pencatatan (koreksi perubahan nilai bertambah) dikarenakan pada saat penginputan transaksi tersebut tidak bisa direkam karena merupakan pembelian konsumsi (80 bh x 10.000 = 800.000) . Pada saat penginputan hanya bisa diinput 1 bh (10.000) krna jumlah kdp hanya ada 1
20	Aceh	005.01.401582	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	11.531.306	Merupakan Akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan
21	Aceh	005.01.401904	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE	-899.530	Merupakan Akumulasi penyusutan atas koreksi nilai berkurang gedung dan bangunan
22	Bali	005.01.307822	PENGADILAN AGAMA DENPASAR	-96.638.761	Akumulasi dari Koreksi Pencatatan Gedung Bangunan, sound system, internet dan video confrence dan koreksi nilai bertambah gedung bangunan
23	Bali	005.01.099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	188.181.000,	Koreksi pencatatan atas aset dengan kode barang 6070301001
24	Bali	005.01.099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	(187.451.142,)	Terdapat Koreksi Manual Bangunan Terbuka Lainnya -187.451.142
25	Bali	005.01.099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	132.428.021,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
26	Bali	005.01.099816	PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	(38.750,)	Merupakan Tindak lanjut Normalisasi dengan penginputan perolehan normalisasi berupa aset lainnya
27	Bangka Belitung	005.01.401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	173.000.000,	Merupakan Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebesar 100.000; dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebesar 172.900.000
28	Bangka Belitung	005.01.099024	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	2.812.500,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
29	Bangka Belitung	005.01.400600	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	64.357.371,	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen sebesar 187.709.000 dan penyusutan transaksional atas transaksi tersebut sebesar -123.351.629
30	Bangka Belitung	005.01.663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	(13.531.764,)	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen atas temuan LKPP 2021 sebesar -20,502,672 dan penyusutan transaksional atas transaksi tersebut sebesar 6,970,908
31	Banten	005.01.417850	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	17.994.000,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (305) Koreksi Pencatatan, dan transaksi (204) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah. Dikarenakan nilai yang seharusnya menambah nilai aset tetapi dicatat sebagai aset dengan nup baru
32	Banten	005.01.400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	18.211.197,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (305) Koreksi Pencatatan, transaksi (204) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah. Transaksi koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah dikarenakan kesalahan modul komitmen yang seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai aset tetapi dicatat menjadi aset dengan nup baru. dan terdapat juga jurnal dari modul GLP dengan deskripsi koreksi jurnal eliminasi atas koreksi tambah aset ke intrakontrabel sehingga akun beban ekstrakontable dieliminasi.
33	Banten	005.01.400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	9.982.007,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (204) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, dan transaksi (305) Koreksi Pencatatan, dan transaksi (401) Penghentian Aset dari Penggunaan
34	Banten	005.01.097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	3.978.394.912,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (264) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang. Koreksi pencatatan nilai berkurang dikarenakan Lebih input nilai tinjut normalisasi, maka lakukan Koreksi Nilai Berkurang sesuai Nilai Normalisasi 209/Nilai Aset Banding untuk menindak lanjuti temuan LHP LKPP BPK tahun 2021

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
35	Banten	005.01.097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	541.208.232,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (204) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, dan transaksi (305) Koreksi Pencatatan. Dikarenakan nilai yang seharusnya menambah nilai aset tetapi dicatat sebagai aset dengan nup baru
36	Banten	005.01.689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	2.872.340,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (204) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, transaski (264) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang, transaksi (305) Koreksi Pencatatan, Jurnal Koreksi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan jurnal GLP atas beban aset ekstrakomptable, . dikarenakan terdapat kesalahan pencatatan aset nilai bertambah dan berkurang, terdapat koreksi pencatatan tanah yang seharusnya masuk kedalam nilai tanah tetapi dicatat sebagai tanah nup baru. untuk jurnal dikarenakan satker ada pencatatan perolehan lainnya dan aset ekstrakomptabel yang sebenarnnya bukan berupa aset tetapi menambah nilai aset
37	Banten	005.01.663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	(122.333.490,)	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (100) saldo awal, transaksi (204) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah, transaksi (305) Koreksi Pencatatan. Saldo awal berupa pencatatan bangunan tempat parkir, untuk koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah dikarenakan kesalahan pencatatan modul komitmen yang seharusnya menambah nilai aset tetapi di catat menjadi aset dengan nup baru
38	Banten	005.01.417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	(15.622.590,)	Merupakan Tindak lanjut Normalisasi dengan penginputan perolehan normalisasi
39	Bengkulu	005.01.308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	10.666.667,	terdapat kesalahan penginputan BAST Hibah masuk yang seharusnya menambah nilai gedung kantor namun tercatat NUP baru, dilakukan koreksi pencatatan terhadap nup baru dan melakukan koreksi susulan atas aset bangunan gedung
40	Bengkulu	005.01.401942	PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG	(14.427.889,)	Telah terjadi kesalahan pencatatan Tindak Lanjut Normalisasi yang menyebabkan Kurang input nilai tinjut normalisasi, lakukan Koreksi Nilai Bertambah sesuai Nilai Normalisasi 209/Nilai Aset Banding
41	Bengkulu	005.01.400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	(405.048.326,)	Kesalahan pencatatan hibah, yang operator catat berbeda dengan jumlah tersebut
42	Bengkulu	005.01.673009	PENGADILAN NEGERI TAIS	19.960.825,	Merupakan nilai buku/selisih nilai perolehan aset dengan akumulasi penyusutan atas transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa PC. Unit dengan nilai perolehan 36,562,200 dan akumulasi penyusutan 22,851,375; serta nilai perolehan PC Unit 12,500,000 dan akumulasi penyusutan 6,250,000
43	Bengkulu	005.01.578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	18.761.624,	berawal dari kesalahan pencatatan karena pada awalnya sudah terlanjur input menjadi aset Jaringan Listrik Lainnya NUP 2 senilai 99.515.350 yang seharusnya untuk Penambahan Masa Manfaat Gedung Kantor Permanen, maka dilakukan Proses Reklas masuk dan Keluar sehingga nilai 99.515.350 akan digabungkan ke yang sebelumnya Jaringan Listrik lainnya NUP 2 di Reklas menjadi Bangunan Gedung kantor NUP 3, setelah itu dilakukan proses koreksi pencatatan nilai bertambah senilai 99.515.350 ke Bangunan Gedung kantor Permanen NUP 1, dan setelah melakukan proses koreksi pencatatan nilai bertambah tersebut maka munculah transaksi senilai 18.761.624
44	Bengkulu	005.01.576274	PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	40.261.054,	Karena telah terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan nup rumah negara golongan 1 type A permanen terhapus, dan telah dilakukan koreksi dan penginputan kembali melalui saldo awal, sehingga memunculkan penyusutan transaksional baru sejumlah Rp104.949.920, dimana saat migrasi penyusutan hanya Rp.64.688.866, sehingga muncul selisih dari penyusutan sebesar Rp.40.261.054
45	Bengkulu	005.01.400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	75.120.895,	Terjadi karena adanya selisih Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang & Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (merubah kode barang dari Personal Computer ke P.C Unit)
46	Denpasar	005.01.402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	(2.217.110.045,)	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi ini merupakan selisih dari jumlah total koreksi nilai bertambah di kurangi jumlah total koreksi nilai berkurang ini terjadi pada saat migrasi data. Dan Koreksi nilai berkurang atas temuan LKPP 2021

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
47	Gorontalo	005.01.682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	(3.883.684,)	Terdapat Koreksi pencatan danpencatatan nilai bertambah, serta Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan. Dikarenakan koreksi pencatatan dan pencatatan nilai bertambah seharusnya menambah nilai bangunan gedung bukan menambah bangunan gedung. Pencatatan Pembatalan Barang yang mau dihapuskan dikarenakan barang tersebut masih digunakan Inputan periode normal -Nilai SK : 133.413.416 -Nilai inputan barang yg mau dihapuskan (trx 911) : 690.205.832 (karena dobel input dan ketambahan aset yg blm masuk sk) -Nilai pembtalan aset yg mau dihapuskan (trx 912) : 412.327.416 Inputan periode 13 Nilai pembatalan aset yg mau dihapuskan (trx 912) atas aset yg tidak masuk SK : 144.465.000
48	Gorontalo	005.01.401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA	(339.600,)	Koreksi Nilai Aset Tetap Non revaluasi dikarenakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah. Dikarenakan terdapat selisih nilai normalisasi K3 pada saat migrasi dari SIMAK BMN ke SAKTI berupa LCD Monitor senilai 1.887.000 dengan koreksi nilai bertambah senilai 1.132.000
49	Jakarta	005.01.400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	2.847.522,	Penyusutan transaksional Bangunan Gedung Kantor Permanen (karena ada transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah)
50	Jakarta	005.01.400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	2.808.500,	Terdapat Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra berupa kursi besi/metal dan input Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra, karena terdapat koreksi pencatatan nilai berkurang sehingga nilai barang yang awalnya 2.808.500 dikurangi 1.872.334 sehingga nilainya menjadi dibawah kapitalisasi.
51	Jakarta	005.01.663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	(1.287.500,)	Terdapat selisih penyusutan antara Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk
52	Jakarta	005.01.097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	30.637.304,	Penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah bangunan gedung kantor permanen sebesar 3.026.966; 19.945.401; 19.366.239; dan koreksi pencatatan bangunan gedung kantor lainnya sebesar 11.701.302
53	Jakarta	005.01.400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	(1.788.405.461,)	input saldo awal perolehan hibah BTN
54	Jakarta	005.01.400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	(29.484.000,)	Terdapat koreksi pencatatan nilai bertambah atas temuan LHP LKPP berupa 4 unit video conference sebesar Rp 42.120.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp -12.636.000
55	Jakarta	005.01.097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	(4.812.500,)	Terdapat Penghapusan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra berupa CCTV dan input Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra
56	Jakarta	005.01.097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	27.605.640,	Merupakan penyusutan transaksional koreksi nilai berkurang gedung dan bangunan
57	Jambi	005.01.403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	2.631.212,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah pada gedung bangunan karena kesalahan input pada modul komitmen yang melakukan input kode barang 4010101001 yang membentuk NUP baru seharusnya menggunakan kode barang 4010101001 menambah nilai gedung bangunan.
58	Jambi	005.01.632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	3.116.883,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah pada Genset karena kesalahan input pada modul komitmen yang melakukan input kode barang 3150405001 genset yang membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai genset. telah dilakukan tindak lanjut berupa jurnal manual

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
59	Jambi	005.01.400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	(6.093.700,)	Merupakan akumulasi penyusutan atas NOrmalisasi dan Perolehan Tinjut Normalisasi BMN berupa 1 unit P.C
60	Jambi	005.01.098900	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	(35.018.470.684,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah dan nilai berkurang atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP).
61	Jambi	005.01.663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	(150.113.401,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP)
62	Jambi	005.01.477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	(9.306.556.473,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP) dab Penghapusan Meubelair
63	Jambi	005.01.578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	2.448.268,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah pada gedung bangunan karena kesalahan input pada modul komitmen yang melakukan input kode barang 4010101001 yang membentuk NUP baru seharusnya 4010101001 menambah nilai gedung bangunan. dan Tindak lanjut normalisasi dengan perolehan normaliasi.
64	Jambi	005.01.400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	33.533.388,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah pada gedung bangunan karena kesalahan input pada modul komitmen yang melakukan input kode barang 4010101001 yang membentuk NUP baru seharusnya 4010101001 menambah nilai gedung bangunan.
65	Jawa Barat	005.01.400662	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	-3.421.179	Terdapat Koreksi Nilai Berkurang atas temuan LHP LKPP berupa Lukisan Cat Minyak sebesar 250.000 dan korek nilai bertambah atas Lukisan Cat Minyak sebesar 600.000
66	Jawa Barat	005.01.400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	(5.490.750,)	Terdapat akumulasi penyusutan atas input saldo awal sebesar 44463000 dan penyusutan transksional atas transaksi koreksi pencatatan komputer unit lainnya sebesar -49953750
67	Jawa Barat	005.01.614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	3.547.500,	Terdapat penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 2.744.096 dan 803.404
68	Jawa Barat	005.01.652062	PENGADILAN AGAMA DEPOK	(221.578.309,)	Terdapat koreksi nilai aset tetap non revaluasi dikarenakan adanya koreksi nilai bertambah atas temuan LHP LKPP berupa bangunan Gedung Kantor sebesar -321127984 dan akumulasi penyusutan transaksional sebesar 99549675
69	Jawa Barat	005.01.682164	PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR	1.195.022,	Terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi karena kesalahan pencatatan kode barang berupa Scanner dan Portal pintu masuk sehingga dilakukan reklas dari kode 308 ke 310 dan 305
70	Jawa Barat	005.01.401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	30.283.400,	Terdapat Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan Software Komputer sebesar 29.700.000; Terdapat Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Monografi sebesar 183.400 serta Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Software Komputer dengan nilai aset sebesar 3200.000 dan akumulasi penyusutan sebesar -2800.000
71	Jawa Barat	005.01.400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	(32.100.000,)	Terdapat kesalahan pencatatan kuantitas gordyn sebanyak 107 buah yang seharusnya 30, sehingga dilakukan koreksi pencatatan sebanyak 77 buah dan dilakukan koreksi nilai bertambah pada 30 gordyn.
72	Jawa Barat	005.01.403009	PENGADILAN AGAMA SUMBER	653.465,	Terdapat kesalahan pencatatan jumlah barang sebagai kursi roda, sudah dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang atas kursi roda dan input prasarana disabilitas lainnya melalui perolehan lainnya (ekstrakomptabel). Dan Tindak Lanjut normalisasi dengan perolehan normalisasi
73	Jawa Barat	005.01.400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	(1.149.938.733,)	Terdapat input Saldo Awal Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -1576528910, atas transaksi tersebut muncul penyusutan transaksional sebesar 426590177
74	Jawa Barat	005.01.400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	20.552.186,	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -106504500, atas transaksi tersebut muncul penyusutan transaksional sebesar 9658956; Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -135.000.000 atas transaksi tersebut muncul penyusutan transaksional sebesar 12.243.230

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
75	Jawa Barat	005.01.097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	11.990.743,	Merupakan akumulasi penyusutan (penyusutan transaksional) atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
76	Jawa Barat	005.01.401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	23.785.713,	Terdapat input hibah masuk berupa peralatan mesin sebesar 23.785.713 dan koreksi atas transaksi pembelian tanah yg seharusnya pengembangan nilai tanah namun terinput pembelian yang mengakibatkan bertambah NUP baru, dilakukan koreksi pencatatan nilai bertambah tanah bangunan kantor sebesar 68.727.400
77	Jawa Barat	005.01.097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	(2.324.344.051,)	adanya penginputan saldo awal barang sebagai pencatatan barang hibah dari BTN temuan dari BPK
78	Jawa Barat	005.01.097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	(299.090.817,)	Terdapat input saldo awal barang hibah dari BTN tahun 2021 atas temuan BPK dan melakukan reklasifikasi masuk atas kesalahan kode barang
79	Jawa Barat	005.01.401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	222.923.456,	Merupakan penyusutan transaksional sebesar 199.950 atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen karena kesalahan pencatatan kode barang pada Peralatan Mesin dalm renovasi; Terdapat penyusutan transaksional sebesar 1.137.993.990 atas hibah keluar gedung dan bangunan dalam renovasi sebesar 1.382.893.925
80	Jawa Barat	005.01.097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	11.593.178,	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang yang membentuk nup baru sehingga dilakukan Koreksi Pencatatan Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya dan input koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor sebesar 55.000.000, atas transaksi ini muncul penyusutan transaksional sebesar 11,593,178
81	Jawa Barat	005.01.477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	(14.583.674.707,)	Terdapat koreksi nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor sebesar 10.550.208.825; terdapat input saldo awal dengan nilai aset sebesar 5.116.571.164 dan akumulasi penyusutan sebesar 1.083.105.282
82	Jawa Barat	005.01.097542	PENGADILAN NEGERI GARUT	(265.942,)	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen
83	Jawa Barat	005.01.097687	PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU	4.739.890,	Merupakan penyyusutan transaksional atas transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 2.692.916; Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 4.223.125; dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -2.175.150
84	Jawa Barat	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	(371.754.920,)	Terdapat jurnal manual KOREKSI KESALAHAN METODE PENCATATAN ASET dengan mendebet Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan kredit Koreksi AT Non Reval sebesar 371.754.920
85	Jawa Barat	005.01.097624	PENGADILAN NEGERI KARAWANG	6.438.806,	Terdapat input Reklasifikasi Masuk Scanner (Peralatan Personal Komputer), atas transaksi ini terbentuk penyusutan transaksional sebesar 6.348.806
86	Jawa Barat	005.01.400483	PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG	(750.000,)	Merupakan tindak lanjut normalisasi 2021 dengan perolehan normalisasi berupa aset lainnya
87	Jawa Barat	005.01.097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	(4.381.460,)	Merupakan penyusutan transaksional atas hibah masuk sebesar 997.060; dan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -5.369.520
88	Jawa Barat	005.01.097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	(12.554.200,)	Merupakan selisih antara nilai barang dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan
89	Jawa Barat	005.01.097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	(22.886.719,)	Terdapat Koreksi Nilai Bertambah atas temuan LHP LKPP berupa Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen sebesar -43942500, atas transaksi ini terbentuk penyusutan transaksional sebesar 21055781
90	Jawa Barat	005.01.400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	496.173.385,	Terdapat Koreksi Nilai Berkurang atas temuan LHP LKPP berupa Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen sebesar 959323830, atas transaksi ini terbentuk penyusutan transaksional sebesar -501.464.731; Terdapat input Hibah Masuk Station Wagon sebesar 38.314.286
91	Jawa Barat	005.01.097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	(1.040.078,)	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -1.040.078
92	Jawa Tengah	005.01.402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	(8.950.000,)	Terdapat Jurnal Eliminasi -8950000

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
93	Jawa Tengah	005.01.401106	PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA	2.816.471,	Transaksi yg terjadi atas koreksi pencatatan belanja modal Prasarana gedung di Semester I dan dilakukan koreksi di Semester II
94	Jawa Tengah	005.01.400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	(61.794.587,)	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan, Koreksi Pencatatan, Hibah Masuk, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah 23594413
95	Jawa Tengah	005.01.400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	48.611.281,	Koreksi pencatatan nilai atas Bangunan gedung Kantor Permanen dalam satu NUP
96	Jawa Tengah	005.01.400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	(8.185.072,)	Koreksi pencatatan atas ketidaksesuaian akun dan kode barang aset tetap
97	Jawa Tengah	005.01.403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	208.079.062,	Merupakan input Saldo Awal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar -36,000,000 dan penyusutan transaksional atas transaksi terseut sebesar 9,627,915; Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 5,270,185; Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar 326,501,000 dan penyusutan transaksional atas transaksi tersebut sebesar 87,320,038; Merupakan Koreksi Nilai KDP Bertambah Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar 10.000.000.
98	Jawa Tengah	005.01.400967	PENGADILAN AGAMA PATI	(844.152.000,)	Pendapatan Aset Non Lancar karena ada transaksi Ruislag dengan PT Dua Kelinci BAST No. W11-A14/5778/PL.01/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dengan Nilai Tanah dan Bangunan masing-masing Rp613.523.000 dan Rp230.629.000
99	Jawa Tengah	005.01.400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	(26.089.822,)	koreksi aset tetap non reval terjadi karena Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen, -29117000 dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen 3027178
100	Jawa Tengah	005.01.400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	648.000,	koreksi aset tetap non reval terjadi karena Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah -282000, dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai 1494000
101	Jawa Tengah	005.01.400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	8.974.488,	Adanya Hibah masuk dari Pemda Kab Rembang peralatan dan mesin
102	Jawa Tengah	005.01.400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	(9.523.394,)	Koreksi pencatatan atas ketidaksesuaian akun dan kode barang aset tetap, pencatatan pengembalian belanja modal
103	Jawa Tengah	005.01.401168	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	106.781.490,	koreksi pencatatan nilai berkurang atas temuan LHP LKPP berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 131.829.000 dan akumulasi penyusutan sebesar (Rp 25.047.510)
104	Jawa Tengah	005.01.401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	(1.420.000,)	Administrasi Pengadaan Belanja Modal
105	Jawa Tengah	005.01.098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	30.000.000,	Jurnal atas kesalahan pencatatan transaksi pencatatan penerimaan barang pada modul komitmen nomor Dokumen 00007 tgl April 2022 yg telah terbit SPM nomor 00030T dan SP2D nomor 221641701000028
106	Jawa Tengah	005.01.098022	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	(5.625.000,)	Nilai buku atas aset berupa Brandkas, sehingga terdapat selisih dikarenakan ada penyusutan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
107	Jawa Tengah	005.01.097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	900.000,	koreksi aset tetap non reval terjadi karena terdapat Hibah Masuk Lemari Display, Hibah Masuk Dispenser, Hibah Masuk Rak Besi senilai 900.000
108	Jawa Tengah	005.01.097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	6.055.484,	adanya koreksi aset pada aset peralatan dan mesin ac 2 unit dan pembayaran honor pbj
109	Jawa Tengah	005.01.097982	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	(1.769.000,)	koreksi pencatatan atas ketidak sesuaian kode akun dengan kode barang aset tetap
110	Jawa Tengah	005.01.097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	2.800.000,	Nilai Buku atas Penyusutan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu
111	Jawa Tengah	005.01.098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	117.125.083,	Koreksi atas akun administrasi pengadaan dan aset tetap renovasi
112	Jawa Tengah	005.01.097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	40.878.079,	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
113	Jawa Tengah	005.01.400565	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	(5.589.475.504,)	Nilai KDP yang telah menjadi aset (Gedung dan Bangunan), namun terdapat temuan BPK sebesar 350.495.200 sehingga mengurangi nilai Gedung dan Bangunan setelah terjadi penyusutan
114	Jawa Tengah	005.01.097908	PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	3.533.241,	Koreksi pencatatan nilai bertambah dan berkurang atas Bangunan gedung Kantor Permanen
115	Jawa Tengah	005.01.097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	(600.000,)	Koreksi pencatatan atas ketidak sesuaian akun dengan kode barang aset tetap
116	Jawa Tengah	005.01.097996	PENGADILAN NEGERI KLATEN	173.228.219,	Jurnal koreksi atas Saldo Awal A.C. Split (Barang Hibah) dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen (Tindak Lanjut LHP LKPP 2021)
117	Jawa Tengah	005.01.097755	PENGADILAN NEGERI KUDUS	19.390.750,	Reklasifikasi Masuk Camera Digital, 5 Unit AC Split dan 2 unit UPS
118	Jawa Tengah	005.01.097762	PENGADILAN NEGERI PATI	14.846.367,	Terdapat Koreksi Pencatatan Tablet PC, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen, Saldo Awal Tablet PC, Koreksi Pencatatan Tablet PC, Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
119	Jawa Tengah	005.01.097741	PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN	8.504.958,	Terdapat Reklasifikasi Masuk Aset tetap sebesar Rp. 8.504.958 berupa UPS sebanyak 14 NUP
120	Jawa Tengah	005.01.097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	(37.500,)	Terdapat koreksi Pencatatan Nilai Berkurang P.C Unit dan Koreksi PNBP LO pengembalian belanja modal atas perolehan aset
121	Jawa Tengah	005.01.098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	1.555.965.898,	Nilai KDP yang telah menjadi aset (Gedung dan Bangunan), namun terdapat temuan BPK sebesar 56.734.924 sehingga mengurangi nilai Gedung dan Bangunan setelah terjadi penyusutan
122	Jawa Tengah	005.01.097720	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	(185.123.500,)	Koreksi aset tetap non reval terjadi karena perolehan lainnya berupa laptop, Printer (peralatan personal komputer), perangkat akses komputer, televisi, camera conference, wireless, mesin penghitung uang, air coditioning, CCTV dan mixer senilai 155436500

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
123	Jawa Tengah	005.01.097940	PENGADILAN NEGERI SRAGEN	13.248.000,	Adanya Koreksi nilai aset peralatan dan mesin printer ac dan cctv
124	Jawa Tengah	005.01.097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	(2.962.500,)	Nilai buku atas PPO BTN (1 unit televisi dan 1 unit scanner) yang diinput di saldo awal 2022 dengan tahun perolehan 2019
125	Jawa Tengah	005.01.097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	34.330.073,	Koreksi pencatatan nilai bertambah dan berkurang karena migrasi 2022
126	Jawa Tengah	005.01.097929	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	(519.066.134,)	Merupakan penyusutan transaksional koreksi nilai berkurang gedung dan bangunan atas temuan LKPP 2021. dan penyusutan transaksional koreksi nilai berkurang gedung dan bangunan atas pengembalian belanja modal TAYL.
127	Jawa Tengah	005.01.097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	(94.415.845,)	Koreksi Pencatatan Lemari Besi/Metal 1140000 Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Lainnya 99178500 Reklasifikasi keluar atas Lemari Besi/Metal (3.05.01.04.001) NUP 17 yang dicatat sebagai KDP 680000 Koreksi Nilai KDP Bertambah Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan -680000 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya 1825 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Mobile File -340000
128	Jawa Timur	005.01.401545	PENGADILAN AGAMA BANGKALAN	(3.317.768.450,)	selisih antara Koreksi pencatatan nilai bertambah bangunan gedung kantor permanen, mess, tempat ibadah, dan UPS dengan akumulasi penyusutannya.
129	Jawa Timur	005.01.401494	PENGADILAN AGAMA MAGETAN	12.313.000,	Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 161.000.000, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Tempat Parkir 175.900.000 dan akumulasi penyusutan 12.313.000, Jurnal atas kesalahan pencatatan transaksi aset yang seharusnya penambahan nilai gedung dan bangunan sebesar 14.900.000
130	Jawa Timur	005.01.401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	9.858.750,	Merupakan koreksi nilai bertambah atas perolehan hardisk menggunakan belanja pemeliharaan
131	Jawa Timur	005.01.401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	5.627.800,	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi – 391116 sebesar Rp5.627.800,00 adalah terdapat koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor permanen.
132	Jawa Timur	005.01.098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	(55.868.735,)	penghentian aset dari penggunaan berupa menara/bak dan koreksi nilai bertamabh atas Rumah negara golongan II tipe C Permanen
133	Jawa Timur	005.01.400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	34.192.196,	Terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi – 391116 posisi di kredit sebesar Rp34.192.196,00 karena melakukan normalisasi K3 terinput menjadi saldo awal.
134	Jawa Timur	005.01.098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	2.225.893,	akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan nilai bertambah bangunana gedung permanen.
135	Jawa Timur	005.01.098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	1.961.150,	Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp11.179.750,00 adalah Koreksi Nilai bertambah gedung bangunan sebesar Rp7.479.750,00 dan koreksi pencatatan printer sebesar Rp3.700.000,00
136	Jawa Timur	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	651.200,	Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp 1.762.200 adalah koreksi pencatatan atas BAST yng sudah terlanjur didetailkan atas hibah TAYL yang di input double pada modul komitmen.
137	Jawa Timur	005.01.098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	29.870.574,	akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan serta koreksi pencatatan KDP Gedung dan Bangunan
138	Jawa Timur	005.01.098366	PENGADILAN NEGERI PACITAN	1.717.500,	Terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi – 391116 sebesar Rp1.717.500,00 karena penyusutan yang berasal dari koreksi atas reklas.
139	Jawa Timur	005.01.098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	(186.050.040,)	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen senilai 136.801.500 + 136.801.500 dan akumulasi penyusutan 43.776.480 + 43.776.480

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
140	Jawa Timur	005.01.098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	54.811.267,	1. akumulasi penyusutan atas hibah masuk lemari kayu dan akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan gedung dan bangunan dalam renovasi. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp998.696.000,00 sudah sesuai dengan kartu KDP dan sudah didefinitifkan dibulan desember. 2. Merupakan penyusutan transaksional koreksi nilai bertambah atas Pengembangan Nilai Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
141	Jawa Timur	005.01.098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	581.623.704,	Terdapat Koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp581.623.704 adalah akumulasi penyusutan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen sebanyak 7 NUP.
142	Jawa Timur	005.01.098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	5.998.678.427,	karena selisih antara input saldo awal generating set, lift/elevator dan koreksi pencatatan nilai berkurang gedung bangunan kantor permanen dan koreksi nilai bertambah sepeda motor dengan akumulasi penyusutan transaksi tersebut.
143	Jawa Timur	005.01.098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	4.732.000,	salah input pada modul komitmen memilih gedung dan kantor permanen seharusnya gedung dan bangunan dalam pengerjaan.
144	Jawa Timur	005.01.526767	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	3.879.293,	Merupakan penyusutan transaksional koreksi nilai bertambah atas Pengembangan Nilai Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
145	Jawa Timur	005.01.548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	23.635.061,	Merupakan koreksi nilai berkurang gedung dan bangunan atas temuan BPK kelebihan pembayaran atas adanya kekurangan volume pekerjaan belanja modal
146	Jawa Timur	005.01.663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	2.535.000,	Merupakan koreksi nilai berkurang atas pengembalian belanja modal penambah nilai peralatan dan mesin
147	Kalimantan Barat	005.01.402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	(4.563.389,)	Terdapat jaringan transmisi di bawah 100 KWH maka koreksi pencatatan, kemudian penambahan daya listrik menambah nilai aset ke gedung dan bangunan kemudian terdapat akumulasi penyusutan gedungan dan bangaunan.
148	Kalimantan Barat	005.01.663225	PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK	7.350.000,	Koreksi terkait kesalahan pencatatan pada modul komitmen, ada beberapa item namun di masukan hanya 1 item, sehingga dilakukan koreksi nilai berkurang pada kursi roda dan menambah nup baru dengan perolehan lainnya.
149	Kalimantan Barat	005.01.670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	76.489.297,	Koreksi Pencatatan terkait akun pemeliharaan yang seharusnya tidak dilakukan memilih aset pada modul komitmen
150	Kalimantan Barat	005.01.099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	(5.620.428.512,)	Terdapat Koreksi Manual, koreksi pencatatan nilai bertambah peralatan dan mesin, koreksi pencatatan nilai bertambah gedung dan bangunan.
151	Kalimantan Selatan	005.01.632043	PENGADILAN AGAMA BANJARBARU	10.462.994,	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen, Koreksi Pencatatan Proyector Spider Bracket, Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen, Penghentiaan Aset Dari Penggunaan berupa Printer (Peralatan Personal Komputer), PC Unit, Kursi Besi/Metal, dan Handy Cam
152	Kalimantan Selatan	005.01.402500	PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN	(6.045.514,)	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Pertemuan Permanen, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Pagar Permanen, dan Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen
153	Kalimantan Selatan	005.01.307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	12.693.933,	Koreksi pencatatan nilai bertambah printer (10.000.000), akumulasi penyusutan akibat transaksional akibat koreksi pencatatan nilai bertambah pada gedung dan bangunan (2.693.933)
154	Kalimantan Selatan	005.01.663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	2.965.055,	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
155	Kalimantan Selatan	005.01.099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	60.583.598,	Akumulasi Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara
156	Kalimantan Selatan	005.01.099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	-41.312.661	Akumulasi Transaksi Koreksi pencatatan rumah negara, penghentian aset dari penggunaan, pencatatan barang yang akan dihapuskan, Koreksi pencatatan nilai bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
157	Kalimantan Selatan	005.01.099219	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	7.215.745,	Akumulasi penyusutan akibat Transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang pada nilai gedung dan bangunan kantor permanent
158	Kalimantan Selatan	005.01.400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	7.632.106,	Transaksi 112 Perolehan lainnya pada peralatan dan mesin
159	Kalimantan Selatan	005.01.531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	(104.828.826,)	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah LCD Projector/Infocus, Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Koreksi Pencatatan KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan, dan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen
160	Kalimantan Selatan	005.01.099180	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	(5.728.628,)	Akumulasi Transaksi Reklasifikasi Masuk Camera Digital, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen, Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lap Top, Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Stationary Generating Set, Koreksi Pencatatan Stationary Generating Set, Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Sepeda Motor, dan Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap P.C Unit
161	Kalimantan Tengah	005.01.401919	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK	20,	Kesalahan pencatatan input Perolehan/Penambahan KDP yang seharusnya sebesar 8,584,422 namun yang diinput sebesar 8,584,442, sehingga selisih 20
162	Kalimantan Tengah	005.01.402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	1.170.000,	Merupakan Hibah Masuk Meja Kerja Kayu
163	Kalimantan Tengah	005.01.402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	(26.538.461,)	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 30,000,000 dan akumulasi penyusutan atas transaksi tersebut sebesar 3,461,539
164	Kalimantan Tengah	005.01.402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	4.212.720.000,	Merupakan Penghapusan/Penghentian KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar 4,213,400,000, dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Genset sebesar -680,000
165	Kalimantan Tengah	005.01.672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	(200.000,)	Merupakan Koreksi Susulan Serial Scanner/Printer sebesar -200,000
166	Kalimantan Tengah	005.01.401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	3.635.004.263,	Merupakan penyusutan trannsaksional atas Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -217.997.837 dan Koreksi Pencatatan KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar 3,870,000,000
167	Kalimantan Tengah	005.01.099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	15.000.000,	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi gedung sebagai NUP baru sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 30.000.000, atas transaksi tersebut terdapat penyusutan transaksional sebesar 15.000.000
168	Kalimantan Tengah	005.01.099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	5.707.488,	Merupakan akumulasi penyusutan atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen atas kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak membentuk nup baru sebesar 2,460,488; Merupakan Koreksi Pencatatan Alat Kesehatan Umum Lainnya karena kesalahan jumlah dan kode barang sebesar 19,980,000; Dan jurnal manual atas Kesalahan pencatatan pembelian barang sebesar -16,733,000
169	Kalimantan Tengah	005.01.401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	10.590.489,	Merupakan penyusutan transaksional koreksi nilai bertambah atas Pengembangan Nilai Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
170	Kalimantan Tengah	005.01.578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	(102.631.669,)	Terdapat kesalahan penginputan pagar permanen melalui saldo awal, sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah. Atas transaksi ini terbentuk jurnal otomatis pada Koreksi Aset Non revaluasi berupa koreksi pencatatan dan akumulasi penyusutannya
171	Kalimantan Timur	005.01.307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	(1.052.640,)	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah beserta akumulasi penyusutan atas Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen Gedung dan Bangunan (Normalisasi)
172	Kalimantan Timur	005.01.307161	PENGADILAN AGAMA TENGGARONG	50.882.260,	Koreksi kesalahan pencatatan dari fasilitas umum lainnya ke gedung dan bangunan permanen

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
173	Kalimantan Timur	005.01.099308	PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN	(1.350.000,)	hasil jurnal manual (D) 491429 dan (K) 391116 dimana sebelumnya dilakukan penginputan perolehan lainnya sebagai tindak lanjut temuan bawas adanya pembelian barang diatas nilai kapitalisasi berupa whiteboard sebesar 1.350.000
174	Kalimantan Timur	005.01.477380	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	1.787.146.700,	Bersumber dari Hibah Masuk (103) Renovasi / Penambahan Bangunan Lantai 2 Sisi Kanan Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat namun tidak bisa diinput menggunakan Menu Pengembangan Langsung pada Modul Aset Aplikasi Sakti sehingga menimbulkan NUP No. 3 (baru) dan dilakukan Penghapusan Terhadap NUP No. 3 tersebut dan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada NUP No. 1 sesuai Surat Keterangan Penghapusan dan Koreksi Pencatatan (Koreksi Perubahan Nilai Bertambah) Nomor W18-U11/1948/PL.01/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Sekretaris Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II selaku Penanggung Jawab UAKPB
175	Kalimantan Timur	005.01.401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	(37.110.626,)	(1)Terdapat Belanja Modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Penajam TA.2021 yang kontraknya berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan diberi perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan Adendum Kontrak II Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Penajam TA.2021 Nomor W18-U13/276/PL.05/01/2022 Tanggal 27 Januari 2022. Namun terjadi Wanprestasi pekerjaan sehingga penyelesaian pekerjaan hanya mencapai 71,17% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor W18-U13/575/PL.05/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022, maka perlu dilakukan koreksi pencatatan (305) senilai Rp 333.995.635,- (2) Perpindahan Akun 595112 ke Akun 391116 dikarenakan honor Pokja yang membentuk NUP baru sebesar Rp 680.000,-
176	Kalimantan Timur	005.01.099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	127.306.840,	I. 375.000, 504.800, 585.000 merupakan honor panitia pengadaan yang nilainya dibawah kapitalisasi sehingga dicatat ke dalam KDP, kemudian dilakukan koreksi pencatatan nilai bertambah dan dimasukkan kedalam harga item barang tersebut (Bangunan Gedung Kantor, Printer, Sofa, PC) II. 1.995.200, 2.500.000, 2.500.000, 20.000.000 merupakan kesalahan pencatatan jenis aset (MIc, Meja, Kursi, Sofa) sehingga dilakukan jurnal koreksi untuk menghapus kesalahan pencatatan tersebut, kemudian setelah dijurnal aset dicatat ulang sesuai arahan KPPN Samarinda yaitu sesuai jenis barang asetnya. III. 21.870.000 angka/akun tersebut muncul dineraca. Sesuai arahan dari MA terkait perlakuan akuntansi dalam penyusunan LKTA 2022 maka dilakukan jurnal manual agar pendapatan aset lainnya tersebut tidak muncul di neraca. IV. 907.442.400 adanya hibah renovasi gedung dan bangunan kantor dari PEMKOT yang mana pencatatannya membentuk NUP baru, sehingga dilakukan koreksi nilai pencatatan nilai bertambah pada Gedung dan bangunan yang lama.
177	Kalimantan Timur	005.01.400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	17.758.078,	Hal tersebut dikarenakan akun 533121 belanja penambahan nilai gedung dan bangunan pada kegiatan Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan dicatat sebagai Bangunan Fasilitas Umum Lainnya membentuk NUP baru. sehingga oleh operator pada modul aset melakukan Koreksi Pencatatan Bangunan Fasilitas Umum Lainnya selanjutnya dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
178	Kalimantan Timur	005.01.099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	3.332.214,	1. 2.934.164 merupakan akumulasi penyusutan dari nilai aset tetap gedung bangunan (guiding block) sebesar 29.320.000. Aset tetap tersebut merupakan kesalahan pencatatannya dan menimbulkan NUP baru. Aset tetap senilai 29.320.000 sudah dilakukan koreksi pencatatan, tapi akumulasi penyusutannya sudah terhitung oleh sistem, 2. 680.000 merupakan akumulasi penyusutan dari nilai aset tetap honor gedung bangunan (guiding block) sebesar 680.000. Aset tetap tersebut merupakan kesalahan pencatatannya dan menimbulkan NUP baru. Aset tetap senilai 680.000 sudah dilakukan koreksi pencatatan, tapi akumulasi penyusutannya sudah terhitung oleh sistem, 3. 66.000 (66.000 sebanyak 5 pencatatan) merupakan koreksi kesalahan pencatatan atas honor pengadaan sarana disabilitas sebanyak 10 buah dengan nilai Rp. 660.000. Lima sarana disabilitas termasuk barang ekstrakomptibel (dibawah kapitalisasi, tapi memiliki kwitansi yang sama dengan barang intrakomptibel) dan lima lainnya tersmasuk intrakomptibel.
179	Kalimantan Utara	005.01.417722	PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR	(4.135.225.820,)	Koreksi pencatatan akibat normalisasi saat migrasi SAKTI, yang mengakibatkan aset bangunan gedung kantor permanen menjadi master aset tidak aktif di SIMAN dan tidak terbaca pada laporan BMN SAKTI
180	Kepulauan Riau	005.01.402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	(909.090,)	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah 2 unit Serial Scanner/Printer @454,545
181	Kepulauan Riau	005.01.402160	PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	12.500.000,	Merupakan selisih dari Koreksi Pencatatan P.C Unit dengan nilai perolehan sebesar 25,000,000 dan akumulasi penyusutan atas transaksi tersebut sebesar -12,500,000
182	Kepulauan Riau	005.01.402148	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PINANG	(400.391.186,)	Merupakan input koreksi pencatatan, koreksi nilai berkurang, dan koreksi nilai bertambah atas tindak lanjut LKPP 2021
183	Kepulauan Riau	005.01.108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	51.064.016,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 33.210.011 dan 17.854.005
184	Kepulauan Riau	005.01.098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	555.375.803,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 13,652,589 karena kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak membentuk nup baru; Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Fasilitas Umum Lainnya sebesar 44,969,371 karena kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak membentuk nup baru; Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen sebesar -41,396,157.
185	Lampung	005.01.652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	(2.750.000,)	Koreksi nilai bertambah atas penghapusan barang ekstrakomtabel
186	Lampung	005.01.402330	PENGADILAN AGAMA KRUI	4,	Selisih pembulatan atas koreksni nilai bertambah pada kursi besi metal.
187	Lampung	005.01.402355	PENGADILAN AGAMA METRO	14.226.660,	Merupakan nilai dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dari transaksi Reklasifikasi Masuk barang Uninterruptible power Supply (UPS) sebanyak 2 unit masing-masing senilai Rp. 7.113.330, sehingga total penyusutan menjadi 14.226.660
188	Lampung	005.01.614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	25.232.771,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi pecatatatan Gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin.
189	Lampung	005.01.614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	39.006.713,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan Gedung dan bangunan senilai Rp19.006.713 dan koreksi pecatatan tanah atas temuan LKPP tahun 2021
190	Lampung	005.01.663051	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	23.654.288,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan Gedung dan bangunan.
191	Lampung	005.01.401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	(1.700.000,)	Merupakan jurnal manual atas BAST aset ekstrakomptabel yang tidak direalisasikan pada tahun 2022. DImana sudah dilakukan koreksi pencatatatn terhadap aset ekstrakomptabel.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
192	Lampung	005.01.663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	151.158.395,	Merupakan akumulasi penyusutan pada peralatan dan mesin yang diperoleh dari Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu.
193	Lampung	005.01.099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	8.091.900,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai berkurang pada gedung bangunan karena kesalahan input pada modul komitmen yang melakukan input kode barang 4010132999 bangunan fasilitas umum kantor permanen yang membentuk NUP baru seharusnya 4010101001 gedung bangunan.
194	Lampung	005.01.559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	6.985.212,	Hasil Akumulasi dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Peralatan dan Mesin Kursi Roda yang dirubah ke Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan NUP I senilai Rp. 2.009.542. dan Rp. 4.244.420. serta Rp. 731.250 (Barang Ekstrakomptabel berupa Tongkat Pedel) yang tidak dapat masuk Jurnal di GLP
195	Maluku	005.01.401970	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU	10.951.875,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (100) Saldo Awal dan (305) koreksi pencatatan. Dikarenakan tertapat aset yang seharusnya dicatat sebagai perolehan tahun yang lalu tetapi dicatat sebagai perolehan tahun berjalan.
196	Maluku	005.01.401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	19.815.257,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan terdapat transaksi (517) Koreksi Pencatatan KDP dan (305) koreksi pencatatan, dikarenakan kesalahan pencatatan yang seharusnya menambah nilai KDP / pengembangan KDP tetapi dicatat sebagai KDP dengan NUP baru
197	Maluku Utara	005.01.307782	PENGADILAN AGAMA TERNATE	3.000.000,	Terdapat Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra dan input Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra berupa printer sebanyak 3 unit @1000.000, atas transaksi koreksi nilai berkurang 3 unit printer sebesar 10.000 pada printer yang nilai awalnya 1.000.000
198	Maluku Utara	005.01.401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	24.266.152,	Merupakan Koreksi Nilai KDP Berkurang Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan karena BAST yang belum direalisasikan tahun 2022
199	Maluku Utara	005.01.099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	86.479.572,	Akumulasi penyusutan atas Input Hibah Masuk Station Wagon
200	Maluku Utara	005.01.099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	(108.547.417,)	1. Akumulasi penyusutan atas input perolehan lainnya aset tetap tahun perolehan 2021 sebesar 12.531.893 2. Selisih koreksi pencatatan pagar permanen (ekstrakomtabel) sebesar -110.666.000 3. Akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah Bangunan Gedung Kantor sebesar 3.600.000 4. Akumulasi penyusutan atas koreksi nilai berkurang P.C Unit sebesar -15.300.110
201	Maluku Utara	005.01.664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	(870.868.002,)	Terdapat koreksi nilai bertambah atas temuan LHP LKPP 2021 berupa Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen sebesar -1.192.969.865, dan penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah sebesar 32.210.1863
202	Nusa Tenggara Barat	005.01.307928	PENGADILAN AGAMA BIMA	24.720.995,	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa akumulasi penyusutan gedung bangunan
203	Nusa Tenggara Barat	005.01.307907	PENGADILAN AGAMA PRAYA	20.321.715,	Merupakan penyusutan transaksional atas koreksi kesalahan pencatatan pengadaan backdrop PTSP dan pemasangan paving halaman kantor yang membentuk NUP baru bangunan gedung kantor, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor utama
204	Nusa Tenggara Barat	005.01.307892	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA	3.084.950,	Terdapat koreksi pencatatan nilai berkurang atas temuan LHP LKPP
205	Nusa Tenggara Barat	005.01.682274	PENGADILAN AGAMA TALIWANG	(750.000.000,)	Input Saldo Awal Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
206	Nusa Tenggara Barat	005.01.099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	16.071.429,	Terdapat honor pengadaan yang tercatat sebagai aset sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada PM sebesar 680.000; Terdapat koreksi pencatatan atas pompa air sebesar 25.000.000 atas temuan LHP LKPP 2021

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
207	Nusa Tenggara Timur	005.01.402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	(175.957.601,)	Merupakan penyusutan transaksional atas input saldo awal sebesar -484,281,485;
208	Nusa Tenggara Timur	005.01.400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	239.068.035,	Terdapat transaksi koreksi pencatatan tanah yang masih tercatat, namun sebenernya sudah diserahkan kepada kemenkumham
209	Nusa Tenggara Timur	005.01.099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	11.428.571,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen karena kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak membentuk nup baru
210	Nusa Tenggara Timur	005.01.681418	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	2.359.157,	Terdapat trasaksi koreksi pencatatan bangunan gedung kantor yang seharusnya merupakan penambahan nilai gedung, sudah dilakukan koreksi nilai bertambah.
211	Nusa Tenggara Timur	005.01.099947	PENGADILAN NEGERI SO'E	331.034,	Merupakan input Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 1,600,000 sebagai tindak lanjut atas temuan LKPP 2021, atas transaksi tersebut terdapat penyusutan transaksional sebesar -1,268,966 sehingga saldo koreksi aset tetap non revaluasi menjadi 331,034 (selisihnya)
212	Nusa Tenggara Timur	005.01.576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	680.000,	Merupakan selisih nilai antara Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Genset sebesar -2,280,000 dengan Jurnal Eliminasi Beban Ekstrakomptabel sebesar 2,960,000
213	Papua	005.01.402876	PENGADILAN AGAMA JAYAPURA	(2.553.874.042,)	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang yang membentuk nup baru sehingga dilakukan koreksi pencatatan sebesar 2439527000 dan muncul penyusutan transaksional sebesar -274446788, kemudian dilakukan koreksi nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor sebesar 2439527000, atas transaksi ini muncul penyusutan transaksional sebesar 140913232; Terdapat koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor sebesar -2568716000, atas transaksi ini ada penyusutan transaksional sebesar 148375514
214	Papua	005.01.402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	34.255.882,	Merupakan penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebesar 7.053.333; 1.721.111;4.775.556; penyusutan transaksional atas Koreksi Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 20.705.882;
215	Papua	005.01.400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	6.619.871,	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang berupa sarana disabilitas yang tercatat sebagai rambu-rambu petunjuk/penuntun, kemudian dilakukan koreksi pencatatan sebesar 29.415.000, dan input perolehan lainnya berupa 4 buah alat kesehatan lainnya senilai 2.650.403 dan aid hearing sebesar 679.597, serta koreksi pencatatan nilai bertambah pada bangunan gedung kantor permanen sebesar 26.085.000 dan muncul penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah sebesar 3,298.871
216	Papua	005.01.402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	21.716.424,	Terdapat kesalahan pencatatan penyelesaian pembangunan langsung yang membentuk NUP baru sebagai jaringan listrik sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi niai bertambah pada bangunan gedung kantor, atas transaksi ini terbentuk penyusutan transaksional sebesar 12409424; Terdapat kesalahan pencatatan yang membentuk nup baru pagar permanen sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi pencatatan nilai bertambah pada pagar permanen, atas transaksi ini muncul penyusutan transaksional sebesar 26,017,000; Terdapat kesalahan pencatatan yang membentuk nup baru Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan dan Pagar permanen sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi pencatatan nilai bertambah pada pagar permanen, atas transaksi ini muncul penyusutan transaksional sebesar
217	Papua	005.01.400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	19.963.566,	Penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen; dilakukan koreksi karena terdapat kesalahan pencatatan kode barang yang membentuk nup baru sehingga dilakukan koreksi pencatatan pada Jaringan Listrik lainnya dan input koreksi pencatatan nilai bertambah pada gedung bangunan kantor permanen
218	Papua Barat	005.01.402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	9.363.468,	Merupakan akumulasi penyusutan atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 2.770.312 dan 6.593.156
219	Riau	005.01.402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	2.779.276,	Koreksi pencatatan atas hibah barang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
220	Riau	005.01.477261	PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR	(42.161,)	Koreksi Pencacatan Nilai Bertambah dan saldo awal
221	Riau	005.01.401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	741.777.780,	Koreksi Pencatatan atas termin I I KDP
222	Riau	005.01.098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	99.916.033,	Merupakan penyusutan transaksional atas hibah masuk dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan
223	Satker Pusat	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	84.427.711	Adanya transaksi berupa Koreksi Pencatatan aset berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi aset-aset BMN Jurnal Balik atas perolehan aset lainnya yang menghasilkan jurnal pendapatan aset lainnya Penghapusan aset 6070301001 (Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi) NUP 3, melalui Koreksi Pencatatan Aset pada aplikasi SAKTI Terjadi Kesalahan Klasifikasi Aset yang seharusnya untuk aset 4010110004 (Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan) NUP 1, tapi menjadi aset 6070301001 (Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi) NUP 3. Sehingga dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah aset 4010110004 (Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan) NUP 1 sebesar Rp.176.671.051 Terjadi Kesalahan Klasifikasi Penambahan Nilai Aset yang seharusnya untuk 4010204001 (Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen) NUP 2, tapi ditambahkan untuk aset 4010101001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen) NUP 2. Sehingga dilakukan hal-hal sebagai berikut: Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang aset 4010101001 (Bangunan Gedung Kantor Permanen) NUP 2 sebesar Rp.1.058.641.988 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah aset 4010204001 (Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen) NUP 2 sebesar Rp.1.058.641.988 Terjadi kesalahan pencatatan operator komitmen dimana 3 renovasi bangunan ini dibuat menjadi satu harga renovasi senilai Rp. 740.724.263 terhadap aset 4010205001 (Asrama Permanen) NUP 13. Sehingga dilakukan hal-hal sebagai berikut: Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang aset 4010205001 (Asrama Permanen) NUP 13 sebesar Rp. 493.816.174 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah aset 4010205001 (Asrama Permanen) NUP 14 sebesar Rp. 246.908.087 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah aset 4010205001 (Asrama Permanen) NUP 15 sebesar Rp. 246.908.087
224	Satker Pusat	005.01.663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	11.422.962.491	Koreksi pencatatan akibat kesalahan pencatatan pada modul komitmen
225	Sulawesi Barat	005.01.307630	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	18.159.967,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah bagunan gedung senilai Rp2.363.092 dan Akumulasi pnyusutan atas reklasfikasi masuk PC unit dan monitor senilai Rp15.796.875
226	Sulawesi Barat	005.01.681422	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	17.727.555,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah bagunan gedung kantor

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
227	Sulawesi Selatan	005.01.307597	PENGADILAN AGAMA ENREKANG	(50,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP).
228	Sulawesi Selatan	005.01.307466	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	2.497.306,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah pada kode barang 4010101001 penambahan daya listrik
229	Sulawesi Selatan	005.01.401883	PENGADILAN AGAMA MALILI	(1.406.500,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP).
230	Sulawesi Selatan	005.01.307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	12.963.600,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah Gedung dan bangunan atas kesalahan pencatatan kode barang 6070301001 pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang 4010101001 menambah nilai gedung dan bangunan.
231	Sulawesi Selatan	005.01.307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	3.107.143,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah Gedung dan bangunan atas kesalahan pencatatan kode barang 6070301001 pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang 4010101001 menambah nilai gedung dan bangunan.
232	Sulawesi Selatan	005.01.307580	PENGADILAN AGAMA PINRANG	21.833.256,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah Gedung dan bangunan atas kesalahan pencatatan akun belanja modal pada modul komitmen sehinggan menimbulkan NUP baru seharusnya menggunakan akun belanja penambahan nilai gedung dan bangunan.
233	Sulawesi Selatan	005.01.307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	1.100.000,	Merupakan akumulasi penyusutan atas Hibah masuk TAYL berupa pintu elektrik 1 unit
234	Sulawesi Selatan	005.01.307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	405.000,	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan atas kesalahan penginputan normalisasi pada tahun 2021
235	Sulawesi Selatan	005.01.099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	43.100.900,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah Gedung dan bangunan atas kesalahan pencatatan kode barang 5040299999 pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang 4010101001 menambah nilai gedung dan bangunan.
236	Sulawesi Selatan	005.01.401928	PENGADILAN NEGERI BELOPA	6.582.442,	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah bangunan gedung kantor permanen atas kesalahan pencatatan kode barang 7010101003 KDP gedung pos jaga yang terdiri dari pembangunan pos jaga, pagar permanen dan renov gedung kantor.
237	Sulawesi Selatan	005.01.099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	15.338.295,	Merupakan akumulasi penyusutan atas Hibah masuk TAYL berupa printer, charger, hardisk dan lain2.
238	Sulawesi Selatan	005.01.099600	PENGADILAN NEGERI PALOPO	234.827.420,	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan pada rumah negara atas temuan LKPP LK tahuan 2021
239	Sulawesi Selatan	005.01.099443	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	11.880.000,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah Gedung dan bangunan atas kesalahan pencatatan kode barang 7010101003 (KDP) pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang 4010101001 menambah nilai gedung dan bangunan.
240	Sulawesi Selatan	005.01.099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	(11.653.615,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP).
241	Sulawesi Selatan	005.01.099439	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	(1.173.000,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai berkurang atas pengembalian belanja modal TYL
242	Sulawesi Selatan	005.01.099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	4.197.382,	Merupakan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bertambah Gedung dan bangunan atas kesalahan pencatatan kode barang 7010101003 (KDP) pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang 4010101001 menambah nilai gedung dan bangunan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
243	Sulawesi Selatan	005.01.526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	1.507.440,	Merupakan Akumulasi penyusutan atas koreksi pencatatan nilai bertambah gedung dan bangunan
244	Sulawesi Selatan	005.01.099418	PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG	(159.144.789,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP).
245	Sulawesi Tengah	005.01.652102	PENGADILAN AGAMA BUOL	(71.402.972,)	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 107 Reklasifikasi Masuk dan 304 reklasifikasi keluar
246	Sulawesi Tengah	005.01.307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	7.388.400,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi, 305 (Koreksi Pencatatan), dan 504 (Koreksi Nilai KDP Bertambah)
247	Sulawesi Tengah	005.01.307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	29.260.882,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi, 305 (Koreksi Pencatatan), 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah), 264 (Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang) dan 504 (Koreksi Nilai KDP Bertambah. terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset.
248	Sulawesi Tengah	005.01.307288	PENGADILAN NEGERI LUWUK	(98.400.000,)	Merupakan tindak lanjut normalisasi dengan perolehan normalisasi gedung dan bangunan
249	Sulawesi Tengah	005.01.099375	PENGADILAN NEGERI PALU	2,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 564 (Koreksi Nilai KDP Berkurang), 305 (Koreksi Pencatatan), 517 (Koreksi Pencatatan KDP), dan 504 (Koreksi Nilai KDP Bertambah. terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
250	Sulawesi Tengah	005.01.672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	13.152.410,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 305 (Koreksi Pencatatan), dan 204 (Koreksi Pencatatan Nilai). Dikarenakan pencatatan dari modul komitmen yang mencatat sebagai aset yang seharusnya mencatat sebagai penambahan nilai
251	Sulawesi Tenggara	005.01.682207	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	(400.000,)	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Printer (Peralatan Personal Komputer)
252	Sulawesi Tenggara	005.01.401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	(111.026.218,)	Merupakan Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 14.379.919.570 kemudian dilakukan Jurnal Manual Terkait Koreksi Aset sebesar -14.491.795.788; dan terdapat Koreksi Pencatatan KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar 850,000
253	Sulawesi Tenggara	005.01.099684	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	(284.104.168,)	Merupakan input Saldo Awal Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen dan Saldo Awal Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen
254	Sulawesi Tenggara	005.01.477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	1.802.603,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
255	Sulawesi Tenggara	005.01.576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	2.550.000,	Merupakan penyusutan transaksinal atas input hibah masuk berupa sice, televisi, sound system, dan mimbar/podium
256	Sulawesi Utara	005.01.682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	5.735.226,	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas koreksi kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen yang membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung bangunan.
257	Sulawesi Utara	005.01.401888	PENGADILAN AGAMA LOLAK	(2.544.618,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai berkurang atas pengembalian belanja modal TYL
258	Sulawesi Utara	005.01.401891	PENGADILAN AGAMA TUTUYAN	(32.520.913,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas Selisih nilai normalisasi dengan nilai tindak lanjut Normalisasi pada tahun 2021 (Temuan LHP LKPP).
259	Sulawesi Utara	005.01.568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	28.862.801,	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai bertambah atas koreksi kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen yang membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung bangunan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
260	Sulawesi Utara	005.01.401925	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	(2.979.487,)	Merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi nilai berkurang atas pengembalian belanja modal TYL
261	Sulawesi Utara	005.01.402681	PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	55.872.500,	Merupakan nilai buku/selisih nilai perolehan aset dengan akumulasi penyusutan atas transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa monografi dan kursi besi/metal
262	Sumatera Barat	005.01.402613	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	338.651.082,	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Pagar Permanen sebesar 439.806.600 dan akumulasi penyusutan atas transaksi tersebut sebesar -101.155.518
263	Sumatera Barat	005.01.401953	PENGADILAN AGAMA PADANG	1.221.000,	Merupakan input Reklasifikasi Masuk Kursi Roda sebanyak 2 unit @610,500
264	Sumatera Barat	005.01.401931	PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO	(104.180.189,)	Merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen dan akumulasi penyusutan atas transaksi tersebut dan Koreksi Pencatatan Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA serta akumulasi penysutannya; serta Koreksi Pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen
265	Sumatera Barat	005.01.402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	162.293.464,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar164,819,780; dan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar 2,526,316
266	Sumatera Barat	005.01.098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	806.487,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
267	Sumatera Barat	005.01.477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	1.966.120,	Merupakan penyusutan transaksional atas input Hibah Masuk Bangunan Fasilitas Umum Lainnya
268	Sumatera Barat	005.01.400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	1.713.514,	Merupakan penysutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen
269	Sumatera Selatan	005.01.402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	1.640.000,	Merupakan input jurnal manual atas koreksi jurnal antar beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual yang berasal dari modul GLP
270	Sumatera Selatan	005.01.402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	842.000,	Merupakan penyusutan transaksional atas input Hibah Masuk Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya
271	Sumatera Selatan	005.01.401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	(64.325.832,)	Merupakan Pengembangan Nilai Aset (Langsung) berupa kursi besi/metal, kursi kayu, filling cabinet besi, lemari besi/metal, dan sofa
272	Sumatera Selatan	005.01.663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	(14.177.194.600,)	Merupakan input Saldo Awal Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, serta Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan
273	Sumatera Selatan	005.01.098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	71.708.577,	Merupakan penyusutan transaksional atas Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen karena kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya tidak membentuk NUP baru
274	Sumatera Selatan	005.01.098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	13.493.400,	Merupakan input Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen atas temuan LKPP 2021 sebesar 61,010,000 dan akumulais penyusutan atas transaksi tersebut sebesar -25,121,765; serta input Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar -29,860,000 dan akumulasi penyusutan atas transaksi tersebut sebesar 7,465,165
275	Sumatera Selatan	005.01.401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	221.652.000,	Merupakan input Hibah Masuk Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
276	Sumatera Selatan	005.01.099003	PENGADILAN NEGERI SEKAYU	55.883.827,	Merupakan penyusutan transaksional koreksi nilai bertambah atas kesalahan pencatatan Gedung dan bangunan NUP 5 dan harusnya gabung NUP 2
277	Sumatera Selatan	005.01.672969	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	(379.620.420,)	Merupakan tindak lanjut normalisasi dengan perolehan normalisasi gedung dan bangunan
278	Sumatera Utara	005.01.401783	PENGADILAN AGAMA BINJAI	86.768.347,	terdapat koreksi pencatatan untuk bangunan gedung kantor permanen nup 4. dikarenakan terdapat data ganda (double) antara nup 4 dan nup 7. nup 4 dilakukan normalisasi dan input normalisasi menjadi nup7. tetapi saat cetak laporan barang nup 4 masih aktif. jadi dilakukan koreksi pencatatan untuk nup 4
279	Sumatera Utara	005.01.403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	(26.910.000,)	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan tedapat jurnal pada modul GLP berupa keterangan koreksi nilai kesalahan input kuitansi up

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
280	Sumatera Utara	005.01.401859	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	(3.019.748,)	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah), 305 (Koreksi Pencatatan). Dikarenakan pencatatan aset yang seharusnya menambah nilai dari suatu aset tetapi dicatat menjadi aset dengan nup baru
281	Sumatera Utara	005.01.401935	PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH	(241.390.086,)	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 305 (Koreksi Pencatatan) yang awalnya bangunan gedung kantor lainnya dicatat 1 nup yang seharusnya dicatat terdapat gedung bangunan dan peralatan dan mesin.
282	Sumatera Utara	005.01.403083	PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN	2.570.827,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah), 264 (Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang), 305 (Koreksi Pencatatan), 504 (Koreksi Nilai KDP Bertambah)
283	Sumatera Utara	005.01.547682	PENGADILAN AGAMA STABAT	(5.026.759,)	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah) 305 (Koreksi Pencatatan) dikarenakan terdapat honorarium yang seharusnya menambah nilai aset tetapi dicatat sebagai aset dengan nup baru
284	Sumatera Utara	005.01.663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	19.280.357,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah) 305 (Koreksi Pencatatan) dikarenakan terdapat honorarium yang seharusnya menambah nilai aset tetapi dicatat sebagai aset dengan nup baru
285	Sumatera Utara	005.01.672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	4.630.420,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 100 (Saldo Awal), 103 (Hibah Masuk), 305 (Koreksi Pencatatan). Dikarenakan koreksi lhp BPK 2021 , rekomendasi dari BPK dikoreksi pencatatan, jika barang masih ada input saldo awal Atas rumah negara gol II tipe E semi permanen (4010202014)
286	Sumatera Utara	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	(39.262.484,)	Terjadi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 103 (Hibah Masuk), 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah), 214 (Koreksi Susulan), 264 (Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang), 305(Koreksi Pencatatan), 401 (Penghentian Aset dari Penggunaan)
287	Sumatera Utara	005.01.400395	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	50,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah), 305 (Koreksi Pencatatan). Dikarenakan pencatatan aset yang seharusnya menambah nilai dari suatu aset tetapi dicatat menjadi aset dengan nup baru
288	Sumatera Utara	005.01.098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	(1.871.180.195,)	Terdapat koreksi pencatatan - input saldo awal/koreksi nilai bertambah hasil rekomendasi LHP BPK LKPP 2021 sebanyak 174 NUP.
289	Sumatera Utara	005.01.098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	6.460.000,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 103 (Hibah Masuk) ke satuan kerja Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
290	Sumatera Utara	005.01.098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	815.176.709,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah), 305 (Koreksi Pencatatan). Dikarenakan pencatatan aset yang seharusnya menambah nilai dari suatu aset tetapi dicatat menjadi aset dengan nup baru
291	Sumatera Utara	005.01.098675	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	54.877.710,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah), 305 (Koreksi Pencatatan). Dikarenakan pencatatan aset yang seharusnya menambah nilai dari suatu aset tetapi dicatat menjadi aset dengan nup baru
292	Sumatera Utara	005.01.401905	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH	88.486.200,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 305 (Koreksi Pencatatan) yang awalnya bangunan gedung kantor lainnya dicatat 1 nup yang seharusnya dicatat terdapat gedung bangunan dan peralatan dan mesin.
293	Sumatera Utara	005.01.526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	128.069.731,	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dikarenakan transaksi 204 (Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah) 305 (Koreksi Pencatatan) dikarenakan terdapat honorarium yang seharusnya menambah nilai aset tetapi dicatat sebagai aset dengan nup baru

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391116 - KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
294	Yogyakata	005.01.400172	PENGADILAN NEGERI BANTUL	42.792.857,	Merupakan penyusutan transaksional atas koreksi penambahan nilai pada gedung dan bangunan permanen atas belanja modal untuk penambahan daya listrik.
295	Yogyakata	005.01.098078	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	5.375.000,	Merupakan tindak lanjut LHP LKPP berupa korekis pencatatan atas Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II karena pada faktanya Tidak ada dan merupakan kesalahan pada proses migrasi dan sudah dilakukan Koreksi Pencatatan tertanggal 14 September 2022
TOTAL				**(97.531.352.646,)**	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
391118 - KOREKSI NILAI ASET LAINNYA NON REVALUASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
1	Sumatera Utara	005.01.098629	PENGADILAN NEGERI MEDAN	(45.202.733,)	Terdapat koreksi pencatatan - input saldo awal/koreksi nilai bertambah hasil rekomendasi LHP BPK LKPP 2021 sebanyak 174 NUP.
2	Jawa Barat	005.01.401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	(29.700.000,)	Koreksi Aset lainnya non reval terjadi karena Koreksi Pencatatan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai 10000000
3	Jawa Tengah	005.01.403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	10.000.000,	Koreksi Aset lainnya non reval terjadi karena Koreksi Pencatatan Aset Tak Berwujud Lainnya senilai 10000000
4	Jawa Barat	005.01.477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	(495.697.331,)	input saldo awal atas temuan BPK berupa software
5	Sumatera Selatan	005.01.663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	(11.295.300,)	Jurnal GLP
6	Satker Pusat	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	(194.020,)	Jurnal GLP
TOTAL				(572.089.384,)	



KETIDAKSESUAIAN AKUN VS KODE BMN/PERSEDIAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
1	'00501	Aceh	'098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'8573555/KWI/PNTAPAKTUAN/2022	10-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN PARKIR SESUAI DENGAN KWITANSI NO: 8573555/KWI/PNTAPAKTUAN/2022 TANGGAL 10 MARET 2022	4010101001	1	18.425.000	18.425.000	'220741301001750	sudah dilakukan koreksi pencatan atas saran hai djpb dan sudah di input ke perolehan kdp lainnya serta melakukan jurnal manual di modul glp pada bulan juni atas saran akuntansi biro keuangan.
2	'00501	Aceh	'098590	PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'8577555/KWI/PNTAPAKTUAN/2022	10-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA PEMBAYARAN JASA KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN PAGAR SESUAI DENGAN KWITANSI NO: 8577555/KWI/PNTAPAKTUAN/2022 TANGGAL 10 MARET 2022	4010101001	1	20.834.000	20.834.000	'220741301001751	sudah dilakukan koreksi pencatan atas saran hai djpb dan sudah di input ke perolehan kdp lainnya serta melakukan jurnal manual di modul glp pada bulan juni atas saran akuntansi biro keuangan.
3	'00501	Aceh	400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00039	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Rumah Genset Sesuai SPK No.W1-U18/291a/PL.01/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022	4010130005	1	54.414.000	54.414.000	'220011701003348	Terdapat kesalahan akun belanja yang mana akun belanja tersebut merupakan akun belanja tambhan dari BUa YANG HARUS NYA 533 Terkirimnya 532 sehingga pembayaran di akun tersebut dan sudah di konsultasikan dengan kppn terkait kesalahan tersebut yang mana saran kppn adalah menjelaskan CALK
4	'00501	Aceh	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A1/1525.a/PL.04/7/2022	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tahun 2022	3070199999	1	845.000	845.000	'220011301025701	Akibat Pembelian unit sarana disabilitas yang nilainya dibawah kapitalisasi. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengajukan revisi anggaran dikarenakan hal tersebut diatas. Adapun balasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah tidak dapat dipertimbangkan.
5	'00501	Aceh	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A1/1525.a/PL.04/7/2022	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tahun 2022	3070199999	1	180.000	180.000	'220011301025701	Akibat Pembelian unit sarana disabilitas yang nilainya dibawah kapitalisasi. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengajukan revisi anggaran dikarenakan hal tersebut diatas. Adapun balasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah tidak dapat dipertimbangkan.
6	'00501	Aceh	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A1/1525.a/PL.04/7/2022	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tahun 2022	3070199999	1	180.000	180.000	'220011301025701	Akibat Pembelian unit sarana disabilitas yang nilainya dibawah kapitalisasi. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengajukan revisi anggaran dikarenakan hal tersebut diatas. Adapun balasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah tidak dapat dipertimbangkan.
7	'00501	Aceh	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A1/1525.a/PL.04/7/2022	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tahun 2022	3070199999	1	180.000	180.000	'220011301025701	Akibat Pembelian unit sarana disabilitas yang nilainya dibawah kapitalisasi. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengajukan revisi anggaran dikarenakan hal tersebut diatas. Adapun balasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah tidak dapat dipertimbangkan.
8	'00501	Aceh	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A1/1525.a/PL.04/7/2022	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tahun 2022	3070106999	1	750.000	750.000	'220011301025701	Akibat Pembelian unit sarana disabilitas yang nilainya dibawah kapitalisasi. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengajukan revisi anggaran dikarenakan hal tersebut diatas. Adapun balasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah tidak dapat dipertimbangkan.
9	'00501	Aceh	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A1/1525.a/PL.04/7/2022	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tahun 2022	3070199999	3	290.000	870.000	'220011301025701	Akibat Pembelian unit sarana disabilitas yang nilainya dibawah kapitalisasi. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengajukan revisi anggaran dikarenakan hal tersebut diatas. Adapun balasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah tidak dapat dipertimbangkan.
10	'00501	Aceh	401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A1/1525.a/PL.04/7/2022	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tahun 2022	3070199999	1	650.000	650.000	'220011301025701	Akibat Pembelian unit sarana disabilitas yang nilainya dibawah kapitalisasi. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengajukan revisi anggaran dikarenakan hal tersebut diatas. Adapun balasan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah tidak dapat dipertimbangkan.
11	'00501	Aceh	401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00006	27-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak	3050201003	5	500.000	2.500.000	'220011301020371	Ketidaksesuai tersebut muncul dikarenakan dalam melakukan realisasi belanja modal peralatan dan mesin berupa fasilitas dukungan sistem peradilan pidana anak sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terdapat 5 (lima) buah peralatan (kursi) yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-buah. Setelah berkonsultasi dengan pembina dan KPPN, satu-satunya cara untuk menyelesaikan ketidaksesuain tersebut yaitu hanya dengan jalan revisi belanja modal (53) ke belanja barang (52), namun cara tersebut rumit untuk dilaksanakan karena anggarannnya sudah dibelanjakan dan serta memiliki dampak bergesernya baseline belanja Mahkamah Agung secara keseluruhan
12	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012	28-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	6070501001	1	30.000.000	30.000.000	'220011301020945	hal ini terjadi karena ada pengadaan guilding blok untuk prasarana disablitas. terjadi kesalahan pada modul komitmen dengan dimasukan aset tetap renovasi, seharusnya dimasukan kedalam penambahan nilai gedung
13	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	16-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3050199999	1	732.600	732.600	'220011301029106	pembelian tongkat disabilitas menggunakan akun 53 dan pelanjanya dibawah nilai kapitalisasi
14	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	16-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3050199999	2	366.300	732.600	'220011301029106	pembelian tongkat disabilitas menggunakan akun 53 dan pelanjanya dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
15	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00017	16-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3050199999	1	513.950	513.950	'220011301029106	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.
16	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00017	16-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3160101001	2	738.150	1.476.300	'220011301029106	pembelian alat bantu dengar 2 unit menggunakan akun 53 dan nilai nya dibawah kapitalisasi
17	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00017	16-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3050199999	2	518.925	1.037.850	'220011301029106	pembelian kursi duduk disabilitas sejumlah 2 unit dibawaah nilai kapitalisasi dan menggunakan akun 53
18	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00017	16-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3050199999	2	213.675	427.350	'220011301029106	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.
19	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00017	16-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3050199999	2	305.250	610.500	'220011301029106	pembelian penyangga tagan
20	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00028	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Nota Pesanan No. W1-A2/1725/PL.00/XI/2022 tanggal 1 November 2022	3050201004	3	850.000	2.550.000	'220011305004277	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.
21	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00028	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Nota Pesanan No. W1-A2/1725/PL.00/XI/2022 tanggal 1 November 2022	3050201004	1	850.000	850.000	'220011305004277	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.
22	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00028	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Nota Pesanan No. W1-A2/1725/PL.00/XI/2022 tanggal 1 November 2022	3050206030	2	750.000	1.500.000	'220011305004277	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.
23	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00028	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Nota Pesanan No. W1-A2/1725/PL.00/XI/2022 tanggal 1 November 2022	3050201003	2	720.000	1.440.000	'220011305004277	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.
24	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00028	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Nota Pesanan No. W1-A2/1725/PL.00/XI/2022 tanggal 1 November 2022	3050201003	1	720.000	720.000	'220011305004277	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
25	'00501	Aceh	401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Nota Pesanan No. W1-A2/1725/PL.00/XI/2022 tanggal 1 November 2022	3050201003	2	720.000	1.440.000	'220011305004277	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.
26	'00501	Aceh	401627	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU	BAST KONTRAKTUAL	W1-A13/840/PL.08/08/2022	22-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Meubeler Mahkamah Syariyah Meureudu Tahun Anggaran 2022	4010124999	1	25.000.000	25.000.000	'220011301029193	hal ini terjadi dikarenakan kesalahan pemilihan kode barang saat pembuatan SPM, yang seharusnya di pilih 3050201999 meubelair lainnya, tetapi operator komtmennya mimilih kode 4010124999 pebangunan tempat persidangan lainnya
27	'00501	Aceh	401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	BAST NONKONTRAKTUAL	'02	15-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	belanja modal pengadaan fasilitas dukungan sistem peradilan pidana anak	3050201020	2	600.000	1.200.000	'220891301009232	Salah penginputan..seharus nya 1 barang dgn harga 1.2jt, tp saat penginputan di sakti terisi 2 brg dgn hrg 600rb
28	'00501	Aceh	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pengadaan Landscape Halaman Kantor Mahkamah Syar'iyah Calang 2022	2010302004	1	198.000.000	198.000.000	'220031701000549	Hal tersebut dikarenakan kesalahan kode akun yang seharusnya penambahan nilai gedung dan bangunan tetapi di input sebagai penambahan nilai tanah (lahan parkiran kantor)
29	'00501	Aceh	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A21/482/PL.05/04/2022	18-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Barang (Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran)	3050201003	13	400.000	5.200.000	'220741301003274	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel
30	'00501	Aceh	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A21/482/PL.05/04/2022	18-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Barang (Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran)	3050201003	6	900.000	5.400.000	'220741301003274	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel
31	'00501	Aceh	401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A21/482/PL.05/04/2022	18-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Barang (Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran)	3050204006	3	800.000	2.400.000	'220741301003274	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel
32	'00501	Aceh	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028/2022	'01-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	3050201003	5	825.000	4.125.000	'220741301002492	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel
33	'00501	Aceh	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028/2022	'01-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	3050201003	12	925.000	11.100.000	'220741301002492	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel
34	'00501	Aceh	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028/2022	'01-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	3050201012	1	750.000	750.000	'220741301002492	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel
35	'00501	Aceh	401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028/2022	'01-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	3070119031	1	840.000	840.000	'220741301002492	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel
36	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'0008/LS/VI/2022	23-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Kontruksi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Pagar Samping dab Belakang Kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.	4040104001	1	680.000	680.000	'221221301004257	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
37	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'0010.LS/VI/2022	23-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang	4040104001	1	720.000	720.000	'221221301004335	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
38	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'0011.LS/VI/2022	23-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang	4040104001	1	720.000	720.000	'221221301004336	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
39	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'0012.LS/VI/2022	23-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang Kantor Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	4040104001	1	720.000	720.000	'221221301004574	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
40	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'007.LS/III/2022	15-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Termin ke 1 Pengadaan Jasa Konsultansi Kontruksi Perencana Pembangunan Pagar berdasarkan Kuitansi No. 007.LS/III/2022 tanggal 15 maret 2022.	4040104001	1	23.183.600	23.183.600	'221221301001522	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
41	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'013.LS/X/2022	'05-10-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Pejabat Peneliti Addedum Kotrak Pembangunan Pagar Samping dan Belakang kantor.	4040104001	1	680.000	680.000	'221221301007288	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
42	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'014.LS/X/2022	12-10-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Pagar Samping dan Belakang	4040104001	1	21.611.700	21.611.700	'221221301007278	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
43	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'015.LS/X/2022	'03-10-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Honor Pejabat Peneliti Kontrak Pembangunan Pagar Samping dan Belakang kantor Berdasarkan SK No. W1-U19/1754.a/PL.01/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	4040104001	2	720.000	1.440.000	'221221301007473	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
44	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'016.LS/X/2022	'05-10-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Konsultasi Terkait Pekerjaan Pembangunan Pagar	4040104001	1	1.960.000	1.960.000	'221221301007472	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
45	'00501	Aceh	673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'017.LS/X/2022	10-10-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pembayaran Perjalanan Dinas	4040104001	1	150.000	150.000	'221221301007574	sudah dilakaukan koreksi pencatatan, dan ada belnja di bawah nilai kapitalisasai
46	'00501	Aceh	682228	MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-A20/1666/Ku.01/11/2022	28-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak	3050201003	8	755.000	6.040.000	'221221305000510	kesalahan kode akun belanja 521111 membentuk aset senilai 6040000, yang seharusnya menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel
47	'00501	Bali	'099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	28-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor pejabat pengadaan alat pengolah data	3100203003	1	600.000	600.000	'220371701001310	Terdapat Honor Pejabat Pengadaan Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
48	'00501	Bali	'099773	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	28-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor pejabat pengadaan fasilitas perkantoran	3050201002	1	414.000	414.000	'220371701001310	Terdapat Honor Pejabat Pengadaan Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
49	'00501	Bali	'099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	BAST KONTRAKTUAL	W24-U8/979/KS.00/09/2022	28-09-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan gedung kantor	6070301001	1	188.181.000	188.181.000	'221541304000702	Kesalahan dalam melakukan input di modul komitmen memilih aset kode barang kode barang 6070301001 (Aset Tetap Renovasi) menggunakan 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
50	'00501	Bali	'099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	BAST NONKONTRAKTUAL	W24U8/556a/KS.00/06/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3090403062	1	499.500	499.500	'221541301003630	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
51	'00501	Bali	'099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	BAST NONKONTRAKTUAL	W24U8/556a/KS.00/06/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3090402019	1	222.000	222.000	'221541301003630	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
52	'00501	Bali	'099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	BAST NONKONTRAKTUAL	W24U8/556a/KS.00/06/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3010312030	1	166.500	166.500	'221541301003630	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
53	'00501	Bali	402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	W22-A12/349/PL.04/5/2022	20-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	405.000	405.000	'221541304000332	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
54	'00501	Bali	402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	W22-A12/349/PL.04/5/2022	20-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	352.000	352.000	'221541304000332	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
55	'00501	Bali	402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	W22-A12/349/PL.04/5/2022	20-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	344.000	344.000	'221541304000332	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
56	'00501	Bali	402772	PENGADILAN AGAMA GIANYAR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00003	'01-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Perjalanan Dinas Belanja Modal	3100203003	2	250.000	500.000	'220371301009022	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
57	'00501	Bali	559861	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR	BAST KONTRAKTUAL	APB.2022.06.0140	11-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas (2 Unit)	2010101001	1	107.238.900	107.238.900	'220371304006465	Terdapat kesalahan input pada modul komitmen berupa tanah 2010101001 mennggunakan akun 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
58	'00501	Bali	614731	PENGADILAN AGAMA BADUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004	22-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan 2 Unit Printer TA 2022	3100203003	2	300.000	600.000	'220371301004974	Terdapat Honor Pejabat Pengadaan Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
59	'00501	Bali	663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	BAST KONTRAKTUAL	W3-MIL.03/16/KU.PL/12/2022	16-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	3050201020	5	999.000	4.995.000	'220371304015292	Terdapat pengadaan fasilitas perkantoran berupa 5 (lima) unit kursi yang nilainya di bawah kapitalisasi dengan menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532121)
60	'00501	Bali	663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	BAST NONKONTRAKTUAL	W3-Mil03/06/KU.PL/EP/10/2022	12-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Genset) berupa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3010304003	1	680.000	680.000	'220371303008100	Terdapat Honor Pejabat Pengadaan Peralatan dan mesin berupa Genset yang nilainya di bawah kapitalisasi
61	'00501	Bangka Belitung	'099010	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	BAST NONKONTRAKTUAL	Kuitansi No. : 005/CV.NBJ./KWT/IV/2022	22-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	4010101001	55	545.000	29.975.000	'220151304001356	Terdapat akun 532111 belanja modal peraltan dan mesin atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi, seharusnya menggunakan akun belanja peralatan dan mesin-Estrakomptabel

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
62	'00501	Bangka Belitung	401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	BAST KONTRAKTUAL	'015/SPK/PL.01/CV.TK/03/2022	18-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI KOBA TAHUN 2022	6070301001	1	173.000.000	173.000.000	'220151301003474	Merupakan belanja pemeliharaan gedung dan kantor 523111 berupa penggantian HPL dan pengecatan, seharusnya tidak menambah nilai gedung tetapi saat penginputan bast diklik menambah aset dalam kategori ATR, sudah dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebesar 172.900.000, Koreksi Pencatatan Gedung dalam renovasi sebesar 100.000.
63	'00501	Bangka Belitung	401912	PENGADILAN NEGERI KOBA	BAST NONKONTRAKTUAL	'12/KONSULTAN/PL/VI/2022	13-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN	4010113001	1	9.865.000	9.865.000	'220151302002688	Merupakan belanja modal berupa gedung pos jaga permanen, tetapi saat penginputan diinput ke pembelian oleh operator komitmen, sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai KDP bertambah gedung dan bangunan dalam pengerjaan (9.865.000), sudah dilakukan jurnal koreksi Debet Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp9.865.000, Kredit Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan
64	'00501	Bangka Belitung	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00085	20-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Perangkat Pengolah Data PN Mentok TA 2022 an.Eko Febrianto,S.H.,SK No.W7-U5/2185.a/KU.04/SK/11/2022 Tgl 1/11/2022	3100102002	1	680.000	680.000	'220151701000648	Merupakan honorarium pejabat pengadaan peralatan dan mesin, tetapi karena nilainya dibawah 1 juta sehingga masuk kedalam ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan jurnal Debet Koreksi Aset Tetap Non Reval sebesar Rp.680.000, Kredit Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin
65	'00501	Bangka Belitung	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	BAST KONTRAKTUAL	W7-U5/2141.a/BAST-MBL/PL.05/10/2022	26-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran pada Pengadilan Negeri Mentok Tahun Anggaran 2022	3050206057	293	414.030	121.310.790	'220151303002632	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin tetapi nilai satuannya dibawah kapitalisasi, sehingga masuk dalam belanja ekstrakomptabel sudah dilakukan koreksi pencatatan dan jurnal Debet Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi, Kredit Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin
66	'00501	Bangka Belitung	401913	PENGADILAN NEGERI MENTOK	BAST KONTRAKTUAL	W7-U5/2141.a/BAST-MBL/PL.05/10/2022	26-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran pada Pengadilan Negeri Mentok Tahun Anggaran 2022	4040104999	2	6.900.870	13.801.740	'220151303002632	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin berupa pagar pembatas ruang sidang, tetapi oleh operator dimasukan ke pembatas gedung dalam kategori gedung dan bangunan, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan jurnal Debet Koreksi Aset Tetap Non Reval dan Kredit Beban Aset Ekstrakomptabel peralatan dan mesin
67	'00501	Bangka Belitung	663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'009736	'08-08-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Faktur atas Pembelian Karpet	3050206056	1	914.825	914.825		Kesalahan kelebihan pencatatan jumlah barang berupa karpet oleh operator komitmen, sudah dilakukan koreksi pencatatan berkurang, dan jurnal Debet Utang yg belum diterima tagihannya, Kredit Beban Keperluan Perkantoran
68	'00501	Banten	400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A1/2627/BAST P/PL.04/VI/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian Peralatan Disabilitas	3070101999	2	166.500	333.000	'220201302004940	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
69	'00501	Banten	400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A1/2627/BAST P/PL.04/VI/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian Peralatan Disabilitas	3070101999	1	333.000	333.000	'220201302004940	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
70	'00501	Banten	400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A1/2627/BAST P/PL.04/VI/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian Peralatan Disabilitas	3070101999	2	333.000	666.000	'220201302004940	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
71	'00501	Banten	400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A1/2627/BAST P/PL.04/VI/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian Peralatan Disabilitas	3070101999	1	333.000	333.000	'220201302004940	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
72	'00501	Banten	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028	'01-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Printer. Berdasarkan SK. No W27-A4/609/PL.04/IV/2022 Tanggal 11 April 2022.	3100203003	1	680.000	680.000	'221611301003403	kesalahan pencatatan honorarium yang dicatat sebagai aset dengan nup baru yang seharusnya menambah dari aset nya telah lakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk pengadaan printer
73	'00501	Banten	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00049	26-09-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengelola Kegiatan	3180199999	1	2.944.200	2.944.200	'221611301005266	kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak dicatat sebagai aset malah dicatat sebagai aset. Seharusnya menambah nilai dari aset geedung dan bangunan telah lakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk gedung dan bangunan, dilakukan perbaikan bulan 10
74	'00501	Banten	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'014/BK/Pen/V/2022	24-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pengaspalan Lingkungan Gedung Berdasarkan Invoice Nomor 013/BK/Pen/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022	3180102012	1	9.439.440	9.439.440	'221611302001287	kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak dicatat sebagai aset malah dicatat sebagai aset. Seharusnya menambah nilai dari aset gedung dan bangunan telah dilakukan koreksi pencatatan dan dicatat sebagi gedung dan bangunan
75	'00501	Banten	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG	BAST KONTRAKTUAL	W27-A4/1366/PL.04/VIII/2022	29-08-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengadaan Pengaspalan Lingkungan Gedung Pengadilan Agama Rangkasbitung	3180199999	1	174.700.000	174.700.000	'221611302002144	kesalahan pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai gedung bangunan tetapi dicatat sebagi aset peralatan dan mesin telah lakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk gedung dan bangunan, dilakukan perbaikan bulan 10

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
76	'00501	Banten	400817	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	BAST KONTRAKTUAL	W27-A4/1373/PL.04/VIII/2022	29-08-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pengaspalan Lingkungan Gedung	3180199999	1	11.845.000	11.845.000	'221611302002181	kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak dicatat sebagai aset malah dicatat sebagai aset. Seharusnya menambah nilai dari aset gedung dan bangunan telah lakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk gedung dan bangunan, dilakukan perbaikan bulan 10
77	'00501	Banten	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	BAST KONTRAKTUAL	W27-A3/2056/PL.04/VI/2022	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Tangerang	3070101999	1	99.900	99.900	'221271302007363	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
78	'00501	Banten	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	BAST KONTRAKTUAL	W27-A3/2056/PL.04/VI/2022	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Tangerang	3070101999	1	77.700	77.700	'221271302007363	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
79	'00501	Banten	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	BAST KONTRAKTUAL	W27-A3/2056/PL.04/VI/2022	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Tangerang	3070101999	1	66.600	66.600	'221271302007363	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
80	'00501	Banten	400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	BAST KONTRAKTUAL	W27-A3/2056/PL.04/VI/2022	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Tangerang	3070101999	1	166.500	166.500	'221271302007363	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
81	'00501	Banten	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W29.U2/UK/PL.6/BAST/PN.PDL/VIII/2022	30-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	3160101001	1	369.075	369.075	'221611302002019	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
82	'00501	Banten	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W29.U2/UK/PL.6/BAST/PN.PDL/VIII/2022	30-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	3090402019	1	77.700	77.700	'221611302002019	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
83	'00501	Banten	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W29.U2/UK/PL.6/BAST/PN.PDL/VIII/2022	30-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	3070108161	1	155.400	155.400	'221611302002019	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
84	'00501	Banten	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W29.U2/UK/PL.6/BAST/PN.PDL/VIII/2022	30-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	6010101999	5	735.375	3.676.875	'221611302002019	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
85	'00501	Banten	604723	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	BAST KONTRAKTUAL	BAST-001/604723/2022	'08-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi Lantai Ruang Sidang 1, Ruang Sidang 2, Ruang Sidang 3 dan Perbaikan Instalasi Air Bersih	7010101003	1	33.417.350	33.417.350	'221271302001275	telah dilakukan koreksi pencatatan seharusnya ini hanya pemeliharaan gedung dan bangunan memperbaiki kondisi semula. Bukan merupakan kdp
86	'00501	Banten	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A6/1403/PL.01/10/2022	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA CILEGON	3090402019	2	166.500	333.000	'220201302010435	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
87	'00501	Banten	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A6/1403/PL.01/10/2022	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA CILEGON	3070108161	1	444.000	444.000	'220201302010435	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
88	'00501	Banten	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A6/1403/PL.01/10/2022	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA CILEGON	3070112999	2	333.000	666.000	'220201302010435	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
89	'00501	Banten	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A6/1403/PL.01/10/2022	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA CILEGON	3160101001	2	832.500	1.665.000	'220201302010435	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
90	'00501	Banten	652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	BAST NONKONTRAKTUAL	W27-A6/1403/PL.01/10/2022	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA CILEGON	3070112999	1	333.000	333.000	'220201302010435	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111.
91	'00501	Banten	663398	PENGADILAN TINGGI BANTEN	BAST NONKONTRAKTUAL	'07	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	meubelair	3050201002	1	800.000	800.000	'220201302008587	kesalahan penginputan yang seharusny tidak menjadi aset. Tetapi di catat sebagai aset, yang seharusnya masuk ke nilai dari beberapa aset telah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah untuk beberapa aset
92	'00501	Banten	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	BAST KONTRAKTUAL	W2-TUN7/185/PPK/BAST/PL.01/IV/2022	11-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan 14,34 M2.	2010104001	1	29.350.000	29.350.000	'220201302003203	kesalahan pencatatan yang seharusnya merupakan gedung bangunan tetapi dicatat sebagai kode barang tanah telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk gedung dan bangunan
93	'00501	Banten	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-TUN7/263/HPjP-SARDIS/PL.05/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Dengan SK KPA No. W2-TUN7/263/HPjP-SARDIS/PL.05/VI/2022 Tanggal 14-06-2022 (Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Masa Pelaksanaan Pengadaan Tanggal 27-05-2022 s/d 13-06-2022)	3070112002	1	650.000	650.000	'220201301008460	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111. surat pernyataan dari kpb bahwa terdapat penggunaan akun 532111 untuk belanja peralatan dan mesin dibawah kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
94	'00501	Banten	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-TUN7/30/PL.04/I/2022	'03-01-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Dengan SK KPA No. W2-TUN7/30/PL.04/I/2022 Tgl 03-01-2022 (Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Masa Pekerjaan Tgl 21-03-2022 s.d. 11-04-2022)	2010104001	1	650.000	650.000	'220201301005766	kesalahan pencatatan yang seharusnya menambah nilai gedung bangunan tetapi di catat sebagai tanah telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk gedung dan bangunan
95	'00501	Banten	689313	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-TUN7/30/PL.04/III/2022	'03-01-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Dengan SK KPA No. W2-TUN7/30/PL.04/I/2022 Tanggal 03-01-2022 (Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Masa Pelaksanaan Pengadaan Tanggal 18-01-2022 s/d 16-03-2022)	3080141194	1	680.000	680.000	'220201301003717	kesalahan penggunakan kode akun belanja yang seharusnya 521252 tetapi menggunakan kode akun 532111. surat pernyataan dari kpb bahwa terdapat penggunaan akun 532111 untuk belanja peralatan dan mesin dibawah kapitalisasi
96	'00501	Bengkulu	308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	BAST NONKONTRAKTUAL	SPP/004/JBT/VII/2022	'03-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Curup T.A 2022 sesuai dengan Kuitansi No. SPP/004/JBT/VII/2022 tgl 3 Agustus 2022	3010399999	1	275.300	275.300	'221461303002017	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Sarana Disabilitas berupa Tongkat Kaki 3 sejumlah Rp275.300. Hal ini terjadi kesalahan karena kesalahan dari penginputan BAST atas BMN tersebut pada akun Alat Bantu Lainnya, padahal seharusnya dicatat sebagai akun Alat Kesehatan Umum Lainnya
97	'00501	Bengkulu	308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	BAST KONTRAKTUAL	W7-A4/1512/PL.04/11/2022	17-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Penambahan Daya Kantor Pengadilan Agama Curup T.A. 2022	6070301001	1	100.000.000	100.000.000	'221461301007304	Penambahan daya listrik yang seharusnya menambah nilai Gedung Bangunan Kantor Permanen, namun operator aset salah menginput dengan menginput seperti perolehan biasa sehingga menjadi akun Aset Tetap Renovasi sebesar Rp100.000.000.
98	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028	14-04-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	MEJA KERJA BROWN	3050201002	2	975.000	1.950.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
99	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00031	24-03-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	LEMARI KAYU (KOTAK 4) WARNA BROWN	3050104002	1	500.000	500.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
100	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	'01-03-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	DISPENSER MERK MIYAKO	3050206036	1	135.000	135.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
101	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00038	24-03-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RAK DISPENSER KAYU	3050105999	1	300.000	300.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
102	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00039	24-03-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	LEMARI PLASTIK ODC (KOTAK 5) CREAM	3050206064	1	950.000	950.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
103	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	27-04-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	LEMARI BESI WHITE LF RSG 04K4 WHITE SONOMA	3050104001	2	500.000	1.000.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
104	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00043	'09-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	RAK BUKU ARENA ANAK	3040104003	1	600.000	600.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
105	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00044	'09-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	DISPENSER MIYAKO	3050206036	1	550.000	550.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
106	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00045	29-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	CHAIR BLACK HARIS BANQUET	3050201003	36	299.500	10.782.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
107	'00501	Bengkulu	400110	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00046	'01-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	DISPENSER MIYAKO	3050206036	1	515.000	515.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521119
108	'00501	Bengkulu	400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00112	21-02-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan/Penggantian Inventaris	3050206036	2	650.000	1.300.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521111
109	'00501	Bengkulu	400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00114	'08-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan/Penggantian Inventaris Lemari	3050104002	1	998.000	998.000		Salah Akun atas pencatatan barang ekstrakomptabel dikarenakan akun ekstrakomptabel pada tanggal transaksi belum ada sehingga akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang ekstrakomptabel adalah 521111
110	'00501	Bengkulu	400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	BAST KONTRAKTUAL	W8-U/3234/PL.01.10/XII/2022	13-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (Tambah Daya dan Perbaikan Jaringan Listrik)	5040299999	1	162.840.000	162.840.000	'220161303008971	Penambahan daya listrik yang seharusnya menambah nilai Gedung Bangunan Kantor Permanen, namun salah menginput dengan menginput seperti akun Penambahan Listrik dan Jaringan sehingga menjadi akun Aset Tetap Renovasi sebesar Rp162.840.000.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
111	'00501	Bengkulu	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	BAST KONTRAKTUAL	W1TUN8/1171/PL.04/10/2022	19-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Penambahan Daya dan Perbaikan Listrik Instalasi Listrik PTUN Bengkulu	5040299999	1	99.515.350	99.515.350	'220161303007236	Penambahan daya listrik yang seharusnya menambah nilai masa manfaat Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1, namun operator komitmen dan aset terlanjut salah input menjadi Jaringan Listrik Lainnya NUP 2 senilai Rp. 99.515.350, maka harus dilakukan reklas keluar dan masuk, koreksi pencatatan nilai bertambah kepada Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 Sebesar Rp. 99.515.350 dan proses tersebut diatas sudah dilaksanakan
112	'00501	Gorontalo	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-A4/1090/OL.01/VIII/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara serah terima barang	3070299999	1	250.000	250.000	'221801302000746	kesalahan kode akun belanja 521111 membentuk aset, yang seharusnya menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel pengungkapan di calk
113	'00501	Gorontalo	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-A4/1090/OL.01/VIII/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara serah terima barang	3070108161	1	650.000	650.000	'221801302000746	kesalahan kode akun belanja 521111 membentuk aset, yang seharusnya menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel pengungkapan di calk
114	'00501	Gorontalo	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-A4/1090/OL.01/VIII/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara serah terima barang	3070299999	2	200.000	400.000	'221801302000746	kesalahan kode akun belanja 521111 membentuk aset senilai 400.000, yang seharusnya menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel pengungkapan di calk
115	'00501	Gorontalo	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-A4/1090/OL.01/VIII/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara serah terima barang	3070299999	2	300.000	600.000	'221801302000746	kesalahan kode akun belanja 521111 membentuk aset, yang seharusnya menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel pengungkapan di calk
116	'00501	Gorontalo	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-A4/1090/OL.01/VIII/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara serah terima barang	3070299999	2	250.000	500.000	'221801302000746	kesalahan kode akun belanja 521111 membentuk aset, yang seharusnya menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel pengungkapan di calk
117	'00501	Gorontalo	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-A4/1090/OL.01/VIII/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara serah terima barang	3060101001	1	600.000	600.000	'221801302000746	kesalahan kode akun belanja 521111 membentuk aset, yang seharusnya menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel pengungkapan di calk
118	'00501	Jakarta	'097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	BAST KONTRAKTUAL	W10-U/112/PL.01/12/2022	15-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	3050206030	2	650.000	1.300.000	'221751303037900	Belanja modal dibawah nilai kapitalisasi
119	'00501	Jakarta	'097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	BAST KONTRAKTUAL	W10-U/91/PL.03/10/2022	24-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran CCTV pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	3050105007	5	962.500	4.812.500	'221751301046571	Belanja modal dibawah nilai kapitalisasi
120	'00501	Jakarta	'097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	BAST NONKONTRAKTUAL	'00029	21-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Prasarana Kaum Rentan	4010132999	1	19.258.500	19.258.500	'221751701016685	Kesalahan penginputan kode barang
121	'00501	Jakarta	'097488	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	BAST KONTRAKTUAL	W10.U2/16.J/PL.06/VII/2022	'04-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN PRASARANA DISABILITAS	2010104001	1	29.597.000	29.597.000	'221751302019740	Kesalahan pencatatan pengadaan prasarana yang seharusnya menambah nilai gedung sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas tanah dan dilakukan koreksi nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor Permanen.
122	'00501	Jakarta	'097492	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	BAST KONTRAKTUAL	W10.U5/11/LS.01/01/11/2022	15-11-2022	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Pengadaan Alat Kebersihan Kantor	3090202005	1	133.200	133.200	'221751302037874	Terdapat belanja persediaan yang tercatat sebagai aset, sudah dilakukan reklas keluar ke persediaan
123	'00501	Jakarta	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'387/AMS/XI/2022	'09-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas PN Jaksel	6010101999	1	2.220.000	2.220.000	'221751301050287	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa buku braille,
124	'00501	Jakarta	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	BAST KONTRAKTUAL	'12/LPM-PNJU/IX/2022	'03-10-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BELANJA MODAL KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN LANJUTAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TA 2022	6070301001	1	2.639.403.394	2.639.403.394	'221751302031821	kesalahan penginputan kode barang, telah dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi nilai bertambah KDP
125	'00501	Jakarta	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	BAST KONTRAKTUAL	'16/BA.AL-PN.JAKUT/IX/2022	20-09-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PEKERJAAN JASA KONSULTASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN/RENOVASI GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	6070301001	1	102.176.250	102.176.250	'221751301042022	kesalahan penginputan kode barang, telah dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi nilai bertambah KDP
126	'00501	Jakarta	400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	BAST KONTRAKTUAL	W10.U4/02-DISABILITAS/PL.01/09/2022	'05-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas	3010399999	3	832.500	2.497.500	'221751302028665	kesalahan penginputan kode akun belanja aset ekstrakomptabel menjadi belanja aset intrakomptabel
127	'00501	Jakarta	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	BAST NONKONTRAKTUAL	'11/LC-KW/6/2022	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Pengadaan Prasarana Disabelitas	6070301001	1	29.793.510	29.793.510	'221751302016405	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi bangunan gedung kantor sebagai ATR, sudah dilakukan koreksi dengan RK-RM ke bangunan gedung kantor permanen sehingga membentuk NUP baru, kemudian dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan dilakukan koreksi nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor Permanen yang direnovasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
128	'00501	Jakarta	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00110	'06-09-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel berupa pembelian kursi tunggu stainless silver sebanyak 3 kursi @Rp.915rb	3050201003	1	2.808.500	2.808.500	'221751301039080	Terdapat kesalahan pencatatan kursi sebanyak 3 unit tercatat 1 unit, sudah dilakukan koreksi nilai berkurang dan input 2 kursi melalui perolehan lainnya
129	'00501	Jakarta	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	BAST NONKONTRAKTUAL	'35/PPK-JU/RWT.GD/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sarana Disabilitas Sesuai Kwitansi Nomor: 4/LC-KW/4/2022 Tanggal 11 April 2022	3010399999	1	457.706	457.706	'221751302008756	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
130	'00501	Jakarta	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	BAST NONKONTRAKTUAL	'35/PPK-JU/RWT.GD/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sarana Disabilitas Sesuai Kwitansi Nomor: 4/LC-KW/4/2022 Tanggal 11 April 2022	3010399999	1	537.706	537.706	'221751302008756	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
131	'00501	Jakarta	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	BAST NONKONTRAKTUAL	'35/PPK-JU/RWT.GD/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sarana Disabilitas Sesuai Kwitansi Nomor: 4/LC-KW/4/2022 Tanggal 11 April 2022	3010399999	1	712.706	712.706	'221751302008756	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
132	'00501	Jakarta	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	BAST NONKONTRAKTUAL	'35/PPK-JU/RWT.GD/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Sarana Disabilitas Sesuai Kwitansi Nomor: 4/LC-KW/4/2022 Tanggal 11 April 2022	3070108161	1	772.706	772.706	'221751302008756	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
133	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	400.000	400.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
134	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	340.000	340.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
135	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	390.000	390.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
136	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	840.000	840.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
137	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	650.000	650.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
138	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	300.000	300.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
139	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	160.000	160.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
140	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	220.000	220.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
141	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	246.000	246.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
142	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	160.000	160.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
143	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050199999	1	220.000	220.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
144	'00501	Jakarta	663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	BAST NONKONTRAKTUAL	MILTAMA/128/BAST.PSD.PPK/8/2022	'02-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN MILITER UTAMA	3050105056	1	500.000	500.000	'221751301033209	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
145	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BAST.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	220.000	220.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
146	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BAST.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	840.000	840.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
147	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	650.000	650.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
148	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	340.000	340.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
149	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	390.000	390.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
150	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	160.000	160.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
151	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	300.000	300.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
152	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050105056	1	500.000	500.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
153	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	400.000	400.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
154	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	220.000	220.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
155	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	160.000	160.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
156	'00501	Jakarta	663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-MIL/193/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tahun 2022	3050199999	1	246.000	246.000	'221751301033045	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
157	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	160.000	160.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
158	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	300.000	300.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
159	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	650.000	650.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
160	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	340.000	340.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
161	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	390.000	390.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
162	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	400.000	400.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
163	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	220.000	220.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
164	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050105056	1	500.000	500.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
165	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	246.000	246.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
166	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	160.000	160.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
167	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	220.000	220.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
168	'00501	Jakarta	663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	BASTP Nomor W2-MIL01/128/BASTP.PSD.PPK/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer II-08 Jakarta	3050199999	1	840.000	840.000	'221751301032828	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
169	'00501	Jambi	'098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00057	30-08-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST SPPD Pembuktian Kualifikasi di MA.RI	4040104001	1	4.218.732	4.218.732	'220121301011000	Merupakan belanja penambahan nilai gedung atas sppd pengadaan pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi sehingga membentuk NUP baru sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada pagar permanen
170	'00501	Jambi	'098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00058	30-08-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST SPPD Pembuktian Kualifikasi di MA.RI	4040104001	1	4.096.012	4.096.012	'220121301011000	Merupakan belanja penambahan nilai gedung atas sppd pengadaan pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi sehingga membentuk NUP baru sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada pagar permanen
171	'00501	Jambi	'098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00075	14-11-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST honor renovasi pagar kantor pengadilan negeri jambi	4040104001	1	850.000	850.000	'220121301014103	Merupakan belanja penambahan nilai gedung atas honor renovasi pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi sehingga membentuk NUP baru sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada pagar permanen
172	'00501	Jambi	'098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00075	14-11-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST honor renovasi pagar kantor pengadilan negeri jambi	4040104001	4	340.000	1.360.000	'220121301014103	Merupakan belanja penambahan nilai gedung atas honor renovasi pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi sehingga membentuk NUP baru sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada pagar permanen
173	'00501	Jambi	'098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	'036/VAB/IV/2022	13-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Berupa Kamera Digital (Kamera dan Tripod Camera)	3060102045	1	650.000	650.000	'220121304002050	Terdapat belanja modal 533111 Belanja modal PM dibawah nilai kapitalisasi berupa kamera
174	'00501	Jambi	'098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	DO.2022.12.00015	'09-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST KURSI DAN PRINTER	3100203003	1	807.000	807.000	'220121304007590	Terdapat belanja modal 533111 Belanja modal PM dibawah nilai kapitalisasi berupa kursi dan printer
175	'00501	Jambi	'098921	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-U4/287/PL.04/3/2022	23-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tambah Daya Listrik.	6070301001	1	32.600.000	32.600.000	'220131302000022	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambah nilai gedung bangunan dengan kode barang 4010101001. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yg salah dan koreksi nilai bertambah pada gedung dan bangunan.
176	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3050206085	1	760.000	760.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
177	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3010399999	1	440.000	440.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
178	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3010399999	1	630.000	630.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
179	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3010399999	1	560.000	560.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
180	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3050206085	1	760.000	760.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
181	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3030211008	1	500.000	500.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
182	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3050206036	1	540.000	540.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
183	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	'01-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas PN Bangko berupa pembelian automatic hand dryer, tissue dispenser, kurk dll.	3050105095	1	740.000	740.000	'221591301000340	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
184	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00059	'01-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal berupa kursi hadap.	3050201003	1	475.000	475.000	'221591301004854	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
185	'00501	Jambi	400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00060	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal berupa kursi hadap.	3050201003	2	475.000	950.000	'221591301004854	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
186	'00501	Jambi	402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A1/1086/PL.01/VII/2022	25-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3160101001	2	277.500	555.000	'220121304004406	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
187	'00501	Jambi	402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A1/1086/PL.01/VII/2022	25-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070108161	1	444.000	444.000	'220121304004406	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
188	'00501	Jambi	402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A1/1086/PL.01/VII/2022	25-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	6010101999	5	765.900	3.829.500	'220121304004406	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
189	'00501	Jambi	402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A1/1086/PL.01/VII/2022	25-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070108161	1	242.000	242.000	'220121304004406	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
190	'00501	Jambi	402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A3/527/PL.04/V.2022	13-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Sarana Disabilitas PA Kuala Tungkal	3070108161	1	166.500	166.500	'221431304000344	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
191	'00501	Jambi	402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A3/527/PL.04/V.2022	13-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Sarana Disabilitas PA Kuala Tungkal	3160101001	2	499.500	999.000	'221431304000344	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
192	'00501	Jambi	402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A3/527/PL.04/V.2022	13-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Sarana Disabilitas PA Kuala Tungkal	3070108161	1	517.150	517.150	'221431304000344	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
193	'00501	Jambi	402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A3/527/PL.04/V.2022	13-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Sarana Disabilitas PA Kuala Tungkal	3070108161	1	333.000	333.000	'221431304000344	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
194	'00501	Jambi	403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A2/1283/PL.01/XII/2022	12-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Prasarana gedung berupa 1 set Karpet Sesuai dengan BAST No. W5-A2/1283/PL.01/XII/2022 dan BAP No. W5-A2/1284/KU.01/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022	3050206056	1	44.977.500	44.977.500	'220121304007593	Terdapat kesalahan akun belanja atas pengadaan satu set karpet, seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dana mesin
195	'00501	Jambi	403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A2/536/PL.05/III/2022	18-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Barang Sarana Disabilitas Pengadilan	6010101999	5	660.000	3.300.000	'220121304001162	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
196	'00501	Jambi	403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A2/536/PL.05/III/2022	18-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Barang Sarana Disabilitas Pengadilan	3180102009	2	935.000	1.870.000	'220121304001162	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
197	'00501	Jambi	477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	BAST KONTRAKTUAL	W5-U8/793/PL.05/06/2022	13-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Perencanaan Lanjutan Interior	2010104001	1	49.395.000	49.395.000	'220781304000970	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KDP. sehingga dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yg salah dan perolehan lainnya KDP untuk mencatat ke kode barang yg benar dan telah dilakukan penjurnalan.
198	'00501	Jambi	578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00113	'09-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Biaya pembelian palu sidang dan box ukiran	3050206040	3	952.500	2.857.500	'220121701001624	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
199	'00501	Jambi	578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00114	'09-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Biaya pembelian papan nama Majelis Hakim, Panitera dan Para Pihak	3050105008	12	428.625	5.143.500	'220121701001624	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
200	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A7/719/KU.01/VI/2022	15-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Pengadaan Genset	3150405001	1	720.000	720.000	'221591301005731	Kesalahan akun Belanja seharusnya akun honor pejabat pengadaan. telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan koreksi nilai bertambah genset
201	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A7/722/KU.01/VI/2022	15-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Rumah Genset	4010130005	1	720.000	720.000	'221591301005731	Kesalahan akun Belanja seharusnya akun honor pejabat pengadaan. telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan koreksi nilai bertambah genset
202	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST KONTRAKTUAL	W5-A7/722/KU.01/VI/2022	27-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaab Fasilitas Pendukung Mesin Genset Pengadilan Agama Sarolangun	5031001001	1	30.000.000	30.000.000	'221591303000065	Kesalahan akun Belanja seharusnya akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan
203	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST KONTRAKTUAL	W5-A7/722/KU.01/VI/2022	27-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaab Fasilitas Pendukung Mesin Genset Pengadilan Agama Sarolangun	4010130005	1	35.000.000	35.000.000	'221591303000065	Kesalahan Pencatatan Kode Barang. Telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan koreksi nilai bertambah rumah genset
204	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A7/911/KU.01/VIII/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pengadilan Agama Sarolangun Tahun 2022	3160101001	2	750.000	1.500.000	'221591304001685	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
205	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A7/911/KU.01/VIII/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pengadilan Agama Sarolangun Tahun 2022	3010399999	1	300.000	300.000	'221591304001685	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
206	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A7/911/KU.01/VIII/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pengadilan Agama Sarolangun Tahun 2022	3090402019	1	550.000	550.000	'221591304001685	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
207	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A7/911/KU.01/VIII/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pengadilan Agama Sarolangun Tahun 2022	3090402020	1	350.000	350.000	'221591304001685	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
208	'00501	Jambi	632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W5-A7/911/KU.01/VIII/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PAKET PEKERJAAN Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pengadilan Agama Sarolangun Tahun 2022	3090402020	1	350.000	350.000	'221591304001685	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
209	'00501	Jambi	632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00089	19-12-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Pengelola Proyek Pembangunan Pos Jaga (Honor panitia pengelola proyek)	4010113001	1	2.640.000	2.640.000	'221431701000314	Terdapat kesalahan akun belanja sehingga membentuk NUP baruseharusnya akun belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan atas honor pengadaan pos jaga. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan koreksi nilai bertambah pos jaga
210	'00501	Jambi	632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	BAST KONTRAKTUAL	W5-A8/1034/PL.02/XI/2022	10-11-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga Kantor Pengadilan Agama Muara Sabak	4010101001	1	17.000.000	17.000.000	'221431304000973	Terdapat kesalahan akun belanja sehingga membentuk NUP baruseharusnya akun belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan atas perencanaan pengadaan pos jaga. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan koreksi nilai bertambah pos jaga. serta JUrnal manual Beban ekstra G/B dengan Koreksi aset non reval
211	'00501	Jambi	632022	PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK	BAST KONTRAKTUAL	W5-A8/1136/PL.02/XII/2022	14-12-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengawasan Pembangunan Pos Jaga Pengadilan Agama Muara Sabak Muara Sabak Tahun 2022	4010113001	1	13.000.000	13.000.000	'221431304001049	Terdapat kesalahan akun belanja sehingga membentuk NUP baru seharusnya akun belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan atas pengawasan pengadaan pos jaga. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan koreksi nilai bertambah pos jaga. serta JUrnal manual Beban ekstra G/B dengan Koreksi aset non reval
212	'00501	Jambi	652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	BAST KONTRAKTUAL	W5-A10/561/PL.04/4/2022	27-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa Fasilitas Pendukung Mesin Genset	4010130005	1	15.559.500	15.559.500	'220121304002261	Terdapat kesalahan akun belanja atas pengadaan rumah genset. Seharusnya menggunakan akun belanja modal Gedung dan bangunan
213	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00009	'08-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek berupa konsumsi rapat tim POKJA.	4040104001	1	456.500	456.500	'220121301006542	Merupakan pembyaran Adm proyek atas pengadaan pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi yg menambah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
214	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	'08-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek berupa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Perencanaan dan Pengawasan Proyek Pengadaan Pagar Rumah Dinas PN Sengeti.	4040104001	2	680.000	1.360.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran Adm proyek atas pengadaan pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi yg menambah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
215	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00011	'08-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek berupa Honor Tim POKJA Pengadaan Pagar Rumah Dinas PN Sengeti	4040104001	1	1.020.000	1.020.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran Adm proyek atas pengadaan pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi yg menambah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
216	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012	'08-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Honor Tim POKJA Pengadaan Pagar Rumah Dinas PN Sengeti.	4040104001	1	1.020.000	1.020.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran honor atas pengadaan pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi yg menambah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
217	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	'08-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Honor Tim POKJA Pengadaan Pagar Rumah Dinas PN Sengeti.	4040104001	1	1.020.000	1.020.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran honor atas pengadaan pagar permanen dibawah nilai kapitalisasi yg menambah nilai kapitalisasi. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
218	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00014	'08-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek Pengadaan Pagar Rumah Dinas PN Sengeti berupa Pembelian 1 unit printer dan catridge.	4040104001	1	1.650.000	1.650.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran honor dibawah nilai kapitalisasi atas pengadaan pagar permanen. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
219	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015	13-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek pembelian 2 buah HDD External 1 TB.	4040104001	1	1.500.000	1.500.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran adm proyek dibawah nilai kapitalisasi atas pengadaan pagar permanen. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
220	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	13-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek Pencairan Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tgl 19 April 2022 dan 17 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Sengeti.	4040104001	1	740.000	740.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran adm proyek dibawah nilai kapitalisasi atas pengadaan pagar permanen. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
221	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	13-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek Pencairan Surat Perintah Perjalanan Dinas kegiatan tgl 19 April 2022 dan 17 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Sengeti.	4040104001	1	740.000	740.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran adm proyek dibawah nilai kapitalisasi atas pengadaan pagar permanen. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
222	'00501	Jambi	663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	13-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Gedung dan Bangunan Administrasi Proyek pembelian Printer Epson L121 & SSD 500 Gb Kingstone.	4040104001	1	3.150.000	3.150.000	'220121301006542	Merupakan pembyaran adm proyek dibawah nilai kapitalisasi atas pengadaan pagar permanen. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas timbulnya NUP baru berupa aset ekstra dikarenakan dibawah nilai kapitalisasi dan dilakukan koreksi nilai bertambah terhadap kode barang pagar permanen.
223	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honorarium Pengelola Teknis atas Pengecatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	4010201001	1	1.550.000	1.550.000	'220951301011424	Merupakan Honor pengelola teknis pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
224	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Pengecetan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo, ST.	4010201001	1	2.550.000	2.550.000	'220951301011424	Merupakan biaya perjalanan dinas pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
225	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00003	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Kusen dan mekanikal Elektrikal Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo, ST.	4010201001	1	1.550.000	1.550.000	'220951301011424	Merupakan Honor pengelola teknis pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
226	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Kusen dan mekanikal Elektrikal Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo, ST.	4010201001	1	2.550.000	2.550.000	'220951301011424	Merupakan biaya perjalanan dinas pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
227	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00005	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Atap, Plafond, Dinding dan Lantai Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo, ST.	4010201001	1	1.240.000	1.240.000	'220951301011424	Merupakan Honor pengelola teknis pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
228	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00007	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Atap, Plafond, Dinding dan Lantai Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo, ST.	4010201001	1	2.040.000	2.040.000	'220951301011424	Merupakan biaya perjalanan dinas pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
229	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00008	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Ruang Kerja Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo ST.	4010101001	1	1.240.000	1.240.000	'220951301011424	Merupakan Honor pengelola teknis pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
230	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00009	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Ruang Kerja Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo ST.	4010101001	1	2.210.000	2.210.000	'220951301011424	Merupakan biaya perjalanan dinas pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
231	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi PTSP Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo ST.	4010101001	1	1.240.000	1.240.000	'220951301011424	Merupakan Honor pengelola teknis pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
232	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00011	17-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi PTSP Pengadilan Tinggi Bandung an. Sunaryo ST.	4010101001	1	2.210.000	2.210.000	'220951301011424	Merupakan biaya perjalanan dinas pengelola teknis seharusnya menambah nilai rumah dinas, sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang membentuk NUP baru dan koreksi nilai bertambah pada rumah dinas
233	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012	'07-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pekerjaan Pengawasan Renovasi Atap Plafon, Dinding dan Lantai Rumah Dinas TA 2022	2010101001	1	15.873.000	15.873.000	'220951701000805	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
234	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00013	'07-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi Atap Plafon, Dinding dan Lantai Rumah Dinas TA 2022	2010101001	1	158.750.000	158.750.000	'220951701000805	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
235	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00014	11-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi Kusen dan Mekanikal Elektrikal Rumah Dinas TA 2022	2010101001	1	158.100.000	158.100.000	'220951701000805	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
236	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/MERDKPT/15/4/2022	14-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Perencanaan Renovasi Kusen dan Mekanikal Elektrikal Rumah Dinas	2010101001	1	19.143.000	19.143.000	'220951302006539	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
237	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/PDLRKPT/15/3/2022	14-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Perencanaan Pekerjaan Perencanaan renovasi Atap, Plafon, Dinding dan Lantai Rumah Dinas TA 2022	2010101001	1	19.126.000	19.126.000	'220951302006540	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
238	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/RPTSP/15/4/2022	12-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Perencanaan Renovasi PTSP TA 2022	2010101001	1	16.727.000	16.727.000	'220951302006597	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
239	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/RRDKPT/15/4/2022	11-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Perencanaan Renovasi Pengecatan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Rumah Dinas	2010101001	1	19.131.000	19.131.000	'220951302006535	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
240	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/RRK/12/4/2022	28-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Perencanaan Renovasi Ruang Kerja	4010101001	1	16.727.000	16.727.000	'220951302007904	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
241	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/WKMRD/15/5/2022	25-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pengawasan Renovasi Kusen dan Mekanikal Elektrikal Rumah Dinas	4010201001	1	15.870.000	15.870.000	'220951302009980	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
242	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/WPRD/15/6/2022	23-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pengawasan Renovasi Pengecetan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Rumah Dinas	4010201001	1	15.852.000	15.852.000	'220951302010586	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
243	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/WPTSP/15/6/2022	13-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pengawasan Renovasi PTSP Pengadilan Tinggi Bandung	4010101001	1	13.953.000	13.953.000	'220951302010052	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
244	'00501	Jawa Barat	'097500	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	PPK/PTB/WRK/12/6/2022	10-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pengawasan Renovasi Ruang Kerja	4010101001	1	13.967.000	13.967.000	'220951302010951	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang rumah negara. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru tanah yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada kode 4010101001 barang rumah negara
245	'00501	Jawa Barat	'097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	KT/TSM/G01	'04-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 04 JULI 2022	3050199999	1	360.750	360.750	'220951304000627	Merupakan belanja modal peralatan disabilitas dengan nilai dibawah kapitalisasi. Sudah ditindaklanjuti dengan pengungkapan CaLK, karena tidak bisa revisi anggaran kode akun karena melewati waktu dan sudah dibayarkan, serta tidak bisa koreksi SPM karena menyatu dalam satu SPM antara peralatan disabilitas dengan nilai dibawah dan diatas kapitalisasi
246	'00501	Jawa Barat	'097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	KT/TSM/G01	'04-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 04 JULI 2022	3050199999	1	475.030	475.030	'220951304000627	Merupakan belanja modal peralatan disabilitas dengan nilai dibawah kapitalisasi. Sudah ditindaklanjuti dengan pengungkapan CaLK, karena tidak bisa revisi anggaran kode akun karena melewati waktu dan sudah dibayarkan, serta tidak bisa koreksi SPM karena menyatu dalam satu SPM antara peralatan disabilitas dengan nilai dibawah dan diatas kapitalisasi
247	'00501	Jawa Barat	'097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	KT/TSM/G01	'04-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 04 JULI 2022	3050199999	4	850.000	3.400.000	'220951304000627	Merupakan belanja modal peralatan disabilitas dengan nilai dibawah kapitalisasi. Sudah ditindaklanjuti dengan pengungkapan CaLK, karena tidak bisa revisi anggaran kode akun karena melewati waktu dan sudah dibayarkan, serta tidak bisa koreksi SPM karena menyatu dalam satu SPM antara peralatan disabilitas dengan nilai dibawah dan diatas kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
248	'00501	Jawa Barat	'097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	KT/TSM/G01	'04-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 04 JULI 2022	3070108161	1	622.220	622.220	'220951304000627	Merupakan belanja modal peralatan disabilitas dengan nilai dibawah kapitalisasi. Sudah ditindaklanjuti dengan pengungkapan CaLK, karena tidak bisa revisi anggaran kode akun karena melewati waktu dan sudah dibayarkan, serta tidak bisa koreksi SPM karena menyatu dalam satu SPM antara peralatan disabilitas dengan nilai dibawah dan diatas kapitalisasi
249	'00501	Jawa Barat	'097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028	30-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PERALATAN FASILITAS KANTOR PN BEKASI	3070108161	1	700.000	700.000	'221711301007711	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
250	'00501	Jawa Barat	'097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028	30-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PERALATAN FASILITAS KANTOR PN BEKASI	3070108161	1	300.000	300.000	'221711301007711	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
251	'00501	Jawa Barat	'097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00057	'06-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Prasarana Pendukung Disabilitas Pengadilan Negeri Bogor	3090402019	2	282.500	565.000	'220231701000082	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
252	'00501	Jawa Barat	'097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00057	'06-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Prasarana Pendukung Disabilitas Pengadilan Negeri Bogor	3070108161	1	395.500	395.500	'220231701000082	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
253	'00501	Jawa Barat	'097670	PENGADILAN NEGERI CIREBON	BAST NONKONTRAKTUAL	'00094	'06-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal (Perencanaan) Renovasi Atap	2010104999	1	55.500.000	55.500.000	'220241701000126	Kesalahan pencatatan kode barang tanah bangunan tempat kerja lainnya, seharusnya menambah nilai gedung bangunan kantor. Sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor
254	'00501	Jawa Barat	'097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004	'05-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Barang Hibah Sarana dan Prasarana Media Center	3050206080	3	370.000	1.110.000		Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
255	'00501	Jawa Barat	'097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00006	'05-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Hibah Penataan Ruang PTSP	3050206080	1	370.000	370.000		Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
256	'00501	Jawa Barat	400704	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	BAST KONTRAKTUAL	'011/BAST-PL/Almadani/XII/2022	14-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Penambahan nilai gedung dan bangunan (Renovasi Ruang Media Center) Pengadilan Agama Tasikmalaya	6070301001	1	106.504.500	106.504.500	'220251302008481	Kesalahan pencatatan renovasi gedung sebagai ATR, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor
257	'00501	Jawa Barat	400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	BAST KONTRAKTUAL	W10-A14/3026/PL.04/VIII/2022	30-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Penggadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Kuningan	3050206058	107	300.000	32.100.000	'221471301004578	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
258	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00094	'06-10-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Keperluan Perkantoran Lainnya berupa Lemari	3050104001	1	899.000	899.000	'220951301021389	Kesalahan penggunaan akun belanja, sudah dilakukan jurnal manual D 521252 K 521119
259	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00094	'06-10-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Keperluan Perkantoran Lainnya berupa Lemari	3050104020	1	949.000	949.000	'220951301021389	Kesalahan penggunaan akun belanja, sudah dilakukan jurnal manual D 521252 K 521119
260	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00097	11-10-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Keperluan Perkantoran Lainnya berupa Distance Meter dan Measuring Tape	3030301141	1	309.900	309.900	'220951301023724	Kesalahan penggunaan akun belanja, sudah dilakukan jurnal manual D 521252 K 521119
261	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00097	11-10-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Keperluan Perkantoran Lainnya berupa Distance Meter dan Measuring Tape	3030301141	1	609.900	609.900	'220951301023724	Kesalahan penggunaan akun belanja, sudah dilakukan jurnal manual D 521252 K 521119
262	'00501	Jawa Barat	401958	PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00100	'02-11-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Keperluan Perkantoran Lainnya berupa Dispenser	3050206036	2	790.000	1.580.000	'220951301023724	Kesalahan penggunaan akun belanja, sudah dilakukan jurnal manual D 521252 K 521119
263	'00501	Jawa Barat	477292	PENGADILAN NEGERI DEPOK	BAST NONKONTRAKTUAL	W11.U21/2698/UM.01.10/VII/2022	22-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Depok	6010101999	1	8.000.000	8.000.000	'220231302010641	Kesalahan pencatatan kode barang, sudah ditindak lanjuti dengan reklas keluar dan reklas masuk ke alat bantu lainnya
264	'00501	Jawa Barat	614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/BAST/IX/2022	'07-09-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PEMASANGAN PINTU OTOMATIS	5031001003	1	8.701.000	8.701.000	'221711302005316	Kesalahan pencatatan kode barang harusnya tidak membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada banguna gedung kantor
265	'00501	Jawa Barat	614706	PENGADILAN AGAMA CIKARANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002/BAST/IX/2022	'07-09-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PEMASANGAN PINTU OTOMATIS	3050105057	1	29.719.000	29.719.000	'221711302005316	Kesalahan pencatatan kode barang harusnya tidak membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada banguna gedung kantor
266	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3180102009	10	27.750	277.500	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
267	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKON TRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3070299999	1	333.000	333.000	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
268	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKON TRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3070299999	1	666.000	666.000	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
269	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKON TRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3070299999	1	166.500	166.500	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
270	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKON TRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3070299999	1	277.500	277.500	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
271	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKON TRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3070299999	1	777.000	777.000	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
272	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKON TRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3010399999	2	555.000	1.110.000	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
273	'00501	Jawa Barat	682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	BAST NONKON TRAKTUAL	'151/BAST/CV JAVA PERSADA/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3070299999	1	277.500	277.500	'220251302003146	Merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya dibawah kapitalisasi
274	'00501	Jawa Tengah	'097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00027	19-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Listrik	4010101001	1	680.000	680.000	'221341301009038	sudah dilakukan koreksi pencatatna dan dilakaukan koreksi nilai bertambah
275	'00501	Jawa Tengah	'097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00069	15-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pengadilan Tinggi Semarang TA 2022 sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang nomor W12-U/254/SK-KPA/PB/KU.01/VIII/2022 tanggal 18-08-2022.	3050104014	1	340.000	340.000	'221341701000663	sudah dilakukan koreksi pencatatna dan dilakaukan koreksi nilai bertambah
276	'00501	Jawa Tengah	'097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00069	15-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pengadilan Tinggi Semarang TA 2022 sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang nomor W12-U/254/SK-KPA/PB/KU.01/VIII/2022 tanggal 18-08-2022.	3050104014	1	340.000	340.000	'221341701000663	sudah dilakukan koreksi pencatatna dan dilakaukan koreksi nilai bertambah
277	'00501	Jawa Tengah	'097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	BAST NONKON TRAKTUAL	'00079	15-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Honor Pejabat Pengadaan	3020101003	1	600.000	600.000	'221341701001089	Merupakan honor pejabat pengadaan yang membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
278	'00501	Jawa Tengah	'097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	BAST NONKON TRAKTUAL	'00044	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan TV dan AC Tahun Anggaran 2022	3050204004	2	250.000	500.000	'221631301004557	terjadi kesalahan pencatatan yang seharusnya nilai bertambah, ke aset gedung dan bangunan
279	'00501	Jawa Tengah	'097851	PENGADILAN NEGERI BLORA	BAST NONKON TRAKTUAL	'00049	'02-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran administrasi pengadaan renovasi ruang tahanan tahun anggaran 2022	4010101001	1	3.080.000	3.080.000	'221631301005031	terjadi kesalahan catat dilakukan koreksi, dilakukan pencatatn nilai bertambah ke aset gedung dan banguanan.
280	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00012	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kegiatan Pengadaan Genset Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	3060347002	1	760.000	760.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
281	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00013	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kegiatan Pengadaan Genset Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	3060347002	1	760.000	760.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
282	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00014	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kegiatan Pengadaan Genset Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	3060347002	1	760.000	760.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
283	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00015	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 6 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
284	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00016	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 6 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
285	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00017	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 6 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
286	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 19 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
287	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 19 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
288	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 19 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
289	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 27 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
290	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 27 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
291	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00023	23-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 27 Januari 2022 dalam rangka Pokja ULP Pengadaan Genset PN Rembang	3060347002	1	620.000	620.000	'220971301000469	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
292	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00033	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 17 Februari 2022	4010201007	1	370.000	370.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
293	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00034	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 17 Februari 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
294	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00035	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 17 Februari 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
295	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00036	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 22 Februari 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
296	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 22 Februari 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
297	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00038	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 22 Februari 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
298	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00039	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 8 Maret 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
299	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00040	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 17 Februari 2022	4010201007	1	370.000	370.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
300	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 17 Februari 2022	4010201007	1	370.000	370.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
301	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 17 Februari 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
302	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00043	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 18 Maret 2022	4010201007	1	370.000	370.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
303	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00044	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 18 Maret 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
304	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00045	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang selama 1 hari tgl 18 Maret 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001361	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
305	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00046	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta selama 2 hari tgl 20-21 Maret 2022	4010201007	1	1.060.000	1.060.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
306	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00047	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta selama 2 hari tgl 20-21 Maret 2022	4010201007	1	2.780.000	2.780.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
307	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta selama 2 hari tgl 1820-21 Maret 2022	4010201007	1	1.060.000	1.060.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
308	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00049	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta selama 2 hari tgl 20-21 Maret 2022	4010201007	1	1.060.000	1.060.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
309	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00050	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang dan Jakarta selama 2 hari tgl 28-29 Maret 2022	4010201007	1	1.610.000	1.610.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
310	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00051	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang dan Jakarta selama 2 hari tgl 28-29 Maret 2022	4010201007	1	3.910.000	3.910.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
311	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00052	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Semarang dan Jakarta selama 2 hari tgl 28-29 Maret 2022	4010201007	1	1.060.000	1.060.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
312	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00053	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 13 April 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
313	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00054	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 13 April 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
314	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00055	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 13 April 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
315	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00056	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	4010201007	1	680.000	680.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
316	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00057	18-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Narasumber FGD Pelaksanaan Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang TA 2022 selama 2 jam pada tanggal 11 April 2022	4010201007	1	900.000	900.000	'22097130100136 1	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
317	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00064	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 2 hari tgl 11-12 Mei 2022	4010201007	1	1.570.000	1.570.000	'22097130100196 5	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
318	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00065	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 2 hari tgl 11-12 Mei 2022	4010201007	1	1.870.000	1.870.000	'22097130100196 5	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
319	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00066	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 2 hari tgl 11-12 Mei 2022	4010201007	1	1.570.000	1.570.000	'22097130100196 5	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
320	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00067	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Semarang selama 1 hari tgl 23 Mei 2022	4010201007	1	370.000	370.000	'22097130100196 5	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
321	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00068	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Semarang selama 1 hari tgl 23 Mei 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'22097130100196 5	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
322	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00069	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 23 Mei 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'22097130100196 5	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
323	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 25 Mei 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'22097130100196 5	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
324	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00071	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 25 Mei 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
325	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00072	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Semarang ke Rembang selama 1 hari tgl 25 Mei 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
326	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00073	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Semarang selama 1 hari tgl 3 Juni 2022	4010201007	1	370.000	370.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
327	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00074	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Semarang selama 1 hari tgl 3 Juni 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
328	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00075	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Semarang selama 1 hari tgl 3 Juni 2022	4010201007	1	600.000	600.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
329	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00076	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Jakarta selama 2 hari tgl 6-7 Juni 2022	4010201007	1	1.950.000	1.950.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
330	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00077	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Jakarta selama 2 hari tgl 6-7 Juni 2022	4010201007	1	3.260.000	3.260.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
331	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00078	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Jakarta selama 2 hari tgl 6-7 Juni 2022	4010201007	1	1.610.000	1.610.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
332	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00079	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dari Rembang ke Jakarta selama 2 hari tgl 6-7 Juni 2022	4010201007	1	1.060.000	1.060.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
333	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00080	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	4010201007	1	850.000	850.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
334	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00081	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	4010201007	1	850.000	850.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
335	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00082	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	4010201007	1	850.000	850.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
336	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00083	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Kegiatan Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	4010201007	1	680.000	680.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
337	'00501	Jawa Tengah	'097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	BAST NONKON TRAKTUAL	'00084	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Narasumber Pengelola Teknis Kegiatan Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang TA 2022	4010201007	1	900.000	900.000	'220971301001965	Terjadi kesalahan pada pencatatan BAST nya yang menunjuk langsung nama asetnya
338	'00501	Jawa Tengah	'097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	W12.U27/622/PL.09/6/2022	27-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Temanggung	3090402019	4	480.000	1.920.000	'221151303002574	sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk dengan kode dengan kode akun yang benar, tetapi tetap muncul dikarenakan nilai perolehannya dibawah kapitalisasi
339	'00501	Jawa Tengah	'097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	W12.U27/622/PL.09/6/2022	27-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Temanggung	3090402019	4	180.000	720.000	'221151303002574	sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk dengan kode dengan kode akun yang benar, tetapi tetap muncul dikarenakan nilai perolehannya dibawah kapitalisasi
340	'00501	Jawa Tengah	'097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	W12.U27/622/PL.09/6/2022	27-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Temanggung	3090402019	4	325.000	1.300.000	'221151303002574	sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk dengan kode dengan kode akun yang benar, tetapi tetap muncul dikarenakan nilai perolehannya dibawah kapitalisasi
341	'00501	Jawa Tengah	'097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	BAST NONKON TRAKTUAL	W12.U27/622/PL.09/6/2022	27-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Temanggung	3090402019	4	250.000	1.000.000	'221151303002574	sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk dengan kode dengan kode akun yang benar, tetapi tetap muncul dikarenakan nilai perolehannya dibawah kapitalisasi
342	'00501	Jawa Tengah	'098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	BAST NONKON TRAKTUAL	'00072	30-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Administrasi Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadaan	4010101001	1	400.000	400.000	'221301701000258	Merupakan biaya administrasi pengadaan Sarpras yang membentuk NUP barus seharusnya menambah nilai . sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
343	'00501	Jawa Tengah	'098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	BAST NONKONTRAKTUAL	'00073	30-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Administrasi Pengadaan PC Kepaniteraan dan Printer	3100102001	1	500.000	500.000	'221301701000258	Merupakan biaya administrasi pengadaan Sarpras yang membentuk NUP barus seharusnya menambah nilai . sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah
344	'00501	Jawa Tengah	'098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	BAST NONKONTRAKTUAL	'00077	30-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Administrasi Pengadaan Pengadaan Saran Disabilitas Pengadilan	3070112999	1	400.000	400.000	'221301701000258	Merupakan biaya administrasi pengadaan Sarpras yang membentuk NUP barus seharusnya menambah nilai . sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah
345	'00501	Jawa Tengah	'098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	BAST NONKONTRAKTUAL	'00078	30-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Administrasi Pengadaan Meubelair PTSP dan Meja Kursi Sidang	3050201014	1	400.000	400.000	'221301701000258	Merupakan biaya administrasi pengadaan Sarpras yang membentuk NUP barus seharusnya menambah nilai . sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah
346	'00501	Jawa Tengah	'098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00007	10-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	www	3010399999	20	1.000.000	20.000.000	'221641701000028	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan
347	'00501	Jawa Tengah	'098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	BAST NONKONTRAKTUAL	W12.U26/413/PL.03/4/2022	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Konsultan Perencanaan pekerjaan prasarana disabilitas pengadilan	2010104999	1	2.500.000	2.500.000	'221641303000261	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan
348	'00501	Jawa Tengah	'098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	BAST NONKONTRAKTUAL	W12.U26/519/PL.03/4/2022	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan pengadaan prasarana disabilitas pengadilan SPK No.W12.U26/440/KU.01/4/2022. Tanggal 1 April 2022. BAST No.W12.U26/519/PL.08/4/2022. Tanggal 21 April 2022.	2010104999	1	26.000.000	26.000.000	'221641303000259	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan
349	'00501	Jawa Tengah	'098040	PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA	BAST NONKONTRAKTUAL	W12.U26/520/PL.08/4/2022	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengawas pekerjaan pengadaan prasarana disabilitas pengadilan	2010104999	1	1.500.000	1.500.000	'221641301000899	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan
350	'00501	Jawa Tengah	400905	PENGADILAN AGAMA BATANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A12/2787/PL.08/XI/2022	'08-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	'1 (satu) Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Renovasi Pagar Keliling Pengadilan Agama Batang Tahun Anggaran 2022	4010101001	1	7.980.000	7.980.000	'220721301003815	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan Perolehan lainnya KDP.
351	'00501	Jawa Tengah	400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00009	28-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	4010101001	1	680.000	680.000	'221341301022250	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan Perolehan lainnya KDP.
352	'00501	Jawa Tengah	400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	28-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa jilid dokumen	4010101001	1	70.000	70.000	'221341301022250	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan Perolehan lainnya KDP.
353	'00501	Jawa Tengah	400911	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A1/5962/PL.01/XI/2022	'07-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pembangunan Ruang Tunggu Sidang pada Pengadilan Agama Semarang	4010101001	1	3.950.000	3.950.000	'221341301020128	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru dan Perolehan lainnya KDP.
354	'00501	Jawa Tengah	400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	BAST KONTRAKTUAL	W11-A13/2301/PL.01/11/2022	11-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Perencana Perorangan Kegiatan Pavingisasi Halaman Kantor PA Salatiga	7010101002	1	1.000.000	1.000.000	'221341301020850	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru KDP peralatan dan mesin seharusnya menggunakan kode barang KDP gedung dan bangunan.
355	'00501	Jawa Tengah	400920	PENGADILAN AGAMA SALATIGA	BAST KONTRAKTUAL	W11-A13/2400/KU.01/11/2022	22-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Jasa Konsultan Pengawas Pavingisasi Halaman Kantor PA Salatiga	7010101002	1	1.000.000	1.000.000	'221341301021894	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sehingga membentuk NUP baru KDP peralatan dan mesin seharusnya menggunakan kode barang KDP gedung dan bangunan.
356	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00007	25-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal peralatan dan mesin berupa konsumsi rapat	7010101005	20	52.000	1.040.000	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
357	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00008	25-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal peralatan dan mesin berupa perjalanan dinas pokja	7010101005	1	370.000	370.000	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
358	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00009	25-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal peralatan dan mesin berupa perjalanan dinas pokja	7010101005	1	370.000	370.000	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
359	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	25-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal peralatan dan mesin berupa perjalanan dinas pokja	7010101005	1	740.000	740.000	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
360	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00011	'01-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Kendal ke Semarang tgl 3-4 Februari 2022	7010101005	1	1.389.500	1.389.500	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
361	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012	'01-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Kendal ke Kab. Semarang tgl 3-4 Februari 2022	7010101005	1	1.759.500	1.759.500	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
362	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	'01-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Kendal ke Kab. Semarang tgl 3-4 Februari 2022	7010101005	1	1.389.500	1.389.500	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
363	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00014	'01-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Kendal ke Kab. Semarang tgl 3-4 Februari 2022	7010101005	1	1.538.500	1.538.500	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
364	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015	'01-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Kendal ke Semarang tgl 3-4 Februari 2022	7010101005	1	1.389.500	1.389.500	'221341301001803	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
365	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	'01-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Kendal ke Semarang tgl 3-4 Februari 2022	7010101005	1	1.389.500	1.389.500	'221341301002054	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
366	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	'02-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal administrasi proyek berupa kertas HVS, dll	7010101005	1	511.000	511.000	'221341301002054	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
367	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	'04-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Semarang ke Kendal tgl 2 Februari 2022	7010101005	1	370.000	370.000	'221341301002054	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
368	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	'04-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Kejen ke Kendal tgl 2 Februari 2022	7010101005	1	370.000	370.000	'221341301002054	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
369	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020	'04-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja perjalanan dinas Banjarnegara ke Kendal tgl 2 Februari 2022	7010101005	1	370.000	370.000	'221341301002054	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
370	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST NONKONTRAKTUAL	'00023	18-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal peralatan dan mesin berupa administrasi proyek (Honor POKJA)	7010101005	1	2.280.000	2.280.000	'221341301003606	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
371	'00501	Jawa Tengah	400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	BAST KONTRAKTUAL	W11-A7/5416/PL.01/XI/2022	'07-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perencanaan Perluasan Ruang Tunggu Sidang pada Pengadilan Agama Kendal	4010101001	1	8.980.000	8.980.000	'221341301020500	Sudah dilakukan koreksi pencatatan
372	'00501	Jawa Tengah	400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00007	28-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	ADMINISTRASI PENGADAAN MEUBELAIR	3050201004	3	282.000	846.000	'221631301001428	sudah dilakukan koreksi penvatatan di semester I di bulan april
373	'00501	Jawa Tengah	400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021	28-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	belanja pembelian meja kerja kayu (ekstrakompetabel)	3050201002	1	1.494.000	1.494.000	'221631701000138	sudah dilakukan koreksi penvatatan di semester II di bulan april
374	'00501	Jawa Tengah	400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	BAST NONKONTRAKTUAL	'13 Desember 2022	13-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Barang Yaitu Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai SK KPA Jepara Nomor: W11-A17/1854/Kp.04.5/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021	3050201002	1	680.000	680.000	'221291301008840	Honor pejabat pengadaan belanja modal peralatan mesin karena spm nya terpisah sehinnga tidak masuk ke dalam belanja modalnya,
375	'00501	Jawa Tengah	401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	BAST KONTRAKTUAL	W11-A10/4834/PL.01/XI/2022	'08-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Renovasi Ruang PTSP Kantor Pengadilan agama Kebumen Kelas IA	4010101001	1	5.150.000	5.150.000	'220271303001489	sudah dilakukan koreksi pencatatan berkurang pada akun 4.01.01 mencatata pengembangan KDP
376	'00501	Jawa Tengah	401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	BAST KONTRAKTUAL	W11-A25/3021/PL.01/XII/2022	20-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubeliar Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2022.	3050201003	8	700.000	5.600.000	'221481303002476	Nilai aset pengadaan meubelair pengadilan agama boyolali tahun 2022 dengan kode barang 3050201003 ursi besi/metal nup 321-328 sejumlah 8 unit dengan harga per unitnya sebesar 700000 dengan total harga 5600000 dikategorikan barang ekstrakomptabel karena nilai aset dibawah kapitalisasi.
377	'00501	Jawa Tengah	401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	'01/honorAC/X/2022	'07-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Pejabat Pengadaan AC Split	3050204004	1	680.000	680.000	'220281303012470	terdapat temuan akun vs bmn terdapat belanja 532311 68000 belnja administrasi pengadaan dan belnja perjalanan dinas AC Split sebesar 680000 merupakan pembayaran honor pejabat pengadaan pembelian AC Split unutk satu orang
378	'00501	Jawa Tengah	401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	W11-A31/2712/KU.01/VIII/2022	15-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SPD Pejabat Pengadaan Tanggal 15 Agustus 2022	3050204999	2	370.000	740.000	'220281303012586	Aset pendingin lainya sebesar 740000 nilai tersebut merupakan perjalanan dinas pejabat pengadaan aset pendingin lainya sebanyak 2 kali perjalanan dengan nilai masing-masing sebesar 370000
379	'00501	Jawa Tengah	402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	BAST KONTRAKTUAL	W11-A33/3738/PL.01/IX/2022	16-09-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Konsultan Perencana Renovasi Pagar Kantor Pengadilan Agama Ambarawa Tahun Anggaran 2022	4040104001	1	8.950.000	8.950.000	'221341301017078	Terdapat keasalahan pencatatan kode barang BMN tercatat semua pagar permanen senialai 8950000 telah dilakakan koreksi pencatatan pagar permanen 4040104001 senilai 8950000 dan perolehan laninnya KDP 701010100 Senilai 8950000, setetlah dikoreksi BMN yang tercatat menjadi perolehan lainyya KDP 701010100 SENILAI 8950000
380	'00501	Jawa Tengah	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A/5235.a/PL.01/XI/2022	28-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4010132999	1	4.000.000	4.000.000	'221341302009281	Terjadi perbaikan pencatatan laporan dan koreksi perubahan nilai bertambah BMN karena kesalahan pencatatan aset pada perekaman sebelumnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
381	'00501	Jawa Tengah	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A/5577.a/PL.01/XII/2022	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PERENCANAAN PERBAIKAN ATAP PARKIR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4010101001	1	4.000.000	4.000.000	'221341302010333	Terjadi perbaikan pencatatan laporan dan koreksi perubahan nilai bertambah BMN karena kesalahan pencatatan aset pada perekaman sebelumnya
382	'00501	Jawa Tengah	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A/5579.a/PL.01/XII/2022	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN PERENCANAAN PERBAIKAN PAVING HALAMAN KANTOR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4010101001	1	4.000.000	4.000.000	'221341302010325	Terjadi perbaikan pencatatan laporan dan koreksi perubahan nilai bertambah BMN karena kesalahan pencatatan aset pada perekaman sebelumnya
383	'00501	Jawa Tengah	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A/5715/PL.01/XII/2022	16-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGAWASAN PEMBANGUNAN PRASARANA DISABILITAS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4010132999	1	4.000.000	4.000.000	'221341302010362	Terjadi perbaikan pencatatan laporan dan koreksi perubahan nilai bertambah BMN karena kesalahan pencatatan aset pada perekaman sebelumnya
384	'00501	Jawa Tengah	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A/5727/PL.01/XII/2022	16-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN PENGAWASAN PERBAIKAN PAVING HALAMAN KANTOR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4010101001	1	3.950.000	3.950.000	'221341302010360	Terjadi perbaikan pencatatan laporan dan koreksi perubahan nilai bertambah BMN karena kesalahan pencatatan aset pada perekaman sebelumnya
385	'00501	Jawa Tengah	402964	PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	BAST KONTRAKTUAL	W11-A/5739/PL.01/XII/2022	16-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN PENGAWASAN PERBAIKAN ATAP PARKIR PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4010101001	1	3.950.000	3.950.000	'221341302010361	Terjadi perbaikan pencatatan laporan dan koreksi perubahan nilai bertambah BMN karena kesalahan pencatatan aset pada perekaman sebelumnya
386	'00501	Jawa Tengah	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	BAST KONTRAKTUAL	W11-1/1756/PL.04/IV/2022	'03-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengawasan Renovasi Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Agama Mungkid	8010101999	1	10.000.000	10.000.000	'221151302000660	Terdjadi kesalahan pencatatan aset pada detail BAST pada model komitmen aplikasi sakti, kesalahan tersebut berupa pencatatan aset tak berwujud lainya yang seharusnya di catatat dalam konstruksi dalam pengerjaan berupa renovasi ruang tunggu sidang. dikarenakan hal tersebut kami kami telah melakukan koreksi perubahan nilai menjadi gedung dan bangunan dalam pengerjaan yang di rekam pada tanggal 10 juni 2022, sehingga dengan kesalahan pencatatn tersebut menyebabkan adnaya koreksi aset tetap no revaluasi
387	'00501	Jawa Tengah	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	BAST KONTRAKTUAL	W11-A1/1752/PL.04/I/2022	'03-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan Agama Mungkid TA 2022	3070112999	1	30.000.000	30.000.000	'221151302000656	Terjadi kesalahan pencatatan aset pada detail BAST dimodul komitmen aplikasi sakti, kesalahan tersebut berupa koreksi pencatatan aset kode BMN untuk pengadaan prasaraja disabilitas pengadilan agama mungkid sebagai alat medis dan rehabilitasi lainnya.
388	'00501	Jawa Tengah	403021	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	BAST KONTRAKTUAL	W11.A30/4498/PL.01/XII/2022	20-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN TAMBAH DAYA LISTRIK PENGADILAN AGAMA MUNGKID	6070301001	1	194.933.000	194.933.000	'221151303009654	karena kesalahan pencatatan aset pada detail BAST pada modul komitmen pada aplikasi sakti. kesalahan tersebut berupa kesalahan pencatatan aset kode BMN untuk pengadan daya tambah listrik pengadilan agama mungkid sebagaia gedung bangunan dalam renovasi
389	'00501	Jawa Timur	'098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pembayaran paket meeting halfday untuk kegiatan kualifikasi Pengadaan konsultasi Pengawas	4010101001	1	3.380.000	3.380.000	'221351301009254	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
390	'00501	Jawa Timur	'098104	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00053	30-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran paket half meeting sesuai rincian terlampir	4010101001	1	4.732.000	4.732.000	'221351301011209	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
391	'00501	Jawa Timur	'098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	BAST KONTRAKTUAL	W14.U29/2417/PL.01/12/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pekerjaan Rumah Genset Pada Pengadilan Negeri Tuban	4010130005	1	54.854.000	54.854.000	'221661301002654	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
392	'00501	Jawa Timur	'098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'014LS/098146/2022	24-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Keperluan Administrasi Proyek Pengelola Kegiatan Renovasi Pagar Rumah Dinas	4010202007	1	14.990.550	14.990.550	'220731301002669	Terdapat belanja akun 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
393	'00501	Jawa Timur	'098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	BAST KONTRAKTUAL	W14-U30/100/PL.01/2/2022	'09-02-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Perkerjaan Jasa Konsultasi badan Usaha Konsultan Perencana Renovasi Pagar Rumah dinas	4010202007	5	6.912.400	34.562.000	'220731301000347	Terdapat belanja akun 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
394	'00501	Jawa Timur	'098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	BAST KONTRAKTUAL	W14-U30/97/PL.01/2/2022	'09-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Konsultan Perencanaan Perluasan Gedung Arsip, Pos Jaga, dan Pagar	4010101001	1	17.500.000	17.500.000	'220731301000346	Terdapat belanja akun 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
395	'00501	Jawa Timur	'098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	BAST KONTRAKTUAL	W14-U30/97/PL.01/2/2022	'09-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Konsultan Perencanaan Perluasan Gedung Arsip, Pos Jaga, dan Pagar	4010113001	1	17.500.000	17.500.000	'220731301000346	Terdapat belanja akun 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
396	'00501	Jawa Timur	'098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	BAST KONTRAKTUAL	W14-U30/97/PL.01/2/2022	'09-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Konsultan Perencanaan Perluasan Gedung Arsip, Pos Jaga, dan Pagar	4010101001	1	24.510.000	24.510.000	'220731301000346	Terdapat belanja akun 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
397	'00501	Jawa Timur	'098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	BAST KONTRAKTUAL	'22.50/IV/BAST/Pnr.Grs/2022	22-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Pengadaan jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	6070301001	1	47.200.000	47.200.000	'221651301004026	Terdapat belanja akun 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan namun input kode barang ATR 6070301001
398	'00501	Jawa Timur	'098188	PENGADILAN NEGERI JOMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00035	20-07-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembelian Tiang Bendera Dalam Ruangan	3050206030	4	275.000	1.100.000	'220981301008032	Terdapat pembelian barang peralatan dan mesin ektrakomtabel menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
399	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	BAST NONKONTRAKTUAL	W14-U4/1340.KMR.DSBL/PL.01/8/2022	26-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Untuk Pengguna Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Kediri TA. 2022	6070301001	1	29.760.488	29.760.488	'220341301008672	Terdapat belanja akun 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan namun input kode barang ATR 6070301001
400	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00030	11-07-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembayaran lisensi zoom bulan Mei sampai Juni 2022 kantor PN Malang.	3060102132	2	751.292	1.502.584	'220321301016707	Terdapat sewa lisensi Zoom menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
401	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'002/PNKW/INV/VIII/2022	'09-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa Renovasi Ruang Sidang Kartika di PN Malang sesuai kwitansi nomor Invoice 002/PNKW/INV/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.	3050203999	1	917.280	917.280	'220321301019717	Terdapat Akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya tidak dilakukan pendetilan pada modul komitmen
402	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'002/PNKW/INV/VIII/2022	'09-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa Renovasi Ruang Sidang Kartika di PN Malang sesuai kwitansi nomor Invoice 002/PNKW/INV/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.	4010124999	1	450.000	450.000	'220321301019717	Terdapat Akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya tidak dilakukan pendetilan pada modul komitmen
403	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'002/PNKW/INV/VIII/2022	'09-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa Renovasi Ruang Sidang Kartika di PN Malang sesuai kwitansi nomor Invoice 002/PNKW/INV/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.	4010124999	1	500.000	500.000	'220321301019717	Terdapat Akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya tidak dilakukan pendetilan pada modul komitmen
404	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'002/PNKW/INV/VIII/2022	'09-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa Renovasi Ruang Sidang Kartika di PN Malang sesuai kwitansi nomor Invoice 002/PNKW/INV/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.	4010128022	1	2.582.496	2.582.496	'220321301019717	Terdapat Akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya tidak dilakukan pendetilan pada modul komitmen
405	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'002/PNKW/INV/VIII/2022	'09-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa Renovasi Ruang Sidang Kartika di PN Malang sesuai kwitansi nomor Invoice 002/PNKW/INV/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.	7010101003	1	18.065.124	18.065.124	'220321301019717	Terdapat Akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya tidak dilakukan pendetilan pada modul komitmen
406	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'002/PNKW/INV/VIII/2022	'09-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa Renovasi Ruang Sidang Kartika di PN Malang sesuai kwitansi nomor Invoice 002/PNKW/INV/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.	7010101003	1	2.476.639	2.476.639	'220321301019717	Terdapat Akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya tidak dilakukan pendetilan pada modul komitmen
407	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/INV/PN/ARGOPURO/VIII/2022	23-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang berupa pengadaan sarana Disabilitas di kantor PN Malang berdasarkan kwitansi nomor 006/INV/PN/ARGOPURO/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.	3050105095	1	460.650	460.650	'220321302007797	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
408	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/INV/PN/ARGOPURO/VIII/2022	23-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang berupa pengadaan sarana Disabilitas di kantor PN Malang berdasarkan kwitansi nomor 006/INV/PN/ARGOPURO/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.	3050105095	13	183.150	2.380.950	'220321302007797	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
409	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/INV/PN/ARGOPURO/VIII/2022	23-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang berupa pengadaan sarana Disabilitas di kantor PN Malang berdasarkan kwitansi nomor 006/INV/PN/ARGOPURO/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.	3090402019	1	244.200	244.200	'220321302007797	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
410	'00501	Jawa Timur	'098331	PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'021/SM.INV/PN-KD/VIII/2022	'03-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan Negeri Kraksaan Tahun 2022 berupa pemasangan lantai difabilitas sesuai nomor: 021/SM.INV/PN-KD/VIII/2022 tgl 3 Agustus 2022	6020202006	200	149.595	29.919.000	'220351301004825	Terdapat belanja akun 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan namun input kode barang ATR 6020202006
411	'00501	Jawa Timur	'098409	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	BAST KONTRAKTUAL	W14.U15/84/PL.01/11/2022	16-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi 8 (Delapan) Unit Rumah Dinas Kantor Pengadilan Negeri Sumenep	7010101002	1	735.150.883	735.150.883	'220361301010044	Terdapat belanja akun 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan menggunakan kode barang KDP 7010101002
412	'00501	Jawa Timur	'098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00231	23-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Biaya pembelian perekam suara pada Shopee	3050105052	1	1.102.000	1.102.000	'220361301010074	Terdapat Akun belanja 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel namun dengan nilai di atas kapitalisasi
413	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00064	'08-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal untuk sarana disabilitas	3050199999	5	138.700	693.500	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
414	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00065	'08-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran biaya belanja modal buku braille	6010101999	1	1.680.000	1.680.000	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Buku Lainnya
415	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00066	'08-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sarana disabilitas meja dan kursi	3050201002	1	591.000	591.000	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
416	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00071	'09-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja sarana disabilitas	3010399999	1	298.500	298.500	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
417	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00072	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sarana disabilitas card holder	3180102002	1	161.900	161.900	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
418	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00072	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sarana disabilitas card holder	3050199999	10	4.630	46.300	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
419	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00072	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sarana disabilitas card holder	3010399999	1	156.800	156.800	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
420	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00072	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sarana disabilitas card holder	3180102002	1	591.000	591.000	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
421	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00081	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja persediaan barang Al-Qur'an Braille	6010101999	1	1.460.000	1.460.000	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Buku Lainnya
422	'00501	Jawa Timur	401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00082	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang persediaan	3010399999	1	297.000	297.000	'221351301009571	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
423	'00501	Jawa Timur	401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	BAST KONTRAKTUAL	W13-A7/0363/PL.01/1/2022	11-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Lamongan	7010101002	1	18.536.408	18.536.408	'220731301005565	Terdapat belanja akun 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan menggunakan kode barang KDP 7010101002
424	'00501	Jawa Timur	401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	BAST NONKONTRAKTUAL	W13-A4/3769/PL.04/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Nota Pesanan Nomor W13-A4/3592/PL.04/7/2022 Tanggal 25 Juli 2022 BAST Nomor W13-A4/3769/PL.04/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022	3120204999	1	600.000	600.000	'221311301004275	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
425	'00501	Jawa Timur	401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	BAST NONKONTRAKTUAL	W13-A4/3769/PL.04/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Nota Pesanan Nomor W13-A4/3592/PL.04/7/2022 Tanggal 25 Juli 2022 BAST Nomor W13-A4/3769/PL.04/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022	3070108161	1	750.000	750.000	'221311301004275	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
426	'00501	Jawa Timur	401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	BAST NONKONTRAKTUAL	W13-A4/3769/PL.04/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Nota Pesanan Nomor W13-A4/3592/PL.04/7/2022 Tanggal 25 Juli 2022 BAST Nomor W13-A4/3769/PL.04/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022	3010399999	1	350.000	350.000	'221311301004275	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
427	'00501	Jawa Timur	401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	BAST NONKONTRAKTUAL	W13-A4/3769/PL.04/8/2022	'05-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Nota Pesanan Nomor W13-A4/3592/PL.04/7/2022 Tanggal 25 Juli 2022 BAST Nomor W13-A4/3769/PL.04/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022	3010399999	1	500.000	500.000	'221311301004275	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
428	'00501	Jawa Timur	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	BAST KONTRAKTUAL	W13-A3/1980/PL.07/6/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Disabilitas) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	3160101001	2	369.000	738.000	'221001301002527	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
429	'00501	Jawa Timur	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	BAST KONTRAKTUAL	W13-A3/1980/PL.07/6/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Disabilitas) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	3010399999	3	160.700	482.100	'221001301002527	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
430	'00501	Jawa Timur	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	BAST KONTRAKTUAL	W13-A3/1980/PL.07/6/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Disabilitas) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	3010399999	3	221.400	664.200	'221001301002527	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
431	'00501	Jawa Timur	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	BAST KONTRAKTUAL	W13-A3/1980/PL.07/6/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Disabilitas) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	3010399999	5	296.000	1.480.000	'221001301002527	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
432	'00501	Jawa Timur	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	BAST KONTRAKTUAL	W13-A3/1980/PL.07/6/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Disabilitas) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	3070108161	2	410.900	821.800	'221001301002527	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
433	'00501	Jawa Timur	401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	BAST KONTRAKTUAL	W13-A3/1980/PL.07/6/2022	17-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Disabilitas) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	3070108161	2	159.900	319.800	'221001301002527	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
434	'00501	Jawa Timur	401457	PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO	BAST KONTRAKTUAL	W13-A24/0517/PL.08/3/2022	15-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Penambahan Daya Listrik pada Pengadilan Agama Probolinggo Tahun Anggaran 2022	5040299999	1	59.999.000	59.999.000	'220351301001180	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan namun input kode barang 5040299999
435	'00501	Jawa Timur	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	16-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa Honor Pejabat Pengadaan (Administrasi Proyek)	4010101001	1	680.000	680.000	'221661701000068	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
436	'00501	Jawa Timur	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	'02-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa snack rapat (Administrasi Proyek)	4010101001	1	320.000	320.000	'221661701000068	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
437	'00501	Jawa Timur	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020	20-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa Honor Pejabat Pengadaan	4010101001	1	680.000	680.000	'221661701000068	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
438	'00501	Jawa Timur	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	BAST KONTRAKTUAL	W13-A6/3665/PL.01/12/2022	13-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Jasa Knstruksi Rehabilitasi Atap (Ruang Arsip) Kantor Pengadilan Agama Tuban Tahun Anggaran 2022	4010101001	1	9.250.000	9.250.000	'221661301002638	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
439	'00501	Jawa Timur	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	BAST KONTRAKTUAL	W13-A6/3669/PL.01/12/2022	13-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Rehabilitasi Atap gedung Kantor Pengadilan Agama Tuban Tahun Anggaran 2022	4010101001	1	780.000	780.000	'221661301002643	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
440	'00501	Jawa Timur	450737	PENGADILAN AGAMA TUBAN	BAST KONTRAKTUAL	W13-A6/3671/PL.01/12/2022	13-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Atap (Ruang Arsip) Kantor Pegadilan Agama Tuban Tahun Anggaran 2022	4010101001	1	6.000.000	6.000.000	'221661301002645	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
441	'00501	Jawa Timur	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi belanja modal gedung dan bangunan An. Oki K. Iskandar	2010101001	1	5.959.440	5.959.440	'221351301012630	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
442	'00501	Jawa Timur	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00043	'06-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi belanja modal gedung dan bangunan An. Subhan J	2010101001	1	5.618.000	5.618.000	'221351301012630	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
443	'00501	Jawa Timur	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	BAST KONTRAKTUAL	W3-TUN/622.12/PL.08/3/2022	11-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja modal sesuai SPK Nomor: W3-TUN/622.09/PL.08/1/2022 Tgl.26 Januari 2022 BAST Nomor:W3-TUN/622.12/PL.08/3/2022 Tgl. 11 Maret 2022	2010101002	5	17.084.100	85.420.500	'221351301009050	Terdapat Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai di bawah kapitalisasi
444	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'03	'01-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Kantor TA. 2022 Nomor:W5.Mil/PLMILTIsby/KP.05.6/VII/2022 tgl 01/08/2022.	3090402019	1	450.000	450.000	'221351302010378	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
445	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'03	'01-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Kantor TA. 2022 Nomor:W5.Mil/PLMILTIsby/KP.05.6/VII/2022 tgl 01/08/2022.	3090402019	1	750.000	750.000	'221351302010378	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
446	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'03	'01-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Kantor TA. 2022 Nomor:W5.Mil/PLMILTIsby/KP.05.6/VII/2022 tgl 01/08/2022.	3160101001	1	525.000	525.000	'221351302010378	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
447	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'03	'01-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Kantor TA. 2022 Nomor:W5.Mil/PLMILTIsby/KP.05.6/VII/2022 tgl 01/08/2022.	3050105008	19	120.000	2.280.000	'221351302010378	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
448	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'03	'01-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Kantor TA. 2022 Nomor:W5.Mil/PLMILTIsby/KP.05.6/VII/2022 tgl 01/08/2022.	3070107022	2	900.000	1.800.000	'221351302010378	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
449	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'03	'01-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Kantor TA. 2022 Nomor:W5.Mil/PLMILTIsby/KP.05.6/VII/2022 tgl 01/08/2022.	3050105056	2	625.000	1.250.000	'221351302010378	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
450	'00501	Jawa Timur	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'05	30-08-2022	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	BAST Prasana Disabilitas TA. 2022 Nomor;W3.Mil/23/PLMiltiSby/KP.05.6/VIII/2022 tgl 30/08/2022	4010101001	1	29.900.000	29.900.000	'221351302012030	Terdapat Akun belanja 532121 - Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin namun input kode barang Jaringan 4010101001, seharusnya input kode bangunan gedung kantor permanen
451	'00501	Jawa Timur	663321	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.Mil02/12/PL.01/17/II/2022	22-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dibayarkan Belanja Modal Berupa Pengadaan Sarana Disabilitas Sesuai Kuitansi Nomor : 005/CAN/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022	3070101999	1	243.000	243.000	'220331301002018	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
452	'00501	Kalimantan Barat	'099070	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'10/PPK/PN.SKW/4/2022	27-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Honorarium Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Printer dan PC Kepaniteraan	3080141194	1	680.000	680.000	'220931304001024	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
453	'00501	Kalimantan Barat	'099113	PENGADILAN NEGERI SANGGAU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	24-10-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembelian barang penggantian inventaris kantor PN Sanggau di CV. Sinar Kota, Dibayarkan Tgl. 24 Oktober 2022	3050201020	2	2.700.000	5.400.000	'221671301004932	Terdapat pembelian barang peralatan dan mesin ektrakomtabel menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
454	'00501	Kalimantan Barat	400194	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	BAST NONKONTRAKTUAL	W17-U7/306/PL.03/III/2022	15-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST	3100102001	1	680.000	680.000	'221171301000469	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
455	'00501	Kalimantan Barat	401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00038	12-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan Kipas Angin Sebanyak 3 Unit	3050204006	3	866.250	2.598.750	'220421301005739	Terdapat pembelian barang peralatan dan mesin ektrakomtabel menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
456	'00501	Kalimantan Barat	401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	27-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan Meja dan Kursi Sebanyak 12 Unit	3050201002	2	956.250	1.912.500	'220421301007532	Terdapat pembelian barang peralatan dan mesin ektrakomtabel menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
457	'00501	Kalimantan Barat	401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	27-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan Meja dan Kursi Sebanyak 12 Unit	3050201002	2	731.250	1.462.500	'220421301007532	Terdapat pembelian barang peralatan dan mesin ektrakomtabel menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
458	'00501	Kalimantan Barat	401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	27-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan Meja dan Kursi Sebanyak 12 Unit	3050201003	4	618.750	2.475.000	'220421301007532	Terdapat pembelian barang peralatan dan mesin ektrakomtabel menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
459	'00501	Kalimantan Barat	401964	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	27-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pengadaan Meja dan Kursi Sebanyak 12 Unit	3050201004	4	258.750	1.035.000	'220421301007532	Terdapat pembelian barang peralatan dan mesin ektrakomtabel menggunakan Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
460	'00501	Kalimantan Barat	402361	PENGADILAN AGAMA PONTIANAK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	19-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	3100102999	1	600.000	600.000	'220421301008372	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
461	'00501	Kalimantan Barat	402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	BAST NONKONTRAKTUAL	'06/SKL/06/BAST/NI/22	30-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Beri Acara Serah Terima Sarana Disabilitas Pengadilan	3120204999	3	400.000	1.200.000	'220931304001836	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
462	'00501	Kalimantan Barat	402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	BAST NONKONTRAKTUAL	'06/SKL/06/BAST/NI/22	30-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Beri Acara Serah Terima Sarana Disabilitas Pengadilan	3120204999	4	400.000	1.600.000	'220931304001836	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
463	'00501	Kalimantan Barat	402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00088	15-08-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Pembelian barang ekstrakomptabel	3050104002	1	1.000.000	1.000.000	'220791301004477	Terdapat Akun belanja 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel namun dengan nilai di atas kapitalisasi
464	'00501	Kalimantan Barat	402406	PENGADILAN AGAMA SINTANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00089	'08-08-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Belanja barang ekstrakomtable	3050206007	1	1.000.000	1.000.000	'220791301004477	Terdapat Akun belanja 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel namun dengan nilai di atas kapitalisasi
465	'00501	Kalimantan Barat	402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00113	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan dalam rangka Pengadaan Tambah Daya Listrik TA 2022 pada Pengadilan Agama Mempawah sesuai BAST Nomor : W14-A3/516/PL.08/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022	5040201003	1	600.000	600.000	'220421301009724	Terdapat Honor pengadaan penambah daya listrik menggunakan Akun belanja 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, dengan input kode barang 5040201003
466	'00501	Kalimantan Barat	402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	BAST KONTRAKTUAL	W14-A3/516/PL.08/V/2022	23-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Tambah Daya Listrik	5040201003	1	54.025.730	54.025.730	'220421304003442	Terdapat Honor pengadaan penambah daya listrik menggunakan Akun belanja 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, dengan input kode barang 5040201003
467	'00501	Kalimantan Barat	402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	BAST KONTRAKTUAL	W14-A3/777/PL.04/VIII/2022	'01-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 1 (satu) unit UPS	3060101048	1	899.800	899.800	'220421302006512	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
468	'00501	Kalimantan Barat	670227	PENGADILAN NEGERI SAMBAS	BAST KONTRAKTUAL	W17-U8/04/SPK/PL.PGK/6/2022	30-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sambas berupa Perbaikan Halaman Depan Kantor	4010101001	1	76.489.297	76.489.297	'220931304001727	Terdapat Akun 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang seharusnya tidak dilakukan pendetilan pada modul komitmen
469	'00501	Kalimantan Selatan	'099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W15.U1/1437/PL.03.06/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN SEKALIGUS 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3060102003	1	450.000	450.000	'220451303002168	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
470	'00501	Kalimantan Selatan	'099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W15.U1/1437/PL.03.06/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN SEKALIGUS 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3090402019	1	272.000	272.000	'220451303002168	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
471	'00501	Kalimantan Selatan	'099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W15.U1/1437/PL.03.06/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN SEKALIGUS 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	3160101001	1	550.000	550.000	'220451303002168	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
472	'00501	Kalimantan Selatan	'099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W15.U1/1437/PL.03.06/4/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN SEKALIGUS 100% ATAS PEKERJAAN PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN	6020202006	176	53.000	9.328.000	'220451303002168	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
473	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00011	'08-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24-25 Maret 2022	4010201007	2	380.000	760.000	'221101301003196	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
474	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012	'08-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24-25 Maret 2022	4010201007	2	380.000	760.000	'221101301003196	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
475	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	'08-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24-25 Maret 2022	4010201007	2	380.000	760.000	'221101301003196	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
476	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00014	'08-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24-25 Maret 2022	4010201007	2	380.000	760.000	'221101301003196	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
477	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015	'08-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Sewa Mobil untuk Keperluan Perjalanan Dinas ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24-25 Maret 2022 (2 hari x Rp. 600.000,-)	4010201007	2	600.000	1.200.000	'221101301003196	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
478	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	'08-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Hotel untuk Keperluan Dinas Administrasi Proyek	4010201007	1	648.000	648.000	'221101301003196	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
479	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	'08-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Sewa Aula Hotel untuk Keperluan Pembuktian Kualifikasi	4010201007	2	750.000	1.500.000	'221101301003196	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
480	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	495.000	495.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
481	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	2	380.000	760.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
482	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	2	750.000	1.500.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
483	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	495.000	495.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
484	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	2	380.000	760.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
485	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	300.000	300.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
486	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pokja Pemilihan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	380.000	380.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
487	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pokja Pemilihan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	398.780	398.780	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
488	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00023	21-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pokja Pemilihan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	2	380.000	760.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
489	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00024	22-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Tanda Terima Honoraroium Pokja Pemilihan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	3	480.000	1.440.000	'221101301004141	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
490	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032	27-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Pemilihan Jasa Konsultan Perencana Rehab Rumah Dinas dan Pagar Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	200.000	200.000	'221101301006085	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
491	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032	27-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Pemilihan Jasa Konsultan Perencana Rehab Rumah Dinas dan Pagar Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	380.000	380.000	'221101301006085	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
492	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00033	28-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Undangan Rapat Pokja Pembangunan / Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Barabai	4010201007	1	380.000	380.000	'221101301006085	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
493	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1525/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN PRASARANA DISABILITAS GEDUNG KANTOR, SPK NO. W15-U4/1382/PL.03.06/PPK/9/2022 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022, BAST NO. W15-U4/1525/PL.03.06/X/2022 TANGGAL 17 OKTOBER 2022	4010101001	1	21.080.000	21.080.000	'221101302000324	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
494	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1525/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN PRASARANA DISABILITAS GEDUNG KANTOR, SPK NO. W15-U4/1382/PL.03.06/PPK/9/2022 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022, BAST NO. W15-U4/1525/PL.03.06/X/2022 TANGGAL 17 OKTOBER 2022	4010101001	6	810.000	4.860.000	'221101302000324	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
495	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1525/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN PRASARANA DISABILITAS GEDUNG KANTOR, SPK NO. W15-U4/1382/PL.03.06/PPK/9/2022 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022, BAST NO. W15-U4/1525/PL.03.06/X/2022 TANGGAL 17 OKTOBER 2022	4010101001	5	810.000	4.050.000	'221101302000324	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi,Koreksi pencatatan belanja modal renovasi rumah dinas dimodul komitmen tercatat rumah negara baru sehingga dikoreksi dimodul aset tetap dengan KDP sesuai NUP rumah dinas yg dilakukan renovasi (KDP sudah Selesai
496	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan pada Pengadilan Negeri Barabai, BAST No. W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, SPK No. W15-U4/1381/PL.03.06/9/2022 tanggal 12 September 2022	3070108161	1	450.000	450.000	'221101302000323	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
497	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan pada Pengadilan Negeri Barabai, BAST No. W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, SPK No. W15-U4/1381/PL.03.06/9/2022 tanggal 12 September 2022	3070299999	1	150.000	150.000	'221101302000323	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
498	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan pada Pengadilan Negeri Barabai, BAST No. W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, SPK No. W15-U4/1381/PL.03.06/9/2022 tanggal 12 September 2022	3050199999	3	150.000	450.000	'221101302000323	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
499	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan pada Pengadilan Negeri Barabai, BAST No. W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, SPK No. W15-U4/1381/PL.03.06/9/2022 tanggal 12 September 2022	3050199999	1	220.000	220.000	'221101302000323	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
500	'00501	Kalimantan Selatan	'099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022	17-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan pada Pengadilan Negeri Barabai, BAST No. W15-U4/1527/PL.03.06/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, SPK No. W15-U4/1381/PL.03.06/9/2022 tanggal 12 September 2022	3070299999	1	300.000	300.000	'221101302000323	Belanja modal peralatan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
501	'00501	Kalimantan Selatan	307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W15-A6/1120/PL.02/8/2022	11-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Penyediaan Jalur disabilitas/Guiding Block	4010101001	1	19.813.500	19.813.500	'220811301003489	Kesalahan pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tercatat dalam kode barang Bangunan Gedung Kantor Permanen'telah dilakukan koreksi nilai pencatatan pada aplikasi SAKTI penghapusan koreksi pencatatan
502	'00501	Kalimantan Selatan	307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	BAST KONTRAKTUAL	W15-A6/607/PL..02/4/2022	11-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Gedung dan Bangunan untuk Pemeliharaan Toilet Disabilitas Kantor Pengadilan Agama Kotabaru	2010104001	1	29.970.000	29.970.000	'220811301001333	Kesalahan pencatatan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan tercatat dalam kode barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah telah dilakukan reklasifikasi pada Aplikasi SAKTI
503	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1707/PL.4/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal berupa Pengadaan Fasilitas Perkantoran PTTUN Banjarmasin	3050105058	1	900.000	900.000	'220451302011375	Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi
504	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1723/PL.4/XII/2022	20-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal berupa Pengadaan Fasilitas Perkantoran (Meubelair Kantor) untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.	3050201003	20	950.000	19.000.000	'220451303009975	Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi
505	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1723/PL.4/XII/2022	20-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal berupa Pengadaan Fasilitas Perkantoran (Meubelair Kantor) untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.	3050201003	14	950.000	13.300.000	'220451303009975	Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi
506	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1723/PL.4/XII/2022	20-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal berupa Pengadaan Fasilitas Perkantoran (Meubelair Kantor) untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.	3050201003	8	800.000	6.400.000	'220451303009975	Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi
507	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1726/PL.04/XII/2022	20-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung berupa Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas PTUN Banjarmasin	4010202007	1	20.350.000	20.350.000	'220451301035013	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
508	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1726/PL.04/XII/2022	20-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung berupa Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas PTUN Banjarmasin	4010202007	1	18.300.000	18.300.000	'220451301035013	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
509	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1726/PL.04/XII/2022	20-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung berupa Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas PTUN Banjarmasin	4010202007	1	20.650.000	20.650.000	'220451301035013	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
510	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1726/PL.04/XII/2022	20-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung berupa Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas PTUN Banjarmasin	4010202007	1	18.500.000	18.500.000	'220451301035013	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
511	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1726/PL.04/XII/2022	20-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung berupa Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas PTUN Banjarmasin	4010202007	1	20.500.000	20.500.000	'220451301035013	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
512	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1741/PL.4/XII/2022	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	4010202007	1	2.750.000	2.750.000	'220451301034987	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
513	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1741/PL.4/XII/2022	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	4010202004	1	3.600.000	3.600.000	'220451301034987	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
514	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1741/PL.4/XII/2022	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	4010202007	1	2.750.000	2.750.000	'220451301034987	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
515	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1741/PL.4/XII/2022	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	4010202007	1	2.750.000	2.750.000	'220451301034987	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
516	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1741/PL.4/XII/2022	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	4010202007	1	2.750.000	2.750.000	'220451301034987	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
517	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1741/PL.4/XII/2022	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	4010202007	1	2.750.000	2.750.000	'220451301034987	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
518	'00501	Kalimantan Selatan	531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	BAST KONTRAKTUAL	W2.TUN3/1741/PL.4/XII/2022	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Modal berupa Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	4010202004	1	3.600.000	3.600.000	'220451301034987	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi
519	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'002	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA PENGADAAN 1 PAKET SARANA DISABILITAS SESUAI KUITANSI NOMOR 0035/TM-Kw/IX/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN	3010399999	4	500.600	2.002.400	'220451301024342	Belanja modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
520	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'002	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA PENGADAAN 1 PAKET SARANA DISABILITAS SESUAI KUITANSI NOMOR 0035/TM-Kw/IX/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN	3150303058	1	281.625	281.625	'220451301024342	Belanja modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
521	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'002	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA PENGADAAN 1 PAKET SARANA DISABILITAS SESUAI KUITANSI NOMOR 0035/TM-Kw/IX/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN	3160101001	2	563.250	1.126.500	'220451301024342	Belanja modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
522	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'002	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA PENGADAAN 1 PAKET SARANA DISABILITAS SESUAI KUITANSI NOMOR 0035/TM-Kw/IX/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN	3070108161	1	964.920	964.920	'220451301024342	Belanja modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
523	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'002	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA PENGADAAN 1 PAKET SARANA DISABILITAS SESUAI KUITANSI NOMOR 0035/TM-Kw/IX/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN	3070108161	2	630.840	1.261.680	'220451301024342	Belanja modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
524	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'002	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA PENGADAAN 1 PAKET SARANA DISABILITAS SESUAI KUITANSI NOMOR 0035/TM-Kw/IX/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN	3070101005	1	844.875	844.875	'220451301024342	Belanja modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
525	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	'002	29-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL BERUPA PENGADAAN 1 PAKET SARANA DISABILITAS SESUAI KUITANSI NOMOR 0035/TM-Kw/IX/2022 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN	3010399999	2	225.300	450.600	'220451301024342	Belanja modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
526	'00501	Kalimantan Selatan	663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-Mil/38.a/PL.03.06/PPK/V/2022	15-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN PRASARANA DISABILITAS SESUAI SPK NOMOR: W1-Mil/38.a/PL.03.06/PPK/V/2022	2010104001	1	29.980.000	29.980.000	'220451301013864	Kesalahan pencatatan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan tercatat dalam kode barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Telah dilakukan Koreksi Pencatatan
527	'00501	Kalimantan Tengah	'099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W16-U1/1461/KU.01/IV/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS	3070108161	2	575.000	1.150.000	'220431303002856	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
528	'00501	Kalimantan Tengah	'099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W16-U1/1461/KU.01/IV/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS	3070101999	4	750.000	3.000.000	'220431303002856	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
529	'00501	Kalimantan Tengah	'099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W16-U1/1461/KU.01/IV/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS	3070108161	1	650.000	650.000	'220431303002856	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
530	'00501	Kalimantan Tengah	'099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W16-U1/1461/KU.01/IV/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS	3070101146	1	850.000	850.000	'220431303002856	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
531	'00501	Kalimantan Tengah	'099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W16-U1/1461/KU.01/IV/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS	3050199999	2	700.000	1.400.000	'220431303002856	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
532	'00501	Kalimantan Tengah	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00094	28-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya Honor Pejabat Pengadaan Paket Renovasi Pagar Rumah Dinas (nota terlampir)	4010201004	1	680.000	680.000	'220431701001508	terdapat kesalahan pencatatan honor pengadaan gedung, namun tercatat pada gedung ekstra, sudah dilakukan koreksi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
533	'00501	Kalimantan Tengah	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	'006a/BASTB/AMJAYA/VII/2022	19-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan PC Kepaniteraan	3100102001	1	680.000	680.000	'220431303008994	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
534	'00501	Kalimantan Tengah	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W16-U9/502/KP.01.1/3/2022	31-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Belanja Modal Uang Tranportasi Perjalanan Dinas Luar Kota Berdasarkan Surat Tugas Nomor :W16-U9/502/KP.01.1/3/2022 Tanggal 31 Maret 2022	4010101001	1	12.407.900	12.407.900	'220431301007352	terdapat kesalahan pencatatan biaya perjalanan dinas pengadaan gedung yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat pada gedung ekstra, sudah dilakukan koreksi
535	'00501	Kalimantan Tengah	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	BAST NONKONTRAKTUAL	W16-U9/535/KP.01.1/4/2022	'07-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Belanja Modal Uang Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota berdasarkan Surat Tugas Nomor : w16-U9/535/KP.01.1/4/2022 Tanggal 7 April 2022 An. EXMAN VRYANTO.,SE	4010101001	1	360.000	360.000	'220431303002233	terdapat kesalahan pencatatan biaya perjalanan dinas pengadaan gedung yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat pada gedung ekstra, sudah dilakukan koreksi
536	'00501	Kalimantan Tengah	402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	'35/BAST-MCN/VIII-2022	11-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	3180102009	1	90.818	90.818	'220431302005356	kesalahan penggunaan akun belanja, seharusnya menggunakan belanja barang ekstrakomptabel
537	'00501	Kalimantan Tengah	402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	'35/BAST-MCN/VIII-2022	11-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	3180102009	122	90.731	11.069.182	'220431302005356	kesalahan penggunaan akun belanja, seharusnya menggunakan belanja barang ekstrakomptabel
538	'00501	Kalimantan Tengah	402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	'35/BAST-MCN/VIII-2022	11-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan	3180102009	157	120.000	18.840.000	'220431302005356	kesalahan penggunaan akun belanja, seharusnya menggunakan belanja barang ekstrakomptabel
539	'00501	Kalimantan Tengah	402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012	'09-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Genset	3060347002	1	700.000	700.000	'220801301005414	Honor pengadaan genset dibawah kapitalisasi, sudah dilakukan koreksi
540	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028	24-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Belanja Peralatan dan Mesin	3030104003	1	1.000.000	1.000.000	'220801301008356	Kesalahan penggunaan akun belanja, kurang fahamnya satuan kerja pada batas nilai kapitalisasi, untuk penggunaan akun belanja ekstrakomptabel seharusnya belanja aset dibawah 1 juta
541	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'00029	24-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Belanja Peralatan dan Mesin	3100202017	1	1.000.000	1.000.000	'220801301008356	Kesalahan penggunaan akun belanja, kurang fahamnya satuan kerja pada batas nilai kapitalisasi, untuk penggunaan akun belanja ekstrakomptabel seharusnya belanja aset dibawah 1 juta
542	'00501	Kalimantan Tengah	402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	BAST NONKONTRAKTUAL	W16-A3/1116/VII/2022	27-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Genset (Honorarium Genset)	3060347002	1	680.000	680.000	'220441301003752	Honor pengadaan genset dibawah kapitalisasi, sudah dilakukan koreksi
543	'00501	Kalimantan Tengah	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	W16-A/100/KU.03/XI/2022	15-11-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan	4010101001	1	680.000	680.000	'220431301031534	Honor pengadaan dibawah kapitalisasi, sudah dilakukan koreksi
544	'00501	Kalimantan Tengah	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	W16-A/101/KU.03/XI/2022	15-11-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Perencanaan Pembangunan Pos Satpam	4010101001	1	680.000	680.000	'220431301031566	Honor pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
545	'00501	Kalimantan Tengah	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	BAST NONKONTRAKTUAL	W16-A/102/KU.03/XI/2022	15-11-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengawasan Pembangunan Pos Satpam	4010101001	1	680.000	680.000	'220431301031567	Honor pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
546	'00501	Kalimantan Tengah	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W16-A/1175/PL.00/VIII/2022	12-08-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pos Satpam	4010101001	1	7.000.000	7.000.000	'220431302004210	Realisasi pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
547	'00501	Kalimantan Tengah	402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W16-A/1635/PL.00/X/2022	17-10-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pos Satpam	4010101001	1	4.600.000	4.600.000	'220431302005544	Realisasi pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
548	'00501	Kalimantan Tengah	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	'0624/CV-BTK/VI/2022	23-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PERJANJIAN PERENCANAAN PAGAR KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA	4040104001	1	15.096.000	15.096.000	'220431303004822	Realisasi pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
549	'00501	Kalimantan Tengah	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	'1015/CV-BTK/X/2022	31-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PERJANJIAN PERENCANAAN PAGAR KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA	4040104001	1	943.500	943.500	'220431303010787	Realisasi pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
550	'00501	Kalimantan Tengah	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	'1017/CV-BTK/X/2022	31-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PERJANJIAN PERENCANAAN PAGAR KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA	4040104001	1	2.830.500	2.830.500	'220431303010786	Realisasi pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
551	'00501	Kalimantan Tengah	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	'46/ACET/PLK/X/2022	17-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PEKERJAAN PENGAWASAN RENOVASI PAGAR KANTOR PTUN PALANGKA RAYA	4040104001	1	11.900.000	11.900.000	'220431303010901	Realisasi pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
552	'00501	Kalimantan Tengah	578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	BAST KONTRAKTUAL	W2-TUN6/1046/PL.03/XII/2022	13-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN BELANJA MODAL PENAMBAHAN DAYA LISTRIK KANTOR PTUN PALANGKA RAYA	5040299999	1	73.200.000	73.200.000	'220431301036567	Realisasi pengadaan yang seharusnya dicatat KDP, namun tercatat sendiri menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksii
553	'00501	Kalimantan Tengah	672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00047	24-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Honor Pejabat Pengadaan Printer	3080302039	1	200.000	200.000	'220441301006854	honor pengadaan namun dibawah kapitalisasi, sudah dilakukan koreksi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
554	'00501	Kalimantan Timur	'099286	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	27-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Belanja Modal Sarana disabilitas dan Fasilitas Peradilan Pidana Anak	3050206014	1	504.800	504.800	'220461701001502	Hal tersebut terjadi karena pembayaran honor panitia pengadaan menggunakan akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada kegiatan pengadaan Sarana Disabilitas dan Fasilitas Peradilan Pidana Anak. tindak lanjut dengan tetap didetailkan pada modul aset dengan nama alat kantor lainnya
555	'00501	Kalimantan Timur	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032	20-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan Negeri Tenggarong	4010101001	1	680.000	680.000	'220461301021594	terjadi kesalahan pencatatan akun pada bulan oktober, yaitu honor pengadaan prasarana disabilitas, tercatat sebagai pembelian aset baru dan menciptakan nup baru, yaitu 13. tindak lanjutnya yaitu koreksi pencatatan yaitu menghapus NUP tersebut dan melakukan koreksi perubahan nilai bertambah pada NUP 9
556	'00501	Kalimantan Timur	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	29-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honor Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Tenggarong	3050105999	1	660.000	660.000	'220461301024831	terjadi kesalahan pencatatan honor pengadaan sarana disabilitas tercatat sebagai aset baru dan menciptakan nup baru, yaitu 66 pada perkakas lainnya. tindak lanjutnya yaitu koreksi pencatatan untuk menghapus nup baru dan melakukan koreksi perubahan nilai bertambah pada setiap sarana disabilitas,terjadi kesalahan pencatatan honor pengadaan sarana disabilitas tercatat sebagai aset baru dan menciptakan nup baru, yaitu 66 pada perkakas lainnya. tindak lanjutnya yaitu koreksi pencatatan untuk menghapus nup baru dan melakukan koreksi perubahan nilai bertambah pada setiap sarana disabilitas
557	'00501	Kalimantan Timur	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'12/RU-Smd/ST/2022	25-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Tenggarong	3050105999	1	388.500	388.500	'220461302022164	terjadi kesalahan pencatatan atas pengadaan sarana disabilitas nilai barang dibawah kapitalisasi
558	'00501	Kalimantan Timur	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'12/RU-Smd/ST/2022	25-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Tenggarong	3050105999	1	366.300	366.300	'220461302022164	terjadi kesalahan pencatatan atas pengadaan sarana disabilitas nilai barang dibawah kapitalisasi
559	'00501	Kalimantan Timur	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'12/RU-Smd/ST/2022	25-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Tenggarong	3050105999	1	610.500	610.500	'220461302022164	terjadi kesalahan pencatatan atas pengadaan sarana disabilitas nilai barang dibawah kapitalisasi
560	'00501	Kalimantan Timur	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'12/RU-Smd/ST/2022	25-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Tenggarong	3050105999	1	732.600	732.600	'220461302022164	terjadi kesalahan pencatatan atas pengadaan sarana disabilitas nilai barang dibawah kapitalisasi
561	'00501	Kalimantan Timur	'099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'12/RU-Smd/ST/2022	25-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Tenggarong	3050105999	1	499.500	499.500	'220461302022164	terjadi kesalahan pencatatan atas pengadaan sarana disabilitas nilai barang dibawah kapitalisasi
562	'00501	Kalimantan Timur	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W17-A2/1811/PL.01/VII/2022	'06-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa T.A. 2022 Nilai Rp. 680.000	4010101001	1	680.000	680.000	'220471302006457	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 680.000. Hal ini terjadi karena Belanja Modal berupa Honor Pejabat Pengadaan yang membuat NUP baru di Geudng dan Bangunan, sehingga harus dikoreksi manjadi penambahan nilai pada gedung dan bangunan
563	'00501	Kalimantan Timur	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W17-A2/960/PL.04/III/2022	30-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal berupa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa T.A 2022 Berdasarkan Daftar Nominatif 008/KU.01/3/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Nilai Rp. 680.000	3080141194	2	220.000	440.000	'220471302002312	Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 680.000. Hal ini terjadi karena kesalahan pada pamilihan kode barang saat penginputan BAST atas pembayaran honor pejabat Pengadaan yang seharusnya menambah nilai aset P.C Komputer, tetapi di BASTnya memilih kode barang Personal Komputer
564	'00501	Kalimantan Timur	307199	PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W17-A2/960/PL.04/III/2022	30-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal berupa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa T.A 2022 Berdasarkan Daftar Nominatif 008/KU.01/3/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Nilai Rp. 680.000	3080141194	1	240.000	240.000	'220471302002312	Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 680.000. Hal ini terjadi karena kesalahan pada pamilihan kode barang saat penginputan BAST atas pembayaran honor pejabat Pengadaan yang seharusnya menambah nilai aset P.C Komputer, tetapi di BASTnya memilih kode barang Personal Komputer
565	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	BAST NONKONTRAKTUAL	'021/BAST/CV.MK/IV/2022	11-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG	6010101001	1	1.150.000	1.150.000	'220471302002887	Hal tersebut terjadi karena terdapat pembelian Buku Panduan Braille menggunakan akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada kegiatan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan. Tindak lanjutnya tetap didetailakn pada modul aset dengan nama barang Monografi
566	'00501	Kalimantan Timur	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	BAST NONKONTRAKTUAL	W18-U/983/PL.08/III/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	HONOR PEJABAT PENGADAAN B/J PADA PT KALTIM TA 2022	3100203003	1	100.000	100.000	'220461304000017	Hal tersebut terjadi karena terdapat pembayaran honor pejabat pengadaan PC Unit senilai Rp 325.000 dan Printer Rp 100.000 menggunakan akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Tindak lanjutnya BAST honor yang telah direkam oleh Operator Aset sehingga membentuk NUP baru, kemudian dihapuskan dan dilakukan koreksi perubahan nilai aset untuk menambah honor pejabat pengadaan ke harga perolehan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
567	'00501	Kalimantan Timur	400528	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	BAST NONKONTRAKTUAL	W18-U/983/PL.08/III/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	HONOR PEJABAT PENGADAAN B/J PADA PT KALTIM TA 2022	3100102001	1	325.000	325.000	'220461304000017	Hal tersebut terjadi karena terdapat pembayaran honor pejabat pengadaan PC Unit senilai Rp 325.000 dan Printer Rp 100.000 menggunakan akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Tindak lanjutnya BAST honor yang telah direkam oleh Operator Aset sehingga membentuk NUP baru, kemudian dihapuskan dan dilakukan koreksi perubahan nilai aset untuk menambah honor pejabat pengadaan ke harga perolehan.
568	'00501	Kalimantan Timur	401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	BAST KONTRAKTUAL	W17-A11/1539/PL.01/XII/2022	23-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Penajam	6070301001	1	29.500.000	29.500.000	'220471302014487	Hal tersebut dikarenakan terdapat pembelian gedung dan bangunan dalam renovasi pada akun 533121 belanja penambahan nilai gedung dan bangunan pada kegiatan Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan. Tindak lanjutnya dengan non henti guna pembelian gedung dan bangunan dalam renovasi dan selanjutnya dilakukan Koreksi Perubahan Nilai bertambah pada Bangunan Gedung Kantor Permanen
569	'00501	Kalimantan Timur	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	21-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Paket Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (AC) di Lingkungan Pengadilan Negeri Penajam TA. 2022 kepada Sdr. Aprijal Kurniawan, S.H.	3050204004	1	680.000	680.000	'220471701000462	Hal tersebut terjadi karena terdapat Pembayaran Hororarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadilan. Tindak lanjutnya tetap dilakukan pendetailan pada Modul Aset dengan nama barang A.C. Split dan pembuatan jurnal manual pada modul GLP
570	'00501	Kalimantan Utara	'099272	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/LS/VI/2022	28-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal berupa Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadilan Negeri Tarakan Tahun Anggaran 2022	3100102001	1	400.000	400.000	'220481301002874	Hal tersebut terjadi karena terjadi koreksi pencataan terkait honor pengadaan dengan kode 532111. tindak anjutnya adalah tetap didetailkan pada modul aset tetap dengan nama barang P.C. Unit dengan kode barang 3.10.01.02.001
571	'00501	Kalimantan Utara	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00035	28-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Keg. Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara An. Rajib Syahri, S.Kom	3060102135	1	650.000	650.000	'221851701000444	terjadi kesalahan pencatatan honor pengadaan tercatat sebagai aset baru dan menciptakan nup baru. tindak lanjutnya yaitu koreksi pencatatan untuk menghapus nup baru dan melakukan koreksi perubahan nilai bertambah
572	'00501	Kalimantan Utara	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00036	28-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa Keg. Pengadaan Fasilitas Perkantoran An. Rajib Syahri, S.Kom	3050201003	1	760.000	760.000	'221851701000445	terjadi kesalahan pencatatan honor pengadaan tercatat sebagai aset baru dan menciptakan nup baru. tindak lanjutnya yaitu koreksi pencatatan untuk menghapus nup baru dan melakukan koreksi perubahan nilai bertambah
573	'00501	Kalimantan Utara	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	28-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa Keg. Pengadaan Fasilitas Perkantoran An. Jazilatul Humaira, S.H.	3050201003	1	760.000	760.000	'221851701000445	terjadi kesalahan pencatatan honor pengadaan tercatat sebagai aset baru dan menciptakan nup baru. tindak lanjutnya yaitu koreksi pencatatan untuk menghapus nup baru dan melakukan koreksi perubahan nilai bertambah
574	'00501	Kalimantan Utara	417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00038	28-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa Keg. Pengadaan Fasilitas Perkantoran An. Said Muhammad Anwar Musadak, S.H.	3050201003	1	760.000	760.000	'221851701000445	terjadi kesalahan pencatatan honor pengadaan tercatat sebagai aset baru dan menciptakan nup baru. tindak lanjutnya yaitu koreksi pencatatan untuk menghapus nup baru dan melakukan koreksi perubahan nilai bertambah
575	'00501	Kalimantan Utara	682295	PENGADILAN AGAMA NUNUKAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W17-A10/3/PL.04/1/2022	'03-01-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SK Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3100203003	1	200.000	200.000	'221521301000928	hal tersebut terjadi karena terdapat pengadaan peralatan dan mesin berupa printer yang honor pengadaannya terpidah pencairannya pencatatan pada aplikasi Sakti menggunakan akun 595112 (beban aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin). tindak lanjutnya dengan cara melakukan koreksi akun 391116 (koreksi nilai aset tetap non revaluasi)
576	'00501	Kepulauan Riau	108309	PENGADILAN NEGERI BATAM	BAST KONTRAKTUAL	W4.U8/2/BAST/PL.PPK.JR.LST/IV/2022	19-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan Jaringan Listrik dalam Rangka Penyesuaian Kenaikan Daya listrik Kantor Pengadilan Negeri Batam Kelas I A Tahun Anggaran 2022	5030603002	1	160.800.000	160.800.000	'221371302002294	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dengan kode barang 5030603002 dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
577	'00501	Kepulauan Riau	402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A9/255/PL.03/4/2022	'05-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Nota Nomor INV/SIBAJA/2022/0009 Tanggal 2 Maret 2022	3100201009	1	909.090	909.090	'220091302002017	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
578	'00501	Lampung	'099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	BAST KONTRAKTUAL	W9.U1/06.BAST/PL.04/II/2022	25-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG	3090402019	2	385.000	770.000	'220171303000845	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
579	'00501	Lampung	'099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	BAST KONTRAKTUAL	W9.U1/06.BAST/PL.04/II/2022	25-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN SARANA DISABILITAS PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG	3180102009	14	990.000	13.860.000	'220171303000845	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
580	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	15-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Material perbaikan ruang kerja hakim	6010303002	1	1.041.000	1.041.000	'220171301001796	Terdapat kesalahan pencatatan rincian aset pada modul komitmen sehingga membentuk aset NUP baru, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset
581	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00066	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Pembelian Material Rumah Dinas Wakil (kayu)	6010303002	1	1.500.000	1.500.000	'220171301003300	Terdapat kesalahan pencatatan rincian aset pada modul komitmen sehingga membentuk aset NUP baru, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset
582	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00067	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Pembelian material rumah dinas wakil (cat, asbes)	3080107999	1	1.707.000	1.707.000	'220171301003300	Terdapat kesalahan pencatatan rincian aset pada modul komitmen sehingga membentuk aset NUP baru, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset
583	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00068	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Pembelian Material Rumah Dinas Wakil (Cat, GRC, Tiner)	3080107999	1	1.866.000	1.866.000	'220171301003300	Terdapat kesalahan pencatatan rincian aset pada modul komitmen sehingga membentuk aset NUP baru, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
584	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00069	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Pembelian Material Rumah Dinas Wakil (kayu balok dan kasau)	6010303002	1	1.140.000	1.140.000	'220171301003300	Terdapat kesalahan pencatatan rincian aset pada modul komitmen sehingga membentuk aset NUP baru, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset
585	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00072	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Pembelian material rumah dinas wakil (GRC, cat, tiner, kuas, paku, dll)	3080107999	1	4.175.000	4.175.000	'220171301003300	Terdapat kesalahan pencatatan rincian aset pada modul komitmen sehingga membentuk aset NUP baru, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset
586	'00501	Lampung	401911	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN	BAST KONTRAKTUAL	W9.U11/1279/PL.01/2022	19-09-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Gedong Tataan	6070301001	1	89.400.000	89.400.000	'220171303007062	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen sehingga membentuk aset dengan NUP baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barnag yang salah dan koreksi nilai bertambah KDP.
587	'00501	Lampung	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	10-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Penggantian SPPD ke MA an Aziz Iskandar SE	4010101001	1	3.344.000	3.344.000	'221261301000942	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KDP gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah KDP
588	'00501	Lampung	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00002	10-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Penggantian SPPD ke MA an Kartono	4010101001	1	1.850.000	1.850.000	'221261301000942	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KDP gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah KDP
589	'00501	Lampung	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00003	10-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Penggantian SPPD ke MA an Arif AlFurqon, S.Kom	4010101001	1	1.350.000	1.350.000	'221261301000942	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KDP gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah KDP
590	'00501	Lampung	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	19-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Penggantian Biaya SPPD Tanggal 4-6 April 2022 Penelaahan Anggaran di Jakarta	4010101001	1	3.991.000	3.991.000	'221261301002262	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KDP gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah KDP
591	'00501	Lampung	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00062	21-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PENGADAAN FASILITAS MEUBELAIR PA SUKADANA	3050206058	80	712.005	56.960.400	'221261701000392	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
592	'00501	Lampung	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A14/1444/PL.07/12/2022	'09-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pokja Pengadaan Meubelair PA Sukadana Tahun 2022	7010101003	3	1.270.000	3.810.000	'221261305000245	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang KDP harusnya menggunakan KDP Peralatan dan mesin. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang KDP yang salah dan koreksi nilai bertambah atas honor pengadaan meubelair berupa lemari besi.
593	'00501	Lampung	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	BAST KONTRAKTUAL	W8-A14/520/PL.08/3/2022	'04-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA SUKADANA	4010101001	1	18.761.550	18.761.550	'221261303000627	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KDP gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah KDP
594	'00501	Lampung	402355	PENGADILAN AGAMA METRO	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A2/836/PL.06/4/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3010399999	1	322.122	322.122	'221261302000554	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
595	'00501	Lampung	402355	PENGADILAN AGAMA METRO	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A2/836/PL.06/4/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3010399999	5	756.818	3.784.090	'221261302000554	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
596	'00501	Lampung	402355	PENGADILAN AGAMA METRO	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A2/836/PL.06/4/2022	26-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3010399999	1	503.940	503.940	'221261302000554	Terdapat belanja modal peralatan mesin berupa pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
597	'00501	Lampung	559840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'015/AJMM/4/2022	20-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PENGADAAN PRASARANA DISABILITAS	5010109999	1	29.820.675	29.820.675	'220171303002519	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang atas pengadaan Guiding Block Jalan Dan Jembatan , seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan dengan kode barang 401xxxxx. SUdah dilakukan koreksi pecatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah pada gedung dan bangunan.
598	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST KONTRAKTUAL	W8-A7/1223/PL.01/11/2022	16-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Tambah Daya dan Perbaikan Jaringan	5030603999	1	126.697.950	126.697.950	'221161301004560	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan dengan kode barang 401xxx. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
599	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST KONTRAKTUAL	W8-A7/1223/PL.01/11/2022	16-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Tambah Daya dan Perbaikan Jaringan	3030212025	1	35.745.000	35.745.000	'221161301004560	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan dengan kode barang 401xxx. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dan koreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
600	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3010399999	1	909.091	909.091	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
601	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3090402019	1	681.818	681.818	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
602	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3050201003	1	909.091	909.091	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
603	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3050105008	1	227.000	227.000	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
604	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3010399999	1	454.000	454.000	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
605	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	6010101999	1	681.818	681.818	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
606	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3090402019	1	681.818	681.818	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
607	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/493/PL.06/3/2022	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Sarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424541 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/493/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3090402019	1	681.818	681.818	'221161302000516	Terdapat 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan mesin yang nilainya di bawah kapitalisasi
608	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/496/PL.06/3/2022	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424540 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/496/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3080110058	1	272.727	272.727	'221161302000515	Terdapat kesalahan penginputan kode barang pada BAST nomor W8-A7/496/PL.06/3/2022 senilai Rp30.000.000 atas renovasi gedung seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. Atas kesalahan penginputan kode barang BAST tersebut terdapat: ketidaksesuaian akun vs persediaan senilai Rp26.127.273 dan ketidaksesuaian akun vs kode BMN senilai Rp3.872.727. SUdah dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut.
609	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/496/PL.06/3/2022	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424540 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/496/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	4010128022	1	1.250.000	1.250.000	'221161302000515	Terdapat kesalahan penginputan kode barang pada BAST nomor W8-A7/496/PL.06/3/2022 senilai Rp30.000.000 atas renovasi gedung seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. Atas kesalahan penginputan kode barang BAST tersebut terdapat: ketidaksesuaian akun vs persediaan senilai Rp26.127.273 dan ketidaksesuaian akun vs kode BMN senilai Rp3.872.727. SUdah dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut.
610	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/496/PL.06/3/2022	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424540 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/496/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	5020106010	1	1.250.000	1.250.000	'221161302000515	Terdapat kesalahan penginputan kode barang pada BAST nomor W8-A7/496/PL.06/3/2022 senilai Rp30.000.000 atas renovasi gedung seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. Atas kesalahan penginputan kode barang BAST tersebut terdapat: ketidaksesuaian akun vs persediaan senilai Rp26.127.273 dan ketidaksesuaian akun vs kode BMN senilai Rp3.872.727. SUdah dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut.
611	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A7/496/PL.06/3/2022	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasarana Disabilitas sesuai Faktur Nomor 020.003-22.45424540 tanggal 29 Maret 2022, BAST Nomor W8-A7/496/Pl.06/3/2022 tanggal 28 Maret 2022.	3080110058	1	1.100.000	1.100.000	'221161302000515	Terdapat kesalahan penginputan kode barang pada BAST nomor W8-A7/496/PL.06/3/2022 senilai Rp30.000.000 atas renovasi gedung seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan. Atas kesalahan penginputan kode barang BAST tersebut terdapat: ketidaksesuaian akun vs persediaan senilai Rp26.127.273 dan ketidaksesuaian akun vs kode BMN senilai Rp3.872.727. SUdah dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut.
612	'00501	Lampung	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	18-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal berupa pengadaan sarana disabilitas.	3070101999	1	530.000	530.000	'220171301020576	Terdapat kesalahan akun belanja atas pengadaan alat disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
613	'00501	Lampung	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	18-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal berupa pengadaan sarana disabilitas.	3070101999	1	330.000	330.000	'220171301020576	Terdapat kesalahan akun belanja atas pengadaan alat disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
614	'00501	Lampung	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	18-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal berupa pengadaan sarana disabilitas.	3070101999	1	130.000	130.000	'220171301020576	Terdapat kesalahan akun belanja atas pengadaan alat disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
615	'00501	Lampung	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	18-10-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja modal berupa pengadaan sarana disabilitas.	3070106999	1	640.000	640.000	'220171301020576	Terdapat kesalahan akun belanja atas pengadaan alat disabilitas dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
616	'00501	Lampung	614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	BAST NONKONTRAKTUAL	W8-A6/1608/PL.01/10/2022	14-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Barang/Pekerjaan Prasarana Disabilitas Pengadilan Tahun 2022	4010101001	1	10.000.000	10.000.000	'220171301020200	Terdapat akun 533121 Belanja penambahan nilai GB pada modul Komitmen dan sudah di SP2Dkan berupa pengadaan prasarana disabilitas berupa jalan guiding warning block di bawah nilai kapitalisasi. Sesuai instruksi dr auditor, karena akun 533121 masuk ke RUH Modul Aset shg didetailkan dahulu menghasilkan nilai NUP baru NUP 6, dilanjutkan penghapusan nilai thd NUP baru GB dan membukukannya ke akun 595113 sebagai belanja aset ekstrakomptabel GB atas koreksi pencatatan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
617	'00501	Lampung	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	BAST NONKONTRAKTUAL	'0006/LS.01/3/2022	14-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan AGama Gunung Sugih	3010399999	3	900.000	2.700.000	'221261302000258	Terdapat kesalahan akun belanja atas pengadaan alat disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
618	'00501	Lampung	652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	BAST KONTRAKTUAL	W8-A8/2291/PL.01/12/2022	21-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Tambah Daya Listrik	5040299999	1	129.900.000	129.900.000	'221261303002203	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambah nilai gedung dngan kode barang 401xxx. Sudah dilakukan koreksi pencatatn atas kode barang yg salah dan koreksi nilai bertambah pada gedung dan bangunan.
619	'00501	Lampung	652055	PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU	BAST KONTRAKTUAL	W8-A9/1565/PL.01/12/2022	14-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pembangunan rumah Genset dan Pengadaan Panel	4010104999	1	167.824.345	167.824.345	'221161303002845	Terdapat kesalahan akun belanja seharusnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan.
620	'00501	Maluku	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	BAST KONTRAKTUAL	'22.06.02.1104.006767	22-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Namlea	7010101003	1	536.164.646	536.164.646	'220611301005156	kesalahan di Modul komitmen menentukan kode aset operator aset sudah melakukan reklas ke kode yg sesuai
621	'00501	Maluku	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	BAST KONTRAKTUAL	'16/BAST-PWS/PPK/12/2022	'07-12-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket penyedia jasa konsultasi pengawasan pembanguna gedung kantor pengadilan negeri dobo	2010104001	1	230.590.000	230.590.000	'220841303000857	akun belanja modal gedung bangunan tetapi kenapa di catat sebagai aset tanah "Dilakukan Pengembangan KDP pada Aplikasi SAKTI 1. Dilakukan penghapusan pada aset tetap yang direklas keluar menggunakan menu Aset Tetap>>RUH>>Transaksi BMN>>Penghapusan>>Koreksi Pencatatan 2. Dilakukan Perekaman KDP sebagai reklas masuk menggunakan menu Aset Tetap>>RUH>>Transaksi KDP>>Koreksi Perubahan Nilai Bertambah 3. Dilakukan Jurnal Manual pada Modul GLP : (D) 391116 (K) 596111 dengan nilai sesuai jumlah yang direklas tersebut untuk nilai di atas kapitalisasi"
622	'00501	Maluku	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	BAST KONTRAKTUAL	'21/BAST.F/PPK/12/2022	'08-12-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Dobo Tahun Anggaran 2022	2010104001	1	1.041.224.000	1.041.224.000	'220841301007360	akun belanja modal gedung bangunan tetapi kenapa di catat sebagai aset tanah "Dilakukan Pengembangan KDP pada Aplikasi SAKTI 1. Dilakukan penghapusan pada aset tetap yang direklas keluar menggunakan menu Aset Tetap>>RUH>>Transaksi BMN>>Penghapusan>>Koreksi Pencatatan 2. Dilakukan Perekaman KDP sebagai reklas masuk menggunakan menu Aset Tetap>>RUH>>Transaksi KDP>>Koreksi Perubahan Nilai Bertambah 3. Dilakukan Jurnal Manual pada Modul GLP : (D) 391116 (K) 596111 dengan nilai sesuai jumlah yang direklas tersebut untuk nilai di atas kapitalisasi"

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
623	'00501	Maluku	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	BAST KONTRAKTUAL	'26/BAST-PRC/PPK/12/2022	'07-12-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Paket penyedia jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Negeri Dobo	2010104001	1	183.095.154	183.095.154	'220841302001594	akun belanja modal gedung bangunan tetapi kenapa di catat sebagai aset tanah "Dilakukan Pengembangan KDP pada Aplikasi SAKTI 1. Dilakukan penghapusan pada aset tetap yang direklas keluar menggunakan menu Aset Tetap>>RUH>>Transaksi BMN>>Penghapusan>>Koreksi Pencatatan 2. Dilakukan Perekaman KDP sebagai reklas masuk menggunakan menu Aset Tetap>>RUH>>Transaksi KDP>>Koreksi Perubahan Nilai Bertambah 3. Dilakukan Jurnal Manual pada Modul GLP : (D) 391116 (K) 596111 dengan nilai sesuai jumlah yang direklas tersebut untuk nilai di atas kapitalisasi"
624	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	26-08-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya perjalanan Dinas TPP ke Jakarta selama 4 Hari kerja	7010101001	1	9.420.000	9.420.000	'220611701001000	Modul komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
625	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST NONKONTRAKTUAL	'04/KPA.Nla/SK/I/2022	'04-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengangkatan Tim Kegiatan dan Kesektariatan TIM Pembangunan Gedung Kantor dan Pengelola Keuangan	2010101004	1	9.400.000	9.400.000	'220611301001026	Modul komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP)
626	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST NONKONTRAKTUAL	'04a/KPA.Nla/SK/I/2022	'04-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengangkatan Tim Kegiatan dan Kesektariatan TIM Pembangunan Gedung Kantor dan Pengelola Keuangan	2010101004	1	1.900.000	1.900.000	'220611301001064	Modul komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
627	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST NONKONTRAKTUAL	'06/KPA.Nla/SK/2/2022	'01-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor PN. Namlea dan Pengelola DIPA	2010101004	1	9.400.000	9.400.000	'220611301001494	Modul Komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP)
628	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST NONKONTRAKTUAL	'06a/KPA.Nla/SK/2/2022	'01-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengangkatan TIM Pelaksanaan Kegiatan dan Kesektariatan Pembangunan Gedung Kantor	2010101004	1	1.900.000	1.900.000	'220611301001496	Modul Komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
629	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST KONTRAKTUAL	'2/PPK-PN.NLA/PL.01/4/2022	25-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Namlea Satuan Kerja Baru	2010104001	1	5.258.703.000	5.258.703.000	'220611301004496	Modul Komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP) 04 Januari 2022 7010101003 [illegible]
630	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST KONTRAKTUAL	'5/WST-PENGADILAN-NEGERI/IV/2022	25-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pengawasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Namlea	2010104001	1	242.992.800	242.992.800	'220611302001843	Modul Komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP) 04 Januari 2022 7010101003 1.900.000 2 (perolehan Lainnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
631	'00501	Maluku	401930	PENGADILAN NEGERI NAMLEA	BAST KONTRAKTUAL	'5/WST/PN/IV/2022	25-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Namlea Satuan Kerja Baru	2010104001	1	1.752.901.000	1.752.901.000	'220611301005652	Modul Komitmen melakukan pencatatan kontraktual diinput sebagai tanah yang seharusnya itu adalah KDP dengan rincian : 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 pada tahun 2021 sudah terdapat transaksi KDP 7010101003 1 senilai 30.464.956.906 tetapi pada tanggal 18 febuari 2022 dilakukan penginputan koreksi nilai berkurang senilai 30.464.956.906 sehingga KDP 7010101003 1 mempunyai nilai 0 untuk 4 Januari 2022 2010101004 9.400.000 1 4 Januari 2022 2010101004 1.900.000 2 1 Februari 2022 2010101004 9.400.000 3 1 Februari 2022 2010101004 1.900.000 4 25 April 2022 2010104001 5.258.703.000 4 25 April 2022 2010104001 242.992.800 5 25 April 2022 2010104001 1.752.901.000 6 kemudian melakukan pencatatan KDP berdasarkan petunjuk KPPN tanpa memperbaiki kesalahan penginputan Tanah kemudian memunculkan KDP dengan rincian 04 Januari 2022 7010101003 9.400.000 2 (perolehan Lainnya KDP) 04 Januari 2022 7010101003 1.900.000 2 (perolehan Lainnya
632	'00501	Maluku	402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	BAST KONTRAKTUAL	W24-A/1668/PL.04/11/2022	30-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan rumah genset	4010130005	1	140.107.000	140.107.000	'220611301015158	kesalahan penggunaan kode akun berupa 532111 belanja modal peralatan dan mesin tetapi dicatat sebagai gedung dan bangunan. diungkapkan pada calk tahunan 2022
633	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	BAST NONKONTRAKTUAL	'00001	20-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BIAYA ADMINISTRASI PROYEK	2010313999	1	4.600.000	4.600.000	'220621301010921	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk, tapi seharusnya tidak membentuk nup baru sehingga setelah dilakukan reklas masuk ke pagar permanen kemudian dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi nilai bertambah pada pagar permanen yang sudah ada.
634	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	BAST NONKONTRAKTUAL	NO.W28-U2/347/PL.03/1/2022	'03-02-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PEMBAYARAN BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NO.W28-U2/279/PL.03/1/2022 TANGGAL 20 JANUARI 2022, BAP NO.W28-U2/346/PL.03/2/2022 TANGGAL 03 FEBRUARI 2022 DAN BAST NO.W28-U2/347/PL.03/1/2022 TANGGAL 03 FEBRUARI 2022.	3030204999	100	300.000	30.000.000	'220621304000029	Terdapat kesalahan pencatatan kode, jumlah, dan nilai BMN sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan input perolehan lainnya pada kode barang yang sesuai
635	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	BAST NONKONTRAKTUAL	W28-U2/345/PL.03/1/2022	'03-02-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL SESUAI KONTRAK NO.W28-U2/280/PL.03/1/2022 TANGGAL 20 JANUARI 2022, BAP NO.W28-U2/344/PL.03/2/2022 TANGGAL 03 FEBRUARI 2022 DAN BAST NO.W28-U2/345/PL.03/1/2022 TANGGAL 03 FEBRUARI 2022.	3030204999	100	200.000	20.000.000	'220621304000028	Terdapat kesalahan pencatatan kode, jumlah, dan nilai BMN sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan input perolehan lainnya pada kode barang yang sesuai
636	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	BAST KONTRAKTUAL	W28-U2/964/PL.01/IV/2022	11-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN PAGAR RUMAH DINAS PENGADILAN NEGERI TERNATE.	2010101003	6	14.192.000	85.152.000	'220621302003219	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk, tapi seharusnya tidak membentuk nup baru sehingga setelah dilakukan reklas masuk ke pagar permanen kemudian dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi nilai bertambah pada pagar permanen yang sudah ada.
637	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	BAST KONTRAKTUAL	W28-U2/964/PL.01/IV/2022	11-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	PAKET PEKERJAAN PERENCANAAN PAGAR RUMAH DINAS PENGADILAN NEGERI TERNATE.	2010101003	1	14.195.000	14.195.000	'220621302003219	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk, tapi seharusnya tidak membentuk nup baru sehingga setelah dilakukan reklas masuk ke pagar permanen kemudian dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi nilai bertambah pada pagar permanen yang sudah ada.
638	'00501	Nusa Tenggara Barat	'099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	18-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	3100203003	2	100.000	200.000	'221011301001377	Kesalahan pencatatan belanja honor pejabat pengadaan barang dan jasa Printer, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi perubahan nilai bertambah pada printer
639	'00501	Nusa Tenggara Barat	'099883	PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	18-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	3100102001	3	160.000	480.000	'221011301001377	Kesalahan pencatatan belanja honor pejabat pengadaan barang dan jasa PC, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada P.C Unit
640	'00501	Nusa Tenggara Barat	'099890	PENGADILAN NEGERI SELONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'001/BAST/04/2022	'04-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	honor Pejabat Pengadaan	3100102001	1	6.800	6.800	'221691301000945	Terdapat kesalahan pencatatan nominal honor pengadaan PC yang tercatat sebagai NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada printer

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
641	'00501	Nusa Tenggara Barat	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004	19-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Pejabat Paket Pengadaan PC dan Printer	3100102001	7	90.000	630.000	'220711301002116	Kesalahan pencatatan honor pengadaaan PC yang tercatat sebagai NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
642	'00501	Nusa Tenggara Barat	307932	PENGADILAN AGAMA DOMPU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004	19-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Pejabat Paket Pengadaan PC dan Printer	3100203003	2	25.000	50.000	'220711301002116	Kesalahan pencatatan honor pengadaaan PC yang tercatat sebagai NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah
643	'00501	Nusa Tenggara Barat	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	BAST KONTRAKTUAL	W3-TUN6/1199/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran PTTUN Mataram	3050201003	6	905.000	5.430.000	'220381302026708	terdapat belanja meubeleair untuk PTTUN Mataram yang baru dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per item untuk kegiatan paket pengadaan.
644	'00501	Nusa Tenggara Barat	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	BAST KONTRAKTUAL	W3-TUN6/1199/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran PTTUN Mataram	3050201003	2	905.000	1.810.000	'220381302026708	terdapat belanja meubeleair untuk PTTUN Mataram yang baru dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per item untuk kegiatan paket pengadaan.
645	'00501	Nusa Tenggara Barat	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	BAST KONTRAKTUAL	W3-TUN6/1199/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran PTTUN Mataram	3050201003	2	905.000	1.810.000	'220381302026708	terdapat belanja meubeleair untuk PTTUN Mataram yang baru dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per item untuk kegiatan paket pengadaan.
646	'00501	Nusa Tenggara Barat	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	BAST KONTRAKTUAL	W3-TUN6/1199/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran PTTUN Mataram	3050201003	2	905.000	1.810.000	'220381302026708	terdapat belanja meubeleair untuk PTTUN Mataram yang baru dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per item untuk kegiatan paket pengadaan.
647	'00501	Nusa Tenggara Barat	578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	BAST KONTRAKTUAL	W3-TUN6/1199/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran PTTUN Mataram	3050201003	2	905.000	1.810.000	'220381302026708	terdapat belanja meubeleair untuk PTTUN Mataram yang baru dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per item untuk kegiatan paket pengadaan.
648	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3010399999	1	750.000	750.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
649	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3010399999	1	600.000	600.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
650	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3090402019	1	250.000	250.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
651	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3090402019	1	250.000	250.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
652	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	6010101999	1	2.100.000	2.100.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
653	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3010399999	4	400.000	1.600.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
654	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3090402019	1	500.000	500.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
655	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	BAST No.009/PPK/VI/2022	14-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas	3070108161	1	700.000	700.000	'220391301012643	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
656	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U8/1057/PL.05/8/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pada Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Sesuai Kwitansi Pembayaran Nomor:004/KW/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022.	3080203032	1	800.000	800.000	'221721303001063	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
657	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U8/1057/PL.05/8/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pada Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Sesuai Kwitansi Pembayaran Nomor:004/KW/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022.	3090403059	3	350.000	1.050.000	'221721303001063	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
658	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U8/1057/PL.05/8/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pada Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Sesuai Kwitansi Pembayaran Nomor:004/KW/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022.	3080135038	49	175.000	8.575.000	'221721303001063	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
659	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U8/1057/PL.05/8/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pada Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Sesuai Kwitansi Pembayaran Nomor:004/KW/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022.	3030212021	1	568.000	568.000	'221721303001063	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
660	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U8/1057/PL.05/8/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pada Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Sesuai Kwitansi Pembayaran Nomor:004/KW/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022.	3030303001	16	175.000	2.800.000	'221721303001063	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
661	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U8/1057/PL.05/8/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pada Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Sesuai Kwitansi Pembayaran Nomor:004/KW/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022.	3070108161	1	575.000	575.000	'221721303001063	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
662	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U8/1057/PL.05/8/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Pada Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Sesuai Kwitansi Pembayaran Nomor:004/KW/8/2022 tanggal 05 Agustus 2022.	3050105089	1	468.250	468.250	'221721303001063	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
663	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	BAST KONTRAKTUAL	W26-U5/037/PL.05/BAST-PPK/3/2022	29-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran: Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Waingapu Tahun 2022	3010399999	2	677.600	1.355.200	'220411303000376	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
664	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	BAST KONTRAKTUAL	W26-U5/037/PL.05/BAST-PPK/3/2022	29-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran: Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Waingapu Tahun 2022	3070108161	2	847.000	1.694.000	'220411303000376	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
665	'00501	Nusa Tenggara Timur	'099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	BAST KONTRAKTUAL	W26-U5/037/PL.05/BAST-PPK/3/2022	29-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran: Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Waingapu Tahun 2022	3090402019	4	174.900	699.600	'220411303000376	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
666	'00501	Nusa Tenggara Timur	400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	BAST NONKONTRAKTUAL	W26.U7/03/PL.06/06/2022	'07-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PENGADAAN TV MONITOR DAN UPS	3060101048	9	760.000	6.840.000	'221111302000357	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
667	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26-U12/16/FSK.01.02/10/2022	13-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi	6070301001	1	119.146.985	119.146.985	'220391303012781	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
668	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26-U12/16/FSK.01.02/10/2022	13-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi	6070301001	1	119.146.985	119.146.985	'220391303012781	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
669	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26-U12/16/FSK.01.02/10/2022	13-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi	6070301001	1	119.146.995	119.146.995	'220391303012781	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
670	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26-U12/16/FSK.01.02/10/2022	13-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi	6070301001	1	119.146.985	119.146.985	'220391303012781	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
671	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/16/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	6070301001	1	43.020.993	43.020.993	'220391303016843	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
672	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/16/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	6070301001	1	43.020.000	43.020.000	'220391303016843	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
673	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/16/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	6070301001	1	43.020.000	43.020.000	'220391303016843	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
674	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/16/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	6070301001	1	43.020.000	43.020.000	'220391303016843	Kesalahan kode barang pekerjaan renovasi rumah negara, sudah dilakukan koreksi
675	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/18/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	4010201001	1	22.443.000	22.443.000	'220391303016837	kesalahan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang seharusnya dicatat KDP, namun dicatat sebagai gedung ekstra sudah dilakukan koreksi
676	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/18/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	4010201001	1	22.443.000	22.443.000	'220391303016837	kesalahan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang seharusnya dicatat KDP, namun dicatat sebagai gedung ekstra sudah dilakukan koreksi
677	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/18/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	4010201001	1	22.446.967	22.446.967	'220391303016837	kesalahan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang seharusnya dicatat KDP, namun dicatat sebagai gedung ekstra sudah dilakukan koreksi
678	'00501	Nusa Tenggara Timur	400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	BAST KONTRAKTUAL	W26.U12/18/PRC.01.01/12/2022	22-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi 4 Unit Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kalabahi.	4010201001	1	22.443.000	22.443.000	'220391303016837	kesalahan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang seharusnya dicatat KDP, namun dicatat sebagai gedung ekstra sudah dilakukan koreksi
679	'00501	Nusa Tenggara Timur	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'14/400245/III/2021	21-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perencanaan Renovasi Plafond	4010101001	1	3.000.000	3.000.000	'220391301005331	kesalahan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang seharusnya dicatat KDP, namun dicatat sebagai gedung ekstra sudah dilakukan koreksi
680	'00501	Nusa Tenggara Timur	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U/02.a/05.01.3/I/2022	'03-01-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pejabat Pengadaan Kegiatan Renovasi Plafond	4010101001	1	680.000	680.000	'220391301005330	kesalahan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang seharusnya dicatat KDP, namun dicatat sebagai gedung ekstra sudah dilakukan koreksi
681	'00501	Nusa Tenggara Timur	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U/02/05.01.3/I/2022	'03-01-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SK Pejabat Pengadaan PC dan Printer	3100203003	2	340.000	680.000	'220391301004627	honor pengadaan Peralatan dan mesin namun dibawah nilai kapitalisasi, sehingga menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
682	'00501	Nusa Tenggara Timur	400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W26-U/03/05.01.3/I/2022	'03-01-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	SK Pejabat Pengadaan	3050105048	1	680.000	680.000	'220391301004628	honor pengadaan Peralatan dan mesin namun dibawah nilai kapitalisasi, sehingga menjadi aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
683	'00501	Nusa Tenggara Timur	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja MOdal Peralatan dan Mesin	3050201999	1	850.000	850.000	'22111130100435 2	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
684	'00501	Nusa Tenggara Timur	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00020	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3050201999	1	850.000	850.000	'22111130100435 2	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
685	'00501	Nusa Tenggara Timur	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021	'07-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3050201999	1	850.000	850.000	'22111130100435 2	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
686	'00501	Nusa Tenggara Timur	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00022	11-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Biaya Konsumsi Rapat Panitia Pengadaan Meubaliar	3050201999	1	500.000	500.000	'22111130100435 2	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
687	'00501	Nusa Tenggara Timur	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00025	20-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Biaya Pengiriman Dokumen Belanja Modal	3050201999	1	33.000	33.000	'22111130100435 2	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
688	'00501	Nusa Tenggara Timur	402845	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00030	26-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran, Belanja Barang ATK Belanja Modal	3050201999	1	387.000	387.000	'22111130100580 2	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
689	'00501	Nusa Tenggara Timur	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00039	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Honor Pokja Pengadaan Genset	3060347002	1	760.000	760.000	'22039130102708 3	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
690	'00501	Nusa Tenggara Timur	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00040	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Honor Pokja Pengadaan Genset	3060347002	1	760.000	760.000	'22039130102708 3	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
691	'00501	Nusa Tenggara Timur	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	'07-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Honor Pokja Pengadaan Genset	3060347002	1	760.000	760.000	'22039130102708 3	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
692	'00501	Nusa Tenggara Timur	576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00047	23-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Honor Pejabat Pengadaan Alat Teleconverence dan Videotron	3080163002	1	680.000	680.000	'22039170100225 4	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
693	'00501	Nusa Tenggara Timur	681418	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	BAST NONKONTRAKTUAL	'012/PL.02/PN.OLM/6/2022	21-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan Negeri Oelamasi	6070301001	1	29.995.000	29.995.000	'22039130300611 7	Kesalahan penggunaan kode barang, sudah dilakukan koreksi
694	'00501	Nusa Tenggara Timur	682281	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	'09-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST HONOR Pejabat Pengadaan berupa Printer TA 2022	3100203003	1	600.000	600.000	'22111130100143 4	Kesalahan realisasi pengadaan belanja modal Peralatan dan mesin, yang seharusnya menambah nilai aset, namun tercatat sebagai aset ekstrakomptabel, sudah dilakukan koreksi
695	'00501	Papua	400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	BAST KONTRAKTUAL	W30-U/43/PL.04/6/2022	22-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Penambahan Daya Listrik Kantor Pengadilan Tinggi Jayapura	5040299999	1	149.294.267	149.294.267	'22063130300214 0	kesalahan pencatatan penambahan daya listrik yang seharusnya menambah nilai bangunan tercatat sebagai nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor
696	'00501	Papua	400038	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	BAST NONKONTRAKTUAL	W30-U1/1992/PL.01.2/6/2022	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Prasarana Disabilitas Kantor Pengadilan Negeri	3180102009	1	29.415.000	29.415.000	'22063130400419 7	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang berupa sarana disabilitas yang tercatat sebagai rambu-rambu petunjuk/penuntun, kemudian dilakukan koreksi pencatatan sebesar 29.415.000, dan input perolehan lainnya berupa 4 buah alat kesehatan lainnya senilai 2.650.403 dan aid hearing sebesar 679.597, serta koreksi pencatatan nilai bertambah pada bangunan gedung kantor permanen sebesar 26.085.000
697	'00501	Papua	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	BAST KONTRAKTUAL	W25-A/2285/PL.01/12/22	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Pagar Tembok Samping Kanan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	2010101004	1	240.470.000	240.470.000	'22063130400727 5	kesalahan pencatatan renovasi pagar yang membentuk nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada pagar permanen
698	'00501	Papua	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	BAST NONKONTRAKTUAL	W25-A/2287/PL.01/12/2022	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Pengawasan Renovasi Pagar Tembok samping Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	4040104001	1	19.700.000	19.700.000	'22063130400710 0	kesalahan pencatatan renovasi pagar yang membentuk nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada pagar permanen
699	'00501	Papua	402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	BAST KONTRAKTUAL	W25-A/546/PL.08/3/2022	17-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Penambahan Daya Listrik Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	5040299999	1	127.425.185	127.425.185	'22063130300063 3	kesalahan pencatatan penambahan daya listrik yang membentuk nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor permanen
700	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00006	'09-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Penambahan Daya Listrik senilai Rp.88.000.000	5040299999	1	88.000.000	88.000.000	'22138170100003 4	Kesalahan pencatatan penambahan daya listrik sebagai nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan input koreksi nilai bertambah pada bangunan gedung kantor
701	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/CV.ID/KWT/II/2022	14-01-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Serui Kelas II	2010101001	1	31.740.000	31.740.000	'22138130100034 1	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
702	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	'03/KWT/V/2022	'09-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Administrasi Proyek Renovasi Rumah Dinas PA Serui	2010101001	1	8.245.000	8.245.000	'221381304000075	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
703	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	'04/KWT/V/2022	13-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Administrasi Proyek Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Serui	2010101001	1	7.745.000	7.745.000	'221381304000087	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
704	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	'05/KWT/V/2022	'09-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Administrasi Proyek Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Serui	2010101001	1	7.745.000	7.745.000	'221381302000326	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
705	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	'06/KWT/V/2022	'09-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Administrasi Proyek Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Serui	2010101001	1	7.745.000	7.745.000	'221381302000325	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
706	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	10/KWT/VI/2022	29-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Honor Pokja Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas PA Serui	2010101001	1	1.000.000	1.000.000	'221381302000446	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
707	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	11/KWT/VI/2022	29-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Honor Pokja Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas PA Serui	2010101001	1	1.000.000	1.000.000	'221381302000445	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
708	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	12/KWT/VI/2022	29-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Honor Pokja Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas PA Serui	2010101001	1	1.000.000	1.000.000	'221381302000447	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
709	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	13/KWT/VI/2022	29-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Honor Pokja Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas PA Serui	2010101001	1	1.000.000	1.000.000	'221381304000124	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
710	'00501	Papua	402942	PENGADILAN AGAMA SERUI	BAST NONKONTRAKTUAL	'33/NP/CV.MER/2022	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja ATK Kegiatan Operasional Renovasi Rumah Dinas PA Serui	2010101001	1	1.500.000	1.500.000	'221381304000314	Terdapat kesalahan pencatatan renovasi rumah dinas yang membentuk NUP baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan sebesar 68.720.000 dan koreksi nilai bertambah
711	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3070119071	1	850.603	850.603	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
712	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3070126009	1	389.259	389.259	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
713	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3070299999	1	648.765	648.765	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
714	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3070299999	2	259.506	519.012	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
715	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3070299999	1	230.672	230.672	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
716	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3150303058	2	311.910	623.820	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
717	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3070299999	1	173.004	173.004	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
718	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3070299999	2	346.008	692.016	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
719	'00501	Papua	614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	BAST NONKONTRAKTUAL	'18/FT/PA-SENTANI/CV.MONTARI/VI/2022	22-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Sentani	3160101001	1	735.267	735.267	'220631304002932	belanja modal dibawah nilai kapitalisasi berupa sarana disabilitas
720	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/1062/PL.01/8/2022	'08-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PEMELIHARAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI	6070301001	1	164.016.000	164.016.000	'220651302009714	kesalahan pencatatan kode barang pemeliharaan berupa penggantian atap dan pemeliharaan gedung PT Papua Barat (titip anggaran) sudah dilakukan koreksi pencatatan
721	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/1160/PL.01/8/2022	25-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PEMELIHARAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI	6070301001	1	95.676.000	95.676.000	'220651302010294	kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan koreksi pencatatan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
722	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/1185/PL.01/8/2022	30-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PEMELIHARAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI	6070301001	1	95.676.000	95.676.000	'220651302010725	kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan koreksi pencatatan
723	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/1258/PL.01/9/2022	29-08-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PEMELIHARAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI	6070301001	1	95.676.000	95.676.000	'220651302011496	kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan koreksi pencatatan
724	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2019/PL.01/11/2022	22-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BELANJA MODAL PENGADAAN 1 UNIT GENSET PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI	4010130005	1	269.880.000	269.880.000	'220651302015873	kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada genset
725	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2941/PL.01/12/2022	'07-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050201003	10	725.940	7.259.400	'220651303004523	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
726	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2941/PL.01/12/2022	'07-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050201003	4	700.000	2.800.000	'220651303004523	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
727	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2941/PL.01/12/2022	'07-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050201003	7	700.000	4.900.000	'220651303004523	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
728	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2942/PL.01/12/2022	'07-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050206015	7	340.000	2.380.000	'220651303004515	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
729	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2942/PL.01/12/2022	'07-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050206014	9	750.000	6.750.000	'220651303004515	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
730	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2942/PL.01/12/2022	'07-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3060101037	2	635.000	1.270.000	'220651303004515	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
731	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2965/PL.01/12/2022	12-12-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pengadilan Tinggi Papua Barat	6070301001	1	143.000.000	143.000.000	'220651302017801	Merupakan renovasi gedung Pemda yang dipinjam pakai untuk PT Papua Barat, karena PT Papua Barat belum memiliki DIPA maka anggaran renovasi gedungnya dititipkan pada PN Manokwari.
732	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/2977/PL.01/12/2022	14-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BELANJA MODAL PENGADAAN 1 UNIT GENSET PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARI	4010130005	1	314.860.000	314.860.000	'220651302018253	kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada genset
733	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/3029/PL.01/12/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050201003	16	700.000	11.200.000	'220651303004914	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
734	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/3029/PL.01/12/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050201003	4	700.000	2.800.000	'220651303004914	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
735	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/3029/PL.01/12/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050201003	8	700.000	5.600.000	'220651303004914	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
736	'00501	Papua Barat	400069	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W30-U7/3029/PL.01/12/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT	3050201003	3	700.000	2.100.000	'220651303004914	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa fasilitas perkantoran untuk PT Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PT Papua Barat pada tahun 2023
737	'00501	Papua Barat	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00014	'08-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA MODAL	4010101001	1	24.969.250	24.969.250	'220661303005532	terdapat pengembangan gedung PTSP PA Sorong dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per kegiatan sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada bangunan gedung kantor
738	'00501	Papua Barat	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	14-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Pekerjaan Renovasi	4010101001	1	24.969.250	24.969.250	'220661303005624	terdapat pengembangan gedung PTSP PA Sorong dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per kegiatan sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada bangunan gedung kantor
739	'00501	Papua Barat	402882	PENGADILAN AGAMA SORONG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	22-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BAST Belanja Modal Renovasi PTSP	4010101001	1	20.388.500	20.388.500	'220661303005932	terdapat pengembangan gedung PTSP PA Sorong dengan nilai dibawah kapitalisasi karena di detail per kegiatan sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada bangunan gedung kantor
740	'00501	Papua Barat	402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W25-A7/959/LP.05/12/2022	'06-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Surat Perjanjian Paket Pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	3050206026	1	666.000	666.000	'220651302016981	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa meubelair untuk PTA Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PTA Papua Barat pada tahun 2023
741	'00501	Papua Barat	402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W25-A7/959/LP.05/12/2022	'06-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Surat Perjanjian Paket Pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	3050201003	30	808.000	24.240.000	'220651302016981	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa meubelair untuk PTA Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PTA Papua Barat pada tahun 2023

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
742	'00501	Papua Barat	402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	BAST KONTRAKTUAL	W25-A7/959/LP.05/12/2022	'06-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Surat Perjanjian Paket Pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	3050206030	2	388.500	777.000	'220651302016981	Merupakan belanja modal peralatan mesin berupa meubelair untuk PTA Papua Barat dibawah nilai kapitalisasi, akan dilakukan transfer keluar ke PTA Papua Barat pada tahun 2023
743	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3050105999	3	277.500	832.500	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
744	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3090402019	1	166.500	166.500	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
745	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3050206085	7	277.500	1.942.500	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
746	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3050206085	3	666.000	1.998.000	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
747	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3070108161	1	444.000	444.000	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
748	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3090402019	1	166.500	166.500	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
749	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3030212021	2	277.500	555.000	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
750	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3010399999	2	666.000	1.332.000	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
751	'00501	Riau	402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A1/2287/PL.04/5/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pekanbaru	3050206065	2	943.500	1.887.000	'220081301008705	Belanja dibawah nilai Kapitalisasi
752	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/1186/PL.01/08/2022	18-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan prasarana disabilitas Pengadilan	4010101999	1	30.000.000	30.000.000	'220081301018631	Kesalahan penggunaan akun belanja, sehingga menyebabkan ketidak sesuaian, namun kode barang sudah sesuai
753	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3010399999	1	166.500	166.500	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
754	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3010399999	2	666.000	1.332.000	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
755	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3050206065	2	999.000	1.998.000	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
756	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3050206085	3	666.000	1.998.000	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
757	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3050206085	3	610.500	1.831.500	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
758	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3070108161	1	444.000	444.000	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
759	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3010399999	2	277.500	555.000	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
760	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3010399999	1	166.500	166.500	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
761	'00501	Riau	402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W4-A7/763/KU.01/06/2022	15-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan sarana disabilitas	3040104002	3	277.500	832.500	'220081301011141	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
762	'00501	Riau	632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	'00067	30-08-2022	532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	Belanja Barang Modal Berupa 4 Unit Lemari Toga dan 10 Unit Kursi Susun Untuk Pengadilan Agama Ujung Tanjung Pada Universal Furniture	3050201004	10	300.000	3.000.000	'221201301007836	Realisasi belanja modal peralatan mesin, namun nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi, kode barang dan nilai sudah sesuai
763	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'101/BAST/PPK/BUA.6/8/2022	'04-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3100204024	3	787.545	2.362.635	'221751301033056	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
764	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'138/BUA.7/BAST/3/2022	21-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Tempat Sampah Dan Pembatas Antrian Pada Kantor Mahkamah Agung RI	3050201023	10	962.500	9.625.000	'221751302007177	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
765	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'151/BAST/PPK/BUA.6/11/2022	'03-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Pendukung Pengelola IT	3100204029	2	921.000	1.842.000	'221751302038851	kesalahan pengelompokan pada modul komitmen yang seharusnya KDP
766	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST NONKONTRAKTUAL	'19.a/BUA.7/ST/1/2021	11-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta - Sidoarjo (PP) Sesuai Surat Tugas Nomor 19a/BUA.7/ST/1/2021 tanggal 11 Januari 2022	2010104001	1	11.646.000	11.646.000	'221751301000922	kesalahan pengelompokan pada modul komitmen yang seharusnya KDP
767	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST NONKONTRAKTUAL	'19.b/BUA.7/ST/1/2021	11-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta - Sidoarjo (PP) Sesuai Surat Tugas Nomor 19b/BUA.7/ST/1/2021 tanggal 11 Januari 2022	2010104001	1	9.770.400	9.770.400	'221751301000920	kesalahan pengelompokan pada modul komitmen yang seharusnya KDP
768	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST NONKONTRAKTUAL	'19/BUA.7/ST/1/2021	11-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta - Sidoarjo (PP) Sesuai Surat Tugas Nomor 19/BUA.7/ST/1/2021 tanggal 11 Januari 2022	2010104001	1	12.413.400	12.413.400	'221751301000921	kesalahan pengelompokan pada modul komitmen yang seharusnya KDP
769	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST NONKONTRAKTUAL	'44/BUA.7/ST/1/2021	25-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta - Sidoarjo (PP) Sesuai Surat Tugas Nomor 44/BUA.7/ST/1/2021 tanggal 25 Januari 2022	2010104001	1	17.298.600	17.298.600	'221751301001167	kesalahan pengelompokan pada modul komitmen yang seharusnya KDP
770	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'846/BUA.7/BAST/11/2022	29-11-2022	536111	Belanja Modal Lainnya	Pembuatan Aplikasi Pendukung UKPBJ Mahkamah Agung RI	3050199999	1	199.650.000	199.650.000	'221751302040758	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
771	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'858/BUA.7/BAST/12/2022	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Untuk Satuan Kerja Kantor Pengadilan Agama Ponorogo	3050201003	60	582.750	34.965.000	'221751301054656	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
772	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'859/BUA.7/BAST/12/2022	'08-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Untuk Satuan Kerja Kantor Pengadilan Agama Probolinggo	3050201003	24	943.500	22.644.000	'221751301056777	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
773	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'887/BUA.7/BAST/12/2022	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Pada Kantor Mahkamah Agung RI	3050201023	40	882.450	35.298.000	'221751302041649	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
774	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'887/BUA.7/BAST/12/2022	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Pada Kantor Mahkamah Agung RI	3060319999	5	471.750	2.358.750	'221751302041649	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
775	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'887/BUA.7/BAST/12/2022	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Pada Kantor Mahkamah Agung RI	3060309999	2	682.650	1.365.300	'221751302041649	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
776	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'90/BAPP/PPK/BUA.6/7/2022	21-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3050206014	706	549.450	387.911.700	'221751301030427	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
777	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'90/BAPP/PPK/BUA.6/7/2022	21-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3050206014	706	549.450	387.911.700	'221751301030427	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
778	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'90/BAPP/PPK/BUA.6/7/2022	21-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3050206014	706	549.450	387.911.700	'221751301030427	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
779	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'90/BAPP/PPK/BUA.6/7/2022	21-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3050206014	706	549.450	387.911.700	'221751301030427	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
780	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'90/BAPP/PPK/BUA.6/7/2022	21-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3050206014	706	549.450	387.911.700	'221751301030427	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
781	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'90/BAPP/PPK/BUA.6/7/2022	21-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3050206014	706	549.450	387.911.700	'221751301030427	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
782	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'90/BAPP/PPK/BUA.6/7/2022	21-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik	3050206014	706	549.450	387.911.700	'221751301030427	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
783	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'932/BUA.7/BAST/12/2022	'08-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Mahkamah Agung RI	3050206085	1	749.250	749.250	'221751302043570	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
784	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'948/BUA.7/BAST/12/2022	'09-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Pimpinan	6010303001	2	4.642.960	9.285.920	'221751301057089	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
785	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BAST KONTRAKTUAL	'948/BUA.7/BAST/12/2022	'09-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Pimpinan	3050206085	18	265.312	4.775.616	'221751301057089	kesalahan kode akun untuk belanja aset ekstrakomtable
786	'00504	Satker Pusat	663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	BAST KONTRAKTUAL	'496/PPK/PL.08/BAST/12/2022	14-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	'1 paket spesifikasi sesuai KAK	3100204024	6	842.240	5.053.440	'221751303036952	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
787	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	BAST NONKONTRAKTUAL	'025/WK/Pembayaran/XI/2022	29-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Ruang Rapat Peneliti	6070301001	1	49.294.122	49.294.122	'220231302019162	Renovasi gedung milik BUA
788	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	BAST KONTRAKTUAL	'050/Bld.1/PPK/PB/BAST/5/2022	10-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Kantor	3050201003	6	865.800	5.194.800	'220231302006347	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
789	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	BAST KONTRAKTUAL	'097/Bld.1/PPK/P.J/BAST/11/2022	21-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Kelas Lab dan Sidang Semu	6070301001	1	176.671.051	176.671.051	'220231302019161	Renovasi gedung milik BUA
790	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	BAST KONTRAKTUAL	'099/Bld.1/PPK/P.J/BAST/11/2022	18-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Ruang Rapat Pusat Strategis Kebijakan	6070301001	1	192.237.191	192.237.191	'220231302019160	Renovasi gedung milik BUA
791	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	BAST KONTRAKTUAL	'114/Bld.1/PPK/PJ/BAST/12/2022	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Area Pedestrian	5010109002	1	169.903.263	169.903.263	'220231301024338	Renovasi gedung milik BUA
792	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	BAST KONTRAKTUAL	'120/Bld.1/PPK/PJ/BAST/12/2022	'09-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Renovasi Ruangan Kepala Puslitbang	6070301001	1	97.544.891	97.544.891	'220231302021069	Renovasi gedung milik BUA
793	'00506	Satker Pusat	610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	BAST NONKONTRAKTUAL	'1244/ESK/XII/2022	'09-12-2022	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	Pengadaan Pohon	6050101003	2	7.145.625	14.291.250	'220231302020986	kode barang dan nilai sudah sesuai
794	'00501	Sulawesi Barat	'099638	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	BAST KONTRAKTUAL	'009/099638/2022	23-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Mamuju	6070301001	1	781.847.000	781.847.000	'221781301007089	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen sehingga membentuk aset dengan NUP baru, seharusnya menggunakan kode barang KDP. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yg salah dan perolehan Lainnya KDP.
795	'00501	Sulawesi Selatan	'099422	PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG	BAST KONTRAKTUAL	W22.U1/190/PPK/PL.04/12/2022	23-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Software & Hardware ATR) pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2022	8010101001	1	80.647.000	80.647.000	'221361302016254	Terdapat pengadaan software dan Hardware, akun belanja dan kode barang sudah benar.
796	'00501	Sulawesi Selatan	'099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U4/07.04/PL.05/11/2022	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	3090402019	1	380.000	380.000	'221361303009538	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
797	'00501	Sulawesi Selatan	'099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U4/07.04/PL.05/11/2022	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	3150303058	1	450.000	450.000	'221361303009538	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
798	'00501	Sulawesi Selatan	'099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U4/07.04/PL.05/11/2022	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	3070101005	1	940.000	940.000	'221361303009538	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
799	'00501	Sulawesi Selatan	'099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U4/07.04/PL.05/11/2022	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	3090402019	2	250.000	500.000	'221361303009538	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
800	'00501	Sulawesi Selatan	'099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U4/07.04/PL.05/11/2022	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	3070108161	1	860.000	860.000	'221361303009538	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
801	'00501	Sulawesi Selatan	'099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U4/07.04/PL.05/11/2022	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	3070108161	1	550.000	550.000	'221361303009538	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
802	'00501	Sulawesi Selatan	'099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U4/07.04/PL.05/11/2022	'02-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	3090402019	1	570.000	570.000	'221361303009538	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
803	'00501	Sulawesi Selatan	'099492	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	BAST NONKONTRAKTUAL	W22-U2/603/PL.04/04/2022	19-04-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Kantor Pengadilan Negeri Parepare Tahun Anggaran 2022	6010101999	1	1.108.810	1.108.810	'220571302001281	Merupakan pengadaan buku braile dengan kode barang 6010101999. akun belanja dan kode barang sudah benar.
804	'00501	Sulawesi Selatan	'099553	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	BAST KONTRAKTUAL	W22-U9/05/PPK-RG/9/2022	26-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Bangunan Instalasi Genset	4010130005	1	99.905.000	99.905.000	'220551302002780	Terdapat akun 532111 Belanja modal peralatan dan mesin seharusnya menggunakan akun 533111 belanja modal gedung dan bangunan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
805	'00501	Sulawesi Selatan	'099560	PENGADILAN NEGERI BANTA ENG	BAST KONTRAKTUAL	W.22.U5/04/PL.01/1/2022	24-01-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Penambahan Daya Listrik dan Peremajaan Jaringan Listrik Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng Tahun 2022	5040299999	1	62.586.000	62.586.000	'220561302000085	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambahn niali gedung dan bangunan dengan kode barang 4010101001. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dankoreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
806	'00501	Sulawesi Selatan	307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	BAST NONKONTRAKTUAL	'00043	'01-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja peralatan mesin ektrakomptable berupa kursi dan printer	3100203003	3	1.000.000	3.000.000	'221361701000861	Terdapat kesalahan pencatatan akun belanja modal seharusnya menggunakan belanja modal peralatan dan mesin
807	'00501	Sulawesi Selatan	307445	PENGADILAN AGAMA MAROS	BAST KONTRAKTUAL	W20-AS/2026/PL.08/XII/2022	23-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	renovasi ruang sidang, perbaikan atap gedung dan renovasi kamar mandi Pengadilan Agama Maros tahun 2022	6070301001	1	99.636.000	99.636.000	'221361302016228	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambahn niali gedung dan bangunan dengan kode barang 4010101001. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dankoreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
808	'00501	Sulawesi Selatan	307466	PENGADILAN AGAMA JENNEPONTO	BAST NONKONTRAKTUAL	1	26-01-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Bayar biaya penambhan daya listrik	3030103031	1	21.118.000	21.118.000	'220561301000270	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambahn niali gedung dan bangunan dengan kode barang 4010101001. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dankoreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
809	'00501	Sulawesi Selatan	307576	PENGADILAN AGAMA PARE PARE	BAST KONTRAKTUAL	'036/PPK.PA.Pare/X/2022	31-10-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Tambah Daya dan Perbaikan Jaringan	6070301001	1	29.000.000	29.000.000	'220571301009936	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambahn niali gedung dan bangunan dengan kode barang 4010101001. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dankoreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
810	'00501	Sulawesi Selatan	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/TNM-KW/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	750.000	750.000	'221361302005067	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
811	'00501	Sulawesi Selatan	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/TNM-KW/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3050105056	1	400.000	400.000	'221361302005067	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
812	'00501	Sulawesi Selatan	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/TNM-KW/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070108161	1	700.000	700.000	'221361302005067	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
813	'00501	Sulawesi Selatan	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/TNM-KW/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	250.000	250.000	'221361302005067	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
814	'00501	Sulawesi Selatan	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/TNM-KW/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	600.000	600.000	'221361302005067	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
815	'00501	Sulawesi Selatan	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/TNM-KW/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	400.000	400.000	'221361302005067	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
816	'00501	Sulawesi Selatan	526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'006/TNM-KW/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3070299999	1	300.000	300.000	'221361302005067	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
817	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070101005	1	630.480	630.480	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
818	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3050199999	1	333.000	333.000	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
819	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	6010101001	7	166.500	1.165.500	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
820	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070299999	1	333.000	333.000	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
821	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070299999	1	832.500	832.500	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
822	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070299999	1	166.500	166.500	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
823	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070299999	1	222.000	222.000	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
824	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070299999	1	277.500	277.500	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
825	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070299999	1	222.000	222.000	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
826	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3070299999	1	555.000	555.000	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
827	'00501	Sulawesi Selatan	672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	BAST NONKONTRAKTUAL	W22.U24/1293/PL.04/11/2022	11-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas	3050206065	1	888.000	888.000	'220581302003797	Terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin atas pengadaan sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252-Belanja Ekstra Peralatan dan mesin
828	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00008	13-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjadin ke Biro Perlengkapan MA RI dlam rangka asistensi & persetujuan gambar desain pemcnn Rumdin dan pagar rumdin PN Palu TA 2022	4010101001	1	7.988.258	7.988.258	'220511301006496	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
829	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	13-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjadin Ke Biro Perlengkapan MA RI dlm rangka asistensi & persetujuan gambar desain Rumdin & Pagar Rumdin PN Palu TA 2022	4010101001	1	8.160.400	8.160.400	'220511301006496	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
830	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	'09-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjadin Ke Biro Perlengkapan MA RI dalam rangka asistensi & persetujuan gambar desain perencanaan rehhab rumdin & pagar rumdin PN Palu TA 2022	4010101001	1	8.763.400	8.763.400	'220511301008595	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
831	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	'09-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjadin Ke Biro Perlengkapan MA RI dlm rangka Konsultasi Bel.Modal & Pengambilan Hasil Gambar Desain Perencanaan Renovasi & Pagar Rumdin TA 2022 a.n Moh Iqbal,SH	4010101001	1	8.763.500	8.763.500	'220511301011057	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
832	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	'09-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjadin Ke Biro Perlengkapan MA RI dlm rangka Konsultasi Bel.Modal & Pengambilan Hasil Gambar Desain Perencanaan Renov. & Pagar Rumdin PN Palu TA 2022 a.n Indra,S.Kom	4010101001	1	8.763.500	8.763.500	'220511301011057	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
833	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	'09-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjadin Ke Biro Perlengkapan MA RI dlm rangka konsultasi bel.modal & pengambilan hasil gambar desain perenc.renov & pagar rumdin TA 2022 a.n Chairil Anwar,SH.,M.Hum	4010101001	1	8.763.500	8.763.500	'220511301011057	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
834	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00033	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pembelian Konsumsi POKJA	4010101001	1	243.000	243.000	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year. . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
835	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00034	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pembelian Konsumsi POKJA	4010101001	1	92.500	92.500	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
836	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00035	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Konsumsi POKJA	4010101001	1	104.000	104.000	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
837	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00036	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Konsumsi POKJA	4010101001	1	285.000	285.000	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
838	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00037	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Konsumsi POKJA	4010101001	1	110.000	110.000	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
839	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00038	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pembelian Konsumsi POKJA	4010101001	1	81.000	81.000	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
840	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00039	19-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Konsumsi POKJA	4010101001	1	331.000	331.000	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
841	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00040	20-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pembelian kertas dll	4010101001	1	1.530.000	1.530.000	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
842	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00041	20-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Penjilidan Berkas POKJA	4010101001	1	1.437.600	1.437.600	'220511301014785	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
843	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00043	26-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Konsumsi Snack (POKJA) di Tk Memori 82	4010101001	1	265.000	265.000	'220511301016888	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
844	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00044	26-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Konsumsi POKJA di Kantin PN Palu	4010101001	1	250.000	250.000	'220511301016888	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
845	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00045	'04-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Konsumsi POKJA	4010101001	1	1.084.000	1.084.000	'220511301016888	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
846	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00050	25-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjadin Ke MA RI untuk Konsultasi a.n Dr.Johanis Hehamony,SH.,MH	4010101001	1	9.241.400	9.241.400	'220511301018388	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
847	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00051	25-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjadin Ke MA RI untuk Konsultasi a.n Moh.Iqbal,SH	4010101001	1	9.241.400	9.241.400	'220511301018388	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
848	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00053	25-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Penggandaan & ATK POKJA di Asdu Putra FC	4010101001	1	2.037.000	2.037.000	'220511301018388	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
849	'00501	Sulawesi Tengah	'099375	PENGADILAN NEGERI PALU	BAST NONKON TRAKTUAL	'00054	25-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Pembelian Printer di BC Computer (POKJA)	4010101001	1	4.400.000	4.400.000	'220511301018388	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year . sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 11 nup rumah dinas. Kdp hanya single year
850	'00501	Sulawesi Tengah	'099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	BAST NONKON TRAKTUAL	W21-U3/2133/PL.01/11/2022	25-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan	3180102001	10	200.000	2.000.000	'220531301008809	Pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi Pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
851	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00017	17-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Konsultasi dan Asistensi An Misnudin.SH.,MH. berdasarkan Surat Tugas Nomor: W19-A/458/PL.01/2/2022.	2010101002	1	5.504.337	5.504.337	'220821301001120	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
852	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00018	17-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Konsultasi dan Asistensi An Muhammad Fahrul.SH. berdasarkan Surat Tugas Nomor: W19-A/458/PL.01/2/2022.	2010101002	1	6.952.400	6.952.400	'220821301001120	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
853	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00030	20-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjalanan dinas An. Nasrudin,S.T.,M.M.	2010101002	1	4.891.600	4.891.600	'220821301002470	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
854	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00031	23-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjalanan Dinas An. Ira Rahmawati,S.T.,M.M	2010101002	1	4.891.600	4.891.600	'220821301002470	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
855	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00032	23-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Penyedia Konsultan Perencanaan Renovasi Rumah Dinas	2010101002	1	680.000	680.000	'220821301002470	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
856	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00033	23-05-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Konsumsi Rapat POKJA evaluasi pemilihan penyedia konstruksi	2010101002	1	500.000	500.000	'220821301002470	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
857	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00041	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjalanan Dinas konsultasi PTA Palu dan KPKNL palu an. Ihsan,SHI	2010101002	1	2.370.000	2.370.000	'220821701000165	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
858	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKON TRAKTUAL	'00041/D	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjalanan Dinas konsultasi PTA Palu dan KPKNL palu an. Ihsan,SHI	2010101002	1	2.370.000	2.370.000		terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
859	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran Perjalanan Dinas konsultasi PTA Palu dan KPKNL palu an. Muhammad Fahrul,SH	2010101002	1	2.370.000	2.370.000	'220821701000165	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
860	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00043	'07-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran pembelian ATK	2010101002	1	1.053.300	1.053.300	'220821701000165	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
861	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00045	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor POKJA Renovasi Rumah dinas Pengadilan Agama Tolitoli	2010101002	3	850.000	2.550.000	'220821301002887	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
862	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00046	'08-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawasan	2010101002	1	680.000	680.000	'220821301002887	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
863	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00047	'09-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Konsumsi Rapat Tim	2010101002	1	500.000	500.000	'220821301002887	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
864	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST KONTRAKTUAL	W19-A4/226/PL.01/I/2022	19-01-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Tolitoli	2010101001	2	20.125.000	40.250.000	'220821302000050	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
865	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST KONTRAKTUAL	W19-A4/462/PL.01/II/2022	25-02-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Tolitoli	2010101001	1	28.175.000	28.175.000	'220821302000356	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
866	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST KONTRAKTUAL	W19-A4/709/PL.01/6/2022	13-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Konsultan Pengawasan Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Tolitoli	2010101002	1	43.500.000	43.500.000	'220821302001057	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
867	'00501	Sulawesi Tengah	307288	PENGADILAN AGAMA TOLI TOLI	BAST KONTRAKTUAL	W19-A4/710/PL.01/6/2022	13-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Agama Tolitoli	2010101002	1	124.500.000	124.500.000	'220821301002964	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya di catat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah diinput sebagai perolehan lainnya kdp dan pengembangan kdp untuk 1 bast yang seharusnya bast karena ada 2 pengerjaan kdp, ketika aset definitif dilakukan koreksi nilai berkurang untuk 1 rumah dinas dan koreksi nilai bertambah untuk 1 rumah dinas. agar nilai kdp masuk ke 2 nup rumah dinas
868	'00501	Sulawesi Tengah	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	BAST NONKONTRAKTUAL	'0001	28-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Perjalanan Dinas Untuk Mengikuti Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Pos Jaga dan Pagar	4040104001	1	3.090.000	3.090.000	'220531301000167	koreksi pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai KDP telah dilakukan koreksi pencatatan, dan diinputkan sebagai perolehan lainnya kdp, pengembangan dan koreksi nilai bertambah kdp
869	'00501	Sulawesi Tengah	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	BAST NONKONTRAKTUAL	'254/Bua.UKPBJ/SK/XII/2021	'03-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honorarium Pokja Pemilihan Penyedia Kegiatan Pengadaan Pagar dan Pos Jaga PEngadilan Agama Luwuk Tahun 2022	4040104001	1	3.060.000	3.060.000	'220531301003753	koreksi pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai KDP telah dilakukan koreksi pencatatan, dan diinputkan sebagai perolehan lainnya kdp, pengembangan dan koreksi nilai bertambah kdp
870	'00501	Sulawesi Tengah	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	BAST NONKONTRAKTUAL	W19-A2/1035/PL.08/XII/2021	14-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga&Pagar PA. Luwuk Tahun 2022	4040104001	1	680.000	680.000	'220531301000571	koreksi pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai KDP telah dilakukan koreksi pencatatan, dan diinputkan sebagai perolehan lainnya kdp, pengembangan dan koreksi nilai bertambah kdp
871	'00501	Sulawesi Tengah	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	BAST NONKONTRAKTUAL	W19-A2/1035C/PL.08/XII/2021	23-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honorarium Pejabat Pengadaan	3050199999	1	680.000	680.000	'220531305000036	koreksi pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai KDP telah dilakukan koreksi pencatatan, dan diinputkan sebagai perolehan lainnya kdp, pengembangan dan koreksi nilai bertambah kdp
872	'00501	Sulawesi Tengah	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	BAST NONKONTRAKTUAL	W19-A2/1036/PL.08/XII/2021	'03-01-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022	4040104001	1	680.000	680.000	'220531301003752	koreksi pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai KDP telah dilakukan koreksi pencatatan, dan diinputkan sebagai perolehan lainnya kdp, pengembangan dan koreksi nilai bertambah kdp
873	'00501	Sulawesi Tengah	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	BAST NONKONTRAKTUAL	W19-A2/299/KU.01/II/2022	'02-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Berupa Perjadin (Administrasi Proyek)	4040104001	1	9.883.679	9.883.679	'220531301000919	koreksi pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai KDP telah dilakukan koreksi pencatatan, dan diinputkan sebagai perolehan lainnya kdp, pengembangan dan koreksi nilai bertambah kdp
874	'00501	Sulawesi Tengah	307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	BAST NONKONTRAKTUAL	W19-A2/495a/PL.01/V/2022	10-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Barang Sesuai SPD No. W19-A2/495a/PL.01/V/2022	4040104001	1	16.891.500	16.891.500	'220531301003630	koreksi pencatatan yang seharusnya dicatat sebagai KDP telah dilakukan koreksi pencatatan, dan diinputkan sebagai perolehan lainnya kdp, pengembangan dan koreksi nilai bertambah kdp
875	'00501	Sulawesi Tengah	400534	PENGADILAN TINGGI PALU	BAST KONTRAKTUAL	W21-U/094/PL.01/6/2022	'02-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Addendum Ke-2 Rehab Rumah Dinas dan Pagar Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	2010101001	1	1.744.571.700	1.744.571.700	'220511301009979	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 13 kdp rumah dinas dan 1 gedung kantor
876	'00501	Sulawesi Tengah	400534	PENGADILAN TINGGI PALU	BAST KONTRAKTUAL	W21-U/095/PL.01/6/2022	'02-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Addendum Ke-1 Pengawasan Rehab Rumah Dinas dan Pagar Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	2010101001	1	99.485.000	99.485.000	'220511301010003	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 13 kdp rumah dinas dan 1 gedung kantor
877	'00501	Sulawesi Tengah	400534	PENGADILAN TINGGI PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	W21-U/117/PL.01/7/2022	'08-07-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Operasional Pengelola Kegiatan	2010101002	1	18.825.000	18.825.000	'220511301013979	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 13 kdp rumah dinas dan 1 gedung kantor
878	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	16-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST Konsumsi Rapat Pokja Kantor PTUN Palu	4010101001	9	26.000	234.000	'220511301001618	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatat sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
879	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00014	16-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST - Konsumsi Rapat Pojka Kantor PTUN Palu pada tanggal 5 Januari 2022	4010101001	1	208.000	208.000	'220511301001618	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
880	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00015	16-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST - Pembelian Konsumsi Rapat Pokja kantor Ptun Palu pada tanggal 19 Januari 2022	4010101001	5	17.000	85.000	'220511301001618	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
881	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00016	16-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST - Konsumsi Rapat Pokja Kantor PTUN Palu pada tanggal 19 Januari 2022	4010101001	5	28.000	140.000	'220511301001618	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
882	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	16-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST - Konsumsi Rapat Pokja Kantor PTUN Palu pada tanggal 26 Januari 2022	4010101001	10	16.500	165.000	'220511301001618	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
883	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00018	16-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST - Konsumsi Rapat Pokja Kantor PTUN Palu pada tanggal 26 Januari 2022	4010101001	10	34.000	340.000	'220511301001618	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
884	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00019	16-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BAST - Konsumsi Rapat Pokja Kantor PTUN Palu pada tanggal 27 Januari 2022	4010101001	17	14.000	238.000	'220511301001618	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
885	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00025	17-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembelian Mesin Printer Epson L5290 untuk keperluan administrasi proyek kantor PTUN Palu	4010101001	1	5.176.500	5.176.500	'220511301001819	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
886	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00026	17-02-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembelian Mesin Proyektor Epson EB-X500 EIN untuk keperluan administrasi proyek kantor PTUN Palu	4010101001	1	5.712.000	5.712.000	'220511301001819	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
887	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00044	22-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama satu hari untuk 5 Orang pada tanggal 22 Desember 2021	4010101001	1	1.400.000	1.400.000	'220511301004208	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
888	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00045	22-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama satu hari untuk 5 Orang pada tanggal 20 Desember 2021	4010101001	1	1.400.000	1.400.000	'220511301004208	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
889	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00046	22-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama dua hari untuk 5 Orang pada tanggal 30 - 31 Desember 2021	4010101001	2	1.400.000	2.800.000	'220511301004208	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
890	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00047	22-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama Dua hari untuk 5 Orang pada tanggal 4 - 5 Januari 2022	4010101001	2	1.400.000	2.800.000	'220511301004208	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
891	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048	22-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama satu hari untuk 5 Orang pada tanggal 14 Januari 2022	4010101001	1	1.400.000	1.400.000		terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
892	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00049	22-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama Dua hari untuk 5 Orang pada tanggal 19 - 20 Januari 2022	4010101001	2	1.400.000	2.800.000	'220511301004208	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
893	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00050	22-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama tiga hari untuk 5 Orang pada tanggal 26 - 28 Januari 2022	4010101001	3	1.400.000	4.200.000	'220511301004208	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
894	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00052	25-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas Tim Pokja dalam kota selama 1 hari untuk 5 Orang pada tanggal 14 Januari 2022	4010101001	1	1.400.000	1.400.000	'220511301006490	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
895	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00053	28-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Print dan Jilid untuk keperluan Administrasi Proyek Pokja	4010101001	1	314.000	314.000	'220511301006490	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
896	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00054	28-03-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Fotocopy untuk keperluan Administrasi Proyek Pokja	4010101001	1	729.750	729.750	'220511301006490	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
897	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00067	27-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja PTUN Palu	4010101001	1	4.500.000	4.500.000	'220511301008781	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
898	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00069	28-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembelian ATK untuk keperluan Tim Pokja Kantort PTUN Palu	4010101001	1	1.750.000	1.750.000	'220511301008781	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
899	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'09-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Bast Pembelian Tinta Epson untuk Keperluan Administrasi Tim Pokja PTUN Palu	4010101001	9	110.000	990.000	'220511301008781	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
900	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00075	27-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi tentang asistensi gambar desain pembangunan gedung kantor PTUN Palu di Badan Urusan Administrasi Jakarta tanggal 17 samapi dengan 21 Mei 2022	4010101001	1	9.202.350	9.202.350	'220511301011633	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
901	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00076	27-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi tentang asistensi gambar desain pembangunan gedung kantor PTUN Palu di Badan Urusan Administrasi Jakarta tanggal 17 samapi dengan 21 Mei 2022	4010101001	1	9.769.450	9.769.450		terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
902	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00077	27-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi tentang asistensi gambar desain pembangunan gedung kantor PTUN Palu di Badan Urusan Administrasi Jakarta tanggal 17 sampai dengan 21 Mei 2022	4010101001	1	9.931.150	9.931.150	'220511301011633	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
903	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00081	'03-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Honor Pengelola Teknis bulan Januari sampai dengan Mei 2022 kantor PTUN Palu	4010101001	1	3.850.000	3.850.000	'220511301011633	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
904	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00097	27-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Honorarium Narasumber Pengelola Teknis Kegiatan tanggal 27 Januari 2022	4010101001	3	900.000	2.700.000	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
905	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00098	27-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Honorarium Narasumber Pengelola Teknis Kegiatan tanggal 18 Februari 2022	4010101001	2	900.000	1.800.000	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
906	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00099	27-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Honorarium Narasumber Pengelola Teknis Kegiatan tanggal 25 Mei 2022	4010101001	2	900.000	1.800.000	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
907	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00100	27-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Honorarium Narasumber Pengelola Teknis Kegiatan tanggal 14 Juni 2022	4010101001	1	900.000	900.000	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
908	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00102	27-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Honorarium Tenaga Teknis kegiatan tanggal 21 Juni 2022	4010101001	2	1.700.000	3.400.000	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
909	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00103	27-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Honorarium Tenaga Teknis kegiatan tanggal 26 Juni 2022	4010101001	4	1.700.000	6.800.000	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
910	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00114	12-07-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Biaya Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan proyek di BUA dan Dirjen di Jakarta pada tgl 6 - 9 Juli 2022	4010101001	1	9.204.300	9.204.300	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
911	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00115	12-07-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pemb. Biaya Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan proyek di BUA dan Dirjen di Jakarta pada tgl 6 - 9 Juli 2022	4010101001	1	8.745.100	8.745.100	'220511301013982	terjadi dikarenakan penginputan yang seharusnya dicatta sebagai kdp tetapi membentuk aset. sudah diperbaiki dengan koreksi pencatatan, telah dilakukan penginputan kdp perolehan lainnya dan pengembangan. Untuk pengerjaan 1 kdp
912	'00501	Sulawesi Tengah	672980	PENGADILAN NEGERI PARIGI	BAST KONTRAKTUAL	W21-U7/2591/PL.08/12/2022	12-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Perbaikan Jaringan Listrik	5040299999	1	189.060.000	189.060.000	'220511301030521	kesalahan penginputan yang seharusnya menambah nilai gedung tetapi dicatat sebagai jaringan listrik lainnya. koreksi pencatatan dan dilakukan penambahan nilai gedung

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
913	'00501	Sulawesi Tenggara	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	21-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Biaya belanja bahan dan instalasi penghubung untuk pemasangan daya 10500 Kwh Gedung Kantor Pengadilan Negeri Unaaha (Perincian terlampir) kepada PT Multi Elektrikal Indonesia	4010101001	1	6.959.700	6.959.700	'220601701001115	Realisasi belanja modal gedung dan bangunan, namun nilainya dibawah kapitalisasi
914	'00501	Sulawesi Tenggara	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	BAST NONKONTRAKTUAL	W23-U5/2637/PL.08/XII/2022	'07-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Tmbah daya listrik pada Pengadilan Negeri Unaaha	4010101001	1	7.841.000	7.841.000	'220601303006452	Realisasi belanja modal gedung dan bangunan, namun nilainya dibawah kapitalisasi
915	'00501	Sulawesi Tenggara	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	BAST NONKONTRAKTUAL	W23-U5/2637.a/PL.08/XII/2022	'07-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	tambah daya listrik pada Pengadilan Negeri Unaaha	4010101001	1	3.000.000	3.000.000	'220601302018332	Realisasi belanja modal gedung dan bangunan, namun nilainya dibawah kapitalisasi
916	'00501	Sulawesi Tenggara	477224	PENGADILAN NEGERI UNA AHA	BAST NONKONTRAKTUAL	W23-U5/2637.a/PL.08/XII/2022	'07-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	tambah daya listrik pada Pengadilan Negeri Unaaha	4010101001	1	4.000.000	4.000.000	'220601302018332	Realisasi belanja modal gedung dan bangunan, namun nilainya dibawah kapitalisasi
917	'00501	Sulawesi Tenggara	576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	BAST KONTRAKTUAL	W21-A/41/BAST/PPK/12/2022	'09-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan 1 (satu) Paket Automatic Transfer Switch (ATS) Genset 100KVA Pengadilan Tinggi Agama Kendari Tahun Anggaran 2022.	5040201002	1	72.982.500	72.982.500	'220601301026208	Kesalahan kode barang seharusnya peralatan dan mesin
918	'00501	Sulawesi Tenggara	604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	BAST KONTRAKTUAL	W21-A5/G.01/PPK/PL.01/VI/2022	29-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2022	6070301001	1	101.085.300	101.085.300	'220601302007708	Kesalahan penggunaan kode barang, seharusnya Gedung menjadi ATR, sudah dilakukan koreksi
919	'00501	Sulawesi Utara	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	18-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Administrasi Perencanaan Tim POKJA Renovasi dan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Tahuna	2010104001	1	42.000.000	42.000.000	'220831701000033	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pad modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KPD gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salaha dan perolehan lainnya KDP.
920	'00501	Sulawesi Utara	307246	PENGADILAN AGAMA TAHUNA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00017	17-05-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Administrasi proyek peembangunan gedung Pengadilan Agama Tahuna berupa Perjalanan Dinas Untuk 3 orang Pegawai ke Mahkamah Agung RI	2010102003	1	25.000.000	25.000.000	'220831701000047	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pad modul komitmen seharusnya menggunakan kode barang KPD gedung dan bangunan. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salaha dan perolehan lainnya KDP.
921	'00501	Sulawesi Utara	568725	PENGADILAN NEGERI BITUNG	BAST KONTRAKTUAL	W19-U5/521/PL.03/11/2022	'01-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perbaikan Jaringan Listrik Gedung Kantor	5040299999	1	174.936.000	174.936.000	'221791302004186	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambahn niali gedung dan bangunan dengan kode barang 4010101001. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dankoreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
922	'00501	Sulawesi Utara	604751	PENGADILAN AGAMA BITUNG	BAST NONKONTRAKTUAL	W18-A5/964/PL.04/12/2022	'01-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Rumah Genset Tahun 2022	4010130005	1	45.000.000	45.000.000	'221791303000651	Terdapat akun 532111 Belanja modal peralatan dan mesin seharusnya menggunakan akun 533111 belanja modal gedung dan bangunan.
923	'00501	Sulawesi Utara	682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	BAST KONTRAKTUAL	W18-A6/434/PL.01/8/2022	'05-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Pengadilan Agama Amurang Kabupaten Minahasa Selatan	2010104001	1	80.000.000	80.000.000	'220491301015301	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen seharusnya menambahn niali gedung dan bangunan dengan kode barang 4010101001. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas kode barang yang salah dankoreksi nilai bertambah gedung dan bangunan.
924	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	188.700	377.400	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
925	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	210.900	421.800	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
926	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	277.500	555.000	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
927	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	122.100	244.200	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
928	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3070108161	2	721.500	1.443.000	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
929	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	111.000	222.000	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
930	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3160101001	2	721.500	1.443.000	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
931	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	210.900	421.800	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
932	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	210.900	421.800	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
933	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3070108161	2	499.500	999.000	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
934	'00501	Sumatera Barat	'098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	BAST NONKONTRAKTUAL	W3.U1/02/PHP.PL-DIS/5/2022	13-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja modal sesuai dengan kuitansi nomor : 034/MSi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022	3050105089	2	166.500	333.000	'220101304006975	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
935	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3050206070	1	340.000	340.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
936	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3050105089	1	100.000	100.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
937	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3070108161	1	400.000	400.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
938	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3070101005	1	620.000	620.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
939	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3060299999	1	400.000	400.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
940	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3050105089	1	250.000	250.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
941	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3070108161	1	570.000	570.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
942	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	'02/KPA.PA.SLK/BAST.PSD/III/2022	'07-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Alat Sarana Disabilitas pada Pengadilan Agama Solok	3050105089	1	170.000	170.000	'220901304000195	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
943	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	W3-A7/1634/KU.01/XII/2022	'05-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Daftar nominatif perjalanan dinas	4010101001	1	4.200.000	4.200.000	'220901301006999	Merupakan biaya sppd seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
944	'00501	Sumatera Barat	401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	BAST NONKONTRAKTUAL	W3-A7/1670/KU.01/XII/2022	12-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengelola kegiatan terkait belanja modal gedung bagunan	4010101001	1	11.668.304	11.668.304	'220901301007136	Merupakan biaya pengelola kegiatan seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
945	'00501	Sumatera Barat	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00045	14-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nila Gedung dan bangunan berupa pengelola kegiatan sebagaimana terlampir	4010101001	1	500.000	500.000	'220901301006606	Merupakan biaya pengelola kegiatan seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
946	'00501	Sumatera Barat	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00046	28-11-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pengelola Kegiatan, sebagaimana terlampir	4010101001	1	500.000	500.000	'220901301006606	Merupakan biaya pengelola kegiatan seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
947	'00501	Sumatera Barat	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00049	12-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pengelola Kegiatan	4010101001	3	680.000	2.040.000	'220901701000292	Merupakan biaya pengelola kegiatan seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
948	'00501	Sumatera Barat	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00050	12-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pengelola Kegiatan, sebagaimana terlampir	4010101001	1	680.000	680.000		Merupakan biaya pengelola kegiatan seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
949	'00501	Sumatera Barat	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00051	29-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Perencanaan, sebagaimana terlampir	4010101001	1	2.500.000	2.500.000	'220901701000292	Merupakan biaya pengelola kegiatan seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
950	'00501	Sumatera Barat	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	BAST NONKONTRAKTUAL	'00052	29-12-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pengawasan, sebagaimana terlampir	4010101001	1	3.000.000	3.000.000	'220901701000292	Merupakan biaya pengelola kegiatan seharusnya menambah nilai gedung dan bangunan tetapi membentuk NUP baru. sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUp baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah pada 4010101001 gedung dan bangunan kantor.
951	'00501	Sumatera Barat	402050	PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH	BAST NONKONTRAKTUAL	'00021	30-08-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Bayar lunas belanja peralatan dan mesin-ekstrakomptabel berupa pembelian scafolding sebanyak 5 set bulan Agustus 2022 kantor Pengadilan Agama Payakumbuh	3030205027	5	1.000.000	5.000.000	'220111301008531	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja seharusnya menggunakan akun 532111 belanja modal peralatan dan mesin. SUdah tidak bisa lagi ralat akun belanja
952	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00030	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Batusangkar ke Bukittinggi pada tgl 04/02/2022 an Ahmad Rasyid Sadiki dalam rangka melaksanakan lanjutan lelang renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	530.000	530.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
953	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00031	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Ke Bukitting pada tgl 04/02/2022 an Rismal Riandi, S.H.dalam rangka pelaksanaan lelang lanjutan renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	480.000	480.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
954	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00032	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Bukittinggi pada tgl 04/02/2022 an Robi Gema Putra, S.Kom, dalam rangka pelaksanaan lelang lanjutan renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	480.000	480.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
955	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00033	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Ke Bukittinggi pada tgl 02/04/2022 an Rismal Riandi, S.H., dalam rangka melaksanakan lelang lanjutan renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	480.000	480.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
956	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00034	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Bukittinggi pada tgl 02/02/2022 an Robi Gema Putra, S.Kom; dalam rangka melaksanakan lelang lanjutan renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	480.000	480.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
957	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00035	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Batusangkar ke Bukittingi pada tgl 02/02/2022 an Ahmad Rasyid Sadiki dalam rangka melaksanakan lelang lanjutan renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	530.000	530.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
958	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00036	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Padang pada tgl 18/01/2022 an Rismal Riandi, S.H. dalam rangka melaksanakan konsultasi belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
959	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Padang pada tgl 18/01/2022 an Robi Gema Putra, S.Kom dalam rangka melaksanakan kegiatan konsultasi belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NUp baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
960	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00038	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Padang dalam pada tgl 18/01/2022, an Atika Dewi dalam rangka melaksanakan konsultasi belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
961	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00039	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Bukittinggi pada tgl 11/02/2022 an Rismal Riandi, S.H dalam rangka penyerahan hasil lelang lanjutan renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	480.000	480.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
962	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00040	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Bukittinggi pada tgl 11/02/2022 an Robi Gema Putra, S.Kom. dalam rangka penyerahan hasil lelang lanjutan renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	480.000	480.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
963	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00041	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Batusangkar ke Bukittinggi pada tgl 11/02/2022 an Ahmad Rasyid Sadiki dalam rangka penyerahan hasil lelang lanjutan renovasi	4010101001	1	530.000	530.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
964	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00042	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Padang pada tgl 15/02/2022 an Rismal Riandi, S.H. dalam rangka konsultasi belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
965	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00043	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Ke Padang pada tgl 15/02/2022 an Robi Gema Putra, S.Kom dalam rangka melaksankan konsultasi belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
966	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00044	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Ke Padang pada tgl 15/02/2022 an Atika Dewi dalam rangka melaksankan konsultasi belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
967	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00045	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Padang pada tgl 09/03/2022 an Rismal Riandi, S.H. dalam rangka konsultasi belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
968	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00046	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Padang pada tgl 09/03/2022 an Robi Gema Putra dalam rangka melaksanakan konsultasi mengenai belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
969	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00047	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD ke Padang pada tgl 15/03/2022 an Atika Dewi dalam rangka melaksanakan konsultasi mengenai belanja modal ke PTA Padang	4010101001	1	590.000	590.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
970	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00048	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	SPD Batusangkar ke Bukittinggi pada tgl 08-10 Feb 2022 an Ahmad Rasyid Sadiki dalam rangka pembukaan dan evaluasi dokumen renovasi Pengadilan Agama Tanjung Pati	4010101001	1	4.540.000	4.540.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
971	'00501	Sumatera Barat	402066	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI	BAST NONKONTRAKTUAL	'00049	14-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor pengadaan Jasa konstruksi lanjutan renovasi ruang tunggu sidang dan ruang PTSP PA Tanjung Pati	4010101001	1	680.000	680.000	'220111301005636	Terdapat kesalahan pemilihan kode barang sehingga membetuk NU baru seharusnya menggunakan kode barang KDP. Sudah dilakukan koreksi pencatatan atas NUP baru yang terbentuk dan koreksi nilai bertambah KDP
972	'00501	Sumatera Barat	531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	BAST KONTRAKTUAL	W1-TUN3/1875/PL.05/XII/2022	14-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Ruang PTSP dan Ruang Tunggu	3050201003	4	960.150	3.840.600	'220101304014396	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
973	'00501	Sumatera Selatan	'098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	BAST NONKONTRAKTUAL	'007/CVSBY/INV/IX/2022	'08-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian 60 unit kursi susun	3050201003	60	264.180	15.850.800	'220141302015322	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
974	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	5	300.000	1.500.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
975	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	1	350.000	350.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
976	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	1	400.000	400.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
977	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	1	450.000	450.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
978	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	1	750.000	750.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
979	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	1	550.000	550.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
980	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	1	750.000	750.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
981	'00501	Sumatera Selatan	401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	BAST KONTRAKTUAL	W6-A11/1442/PL.01/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Agama Pagar Alam	3050199999	5	185.000	925.000	'221441303003078	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
982	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201033	3	999.000	2.997.000	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
983	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	4	804.528	3.218.112	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
984	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	3	804.528	2.413.584	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
985	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	10	900.654	9.006.540	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
986	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201004	16	804.528	12.872.448	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
987	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201004	2	951.270	1.902.540	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
988	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	13	630.924	8.202.012	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
989	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050206057	140	82.362	11.530.680	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
990	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	2	804.528	1.609.056	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
991	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050104001	8	919.524	7.356.192	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
992	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	6	804.528	4.827.168	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
993	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050104005	6	856.254	5.137.524	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
994	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	2	380.508	761.016	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
995	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	'50.658.50.2022.0238-0	15-09-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050201003	5	804.528	4.022.640	'220141301014984	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
996	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST KONTRAKTUAL	W6-A12/1063/PL.05/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022	3050206057	140	329.448	46.122.720	'220141301023162	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
997	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3070108161	1	812.500	812.500	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
998	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3010399999	2	143.000	286.000	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
999	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3010399999	1	182.000	182.000	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
1000	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3010399999	1	195.000	195.000	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
1001	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3010399999	1	208.000	208.000	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
1002	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3010399999	1	227.500	227.500	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
1003	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3070108161	1	481.000	481.000	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
1004	'00501	Sumatera Selatan	401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	BAST NONKONTRAKTUAL	W6-A12/1072/PL.04/XII/2022	12-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembayaran Paket Pengadaan Alat Bantu Disabilitas Pengadilan Agama Prabumulih	3060102118	1	585.000	585.000	'220141303026028	Terdapat akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin ekstrakomptabel atas pengadaan aset dibawah nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun 521252 belanja modal peralatan dan mesin ekstrakomtabel
1005	'00501	Sumatera Selatan	663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	BAST KONTRAKTUAL	W1Mil04/76/PL.04/XII/2022	21-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Tahun 2022	3050201003	30	949.000	28.470.000	'220141302026748	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin, namun nilai satuan dibawah kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
1006	'00501	Sumatera Utara	'098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	BAST KONTRAKTUAL	BAP:W2.U/2137/Um.01.10/2/2022	11-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Tinggi Medan TA. 2022	3060101048	39	871.200	33.976.800	'221231304001258	Terdapat belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) yang nilainya dibawah kapitalisasi perunitnya, yaitu pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai Rp. 871.200,- sebanyak 39 unit, dengan BAST Nomor : BAP:W2.U/2137/Um.01.10/2/2022 penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1007	'00501	Sumatera Utara	'098701	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	BAST NONKONTRAKTUAL	'2366/BAST-PL.PIPP/8/2022	19-08-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pengadaan Pemasangan Instalasi Penangkal Petir Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022	5030901001	1	25.405.000	25.405.000	'220051304001306	terdapat kesalahan pencatatan yang seharusnya menambah nilai gedung tetapi menimbulkan aset baru dengan kode barang 5030901001 telah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi pencatatan nilai bertambah untuk gedung dan bangunan
1008	'00501	Sumatera Utara	'098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	BAST KONTRAKTUAL	W2.U61724/UM/XII/2022	19-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Rumah Genset Pengadilan Negeri Tarutung Tahun Anggaran 2022	2010309005	1	149.517.000	149.517.000	'221251304002145	terdapat kesalahan penginputan yang seharusnya bangunan rumah genset tetapi dicatat tanah untuk bangunan instalasi listrik. Dan terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin seharusnya menggunakan belanja modal gedung dan bangunan telah melakukan reklasifikasi keluar untuk tanah bangunan instalasi listrik dan reklasifikasi masuk bangunan rumah genset. Dan tambahan penjelasan pada calk karena kesalahan penggunaan akun
1009	'00501	Sumatera Utara	401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-A1/2211/KU.01.1/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	jasa pejabat pengadaan barang dan jasa	3100203001	11	45.000	495.000	'221231304003513	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. Telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk barang tepat
1010	'00501	Sumatera Utara	401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-A1/2211/KU.01.1/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	jasa pejabat pengadaan barang dan jasa	3100203003	1	50.000	50.000	'221231304003513	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. Telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk barang tepat
1011	'00501	Sumatera Utara	401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-A1/2211/KU.01.1/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	jasa pejabat pengadaan barang dan jasa	3090402031	1	45.000	45.000	'221231304003513	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. Telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk barang tepat
1012	'00501	Sumatera Utara	401803	PENGADILAN AGAMA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W2-A1/2211/KU.01.1/V/2022	23-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	jasa pejabat pengadaan barang dan jasa	3100203003	2	45.000	90.000	'221231304003513	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. Telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk barang tepat
1013	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	BAST KONTRAKTUAL	W2-A.10/1361/PL.01/V/2022	31-05-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Barang Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Lubuk Pakam	4010130005	1	26.401.892	26.401.892	'221241304001352	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 533111 tetapi menggunakan akun 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1014	'00501	Sumatera Utara	526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1-TUN/10/PL.05/8/2022	'03-08-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	3050201020	24	514.500	12.348.000	'221231304005821	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akun 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1015	'00501	Sumatera Utara	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00004	28-03-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Pejabat Pengadaan Fasilitas Perkantoran berupa Meubelair Pengadilan Tata Usaa Negara Medan TA.2022	3050104002	1	680.000	680.000	'221231301003217	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. Telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk barang tepat
1016	'00501	Sumatera Utara	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00008	16-06-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Honor Pejabat Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	3100203004	1	680.000	680.000	'221231301006543	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. Telah dilakukan koreksi pencatatan dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk barang tepat
1017	'00501	Sumatera Utara	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00009	16-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung/Ruang Arsip	4010101001	1	680.000	680.000	'221231301006543	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. telah dimasukan sebagai KDP dan detailkan koreksi penambahan nilai gedung dan bangunan
1018	'00501	Sumatera Utara	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00010	16-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung/Ruang Arsip	4010101001	1	680.000	680.000	'221231301006543	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. telah dimasukan sebagai KDP dan detailkan koreksi penambahan nilai gedung dan bangunan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
1019	'00501	Sumatera Utara	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00011	16-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pokja Pemilihan Penyedia Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung/Ruang Arsip	4010101001	1	2.550.000	2.550.000	'221231301006543	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. telah dimasukan sebagai KDP dan detailkan koreksi penambahan nilai gedung dan bangunan
1020	'00501	Sumatera Utara	526746	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	'00012	16-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Honor Pokja Pemilihan Penyedia Kegiatan Pengadaan Konsultan Perencana Renovasi Rumah Dinas	4010202007	1	2.040.000	2.040.000	'221231301006543	kesalahan pencatatan yang seharusnya honorarium pejabat pengadaan tidak menjadi aset. telah dimasukan sebagai KDP dan detailkan koreksi penambahan nilai gedung dan bangunan
1021	'00501	Sumatera Utara	547682	PENGADILAN AGAMA STABAT	BAST KONTRAKTUAL	W2A16/2581/PL.01/XI/2022	'08-11-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Penambahan Daya Listrik	5040299999	1	59.715.000	59.715.000	'221231304008462	kesalahan penginputan yang seharusnya menambah nilai gedung tetapi dicatat sebagai jaringan listrik lainnya. Dan kesalahan penggunaan akun yang seharunsya akun belanja modal gedung bangunan tetapi menggunakan akun belanja peralatan dan mesin telah dilakukan koreksi pencatatan untuk jaringan listrik lainnya dan dilakukan koreksi nilai bertambah untuk gedung dan bangunan. Utnuk kesalahan penggunaan akun diungkapkan di calk
1022	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3030308012	2	995.000	1.990.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1023	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070108161	2	175.000	350.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1024	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070108161	2	252.000	504.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1025	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3160101001	2	320.000	640.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1026	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3150303058	1	160.000	160.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1027	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070205999	1	290.000	290.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1028	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070101005	1	380.000	380.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1029	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070108161	2	205.000	410.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1030	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	6010101999	1	2.950.000	2.950.000	'221231304005117	pembelian monografi menggunakan akun belanja 532111 pembelian monografi menggunakan akun belanja 532111
1031	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070108161	1	130.000	130.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1032	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070108161	2	390.000	780.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE BMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D	Penjelasan
1033	'00501	Sumatera Utara	663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	BAST NONKONTRAKTUAL	W1Mil/344/PL.04/VII/2022	'06-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Sarana Disabilitas Pengadilan Militer Tinggi I Medan	3070108161	1	770.000	770.000	'221231304005117	kesalahan kode akun belanja, yang seharusnya 521252 tetapi meunggunakan akuan 532111. penjelasan pada calk satuan kerja kesalahan penggunaan akun
1034	'00501	Yogyakarta	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	BAST NONKONTRAKTUAL	'00013	21-12-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Administrasi Proyek Pembangunan Pagar Rumah Dinas	4040104001	1	5.810.000	5.810.000	'220301701002842	Kesalahan pencatatan pembangunan pagar sebagai nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi nilai bertambah pada pagar permanen
1035	'00501	Yogyakarta	663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	BAST KONTRAKTUAL	W2.Mil.04/09/Pgr-Kons/XI/2022	'09-11-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Renovasi Gedung Konstruksi Fisik	2010101002	1	243.470.000	243.470.000	'220301303021860	Kesalahan pencatatan kode barang atas pembangunan pagar sebagai tanah, sudah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk ke pagar permanen
														30.368.876.460		

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
1	'00501	Aceh	'098476	PENGADILAN NEGERI BEUREUN	15-02-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Tambah Daya Listrik	1010306999	1	21.118.500	21.118.500	Terdapat akun 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, namun melakukan input kode barang persediaan berupa Tambah Daya Listrik yang dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah 4010101001 Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai 21118500
2	'00501	Aceh	401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	28-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	PEMBELIAN KIPAS ANGIN GANTUNG	1010399999	2	500.000	1.000.000	Terjadi kesalahan input pada aplikasi sakti seharsnya di input pada modul aset tetap ekstrakomptabel , terinput pada modul persediaan
3	'00501	Aceh	401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	'09-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	PEMABAYARAN PEMBELIAN 4 UNIT KIPAS ANGIN GAN	1010399999	4	500.000	2.000.000	Terjadi kesalahan input pada aplikasi sakti seharsnya di input pada modul aset tetap ekstrakomptabel , terinput pada modul persediaan
4	'00501	Aceh	401721	MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH	13-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	PEMBAYARAN PEMBELIAN 4 UNIT DISPENSER	1010305009	4	500.000	2.000.000	Terjadi kesalahan input pada aplikasi sakti seharsnya di input pada modul aset tetap ekstrakomptabel , terinput pada modul persediaan
5	'00501	Aceh	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	'08-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Pembelian Pembelian POE SWITCH Hikvision	1010304999	1	980.000	980.000	Terdapat kesalahan input seharusnya di aset tetapakun belanja ekstrakomptabel dan sudah di tindaklanjuti pada saat asisten, dengan input ulang di modul aset tetap perolehan lainnya
6	'00501	Aceh	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	11-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Pembelian UPS	1010304999	2	900.000	1.800.000	Terdapat kesalahan input seharusnya di aset tetapakun belanja ekstrakomptabel dan sudah di tindaklanjuti pada saat asisten, dengan input ulang di modul aset tetap perolehan lainnya
7	'00501	Aceh	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	18-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Pembelian Jam Digital	1010304999	2	620.000	1.240.000	Terdapat kesalahan input seharusnya di aset tetapakun belanja ekstrakomptabel dan sudah di tindaklanjuti pada saat asisten, dengan input ulang di modul aset tetap perolehan lainnya
8	'00501	Aceh	401746	MAHKAMAH SYAR'IYAH CALANG	25-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Pembelian Printer Thermal	1010304999	1	980.000	980.000	Terdapat kesalahan input seharusnya di aset tetapakun belanja ekstrakomptabel dan sudah di tindaklanjuti pada saat asisten, dengan input ulang di modul aset tetap perolehan lainnya
9	'00501	Bali	'099780	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	'09-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	pembelian vertical blind/gordyn pada RAJ GORDEN	1010399999	20	225.000	4.500.000	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan
10	'00501	Bali	'099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	31-10-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembayaran Belanja Barang Berupa Vitamin 44 Botol	1010401002	45	53.835	2.422.575	Terdapat 521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
11	'00501	Bangka Belitung	402302	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	22-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian toner 83A	1010304004	1	225.000	225.000	Kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan peralatan mesin untuk membeli toner
12	'00501	Bengkulu	308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	'02-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Biaya langganan surat kabar Pengadilan Agama Manna bulan Januari 2022	1010313001	278	8.000	2.224.000	Salah akun saat input RUH di Modul Komitmen, karena bukan merupakan akun persediaan 521811. Sudah di detailakan di Bulan Juli tetapi belum approver
13	'00501	Bengkulu	308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	14-03-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Berupa Pembelian Kipas Angin	1010399999	1	500.000	500.000	Salah akun saat input RUH di Modul Komitmen, karena bukan merupakan akun persediaan 521811. Sudah di detailakan di Bulan Juli tetapi belum approver
14	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Rapat Konsultasi dan Pendampingan Bawas dalam Pembangunan Gedung Kantor PA Tais	1010901001	1	2.240.000	2.240.000	Salah akun saat input RUH di Modul Komitmen, karena bukan merupakan akun persediaan 521811. Sudah di detailakan di Bulan Juli tetapi belum approver
15	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan BAngunan Berupa Pembayaran Perjalanan Dinas Surat Tugas No. W7-A8/358/PL.01/2/2022 Tanggal 16 Februari 2022	1010901001	1	1.330.000	1.330.000	Salah akun saat input RUH di Modul Komitmen, karena bukan merupakan akun persediaan 521811. Sudah di detailakan di Bulan Juli tetapi belum approver
16	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perjalanan Dinas Surat Tugas Nomor: W7-A8/358/PL.01/2/2022 Tanggal 16 Februari 2022	1010901001	1	1.330.000	1.330.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
17	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Sewa 3 Unit Leptop selama 3 Bulan dari Bulan Januari s.d Maret 2022	1010901001	3	4.500.000	13.500.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
18	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Pembayaran Honorarium POKJA Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kantor PA Tais	1010901001	1	4.550.000	4.550.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
19	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas Nomor: W7-A/10/PL.01/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
20	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa surat Tugas Nomor: W7-A/10/PL.01/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
21	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa surat Tugas Nomor: W7-A/10/PL.01/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
22	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa surat Tugas Nomor: W7-A/10/PL.01/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
23	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa surat Tugas Nomor: W7-AI/686/HM.00/1/2022 Tanggal 10 Januari 2022	1010901001	1	95.000	95.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
24	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Barang Persediaan barang Konsymsi Berupa Pena, Pensil, dll	1010901001	1	4.419.400	4.419.400	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
25	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa surat Tugas Nomor: W7-A/333/PL.01/1/2022 Tanggal 7 Januari 2022	1010901001	1	95.000	95.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
26	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/333/PL.01/1/2022 Tanggal 7 Januari 2022	1010901001	1	95.000	95.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
27	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/333/PL.01/1/2022 Tanggal 7 Januari 2022	1010901001	1	95.000	95.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
28	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/333/PL.01/1/2022 Tanggal 7 Januari 2022	1010901001	1	95.000	95.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
29	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/343/PL.01/1/2022 Tanggal 3 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
30	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/429/PL.01/1/2022 Tanggal 27 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
31	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/429/PL.01/1/2022 Tanggal 27 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
32	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/429/PL.01/1/2022 Tanggal 27 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
33	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/429/PL.01/1/2022 Tanggal 27 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
34	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-AI/446/PL.01/1/2022 Tanggal 28 Januari 2022	1010901001	1	260.000	260.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
35	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/625/HM.00/2/2022 Tanggal 23 Februari 2022	1010901001	1	3.679.290	3.679.290	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
36	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Surat Tugas W7-A/625/HM.00/2/2022 Tanggal 23Februari 2022	1010901001	1	3.809.850	3.809.850	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
37	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Rapat Evaluasi Prakualifikasi	1010901001	1	1.220.000	1.220.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
38	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Perjalanan Dinas Surat Tugas Nomor W7-A8/488/PL.01/3/2022 Tanggal 18 Maret 2022	1010901001	1	4.602.700	4.602.700	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
39	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Perjalanan Dinas Surat Tugas Nomor: W7-A8/488/PL.01/3/2022 Tanggal 18 Maret 2022	1010901001	1	4.016.300	4.016.300	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
40	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Perjalanan Dinas Surat Tugas Nomor: W7-A/715/PL.01/3/2022 Tanggal 8 Maret 2022	1010901001	1	380.000	380.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
41	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Perjalanan Dinas Surat Tugas Nomor: W7-A/715/PL.01/3/2022 Tanggal 8 Maret 2022	1010901001	1	380.000	380.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
42	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Pembelian Perlengkapan Untuk Pembuatan Gedung Kantor PA Tais	1010901001	1	1.358.000	1.358.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
43	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Perjalanan Dinas Surat Tugas Nomor: W7-A8/426/PL.01/3/2022 Tanggal 7 Maret 2022	1010901001	1	450.000	450.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
44	'00501	Bengkulu	401941	PENGADILAN AGAMA TAIS	20-04-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berupa Uang Harian Perjalanan Dinas Surat Tugas Nomor: W7-A8/426/PL.01/3/2022 Tanggal 7 Maret 2022	1010901001	1	450.000	450.000	Sudah didetailkan dan sudah di hapuskan berdasarkan surat nomor W7-A8/955/KU.01/7/2022
45	'00501	Gorontalo	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	28-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Mouse dan Catridge	1010304004	2	386.400	772.800	Satuan kerja mencatat barang persediaan menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, barang persediaan sudah dilakukan pemakaian. Seharusnya barang pemeliharaan tidak perlu dicatat di modul persediaan sebagai barang persediaan. Dilakukan jurnal D: 523121 Belanja Pemeliharaan PM K: 593111 Beban Persediaan Barang Konsumsi senilai 772.800
46	'00501	Gorontalo	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	28-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Mouse dan Catridge	1010304004	2	435.000	870.000	Satuan kerja mencatat barang persediaan menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, barang persediaan sudah dilakukan pemakaian. Seharusnya barang pemeliharaan tidak perlu dicatat di modul persediaan sebagai barang persediaan. Dilakukan jurnal D: 523121 Belanja Pemeliharaan PM K: 593111 Beban Persediaan Barang Konsumsi senilai 870.000
47	'00501	Gorontalo	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	28-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Mouse dan Catridge	1010304010	3	72.800	218.400	Satuan kerja mencatat barang persediaan menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, barang persediaan sudah dilakukan pemakaian. Seharusnya barang pemeliharaan tidak perlu dicatat di modul persediaan sebagai barang persediaan. Dilakukan jurnal D: 523121 Belanja Pemeliharaan PM K: 593111 Beban Persediaan Barang Konsumsi senilai 218.400

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
48	'00501	Gorontalo	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	11-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Lampu Gedung Kantor	1010306002	36	74.100	2.667.600	Satuan kerja mencatat barang persediaan menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, barang persediaan sudah dilakukan pemakaian. Seharusnya barang pemeliharaan tidak perlu dicatat di modul persediaan sebagai barang persediaan. Dilakukan jurnal D: 523111 Belanja Pemeliharan GB K: 593111 Beban Persediaan Barang Konsumsi senilai 2.667.600
49	'00501	Gorontalo	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA	11-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Lampu Gedung Kantor	1010306002	46	92.910	4.273.860	Satuan kerja mencatat barang persediaan menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, barang persediaan sudah dilakukan pemakaian. Seharusnya barang pemeliharaan tidak perlu dicatat di modul persediaan sebagai barang persediaan. "Dilakukan jurnal D: 523111 Belanja Pemeliharan GB K: 593111 Beban Persediaan Barang Konsumsi senilai 4.273.860 "
50	'00501	Jawa Barat	401959	PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH	24-08-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	PEMBELIAN QURAN PADA 240822	1010301005	3	71.000	213.000	kesalahan pencatatan kuitansi pembelian alquran dengan akun 521119 mencatat barang persediaan, dilakukan koreksi pencatatan persediaan dan melakukan jurnal manual (D) 521119 (K) Beban penyesuaian nilai persediaan
51	'00501	Jawa Tengah	'097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	12-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja barang pendukung perkantoran	1010309999	2	412.500	825.000	pembelian baranag ekstrakomptable berupa hardisk kipas angin dan jam dinding dibawah nilai kapitalisasi terjadi kesalahan menggunakan akun persediaan dan sudah di reklas dengan aset tetap
52	'00501	Jawa Tengah	'097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	'09-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja barang pendukung perkantoran	1010309999	1	404.000	404.000	pembelian baranag ekstrakomptable berupa hardisk kipas angin dan jam dinding dibawah nilai kapitalisasi terjadi kesalahan menggunakan akun persediaan dan sudah di reklas dengan aset tetap
53	'00501	Jawa Tengah	'097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	12-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja barang pendukung perkantoran	1010310999	1	771.000	771.000	pembelian baranag ekstrakomptable berupa hardisk kipas angin dan jam dinding dibawah nilai kapitalisasi terjadi kesalahan menggunakan akun persediaan dan sudah di reklas dengan aset tetap
54	'00501	Jawa Tengah	'097823	PENGADILAN NEGERI SALATIGA	13-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja barang pendukung perkantoran	1010309999	1	800.000	800.000	pembelian baranag ekstrakomptable berupa hardisk kipas angin dan jam dinding dibawah nilai kapitalisasi terjadi kesalahan menggunakan akun persediaan dan sudah di reklas dengan aset tetap
55	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian Pengharum Mobil Kendara	1010305012	4	35.200	140.800	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
56	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian Pengharum Mobil Kendara	1010305012	4	13.500	54.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
57	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	280.059	280.059	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
58	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	269.969	269.969	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
59	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	338.513	338.513	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
60	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	285.422	285.422	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
61	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	215.577	215.577	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
62	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian Teh Celup, Tempat Air, Gu	1010701001	2	14.250	28.500	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
63	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian Teh Celup, Tempat Air, Gu	1010305999	2	16.000	32.000	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
64	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian Teh Celup, Tempat Air, Gu	1010701002	2	25.200	50.400	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
65	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian Teh Celup, Tempat Air, Gu	1010701002	1	38.500	38.500	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
66	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian Teh Celup, Tempat Air, Gu	1010701002	1	30.500	30.500	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
67	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian Teh Celup, Tempat Air, Gu	1010701002	1	33.900	33.900	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
68	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian Teh Celup, Tempat Air, Gu	1010701002	2	20.400	40.800	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
69	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	186.125	186.125	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
70	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	244.571	244.571	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
71	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	341.955	341.955	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
72	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	304.853	304.853	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
73	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	356.337	356.337	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
74	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	368.348	368.348	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
75	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian 14 (empat belas) Buah Ac	1010310999	14	53.000	742.000	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
76	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP berupa Pembelian 14 (empat belas) Buah Ac	1010310999	4	61.000	244.000	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
77	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	422.280	422.280	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
78	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	283.960	283.960	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
79	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	361.080	361.080	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
80	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	271.958	271.958	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
81	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	300.416	300.416	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
82	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Ban Dlp Enasave/215/60-1	1010201001	1	5.000	5.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
83	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Ban Dlp Enasave/215/60-1	1010201001	1	825.000	825.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
84	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Ban Dlp Enasave/215/60-1	1010201001	1	10.000	10.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
85	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	203.490	203.490	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
86	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Belanja Keperlan Perkantoran Langganan Internet beru	1010310999	1	2.416.795	2.416.795	Terdapat Akun 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
87	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	177.863	177.863	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
88	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Semir Ban Dan Kanebo Ke	1010305008	1	27.700	27.700	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
89	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Semir Ban Dan Kanebo Ke	1010305008	1	36.000	36.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
90	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Semir Ban Dan Kanebo Ke	1010305002	1	79.750	79.750	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
91	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	167.765	167.765	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
92	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	442.706	442.706	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
93	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	290.088	290.088	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
94	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	200.000	200.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
95	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	243.653	243.653	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
96	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	172.814	172.814	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
97	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	200.000	200.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
98	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	200.000	200.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
99	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian 1 (satu) Buah GS Battery (	1010306009	1	825.000	825.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
100	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	347.387	347.387	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
101	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4	1020103007	1	152.082	152.082	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
102	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	AST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	315.027	315.027	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
103	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAKendaraan Roda - 4 , AG 40 AP ST KPP berupa Pemb	1020103007	1	277.848	277.848	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
104	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Oli dan Gasket Packing Oli	1010313002	1	545.000	545.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
105	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Oli dan Gasket Packing Oli	1010208001	1	7.000	7.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
106	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	271.499	271.499	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
107	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	289.017	289.017	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
108	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	442.476	442.476	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
109	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	369.824	369.824	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
110	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Oli Mesin, Oli Gardan dan	1010313002	6	101.000	606.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
111	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Oli Mesin, Oli Gardan dan	1010313002	5	97.000	485.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
112	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian Oli Mesin, Oli Gardan dan	1010208001	1	7.000	7.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
113	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 2 ,	1020103007	1	100.080	100.080	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
114	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	358.709	358.709	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
115	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	216.342	216.342	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
116	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	353.048	353.048	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
117	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 322 AP	1020103007	1	355.955	355.955	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
118	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian 1 (satu) Buah Accu GS NS	1010306009	1	833.000	833.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
119	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian 2 (dua) Buah Skok Belaka	1010201001	2	494.800	989.600	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
120	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	239.981	239.981	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
121	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	451.733	451.733	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
122	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian 8 (delapan) Buah Glade R	1010305012	8	17.800	142.400	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
123	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	436.050	436.050	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
124	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KPP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	359.703	359.703	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
125	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	388.467	388.467	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
126	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	593.375	593.375	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
127	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'09-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP berupa Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 ,	1020103007	1	287.946	287.946	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
128	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 1159 AP	1020103007	1	349.223	349.223	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
129	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 525 AP	1020103007	1	404.915	404.915	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
130	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 1159 AP	1020103007	1	101.975	101.975	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
131	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 525 AP	1020103007	1	299.192	299.192	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
132	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 40 AP	1020103007	1	352.818	352.818	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
133	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 525 AP	1020103007	1	342.797	342.797	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
134	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 525 AP	1020103007	1	210.834	210.834	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
135	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 40 AP	1020103007	1	117.887	117.887	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
136	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 525 AP	1020103007	1	440.028	440.028	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
137	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 525 AP	1020103007	1	414.936	414.936	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
138	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian Oli AG 525 AP	1020103006	3	165.500	496.500	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
139	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian Oli AG 525 AP	1020103006	6	165.000	990.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
140	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 400 AP	1020103007	1	571.000	571.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
141	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian Oli Mesin AG 400 AP	1020103006	6	105.000	630.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
142	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 40 AP	1020103007	1	159.350	159.350	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
143	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 322 AP	1020103007	1	250.000	250.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
144	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP embelian Gula,Teh, Kopi dan Indo C.C.Mic	1010701001	2	12.200	24.400	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
145	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP embelian Gula,Teh, Kopi dan Indo C.C.Mic	1010701001	2	26.400	52.800	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
146	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP embelian Gula,Teh, Kopi dan Indo C.C.Mic	1010701001	2	40.800	81.600	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
147	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	BAST KKP embelian Gula,Teh, Kopi dan Indo C.C.Mic	1010701001	1	14.400	14.400	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
148	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'06-06-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST KKP Pembelian BBM AG 525 AP	1020103007	1	376.763	376.763	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
149	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	429.854	429.854	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
150	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 40 AP	1020103007	1	299.115	299.115	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
151	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	375.845	375.845	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
152	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 2 , AG 2388 AP	1020103007	1	90.000	90.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
153	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	313.344	313.344	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
154	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 322 AP	1020103007	1	292.766	292.766	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
155	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	383.801	383.801	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
156	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	215.424	215.424	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
157	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 40 AP	1020103007	1	174.007	174.007	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
158	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 400 AP	1020103007	1	344.633	344.633	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
159	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 1159 AP	1020103007	1	291.006	291.006	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
160	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	462.137	462.137	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
161	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Oli Kendaraan Roda - 4 , AG 40 AP	1010313002	1	551.000	551.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
162	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 40 AP	1020103007	1	200.000	200.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
163	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian 4 (empat) Kg Gula Tebu Rose Br	1010701001	4	15.000	60.000	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
164	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 1159 AP	1020103007	1	202.190	202.190	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
165	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 400 AP	1020103007	1	359.076	359.076	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
166	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 1159 AP	1020103007	1	339.660	339.660	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
167	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 1159 AP	1020103007	1	346.775	346.775	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
168	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	452.574	452.574	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
169	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 525 AP	1020103007	1	301.716	301.716	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
170	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian BBM Kendaraan Roda - 4 , AG 400 AP	1020103007	1	359.015	359.015	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
171	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian 11 (sebelas) Buah Label GM sebagaimana no	1010305999	2	30.500	61.000	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
172	'00501	Jawa Timur	'098235	PENGADILAN NEGERI KEDIRI	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian 11 (sebelas) Buah Label GM sebagaimana no	1010305999	9	13.500	121.500	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
173	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	17-03-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembayaran Lisensi Zoom bulan Januari 2022	1010304999	1	482.997	482.997	Terdapat Akun 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
174	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	17-03-2022	522141	Belanja Sewa	Pembayaran web hosting tahun 2022 kantor PN Malang	1010304999	1	3.419.812	3.419.812	Terdapat Akun 522141 - Belanja Sewa, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
175	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	22-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian pengharum ruangan	1010305012	1	1.191.661	1.191.661	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
176	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	'05-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Pengharum ruangan untuk keperluan kantor	1010305012	1	1.479.999	1.479.999	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
177	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	'03-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja modal berupa renovasi jalur Disabi	1010101999	1	20.000.000	20.000.000	Terdapat Akun 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, namun melakukan input kode barang persediaan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
178	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	'03-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja modal berupa renovasi jalur Disabi	1010101999	1	9.170.000	9.170.000	Terdapat Akun 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, namun melakukan input kode barang persediaan
179	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	19-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa penambahan Ruang	1010101999	1	3.000.000	3.000.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
180	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	19-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa penambahan Ruang	1010101999	1	650.933	650.933	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
181	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	19-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa penambahan Ruang	1010101999	1	508.268	508.268	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
182	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	19-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa penambahan Ruang	1010101999	1	969.689	969.689	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
183	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	31-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang pembelian RAM dan SSD,se	1010304004	1	1.006.500	1.006.500	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
184	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	31-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang pembelian RAM dan SSD,se	1010304007	3	2.100.000	6.300.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
185	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	31-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang pembelian RAM dan SSD,se	1010304007	1	2.100.000	2.100.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
186	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	31-05-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang pembelian RAM dan SSD,se	1010304999	1	750.000	750.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
187	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	31-05-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembayaran belanja barang pembelian RAM dan SSD b	1010304009	1	2.100.000	2.100.000	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
188	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	31-05-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembayaran belanja barang pembelian RAM dan SSD b	1010304999	1	445.500	445.500	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
189	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	31-05-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembayaran belanja barang pembelian RAM dan SSD b	1010304999	1	1.950.000	1.950.000	Terdapat Akun 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
190	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	4	1.150.128	4.600.512	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
191	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	1	1.250.000	1.250.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
192	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	1	1.105.113	1.105.113	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
193	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	1	750.000	750.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
194	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	1	845.966	845.966	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
195	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	1	350.000	350.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
196	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	1	1.000.000	1.000.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
197	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perbaikan gedung r	1010101999	1	1.250.000	1.250.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
198	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Lapangan dan Paving Pengadilan Negeri Mala	1010101999	1	200.000	200.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
199	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Lapangan dan Paving Pengadilan Negeri Mala	1010101999	4	532.422	2.129.688	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
200	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Lapangan dan Paving Pengadilan Negeri Mala	1010101999	1	4.169.403	4.169.403	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
201	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Lapangan dan Paving Pengadilan Negeri Mala	1010101999	1	500.000	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
202	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Lapangan dan Paving Pengadilan Negeri Mala	1010101999	8	62.500	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
203	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Lapangan dan Paving Pengadilan Negeri Mala	1010101999	1	990.611	990.611	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
204	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	24-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Perbaikan Lapangan dan Paving Pengadilan Negeri Mala	1010101999	1	1.506.463	1.506.463	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
205	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	18-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan striker	1010101999	1	200.000	200.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
206	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	18-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan striker	1010101999	1	294.591	294.591	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
207	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	18-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan striker	1010101999	1	2.379.300	2.379.300	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
208	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	18-07-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan striker	1010101999	1	98.800	98.800	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
209	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	30-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perawatan Taman d	1010101999	1	988.542	988.542	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
210	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	30-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perawatan Taman d	1010101999	1	5.139.810	5.139.810	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
211	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	30-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perawatan Taman d	1010101999	1	500.000	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
212	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	30-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perawatan Taman d	1010101999	1	2.170.740	2.170.740	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
213	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	30-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perawatan Taman d	1010101999	1	350.000	350.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
214	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	30-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa perawatan Taman d	1010101999	1	826.199	826.199	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
215	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Ruang Sid	1010101999	1	450.000	450.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
216	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Ruang Sid	1010101999	1	2.307.201	2.307.201	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
217	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Ruang Sid	1010101999	1	16.774.758	16.774.758	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
218	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Ruang Sid	1010101999	1	851.760	851.760	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
219	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Ruang Sid	1010101999	1	500.000	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
220	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	27-06-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Ruang Sid	1010101999	1	2.398.032	2.398.032	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
221	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	13-05-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan wallpa	1010101999	25	18.000	450.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
222	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	13-05-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan wallpa	1010101999	25	110.250	2.756.250	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
223	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	13-05-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan wallpa	1010101999	9	200.000	1.800.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
224	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	13-05-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan wallpa	1010101999	1	250.000	250.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
225	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	13-05-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa pemasangan wallpa	1010101999	1	599.967	599.967	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
226	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	1	260.000	260.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
227	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	1	160.000	160.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
228	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	3	75.000	225.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
229	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	4	2.250.000	9.000.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
230	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	1	190.000	190.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
231	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	2	105.000	210.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
232	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	2	105.000	210.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
233	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	1	1.052.500	1.052.500	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
234	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	16-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PERAWATAN KOMPUTER	1010304999	1	270.000	270.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
235	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	'08-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembayaran belanja Barang berupa pembelian 52 stel k	1010307001	4	500.000	2.000.000	Terdapat Akun 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
236	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	'08-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembayaran belanja Barang berupa pembelian 52 stel k	1010307001	2	1.300.000	2.600.000	Terdapat Akun 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
237	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	'08-04-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembayaran belanja Barang berupa pembelian 52 stel k	1010307001	48	500.000	24.000.000	Terdapat Akun 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
238	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	21-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Atap teras	1010101999	1	347.468	347.468	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
239	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	21-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Atap teras	1010101999	5	100.000	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
240	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	21-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Atap teras	1010101999	3	2.000.000	6.000.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
241	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	21-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Atap teras	1010101007	4	125.000	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
242	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	21-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Atap teras	1010101006	2	1.000.000	2.000.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
243	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Renovasi A	1010101999	10	100.000	1.000.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
244	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Renovasi A	1010101999	5	100.000	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
245	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Renovasi A	1010101999	1	365.833	365.833	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
246	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi Renovasi A	1010101014	4	1.500.000	6.000.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
247	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	607.251	607.251	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
248	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101006	1	300.000	300.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
249	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	607.877	607.877	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
250	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	4	275.000	1.100.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
251	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	500.000	500.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
252	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	307.235	307.235	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
253	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	3.643.907	3.643.907	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
254	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	111	111	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
255	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	546.586	546.586	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
256	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	4.750.000	4.750.000	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
257	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembayaran belanja barang berupa renovasi ruang ram	1010101999	1	1.236.177	1.236.177	Terdapat Akun 523111 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
258	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembayaran belanja barang berupa perbaikan komputer	1010304004	2	166.500	333.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
259	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembayaran belanja barang berupa perbaikan komputer	1010304999	8	222.000	1.776.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
260	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembayaran belanja barang berupa perbaikan komputer	1010304999	1	290.500	290.500	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
261	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	20-04-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembayaran belanja barang berupa perbaikan komputer	1010304999	2	222.000	444.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
262	'00501	Jawa Timur	'098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	18-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembayaran belanja barang berupa perawatan komputa	1010304999	1	2.331.000	2.331.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
263	'00501	Jawa Timur	'098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	'07-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian Bunga Latex	1010305999	5	163.000	815.000	Terdapat Akun 523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
264	'00501	Jawa Timur	'098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	'07-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian Bunga Latex	1010305999	1	410.000	410.000	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan
265	'00501	Jawa Timur	'098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	'07-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian Bunga Latex	1010305999	1	660.000	660.000	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan
266	'00501	Jawa Timur	'098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	'07-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian Bunga Latex	1010305999	1	660.000	660.000	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan
267	'00501	Jawa Timur	'098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	'07-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian Water Dispenser	1010305999	2	475.000	950.000	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan
268	'00501	Jawa Timur	'098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	'02-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian Water Dispenser untuk keperluan Kantor	1010301999	1	350.000	350.000	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan
269	'00501	Jawa Timur	'098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	17-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	BAST Alat Ekstrakomptabel Vacum Cleaner	1010301999	1	496.600	496.600	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan
270	'00501	Jawa Timur	401344	PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO	12-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	pembelian thermogun	1010105999	1	702.000	702.000	Terdapat Akun 521252 - Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel, namun melakukan input kode barang persediaan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
271	'00501	Kalimantan Barat	'099091	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	25-01-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Belanja Barang Operaional-Penanganan Pandemi COVID	1010102002	1	175.000	175.000	Terdapat 521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 yang seharusnya di modul komitmen memilih non aset.
272	'00501	Kalimantan Selatan	'099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	11-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pengadaan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisa	1010501004	1	950.000	950.000	Kesalahan pencatatan belanja barang ekstrakomptabel dengan kode barang persediaan dan sudah dilakukan reklasifikasi ke aset
273	'00501	Kalimantan Selatan	'099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	'07-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pengadaan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisa	1010501004	2	950.000	1.900.000	Kesalahan pencatatan belanja barang ekstrakomptabel dengan kode barang persediaan dan sudah dilakukan reklasifikasi ke aset
274	'00501	Kalimantan Selatan	'099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	11-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pengadaan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisa	1010501004	2	350.000	700.000	Kesalahan pencatatan belanja barang ekstrakomptabel dengan kode barang persediaan dan sudah dilakukan reklasifikasi ke aset
275	'00501	Kalimantan Selatan	'099251	PENGADILAN NEGERI AMUNTAI	11-10-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pengadaan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisa	1010501004	1	950.000	950.000	Kesalahan pencatatan belanja barang ekstrakomptabel dengan kode barang persediaan dan sudah dilakukan reklasifikasi ke aset
276	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	13-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	BAST Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1010401999	5	83.000	415.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
277	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	13-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	BAST Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1010305008	6	50.000	300.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
278	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	13-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	BAST Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1010305008	7	70.000	490.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
279	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	13-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	BAST Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1010401999	27	15.000	405.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
280	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	13-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	BAST Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1010401999	3	110.000	330.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
281	'00501	Kalimantan Tengah	402452	PENGADILAN AGAMA BUNTOK	13-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	BAST Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1010401999	2	30.000	60.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
282	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	23-02-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Belanja barang persediaan Covid	1010311001	10	75.000	750.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
283	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	23-02-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Belanja barang persediaan Covid	1010310001	10	40.000	400.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
284	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	25-02-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	barang persedian belanja covid	1010309999	30	18.000	540.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
285	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	25-02-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	barang persedian belanja covid	1010314002	35	45.000	1.575.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
286	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	19-05-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembelian Masker	1010310999	32	40.000	1.280.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
287	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	13-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	pembelian barang persediaan berupa hand soap	1010311999	2	150.000	300.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
288	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	15-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembelian Vitamin	1010314002	30	46.000	1.380.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
289	'00501	Kalimantan Timur	400302	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	15-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembelian Vitamin	1010314001	30	16.700	501.000	Hal tersebut terjadi dikarenakan transaksi akun 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 diinput menjadi barang persediaan pada modul bendahara dan sudah terbit SP2D,tindak lanjutnya dengan tetap didetailkan pada modul persediaan dan dikeluarkan sebagai pemakaian habis pakai dikarenakan barang tersebut langsung habis pakai pada bulan berjalan
290	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembayaran Langganan Koran	1010199999	1	465.000	465.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
291	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Lampu	1010306002	7	15.000	105.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
292	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Lampu	1010306002	4	27.500	110.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
293	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian MCB 35A untuk Perbaikan Rumah Dinas	1010306004	3	110.000	330.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
294	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Pembelian Air Minum Kemasan dan isi ulang galon	1010399999	1	215.000	215.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
295	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Isi Toner Printer	1010301999	1	180.000	180.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
296	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Pewangi Ruangan Stella Matic	1010309999	1	73.100	73.100	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
297	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	20-01-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Lampu	1010306002	15	30.000	450.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
298	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	26-01-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian Material Rumah Dinas	1010101999	1	1.887.000	1.887.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
299	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	29-01-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian Cat, obat rumput, dan material lainnya Untul	1010101999	1	1.243.500	1.243.500	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
300	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	30-01-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Semen dan Pasir Perbaikan Lantai Ruang Ha	1010101002	5	50.800	254.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
301	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	31-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Acrilic Bantex stand Up DAN cetak photo ser	1010305999	10	97.500	975.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
302	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	31-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembuatan Papan Banner Media Center	1010303999	3	575.000	1.725.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
303	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	31-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembuatan Papan Panjer Biaya Perkara	1010303999	1	750.000	750.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
304	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	15-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian Material perbaikan rumah dinas SMK	1010101999	1	1.526.000	1.526.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
305	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	15-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Tambahan Pembelian Material perbaikan rumah dinas H	1010101999	1	1.101.000	1.101.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
306	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	15-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian material perbaikan pintu toilet rumah dinas H	1010101999	1	235.000	235.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
307	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	18-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penggantian Pembelian BBM Mobil Dinas KPN	1010104001	1	3.076.126	3.076.126	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
308	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	18-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penggantian Pembelian BBM Mobil Dinas WKPN	1010104001	1	1.463.631	1.463.631	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
309	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	18-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penggantian Pembelian BBM Mobil Dinas Sekretaris	1010104001	1	773.880	773.880	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
310	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	18-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembuatan Banner Uraian Tugas	1010310999	10	275.000	2.750.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
311	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	18-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembuatan Banner Pakta Integritas dan Komitmen Bers	1010310999	1	1.750.000	1.750.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
312	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	18-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembuatan Banner dan Papan Ucapan	1010310999	1	1.108.000	1.108.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
313	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	23-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Pewangi dan Vigura	1010302999	1	720.700	720.700	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
314	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian material rumah dinas wakil (pasir, bata, sem	1010101004	1	1.830.000	1.830.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
315	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian material rumah dinas wakil (cat jotun)	1010101006	2	285.000	570.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
316	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	23-02-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian material rumah dinas wakil (fiting, lampu, lis	1010306002	1	1.959.000	1.959.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan
317	'00501	Lampung	400452	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	21-03-2022	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lair	Pembelian semen, Kuas, NO Drop, dll untuk Rumah Dir	1010101002	1	335.000	335.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak perlu memilih rincian aset dikarenakan barang tersebut tidak distock dan sudah dihabispakaikan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
318	'00501	Lampung	401955	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH	'01-07-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembelian Toner Laser Jet	1010304004	1	900.000	900.000	Kesalahan pencatatan pada modul komitmen, seharusnya opr komitmen tidak memilih sebagai persediaan tetapi sebagai kdp. Sudah dilakukan koreksi kuantitas kurang pada persediaan dan koreksi nilai bertambah KDP.
319	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasaran	1010101002	5	60.000	300.000	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangungan kantor. Sudah dilakukan koreksi atas beban persediaan yang timbul dan koreksi nilai bertambah nilai gedung pada modul aset tetap.
320	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasaran	1010101013	5	250.000	1.250.000	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangungan kantor. Sudah dilakukan koreksi atas beban persediaan yang timbul dan koreksi nilai bertambah nilai gedung pada modul aset tetap.
321	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasaran	1010101013	240	70.000	16.800.000	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangungan kantor. Sudah dilakukan koreksi atas beban persediaan yang timbul dan koreksi nilai bertambah nilai gedung pada modul aset tetap.
322	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasaran	1010101006	1	300.000	300.000	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangungan kantor. Sudah dilakukan koreksi atas beban persediaan yang timbul dan koreksi nilai bertambah nilai gedung pada modul aset tetap.
323	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasaran	1010101004	1	300.000	300.000	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangungan kantor. Sudah dilakukan koreksi atas beban persediaan yang timbul dan koreksi nilai bertambah nilai gedung pada modul aset tetap.
324	'00501	Lampung	614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	28-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	Pembayaran belanja Modal berupa Pengadaan Prasaran	1010101999	1	7.177.273	7.177.273	Kesalahan pencatatan kode barang pada modul komitmen, seharusnya menambah nilai gedung dan bangungan kantor. Sudah dilakukan koreksi atas beban persediaan yang timbul dan koreksi nilai bertambah nilai gedung pada modul aset tetap.
325	'00501	Maluku	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	17-10-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Belanja barang berupa penanganan pandemi covid 19	1010399999	5	58.000	290.000	kesalahan penggunaan akun belanja yang seharusnya menggunakan akun 521841 (Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19) tetapi dicatat dengan akun 5211131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19) kuasa pengguna barang membuat surat pernyataan terkait kesalahan penggunaan akun covid
326	'00501	Maluku	401898	PENGADILAN AGAMA NAMLEA	17-10-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Belanja barang berupa penanganan pandemi covid 19	1010399999	7	64.000	448.000	kesalahan penggunaan akun belanja yang seharusnya menggunakan akun 521841 (Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19) tetapi dicatat dengan akun 521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19) kuasa pengguna barang membuat surat pernyataan terkait kesalahan penggunaan akun covid
327	'00501	Maluku	401929	PENGADILAN NEGERI DOBO	'03-06-2022	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI	1010901001	1	234.682.846	234.682.846	terdapat kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya dicatat sebagai pengembangan kdp tetapi di catat sebagai persediaan dan telah di habis pakai telah dilakukan perbaikan, dengan cara menginput pada koreksi nilai bertambah kdp
328	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	20-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	BIAYA ADMINISTRASI PROYEK	1010303002	4	110.000	440.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan, sudah dilakukan reklas ke aset namun seharusnya tidak tercatat sebagai NUP baru. Sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada pagar permanen.
329	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	20-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunar	BIAYA ADMINISTRASI PROYEK	1010302001	3	65.000	195.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan, sudah dilakukan reklas ke aset namun seharusnya tidak tercatat sebagai NUP baru. Sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada pagar permanen.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
330	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	20-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BIAYA ADMINISTRASI PROYEK	1010301003	2	14.000	28.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan, sudah dilakukan reklas ke aset namun seharusnya tidak tercatat sebagai NUP baru. Sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada pagar permanen.
331	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	20-04-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	BIAYA ADMINISTRASI PROYEK	1010304006	1	85.000	85.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan, sudah dilakukan reklas ke aset namun seharusnya tidak tercatat sebagai NUP baru. Sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada pagar permanen.
332	'00501	Maluku Utara	'099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	20-06-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	ADMINISTRASI PROYEK	1010101999	1	4.900.000	4.900.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan, sudah dilakukan reklas ke aset namun seharusnya tidak tercatat sebagai NUP baru. Sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai bertambah pada pagar permanen.
333	'00501	Maluku Utara	'099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	'07-02-2022	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan P	Pembelian Vitamim	1010314002	440	6.000	2.640.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja barang yang dicatat sebagai kode barang persediaan
334	'00501	Maluku Utara	'099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	'07-02-2022	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan P	Belanja Covid	1010701002	176	10.000	1.760.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja barang yang dicatat sebagai kode barang persediaan
335	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	1	396.000	396.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
336	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	4	34.500	138.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
337	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	1	112.000	112.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
338	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	1	1.000.000	1.000.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
339	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	15	8.000	120.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
340	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	4	24.000	96.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
341	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	2	120.000	240.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
342	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	2	950.000	1.900.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
343	'00501	Maluku Utara	307818	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	'06-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Bahan Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	1010310999	1	998.000	998.000	Terdapat kesalahan penggunaan belanja modal yang dicatat sebagai kode barang persediaan
344	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	'04-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST Pembelian Sparepart Komputer Kepegawaian	1010304999	1	500.000	500.000	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
345	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	'04-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST Pembelian Sparepart Komputer Kepegawaian	1010304007	1	450.000	450.000	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
346	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	'04-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST Pembelian Sparepart Komputer Kepegawaian	1010304999	1	1.000.000	1.000.000	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
347	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	'04-03-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BAST Pembelian Sparepart Komputer Kepegawaian	1010304999	1	650.000	650.000	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
348	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	25-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	1010306999	6	38.570	231.420	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
349	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	25-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	1010305001	5	55.825	279.125	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
350	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	25-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	1010305012	11	25.375	279.125	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
351	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	25-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	1010305012	12	30.450	365.400	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
352	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	25-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	1010305008	12	30.450	365.400	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
353	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	25-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	1010305004	6	35.525	213.150	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
354	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	25-03-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN	1010305008	6	23.345	140.070	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
355	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-03-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN KESEHATAN (VI	1010307002	1	35.125	35.125	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
356	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-03-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	BAST BELANJA BARANG PERSEDIAAN KESEHATAN (VI	1010307002	56	35.086	1.964.816	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
357	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-03-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	BAST PEMBELIAN BARANG PERSEDIAAN KESEHATAN (	1010307002	49	47.999	2.351.951	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
358	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-03-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	BAST PEMBELIAN BARANG PERSEDIAAN KESEHATAN (	1010307002	18	44.000	792.000	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
359	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-03-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	BAST PEMBELIAN BARANG PERSEDIAAN KESEHATAN (	1010307002	56	32.285	1.807.960	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
360	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-03-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	BAST PEMBELIAN BARANG PERSEDIAAN KESEHATAN (	1010307002	1	48.048	48.048	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
361	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembayaran belanja barang sesuai invoice No. SO.2022	1010307002	20	48.939	978.780	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
362	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	29-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembayaran belanja barang sesuai invoice No. SO.2022	1010307002	119	33.601	3.998.519	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
363	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	23-09-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembayaran belanja barang sesuai invoice No. AL-0922	1010307002	15	34.410	516.150	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
364	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	23-09-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembayaran belanja barang sesuai invoice No. AL-0922	1010307002	10	38.850	388.500	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
365	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	23-09-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembayaran belanja barang sesuai invoice No. AL-0922	1010305008	21	47.952	1.006.992	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
366	'00501	Maluku Utara	664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	23-09-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pande	Pembayaran belanja barang sesuai invoice No. TF-0922	1010314002	50	46.636	2.331.800	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja modal untuk membeli barang persediaan
367	'00501	Nusa Tenggara Timur	402808	PENGADILAN AGAMA RUTENG	'05-07-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Honor Pengadaan Barang	1010501004	3	760.000	2.280.000	Terdapat kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya dicatat sebagai penambahan nilai genset, sudah dilakukan habis pakai dan koreksi nilai bertambah pada Genset
368	'00501	Riau	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	29-09-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	pembelian 1 unit printer	1010310999	1	800.000	800.000	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel
369	'00501	Riau	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	'04-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian 1 unit printer	1010304999	1	800.000	800.000	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel
370	'00501	Riau	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	'07-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	pembelian 1 unit printer	1010304999	1	800.000	800.000	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel
371	'00501	Riau	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	'08-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	pembelian 1 unit printer	1010304999	1	800.000	800.000	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel
372	'00501	Riau	662990	PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN	'09-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian 1 unit printer	1010304999	1	800.000	800.000	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel
373	'00501	Satker Pusat	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	14-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pengadaan Peralatan Keperluan Kantor, Papan nama st	1010501008	10	869.130	8.691.300	kesalahan kodefikasi barang pada modul komitmen yang seharusnya dicatat sebagai perolehan aset lainnya.dikeluarkan dari persediaan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
374	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	PEmbelian Masker untuk keperluan penanganan Covid19 pada Kantor PTUN Palu	1010399999	2	15.000	30.000	1.01.03.99.999.000633 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
375	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	PEmbelian Masker untuk keperluan penanganan Covid19 pada Kantor PTUN Palu	1010399999	7	12.500	87.500	1.01.03.99.999.000635 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
376	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	PEmbelian Masker untuk keperluan penanganan Covid19 pada Kantor PTUN Palu	1010399999	2	12.500	25.000	1.01.03.99.999.000630 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
377	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	PEmbelian Masker untuk keperluan penanganan Covid19 pada Kantor PTUN Palu	1010399999	1	20.687	20.687	1.01.03.99.999.000632 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
378	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	PEmbelian Masker untuk keperluan penanganan Covid19 pada Kantor PTUN Palu	1010399999	11	12.500	137.500	1.01.03.99.999.000631 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
379	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	PEmbelian Masker untuk keperluan penanganan Covid19 pada Kantor PTUN Palu	1010399999	1	35.000	35.000	1.01.03.99.999.000634 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
380	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Pembelian Sabun Cuci Tangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada kantor PTUN Palu	1010399999	2	155.000	310.000	1.01.03.99.999.000636 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
381	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	17-06-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Pembelian Sabun Cuci Tangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada kantor PTUN Palu	1010399999	1	155.000	155.000	1.01.03.99.999.000637 masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
382	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Tempelan Pintu untuk keperluan kantor PTUN Palu	1010399999	4	14.645	58.580	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
383	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Vacuum Cleaner untuk keperluan kantor PTUN PAlu	1010399999	1	969.000	969.000	telah dilakukan reklasifikasi dari persediaan ke aset. Informasi dari pembina keuangan : dilakukan koreksi spm antara akun 521119 ke akun 521252. dilakukan jurnal "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
384	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	2	40.494	80.988	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
385	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	2	33.675	67.350	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya. pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
386	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	5	33.150	165.750	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
387	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	1	45.390	45.390	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
388	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	1	36.210	36.210	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
389	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	1	52.500	52.500	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
390	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	1	40.494	40.494	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
391	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Peralatan rumah tangga untuk keperluan kantor sewa PTUN Palu	1010399999	1	51.714	51.714	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
392	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Tinta Printer untuk keperluan kantor PTUN Palu	1010304004	4	117.875	471.500	1.01.03.04.004.0000xx masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 523121 K: 593311 "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
393	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Tinta Printer untuk keperluan kantor PTUN Palu	1010304004	1	117.875	117.875	1.01.03.04.004.0000xx masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 523121 K: 593311 "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
394	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Tinta Printer untuk keperluan kantor PTUN Palu	1010304004	1	117.875	117.875	1.01.03.04.004.0000xx masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 523121 K: 593311 "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
395	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pembelian Tinta Printer untuk keperluan kantor PTUN Palu	1010304004	1	117.875	117.875	1.01.03.04.004.0000xx masih belum digunakan, telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 523121 K: 593311 "telah dilakukan koreksi jumlah berkurang pada modul persediaan, telah dilakukan jurnal manual. D : 521131 K: 593311, kesalahan modul komitmen yang seharusnya tidak di catat sebagai barang persediaan"
396	'00501	Sulawesi Tengah	578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	'08-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian PABX untuk keperluan kantor PTUN Palu	1010399999	7	244.800	1.713.600	pencatatan barang persediaan menggunakan akun belanja barang operasional lainnya pengungkapan pada calk satuan kerja penggunaan akun belanja barang operasional lainnya yang menghasilkan barang persediaan
397	'00501	Sulawesi Tenggara	604772	PENGADILAN AGAMA UNAAHA	30-08-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Bayar biaya cetak spanduk di Percetakan Perdana Unaaha	1010303999	1	200.000	200.000	kesalahan penvatatan kode barang persediaan yamng seharusnya operasoinal lainnya untuk bayar spanduk, sudah dilakukan koreksi pada modul persediaan
398	'00501	Sulawesi Tenggara	681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	26-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Belanja barang persediaan barang konsumsi berupa lak batang 1 pack	1010301010	1	260.000	260.000	kesalahan penggunaan akun bleanja barang persediaan, merupakan barang persediaan
399	'00501	Sumatera Barat	401984	PENGADILAN AGAMA KOTO BARU	30-08-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel berupa pembelian Mic Warles	1010399999	1	750.000	750.000	Kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan reklasifikasi ke aset
400	'00501	Sumatera Barat	402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	28-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Dibayarkan Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Pengadaan peralatan dan mesin di bawah kapitalisasi sebagaimana faktur terlampir beserta pajak	1010305999	5	720.000	3.600.000	Kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan habis pakai dan input perolehan lainnya pada modul aset
401	'00501	Sumatera Barat	402010	PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	28-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Dibayarkan Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Pengadaan peralatan dan mesin di bawah kapitalisasi sebagaimana faktur terlampir beserta pajak	1010305999	1	656.800	656.800	Kesalahan pencatatan kode barang, sudah dilakukan habis pakai dan input perolehan lainnya pada modul aset
402	'00504	Sumatera Barat	402614	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	13-05-2022	521211	Belanja Bahan	Belanja ATK Sidang Keliling KW Restu Bunda	1010301001	2	7.000	14.000	Kesalahan penggunaan akun belanja
403	'00504	Sumatera Barat	402614	PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG	13-05-2022	521211	Belanja Bahan	Belanja ATK Sidang Keliling KW Restu Bunda	1010302001	3	42.000	126.000	Kesalahan penggunaan akun belanja
404	'00501	Sumatera Selatan	'098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	'09-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian dispenser	1010305009	2	950.000	1.900.000	pembelian barang ekstrakomptabel berupa dispenser namun salah kode barang menjadi barang persediaan, sudah dilakukan koreksi
405	'00501	Sumatera Selatan	'098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	'09-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian harddisk	1010304009	2	990.000	1.980.000	pembelian barang ekstrakomptabel berupa hardisk namun salah kode barang menjadi barang persediaan, sudah dilakukan koreksi
406	'00501	Sumatera Selatan	'098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	14-12-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Pembelian harddisk	1010304009	1	990.000	990.000	pembelian barang ekstrakomptabel berupa hardisk namun salah kode barang menjadi barang persediaan, sudah dilakukan koreksi
407	'00501	Sumatera Selatan	'098970	PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU	14-03-2022	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Paket Pengadaan Prasarana Disabiltas	1010101999	1	29.860.000	29.860.000	pengadaan aset disabilitas namun salah kode barang masuk ke persediaan, sudah dilakukan koreksi
408	'00501	Sumatera Selatan	402236	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	22-02-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Belanja barang berupa pembelian barang persediaan ATK	1010310001	10	5.000	50.000	kesalahan penggunaan akun belanja, merupakan barang persediaan
409	'00501	Sumatera Selatan	402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	10-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel Berupa Pembelian Mic	1010501004	1	990.000	990.000	pembelian barang ekstrakomptabel berupa mic namun salah kode barang menjadi barang persediaan, sudah dilakukan koreksi
410	'00501	Sumatera Selatan	402298	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	10-11-2022	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstra komptabel Berupa Pembelian Dispenser	1010501004	2	325.000	650.000	pembelian barang ekstrakomptabel berupa mic namun salah kode barang menjadi barang persediaan, sudah dilakukan koreksi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
411	'00501	Sumatera Utara	'098718	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	'05-12-2022	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan Generator /Genset	1010501004	1	166.400.000	166.400.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penginputan kode barang untuk akun yang menghasilkan barang (seharusnya dicatat pada modul aset tetap tetapi dicatat pada modul persediaan) dilakukan reklasifikasi ke aset dari persediaan.kemudian dilakukan reklasifikasi masuk ke aset tetap
412	'00501	Sumatera Utara	401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	'06-06-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Map Plastik	1010301006	1	35.000	35.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
413	'00501	Sumatera Utara	401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	19-07-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian Air Minum Galon Isi Ulang 4	1010701002	4	27.000	108.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang"telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
414	'00501	Sumatera Utara	401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	19-07-2022	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Pembelian SOS Handsanitizer 5 botol	1010314001	5	51.000	255.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang"telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
415	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	'05-01-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	pembelian barang pemeliharaan gedung dan halaman kantor	1010306005	1	33.000	33.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
416	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	'05-01-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian barang pemeliharaan gedung dan halaman	1010306999	1	144.000	144.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
417	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	'05-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	pembelian barang keperluan kantor	1010311999	2	962.500	1.925.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
418	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	'03-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembelian bahan bakar minyak	1010104001	1	1.500.000	1.500.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
419	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	10-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pemeliharaan kendaraan roda 4	1010299999	1	8.400.000	8.400.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
420	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	24-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembelian bahan bakar minyak	1010104001	1	2.000.000	2.000.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
421	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	18-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	pembuatan spanduk	1010303999	2	150.000	300.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
422	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	14-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	pembuatan spanduk	1010303999	1	825.000	825.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
423	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	'07-01-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	pembuatan spanduk	1010303999	2	150.000	300.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
424	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	26-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembelian barang persediaan keperluan kantor	1010304999	2	390.000	780.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
425	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	28-01-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembelian barang persediaan keperluan kantor	1010304999	3	310.000	930.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
426	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Pembelian pegangan pintu	1010309999	3	110.000	330.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
427	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembelian bahan bakar minyak BK 2014 M	1010104001	19	7.850	149.150	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang"telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
428	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	pembelian CCTV	1010309999	1	4.020.000	4.020.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
429	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	pembelian perlengkapan CCCTV	1010309999	1	130.000	130.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
430	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	pembelian papan alas mouse	1010304999	1	20.000	20.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
431	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	service komputer	1010310999	1	3.000.000	3.000.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
432	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	pembuatan spanduk	1010303999	1	210.000	210.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
433	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	service kereta dinas	1010201999	1	303.000	303.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
434	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	service kendaraan dinas rida empat	1010208999	1	3.585.000	3.585.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETIDAKSESUAIAN KODE AKUN VS KODE PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	BAES1	Wilayah	Kode	Nama Satker	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	Penjelasan
435	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	service ac kantor	1020202004	24	126.250	3.030.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
436	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	pembayaran pemeliharaan gedung dan halaman	1010309999	1	500.000	500.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
437	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	pembayaran pemeliharaan gedung dan halaman	1010309999	1	250.000	250.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
438	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	15-02-2022	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	pembelian wallpaper	1010309999	1	2.875.000	2.875.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
439	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	21-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembelian peralatan IT	1010304999	1	400.000	400.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
440	'00501	Sumatera Utara	403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	21-02-2022	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	pembelian peralatan IT	1010306001	1	195.000	195.000	Pada satuan kerja terdapat kesalahan penggunaan akun non barang yang seharusnya tidak menghasilkan barang tetapi salah catat menghasilkan barang "telah dilakukan jurnal manual pada modul glp D : 52xxxx (non barang) K : 593311 "
Total												**944.673.262**	



REKAPITULASI KOREKSI *AUDITED* BPK DAN MAHKAMAH AGUNG

REKAP KOREKSI AUDITED 2022 BPK DAN MAHKAMAH AGUNG (PERALATAN DAN MESIN)

No.	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Nama Akun	Total	Penjelasan
1	402732	PENGADILAN AGAMA NEGARA	132111	Peralatan dan Mesin	- 780.000	Belum melakukan transaksi Penghapusan terhadap SK Penghapusan yang sudah terbit (Namun terdapat 1 buah meja komputer NUP 3 yang belum di hentiguna sebesar 780.000)
2	681439	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	132111	Peralatan dan Mesin	503.777.560	Terdapat list BMN yang tidak termigrasi dari SIMAK ke SAkti
3	402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	132111	Peralatan dan Mesin	- 175.830.000	Pencatatan Alih Status dari PTA Ambon ke PA Dataran Hunipopu pada tahun Anggaran 2022 yang belum terinput pada aplikasi sakti berupa Station Wagon
4	401894	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	132111	Peralatan dan Mesin	175.830.000	Pencatatan Alih Status dari PTA Ambon ke PA Dataran Hunipopu pada tahun Anggaran 2022 yang belum terinput pada aplikasi sakti berupa Station Wagon
5	401924	PENGADILAN NEGERI PENAJAM	132111	Peralatan dan Mesin	680.000	Terdapata honorarium menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi belum dilakukan koreksi nilai bertambah ke nilai barang dikarenakan kurang telitinya operator Aset Tetap terdapat pada NUP 13 dengan kode barang 3.05.02.04.004 dengan uraian A.C Split dengan pengadaan belanja modal A.C Split sebanyak 6 buah dari NUP 7-12
6	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	132112	Peralatan dan Mesin	- 5.050.500	Koreksi nilai berkurang peralatan mesin sebesar 1.648.350 dan Koreksi Nilai berkurang Sofa sebesar 3.108.000
7	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	3.108.000	Kesalahan pencatatan kuantitas atas sofa, seharusnya 2 unit @3.108.000 tercatat 1 unit senilai 6.216.000 (koreksi nilai berkurang peralatan mesin sebesar 3.108.000 dan input perolehan lainnya satu unit sofa @3.108.000)
8	400214	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	132111	Peralatan dan Mesin	433.373.020	Terdapat barang hasil Kemitraan BTN belum didaftarkan sebagai barang hibah maupun dicatat sebagai BMN dengan BAST No. 96/S/JKK-UT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp451.170.662,00, dan terdapat kurang input satu barang atas BAST No. /S/JKK-UT/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 senilai 5.565.000
9	401920	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	132111	Peralatan dan Mesin	15.031.000	1. Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) untuk Biaya pemasangan AC Cassette 1 unit senilai Rp10.500.000,00 belum dikapitalisasi ke dalam aset induk AC. (Koreksi Nilai Bertambah) 2. Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) untuk Rangka Besi Spanduk Rp4.531.000,00 belum dikapitalisasi ke aset tetap peralatan dan mesin
10	663182	PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH	132111	Peralatan dan Mesin	789.800.000	(Hasil Analisis LK MA 2022 Unaudited BPK) Terdapat KDP yang seharusnya telah definitif menjadi aset. Koreksi untuk mereklasifikasi KDP ke Aset Tetap Peralatan dan mesin atas Kesalahan Pencatatan oleh Satker.
11	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	132111	Peralatan dan Mesin	- 245.057.687	1. Terdapat BMN Peralatan dan Mesin dalam kondisi Rusak Berat sesuai Berita Acara Perubahan Kondisi BMN No. W16-U/2669/PL.05/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp265.005.887,00.
12	400358	PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA	132111	Peralatan dan Mesin	16.592.200	2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) untuk Pembuatan Pembatas Ruangan Perpustakaan senilai Rp16.592.200,00 belum dikapitalisasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebagai Partisi (3.05.02.01.022)
13	400365	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	132111	Peralatan dan Mesin	11.875.000	1 Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin berupa rak aluminium sebanyak 2 buah senilai Rp11.875.000 yang direalisasikan tangal 4/10/22 dan 17/10/22 dari belanja bahan (Dipa 03)
14	400365	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	132111	Peralatan dan Mesin	- 11.875.000	2. Transfer keluar ke DIPA 01 rak aluminium sebanyak 2 buah senilai 11.854.000
15	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	132111	Peralatan dan Mesin	11.875.000	Transfer Masuk Rak aluminium sebanyak 2 buah senilai 11.875.000 dari PT Tanjung Karang DIPA 03
16	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	132111	Peralatan dan Mesin	1.935.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin berupa Audio Equalizer in/out door 30 band (1 buah) senilai Rp1.935.000 yang direalisasikan tanggal 09/03/22 dari belanja pemeliharaan peralatan mesin
17	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	132111	Peralatan dan Mesin	3.800.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin berupa lampu tembak kantor (2 buah) senilai Rp2.700.000 yang direalisasikan tanggal 24/01/22 dan 03/02/22 dari belanja pemeliharaan gedung kantor (Setelah diverifikasi ke satuan kerja lampu tembak kantor dua buah senilai 3.800.000)
18	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	132111	Peralatan dan Mesin	1.200.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin berupa mesin kolam (1 buah) senilai Rp1.200.000 yang direalisasikan tanggal 09/03/22 dari belanja pemeliharaan gedung kantor
19	400364	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	132111	Peralatan dan Mesin	4.500.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin berupa pembelian kursi jati sidang (3 buah) senilai Rp4.500.000 yang direalisasikan tanggal 3,5 dan 18 Februari 2022 dari belanja keperluan perkantoran
20	547678	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	132111	Peralatan dan Mesin	62.750.787	transfer masuk Sofa dan Meja dari PA Sukadana pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nilai total Rp58.753.677 (Verifikasi ke satuan Kerja: sudah ada BAST; diperuntukan utk PTA Bandarlampung berupa Sofa dan Meja kerja kayu senilai Rp62.750.787 sesuai BAST)
21	401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	132111	Peralatan dan Mesin	- 62.750.787	transfer masuk Sofa dan Meja dari PA Sukadana pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nilai total Rp58.753.677 (Verifikasi ke satuan Kerja: sudah ada BAST; diperuntukan utk PTA Bandarlampung berupa Sofa dan Meja kerja kayu senilai Rp62.750.787 sesuai BAST)
22	098111	PENGADILAN NEGERI SURABAYA	132111	Peralatan dan Mesin	8.350.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin berupa lemari/rak wastafel senilai Rp8.350.000 yang direalisasikan tanggal 05/05/22 dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
23	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	132111	Peralatan dan Mesin	19.934.100	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) untuk Pembelian Vertikal Blind Semi Blok out sesuai Kuitansi No. W16-U9/1194/KU.01/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp 19.934.100 belum dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin
24	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	132111	Peralatan dan Mesin	18.928.300	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) untuk Pembelian Vertikal Blind 5034 ukuran 35.38 sesuai Kuitansi No. W16-U9/1403/KU.01/9/2022 tanggal 23 November 2022) sebesar Rp18.928.300,00 belum dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin
25	401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	132111	Peralatan dan Mesin	23.700.000	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) untuk Pembelian 3 unit Partisi sesuai Kuitansi No. W16-U9/1853/KU.01/11/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 23.700.000 belum dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin
26	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	132111	Peralatan dan Mesin	4.080.000	Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) untuk Biaya pemesanan papan nama untuk gapura An. Ragil Reklame sesuai Kuitansi No. 00160/KW/548940/2022 tanggal 05-04-2022 senilai Rp4.080.000 dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin. 3050105008 Papan Visual/Papan Nama
27	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	132111	Peralatan dan Mesin	8.085.000	Belanja Pemelihraan Gedung dan Bangunan (523111) untuk pengadaan dan pemasangan 1 (satu) unit Tandon Atap sesuai Kuitansi No. 069/INV-RJ/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 senilai Rp8.085.000 dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin. 3050205011 Treng Air/Tandon Air

28	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	132111	Peralatan dan Mesin	1.900.000	Belanja Keperluan Kantor (521111) untuk biaya pembelian atau pemesanan rak souvenir An.Asy'ari sesuai Kuitansi No. 00180/KW/548940/2022 tanggal 05-04-2022 senilai Rp1.900.000 dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin. 3060102042 Rak Peralatan
29	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	132111	Peralatan dan Mesin	10.050.000	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) berupa pemeliharaan dan perbaikan CCTV An. CV. Lintas Media Solusindo sesuai Kuitansi No. 00198/KW/548940/2022 tanggal 20-04-2022 senilai Rp10.050.000 dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin. 3050105007 CCTV - Camera Control Television System
30	548940	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	132111	Peralatan dan Mesin	1.443.000	Belanja Pemelihraan Gedung dan Bangunan (523111) berupa pembelian 1 (satu) unit Pompa Air Tandon Gedung sesuai SPK No. W3-TUN/1526.06/PL.08/9/2022 tanggal 21 September 2022 senilai Rp1.443.000,00 dikapitalisasi ke aset peralatan dan mesin. 3010305010 Pompa Air
31	663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	132111	Peralatan dan Mesin	24.000.000	Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dibelanjakan untuk Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.000.000. Pembelian lampu gantung pada lantai 2 senilai Rp14.000.000 dan lampu gantung pada Lobby lantai 1 Rp3.500.000, pembelian lemari senilai Rp6.500.000.
32	097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	132111	Peralatan dan Mesin	69.900.000	Pengadaan Jasa Perbaikan Sistem Pompa STP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus berupa pengadaan pompa sebesar Rp 69.900.000 (dicatat sebagai peralatan mesin)
33	098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	132111	Peralatan dan Mesin	4.000.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin yang direalisasikan dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (akan dikonfirmasi ke satuan kerja)
34	578818	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH	132111	Peralatan dan Mesin	- 12.850.000	Koreksi untuk mencatat reklasifikasi nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lain-Lain atas dua unit printer (NUP 3 dan NUP 9) serta dua unit AC Split (NUP 8 dan NUP 9) sudah tidak digunakan karena rusak
35	098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	132111	Peralatan dan Mesin	3.981.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin yang direalisasikan dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa CCTV 3050105007
36	401426	PENGADILAN AGAMA MALANG	132111	Peralatan dan Mesin	10.515.000	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin yang direalisasikan dari belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa server dan upgrade laptop (terdapat 2 nota, pertama: 8.765.000 hardisk buat server NUP 1, yang kedua adalah SSD dan RAM untuk laptop NUP 16 sejumlah 1.750.000) sudah eksekusi oleh satker
37	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	132111	Peralatan dan Mesin	189.948.750	Koreksi untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin yang direalisasikan dari belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa set top box dan server IPTV (akan dikonfirmasi ke satuan kerja)
38	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	132111	Peralatan dan Mesin	35.711.220.000	Koreksi atas pencatatan aset Transfer Keluar dari Satker yang baru diterima pada 31 Januari 2023
39	098036	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	132111	Peralatan dan Mesin	- 540.000	Koreksi atas pencatatan aset Transfer Keluar dari Satker yang baru diterima pada 31 Januari 2023
40		909 Satuan Kerja	132111	Peralatan dan Mesin	- 35.711.220.000	Pengembalian belanja TAYL yang menghasilkan BMN
				Total	**1.920.208.743**	



PENDAPATAN DAN BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
491511 - PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Aceh	005.01.098551	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	(5.628.510.000,)	Terdapat Jurnal Penyesuaian Koreksi 10000000, Koreksi Pencatatan -48055000, Koreksi Kesalahan Jurnal -10000000 dan -5580455000
3.0	Aceh	005.04.401696	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	(1.139.800,)	Terdapat koreksi jumlah persediaan kertas hvs yang awalnya satuannya per-lembar dikreksi menjadi satuan RIM
3.0	Bangka Belitung	005.01.401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	(934.000,)	merupakan koreksi ralat akun pagu minus dari 528111 menjadi akun pos 521114 sebesar Rp.366.000, sehingga akun persediaan menjadi senilai 884.000,oleh operator persediaan dilakukan koreksi persediaan berupa koreksi nilai dan koreksi kuantitas, kuantitas ditambah 17 dan nilai diubah dari 50ribu menjadi 52ribu, sehingga nilai koreksi menjadi 884.000., nilai penyesesuain persediaan senilai 934.000 yaitu 884.000 merupakan koreksi nilai persediaan dan 50.000 merupakan selisih koreksi nilai harga kertas A4 (karena harga kertas ada yg 44ribu, 50 ribu, 52 rbu)dari akun 521811 namun menimbulkan pagu minus, shg diarahkan KPPN utk ralat ke 521114 pos shg dipersediaan di stockopname dikoreksi dan pembelian dikoreksi nilai dan kuantitas kurang yang dikoreksi
3.0	Gorontalo	005.01.401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	(462.164.000,)	terdapat kesalahan penginputan kuantitas. + - 462.164.000 dengan beban penyesuain nilai persediaan
3.0	Jakarta	005.01.526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	(136.740.000,)	Koreksi satuan barang dari dus ke unit
3.0	Jambi	005.01.663012	PENGADILAN NEGERI SENGETI	(260.000,)	Koreksi nilai persediaan atas adanya kesalahan input jumlah/kuantitas persediaan
3.0	Jawa Barat	005.01.097631	PENGADILAN NEGERI SUBANG	(855.000,)	Merupakan koreksi atas Salah Pencatatan Jumlah Pada Modul Bendahara dengan rincian : Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Pulpen Standar sebesar -120,000 Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Stick Glue sebesar -300,000 Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Tinta Epson 664 (Hitam) sebesar -435,000
3.0	Jawa Barat	005.03.099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	(519.000,)	Merupakan KOREKSI PENCATATAN SETELAH PERBAIKAN / REKLASIFIKASI BAST TUP berupa Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian TINTA HP GT53 HITAM
3.0	Jawa Tengah	005.01.400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	(38.000,)	Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Sidu HVS A4 70 g
3.0	Jawa Tengah	005.03.099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	(22.500,)	Merupakan Koreksi Kuantitas Pembelian Boliner Biru atas kesalahan input barang yang seharusnya tidak ada
3.0	Jawa Timur	005.01.098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	(324.000.000,)	koreksi nilai bertambah atas kesalahan penginputan nilai menjadi kuantitas dan kuantitas menjadi harga pada modul komitmen sebelumnya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
491511 - PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Timur	005.01.098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	(4.341.600,)	terdapat koreksi kuantitas (jumlah) bertambah terhadap: bunga latex, water dispenser, vacum cleaner
3.0	Jawa Timur	005.01.401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	(3.765.384.000,)	Koreksi jumlah dan koreksi nilai atas kesalahan penginputan kuantitas dan nilai pada modul komitmen.
3.0	Jawa Timur	005.01.663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	(180.000,)	koreksi nilai tambah berupa barang: Spidol White board.
3.0	Jawa Timur	005.03.099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	(2.845.000,)	Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Label sebesar -895,000 Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Label sebesar -160,000 Koreksi Nilai Tambah atas Koreksi Kuantitas Tambah Label sebesar -1,790,000
3.0	Jawa Timur	005.04.401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	(8.925.000,)	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, antara Nilai (Jumlah barang dan Harga) pada Modul Komitmen, sehingga dilakukan koreksi jumlah
3.0	Jawa Timur	005.04.401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	(1.736.000,)	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
3.0	Jawa Timur	005.04.401521	PENGADILAN AGAMA PACITAN	(100.000,)	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
3.0	Kalimantan Barat	005.01.402386	PENGADILAN AGAMA KETAPANG	(207.500,)	Koreksi kuantitas bertambah atas pembelian sabun 16.500, Racun nyamuk 86.000, dan tisu 105.000
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	(66.000,)	Koreksi Kuantitas Tambah atas Hasil Opname Fisik dari barang berupa Wipol
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	(200.783.885,)	terdapat kesalahan penginputan kuantitas persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
3.0	Kalimantan Utara	005.03.099273	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	(3.498.000,)	Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Pulpen Pilot G2 sebesar -2,310,000 Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Pulpen Snowmen V-7 sebesar -1,188,000
3.0	Kepulauan Riau	005.03.099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	(896.000,)	Merupakan Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Isi Stapler No. 10 Joyko Kenko Kangaroo
3.0	Maluku	005.01.099710	PENGADILAN NEGERI MASOHI	(530.000,)	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Dikarenakan transaksi koreksi kuantitas tambah, dikarenakan kesalahan penginputan kuantitas pada modul komitmen
3.0	Maluku	005.01.307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	(4.865.000,)	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Dikarenakan transaksi koreksi kuantitas tambah, dikarenakan kesalahan penginputan kuantitas pada modul komitmen
3.0	Maluku	005.01.663377	PENGADILAN MILITER III - 18 DI AMBON	(500.000,)	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Dikarenakan transaksi koreksi kuantitas tambah, dikarenakan kesalahan penginputan kuantitas pada modul komitmen

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
491511 - PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Maluku Utara	005.01.099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	(2.745.000,)	Koreksi Kuantitas Tambah atas Perolehan Lainnya obat padat sebesar 2.640.000 dan Koreksi Kuantitas Tambah atas Perolehan Lainnya penjepit kertas sebesar 105.000
3.0	Maluku Utara	005.01.401973	PENGADILAN NEGERI BOBONG	(2.260.000,)	Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian pena snowman sebesar -45.000 Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian kertas f4 sebesar -1.400.000 Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Alat Tulis Kantor Lainnya sebesar -165.000 Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Kertas A4 sebesar 650.000
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.04.309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	(43.747,)	Koreksi Nilai Tambah atas Perolehan Lainnya BALPOINT SENOMAN sebesar Rp 4, dan Koreksi Kuantitas Tambah atas Perolehan Lainnya BALPOINT SENOMAN sebesar 47.743
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.099993	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	(1.605.000,)	Adanya kesalahan melakukan koreksi nilai tambah untuk barang berupa buku kwarto,gunting,kertas,HVS,bolpoint,isi Staples,pelubang kertas dan tinta sehingga terjadi perbedaan jumlah barang
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	(750.004,)	Terdapat koreksi jumlah dan nilai barang persediaan berupa vandisk 16 G koreksi jumlah dan nilai
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	(975.275,)	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan terhadap Koreksi Jumlah Barang Persediaan Berupa Pensil, Buku Ekspedisi, Lem Povinal, Buku Folio 100 lmbr, Ballpoint Snowman V5, Gunting besar, Hekter HD-50, Isi Cutter, Tissue Roll, Kertas Buffalo, Hekter-HD 50, Double tape 48 Mm
3.0	Papua	005.04.690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	(252.000,)	Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian kertas a4
3.0	Riau	005.01.402101	PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	(40.000,)	Koreksi Pencatatan persediaan
3.0	Riau	005.03.099215	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	(180.000,)	Merupakan koreksi harga atas Agenda Surat Keluar Perdata
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	(11.236.000.000,)	Terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Rp11.236.000.000,00 dan terdapat Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Rp Rp11.236.000.000,00 terjadi karena salah input jumlah barang yang diisi adalah nilai/harga barang yaitu 106.000 x 106.000.
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	(190.000,)	Terdapat Pendapatan penyesuaian nilai persediaan Rp190.000,00 karena terdapat koreksi jumlah masuk sebanyak 10 barang.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
491511 - PENDAPATAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Sulawesi Tenggara	005.01.401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	(99.960.000,)	terdapat kesalahan penginputan kuantitas dan harga, sehingga dilakukan koreksi jumlah
3.0	Sumatera Barat	005.01.401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	(432.000,)	terdapat kesalahan input pada saat penditelaian persediaan dimana harga barang diinput pada kuantitas barang dan jumlah barang diinput pada harga barang, sudah dilakukan koreksi kuantitas kurang dan koreksi nilai tambah
3.0	Sumatera Barat	005.01.402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	(2.303.520.000,)	terdapat kesalahan koreksi barang persediaan berupa spray anti nyamuk yang merupakan bahan baku, dilakukan koreksi kuantitas kurang , namun membentuk beban persediaan. Kemudian dilakukan koreksi nilai tambah pada kode barang yang benar namun nilai barang nya berbeda sehingga membentuk pendapatan penyesuaian nilai persediaan. sudah dilakukan koreksi kuantitas kurang pada kode barang yang benar tersebut sehingga menimbulkan beban penyesuaian nilai persediaan
3.0	Sumatera Selatan	005.01.401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	(200.000,)	Terdapat kesalahan penginputan satuan jumlah tercatat kota seharusanya pcs, sehingga dilakukan koreksi kuantitas tambah
3.0	Sumatera Selatan	005.01.402267	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	(260.000,)	Terdapat kesalahan penginputan satuan jumlah tercatat kota seharusanya pcs, sehingga dilakukan koreksi kuantitas tambah
3.0	Sumatera Utara	005.01.401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	(63.952.000,)	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Dikarenakan transaksi koreksi nilai tambah
3.0	Sumatera Utara	005.03.099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	(242.765.100,)	Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian GUNTING
3.0	Yogyakata	005.01.098061	PENGADILAN NEGERI WATES	(864.695.500,)	Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Refill Stella 225 ml sebesar -840,710,000 Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Refill So Klin 345 sebesar -23,985,500
3.0	Yogyakata	005.01.098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	(217.002.850,)	Koreksi nilai dan kuantitas atas persediaan dikarenakan adanya kesalahan input harga dan jumlah pesediaan pada BAST Modul Komitmen
3.0	Yogyakata	005.03.099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	(9.320.750,)	Koreksi nilai dan kuantitas atas persediaan dikarenakan adanya kesalahan input harga dan jumlah pesediaan pada BAST Modul Komitmen
TOTAL				**(25.597.189.511,)**	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
593311 - BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	**Penjelasan**
1	Aceh	005.04.401696	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG	1.124.800,	Terdapat koreksi jumlah persediaan kertas hvs yang awalnya satuannya per-lembar dikoreksi menjadi satuan RIM
2	Bali	005.01.099837	PENGADILAN NEGERI KARANGASEM	15.000,	koreksi jumlah berupa klip, karena input saldo awal
3	Banten	005.01.097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	279.000,	Terdapat akun 593311 Koreksi Nilai Persediaan dikarenakan adanya penginputan saldo awal persediaan. Dikarenakan operator persediaan menginput saldo akhir persediaan di tahun lalu dan telah dilakukan koreksi nilai persediaan
4	Gorontalo	005.01.401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO	462.164.000,	terdapat kesalahan penginputan kuantitas. + - 462.164.000 dengan akun 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
5	Jakarta	005.01.526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	136.740.000,	Koreksi satuan barang dari dus ke unit
6	Jawa Barat	005.03.099083	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	1.814.404,	Merupakan koreksi kuantitas kurang berupa buka sidang, buku jurnal, tinta
7	Jawa Tengah	005.01.400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	987.974,	Terdapat Nilai Kurang atas Koreksi Kuantitas Tambah Sidu HVS A4 70 g dan Nilai Kurang atas Pembelian Sidu HVS A4 70 g
8	Jawa Tengah	005.03.099092	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	22.500,	Koreksi Kuantitas Kurang atas Pembelian Boliner Biru
9	Jawa Timur	005.01.401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	3.765.384.000,	Kesalahan input jumlah (kuantitas) dan harga (nilai), dilakukan koreksi jumlah (kuantitas) dan koreksi harga (nilai) Kertas HVS
10	Jawa Timur	005.04.401294	PENGADILAN AGAMA GRESIK	1.736.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
11	Jawa Timur	005.04.401257	PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	8.925.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
12	Jawa Timur	005.01.098200	PENGADILAN NEGERI JEMBER	324.000.000,	Koreksi Kuantitas (jumlah) Keluar sejumlah 18.000 item dengan harga Rp18.000,00
13	Jawa Timur	005.03.099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	1.950.000,	Terdapat Koreksi Nilai Tambah atas Koreksi Kuantitas Kurang berupa Label sebesar dan Koreksi Kuantitas Kurang atas Pembelian Label
14	Jawa Timur	005.01.098303	PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO	4.281.600,	satker melakukan koreksi kuantitas (jumlah) tambah atas belanja ektrakomtabel peralatan dan mesin yang membentuk barang persediaan
15	Kalimantan Selatan	005.01.402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	1.666.999,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
16	Kalimantan Selatan	005.01.307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	7.380.230,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
17	Kalimantan Tengah	005.01.099141	PENGADILAN NEGERI MUARA TEWE	600.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
18	Kalimantan Tengah	005.01.670191	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	4.552.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
19	Kalimantan Tengah	005.01.402989	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA	200.783.885,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
593311 - BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	**Penjelasan**
20	Kalimantan Utara	005.03.099273	PENGADILAN NEGERI TARAKAN	3.498.000,	Koreksi Kuantitas Kurang atas Pembelian Pulpen Pilot G2 senilai 192500., Koreksi nilai pulpen senilai 1188000, koreksi kuantitas tambah puplen seniali 2117500
21	Kepulauan Riau	005.03.099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	896.000,	Koreksi Nilai Kurang atas Koreksi Kuantitas Tambah Isi Stapler senilai 896000
22	Maluku	005.04.402002	PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU	42.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
23	Maluku	005.01.307761	PENGADILAN AGAMA TUAL	4.865.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
24	Maluku	005.01.663377	PENGADILAN MILITER III - 18 DI AMBON	750.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan dan nilai persediaan
25	Maluku Utara	005.01.440740	PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	50.000,	Koreksi Kuantitas Kurang atas Pembelian kanebo
26	Nusa Tenggara Barat	005.04.309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	43.747,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
27	Nusa Tenggara Timur	005.01.402839	PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU	750.004,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
28	Nusa Tenggara Timur	005.01.576260	PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	520.750,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
29	Papua	005.04.690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	252.000,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah
30	Papua Barat	005.01.402911	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	330.000,	Koreksi Kuantitas Kurang atas Pembelian Materai
31	Riau	005.03.099215	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	120.000,	Terdapat kesalahan penginputan kuantitas pada modul komitmen, sehingga dilakukan koreksi kuantitas
32	Sulawesi Selatan	005.01.099485	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	11.236.000.000,	Terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan Rp11.236.000.000,00 dan terdapat Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Rp Rp11.236.000.000,00 terjadi karena salah input jumlah barang yang diisi adalah nilai/harga barang yaitu 106.000 x 106.000.
33	Sulawesi Selatan	005.01.526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	19.000,	Terdapat penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp19.000,00 karena terdapat koreksi jumlah keluar sebanyak 1 barang.
34	Sulawesi Tengah	005.01.307300	PENGADILAN AGAMA LUWUK	50.000,	terdapat transaksi K99 (Koreksi Kuantitas Kurang) senilai 50.000 berupa PULPEN FASTER senilai 50.000 dengan total jumlah 10 buah, dikarenakan kesalahan penginputan jumlah pada sakti modul persediaan
35	Sumatera Barat	005.01.402004	PENGADILAN AGAMA PAINAN	2.303.520.000,	terdapat kesalahan input pada saat penditelaian persediaan dimana harga barang diinput pada kuantitas barang dan jumlah barang diinput pada harga barang, sudah dilakukan koreksi kuantitas kurang dan koreksi nilai tambah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
593311 - BEBAN PENYESUAIAN NILAI PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	**Penjelasan**
36	Sumatera Barat	005.01.401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	432.000,	terdapat kesalahan koreksi barang persediaan berupa spray anti nyamuk yang merupakan bahan baku, dilakukan koreksi kuantitas kurang , namun membentuk beban persediaan. Kemudian dilakukan koreksi nilai tambah pada kode barang yang benar namun nilai barang nya berbeda sehingga membentuk pendapatan penyesuaian nilai persediaan. sudah dilakukan koreksi kuantitas kurang pada kode barang yang benar tersebut sehingga menimbulkan beban penyesuaian nilai persediaan
37	Sumatera Utara	005.01.403077	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	32.224.150,	terdapat kesalahan penginputan jumlah persediaan, sehingga dilakukan koreksi jumlah dengan total senilai 36134150 dan terdapat jurnal pada aplikasi sakti modul GLP berupa Perbaikan/koreksi nilai kesalahan input kuitansi up senilai -3910000
38	Sumatera Utara	005.01.401880	PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN	59.545.000,	Koreksi Kuantitas Kurang atas Pembelian Stik Note Persegi dengan nilai 63952000 dan terdapat jurnal dari aplikasi Sakti modul GLP berupa Perbaikan transaksi BAST belum Spby yang sudah didetilkan dan dilakukan pemakaian -4407000
39	Sumatera Utara	005.03.099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	8.302.500,	Koreksi Kuantitas Kurang atas Pembelian GUNTING senilai 8.302.500
40	Yogyakata	005.01.098082	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	286.593.050,	Koreksi nilai dan kuantitas atas persediaan dikarenakan adanya kesalahan input harga dan jumlah pesediaan pada BAST Modul Komitmen
41	Yogyakata	005.03.099131	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	939.106.460,	Koreksi nilai dan kuantitas atas persediaan dikarenakan adanya kesalahan input harga dan jumlah pesediaan pada BAST Modul Komitmen
42	Yogyakata	005.01.098061	PENGADILAN NEGERI WATES	864.695.500,	Koreksi nilai dan kuantitas atas persediaan dikarenakan adanya kesalahan input harga dan jumlah pesediaan pada BAST Modul Komitmen
Total				**20.667.012.553,**	



BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Aceh	005.01.401591	MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH	3.655.000	Terdapat dua transaksi 101 pembelian berupa Alat Kedokteran Lainnya dan Alat Kedokteran THT Lainnya
3.0	Aceh	005.01.401633	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	1.200.000	terdapat transaksi 101 pembelian Kursi Fiber Glas/Plastik sejmlah 2 buah pada bulan agustus
3.0	Aceh	005.01.401965	MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGPIDIE	13.000.000	terdapat 2 transaksi pembelian 101 berupa kipas angin 3 buah dan Kursi Besi/Metal 19 buah
3.0	Aceh	005.01.401967	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM	16.815.000	terdapat transaksi 101 pembelian berupa Kursi Besi/Metal 17 buah, Meja Ketik 1 buah dan Therminal Transfer Color Printer 1 buah pada bulan april
3.0	Aceh	005.01.401602	MAHKAMAH SYAR'IYAH SABANG	2.500.000	Terdapat pembelian kursui ruang sidang anak sejumlah 5 unit 2.500.000 sudah dicatat di saktinya dan sudah di ungkapkan di CALK,
3.0	Aceh	005.01.401611	MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI	14.031.150	Mahkamah syar'iyah sigli memiliki Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN dikarenakan terdapat pembelian aset yang dibawah nilai kapitalisasi namun menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran Belanja Modal (532111). Telah coba dilakukan koreksi atas hal tersebut, dengan cara Revisi DIPA dengan menggeser anggaran Belanja Modal (532111) menjadi Belanja Barang Ekstrakomptabel (52 1252), namun tidak bisa lagi dilakukan karena tidak terdapat sisa anggaran yang dimaksud.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Aceh	005.01.682228	MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG	6.040.000	terdapat transaksi 101 pembelian berupa Kursi Besi/Metal 8 buah senilai 6040000 pada bulan nopember
3.0	Bali	005.01.402763	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	1.101.000	Pembelian Sarana Disabilitas Pengadilan dengan nilai di bawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111
3.0	Bali	005.01.663335	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	4.995.000	Terdapat pembelian peralatan dan mesin ektra sebesar 4.995.000 dan honor pengadaan senilai 680.000
3.0	Bali	005.01.099858	PENGADILAN NEGERI BANGLI	888.000	Pembelian Tongkat disabilitas menggunakan akun 532111 Belanja modal peralatan dan mesin
3.0	Banten	005.01.652076	PENGADILAN AGAMA CILEGON	3.441.000	Terdapat pembelian berupa Aid Hearing sejumlah 2 unit dengan total nilai keseluruhan 1665000, Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya 3 unit dengan total nilai keseluruhan 999000, Walker Polding sejumlah 1 buah dengan nilai 444000 dan Tongkat Panjang sejumlah 2 unit dengan total nilai keseluruhan 333000
3.0	Banten	005.01.400797	PENGADILAN AGAMA SERANG	1.665.000	pembelian berupa (3070101999) Alat Kedokteran Umum Lainnya sebanyak 6 unit dengan total nilai keseluruhan Rupiah 1.665.000
3.0	Banten	005.01.400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	410.700	Pembelian berupa (3070101999) Alat Kedokteran Umum Lainnya sebanyak 4 unit dengan total nilai keseluruhan Rupiah 410.700

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Banten	005.01.417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	602.175	Terdapat belanja modal Peralatan dan Mesin (532111) mobiluer berupa Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dibawah nilai kapitalisasi perunitnya senilai Rp. 514.500/unit sebanyak 24 unit.
3.0	Banten	005.01.097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	7.650.000	Beban aset ekstrakomtapble dikarenakan transaksi hibah masuk
3.0	Banten	005.01.097598	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	102.854.500	Beban aset ekstrakomtapble dikarenakan transaksi hibah masuk
3.0	Bengkulu	005.01.308021	PENGADILAN AGAMA CURUP	275.300	Beban aset ekstrakomtapble dikarenakan belanja modal barang sarana disabilitas (tongkat kaki 3)
3.0	Bengkulu	005.01.400239	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	800.000	Hibah Individual berupa Dispenser sesuai NPDH Nomor : W8.U4/2309/PL.04/9/2022 tgl 06 September 2022
3.0	Bengkulu	005.01.401910	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	2.640.000	Hibah dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko berupa Kipas Angin BAST Nomor : 030/02/BAST/E.1/Aset/1/2022 tanggal 8 Februari 202
3.0	Gorontalo	005.01.682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	3.000.000	Beban pelepasan aset sebebar 3.000.000 . dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 untuk aset. dimana aset tersebut memiliki selisih beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jakarta	005.01.400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	2.480.824	Terdapat pembelian prasarana disabilitas berupa walker polding sebanyak 1 buah dan alat bantu lainnya sebanyak 3 buah
3.0	Jakarta	005.01.663267	PENGADILAN MILITER II - 08 DI JAKARTA	4.426.000	Terdapat pembelian alat kantor lainnya sebanyak 11 buah @Rp 356.909 dan Panic Button System, Alarm Indicator seharga Rp 500,000
3.0	Jakarta	005.01.663250	PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA	4.426.000	Terdapat pembelian alat kantor lainnya sebanyak 11 buah @Rp 356.909 dan Panic Button System, Alarm Indicator seharga Rp 500,000
3.0	Jakarta	005.01.663161	PENGADILAN MILITER UTAMA	4.426.000	Terdapat pembelian alat kantor lainnya sebanyak 11 buah @Rp 356.909 dan Panic Button System, Alarm Indicator seharga Rp 500,000
3.0	Jakarta	005.01.097471	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	555.000	Input perolehan lainnya berupa sarana disabilitas (walker SIMA) satu unit senilai 555.000
3.0	Jakarta	005.01.400220	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	2.497.500	Terdapat pembelian alat bantu lainnya sebanyak 3 buah @Rp832.500
3.0	Jakarta	005.01.097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	6.112.500	Terdapat pembelian tiang bendera sebanyak 2 buah @Rp650.000 dan CCTV sebanyak 5 buah @962.500
3.0	Jambi	005.01.402185	PENGADILAN AGAMA JAMBI	1.241.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa walker polding 2 unit dan aid hearing 2 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp1.241.000

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jambi	005.01.402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	2.015.650	Terdapat pembelian aset ekstra berupa Microphone 7, walker polding 3 unit dan aid hearing 2 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp2.015.650
3.0	Jambi	005.01.403052	PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN	1.870.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa rambu-rambu penunjuk jalan 2 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp1.870.000
3.0	Jambi	005.01.632018	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	3.050.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas 6 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp3.050.000.
3.0	Jambi	005.01.652034	PENGADILAN AGAMA SENGETI	15.559.500	Terdapat pembelian aset ekstra berupa pengadaan fasilitas pendukung mesin genset menggunakan kode barang 4010130005 (Bangunan Rumah Genset) dibawah nilai kapitalisasi menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp15.559.500
3.0	Jambi	005.01.400311	PENGADILAN NEGERI BANGKO	6.355.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat-alat disabilitas menggunakan akun 532111 belanja modal PM seniali Rp6.355.000
3.0	Jambi	005.01.098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	1.457.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa kamera, tripod dan kursi, printer menggunakan akun 532111 belanja modal PM seniali Rp1.457.000
3.0	Jambi	005.01.578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	8.001.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa palu sidang 3 unit dan papan nama hakim, panitera, para pihak 12 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp8.001.000

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Barat	005.01.400832	PENGADILAN AGAMA BEKASI	600.000	Terdapat hibah masuk berupa Speaker Komputer sebanyak 4 buah
3.0	Jawa Barat	005.01.682150	PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA	3.885.000	Terdpat pembelian Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun sebanyak 10 unit @27.750; Alat Bantu Lainnya sebanyak 2 buah @555.000; dan alat kesehatan lainnya sebanyak 6 buah @416.250
3.0	Jawa Barat	005.01.400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	32.100.000	Terdapat pembelian Gordyin/Kray sebanyak 107 buah
3.0	Jawa Barat	005.01.097514	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	4.858.000	Merupakan belanja modal peralatan disabilitas dengan nilai dibawah kapitalisasi. Terdapat pembelian alat kantor lainnya sebanyak 6 buah @705.963, dan walker polding sebanyak 1 buah @622.220
3.0	Jawa Barat	005.01.097610	PENGADILAN NEGERI BEKASI	1.000.000	Terdapat pembelian sarana disabilitas berupa walker polding sebanyak 2 buah
3.0	Jawa Barat	005.01.097645	PENGADILAN NEGERI BOGOR	960.500	Terdapat pembelian saran disabilitas berupa tongkat panjang sebanyak 2 buah @282.500 dan walker polding sebanyak 1 buah @395.500
3.0	Jawa Barat	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	812.000	Terdapat kesalahan pencatatan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP berupa Transportable Generating Set, sudah dilakukan koreksi pencatatan.
3.0	Jawa Barat	005.01.097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	1.480.000	Terdapat pembelian Bracket Standing Peralatan sebanyak 4 buah
3.0	Jawa Barat	005.01.097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	3.596.000	Terdapat hibah masuk berupa Kursi Fiber Glas/Plastik sebanyak 4 buah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Barat	005.01.097521	PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	9.329.650	Terdapat hibah masuk berupa kursi besi/metal sebanyak 10 buah @ 932.965
3.0	Jawa Barat	005.01.097535	PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA	35.211.400	Terdapat pembelian berupa kursi besi/metal sebanyak 40 buah @880.285
3.0	Jawa Tengah	005.01.401137	PENGADILAN AGAMA BOYOLALI	5.600.000	Terdapat transaksi 101 pembelian kursi besi metal delapan buah
3.0	Jawa Tengah	005.01.400982	PENGADILAN AGAMA JEPARA	680.000	terdapat transaksi 101 pembelian berupa meja kerja kayu dan transaksi 305 koreksi pencatatan berpa meja kerja kayu
3.0	Jawa Tengah	005.01.400951	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	846.000	terdapat 2 transaksi 101 dan 305 berupa pembelian dan koreksi pencatatan berpa kursi kayu
3.0	Jawa Tengah	005.01.400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	3.547.500	Terdapat transaksi 103 hibah masuk berupa CCTV - Camera Control Television System sebanyak 5 buah
3.0	Jawa Tengah	005.01.401180	PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	1.420.000	Terdapat transaksi 305 koreksi pencatatan berupa A.C. Split dan Alat Pendingin Lainnya
3.0	Jawa Tengah	005.01.097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	13.473.311	terdapat trasnsaksi pembelian 101 berupa meja kerja kayu 680000 dan tranasaksi 305 koreksi pencatatan meja kerj kayu senilai 680.000
3.0	Jawa Tengah	005.01.098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	1.300.000	terdapat 3 transaksi 101 pembelian berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, P.C Unit dan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Tengah	005.01.097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	2.440.000	Terdapat 2 transaksi 305 hibah masuk berupa Tempat Sampah 4 buah senilai 2140000 dan Bracket Holder 1 buah senilai 300.000 pada bulan juli
3.0	Jawa Tengah	005.01.097797	PENGADILAN NEGERI KENDAL	600.000	Terdapat transaksi 101 pembelian Station Wagon 1 unit senilai 600.000, dan transaksi 305 koresi pencatatan Station Wagon (-1) 600.000
3.0	Jawa Tengah	005.01.097762	PENGADILAN NEGERI PATI	545.000	terdapat transaksi transaksi 103 hibah masuk berupa Microphone 1 buah senilai 545000
3.0	Jawa Tengah	005.01.097780	PENGADILAN NEGERI PEMALANG	500.000	Penjelasan Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (595112) senilai Rp. 500.000,- Hal tersebut berupa 2 (dua) unit Bracket LCD Gantung yang merupakan perolehan dari BTN melalui mekanisme Hibah dan sudah dilakukan Pengesahan Hibah di KPPN Tegal pada tanggal 17 Juni 2022
3.0	Jawa Tengah	005.01.097912	PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG	4.940.000	terdapat transaksi 101 pembelian tongkat panjang 16 buah, 107 reklasifikasi masuk Alat Kesehatan Umum Lainnya dan 304 Reklasifikasi Keluar Tongkat Panjang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Tengah	005.01.097713	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	680.000	terdapat transaksi 101 berpa pembelian mobile file 2 buah dengan nilai 680.000 dan transaksi 305 koreksi pencatatan mobile file -2 senilai 680.000 dan transaksi 107dan 304 berupa reklasifikasi keluar dan reklasifikas masuk berupa bangunan gedung permanen banguna gedung kantor lainnya senilai 680.000 dan transaksi 305 koreksoi pencatatan banguanan gedung kantor lainnya dan transaksi 101 pembelian bangunan gedung kantor permanen
3.0	Jawa Timur	005.01.401369	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	4.505.900	Terdapat beban aset ektrakomtabel PM sebesar Rp4.505.900,00 adalah pembelian PM di bawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111.
3.0	Jawa Timur	005.01.401293	PENGADILAN AGAMA GRESIK	2.836.000	Terdapat 593121 Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel sebesar Rp2.836.000,00 adalah terdapat belanja barang dibawah nilai kapitalisasi berupa alat sarana disabilitas menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin.
3.0	Jawa Timur	005.01.401338	PENGADILAN AGAMA JEMBER	2.200.000	Terdapat Aset Ektrakomtabel PM sebesar Rp2.200.000,00 adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan nilai ekstrakomptabel.
3.0	Jawa Timur	005.01.663321	PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN	243.000	Terdapat pembelian saran disabilitas berupa kruk sebanyak 1 buah senilai Rp. 243,000,-
3.0	Jawa Timur	005.01.663300	PENGADILAN MILITER TINGGI III DI SURABAYA	7.055.000	Terdapat beban aset ektra PM sebesar Rp7.055.000,00 adalah 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) dengan nilai di bawah kapitalisasi berupa peralatan difabel.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Jawa Timur	005.01.098214	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	2.025.000	Terdapat beban aset ektrakomtable PM sebesar Rp2.025.000,00 adalah hibah berupa kipas angin dengan jasa pemasangan.
3.0	Jawa Timur	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	3.100.000	Terdapat Beban Ekstrakomptabel peralatan dan mesin atas hibah CCTV dan Micropone dibawah nilai kapitalisasi.
3.0	Jawa Timur	005.01.098281	PENGADILAN NEGERI MALANG	3.085.800	Terdapat akun beban aset ekstrakomtabel Peralatan dan mesin sebesar Rp3.085.800,00 disebabkan terdapat belanja barang dibawah nilai kapitalisasi berupa alat sarana disabilitas menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin
3.0	Jawa Timur	005.01.098420	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	1.102.000	Beban Aset Ektra Peralatan dan Mesin Sebesar Rp1.102.000,00 adalah belanja ektra menggunakan akun 53 yaitu berupa perekam suara sebanyak 2 unit.
3.0	Jawa Timur	005.01.098132	PENGADILAN NEGERI TUBAN	2.402.400	Terdapat Beban Aset Ektra PM dengan nilai Rp2.402.400,00 adalah hibah PM dengan nilai di bawah kapitalisasi
3.0	Kalimantan Barat	005.01.402669	PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH	899.800	Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai di bawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111, karena kesalahan input pada modul komitmen (Pembelian 1 unit UPS)
3.0	Kalimantan Barat	005.01.402370	PENGADILAN AGAMA SAMBAS	2.800.000	Pembelian Sarana Disabilitas Pengadilan dengan nilai di bawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 (Tongkat & Kruk)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.307122	PENGADILAN AGAMA KOTABARU	19.813.500	Kesalahan input yang seharusnya pengadaan peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi tapi diinpu KDP, kemudian dilakukan reklasifikasi
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.663232	PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN	6.932.600	Terdapat barang dengan nilai di bawah minimum kapitalisasi pada belanja modal pengadaan 1 paket sarana disabilitas (532111)
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.099197	PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN	1.272.000	Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan sarana Disabilitas Pengadilan dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	1.570.000	Belanja Modal peralatan dan mesin sarana disabilitas dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	1.100.000	Penerimaan beberapa Hibah Barang dibawah nilai Kapitalisasi Aset
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.400282	PENGADILAN NEGERI PLEIHARI	14.100.000	Hibah masuk dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	39.600.000	Belanja modal peralatan dan mesin berupa 1 unit Focusing Screen/Layar LCD Projector dan 42 buah Kursi Besi/Metal dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	4.550.000	pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi dispenser, vaccum cleaner. dan ada hibah dibawah nilai kapitalisasi berupa kursi-besi dari UIN Antasari Banjarmasin
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	3.500.000	pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi berupa tabung pemadam api dan alat-alat disabilitas
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	680.000	pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.099162	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	9.000.000	Hibah Aset Ekstrakomtabel berupa 12 unit Kursi yang nilai perolehannya di bawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.672973	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	200.000	Merupakan honor pejabat pengadaan printer
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.099120	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	7.050.000	Terdapat kesalahan penggunaan akun belanja yang seharusnya menggunakan belanja Ekstrakomptabel namun menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin 532111 (alat sarana disabilitas)
3.0	Kalimantan Timur	005.01.401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	1.645.975	Terdapat barang dengan nilai di bawah minimum kapitalisasi pada akun 532111 belanja modal pengadaan 1 paket sarana disabilitas berupa tongkat dan kruk.
3.0	Kalimantan Timur	005.01.099290	PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	2.597.400	Terdapat kesalahan pencatatan atas pengadaan sarana disabilitas. Barang yang harganya dibawah kapitalisasi memiliki satu kwitansi yang sama dengan barang di atas kapitalisasi. Berikut terlampir rincian yang dimaksud, barang sebagai berikut: 1. 3050105999 (Perkakas Kantor Lainnya / Kursi Lipat Sholat) = Rp. 388500 2. 3050105999 (Perkakas Kantor Lainnya / Tongkat Tunanetra) = Rp. 732600 3. 3050105999 (Perkakas Kantor Lainnya / Tongkat Kaki Satu) = Rp. 499500 4. 3050105999 (Perkakas Kantor Lainnya / Tongkat Kaki Tiga) = Rp. 366300 5. 3050105999 (Perkakas Kantor Lainnya / Tongkat Kaki Empat) = Rp. 610500

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Kalimantan Utara	005.01.417657	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	9.463.860	Pengadilan Agama Tanjung Selor terdapat Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2022 senilai Rp.9.463.860,- yang terdiri dari 14 Buah Kursi Hadap yang nilainya per unitnya senilai Rp.675.990,-
3.0	Kepulauan Riau	005.01.402154	PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP	909.090	Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai Potongan PPN 10%
3.0	Kepulauan Riau	005.01.098881	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	1.242.000	Hibah Peralatan dan Mesin dengan nilai dibawah kapitalisasi berupa Bracket Standing Peralatan sebanyak 2 buah dengan nilai perolehan Rp 621.000 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor BAST 86/BA- H/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022
3.0	Lampung	005.01.652041	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	2.700.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas 3 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp2.700.000
3.0	Lampung	005.01.402355	PENGADILAN AGAMA METRO	4.610.152	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas 7 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp4.610.152
3.0	Lampung	005.01.401956	PENGADILAN AGAMA SUKADANA	56.960.400	Terdapat pembelian aset ekstra berupa Gordyin/kray 80 buah menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp56.960.400
3.0	Lampung	005.01.614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	1.630.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas 4 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp1.630.000
3.0	Lampung	005.01.614684	PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG	4.544.636	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas 7 unit menggunakan akun 532111 belanja modal PM senilai Rp4.544.636

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Lampung	005.01.663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	9.250.000	Terdapat Hibah masuk aset ekstra berupa kabel 1 unit @150.000, kursi Zeis 16 buah @550.000, proyector spide 1 unit @300.000
3.0	Lampung	005.01.099031	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	14.630.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa rambu2 petunjuk jalan 14 unit dan tongkat panjang 2 buah menggunakan akun 532111 belanja modal PM seniali Rp14.630.000
3.0	Maluku Utara	005.01.099752	PENGADILAN NEGERI LABUHA	1.200.000	Terdapat hibah masuk berupa AC Split senilai Rp 500,000 dan Bunga Plastik/Pohon Artificial sebesar Rp 700,000
3.0	Maluku Utara	005.01.099731	PENGADILAN NEGERI TERNATE	4.570.000	Merupakan input perolehan lainnya barang ekstrakomptabel berupa 2 unit aid hearing @750.000, panic button sistem/alarm indicator 820.000, dan 2 unit walker polding @562.500
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.307885	PENGADILAN AGAMA MATARAM	1.200.000	Terdapat hibah masuk berupa AC Split senilai Rp 500,000 dan Bunga Plastik/Pohon Artificial sebesar Rp 700,000
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.099879	PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA	3.909.975	Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi sebanyak 9 unit
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.578871	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM	12.670.000	Terdapat pembelian kursi besi/metal sebanyak 14 buah @Rp 905.000
3.0	Nusa Tenggara Barat	005.01.402788	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1.800.000	Terdapat pembelian printer sebanyak 2 buah @Rp900.000
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.099951	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	14.836.250	Belanja Barang Ekstrakomtable berupa Pembelian sarana disabilitas (Kursi Roda 1 Buah, Walker polding 1 Buah Tongkat Jalan 2 Buah, Alat Bantu Dengar 2 Buah, Kruk 1 Buah dan Tombol Panik 4 Buah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.099926	PENGADILAN NEGERI KUPANG	4.650.000	Belanja Barang Ekstrakomptabel berupa pembelian Sarana Disabilitas (Walker Polding 1 buah, Tongkat Jalan 2 buah, Alat Bantu Dengar 2 buah, Kruk 1 buah, dan Tombol Panic 4 buah)
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.400013	PENGADILAN NEGERI RUTENG	6.840.000	Belanja Barang Ekstrakomptabel berupa pembelian 9 (sembilan) buah UPS @ Rp. 760.000
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.099968	PENGADILAN NEGERI WAINGAPU	3.748.800	belanja barang ektrakomtabel sarana disabilitas.Walker polding.tongkat panjang.alat bantu dengar
3.0	Papua	005.01.614769	PENGADILAN AGAMA SENTANI	4.862.418	Terdapat pembelian P3K, Advanced / Extended Care sebanyak 2 buah @ Rp311.910; Aid Hearing sebanyak 1 buah @Rp 735.267; Alat Kesehatan Umum Lainnya sebanyak 7 buah @ Rp323.353 Pulse Oxymeter sebanyak 1 buah @Rp 389.259; Blood Presure Meter/Tensimeter sebanyak 1 buah @Rp 850.603.
3.0	Papua	005.01.400022	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	9.157.500	Terdapat pembelian Kursi Besi/Metal sebanyak 15 unit @Rp 610,500
3.0	Riau	005.01.402123	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAYAN	9.324.000	Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai di bawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 berupa alat sarana disabilitas

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Riau	005.01.402072	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	9.324.000	Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai di bawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 berupa alat sarana disabilitas
3.0	Riau	005.01.632001	PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG	3.000.000	Pembelian Meubelair sebanyak 10 kursi futura dengan nilai dibawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal
3.0	Riau	005.01.401908	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	23.307.778	Pembelian belanja modal Sarana dan Prasarana untuk Telepon Analog,Web Cam, dan Smoke Detector melalui Belanja Modal Akun 53 yang dicairkan dalam 2 tahap yaitu termin 30% dan Termin 70%
3.0	Satker Pusat	005.06.610378	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	5.194.800	terdapat pembelian aset PM dibawah nilai kapitalisasi berupa 6 unit kursi besi/metal
3.0	Satker Pusat	005.01.663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2.831.367.451	terdapat pembelian aset PM dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Satker Pusat	005.04.663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	5.053.440	terdapat pembelian aset PM dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	25.650.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas menggunakan akun 53211 belanja modal PM seniali Rp.4.250.000 dan Hibah masuk aset ekstra dibawah nilai kapitalisasi senilai Rp21.400.000
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.672927	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	4.459.980	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas menggunakan akun 53211 belanja modal PM seniali Rp4.459.980

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.099574	PENGADILAN NEGERI SINJAI	2.375.150	Terdapat Hibah masuk aset ekstra berupa camera, micrhophone dan Mixer dibawah nilai kapitalisasi senilai Rp2.375.150
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	3.400.000	Terdapat pembelian aset ekstra berupa alat disabilitas menggunakan akun 53211 belanja modal PM seniali Rp3.400.000
3.0	Sulawesi Tengah	005.01.307271	PENGADILAN AGAMA KODYA PALU	9.828.000	pembelian berupa (3050201020) Kursi Fiber Glas/Plastik sebanyak 12 unit dengan total nilai keseluruhan Rupiah 9.828.000
3.0	Sulawesi Tengah	005.01.099396	PENGADILAN NEGERI LUWUK	2.000.000	pembelian berupa (3180102001) Rambu Jalan sebanyak 10 unit dengan total nilai keseluruhan Rupiah 2.000.000
3.0	Sulawesi Tengah	005.01.099375	PENGADILAN NEGERI PALU	28.475.000	Beban aset ekstrakomtapble dikarenakan transaksi hibah masuk
3.0	Sulawesi Utara	005.01.099340	PENGADILAN NEGERI TAHUNA	3.790.000	Terdapat Hibah masuk aset ekstra berupa kipas anging 7 buah dibawah nilai kapitalisasi senilai Rp3.790.000
3.0	Sumatera Barat	005.01.401936	PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG	9.945.525	Terdapat hibah masuk berupa Kursi Besi/Metal sebanyak 15 buah
3.0	Sumatera Barat	005.01.401922	PENGADILAN AGAMA SOLOK	2.850.000	Terdapat pembelian prasarana disabilitas sebanyak 8 buah berupa walker polding, tensimenter, alat komunikasi lainnya, tangga, dan tongkat pedel
3.0	Sumatera Barat	005.01.098750	PENGADILAN NEGERI PADANG	6.882.000	Terdapat pembelian prasarana disabilitas berupa 2 buah aid hearing @721,500; tongkat pedel 16 buah @187,313; dan walker polding sebanyak 4 buah @610,500

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Sumatera Barat	005.01.401907	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG	12.155.565	Terdapat hibah masuk berupa Kursi Besi/Metal sebanyak 21 buah
3.0	Sumatera Barat	005.01.400421	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI	3.000.000	Terdapat hibah masuk berupa kipas angin sebanyak 2 buah @ 900.000 dan camera conference sebanyak 2 buah @600.000
3.0	Sumatera Barat	005.01.531844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG	3.840.600	Terdapat pembelian Kursi Besi/Metal sebanyak 4 buah
3.0	Sumatera Selatan	005.01.401946	PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM	5.675.000	Merupakan pembelian Alat Kantor Lainnya sebanyak 16 buah
3.0	Sumatera Selatan	005.01.401949	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	124.956.232	Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai di bawah kapitalisasi menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 berupa Meubelair yang dibayarkan Termin 1 sebanyak 20% dan Belanja Peralatan Disabilitas
3.0	Sumatera Selatan	005.01.663211	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	28.470.000	Merupakan pembelian Kursi Besi/Metal sebanyak 30 buah
3.0	Sumatera Selatan	005.01.098959	PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG	5.506.800	Merupakan hibah masuk berupa 4 buah alat kantor lainnya @274,450; 1 buah tripod kamera @700,000; 5 buah alat pembersih lainnya @323,000; dan 3 buah kipas angin @698,000
3.0	Sumatera Selatan	005.01.098942	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	15.850.800	Merupakan pembelian Kursi Besi/Metal sebanyak 60 buah
3.0	Sumatera Selatan	005.01.098938	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	4.050.000	Merupakan hibah masuk Kursi Besi/Metal sebanyak 6 buah

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595112 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL PERALATAN DAN MESIN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
3.0	Sumatera Utara	005.01.663178	PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN	6.404.000	Terdapat belanja modal Peralatan dan Mesin (532111) mobiluer berupa Pengadaan Sarana Disabilitas, dibawah nilai kapitalisasi perunitnya sebanyak 17 unit.
3.0	Sumatera Utara	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	1.980.000	Terdapat transaksi Hibah Masuk Peralatan dan Mesin berupa Kipas Angin dengan nilai Rp. 495.000,- perunitnya sebanyak 4 unit
3.0	Sumatera Utara	005.01.098612	PENGADILAN TINGGI MEDAN	33.976.800	Terdapat belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) yang nilainya dibawah kapitalisasi perunitnya, yaitu pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai Rp. 871.200,- sebanyak 39 unit, dengan BAST Nomor : BAP:W2.U/2137/Um.01.10/2/2022
3.0	Sumatera Utara	005.01.526725	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN	12.348.000	Terdapat belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) yang nilainya dibawah kapitalisasi perunitnya, berupa (3050201020) Kursi Fiber Glas/Plastik sebanyak 24 unit dengan nilai total keseluruhan 12.348.000
TOTAL				3.948.133.537	

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595113 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

AKUN : 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	**Penjelasan**
3.0	Aceh	005.01.673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	52.545.300,	pembangunan banguna pos jaga dan sudah tercatat di aplikasi sakti
3.0	Jawa Barat	005.01.097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	18.002.600,	Merupakan kesalahan pencatatan hibah masuk berupa renovasi bangunan gedung kantor yang seharusnya tidak membentuk nup baru, sudah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi susulan pada Bangunan Gedung Kantor
3.0	Jawa Tengah	005.01.098015	PENGADILAN NEGERI CILACAP	400.000,	Honor pejabat pengadaan Barang dan Jasa peralatan dan mesin
3.0	Jawa Tengah	005.01.400879	PENGADILAN AGAMA PEMALANG	29.117.000,	Terdapat Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 29117000 dan Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan -29117000
3.0	Jawa Tengah	005.01.400936	PENGADILAN AGAMA KENDAL	8.980.000,	terjadi perluasan gedung dan bangunan berupa ruang tunggu sidang dan dikerjakan oleh kosultan perencanaa seniali 8980000. nilai pengembangan dubawah nilai kapitalisasi gedung dan bangunan, sudah berkonsultasi juga dengan KPPN dan sudah didetailkan sudah di koreksi pencatatan, sidah berkorrodinasi juga dengan tingkat banding dengan cara nilai bertambah terhadap gedung dan bangunan. dan nilai koreksi bertambah dan sudah masuk ke gedung dan bangunan.
3.0	Jawa Tengah	005.01.401055	PENGADILAN AGAMA KEBUMEN	5.150.000,	595113 Belanja Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan Nilai 5.150.000 Pada Akun 595113 (Belanja Aset Ektrakomtable
3.0	Jawa Tengah	005.01.402593	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	8.950.000,	terdapat 3180321.BASTDetail.Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan senilai 8950000
3.0	Jawa Timur	005.01.098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	21.500.000,	Terdapat beban aset Ekstrakomptable gedung dan bangunan sebesar Rp21.500.00,00 adalah hibah kamar mandi dibawah nilai kapitalisasi.
3.0	Jawa Timur	005.01.401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	9.500.000,	Terdapat beban aset ektra Gedung Bangunan sebesar Rp9.500.000,00 adalah hibah bangunan berupa tempat ibadah permanen senilai Rp7.000.000,00 dan garasi/pool permanen senilai Rp2.500.000,00.
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.099223	PENGADILAN NEGERI BARABAI	44.626.780,	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa renovasi rumah dinas dibawah nilai kapitalisasi
3.0	Kalimantan Selatan	005.01.531865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	119.250.000,	Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa renovasi rumah negara sebanyak 7 unit dibawah nilai kapitalisasi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595113 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

AKUN : 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	**Penjelasan**
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.401918	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN	12.767.900,	Terdapat transaksi pencatatan gadung bangunan dibawah kapitalisasi nup 3 dan 4
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.402421	PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA	30.000.000,	terdapat pencatatan transaksi pembelian rambu-rambu
3.0	Kalimantan Tengah	005.01.578843	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	40.882.000,	Terjadi kesalahan pencatatan pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan renovasi pagar kantor yang seharusnya dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tetapi dicatat sebagai pagar permanen dan untuk saat ini sedang dalam proses koreksi Akun
3.0	Lampung	005.01.614691	PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS	10.000.000,	Terdapat akun 533121 Belanja penambahan nilai GB pada modul Komitmen dan sudah di SP2Dkan berupa pengadaan prasarana disabilitas berupa jalan guiding warning block di bawah nilai kapitalisasi. Sesuai instruksi dr auditor, karena akun 533121 masuk ke RUH Modul Aset shg didetailkan dahulu menghasilkan nilai NUP baru NUP 6, dilanjutkan penghapusan nilai thd NUP baru GB dan membukukannya ke akun 595113 sebagai belanja aset ekstrakomptabel GB atas koreksi pencatatan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
3.0	Nusa Tenggara Timur	005.01.400163	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	89.775.967,	1.Nilai yang tertera merupakan pembayaran pengawasan untuk rehab 4 rumah dinas,telah dicatat dan dilakukan koreksi nilai bertambah aset gedung dang bangunan berupa 4 rumah dinas golongan II tipe C. Untuk NUP 3,4,5 dan 6
3.0	Papua	005.01.402860	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	19.700.000,	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi berupa Pengawasan Renovasi Pagar Tembok samping Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebesar Rp 19.700.000
3.0	Sulawesi Selatan	005.01.307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	9.000.000,	Terdapat Hibah masuk aset ekstra berupa bangunan gazebo dibawah nilai kapitalisasi senilai Rp9.000.000
3.0	Sulawesi Tenggara	005.01.401885	PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI	111.026.218,	terdapat pencatatan bangunan gedung ekstrakomptabel

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
595113 - BEBAN ASET EKSTRAKOMTABEL GEDUNG DAN BANGUNAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

AKUN : 595113 Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan

TRN	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	**Penjelasan**
3.0	Sumatera Utara	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	17.236.000,	Belanja ini adalah Hibah renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanenuntuk NUP 1. Awalnya dicatat dengan menambah NUP baru yaitu NUP 7, karena di modul komitmen akun renovasi gedung tidak ada. Kemudian dilakukan koreksi pencatatan pada tanggal 20-10-2022 untuk menghapus NUP baru (7), dan dilakukan koreksi susulan untuk NUP 1 pada tanggal 20-10-2022 sesuai instruksi HaiDJPb bersamaan dengan hibah lain renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen untuk NUP 1 senilai Rp 253,209,990 dan 39,517,500 sehingga total koreksi susulan tgl. 20-10-2022 Rp 309,963,490
TOTAL				658.409.765,	



BEBAN KERUGIAN PELEPASAN ASET

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
1	Aceh	005.01.401966	MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE	6.256.120,	Terdapat Hibah Keluar Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp 583.693.000 serta Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Alat Penghancur Kertas berupa selisih aset yang dihapuskan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 638.000
2	Aceh	005.01.098441	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	1.441.682.081,	Transaksi Penghapusan Meubelair dan Peralatan Mesin SK SEKMA No 485/SEK/SK/IV/2022 tgl 13/04/2022
3	Aceh	005.01.401902	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE	2.230.255,	Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 dan 2 serta Gedung Pos Jaga Permanen NUP 1
4	Aceh	005.01.400415	PENGADILAN NEGERI JANTHOI	13.540.950,	Transaksi Penghapusan berupa Meubelair, Peralatan dan Mesin.
5	Aceh	005.01.673062	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG	1.070.000,	Beban pelepasan aset sebebar 3.522.535.072 dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 untuk aset berupa Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Taman Permanen, Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, dan, Pagar Permanen dimana aset tersebut memiliki selisih beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
6	Aceh	005.01.098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	431.322.870,	terdapat kesalahan penginputan dan pencatatan
7	Aceh	005.01.098434	PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH	5.281.913.424,	Terdapat Penghapusan berupa Gedung dan Bangunan, penghapusan berupa sepeda motor dan minibus, dan pencatatan barang yang akan dihapuskan berupa meubelair dan peralatan mesin
8	Bali	005.01.099802	PENGADILAN NEGERI NEGARA	555.060,	Merupakan Pencatatan Barang yg Mau dihapuskan (akun 911) berupa Handy Talky (HT) , Nilai Rp555.060 merupakan selisih nilai perolehan aset yg dihapuskan senilai Rp.1.850.200 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.1.295.140 sesuai SK Penghapusan Nomor 485/SEK/SK/4/2022
9	Bangka Belitung	005.01.663403	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	1.402.148,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Papan Pengumuman
10	Banten	005.01.400823	PENGADILAN AGAMA TANGERANG	10.000.000,	Beban pelepasan aset sebebar 10.000.000 . dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 untuk aset berupa monografi. dimana aset tersebut memiliki selisih beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
11	Banten	005.01.097560	PENGADILAN NEGERI SERANG	4.687.500,	Beban pelepasan aset sebebar 4.687.500 . dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 untuk aset berupa lap top. dimana aset tersebut memiliki selisih beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
12	Bengkulu	005.01.308014	PENGADILAN AGAMA MANNA	3.811.020,	Terdapat selisih antara nilai aset dan nilai akumulasi penyusutan dari Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa mesin antrian, dispenser, alat komunikasi lainnya, P.C. Unit, dan printer
13	Bengkulu	005.01.400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	67.509.350,	terjadi karena adanya pencatatan barang yang dihapuskan selisih dengan beban penyusutan SK Penghapusan Nomor 1314/SEK/SK/X/2022 dan 2202/SEK/SK/XII/2022
14	Gorontalo	005.01.402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO	1.851.000,	Beban pelepasan aset sebebar 5.441.125. dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 dan keluar lainnya K06 dengan total keselurahan 5.441.125 "keterkaitan dengan transaksi lain jurnal D: 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) K : 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) nilai 15.025.000 D: 391113 (Koreksi Nilai Persediaan) K : 596111 (Beban Kerugian Pelepasan Aset) nilai 3.585.125 D: 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) K: 596111 (Beban Kerugian Pelepasan Aset) nilai 5.000
15	Gorontalo	005.01.682185	PENGADILAN AGAMA MARISA	6.410.000,	Beban pelepasan aset sebebar 6.410.000 . dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 untuk aset berupa lap top. dimana aset tersebut memiliki selisih beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
16	Jakarta	005.01.097467	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	4.474.000,	Terdapat Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Stabilizer/UPS dan Software Conf Off-Line Computer, jumlah tersebut merupakan selisih aset yang dihapuskan dengan akumulasi penyusutannya

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
17	Jambi	005.01.402205	PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL	308.908.888,	Merupakan nilai buku/selisih nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas hibah keluar bangunan Gedung Kantor Semi Permanen senilai Rp308.908.888
18	Jambi	005.01.098895	PENGADILAN NEGERI JAMBI	490.000,	Merupakan Pencatatan Barang yg Mau dihapuskan berupa finger printer dan attandance acces control, Nilai Rp490.000 merupakan selisih nilai perolehan aset yg dihapuskan senilai Rp.4.900.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp4.410.000
19	Jambi	005.01.477368	PENGADILAN NEGERI TEBO	3.159.272,	Merupakan nilai buku/selisih nilai perolehan aset dengan akumulasi penyusutan atas transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa serial scanner 2 buah senilai Rp3.159.272
20	Jambi	005.01.400503	PENGADILAN TINGGI JAMBI	2.875.000,	Merupakan nilai buku/selisih nilai perolehan aset dengan akumulasi penyusutan atas transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa Ac split dan printer senilai Rp2.875.000
21	Jawa Barat	005.01.400848	PENGADILAN AGAMA KARAWANG	408.000,	Merupakan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Monografi (tidak ada akumulasi penyusutannya)
22	Jawa Barat	005.01.400678	PENGADILAN AGAMA SUMEDANG	182.684.000,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)
23	Jawa Barat	005.01.401915	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	4.931.000,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Hibah Keluar Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi
24	Jawa Barat	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	372.128.420,	Merupakan Penghapusan/Penghentian KDP Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan karena kesalahan pencatatan yang seharusnya tidak membentuk nup baru, sudah dilakukan input pengembangan melalui KDP
25	Jawa Barat	005.01.097603	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA	12.554.200,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa mesin antrian, dispenser, alat komunikasi lainnya, PC. Unit, dan printer
26	Jawa Barat	005.01.531823	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	7.600.000,	Merupakan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Alat Musik Tradisional/Daerah (tidak ada akumulasi penyusutannya)
27	Jawa Tengah	005.01.400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	85.389.000,	Nilai perolehan dari BMN berupa monografi yang telah di hapus
28	Jawa Tengah	005.01.400942	PENGADILAN AGAMA DEMAK	1.633.338.462,	Merupakan nilai aset penghapusan untuk Foto Dokumen (6020202002) NUP 1 s.d. 12 yang tidak mengalami penyusutan
29	Jawa Tengah	005.01.400967	PENGADILAN AGAMA PATI	110.055.419,	Saat Pengimputan sudah sesuai tapi hasilnya malah mengurangi nilai barang barang yang dihapus sehingga menjadi Beban Kerugian Pelepasan aset
30	Jawa Tengah	005.01.400565	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TEGAL DI SLAWI	5.642.394.497,	Penghapusan/Penghentian KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
31	Jawa Tengah	005.01.097865	PENGADILAN NEGERI REMBANG	76.500,	Terdapat koreksi, Jurnal Pencatatan KDP atas koreksi pencatatan karena kesalahan pada BAST Renovasi Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen NUP 2., Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan A.C. Split, Camera Video, Kursi Besi/Metal, Kipas Angin, Peta (Map), Jam Elektronik, Meja Kerja Kayu, Mesin Hitung Elektronik/Calculator, Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci), Kursi Kayu, White Board, Papan Visual/Papan Nama, Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci), P.C Unit, Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)), Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci), Perkakas Kantor Lainnya, Printer (Peralatan Personal Komputer), Camera Digital, Pesawat Telephone, Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci), Microphone/Boom Stand, Filing Cabinet Besi, mAmplifier, Lap Top, Kaca Hias, Unit Power Supply, Paging Mic, Palu Sidang, Alat Perekam Suara (Voice Pen) , Equalizer, Portable Water Pump, Lemari Kayu, Tustel, Meja Resepsionis, DVD Player, Facsimile, Televisi, Karaoke, Alat Bilyard, Meja Komputer, Rak Kayu, Alat Tenis Meja, Jurnal Koreksi Pencatatan karena kesalahan pada BAST, Jurnal KDP atas koreksi pencatatan kesalahan pada BAST Renovasi Rumah Negara Gol.I Tipe C Permanen, Jurnal Koreksi , Jurnal Koreksi karena kesalahan BAST, Jurnal Balik atas Jurnal Manual 007, Jurnal Balik atas Jurnal 004, karena kesalahan pencatatan pada Semester I TA 2022, Jurnal Balik atas kesalahan pemilihan akun pada jurnal manual dan Jurnal Balik atas Jurnal Manual 006 pada transaksi Semester I TA 2022
32	Jawa Tengah	005.01.097734	PENGADILAN NEGERI TEGAL	1.610.400,	Berdasarkan buku besar untuk Pengadilan Negeri tegal munculnya akun tersebut diakibatkan proses usulan penghapusan berupa satu unit server, satu unit ups dan satu unit router yang mengalami rusak berat. Transaksi tersebut dilakukan koreksi pada periode 13 berupa pembatalan usulan penghapusan dan penggunaan kembali karena kesalahan pencatatan (pencatatan pada sakti sebelum terbitnya SK)
33	Jawa Timur	005.04.401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	1.806.296,	DIPA 04
34	Kalimantan Barat	005.01.402412	PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	50.000,	Terdapat beban kerugian pelepasan aset sebesar Rp50.000 karena penghapusan monografi dan foto dokumen sesuai SK 2221/SEK/SK/XII/2022
35	Kalimantan Selatan	005.01.402531	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	1.141.000,	Merupakan pencatatan keluar lainnya persediaan
36	Kalimantan Selatan	005.01.099202	PENGADILAN NEGERI KANDANGAN	12.494.846,	Merupakan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Monografi (tidak ada akumulasi penyusutannya)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
37	Kalimantan Selatan	005.01.400260	PENGADILAN NEGERI MARABAHAN	314.582.220,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Penghapusan Pagar Permanen
38	Kalimantan Selatan	005.01.099230	PENGADILAN NEGERI MARTAPURA	71.000,	Merupakan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Foto Dokumen (tidak ada akumulasi penyusutannya
39	Kalimantan Selatan	005.01.099265	PENGADILAN NEGERI RANTAU	2.120.051.967,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Penghapusan Bengunan Gedung Kantor Permanen NUP 1&2, serta Gedung Pos Jaga Permanen Nup 1
40	Kalimantan Selatan	005.01.099244	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	812.500,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Software Komputer
41	Kalimantan Tengah	005.01.402474	PENGADILAN AGAMA SAMPIT	5.573.301.790,	Terdapat transaksi hibah keluar tanah bangunan rumah dinas, dan rumah negara
42	Kalimantan Tengah	005.01.099176	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	30.575.000,	Terdapat Penghapusan barang2 meubelair
43	Nusa Tenggara Barat	005.01.099862	PENGADILAN NEGERI MATARAM	584.331.000,	Terdapat Hibah Keluar Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp 583.693.000 serta Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Alat Penghancur Kertas berupa selisih aset yang dihapuskan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 638.000
44	Nusa Tenggara Timur	005.01.400245	PENGADILAN TINGGI KUPANG	5.370.275,	Terdapat Hibah Keluar Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi
45	Nusa Tenggara Timur	005.01.099972	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	82.501.454,	dalam proses verifikasi jurnal GLP
46	Satker Pusat	005.01.663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	403.584.261,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Penghapusan Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen NUP 1-8
47	Satker Pusat	005.04.663712	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	295.687.250,	Terdapat proses penghapusan berupa kendaraan dan meubelair
48	Satker Pusat	005.03.097450	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	14.756.503,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Uninterupted Power Supply (UPS)
49	Sulawesi Selatan	005.01.307452	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	990.200,	Merupakan Pencatatan Barang yg Mau dihapuskan Ac split dan power suplly sesuai SK No 2198/SEK/SK/XII/2022, selisih nilai perolehan aset yg dihapuskan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp990.200

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
50	Sulawesi Selatan	005.01.307509	PENGADILAN AGAMA WATAMPONE	227.631.418,	Merupakan selisih akumulasi penyusutan dengan nilai perolehan atas penghapusan Barang Milik Negara berupa Pagar Permanen dan Bangunan Tempat Parkir SK Nomor : 672/SEK/SK/V/2022 senilai Rp227.186.418, dan silisih nilai perolehan aset yg dihapuskan dengan akumulasi penyusutan atas Penghapusan BMN berupa Peralatan dan mesin sesuai SK Nomor 112/SEK/SK/I/2022 senilai Rp445.000
51	Sulawesi Selatan	005.01.099581	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	5.666.669,	Merupakan Pencatatan Barang yg Mau dihapuskan Serial scanner/printer, selisih nilai perolehan aset yg dihapuskan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp5.666.669
52	Sulawesi Selatan	005.01.099532	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	10.500.000,	Merupakan Pencatatan Barang yg Mau dihapuskan P.c Unit, selisih niali perolehan aset yg dihapuskan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp10.500.000
53	Sulawesi Selatan	005.01.526771	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG	24.822.000,	Terdapat penghapusan/pemusnahan BMN berupa Monografi senilai Rp24.822.000
54	Sulawesi Selatan	005.01.526711	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG	100.830.000,	Terdapat penghapusan/pemusnahan BMN berupa Monografi senilai Rp100.830.000
55	Sulawesi Tengah	005.01.578850	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU	3.522.535.072,	Beban pelepasan aset sebebar 3.522.535.072 dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 untuk aset berupa Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Taman Permanen, Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, dan, Pagar Permanen dimana aset tersebut memiliki selisih beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
56	Sulawesi Tengah	005.01.400534	PENGADILAN TINGGI PALU	261.129.280,	Beban pelepasan aset sebebar 261.129.280. dikarenakan terdapat transaksi pencatatan barang yang akan dihapuskan 911 untuk aset berupa jalan lainnya dan gedung garaso/pool permanen dimana aset tersebut memiliki selisih beban penyusutan yang didapat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dengan akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
57	Sulawesi Tenggara	005.01.682207	PENGADILAN AGAMA ANDOOLO	400.000,	Penghapusan motor yang hilang
58	Sumatera Barat	005.01.098832	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	19.236.362,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Kursi Besi/Metal, laptop, dan Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA
59	Sumatera Utara	005.01.098633	PENGADILAN NEGERI BINJAI	70.848.400,	Terdapat transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan (911) dan penghapusan (301) Meubelair (Peralatan dan Mesin) berupa Monografi sebanyak 3.426 unit, sesuai dengan SK SEKMA No. 1562/SEK/SK/XI/2022

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
596111 - BEBAN PELEPASAN ASET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)

No	Wilayah	KODE	NMSATKER	RPHREAL	Penjelasan
60	Sumatera Utara	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	650.000,	Terdapat transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan (911) dan penghapusan (301) Meubelair (Peralatan dan Mesin), sesuai dengan SK SEKMA No. 2042/SEK/SK/XII/2022
61	Yogyakata	005.01.663292	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	2.227.500,	Merupakan selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atas Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa Kursi Besi/Metal dan Lisensi
TOTAL				**29.335.903.099,**	



LAPORAH HIBAH

LAPORAN
PENERIMAAN HIBAH

HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK
BARANG / UANG / JASA

MAHKAMAH AGUNG RI

AUDITED

TA 2022



DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Pendahuluan ii

Bagian I – Penerimaan Hibah Mahkamah Agung RI 1

Bagian II - Hibah Tahun Berjalan Yang Sudah Disahkan 14

A. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Uang 14

B. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang 16

C. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa 16

D. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu 16

Lampiran 1 – Hibah Tahun Anggaran Berjalan Yang Sudah Disahkan 22

Lampiran 2 – Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Sudah Disahkan 41

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung RI dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan menggunakan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain sumber dana tersebut, Mahkamah Agung juga menerima sumber dana dari donor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, berupa hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Menurut jenisnya hibah terdiri atas hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Hibah yang direncanakan merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara dan uang/barang/jasa yang diterima dari donor digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

Pedoman penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta lebih lanjut Mahkamah Agung mengatur tentang pedoman kerjasama dengan mitra kerja yang tertuang dalam SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 920 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Barang/Jasa Dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.



Laporan Penerimaan Hibah Langsung **Audited Tahun 2022** di Mahkamah Agung RI ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berbentuk hibah uang/barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama periode **Januari** hingga **Desember** Tahun **2022** yang sudah dilakukan Audit oleh BPK. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai nilai, sumber dan asal penerimaan hibah, hingga klasifikasi hibah per jenis aset yang diterima.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi

Sahwan, S.H., M.H.
19680817 198903 1 007



Bagian

I

PENERIMAAN HIBAH MAHKAMAH AGUNG RI

Penerimaan hibah Mahkamah Agung RI adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan hibah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan negara yang dapat dimanfaatkan. Penerimaan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan serta mendukung pelayanan peradilan.

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 atau periode Audited ini mencatatkan penerimaan hibah langsung dari dalam negeri yang sudah disahkan sejumlah Rp70.284.339.793,00 ditambah dengan hibah tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp19.068.832.217,00 sehingga jika ditotal, nilai perolehan hibah Audited tahun 2022 sebesar Rp89.353.172.010,00 (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sepuluh rupiah*).

Tabel 1.1
Penerimaan Hibah Audited Tahun 2022

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Sudah Disahkan	168	343	Rp	70.284.339.793,00
Hibah Belum Disahkan	0	0	Rp	-
Hibah TAYL	35	49	Rp	19.068.832.217,00
TOTAL	**203**	**392**	**Rp**	**89.353.172.010,00**

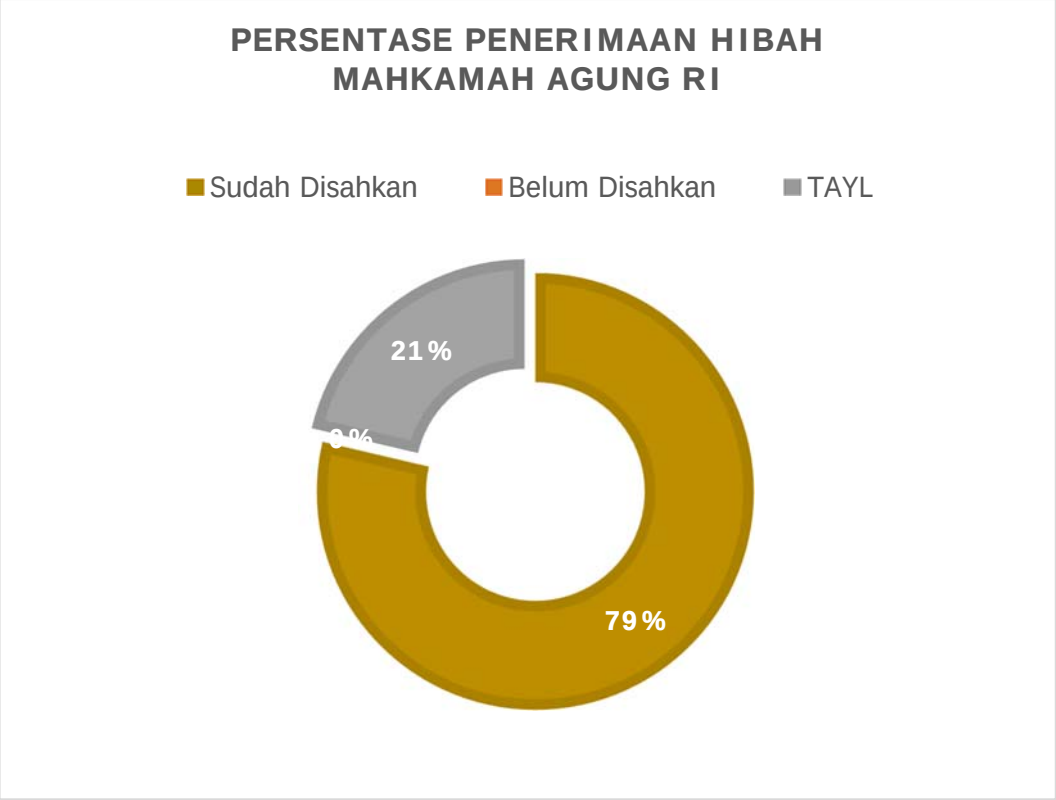

Jika dikelompokan menurut bentuknya, hibah yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dapat dibagi menjadi hibah barang, hibah uang dan hibah jasa yang terdapat pada 203 satuan kerja dengan 392 dokumen pengesahan hibah yang dapat dijelaskan berikut ini:

Tabel 1.2
Hibah Menurut Bentuknya Audited Tahun 2022

	JUMLAH SATKER	JUMLAH DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
Hibah Barang	196	378	Rp	76.825.964.568,00
Hibah Uang	6	13	Rp	10.490.540.848
Hibah Jasa	1	1	Rp	2.036.666.594
TOTAL	**203**	**392**	**Rp**	**89.353.172.010,00**

Lebih lanjut jika dikelompokan menurut sumber asal hibahnya, secara umum satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya menerima hibah yang bersumber dari dalam negeri baik berasal dari individu atau perseorangan, pemerintah daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten), lembaga perbankan atau keuangan dan juga organisasi dalam negeri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Hibah Menurut Sumber Asal Hibahnya Audited Tahun 2022

NO	ASAL HIBAH	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	PERSENTASE (%)
1	Individu / Perseorangan	164	Rp 4.800.831.576,00	5,37%
2	Pemerintah Daerah	96	Rp 55.355.984.106,00	61,95%
3	Organisasi Lainnya	28	Rp 3.409.444.164,00	3,82%
4	Korporasi	7	Rp 110.599.759,00	0,12%
5	Bank BTN	57	Rp 22.314.127.659,00	24,97%
6	Lembaga Perbankan Lainnya	40	Rp 3.362.184.746,00	3,76%
TOTAL		**392**	**Rp 89.353.172.010,00**	**100%**

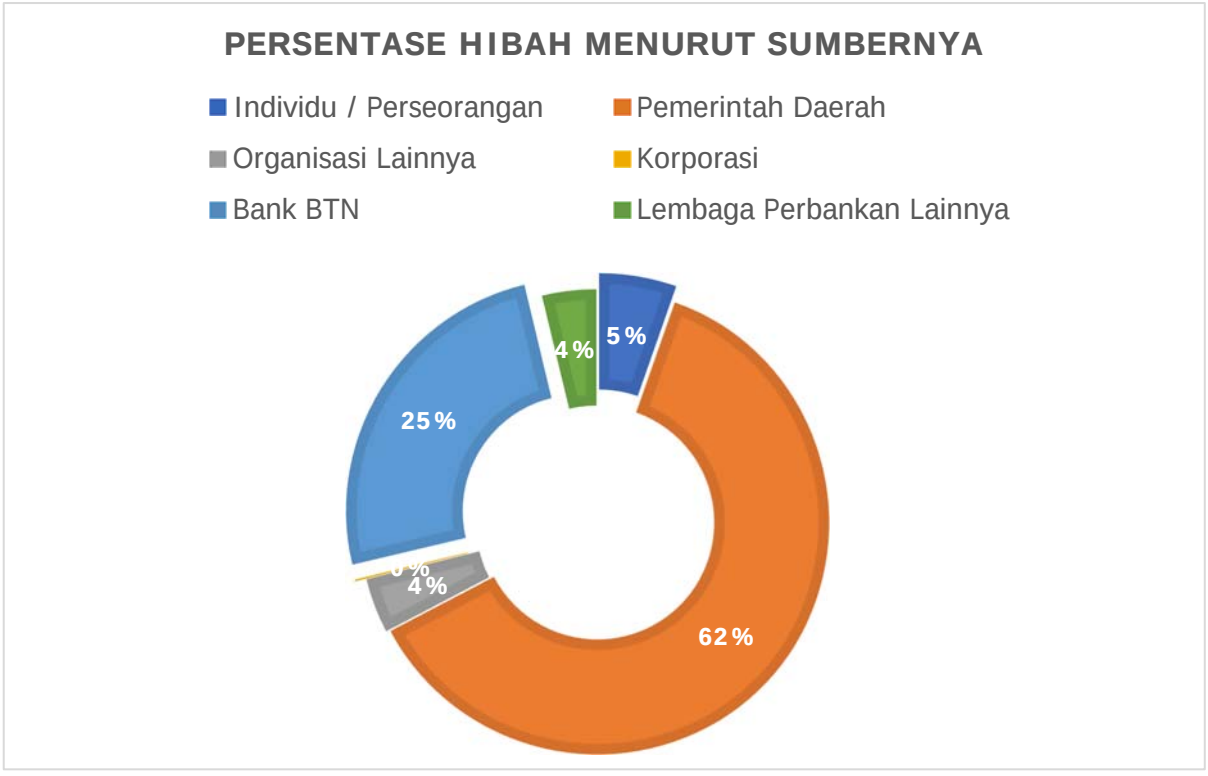

Jika dilihat dari persentase diatas, tahun 2022 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menerima hibah dari Bank BTN yang sudah memenuhi syarat sahnya hibah sehingga dapat di catatkan sebagai penerimaan hibah masuk Mahkamah Agung dengan total nilai perolehan hibah ke dua terbesar setelah hibah dari Pemerintah Daerah, yakni 24,97% dari total persentase penerimaan hibah Mahkamah Agung.

Adapun detail satuan kerja yang telah menerima hibah dari Bank BTN, akan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Penerimaan Hibah dari Bank BTN Audited Tahun 2022

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
1	PN DENPASAR	PERALATAN DAN MESIN	Laptop Fujitsu	Rp 19.690.000	Rp 19.690.000,00	NPH.NO: 001/NPH/BCSU/DPS.II/I/2022 Tanggal : 31 Januari 2022	29SC2YPA
2	PN DENPASAR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Pos Jaga/Keamanan Lengkap	Rp 64.050.000	Rp 64.050.000,00	NPH.NO: 002/NPH/BCSU/DPS.II/I/ 2022 Tanggal: 3 Januari 2022	2H7B93JA
3	PN SIDOARJO	PERALATAN DAN MESIN	Lemari + Backdrop Uk. 5,8m	Rp 38.600.000	Rp 150.375.000,00	BAST.NO: 2015/S/SPA.II/BCSU-FUN/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020	29ETE8VA
			Meja Uk. 2m	Rp 4.700.000			
			Backdrop TV Uk. 4m	Rp 15.300.000			
			Lantai Vinyl Uk. 64m	Rp 13.500.000			
			Bongkar Pasang Plafon Uk. 64m	Rp 10.175.000			
			Lampu Plafon + Kabel	Rp 4.750.000			
			Cat Plafon Uk. 64m	Rp 4.750.000			
			Penambahan Kusen 2 Plong + Pintu	Rp 10.000.000			
			Wallapaper Uk. 45m	Rp 3.700.000			
			Partisi Dinding Tinggi 120 x 17 m	Rp 7.800.000			
			Sofa 5 Sit + Meja + Nakas 2 Buah	Rp 10.000.000			
			Gorden	Rp 5.000.000			
			Lampu	Rp 600.000			
		GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembuatan Kamar Mandi Ukuran 120x180	Rp 21.500.000			
4	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	Lenovo AIO A340 i3	Rp 11.200.000	Rp 34.000.000,00	NPH.NO: 53/PKS/PKL.III/FSU/IV/ 2022 Tanggal: 14 April 2022	2S1TTZEA
			TV TCL P615 Android	Rp 11.150.000			
			Bracket TV Standing	Rp 2.600.000			
			Screen LCD Proyektor Motorized	Rp 3.750.000			
			Bracket LCD Gantung	Rp 500.000			
			Webcam Logitech Brio	Rp 4.800.000			
5	PN WATES	PERALATAN DAN MESIN	Kursi Tunggu Pengunjung 4 Seat	Rp 45.500.000	Rp 45.500.000,00	BAST.NO: 71/HIBAH/YYK.II/III/2022 & W13-U3/873a/PL.04/3/2022 Tanggal: 28 Maret 2022	21XG95EA
6	PN MAROS	PERALATAN DAN MESIN	UPS 6 KVA	Rp 20.000.000	Rp 167.707.950,00	BAST.NO: W22.U4/2191.a/UM/XII /2021 Tanggal: 20 Desember 2021	21VU4W9A
			PC Komputer	Rp 10.000.000			
			Laptop	Rp 30.000.000			
			Televisi	Rp 13.100.000			
			Batery Charger	Rp 4.000.000			
			Charger Batery	Rp 500.000			
			Smartphone Tablet	Rp 23.750.000			
			Speaker Videotron	Rp 800.000			
			Printer	Rp 7.000.000			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
			Printer Scanner	Rp 3.500.000			
			AC Split 0,5 PK	Rp 3.500.000			
			Hard Disk External 1 TB	Rp 800.000			
			Brangkas	Rp 9.000.000			
			Kursi Kerja	Rp 5.000.000			
			Mic Wireless	Rp 3.257.950			
			Box Arsip	Rp 13.500.000			
			Interior Ruangan	Rp 20.000.000			
7	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Backdrop Aula utama Kayu	Rp 28.000.000	Rp 100.000.000,00	BAST.NO: W12.U23/107/PL.04/12 /2021 Tanggal: 8 Desember 2021	2E8R9LAA
			Meja Kursi Kayu Majelis PP, Jaksa	Rp 18.000.000			
			Backdrop Teleconference Kayu	Rp 21.000.000			
			TV LED 32" Sharp	Rp 3.000.000			
			Komputer PC ASUS	Rp 17.000.000			
			Printer Scanner Folio HP	Rp 5.000.000			
			Speaker Dinding TOA	Rp 8.000.000			
8	PN DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Kayu Tunggu Besi Stainless Steel	Rp 17.800.000	Rp 70.000.000,00	BAST.NO: W12.U23/874/PL.04/8/ 2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2EH6T4YA
			Wastafel Batu Alam	Rp 2.800.000			
			Meja Meeting Finishing HPL	Rp 17.750.000			
			Smart TV Samsung 55"	Rp 8.795.000			
			Smart TV Samsung 50"	Rp 7.775.000			
			Smart TV Samsung 40"	Rp 4.940.000			
			Bracket TV Standing Samsung	Rp 2.000.000			
			Bracket TV Universal Samsung	Rp 300.000			
			Tong Sampah Stainless Kotak	Rp 2.140.000			
			Kursi dan Meja Tamu Kayu Jati	Rp 5.700.000			
9	PN BATANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Penutupan Tembok Bagian Depan dan Belakang dengan Triplek	Rp 57.720.000	Rp 62.000.000,00	BAST.NO: 02/PKS/PKL.III/BCSU/I/ 2022 Tanggal: 13 Januari 2022	2R8NMWKA
			Lemari	Rp 2.000.000			
			Backdrop	Rp 2.280.000			
10	PN BATANG	PERALATAN DAN MESIN	Dispenser, Almari dan Rak Besi	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000,00	NPH.NO: 39/PKS/PKL.III/BCSU/V III/2020 Tanggal: 18 Agustus 2020	25Y8YJ2A
11	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	Mesin Antrian Sidang	Rp 15.400.000	Rp 179.602.500,00	NPH.NO: W29.U3/324/UK.01.10/ II/2022 & 36/BAST/047/II/2022 Tanggal: 2 Februari 2022	251JJG4A
			Lemari Locker	Rp 8.002.500			
			Printer	Rp 34.650.000			
			AC Split 2 PK	Rp 17.600.000			
			AC Split 1 PK	Rp 22.000.000			
			Scanner	Rp 13.200.000			
			Loudspeaker	Rp 30.800.000			
			Kursi Besi/Metal	Rp 5.500.000			
			CCTV	Rp 5.500.000			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
			HardDisk 1 Tera	Rp 2.750.000			
			Meja Kerja Kayu	Rp 11.000.000			
			Gordyn	Rp 11.000.000			
			Kabel UTP cat 6	Rp 2.200.000			
12	PN RANGKAS BITUNG	PERALATAN DAN MESIN	Backdrop PTSP	Rp 165.275.000	Rp 259.025.000,00	BAST.NO: 114/BAST/047/II/2021 & W29.U3/347/UK.01.10/ II/2021 Tanggal: 3 Februari 2021	2EKG53HA
			Bangku Panjang Besi Metal	Rp 4.000.000			
			Kursi Besi Metal	Rp 21.000.000			
			Meja Resepsionis	Rp 57.750.000			
			AC Split 2 PK	Rp 11.000.000			
13	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Pembangunan Ruang Pengacara dan Jaksa PN Sumedang	Rp 170.348.000	Rp 170.348.000,00	NPH.NO: 0204/S/BDT/BCSU/I/2022 & W11.U13/221.a/PL.09/ 01/2022 Tanggal: 21 Januari 2022	2XAZTM9A
14	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Pimpinan PN Sumedang	Rp 157.834.495	Rp 157.834.495,00	NPH.NO: 462/S/BDT/BCSU/III/2022 & W11.U13/526.a/PL.09/ 3/2022 Tanggal: 4 Maret 2022	2TPQKGRA
15	PN TEMANGGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Layar Tripod 96"	Rp 2.000.000	Rp 8.999.999,00	NPH.NO: 12/PKS/MGL.III/III/2022 & W.12.U27/376/UM.09/3 /2022 Tanggal: 24 Maret 2022	2UDN2N1A
			Camera Canon EOS M6 KIT	Rp 6.999.999			
16	PN KISARAN	PERALATAN DAN MESIN	Sofa Victoria/Milano	Rp 4.600.000	Rp 86.086.000,00	BAST.NO: W2.U11/2003/BAST/3/ 2021 Tanggal: 22 Maret 2021	2XTD5Q5A
			Sofa Grandic	Rp 12.500.000			
			Meja Sofa	Rp 1.200.000			
			Kursi Airpot (Duduk 3 Orang)	Rp 1.600.000			
			Kursi Teras Kayu Santai	Rp 1.200.000			
			Rak Buku	Rp 1.600.000			
			Meja+Kursi Tempahan	Rp 4.600.000			
			Lemari Kabinet Buku	Rp 5.200.000			
			Meja Granie Untuk Sofa	Rp 5.200.000			
			Lemari Baju Gantung tempahan	Rp 4.900.000			
			TV LED 70' Sharp	Rp 18.500.000			
			AC Samsung 2 PK	Rp 7.750.000			
			Pembelian Karpet	Rp 3.261.000			
			Pembayaran Wallpaper	Rp 13.975.000			
17	PN KISARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP	Rp 34.963.977	Rp 42.117.500,00	BAST.NO: 02/BA/STR/BCSU/IV/2021 Tanggal: 26 April 2021	2RR3NNEA
		PERALATAN DAN MESIN	TV Sharp 32 Inch	Rp 2.600.000			
			Refurbish Meja PTSP	Rp 846.381			
			Downlight	Rp 1.168.005			
			Lampu Strip	Rp 1.805.612			
			Lampu Sorot	Rp 733.530			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
18	PN JANTHOI	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Toyota Haice M/T	Rp 520.561.080	Rp 520.561.080,00	NPH.NO: W1.U18/94A/NPHD/2022 Tanggal: 10 Januari 2022	2G8JCKVA
19	PN KISARAN	GEDUNG DAN BANGUNAN	A. Ruang Lobby		Rp 282.139.990,00	BAST.NO: W2.U11/6422/UM.01.10/12/ 2021 Tanggal: 01 Desember 2021	261BZGBA
			Pekerjaan Dinding dan Pintu				
			Pemasangan dinding partisi gypsum 2 sisi+cat	Rp 15.848.250			
			Pemasanagan Partisi dan Pintu UPVC	Rp 41.098.750			
			Pemasangan Furniture Dinding	Rp 27.297.600			
			Pemasanga Plint	Rp 2.805.000			
			Pemasangan Wallpaper	Rp 2.344.980			
			Pemasangan Akses Card Pintu	Rp 6.270.000			
			Pekerjaan Furtniture Lapis Dinding	Rp 4.950.000			
			Pekerjaan pintu UPVC uk.2,30x0,8m	Rp 5.280.000			
			Bongkar dan Pasang Pintu Alumunium	Rp 2.310.000			
			Bongkar dan Pasang Pintu Akses	Rp 1.430.000			
			Pekerjaan Plafond	Rp -			
			Pemasangan Plafond Gypsum	Rp 20.858.750			
			Pekerjaan Pengecatan	Rp -			
			Pengecatan Plafond Gypsum	Rp 2.931.500			
			Pekerjaan Listrik	Rp -			
			Instalasi lampi+switch	Rp 3.866.500			
			Pemasangan Lampu LED	Rp 3.135.000			
			Pekerjaan Pagar dan Kanopi	Rp -			
			Pemsasangan pagar pembatas	Rp 18.835.575			
			Pemasangan Kanopi Rangka Hollow atap Spandek	Rp 20.571.760			
			B. Ruang Menyusui	Rp -			
			Pekerjaan Dinding dan Meja	Rp -			
			Pemasangan partisi dinding triplek	Rp 6.286.500			
			Pemasangan meja Lapis HPL	Rp 5.335.000			
			Pemasangan Wallpaper	Rp 3.010.645			
			C . Ruang Tunggu Samping	Rp -			
			Pekerjaan Lantai	Rp -			
			Pasangan Keramik lantai Uk.40x40cm	Rp 28.156.700			
			Pekerjaan Lantai	Rp -			
			Pemasangan Kanopi Rangka Hollow atap Spandek	Rp 26.077.480			
			C . Ruang Ketua dan Panitera	Rp -			
			Pekerjaan Instalasi Listrik dan Asesoris	Rp -			
			Pemasangan Instalasi Wifi	Rp 1.980.000			
			Pemasangan Instalasi CCTV	Rp 2.530.000			
			Pemasangan AC 1 PK + Asesoris	Rp 12.100.000			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
			Pemasangan Kipas Standing	Rp 1.980.000			
			Pengadaan + Pemasangan TV 45"	Rp 14.850.000			
20	PN CILACAP	PERALATAN DAN MESIN	CCTV HIK Vision 8 Channel	Rp 8.500.000	Rp 24.500.000,00	NPH.NO: 12.A/PKS/PWK/FSU/II/2022 & W12.U7/463/PL.07/3/2022 Tanggal: 15 Februari 2022	2U6W5GRA
			AC Split Daikin 2 PK	Rp 7.151.000			
			Laptop HP 14s	Rp 6.499.000			
			Printer Canon G3010	Rp 2.350.000			
21	PN KLUNGKUNG	PERALATAN DAN MESIN	Printer wifi/LAN merk Epson	Rp 47.502.000	Rp 688.976.300,00	BAST.NO: 28/BAST/DPS.II/BCSU/IV/2022 Tanggal: 5 April 2022	23AGR2AA
			Scanner Epson	Rp 81.606.000			
			Samsung Smart TV 55 Inch	Rp 114.999.500			
			Pemasangan CCTV 2 Titik	Rp 6.600.000			
			Laptop ASUS Warna Grey Dan Lillac	Rp 120.277.500			
			Kursi Leather Ichiko back high rest	Rp 8.635.000			
			Kursi Atria High Office Chair	Rp 42.240.000			
			AC Standar 2 PK Merk Daikin	Rp 29.341.620			
			AC Standar 1 PK Merk Daikin	Rp 17.774.680			
			Logitech Camrea PTZ Pro 2	Rp 10.600.000			
			TV LED LG 70 Inch	Rp 19.700.000			
			TOA BS 301 Campak Stalite Speker	Rp 9.200.000			
			Digital Clock Omegastar	Rp 1.500.000			
			Wireless Microsound 1 Rec 4 Mic	Rp 3.750.000			
			Amplifier BMB DA 3000 Pro	Rp 6.000.000			
			Ruang Command Center	Rp 169.250.000			
22	PN TANGERANG	JASA	Jasa Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional Dalam Rangka Pelayanan Publik	Rp 2.036.666.594	Rp 2.036.666.594,00	NPH.NO: W29.U4/5435/PL.01.03/VII/2022 & 70/TGR.I/PKS/FSU/VII/2022 Tanggal: 1 Juli 2022	2YWLVVZA
23	PTA BENGKULU	PERALATAN DAN MESIN	Laptop HP 14s	Rp 9.400.000	Rp 28.500.000,00	NPH.NO: W7-A/2106/PL.04/8/2022 Tanggal: 9 Agustus 2022	2F2UR9EA
			SmarTV Samsung 32 Inch	Rp 6.100.000			
			AC Split Sharp 2 PK	Rp 13.000.000			
24	PN SINGKAWANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Layanan PTSP	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000,00	NPH.NO: W17-U2/348/KU.06/02/2022 & 060/PKS/042/II/2022 Tanggal: 18 Februari 2022	281GMZNA
25	PN MAROS	PERALATAN DAN MESIN	Printer Epson Jurusita	Rp 2.000.000	Rp 177.534.246,00	NPH.NO: 008/BAST/MKS/FSU/V/2022 & W22.U4/863/UM/V/2022 Tanggal: 20 Mei 2022	23R8V1AA
			Pinter Epson PP	Rp 2.000.000			
			Printer Epson Perdata	Rp 2.000.000			
			Printer Epson Loby	Rp 2.000.000			
			Printer Epson PTIP	Rp 2.000.000			
			Prinler Scan Pidana	Rp 5.500.000			
			Kurs Hakim	Rp 38.918.000			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
			Meja Pelan6kan	Rp 4.000.000			
			Meja Tanda Tangan Absen	Rp 3.200.000			
			Meja Buffet HPL	Rp 4.500.000			
			Meja Komputer Anjungan Mandiri	Rp 3.300.000			
			Akses Poin	Rp 8.400.000			
			Hardisk Server	Rp 3.000.000			
			AC Split 2 PK	Rp 25.500.000			
			Running Teks Loby	Rp 15.716.246			
			Video wall	Rp 42.000.000			
			Kursi Tinggi Anjungan Mandri	Rp 4.000.000			
			MIC	Rp 3.500.000			
			Box	Rp 1.800.000			
			Digital TV 43 Inch	Rp 4.200.000			
26	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kegiatan Pejeraan Perbaikan dan Pemeliharaan Instalasi Gedung	Rp 253.530.000	Rp 235.530.000,00	NPH.NO: W11.U13/691.a/PL.09/ 4/2022 Tanggal 1 April 2022	2SBSWDNA
27	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Digital AD Display Floorstand 49' Touchscreen	Rp 37.242.400	Rp 280.282.420,00	NPH.NO: W11.U13/811.a/PL.09/ 4/2022 Tanggal 26 April 2022	21258K9A
			Touchscreen Monitor 49"	Rp 25.480.000			
			Controller Box -Software ADS Touchscreen	Rp 8.106.000			
			Vesa (mm) 300x400	Rp 300.000			
			LG Smart TV 50" Non Touchscreen	Rp 72.000.000			
			LG Smart TV 50" Non Touchscreen	Rp 16.048.000			
			Mini PC, i3*4GB SSD 120	Rp 10.120.000			
			Bracket Floorstand (add on roda-custom)	Rp 3.600.000			
			Camera Logitech BCC950	Rp 7.788.000			
			Power Mixer "AUDETPRO" AP-908PM USB, 8 Channel rekam	Rp 17.550.000			
			Sett Speaker Pasif "Auderpro" AP-08KX, 8 Inch KX- Wireless	Rp 5.850.000			
			AUDERPRO' AP-949WMT-4CH (1 set=6mic meja)	Rp 41.216.000			
			Sett Stand Tripod Spk "Renxa" RZ-520ST/Bracket RZ-320WB	Rp 660.000			
			Kabel peaker AUDEERPRO AP-280CS (35 Meter)	Rp 841.800			
			Jasa Pengiriman, Akomodasi, Transport, Setting, Testing, Commisioning, 1st Deploy Content, Training	Rp 8.000.000			
			PPN 10%	Rp 25.480.220			
28	PN SUMEDANG	PERALATAN DAN MESIN	Smart TV 50", Briket, Cabeling	Rp 13.293.967	Rp 65.187.086,00	NPH.NO: W11.U13/524.a/PL.09/ 3/2022 Tanggal 4 Maret 2022	21PVS9RA
			Smart TV 42-43", Briket, Cabeling	Rp 30.039.702			
			Web Cam	Rp 2.417.792			
			Pemasangan, Perbaikan CCTV dan DVR	Rp 19.435.625			
29	PN BANYUWANGI	PERALATAN DAN MESIN	Kipas Angin Maspion	Rp 2.025.000	Rp 22.800.000,00	NPH.NO: 287/PKS/BWI.III/FSU/X /2022 & W14.U16/2410/HM.01/ 10/2022 Tanggal: 13 Oktober 2022	2FB4VC9A
			AC Standing Daikin 3 PK	Rp 19.000.000			
			Kaca Film 40% + Pemasangan	Rp 1.775.000			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
30	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang Sidang pada Pengadilan Tinggi Bandung	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000,00	NPH.NO: 464/S/BDT/BCSU/III/2022 & W11.U/1526/KU.06/04/2022 Tanggal: 4 Maret 2022	2TG135BA
31	PN TANGERANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional	Rp 6.747.393.420	Rp 6.747.393.420,00	NPH.NO: W29.U4/7107/PL.01.03/VII/2022 & 100/TGR.I/PKS/FSU/VII/2022 Tanggal: 1 Juli 2022	23ZRCWYA
32	PN KAYU AGUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Interior Ruang Ramah Anak dan Ruang Panitera	Rp 114.830.610	Rp 114.830.610,00	NPH.NO: W6-U2/123/OT.01.1/03/2022 Tanggal: 15 Maret 2022	21XVZSDA
33	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Server PC Asus RS520-E9 Intel Xeon	Rp 97.528.000	Rp 144.107.000,00	NPH.NO: 05/PLB.II/PKS/BFSU/XI/2022 & W6.U2/939.a/OT.01.1/11/2022 Tanggal: 15 November 2022	2B68CY7A
			PC Intel Core i5-10500T	Rp 19.209.000			
			Stabilizer Ica Ferro Resonant	Rp 25.600.000			
			Ica Online Sinewave UPS	Rp 1.770.000			
34	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Elise Coffe Table Rect White	Rp 2.421.750	Rp 125.083.750,00	NPH.NO: W6-U2/125/OT.01.1/03/2022 Tanggal: 15 Maret 2022	2U9SWKSA
			Langley Sofa 2s Grey	Rp 6.099.000			
			PC Lenovo AIO A340	Rp 11.763.000			
			AC Split Panasonic 0,5 PK	Rp 5.100.000			
			Kulkas Panasonic	Rp 2.100.000			
			Notebook Asus ROG	Rp 44.600.000			
			Notebook HP Pavilion	Rp 32.600.000			
			Mixer Analog Yamaha	Rp 3.800.000			
			Scanner Brother ADS-2400N	Rp 9.900.000			
			Scanner Brother ADS-2200	Rp 6.700.000			
35	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Shield Task Chair Black	Rp 25.441.000	Rp 28.695.000,00	NPH.NO: 05/PLB.II/PKS/BFSU/VI/2022 & W6-U2/401.a/OT.01.1/06/2022 Tanggal: 7 Juni 2022	293XUTJA
			Stacy Stool Roud Light Grey	Rp 1.049.000			
			Stacy Stool Roud Dark Grey	Rp 1.049.000			
			Plan Stand SH9 Black	Rp 1.156.000			
36	PT BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Biaya atas Pekerjaan ME Ruang Pusat Kendali dan Pekerjaan Penataan Interior Ruang Command Centre	Rp 750.000.000	Rp 750.000.000,00	NPH.NO: 1956/S/BDT/BCSU/XI/2022 & W11.U/6563/KU.06/11/2022 Tanggal: 1 November 2022	2PSAPAVA
37	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Pembangunan Rumah Genset	Rp 40.800.000	Rp 124.717.600,00	NPH.NO: 004/BA/CRB/I/2022 & W11.U14/01/BAST/I/2022 Tanggal: 25 Januari 2022	2616N38A
			Penambahan Daya Listrik	Rp 18.002.600			
			Laptop Asus Vivobook i5 K413	Rp 12.500.000			
			AC Split Panasonic 1 PK	Rp 22.715.000			
			SmartTV Samsung 4K 50 Inch	Rp 7.700.000			
			SmartTV Samsung	Rp 7.800.000			
			Printer Epson L3150	Rp 15.200.000			
38	PN TANJUNG PINANG	PERALATAN DAN MESIN	LED Running Text	Rp 13.689.500	Rp 13.689.500,00	NPH.NO:W4.U2/149/KS.01/1/2022 & 003/PKS/148/I/2022 Tanggal: 28 Maret 2022	2AAEM6PA

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
39	PN TANGERANG	PERALATAN DAN MESIN	Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional	Rp 5.297.828.186	Rp 5.297.828.186,00	NPH.NO: W29.U4/5434/PL.01.03/VII/2022 & 69/TGR.I/PKS/FSU/VII/2022 Tanggal: 1 Juli 2022	2ZQ44BGA
40	PN BATAM	PERALATAN DAN MESIN	Meja Ruang Tamu Terbuka	Rp 9.000.000	Rp 90.000.000,00	NPH.NO: 80/BAST/BTM/IV/2022 & W4.U8/1479/UM.01.10/IV/2022 Tanggal: 5 April 2022	2LCC52MA
			AC Split Ruang PTSP	Rp 11.270.000			
			Meja Teleconference	Rp 5.500.000			
			Kursi Teleconference	Rp 3.690.000			
			Kursi Kerja Pimpinan	Rp 17.640.000			
			Microphone Wireless	Rp 1.900.000			
			Meja Majelis Hakim	Rp 10.200.000			
			Meja Panitera Pengganti	Rp 4.000.000			
			Meja Para Pihak	Rp 10.000.000			
			Kursi Ruang Sidang Kayu Jati	Rp 16.800.000			
41	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	Router Wi-Fi	Rp 6.400.000	Rp 6.400.000,00	NPH.NO: 250/BA/CRB/III/2022 & W11.U14/01/PL.07/III/2022 Tanggal: 1 Maret 2022	2DA2NJ2A
42	PN MAJALENGKA	PERALATAN DAN MESIN	UPS	Rp 7.000.000	Rp 59.000.000,00	NPH.NO: 253/BA/CRB/XI/2022 & W11.U14/03/PL.07/XI/2022 Tanggal: 30 November 2022	29QN823A
			CCTV	Rp 18.000.000			
			SmartTV Samsung 50 Inch	Rp 8.000.000			
			Kursi Direksi	Rp 10.000.000			
			Meja Kerja 1/2 Biro	Rp 8.000.000			
			Kursi Besi Pengunjung	Rp 3.000.000			
			Sice	Rp 5.000.000			
43	PN PURWAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Meja Rapat	Rp 8.580.000	Rp 42.122.000,00	NPH.NO: W11.U7/1730/PL.04/12/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2UMC3WKA
			Kursi Besi / Metal	Rp 4.596.000			
			Kursi Putar Fiber Glass	Rp 3.596.000			
			Bangku Panjang Kayu	Rp 5.850.000			
			AC Split	Rp 11.000.000			
			Mini PC	Rp 8.500.000			
44	PN PURWAKARTA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Ruang PTSP	Rp 92.756.000	Rp 132.692.000,00	NPH.NO: W11.U7/1732/PL.04/12/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2R5Q8X3A
			Renovasi Ruang Perpustakaan	Rp 39.936.000			
45	PN KAYU AGUNG	PERALATAN DAN MESIN	Renovasi Ruang Kerja Pengadilan Negeri Kayu Agung	Rp 593.834.460	Rp 593.834.460,00	NPH.NO: 07/PLB.II/PKS/BFSU/XII/2022 & W6-U2/312.a/OT.01.07/04/2022 Tanggal: 28 April 2022	2J44VDJA
46	PN BALIGE	PERALATAN DAN MESIN	Lemari Kabinet Buku	Rp 12.250.000	Rp 23.850.000,00	NPH.NO: 01/PKS/STR/BCSU/II/2022 & W2.U18/372/PL.04/2/2022 Tanggal: 22 Februari 2022	2X5XXHLA
			Meja Acrylic	Rp 7.000.000			
			SmartTV LED 43 Inch	Rp 4.600.000			
47	PN PEMALANG	PERALATAN DAN MESIN	PC AIO Asus V222GAK	Rp 8.000.000	Rp 45.000.000,00	NPH.NO: 172/PKS/PKL.III/BFSU/XI/2022 Tanggal: 29 November 2022	2VH6XLPA
			Printer HP Tank 315	Rp 8.000.000			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
			SmartTV Samsung 43 Inch	Rp 13.000.000			
			Mini PC Beelink GK35	Rp 6.600.000			
			Dispenser Sanken	Rp 1.900.000			
			Kursi Tamu	Rp 7.500.000			
48	PN SURAKARTA	PERALATAN DAN MESIN	Speaker Aktif	Rp 18.000.000	Rp 237.994.000,00	NPH.NO: W12-U2/1104/PL.03/12/2022 & 47A/PKS/SLO.II/FSU/XII/2022 Tanggal: 5 Desember 2022	2TGSRWMA
			Mixer	Rp 9.000.000			
			Microphone Wireless	Rp 5.500.000			
			Microphone Clip On	Rp 2.500.000			
			Stand Microphone	Rp 2.000.000			
			Stand Speaker	Rp 2.000.000			
			Meja Kerja	Rp 14.000.000			
			Lemari Berkas	Rp 18.000.000			
			Komputer All In One	Rp 40.000.000			
			Printer	Rp 18.000.000			
			Rak Arsip	Rp 10.000.000			
			Kamera Mirrorless	Rp 15.000.000			
			Kursi Kerja	Rp 6.000.000			
			Meja Oval	Rp 2.500.000			
			Meja Pelayanan PTSP	Rp 19.550.000			
			Meja Credensa	Rp 9.224.000			
			Meja Satpam	Rp 12.905.000			
			Meja Kasir	Rp 3.000.000			
			Lemari Penghargaan	Rp 4.700.000			
			Lemari Difabel	Rp 6.502.500			
			Lemari Buku	Rp 6.912.000			
			Sofa Tamu	Rp 4.400.000			
			Lampu Hias	Rp 8.300.000			
49	PN BALE BANDUNG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pembangunan Gedung PTSP	Rp 479.436.473	Rp 479.436.473,00	BAST.NO: 01/BAST/091/BFSU/I/2022 & W11.U6/1091/PL.01/3/2022 Tanggal: 17 Januari 2022	2ABYDBQA
50	PN LUMAJANG	PERALATAN DAN MESIN	SmartTV Changhong 58 Inch 4K UHD	Rp 5.874.000	Rp 6.985.000,00	NPH.NO: W14.U14/1368/UM.01/X/2020 & 159/PKS/JMB.III/BCSU/X/2020 Tanggal: 22 Oktober 2020	24971ENA
			Mic Shure Beta 99	Rp 312.000			
			Polytron Pas 22	Rp 799.000			
51	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Kursi Council Chair High Back	Rp 61.397.140	Rp 250.000.000,00	NPH.NO: 2387/S/BDT/BFSU/XII/2022 & W11.U13/2708/PL.09/12/2022 Tanggal: 23 Desember 2022	295282RA
			Kursi Council Chair Low Back	Rp 73.086.940			
			Kursi President Dire	Rp 14.086.192			
			Kursi Susun	Rp 9.329.650			
			Meja Staff	Rp 92.100.078			

NO	SATKER	ASET	TYPE	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	NOMOR REGISTER
52	PN SUMEDANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Renovasi Atap dan Plafon Ruang Kantor pada PN Sumedang	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000,00	NPH.NO: 2354/S/BDT/BFSU/XII/2022 & W11.U13/2669/PL.09/12/2022 Tanggal: 19 Desember 2022	2UZ351AA
53	PN KARANGANYAR	PERALATAN DAN MESIN	Printer Canon G3010	Rp 6.000.000	Rp 10.500.000,00	NPH.NO: 47/PKS/SLO.II/FSU/XII/2022 & W12.U31/3452/PL.09/12/2022 Tanggal: 1 Desember 2022	2SL1MW3A
			AC Split Sharp 1 PK	Rp 4.500.000			
54	PN TUBAN	PERALATAN DAN MESIN	PC Desktop Core i5/ RAM 4GB	Rp 47.775.000	Rp 258.445.400,00	NPH.NO: 93/GRS.III/PKS/IX/2022 & W14.U29/1697/HM.01.01/IX/2022 Tanggal: 6 September 2022	2V22GQFA
			Laptop Dell Inspiron	Rp 15.185.000			
			Printer Epson L1210	Rp 24.000.000			
			Team SSD M.2 512 GB	Rp 1.524.600			
			Scanner Plustek Smart PS3140U	Rp 59.270.400			
			SmartTV Aquos 32 Inch	Rp 3.467.100			
			AC Split Daikin 2 PK	Rp 6.600.000			
			AC Split FTC 1 PK	Rp 24.543.750			
			Kipas Angin Tornado 3 in 1	Rp 877.800			
			Standing Dispenser Sharp	Rp 3.045.000			
			Brankas Urban Guard	Rp 27.195.000			
			Brankas Truesafes Size 2	Rp 20.700.000			
			Lemari Arsip Besi Filling	Rp 1.655.000			
			Lemari Arsip 4 Door	Rp 1.622.500			
			Meja Makan Kaca Bulat	Rp 4.184.250			
			Kamera Nikon Coolpix P1000	Rp 16.800.000			
55	PN PEKALONGAN	PERALATAN DAN MESIN	Printer Epson L3110	Rp 7.275.000	Rp 10.000.000,00	NPH.NO: 10/PKS/PKL.III/BCSU/II/2022 & W12.U4/215/UM.01.01/1/2022 Tanggal: 4 Februari 2022	2Y1REXDA
			Showcase Sharp	Rp 2.725.000			
56	PN CIBINONG	PERALATAN DAN MESIN	Scanner Epson Workforce DS-410	Rp 32.400.000	Rp 32.400.000,00	BAST.NO: 039.a/BA/CBN.III/BFSU/II/2022 Tanggal: 10 Februari 2022	22QGNUSA
57	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	PERALATAN DAN MESIN	Proyektor Epson EB-L200X 3LCD XGA	Rp 42.400.000	Rp 191.109.100,00	NPH.NO: 25/PKS/IFD/XI/2022 & 292/BUA.1/OT.01.01/11/2022 Tanggal: 29 November 2022	27Q94EMA
			Apple Macbook Pro 13 Inch M2 8/512	Rp 138.000.000			
			SmartTV Samsung QA55Q60BAKXXD 4K QLED HDR	Rp 10.709.100			
TOTAL PEROLEHAN HIBAH DARI BANK BTN					**Rp**	**22.314.127.659,00**	

Bagian II

HIBAH TAHUN BERJALAN YANG SUDAH DISAHKAN

Mahkamah Agung RI menerima hibah langsung dari dalam negeri yang sudah dilakukan pengesahan hibahnya baik yang disahkan pada tahun berjalan maupun yang sudah lewat tahun, dengan bentuk hibah berupa :

A. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Uang

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa uang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 sejumlah **Rp76.825.964.568,00** (*tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdapat pada 196 satuan kerja dengan 378 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset apa saja yang diterima pada hibah dalam negeri berupa barang:

Tabel 2.1
Hibah Dalam Negeri Berupa Uang dan Aset Yang Telah Dibelanjakan

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
1	PN CIBINONG	PEMKAB. BOGOR	Meubelair Ruang Kantor (Rp.229.235.738)	Pertama	Belanja	Rp 78.840.000	Rp 1.404.540.848,00	NPH.NO: 978.4/054-Bakesbangpol/IX/2022 & W11-U20/4713/Hib.PL.04.05/9/2022 Tanggal: 20 September 2022
			Alat Pengolah Data Persidangan (Rp.275.350.000)	Kedua	Belanja	Rp 261.208.000		
			Perangkat Ruang Sidang Elektronik (Rp.839.995.110)	Ketiga	Belanja	Rp 901.234.500		
			Pengelolaan Operasional Kegiatan (Rp.60.000.000)	Keempat	Belanja	Rp 161.269.355		
				Kelima	Pengembalian	Rp 1.988.993		
2	PN DATARAN HUNIMOA	PEMKAB. SERAM BAGIAN TIMUR	Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Barang Konsumsi	Pertama	Belanja	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000,00	NPH.NO: 061/311/NPHD/2022 & W27-U8/206/HM.01.1/04/2022 Tanggal: 25 April 2022
3	PTUN PALEMBANG	PEMPROV. SUMATERA SELATAN	Biaya Penimbunan Tanah 5.000 m2 (Rp.1.759.500.000)	Pertama	Belanja	Rp 1.979.570.607	Rp 2.186.000.000,00	NPH.NO: 060/NPHD/I/2022 & W1-

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	TYPE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH
			Biaya Perencanaan Konstruksi (Rp.202.520.000)					TUN2/1188/PL.02/X/2022 Tanggal: 10 Oktober 2022
			Biaya Pengawasan Kontruksi (Rp.126.960.000)					
			Biaya Pengelolaan Kegiatan (97.020.000)					
				Pertama	Pengembalian	Rp 206.429.393		
4	PN KUNINGAN	PEMKAB. KUNINGAN	PC AIO	17	Unit	Rp 255.255.000	Rp 700.000.000,00	NPH.NO: NPHD/900/227-Bakesbangpol/2022 & W11-U16/327/KU.01/02/2022 Tanggal: 17 Februari 2022
			Laptop i5-1135G7 14" 256GB SSD Intel	1	Unit	Rp 11.507.725		
			Printer	12	Unit	Rp 48.600.000		
			AC	7	Unit	Rp 63.830.000		
			Scanner	5	Unit	Rp 40.377.500		
			LED TV	9	Unit	Rp 79.110.000		
			Kamera	4	Unit	Rp 52.404.850		
			Bracket	4	Unit	Rp 2.020.000		
			Mixer	2	Paket	Rp 13.000.000		
			Speaker	5	Unit	Rp 19.490.625		
			Microphone	4	Unit	Rp 5.728.000		
			Kursi Kerja	40	Unit	Rp 79.176.000		
			Meja Kerja	3	Unit	Rp 25.000.000		
			Lemari Kayu	2	Unit	Rp 4.500.000		
				Pertama	Pengembalian	Rp 300		
5	PN SINGKAWANG	PEMKOT. SINGKAWANG	AC Floor Standing 5 PK Changhong	1	Unit	Rp 26.500.000	Rp 150.000.000,00	NPH.NO: 400/156/SETDA.KESRA-C & W17-U2/2109/KU.06/11/2022 Tanggal: 22 November 2022
			AC Split Panasonic 2 PK	2	Unit	Rp 21.000.000		
			Smart TV 55 Inch Changhong	3	Unit	Rp 24.840.000		
			Smart TV 50 Inch Changhong	2	Unit	Rp 12.960.000		
			Kursi Pengunjung Ruang Sidang	8	Unit	Rp 19.600.000		
			Kursi Hadap	16	Unit	Rp 25.600.000		
			Meja Rapat	1	Unit	Rp 19.000.000		
			Honorarium Pejabat PBJ	1	Paket	Rp 500.000		
6	PN CIKARANG	PEMKAB. BEKASI	Bantuan Keuangan Pengadaan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Cikarang	Pertama	Belanja	Rp 4.690.000	Rp 6.000.000.000,00	NPH.NO: PM.01.02/2913/Bakesbangpol/ 2022 & W11.U23/4206/KU.01.07/XI/2022 Tanggal: 22 November 2022
				Sisa	Saldo	Rp 5.995.310.000		
JUMLAH TOTAL PEROLEHAN HIBAH UANG							**Rp 10.490.540.848,00**	

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D 31 DESEMBER 2022

AKUN : 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.097709	PENGADILAN NEGERI KUNINGAN	300
0.0	005.01.613519	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	19.88.993
TOTAL			**19.89.293**

B. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Barang

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 baik penerimaan di tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu (TAYL) sejumlah **Rp76.825.964.568,00** (*tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdapat pada 196 satuan kerja dengan 378 dokumen pengesahan hibah. Berikut lebih detail mengenai per jenis aset hibah dalam negeri berupa barang:

Tabel 2.2
Hibah Dalam Negeri Berupa Barang Per Jenis Aset Sudah Disahkan

NO	ASET YANG DITERIMA	DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH	NILAI PEROLEHAN HIBAH	
1	Tanah	26	Rp	20.823.908.359,00
2	Gedung dan Bangunan	74	Rp	35.915.121.408,00
3	Kendaraan Roda 4	8	Rp	3.965.284.630,00
4	Kendaraan Roda 2	1	Rp	118.891.650,00
5	Peralatan dan Mesin	269	Rp	16.002.758.521,00
TOTAL		**378**	**Rp**	**76.825.964.568,00**

C. Hibah Langsung Dalam Negeri Berupa Jasa

Penerimaan hibah langsung dari dalam negeri berupa jasa di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 hanya diterima oleh 1 satuan kerja yakni Pengadilan Negeri Tangerang yang berasal dari Bank BTN berupa Jasa Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Operasional Dalam Rangka Pelayanan Publik senilai **Rp2.036.666.594,00** (*dua milyar tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*).

D. Hibah Langsung Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) merupakan hibah langsung yang diterima pada tahun 2021 dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang Naskah Perjanjian Hibah atau Berita Acara Serah Terima Hibahnya belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah. Dalam pelaksanaan tata kelola hibah yang baik di Mahkamah Agung, satker harus memastikan semua penerimaan hibah harus tercatat dan terkelola administrasinya secara akuntabel. Jika tidak, akan berpotensi menjadi temuan oleh BPK. Oleh sebab itu, masih terdapat satker yang mengajukan permohonan registrasi atas hibah langsung yang diterima pada TAYL dan belum dicatat pada laporan keuangan.

Pengajuan permohonan nomor register hibah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 dengan dilampiri hasil Reviu APIP Kementerian/Lembaga atas penerimaan hibah langsung bentuk uang/barang/jasa. Mekanisme review atas penerimaan hibah tahun anggaran yang lalu sepenuhnya ke APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Dari total hibah langsung dalam negeri berupa barang sesuai pada tabel 2.2, di dalamnya terdapat hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar **Rp19.068.832.217,00** (*sembilan belas milyar enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah)* pada 35 satuan kerja dengan 49 dokumen pengesahan hibah yang Naskah Perjanjian Hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima Hibahnya tertanggal sudah lewat tahun berjalan. Secara lebih detail dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Hibah Barang Dalam Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
1	MS IDI	PEMKAB. ACEH TIMUR	TANAH	Rp652.252.212,00	590/10492/2021 Tanggal: 27 Oktober 2021	2SH4BU5A
2	PTA KENDARI	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp21.500.000,00	W21-A/1693.a/PL.01/12/2021 Tanggal: 3 Desember 2021	2U7EXF9A
3	PTA KENDARI	OTHER ORGANIZATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp4.000.000,00	W21.A/1598.a/PL.01/12/2021 Tanggal: 9 November 2021	2KCAJVUA
4	PN SIDOARJO	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN + GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp150.375.000,00	2015/S/SPA.II/BCSU-FUN/XII/2020 Tanggal: 1 Desember 2020	29ETE8VA
5	PA SENDAWAR	PEMKAB. KUTAI BARAT	TANAH	Rp3.037.149.000,00	130/1932/HK-TU.P/XI/2021 dan W17-A12/1056.a/PL.02/11/2021 Tanggal: 2 November 2021	22BZ8N6A
6	PN MAROS	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp167.707.950,00	W22.U4/2191.a/UM/XII/2021 Tanggal: 20 Desember 2021	21VU4W9A
7	PN SUMBER	PEMKAB. CIREBON	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp536.400.000,00	978/1062/Bakesbangpol/2021 dan W11.U19/2367/PL.06/VIII/2021 Tanggal: 23 Agustus 2021	2G9DTAZA

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
8	PN DEMAK	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp100.000.000,00	W12.U23/107/PL.04/12/2021 Tanggal: 8 Desember 2021	2E8R9LAA
9	PN DEMAK	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp70.000.000,00	W12.U23/874/PL.04/8/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2EH6T4YA
10	PN DEMAK	PEMKAB. DEMAK	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp524.281.000,00	031/2597Tanggal: 23 Desember 2021	26NJHFCA
11	PN DEMAK	PEMKAB. DEMAK	PERALATAN DAN MESIN	Rp171.882.967,00	028/873.1/2021 Tanggal: 30 Desember 2021	2PLHMHTA
12	PN BATANG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.000.000,00	39/PKS/PKL.III/BCSU/VIII/2020 Tanggal: 18 Agustus 2020	25Y8YJ2A
13	PA SELAT PANJANG	PEMKAB. BENGKALIS	TANAH	Rp384.000.000,00	940/NHBMD/2021/03 Tanggal: 13 September 2021	2GUDDWGA
14	PN KAB. KEDIRI	PEMKAB. KEDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp1.709.609.772,00	641/9615/418.32/2020 Tanggal: 30 Desember 2020	2WCLHECA
15	PN RANGKAS BITUNG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp259.025.000,00	114/BAST/047/II/2021 & W29.U3/347/UK.01.10/II/2021 Tanggal: 3 Februari 2021	2EKG53HA
16	PN PASAMAN BARAT	BANK BRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp196.612.000,00	B.1326.KC.III/LYI/07/2021 Tanggal: 16 Juli 2021	2E2SELYA
17	PN SIGLI	PEMKAB. PIDIE	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp399.077.000,00	645/761/NPHD/PRKP/2021 Tanggal: 15 November 2021	2GJX7CWA
18	PN KISARAN	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp86.086.000,00	W2.U11/2003/BAST/3/2021 Tanggal: 22 Maret 2021	2XTD5Q5A
19	PN KISARAN	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN + GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp42.117.500,00	02/BA/STR/BCSU/IV/2021 Tanggal: 26 April 2021	2RR3NNEA
20	PN MENGGALA	BANK MANDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp500.000.000,00	W9.UG/1257/HK.02/VIII/2021 Tanggal: 25 Agustus 2021	2HD4WT2A
21	PA MUARA TEWE	PEMKAB. MURUNG RAYA	TANAH	Rp1.068.000.000,00	027/230/DPRKPP/2021 Tanggal: 5 November 2021	2RVBTMXA
22	PN TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp186.320.000,00	43/BKBP-SET/XI/2021 Tanggal: 2 November 2021	2C3HGTDA
23	PA KUALA KAPUAS	OTHER ORGANIZATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp5.850.000,00	01/Pos.LKBHFasya/01/2021 Tanggal: 14 Januari 2021	2GR89PDA
24	PN KISARAN	BANK BTN	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp282.139.990,00	W2.U11/6422/UM.01.10/12/ 2021 Tanggal: 01 Desember 2021	261BZGBA
25	PT MALUKU UTARA	PEMKAB. PULAU MUROTAI	TANAH	Rp678.732.000,00	W28-U/1058/OT.01.1/9/2019 Tanggal: 20 September 2019	2M7V8YJA
26	PA REMBANG	PEMKAB. REMBANG	PERALATAN DAN MESIN	Rp87.840.500,00	030/2568/2021 & W11-A18/2236/HM.01.1/XII/2021 Tanggal: 16 Desember 2021	27WHZ6VA
27	PN BREBES	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp7.000.000,00	01/V/2020 Tanggal: 27 Mei 2020	2KUKP49A
28	PA BREBES	PEMKAB. BREBES	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp201.473.000,00	050/43475 & W11-A2/3510/PL.01/X/2020 Tanggal: 12 Oktober 2020	213G76NA
29	PA BREBES	PEMKAB. BREBES	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp126.704.000,00	050/11484 & W11-A2/1284/PL.01/III/2020 Tanggal: 18 Maret 2020	213M8GEA
30	PN SOASIU	PEMKAB. HALMAHERA TIMUR	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp364.436.000,00	035/82/06/2020 & W28-U1/893/PL.01/IX/2020 Tanggal: 19 Juni 2020	2BQ23L9A

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	ASET	NILAI PEROLEHAN	BAST / NPH	REGISTER
31	PN PANGKALAN BALAI	PEMKAB. BANYUASIN	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp1.034.376.000,00	1059/NPHD/BPKAD/2020 & W6.U10/1151/PL.06/XII/2020 Tanggal: 7 Desember 2020	2V7FM7DA
32	PN MENGGALA	BANK MANDIRI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp810.000.000,00	BSJ.R02.Ar.BDL/ATF.309/2020 Tanggal: 20 Juli 2020	2EUEGHXA
33	PN MAJALENGKA	PEMKAB. MAJALENGKA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp299.378.000,00	978/1716.B/DPUTR Tanggal: 5 November 2021	2CLXD1LA
34	PN BANJAR	BANK BRI	PERALATAN DAN MESIN	Rp80.000.000,00	B.12451.e-LYI/10/2020 & W11.U22/783.a/KU.06/10/2022 Tanggal: 30 September 2020	2PEPANCA
35	MS KOTACANE	PEMKAB. ACEH TENGGARA	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp90.895.000,00	600/568.1/NPHD/PUPR-AGR/2021 & W1.A7/858/PL.01/IX/2021 Tanggal: 20 September 2021	25P8D66A
36	PA PALEMBANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp84.200.000,00	W6-A1/1857a/PL.07/VIII/2021 Tanggal: 3 Agustus 2021	2KHKL67A
37	PN BALIGE	PEMPROV. SUMATERA UTARA	PERALATAN DAN MESIN	Rp78.801.000,00	041/3064/DPA/III/2019 Tanggal: 7 Agustus 2019	2DFM7VGA
38	PN SINGKIL	PEMKOT. SUBULUSSALAM	TANAH	Rp1.893.569.000,00	424/032/2021 & W1.U11/924/PL.02/VII/2021 Tanggal: 28 Juli 2021	25E1WPQA
39	PA SUNGGUMINASA	CORPORATIONS	PERALATAN DAN MESIN	Rp9.000.000,00	217/SKU/MGM/XI/2021 Tanggal: 25 November 2021	27H2GSRA
40	PA SUNGGUMINASA	BANK BSI	PERALATAN DAN MESIN	Rp11.000.000,00	01/008/440/XI Tanggal: 25 November 2021	2WBRC3GA
41	PA AMURANG	INDIVIDUAL	GEDUNG DAN BANGUNAN + TANAH	Rp2.476.737.326,00	W18-A6/528/PL.02/09/2022 Tanggal: 12 September 2019	2FJTF4GA
42	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.400.000,00	W2.U5/578/PL.01.10/IV/2019 Tanggal: 10 April 2019	2ZCX12GA
43	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/445/PL.01.10/III/2020 Tanggal: 16 Maret 2020	2CALLBVA
44	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/583.A/PL.01.10/III/2021 Tanggal: 19 Maret 2021	23LPDNEA
45	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp3.400.000,00	W2.U5/560/PL.01.10/IV/2020 Tanggal: 7 April 2020	28NL2B1A
46	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/603/PL.01.10/IV/2020 Tanggal: 15 April 2020	2TCK51TA
47	PN PADANG SIDEMPUAN	INDIVIDUAL	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.800.000,00	W2.U5/296.a/PL.01.10/II/2021 Tanggal: 15 Februari 2021	2EGMQ39A
48	PN LUMAJANG	BANK BTN	PERALATAN DAN MESIN	Rp6.985.000,00	W14.U14/1368/UM.01/X/2020 & 159/PKS/JMB.III/BCSU/X/2020 Tanggal: 22 Oktober 2020	24971ENA
49	PA TEMBILAHAN	PEMKAB. INDRAGIRI HILIR	TANAH	Rp136.320.000,00	W4-A4/192.a/KU.01.1/II/2018 Tanggal: 7 Februari 2018	2JLDNGCA
TOTAL				**Rp19.068.832.217,00**		

Namun dalam pencatatan dan penjurnalan pada aplikasi SAKTI, total hibah langsung dalam negeri TAYL sebesar **Rp18.862.402.824,00** terdapat selisih antara total angka pada dokumen pengesahan hibah dengan aplikasi SAKTI senilai **Rp206.429.393,00**. Hal ini disebabkan karena ada angka debit dari PTUN Palembang yang berasal dari pengesahan pengembalian sisa hibah uang (SP3HL) yang seharusnya diinput pada akun Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung namun satker terkendala tidak bisa input pada akun tersebut. Lalu satker mengajukan pertanyaan dan diberi petunjuk HAI DJPB disarankan mengubah hibah dari Tahun Anggaran Berjalan (THB) ke hibah sudah disahkan TAYL karena satker terseut terkendala dalam melakukan penginputan pada aplikasi SAKTInya dengan tujuan agar dapat melakukan proses pembuatan SPM SP4HL hibahnya, sehingga ketika diinput muncul angka debit pada akun hibah sudah disahkan TAYL yang menyebabkan total angka hibah sudah disahkan TAYL berkurang.

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D 31 DESEMBER 2022

AKUN : 391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	005.01.097577	PENGADILAN NEGERI RANGKAS BITUNG	(259.025.000,)
0.0	005.01.097691	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	(299.378.000,)
0.0	005.01.097776	PENGADILAN NEGERI BREBES	(7.000.000,)
0.0	005.01.097802	PENGADILAN NEGERI DEMAK	(866.163.967,)
0.0	005.01.097872	PENGADILAN NEGERI BATANG	(3.000.000,)
0.0	005.01.098167	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	(150.375.000,)
0.0	005.01.098310	PENGADILAN NEGERI LUMAJANG	(6.985.000,)
0.0	005.01.098462	PENGADILAN NEGERI SIGLI	(399.077.000,)
0.0	005.01.098608	PENGADILAN NEGERI SINGKEL	(1.893.569.000,)
0.0	005.01.098722	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	(34.000.000,)
0.0	005.01.098874	PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN	(186.320.000,)
0.0	005.01.099471	PENGADILAN NEGERI MAROS	(167.707.950,)
0.0	005.01.099769	PENGADILAN NEGERI SOASIU	(364.436.000,)
0.0	005.01.307491	PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA	(20.000.000,)
0.0	005.01.400389	PENGADILAN NEGERI KISARAN	(410.343.490,)
0.0	005.01.400477	PENGADILAN NEGERI SUMBER	(536.400.000,)
0.0	005.01.400580	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	(1.709.609.772,)
0.0	005.01.400891	PENGADILAN AGAMA BREBES	(328.177.000,)

0.0	005.01.400998	PENGADILAN AGAMA REMBANG	(87.840.500,)
0.0	005.01.401670	MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI	(652.252.212,)
0.0	005.01.401715	MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTACANE	(90.895.000,)
0.0	005.01.401878	PENGADILAN AGAMA SENDAWAR	(3.037.149.000,)
0.0	005.01.401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	(1.034.376.000,)
0.0	005.01.401914	PENGADILAN NEGERI BANJAR	(80.000.000,)
0.0	005.01.402097	PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN	(136.320.000,)
0.0	005.01.402132	PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG	(384.000.000,)
0.0	005.01.402242	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	(84.200.000,)
0.0	005.01.402443	PENGADILAN AGAMA MUARA TEWE	(1.068.000.000,)
0.0	005.01.402468	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	(5.850.000,)
0.0	005.01.477352	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	(196.612.000,)
0.0	005.01.526750	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	206.429.393,
0.0	005.01.576253	PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	(25.500.000,)
0.0	005.01.663026	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	(1.310.000.000,)
0.0	005.01.664522	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	(678.732.000,)
0.0	005.01.672910	PENGADILAN NEGERI BALIGE	(78.801.000,)
0.0	005.01.682171	PENGADILAN AGAMA AMURANG	(2.476.737.326,)
TOTAL			**(18.862.402.824,)**

Lampiran 1 :
Hibah Tahun Anggaran Berjalan Yang Sudah Disahkan – Audited TA 2022

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	099010	2Z43A93A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
2	098963	2LLG1QGA	PN BATURAJA	BARANG	DN	Rp 46.500.000,00
3	099780	29SC2YPA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 19.690.000,00
4	099780	2234U9CA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 5.070.000,00
5	099780	23XRHVCA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 12.050.000,00
6	099780	26S1R88A	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 12.050.000,00
7	099780	2H7B93JA	PN DENPASAR	BARANG	DN	Rp 64.050.000,00
8	662972	2DKK6DYA	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp 277.503.459,00
9	400936	2ATRJ4LA	PA KENDAL	BARANG	DN	Rp 11.999.000,00
10	477380	2DC38Y7A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
11	477380	2D2D2HFA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
12	477380	2HMB554A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
13	477380	2ET7772A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
14	477380	2S6BLRSA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
15	477380	23J1PB8A	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.600.000,00
16	099574	2GWF2ZJA	PN SINJAI	BARANG	DN	Rp 10.654.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
17	099574	2ZEWTQHA	PN SINJAI	BARANG	DN	Rp 2.375.150,00
18	307555	29USX7AA	PA SINJAI	BARANG	DN	Rp 21.500.000,00
19	099003	2PQG872A	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 1.000.000,00
20	099450	2C6MQ7AA	PN BARRU	BARANG	DN	Rp 196.698.000,00
21	097780	2S1TTZEA	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp 34.000.000,00
22	401390	23A8EASA	PA TRENGGALEK	BARANG	DN	Rp 520.075.105,00
23	097624	2FBG4TYA	PN KARAWANG	BARANG	DN	Rp 191.725.000,00
24	663403	2DXS24ZA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
25	098061	21XG95EA	PN WATES	BARANG	DN	Rp 45.500.000,00
26	099003	2PWED99A	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
27	401055	2N8R6P1A	PA KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
28	400421	23GB5RYA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 32.750.000,00
29	400741	2Q8WQF6A	PA CIANJUR	BARANG	DN	Rp 175.000.000,00
30	099926	28S2L76A	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
31	099926	2SJUVQXA	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
32	098675	2T3AC8QA	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp 118.891.650,00
33	663398	2N7XULWA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 1.800.000,00
34	663398	2LLGV4LA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 5.500.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
35	663398	23KVZ9VA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 4.350.000,00
36	663398	234V9MEA	PT BANTEN	BARANG	DN	Rp 2.300.000,00
37	099162	2D81N5WA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 9.696.000,00
38	402191	25GXSJEA	PA MUARA BUNGO	BARANG	DN	Rp 138.000.000,00
39	099162	2LLWAGXA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 11.663.000,00
40	400772	2TEAZ86A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 2.138.000,00
41	400772	2Q2NV62A	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
42	400772	2ZPRPNRA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 4.950.000,00
43	400772	2KMG37KA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 3.250.000,00
44	400772	2PK54JNA	PA MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
45	401915	2EUPPH2A	PN CIKARANG	BARANG	DN	Rp 1.603.619.000,00
46	401957	2TKNZQPA	PA SOREANG	BARANG	DN	Rp 72.348.600,00
47	099045	2H4RRTJA	PN METRO	BARANG	DN	Rp 199.743.000,00
48	097872	2R8NMWKA	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 62.000.000,00
49	097577	251JJG4A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 179.602.500,00
50	401307	2C55Q4HA	PA BOJONEGORO	BARANG	DN	Rp 825.839.780,00
51	098544	2YATGQ5A	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
52	097577	2EAYNF9A	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 7.650.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
53	098544	2HMQJNCA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 2.200.000,00
54	099162	27TK8KDA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
55	400678	265ZUGTA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 132.700.000,00
56	099176	2BL45Z7A	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp 4.785.000,00
57	097872	2XAZTM9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 170.348.000,00
58	097872	2TPQKGRA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 157.834.495,00
59	401488	2V5Q7LSA	PA MADIUN	BARANG	DN	Rp 28.000.000,00
60	099802	2EC8DFSA	PN NEGARA	BARANG	DN	Rp 30.657.000,00
61	401709	2N7PRCCA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 7.200.000,00
62	401910	22A3KDBA	PN MUKOMUKO	BARANG	DN	Rp 777.799.650,00
63	099820	2X7GYQJA	PN TABANAN	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
64	400704	2KX2Y12A	PA TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 33.266.759,00
65	307907	2QFUPCHA	PA PRAYA	BARANG	DN	Rp 80.000.000,00
66	097912	2UDN2N1A	PN TEMANGGUNG	BARANG	DN	Rp 8.999.999,00
67	099286	2R78HMUA	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 9.800.000,00
68	401904	2PND2C3A	PN SUKA MAKMUE	BARANG	DN	Rp 187.450.000,00
69	097872	2LM7FS9A	PN RANTAU PRAPAT	BARANG	DN	Rp 198.931.700,00
70	400421	2FQGFCKA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 45.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
71	098917	2HBDNGBA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	Rp 205.493.495,00
72	098917	2KBMWRRA	PN KUALA TUNGKAL	BARANG	DN	Rp 424.486.682,00
73	682150	2RXFN2MA	PA KOTA TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 106.987.664,00
74	097755	2QF6VURA	PN KUDUS	BARANG	DN	Rp 424.800.000,00
75	670206	2M2HRJAA	PN BATULICIN	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
76	097886	2C3SA5WA	PN PURWOREJO	BARANG	DN	Rp 2.165.741.250,00
77	402101	229D8AHA	PA BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 47.640.000,00
78	401271	238Y39AA	PA JOMBANG	BARANG	DN	Rp 661.400.000,00
79	402101	2VVFLD5A	PA BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 150.000.000,00
80	578864	2L6REEGA	PTUN KENDARI	BARANG	DN	Rp 42.660.000,00
81	098874	2WQZUVEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 11.100.000,00
82	098938	2392TD4A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
83	098938	2HQWKY1A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
84	098938	23WCFMPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
85	098938	2GBPMB5A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.549.000,00
86	098938	2Z6E3LNA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.700.000,00
87	097908	27RGLNUA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 12.012.000,00
88	400891	2ET6BMMA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
89	099031	21THL5DA	PN TANJUNG KARANG	BARANG	DN	Rp 12.000.000,00
90	098938	2RA7G8ZA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 4.400.000,00
91	098938	286KM9NA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.700.000,00
92	400327	2SR2PNGA	PN DUMAI	BARANG	DN	Rp 23.450.000,00
93	401375	213RHZEA	PA KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp 322.541.788,00
94	681422	2UEUSX7A	PN PASANGKAYU	BARANG	DN	Rp 197.411.966,00
95	097542	2UVHW84A	PN GARUT	BARANG	DN	Rp 5.750.000,00
96	097542	2VWDQDLA	PN GARUT	BARANG	DN	Rp 5.750.000,00
97	097603	2VEY2ECA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 39.050.000,00
98	401876	2KKWXGHA	PA KUALA KURUN	BARANG	DN	Rp 338.162.000,00
99	098310	2F4YN6BA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
100	098310	2F9TBSEA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
101	099024	21SAJ1AA	PN SUNGAILIAT	BARANG	DN	Rp 70.000.000,00
102	670227	2F25XX3A	PA SURAKARTA	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
103	559857	29RMM13A	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 29.000.000,00
104	400690	2U3C6V2A	PA CIAMIS	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
105	400415	2G8JCKVA	PN JANTHOI	BARANG	DN	Rp 520.561.080,00
106	400492	22PN216A	PT RIAU	BARANG	DN	Rp 52.100.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
107	672980	25U13T6A	PN PARIGI	BARANG	DN	Rp 449.200.000,00
108	097652	2HU2UJRA	PN SUKABUMI	BARANG	DN	Rp 35.780.000,00
109	099773	2L3QVBBA	PT DENPASAR	BARANG	DN	Rp 5.016.854.000,00
110	402468	289MT84A	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 4.550.000,00
111	307644	2GM1K39A	PA MAJENE	BARANG	DN	Rp 11.000.000,00
112	098310	24X1N5VA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 32.000.000,00
113	098874	27ZUDQFA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00
114	400559	2458MQ2A	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp 6.549.000,00
115	400559	21CBPCTA	PT MATARAM	BARANG	DN	Rp 12.550.000,00
116	099155	2J1137ZA	PN KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 35.400.000,00
117	662972	27A755DA	PN BONTANG	BARANG	DN	Rp 11.667.000,00
118	402519	28VPDLFA	PA MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 181.309.150,00
119	098015	2U6W5GRA	PN CILACAP	BARANG	DN	Rp 24.500.000,00
120	400239	2WU22KVA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 800.000,00
121	400239	29F9R9MA	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
122	097908	2QP8RQSA	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 8.000.000,00
123	604723	2CJJHDUA	PA TIGARAKSA	BARANG	DN	Rp 235.500.000,00
124	673013	25J4YG7A	PN MALILI	BARANG	DN	Rp 524.533.560,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
125	402302	23FDWSVA	PA PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 83.016.000,00
126	099439	2L64TBDA	PN SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 45.850.000,00
127	099926	2CHUPMGA	PN KUPANG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
128	477380	2863U8ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
129	477380	2JV32PXA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 4.050.000,00
130	670227	293811GA	PN SAMBAS	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
131	652123	23NLRY5A	PA BANGGAI	BARANG	DN	Rp 32.225.000,00
132	098942	2DNTQS7A	PN PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 12.100.000,00
133	400126	2HHDQE9A	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
134	400126	2G1SWB7A	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 12.500.000,00
135	400126	26GFT7WA	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
136	400512	24LQ3D8A	PT BENGKULU	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
137	401938	2CBAFAKA	PA TELUK KUANTAN	BARANG	DN	Rp 570.000.000,00
138	400735	2U25DZZA	PA SUKABUMI	BARANG	DN	Rp 24.894.000,00
139	400678	212LMLGA	PA SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 27.500.000,00
140	417657	2HPLP3WA	PA TANJUNG SELOR	BARANG	DN	Rp 1.370.294.550,00
141	099816	23AGR2AA	PN KLUNGKUNG	BARANG	DN	Rp 688.976.300,00
142	099340	2MMSRVJA	PN TAHUNA	BARANG	DN	Rp 54.490.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
143	098900	2THSDN6A	PN MUARA BUNGO	BARANG	DN	Rp 149.555.000,00
144	400832	212679TA	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp 21.540.000,00
145	400832	21QBBV9A	PA BEKASI	BARANG	DN	Rp 69.750.000,00
146	099947	2GALK3VA	PN SO'E	BARANG	DN	Rp 35.000.000,00
147	098938	24FV3A7A	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 2.240.000,00
148	098938	2SGNM2CA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 12.200.000,00
149	098938	2K275EVA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
150	098938	2KLH5LPA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 5.925.000,00
151	098938	2Z2XQ7RA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 4.050.000,00
152	098938	2Y2MA4JA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 2.350.000,00
153	401936	2RTZK12A	PA PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	Rp 198.669.994,00
154	098942	2EVL9GLA	PN PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 16.500.000,00
155	576274	28FQA32A	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 7.300.000,00
156	576274	2SY41AEA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 43.500.000,00
157	576274	2F2UR9EA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 28.500.000,00
158	576274	25ZUYHDA	PTA BENGKULU	BARANG	DN	Rp 12.500.000,00
159	477249	2W628Y4A	PN ROTE NDAO	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
160	400512	224SBGXA	PT BENGKULU	BARANG	DN	Rp 7.300.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
161	099070	281GMZNA	PN SINGKAWANG	BARANG	DN	Rp 65.000.000,00
162	402820	2JVYPNDA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 1.600.000,00
163	402820	2JGQCQJA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 1.400.000,00
164	402820	2PRV8G9A	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
165	402820	2X8MPJQA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 5.400.000,00
166	402820	2NHHAG8A	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 5.400.000,00
167	402820	2FAVV4EA	PA SO'E	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
168	098959	2YBDB7QA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 255.912.200,00
169	663403	2CWNVALA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
170	663403	2KN4F76A	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.000.000,00
171	663403	2NRVC3GA	PT BANGKA BELITUNG	BARANG	DN	Rp 2.500.000,00
172	099010	25LBHRLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 13.500.000,00
173	099010	2QETUP6A	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 4.650.000,00
174	098938	2X177DFA	PT PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 3.300.000,00
175	307729	2D5QJU9A	PA BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 16.000.000,00
176	477224	2GNGUTUA	PN UNAAHA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
177	400141	2N2MH71A	PN BANGKINANG	BARANG	DN	Rp 311.687.534,00
178	099471	23R8V1AA	PN MAROS	BARANG	DN	Rp 177.534.246,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
179	417722	2GJNVE1A	PN TANJUNG SELOR	BARANG	DN	Rp 1.370.294.550,00
180	097872	2PVA4JTA	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 439.202.000,00
181	400075	2Z4VMY5A	PN SORONG	BARANG	DN	Rp 299.580.000,00
182	400540	284BX3EA	PT KENDARI	BARANG	DN	Rp 539.078.000,00
183	097872	2SBSWDNA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 235.530.000,00
184	097872	21258K9A	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 280.282.420,00
185	097872	21PVS9RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 65.187.086,00
186	662986	2MRYTCKA	PN SANGATTA	BARANG	DN	Rp 10.200.000,00
187	662986	23AK2ELA	PN SANGATTA	BARANG	DN	Rp 6.600.000,00
188	098214	2FB4VC9A	PN BANYUWANGI	BARANG	DN	Rp 22.800.000,00
189	400967	2TJSCEMA	PA PATI	BARANG	DN	Rp 475.000.000,00
190	559857	25XAVENA	PTA BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 25.400.000,00
191	307712	2RX33TPA	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp 1.925.000,00
192	097500	2TG135BA	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp 200.000.000,00
193	097535	2S83Y8DA	PN TASIKMALAYA	BARANG	DN	Rp 134.462.500,00
194	402540	2XH5PPYA	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
195	402540	2QBNMJTA	PA BARABAI	BARANG	DN	Rp 7.700.000,00
196	098544	2DY4ZXKA	PN BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 149.105.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
197	307712	2V4WKRLA	PA KENDARI	BARANG	DN	Rp 6.000.000,00
198	307232	278J6DFA	PA KOTAMUBAGU	BARANG	DN	Rp 33.925.000,00
199	099638	2AT7UBQA	PN MAMUJU	BARANG	DN	Rp 162.000.000,00
200	098310	2WRQDQHA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 44.219.000,00
201	098310	2Z8LZ3YA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
202	098310	2T45PQUA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 13.325.000,00
203	402525	2LWCRFVA	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp 117.500.000,00
204	402525	2KRRP9PA	PA RANTAU	BARANG	DN	Rp 4.800.000,00
205	098874	2AYMXHAA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 47.175.000,00
206	098874	2BKWLRNA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 175.844.000,00
207	098874	27HBVCUA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 175.778.000,00
208	477380	2GZLS6ZA	PN KUTAI BARAT	BARANG	DN	Rp 1.787.146.700,00
209	400879	2T1ZPLCA	PA PEMALANG	BARANG	DN	Rp 33.750.000,00
210	400879	23TBNC5A	PA PEMALANG	BARANG	DN	Rp 29.117.000,00
211	099180	2YGE422A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 3.696.500,00
212	099180	23BHDD6A	PT BANJARMASIN	BARANG	DN	Rp 6.700.000,00
213	099752	2869FYCA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
214	099752	27JGB2DA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 12.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
215	099752	2ZBF8PDA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
216	401929	27187KPA	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 6.750.000,00
217	401929	2PFAYAJA	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 9.650.000,00
218	401929	2DSUPG7A	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 3.850.000,00
219	401929	25PSLW4A	PN DOBO	BARANG	DN	Rp 419.872.006,00
220	098832	2YQP6Y6A	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
221	098832	235MPPTA	PN PAYAKUMBUH	BARANG	DN	Rp 5.999.000,00
222	099752	22U38QVA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
223	099752	2L9D8M1A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
224	099752	2YNSUJ3A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
225	099752	2FKDTF7A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 26.500.000,00
226	099752	2S1M4CLA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 43.000.000,00
227	099752	2GM28WHA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 500.000,00
228	099752	29H7V5PA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
229	099752	2832ZE4A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
230	099752	2V3JBR8A	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
231	099010	2QNDZYLA	PN PANGKAL PINANG	BARANG	DN	Rp 4.200.000,00
232	099862	2DU5LHYA	PN MATARAM	BARANG	DN	Rp 1.690.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
233	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp 214.525.150,00
234	400430	2JRZ19YA	PN MUARA BULIAN	BARANG	DN	Rp 356.400.000,00
235	400571	2D68V6KA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 4.900.000,00
236	400571	2K5B33HA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 3.300.000,00
237	400571	26GMWEAA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.050.000,00
238	400571	2PMRJ2YA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.375.000,00
239	400571	28FVQSDA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
240	400571	2UPD1MCA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.575.000,00
241	400571	2W3AAHTA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.575.000,00
242	400571	26FNR2LA	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 2.700.000,00
243	400571	2MWL153A	PN MUNGKID	BARANG	DN	Rp 1.350.000,00
244	099176	2N1CFU6A	PN SAMPIT	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
245	097598	23ZRCWYA	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp 6.747.393.420,00
246	401907	2F3AP18A	PN PULAU PUNJUNG	BARANG	DN	Rp 198.010.000,00
247	099162	22ZVSDHA	PN BUNTOK	BARANG	DN	Rp 1.750.000,00
248	098959	21XVZSDA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 114.830.610,00
249	098959	2B68CY7A	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 144.107.000,00
250	098959	2U9SWKSA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 125.083.750,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
251	098959	293XUTJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 28.695.000,00
252	099752	2K2XRSXA	PN LABUHA	BARANG	DN	Rp 5.000.000,00
253	097500	2PSAPAVA	PT BANDUNG	BARANG	DN	Rp 750.000.000,00
254	400492	23YMFCDA	PT RIAU	BARANG	DN	Rp 40.000.000,00
255	097691	2616N38A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 124.717.600,00
256	097890	2RKUAD3A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
257	097890	2YN6RDMA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
258	097890	2PB6B6HA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.100.000,00
259	097890	26KJQR9A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 2.800.000,00
260	097890	2PDYBP7A	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.900.000,00
261	097890	26KBMLWA	PN MAGELANG	BARANG	DN	Rp 3.850.000,00
262	401884	2U1VZFEA	PA AMPANA	BARANG	DN	Rp 147.243.139,00
263	098881	2BYWNXDA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 924.688.000,00
264	098881	2AAEM6PA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 13.689.500,00
265	097908	2GYKFK1A	PN KEBUMEN	BARANG	DN	Rp 3.800.000,00
266	097598	2ZQ44BGA	PN TANGERANG	BARANG	DN	Rp 5.297.828.186,00
267	400126	2ZK8QRGA	PN CURUP	BARANG	DN	Rp 199.867.000,00
268	108309	2LCC52MA	PN BATAM	BARANG	DN	Rp 90.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
269	097691	2DA2NJ2A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 6.400.000,00
270	400239	2P6FF32A	PN ARGA MAKMUR	BARANG	DN	Rp 302.894.027,00
271	477306	22Y38MLA	PN KOTA AGUNG	BARANG	DN	Rp 193.903.614,00
272	097691	29QN823A	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 59.000.000,00
273	098192	2W6R8ZJA	PN BONDOWOSO	BARANG	DN	Rp 13.000.000,00
274	400823	2W53PPPA	PA TANGERANG	BARANG	DN	Rp 4.500.000,00
275	400823	2PXF91MA	PA TANGERANG	BARANG	DN	Rp 3.500.000,00
276	098256	2D1JGX7A	PN TULUNGAGUNG	BARANG	DN	Rp 10.450.000,00
277	097603	2UMC3WKA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 42.122.000,00
278	097603	2R5Q8X3A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 132.692.000,00
279	097603	23EMJ9DA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
280	097603	2JK5HPQA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
281	097603	2782DL5A	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 9.400.000,00
282	097603	2ZKZH4XA	PN PURWAKARTA	BARANG	DN	Rp 9.400.000,00
283	672910	2BQA2LGA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 30.600.000,00
284	401709	29KG64BA	MS BLANGKAJEREN	BARANG	DN	Rp 197.962.000,00
285	098959	2J44VDJA	PN KAYU AGUNG	BARANG	DN	Rp 593.834.460,00
286	559857	2QFJNACA	PTUN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
287	672910	2U8PTTVA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
288	672910	2X5XXHLA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 23.850.000,00
289	673062	23V3KT6A	PN SIMPANG TIGA REDELONG	BARANG	DN	Rp 198.634.000,00
290	098874	29RU9UEA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 199.851.000,00
291	098874	2JHP2P5A	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 151.620.000,00
292	097780	2VH6XLPA	PN PEMALANG	BARANG	DN	Rp 45.000.000,00
293	098743	2MDHA7BA	PT PADANG	BARANG	DN	Rp 718.529.500,00
294	098743	2D7618YA	PT PADANG	BARANG	DN	Rp 447.106.946,00
295	098722	22EQ8K1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
296	098061	2FY9M59A	PN WATES	BARANG	DN	Rp 68.000.000,00
297	099230	21Z88U4A	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 5.850.000,00
298	099230	232LG2XA	PN MARTAPURA	BARANG	DN	Rp 16.977.600,00
299	400421	2D79E5CA	PN TANJUNG PATI	BARANG	DN	Rp 7.925.000,00
300	098860	2EW2HGLA	PN RENGAT	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
301	308021	2CPNYVZA	PA CURUP	BARANG	DN	Rp 4.749.000,00
302	401174	2V8PY87A	PA KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 290.711.900,00
303	097933	2TGSRWMA	PN SURAKARTA	BARANG	DN	Rp 237.994.000,00
304	400483	2ABYDBQA	PN BALE BANDUNG	BARANG	DN	Rp 479.436.473,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
305	099003	21JNHQGA	PN SEKAYU	BARANG	DN	Rp 739.470.000,00
306	663051	21APMVVA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 17.625.000,00
307	663051	2WDAXWNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 23.850.000,00
308	663051	2K9MEKNA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 9.773.000,00
309	663051	21H1DZDA	PN BLAMBANGAN UMPU	BARANG	DN	Rp 6.850.000,00
310	098881	2BKWC4GA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 34.854.000,00
311	098881	251G48FA	PN TANJUNG PINANG	BARANG	DN	Rp 349.560.508,00
312	400282	2Z4373RA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 4.950.000,00
313	400282	24PBJ4GA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 11.050.000,00
314	400282	2TRMR4JA	PN PELAIHARI	BARANG	DN	Rp 27.500.000,00
315	097872	295282RA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
316	097872	2UZ351AA	PN SUMEDANG	BARANG	DN	Rp 250.000.000,00
317	097975	2SL1MW3A	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 10.500.000,00
318	097975	2HG2TCRA	PN KARANGANYAR	BARANG	DN	Rp 409.000.000,00
319	099375	2Q9NDL3A	PN PALU	BARANG	DN	Rp 100.069.000,00
320	097762	2A9T9JQA	PN PATI	BARANG	DN	Rp 36.335.000,00
321	099663	213Y168A	PN BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 19.088.000,00
322	099663	2WJ4N6MA	PN BAU-BAU	BARANG	DN	Rp 1.250.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
323	098132	2V22GQFA	PN TUBAN	BARANG	DN	Rp 258.445.400,00
324	097762	2L8M632A	PN PATI	BARANG	DN	Rp 199.500.000,00
325	097741	2Y1REXDA	PN PEKALONGAN	BARANG	DN	Rp 10.000.000,00
326	099286	2R7A9W4A	PN SAMARINDA	BARANG	DN	Rp 907.442.400,00
327	613519	22QGNUSA	PN CIBINONG	BARANG	DN	Rp 32.400.000,00
328	682164	27Q94EMA	PA KOTA BANJAR	BARANG	DN	Rp 47.419.000,00
329	663157	27Q94EMA	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	BARANG	DN	Rp 191.109.100,00
330	097598	2YWLVVZA	PN TANGERANG	JASA	DN	Rp 2.036.666.594,00
331	613519	2ENK2HKA	PN CIBINONG	UANG	DN	Rp 1.404.540.848,00
332	401971	2UGZN68A	PN DATARAN HUNIMOA	UANG	DN	Rp 50.000.000,00
333	526750	21FPKXHA	PTUN PALEMBANG	UANG	DN	Rp 2.186.000.000,00
334	097709	2HH6RWGA	PN KUNINGAN	UANG	DN	Rp 700.000.000,00
335	099070	27FDBQ1A	PN SINGKAWANG	UANG	DN	Rp 150.000.000,00
336	401915	2KS1A39A	PN CIKARANG	UANG	DN	Rp 6.000.000.000,00
TOTAL						**Rp 70.284.339.793,00**

Lampiran 2 :
Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Sudah Disahkan – Audited TA 2022

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
1	401670	2SH4BU5A	MS IDI	BARANG	DN	Rp 652.252.212,00
2	576253	2U7EXF9A	PTA KENDARI	BARANG	DN	Rp 21.500.000,00
3	576253	2KCAJVUA	PTA KENDARI	BARANG	DN	Rp 4.000.000,00
4	098167	29ETE8VA	PN SIDOARJO	BARANG	DN	Rp 150.375.000,00
5	401878	22BZ8N6A	PA SENDAWAR	BARANG	DN	Rp 3.037.149.000,00
6	099471	21VU4W9A	PN MAROS	BARANG	DN	Rp 167.707.950,00
7	400477	2G9DTAZA	PN SUMBER	BARANG	DN	Rp 536.400.000,00
8	097802	2E8R9LAA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 100.000.000,00
9	097802	2EH6T4YA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 70.000.000,00
10	097802	26NJHFCA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 524.281.000,00
11	097802	2PLHMHTA	PN DEMAK	BARANG	DN	Rp 171.882.967,00
12	097872	25Y8YJ2A	PN BATANG	BARANG	DN	Rp 3.000.000,00
13	402132	2GUDDWGA	PA SELAT PANJANG	BARANG	DN	Rp 384.000.000,00
14	400580	2WCLHECA	PN KAB. KEDIRI	BARANG	DN	Rp 1.709.609.772,00
15	097577	2EKG53HA	PN RANGKAS BITUNG	BARANG	DN	Rp 259.025.000,00
16	477352	2E2SELYA	PN PASAMAN BARAT	BARANG	DN	Rp 196.612.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
17	098462	2GJX7CWA	PN SIGLI	BARANG	DN	Rp 399.077.000,00
18	400389	2XTD5Q5A	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 86.086.000,00
19	400389	2RR3NNEA	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 42.117.500,00
20	663026	2HD4WT2A	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp 500.000.000,00
21	402443	2RVBTMXA	PA MUARA TEWE	BARANG	DN	Rp 1.068.000.000,00
22	098874	2C3HGTDA	PN TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 186.320.000,00
23	402468	2GR89PDA	PA KUALA KAPUAS	BARANG	DN	Rp 5.850.000,00
24	400389	261BZGBA	PN KISARAN	BARANG	DN	Rp 282.139.990,00
25	664522	2M7V8YJA	PT MALUKU UTARA	BARANG	DN	Rp 678.732.000,00
26	400998	27WHZ6VA	PA REMBANG	BARANG	DN	Rp 87.840.500,00
27	097776	2KUKP49A	PN BREBES	BARANG	DN	Rp 7.000.000,00
28	400891	213G76NA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 201.473.000,00
29	400891	213M8GEA	PA BREBES	BARANG	DN	Rp 126.704.000,00
30	099769	2BQ23L9A	PN SOASIU	BARANG	DN	Rp 364.436.000,00
31	401909	2V7FM7DA	PN PANGKALAN BALAI	BARANG	DN	Rp 1.034.376.000,00
32	663026	2EUEGHXA	PN MENGGALA	BARANG	DN	Rp 810.000.000,00
33	097691	2CLXD1LA	PN MAJALENGKA	BARANG	DN	Rp 299.378.000,00
34	401914	2PEPANCA	PN BANJAR	BARANG	DN	Rp 80.000.000,00

NO	KODE SATKER	NO REGISTER	SATKER	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH
35	401715	25P8D66A	MS KOTACANE	BARANG	DN	Rp 90.895.000,00
36	402242	2KHKL67A	PA PALEMBANG	BARANG	DN	Rp 84.200.000,00
37	672910	2DFM7VGA	PN BALIGE	BARANG	DN	Rp 78.801.000,00
38	098608	25E1WPQA	PN SINGKIL	BARANG	DN	Rp 1.893.569.000,00
39	307491	27H2GSRA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 9.000.000,00
40	307491	2WBRC3GA	PA SUNGGUMINASA	BARANG	DN	Rp 11.000.000,00
41	682171	2FJTF4GA	PA AMURANG	BARANG	DN	Rp 2.476.737.326,00
42	098722	2ZCX12GA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
43	098722	2CALLBVA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
44	098722	23LPDNEA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
45	098722	28NL2B1A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 3.400.000,00
46	098722	2TCK51TA	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
47	098722	2EGMQ39A	PN PADANG SIDEMPUAN	BARANG	DN	Rp 6.800.000,00
48	098310	24971ENA	PN LUMAJANG	BARANG	DN	Rp 6.985.000,00
49	402097	2JLDNGCA	PA TEMBILAHAN	BARANG	DN	Rp 136.320.000,00
TOTAL						**Rp 19.068.832.217,00**



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG

LAPORAN KINERJA

MAHKAMAH AGUNG

TAHUN

2022



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2023

Kepala Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO

KATA PENGANTAR



Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun ketiga, maka Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2022.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Amanat yang tercermin dalam visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7(tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik, maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan agenda tersebut adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili

serta menyelesaikan perkara. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 24 Februari 2023
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H.,M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR *Code* atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (https://bsre.bssn.go.id/repository).



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi

meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2022 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	99,05%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	28,92%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	 1) 193,95% 2) 53,83% 3) 163,02%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	23,24%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	114,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			**101,66%**
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	326,70%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	76,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			**201,49%**
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	333,33%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		4. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			**158,33%**

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	129,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			**129,64%**
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100,03%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			**100,03%**
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	425,00%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	98,62%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			**261,81%**
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	98,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			**107,82%**
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85,48%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			**92,74%**
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022			**144,19%**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI..... 3
C. SISTEMATIKA LAPORAN..... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022..... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA..... 19
B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA... 83
C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL..... 85
D. REALISASI ANGGARAN..... 88
BAB IV PENUTUP..... 94
LAMPIRAN..... 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 iv
Tabel 1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung 7
Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung 12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 16
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022 18
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 19
Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 21
Tabel 3.3 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 22
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022 22
Tabel 3.5 Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung 24
Tabel 3.6 Perkara Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif 24
Tabel 3.7 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 25
Tabel 3.8 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama 26
Tabel 3.9 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding 26
Tabel 3.10 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali 27
Tabel 3.11 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 27
Tabel 3.12 Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022 28
Tabel 3.13 Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2022 28
Tabel 3.14 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan 29
Tabel 3.15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 30
Tabel 3.16 Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan 31
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022 31
Tabel 3.18 Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 32
Tabel 3.19 Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022 32
Tabel 3.20 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi 33
Tabel 3.21 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2022 34
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024 34

Tabel 3.23 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 – 2022 35
Tabel 3.24 Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 - 2022 35
Tabel 3.25 Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 39
Tabel 3.26 Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2018-2022 39
Tabel 3.27 Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 42
Tabel 3.28 Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2018 - 2022 43
Tabel 3.29 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 43
Tabel 3.30 Data Layanan Posbakum Tahun 2018 - 2022 44
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022 45
Tabel 3.32 Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN 46
Tabel 3.33 Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti 46
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022 47
Tabel 3.35 Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan 47
Tabel 3.36 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum 48
Tabel 3.37 Bimbingan Teknis Peradilan Umum 48
Tabel 3.38 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama 49
Tabel 3.39 Bimbingan Teknis Peradilan Agama 49
Tabel 3.40 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer 50
Tabel 3.41 Bimbingan Teknis Peradilan Militer 50
Tabel 3.42 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara 51
Tabel 3.43 Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 51
Tabel 3.44 Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas 54
Tabel 3.45 Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan 54
Tabel 3.46 Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkat Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat 64
Tabel 3.47 Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan 66
Tabel 3.48 Pengembangan Kompetensi Pelatihan (PPC) Terpadu 66
Tabel 3.49 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Hakim Berkelanjutan 67

Tabel 3.50 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Hakim 67
Tabel 3.51 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional 67
Tabel 3.52 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Yudisial 68
Tabel 3.53 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Panitera dan Jurusita 69
Tabel 3.54 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Singkat (Short Course) 69
Tabel 3.55 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Khusus 69
Tabel 3.56 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan 70
Tabel 3.57 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional 70
Tabel 3.58 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Adminitrasi Umum 71
Tabel 3.59 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2022 72
Tabel 3.60 Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti 73
Tabel 3.61 Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke 73
Tabel 3.62 Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi 74
Tabel 3.63 Hukuman Disiplin Tahun 2022 75
Tabel 3.64 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2022 76
Tabel 3.65 Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor (K1) 77
Tabel 3.66 Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2) 78
Tabel 3.67 Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3) 78
Tabel 3.68 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima 79
Tabel 3.69 Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM 80
Tabel 3.70 Data Penginputan Nilai prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP 81
Tabel 3.71 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung 83
Tabel 3.72 Capaian Prioritas Nasional Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 85
Tabel 3.73 Capaian Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim 86
Tabel 3.74 Capaian Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. 86
Tabel 3.75 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 88
Tabel 3.76 Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada masing-masing Sasaran

Strategis 89
Tabel 3.77 Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasarang Strategis Mahkamah Agung 90
Tabel 3.78 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 90
Tabel 3.79 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas 91
Tabel 3.80 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal .. 91
Tabel 3.81 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset 92
Tabel 3.82 Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2022 93



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung.

LKjIP Mahkamah Agung disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat

menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
   - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
   - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
   - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).

c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan

perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).

b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
   - Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
   - Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan

finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Wewenang dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung untuk menentukan arah kebijakan dan strategis.

Table 1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	- Pembatasan perkara kasasi dan PK - Penerapan sistem kamar secara konsisten, Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan, Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang Organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses menajeme perkara - Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu - Pelaksanaa Sistem Peradilan Pidana Anak. - Penyempurnaan sistem kamar - Implementasi e-litigasi - Penyempurnaan system	- Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Mahkamah Agung - Evaluasi pelaksanaan sistem kamar - Sosialisasi e- litigasi - Melakukan penelitian	Pembuatan SK KMA: - Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasill rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk Penyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

		eksekusi - Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif - Penyelesaian perkara hak uji materii	Lembaga Juru Sita - Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal - Melakukan kajian terkait perkara hak uji materiil	- Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara - SOP sistem kamar - Pemberlakuan e-litigasi keseluruh pengadilan - SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN - SK KMA tentang RJ - SK KMA pembentukan Pokja hak uji materiil
2.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	- Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo. - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara
3.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.
4.	Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementas i SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.
5.	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non tenis peradilan, - Peningkatan SDM aparatur 20 jam setahun	- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	- Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum. - Pembuatan SK Kabadan Litbangdiklat Kumdil
6.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata Kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi
7.	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan. - Standarisasi sarana	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja	- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan - Pembuatan SK KMA tentang

	Agung.	pendukung kinerja	aparatur peradilan - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	standarisasi sarana dan prasarana
8.	Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA R	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	- Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradila

Peran Strategis Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi, yaitu sebagai berikut:

1) Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata dan penguatan kelembagaaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
2) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi pembangunan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
3) Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai antar data penegak hukum termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
4) Peningkatan kualitas dan intergritas hakim melalui Pendidikan dan pelatihan edukasi publik dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
5) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola.
6) Percepatan penyelesaian perkara.
7) Penyelesiaan perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.

8) Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   A. Capaian Kinerja Organisasi

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

   B. Realisasi Anggaran

      Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung

yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja
		c.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK
		d.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		e.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu
		b.	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
		c.	Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) Indentitas Hukum
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini dimiliki oleh

Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
d) Peningkatan Ketetalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.
e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
g) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.
h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyariahan.
k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.
l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.
o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
p) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.

b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini dimiliki oleh Badan Pengawasan, Badan Litbang Diklat Kumdil dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.

m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.

n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;	
			1) Banding	50%
			2) Kasasi	50%
			3) Peninjauan Kembali	50%
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).		75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)		100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	58,52%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan	85%

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
	pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset		standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp11.820.133.400.000,00 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	179.310.835.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,-
	JUMLAH	**11.820.133.400.000,-**



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	99,05%	99,05%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%	1,16%	28,92%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			
		1) Banding	1) 50%	1) 96,98%	1) 193,95%
		2) Kasasi	2) 50%	2) 26,91%	2) 53,83%
		3) Peninjauan Kembali	3) 50%	3) 81,51%	3) 163,02%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%	5,81%	23,24%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	91,44%	114,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					**101,66%**
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	65,34%	326,70%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	19,07%	76,29%

Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					**201,49%**
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	100%	333,33%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					**158,33%**
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	97,23%	129,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					**129,64%**
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100,09%	100,09%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					**100,03%**
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4	17	425,00%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,52%	57,71%	98,62%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					**261,81%**
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100,00%	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	83,30%	98,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					**107,82%**
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	72,66%	85,48%

		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	100%	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII					**92,74%**
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022					**144,19%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	100%	99,05%	99,05%
	2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%	15%	1,16%	28,92%
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;				
	1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 50% 2) 50% 3) 50%	1) 50% 2) 50% 3) 50%	1) 96,98% 2) 26,91% 3) 81,51%	1) 193,95% 2) 53,83% 3) 163,02%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%	25%	5,81%	23,24%
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	80%	91,44%	114,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					**101,66%**

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yaitu paling lama 250 hari sejak diterimanya berkas perkara. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 bulan.

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Kepaniteraan	Peradilan Agama	Peradilan Umum	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	27.817	605.495	263.044	3.236	2.157	901.749
Jumlah perkara yang diselesaikan	28.024	607.903	268.476	3.249	2.700	910.352
Realisasi						99,05%
Target						100%
Capaian Persentase Penyelesaian perkara tepat waktu						99,05%

* Tidak termasuk perkara lalu lintas dan perkara pada pengadilan pajak

Realisasi indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian (%)			
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	99,05%	99,05	97,77	96,65	101,66	107

Berbeda dengan tahun 2021, yang mengukur penyelesaian perkara tepat waktu hanya pada Kepaniteraan, di tahun 2022 indikator ini turut juga mengukur penyelesaian perkara tepat waktu pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021 disebabkan beberapa faktor:

1. Penerapan *reward* bagi Hakim Agung yang mendorong percepatan penyelesaian perkara.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara:
   - Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.
   - Aplikasi info perkara digunakan untuk monitoring jalannya perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Mahkamah Agung.
   - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

     Aplikasi yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
   - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

     Aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
   - Aplikasi e-court

     Aplikasi yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,
   - Aplikasi e-litigasi

     Aplikasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.
3. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI MAHKAMAH AGUNG

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan restoratif.

Tabel 3.5 Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%	1,16%	28,92	166,5	107,5	128,5	79,08

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 64.483 dan yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 746, sehingga realisasinya sebesar 1,16% dengan capaian sebesar 28,92%. Capaian persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung lebih rendah dari tahun lalu disebabkan pengukuran tahun 2021 hanya diambil dari perkara pidana anak, sedangkan pengukuran tahun 2022 turut mengukur pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara pidana anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara Narkotika (dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahgunaan, ketergantungan dan pemakaian Narkotika satu hari)

Tabel 3.6 Perkara Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif

NO	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Sekarang
1	Kejahatan/kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	63	434	497	-	440	57
2	Kejahatan/kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan	4	67	71	-	67	4
3	Kejahatan Perjudian	438	4.639	5.077	-	4.254	823
4	Kejahatan/meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong	-	4	4	-	4	-
5	Kejahatan/penghinaan	9	71	80	-	60	20
6	Kejahatan/penganiayaan	742	5.906	6.648	-	5.987	661

7	Kejahatan/pencurian	2.824	24.827	27.651	-	24.642	3.009
8	Kejahatan/perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak	2	4	6	-	6	-
9	Kejahatan/penghancuran Atau Perusakan Barang	62	346	408	-	337	71
10	Kejahatan/kejahatan Jabatan	5	5	10	-	7	3
11	Narkotika	3.227	21.628	24.854	-	21.557	3.297
12	Lain-Lain	300	2.523	2.823	-	2.320	503
13	Lalu Lintas	174	1.372	1.546	-	1.372	174
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	146	1.180	1.326	-	1.178	148
15	Tanpa Hak Mengambil Atau Memiliki Suatu Barang Milik Orang Lain	3	7	10	-	8	2
16	Menghuni Rumah Tanpa Izin	4	3	7	-	7	-
17	Perbuatan Tidak Menyenangkan	16	99	115	-	98	17
18	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	194	1.566	1.760	-	1.558	202
19	Pencemaran Nama Baik	15	55	70	-	61	9
20	Pidana Umum/melaksanakan Jasa Transportasi Ilegal	-	1	1	-	-	1
21	Pengancaman	30	220	250	-	226	24
22	Pelanggaran	1	3	4	-	2	2
23	Kejahatan/perbuatan Curang	45	182	227	-	191	36
24	Pelanggaran/pelanggaran Ketertiban Umum	1	14	15	-	13	2
25	Pelanggaran/pelanggaran Terhadap Penguasa Umum	-	1	1	-	1	-
26	Pelanggaran/pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan	13	43	56	-	45	11
27	Administrasi Kependudukan	1	26	27	-	22	5
28	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	4	17	21	-	20	1
		8.322	**65.242**	**73.565**	**-**	**64.483**	**9.082**

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 3
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.7 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum							
A. Banding	50%	96,98%	193,95	192,62	193,08	107,6	101,1
B. Kasasi	50%	26,91%	53,83	101,70	94,58	51,71	46,77
C. Peninjauan kembali	50%	81,51%	163,02	180,44	178,82	126,69	132,88

Meningkatnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022 disebabkan oleh kepuasan masyarakat terhadap layanan

pengadilan salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Menurunnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali disebabkan oleh semakin mudahnya akses untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali serta semakin cepatnya penyampaian informasi putusan kepada para pihak pencari keadilan.

A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2022 sebanyak 850.695 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 25.733 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 824.962 perkara (96,98%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 193,95%.

Tabel 3.8 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	138.019	103.097	604.820	2.722	2.037	850.695
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	13.253	7.709	3.108	543	1.120	25.733
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding						824.962
Realisasi (%)						96,98%

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2022 sebanyak 25.250 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 18.454 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 6.796 perkara (26,91%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 53,83%.

Tabel 3.9 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding	12.924	7.594	3.081	523	1.128	25.250

Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	9.279	7.017	1.134	365	659	18.454
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi						6.796
Realisasi (%)						26,91%

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2022 sebanyak 18.531 perkara, yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3.426 perkara dan yang tidak diajukan peninjauan kembali sebanyak 15.105 perkara (81,51%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 163,02%.

Tabel 3.10 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	9.352	7.034	1.141	365	639	18.531
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan Kembali	1.507	1.462	192	15	250	3.426
Jumlah perkara yang tidak diajukan peninjauan Kembali						15.105
Realisasi (%)						81,51%

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 4
PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.11 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	5,81%	23,24	13,32	8,56	128,5	79.08

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.12 Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	1.153	67	27	35	5

Tabel 3.13 Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2022

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2021	800 perkara
2.	Masuk 2022	353 perkara
3.	Beban Perkara	1.153 perkara
4.	Putus 2022	277 perkara

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2022 sebanyak 1.153 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 67 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 5.81% dengan capaian sebesar 23.24%. Meningkatnya capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2022 disebabkan:

1. Masing-masing pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan secara perdamaian
2. Dilaksanakan oleh hakim-hakim yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah dilaksanakan
4. Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
5. Koordinasi dengan instansi terkait

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 5
INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP PELAYANAN PERADILAN

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.14 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	91,44%	114,30	115,19	113,01	107,79	102,51

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan
   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
   Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

   Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan,saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Badan Urusan Administrasi	Rata
1	Persyaratan	97,00	94,00	96,00	92,30	-	94,83
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	96,00	84,25	95,75	92,57	79,25	89,56
3	Waktu Pelayanan	92,75	84,73	94,50	92,48	79,75	88,84
4	Biaya/Tarif	96,50	80,50	97,50	92,53	-	91,76
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,75	89,25	95,00	92,64	-	93,16
6	Kompetensi Pelaksana	95,50	83,50	97,50	92,52	81,75	90,15
7	Perilaku Pelaksana	98,25	84,50	97,75	92,40	83,25	91,23
8	Sarana dan Prasarana	95,25	93,25	96,25	92,42	80,25	91,48
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	86,00	92,75	96,50	92,55	-	91,95
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan							**91,44**

Dari hasil rekapitulasi indeks rata-rata survey kepuasan masyarakat, Mahkamah Agung mendapat nilai sebesar 91,44 dengan kategori pelayanan "Sangat Baik".

Nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan yaitu 88,84, hal ini menggambarkan bahwa harapan masyarakat terhadap waktu pelayanan di pengadilan masih belum baik. Adapun nilai terendah kedua terdapat pada aspek sistem, mekanisme dan prosedur, hal ini menggambarkan adanya harapan masyarkat terhadap prosedur pelayanan di pengadilan untuk menjadi lebih baik lagi, kedua kelemahan ini menjadi fokus utama Mahkamah Agung dalam penentuan kebijakan serta langkah-langkah nyata dalam peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.16 Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	20%	65,34%	326,70%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	25%	19.07%	76,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					**201,49%**

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara, yaitu 3 (tiga) bulan setelah perkara diputus sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.18 Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	65,34%	326,70	83,65	167,15	105,26	109,07

Dari data pada tabel diatas, capaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dari target yang ditentukan sebesar 20% telah terealisasi diatas target sebesar 65,34% sehingga capaian kinerja sebesar 326,70%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2022 sebesar 65,34%. Capaian ini meningkat 290,56% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 16,73%. Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tahun 2022 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19 Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	4.402	2.072	429	18	0	6.921
2	Perdata Khusus	1.615	299	43	0	0	1.957
3	Pidana	1.024	524	429	345	57	2.379
4	Pidana Khusus	5.925	2162	1.841	1.335	321	11.584
5	Perdata Agama/ Jinayah	1.081	384	32	0	0	1.497
6	Pidana Militer	312	9	90	18	0	429
7	Tata Usaha Negara	6.195	339	145	9	0	6.688
Jumlah		20.554	5.789	3.009	1.725	378	31.455
%		65,34 %	18,40 %	9,57 %	5,48 %	1,20 %	

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2022 sebanyak 31.455 perkara. jumlah perkara yang dikirim kepengadilan meningkat

45,72% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengirim sebanyak 21.586 perkara. jumlah minutasi perkara tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Hal ini tidak telepas dari adanya kebijakan reward yang mendorong percepatan penyelesaian perkara, dimana penyelesaian perkara diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.20 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	19,07%	76,29	39,68	21,64	113,80	132,5

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 109.382 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 20.861 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 64.690 perkara sehingga realisasinya sebesar 19,07% dengan capaian sebesar 76,29%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kompetensi hakim melalui Pendidikan dan pelatihan hakim mediasi.

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berakibat pada ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki iktikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya maupun sengketa yang dipermasalahkan;
2. Faktor ketidakhadiran pihak berpekara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan;
3. Terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat.

Tabel 3.21 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2022

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Umum	40.551	1.362	16.985	20.863	1.341
2	Agama	68.831	19.499	47.705	1.243	384
Jumlah		109.382	20.861	64.690	22.106	1.725
Persentase (%)			19,07	59,07	20,21	1,58

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	30%	100%	333,33%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%	100%

	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					**158,33%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.23 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%	100%	333,33	332,67	333,33	100	100

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.24 Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 - 2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Umum	2018	352	1.424
	2019	28	24
	2020	28	624

	2021	28	50
	2022	28	166
Peradilan Agama	2018	359	15.541
	2019	359	17.264
	2020	397	19.190
	2021	408	33.879
	2022	408	36.671
Peradilan Tata Usaha Negara	2018	28	9
	2019	28	16
	2020	30	9
	2021	30	11
	2022	34	13

Perkara prodeo yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 36.850 dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, antara lain:

1. Peradilan Umum

   Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tahun 2022 sebanyak 166 perkara dengan target perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara sebanyak 160 perkara dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp106.350.000,00 (untuk perkara permohonan dan gugatan) sehingga capaian indikator ini sebesar 103,75% (104%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp33.987.200,00 atau 31,95%. Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara lebih besar dari realisasi anggaran yang terserap karena pembiayaan perkara permohonan lebih ringan dibandingkan dengan biaya perkara gugatan.

2. Peradilan Agama

   Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2022 sebesar Rp9.952.839.000,00 dengan jumlah perkara yang diajukan sebesar 36.671 perkara dan seluruhnya terealisasi 100% melalui anggaran DIPA. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

   - Dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak

mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI

- Didalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskanan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukan dokumen stastus kependudukan lainya;
- Didalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabakan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
- Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyartan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni)

3. Peradilan Tata Usaha Negara

   Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp993.658.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp975.117.998,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta serratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Pada tahun 2022 satker di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terdapat pada 34 satker dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui anggaran DIPA sebesar 13 perkara dari target yang ditetapkan sebesar 66 perkara dengan capaian 30,30%. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

1. Dalam Pasal 3 juncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI.
2. Didalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskanan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukan dokumen stastus kependudukan lainya;
3. Didalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
4. Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyartan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni).

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi

masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.25 Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100	99,88	99,75	100	111,11

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.26 Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2018-2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2018	97	378
	2019	54	3.715
	2020	54	3.840
	2021	105	2.038
	2022	169	1.059
Peradilan Agama	2018	281	71.377
	2019	293	44.589
	2020	290	37.450
	2021	324	38.287
	2022	342	56.039
Peradilan Militer	2018	51	353
	2019	60	329
	2020	59	260
	2021	46	311
	2022	23	371

Perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pada tahun 2022 sebanyak 57.469 dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Realisasi ini

dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, antara lain:

1. Peradilan Umum

   Alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan tahun 2022 sebesar Rp6.317.295.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.274.997.197,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,33%. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan tahun 2022 sebanyak 1.059 perkara atau 22,88% (23%) dari target yang telah ditetapkan.

2. Peradilan Agama

   Pada tahun 2022, satker di lingkungan peradilan agama mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp20.858.318,000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp20.643.526.667,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdapat pada 342 satker dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 56.039 perkara dari target yang ditetapkan oleh Ditjen Badilag sebesar 32.918 perkara dengan capaian 170,24%.

   Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sidang diluar gedung pengadilan adalah mekanisme sidang diluar gedung pengadilan lebih bersifat “proaktif”, atau dengan kata lain pengadilan yang mendatangi masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, transportasi maupun jarak yang jauh dari gedung pengadilan dapat merasakan kemudahan dengan adanya program tersebut, sehingga sangat membatu masyarakat yang beperkara dipengadilan. Sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat, standar pelayanan dalam memeriksa perkara tetap dijaga dan tidak ditinggalkan, sehingga tidak terjadi perbedaan atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun diluar gedung pengadilan.

3. Peradilan Militer

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer mendapatkan alokasi anggaran sidang di luar gedung pada tahun 2022 sebesar Rp2.185.121.000,00 (dua miliar serratus delapan puluh lima juta serratus dua puluh satu juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.171.229.019,00 (dua miliar serratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah).

Pada tahun 2022, satker di lingkungan peradilan Militer mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan terdapat pada 23 satker dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 371 perkara dari target yang ditetapkan oleh Ditjen Badilmiltun sebesar 438 perkara dengan capaian 87,40%

Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sidang diluar gedung pengadilan adalah Mekanisme sidang diluar gedung pengadilan lebih bersifat “proaktif”, atau dengan kata lain pengadilan yang mendatangi masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, transportasi maupun jarak yang jauh dari gedung pengadilan dapat merasakan kemudahan dengan adanya program tersebut, sehingga sangat membatu masyarakat yang beperkara dipengadilan.

Sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat, standar pelayanan dalam memeriksa perkara tetap dijaga dan tidak ditinggalkan, sehingga tidak terjadi perbedaan atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun diluar gedung pengadilan.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 3
PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara pemohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Tabel 3.27 Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100	100

Sidang keliling terpadu pada prinsipnya adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan identitas hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memudahkan pencari keadilan menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran pasca putusan pemeriksaan pengadilan. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya.



Gambar 3.1 Sidang Itsbat Terpadu yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Suwawa

Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) serta Kantor Urusan Agama (KUA) sangat membantu masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pelibatan instansi lain yang berwenang mengeluarkan akta identitas hukum, dapat mempercepat proses penerbitan akta-akta dimaksud pada hari itu juga sehingga masyarakat pencari keadilan tidak perlu lagi melakukan pengurusan secara mandiri, dan tentu memudahkan urusan administrasi kependudukan dan perkawinan bagi masyarakat.

Pada tahun 2022 satker di lingkungan peradilan agama mendapatkan alokasi anggaran sidang terpadu sebesar Rp2.588.588.000,00 yang terdapat pada 83 satker untuk 7.658 perkara. Perkara voluntair yang diajukan pada tahun 2022 sebesar 11.543 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.28 Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2018 - 2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Voluntair yang Diselesaikan
Peradilan Agama	2018	5.465
	2019	2.981
	2020	6.412
	2021	6.502
	2022	11.543

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 4
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.29 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.30 Data Layanan Posbakum Tahun 2018 - 2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
Peradilan Umum	2018	352	10.019
	2019	382	18.564
	2020	382	42.497
	2021	382	47.930
	2022	382	53.122
Peradilan Agama	2018	230	199.880
	2019	244	213.605
	2020	329	229.844
	2021	351	281.167
	2022	412	346.229
Peradilan Militer	2018	28	308
	2019	30	517
	2020	30	591
	2021	30	597
	2022	34	1.790

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realiasi kinerja posbakum adalah:

1. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dengan Pendidikan yang rendah sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum;

2. Informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formiil yang cukup mudah dipenuhi oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan, serta seringkali oleh pegawai di meja registrasi perkara memberikan advis kepada masyarakrat tidak mampu untuk memilih layanan bantuan hukum daripada beracara dengan biaya sendiri, membuat masyarakat mudah mengakses layanan bantuan hukum dan merasa terbantu dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
3. Pasal 26 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 memberikan amanah bagi pengadilan untuk membuat kerjasama kelembagaan dengan lembaga penyedia bantuan hukum baik swasta maupun pemerintahan maupun lembaga konsultasi bantuan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga mendapatkan tenaga advokasi bantuan hukum professional dan berdampak pula pada keberhasilan program layanan bantuan hukum di pengadilan agama;
4. Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk perkara berikutnya pada tahun berjalan.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	75%	97,23%	129,64%

SASARAN IV – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN TUN YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3. 32 Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	75%	97,23%	129,64	131,17	131,60	110,04	141,4

Jumlah perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2022 sebanyak 566.901 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 551.191 perkara (97,23%) sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 129,64%.

Tabel 3.33 Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	31.375	17.427	13.948
Putusan Perkara Agama yang Ditindaklanjuti	533.145	532.534	611
Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	2.381	1.230	1.151
Jumlah	566.901	551.191	15.710

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Perbandingan jumlah perkara berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan eksekusi dengan perkara berkekuatan hukum tetap sebesar 97,23%. Tingginya capaian indikator ini menunjukan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberikan kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaiman yang mereka harapkan.

SASARAN V. MENINGKATNYA HASIL PEMBINAAN BAGI APARATUR TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan oleh setiap Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diantaranya untuk:

1. Meningkatkat kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis;
2. Membangun karakter, sikap, dan perilaku (personal capacity building).
3. Membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
4. Memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
5. Membantu mempercepat turwujudnya capaian kinerja seluruh level organisasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	100,09%	100,09%

SASARAN V - INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE SDM TEKNIS YUSTISIAL YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DI BIDANG TEKNIS YUDISIAL (UMUM, AGAMA DAN MILTUN)

Sumber daya tenaga teknis yustisial merupakan sumber daya manusia di bidang peradilan yang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses yustisial. Sumber daya tenaga teknis yustisial ini meliputi Hakim dan Panitera dan kesemuanya memiliki peranan strategis dalam menjalankan proses penanganan perkara di pengadilan.

Tabel 3.35 Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100,09%	100,09	96,17	100	105,26	105,02

A. Badan Peradilan Umum

Tabel 3.36 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	102,91%	102,91%

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan pembinaan kepada tenaga teknis baik hakim, panitera maupun jurusita. Tahun 2022 jumlah tenaga teknis yang terdiri dari 4.485 orang Hakim dan 6.487 orang Kepaniteraan (Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita). Target tenaga teknis yang mengikuti pembinaan teknis sebanyak 550 orang. Pembinaan teknis yang dilaksanakan meliputi: Focus Group Discussion (FGD) Kepaniteraan (Jurusita), Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan, Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif, Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pengadilan, Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Niaga. Lebih lanjut rincian tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga teknis dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37 Bimbingan Teknis Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Tanjung Karang dan PT Palembang)	50 Peserta
2.	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Yogyakarta)	32 Peserta
3.	Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan (Wilayah Hukum PT Sulawesi Utara)	40 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 8--10 Maret 2022 di Tangerang	92 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 7 Juni 2022 di Ternate	56 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 18--20 Juli 2022 di Medan	112 Peserta
7.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal	90 Peserta

	9--11 Agustus 2022 di Mataram	
8.	Bimbingan Teknis antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan tanggal 12 September 2022 di Bengkulu	50 Peserta
9.	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak kekayaan Intelektual HKI/Niaga tanggal 13--15 Oktober 2022 di Jakarta	44 Peserta
TOTAL		566 Peserta

B. Badan Peradilan Agama

Tabel 3.38 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	100%	100%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dengan target jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 25.820 melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.39 Bimbingan Teknis Peradilan Agama

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara daring skala nasional dengan tema "Problematika Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama"	3.523 Peserta
2.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara luring (tatap muka) tahun 2022 dengan tema "Permasalahan dan Solusi Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama"	29 Peserta
3.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara daring skala nasional dengan tema "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak"	3.608 Peserta
4.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis Peradilan Agama Secara Daring Zona-1 (Wilayah Hukum Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu) dengan tema "Teknik mengonstatir, mengualifisir, dan mengonstituir perkara yang tepat dan benar."	1.443 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Temuan Problematika Penerapan Hukum Acara dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali".	3.109 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Skala Nasional dengan tema "Bedah Berkas Perkara Kewarisan"	3.676 Peserta
7.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Secara Daring Zona-2 (Wilayah Hukum PTA Medan, Jambi, Palembang, Bangka Belitung, Bandar Lampung) dengan tema "Mewujudkan Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Dapat Dilaksanakan".	363 Peserta
8.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan Tema “Penerapan Hukum Formil dan	3.316 Peserta

	Materiel dalam Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	
9.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Zona-4 (Wilayah Hukum PTA Semarang, Surabaya) dengan tema "Teknik Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang Efektif dan Efisien"	609 Peserta
10.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema “Permasalahan Hukum Wakaf di Pengadilan Agama	1.400 Peserta
11.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema “Hadhanah dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Anak”	3.162 Peserta
12.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Kejurusitaan Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Kejurusitaan (Permasalahan dan Solusi)".	1.582 Peserta
TOTAL		25.820 Peserta

C. Badan Peradilan Militer

Tabel 3.40 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	105%	105%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera peradilan Militer di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 160 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 168 orang. Lonjakan capaian ini dikarenakan pelaksanaan bimtek dilakukan mayoritas secara daring sehingga tidak membebani anggaran baik bagi satuan kerja maupun bagi peserta bimtek.

Selain itu, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi turut memudahkan peradilan Militer dalam memfasilitasi bimbingan teknis ini secara daring. Sehingga mampu menjaring tenaga teknis yustisial hingga garis terluar untuk mengikuti bimbingan tenaga teknis yustisial. Berikut data bimbingan teknis yustisial yang diadakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selama tahun 2022.

Tabel 3.41 Bimbingan Teknis Peradilan Militer

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim dalam membuat putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) di Lingkungan	40 peserta

	Peradilan Militer	
2.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim dalam membuat suatu pertimbangan Dissenting Opinion dan Concurring Opinion di Lingkungan Peradilan Militer	42 Peserta
3.	Bimbingan Teknis Pengajuan Perlawanan ke Pengadilan Militer Tingkat Banding	42 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Pengajuan Grasi Ke Mahkamah Agung RI	44 Peserta
TOTAL		168 Peserta

D. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 3.42 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	100%	100%

Direktorat jenderal badan peradilan Militer dan peradilan tata usaha negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim, Panitera dan Jurusita peradilan TUN di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 280 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 280 orang.

Lonjakan capaian ini dikarenakan pelaksanaan bimtek dilakukan mayoritas secara daring sehingga tidak membebani anggaran baik bagi satuan kerja maupun bagi peserta bimtek. Selain itu, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi turut memudahkan peradilan TUN dalam memfasilitasi bimbingan teknis ini secara daring. Sehingga mampu menjaring tenaga teknis yustisial hingga garis terluar untuk mengikuti bimbingan tenaga teknis yustisial. Berikut data bimbingan teknis yustisial yang diadakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selama tahun 2022.

Tabel 3.43 Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
2	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
3	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Perizinan Pasca Berlakunya UU	40 Peserta

	Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara T.A 2022	
4	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2022	45 Peserta
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan Elektronik bagi tenaga teknis kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
6	Bimbingan Teknis Administrasi upaya hukum banding secara elektronik bagi aparatur kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	75 Peserta
TOTAL		280 Peserta

SASARAN VI. MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG YANG BERKUALITAS

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil) adalah salah satu Unit Eselon I pada Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Memiliki posisi dan peran strategis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan Peradilan Negara tertinggi. Selain itu, Badan Litbang Diklat Kumdil juga memiliki peran dalam mendukung Program Prioritas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang hukum, khususnya penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Mahkamah Agung melalui pendidikan dan pelatihan.

Sejauh ini Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I telah berupaya menjadi pusat penelitian dan pengembangan dan pusat pendidikan dan pelatihan yang professional yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dijawantakan, sebagiannya telah tercapai dengan prestasi yang cukup baik dan membanggakan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar mencapai hasil yang lebih baik demi akselerasi pencapaian misi Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung *jo* Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu:

a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan;
b. Pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya;
c. Pelaksanaan administrasi Badan Litbang Diklat Kumdil.

Ketiga fungsi tersebut kemudian diuraikan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 dalam fungsi strategis, yaitu:

1) Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) memiliki fungsi dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan *(knowledge-based organization)*. Terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang:
    a) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili; dan
    b) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut maka, fungsi Litbang berupa pengelolaan pengetahuan *(knowledge management)* merupakan modal penting untuk menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar;
2) Bidang pendidikan dan pelatihan, merupakan fungsi strategis yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hakim dan SDM Mahkamah Agung, di lingkungan Mahkamah Agung.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan hasil penelitian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44 Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4	4	17	425%
	2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,25%	65,69%	57,71%	98,62%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					**261,81%**

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 1
JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENGADILAN

Indikator ini diukur dari berapa banyak rekomendasi penelitian yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan. Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil pada tahun 2022 menunjukan peran yang signifikan dan strategis dalam khasanah pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia, sekaligus merespon dinamika perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 3.45 Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4	17	425	175	150	NA	NA

Pada Tahun Anggaran 2022, terjadi perpindahan peneliti Badan Litbang Diklat Kumdil ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Indonesia. Perpindahan ini dilakukan sebagai bagian dari re-organisasi institusi penelitian dan inovasi di Indonesia. Sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

tidak lagi memiliki fungsi untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan. Kedepannya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan berubah nomenklatur menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun bahan rekomendasi pembentukan kebijakan. Menunggu adanya peraturan tentang perubahan nomenklatur tersebut, sampai dengan tahun 2022 ini masih menggunakan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Hukum dan Peradilan).

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 62/KMS/SK/IV/2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Tatacara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil maka penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Hakim Yustisial Peneliti dan Hakim di luar Puslitbang Hukum dan Peradilan. Jika sebelumnya output yang dihasilkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan adalah lebih banyak berupa Laporan Penelitian dibandingkan Naskah Akademik, maka mulai tahun 2022 output yang dihasilkan lebih banyak berupa Naskah Akademik.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Hukum dan Peradilan) bersama-sama dengan para peneliti rumpun hukum di BRIN, pada Tahun 2022 berhasil menyelesaikan seluruh Naskah Akademik hasil Analisa Kebutuhan Lembaga dan rekomendasi Pimpinan baik dari Pimpinan Mahkamah Agung RI maupun Pimpinan Eselon I berdasarkan rapat pleno Mahkamah Agung. Dari 17 hasil Naskah Akademik, seluruhnya dijadikan sebagai bahan referensi atau rekomendasi terkait penyelenggaraan peradilan dan pembentukan kebijakan yang meliputi penyusunan regulasi guna penguatan kelembagaan Mahkamah Agung RI.

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2022 menunjukan peran yang signifikan dan strategis dalam khasanah pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia, sekaligus merespon dinamika perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk mendukung peran dalam pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan pada tahun 2022 menyiapkan penyusunan naskah akademik terkait beberapa topik, antara lain:

1. **Naskah Akademis Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

   Naskah tersebut fokus pada skema pelaksanaan putusan perdata, yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan ketentuan ketentuan yang terdapat

dalam HIR/RBG, RV dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kendala yang dipetakan oleh Tim, terbagi menjadi 2 yakni kendala internal dan eksternal, kendala internal yaitu tidak adanya satuan khusus internal pengamanan eksekusi yang dimiliki Pengadilan. Sedangkan kendala eksternal yang menghambat proses jalannya eksekusi yang berasal dari instansi/Lembaga lain diluar pengadilan sebagai penunjang pelaksanaan eksekusi seperti POLRI, BPN, Perbankan, Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup (dalam perkara Lingkungan Hidup) dan sebagainya. Oleh karena itu naskah akademik ini memandang perlu menempatkan Ketua Pengadilan Negeri sebagai "Koordinator Eksekusi" yang memiliki kewenangan berdasar undang undang untuk memerintahkan instansi/Lembaga lain di wilayah hukumnya untuk mentaati kebijakan kebijakan yang diambilnya dalam pelaksanaan ekesekusi.

2. **Naskah Akademik Pengenaan Uang Paksa kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memiliki kendala dalam pelaksanaan putusan. Pelaksanaan eksekusi putusan tersebut terkendala terhadap beberapa permasalahan seperti kepatuhan hukum yang rendah terhadap putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketidakmauan ataupun ketidakmampuan melaksanakan putusan peradilan, adanya pengaruh politik pada pelaksanaan putusan peradilan hingga pada objek putusan pengadilan yang berkaitan dengan Aset Negara. Untuk itu atas arahan pimpinan Ketua Kamar TUN, Puslitbang Kumdil Kumdil MA RI melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Pengenaan Uang Paksa kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, mendorong pengaturan detail mengenai besaran uang paksa dan tata cara pengenaan uang paksa melalui Rancangan Peraturan Pemerintah. Kewenangan PTUN dalam Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif menjadi perhatian Puslitbang Kumdil di Tahun 2022. Kendala dalam tataran normatif yang berdampak pada pada tataran implementasi di pengadilan.

3. **Naskah Akademik tentang Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif**

Penyusunan Naskah Akademik dengan sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyasar pada pembagian kewenangan PTUN dan PT.TUN, penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan/tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif dan penegasan pencabutan Perma 6 Tahun 2018.

4. **Naskah Akademik berkenaan dengan restorative justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika**

Dalam peradilan pidana secara kuantitif sekitar 70 persen didominasi persoalan tindak pidana narkotika. Sebagai respon atas permasalahan tersebut dan kontribusi terhadap RPJMN 2019-2024 bidang hukum, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, maka tahun 2022 dilakukan penyusunan Naskah Akademik berkenaan dengan restorative justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika didasarkan pada tujuan pemulihan diri dari pelaku, baik sebagai Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tujuan tersebut menonjolkan pemulihan keadaan (diri) pelaku (yang sekaligus korban). Untuk itu restorative justice dijadikan pendekatan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk optimalisasi lembaga rehabilitasi yang merupakan sarana pemulihan secara medis maupun sosial bagi Pelaku. Selama ini skema keadilan restoratif diatur dalam Perpol No.

8 Tahun 2021, Pedja No. 18 Tahun 2021 dan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Rekomendasi dari Tim, mendorong terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur penyelesaian perkara narkotika melalui pendekatan restorative justice di Pengadilan. Alasan lainnya yaitu keberadaan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 perlu dinaikkan levelnya menjadi Perma karena mengatur teknis hukum acara. Adapun dasar keberlakuan Perma tersebut yaitu Pasal 79 UU MA yang menentukan bahwa bilamana terdapat kekosongan hukum acara dan terjadinya stagnasi penyelenggaraan peradilan maka Mahkamah Agung dapat menerbitkan Perma.

5. **Naskah Akademik Sistem Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

   Untuk bidang perpajakan dan kebutuhan dukungan teknis judisial dalam peradilan pajak, dilakukan penyusunan Naskah Akademik Sistem Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, menyoroti beberapa hal terkait pidana perpajakan. Berdasar UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Rumusan pasal-pasal jenis tindak pidana terbagi dalam bentuk kelalaian (culpa) dan pidana pajak dalam bentuk kesengajaan (Dolus). Subjek sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam ketentuan pidana pada UU KUP adalah Wajib Pajak, Pejabat Pajak (Fiscus) dan Pihak Ketiga serta ditegaskan pula pengaturan wajib pajak dalam UU HPP. Rekomendasi dari Tim, pemangku kepentingan perlu membuat kebijakan legislasi baru berupa rekonstruksi formulasi UU KUP dan UU HPP yang menitikberatkan bahwa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan bersifat ultimum remedium, karena sifatnya berorientasi kepada pendapatan negara.

6. **Naskah Akademik Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan**

   Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Dalam skema pencegahan pernikahan pada usia anak, Puslitbang Kumdil fokus pada naskah akademik Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak, pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Praktik di lapangan, setelah adanya Perma

angka pernikahan anak semakin mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya permohonan dispensasi kawin, dan meningkatnya permohonan istbat nikah yang meningkat. Untuk itu dalam praktik berpedoman pada Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama menambah persyaratan di luar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Perma No. 5 Tahun 2019 seperti adanya rekomendasi dari P2TP2A, surat keterangan Klinik atau bidan atau dari Dinas Kesehatan tentang kehamilan, kemampuan ekonomi yang sebenarnya menjadi domain hakim ketika di persidangan.

7. Naskah Akademik Kajian Terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP

Merespon perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung, terdapat beberapa naskah akademik, diantaranya: Analisis Hukum Terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011: Kajian Terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP pada Satuan Kerja di Pengadilan Tingkat Pertama. Naskah Akademik tersebut, menawarkan konsep ideal pengaturan layanan informasi publik di Pengadilan, agar keterbukaan informasi di pengadilan dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi. Termasuk merekomendasikan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan.

8. Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan

Masih dalam semangat pengembangan layanan pengadilan, Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan menawarkan adanya jabatan fungsional tertentu di Pengadilan. Hal dimaksud sejalan dengan reformasi birokrasi. Pembentukan jabatan fungsional tertentu yang memiliki keahlian dan profesionalisme dalam memberikan layanan di bidang administrasi perkara dan kesekretariatan. Manfaat dasar adanya jabatan fungsional layanan pengadilan ialah memberikan jenjang karier yang jelas kepada ASN pengadilan dan mengoptimalkan layanan pengadilan kepada masyarakat. Selain itu, jabatan fungsional layanan pengadilan membuka peluang untuk menyerap pegawai honorer yang ada di pengadilan menjadi aparatur sipil negara.

9. **Naskah Akademis Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim**

Kebutuhan Pengadaan Hakim yang Ideal, skema pengadaan Hakim yang selama ini mengikuti skema penerimaan pegawai negeri sipil, mempengaruhi pola pelayanan hukum yang berkelanjutan dan berkepastian, karena terjadi regenerasi professional yang tidak teratur. Untuk itu naskah akademik merekomendasikan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Hakim, yang mencakup penetapan jumlah kebutuhan Hakim, persetujuan pengadaan Hakim, tata cara pengadaan Hakim, Program Pelatihan Hakim, Pengangkatan dan Penempatan.

10. **Naskah Akademik Analisis Beban Kerja Hakim**

Secara bersamaan, Naskah Akademik Analisis Beban Kerja Hakim dilakukan untuk memenuhi kebutuhan formasi sesuai Permenpan RB No. 1 Tahun 2020. Proses ini menyiapkan sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim urgen untuk dirumuskan tersendiri. Hal ini untuk menghindari timbulnya kekacauan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi Hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding. Termasuk menentukan gradasi di antara para-Hakim yang masing masing memiliki masa kerja dan pengalaman serta kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lain.

11. **Naskah Akademik Sertifikasi Hakim Jinayat.**

Sertifikasi Hakim Jinayat, yang selama ini belum memiliki payung hukum. Kebutuhan tersebut diakomodasi dalam penyusunan Naskah Akademik Sertifikasi Hakim Jinayat. Proyeksinya, Sertifikasi Hakim Jinayat akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, dengan tujuan mencegah ada disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena, pengaturan dimaksud merupakan ketentuan dari peraturan perundangan yang telah ada, yakni qanun jinayat. Keuntungan dari sertifikasi hakim jinayat, adanya pemerataan kemampuan para hakim peradilan agama/Mahkamah Syar'iyah dalam penguasaan hukum jinayat, hal tersebut dimaksudkan untuk menyinkronkan antara hakim yang kompeten bidang jinayat dengan pola promosi dan mutasi hakim.

12. **Naskah Akademik Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI**

Penguatan organisasi Mahkamah Agung melalui Assesment Centre merupakan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan penilaian kinerja dalam mendukung program Manajemen Talenta. Hal dimaksud didasarkan pada landasan penarapan sistem merit yang memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya Unit Penilaian Kompetensi/Assesment Centre Mahkamah Agung, maka inkorporasi sistem merit dalam manajamen atau tata kelola pemerintahan yang baik di Mahkamah Agung merupakan keniscayaan.

13. **Naskah Akademik Usulan Pembentukan Unit Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.**

    Proses transformasi Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung paska Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, mendorong penyusunan naskah akademik dimaksud. Secara garis besar, fungsi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan melaksanakan dukungan teknis terkait penyediaan referensi pelaksanaan fungsi mengadili dan pembentukan serta evaluasi kebijakan peradilan dengan menyelenggarakan layanan dan fasilitasi strategi kebijakan untuk seluruh lingkungan peradilan di Mahkamah Agung.

    Turunan dari fungsi tersebut, maka Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan memberikan layanan dalam beberapa lingkup, diantarannya: Melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam perumusan kebijakan di Mahkamah Agung, Melaksanakan uji kelayakan rumusan rekomendasi kebijakan, Melaksanakan advokasi pemanfaatan usulan rekomendasi kebijakan, dan Memberikan layanan pengumpulan bahan untuk kebutuhan penyusunan yurisprudensi dan landmark decision.

14. **Naskah Akademik Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian Nasional**

    Masih dalam pengembangan kelembagaan Mahkamah Agung, observasi kedudukan dan status jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam sistem kepegawaian nasional menjadi perhatian Puslitbang Kumdil di tahun 2022. Penetapan jabatan Panitera dan Panitera Muda sebagai jabatan fungsional oleh

Perma memiliki dampak serius terhadap perubahan struktur organ pengadilan. Karena akan menyebabkan penyimpangan terhadap kedudukan, struktur organ, pembinaan, pola karir, promosi dan mutasi sebagaimana yang ada dan diberlakukan selama ini dan sesuai dengan rezim UU Peradilan. Solusinya, karakteristik stuktural dalam kedudukan Panitera harus dipertimbangkan dalam mencari alternatif jabatan yang sesuai dengan rezim sistem kepegawaian nasional yaitu antara jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi.

15. **Naskah Akademik Urgensi Pembentukan Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi**

    Merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035 bahwa setelah diterapkannya sistem kamar secara konsisten di Mahkamah Agung, maka diperlukan juga penerapan sistem kamar di Pengadilan Tinggi yang terbagi dalam Kamar Perdata dan Kamar Pidana. Cetak Biru Pembaruan Peradilan tersebut mengarahkan penerapan sistem kamar di Pengadilan Tinggi dapat dilaksanakan pada periode 2015-2019. Namun demikian, hingga saat ini yaitu tahun 2022, pemberlakuan sistem kamar pada Pengadilan Tinggi tersebut masih belum terealisasi. Mengingat hal tersebut di atas, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 4 November 2021 di Denpasar menyampaikan tentang perlunya pemberlakuan sistem kamar di Pengadilan Tinggi. Empat keuntungan sistem kamar pada Pengadilan Tinggi yaitu: (a) terciptanya kesatuan hukum dan konsistensi putusan sejak dari tingkat banding; (b) mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding; (c) meningkatkan profesionalias dan kepakaran; dan (d) memberi pengalaman bagi Hakim Tinggi yang akan mencalonkan sebagai Hakim Agung. Berdasarkan arahan tersebut, Puslitbang Kumdil melakukan penyusunan Urgensi Pembentukan Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi. Diharapkan hasil penyusunan ini menjadi dasar pimpinan Mahkamah Agung untuk mengambil kebijakan untuk penerapannya.

16. **Naskah Akademik Penugasan Dan Pembinaan Karier Bagi Prajurit TNI Pada Jabatan Di Mahkamah Agung Republik Indonesia Serta Pengadilan Di**

Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kerangka Sitem Satu Atap (One Roof System)

Berkaitan dengan penugasan dan pembinaan karier bagi Prajurit TNI pada Jabatan di Mahkamah Agung. Paska Keputusan Bersama Nomor 25/KMA/SKB/I/2022 dan Kep/64/I/2022 yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan Mabes TNI, terdapat beberapa keetentuan yang belum terimplementasi dengan baik. Seperti dalam penerapan rekrutmen Hakim Militer Tinggi dan pelaksaanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi bagi prajurit TNI yang bertugas pada Mahkamah Agung RI, serta dalam hal penyetaraan pendidikan Hakim Militer yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bagi prajurit TNI yang dinyatakan lulus dalam seleksi Calon Hakim Militer dan mengikuti pendidikan Hakim Militer, disetarakan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI. Untuk itu Naskah Akademik Penugasan dan Pembinaan Karier bagi Prajurit TNI pada Jabatan di Mahkamah Agung, merekomendasikan perlu adanya penataan kembali atas ketentuan- ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Mabes TNI berkaitan dengan penugasan Prajurit TNI dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer, dalam bentuk Keputusan Bersama, sehingga terbentuk harmonisasi dan dapat diterapkan dengan baik.

17. **Naskah Kebijakan Urgensi, Penerapan Pengembangan SDM dan Strategi Pembentukan Corporate University (Corpu).**

Modernisasi Mahkamah Agung adalah pembentukan Mahkamah Agung Corporate University. Puslitbang Kumdil berperan untuk menyiapkan naskah kebijakan yang berpijak pada urgensi, penerapan pengembangan SDM dan strategi pembentukan Corporate University (Corpu). Corpu merupakan konsep baru dalam implementasi pengembangan kompetensi di instansi pemerintah. Namun sebenarnya Corpu merupakan versi pembaharu atau generasi penerus dari eksistensi lembaga pelatihan seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan sebutan nomenklatur lainnya yang selama ini telah ada di instansi pemerintah. Naskah kebijakan merekomendasi tiga sasaran. 1) Sasaran jangka pendek, yang berbekal pada sarana prasarana yang memadai, pelaksanaan pembelajaran melalui Learning Management System (LMS), serta adanya kelebihan lainnya, maka kick off pelaksanaan Corporate University Mahkamah Agung bisa dimulai

dengan dukungan Pimpanan Mahkamah Agung. 2) Sasaran jangka menengah, mencakup pengembangan elemen-elemen dasar yang telah ada dan mapan menjadi lebih fokus pada pemetaan kompetensi. Selanjutnya penetapan dan penuangan Corporate University kedalam kebijakan internal Mahkamah Agung. 3) Sasaran jangka panjang, yakni berjalannya identifikasi setiap kebutuhan pengembangan personal yang melibatkan semua entitas organisasi. Dan secara paralel, sistem manajemen pengetahuan dapat menampung konten-konten pembelajaran yang merupakan hasil dari identifikasi pengetahuan dari tiap unit kerja yang menjalankan fungsi Mahkmah Agung.

Dari 17 hasil Naskah Akademis di tahun 2022, seluruh atau 100% dari seluruh hasil Naskah Akademis tersebut dijadikan sebagai bahan referensi atau rekomendasi terkait penyelenggaraan peradilan dan pembentukan kebijakan yang meliputi penyusunan regulasi guna penguatan kelembagaan Mahkamah Agung terhadap substansi 17 naskah akademis dimaksud.

Target yang ditetapkan sebanyak 4 Naskah Akademis yang di rekomendasi sehingga capaiannya 425%. Untuk tahun 2018 hingga tahun 2020 capaian pada Indikator ini tidak ada dikarenakan baru di tahun 2020 Indikator Kinerja ini berjalan, sebelumnya Puslitbang Hukum dan Peradilan belum bisa menentukan outcome pada penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan sebagai kebijakan oleh Mahkamah Agung.

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA PERADILAN YANG MENINGKAT KOMPETENSI SETELAH MENGIKUTI DIKLAT

Persentase SDM Peradilan (Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya) yang meningkat kompetensi setelah mengikuti pelatihan adalah perbandingan antara jumlah SDM Peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan dengan total jumlah SDM Peradilan tahun 2022. Capaian persentase SDM Peradilan yang mengikuti pelatihan tahun 2022, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.46 Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkat Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018

Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkat Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat	58,52%	57,71%	98,62	109,04	280,75	105,26	111,11

SDM Mahkamah Agung dikatakan telah meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat apabila dapat menyelesaikan pelatihan dan dibuktikan dengan pemberian sertifikat. Dalam proses pelatihan secara umum ada tiga komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran, sikap (attitude), dan keterampilan(skill).

1. Kehadiran dinilai berdasarkan jumlah kehadiran di kelas. Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan kehadiran peserta 80% dan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan baik secara secara tatap muka (luring) maupun jarak jauh (daring).
2. Attitude dinilai berdasarkan sikap peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan. Penilaian attitude peserta diberikan oleh para pengajar, mentor dan peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan.
3. Skill dinilai berdasarkan kemampuan peserta menyerap materi pelatihan yang disampaikan. Penilaian skill dimulai dari para peserta sebelum memulai pelatihan melalui pre-test, lalu dilanjutkan dengan adanya quiz pada setiap materi, bedah kasus dan post-test setelah para peserta selesai mengikuti rangkaian pelatihan.

Sertifikat pelatihan bagi peserta dapat diberikan apabila ketiga komponen penilaian tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan target minimal nilai yang telah ditetapkan yaitu 70.

Badan Litbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan kepada 18.900 orang atau sebesar 57,71% dari jumlah sumber daya manusia Mahkamah Agung sebanyak 32.751 orang. Capaian yang diperoleh adalah sebesar 98,61% dan secara umum dapat dikatakan baik. Meskipun capaian tahun 2022 turun jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun jumlah peserta yang selesai mengikuti pelatihan mengalami peningkatan sebesar 1.107 orang jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 17.793 orang. Penurunan capaian pada tahun 2022 dilatarbelakangi dengan adanya kenaikan target capaian sebesar 5,11% dari 53,41% pada tahun 2021 menjadi 58,52% pada tahun 2022. Selain itu jumlah SDM Mahkamah Agung meningkat cukup signifikan dari 30,551 orang di tahun 2021 menjadi 32,751 orang di tahun 2022.

Pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada perubahan pelatihan. selain melaksanakan pelatihan secara jarak jauh (daring) dan tatap muka (luring), strategi yang dilakukan Badan Litbang Diklat Kumdil adalah melaksanakan pelatihan

secara blended learning. Program pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3.47 Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	11.226 Orang
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	7.674 Orang
Total		**18.900 Orang**

Rincian jenis pelatihan berdasarkan pola pelaitihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai berikut:

A. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan

Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada tahun 2022 untuk mendidik dan melatih tenaga yudisial sebanyak 11.226 orang (411,21%), dari target kinerja 2.730 orang. Pelatihan Restorative Justice (RJ) belum dapat dilaksanakan karena menunggu arahan pimpinan terkait proses di terbitkannya Perma (Peraturan Mahkamah Agung RI) sebagai dasar hukum pelatihan. Untuk optimalisasi, Pusdiklat Teknis Peradilan berhasil melakukan 13 pelatihan tambahan yang semula tidak ada dalam perencanaan.

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Tabel 3.48 1. Pengembangan Kompetensi Pelatihan (PPC) Terpadu

No.	Pola Diklat	Target (*orang*)	Realisasi (*orang*)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer Angkatan III • Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan III • Mentor Pengadilan Magang	 26 12	 26 11	 100,00 91,67
2.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV • Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan IV • Tutor dan Mentor Pengadilan Magang		 25 15	
Total		38	**77**	**202,63**

2. Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Pelatihan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas semua tenaga teknis peradilan, akan tetapi tahun 2021 yang mendapat kesempatan adalah hakim melalui program Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (*Continuing Judicial Education* I) bagi hakim dengan masa kerja 1-5 tahun, Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan II (*Continuing Judicial Education* II) bagi hakim dengan masa kerja 6-10 tahun. Tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Hakim Berkelanjutan, sebagai berikut

Tabel 3.49 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Hakim Berkelanjutan

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Agama	80	106	132,50
2.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Umum	80	94	117,50
Total		**160**	**200**	**125,00**

3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Tabel 3.50 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Hakim

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	160	168	105,00
2.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup	160	161	100,62
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Peradilan Agama	280	280	100,00
4.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	52	104,00
T		**650**	**661**	**101,69**

4. Pelatihan Sertifikasi Reguler

Tabel 3.51 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi	80	81	101,25
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	36	90,00
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	80	77	96,25
4.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	40	48	120,00
5.	Pelatihan Sertifikasi Persaingan Usaha	40	41	102,50
Total		**280**	**283**	**101,43**

a. Program Pelatihan Teknis Yudisial

Tabel 3.52 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Yudisial

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah	30	33	110,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses	30	29	96,67
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman	42	60	142,86
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	47	117,50
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	40	75	187,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	80	72	90,00
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	166	207,50
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin	40	34	85,00
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Hukum Filantropi Islam	40	41	102,50
10.	Pelatihan Teknis Yudisial TPPO Kalimantan Barat	40	29	72,50
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan	40	43	107,50
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	45	112,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan	30	30	100,00
14.	Pelatihan Teknis Yudisial *Blasphemy* Umum dan	80	35	43,75
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat mahkamah	40	40	100,00
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Upaya Administratif dalam Sengketa TUN	30	29	96,67
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Senior Peradilan Militer (**Pengganti** Pelatihan Teknis Yudisial Tata Usaha Militer)	30	30	100,00
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pencucian Uang	40	35	87,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	30	30	100,00
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Pembuktian Alat Bukti Elektronik (TUN)	30	37	123,33
21.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Khusus Kasus HAM (**Pengganti** Pelatihan Teknis Yudisial *Advance* SPPA)	30	21	52,50
22.	Pelatihan Teknis Yudisial Ekseskusi Putusan Perdata (**Pengganti** Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual)	40	153	382,50
23.	Pelatihan Teknis Yudisial Pranata Peradilan	0	231	NA
24.	Pelatihan Teknis Yudisial *Ontrechmatige Overheidsdaad* (OOD)/Perbuatan melawan Hukum	0	27	NA
25.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Tingkat Banding Agama	0	44	NA
26.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pengesahan Badan Hukum	0	30	NA
27.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris	0	38	NA
28.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan (TUN)	0	36	NA

29.	Pelatihan Teknis Yudisial Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal	0	43	NA
Total		922	1.563	151,31

b. Pelatihan teknis Yudisial bagi Panitera dan Jurusita

Tabel 3.53 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Panitera dan Jurusita

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera	200	150	75,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita/Juru Sita	200	168	84,00
3.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	0	7.791	NA
Total		400	8.109	2.026,75

c. Pelatihan Singkat (*Short Course*)

Tabel 3.54 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Singkat (Short Course)

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual (*Elementary*)	100	113	113,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa dalam Perkara Pemilihan Kepala Daerah	30	23	76,67
3.	Pelatihan Singkat tentang Peradilan yang Adil bagi Disabilitas	30	36	120,00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Singkat Hukum Perpajakan bagi Hakim Yustisial	0	30	NA
5.	Pendidikan dan Pelatihan Singkat Sengketa Verifikasi Partai Politik	0	32	NA
Total		160	234	146,25

d. Pelatihan Khusus

Tabel 3.55 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Khusus

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Hak Uji Materiil (TUN)	40	27	67,50
2.	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Panitera dan Jurusita	40	37	92,50
3.	Training of Trainers Mediasi (**Pengganti** Pelatihan Terpadu	40	35	87,5
Total		120	99	82,50

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Pencapaian kinerja pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2022 untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan leadership sebanyak 7.674 orang (101,66%), dari target kinerja 7.549 orang. Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan tahun 2022 disamping melakakukan pelatihan bagi SDM Aparatur Mahkamah Agung juga melakukan pengembangan kompetensi bagi para para Pelatih atau Pengajar dengan Pelatihan Training of Trainer (TOT) untuk muatan lokal substansi Lembaga Mahamah Agung yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Profesional Trainer bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Pemerintah (BNSP) serta melakukan pelatihan Profesioanal Coach untuk 140 (seratus empat puluh) orang peserta bekerjasama dengan ESQ.

1. Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan

Tabel 3.56 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	15	1	7,00
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA)	40	39	98,00
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Restoratif Justice)	120	113	95,00
4.	Pelatihan Dasar (Latsar) PNS Golongan III	2.361	2.361	100,00
5.	Pelatihan Dasar (Latsar) PNS Golongan II	2.025	2.025	100,00
Total		4.561	4.539	99,52

2. Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional

Tabel 3.57 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional

No	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Ahli	50	25	50,00
2.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Terampil	50	15	30,00
3.	Pelatihan Fungsional Teknis Kepegawaian	50	57	114,00
4.	Pelatihan Fungsional Chartered Accountant Auditor	0	1	-
5.	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Muda	50	2	4,00

6.	Pelatihan Fungsional Pranata Humas	50	6	12,00
7.	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer	50	32	64,00
8.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama	50	5	10,00
9.	Pelatihan Fungsional Auditor Muda	50	3	6,00
Total		**400**	**146**	**26,50**

3. Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis Administrasi Umum

Tabel 3.58 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Adminitrasi Umum

No	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Training of Trainers (ToT) Fasilitator	80	138	172,5
2.	Pelatihan Teknis Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan	40	117	292,5
3.	Pelatihan Teknis Barang Milik Negara (BMN)	56	55	98.2
4.	Pelatihan Teknis Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	56	133	237,5
5.	Pelatihan Teknis Laporan Akuntablitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)	40	43	107,5
6.	Pelatihan Teknis Judicial Young Leadership	106	122	115.1
7.	Pelatihan Teknis Placement Test	106	182	171,7
8.	Pelatihan Teknis Arsip Dinamis	80	55	68,75
9.	Pelatihan Teknis Professional Trainers	80	139	173,75
10.	Pelatihan Teknis Manajemen ASN	40	168	420
11.	Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kierja Pemerintah (SAKIP)	40	34	85
12.	Pelatihan Teknis Court Excellence and Champion	639	810	126,76
13.	Pelatihan Teknis Audit for Non Auditor	8	125	1562,5
14.	Pelatihan Teknis Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik	80	156	196,25
15.	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif	40	143	357,5
16.	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	81	153	188,89
17.	Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	5	136	2720
18.	Pelatihan Teknis ECSCS Threshold Level for National Leadership Training	106	58	54,71
19.	Pelatihan Teknis Agile Scrum Master	424	8	1,88
20.	Pelatihan Teknis Beasiswa Schoters	0	54	NA
21.	Pelatihan Teknis Generasi Emas	40	160	400
22.	Pelatihan Teknis Administrasi Umum Rumpun Keuangan	219	0	0
23.	Pelatihan Teknis Administrasi Umum Rumpun Komunikasi/Media	100	0	0
Total		**2.521**	**2.989**	**118,56**

Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2022 juga mendapatkan Penghargaan Apresiasi. Berikut contoh kegiatan yang mendapatkan penghargaan tersebut.





SASARAN VII. MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – tahun 2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2022, sebagai berikut.

Tabel 3.59 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menigkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	83,30%	98%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII				**107,82%**

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PENGADUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI.

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.60 Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjut	85%	100%	117,65	117,65	117,65	100	100

Pada Tahun 2022 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.877 pengaduan dan terdapat sisa pengaduan tahun 2021 sebanyak 267 pengaduan sehingga jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2022 sebanyak 4.144 pengaduan dimana seluruh pengaduan tersebut sudah dapat ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya 117,65%, tindaklanjut atas pengaduan tersebut diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.61 Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		**692**
2.	Selesai diproses		**3.452**
	a. Diperiksa Tim Bawas	112	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	28	
	c. Konfirmasi	89	
	d. Klarifikasi	783	
	e. Memorandum / Delegasi Internal	199	
	f. Dijawab Surat	1064	
	g. Pelaksanaan Pemantauan	71	
	h. Diarsipkan	103	

	i. Gabung berkas	996	
	j. Dicabut	7	
Jumlah			**4.144**

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen, sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel diantaranya dengan terus melakukan penyempurnaan pada aplikasi SIWAS dengan berbagai penambahan fitur yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (E-post). Disamping melalui aplikasi SIWAS Pelapor juga dapat menggunakan kanal pengaduan lainnya yaitu melalui surat, email pengaduan, SMS Pengaduan, dan aplikasi SP4N – LAPOR, sehingga dengan adanya kemudahan penyampaian pengaduan tersebut maka kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PENGADUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI DAN DIPUBLIKASI

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 3.62 Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	85%	83,30%	98	104,28	104,20	100	100

Pada Tahun 2022 Badan Pengawasan telah menyelesaikan 3.452 pengaduan dari 4.144 pengaduan dengan realisasi kinerja sebesar 83,30% dengan capaian kinerja sebesar 98% sehingga terdapat penurunan jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2021. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya peningkatan jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sementara jumlah personil bagian penanganan pengaduan tidak mengalami perubahan.

Tahun 2022 Badan Pengawasan berupaya untuk lebih mengoptimalkan peranannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI yaitu dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan terhadap aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku, maupun kedisiplinan, dimana untuk jumlah aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dikenakan sanksi / hukuman disiplin untuk tahun 2022 sejumlah 271 orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.63 Hukuman Disiplin Tahun 2022

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	22	21	102	145
	Hakim *Ad Hoc*	-	1	-	1
2.	Panitera	1	4	9	14
3.	Sekretaris	3	2	4	9
4.	Panitera Muda	1	5	20	26
5.	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6.	Jurusita	2	2	3	7
7.	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8.	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10.	Staff	9	4	6	19
11.	PPN	1	-	-	1
Jumlah		**52**	**52**	**167**	**271**

Badan Pengawasan juga merehabilitasi aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan

pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Jumlah aparatur yang direhabilitasi tahun 2022 sebanyak 163 orang.

SASARAN VIII. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan SDM, keuangan dan aset secara transparan, terdiri dari 2 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	72,66%	85,44%
	2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII				90,88%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA GEDUNG YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang memadai, modern dan profesional bagi para pencari keadilan. Dari sisi regulasi, pedoman Standar Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas telah diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi

Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut telah berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan layanan peradilan saat ini.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan peradilan saat ini, kriteria dalam mengukur kebutuhan standar minimal sarana dan prasarana gedung pengadilan harus memenuhi 3 (kriteria), yaitu: (1) 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.65 Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan
1.	Peradilan Umum	409
2.	Peradilan Agama	389
3.	Peradilan Militer	21
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	25
Jumlah		844

Berdasarkan data di atas, dari total 923 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 844 satuan kerja atau sebesar 91,44% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Berdasarkan kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, guiding blocks untuk disabilitas netra, jalur landai (ram) dan pegangan, kursi roda,

kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.66 Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)

No.	Lingkungan Peradilan	Layanan Penyandang Disabilitas
1.	Peradilan Umum	173
2.	Peradilan Agama	124
3.	Peradilan Militer	10
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	6
Jumlah		313

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 313 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 33,91%.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan badan peradilan yang agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok E-Court, Fasilitas e Banking, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang Teleconference. Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan, berdasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.67 Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)

No.	Lingkungan Peradilan	Pelayanan Peradilan
1.	Peradilan Umum	388
2.	Peradilan Agama	412
3.	Peradilan Militer	21
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	34
Jumlah		855

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak 855 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 92,63%.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.68 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2021
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	72,66%	85,48	82,35	75,29	74,86	82,35

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di tahun 2022 sudah tercapai sebesar 72,66% { (K1+K2+K3) : 3} berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah capaian terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima mencapai 73% dari 85% yang ditargetkan atau 85,88%. Hal ini berarti terdapat kenaikan sebesar 3,13% dari tahun 2021.

Pada tahun 2022, sesuai dengan kesimpulan diatas, memang ada peningkatan kinerja sebesar 3,13%. Peningkatan ini tidak meningkat signifikan dikarenakan

adanya penambahan jumlah satuan kerja sebanyak 13 (tiga belas) satuan kerja dari semula 910 satuan kerja menjadi 923 satuan kerja yang berarti jumlah pembagi satuan kerja menjadi lebih banyak meskipun sudah ada peningkatan kinerja disetiap kriteria (K1, K2 dan K3). Penambahan satuan kerja ini adalah akibat dari pembentukan pengadilan tinggi baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 sampai dengan 10 Tahun 2021 terkait Pembentukan 13 Pengadilan Tinggi Baru.

Peningkatan kinerja di setiap kriteria (K1,K2 dan K3) terjadi karena adanya beberapa program sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pelayanan Publik.
2. Khusus untuk peningkatan pelayanan disabilitas, terdapat penambahan anggaran untuk pemenuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan.

Bagi pengadilan baru dan pengadilan yang direnovasi total sudah diterapkan tata ruang pengadilan sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana pengadilan yang telah selesai disusun.

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 2
PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KINERJA SDM (SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Tabel 3.69 Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100	100	100	99,4	99,08	104,48	109,6

Pada Tahun 2022, Mahkamah Agung RI memiliki pegawai sebanyak 32.737 orang (SIKEP per 6 Januari 2023 pukul 13.51 WIB). Dari jumlah tersebut terdapat 24.623 Pegawai yang wajib menginput penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan yang telah mengisi penilaian SKP adalah sejumlah 19.965 Pegawai (81,08% dari total jumlah pegawai wajib input SKP). Sementara yang belum mengisi penilaian SKP adalah sejumlah 4.658 Pegawai (18,92% dari total jumlah pegawai wajib input SKP). Pegawai lain yang terhitung dalam SIKEP, tetapi tidak wajib menginput SKP adalah pegawai dari kalangan Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, serta Militer yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI (sejumlah 8.114 Pegawai).

Kategori dalam Penilaian Prestasi Kerja merupakan tolak ukur penilaian dalam SKP. Pegawai wajib input SKP yang memperoleh Kategori Penilaian Prestasi Kerja "Baik" adalah sejumlah 19.082 Pegawai (95,58% dari jumlah Pegawai yang sudah menginput SKP pada SIKEP), dan 883 Pegawai lain (4,42% dari jumlah Pegawai yang sudah menginput SKP pada SIKEP) memperoleh Kategori "Sangat Baik", atau diperinci sebagaimana table berikut:

Tabel 3.70 Data Penginputan Nilai prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	32.737
2	Wajib Input	24.623
3	Belum Input	4.658
4	Sudah Input	
	Dengan Penilaian Prestasi Kerja	
	a. Sangat Baik	883
	b. Baik	19.082

Sumber: SIKEP, 6 Januari 2023

Bahwa dalam penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Orientasi Penilaian dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak

hanya berkutat pada hasil kinerja dari pegawai yang bersangkutan, akan tetapi meliputi:

1. Pengembangan Kinerja Pegawai;
2. Pemenuhan Ekpektasi Pimpinan;
3. Dialog Kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pegawai;
4. Pencapaian Kinerja Organisasi; dan
5. Hasil Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai.

Adapun proses penilaian, pemantauan, dan pembinaan dilaksanakan secara periodik. Aparatur Sipil Negara dihimbau untuk mendokumentasikan hasil kinerja secara periodik sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Periode pendokumentasian sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara Harian; Mingguan; Bulanan; Triwulanan; Semesteran; dan/atau Tahunan. Sementara periode evaluasi kinerja terhadap Pegawai dan Dokumentasi Kinerja dilaksanakan secara Triwulan; Semesteran; dan/atau Tahunan sesuai ketetapan Instansi.

Proses pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dipermudah dengan adanya pengembangan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu e-KINERJA (https://kinerja.bkn.go.id/). Aplikasi tersebut baru diperkenalkan secara meluas, terutama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, pada Tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan Periode Evaluasi Kinerja yang diisi oleh Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya pada Tahun 2022 hanya Periode Triwulan IV dan Periode Tahunan.

Adaptasi tersebut pun belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga masih ada 4.658 Pegawai Wajib Input SKP yang belum melaksanakan penginputan (SIKEP, 6 Januari 2023, pukul 13.51 WIB). Hal tersebut dipengaruhi oleh rentang batas waktu penilaian yang ditetapkan oleh BKN yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.59 WIB. BKN menyatakan bahwa Pegawai yang tidak melaksanakan penilaian sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak akan mendapatkan pelayanan kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Promosi/Mutasi, dan Pensiun. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung RI optimis bahwa seluruh Pegawai Wajib Input SKP akan melaksanakan penginputan SKP pada SIKEP pada batas waktu tersebut.

B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Mahkamah Agung melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Mahkamah Agung berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada stakeholder dan para pencari keadilan melalui tindaklajut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

1. Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Badan Pengawasan

   Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

   Hasil Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Mahkamah dan Badan Peradilan di bawahnya yang mendapat penilaian SAKIP minimal BB pada tahun 2022 sebanyak 726 Satker atau 78 % dari jumlah seluruhnya yaitu 930 Satker.

2. Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB

   Hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung tahun 2021 oleh KemenPAN-RB memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3.71 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,53	23,18
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,18	17,17
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,30	11,24
4.	Evaluasi Internal	10	7,76	7,76

5.	Capaian Kinerja	20	14,78	14,77
Nilai Hasil Evaluasi			74,55	74,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembanguna budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang beorientasi hasil pada Mahkamah Agung menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian ada penurunan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh KemenPAN-RB dan telah ditindaklnjuti oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh unit kerja sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi yang baik kinerja yang baik.

   Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai acuan bagi Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dalam menyusun dokumen SAKIP.
2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal agar lebih menggambarkan akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi, juga memantau dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit secara berkelanjutan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Untuk mengetahui sejauh mana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus mendorong adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja.

C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Mahkamah Agung terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN III);
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN VI);
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN VII);

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program prioritas, 2 (dua) kegiatan prioritas di Badan Peradilan Agama dan Badan Litbang Diklat Kumdil dengan pagu mencapai Rp4.779.898.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.655.781.446,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.72 Capaian Prioritas Nasional Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Output Priotas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Peradilan Agama	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan/ Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	Rp2.588.588.000	Rp2.473.953.950	95,57%	Perkara	7658	11.534	150,73%
Badan Litbang Diklat Kumdil	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda/Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	Rp2.191.310.000	Rp2.181.827.496	99, 57%	Orang	160	168	105%

b. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, pada Badan Litbang Diklat Kumdil dengan pagu mencapai Rp2.176.218.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.176.152.969,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.73 Capaian Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Output Priotas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Litbang Diklat Kumdil	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup/Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu	Rp2.176.218.000	Rp2.176.152.969	100%	Orang	160	161	100,63%

c. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 2 (dua) kegiatan prioritas, Pada Badan Urusan Adminstrasi, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN dan Badan Litbang Diklat Kumdil dengan pagu mencapai Rp78.504.722.000,00 dan realisasi sebesar Rp76.516.995.641,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.74 Capaian Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Output Priotas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Urusan Adminstrasi	Penegakan Hukum Nasional/ Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)	Rp800.000.000	Rp792.339.085	99%	NSPK	1	4	400%
		Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	Rp2.200.000.000	Rp2.136.649.162	97%	Sistem Informasi	1	1	100%

Badan Litbang Diklat Kumdil	Penegakan Hukum Nasional/Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	Rp936.000.000	Rp929.560.274	99,31%	orang	50	52	104%
		Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	Rp2.284.000.000	Rp2.174.039.954	95,19%	orang	280	286	102,14%
Badan Peradilan Umum	Penegakan Hukum Nasional/Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	Rp1.500.000.000	Rp1.496.379.233	99,76%	orang	300	330	110%
	Penegakan Hukum Nasional/ Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Pos Bantuan Hukum	Rp11.136.800.000	Rp11.021.055.786	98,96%	orang	111.368	110.210	98,96%
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Rp6.317.295.000	Rp6.267.387.197	99,21%	Perkara	4.628	4.593	99,21%
		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp.106.350.000	Rp32.522.000	30,61%	Perkara	160	50	30,6%
Badan Peradilan Agama	Penegakan Hukum Nasional/ Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp22.413.120.000	Rp22.257.091.347	99,30%	Orang	234.469	372.834	159,01%
		Perkara di Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Rp9.952.839.000	Rp8.764.795.153	88,06%	Perkara	21.413	31.063	145,07%
		Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	Rp20.858.318.000	Rp20.643.526.667	99,97%	Perkara	32.918	56.039	170,24%
Badan Peradilan Militer dan TUN	Penegakan Hukum Nasional/ Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp990.000.000	Rp641.938.000	64,79%	Orang	2.880	1.741	60,45%
		Perkara Peradilan	Rp49.860.000	Rp5.890.000	11,81%	Perkara	66	11	16,67

		Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perakara							

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022 Mahkamah Agung mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp11.820.133.399.950,00 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Mahkamah Agung Tahun 2022. Namun, dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran maka anggaran tersebut direvisi dengan rincian seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.75 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	***Badan Urusan Administrasi***				
	Program Dukungan Manajemen	Rp11.127.467.300.000	Rp10.777.728.441.000	Rp10.553.218.959.986	97,92%
2	***Kepaniteraan***				
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp10.732.829.000	Rp10.732.829.000	Rp10.698.378.097	99,68%
	Program Dukungan Manajemen	Rp179.261.923.000	Rp214.211.923.000	Rp213.588.489.680	99,71%
3	***Ditjen Badan Peradilan Umum***				
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp83.361.365.950	Rp83.264.024.000	Rp81.091.784.385	97,39%
	Program Dukungan Manajemen	Rp57.086.192.000	Rp57.183.534.000	Rp56.925.996.332	99,55%
4	***Ditjen Badan Peradilan Agama***				
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp76.115.385.000	Rp76.115.385.000	Rp74.209.845.612	97,50%
	Program Dukungan Manajemen	Rp41.639.962.000	Rp41.412.785.000	Rp41.260.802.769	99,63%
5	***Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara***				
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp9.101.255.000	Rp9.101.255.000	Rp8.815.797.620	96,86%
	Program Dukungan Manajemen	Rp20.453.502.000	Rp19.205.014.000	Rp19.153.168.930	99,73%
6	***Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan***				
	Program Dukungan Manajemen	Rp174.752.945.000	Rp188.504.054.000	Rp187.230.380.986	99,32%
7	***Badan Pengawasan***				

	Program Dukungan Manajemen	Rp40.160.741.000	Rp36.960.741.000	Rp36.658.132.118	99,18%
	Jumlah	**Rp11.820.133.399.950**	**Rp11.514.419.985.000**	**Rp11.282.851.736.515**	**97,99%**

Realisasi Anggaran pada Tahun 2022 mencapai Rp11.282.851.736.515,00 (sebelas triliun dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) atau sebesar 97,99% dari total alokasi yaitu Rp11.514.419.985.000 (sebelas triliun lima ratus empat belas miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Program penegakkan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan alokasi masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.76 Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada masing-masing Sasaran Strategis

(dalam ribuan)

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	511.226.749.000	505.744.263.425	98,93%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	-	-	-
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	-	-	-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	-	-	-
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	188.504.054.000	187.230.380.986	99,32%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	36.960.741.000	36.658.132.118	99,18%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	10.777.728.441.000	10.553.218.959.986	97,92%
	TOTAL	**11.514.419.985.000**	**11.282.851.736.515**	97,99%

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 memuat 8 (delapan) sasaran strategis, namun yang dianggarkan pada Rencana Kerja Mahkamah Agung hanya 4 (empat) sasaran strategis seperti yang tercantum pada tabel di atas. Penyerapan anggaran tersebut perlu diukur agar tidak melebihi anggaran

yang seharusnya dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut sehingga efisiensi dari penggunaan anggaran atas kinerja tersebut dapat terlaksana.

Tabel 3.77 Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasarang Strategis Mahkamah Agung

(dalam ribuan)

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	98,93%	152,60%	53,67%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	-	-	-
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	-	-	-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	-	-	-
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	99,32%	261,81%	162,49%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	99,18%	107,82%	8,64%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	97,92%	92,74%	-5,18%

Seluruh kegiatan pada Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” yang juga ditunjang dengan terlaksananya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.78 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

(dalam ribuan)

Program dan Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
➢ Seluruh kegiatan pada program penegakkan dan pelayanan hukum	Rp179.213.493.000	Rp174.815.805.714	97,55%
Program Dukungan Manajemen			
➢ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp214.211.923.000	Rp213.588.489.680	99,71%
➢ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp57.183.534.000	Rp56.925.996.332	99,55%
➢ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan	Rp41.412.785.000	Rp41.260.802.769	99,63%

Agama			
➢ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp19.205.014.000	Rp19.153.168.930	99,73%
TOTAL	**Rp511.226.749.000**	**Rp505.744.263.425**	**98,93%**

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 101,66%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 98,93% sehingga terjadi efisiensi sebesar 2,73% atau sebesar Rp13.956.490.248,00 dari alokasi anggaran. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di bawah Program Dukungan Manajemen dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis yang lain.

Tabel 3.79 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

(dalam ribuan)

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	Rp35.797.232.000	Rp35.717.833.546	99,78%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	Rp15.846.600.000	Rp15.703.973.142	99,10%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp70.584.349.000	Rp73.521.461.510	104,16%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	Rp66.275.873.000	Rp62.287.112.788	93,98%
TOTAL	**Rp188.504.054.000**	**Rp187.230.380.986**	**99,32%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas adalah sebesar 261,81% jauh lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,32%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 162,49% atau sebesar Rp306.300.237.345 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.80 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal

(dalam ribuan)

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Pengawasan Pelaksanaan Teknis,	Rp5.454.553.000,00	Rp5.451.932.419,00	99,95%

Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I			
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	Rp6.665.484.000,00	Rp6.628.117.036,00	99,44%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp15.271.119.000,00	Rp15.046.038.647,00	98,53%
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	Rp5.227.429.000,00	Rp5.221.696.594,00	99,89%
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	Rp4.342.156.000,00	Rp4.310.347.422,00	99,27%
TOTAL	**Rp36.960.741.000**	**Rp36.658.132.118**	**99,18%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal adalah sebesar 107,82% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,18% sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,64% atau sebesar Rp3.193.408.022,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.81 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

(dalam ribuan)

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp40.199.973.000,00	Rp39.758.976.464,00	98,90%
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp9.188.916.000,00	Rp9.158.382.201,00	99,67%
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp8.890.411.862.000,00	Rp8.686.392.804.937,00	97,71%
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp13.067.928.000,00	Rp12.200.739.878,00	93,36%
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Rp5.647.516.000,00	Rp5.637.870.630,00	99,83%
Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	Rp6.332.350.000,00	Rp6.296.220.582,00	99,43%
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp217.477.898.000,00	Rp217.011.512.096,00	99,79%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di	Rp1.595.401.998.000,00	Rp1.576.762.453.198,00	98,83%

Lingkungan Mahkamah Agung			
TOTAL	**Rp10.777.728.441.000**	**Rp10.553.218.959.986**	**97,92%**

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset adalah sebesar 92,74% lebih rendah dari realisasi anggarannya yang mencapai 97,92% sehingga terjadi inefisiensi sebesar 5,18% atau sebesar Rp558.286.333.243,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.82 Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2022

(dalam ribuan)

Alokasi	Realisasi	%	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Rp11.514.391.741.000	Rp11.282.851.736.515	97,99%	144,19%	46,20%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis Mahkamah Agung sebesar 144,19% lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 97,99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 46,20% dari total alokasi anggaran.



BAB IV - PENUTUP

Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 114,37% pada tahun 2021 menjadi 144,19% pada tahun 2022, sedangkan capaian realisasi anggaraan tahun 2022 sebesar 97,99% atau sebesar Rp11.282.851.736.515,00 (sebelas triliun dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) dari pagu tahun 2022 sejumlah Rp11.820.133.399.950,00 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 930 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 80 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat

Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Mahkamah Agung semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG

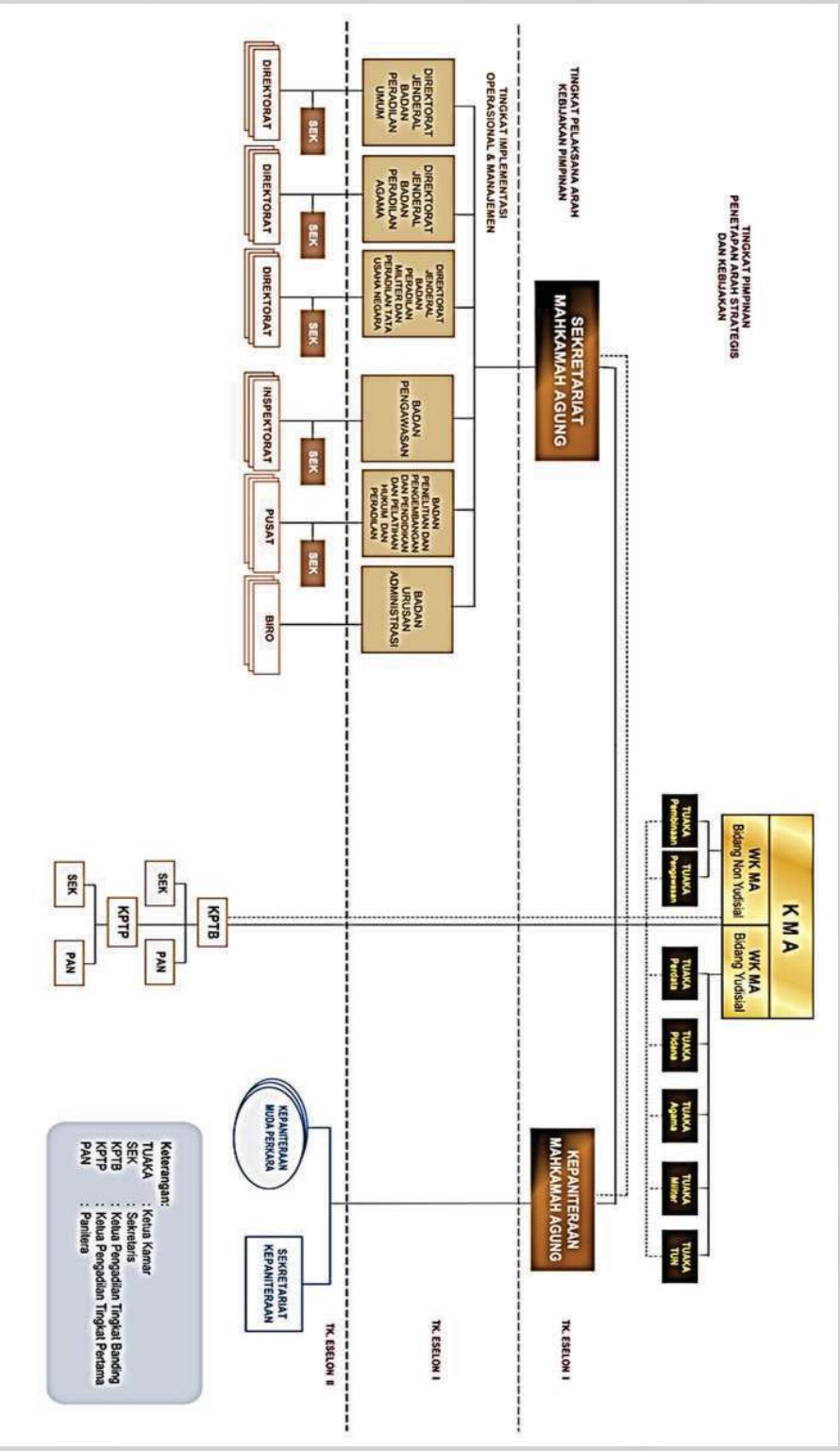

2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepaniteraan
		Persentase pututsan yang menggunakan pendekatan keadian restoratif di Mahkmah Agung	2	2	4	4	15	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50	50	50	50	50	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80	80	80	80	80	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20	20	20	20	20	Kepaniteraan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	30	30	30	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	75	75	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100	100	100	100	100	Badan Litbang Diklat Kumdil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4	4	4	4	4	Badan Litbang Diklat Kumdil
		Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20.31	53,41	58,52	65,69	66,56	
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	Badan Pengawasan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85	85	85	85	
8.	Meningkatnya Transparasi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85	Badan Urusan Administrasi
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	100	100	100	100	

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,52%

7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

4. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

MAHKAMAH AGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%

5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaran pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,52%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp	179.310.835.000
2	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp	11.640.822.565.000
JUMLAH		**Rp**	**11.820.133.400.000**

5. INVENTARISIR DATA KINERJA MAHKAMAH AGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JANUARI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,84%	97,84%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		387	21.517	42.385	193	-	-	-	64.482		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		390	22.667	42552	298	-	-	-	65.907		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									15,79%	394,74%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	6	-	-	-	-	-	6		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	38	-	-	-	-	-	38		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									-51,42%	-102,84%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	1.677	42.120	94	-	-	-	43.891	70,33%	141%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	19.835	42.338	230	-	-	-	62.403		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	163	113	62	-	-	-	338	11,34%	23%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	2.639	216	126	-	-	-	2981		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-847	-	-	-	-	-	-	-847	-235,93%	-472%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		359	-	-	-	-	-	-	359		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									12,50%	50%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	12	-	-	-	-	-	12		
			Jumlah perkara pidana anak		-	96	-	-	-	-	-	96		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	81,30%	88,15%	88,15%	110%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat**	20%									25,30%	126,51%

			waktu;										
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		335	-	-	-	-	-	-	335	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		1.324	-	-	-	-	-	-	1.324	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%									
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	113	4.764	-	-	-	-	4877	169,22 %	676,89%
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	1.528	1.354	-	-	-	-	2882	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%									
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	14	621	0	-	-	-	635	78,11%	260,35%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	14	733	66	-	-	-	813	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%									
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	37	1.681	13	-	-	-	1731	165,80 %	165,80%
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	37	988	19	-	-	-	1044	
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%									
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	346	-	-	-	-	346	150,43 %	150,43%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	230	-	-	-	-	230	
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%									
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	4.048	10.387	78	-	-	-	14513	103,95 %	103,95%
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	4.048	7.034	2.880	-	-	-	13962	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%									
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	1.452	37.534	21	-	-	-	39007	96,92%	129,22%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	2.614	37.601	33	-	-	-	40248	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%									0,00%	0,00%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	0	-	0	-	-	-	0	

			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	0	-	-	-	275		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	0,00	-	0	0	0,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									2,47%	4,23%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	810	-	810		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									98,39%	115,75%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	366	-	-	366		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	372	-	-	372		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									98,39%	115,75%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	366	-	-	366		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	372	-	-	372		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	FEBRUARI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,85%	97,85%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		1.800	43.034	90.826	513	-	-	-	136.173		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		1.804	45.334	91.184	836	-	-	-	139.158		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									14,86%	371,62%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	11	-	-	-	-	-	11		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	74	-	-	-	-	-	74		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									21,15%	42,30%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	3.354	90.257	-	-	-	-	93.611	71,79%	144%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	39.670	90.723	-	-	-	-	130.393		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	226	257	144	-	-	-	627	14,88%	30%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	3.416	462	335	-	-	-	4213		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-372	-	-	-	-	-	-	-372	-23,22%	-46%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		1.602	-	-	-	-	-	-	1.602		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									12,50%	50%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	24	-	-	-	-	-	24		
			Jumlah perkara pidana anak		-	192	-	-	-	-	-	192		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	81,05%	88,03%	88,03%	110%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%									27,58%	137,92%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		846	-	-	-	-	-	-	846		

			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		3.067	-	-	-	-	-	-	3.067		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%									172,24%	688,96%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	226	9.869	-	-	-	-	10.095		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	3.056	2.805	-	-	-	-	5.861		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%									81,19%	270,63%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	28	2.483	1	-	-	-	2.512		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	28	2.934	132	-	-	-	3.094		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%									166,60%	166,60%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	130	6.725	44	-	-	-	6.899		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	130	3.950	61	-	-	-	4.141		
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%									150,57%	150,57%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	923	-	-	-	-	923		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	613	-	-	-	-	613		
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%									117,02%	117,02%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	7.924	38.085	184	-	-	-	46.193		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	7.924	25.792	5.760	-	-	-	39.476		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%									97,08%	129,44%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	2.904	79.493	52	-	-	-	82.449		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	5.228	79.607	91	-	-	-	84.926		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%									12,70%	12,70%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	0	-	40	-	-	-	40		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	40	-	-	-	315		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	0,00	-	0	0	0,00%

		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									4,47%	7,64%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	1.465	-	1.465		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									99,39%	116,93%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	324	-	-	324		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	326	-	-	326		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									99,39%	116,93%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	324	-	-	324		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	326	-	-	326		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	MARET									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,93%	97,93%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		4.725	64.551	151.377	1.012	-	-	-	221.665		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		4.730	68.001	151.973	1.638	-	-	-	226.342		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									14,16%	353,98%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	16	-	-	-	-	-	16		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	113	-	-	-	-	-	113		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									18,00%	36,00%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	5.031	150.429	-	-	-	-	155.460	73,78%	148%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	59.505	151.206	-	-	-	-	210.711		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	318	458	243	-	-	-	1019	15,61%	31%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	5.125	770	632	-	-	-	6527		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-1.096	-	-	-	-	-	-	-1.096	-35,39%	-71%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		3.097	-	-	-	-	-	-	3.097		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									12,50%	50%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	36	-	-	-	-	-	36		
			Jumlah perkara pidana anak		-	288	-	-	-	-	-	288		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	83,10%	89,05%	89,05%	111%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%								25,23%	126,16%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		1.408	-	-	-	-	-	-	1.408	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		5.580	-	-	-	-	-	-	5.580	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%								175,15%	700,59%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	339	15.314	-	-	-	-	15.653	
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	4.584	4.353	-	-	-	-	8.937	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%								81,15%	270,49%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	42	3.724	0	-	-	-	3.766	
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	42	4.401	198	-	-	-	4.641	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%								164,29%	164,29%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	387	10.087	106	-	-	-	10.580	
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	387	5.925	128	-	-	-	6.440	
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%								150,71%	150,71%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	1.385	-	-	-	-	1.385	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	919	-	-	-	-	919	
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%								117,02%	117,02%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	7.924	38.085	184	-	-	-	46.193	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	7.924	25.792	5.760	-	-	-	39.476	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%								97,31%	129,75%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	4.356	131.160	87	-	-	-	135.603	
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	7.842	131.329	178	-	-	-	139.349	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%								670,63%	670,63%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	134	2.395	120	-	-	-	2.649		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	120	-	-	-	395		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	0,00	-	0	0	0,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									15,58%	26,63%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	5.103	-	5.103		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									99,18%	116,68%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	362	-	-	362		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	365	-	-	365		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									99,18%	116,68%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	362	-	-	362		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	365	-	-	365		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	APRIL									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	**a.**	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		7.383	86.068	199.817	1.616	-	-	-	294.884	97,87%	97,87%
			Jumlah perkara yang diselesaikan		7.388	90.668	200.604	2.644	-	-	-	301.304		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%										
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	25	-	-	-	-	-	25	16,67%	416,67%
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	150	-	-	-	-	-	150		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%										
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	6.708	198.566	1.359	-	-	-	206.633	73,46%	147%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	79.340	199.591	2.366	-	-	-	281.297		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	413	603	373	-	-	-	1389	16,48%	33%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	6.390	1.017	1.023	-	-	-	8430		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-298	-	-	-	-	-	-	-298	-6,58%	-13%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		4.531	-	-	-	-	-	-	4.531		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%										
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	48	-	-	-	-	-	48	12,50%	50%
			Jumlah perkara pidana anak		-	384	-	-	-	-	-	384		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	83,55%	89,28%	89,28%	112%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%								36,87%	184,36%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		3.230	-	-	-	-	-	-	3.230	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		8.760	-	-	-	-	-	-	8.760	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%								172,23%	688,93%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	452	19.737	-	-	-	-	20189	
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	6.112	5.610	-	-	-	-	11722	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%								82,19%	273,95%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	59	7.138	0	-	-	-	7197	
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	59	8.434	264	-	-	-	8757	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%								165,96%	165,96%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	411	15.691	127	-	-	-	16229	
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	411	9.217	151	-	-	-	9779	
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%								150,80%	150,80%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	2.078	-	-	-	-	2078	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	1.378	-	-	-	-	1378	
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%								120,69%	120,69%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	17.158	93.482	375	-	-	-	111015	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	17.158	63.307	11.520	-	-	-	91985	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%								97,20%	129,60%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	5.808	167.460	136	-	-	-	173404	
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	10.456	167.662	288	-	-	-	178406	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan**	100%								48,73%	48,73%

	peradilan		**Miltun)**											
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	134	0	0	-	-	-	134		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	0	-	-	-	275		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	1,00	-	1	1	25,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									28,83%	49,26%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	9.442	-	9442		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									98,39%	115,75%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	244	-	-	244		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	248	-	-	248		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									100,00%	117,65%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	248	-	-	248		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	248	-	-	248		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	MEI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	**a.**	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,81%	97,81%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		8.840	107.585	248.258	2.224	-	-	-	366.907		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		8.854	113.335	249.235	3.693	-	-	-	375.117		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									16,37%	409,36%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	28	-	-	-	-	-	28		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	171	-	-	-	-	-	171		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									31,26%	62,52%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	8.385	246.703	1.895	-	-	-	256.983	73,32%	147%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	99.175	247.977	3.343	-	-	-	350.495		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	488	745	505	-	-	-	1738	17,27%	35%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	7.313	1.263	1.487	-	-	-	10063		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		173	-	-	-	-	-	-	173	3,18%	6%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		5.438	-	-	-	-	-	-	5.438		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									12,50%	50%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	60	-	-	-	-	-	60		
			Jumlah perkara pidana anak		-	480	-	-	-	-	-	480		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	83,55%	89,28%	89,28%	112%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%									41,26%	206,29%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		4.687	-	-	-	-	-	-	4.687		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		11.360	-	-	-	-	-	-	11.360		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%									171,63%	686,53%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	565	24.502	-	-	-	-	25.067		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	7.640	6.965	-	-	-	-	14.605		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%									82,44%	274,81%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	73	9.932	2	-	-	-	10.007		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	73	11.735	330	-	-	-	12.138		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%									166,40%	166,40%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	450	19.614	144	-	-	-	20.208		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	450	11.521	173	-	-	-	12.144		
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%									150,71%	150,71%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	2.770	-	-	-	-	2.770		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	1.838	-	-	-	-	1.838		
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%									120,33%	120,33%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	21.138	114.256	469	-	-	-	135.863		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	21.138	77.375	14.400	-	-	-	112.913		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%									97,01%	129,35%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	7.260	196.337	202	-	-	-	203.799		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	13.070	196.574	429	-	-	-	210.073		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%									78,27%	78,27%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	170	-	201	-	-	-	371		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	199	-	-	-	474		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	2,00	-	2	2	50,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									36,99%	63,20%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	12.113	-	12.113		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									97,24%	114,40%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	176	-	-	176		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	181	-	-	181		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									97,24%	114,40%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	176	-	-	176		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	181	-	-	181		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JUNI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,78%	97,78%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		11.549	129.105	305.781	2.979	-	-	-	449.414		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		11.587	136.005	306.985	5.022	-	-	-	459.599		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									15,65%	391,30%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	36	-	-	-	-	-	36		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	230	-	-	-	-	-	230		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									35,82%	71,63%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	10.062	303.866	2.561	-	-	-	316.489	73,95%	148%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	119.010	305.435	3.545	-	-	-	427.990		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	650	935	699	-	-	-	2284	17,65%	35%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	9.309	1.556	2.074	-	-	-	12939		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		1.113	-	-	-	-	-	-	1.113	15,85%	32%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		7.024	-	-	-	-	-	-	7.024		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									12,50%	50%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	72	-	-	-	-	-	72		
			Jumlah perkara pidana anak		-	576	-	-	-	-	-	576		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	83,55%	89,28%	89,28%	112%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%									
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		6.988	-	-	-	-	-	-	6.988	46,06%	230,32%
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		15.170	-	-	-	-	-	-	15.170		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%									
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	680	30.627	-	-	-	-	31.307	175,11%	700,46%
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	9.172	8.706	-	-	-	-	17.878		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%									
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	87	13.966	3	-	-	-	14.056	82,76%	275,85%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	87	16.502	396	-	-	-	16.985		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%									
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	556	29.140	175	-	-	-	29.871	167,03%	167,03%
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	556	17.117	211	-	-	-	17.884		
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%									
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	4.155	-	-	-	-	4.155	150,71%	150,71%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	2.757	-	-	-	-	2.757		
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%									
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	26.487	152.341	667	-	-	-	179.495	122,16%	122,16%
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	26.487	103.166	17.280	-	-	-	146.933		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%									
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	8.712	258.650	81	-	-	-	267.443	97,17%	129,56%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	15.684	258.941	602	-	-	-	275.227		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%									864,43%	864,43%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	222	8.821	241	-	-	-	9.284		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	560	239	-	-	-	1.074		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	3,00	-	3	3	75,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									40,16%	68,63%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	13.154	-	13.154		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									88,15%	103,70%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	238	-	-	238		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	270	-	-	270		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									88,15%	103,70%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	238	-	-	238		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	270	-	-	270		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	JULI									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									100,27%	100,27%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		13.893	150.625	360.277	3.951	-	-	-	528.746		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		390	158.676	361.695	6.539	-	-	-	527.300		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									13,25%	331,33%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	44	-	-	-	-	-	44		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	332	-	-	-	-	-	332		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									37,79%	75,59%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	11.739	358.020	3.309	-	-	-	373.068	74,26%	149%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	138.848	359.869	3.694	-	-	-	502.411		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	750	1.111	939	-	-	-	2800	17,70%	35%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	11.228	1.833	2.754	-	-	-	15815		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		1.836	-	-	-	-	-	-	1.836	21,42%	43%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		8.571	-	-	-	-	-	-	8.571		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									12,95%	52%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	87	-	-	-	-	-	87		
			Jumlah perkara pidana anak		-	672	-	-	-	-	-	672		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	83,55%	89,28%	89,28%	112%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%									
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		9.493	-	-	-	-	-	-	9.493	51,36%	256,78%
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		18.485	-	-	-	-	-	-	18.485		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%									
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	793	10.350	-	-	-	-	11143	23,65%	94,60%
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	10.702	36.412	-	-	-	-	47114		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%									
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	101	17.070	4	-	-	-	17175	82,84%	276,14%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	101	20.169	462	-	-	-	20732		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%									
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	657	34.744	213	-	-	-	35614	167,05%	167,05%
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	657	20.409	253	-	-	-	21319		
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%									
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	5.541	-	-	-	-	5541	150,73%	150,73%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	3.676	-	-	-	-	3676		
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%									
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	31.761	190.426	828	-	-	-	223015	123,30%	123,30%
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	31.761	128.958	20.160	-	-	-	180879		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%									
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	10.167	305.361	182	-	-	-	315710	97,19%	129,59%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	18.302	305.718	807	-	-	-	324827		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%									75,09%	75,09%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	330	-	330	-	-	-	660		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	329	-	-	-	879		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	8,00	-	8	8	200,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									41,02%	70,10%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	13435	-	13435		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	AGUSTUS									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	**a.**	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,74%	97,74%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		16.804	172.142	411.745	5.148	-	-	-	605.839		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		16.873	181.343	413.366	8.264	-	-	-	619.846		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									13,93%	348,26%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	56	-	-	-	-	-	56		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	402	-	-	-	-	-	402		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									40,55%	81,09%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	13.416	409.166	-	-	-	-	422.582	74,14%	148%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	158.686	411.279	-	-	-	-	569.965		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	864	1.267	1.251	-	-	-	3382	18,19%	36%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	12.931	2.095	3.564	-	-	-	18590		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		3.113	-	-	-	-	-	-	3.113	29,30%	59%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		10.623	-	-	-	-	-	-	10.623		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									13,54%	54%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	104	-	-	-	-	-	104		
			Jumlah perkara pidana anak		-	768	-	-	-	-	-	768		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	82,85%	88,93%	88,93%	111%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%								55,19%	275,97%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		11.567	-	-	-	-	-	11.567		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		20.957	-	-	-	-	-	20.957		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%								23,74%	94,94%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	910	12.091	-	-	-	13.001		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	12.235	42.538	-	-	-	54.773		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%								82,91%	276,35%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	117	20.173	6	-	-	20.296		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	117	23.836	528	-	-	24.481		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%								167,22%	167,22%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	720	40.348	238	-	-	41.306		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	720	23.701	281	-	-	24.702		
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%								150,73%	150,73%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	6.810	-	-	-	6.810		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	4.518	-	-	-	4.518		
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%								123,91%	123,91%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	36.428	225.049	1.058	-	-	262.535		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	36.428	152.405	23.040	-	-	211.873		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%								97,24%	129,65%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	11.619	356.591	292	-	-	368.502		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	20.919	357.016	1.035	-	-	378.970		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%								75,64%	75,64%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	416	-	0	-	-	-	416		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	0	-	-	-	550		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	10,00	-	10	10	250,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									42,42%	72,49%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	13.893	-	13.893		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SEPTEMBER									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	**a.**	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,78%	97,78%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		19.048	193.659	481.378	6.713	-	-	-	700.798		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		19.139	204.010	483.273	10.269	-	-	-	716.691		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									13,79%	344,83%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	68	-	-	-	-	-	68		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	493	-	-	-	-	-	493		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									42,61%	85,23%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	15.093	478.363	-	-	-	-	493.456	74,84%	150%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	178.525	480.833	-	-	-	-	659.358		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	953	1.518	1.616	-	-	-	4087	18,89%	38%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	14.683	2.449	4.508	-	-	-	21640		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		4.217	-	-	-	-	-	-	4.217	34,11%	68%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		12.362	-	-	-	-	-	-	12.362		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									13,64%	55%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	118	-	-	-	-	-	118		
			Jumlah perkara pidana anak		-	865	-	-	-	-	-	865		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	82,40%	88,70%	88,70%	111%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%								59,41%	297,06%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		14.270	-	-	-	-	-	-	14.270	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		24.019	-	-	-	-	-	-	24.019	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%								23,82%	95,29%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	1.023	13.929	-	-	-	-	14.952	
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	13.763	49.003	-	-	-	-	62.766	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%								82,95%	276,50%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	131	23.277	7	-	-	-	23.415	
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	131	27.503	594	-	-	-	28.228	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%								167,07%	167,07%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	835	44.831	274	-	-	-	45.940	
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	835	26.334	328	-	-	-	27.497	
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%								150,73%	150,73%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	7.734	-	-	-	-	7.734	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	5.131	-	-	-	-	5.131	
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%								123,91%	123,91%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	36.428	225.049	1.058	-	-	-	262.535	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	36.428	152.405	23.040	-	-	-	211.873	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%								97,24%	129,66%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	13.071	402.939	433	-	-	-	416.443	
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	23.533	403.415	1.300	-	-	-	428.248	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%								90,97%	90,97%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	462	0	374	-	-	-	836		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	369	-	-	-	919		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	11,00	-	11	11	275,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									43,59%	74,49%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	14.276	-	14.276		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	OKTOBER									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	**a.**	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,73%	97,73%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		21.150	215.177	511.653	8.421	-	-	-	756.401		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		21.261	226.677	513.668	12.352	-	-	-	773.958		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									12,88%	321,91%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	77	-	-	-	-	-	77		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	598	-	-	-	-	-	598		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									41,90%	83,80%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	16.770	508.448	6.265	-	-	-	531.483	74,47%	149%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	198.360	511.075	4.249	-	-	-	713.684		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	1.042	1.569	2.016	-	-	-	4627	19,14%	38%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	16.057	2.603	5.516	-	-	-	24176		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		4.428	-	-	-	-	-	-	4.428	32,09%	64%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		13.800	-	-	-	-	-	-	13.800		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									13,53%	54%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	130	-	-	-	-	-	130		
			Jumlah perkara pidana anak		-	961	-	-	-	-	-	961		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	81,40%	88,20%	88,20%	110%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%								62,20%	310,98%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		16.493	-	-	-	-	-	-	16.493	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		26.518	-	-	-	-	-	-	26.518	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%								23,89%	95,55%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	1.136	15.767	-	-	-	-	16903	
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	15.291	55469		-	-	-	70760	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%								82,96%	276,54%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	145	26.070	8	-	-	-	26223	
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	145	30.804	660	-	-	-	31609	
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%								166,94%	166,94%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	937	48.754	325	-	-	-	50016	
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	937	28.639	385	-	-	-	29961	
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%								150,72%	150,72%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	8.888	-	-	-	-	8888	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	5.897	-	-	-	-	5897	
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%								124,24%	124,24%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	46.193	287.370	1.385	-	-	-	334948	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	46.193	194.609	28.800	-	-	-	269602	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%								97,25%	129,67%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	14.523	450.091	598	-	-	-	465212	
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	26.147	450.623	1.594	-	-	-	478364	
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%								92,00%	92,00%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	506	0	0	-	-	-	506		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	0	-	-	-	550		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	14,00	-	14	14	350,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									45,21%	77,26%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	14.807	-	14807		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan asset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	NOVEMBER									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									97,70%	97,70%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		23.322	236.694	560.094	10.398	-	-	-	830.508		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		23.466	249.347	562.299	14.950	-	-	-	850.062		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									12,06%	301,60%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	83	-	-	-	-	-	83		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	688	-	-	-	-	-	688		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									44,14%	88,28%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	18.447	556.585	6.438	-	-	-	581.470	74,34%	149%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	218.195	559.460	4.473	-	-	-	782.128		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	1.125	1.716	2.514	-	-	-	5355	20,75%	41%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	17.396	2.850	5.566	-	-	-	25812		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		5.755	-	-	-	-	-	-	5.755	37,34%	75%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		15.414	-	-	-	-	-	-	15.414		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									13,43%	54%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	142	-	-	-	-	-	142		
			Jumlah perkara pidana anak		-	1.057	-	-	-	-	-	1057		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	95%	-	-	-	-	81,40%	88,20%	88,20%	110%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%									63,89%	319,47%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		18.517	-	-	-	-	-	-	18.517		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		28.981	-	-	-	-	-	-	28.981		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%									23,96%	95,84%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	1.249	17.702	-	-	-	-	18.951		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	16.819	62.275	-	-	-	-	79.094		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%									82,96%	276,54%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	159	28.553	11	-	-	-	28.723		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	159	33.737	726	-	-	-	34.622		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%									166,84%	166,84%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	1.035	52.116	358	-	-	-	53.509		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	1.035	30.614	424	-	-	-	32.073		
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%									150,72%	150,72%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	10.273	-	-	-	-	10.273		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	6.816	-	-	-	-	6.816		
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%									124,52%	124,52%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	49.368	318.531	1.614	-	-	-	369.513		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	49.368	215.711	31.680	-	-	-	296.759		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%									97,24%	129,66%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	15.975	495.749	805	-	-	-	512.529		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	28.761	496.328	1.964	-	-	-	527.053		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%									92,00%	92,00%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	506	-	0	-	-	-	506		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	0	-	-	-	550		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	15,00	-	15	15	375,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									47,06%	80,42%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	15.414	-	15.414		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan asset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	DESEMBER									CAPAIAN (%)
					REALISASI									
					Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	**Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;**	100%									99,05%	99,05%
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		27.817	605.495	263.044	5.393		-	-	901.749		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		28.024	607.903	268.476	5.949		-	-	910.352		
		b.	**Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;**	4%									1,16%	28,92%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	746	-	-	-	-	-	746		
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	64.483	-	-	-	-	-	64483		
		c.	**Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)**	50%									68,47%	136,93%
		1.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	220.154	601.712	3.096		-	-	824.962	96,98%	194%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	241.116	604.820	4.759		-	-	850.695		
		2.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	4.222	1.947	627		-	-	6796	26,91%	54%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	20.518	3.081	1.651		-	-	25250		
		3.	**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		15.105	-	-	-	-	-	-	15.105	81,51%	163%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		18.531	-	-	-	-	-	-	18.531		
		d.	**Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;**	25%									5,81%	23%
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	67	-	-	-	-	-	67		
			Jumlah perkara pidana anak		-	1.153	-	-	-	-	-	1153		
		e.	**Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.**	80%	-	94,78%	87,41%	94,40%	-	-	80,85%	91,44%	91,44%	114%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**a.**	**Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;**	20%								65,34%	326,72%
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waku		20.554	-	-	-	-	-	20.554		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		31.455	-	-	-	-	-	31.455		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**	25%								19,07%	76,29%
			Jumlah perkara yang diseelsaikan melalui mediasi		-	1.362	19.499	-	-	-	20.861		
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	40.551	68.831	-	-	-	109.382		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**a.**	**Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;**	30%								100,00%	333,33%
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	166	36.671	13	-	-	36.850		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	166	36.671	13	-	-	36.850		
		b.	**Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;**	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	1.059	56.039	371	-	-	57.469		
			Jumlah perkara yang diajukan disesaikan di luar gedung pengadilan		-	1.059	56.039	371	-	-	57.469		
		c.	**Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;**	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	11.543	-	-	-	11.543		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	11.543	-	-	-	11.543		
		d.	**Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**	100%								100,00%	100,00%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	53.122	346.229	1.790	-	-	401.141		
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	53.122	346.229	1.790	-	-	401.141		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**a.**	**Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).**	75%								97,23%	129,64%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	17.427	532.534	1.230	-	-	551.191		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	31.375	533.145	2.381	-	-	566.901		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	**a.**	**Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)**	100%								100,09%	100,09%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	566	25.820	448	-	-	-	26.834		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	25.820	440	-	-	-	26.810		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	**a.**	**Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan**	4	-	-	-	-	-	17,00	-	17	17	425,00%
		b.	**Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat**	59%									57,71%	98,61%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	18.900	-	18.900		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	**a.**	**Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti**	85%									100,00%	117,65%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.144	-	-	4.144		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	4.144	-	-	4.144		
		b.	**Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi**	85%									83,30%	98,00%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	3.452	-	-	3.452		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.144	-	-	4.144		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	**a.**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima**	85									72,66%	85,48%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	670,67	671		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	923	923		
		b.	**Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)**	100									100,00%	1,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	19965	19.965		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	19965	19.965		

6. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

Mahkamah Agung menerima penghargaan juara 1 katagori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Satker lebih dari 100 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.



Merdeka.com memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung untuk katagori Program Inovatif untuk Negeri yang diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H oleh Bapak Wenseslaus Manggut selaku Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse.





Kementerian Pendagayunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddun, SH., MH sebagai Pembina pelayanan publik katagori Pelayanan Prima tahun 2021, penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri (PANRB) Tjahjo Kumolo diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.Sunarto, SH., MH pada hari Selasa, 8/3/2022 bertempat diBollroom Intercontinental Pondok Indah.



Mahkamah Agung menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2021. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., hadir mewakili Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan tersebut pada Kamis, 22 September 2022 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuagan Sri Mulyani



Mahkamah Agung Republik Indonesia meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) pusat pada Rabu, 14 Desember 2022 di Ballroom Atria Hotel, Serpong, Banten. Kategori anugerah yang diterima Mahkamah Agung adalah Informatif dengan nilai 97,13. Anugerah tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H.